



PEMERINTAH KABUPATEN  
MUARA ENIM

# LAPORAN KETERANGAN **PERTANGGUNGJAWABAN** BUPATI MUARA ENIM 2 0 2 4



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyampaian LKPJ Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini disusun berdasarkan pedoman yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023.

Sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas, LKPJ Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat. Tahun 2024 ini juga menandai tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Muara Enim 2018-2023.

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD/BUMS, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Muara Enim. Dukungan ini telah memungkinkan pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan lancar.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar untuk perbaikan serta penyempurnaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim di masa yang akan datang, dan dapat mendorong tercapainya perubahan yang lebih baik bagi Kabupaten Muara Enim.

Sekian dan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Muara Enim,           Maret 2025  
BUPATI MUARA ENIM

**H. EDISON. SH., M.Hum.**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. DASAR HUKUM.....	I-1
1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH .....	I-2
1.2.1. VISI DAN MISI .....	I-4
1.2.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH .....	I-7
1.3. DATA UMUM DAERAH.....	I-12
1.3.1. KONDISI GEOGRAFIS WILAYAH.....	I-12
1.3.2. KONDISI DEMOGRAFIS .....	I-13
1.3.3. KONDISI EKONOMI.....	I-16
1.3.4. JUMLAH PENDUDUK .....	I-24
1.3.5. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) .....	I-25
1.3.6. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN .....	I-29
1.3.7. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA.....	I-30
1.3.8. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN.....	I-31
<b>BAB II : PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....</b>	<b>II-1</b>
2.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH .....	II-3
2.1.1. REALISASI PENDAPATAN DAERAH.....	II-6
2.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH .....	II-10
2.2.1. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	II-10
2.2.2. REALISASI BELANJA DAERAH .....	II-14
2.3. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN.....	II-19
2.4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	II-21
<b>BAB III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH</b>	
<b>3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>III-1</b>
3.1.1. PELAKSANAAN URUSAN WAJIB.....	III-2
3.1.2. PELAKSANAAN URUSAN TIDAK WAJIB .....	III-132
3.1.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN .....	III-283
3.1.4. FUNGSI PENUNJANG .....	III-432
3.1.5. URUSAN KECAMATAN .....	III-523
<b>3.2. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
1. URUSAN PENDIDIKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.....	III-669
2. URUSAN KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN DAN RSUD H. M. RABAIN .....	III-691
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG .....	III-725
4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN.....	III-756
5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DINAS	



PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH .....	III-766
5. URUSAN SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL.....	III-820
<b>3.3. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	
1. URUSAN TENAGA KERJA OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.....	III-828
2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.....	III-835
3. URUSAN PANGAN OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN.....	III-844
4. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP .....	III-862
5. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL....	III-882
6. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA .....	III-895
7. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA .....	III-905
8. URUSAN PERHUBUNGAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN.....	III-918
9. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	III-934
10. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH OLEH IDINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.....	III-946
11. URUSAN PENANAMAN MODAL OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU .....	III-951
12. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA OLEH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.....	III-962
13. URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.....	III-973
<b>3.4. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	
1. URUSAN PERIKANAN OLEH DINAS PERIKANAN .....	III-983
2. URUSAN PARIWISATA OLEH DINAS PARIWISATA .....	III-993
3. URUSAN PERTANIAN OLEH DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN, DAN DINAS PERKEBUNAN .....	III-1004
4. URUSAN PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN ESDM OLEH DINAS PERDAGANGAN .....	III-1068
<b>3.5. FUNGSI PENUNJANG</b>	
1. SEKRETARIAT DAERAH .....	III-1077
2. SEKRETARIAT DPRD .....	III-1089
3. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.....	III-1095
4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	III-1105
5. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.	III-1114
6. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM .....	III-1125
7. INSPEKTORAT .....	III-1135
8. BADAN PENDAPATAN DAERAH .....	III-1143
9. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH .....	III-1151



### 3.6. KECAMATAN

1. KECAMATAN SEMENDE ULU (SDU).....	III-1158
2. KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH (SDT).....	III-1166
KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT.....	III-1172
3. KECAMATAN TANJUNG AGUNG.....	III-1179
4. KECAMATAN LAWANG KIDUL.....	III-1186
5. KECAMATAN MUARA ENIM.....	III-1192
6. KECAMATAN UJAN MAS.....	III-1199
7. KECAMATAN BENAKAT.....	III-1207
8. KECAMATAN GUNUNG MEGANG.....	III-1218
9. KECAMATAN RAMBANG.....	III-1225
10. KECAMATAN RAMBANG NIRU.....	III-1233
11. KECAMATAN LUBAI.....	III-1238
12. KECAMATAN LEMBAK.....	III-1246
13. KECAMATAN KELAKAR.....	III-1253
14. KECAMATAN GELUMBANG.....	III-1259
15. KECAMATAN MUARA BELIDA.....	III-1267
16. KECAMATAN BELIMBING.....	III-1276
17. KECAMATAN BELIDA DARAT.....	III-1286
18. KECAMATAN LUBAI ULU.....	III-1292
19. KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU.....	III-1298
20. KECAMATAN PANANG ENIM.....	III-1306
21. KECAMATAN SUNGAI ROTAN.....	III-1317
3.7. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN.....	III-1325
3.8. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.....	III-1328

## BAB IV : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. DANA BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.....	IV-1
4.1.1. DASAR HUKUM.....	IV-1
4.1.2. JUMLAH ANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN.....	IV-1
4.1.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	IV-3
4.2. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	IV-3
4.2.1. KERJASAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD).....	IV-4
4.2.2. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK).....	IV-6
4.2.3. DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (SINERGI).....	IV-11
4.2.4. PEMBINAAN BATAS WILAYAH.....	IV-20
4.2.5. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	IV-28
4.2.6. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS.....	IV-50
4.2.7. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.....	IV-53

## BAB V : PENUTUP..... V-1

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

REKAPITULASI REALISASI APBD KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2023  
(UNAUDITED)  
REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT PERANGKAT DAERAH



**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**BAB II**

PERUBAHAN PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

**BAB III**

HASIL  
PENYELENGGARAAN  
URUSAN PEMERINTAH  
YANG MENJADI  
KEWENANGAN DAERAH

**BAB IV**

CAPAIAN KINERJA  
PELAKSANAAN TUGAS  
PEMBANTUAN DAN  
PENUGASAN

**BAB V**

**PENUTUP**

**LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan wujud demokrasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memberikan hak, pelimpahan kewenangan, dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, otonomi daerah diharapkan dapat mendorong daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, kondisi daerah, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Selain memberikan hak dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kepentingan sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 154 Ayat (1) mengamanatkan kepada kepala daerah untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tersebut mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tersebut disampaikan kepada DPRD setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Muara Enim berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Muara Enim Tahun 2024 kepada DPRD Kabupaten Muara Enim dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim dalam kurun waktu 2024-2026, dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim seiring dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023, hal ini juga berarti berakhirnya visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023.



Berdasarkan uraian di atas dan untuk menentukan tujuan serta sasaran pembangunan daerah dalam RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 mempedomani Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025.

### 1.1 Dasar Hukum

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim Tahun 2024, disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6573).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2000);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2010);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2018; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun



- 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Seri E Tahun 2008);
23. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
  24. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  26. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  27. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen LKPJ Bupati Muara Enim Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024 (Unaudited), dengan menggunakan RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 sebagai tolak ukur.
2. Membangun pemahaman bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang pengelolaan APBD selama tahun anggaran 2024 sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja tahun anggaran berikutnya.
3. Memperoleh masukan dan umpan balik dari DPRD dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada berbagai bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan ke masyarakat.

## 1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai uraian di atas untuk menentukan tujuan serta sasaran pembangunan daerah dalam RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 mempedomani Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025. Ada pun jabaran mengenai Visi dan Misi tersebut ialah:

**Tabel 1.1 Visi, Misi, dan Tujuan RPJPD Tahun 2005-2025  
Kabupaten Muara Enim**

RPJPD 2005-2025	
Visi RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025, yaitu "Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri, dan Sejahtera"	
Misi	Sasaran
Visi Sehat diwujudkan melalui Misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani	Sasaran Sehat adalah sebagai berikut: 1. Terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani
Misi	Sasaran
2. Mewujudkan masyarakat yang sehat rohani	2. Terwujudnya masyarakat yang sehat rohani



<b>RPJPD 2005-2025</b>	
<b>Visi RPJPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025, yaitu "Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri, dan Sejahtera"</b>	
<b>Misi</b>	<b>Sasaran</b>
<p>Visi Mandiri diwujudkan melalui Misi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal</li> <li>2. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas</li> <li>3. Mewujudkan lembaga pemerintahan yang baik</li> <li>4. Mewujudkan perekonomian yang mempunyai daya saing tinggi</li> </ol>	<p>Sasaran Mandiri adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis sumber daya lokal (pertanian dan pertambangan) secara berkelanjutan</li> <li>2. Terwujudnya pengembangan industri pengolahan yang berbasis pertanian</li> <li>3. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan pembangunan</li> <li>4. Terwujudnya struktur perekonomian yang semakin proporsional</li> <li>5. Terwujudnya pembangunan sesuai dengan RTRW</li> <li>6. Terwujudnya kerjasama antar lembaga, daerah, dan antara negara.</li> <li>7. Terwujudnya SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK</li> <li>8. Terwujudnya dana pembangunan dari sumber penerimaan lokal (Peningkatan PADS)</li> <li>9. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan memadai</li> <li>10. Terwujudnya akuntabilitas pelayanan publik</li> <li>11. Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya tata kelola pemerintahan yang baik</li> <li>12. Terwujudnya kepastian hukum</li> <li>13. Terwujudnya kehidupan yang lebih demokratis</li> </ol>
<p>Visi Sejahtera diwujudkan melalui Misi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan masyarakat yang dapat memenuhi hak-hak dasar</li> <li>2. Mewujudkan masyarakat yang semakin dapat mengaktualisasikan diri</li> </ol>	<p>Sasaran Sejahtera adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan papan) yang layak</li> <li>2. Terwujudnya masyarakat yang sehat</li> <li>3. Terwujudnya masyarakat yang berpendidikan</li> <li>4. Terwujudnya masyarakat yang mempunyai pekerjaan yang layak</li> <li>5. Terwujudnya masyarakat yang mempunyai lingkungan yang bersih</li> <li>6. Terwujudnya masyarakat yang sadar berpolitik</li> <li>7. Terwujudnya masyarakat yang taat menjalankan syariat agama</li> <li>8. Terwujudnya keamanan dalam masyarakat</li> <li>9. Terwujudnya masyarakat yang semakin dapat mengaktualisasikan diri</li> </ol>

Sumber: Dokumen RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

Sementara tujuan dan sasaran Kepala Daerah sesuai dengan RPD Muara Enim 2024-2026 ialah sebagai berikut:



**Tabel 1.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target			
				2022	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani masyarakat		Penilaian Capaian Kabupaten Sehat	n/a	Padapa (71-80)	Padapa (71-80)	Wiwerda (81-90)	
		1.1	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	0.6	0.6	0.7	0.8
		1.2	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Indeks Kota Toleran	4.98	5.08	5.18	5.28
		1.3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Lingkungan Hidup	61.70	61.80	61.90	70.00
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi		Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	5.46	5.54	5.62	5.70	
		2.1	Meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal	Pertumbuhan ekonomi	8,39	6.60	7.01	7.44
		2.2	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0,320	0,319	0,318	0,317
3	Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	69.43	69.79	70.15	70.51	
		3.1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Usia Harapan Hidup	69.38	69.63	69.88	70.05
		3.2	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	11.99	12.00	12.01	12.02
				Rata-Rata Lama Sekolah	7.9	7.98	8.06	9.00
		3.3	Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	11,304	11,450	11,597	11,744
4	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	B	
		4.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	B	B
		4.2	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	2.91	3.00	3.10	3.20



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target		
				2022	2024	2025	2026
		4.3 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB
		4.4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kualitas Pelayanan Publik	3.90	4.22	4.54	4.86
5	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat		Persentase Penduduk Miskin	11.12	10.71	10.29	9.88
		5.1 Meningkatkan penanganan PPKS	Persentase penurunan peserta PPKS	85,55	81.73	78.69	75.76
		5.2 Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.12	4.00	3.88	3.76
		5.3 Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	85.00	87.00	90.00	92.00
		5.4 Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.03	1.02	1.01	1.00
		5.5 Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat	Persentase Rumah Layak Huni	91.88	93.88	95.88	97.88
6	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah		Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG)	89.67	89.76	89.85	89.93
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71.65	74.52	77.39	80.25
		6.1 Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IPG	0.09	0.09	0.09	0.09
		6.2 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IDG	2.87	2.87	2.87	2.87
7	Meningkatnya pemenuhan hak anak		Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	Utama
		7.1 Meningkatkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Persentase Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	3.25	6.10	10.20	12.20

Sumber: Dokumen RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026

### 1.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang



Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038. Strategi RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 1.3 Tujuan, Sasaran, dan Strategi RPD  
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026**

No.	Tujuan/Sasaran	Strategi
1.	Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani masyarakat	
	1.1 Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan peran serta masyarakat dalam kepesertaan JKN Peningkatan lingkungan sehat Peningkatan akses jamban sehat masyarakat Peningkatan pelayanan persalinan bagi ibu melahirkan di fasilitas kesehatan Peningkatan akses sarana air bersih masyarakat
	1.2 Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Peningkatan keamanan dan ketertiban Masyarakat Peningkatan kenyamanan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah Peningkatan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah
	1.3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas air, udara, dan lahan Peningkatan ketaatan terhadap RTRW Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan
2.	Meningkatnya pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal	
	2.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Pendapatan Masyarakat Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Peningkatan iklim usaha mikro kecil Peningkatan kualitas layanan perizinan Peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Peningkatan perekonomian sektor unggulan
	2.2 Meningkatkan Pemerataan Pendapatan masyarakat	Peningkatan pemberdayaan ekonomi Desa Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antar daerah sesuai dengan RTRW Peningkatan produktivitas sektor pertanian
3.	Meningkatnya derajat kualitas sumber daya manusia	
	3.1 Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	a) Peningkatan Pengelolaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit b) Peningkatan status kesehatan ibu
	3.2 Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	a) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan



No.	Tujuan/Sasaran		Strategi
			b) Peningkatan akses layanan pendidikan c) Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga pendidik
	3.3	Meningkatkan daya beli masyarakat	a) Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja b) Peningkatan perlindungan sosial tenaga kerja
4.	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan		
	4.1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	a) Peningkatan akuntabilitas keuangan daerah b) Peningkatan Pengawasan aparatur
	4.2	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	a) Peningkatan kualitas layanan internet intra pemerintah b) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik
	4.3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	a) Peningkatan maturitas SPIP b) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur
	4.4	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	a) Peningkatan Kemandirian RSUD b) Peningkatan kepuasan masyarakat c) Peningkatan pelestarian budaya daerah d) Peningkatan Inovasi Daerah e) Peningkatan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan
5.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat		
	5.1	Meningkatkan penanganan PPKS	a) Peningkatan Perlindungan, Rehabilitasi, dan Pemberdayaan PPKS b) Peningkatan Kemandirian PPKS
	5.2	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	a) Peningkatan kualitas tenaga kerja b) Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan yang Kondusif Dalam Hubungan Industrial
	5.3	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	a) Peningkatan ketersediaan pangan b) Peningkatan cadangan pangan c) Peningkatan konsumsi pangan d) Peningkatan pangan yang aman untuk dikonsumsi
	5.4	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk	a) Peningkatan kepesertaan KB pada pasangan usia subur b) Penurunan angka kelahiran
	5.5	Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat	a) Peningkatan kualitas permukiman masyarakat b) Peningkatan kualitas Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Permukiman
6.	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah		



No.	Tujuan/Sasaran	Strategi
6.1	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	a) Peningkatan angka harapan hidup perempuan b) Peningkatan kualitas pendidikan perempuan c) Peningkatan akses peluang usaha bagi perempuan
6.2	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	a) Peningkatan peran perempuan dalam parlemen b) Peningkatan tenaga profesional perempuan c) Peningkatan sumbangan pendapatan perempuan
7.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	
7.1	Meningkatkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	a) Peningkatan peran serta kader dan relawan peduli anak dan perempuan b) Peningkatan kapasitas SDM Penanganan Perempuan dan Anak

Sumber: Dokumen RPD Kabupaten Muara Enim 2024-2026

Berdasarkan hasil perumusan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Muara Enim periode tahun 2024-2026, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Arah Kebijakan RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026**

ARAH KEBIJAKAN		
1. Mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kinerja UMK/IKM dan pemberdayaan masyarakat.	1. Meningkatkan ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat, guna mendukung pengurangan angka kemiskinan.	1. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Mempercepat penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.	2. Meningkatkan pemerataan layanan infrastruktur dasar, guna mendukung konektivitas antar wilayah dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.	2. Meningkatkan layanan infrastruktur dan konektivitas antar daerah, guna meningkatkan pemerataan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya guna peningkatan kualitas pelayanan publik.	3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing daerah.	3. Meningkatkan nilai tambah sektor unggulan dan daya saing daerah.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia,		4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.



ARAH KEBIJAKAN		
<p>khususnya bagi Aparatur Sipil Negara untuk mendukung kinerja Reformasi Birokrasi.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.</p> <p>6. Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi sektor pertanian.</p> <p>7. Mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang kondusif.</p>	<p>4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas pelayan publik dan reformasi birokrasi.</p>	<p>6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna mendukung penurunan angka kemiskinan.</p>

Sumber: Dokumen RPD Kabupaten Muara Enim 2024-2026

Sedangkan tema pembangunan Kabupaten Muara Enim periode 2024-2026, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1.5 Tema Pembangunan RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026**

2024. STABILITAS EKONOMI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DASAR	
<p>Diarahkan untuk peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daerah</p>	<p><b>PRIORITAS PEMBANGUNAN:</b></p> <p>a) Mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat;</p> <p>b) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar lainnya;</p> <p>c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan</p> <p>d) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.</p>
2025. MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	
<p>Diarahkan untuk penguatan ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di bidang ketahanan pangan dan pertanian, serta pemerataan layanan infrastruktur dasar.</p>	<p><b>PRIORITAS PEMBANGUNAN:</b></p> <p>a) Meningkatkan ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat;</p> <p>b) Meningkatkan pemerataan layanan infrastruktur dasar;</p> <p>c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan</p> <p>d) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.</p>
2026. PEMANTAPAN EKONOMI LOKAL MELALUI PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH	
<p>Diarahkan untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah dan peningkatan konektivitas</p>	<p><b>PRIORITAS PEMBANGUNAN:</b></p> <p>a) Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi;</p> <p>b) Meningkatkan layanan infrastruktur dan konektivitas antar daerah;</p>



antar wilayah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.	<p>c) Meningkatkan nilai tambah sektor unggulan dan daya saing daerah;</p> <p>d) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;</p> <p>e) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.</p>
--	---

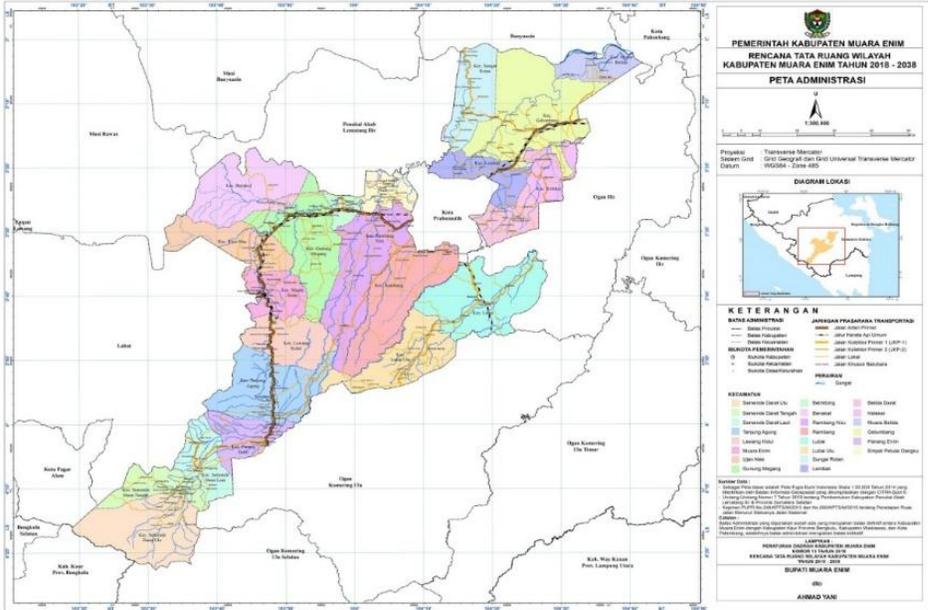
Sumber: Dokumen RPD Kabupaten Muara Enim 2024-2026

**1.3 Data Umum Daerah**  
**1.3.1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Muara Enim saat ini merupakan 1 (satu) kabupaten dari 17 (tujuh belas) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, secara geografis terletak antara 103°18'57" - 104°40'37", Bujur Timur dan 3°3'40" - 4°22'39", Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Muara Enim sekitar 7.383,90 km<sup>2</sup> terletak di tengah-tengah wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Prabumulih.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kota Prabumulih.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih.

**Gambar 1.1**  
**Peta Administrasi Kabupaten Muara Enim**



Sumber : RTRW Kabupaten Muara Enim, 2018-2038

Kabupaten Muara Enim secara administratif terdiri atas 22 kecamatan, 246 desa definitif dan 10 kelurahan, dengan ibu kota kabupaten terletak di Kecamatan Muara Enim. Dari 22 kecamatan tersebut, ada 3 kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Gelumbang seluas 724,05 km<sup>2</sup> atau sebesar 9,81%,



Kecamatan Rambang Niru seluas 535,82 km<sup>2</sup> atau 7,26% dan Kecamatan Tanjung Agung seluas 517,10 km<sup>2</sup> atau 7,00%.

Berdasarkan topografi, wilayah Kabupaten Muara Enim sebagian besar kecamatan berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan dengan cakupan luas mencapai 3.733,25 km<sup>2</sup> atau 50,6% dari luas Kabupaten Muara Enim. Sebelas Kecamatan lainnya berada pada ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl). Lebih rinci, tinggi rata-rata, luas daerah dan jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Muara Enim, sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 1.3 Tinggi Rata-Rata, Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Muara Enim**

No.	Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dpl (m)	Luas Daerah (km <sup>2</sup> )	Persentase thd Luas Kab.(%)	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Semende Darat Ulu	900 - 2.800	488,18	6,61	10
2	Semende Darat Tengah	600 - 1.200	192,64	2,61	12
3	Semende Darat Laut	500 - 1.400	269,14	3,64	10
4	Tanjung Agung	0 - 1.000	517,10	7,00	14
5	Lawang Kidul	0 - 1.200	287,26	3,89	7
6	Muara Enim	0 - 200	191,50	2,59	16
7	Ujan Mas	0 - 200	311,33	4,22	9
8	Benakat	<100	453,75	6,15	6
9	Gunung Megang	<100	471,36	6,38	13
10	Rambang Niru	0 - 200	535,82	7,26	16
11	Lubai	<100	531,46	7,20	10
12	Rambang	0 - 200	496,85	6,73	13
13	Lembak	<100	205,72	2,79	10
14	Kelekar	<100	158,60	2,15	7
15	Gelumbang	<100	724,05	9,81	23
16	Sungai Rotan	<100	344,14	4,66	19
17	Muara Belida	<100	204,67	2,77	8
18	Belimbing	<100	130,61	1,77	10
19	Belida Darat	<100	370,54	5,02	10
20	Lubai Ulu	0 -200	162,88	2,21	11
21	Empat Petulai Dangku	<100	138,35	1,87	10
22	Panang Enim	100 - 1.100	197,95	2,68	12
<b>Total</b>			<b>7.383,90</b>	<b>100</b>	<b>256</b>

Sumber : RPJMD Kabupaten Muara Enim 2018-2023

### 1.3.2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 ialah 645,250 jiwa. Jika dilihat dari kelompok umur, penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) mencapai 443,536 jiwa atau 68,73% dari jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim.



Penduduk dengan usia produktif mengalami peningkatan setiap tahunnya, jika ditelaah dari tahun-tahun sebelumnya, maka terjadi peningkatan sebanyak 1,24% dari tahun 2022 ke tahun 2023, dan terjadi pula peningkatan sebanyak 1,34% dari tahun 2023 ke 2024.

Sementara, untuk penduduk usia 0-14 tahun berjumlah 161,789 jiwa atau 25,07% dari keseluruhan penduduk Muara Enim. Angka ini mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir, yang mana persentase jumlah penduduk usia tersebut di tahun 2022 ialah sebesar 27,65% kemudian turun sebanyak 1,24% menjadi 26,41% di tahun 2023.

Ada pun jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas ialah 31.631 jiwa atau 5,07% dari keseluruhan penduduk Muara Enim, angka ini juga mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, yang mana dari tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat sebanyak 0,66% dan dari tahun 2023 ke tahun 2024 meningkat sebanyak 0,45%. Ada pun jabaran mengenai jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim ialah sebagai berikut:

**Tabel 1.4 Tabel Persentase Penduduk Kabupaten Muara Enim Menurut Kelompok Umur Tahun 2022-2024**

No.	Kelompok Umur (Tahun)	2022		2023		2024	
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%
1	0 - 14	172.527	27,65	169.070	26,41	161,789	25,07
2	15 - 64	419.861	67,28	434.455	67,86	443,536	68,73
3	65 +	31.631	5,07	36.699	5,73	39,925	6,18
<b>Total</b>		<b>624.012</b>	<b>100</b>	<b>640.224</b>	<b>100</b>	<b>645,250</b>	<b>100</b>

*Sumber : Kabupaten Muara Enim Dalam Angka 2024*

Sementara itu, jika dilihat dari persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha/sector ekonomi, di tahun 2024 jumlah penduduk di Kabupaten Muara Enim yang bekerja ialah sebanyak 50.000 jiwa. Sebanyak 31,678% penduduk Kabupaten Muara Enim bekerja pada sektor primer (sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan). Penduduk yang bekerja di sektor sekunder seperti di bagian manufaktur dan konstruksi sebesar 16,126%, sedangkan penduduk yang bekerja di sektor tersier seperti di bidang jasa, keuangan, dan transportasi ialah sebesar 52,196%. Ada pun jabaran mengenai persentase penduduk Kabupaten Muara Enim yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.5. berikut:

**Tabel 1.5 Persentase Penduduk Kabupaten Muara Enim yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023-2024**

No.	Lapangan Usaha	2023		2024	
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%
1	Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	4.024	8,79	3.925	7,85
2	Pertambangan dan Penggalian	9.841	21,50	11.914	23,828



3	Industri Pengolahan	4.143	9,05	3.637	7,274
4	Listrik, Gas, dan Air	1.187	2,59	1.117	2,234
5	Bangunan	2.260	4,94	3.309	6,618
6	Perdagangan Besar	2.931	6,40	3.452	6,904
7	Angkutan, Perdagangan, dan komunikasi	1.787	3,90	1.928	3,856
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan	17.759	38,79	20.718	41,436
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	1.846	4,03	....	
Total		45.778	100	50.000	100

Sumber : Kabupaten Muara Enim Dalam Angka 2025

Selain itu, komposisi penduduk jika dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan berdasarkan data terakhir tahun 2024, sebanyak 37,28% penduduk di Kabupaten Muara Enim belum/tidak bersekolah, angka ini naik sebesar 0,73% dari tahun sebelumnya yang mana di tahun 2023 penduduk Muara Enim yang belum/tidak bersekolah hanya 36,55%. Persentase terbesar selanjutnya ialah sebanyak 19,74% penduduk di Muara Enim telah menamatkan SD/Sederajat, angka ini turun dari tahun sebelumnya sebanyak 0,54% yang mana di tahun sebelumnya penduduk Muara Enim yang telah menamatkan SD/Sederajat ialah sebesar 20,28%. Angka tertinggi ketiga dari segi pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Muara Enim ialah sebanyak 17,55% penduduk Muara Enim telah menamatkan pendidikan SLTA/ sederajat, angka ini naik sebesar 0,16% dari angka sebelumnya yang mana di tahun 2023 penduduk Muara Enim yang telah menamatkan SLTA/Sederajat ialah sebesar 17,39%. Ada pun detail jabaran mengenai data tersebut ialah sebagai berikut:

**Tabel 1.6 Data Pendidikan Penduduk Muara Enim Tahun 2022-2024**

No	Pendidikan	Tahun 2023				Tahun 2024			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	119.757	114.252	234.009	36,55	124.892	118.813	243.705	37,28
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	35.055	33.518	68.573	10,71	34.675	32.765	67.440	10,32
3	Tamat SD/Sederajat	62.815	67.035	129.850	20,28	62.465	66.561	129.026	19,74
4	SLTP/Sederajat	35.373	32.794	68.167	10,65	35.611	33.283	68.894	10,54
5	SLTA/Sederajat	61.896	49.408	111.304	17,39	63.733	51.020	114.753	17,55
6	Diploma I/II	1.221	1.900	3.121	0,49	1.175	1.854	3.029	0,46



No	Pendidikan	Tahun 2023				Tahun 2024			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	2.339	4.502	6.841	1,07	2.422	4.722	7.144	1,09
8	Diploma IV/Strata I	7.678	9.959	17.637	2,75	8.167	10.770	18.937	2,90
9	Strata II	363	320	683	0,11	398	367	765	0,12
10	Strata III	22	17	39	0,01	22	16	38	0,01
<b>Total</b>		<b>326.519</b>	<b>313.705</b>	<b>640.224</b>	<b>100,00</b>	<b>333.560</b>	<b>320.171</b>	<b>653.731</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

### 1.3.3. Kondisi Ekonomi

#### a. Potensi Unggulan Daerah

Secara umum potensi unggulan daerah Kabupaten Muara Enim lebih didominasi sektor primer yaitu sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan), kehutanan, pertambangan, dan energi.

#### Potensi Perkebunan

Sektor Perkebunan merupakan sektor unggulan Kabupaten Muara Enim yang masih perlu ditingkatkan untuk mendorong percepatan pembangunan. Selain berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi, sektor perkebunan juga berkontribusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Muara Enim dengan membuka lapangan kerja baru.

Komoditas perkebunan yang menjadi produk unggulan di Kabupaten Muara Enim ialah komoditas karet, sawit, dan kopi. Dari ketiga komoditas unggulan tersebut, komoditas karet memiliki lahan terluas dibandingkan komoditas kopi dan sawit. Luas lahan karet pada tahun 2024 seluas 154.795,75 Ha.

Penyerapan tenaga kerja di sektor perkebunan, salah satunya dapat dilihat dari jumlah petani perkebunan rakyat. Jumlah Petani yang terbanyak terdapat pada sektor perkebunan karet dengan jumlah petani pada tahun 2024 sebanyak 79.664 KK, sedangkan pada perkebunan kopi dan sawit sebanyak 15.532 KK dan 12.484 KK.

Berdasarkan data produksi komoditas karet, sawit, dan kopi terlihat bahwa pada tahun 2022 hingga tahun 2024 produksi, sawit, dan kopi cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan produktivitas sektor perkebunan tidak terlepas dari pelaksanaan program di bidang perkebunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait.

**Tabel 1.7 Produktivitas Sektor Perkebunan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2022-2024**

URAIAN	TAHUN		
	2022	2023	2024
Luas Tanaman (Rakyat, Negara, dan Swasta)			
Karet (Ha)	154.795,75	154.795,75	154.795,75
Kopi (Ha)	23.725,50	23.725,50	23.725,50
Sawit (Ha)	79.584,20	79.584,20	79.584,20
Jumlah Produksi (Rakyat, Negara, dan Swasta)			
Karet (Ton)	857.802,77	857.986,67	859.721,08
Kopi (Ton)	27.958,81	29.314,00	29.505,95
Sawit (Ton)	1.630.038,17	1.630.288,17	1.630.749,80
Jumlah Petani Perkebunan Rakyat			
Karet (KK)	79.664,00	79.664,00	79.664,00
Kopi (KK)	15.532,00	15.532,00	15.532,00
Sawit (KK)	12.484,00	12.484,00	12.484,00

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim, Tahun 2024

### Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pembangunan di sektor tanaman pangan dan hortikultura diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim yang masih berfokus kepada sektor primer. Peningkatan dan percepatan potensi unggulan di bidang tanaman pangan dan hortikultura diharapkan dapat mendorong pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Adapun komoditas yang dominan dikembangkan di Kabupaten Muara Enim adalah padi (padi sawah, ladang, dan lebak) dengan daerah produksi antara lain di dataran tinggi Semende, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Sungai Rotan dan beberapa Kecamatan di pesisir Sungai Lematang.

Pada tahun 2024 luas lahan padi di Kabupaten Muara Enim adalah 39.618 Ha, dengan produksi sekitar 203.557,28 Ton GKP. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, luas lahan padi tahun ini lebih kecil 74 Ha. Namun, hasil panen padi tahun ini cenderung mengalami peningkatan sebesar 1,76%.

Komoditas lainnya selain padi juga mengalami peningkatan jumlah produksi. Komoditas produksi sayuran tahun 2024 mencapai 12.975 Ton, jumlah ini meningkat sebanyak 9,13% dari tahun sebelumnya. Kemudian, produksi komoditas buah-buahan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun 2023, jumlah produksi komoditas buah ialah 12.397,5 Ton dan pada tahun 2024 jumlah ini mencapai 13.075 Ton. Artinya, produksi komoditas buah-buahan mengalami peningkatan sebanyak 5,46% dari tahun sebelumnya.



**Tabel 1.8 Potensi dan Produksi Pertanian di Kabupaten Muara Enim Tahun 2021-2024**

No.	Potensi Pertanian	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Luas Lahan Padi	39.368 Ha	39.692 Ha	39.692 Ha	39.618 Ha
2.	Produksi Padi	194.125,02 Ton GKP	197.070,78 Ton GKP	200.022,34 Ton GKP	203.557,28 Ton GKP
3.	Produksi Komoditas Sayuran (Kentang, Cabai, Tomat)	10.421,34 Ton	11.222,40 Ton	11.889,00 Ton	12.975 Ton
4.	Produksi Komoditas Buah-Buahan (Alpukat, Duku, Durian, Sawo)	11.201,21 Ton	11.804,70 Ton	12.397,5 Ton	13.075 Ton

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim, Tahun 2024

### Potensi Kehutanan

Selain potensi perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura, sektor kehutanan yang ada di Kabupaten Muara Enim merupakan potensi yang dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Luas areal hutan di Kabupaten Muara Enim saat ini ialah sebesar 254.296 Ha. Kawasan hutan yang terluas adalah Hutan Produksi Tetap dengan luas 152.638 Ha. Rincian luas kawasan hutan di Kabupaten Muara Enim dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 1.9 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Muara Enim**

URAIAN	LUAS KAWASAN HUTAN (Ha)
Hutan Tetap	
1) Suaka Alam dan Pelestarian Alam	8.700
2) Hutan Lindung	57.736
3) Hutan Produksi Terbatas	26.606
4) Hutan Produksi Tetap	152.638
5) Hutan Produksi Dapat Dikonversi	8.616
<b>JUMLAH</b>	<b>254.296</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan, Tahun 2024



## Potensi Peternakan

Potensi peternakan di Kabupaten Muara Enim terdiri dari jenis ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing, domba, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam kampung, dan itik). Secara umum produksi daging ternak dan unggas mengalami di Muara Enim selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun, persentase peningkatan produksi tertinggi terjadi pada produksi ayam ras pedaging yang mana pada tahun 2024 jumlah produksinya mencapai 7.002,233 Ton, artinya jumlah produksi ini naik sebesar 248,06 Ton dari tahun sebelumnya. Ada pun jabaran mengenai hal ini ialah sebagai berikut:

**Tabel 1.10 Produksi Daging Ternak dan Unggas di Kabupaten Muara Enim Tahun 2022-2024 (Ton)**

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Sapi	1.108,26	1.125,31	1129,36
2.	Kerbau	294,00	305,05	315,15
3.	Kambing	55,70	66,75	73,24
4.	Domba	15,41	20,46	30,36
5.	Ayam Kampung	2.171,45	2.240,79	2.295,37
6.	Ayam Ras Petelur	190,21	259,55	266,47
7.	Ayam Ras Pedaging	6.684,93	6.754,27	7.002,33
8.	Itik	198,68	268,02	270,23

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim, Tahun 2024

## Potensi Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Muara Enim cukup besar, baik usaha perikanan di perairan umum maupun budidaya ikan di kolam dan keramba. Pada sektor perikanan darat, produksi perikanan darat sedikit mengalami peningkatan, produksi ikan darat tangkap pada tahun 2023 sebesar 3.456,94 ton dan pada tahun 2024 sebesar 3.484,31 ton. Sedangkan pada sektor perikanan budidaya, jumlah produksi pada tahun 2023 sebesar 8.545,77 ton dan meningkat menjadi 9.245,41 ton pada tahun 2024.

**Tabel 1.11 Produksi Perikanan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2022-2024 (Ton)**

No	Uraian	Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Perikanan Darat Tangkap	3.399,55	3.456,94	3.484,31
2.	Perikanan Budidaya	8.268,72	8.545,77	9.245,41

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim, Tahun 2024

## Potensi Pertambangan dan Energi

Potensi di bidang pertambangan dan energi yang begitu besar di Kabupaten Muara Enim, menjadikan sektor pertambangan dan energi memegang peran yang strategis dalam pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Jika dilihat dari persentase perkembangan peranan kategori pertambangan dan penggalan masih memegang



peran dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Muara Enim, meskipun peranan sektor tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Selain bahan tambang minyak bumi, gas bumi dan batubara, sektor galian golongan C juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim. beberapa jenis bahan galian seperti batu pecah, pasir pasangan, batu kali, batu koral, pasir sungai, dan kerikil sungai merupakan komoditas yang dihasilkan dari bahan galian golongan C dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

**Tabel 1.12 Jumlah Produksi Bahan Galian Golongan C Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2022-2024**

NO.	JENIS BAHAN	SATUAN UNIT	PRODUKSI		
			2022	2023	2024
1.	Batu Kali	m <sup>3</sup>	17.527,69	25.263,422	30.878,758
2.	Batu Koral (Kerikil Sungai)	m <sup>3</sup>	7.788,581	27.589,03	1.590,29
3.	Kerikil Sungai dan Pasir (Krokos)	m <sup>3</sup>	550,62	510,44	34.683,708
4.	Batu Pecah Crusher I Uk. (6-20)	m <sup>3</sup>	55.635,96	32.828,67	-
5.	Batu Pecah Crusher I Uk. (2-6)	m <sup>3</sup>	19.451,5	15.085,15	-
6.	Batu Pecah Crusher I Uk. (0-2)	m <sup>3</sup>	18.237,32	15.447,39	-
7.	Batu Pecah Crusher II Uk. (0-1)	m <sup>3</sup>	71.968,11	58.106,07	-
8.	Batu Pecah Crusher II Uk. (2-3)	m <sup>3</sup>	147.106,603	82.559,36	-
9.	Batu Pecah Crusher II Uk. (3-5)	m <sup>3</sup>	24.000,06	11.715,79	-
10.	Batu Pecah Crusher II Uk. (5-7)	m <sup>3</sup>	18.882,08	966,58	-
11.	Batu Pecah Crusher II Uk. (7-20)	m <sup>3</sup>	40.049,99	35.555,85	951,54
12.	Andesit	m <sup>3</sup>	-	396.002,161	816.129,495
13.	Batu Pecah Non Crusher	m <sup>3</sup>	43.175,57	43.409,45	-
14.	Pasir Urug	m <sup>3</sup>	16.609,667	35.953,647	48.795,074



NO.	JENIS BAHAN	SATUAN UNIT	PRODUKSI		
			2022	2023	2024
15.	Pasir Pasangan	m <sup>3</sup>	381.411,632	469.169,108	541.881,301
16.	Sirtu (Tidak Diayak)	m <sup>3</sup>	262,81	41,22	1.878,894
17.	Bahan Timbunan Pilihan/Tanah	m <sup>3</sup>	53.828	15.320,62	32.555,96
18.	Tanah Liat	m <sup>3</sup>	65.440,24	70.241,996	75.302,473
19.	Bolder +	m <sup>3</sup>	9.120	12.286,52	-
20.	Bolder -	m <sup>3</sup>	-	24.884	-

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

#### a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Muara Enim secara umum masih menunjukkan ciri struktur primer atau struktur ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Sampai tahun 2024 perekonomian Kabupaten Muara Enim masih mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor pertanian, dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ada pun jabaran mengenai hal yang berkaitan dengan PDRB ialah sebagai berikut:

**Tabel 1.13 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muara Enim Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023-2024 (Rp. Juta)**

No	Lapangan Usaha	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.783,17	4.850,19	7.307,54	4.995,57
2	Pertambangan dan Penggalian	85.841,76	33.516,98	81.223,87	35.775,78
3	Industri Pengolahan	10.473,74	5.715,61	11.421,40	5.805,94
4	Pengadaan Listrik dan Gas	117,53	66,17	124,38	69,88
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,69	10,09	18,38	10,36
6	Konstruksi	3.643,69	2.134,14	3.858,33	2.239,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.281,73	2.609,07	6.855,77	2.831,03
8	Transportasi dan Pergudangan	1.198,73	539,11	1.334,81	583,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	418,14	214,94	460,68	230,05
10	Informasi dan Komunikasi	536,93	384,96	579,14	413,22



No	Lapangan Usaha	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	358,84	239,92	383,14	253,31
12	Real Estate	779,72	435,84	857,02	474,69
13	Jasa Perusahaan	11,04	6,23	12,31	6,58
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	776,89	637,56	842,05	684,39
15	Jasa Pendidikan	799,49	577,22	913,17	624,56
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	294,19	180,18	333,86	191,62
17	Jasa Lainnya	184,25	110,04	198,56	115,03
	Produk Domestik Regional Bruto	118.517,51	52.228,24	116.724,41	55.304,93

Sumber : Kabupaten Muara Enim Dalam Angka 2025

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Muara Enim ialah berasal dari sektor pertambangan yang mana 35.775,78 merupakan harga konstan PDRB pada sektor pertambangan dan 81.223,87 merupakan harga baku dari PDRB tersebut. Ada pun jabaran mengenai distribusi persentase dari masing-masing PDRB tersebut menurut lapangan usaha di Muara Enim akan dijabarkan sebagaimana Tabel 1.14 berikut:

**Tabel 1.14 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Muara Enim (persen), 2023-2024**

No	Lapangan Usaha	Tahun	
		2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,72	6,26
2	Pertambangan dan Penggalian	72,43	69,59
3	Industri Pengolahan	8,84	9,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,02
6	Konstruksi	3,07	3,31
7	Perdagangan Besar dan Eceran	5,3	5,87
8	Transportasi dan Pergudangan	1,01	1,14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,35	0,39
10	Informasi dan Komunikasi	0,45	0,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,3	0,33
12	Real Estat	0,66	0,73
13	Jasa Perusahaan	0,01	0,01



No	Lapangan Usaha	Tahun	
		2023	2024
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,66	0,72
15	Jasa Pendidikan	0,67	0,78
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,25	0,29
17	Jasa Lainnya	0,16	0,17
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100

Sumber : Kabupaten Muara Enim Dalam Angka 2025

Dari data di atas terlihat bahwa sektor pertambangan menyumbang sebesar 69,59% PDRB di Kabupaten Muara Enim, angka ini turun sebanyak 2,84% dari tahun sebelumnya yang mana di tahun 2023 sektor pertambangan menjadi penyumbang PDRB terbesar di Muara Enim dengan persentase yang mencapai 72,43%. Sektor penyumbang PDRB terbesar lainnya ialah sektor industri pengolahan sebanyak 9,78% di tahun 2024 dan 8,84% di tahun 2023 artinya sektor ini mengalami kenaikan sebanyak 0,93% dari tahun sebelumnya. Sektor penyumbang PDRB terbesar berikutnya ialah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan persentase sebesar 6,26, angka ini juga mengalami kenaikan sebesar 0,54% dari tahun sebelumnya, yang mana di tahun 2023 sektor ini hanya menyumbang 5,72 PDRB di Muara Enim.

Perekonomian Kabupaten Muara Enim tahun 2024 tumbuh dengan laju 5,89%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka laju pertumbuhan PDRB ini mengalami penurunan sebanyak 2,69%. Sektor yang mengalami penurunan tertinggi ialah sektor pertambangan dan penggalian yang mana laju pertumbuhan PDRB di tahun ini hanya 6,74% artinya angka ini turun sebanyak 5,29% dari tahun 2023. Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada sektor real estate yang mencapai 8,91% di tahun 2024, sementara di tahun 2023 laju PDRB di sektor ini hanya mencapai 3,19%, artinya angka ini naik sebesar 5,72%, laju pertumbuhan PDRB terbesar lainnya terjadi pula di sektor jasa pendidikan yang naik sebesar 6,06% dari tahun sebelumnya, ada pun jabaran mengenai hal tersebut akan dijabarkan pada berikut:

**Tabel 1.15 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Muara Enim (persen), 2020–2024**

No	Lapangan Usaha	Tahun	
		2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,92	3
2	Pertambangan dan Penggalian	12,03	6,74
3	Industri Pengolahan	3,01	3,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,16	5,61
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,75	2,71
6	Konstruksi	1,48	4,95



No	Lapangan Usaha	Tahun	
		2023	2024
7	Perdagangan Besar dan Eceran	4,97	4,89
8	Transportasi dan Pergudangan	7,98	8,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,19	7,03
10	Informasi dan Komunikasi	3,16	7,34
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,05	5,58
12	Real Estate	3,19	8,91
13	Jasa Perusahaan	4,23	5,7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,82	7,35
15	Jasa Pendidikan	2,14	8,2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,02	6,35
17	Jasa Lainnya	2,15	4,53
	<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>8,58</b>	<b>5,89</b>

Sumber : Kabupaten Muara Enim Dalam Angka 2025

#### b. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi sebesar 645,250 ribu jiwa dari jumlah penduduk sebesar 635,939 ribu jiwa pada tahun 2023.

**Tabel 1.17 Jumlah Penduduk Kabupaten Muara Enim Menurut Kecamatan (Ribu Jiwa) Tahun 2020-2024**

No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Semende Darat Laut	14,74	14,89	15,08	15,255	15,473
2.	Semende Darat Ulu	16,80	16,86	16,95	17,790	18,346
3.	Semende Darat Tengah	10,97	11,08	11,20	11,357	11,478
4.	Tanjung Agung	29,02	29,41	29,86	29,684	30,097
5.	Panang Enim	13,37	13,40	13,45	13,308	13,367
6.	Rambang	28,05	28,04	28,08	28,577	28,882
7.	Lubai	25,81	25,93	26,10	27,387	27,764
8.	Lubai Ulu	32,80	33,14	33,55	34,166	34,640
9.	Lawang Kidul	72,12	72,92	73,85	75,618	76,736
10.	Muara Enim	73,55	74,64	75,90	78,415	80,782
11.	Ujan Mas	26,75	27,06	27,42	26,809	27,145
12.	Gunung Megang	35,31	35,48	35,72	35,827	36,062
13.	Benakat	9,64	9,71	9,79	10,490	10,648
14.	Belimbing	25,55	25,69	25,87	26,674	26,970
15.	Rambang Niru	33,56	33,67	33,84	34,92	35,282
16.	Empat Petulai Dangku	19,98	20,06	20,17	20,559	20,547
17.	Gelumbang	61,32	61,95	62,71	63,046	64,082
18.	Lembak	19,70	19,76	19,86	19,883	19,957



No.	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
19.	Sungai Rotan	31,93	32,04	32,22	32,991	33,412
20.	Muara Belida	7,94	7,95	7,98	8,180	8,345
21.	Kelekar	11,02	11,16	11,33	11,581	11,715
22.	Belida Darat	12,99	13,03	13,09	13,414	13,556
<b>Total</b>		<b>612,90</b>	<b>617,85</b>	<b>624,02</b>	<b>635,939</b>	<b>645,250</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2025

**c. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Jumlah pegawai ASN di Kabupaten Muara Enim terdiri dari 5.689 PNS dan 3061 PPPK. Ada pun pendistribusian jumlah pegawai tersebut akan dijabarkan melalui tabel berikut:

**Tabel 1.18 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

NO	DINAS	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
<b>I</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		8	89	19	116
<b>II</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN</b>	1	7	21	3	32
<b>III</b>	<b>DINAS - DINAS</b>					
	1 DINAS PERKEBUNAN + UPT		1	26	13	40
	2 DINAS PERDAGANGAN + UPT		6	24	3	33
	3 DINAS KESEHATAN + UPT + PUSKESMAS		127	802	39	968
	4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN + UPT + SKB + GURU	3	97	1748	889	2747
	5 DINAS PERHUBUNGAN + UPT		2	26	4	32
	6 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		2	22	6	30
	7 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		4	26	3	33
	8 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA + UPT		3	22	5	30
	9 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN + UPT		6	11	5	22
	10 DINAS PERIKANAN + UPT			20	4	24
	11 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN + UPT		3	69	38	110
	12 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		3	22	6	31
	13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP + UPT	1	20	23	8	52
	14 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		3	22	3	28



NO	DINAS	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		2	15	10	27
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG + UPT		5	46	4	55
17	DINAS SOSIAL + UPT		4	9	3	16
18	DINAS KETENAGAKERJAAN + UPT		5	29	4	38
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		3	30	5	38
20	DINAS KETAHANAN PANGAN		3	12	8	23
21	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		9	28	4	41
22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		1	15	3	19
23	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		1	21	6	28
24	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		2	13	6	21
<b>IV</b>	<b>BADAN-BADAN</b>					
1	INSPEKTORAT		1	43	25	69
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1	27	6	34
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		12	28	6	46
4	BADAN PENDAPATAN DAERAH + UPT		19	47	7	73
5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		1	12	6	19
6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA + UPT		6	29	4	39
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		2	16	5	23
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		3	15	1	19
<b>V</b>	<b>KANTOR-KANTOR</b>					
1	RSUD DR.H.M.RABAIN	1	42	278	56	380
2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		1	20	3	24
<b>VI</b>	<b>KECAMATAN (22 KECAMATAN)</b>	1	70	179	35	285
<b>VII</b>	<b>KELURAHAN (10 KELURAHAN)</b>	1	6	36	1	44
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>491</b>	<b>3921</b>	<b>1269</b>	<b>5689</b>

Sumber: BKPSDM Muara Enim, 2025



Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah PNS di Kabupaten Muara Enim, paling banyak berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPT, SKB, dan Guru yang jumlahnya mencapai 2.747 orang. Selain itu, jumlah PNS terbesar lainnya berasal dari instansi Dinas Kesehatan, UPT, dan Puskesmas sebanyak 968 orang dan kemudian sebanyak 380 orang berasal dari RSUD Dr. M.H. Rabain. Sementara itu, jumlah PNS paling sedikit berasal dari Dinas Sosial dan UPT yang hanya berjumlah sebanyak 16 orang. Selain itu, ASN PPPK yang ada di Kabupaten Muara Enim tahun 2024 juga akan dijabarkan melalui tabel berikut:

**Tabel 1.19 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)  
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

NO	DINAS	GOLONGAN					JUMLAH
		V	VII	IX	X	XI	
I	SEKRETARIAT DAERAH			8			8
II	SEKRETARIAT DEWAN		1	3			4
III	DINAS - DINAS						
	1 DINAS PERKEBUNAN + UPT	1	1	7			9
	2 DINAS PERDAGANGAN + UPT			3			3
	3 DINAS KESEHATAN + UPT + PUSKESMAS		224	37	46	1	308
	4 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN + UPT + SKB + GURU		4	2459			2463
	5 DINAS PERHUBUNGAN + UPT	7					7
	6 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			3			3
	7 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2	3			5
	8 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA + UPT	2	1	1			4
	9 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN + UPT	39					39
	10 DINAS PERIKANAN + UPT			2			2
	11 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN + UPT	14	3	20			37
	12 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		2	2			4
	13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP + UPT			3			3
	14 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			4			4
	15 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	16 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG + UPT			4			4



NO	DINAS	GOLONGAN					JUMLAH
		V	VII	IX	X	XI	
	17 DINAS SOSIAL + UPT			3			3
	18 DINAS KETENAGAKERJAAN + UPT			3			3
	19 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		1	2			3
	20 DINAS KETAHANAN PANGAN			3			3
	21 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		1	2			3
	22 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			1			1
	23 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			1			1
	24 DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			3			3
<b>IV</b>	<b>BADAN-BADAN</b>						
	1 INSPEKTORAT						
	2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			2			2
	3 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
	4 BADAN PENDAPATAN DAERAH + UPT			1			1
	5 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			2			2
	6 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA + UPT		1	3			4
	7 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			1			1
	8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			3			3
<b>V</b>	<b>KANTOR-KANTOR</b>						
	1 RSUD DR.H.M.RABAIN		49	3	21		73
	2 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
<b>VI</b>	<b>KECAMATAN (22 KECAMATAN)</b>	10		38			48
<b>VII</b>	<b>KELURAHAN (10 KELURAHAN)</b>						
<b>JUMLAH</b>		<b>73</b>	<b>290</b>	<b>2630</b>	<b>67</b>	<b>1</b>	<b>3061</b>

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa, ASN PPPK paling banyak juga berasal dari instansi yang sama dengan ASN PNS yang mana ASN PPPK paling banyak masih berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SKB, UPT, dan Guru,



kemudian disusul dengan Dinas Kesehatan, UPT, dan Puskesmas, serta RSUD. M.H. Rabain.

**d. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan**

Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024 berdasarkan laporan keuangan Unaudited, ditargetkan sebesar Rp.3.697.697.501.915,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.912.789.972.473,16 atau 105,82%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim mengalami peningkatan sebesar Rp.840.666.618.395,23 atau 21,48%. Pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.2.882.409.372.759,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.072.123.354.077,93 atau 106,58% (Audited). Adapun komponen-komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024 terdiri dari :

**Tabel 1.19 Rincian Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2024 (Unaudited) dan Tahun 2023 (Audited)**

No.	Jenis Pendapatan	2024 (Unaudited)			2023 (Audited)		
		Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan		Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	306.635.850.767,00	380.979.531.113,52	124,24	298.669.489.952,00	354.647.927.876,93	118,74
2.	Pendapatan Transfer	3.377.588.613.451,00	3.524.646.144.599,22	104,35	2.574.846.034.523,00	2.704.324.918.994,00	105,03
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.473.037.697,00	7.164.296.760,42	53,18	8.893.848.284,00	13.150.507.207,00	147,86
<b>Total Pendapatan</b>		<b>3.697.697.501.915,00</b>	<b>3.912.789.972.473,16</b>	<b>105,82</b>	<b>2.882.409.372.759,00</b>	<b>3.072.123.354.077,93</b>	<b>106,58</b>

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Muara Enim 2024

**e. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja**

Pada tahun 2024 berdasarkan laporan keuangan Unaudited, alokasi belanja daerah sebesar Rp.4.351.719.271.996,21 dan terealisasi sebesar Rp.3.917.575.110.242,96 atau 90,02%. Sedangkan pada tahun 2023, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp.3.745.457.978.249,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.336.289.056.357,12 atau 89,08% (Audited). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, maka realisasi belanja daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp.581.286.053.885,84 atau 14,83%. Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer yang secara rinci sebagai berikut:



**Tabel 1.20 Rincian Komponen Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Menurut Jenis Belanja Tahun 2024 (Audited) dan Tahun 2023 (Audited)**

No.	Jenis Belanja Daerah	2024 (Unaudited)			2023 (Audited)		
		Target Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah		Target Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.	Belanja Operasi	2.549.011.276.706,21	2.236.644.864.872,58	87,75	2.124.505.487.815,00	1.891.605.435.158,08	89,04
2.	Belanja Modal	1.281.008.118.240,00	1.173.510.368.320,38	91,61	1.187.242.345.752,00	1.018.994.610.340,04	85,83
3.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	720.000.000,00	4,80	9.705.760.000,00	1.964.524.977,00	20,24
4.	Transfer	506.699.877.050,00	506.699.877.050,00	100,00	424.004.384.682,00	423.724.485.882,00	99,93
<b>Total Belanja Daerah</b>		<b>4.351.719.271.996,21</b>	<b>3.917.575.110.242,96</b>	<b>90,02</b>	<b>3.745.457.978.249,00</b>	<b>3.336.289.056.357,12</b>	<b>89,08</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim) Tahun 2024

**f. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan**

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali (tertentu), baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah yang dianggarkan merupakan seluruh transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

**1. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan yang dianggarkan tahun 2024 ialah sebesar **Rp.660.300.286.213,21** dan terealisasi sebesar **Rp.660.300.286.213,21** atau **100% (Unaudited)**. Sedangkan tahun 2023, pembiayaan yang dianggarkan ialah **Rp.919.327.121.622,00** dan terealisasi sebanyak **Rp.879.327.121.622,40** atau **95,65% (Audited)**.

**2. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Muara Enim dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, dan pembayaran pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk Pengeluaran Pembiayaan sebesar **Rp.6.278.516.132,00** dan terealisasi sebesar **Rp.6.278.516.130,00** atau **100% (Unaudited)**. Sedangkan pada tahun 2023, pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar **Rp.56.278.516.132,00** dan terealisasi sebesar **Rp.54.861.133.130,00** atau **97,48% (Audited)**.

**3. Pembiayaan Netto**

Pada tahun 2024, Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar **654.021.770.081,21** dengan realisasi sebesar **654.021.770.083,21** atau **100 persen (Unaudited)**. Rincian target dan realisasi pembiayaan tahun



2024 berdasarkan jenis pembiayaan, dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.21 Rincian Komponen Pembiayaan Kabupaten Muara Enim Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2024 (Unaudited) dan Tahun 2023 (Audited)**

No	Jenis Pembiayaan	2024 (Unaudited)			2023 (Audited)		
		Target Pembiayaan Rp.	Realisasi Pembiayaan		Target Pembiayaan Rp.	Realisasi Pembiayaan	
			Rp.	%		Rp.	%
1.	Penerimaan Pembiayaan	660.300.286.213,21	660.300.286.213,21	100,00	919.327.121.622,00	879.327.121.622,40	95,65
2.	Pengeluaran Pembiayaan	6.278.516.132,00	6.278.516.123,00	100,00	56.278.516.132,00	54.861.133.130,00	97,48
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>654.021.770.081,21</b>	<b>654.021.770.081,21</b>	<b>100,00</b>	<b>863.048.605.490,00</b>	<b>824.465.988.492,40</b>	<b>95,53</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		<b>649.236.632.313,41</b>			<b>560.300.286.213,21</b>		

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

BAB III

HASIL

PENYELENGGARAAN

URUSAN PEMERINTAH

YANG MENJADI

KEWENANGAN DAERAH

BAB IV

CAPAIAN KINERJA

PELAKSANAAN TUGAS

PEMBANTUAN DAN

PENUGASAN

BAB V

PENUTUP

LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PERUBAHAN PENJABARAN**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Permendagri ini mengatur mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, yang mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Hasil dari evaluasi tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah. Setiap tahun, pemerintah daerah diwajibkan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Laporan tersebut harus memuat informasi yang lengkap dan akurat mengenai kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Dengan demikian, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang capaian dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam menyampaikan informasi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan



Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Pendapatan daerah terutama bersumber dari Dana Perimbangan dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pendapatan lainnya yang sah sebagai sumber pendanaan pembangunan.
2. Belanja daerah didasarkan pada kebutuhan yang objektif, efektif, dan efisien dengan memperhatikan hasil optimal dan prinsip anggaran berbasis kinerja.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBD.
4. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran.
5. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan penerimaan yang cukup.
6. Pengelolaan keuangan daerah wajib mempedomani azas umum yaitu :
  - a) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
  - b) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
  - c) Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
  - d) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan tugas desentralisasi, didanai dari APBD.
  - e) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah, yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan negara.
  - f) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
  - g) Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari :
    - 1) Pendapatan Daerah
    - 2) Belanja Daerah dan
    - 3) Pembiayaan Daerah.
      - a. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan.



- b. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah, yang dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.
- c. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus yang dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

## 2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi sumber pendapatan daerah melalui peningkatan dan perluasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta pendapatan sah lainnya. Hal ini melibatkan usaha untuk meningkatkan dan memperluas basis PAD serta mengoptimalkan Dana Perimbangan agar daerah mendapatkan bagian secara proporsional. Untuk mencapai hal tersebut, diambil berbagai langkah seperti peningkatan pengawasan, koordinasi, serta penyederhanaan proses administrasi pemungutan. Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari :
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari :
  - a. Transfer Pemerintah Pusat
    - 1). Dana Bagi Hasil Pajak;
    - 2). Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA);
    - 3). Dana Alokasi Umum (DAU);
    - 4). Dana Alokasi Khusus (DAK);
    - 5). Dana Insentif Daerah (DID); dan
    - 6). Dana Desa (DD).
  - b. Transfer Antar Daerah
    - 1). Bagi Hasil Pajak Provinsi; dan
    - 2). Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.
3. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain :
  - a. Pendapatan Hibah; dan
  - b. Pendapatan Lainnya.

Kebijakan pengelolaan Pendapatan Daerah dijalankan dengan mengikuti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009



tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim telah mengimplementasikan berbagai langkah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan. Langkah-langkah ini termasuk program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, retribusi daerah, serta pengelolaan BUMD. Peningkatan pendapatan daerah diupayakan dengan memaksimalkan sumber-sumber PAD, melibatkan peran aktif badan usaha dan masyarakat melalui program-program kolaboratif, serta mengajak sektor swasta dalam pembiayaan dan kegiatan pembangunan. Di samping itu, pemerintah daerah juga berusaha meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dan mengoptimalkan perolehan Dana Perimbangan yang lebih adil.

#### **a. Intensifikasi Pendapatan Daerah**

Upaya intensifikasi dilakukan melalui:

- 1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah seperti pembayaran pajak daerah secara online, pelayanan perizinan satu atap.
- 2) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah seperti merevisi kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- 3) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, baik langsung maupun melalui media massa, seperti pemasangan papan himbauan, spanduk, dan pemberian penghargaan.
- 4) Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah seperti pemasangan tapping box pada objek pajak restoran dan pajak hotel, pemasangan water meter pada objek pajak air tanah, pemasangan KWh meter pada objek pajak penerangan jalan (genset), melakukan uji petik terhadap objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah.
- 5) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait, seperti menginventarisasi dan menertibkan objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah.
- 6) Optimalisasi penagihan piutang pajak seperti penyelenggaraan Pekan Panutan PBB.
- 7) Mengikuti rapat perhitungan realisasi lifting minyak dan gas alam dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.
- 8) Mengikuti rapat rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

#### **b. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah**

Upaya ekstensifikasi dilakukan melalui:

- 1). Menerbitkan peraturan daerah tentang retribusi daerah baru yang kontra produktif terhadap perekonomian daerah.
- 2). Pengkajian jenis retribusi daerah yang tidak layak dan perlu



disempurnakan.

- 3). Melakukan rekonsiliasi data produksi batubara untuk alokasi dana bagi hasil landrent dan royalti hasil eksploitasi perusahaan tambang pemegang IUP dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan.
- 4). Melakukan rekonsiliasi data produksi minyak dan gas alam hasil eksploitasi KKKS Pertamina dengan SKK Migas dan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan.
- 5). Peningkatan peran serta badan usaha, masyarakat dan dan luar negeri untuk pembangunan Kabupaten Muara Enim.

Dalam rangka optimalisasi upaya dan langkah tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengelola beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang didasarkan kepada Peraturan Daerah sebagai berikut :

- 1) Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, terdiri dari :
  - Pajak Hotel
  - Pajak Restoran
  - Pajak Hiburan
  - Pajak Reklame
  - Pajak Penerangan Jalan
  - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - Pajak Parkir
  - Pajak Air Tanah
  - Pajak Sarang Burung Walet
  - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- 2) Retribusi Daerah, antara lain :
  - a. Retribusi Jasa Umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, adalah :
    - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
    - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
    - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
    - d. Retribusi Pelayanan Pasar
    - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
    - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
    - g. Retribusi Penyedotan Kakus
  - b. Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, adalah :
    - h. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
    - i. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
    - j. Retribusi Terminal
    - k. Retribusi Tempat Khusus Parkir
    - l. Retribusi Rumah Potong Hewan



- m. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- n. Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, adalah :
  - o. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  - p. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  - q. Retribusi Izin Trayek
- d. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010.

### 2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Pada tahun 2024, pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim mencapai **Rp.3.912.789.972.473,16** menurut laporan keuangan yang belum diaudit (*Unaudited*), melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **Rp.3.697.697.501.915,00**, dengan tingkat pencapaian sebesar **105,82 persen**. Pendapatan ini mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2023, di mana pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar **Rp.840.666.518,39** atau sekitar **27,36 persen**. Pada tahun 2023, pendapatan daerah ditargetkan sebesar **Rp.2.882.409.372.759,00** dengan realisasi sebesar **Rp.3.072.123.454.077,93**, mencapai **106,58 persen** dari target yang telah diaudit (*Audited*). Adapun komponen-komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024 terdiri dari :

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang memainkan peran penting dalam meningkatkan sumber daya finansial daerah. Pada tahun tersebut, PAD ditargetkan sebesar **Rp.306.635.850.767,00** dan terealisasi sebesar **Rp.380.979.531.113,52**, atau **124,24 persen** dari target yang ditetapkan (*Unaudited*). Jika dibandingkan dengan tahun 2023, di mana PAD ditargetkan sebesar **Rp.298.669.489.952,00** dan terealisasi sebesar **Rp.354.647.927.876,93**, atau **118,74 persen** dari target yang diaudit (*Audited*). Adapun komponen - komponen PAD tersebut adalah sebagai berikut :

##### a) Pendapatan Pajak Daerah

Pada tahun 2024, pendapatan dari pajak daerah ditargetkan sebesar **Rp.102.118.871.536,00** dan terealisasi sebesar **Rp.127.885.655.445,00**, mencapai **125,23 persen** dari target yang belum diaudit (*Unaudited*). Jika dibandingkan dengan tahun 2023, di mana target sebesar **Rp.90.635.401.852,00** dan realisasi sebesar **Rp.118.951.424.120,00** atau **131,24 persen** dari target yang telah diaudit (*Audited*), terdapat peningkatan sebesar **Rp.8.934.231.325,00** atau sekitar **7,51 persen**.



#### **b) Pendapatan Retribusi Daerah**

Pada tahun 2024, target pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah sebesar **Rp.120.847.143.074,00** dan terealisasi sebesar **Rp.113.100.457.184,39** mencapai **93,59 persen** dari target yang belum diaudit (*Unaudited*). Jika dibandingkan dengan tahun 2023, di mana target sebesar **Rp.7.722.705.076,00** dan realisasi sebesar **Rp.6.561.840.213,70** atau **84,97 persen** dari target yang diaudit (*Audited*), terdapat peningkatan sebesar **Rp.106.538.616.970,69**.

#### **c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Selain pendapatan dari pajak dan retribusi, pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim juga memperoleh pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2024, target pendapatan dari sumber ini sebesar **Rp.31.102.654.447,00** dan terealisasi sebesar **Rp.31.147.873.242,38**, mencapai **100,15 persen** dari target yang belum diaudit (*Unaudited*). Dibandingkan dengan tahun 2023, di mana target sebesar **Rp.54.804.784.963,00** dan realisasi sebesar **Rp.54.804.783.997,15** atau **100 persen** dari target yang diaudit (*Audited*).

#### **d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Pada tahun 2024, target pendapatan dari sumber lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar **Rp.52.567.181.710,00** dan terealisasi sebesar **Rp.108.845.545.241,75**, mencapai **207,06 persen** dari target yang belum diaudit (*Unaudited*). Jika dibandingkan dengan tahun 2023, di mana target sebesar **Rp.145.506.598.061,00** dan realisasi sebesar **Rp.174.329.879.546,08** atau **119,81 persen** dari target yang diaudit (*Audited*), terdapat penurunan sebesar **Rp.64.484.334.304,33**.

### **2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer Kabupaten Muara Enim bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 ditargetkan sebesar **Rp.3.377.588.613.451,00** dan terealisasi sebesar **Rp.3.524.646.144.599,22** atau **104,35 persen** (*Unaudited*). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, mengalami peningkatan sebesar **Rp.820.321.225.605,22** atau **30,34 persen**. Tahun 2023, yang ditargetkan sebesar **Rp.2.574.846.034.523,00** dan terealisasi sebesar **Rp.2.704.324.918.994,00** atau **105,03 persen** (*Unaudited*), terdapat peningkatan yang signifikan dalam pendapatan transfer

Rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut :



#### a). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pada tahun 2023 (*Audited*), target Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat ditetapkan sebesar **Rp. 2,351,327,520,200.00**. Realisasi pendapatan mencapai **Rp. 2,418,868,422,019.00**, atau **102.87 persen** dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat berhasil mengelola dan mendistribusikan dana dengan efektif sehingga target dapat terlampaui. Masuk ke tahun 2024 (*Unaudited*), target Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat mengalami peningkatan menjadi **Rp. 3,115,940,499,950.00**. Realisasi sementara menunjukkan angka sebesar **Rp. 3,198,030,938,052.00**, atau **102.6 persen** dari target. Meskipun persentase realisasi sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian ini tetap menunjukkan performa yang sangat baik dalam pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat

#### b). Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah juga menunjukkan performa yang sangat baik selama periode yang sama. Pada tahun 2023 (*Audited*), target Pendapatan Transfer Antar Daerah ditetapkan sebesar **Rp. 223,518,514,323.00**, dengan realisasi mencapai **Rp. 285,456,496,975.00**. Ini berarti **127.71 persen** dari target yang ditetapkan berhasil dicapai, menandakan adanya kerjasama yang efektif antar daerah dalam pendistribusian dana. Di tahun 2024 (*Unaudited*), target Pendapatan Transfer Antar Daerah meningkat menjadi **Rp. 261,648,113,501.00**. Realisasi sementara menunjukkan angka sebesar **Rp. 326,615,206,547.22**, atau **124.83 persen** dari target. Walaupun persentase realisasi sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, pencapaian ini tetap luar biasa dan menunjukkan bahwa kerjasama antar daerah terus berlangsung dengan baik.

### 3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah diperoleh dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan lainnya. Pada tahun 2023 (*Audited*), Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah ditargetkan sebesar **Rp.8.893.848.284,00** dan terealisasi sebesar **Rp.13.150.507.207,00** atau **147,86 persen**. Sedangkan pada tahun 2024 (*Unaudited*), ditargetkan sebesar **Rp.13.473.037.697,00** dan terealisasi sebesar **Rp.7.164.296.760,42** atau **53,18 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa Lain-Lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp.5.986.210.446,58**. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari :

#### a). Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada tahun 2023 (*Audited*) ditargetkan sebesar **Rp.3.894.136.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp.1.006.407.510,00** atau **25,84 persen**. Sedangkan pada tahun 2024 (*Unaudited*), Pendapatan



Hibah ditargetkan sebesar **Rp.1.325.000.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp.727.192.879,00** atau **54,88 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Hibah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp.597.807.121,00**.

**b). Pendapatan Lainnya**

Pada tahun 2023 (*Audited*), Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Lainnya ditargetkan sebesar **Rp.4.999.712.284,00** dan terealisasi sebesar **Rp.12.144.099.697,00** atau **242,90 persen**. Sedangkan pada tahun 2024 (*Unaudited*), realisasi pendapatan lainnya ditargetkan sebesar **Rp.12.148.037.697,00** dan terealisasi sebesar **Rp.6.437.103.881,42** atau **52,99 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Lainnya tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp.5.710.993.815,58**.

Secara ringkas Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Muara Enim tahun 2023 (*Audited*) dan 2024 (*Unaudited*) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Muara Enim**  
**Tahun 2023 (*Audited*) - 2024 (*Unaudited*)**

KO DE	URAIAN	2023 (AUDITED)			2024 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
<b>4. PENDAPATAN</b>							
<b>4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>							
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	90.635.401.852,00	118.951.424.120,00	131,24	102.118.871.536,00	126.743.710.193,00	124,11
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.722.705.076,00	6.561.840.213,70	84,97	120.847.143.074,00	100.805.908.431,31	83,42
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	54.804.784.963,00	54.804.783.997,15	100	31.102.654.447,00	31.147.873.242,38	100,15
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	145.506.598.061,00	174.329.879.546,08	119,81	52.567.181.710,00	105.453.200.113,69	200,61
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>298.669.489.952,00</b>	<b>354.647.927.876,93</b>	<b>118,74</b>	<b>306.635.850.767,00</b>	<b>380.979.531.113,52</b>	<b>124,24</b>
<b>4.2. PENDAPATAN TRANSFER</b>							
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.351.327.520.200,00	2.418.868.422.019,00	102,87	3.115.940.499.950,00	3.198.030.938.052,00	102,63
4.2.2	Transfer Antar Daerah	223.518.514.323,00	285.456.496.975,00	127,71	261.648.113.501,00	326.615.206.547,22	124,83



KO DE	URAIAN	2023 (AUDITED)			2024 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
PENDAPATAN TRANSFER		2.574.846.034.523,00	2.704.324.918.994,00	105,03	3.377.588.613.451,00	3.524.646.144.599,22	104,35
<b>4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>							
4.3.1	Pendapatan Hibah	3.894.136.000,00	1.006.407.510,00	25,84	1.325.000.000,00	327.192.879,00	24,69
4.3.2	Pendapatan lainnya	4.999.712.284,00	12.144.099.697,00	242,90	12.148.037.697,00	8.363.579.403,75	68,85
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>		<b>8.893.848.284,00</b>	<b>13.150.507.207,00</b>	<b>147,86</b>	<b>13.473.037.697,00</b>	<b>7.164.296.760,42</b>	<b>53,18</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.882.409.372.759,00</b>	<b>3.072.123.354.077,93</b>	<b>106,58</b>	<b>3.697.697.501.915,00</b>	<b>3.912.789.972.473,16</b>	<b>105,82</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2024

## 2.2. Pengelolaan Belanja Daerah

### 2.2.1. Kebijakan Belanja Daerah

Pada tahun 2021, pengelolaan belanja daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan sistematis bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja daerah diklasifikasi menjadi empat kategori utama, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Masing-masing kategori ini memiliki peran dan fungsinya sendiri dalam mendukung berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah :

- a. Belanja Operasi mencakup pengeluaran rutin yang diperlukan untuk menjalankan operasional pemerintahan sehari-hari, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Kategori ini sangat penting karena memastikan bahwa semua aspek operasional pemerintahan dapat berjalan lancar dan tanpa hambatan.
- b. Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk investasi jangka panjang dalam pembangunan aset tetap, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Pengeluaran ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan



- mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
- c. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi situasi darurat atau kejadian tak terduga yang memerlukan tindakan cepat dan tepat. Anggaran ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya.
  - d. Belanja Transfer adalah pengeluaran yang dilakukan untuk mentransfer dana dari pemerintah daerah kepada pihak lain, seperti transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan. Kategori ini bertujuan untuk mendistribusikan dana secara adil dan merata kepada berbagai pihak yang berhak menerimanya, sehingga dapat mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan adanya klasifikasi belanja yang jelas dan terperinci, pemerintah daerah dapat merencanakan dan mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang ada. Hal ini juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengukur kinerja dan keberhasilan program serta kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan guna mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Belanja Daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kebijakan Belanja Daerah dan Penerimaan Daerah. Kebijakan belanja daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja dengan sasaran yang tepat dan nilai manfaat yang tinggi, memprioritaskan perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan potensi daerah.

Pelaksanaan kebijakan belanja daerah juga berpedoman pada visi dan misi Kabupaten Muara Enim yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2023. Visi tersebut adalah "Muara Enim untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat, dan Sejahtera." Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan beberapa misi, antara lain meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, cerdas, dan mandiri; membina anak yatim, yatim piatu, dhuafa, serta memberikan bantuan langsung kepada keluarga miskin hingga mandiri; meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri, dan agropolitan; mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang mudah diakses dan gratis; serta meningkatkan infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata dan mendukung pembangunan Jalan Tol Muara Enim-Indralaya-Palembang.

Pengelolaan keuangan daerah adalah kunci dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Prinsip-prinsip seperti efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab harus diterapkan dalam

pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin terciptanya kondisi yang mampu menjawab berbagai tuntutan masyarakat. Hal ini mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang semakin sehat dan transparan melalui APBD.

Langkah-langkah kebijakan pengelolaan belanja daerah meliputi menyalurkan alokasi belanja dengan pendelegasian wewenang, meningkatkan alokasi anggaran pada bidang yang menjadi pusat perhatian masyarakat, mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai bahan kebijakan untuk kepentingan masyarakat (pendekatan *bottom-up*), memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja, serta mengeluarkan belanja daerah dengan prinsip hemat, efektif, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Muara Enim, setiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjelaskan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan masing-masing (urusan wajib atau urusan pilihan) sebagai berikut :

**a. Urusan Wajib :**

- 1). Urusan Wajib Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2). Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dr. H. M.Rabain.
- 3). Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4). Urusan Wajib Perumahan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- 5). Urusan Wajib Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 6). Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 7). Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- 8). Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- 9). Urusan Wajib Pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 10). Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 11). Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 12). Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 13). Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial.



- 14). Urusan Wajib Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan.
- 15). Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 16). Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 17). Urusan Wajib Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 18). Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- 19). Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 20). Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah :
  - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
  - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - Sekretariat Daerah
  - Sekretariat DPRD
  - Inspektorat Daerah Kabupaten
  - Badan Pendapatan Daerah
  - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
  - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
  - Kecamatan Semende Darat Ulu
  - Kecamatan Semende Darat Tengah
  - Kecamatan Semende Darat Laut
  - Kecamatan Tanjung Agung
  - Kecamatan Lawang Kidul
  - Kecamatan Muara Enim
  - Kecamatan Ujan Mas
  - Kecamatan Benakat
  - Kecamatan Gunung Megang.
  - Kecamatan Rambang Niru
  - Kecamatan Lubai
  - Kecamatan Rambang
  - Kecamatan Lembak
  - Kecamatan Kelekar
  - Kecamatan Gelumbang
  - Kecamatan Sungai Rotan
  - Kecamatan Muara Belida
  - Kecamatan Belimbing



- Kecamatan Belida Darat
  - Kecamatan Lubai Ulu
  - Kecamatan Empat Petulai Dangku
  - Kecamatan Panang Enim
- 21). Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
  - 22). Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - 23). Urusan Wajib Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - 24). Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
  - 25). Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, dan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
  - 26). Urusan Wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

**b. Urusan Pilihan**

- 1). Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan.
- 2). Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, dan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.
- 3). Urusan Pilihan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 4). Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan.
- 5). Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.
- 6). Urusan Pilihan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.
- 7). Urusan Pilihan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

**2.2.1. Realisasi Belanja Daerah**

Pada tahun 2023 berdasarkan laporan keuangan *Audited*, alokasi belanja daerah sebesar **Rp.3.745.457.978.249,00** dan terealisasi sebesar **Rp.3.336.289.056.357,12** atau **89,08 persen (Audited)**. Sedangkan pada tahun 2024, Belanja Daerah dianggarkan sebesar **Rp.4.351.719.271.996,21** dan terealisasi sebesar **Rp.3.917.575.110.242,96** atau **90,02 persen (Unaudited)**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, maka realisasi belanja daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar **Rp.581.286.053.885,84** atau **17,42 persen**. Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang secara rinci sebagai berikut:

**1) Belanja Operasi**

Belanja Operasi antara lain diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, yang mencakup gaji dan tunjangan, baik tunjangan akres maupun



tunjangan lainnya. Hal ini juga termasuk pembayaran gaji ketiga belas dan keempat belas, serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti uang makan, tunjangan guru yang ditempatkan di daerah terpencil, tunjangan kesejahteraan tahunan, tunjangan kinerja, dan tunjangan bagi tenaga paramedis. Selain itu, Belanja Operasi juga digunakan untuk membiayai belanja barang dan jasa, pembayaran bunga, subsidi, hibah, serta bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Pengalokasian ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan kualitas layanan publik, serta untuk mendukung berbagai program pembangunan dan bantuan sosial yang merata di seluruh wilayah. Pada tahun 2023 (*Audited*), anggaran untuk Belanja Operasi ditetapkan sebesar **Rp.2.124.505.487.815,00**. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja yang berhasil dicapai sebesar **Rp.1.891.605.435.158,08** atau setara dengan **89,04 persen** dari total anggaran yang telah diaudit. Kemudian, untuk tahun 2024 (*Unaudited*), target anggaran Belanja Operasi ditingkatkan menjadi **Rp.2.549.011.276.706,21**. Namun, realisasi yang tercatat hingga saat ini sebesar **Rp.2.236.664.864.872,58** atau mencapai **87,75 persen** dari total target, yang masih dalam tahap audit. Peningkatan alokasi anggaran ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas layanan dan program yang diberikan kepada masyarakat. Rincian target dan realisasi belanja operasi tahun 2023-2024 berdasarkan jenis belanja dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut

**Tabel 2.2**  
**Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Muara Enim**  
**Tahun 2023 (*Audited*) - 2024 (*Unaudited*)**

KODE	URAIAN	2023 (AUDITED)			2024 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
<b>5. BELANJA</b>							
<b>5.1. BELANJA OPERASI</b>							
5.1.1	Belanja Pegawai	1.018.111.989.103,00	905.296.146.233,22	88,92	1.201.350.938.398,66	1.059.547.345.085,03	88,20
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	965.982.659.367,00	854.731.463.603,86	88,48	1.143.729.958.590,55	997.240.222.419,55	87,19
5.1.3	Belanja Bunga	6.504.239.596,00	6.504.239.596,00	100	9.000.000.000,00	7.485.321.723,00	83,17
5.1.4	Subsidi	0	0	0	0	0	0
5.1.5	Hibah	131.477.699.749,00	122.738.685.725,00	93,35	191.550.579.717,00	172.371.975.645	89,99
5.1.6	Bantuan Sosial	2.428.900.000,00	2.334.900.000,00	96,13	3.379.800.000,00	0	0
<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>2.124.505.487.815,00</b>	<b>1.891.605.435.158,08</b>	<b>89,04</b>	<b>2.549.011.276.706,21</b>	<b>2.236.644.864.872,58</b>	<b>87,75</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2024



## 2) Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Muara Enim dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang mencakup pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset tetap berwujud dengan nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset-aset tersebut digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan untuk memastikan pelayanan publik yang optimal. Pengalokasian belanja modal ini mencakup berbagai jenis aset seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya. Tujuan dari alokasi belanja modal ini adalah untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, belanja modal juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, yang berfungsi untuk memperlancar arus transportasi dan distribusi barang, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah. Pengembangan fasilitas irigasi yang penting bagi sektor pertanian juga menjadi fokus, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Keseluruhan upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2023, alokasi belanja modal dianggarkan sebesar Rp.1.187.242.345.752,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.018.994.610.340,04 atau **85,83 persen (Audited)**. Sedangkan pada tahun 2024, belanja modal dialokasikan sebesar Rp.1.281.008.118.240,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.173.510.368.320,38 atau **91,61 persen (Unaudited)**. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur serta fasilitas umum yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Rincian target dan realisasi belanja modal tahun 2023-2024 berdasarkan jenis belanja dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3**  
**Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Muara Enim**  
**Tahun 2023 (Audited) - 2024 (Unaudited)**

KODE	URAIAN	2023 (AUDITED)			2024 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
<b>5.2. BELANJA MODAL</b>							
5.2.1	Belanja Modal Tanah	4.467.000.000,00	2.230.870.000,00	49,94	12.382.090.321,00	10.194.664.000,00	82,33
5.2.2	Belanja Modal	142.543.288.776,00	132.018.241.673,00	92,62	185.456.945.366,00	160.953.164.905,00	86,79



KODE	URAIAN	2023 (AUDITED)			2024 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Peralatan dan Mesin						
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.951.530.293,00	183.794.697.321,66	92,38	218.979.431.746,00	202.931.222.921,64	92,67
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	829.994.008.583,00	690.758.490.475,38	83,22	850.855.615.359,00	786.229.627.683,74	92,40
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.286.518.100,00	10.192.310.870,00	99,08	11.792.066.558,00	11.788.479.740,00	99,97
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000,00	0	0	1.541.968.890,00	1.413.209.060,00	91,65
<b>BELANJA MODAL</b>		<b>1.187.242.345.752,00</b>	<b>1.018.994.610.340,04</b>	<b>85,83</b>	<b>1.281.008.118.240,00</b>	<b>1.173.510.368.320,38</b>	<b>91,61</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2024

### 3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja yang dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dana ini sangat penting karena memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons secara cepat dan efektif terhadap situasi darurat yang mungkin timbul, seperti bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, atau kejadian tak terduga lainnya yang memerlukan tindakan segera. Selain itu, belanja tidak terduga juga dapat digunakan untuk menangani bencana sosial, seperti konflik antarwarga, yang memerlukan intervensi cepat dari pemerintah untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan adanya alokasi dana ini, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran, serta meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian tersebut.

Pada tahun 2023, belanja tidak terduga dialokasikan sebesar **Rp.9.705.760.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp.1.964.524.977,00** atau **20,24 persen (Audited)**. Sedangkan Pada tahun 2024, alokasi Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar **Rp.15.000.000.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp.720.000.000,00** atau **4,80 persen (Unaudited)**. Rincian target dan realisasi belanja tidak terduga tahun 2023-2024 berdasarkan jenis belanja, dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:



**Tabel 2.4**  
**Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Muara Enim**  
**Tahun 2023 (Audited) - 2024 (Unaudited)**

KODE	URAIAN	2021 (AUDITED)			2022 (AUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
<b>5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA</b>							
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	9.705.760.000,00	1.964.524.977,00	20,24	15.000.000.000,00	720.000.000,00	4,80
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		<b>9.705.760.000,00</b>	<b>1.964.524.977,00</b>	<b>20,24</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>720.000.000,00</b>	<b>4,80</b>

*Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2024*

#### 4) Belanja Transfer

Alokasi Transfer Kabupaten Muara Enim terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bantuan Keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik. Tujuan dari alokasi ini adalah untuk memastikan distribusi keuangan yang merata dan meningkatkan kapasitas keuangan pada setiap tingkatan pemerintahan guna mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2023, anggaran belanja transfer sebesar **Rp.424.004.384.682,00** dan terealisasi sebesar **Rp.423.724.485.882,00** atau **99,93 persen (Audited)**. Sedangkan pada tahun 2024, anggaran transfer dialokasikan sebesar **Rp.506.699.877.050,00** dan terealisasi sebesar **Rp.506.699.877.050,00** atau **100 persen (Unaudited)**

**Tabel 2.5**  
**Target dan Realisasi Transfer Kabupaten Muara Enim**  
**Tahun 2023 (Audited) - 2024 (Unaudited)**

KODE	URAIAN	2023 (AUDITED)			2024 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
<b>5.4. BELANJA TRANSFER</b>							
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	9.835.810.693,00	9.835.810.693,00	100,00	22.333.351.461,00	22.333.351.461,00	100,00
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	414.168.573.989,00	413.888.675.189,00	99,93	484.366.525.589,00	484.366.525.589,00	100,00



KODE	URAIAN	2023 (AUDITED)			2024 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
<b>5.4. BELANJA TRANSFER</b>							
	BELANJA TRANSFER	424.004.384.682,00	423.724.485.882,00	99,93	506.699.877.050,00	506.699.877.050,00	100,00
	JUMLAH BELANJA	3.745.457.978.249,00	3.336.289.056.357,12	89,08	4.351.719.271.996,21	3.917.575.110.242,96	90,02
	SURPLUS/(DEFISIT)	-863.048.605.490,00	-264.165.702.279,19	30,61	-654.021.770.081,21	-14.785.137.769,80	0,73

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2024

Dalam pengelolaan belanja daerah, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Tantangan pertama adalah belum optimalnya kapasitas sumber daya aparatur dalam mengelola dan memajemen kegiatan serta administrasi keuangan. Hal ini mengakibatkan proses pengelolaan keuangan daerah menjadi kurang efisien. Tantangan kedua adalah rendahnya tingkat profesionalisme penyedia jasa pembangunan, yang berimbas pada kualitas proyek-proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain:

- a) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang difokuskan pada pengelolaan program dan kegiatan serta administrasi keuangan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugasnya.
- b) Melakukan pembinaan terhadap penyedia jasa pembangunan, agar mereka dapat bekerja dengan lebih profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pembinaan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari teknis hingga manajerial.
- c) Melakukan pengawasan, pengendalian, dan monitoring secara ketat terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga setiap proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati. Pengawasan ini juga memastikan bahwa setiap kegiatan berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat mencapai output dan outcome yang optimal.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan belanja daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

### 2.3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah mencakup seluruh penerimaan yang wajib dikembalikan serta pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran tersebut maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah ini dianggarkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, sehingga anggaran tetap seimbang dan mampu memenuhi kebutuhan operasional serta pembangunan daerah.

Pembiayaan Daerah terbagi menjadi dua, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan meliputi beberapa sumber seperti



Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan aset daerah yang terpisah, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan, dan penerimaan piutang daerah. Sementara itu, Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) oleh pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, serta pemberian pinjaman daerah.

Dengan demikian, pembiayaan daerah memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan operasional dan program-program pembangunan di daerah, sekaligus menjaga keseimbangan keuangan daerah untuk menghadapi berbagai tantangan dan kebutuhan yang mungkin timbul di masa mendatang.

### 1. Penerimaan Pembiayaan

Pada tahun 2023, Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar **Rp.919.327.121.622,00** dan terealisasi sebesar **Rp.879.327.121.622,40** atau **95,65 persen (Audited)**. Sedangkan pada tahun 2024 dianggarkan sebesar **Rp.660.300.286.213,21** dan terealisasi sebesar **Rp.660.300.286.213,21** atau **100 persen (Unaudited)**. Penerimaan pembiayaan tersebut diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

### 2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Muara Enim dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, dan pembayaran pokok utang kepada pemberi pinjaman. Pada tahun 2023, alokasi anggaran untuk Pengeluaran Pembiayaan sebesar **Rp.56.278.516.132,00** dan terealisasi sebesar **Rp.54.861.133.130,00** atau **97,48 persen (Audited)**. Sedangkan pada tahun 2024, pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar **Rp.6.278.516.132,00** dan terealisasi sebesar **Rp.6.278.516.130,00** atau **100 persen (Unaudited)**.

### 3. Pembiayaan Netto

Pada tahun 2023, Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar **Rp.863.048.605.490,00** dengan realisasi sebesar **Rp.824.465.988.492,40** atau **95,53 persen (Audited)**. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) tahun anggaran 2023 sebesar **Rp.560.300.286.213,21 (Audited)**. Sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) tahun anggaran 2024 sebesar **Rp.649.236.632.313,41 (Unaudited)**. Pembiayaan Netto yang dianggarkan pada tahun 2024 sebesar **Rp.654.021.770.081,21** dengan realisasi sebesar **Rp.654.021.770.081,21** atau **100 persen**.

Rincian target dan realisasi pembiayaan tahun 2023-2024 berdasarkan jenis pembiayaan dapat dijelaskan sebagaimana tabel



**Tabel 2.6**  
**Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Muara Enim**  
**Tahun 2023 (Audited) - 2024 (Unaudited)**

KODE	URAIAN	2023 (AUDITED)			2024 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
<b>6. PEMBIAYAAN</b>							
6.1	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	919.327.121.622,00	879.327.121.622,40	95,65	660.300.286.213,21	660.300.286.213,21	100,00
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	879.327.121.622,00	879.327.121.622,40	100,00	560.300.286.213,21	560.300.286.213,21	100,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	0	0	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00
6.2	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	56.278.516.132,00	54.861.133.130,00	97,48	6.278.516.132,00	6.278.516.130,00	100,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	0	0	0
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	18.582.617.000,00	92,91	0	0	0
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.278.516.132,00	6.278.516.130,00	100,00	6.278.516.132,00	6.278.516.130,00	100,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		863.048.605.490,00	824.465.988.492,40	95,53	654.021.770.081,21	654.021.770.083,21	100,00
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)</b>		560.300.286.213,21			649.236.632.313,41		
<b>TOTAL APBD</b>		3.336.289.056.357,12			3.917.575.110.242,96		

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2024

#### 2.4. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan keuangan merupakan sumber informasi penting bagi Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengevaluasi akuntabilitas keuangan daerah dan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta Neraca adalah bagian integral dari laporan keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan dokumen yang menyajikan ringkasan sumber, alokasi, dan penggunaan dana yang dikelola oleh pemerintah.

LRA bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai perbandingan antara anggaran yang telah direncanakan dan realisasi pengeluarannya dalam satu periode tertentu. Laporan ini juga menyoroti efisiensi dan efektivitas



penggunaan anggaran, sehingga dapat dijadikan acuan dalam mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. LRA mencakup berbagai elemen penting, seperti pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Pendapatan daerah meliputi penerimaan dari pajak, retribusi, serta dana transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, belanja daerah mencakup pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lainnya yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

Secara ringkas Laporan Realisasi APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2023 (*Audited*) dan 2024 (*Unaudited*) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 (Audited) - 2024 (Unaudited)**

KODE	URAIAN	2023 (AUDITED)			2024 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
<b>4. PENDAPATAN</b>							
<b>4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>							
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	90.635.401.852,00	118.951.424.120,00	131,24	102.118.871.536,00	126.743.710.193,00	124,11
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.722.705.076,00	6.561.840.213,70	84,97	120.847.143.074,00	100.805.908.431,31	83,42
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	54.804.784.963,00	54.804.783.997,15	100	31.102.654.447,00	31.147.873.242,38	100,15
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	145.506.598.061,00	174.329.879.546,08	119,81	52.567.181.710,00	105.453.200.113,69	200,61
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		<b>298.669.489.952,00</b>	<b>354.647.927.876,93</b>	<b>118,74</b>	<b>306.635.850.767,00</b>	<b>380.979.531.113,52</b>	<b>124,24</b>
<b>4.2. PENDAPATAN TRANSFER</b>							
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	2.351.327.520.200,00	2.418.868.422.019,00	102,87	3.115.940.499.950,00	3.198.030.938.052,00	102,63
4.2.2	Transfer Antar Daerah	223.518.514.323,00	285.456.496.975,00	127,71	261.648.113.501,00	326.615.206.547,22	124,83
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>2.574.846.034.523,00</b>	<b>2.704.324.918.994,00</b>	<b>105,03</b>	<b>3.377.588.613.451,00</b>	<b>3.524.646.144.599,22</b>	<b>104,35</b>
<b>4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>							
4.3.1	Pendapatan Hibah	3.894.136.000,00	1.006.407.510,00	25,84	1.325.000.000,00	327.192.879,00	24,69
4.3.2	Pendapatan lainnya	4.999.712.284,00	12.144.099.697,00	242,90	12.148.037.697,00	8.363.579.403,75	68,85
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>		<b>8.893.848.284,00</b>	<b>13.150.507.207,00</b>	<b>147,86</b>	<b>13.473.037.697,00</b>	<b>7.164.296.760,42</b>	<b>53,18</b>



KODE	URAIAN	2023 (AUDITED)			2024 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.882.409.372.759,00</b>	<b>3.072.123.354.077,93</b>	<b>106,58</b>	<b>3.697.697.501.915,00</b>	<b>3.912.789.972.473,16</b>	<b>105,82</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	1.018.111.989.103,00	905.296.146.233,22	88,92	1.201.350.938.398,66	1.059.547.345.085,03	88,20
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	965.982.659.367,00	854.731.463.603,86	88,48	1.143.729.958.590,55	997.240.222.419,55	87,19
5.1.3	Belanja Bunga	6.504.239.596,00	6.504.239.596,00	100	9.000.000.000,00	7.485.321.723,00	83,17
5.1.4	Subsidi	0	0	0	0	0	0
5.1.5	Hibah	131.477.699.749,00	122.738.685.725,00	93,35	191.550.579.717,00	172.371.975.645	89,99
5.1.6	Bantuan Sosial	2.428.900.000,00	2.334.900.000,00	96,13	3.379.800.000,00	0	0
<b>BELANJA OPERASI</b>		<b>2.124.505.487.815,00</b>	<b>1.891.605.435.158,08</b>	<b>89,04</b>	<b>2.549.011.276.706,21</b>	<b>2.236.644.864.872,58</b>	<b>87,75</b>
<b>5.2. BELANJA MODAL</b>							
5.2.1	Belanja Modal Tanah	4.467.000.000,00	2.230.870.000,00	49,94	12.382.090.321,00	10.194.664.000,00	82,33
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.543.288.776,00	132.018.241.673,00	92,62	185.456.945.366,00	160.953.164.905,00	86,79
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.951.530.293,00	183.794.697.321,66	92,38	218.979.431.746,00	202.931.222.921,64	92,67
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	829.994.008.583,00	690.758.490.475,38	83,22	850.855.615.359,00	786.229.627.683,74	92,40
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.286.518.100,00	10.192.310.870,00	99,08	11.792.066.558,00	11.788.479.740,00	99,97
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000,00	0	0	1.541.968.890,00	1.413.209.060,00	91,65
<b>BELANJA MODAL</b>		<b>1.187.242.345.752,00</b>	<b>1.018.994.610.340,04</b>	<b>85,83</b>	<b>1.281.008.118.240,00</b>	<b>1.173.510.368.320,38</b>	<b>91,61</b>
<b>5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA</b>							
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	9.705.760.000,00	1.964.524.977,00	20,24	15.000.000.000,00	720.000.000,00	4,80
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>		<b>9.705.760.000,00</b>	<b>1.964.524.977,00</b>	<b>20,24</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>720.000.000,00</b>	<b>4,80</b>
<b>5.4. BELANJA TRANSFER</b>							
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	9.835.810.693,00	9.835.810.693,00	100,00	22.333.351.461,00	22.333.351.461,00	100,00
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	414.168.573.989,00	413.888.675.189,00	99,93	484.366.525.589,00	484.366.525.589,00	100,00



KODE	URAIAN	2023 (AUDITED)			2024 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
BELANJA TRANSFER		424.004.384.682,00	423.724.485.882,00	99,93	506.699.877.050,00	506.699.877.050,00	100,00
JUMLAH BELANJA		3.745.457.978.249,00	3.336.289.056.357,12	89,08	4.351.719.271.996,21	3.917.575.110.242,96	90,02
SURPLUS/(DEFISIT)		-863.048.605.490,00	-264.165.702.279,19	30,61	-654.021.770.081,21	-14.785.137.769,80	0,73
<b>6. PEMBIAYAAN</b>							
6,1	Penerimaan Pembiayaan	919.327.121.622,00	879.327.121.622,40	95,65	660.300.286.213,21	660.300.286.213,21	100,00
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	879.327.121.622,00	879.327.121.622,40	100,00	560.300.286.213,21	560.300.286.213,21	100,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	0	0	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00
6,2	Pengeluaran Pembiayaan	56.278.516.132,00	54.861.133.130,00	97,48	6.278.516.132,00	6.278.516.130,00	100,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00	0	0	0
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	18.582.617.000,00	92,91	0	0	0
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.278.516.132,00	6.278.516.130,00	100,00	6.278.516.132,00	6.278.516.130,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO		863.048.605.490,00	824.465.988.492,40	95,53	654.021.770.081,21	654.021.770.083,21	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)		560.300.286.213,21			649.236.632.313,41		
TOTAL APBD		3.336.289.056.357,12			3.917.575.110.242,96		

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

**BAB III**

**HASIL  
PENYELENGGARAAN  
URUSAN PEMERINTAH  
YANG MENJADI  
KEWENANGAN DAERAH**

BAB IV

CAPAIAN KINERJA  
PELAKSANAAN TUGAS  
PEMBANTUAN DAN  
PENUGASAN

BAB V

PENUTUP

LAMPIRAN

### **BAB III**

## **HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan urusan, kewenangan, dan tanggung jawab setiap Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menyusun kebijakan pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024 Kepada DPRD Kabupaten Muara Enim.

### **3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024, dikelompokkan ke dalam Urusan Wajib dan Pilihan. Urusan Wajib terdiri dari 22 (dua puluh dua) urusan dan Urusan Pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan yang dilaksanakan oleh 58 (lima puluh delapan) Perangkat Daerah, dengan total belanja daerah sebesar Rp. 4.351.719.271.996,21 terealisasi besar Rp. Rp.3.917.575.110.242,96 atau 90,02 persen (Unaudited), yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. Rp.2.549.011.276.706,21 dengan realisasi sebesar Rp. 2.236.664.864.872,58 atau 87,75 persen (Unaudited), Belanja Modal sebesar Rp. 1.281.008.118.240,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.173.510.368.320,38 atau 91,61 persen (Unaudited), Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 15.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 720.000.000,00 atau 4,80 persen (Unaudited) dan Biaya Transfer sebesar Rp. 506.699.877.050,00 dengan realisasi sebesar Rp. 506.699.877.050,00 atau 100 persen (Unaudited). 22 (dua puluh dua) Urusan Wajib dan 8 (delapan) Urusan Pilihan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan rincian sebagai berikut:



### 3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib

#### 3.1.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

**Tabel 3.1**  
**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**  
**yang Dilaksanakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang mudah dijangkau dan bebas biaya mewujudkan tata kelola	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	100%	97,31%	-	-	
				<b>Pengelolaan Pendidikan Dasar</b>	100%	98,37%	-	-	
				Pembangunan Ruang Guru Sekolah/Kepala Sekolah/TU	100%	99,79%	-	-	
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	100%	99,81%	-	-	
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	100%	99,85%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100%	99,91%	-	-	
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	100%	99,04%	-	-	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100%	99,72%	-	-	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	100%	99,68%	-	-	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah	100%	99,86%	-	-	
				Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	100%	99,54%	-	-	
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (SD)	100%	79,70%	-	-	
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SD)	100%	90,53%	-	-	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SD)	100%	59,59%	Standar harga yang tinggi, Hadiah yang bersifat perlombaan telah	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							direalisasikan oleh OPD lain yaitu DLH		
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SD)	100%	99,11%	tidak terlaksananya perjalanan dinas karena keterbatasan waktu		
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SD)	100%	85,91%	-	--	
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	100%	99,90%	-		
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	100%	87,39%	tidak terlaksananya perjalanan dinas karena keterbatasan waktu	-	
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100%	99,71%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100%	98,54%	-	-	
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	100%	99,05%	-	-	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	100%	99,81%	-	-	
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100%	95,26%	-	-	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100%	99,40%	-	-	
				<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	100%	96,85%	-	-	
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100%	98,52%	-	-	
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	100%	97,95%	-	-	
				Pembangunan Laboratorium Sekolah	100%	98,54%	-	-	
				Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	100%	97,48%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100%	99,85%	-	--	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100%	98,59%	-		
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	100%	99,66%	-	-	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah	100%	99,70%	-	-	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	100%	99,70%	--	--	
				Pengadaan Mebel Sekolah (SMP)	100%	99,63%			
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (SMP)	100%	78,08%	-	-	
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMP)	100%	66,60%	tidak terlaksananya perjalanan dinas karena keterbatasan waktu	-	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SMP)	100%	87,19%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP)	100%	99,86%	-	-	
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP)	100%	88,88%	-	-	
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (SMP)	100%	86,15%	-	--	
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SMP)	100%	32,18%	-	-	
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	100%	1,00%	-		
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (SMP)	100%	73,61%	-	-	
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	100%	91,73%	-	-	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100%	99,43%	-	-	
				<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	100%	93,41%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD	100%	99,86%	-	-	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	100%	98,30%	-	-	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD	100%	99,82%	-	-	
				Pengadaan Mebel PAUD	100%	86,22%	-	-	
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD (DAK 2024)	100%	99,93%	-	-	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100%	88,63%	-	-	
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	100%	93,56%	-	-	
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	100%	82,84%	-	-	
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan PAUD	100%	99,59%	-	-	
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan PAUD	100%	92,36%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100%	99,90%	-	-	
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	100%	0,10%	-	-	
				<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</b>	100%	86,71%	-	-	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah NonFormal/Kesetaraan	100%	58,25%	-	-	
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	100%	89,23%	-	-	
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	100%	33,32%	-	-	
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100%	96,39%	-	-	
							-	-	
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	100%	86,54%	-	-	
				<b>Penetapan Kurikulum Muata Lokal Pendidikan Dasar</b>	100%	95,42%	-	-	
				Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	95,42%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal</b>	100%	67,28%	-	-	
				Penyusunan Model-Model Pembelajaran Inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	100%	67,28%	pengurangan peserta bimtek dikarenakan tempat kegiatan tidak mencukupi dengan jumlah peserta yang dianggarkan	-	
							-	-	
				<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	100%	91,53%	-	-	
				<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	100%	91,53%	-	-	
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan	100%	54,52%	Pembiayaan Pendidikan Program Guru	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan			Penggerak dan Program Sekolah Penggerak yang masih sepenuhnya dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan sehingga anggaran yang ada tidak dapat direalisasikan		
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan	100%	95,68%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			-	-	
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	100%	33,66%	-	-	
				<b>Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat</b>	100%	33,66%	-	-	
				Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100%	33,66%	jumlah pengurusan perizinan tidak sesuai dengan yang dianggarkan, dikarenakan pengurusan perizinan hanya sekolah yang mengurus perizinan	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-	-	
			Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100%	96,18%	-	-	
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	84,43%	-	-	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	33,04%	adanya tenaga honorarium yang mengundurkan diri sehingga belanja honor operator pada perubahan APBD TA 2024 tidak di realisasikan	memindahkan anggaran belanja honor operator ke belanja barang dan jasa	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	81,51%	adanya tenaga honorarium yang mengundurkan diri sehingga belanja honor operator pada perubahan APBD TA 2024 tidak di realisasikan	memindahkan anggaran belanja honor operator ke belanja barang dan jasa	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	81,26%	adanya tenaga honorarium yang mengundurkan diri sehingga belanja honor operator pada perubahan APBD TA 2024 tidak di realisasikan	memindahkan anggaran belanja honor operator ke belanja barang dan jasa	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	93,74%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	96,29%	-	-	
				Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	80,53%	-	-	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	94,60%	-	-	
				<b>Administrasi Keuangan Negara</b>	100%	96,25%	-	-	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	96,25%	-	-	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	90,95%	-	-	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	85,55%	adanya tenaga honorarium yang mengundurkan diri sehingga belanja honor operator pada perubahan APBD TA 2024	memindahkan anggaran belanja honor operator ke belanja barang dan jasa	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							tidak di realisasikan		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100%	86,28%	adanya tenaga honorarium yang mengundurkan diri sehingga belanja honor operator pada perubahan APBD TA 2024 tidak di realisasikan	memindahkan anggaran belanja honor operator ke belanja barang dan jasa	
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	100%	96,24%	-	-	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	99,78%	-	-	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	91,51%	-	-	
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	89,93%	-	-	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	96,85%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	88,67%	-	-	
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	90,77%	-	-	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	61,62%	-	-	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	93,34%	-	-	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	75,87%	perbedaan standar harga dan harga pada realisasi	memindahkan anggaran belanja honor operator ke belanja barang dan jasa	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100,00%	-	-	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	77,57%	-	-	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	55,82%	Perubahan peraturan	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							makan minum rapat, yang mengharuskan hanya boleh dikeluarkan untuk rapat dengan pihak external		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	99,55%	-	-	
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	93,78%	-	-	
				Pengadaan Mebel	100%	93,78%	-	-	
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	98,06%		-	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	98,65%	-	-	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	95,00%	-	-	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	68,75%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	98,06%	-	-	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	94,79%	-	-	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	98,36%	-	-	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	75,66%	-	-	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	94,50%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100%	88.14 %			Komisi IV DPRD Kabupaten Muara Enim memberikan apresiasi atas capaian program kegiatan fisik yang sudah dilakukan di tahun 2023 oleh dinas kesehatan yang mencapai 93% terkait capaian tersebut apakah sudah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum tipe D



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>dan Puskesmas -Puskesmas di Kabupaten Muara Enim. Karena banyaknya sarana dan prasarana yang terdapat Di Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D yang belum maksimal penggunaannya karena terbatasnya Daya Tegangan Listrik yang ada Komisi IV merekomendasi kan kepada dinas terkait agar dapat</p>



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									melaksanakan kerja dengan PT. PLN untuk pengadaan TRAFO Mandiri Untuk ke 3 RSUD Kelas D dengan melakukan penganggaran pada dinas kesehatan atau diambil dari dana hibah.
				Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	65.79 %			Selanjutnya komisi IV DPRD kabupaten Muara Enim Merekomendasikan kepada PJ. Bupati untuk melakukan kordinasi ke



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Kementerian Kesehatan terkait BLUD di 3 RSUD Kelas D yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang menjadi kewenangan dinas kesehatan terkait dengan tersediannya dokter spesialis di RSUD Kelas D Komisi IV merekomendasi ka kepada PJ. Bupati agar dapat meningkatkan penganggaran Honor dan Fasilitas



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									pendukung lainnya
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Pembangunan Puskesmas Pulau Panggung, Pembangunan Ruang Operasi RSUD Gelumbang, Pembangunan Ruang Operasi RSUD Semende Darat Laut)	100%	65.83 %	Tidak terlaksana belanja DED ruang CSSD RSUD Semende Darat Laut karena pembangunannya blm akan dilaksanakan dalam waktu dekat	Akan disusun DED menjelang proses pembangunan ruang CSSD di RSUD Semende Darat Laut	
				Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	87.01 %			
				Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	50.23 %	Anggaran cetak RKA perubahan disiapkan, namun karena tidak ada permintaan	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							cetak RKA Perubahan dalam jumlah banyak maka anggaran tidak terealisasi		
				Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	100%	73.06 %	Anggaran yang tidak terealisasi adalah belanja ATK, karena masih tersedianya ATK di sub bagian Perencanaan.	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan	
				Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%	9.62 %	Anggaran cetak DPA Perubahan disiapkan, namun karena tidak ada permintaan cetak DPA	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Perubahan dalam jumlah banyak maka anggaran tidak terealisasi		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	79.59 %	Efisiensi belanja Alat Tulis Kantor	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99.7 %			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	87.9 %			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	87.9 %			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	88.19 %			
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	68.84 %			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	68.3 %	Tidak terlaksana semua rencana	Mengikuti bimtek/pelat	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							bimtek / pelatihan untuk pegawai Dinas Kesehatan	ihan secara daring	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100%	94.88 %			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	88.93 %			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	45.55 %	Tidak semua komponen listrik di Dinas Kesehatan dilakukan perbaikan	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	86.88 %			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	66.5 %	Beberapa peralatan dan perlengkapan kantor di Dinas Kesehatan	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							masih dalam kondisi baik		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	63.93 %	Terakomodir dalam perjalanan luar daerah	Telah terpenihi sesuai kebutuhan	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	91.66 %			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	94.39 %			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	97.64 %			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	99.99 %			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	93.8 %			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100%	99.51 %			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	90.39 %			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	95 %			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	37.36 %	Pengiriman surat keluar Kota Muara Enim dilakukan secara digital	Penyampaian surat menyurat melalui media elektronik	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	95.34 %			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	89.53 %			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	60.11 %	Kendaraan operasional Dinas Kesehatan dalam keadaan baik dan berkurangnya biaya pajak untuk	Kendaraan yang mengalami kerusakan sudah dilakukan perbaikan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kendaraan ambulance		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	97.92 %			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	75.28 %	Kondisi AC dan Komputer Dinas Kesehatan dalam keadaan baik.	-	
				<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	100%	93.09 %			
				<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota</b>	100%	93.72 %			
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	19.89 %	Pembangunan ruang rawat inap Rumkit Ban 02,09,01	dianggarkan pada tahun 2025	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							(Hibah uang) tidak terlaksana karena tidak cukup waktu untuk menyelesaikan administrasi dokumen hibah oleh pengusul		
				Pengembangan Puskesmas	100%	99.38 %			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	100%	99.17 %			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	95.23 %			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	100%	98.93 %			
				Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	92.11 %			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	100%	98.07 %			
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alkes/ Alat Penunjang Medik Faskes	100%	66.46 %	Beberapa inkubator tidak dapat dilakukan kalibrasi karena proses kalibrasi memerlukan waktu panjang (kurang lebih 1 hari kerja)	Akan dilakukan kalibrasi kembali ditahun 2025	
				Pengembangan Rumah Sakit	100%	97.37 %			
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan Dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	100%	96.65 %			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	100%	85.91 %			
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis	100%	98.1 %			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					
				<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	92.94 %			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	87.18 %			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	85.56 %			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	20.91 %	1. Adanya dana selisih menu BOK Kabupaten sebesar Rp. 856.961.688	Anggaran hanya di tagging berdasarkan BA RK DAK Non Fisik tahun 2024	
							2. Pelaksanaan pemeriksaan SHK pada bayi baru bisa dilaksanakan	Pembelian BMHP lebih awal untuk tahun 2025	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							(Belanja jasa paket pengiriman sampel, transport lokal petugas ke titik kumpul dan biaya pemeriksaan sampel di laboratorium rujukan) pada bulan oktober 2024 karena BMHP SHK baru tersedia pada bulan tersebut		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	81.23 %	1. Terdapat selisih antara harga satuan pada DPA dengan harga satuan belanja	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kegiatan yaitu penginapan peserta ( hotel ) Fullboard.		
							2. Pada alokasi perjalanan dinas pelacakan gizi buruk dianggarkan 16 kasus namun kasus yang ada hanya 9 kasus yang dilakukan pelacakan.	Telah dilakukan pelacakan pada semua kasus gizi buruk yang ditemukan	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	78.63 %	Pembinaan ke 12 puskesmas yang belum melakukan penjangkaran dilakukan	Pembinaan telah dilakukan ke puskesmas lokus	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							bersama dengan program lain, sehingga dapat dilakukan efisiensi BBM		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	100%	70.49 %	Selisih harga pada pengadaan BMHP	Jumlah kebutuhan BMHP telah terpenuhi	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	83.05 %			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	100%	96.35 %			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%	84.75 %			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	84.89 %			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	94.11 %			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	94.41 %			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100%	70.35 %	Terdapat Selisih harga dari pembelian susu balita, Terdapat selisih antara harga satuan pada DPA dengan harga satuan belanja kegiatan yaitu penginapan peserta ( hotel ) Fullboard.	Jumlah kebutuhan susu telah terpenuhi	
				Pengelolaan kesehatan kerja dan olahraga	100%	89.69 %			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%	98.52 %			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100%	85.4 %			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	100%	44.89 %	Lomba toga tidak terlaksana karena tidak ada regulasi untuk pemberian jasa tim juri,	pada tahun 2024, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan tidak melakukan penilaian	
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100%	65.53 %	Karena ada gangguan pada aplikasi SIPD sehingga ketersediaan anggaran tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan	Melakukan konsultasi ke BPKAD untuk perbaikan aplikasi	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100%	83.38 %			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100%	94.54 %			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%	54.49 %	1. Pengadaan Logistik Bahan Medis Habis Pakai ( BMHP) pemeriksaan Sampel SHK Baru tersedia pada bulan Oktober sehingga pelaksanaan pengambilan dan pengiriman sampel hanya efektif dilakukan pada bulan Minggu kedua Oktober s/d Desember 2024.	Melakukan pembelian BMHP lebih awal untuk tahun 2025	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2. Terdapat selisih harga satuan jasa pemeriksaan sampel pada pada DPA dengan besar tarif jasa pemeriksaan sampel di RSMH Palembang yang ada saat ini		
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100%	97.95 %			
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100%	6.58 %	1. Bahan Medis Habis Pakai ( BMHP ) SHK berupa kertas saring dan Lancet baru tersedia pada bulan	BHJP SHK dapat disediakan sesuai kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Oktober sehingga proses pemeriksaan dan pengiriman sampel SHK dapat dilaksanakan dari bulan Oktober s/d Desember 2024		
							2. Kasus KLB yang terjadi dibawah anggaran yang tentukan	semua kasuh KLB telah ditangani	
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100%	86.43 %			
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100%	85.11 %			
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%	76.69 %			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	100%	35.46 %	adanya kegiatan pelaksanaan akreditasi yang mengalami kendala teknis tidak dapat dilaksanakan yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akreditasi puskesmas 2 Puskesmas Baru (Puskesmas Empat Petulai Dangku dan Puskesmas Panang Enim)</li> <li>• Kaji Banding Peningkatan Mutu (TPCB) ke Jogjakarta (10 orang)</li> </ul>	Akan dilakukan akreditasi pada tahun 2025 setelah semua persiapan dilakukan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>selama 5 hari (Rp 119.400.000,-)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan 1 (satu) workshop tidak terlaksana dikarenakan memiliki materi yang sama dengan workshop yang dibiayai oleh DAK Non Fisik 2024.</li> <li>• Efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan</li> </ul>		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pendampingan penyusunan PPS pasca survei akreditasi melalui media komunikasi online (Whatsapp, Fb, etc)		
				Investigasi Awal Kejadian Tak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100%	30 %	Tidak terlaksana karena vaksin untuk kegiatan tersebut belum diterima dari Kemeneterian Kesehatan	akan dilaksanakan vaksinasi pada bulan Februari 2025	
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu SPGDT	100%	88.37 %			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	100%	78.76 %	Terdapat selisi harga pada pembelian BMHP Pot sputum dan reagen	Jumlah BMHP pot sputum dan reagen telah terpenuhi	
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	100%	96.06 %			
				Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100%	77.53 %	Tidak dapat dilaksanakan karena terkendala ketersediaan anggaran pada aplikasi SIPD yang mengalami gangguan	Melakukan konsultasi ke BPKAD untuk perbaikan aplikasi	
				Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	100%	85.66 %			
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak	100%	85.02 %			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>	100%	64.31 %			
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100%	64.31 %	Anggaran yang tidak terealisasi adalah belanja ATK, karena masih tersedianya ATK di sub bagian Perencanaan.	Profil dinas kesehatan teelah tersusun dengan baik	
				<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	49.75 %			
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.	100%	72.59 %	Realisasi keuangan yang tidak terealisasi karena terdapat pembelian	Tidak memasukkan belanja yang tidak sesuai dengan sub kegiatan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							perangkat yang sesuai pada sub kegiatan tersebut.		
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100%	35.66 %	1. Efisiensi kegiatan monev ke puskesmas diganti dengan koordinasi melalui group WA dan zoommeeting		
							2. Efisiensi biaya pertemuan dengan menggabungkan pertemuan berdasarkan jenis fasyankes dengan		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							sasaran yang sama.		
				<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	100%	75.87 %			
				<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	100%	78.79 %			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100%	79.39 %	1. Ada tenaga Dokter Spesialis mengundurkan diri	Melakukan upaya pendataan dokter spesialis yang dapat melakukan kontrak di RSUD kelas D	
							2. Pengurangan		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							gaji tenaga kontrak yang lulus PPPK belum optimal		
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	56.96 %	1. Terdapat selisih antara harga satuan pada DPA dengan harga satuan belanja kegiatan yaitu penginapan peserta ( hotel ) Fullboard.		
							2. Jumlah peserta tidak hadir maksimal		
							3. Pendampingan dan pembinaan ILP hanya dilaksanakan		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							di kabupaten tidak melakukan pendampingan ke puskesmas.		
				<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	57.28 %			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	57.28 %	Terdapat selisih antara harga satuan pada DPA dengan harga satuan belanja kegiatan yaitu penginapan peserta ( hotel ) Fullboard.	kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik	
				<b>PROGRAM SEDIAN FARMASI ALAT</b>	100%	67.34 %			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>					
				<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	100%	79.93 %			
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	79.93 %	Karena Apotik yang lakukan pengawasan berada dalam kota Muara Enim sehingga perjalanan dinas tidak direalisasikan	Telah dilakukan pembinaan pada semua apotik yang terdaftar	
				<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minumantertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	100%	70.5 %			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100%	70.5 %	Karena kurangnya tenaga pelaksana	menyusun perencanaan tahun 2025 dengan lebih baik	
				<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	100%	58.63 %			
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	100%	58.63 %	Dana tersedia di Triwulan 4 akhir, kapasitas laboratorium terbatas	melakukan pemeriksaan dari awal tahun sehingga dapat lebih efektif	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	100%	69.95 %			
				<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	80.58 %			
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	80.58 %			
				<b>Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100%	83.89 %			
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100%	83.89 %			
				<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya</b>	100%	53.53 %			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
				Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100%	53.53 %	Terdapat selisih antara harga satuan pada DPA dengan harga satuan belanja kegiatan yaitu penginapan peserta ( hotel ) Fullboard.	kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik	
			<b>Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	100%	69.95 %			
				<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	80.58 %			
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,	100%	80.58 %			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
				<b>Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100%	83.89 %			
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100%	83.89 %			
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	53.53 %			
				Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100%	53.53 %	Terdapat selisih antara harga satuan pada DPA dengan harga satuan belanja kegiatan yaitu penginapan peserta ( hotel ) Fullboard.	kegiatan telah dapat terlaksana dengan baik	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Urusan Wajib Kesehatan	RSUD M H RABAIN		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	85%	-	-	Terhadap rekomendasi DPRD kepada RSUD Dr. H. Mohamad Rabain, maka perencanaan penganggaran Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan melakukan rencana pembangunan gedung rawat
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	98%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	93%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	98%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	74%	sebagian tagihan dibayarkan melalui sumber dana	untuk mengatasi pembayaran tagihan listrik RSUD yang sudah harus	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							BLUD sehingga realisasi tidak mencapai targer 100% pembayaran dikarenakan keterlambatan waktu menunggu pengesahan anggaran APBD.	dibayarkan, RSUD melakukan realisasi pembayaran tagihan pada awal tahun menggunakan sumber dana BLUD yang telah disediakan sembari menunggu waktu pengesahan APBD agar aktifitas pelayanan dan penunjang pelayanan kesehatan tetap bisa berjalan seperti biasa	inap dan rawat jalan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dan kendala pelayanan bidang kesehatan yang terjadi yang diharapkan akan dapat mengatasi masalah kekurangan ruang perawatan bagi pasien dan sarana prasarana yang lebih memadai yang ditargetkan
				Peningkatan Pelayanan BLUD	100%	84%	efisiensi anggaran dan penyesuaian	target capaian pendapatan RSUD Dr. H.	lebih memadai yang ditargetkan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							antara pendapatan BLUD dengan anggaran belanja	Mohamad Rabain tidak tercapai 100% sehingga anggaran belanja harus dilakukan efisiensi guna menyeimbangkan antara kas pendapatan yang ada dengan anggaran kas belanja	akan selesai pada akhir tahun 2026 serta pemanfaatannya pada tahun 2027.
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100%	84%	-	-	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	84%	Paket pengembangan Rumah Sakit sub kegiatan belanja Amdal tidak tercapai	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							100% dikarenakan pengerjaan hanya dokumen adendum amdal bukan dokumen amdal baru sehingga terjadi perbedaan tarif dengan pagu.		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan Infrastruktur dan Suprastruktur Dasar yang Berkualitas secara Merata dan Mendukung Terwujudnya Jalan Tol Muara EnimInderalayaPalembang	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	100%	100.6%			
				<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	100.6%			
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	100%	108.1%			
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100%	98.5%			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan	100%	95.5%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					
				Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	100%	99.6%			
				Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	100%	97.7%			
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	100%	85.0%			
				<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	85.0%			
				Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	100%	84.9%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	100%	98.2%			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	100%	91.1%			
				<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	91.1%			
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	100%	94.7%			
				Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	100%	79.2%			
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air	100%	12.0%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Limbah Domestik (SPALD)					
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	100%	38.4%			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	100%	97.9%			
				<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	97.9%			
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	100%	139.7%			
				Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	100%	98.3%			
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	100%	98.1%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	100%	0.0%			
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	100%	99.6%			
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	100%	95.9%			
				<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	100%	95.9%			
				Pengelolaan Leger Jalan	100%	8.5%			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100%	98.8%			
				Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	100%	8.6%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penggantian Jembatan	100%	80.9%			
				Pembangunan Jalan	100%	82.5%			
				Rekonstruksi Jalan	100%	96.9%			
				Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	100%	55.5%			
				Pelebaran Jalan Menuju Standar	100%	98.8%			
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	100%	89.1%			
				Rehabilitasi Jembatan	100%	103.2%			
				Pembangunan Jembatan	100%	93.8%			
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	100%	16.9%			
				Rehabilitasi Jalan	100%	98.2%			
				Pemeliharaan Rutin Jalan	100%	85.7%			
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	100%	11.7%			
				<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	100%	3.2%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	100%	3.2%			
				<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	31.6%			
				Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	100%	31.6%			
			Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Industri dengan Memperhatikan Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	100%	87.3%			
				<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman</b>	100%	83.3%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					
				Normalisasi/ Restorasi Sungai	100%	91.1%			
				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	100%	82.4%			
				Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	100%	0.0%			
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	100%	91.7%			
				<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1</b>	100%	97.7%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>(Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	100%	94.6%			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	100%	99.4%			
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	100%	99.8%			
				Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	100%	71.1%			
				<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	100%	63.2%			
				<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	100%	63.2%			
				Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	100%	51.1%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					
				Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	100%	30.7%			
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100%	76.8%			
				Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT),	100%	22.9%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG					
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	100%	66.3%			
				<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	100%	69.4%			
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	100%	72.5%			
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	100%	70.3%			
				Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	100%	61.1%			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	100%	89.6%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	66.3%			
				Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	100%	66.3%			
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	59.4%			
				Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	100%	64.3%			
				Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	100%	59.1%			
				<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	63.1%			
				Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan	100%	65.4%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK					
				Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	100%	61.4%			
				Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	100%	86.5%			
			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100%	79.1%			
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	85.5%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	95.4%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	75.2%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	71.7%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	93.5%			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	100%	84.5%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	88.2%			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	80.1%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	80.0%			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%	92.7%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	66.5%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%	96.6%			
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	100%	99.3%			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	99.3%			
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	41.8%			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	41.8%			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	89.0%			
				Penyediaan Komponen Instalasi	100%	97.8%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99.9%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	98.1%			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	99.6%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	91.9%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	87.2%			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	82.6%			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	54.6%			
				Pengadaan Mebel	100%	98.5%			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	38.2%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	99.2%			
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	94.5%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	90.1%			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	97.5%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	96.8%			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	77.6%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	77.1%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	79.0%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	99.8%			
				Jumlah					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Perumahan dan Pertanahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100%	92,76%			Komisi IV : Terkait masih besarnya silva Komisi IV merekomendasikan agar dalam perencanaan penganggaran hendaknya lebih memperhatikan kembali secara efektif dan efisien.  Tindak Lanjut : Akan dilakukan Refocusing anggaran terhadap kegiatan yang tidak mempunyai output (hasil
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	70,59%	Tidak Ada	Tidak Ada	keluaran) yang jelas.  Komisi IV : Agar kedepannya dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait anggaran bedah rumah dari dana hibah pusat karena program ini sangat membantu dan diharapkan oleh masyarakat kurang mampu di Kabupaten Muara Enim.
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Pngadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	95%	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	76,47%	Tidak Ada	Tidak Ada	
			Meningkatkan Infrastruktur dan	Program Pengembangan Perumahan	100%	75%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Suprastruktur Dasar yang Berkualitas secara Merata dan						
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%			
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%			
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	100%	0%	Tidak terlaksananya Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi		Tindak Lanjut : Tahun 2024 sudah menyampaikan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Relokasi Program Kabupaten/Kota			Program Kabupaten/Kota karena belum ada Dasar Hukum untuk pelaksanaannya		usulan RTLH ke Provinsi melalui Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK), namun belum disetujui Pemerintah Provinsi.
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	100%			
				Program Kawasan Permukiman	100%	100%			
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	2 Ha 1 Laporan	2 Ha 1 Laporan			
				Perataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha					
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	100%	100,25%			
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Lintas Umum (PSU)	3 Jenis	3 Jenis			
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%	100%	Masih banyak developer/pengembang yang belum menyerahkan PSU Perumahan yg sudah dibangun ke Pemkab Muara Enim sehingga Penyerahan PSU Perumahan Kab.	Telah dilakukan publikasi terkait serah terima asset dari Developer ke Pemerintah	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Muara Enim belum terlaksana dgn maksimal.	Daerah.	
				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	12 Kasus	91,67%			
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	91,67%			
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100%	85%			
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh	100%	85%	Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Desa Kasai Kec. Sungai Rotan tidak mencapai kesepakatan dengan pemilik lahan	Membuat trase baru dengan harapan tanah yang terkena untuk	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			sehingga tidak dapat diproses.	pembangunan jalan Sungai Rotan Muara Lematang mengambil areal pinggir tanah milik masyarakat.	
				Program Pengelolaan Tanah Kosong	100%	100%			
				Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100%	100%			
				Program Penatagunaan Tanah	100%	90%			
				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100%	90%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>	Satuan Polisi Pamong Praja	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa, Cerdas dan Berkualitas	<b>Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>					Untuk kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Lingkup Kabupaten Muara Enim yang dilakukan oleh Tim Yustisi telah ditambahkan volume kegiatan dari tahun sebelumnya. Pelaksanaan yustisi pada tahun 2024 dilakukan sebanyak 12



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									kali.
				<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota</b>					
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	-	-			
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang	87 Orang	237 Orang	Tidak terlaksananya kegiatan pelatihan anggota Satlinmas	Mengevaluasi dan mengkaji kembali jadwal pelaksanaan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Bernuansa Hak Asasi Manusia			karena waktu pelaksanaan berdampingan dengan kegiatan pemilukada serentak.	kegiatan tersebut.	
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	12 Laporan	12 Laporan			
				Penindakan atas gangguan ketentraman	12 Laporan	12 Laporan			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan ketertiban umum berdasarkan Peda dan Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa					
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	63 Unit	63 Unit			
				<b>Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota</b>					
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	3 Laporan	3 Laporan			
				Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Bupati / Walikota	12 Laporan	12 Laporan			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 Laporan	12 Laporan			
			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/Bulan	26 Orang/Bulan	Banyaknya jabatan yang belum terisi mengakibatkan anggaran gaji yang tersedia tidak dapat terserap secara optimal	Mengevaluasi dan mengkaji kembali target anggaran untuk sub kegiatan yang terkait.	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan			
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
				Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	12 Laporan	12 Laporan			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	12 Orang	Keterbatasan SDM untuk mengikuti diklat yang telah dianggarkan	Mengevaluasi dan mengkaji kembali target anggaran untuk sub kegiatan yang terkait.	
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	2 Paket			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	2 Paket			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	3 Paket			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket			
				Penyediaan Bahan Bacaan perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>					
				Pengadaan Mebel	2 Unit	2 Unit			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19 Unit	20 Unit	Standar Harga di SSH SIPD lebih kecil daripada harga toko	Mengevaluasi standar harga yang ada di SIPD dan disesuaikan dengan harga yang ada di pasaran	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 Unit	9 Unit			
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
				Penyediaan jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Jabatan	1 Unit	1 Unit			
				Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22 Unit	25 Unit	Pagu anggaran yang tersedia tidak mencukupi karena adanya beberapa kendaraan yang terkena denda.	Mengevaluasi standar harga yang ada di SIPD dan disesuaikan dengan nilai pajak.	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39 Unit	39 Unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	41 Unit	41 Unit			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kantor atau Bangunan Lainnya					

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	<b>95.29%</b>			Terkait masukan dan saran dari Komisi IV dalam hal kekurangan pos pemadam kebakaran dan perlengkapan alat pelindung diri, akan dibentuk secara bertahap untuk tahun-tahun berikutnya sesuai kemampuan anggaran daerah.
				Kegiatan Perencanaan,	100%	95.89%	Kegiatan ini telah dilakukan	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			sesuai dengan pelaksanaannya.		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	95.73%	Kegiatan ini telah dilakukan sesuai dengan pelaksanaannya	-	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	92.45%	Kegiatan ini telah dilakukan sesuai dengan pelaksanaannya	-	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	95.05%	Kegiatan ini telah dilakukan sesuai dengan pelaksanaannya.	-	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	84.54%	Kegiatan ini telah dilakukan sesuai dengan pelaksanaannya	-	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	Kegiatan ini telah dilakukan sesuai dengan pelaksanaannya	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	90.15%	Kegiatan ini telah dilakukan sesuai dengan pelaksanaannya	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	73.21%	Kegiatan ini telah direalisasikan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dibayar pajak dan telah dibayarkan sesuai dengan tagihan dari pihak ketiga	Anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan	
				<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>	100%	<b>86.31%</b>		-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, Penyelamatan dan Penanggulangan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	100%	86.00%	Kegiatan ini telah dilakukan sesuai dengan pelaksanaannya	Kegiatan ini telah dilakukan sesuai dengan pelaksanaannya	
				Kegiatan Inpeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	97.37%			
				Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	86.12%			
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	92.77%	Kegiatan ini telah dilakukan sesuai dengan pelaksanaannya	Anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan.	
				Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian	100%	84.75%	Kegiatan ini telah direalisasikan	Anggaran akan disesuaikan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			sesuai dengan pelaksanaan yang ada	dengan kebutuhan.	

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Melaksanakan Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	97.79	29,557,800.00			
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	97.52	5,349,500.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Umum serta Perlindungan Masyarakat								
				Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	95.88	5,259,600.00			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	97.63	12,654,200.00			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00	6,294,500.00			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>59.72</b>	<b>2,426,579,174.00</b>			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59.72	2,421,776,574.00	Karena perkiraan pada Bulan Agustus 2024 OPD BPBD Kabupaten Muara Enim meningkat menjadi eselon II.b sehingga untuk anggaran	untuk Anggaran Gaji tetap dianggarkan dan akan disesuaikan kembali sesuai dengan peningkatan Esselon Kantor menjadi Esselon	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							gaji pegawai dianggarkan sesuai dengan kebutuhan peningkatan Esselon dari Esselon III.a menjadi Esselon II.b namun sampai Desember belum terealisasi	II dan juga menghitung anggaran gaji untuk penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.10	1,850,200.00	Karena adanya faktor kekeliruan dalam pengadministrasian dalam pemberkasan	untuk kedepannya agar dilaksanakan dan segera ditindaklanjuti	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	95.26	2,952,400.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>96,40</b>	<b>140,539,800.00</b>			
				Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	99.88	63,023,800.00			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	97.39	77,516,000.00			
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang pada SKPD	-	-	karena buffer stock ATK masih cukup dan tersedia sehingga belum direalisasikan atau at cost		
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>53.04</b>	<b>39,780,000.00</b>			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	53.04	39,780,000.00	Karena Kegiatan Bimtek dan Pelatihan belum ada yang	akan tetap dianggarkan guna meningkatkan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							mengaju pada pengembangan Kompetensi ASN di bidang Kebencanaan sehingga hanya sebagian kegiatan pelatihan serta bimtek yang bisa terserap	propesionalisme serta kompetensi ASN untuk menunjang kinerja Pemerintahan sesuai dengan Informasi Bimtek yang legal dari Pemerintah	
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>87.76</b>	<b>796,300,98 3.00</b>			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57.20	8,744,900.0 0	Karena persediaan peralatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor masih tercukupi	sehubungan dengan peningkatan Esselon Kantor menjadi Esselon II sehingga kebutuhan penyediaan peralatan listrik banyak ruang	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							sehingga tidak terealisasikan	yang memerlukan sumber daya dari alat pendukung listrik sehingga biaya alat listrik masih perlu dianggarkan dan bisa memungkinkan akan bertambah sesuai dengan keperluan yang ada	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.83	17,719,584.00			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94.24	129,224,300.00			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	98.22	16,097,700.00			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	97.73	6,570,000.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	86.53	617,944,49 9.00			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>92,40</b>	<b>404,500,00 0.00</b>			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.40	404,500,00 0.00			
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>60.83</b>	<b>108,483,99 2.00</b>			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.44	2,100,000.0 0	Karena adanya kesenjangan waktu dari bidang akuntansi, sehingga belum terlaksananya kegiatan cetak akhir tahun fotocopy, cetak buku, jilid cover	untuk kedepannya agar diteliti dan cermat sesuai dengan Administrasi	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.80	106,383,99 2.00	at cost dibayarkan sesuai dengan pengeluaran dikantor		
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>76.15</b>	<b>532,431,40 7.00</b>			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.60	4,607,775.0 0	Karena Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Lapangan hanya melakukan pemeliharaan servis ringan	tetap dianggarkan mengingat masa garansi gratis sudah habis dan ditahun berjalan pajak Kendaraan Dinas Jabatan harus dibayar	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							sehingga anggaran tidak seluruhnya terserap		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.64	422,213,13 2.00	Karena pajak kendaraan operasional lapangan 5 Unit berplat B, hanya dibayarkan mutasi plat dan BPKB untuk Administrasi pembayaran pengurusan BPKB di kantor Satlantas belum teranggarkan. Untuk servis diambil sesuai dengan kebutuhan atau at cost	tetap dianggarkan di tahun berjalan dan untuk anggaran servis dikarenakan BPBD masih memiliki Kendaraan roda 6 sebanyak 4 Unit	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.00	55,000,000.00			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	58.61	31,410,000.00	Karena kegiatan Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebagian masih dalam kondisi baik sehingga hanya sedikit memakai biaya pemeliharaan	untuk lebih cermat dalam menghitung kebutuhan anggaran	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.55	19,200,500.00			
				<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>61.41</b>	<b>96,674,200.00</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	61.41	96,674,200.00	Karena terdapat biaya perjalanan dinas yang tidak bisa direalisasikan di biaya tiket pesawat dan biaya penginapan untuk narasumber	dilakukan pergeseran, pengurangan atau perubahan anggaran pada APBD Perubahan	
				<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>79.88</b>	<b>1,793,423,516.00</b>			
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	86.92	162,981,800.00			
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	85.27	1,215,954,528.00			
				Penyusunan Rencana Kontijensi	65.49	146,488,700.00	Karena terdapat biaya Honorarium	dilakukan pergeseran, pengurangan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Tim Tenaga Ahli menyesuaikan dengan SK Bupati dan perjalanan dinas yang tidak bisa direalisasikan sesuai dengan ketentuan pada Perpres no. 33 Tahun 2020. Dan hasil koordinasi bagian Hukum Setda sehingga Anggaran untuk Honorarium tidak direalisasikan	atau perubahan anggaran pada APBD Perubahan	
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	65.68	267,998,48 8.00	Karena biaya setor menyesuaikan	untuk pelatihan berikutnya tetap dianggarkan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dari pusdiklat BNPB dan perjalan dinas pelatihan dianggarkan sebesar Rp. 8.500.000,00 per orang sebanyak 35 orang, terealisasi hanya Rp. 5.000.000,00 sesuai dengan ketentuan Pusdiklat dengan 50 jam pelajaran	sebesar Rp. 8.500.00,00 dikarenakan biaya setor balik pelatihan bervariasi sesuai dengan ketentuan BNPB	
				<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>70.25</b>	<b>495,733,37 1.00</b>			
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	94.42	82,758,872. 00			
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan	86.24	73,213,080. 00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	63.73	339,761,41 9.00	Karena honor petugas penanganan bencana dan makan minum petugas penanganan bencana karena sesuai dengan kebutuhan pada saat penanganan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta siaga Banjir Longsor	dilakukan pergeseran, pengurangan atau perubahan anggaran pada APBD Perubahan	
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	82.84	424,125,95 7.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	77.56	95,824,864.00	Karena dalam pembahasan Kegiatan Penyusunan Perbup KRB dan RPB banyak dilaksanakan dan di fasilitasi di Kanwil Kemenkum HAM Palembang sehingga anggaran makan minum tidak terealisasi, kegiatan dan koordinasi pembahasan perbup KRB dan RPB adanya pembatasan waktu dari Kemenkum	agar dilaksanakan lebih terperinci dan cermat sesuai dengan kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							HAM sehingga anggaran perjalanan Dinas kurang terserap karena keterbatasan waktu dan tidak di laksanakannya kegiatan harmonisasi		
				Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	74.56	52,762,223.00	Karena pelaksanaan koordinasi kedua usaha tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan keterbatasan waktu dan Sumber Daya Manusia yang tersedia di	untuk lebih cermat dalam menghitung biaya Perjalanan Dinas	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							BPBD sehingga beban biaya perjalanan dinas tidak terserap sepenuhnya		
				Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	55.85	14,603,225.00	Karena tidak ada kegiatan yang terkait Evaluasi atau revisi Raperda Penanggulangan Bencana ke Luar Daerah sehingga anggaran Perjalanan Dinas ke Luar Daerah tidak terealisasi		
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	97.83	193,191,349.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	72.01	67,744,296.00	tidak terserapnya perjalanan dinas pasca bencana dikarenakan kejadian bencana lebih sedikit dari perhitungan dan persiapan anggaran perjalanan dinas, dan masih adanya anggaran pembuatan sertifikat dalam kegiatan tersebut	Kota untuk lebih cermat dalam menghitung kebutuhan biaya Perjalanan Dinas dan tidak lagi menganggarkan biaya sertifikat kegiatan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Bidang Sosial	Dinas Sosial		<b>DINAS SOSIAL</b>	100%	70.87%			
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	71.92%			
				<b>Perencanaan, Penganggaran &amp; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	76.42%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	100%	85.56%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	100%	16.14%	Keterlambatan pengesahan APBD menyebabkan dokumen RKA tidak dicetak (langsung cetak DPA), sehingga berimplikasi pada kurang maksimalnya penyerapan anggaran.	Mengevaluasi kembali target anggaran untuk sub kegiatan yang terkait.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	100%	81.08%			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	100%	21.81%	Kebutuhan lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya	Mengevaluasi kembali target anggaran untuk sub kegiatan yang terkait.	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	93.83%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	88.51%			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	67.30%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	66.95%	Banyaknya jabatan yang belum terisi mengakibatkan anggaran gaji yang tersedia tidak dapat	Mengevaluasi dan mengkaji kembali target anggaran untuk sub	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							terserap secara optimal	kegiatan yang terkait.	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	100%	72.80%	Standar Harga di SSH SIPD lebih besar daripada harga toko	Mengevaluasi standar harga yang ada di SIPD dan disesuaikan dengan harga yang ada di pasaran	
				Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100%	98.87%			
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	86.46%			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	86.46%			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Dearah</b>	100%	77.59%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	79.77%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	85.90%			
				Penyediaan Barang Logistik Kantor	100%	71.32%	Standar Harga di SSH SIPD lebih besar daripada harga toko	Mengevaluasi standar harga yang ada di SIPD dan disesuaikan dengan harga yang ada di pasaran	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	74.97%	Standar Harga di SSH SIPD lebih besar daripada harga toko	Mengevaluasi standar harga yang ada di SIPD dan disesuaikan dengan harga yang ada di pasaran	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	82.61%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	76.09%			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	100%	72.02%			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	58.03%	Tidak terlaksananya pengadaan kendaraan operasional roda empat (hiace) satu unit dikarenakan tidak tersedianya stok roda empat yang dibutuhkan	Melakukan pengkajian ulang dan mengecek ketersediaan stok kendaraan roda empat yang dimaksud (hiace)	
				Pengadaan Mebel	100%	85.98%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	100%	99.92%			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Kantor	100%	74.05%	Waktu yang dibutuhkan untuk proses pembangunan gedung kantor 100% tidak cukup sehingga pembangunan gedung secara fisik mencapai 95%		
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	92.09%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	89.29%			
				Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	92.21%			
				Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	66.39%	Standar Harga di SSH SIPD lebih besar	Mengevaluasi standar harga yang ada di	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							daripada harga toko	SIPD dan disesuaikan dengan harga yang ada di pasaran	
				Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	100%	81.35%			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	97.83%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100%	96.65%			
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	99.22%			
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	100%	65.33%			
				Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	100%	85.66%			
				Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	100%	85.66%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	100%	65.14%			
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	83.42%			
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Soisial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	63.30%	Tidak terlaksananya kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat.	Mengevaluasi dan mengkaji ulang kegiatan BLT dengan program prioritas bupati periode 2025-2029	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	89.96%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	100%	73.69%	Minimnya masyarakat yang melakukan konsultasi ke LK3 sehingga kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal	Mengevaluasi kembali target kinerja dan anggaran untuk kegiatan LK3	
				<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	100%	75.06%			
				Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	66.62%			
				Penyediaan Sandang	100%	63.50%	Karena sedikitnya Penerima Manfaat (tidak	Mengevaluasi kembali target kinerja	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dapat diprediksi) yang diberi Permakanan	dan anggaran untuk sub kegiatan yang terkait.	
				Penyediaan Alat Bantu	100%	77.49%	Karena Harga Barang di pasar lebih kecil dari standar harga pemerintah	Mengevaluasi kembali target kinerja dan anggaran untuk sub kegiatan yang terkait.	
				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	100%	84.00%			
				Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga	100%	18.48%	Karena Penerima Manfaat yang ditelusuri ke keluarganya di tahun 2024	Mengevaluasi kembali target kinerja dan anggaran untuk sub	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							hanya ada 1 (satu) orang	kegiatan yang terkait.	
				Pemberian Layanan Rujukan /Disabilitas Terlantar	100%	33.73%	Karena Penerima Manfaat dikegiatan rujukan tidak dapat diprediksi	Mengevaluasi kembali target kinerja dan anggaran untuk sub kegiatan yang terkait.	
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Pantis Sosial	100%	80.37%			
				Penyediaan Alat Bantu /PMKS	100%	81.13%			
				Pemberian Layanan Rujukan / PMKS	100%	79.06%	Karena Penerima Manfaat dikegiatan rujukan tidak dapat diprediksi	Mengevaluasi kembali target kinerja dan anggaran untuk sub kegiatan yang terkait.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	100%	79.30%			
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	100%	26.44%			
				Rujukan Anak-Anak Terlantar	100%	26.44%	Karena Penerima Manfaat dikegiatan rujukan tidak dapat diprediksi	Mengevaluasi kembali target kinerja dan anggaran untuk sub kegiatan yang terkait.	
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100%	84.70%			
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					
				Pendataan Fakir Miskin Cakupan daerah	100%	97.85%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan daerah/Kabupaten Kota	100%	66.51%			
				Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial Keluarga (BPNT)	100%	71.58%	Jumlah pegawai yang membidangi kegiatan ini berkurang sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pegawai yang ada yang menyebabkan penyerapan anggaran kurang maksimal	Mengevaluasi kembali target kinerja dan anggaran untuk sub kegiatan yang terkait.	
				Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	100%	96.35%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	100%	97.24%			
				Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	97.24%			
				Penyediaan makanan	100%	97.24%			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	100%	96.52%			
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%	96.52%			
				Rehabilitasi Sarana Prasarana	100%	99.62%			
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasioanal Kabupaten /Kota	100%	92.44%			



### 3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

**Tabel 3.2**  
**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**  
**yang Dilaksanakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	100%	<b>93.23%</b>			Sudah penambahan tenaga terdapat orang 1 instruktur kelistrikan/otomotif a.n Mecho Aris Yowansyah, S.Pd sebagai instruktur ahli Pertama  Sudah dilakukan upgrading atas tenaga instruktur lainnya pada kelistrikan dan computer.
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	100%	<b>91.18%</b>			Pembangunan jalan alternatif telah



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					direncanakan untuk pelaksanaan pembangunannya.
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	<b>94.45%</b>			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	93.71%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	93.64%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	93.64%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	96.46%			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%	96.46%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	100%	93.68%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	93.32%			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	<b>92.09%</b>			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	92.05%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	95.40%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	100%	97.06%			
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	100%	<b>97.71%</b>			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	97.71%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	<b>95.70%</b>			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	97.73%			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	95.70%			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	91.83%			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	<b>98.19%</b>			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	74.41%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99.20%			
				Belanja Barang Pakai Habis					
				Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Belanja Modal Alat Kantor Lainnya					
				Belanja Modal Alat Pendingin					
				Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use)					
				Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya Home Use)					
				Belanja Modal Personal Computer					
				Belanja Modal Peralatan Personal Computer					
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	99.09%			
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor					
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	91.25%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100.00%			
				Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	50.16%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	99.56%			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	<b>98.88%</b>			
				Pengadaan Mebel					
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	<b>65.29%</b>			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	77.56%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	47.91%			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99.44%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	93.13%			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	<b>87.96%</b>			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan	100%	68.34%			
				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100.00%			
				Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kosntruksi					
				Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Belanja Modal Bangunan Air Bersih/ Air Baku Lainnya					
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	100%	99.92%			
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
				<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	100%	<b>98.84%</b>			
				<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	100%	<b>98.84%</b>			
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	100%	98.84%			
				<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	100%	<b>97.67%</b>			
				<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	100%	<b>97.81%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	100%	97.81%			
				<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	100%	<b>93.88%</b>			
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100%	93.88%			
				<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	100%	<b>94.98%</b>			
				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	100%	94.98%			
				<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	100%	<b>96.19%</b>			
				<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	<b>95.10%</b>			
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100%	98.20%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	100%	90.35%			
				Perluasan Kesempatan Kerja	100%	95.96%			
				<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	100%	<b>96.09%</b>			
				Job Fair/Bursa Kerja	100%	96.09%			
				<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	<b>99.90%</b>			
				Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	100%	99.90%			
				<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	100%	<b>99.32%</b>			
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya	100%	<b>99.20%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					
				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	100%	98.20%			
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	100%	99.50%			
				Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN					
				Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN					
				<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	<b>99.55%</b>			
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	100%	99.50%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	100%	99.69%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa, Cerdas dan Berkualitas	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	100 %				
			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100 %				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	100 %	1 Dokumen			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	100 %	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100 %	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100 %	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 %	5 Laporan			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100 %				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	35 Orang/Bulan			
				Penyediaan Administrasi	100 %	1 Dokumen			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Tugas ASN					
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 %	1 Laporan			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	100 %	1 Laporan			
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	100 %				
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100 %	8 Dokumen			
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100 %				
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %	16 Orang			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100 %				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	1 Paket			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	1 Paket			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100 %	1 Paket			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	1 Paket			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	1 Paket			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100 %	1 Dokumen			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	1 Laporan			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	100 %				



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
				Pengadaan Mebel	100 %	12 Unit			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	1 Unit			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	1 Unit			
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100 %				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	1 Laporan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	1 Laporan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	1 Laporan			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	100 %				



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Penunjang Pemerintahan Daerah</b>					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 %	7 Unit			
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	31 Unit			
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100 %				
				<b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada</b>	100 %				



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota</b>					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten / Kota	100 %	1 Unit			
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	100 %	57 Perangkat Daerah			
				<b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	100 %				
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan	100 %	20 Organisasi			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi					
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100 %	1 Orang			
				<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	100 %				
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	100 %	300 Orang			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota					
				<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	100 %				
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan, Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota (DAK NF)	100 %	1 Dokumen			
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	100 %	57 Perangkat Daerah			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kewenangan Kabupaten/Kota					
				<b>Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	100 %				
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NF)	100 %	87 Layanan			
				<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan</b>	100 %				



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
				Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	1 Dokumen			
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	1 Dokumen			
				<b>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data</b>	100 %				



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					
				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	3 Dokumen			
				Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	2 Dokumen			
				<b>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	100 %				
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak	100 %	3 Organisasi			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	1 Dokumen			
				<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	100 %				
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100 %	50 Orang			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kewenangan Kabupaten/Kota					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	100 %	2 Dokumen			
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	1 Dokumen			
				Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan	100 %	1 Dokumen			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				<b>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	100 %				
				Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan / Program / Kegiatan Pencegahan KTA (DAK NF)	100 %	40 Orang			
				Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan	100 %	3 Dokumen			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kabupaten/Kota (DAK NF + APBD)					
				<b>Penyediaan Layanan bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	100 %				
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	2 Orang			
				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK (DAK NF)	100 %	40 Orang			
				<b>Penguatan dan Pengembangan</b>	100 %				



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					
				Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (DAK NF)	100 %	50 Orang			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Badan Pangan Nasional	Dinas Ketahanan Pangan	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa di Sektor Agribisnis, Agroindustri, dan Agropolitan	<b>URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN</b>	100 %	86.56%			Menindaklanjuti laporan komisi II DPRD kab. Muara Enim tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Muara Enim thn anggaran 2023 dapat kami sampaikan sebagai berikut:
			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>	100 %	86.56%			Terhadap perlunya penganggaran untuk pengawasan daerah rawan pangan kami sangat setuju utk itu kami akan menyediakan anggaran dimaksud



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Peningkatan Pelayanan Publik						
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100 %	86.33%			Terkait analisis kerawanan pangan yang ada di kab. Muara Enim akan kami lakukan dan jika telah selesai akan kami sampaikan dan kami publikasikan
				<b>KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	100 %	83.26%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 %	93.97%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 %	64.90%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 %	66.11%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 %	64.87%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	100 %	91.11%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	97.11%			
				<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	100 %	84.82%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	84.88%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100 %	68.31%			
				<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	100 %	10.61%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 %	10.61%			
				<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	100 %	93.88%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100 %	97.86%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	93.17%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100 %	81.00%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100 %	78.18%			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	100 %	100.00%			
				Fasilitas Kunjungan Tamu	100 %	51.95%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	99.59%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	100 %	87.07%			
				Pengadaan Mebel	100 %	87.07%			
				<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	100 %	83.42%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 %	89.29%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	63.61%			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 %	100%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100 %	100%			
				<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	100 %	97.70%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	100 %	92.93%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100 %	99.89%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	100 %	100%			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	100 %	94.82%			
				<b>KEGIATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELEURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100 %	94.82%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	100 %	83.07%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	100 %	88.89%			
				Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %	98.70%			
				<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYRAKAT</b>	100 %	79.86%			
				<b>KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILITASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN</b>	100 %	69.22%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100 %	94.66%			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100 %	78.24%			
				Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	100 %	90.89%			
				Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	100 %	92.29%			
				Penyediaan Informasi Harga Pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	100 %	53.01%			
				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	100 %	86.24%			
				<b>KEGIATAN PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA</b>	100 %	66.26%			
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	100 %	50.75%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %	79.19%			
				<b>KEGIATAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI</b>	100 %	96.35%			
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	100 %	96.89%			
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100 %	94.92%			
				<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	100 %	97.41%			
				<b>KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA</b>	100 %	97.41%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100 %	97.41%			
				<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	100 %	78.45%			
				<b>KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100 %	78.45%			
				Rekomendasi keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	82.82%			
				Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100 %	66.79%			
				Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100 %	81.47%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Industri dengan Memperhatikan Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100 %	37,45%	Realisasi anggaran total kegiatan <80%	Kegiatan yang terlaksana berupa penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah selesai 100% dilaksanakan dan mendapat penghargaan Gubernur. Namun Kegiatan Evaluasi yang melibatkan tenaga Ahli Penyusuna dan Pembuatan Vidio paparan Bupati tidak terlaksana, karena tidak ada perintah/pedoman dari KLH.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Biasanya dilaksanakan pada bulan November tahun berjalan sampai akhir tahun 2024 pedomannya tidak di terbitkan. pada penyusunan RPPLH dan evaluasi dalam seluruh tahun Program Pembentukan Perda sudah dilaksanakan. Namun sampai akhir tahun anggaran belum ada ketetapan Perda sehingga Rencana Sosialisasi dan Pembahasan yang	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								dianggarkan melibatkan Tim Ahli, OPD dalam dan luar Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak jadi dilaksanakan	
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	100 %	67,27%	realisasi anggaran total kegiatan <80%	dana tidak terserap terutama dari anggaran rapat yang dialihkan menjadi rapat online dan cetak buku untuk pemeriksaan yang sebelumnya menjadi syarat pada rapat Pravalidasi untuk dibagi Tim Pemeriksa,	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								diganti dengan Format PDF	
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	70,90%	realisasi anggaran total kegiatan <80%	serapan anggaran pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim yang dituju untuk pembinaan desa dan koordinasi dengan provinsi. Kegiatan yang tidak terselenggara yaitu koordinasi dengan provinsi. Kegiatan yang tidak	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								terselenggara yaitu perhitungan/inventarisasi Gas Rumah Kaca karena Tim dari BSPJI Palembang yang telah menawarkan kerjasama mengundurkan diri	
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100 %	92,47%		-	
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100 %	18,29%	realisasi anggaran total kegiatan <80%	kegiatan terlaksana sebanyak dua kali pembersihan di empat lokasi RTH dan kegiatan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								<p>pemangkasan di enam lokasi, dikarenakan terlampir tidak terlaksana, hanya dilakukan survei untuk bahan evaluasi dan penyusunan rencana aksi Keanekaragaman hayati, dan karena tidak adanya tenaga KKWT menyanggupi menjadi petugas pembersihan, namun dari perencanaan mengalami peningkatan yaitu adanya Pendampingan</p>	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Penyusunan rencana Aksi Pengelolaan Taman Kehati oleh BKSDA dan KLHK	
				Penyimpanan sementara Limbah B3	100 %	41,24%	realisasi anggaran total kegiatan <80%	untuk kewenangan Kabupaten berupa kegiatan Perkebunan dan Peternakan sedangkan kegiatan lainnya menjadi kewenangan Pusat (KLHK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021	
				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1	100 %	82,94%		-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	81,05%		-	Untuk Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang tercantum pada Dokumen AMDAL yang dimiliki oleh Perusahaan, Pemerintah kabupaten Muara Enim melalui Dinas Lingkungan Hidup telah memprogramkan dan melaksanakan Pengawasan secara



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>rutin dan berkala ke perusahaan dalam Kabupaten Muara Enim oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Namun sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagian besar kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan RKLRPL Dokumen AMDAL menjadi</p>



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									kewenangan Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yaitu antara lain pengawasan terhadap kegiatan pertambangan mineral dan Batubara serta sektor energi dan sumber daya mineral lainnya
				Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang	100 %	88,45%		-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Terkait dengan PPLH					
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	95,36%		-	Dalam rangka menanamkan perilaku yang sadar dan cinta lingkungan sejak usia dini, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Lingkungan Hidup telah memprogramkan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penilaian sekolah adiwiyata dengan mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>Republik Indonesia No: P.52/MENLHK/SE TJEN/KUM - 1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: 53/MENLHK/SETJ EN/KUMI/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata. Sampai dengan Tahun 2024 Sekolah di Kabupaten Muara Enim yang telah mendapat</p>



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									penghargaan Adiwiyata adalah sebagai berikut: 1. Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten sebanyak 242 Sekolah 2. Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi sebanyak 105 Sekolah 3. Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional sebanyak 35 Sekolah 4. Sekolah Adiwiyata Tingkat mandiri sebanyak 8 Sekolah
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	86,43%		-	
				Penyelesaian Pengaduan	100 %	97,97%		-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					
				Pengelolaan Sampah	100 %	93,57%		-	1. Selanjutnya sebagai amanat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tenaga kebersihan diangkat sebagai Pegawai Pemerintrah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan akan diikutsertakan dalam pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Persampahan diperlukan dukungan anggaran paling sedikit 3% dari APBD sesuai dengan Surat Edaran Menteri lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.</p> <p>2. Terhadap Penanggulangan sampah di Kecamatan-kecamatan akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis</p>



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Daerah (UPTD) Persampahan sesuai dengan Keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan penanganan sampah desa disetiap Kecamatan dapat dikelola oleh BUMDES.
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	100 %	57,67%	realisasi anggaran total kegiatan <80%	masih terdapat beberapa kelompok swadaya masyarakat pengelola TPS 3R, Bank Sampah dan Rumah Pengomposan tidak aktif dalam pengelolaan sampah. Kelompok	Terhadap Pengelolaan Sampah telah diterbitkan beberapa Peraturan sebagai berikut : - Peraturan daerah nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah - Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 43 Tahun



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Masyarakat dalam pengelolaan Sampah yang melaksanakan penilaian kinerja sebanyak 4 Kelompok swadaya Masyarakat, terdiri dari Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola TPS 3R Rumah Tumbuh Kelurahan Muara Enim, Pengelola TPS 3R Desa Tebat Agung, Pengelola Bank Sampah Kirab Remaja Kelurahan Air	2016 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah 2018- 2025 - Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik. Saat ini sedang disusun Peta Jalan (RoadMap) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026 kedepan akan dibuat



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lintang Muara Enim, Pengelola Mesin Pemusnah Sampah TPA Bukit Kancil Muara Enim dan Target kinerja yang di tetapkan berupa Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan sampah Kabupaten/Kota terdiri dari Laporan Kebijakan dan Strategi	Pemerintah Kabupaten Pembuatan dan pengelolaan regulasi terkait fungsi penanganan persampahan dan Upaya Pembangunan teknologi PLTSA. Muara Enim berupaya menggandeng Investor untuk Pembangunan PLTSA.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kabupaten dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Semester I dan Semester II) dan Laporan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	
			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	46,60%	realisasi anggaran total kegiatan <80%	terdapat sub kegiatan yang berisi bahan cetak dalam jumlah besar karena diperkirakan seperti tahun 2023 sebelumnya diminta untuk mencetak sebanyak 46 rangkap	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Perubahan DPA yang tidak dianggarkan sebelumnya, sehingga dibayarkan dengan dana bahan cetak dari sub kegiatan percetakan dan penggandaan di bagian umum. sehingga diantisipasi dengan menganggarkan masing masing kurang lebih sebanyak 60 rangkap pada sub kegiatan yaitu cetak DPA, perubahan DPA, RKA dan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								perubahan RKA, namun realisasi pada tahun 2024 tidak ada diminta untuk DPR, sehingga tidak terealisasi secara maksimal karena disesuaikan sesuai kebutuhan.	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	95,27%		-	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	34,92%	realisasi anggaran total kegiatan <80%	anggaran penata usahaan BMD tahun 2024 dikarenakan anggaran yg digunakan sebesar 70% sudah mencukupi kebutuhan kegiatan BMD	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								sepanjang tahun 2024	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	5,82%	realisasi anggaran total kegiatan <80%	jadwal diklat yang dimaksud berada di akhir tahun dan beberapa diklat Barang dan jasa Tipe C yang diikuti oleh 8 orang di biyai oleh anggaran BKPSDM dan jadwal BimbinganTeknis Implementasi Peraturan Perundang undangan yang dimaksud berada di akhir tahun	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	55,01%	realisasi anggaran total kegiatan <80%	penyesuaian kebutuhan yang terjadi di	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								lapangan, belum ada kegiatan yang membutuhkan plakat, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD, makan minum rapat, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS disesuaikan dengan undangan	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	54,99%	realisasi anggaran total kegiatan <80%	seluruh dealer pemegang hak merek tidak menerima orderan untuk pengadaan mobil Dinas Operasional pada	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								akhir November dikarenakan ada penambahan PPN 12% dan perhitungan pajak opsen pada bulan Januari dan UPS yang di anggarkan tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak sesuai dengan harga di lapangan	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	79,08%	realisasi anggaran total kegiatan <80%	jumlah tenaga kebersihan hanya 4 orang dari 6 orang dan tenaga keamanan hanya 3 orang dari 4 orang. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah tenaga	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								petugas keamanan sebanyak 4 orang dan jumlah tenaga petugas kebersihan kebersihan sebanyak 6 orang	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	52,73%	Realisasi anggaran total kegiatan <80%	kendaraan dinas jabatan disesuaikan dengan kerusakan yang terjadi, disesuaikan dengan kerusakan yang terjadi dan beberapa kendaraan dinas operasional atau lapangan STNK nya bukan atas nama Dinas	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim melainkan Dinas PU Cipta Karya dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perda Nomor 3 Tahun 2023 bahwa Dinas PU Cipta Karya berubah nomenklaturnya menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Permukiman sehingga mengalami kesulitan dalam proses pembayaran pajak, dana Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat direncanakan untuk memperbaiki alat berat excavator cattettillar 320. Tetapi anggaran tersebut tidak mencukupi untuk memperbaiki alat tersebut sesuai dengan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								penawaran dari PT. Trakindo, disesuaikan dengan kerusakan yang terjadi dan Sebagian besar Sarana dan Prasarana Gedung kantor dalam kondisi baik, sehingga anggaran dibelanjakan sesuai kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Urusan Administrasi Kependudukan	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Pendaftaran Penduduk	% kepemilikan KTP 99%	98,82%	Perlu peningkatan kualitas dan kompetensi SDM khususnya petugas pelayanan	Bimtek <i>Service Excelent</i> dan <i>Public Speaking</i>	Pada tahun 2024 telah dilakukan sosialisasi terhadap inovasi yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi di 6 Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi/publikasi inovasi melalui radio, banner dan leaflet. Telah dilakukan inventarisasi sarana/prasarana pendukung pelayanan
				Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Pendudu	% kepemilikan KIA 50%	57,24%	Kuantitas SDM masih kurang khususnya yang berstatus ASN	Memaksimalkan SDM yang ada dan berkoordinasi dengan BKPSDM	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pendaftaran Penduduk	% kepemilikan akte lahir 0-18 tahun 96%	96,5%			administrasi kependudukan di seluruh kecamatan.
				Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	% kepemilikan akte mati 100%	100%			
					% kepemilikan akte kawin non muslim 100%	100%			
				Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian data kependudukan skala kab 2 kali	2 kali			
				Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Inovasi yang terlaksana 1 inovasi	2 inovasi			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa, Cerdas dan Berkualitas	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	79.94%	Kompetensi Aparatur Sipil Negara yang harus ditingkatkan setiap tahunnya karena kebijakan dan pengetahuan teknologi semakin maju	Bimbingan Teknis dan Pelatihan ke Aparatur Sipil Negara harus dilakukan setiap tahunnya demi menunjang kualitas SDM ASN	Menyelenggarakan Bimtek dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara, contohnya Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah
				Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100%	93.63%	Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa yang harus ditingkatkan setiap tahunnya karena kebijakan dan pengetahuan teknologi semakin maju	Bimbingan Teknis dan Pelatihan ke Perangkat Desa harus dilakukan setiap tahunnya demi menunjang kualitas SDM yang baik	Menyelenggarakan Bimtek dan Pelatihan Ke perangkat desa, contohnya Bimtek Kepala Desa. Kaur Keuangan terkait Siskeudes
			Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Penguatan	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan	100%	97.31%	Kurangnya Pengetahuan dan Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa dalam mengembangkan ekonomi Desa	Melakukan Pembinaan dan Sosialisasi terhadap Aparatur Pemerintah Desa terkait Potensi Desa	Memperjelas Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa khususnya terkait pengembangan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Komoditas dan Produk Unggulan Desa di Sektor Agribisnis, Agroindustri, dan Agropolitan	pendapatan asli desa				dan Pengembangan Ekonomi Desa	ekonomi dan potensi desa
			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	88.86%	Kemampuan Desa yang Belum Mandiri dalam tata kelola pemerintahan desa	Pembinaan dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, kredibel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik	Peningkatan Kemandirian Desa baik dalam Anggaran Maupun dalam Manajemen Pemerintahan Desa



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	<b>Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</b>	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	95.00%	92.00%	Masih Kurang Optimalnya Koordinasi antar Perangkat Daerah	Pembentukan Tim Koordinasi	DPPKB melaksanakan program dari BKKBN berupa program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) dan bantuan pangan.
				<b>Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	95.00%	62.38%	Kurangnya SDM sehingga belum optimalnya kinerja OPD	Penugasan Penanggung Jawab Koordinasi	Pengadaan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) untuk disalurkan ke kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) yang telah memiliki



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Nomor Induk Berusaha (NIB).
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Capaian akseptor KB Pria masih rendah	Penyelenggaraan Rapat dan Pertemuan Rutin	Peningkatan Kesehatan Mental Remaja melalui Sistem Terintegrasi dan Elaborasi Berkelanjutan (SINDERELA) yaitu Kegiatan layanan konsultasi dan konseling kesehatan mental remaja di Kabupaten Muara Enim secara offline di Kantor DPPKB dan balai penyuluh KB serta online



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									melalui website DPPKB.
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Pengusulan Kebutuhan Pegawai di Lingkup DPPKB	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pria tentang berbagai metode kontrasepsi yang tersedia.	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>95.00%</b>	<b>86.27%</b>			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD					
				<b>Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Prangkat Daerah</b>	<b>95.00%</b>	<b>77.48%</b>			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>92.00%</b>	<b>66.79%</b>			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>95.00%</b>	<b>94.60%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
				Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
				Penyediaan Peralatan rumah Tangga					
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
				Fasilitas Kunjungan Tamu					
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	<b>95.00%</b>	<b>94.83%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>95.00%</b>	<b>96.94%</b>			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik					
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>95.00%</b>	<b>86.67%</b>			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan.					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dinas Operasional atau Lapangan					
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya					
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>					
				<b>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dalam</b>	<b>94.00%</b>	<b>88.10%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>					
				Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota					
				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana					
				<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	95.00%	93.77%			
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga					
				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga					
				Pengolahan dan Pelaporan Data					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					
				<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>					
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	95.00%	82.99%			
				Pengendalian Program KKBPK					
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK					
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)					
				Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					
				Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal					
				<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PKLB)</b>	<b>95.00%</b>	<b>92.24%</b>			
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					
				Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	95.00%	94.62%			
				Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode kontrasepsi Jangka Panjang ( MKJP)					
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Peningkatan Kesertaan KB Pria					
				<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB</b>	<b>95.00%</b>	<b>94%</b>			
				Pembinaan Terpadu Kampung KB					
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas					
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	95.00%	97.39%			
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))					
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
				Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)					
				Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)					
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Keluarga Akseptor (UPPKA)					
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					
				Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)					
				<b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan</b>	<b>95.00%</b>	<b>88.2%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>dan Kesejahteraan Keluarga</b>					
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Kewilayahan	Dinas Perhubungan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan Pelayanan Publik	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN</b>	100%	90,43%			
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100%	86,98%			
				Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	79,39%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	81,67%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	100%	95,92%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	100%	71,03%	Efisiensi anggaran penyesuaian harga	Evaluasi harga dan penyesuaian harga pada anggaran tahun berikutnya	
				koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	100%	73,45%	Efisiensi anggaran penyesuain harga	Evaluasi harga dan penyesuaian harga pada anggaran tahun berikutnya	
				koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	80,23%			
				Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	89,90%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	72,42%	Efisiensi anggaran	Evaluasi harga dan penyesuaian	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							penyesuaian harga	harga pada anggaran tahun berikutnya	
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>77,83%</b>			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	85,00%			
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	85,40%			
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	100%	79,64%	Efisiensi anggaran penyesuaian harga	Evaluasi harga dan penyesuaian harga pada anggaran tahun berikutnya	
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>96,79%</b>			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	96,79%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	92,73%			
				Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	100%	84,74%			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100%	96,21%			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	100%	84,94%			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	95,86%			
				Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	100%	84,37%			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	99,93%			
				Penyediaan bahan logistik kantor	100%	79,36%	Efisiensi anggaran penyesuaian harga	Evaluasi harga dan penyesuaian harga pada anggaran tahun berikutnya	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	100%	87,25%			
				penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	98,08%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	99,09%			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	95,72%			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	99,05%			
				Pengadaan Mebel	100%	99,14%			
				pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	98,91%			
				Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	99,33%			
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	98,36%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	82,46%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	91,48%			
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	61,00%	Kebutuhan barang/jasa sudah terpenuhi	evaluasi kebutuhan dan penyesuaian pada tahun anggaran selanjutnya	
				Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	100%	99,46%			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	<b>94,69%</b>			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	89,76%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	100%	98,01%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>100%</b>	<b>94,63%</b>			
				<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota</b>	<b>100%</b>	<b>98,83%</b>			
				Pembangunan Prasarana jalan di jalan kabupaten/Kota	<b>100%</b>	93,35%			
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota	<b>100%</b>	98,54%			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	<b>100%</b>	98,52%			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	<b>100%</b>	99,28%			
				<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>100%</b>	<b>93,16%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	100%	90,38%			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal tipe C (Fasilitas Utama dan penunjang	100%	97,95%			
				<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir</b>	100%	98,90%			
				Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota	100%	98,90%			
				<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	100%	96,13%			
				Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	93,27%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	87,80%			
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	100%	90,37%			
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	100,00%			
				Identifikasi dan Analisis potensi Jumlah kendaraan bermotor wajib Uji	100%	99,91%			
				Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	99,32%			
				Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	89,17%			
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	100%	81,31%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	100%	81,37%			
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	100%	85,51%			
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten /kota	100%	77,39%	Penyesuaian Jadwal yang belum terkendali/ terintegrasi	Akan dilakukan penjadwalan ulang di tahun selanjutnya	
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan kabupaten/Kota	100%	94,49%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100%	94,49%			
				Audit dan inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100%	99,50%			
				Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap	100%	99,50%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				unit Pelaksana uji berkala kendaraan Bermotor Inspeksi Audit dan Pemantauan unit pelaksana Uji Berkala kendaraan bermotor					
				<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabuapten/Kota</b>	<b>100%</b>	<b>99,87%</b>			
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa AngkutanOrang dan atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabuapten/Kota	100%	99,87%			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>100%</b>	<b>99,52%</b>			
				<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan Dana Pengoperasian Pelabuhan sungai dan Danau</b>	<b>100%</b>	<b>99,57%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembangunan Dermaga sungai dan Danau	100%	99,57%			
				<b>Pemeliharaan Dermaga Sungai Danau</b>	100%	99,26%			
				Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan sungai danau dan penyebrangan.	100%	99,17%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar			Masih terdapatnya daerah sinyal lemah dan blankspot	Melakukan koordinasi ke Kementerian Kominfo melalui Direktorat telekomunikasi dan memberikan data teknis beserta pendukung desa-desa yang masih dalam kondisi sinyal lemah dan blankspot, melakukan survey bersama dengan penyelenggara telekomunikasi/	Rekemendasi Komisi I : Terkait dengan desa yang belum ada jaringan internet yang memadai (Sinyal Lemah dan tidak ada sinyal), Dinas Kominfo SP telah melakukan langka-langka dengan koordinasi ke Kementerian Kominfo melalui Direktorat telekomunikasi dan memberikan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								<p>provider ke desa-desa yang potensial untuk di bangun Base Transceiver Station (BTS) baru. Sesuai kewenangan pemerintah daerah sebagai salah satu cara untuk mengatasi desa sinyal lemah dan blankspot Dinas Kominfo SP memfasilitasi jaringan internet desa bagi 256 desa dan kelurahan se Kabupaten Muara Enim, 24 UPTD</p>	<p>data teknis beserta pendukung desa-desa yang masih dalam kondisi sinyal lemah dan blankspot. Sebagai tindak lanjut telah di lakukan survey bersama dengan penyelenggara telekomunikasi/provider seperti Telkomsel, Indosat dan Smartfreen ke desa-desa yang potensial untuk di bangun Base Transceiver Station (BTS) baru. Dalam hal</p>



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Puskesmas yang berada di Kecamatan serta 15 UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah yang berada di Kecamatan.	pembangunan BTS baru merupakan kewenangan provider dengan memperhatikan prinsip Business to Business.
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	93.57%	Lemahnya standar keamanan informasi	Meningkatkan keamanan informasi dengan standar manajemen keamanan informasi.	Rekomendasi Komisi IV : Dalam mewujudkan desa digitalisasi, pada tahun anggaran 2024 Dinas Kominfo SP Kab Muara Enim telah menganggarkan belanja internet desa untuk 256 desa dan kelurahan.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Dinas Kominfo SP juga telah memberikan program Internet V-Sat untuk di desa-desa yang memiliki potensi pariwisata di lima lokasi yaitu di Desa Bedegung (wisata air terjun curup tenang), Desa Karya Mulia (wisata kampung malaka), Desa Sumber Rahayu (wisata betung berseri), Desa Pinang Banjar



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(wisata air) dan Desa Ujan Mas Baru (wisata danau emas)
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	95.04%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	98.56%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	91.02%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	94.70%			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%	95.00%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	94.40%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	89.56%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	89.25%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	89.24%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	92.53%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	94.56%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	99.45%			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	99.45%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	99.56%			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	99.56%			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	98.77%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	100%	98.92%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	97.63%			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	99.37%			
				Penyediaan bahan logistik kantor	100%	96.35%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	95.61%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	95.99%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	99.10%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	99.99%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	99.67%			
				Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	99.59%			
				Pengadaan Mebel	100%	99.77%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	98.31%			
				Penyediaan jasa surat menyurat	100%	99.02%			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	96.73%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99.16%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	99.54%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	98.95%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	99.46%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	100%	99.74%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
				Urusan Pemerintahan Bidang komunikasi dan Informatika	100%	96.47%			
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	100%	99.47%			
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	99.47%			
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	100%	99.73%			
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	100%	98.95%			
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	100%	97.37%			
				Pelayanan Informasi Publik	100%	99.50%			
				Layanan Hubungan Media	100%	97.80%			
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	100%	97.36%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	100%	99.75%			
				Program Aplikasi Informatika	100%	94.41%			
				Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	93.52%			
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%	93.52%			
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	98.79%			
				Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%	99.90%			
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	100%	97.07%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	100%	98.34%			
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	100%	99.19%			
				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	100%	99.72%			
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	99.72%			
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	99.72%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	100%	99.93%			
				Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	100%	99.11%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	100%	99.02%			
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%	99.02%			
				Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	98.78%			
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	100%	99.73%			
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	97.45%			
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/Kota	100%	99.59%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Operasioanalisis Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	99.59%			

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	85%	85%	Masih Kurangnya tenaga ASN di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dalam menopang pelaksanaan program/kegiatan.	Mengusulkan penambahan tenaga ASN berdasarkan surat Kepala Dinas Koperasi, UKM No 800 /776/ DKUKMI.1 /X/ 2024 Tanggal 25 Oktober 2024	Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, sosialisasi, pendampingan usaha dan pembinaan bagi Koperasi dan UMK dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM bagi Pengurus/



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Pengelola Koperasi dan Pelaku UMK
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Belum optimalnya ketersediaan kendaraan dinas/operasional dalam mendukung mobilitas kerja.	Mengusulkan Pengadaan belanja kendaraan dinas/operasional kepada TAPD berdasarkan Surat Kepala Dinas Koperasi, UKM No. 800.1/ 202/ DKUKM.I.1/ IV/2023 Tanggal 29 April 2024	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyedia Jawa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
			Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa di Sektor Agribisni Agroindustri,	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	95%	71,56%	Masih perlunya pengawasan dan pemriksaan terkait kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan	Memberikan pembinaan secara intensif dan terpadu kepada Anggota/ Pengurus/ Pengelola/ Pengawas Koperasi	Memfasilitasu akses Permodalan bagi pelaku UMK dan Koperasi



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dan Agropolitan						
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	95%	45,18%	Masih kurangnya koperasi yang berstandar SEHAT	Memberikan pembinaan terkait Penilaian Kesehatan Mandiri (Self Assesment) KSP/USP/KSPPS/USPPS melalui aplikasi pengawasan Koperasi	
				Penilaian Kesehatan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN	95%	7,56%	Masih banyak koperasi yang tidak langsung menerapkan materi yang disampaikan/ diajarkan		Memfasilitasi kegiatan promosi produk UMK
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			Materi Pelatihan harus disesuaikan dengan kebutuhan terkini, seperti manajemen modern, teknologi informasi, dan pemasaran digital.		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	95%	83,36%	Koperasi masih sangat bergantung pada bantuan modal usaha.	Melaksanakan sosialisasi tentang informasi ppenyediaan permodalan	Memberikan bantuan peralatan kerja bagi pelaku UMK



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				Memfasilitasi kerjasama usaha antara koperasi dan UMK dengan Pihak ke-3 atau Dunia Usaha Lainnya	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	95%	7,05%	Masih banyak Koperasi dan UMK yang belum memenuhi standar daya saing	Memfasilitasi Pelatihan Kewirausahaan bagi wirausaha muda dan Keterampilan Olah Teknis (Menjahit)	
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan				Memfasilitasi penerbitan izin usaha dan sertifikat usaha dengan rincian sebagai berikut: - NIB : 1.012 umk - Sertifikat Halal : 211 UMK - HaKI : 12 UMK PIRT: 97 UMK	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	95%	8,55%	Usaha Mikro Kalah bersain dengan penjualan melalui e-commerce	Mengembangkan RUMOR (Rumah Inkubator) UMKM dan Launching pada Gebyar UMKM dan Koperasi Tahun 2024	
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orintasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			Pelaku UMK masih sangat bergantung pada bantuan modal usaha	Memberikan bantuan sarana usaha dan sarana produksi untuk UMK dengan total 143 unit barang yang diserahkan	

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Mewujudkan Perekonomian yang Mempunyai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100.00%	86.88%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
		Terpadu Satu Pintu	Daya Saing Tinggi						
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	89.53%	-	-	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	83.79%	-	-	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.00%	84.00%	-	-	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.00%	65.71%	Penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja	Akan diadakan evaluasi semua kegiatan yang tidak terealisasi agar bisa melakukan efisiensi	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
								anggaran sesuai dengan kebutuhan	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00%	91.95%	-	-	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.00%	99.92%	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	91.38%	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00%	83.81%	-	-	
				<b>Program Pengembangan</b>	<b>100.00%</b>	<b>86.74%</b>	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				<b>Iklm Penanaman Modal</b>					
				Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	80.98%	-	-	Terima kasih kepada Komisi III DPRD Kabupaten Muara Enim yang telah mendukung keberadaan MPP di Kabupaten Muara Enim dengan harapan akan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim termasuk memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD dan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									realisasi investasi di Kabupaten Muara Enim.
				Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100.00%	90.20%	-	-	
				<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>100.00%</b>	<b>71.18%</b>	-	-	
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	71.18%	Provinsi Sumatera Selatan tidak menyelenggarakan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Tingkat Provinsi tahun 2024 dan penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja.	Akan diadakan evaluasi semua kegiatan yang tidak terealisasi agar bisa melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
				<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	100.00%	66.89%	-	-	
				Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	100.00%	66.89%	Penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja	Akan diadakan evaluasi semua kegiatan yang tidak terealisasi agar bisa melakukan efisiensi anggaran sesuai dengan kebutuhan	Terkait dengan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM RI melalui aplikasi OSS RBA telah memberikan kemudahan dalam berinvestasi bagi pelaku usaha dengan penerbitan izin yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									<p>usaha secara online.</p> <p>DPMPSTSP telah melakukan kegiatan sosialisasi pemanfaatan aplikasi OSS RBA dalam hal penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha.</p> <p>Dalam hal penerbitan perizinan berusaha, pemerintah Kabupaten Muara Enim berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang</p>



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									berlaku. DPMPTSP telah melakukan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha bagi pelaku usaha melalui aplikasi OSS RBA.
				<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>100.00%</b>	<b>67.29%</b>	-	-	
				Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	67.29%	Belanja jasa Narasumber tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu dari narasumber yang direncanakan, dan penghematan dan efisiensi belanja	Akan diadakan evaluasi semua kegiatan yang tidak terealisasi agar bisa melakukan efisiensi anggaran	1. Terkait dengan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM RI



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
							khususnya biaya transportasi dan akomodasi Narasumber tidak dapat direalisasikan karena dilaksanakan secara daring/zoom	sesuai dengan kebutuhan	melalui aplikasi OSS RBA telah memberikan kemudahan dalam berinvestasi bagi pelaku usaha dengan penerbitan izin yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha secara online. DPMPTSP telah melakukan kegiatan sosialisasi pemanfaatan aplikasi OSS RBA dalam hal penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									<p>bagi pelaku usaha. Dalam hal penerbitan perizinan berusaha, pemerintah Kabupaten Muara Enim berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. DPMPTSP telah melakukan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha bagi pelaku usaha melalui aplikasi OSS RBA.</p> <p>2. Terima kasih</p>



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									<p>kepada Komisi III DPRD Kabupaten Muara Enim yang telah mendukung keberadaan MPP di Kabupaten Muara Enim dengan harapan akan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim termasuk memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD dan realisasi investasi di</p>



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
									Kabupaten Muara Enim.
				<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>100.00%</b>	<b>61.02%</b>	-	-	
				Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.00%	61.02%	Penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja	Akan diadakan evaluasi semua kegiatan yang tidak terealisasi agar bisa melakukan efisiensi anggaran.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			-	-	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	96.65%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	87.88%			
				Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	84.02%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%	99.68%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD	100%	99.98%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	93.91%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	83.57%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	100.00%			
				Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100%	98.87%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	16.58%	Karena adanya stressing dari Tim BPK untuk mengikuti Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	79.74%	Adanya Efisiensi Belanja		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	91.88%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	66.16%	Adanya Efisiensi Belanja		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	93.17%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	43.23%	Adanya Efisiensi Belanja		
				Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	4.57%	karena adanya stressing dari Tim BPK bahwa untuk kegiatan fasilitas kunjungan tamu (makanan dan minuman) hanya diperuntukan bagi tamu		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	59.03%	Adanya Efisiensi Belanja		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	96.50%			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Jasa Konsultan Pengawasan Gedung Kantor)	100%	99.71%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	49.43%	Adanya Efisiensi Belanja		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100%	84.37%			
				Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	100%	76.50%	Adanya Efisiensi Belanja		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	93.57%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	95.09%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	99.67%			
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					
				Penyadaran , Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					
				Koordinasi , Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan	100%	78.66%	1. dikarenakan honorer narasumber		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula			disesuaikan dengan SK keputusan Bupati untuk Narasumber yang diverifikasi oleh bagian hukum 2. SPPD Perjalanan menyesuaikan di kegiatan		
				Koordinasi , Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100%	70.38%	1. Terlambatnya pengesahan APBD tahun anggaran 2024 2. 1 tahun pertimbangan 2024 adalah tahun politik sehingga ada kekhawatiran untuk melaksanakan kegiatan, karena kegiatan		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>kepemudaan lebih banyak menghimpun/ melibatkan pemuda</p> <p>3. Harga satuan di SIPD tidak sinkron dengan realita harga pada saat realiasasi kegiatan kemudahan pada saat koordinasi penambahan SSH dengan tim Anggaran BPKAD</p>		
				<p>Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaran Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat Kabupaten/Kota</p>	100%	50.18%	<p>Honorer narasumber dianggarkan selama 6 bulan untuk setiap bulannya tetapi karena :</p> <p>1. SK Bupati</p>		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Narasumber belum turun sehingga hanya sisa direalisasikan selama 4 bulan 2. sisa hasil selama 4kali untuk gedung pertemuan dikarenakan menggunakan gedung pemerintah daerah (Bappeda dan Pemdes)		
				Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau Berprestasi	100%	52.44%	1. SK Beasiswa untuk SMA hanya bisa dicairkan selama 4 bulan dianggarkan 12 bulan dikarenakan : - . SK Pengesahan APBD terlambat - . SK		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Bupati 2. STAN berdasarkan tagihan 1 tahun tetapi realisasinya 1 semester (6 bulan) 3. STTD sudah dianggarkan 6 orang tahun 2024 tetapi setelah seleksi tidak ada yang lulus		
				Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	100%	63.20%	SPPD Perjalanan dinas menyesuaikan dengan kegiatan SK honorarium narasumber dan tim penguji disesuaikan dengan SK bupati yang diverifikasi		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dengan bagian hukum		
				Pemberdayaan dan Pembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					
				Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	100%	88.75%			
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					
				Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	100%	90.28%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	100%	97.58%			
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	100%	76.11%	Karena Perubahan rencana kegiatan dan pertandingan Muara Enim terhenti dengan Juara 4		
				Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	100%	36.29%	Perubahan jadwal dan panitia pelaksana menginformasikan bahwa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan Anggaran APBD		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Provinsi Sumsel Tahun 2024		
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi					
				Pemusatan Latihan Daerah, ilmu pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	100%	92.51%			
				Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	100%	82.52%			
				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	100%	91.54%			
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga					
				Pengembangan Organisasi Keolahragaan (HIBAH KONI)	100%	-	karena sudah berakhirnya kepengurusan masa jabatan organisasi Hibah KONI		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi					
				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	100%	32.16 %	1. kegiatan serupa banyak dilaksanakan bekerja sama dengan OPD dan instansi lain 2. efisiensi anggaran keuangan 3. kegiatan yang semula akan dilaksanakan oleh provinsi di kabupaten muara enim dengan alasan tertentu maka dialihkan di kabupaten lain 4. masa pilkada		
				Pengembangan Olahraga Wisata , Tantangan dan Petualangan	100%	0.88 %	1. tidak terlaksana dikarenakan peralatan utama		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							yaitu perahu yang tersedianya dalam kondisi layak pakai hanya 6 buah sedangkan untuk lomba tersebut dibutuhkan setidaknya 12 buah perahu 2. kondisi debit air sungai tidak mendukung 3. masa pilkada		
				Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat	100%	49.01%	1. Kegiatan harusnya dilakukan 2 seri akan tetapi untuk efisiensi anggaran keuangan maka dilaksanakan 1 seri 2. kegiatan secara fisik telah		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							terlaksana 100% 3. mendekati masa pilkada		
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan					
				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	100%	76.41%	Rencana monitoring kegiatan pramuka tingkat nasional berhubung kegiatan di pusat tidak terlaksana maka dari itu tidak dapat direalisasikan		
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan ( Hibah Pramuka )	100%	100.00%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	100%	50.08%	Pelaksanaan kegiatan	Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan	Komisi IV : Peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang mudah dijangkau masyarakat seperti penambahan IT dan jaringan desa melalui
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	97.37%	-	-	Tindak Lanjut : 1. Pembangunan gedung perpustakaan desa terdiri dari gedung yang tersebar di berbagai kecamatan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	90.86%	-	-	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	88.88%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	82.45%	-	-	yaitu desa ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas, Desa Gemawang Kecamatan Rambang Niru, Desa Karang Mulya Kecamatan Lubai dan Desa Ibul Kecamatan Belide Darat. 2. penyediaan buku elektronik dalam bentuk Aplikasi Muara Enim Digital Linrary (Medali) yang dapat diakses melalui Aplikasi Android. 3. Penambahan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	84.25%	-	-	
				Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.51%	-	-	
				Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	52.05%	-	-	
				Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	76.68%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>jaringan internet dalam bentuk WFI di perpustakaan. 4. Rencana pembuatan titik baca di areal publik atau tempat-tempat pelayanan publik seperti rumah sakit, mall pelayanan publik dll. 5. Untuk penambahan IT dan jaringan di desa akan dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo kewenangan yang memilikinya.</p>



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	100%	96.73%	Pelaksanaan kegiatan	Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan	Komisi IV : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim secara berkelanjutan telah melaksanakan program literasi yang berbasis inklusi sosial dengan melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap semua jenis perpustakaan seperti meningkatkan
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	88.88%	-	-	
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	79.51%	-	-	
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	100%	80.93%	Pelaksanaan kegiatan	Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota	100%	80.93%	-	-	standar dan kualitas perpustakaan serta melalui promosi melalui pelaksanaan festival literasi yang diadakan oleh dinas perpustakaan provinsi sumatera selatan. Dengan kegiatan inklusi sosial diharapkan pelayanan perpustakaan dapat meningkatkan kealitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	100%	90.61%	Pelaksanaan kegiatan	Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan	
				Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	100%	92.21%	-	-	
				Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	100%	89.63%	-	-	
				Pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota	100%	88.73%	-	-	
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN	100%	76.83%	Pelaksanaan kegiatan	Melaksanakan Rapat Monitoring	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PENYELAMATAN ARSIP				dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan	
				Pemusnahan arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	100%	65.50%	-	-	
				Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media kabupaten/kota	100%	90.33%	-	-	



### 3.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

**Tabel 3.3**  
**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan**  
**yang Dilaksanakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Urusan Pilihan	Dinas Perikanan			97.59%	82.17%			Komisi II menyarankan Dinas Perikanan agar dapat melakukan pemasaran bibit benih ikan lokal yang ada di Kabupaten Muara Enim dari kolam budidaya menjadi kolam khusus. dengan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									harapan untuk meningkatkan penghasilan para peternak ikan
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.00%	71.47%			Program pengembangan budidaya perikanan, komisi II menilai terhadap kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan harus optimal lagi sehingga target realisasi kinerja tercapai, untuk itu diperlukan perencanaan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									yang lebih baik.
				<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100.00%</b>	<b>71.47%</b>			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00%	58.90%			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.00%	79.37%			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.00%	56.33%			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100.00%	55.91%			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100.00%	47.31%			
				Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	84.56%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100.00%	77.17%			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	100.00%	63.91%			
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00%	86.06%			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.00%	81.53%			
				<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	50.00%	42.34%			
				Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.00%	84.67%			
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100.00%	73.93%			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.00%	77.45%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	97.68%			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.00%	62.90%			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00%	55.81%			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.00%	68.98%			
				Subkegiatan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.00%	55.18%			
				Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.00%	99.52%			
				<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100.00%</b>	<b>96.60%</b>			
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.00%	96.60%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100.00%	87.92%			
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00%	100.00%			
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	100.00%	60.97%			
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.00%	90.72%			
				Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00%	100.00%			
				<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100.00%	80.89%			
				Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100.00%	80.89%			
				Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi	100.00%	98.00%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	100.00%	93.68%			
				<b>Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	100.00%	95.78%			
				Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	100.00%	93.68%			
				Sub kegiatan Penjaminan Ketersedian Sarana Usaha Perikanan Tangkap	100.00%	97.87%			
				<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	100.00%	91.58%			
				Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	100.00%	93.41%			
				Sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan	100.00%	89.52%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil					
				sub kegiatan pelaksanaan fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha	100.00%	91.82%			
				<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>92.17%</b>	<b>75.42%</b>			
				<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>98.23%</b>	<b>79.40%</b>			
				Sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	100.00%	93.52%			
				Sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	100.00%	96.22%			
				Sub kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	100.00%	77.72%			
				Sub kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan	92.93%	50.14%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				<b>Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>86.11%</b>	<b>71.44%</b>			
				Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	88.79%	55.92%			
				Sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	99.36%	92.77%			
				Sub kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.39%	36.31%			
				Sub kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidaya Ikan di Darat	95.62%	90.09%			
				Sub kegiatan Perencanaan dan Pengembangan, Pemanfaatan Air	97.41%	82.11%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Untuk Pembudidaya Ikan di Darat					
				<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>98.19%</b>	<b>88.12%</b>			
				<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>94.58%</b>	<b>74.66%</b>			
				Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	94.58%	74.66%			
				<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>100.00%</b>	<b>93.34%</b>			
				Sub kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	100.00%	90.33%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.00%</b>	<b>96.35%</b>			
				Sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100.00%	96.51%			
				Sub kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100.00%	96.19%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 Dokumen	11,005,140,106.00	Kurangnya sarana dan Prasarana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penambahan sarana dan Prasarana di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Untuk tahun 2024 dinas pariwisata dan ekonomi kreatif telah mengusulkan tenaga teknis kepariwisataan baik CPNS & PPPK ke Bupati Muara Enim. Terkait penambahan anggaran pada tahun 2024 sudag di alokasikan oleh pemerintahan kabupaten Muara Enim sesuai dengan kemampuan daerah.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	158,439,628			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Dokumen	3,626,205,905			
				Adiministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Unit	11,542,500			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5 Paket	38,375,000			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		996,903,674			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32 Unit	5,334,088,000			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27 Laporan	624,899,524			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	214,685,875			
			Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa di Sektor Agribisnis, Agroindustri dan Agropolitan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		2,721,446,521			
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	79,970,165			
				Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	2 Unit, 2 Kawasan	2,535,463,706			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	1 Usaha Pariwisata	106,012,650			
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2 Dokumen	1,456,226,424			
				Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	1 Promosi	1,456,226,424			
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1 Dokumen	653,159,200			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	653,159,200			
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1 Laporan	102,478,822	Masih Kurangnya Pegawai / ASN Di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penambahan Pegawai/ ASN Di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	1 Laporan	102,478,822			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Pertanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa di Sektor Agribisnis, Agroindustri dan Agropolitan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		11,704,207,000.00	1. Alih Fungsi Lahan Sawah ke Lahan Non Pertanian	1. Pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dan direncanakan penyusunan Perda LP2B pada Tahun 2026	DPRD Kabupaten Muara Enim memandang bahwa komoditas Tanaman pangan memiliki peranan pokok dalam pemenuhan pangan. untuk itu produksi dan produktivitasnya tanaman pangan harus dilakukan secara integratif dari hulu hingga hilir. salah satu kendala yang dihadapi petani adalah



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									<p>pemenuhan kebutuhan sarana produksi. Untuk itu DPRD kabupaten Muara Enim meminta kepada Pemerintah daerah agar dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan bagi petani.</p>
				<p>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</p>	<p>100%, 1 Kegiatan</p>	<p>788,820,435.00</p>	<p>2. Pertumbuhan Produksi dan Produktivitas Belum Optimal</p>	<p>2. Analisis tentang kerentanan dampak perubahan iklim, inventarisasi dan peta wilayah yang terkena dampak, penyusunan road</p>	<p>Pembinaan terhadap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Muara Enim agar dapat ditingkatkan seperti peningkatan produk-produk</p>



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								map rencana aksi adaptasi dan tindakan perubahan iklim dan lingkungan. Selain itu perlu disiapkan berbagai teknologi adaptasi yang baik seperti varietas unggul, teknologi pengelolaan lahan dan air, pemupukan dan paket teknologi adaptasi perubahan iklim.	olahan dengan harapan masyarakat dapat menerima manfaat seperti program asuh dan program ahli gizi untuk anak - anak di sekolah yang ada di Kabupaten Muara Enim
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian sesuai dengan		321,985,200.00	3.Daya Saing Produk Tanaman Pangan dan	3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan	Untuk penyaluran pupuk yang bersubsidi dapat dilakukan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			Hortikultura Rendah	kelompok tani di desa dan kecamatan sehingga dengan semakin optimalnya kelompok tani, penyediaan produk pertanian secara berkelanjutan dan peningkatan peluang pasar dapat diwujudkan	melalui BUMDES sesuai dengan desa masing-masing.
				Belanja Barang dan Jasa		222,806,700.00	4. Permasalahan di bidang peternakan meliputi belum tersedia nya Rumah Potong Hewan, adanya penyakit hewan menular,	4.Melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kurangnya ketersediaan benih/bibit ternak	Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan penjaminan peredaran ternak di masyarakat melalui belanja yang diserahkan kepada masyarakat berupa ternak sapi, kambing, itik, dan ayam kepada poktan sehingga dapat menunjang pemenuhan produk hasil peternakan secara berkelanjutan. Selain itu,	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pembangunan Rumah Potong Hewan berserta Sarana dan prasarana pendukungnya akan dianggarkan kembali pada tahun 2024-2026 secara bertahap	
				Belanja Jasa Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Dana Penunjang 5% DAK Fisik Penugasan)	1 Paket	99,178,500.00			
				Pendampingan Penggunaan Sarana		466,835,235.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendukung Pertanian					
				Belanja Barang dan Jasa		340,114,335.00			
				Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat		126,720,900.00			
				-Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian		105,720,900.00			
				-Penanganan Inflasi Belanja Cabe Rawit	25 kg x 75 kali	7,000,000.00			
				-Penanganan Inflasi (Operasional)	75 kali	0			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-Penanganan Inflasi Belanja Cabe Merah	50 kg x 75 kali	14,000,000.00			
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhandan Mikro organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	100%, 1 Kegiatan	3,777,437,645.00			
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		456,452,639.00			
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman		1,442,598,876.00			
				Belanja Barang dan Jasa		458,969,853.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Belanja Barang untuk di jual/ diserahkan Kepada Masyarakat		933,745,623.00			
				Belanja Bahan Kimia/Pupuk Sayuran untuk Pemanfaatan Pekarangan		20,476,908			
				Belanja Bahan Kimia/Pupuk Tanaman Buah untuk Peningkatan Produksi		42,267,024			
				Belanja Bahan Kimia/Pupuk Tanaman Sayuran untuk Kegiatan Peningkatan Produksi		52,411,488			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Belanja Bahan Tanaman Sayuran Kegiatan Peningkatan Produksi		48,484,800			
				Belanja Benih/Bibit Tanaman Sayuran untuk Pemanfaatan Pekarangan		30,225,000			
				Belanja Benih Tanaman Sayuran untuk Peningkatan Produksi		199,622,000			
				Belanja Bibit Tanaman Buah untuk Peningkatan Produksi		114,050,000			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Diserahkan kepada Masyarakat di Kecamatan Sungai Rotan berupa Mulsa		53,954,880.00			
				Diserahkan kepada Masyarakat di Kecamatan Gelumbang berupa Mulsa		53,954,880.00			
				Pengadaan Benih Cabe dan Saprodi di Kecamatan Semende Darat Tengah		177,139,000.00			
				Pengadaan Benih Kentang dan Saprodi Kecamatan Semende Darat Tengah		62,395,100.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan Saprodi Sayuran Kecamatan Sungai Rotan		40,269,743			
				Pengadaan Bantuan Benih Sayuan dan Saprodi Kecamatan Gelumbang		38,494,800.00			
				Belanja Modal Bangunan Gazebo/pondok Kayu	2 Unit	49,883,400.00			
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan dan Tanaman		1,878,386,130.00			
				Belanja Barang dan Jasa		607,720,005.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</i>		1,270,666,125.00			
				Pengembangan areal tanaman pangan berupa insektisida	25 Ha x 3 L	13,736,250.00			
				Pengembangan areal tanaman pangan berupa Pupuk NPK	25 Ha x 100 kg	61,050,000.00			
				Pengembangan areal tanaman pangan berupa handraktor	1 unit	25,088,000.00			
				Pengembangan areal tanaman pangan berupa Power thresher		28,887,500.00			
				Pengembangan areal tanaman	25 Ha x 3 botol	5,619,375.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pangan berupa Pupuk Organik					
				Pengembangan areal tanaman pangan berupa Pupuk Urea	25 Ha x 100 kg	48,285,000.00			
				Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija berupa Benih Padi Sebar (BR)	1600 Ha x 25 Kg	544,000,000.00			
				Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija Berupa Benih Padi Sebar (Br)	1600 Ha x 25 Kg	544,000,000.00			
				Peningkatan Mutu dan Peredaran	100%, 1 Kegiatan	1,014,796,328.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota					
				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		1,014,796,328.00			
				Belanja Barang dan Jasa		268,725,935.00			
				Belanja Barang untuk di jual/diserahkan Kepada Masyarakat		266,875,000.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Benih pokok padi sawah	50 Ha x 25 Kg	28,125,000.00			
				- Fungisida, Insektisida, Pupuk NPK, Pupuk Urea	50 Ha x 2 Liter, 50 Ha x 2 Liter, 62 Ha x 100 Kg, 50 Ha x 100 Kg	238,750,000.00			
				Belanja Modal		479,195,393.00			
				- Rehab Pembangunan Gudang	1 Unit	129,779,385.00			
				- Rehab Pembangunan Lantai	1 Unit	149,990,751.00			
				- Rehab Pembangunan RMU dan Rumah Tunggu	1 Unit	199,425,257.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit ternak.		6,123,152,592.00			
				Pengawasan Produksi Benih/ Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan		914,589,697.00			
				Belanja Barang dan Jasa		704,354,100.00			
				<i>Belanja Modal</i>		210,235,597.00			
				- Aksesoris Traktor (Gerobak angkut)	1 Unit	15,300,000.00			
				- Rehab/ Perbaikan	3 Unit	194,935,597.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Rumah Petugas					
				Penjaminan Peredaran Benih/ Bibit Ternak		5,208,562,895.00			
				Belanja Barang dan Jasa		413,901,620.00			
				Belanja Barang untuk di jual/ diserahkan Kepada Masyarakat		4,794,661,275.00			
				-Budidaya Ternak ayam Buras	6 Kelompok Tani	329,040,000.00			
				- Budidaya Ternak Kambing	8 Kelompok Tani	492,000,000.00			
				- Budidaya Ternak Sapi	16 Kelompok Tani	2,751,200,000.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Mesin Pencacah Rumput	1 Unit	29,100,000.00			
				-Sarana dan Prasarana Kelompok Tani	8 Kelompok Tani	238,471,275.00			
				- Ternak Ayam (ABT)		326,250,000.00			
				- Mesin Pencacah Rumput (ABT)		111,600,000.00			
				- Ternak Kambing	2 Kelompok Tani	369,000,000.00			
				- Ternak Sapi (ABT)	4 Kelompok Tani	148,000,000.00			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		29,183,482,889.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengembangan Prasarana Pertanian	100%, 1 Kegiatan	6,880,215,961.00			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		342,606,223.00			
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan		6,537,609,738.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Berkelanjutan / LCP2B					
				Belanja Barang dan Jasa		119,708,900.00			
				Belanja Barang untuk di jual/ diserahkan Kepada Masyarakat		6,417,900,838.00			
				- Combine Harvester	1 Unit	449,600,000.00			
				- Motor Roda 3 /Bentor	3 Unit	116,700,000.00			
				- Cultivator	6 Unit	109,380,000.00			
				- Handtraktor	23 Unit	565,363,000.00			
				- Mulsa	-				



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Pembangunan Gudang RMU	1 Unit	199,998,538			
				- Pompa Air 3 Inchi	5 Unit	115,500,000.00			
				- Power tresher	5 Unit	150,000,000			
				- Traktor Roda 4	5 Unit	1,399,600,000.00			
				- Waring	100 Roll	45,143,300.00			
				Combine Harvester	1 unit	449,000,000.00			
				Motor Roda Tiga / Bentor	7 Unit	276,500,000.00			
				Jonder/Traktor Roda 4	4 unit	1,630,368,000.00			
				Pompa Air Irigasi	3 Unit	65,220,000.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Handtraktor	6 Unit	150,528,000.00			
				Traktor Roda 4	2 Unit	695,000,000.00			
				Pembangunan Prasarana Pertanian	100%, 1 Kegiatan	21,687,589,265.00			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		8,866,291,904.00			
				Belanja Barang dan Jasa		28,968,050.00			
				Belanja Barang untuk di jual/ diserahkan Kepada Masyarakat		8,837,323,854.00			
				-Lanjutan Pembangunan	130.59 Meter	69,781,422.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jalan Usaha Tani Desa Sugihan Kecamatan Rambang					
				-Pembangunan Jalan Usaha Tani Poktan Matang Gawangan Desa Aremantai Kecamatan SDU	130.59 Meter	69,999,523.00			
				- Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Dusun IV Ataran Karya Tani Desa Segamit Kecamatan SDU	130.59 Meter	69,778,240.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Lesung Batu Kecamatan Tanjung Agung	130.59 Meter	69,778,160.00			
				- Pembangunan Jalan Usaha Tani Poktan Mekar Sari Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim	130.59 Meter	69,994,677.00			
				- Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Tanjung Raman	130.59 Meter	69,999,699.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kecamatan Ujan Mas					
				- Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Bitis Kecamatan Gelumbang	130.59 Meter	69,999,793.00			
				- Pembangunan Jalan Usaha Tani Poktan Setuntut Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan	130.59 Meter	69,999,762.00			
				- Pembangunan Jalan Usaha Tani Poktan Bengkuang Desa Tanjung Serian	130.59 Meter	69,999,527.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kecamatan Muara Enim					
				- Pembangunan Jalan Usaha Tani Poktan Subur Tani Desa Paya Bakal Kecamatan Gelumbang	149.25 Meter	79,999,572.00			
				- Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Seleman Kecamatan Tanjung Agung	130.59 Meter	69,999,622.00			
				- Pembangunan Jalan Usaha Tani Poktan	332.68 Meter	178,319,495.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Lakaran Bersama Desa Padang Bindu Kecamatan Panang Enim					
				- Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Batu Surau Kecamatan Semende Darat Tengah	156.48 Meter	83,655,431.00			
				- Pembangunan Jalan Usaha Tani Poktan Padang Baru Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu	130.59 Meter	69,999,937.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Lebung Desa Pajar bulan Kecamatan SDU	298.50 Meter	159,992,734.00			
				- Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Berugo Kecamatan Belimbing	332.68 Meter	178,318,392.00			
				-Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Bulang Kecamatan Belimbing	130.59 Meter	69,998,034.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Lebak Budi Kec Panang Enim	332.68 Meter	177,764,829.00			
				- Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Penindaian Kec SDL	332.68 Meter	178,207,300.00			
				- Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Kelompok Tani Karya Utama Desa Kota Padang Kec. SDT	149.25 Meter	79,777,577.00			
				- Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha	149.25 Meter	89,999,630.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tani Desa Talang Nangka Kec, Lembak					
				- Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Tanjung Bulan Kec, Tanjung Agung	332.68 Meter	178,319,356.00			
				- Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Bedegung Kecamatan Panang Enim	298.50 Meter	159,999,769.00			
				- Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Pagar Jati Kecamatan Panang Enim	332.68 Meter	178,209,364.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Karya Nyata Kecamatan SDL	332.68 Meter	178,319,720.00			
				- Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Air Lintang Desa Padang Bindu Kecamatan Panang Enim	332.68 Meter	178,319,495.00			
				- Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Pematang Kisim Desa Sugihan Kecamatan	332.68 Meter	178,317,607.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tanjung Agung					
				- Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Talang Sawah Dusun V Desa Padang Bindu Kecamatan Panang Enim	332.68 Meter	177,765,050.00			
				- Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Pagar Gunung Kecamatan Lubai	167.91 Meter	89,888,841.00			
				- Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Pucuk Matang	298.50 Meter	159,445,209.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Desa Padang Bindu Kecamatan Panang Enim					
				- Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun IV Desa Segamit Kecamatan SDU	332.68 Meter	177,764,946.00			
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida	200 Meter	107,199,913.00			
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida	200 Meter	107,199,588.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Gedung Buruk Kecamatan Muara Belida	200 Meter	107,199,910.00			
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Pagar Dewa Kecamatan Tanjung Agung	373.13 Meter	199,785,218.00			
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Talang Pertama Desa Padang Bindu Kec. Panang Enim	373.04 Meter	199,833,675.00			
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran	373.13 Meter	199,999,936.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Padang Ringgis Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut					
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Talang Gudang Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut	373.13 Meter	199,999,614.00			
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Surabaya Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung	373.13 Meter	199,999,823.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Pondok Sepang Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung	373.13 Meter	199,999,499.00			
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Muara Dua Kecamatan Semende Darat Laut	373.13 Meter	199,999,749.00			
				Lanjutan Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Padang 1 Desa Penyandingan Kecamatan	373.13 Meter	199,999,728.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Semende Darat Laut					
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Pandan Enim Kec. Tanjung Agung	373.13 Meter	199,998,998.00			
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Tebat Cengal Dusun 4 Desa Padang Bindu Kec. Panang Enim	373.13 Meter	199,999,842.00			
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Kehinjing Desa Pagar Dewa (mulak) Kec.	373.13 Meter	199,999,674.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tanjung Agung					
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Belimbing Besi Desa Padang Bindu Kec. Panang Enim	373.13 Meter	199,999,683.00			
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Pagar Jati Kec. Panang Enim	373.13 Meter	199,998,961.00			
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Embawang Kec. Tanjung Agung	373.13 Meter	199,999,999.00			
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa	373.13 Meter	199,999,959.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tanjung Baru Kec. Panang Enim					
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Talang Kisim Desa Tanjung Bulan Kec. Tanjung Agung	373.13 Meter	199,999,466.00			
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Siring Kuning Desa Muara Meo Kecamatan Panang Enim	373.13 Meter	199,999,348.00			
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Rekimai Jaya Kec. SDT	200 Meter	107,199,732.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Tanjung Jati Kecamatan Muara Enim	200 Meter	107,199,642.00			
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Belimbing Kec. Belimbing	373.13 Meter	199,999,998.00			
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Selino Desa Lebak Budi Kec. Panang Enim	373.13 Meter	199,999,998.00			
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Iupeng Desa Lebak Budi	373.13 Meter	199,999,752.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kec. Panang Enim					
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Beringin Jaya 2 Desa Tebing Abang Kec. SDT	373.13 Meter	199,999,835.00			
				Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Ayek Gemuhuk Desa Tebing Abang Kec. SDT	373.13 Meter	199,999,997.00			
				Pembangunan jalan usaha tani desa tebing abang Kec. SDT	373.13 Meter	199,999,604.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembangunan ,Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit		240,000,000.00			
				Belanja Barang untuk di jual/ diserahkan Kepada Masyarakat		240,000,000.00			
				- Pembangunan /Rehabilitasi Dam Parit Poktan tani Usaha Maju Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	120,000,000.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Pembangunan /Rehabilitasi Dam Parit Poktan Matang Basung Desa Gunung Agung Kecamatan Semende Darat Tengah ( DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	120,000,000.00			
				<b>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya</b>		8,225,753,983.00			
				<i>Belanja Barang untuk di jual/diserahkan</i>		8,225,753,983.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<i>Kepada Masyarakat</i>					
				- Karung (DAK Fisik Penugasan)	3250 Lembar	19,139,250.00			
				- Mesin Jahit Karung ( DAK Fisik Penugasan)	13 Unit	44,415,540.00			
				-Timbangan ( DAK Fisik Penugasan)	13 Unit	77,470,918.00			
				- Mesin Cetak Pelet	13 Unit	449,800,000.00			
				-Mesin Penepung/ Mesin Disk Mill (DAK Fisik Penugasan)	13 Unit	826,800,000.00			
				- Motor Roda 3 ( DAK Fisik Penugasan)	13 Unit	519,938,250.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Alar dan Mesin Pendukung Olahan Pakan Konsentrat unggas ( DAK Fisik Penugasan)	13 Unit	220,300,000.00			
				-Mesin Mixer ( DAK Fisik Penugasan)	13 Unit	342,500,000.00			
				- Pembangunan Gudang Olahan Pakan Unggas Poktan Sumber Rezeki Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	199,993,341.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Pembangunan Gudang Olahan Pakan Unggas Poktan Karya Utama II Desa Gedung Buruk Kecamatan Muara Belida ( DAK Penugasan Fisik)	1 Unit	199,994,451.00			
				- Pembangunan Gudang Olahan Pakan Unggas Beringin Jaya Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida ( DAK	1 Unit	199,991,121.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penugasan Fisik)					
				- Pembangunan Gudang Olahan Pakan Unggas Sekundang Jaya Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida ( DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	199,993,341.00			
				- Pembangunan Gudang Olahan Pakan Unggas Poktan Mitra Tani Desa Patra Tani Kecamatan	1 Unit	199,973,805.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Muara Belida ( DAK Fisik Penugasan)					
				-Pembangunan Gudang Olahhan Poktan Gotong-royong I Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	199,994,451.00			
				-Pembangunan Gudang Olahhan Pakan Unggas Poktan Serasan Sekundang II Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida	1 Unit	199,994,445.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(DAK Fisik Penugasan)					
				- Pembangunan Gudang Olahan Pakan Unggas Poktan Lebak Jaya Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida ( DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	199,992,231.00			
				- Pembangunan Screen House Modern Pengembangan Hortikultura Komoditas Sayuran Poktan Tunas	1 Unit	476,900,000.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Harapan Desa Segayam Kecamatan Gelumbang (DAK Fisik Penugasan)					
				- Pembangunan Screen House Modern Pengembangan Hortikultura Sayuran Poktan Pancur II Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	499,600,000.00			
				- Pembangunan Screen House	1 Unit	474,900,000.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Modern Pengembangan Hortikultura Sayuran Poktan Sido Makmur Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang ( DAK Fisik Penugasan)					
				- Pembangunan Screen House Modern Pengembangan Hortikultura Sayuran Poktan Matang Basung Gunung Agung Kecamatan	1 Unit	474,900,000.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Semende Darat Tengah (DAK Fisik Penugasan)					
				- Pembangunan Screen House Modern Pengembangan Hortikultura Sayuran Poktan Babat Melake Desa Pangkalan Babat Kecamatan Empat Petulai Dangku (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	499,600,000.00			
				- Pembangunan Screen House Modern	1 Unit	499,600,000.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengembangan Hortikultura Sayuran Poktan Subur Tani Desa Paya Bakal Kecamatan Gelumbang ( DAK Fisik Penugasan)					
				- Pembangunan Gudang Olahan Pakan Unggas Poktan Doa Bersama Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	199,993,341.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Pembangunan Gudang Olahan Pakan Unggas Poktan Musi Mandiri Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	199,993,315.00			
				- Pembangunan Gudang Olahan Pakan Unggas Poktan Jaya Mulia Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	199,992,231.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-Pembangunan Gudang Olahan Pakan Unggas Poktan Sukses Bersama Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	199,993,341.00			
				- Pembangunan Gudang Olahan Pakan Unggas Poktan Usaha Bersama Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida (DAK Fisik Penugasan )	1 Unit	199,993,341.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembangunan Gudang Pakan Ternak Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul	1 Unit	199,997,270.00			
				<b>Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani</b>		4,210,826,185.00			
				Belanja Barang dan Jasa		21,569,000.00			
				<i>Belanja Barang untuk di jual/diserahkan Kepada Masyarakat</i>		4,090,189,685.00			
				-Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Tanaman Pangan Poktan	1 Unit	75,000,000.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Lebak Makmur I Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida (DAK Fisik Penugasan)					
				- Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Tanaman Pangan Poktan Mekar Jaya I Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	75,000,000.00			
				-Pembangunan Sprinkle Desa Rekimai Kecamatan		90,298,979.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Semende Darat Tengah					
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Kute Jaya Desa Pajar bulan Kec. SDU	40.62 M3	96,727,641.00			
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Dusun I Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku	37.92 M3	69,997,889.00			
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa	37.79 M3	89,888,582.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyandingan Kec. SDL					
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Ataran Lubuk Langsat Desa Paduraksa Kecamatan Tanjung Agung	33.59 M3	79,777,864.00			
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Padu Ringkih Desa Siring Agung Kecamatan SDU	29.39 M3	69,999,807.00			
				- Pembangunan	37.92 M3	89,997,188.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Jaringan Irigasi Tersier Desa Simpang Tanjung Kecamatan Belimbing					
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Air Melancar Desa Aremantai Kecamatan SDU	29.39 M3	69,999,705.00			
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Jambatan Panjang Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim	37.79 M3	89,999,455.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Tunjung Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim	33.59 M3	79,995,221.00			
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Himbe Hawang II Desa Kepur Kecamatan Muara Enim	29.39 M3	69,999,919.00			
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Lubuk Nipis Desa Tanjung	29.39 M3	69,767,721.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Agung Kecamatan Tanjung Agung					
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Himbe Pedare II Desa Tanjung Serian Kecamatan Muara Enim	29.39 M3	69,999,536.00			
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Sawah Panjang Desa Pulau Panggung Kecamatan SDL	29.39 M3	69,999,852.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Sungai Raman 1 Desa Tanjung Raman Kecamatan Muara Enim	29.39 M3	69,790,403.00			
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Sungai Bahu Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas	29.39 M3	69,999,829.00			
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Sri Mulya Desa Ujan Mas Lama	29.39 M3	69,999,996.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kecamatan Ujan Mas					
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Tunas Muda II Desa Tanjung Raman Kecamatan Ujan Mas	29.39 M3	69,999,840.00			
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Apit Jurai Desa Tenam Bungkuk Kecamatan SDT	29.39 M3	69,777,926.00			
				- Pembangunan Jaringan Irigasi	29.39 M3	69,999,829.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tersier Gapoktan Cinta Kasih Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujan Mas					
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Tebat Dalam Desa Palak Tanah Kecamatan SDT	29.39 M3	69,999,930.00			
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Mandiri Desa Danau Gerak Kecamatan SDU	29.39 M3	69,996,821.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Tebat Dalam 2 Desa Aremantai Kecamatan SDU	29.39 M3	69,999,930.00			
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Padang Ringkau Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim	29.39 M3	69,999,770.00			
				- Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Tanjung Raya 2 Desa Tanjung	33.59 M3	79,999,464.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Agung Kecamatan Tanjung Agung					
				Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Poktan Pematang Kandis Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim	29.39 M3	69,996,811.00			
				Pembangunan Embung Desa Kota Padang Kec. SDT	93.23 M3	199,999,998.00			
				Pembangunan Embung Desa Rekimai Jaya Kec. SDT	50 M3	107,126,514.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembangunan Embung Desa Tanjung Agung Kec. SDU	50 M3	107,255,758.00			
				Pembangunan Embung Desa Muara Tenang Kec. SDT	50 M3	107,259,998.00			
				Rehab Jaringan Irigasi Tersier Desa Palak Tanah Kec. SDT	50 M3	107,259,999.00			
				Pembangunan Saluran Irigasi Tersier Ataran Batu Balai Satu Desa Pandan Dulang Kec. Panang Enim	93.23 Meter	199,999,878.00			
				Rehab Jaringan Irigasi Tersier Danau Nipis	93.23 Meter	199,999,968.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Desa Tanah Abang Kec. SDL					
				Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Desa Tanding Marga Kec. Sungai Rotan	50 M3	107,259,864.00			
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Poktan Sawa Empang Desa Tanjung Serian Kecamatan Ujan Mas	1 Paket	49,883,400.00			
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Poktan Mekar Sari Kelurahan Muara Enim Kecamatan	1 Paket	49,883,400.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Muara Enim					
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Poktan Sungai Raman 4 Desa Tanjung Raman Kecamatan Ujan Mas	1 Paket	49,883,400.00			
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Poktan Mekar Tani Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim	1 Paket	49,883,400.00			
				Pembangunan Jaringan Irigasi	1 Paket	49,883,400.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Air Tanah Poktan Sumber Rezeki Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim					
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Poktan Tanjung Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim	1 Paket	49,883,400.00			
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Poktan Pematang Kandis Kelurahan	1 Paket	49,883,400.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Muara Enim Kecamatan Muara Enim					
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Poktan Serasi Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim	1 Paket	49,883,400.00			
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Poktan Serasan Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim	1 Paket	49,883,400.00			
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Poktan Ulak Himbe	1 Paket	49,883,400.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim					
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Poktan Kemburangan Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim	1 Paket	49,883,400.00			
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Poktan Darat Dusun Kelurahan Muara Enim Kecamatan	1 Paket	49,883,400.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Muara Enim					
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Poktan Harapan Maju Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim	1 Paket	49,883,400.00			
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Poktan Sungai Raman 1 Desa Tanjung Raman Kecamatan Ujan Mas	1 Paket	49,883,400.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Poktan Sungai Raman 2 Desa Tanjung Raman Kecamatan Ujan Mas	1 Paket	49,883,400.00			
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Poktan Sungai Raman 3 Desa Tanjung Raman Kecamatan Ujan Mas	1 Paket	49,883,400.00			
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah Poktan Setia	1 Paket	49,883,400.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim					
				Belanja Jasa Konsultasi Geolistrik	1 Paket	99,067,500.00			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan		144,717,193.00			
				Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%, 1 Kegiatan	615,677,663.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak		615,677,663.00			
				Belanja Barang dan Jasa		391,677,663.00			
				Belanja Modal		224,000,000.00			
				- Sarana IB		224,000,000.00			
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		982,069,099.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten /Kota	100%, 1 Kegiatan	667,970,399.00			
				Pelaksanaan Surveilens Penyakit Hewan dan Zoonosis Pada Hewan		667,970,399.00			
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan	100%, 1 Kegiatan	314,098,700.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Masyarakat Veteriner					
				Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		194,583,500.00			
				Belanja Barang dan Jasa		183,733,500.00			
				Belanja Barang untuk di jual/ diserahkan Kepada Masyarakat		10,850,000.00			
				Penanganan Inflasi		10,850,000.00			
				Pengawasan unit usaha hewan		119,515,200.00			
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGUL		641,525,512.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				ANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/kot a	100%, 1 Kegiatan	641,525,512.00			
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		253,468,722.00			
				Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)		255,796,490.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan					
				Belanja Barang dan Jasa		59,546,490.00			
				Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		196,250,000.00			
				Benih Kacang Tanah	5000 Kg	196,250,000.00			
				Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan		132,260,300.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Belanja Barang dan Jasa		43,779,600.00			
				Belanja Barang untuk di jual/ diserahkan Kepada Masyarakat		88,480,700.00			
				- Terpal Jemur	17 Lembar	30,380,700.00			
				- Power Thresher	2 Unit	58,100,000.00			
				PROGRAM PENYULUH PERTANIAN		2,228,398,195.00			
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100%, 1 Kegiatan	2,228,398,195.00			
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di		1,109,145,736.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kecamatan dan Desa					
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		165,180,551.00			
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian		954,071,908.00			
				Belanja Barang dan Jasa		54,132,000.00			
				Belanja Modal		899,939,908.00			
				- Pemasangan Plafon Puskesmas Gelumbang	1 Unit	59,999,998.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-Pemasangan Tralis dan Gorden Gelumbang	1 Unit	69,999,995.00			
				- Pembangunan Green House Program Jaksa Sahabat Pangan/ Program Forkopimda dalam Penanganan Inflasi Daerah	1 Unit	149,948,646.00			
				- Rehab BPP Beringin Kec. Lubai	1 Unit	149,999,997.00			
				- Rehab BPP Patra Tani Kec. Muara Belida	1 Unit	149,998,039.00			
				- Rehab BPP Pulau	1 Unit	99,998,494.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Panggung Kec. SDL					
				- Rehab BPP Sukarami Kec. Sungai Rotan	1 Unit	99,998,960.00			
				- Rehab/ Pembangunan Pagar BPP Pandan Enim Kec. Tanjung Agung	1 Unit				
				- Sarana Data dan Informasi BPP (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	49,995,782.00			
				-Perlengkapan Kantor Puskesmas Gelumbang	1 Unit	69,999,997.00			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN	100%	22,536,168,742.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PEMERINTAH DAERAH					
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	41,083,000.00			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3,870,000.00			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3,305,000.00			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	20,612,200.00			
				Koordinasi dan Penyusunan	1 Pokumen	6,924,000.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perubahan DPA-SKPD					
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2,519,800.00			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3,852,000.00			
				Administrasi Keuangan	100%	20,082,609,459.00			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/Bulan	20,022,943,459.00			
				Penyediaan Administrasi	2 Dokumen	25,410,000.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Tugas ASN					
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	34,256,000.00			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%, 1 Kegiatan	32,197,575.00			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	32,197,575.00			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%, 9 Orang, 1 Kegiatan	104,910,000.00			
				Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	104,910,000.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 Orang	1,127,264,647.00			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%, 1 Kegiatan	18,317,000.00			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		416,516,000.00			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor		156,780,990.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		8,880,000.00			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		14,160,000.00			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu		36,150,000.00			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		476,460,657.00			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	670,620,947.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		5,000,000.00			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		229,090,947.00			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		436,530,000.00			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%, 1 Kegiatan	477,483,114.00			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Pajak,		274,977,784.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan					
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		135,488,000.00			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		41,957,330.00			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	5 unit	25,060,000.00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				atau Bangunan Lainnya					

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26		Dinas Perkebunan	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa di Sektor Agribisnis, Agroindustri dan Agropolitan	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100.00%	100.0%	Kurangnya Personil Petugas Lapangan (PPL) di wilayah Kecamatan	Tersedianya alokasi penyediaan SDM untuk memenuhi kebutuhan Petugas Lapangan (PPL) untuk wilayah-wilayah yang belum ada Petugasnya	'Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024 telah mengikuti dan berperan serta dalam Event-Event Promosi Hasil Produksi Perkebunan baik itu di Tingkat Nasional



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									maupun di Tingkat Regional diantaranya Gelaran Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) di ICE BSD Tangerang, KTNA Agro Expo Tahun 2024 di Tabanan - Bali, Pameran Terpadu Investasi-Perdagangan Pertanian-Koperasi UMKM dan Pariwisata Tahun 2024 di Batam



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Kepulauan Riau dan Festival Kopi Lahat 2024 (Regional) di Lahat - Sumatera Selatan
			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>Perencanaan, Penanganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100.00%	100.00%	Kurangnya Sarana Transportasi (Mobil Dinas) untuk Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan	Tersedianya alokasi anggaran untuk penyediaan Sarana Transportasi (Mobil Dinas) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan	'Pada Tahun 2024, Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim melakukan langkah besar untuk mewujudkan pengembangan bibit unggul perkebunan lokal yang spesifik lokasinya merupakan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									varietas unggul lokal yaitu Pohon Induk Terpilih Kopi Gerudak Semendo dengan bekerjasama dengan Pusat Standarisasi Instrumen (PSI) Perkebunan Bogor, yang harapannya kedepannya tercapainya rencana pembangunan Kebun Entress Kopi dan Kebun Produksi Kopi di Desa



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu
				Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Peningkatan Produksi Perkebunan	Tersedianya alokasi anggaran untuk memenuhi Sarana dan Prasarana Pendukung Peningkatan Hasil Produksi Perkebunan dengan skala prioritas	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung	Tersedianya alokasi anggaran untuk	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Peningkatan Mutu Produksi Perkebunan	memenuhi Sarana dan Prasarana Pendukung Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan yang sesuai dengan anjuran	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kurangnya Pelatihan Kapasitas SDM Petugas Lapangan (PPL)	Tersedianya alokasi anggaran untuk Pelatihan Kapasitas SDM Petugas Lapangan (PPL)	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kurangnya Pelatihan	Tersedianya alokasi anggaran	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kapasitas untuk Petani Pekebun	untuk Pelatihan Kapasitas untuk Petani Pekebun	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35 Dokumen	35 Dokumen			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Prangkat Daerah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Jenis Polis Asuransi	1 Jenis			
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Dokumen Laporan BMD	1 Dokumen Laporan BMD			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	4 Orang			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	2 Kali	2 Kali			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis Komponen Listrik	7 Jenis Komponen Listrik			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21 Jenis Peralatan Kebersihan	21 Jenis Peralatan Kebersihan			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21 Jenis Alat Tulis Kantor	21 Jenis Alat Tulis Kantor			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	6 Jenis Barang Cetakan	6 Jenis Barang Cetakan			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Jenis Surat Kabar	4 Jenis Surat Kabar			
				Fasilitas Kunjungan Tamu	8 Notulen Rapat	8 Notulen Rapat			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen Perjalanan Dinas	12 Dokumen Perjalanan Dinas			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19 Unit	19 Unit			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	4 Jenis Jasa Layanan	4 Jenis Jasa Layanan			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis Service	1 Jenis Service			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Dokumen Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Dokumen Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00 %</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan. Dinas Operasional atau Lapangan	2 Jenis Jasa Pemeliharaan Kendaraan	2 Jenis Jasa Pemeliharaan Kendaraan			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	3 Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Jenis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>			
				<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00 %</b>			
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2 Jenis Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Jenis Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Jenis Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Jenis Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100.00%	100.00%			
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Jenis Kegiatan Peningkatan SDG Tanaman	1 Jenis Kegiatan Peningkatan SDG Tanaman			
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Jenis Kegiatan Pemanfaatan SDG Tanaman	1 Jenis Kegiatan Pemanfaatan SDG Tanaman			
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman	100.00%	100.00%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Pakan Ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>					
				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil.	425 Ha Peremajaan Karet	425 Ha Peremajaan Karet			
				<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>			
				<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pertanian Pendukung Lainnya	1 Dokumen (12 Event Promosi, 1 Kegiatan Fasilitasi	1 Dokumen (12 Event Promosi, 1 Kegiatan Fasilitasi			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					UPPB dan UPH Kopi)	UPPB dan UPH Kopi)			
				<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.17%</b>			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	45,5 KM Pembukaan Jalan Produksi	45,5 KM Pembukaan Jalan Produksi			
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>			
				<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>100.00%</b>	<b>75.00%</b>			
				<b>Penerbitan Izin Usaha pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten Kota</b>	<b>100.00%</b>	<b>75.00%</b>			
				Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>			
				<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>			
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Urusan Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>PROGRAM PENJUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100%	<b>97.68%</b>			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	<b>97.68%</b>			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>	100%	<b>100.00%</b>			
				Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	<b>100.00%</b>	Komisi II Yang Mengingatkan Dinas Perdagangan Membedangi Pertambangan		Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tentang Panas Bumi, ada 2 (dua) pemanfaatan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Untuk Segera Melakukan Inventarisir Dan Kajian Terhadap Pemanfaatan Panas Bumi Yang Ada Di Kabupaten Muara Enim Dan Dilaporkan Ke Komisi Teknis		panas bumi, yakni Pemanfaatan Langsung dan Pemanfaatan Tidak Langsung. Pemanfaatan Langsung yakni kegiatan perusahaan pemanfaatan panas bumi secara langsung tanpa melakukan proses perubahan dari energi panas/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik seperti untuk wisata air panas/pemandian air panas di Kabupaten Garut dan tempat



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									lainnya untuk roasting kopi, untuk pengolahan gula aren, pasteurisasi media tanam, pengeringan produk pertanian dan yang lainnya. Saat ini kami dari Disperindag ESDM telah membuat kajian (study kelayakan) untuk pemanfaatan langsung untuk akses keekonomian di tahun anggaran 2024. Kedepannya akan dibuatkan rencana untuk pembuatan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Design Engineering Detail (DED) untuk pemanfaatan langsung panas bumi. Kendala untuk pemanfaatan langsung saat ini adalah lokasi yang ada untuk pemanfaatan langsung berada di Lokasi Kawasan Hutan Lindung (HL), dimana untuk mendapatkan akses mengelola pemanfaatan langsung ini harus memiliki Izin Pinjam Pakai



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Kawasan Hutan dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan koordinasi yang intensif untuk perizinan tersebut
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	100%	<b>97.74%</b>			
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	<b>97.74%</b>			
				<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	100%	<b>55.53%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100%	55.53%	Komisi II menyarankan agar Dinas Perdagangan lebih mengoptimalkan pemanfaatan ruang petak pasar inpres yang kosong agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan ruang / petak tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.		Terkait optimalisasi penggunaan ruang petak pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah, Pihak eksekutif sependapat dengan masukan Komisi II DPRD Kabupaten Muara Enim. saat ini dilakukan beberapa langkah dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah, antara lain : 1. Penataan serta revitalisasi gedung B (Pasar



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Inpres) dan gedung C masuk dalam program kegiatan skala prioritas Kabupaten Muara Enim 1. Membangun tangga penghubung antara Gedung B (Pasar Inpres) dengan Gedung A pada tahun 2025; 2. Dilakukan evaluasi kembali pengguna ruang/petak yang kosong.
				<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	100%	<b>84.86%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100%	84.86%			
				<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	100%	93.29%			
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	93.29%			
				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100%	90.74%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan	100%	91.18%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	<b>89.41%</b>			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	<b>38.81%</b>			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	<b>98.30%</b>			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	<b>100.00%</b>			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	<b>89.12%</b>			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	<b>94.04%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	100%	<b>99.10%</b>			
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100%	<b>99.10%</b>			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	100%	<b>98.17%</b>			
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	<b>98.17%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada pimpinan daerah dan perangkat daerah.	Penataan Administrasi Pemerintahan	80%	72.03%	Realisasi Belanja ATK pada sub kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan yang terserap tidak mencapai target karena menyesuaikan dengan Satuan Harga pada aplikasi e-catalog, sedangkan Belanja perjalanan dinas disesuaikan dengan kebutuhan.	PPTK harus lebih teliti memperhitungkan kebutuhan anggaran sub kegiatan dan kemungkinan terealisasinya anggaran pada tahun berikutnya. Satuan Harga yang tertera di aplikasi e-catalog harus dijadikan acuan dalam menganggarkan Belanja pada sub kegiatan tersebut.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	80%	55.86%	Belanja Bahan Cetak dan Belanja ATK yang tidak terealisasi sebagian, hal tersebut disebabkan karena PPTK sebelumnya tidak mengurangi dana Belanja tersebut pada saat pengajuan pagu APBD Perubahan 2024. Selain itu juga karena tidak adanya koordinasi antara PPTK lama dengan PPTK baru	Setiap aparatur harus menaati peraturan yang berlaku dan setiap Bagian harus lebih saling mengawasi terkait pekerjaan dan tanggung jawab yang saling berkaitan. Dalam hal ini Plt. Kabag Perencanaan dan Keuangan seharusnya tidak boleh menunjuk staf sebagai PPTK sementara Fungsional Muda yang seharusnya menjabat masih ada, karena bertentangan dengan PERmendagri	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							mengenai saldo pagu anggaran dan kondisi sub kegiatan yang dilanjutkan.	nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Begitu juga Bagian Hukum yang memverifikasi berkas SK penunjukannya, harus lebih teliti dalam memeriksa berkas pengajuan SK yang masuk. Selanjutnya koordinasi antar sub Bagian harus berjalan baik dan konflik <i>interest</i> harus dihindari untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	80%	72.01%	Belanja Bahan Cetak khususnya Penggandaan yang tidak terealisasi sebagian, hal tersebut disebabkan karena PPTK sebelumnya tidak mengurangi dana Belanja tersebut pada saat pengajuan pagu APBD Perubahan 2024. Selain itu juga karena tidak adanya koordinasi antara PPTK lama dengan	Setiap aparatur harus menaati peraturan yang berlaku dan setiap Bagian harus lebih saling mengawasi terkait pekerjaan dan tanggung jawab yang saling berkaitan. Dalam hal ini Plt. Kabag Perencanaan dan Keuangan seharusnya tidak boleh menunjuk staf sebagai PPTK sementara Fungsional Muda yang seharusnya menjabat masih ada, karena bertentangan dengan Permendagri	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							PPTK baru mengenai saldo pagu anggaran dan kondisi sub kegiatan yang dilanjutkan.	nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Begitu juga Bagian Hukum yang memverifikasi berkas SK penunjukannya, harus lebih teliti dalam memeriksa berkas pengajuan SK yang masuk. Selanjutnya koordinasi antar sub Bagian harus berjalan baik dan konflik interest harus dihindari untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	80%	79.39%	Realisasi perjalanan dinas sudah sesuai dengan kebutuhan / volume perjalanan dinas	PPTK harus lebih teliti memperhitungkan kebutuhan anggaran sub kegiatan dan kemungkinan terealisasinya anggaran pada tahun berikutnya. Jika diperkirakan target realisasi tidak akan tercapai pada pertengahan tahun, dana anggaran harus dikurangi pada Perubahan APBD yang proses input dan waktunya telah ditetapkan.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80%	74.70%	Realisasi belanja benda pos sesuai dengan kebutuhan, dan realisasi pembayaran gaji Pegawai Non PNS sesuai dengan jumlah yang ada	PPTK harus lebih teliti memperhitungkan kebutuhan anggaran sub kegiatan dan kemungkinan terealisasinya anggaran pada tahun berikutnya. Jika diperkirakan target realisasi tidak akan tercapai pada pertengahan tahun, dana anggaran harus dikurangi pada Perubahan APBD yang proses input dan waktunya telah ditetapkan.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	80%	76.85%	Realisasi pembayaran listrik, jasa komunikasi dan air sesuai dengan pemakaian (tagihan)	PPTK harus lebih teliti memperhitungkan kebutuhan anggaran sub kegiatan dan kemungkinan terealisasinya anggaran pada tahun berikutnya. Jika diperkirakan target realisasi tidak akan tercapai pada pertengahan tahun, dana anggaran harus dikurangi pada Perubahan APBD yang proses input dan waktunya telah ditetapkan.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	80%	71.37%	Penyediaan jasa peralatan kantor berupa sewa tenda, kursi dan lain-lain disesuaikan dengan volume kegiatan.	PPTK harus lebih teliti memperhitungkan kebutuhan anggaran sub kegiatan dan kemungkinan terealisasinya anggaran pada tahun berikutnya. Jika diperkirakan target realisasi tidak akan tercapai pada pertengahan tahun, dana anggaran harus dikurangi pada Perubahan APBD yang proses input dan waktunya telah ditetapkan.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80%	60.64%	Realisasi Penyediaan jasa pelayanan umum sesuai dengan jumlah Pegawai Non ASN yang ada.	PPTK harus lebih teliti memperhitungkan kebutuhan anggaran sub kegiatan dan kemungkinan terealisasinya anggaran pada tahun berikutnya. Jika diperkirakan target realisasi tidak akan tercapai pada pertengahan tahun, dana anggaran harus dikurangi pada Perubahan APBD yang proses input dan waktunya telah ditetapkan.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	80%	79.05%	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan	PPTK harus lebih teliti memperhitungkan kebutuhan anggaran sub kegiatan dan kemungkinan terealisasinya anggaran pada tahun berikutnya. Jika diperkirakan target realisasi tidak akan tercapai pada pertengahan tahun, dana anggaran harus dikurangi pada Perubahan APBD yang proses input dan waktunya telah ditetapkan.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah realisasinya	80%	36.78%	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah untuk gaji Pegawai Non ASN disesuaikan dengan jumlah Pegawai Non ASN yang ada	PPTK harus lebih teliti memperhitungkan kebutuhan anggaran sub kegiatan dan kemungkinan terealisasinya anggaran pada tahun berikutnya. Anggaran yang tidak terserap dengan nominal yang besar mengindikasikan kinerja PPTK tidak melakukan prosedur penganggaran kas dengan baik, sehingga PPTK harus mampu meningkatkan kinerjanya.	



### 3.1.4 Fungsi Penunjang

**Tabel 3.4**  
**Pelaksanaan Fungsi Penunjang**  
**yang Dilaksanakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29		Sekretariat DPRD	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	96.10%	-	-	-
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	30.34%	kebutuhan barang dan jasa sudah sesuai kebutuhan	evaluasi kebutuhan dan penyesuaian pada tahun	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								anggaran berikutnya	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	48.35%	kebutuhan barang dan jasa sudah sesuai kebutuhan	evaluasi kebutuhan dan penyesuaian pada tahun anggaran berikutnya	-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	35.10%	kebutuhan barang dan jasa sudah sesuai kebutuhan	evaluasi kebutuhan dan penyesuaian pada tahun anggaran berikutnya	-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	100%	0.00%	kebutuhan barang dan jasa sudah sesuai kebutuhan	evaluasi kebutuhan dan penyesuaian pada tahun anggaran berikutnya	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	100%	0.00%	kebutuhan barang dan jasa sudah sesuai kebutuhan	evaluasi kebutuhan dan penyesuaian pada tahun anggaran berikutnya	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	51.24%	kebutuhan barang dan jasa sudah sesuai kebutuhan	evaluasi kebutuhan dan penyesuaian pada tahun anggaran berikutnya	-
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	96.26%	-	-	-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	96.27%	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	0.00%	kebutuhan barang dan jasa sudah sesuai kebutuhan	evaluasi kebutuhan dan penyesuaian pada tahun	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								anggaran berikutnya	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	41.35%	kebutuhan barang dan jasa sudah sesuai kebutuhan	evaluasi kebutuhan dan penyesuaian pada tahun anggaran berikutnya	-
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	100%	95.29%	-	-	-
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	95.29%	-	-	-
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	72.90%	pendidikan dan pelatihan telah sesuai dengan kebutuhan ASN	evaluasi kebutuhan dan penyesuaian pada tahun anggaran berikutnya	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	72.90%	pendidikan dan pelatihan telah sesuai	evaluasi kebutuhan dan	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dengan kebutuhan ASN	penyesuaian pada tahun anggaran berikutnya	
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	97.09%	-	-	-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100.00%	-	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	98.13%	-	-	-
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	90.00%	-	-	-
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	88.47%	-	-	-
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	96.07%	-	-	-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	100%	65.71%	kebutuhan bahan bacaan sudah sesuai dengan kebutuhan	evaluasi kebutuhan dan penyesuaian pada tahun	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								anggaran berikutnya	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	96.67%	-	-	-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	98.43%	-	-	-
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	94.12%	-	-	-
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	45.56%	kebutuhan barang dan jasa sudah sesuai kebutuhan	evaluasi kebutuhan dan penyesuaian pada tahun anggaran berikutnya	-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	92.94%	-	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	53.94%	kebutuhan barang dan jasa sudah sesuai kebutuhan	evaluasi kebutuhan dan penyesuaian pada tahun	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								anggaran berikutnya	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	97.45%	-	-	-
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	91.10%	-	-	-
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	96.81%	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	99.99%	-	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	58.84%	kebutuhan barang dan jasa sudah sesuai kebutuhan	evaluasi kebutuhan dan penyesuaian pada tahun anggaran berikutnya	-
				<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	100%	96.31%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	100%	97.71%	-	-	-
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100%	0.00%	Pimpinan dan anggota DPRD belum berkenan untuk melaksanakan medical check-up	evaluasi kebutuhan dan penyesuaian pada tahun anggaran berikutnya	-
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100%	82.68%	-	-	-
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	0.00%	Tidak terdapat pengajuan raperda inisiatif dewan sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan	Melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas agenda tahunan dewan pada tahun anggaran terkait.	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	100%	0.00%	Tidak terdapat pengajuan raperda inisiatif dewan sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan	Melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas agenda tahunan dewan pada tahun anggaran terkait.	-
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	100%	0.00%	Tidak terdapat pengajuan raperda inisiatif dewan sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan	Melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas agenda tahunan dewan pada tahun anggaran terkait.	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	100%	0.00%	Tidak terdapat pengajuan raperda inisiatif dewan sehingga tidak ada kegiatan yang dilaksanakan	Melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas agenda tahunan dewan pada tahun anggaran terkait.	-
				<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	100%	91.67%	-	-	-
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	100%	91.67%	-	-	-
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	100%	91.67%	-	-	-
				<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	100%	13.43%			-
				Kunjungan Kerja Dalam Daerah	100%	0.00%	Tidak terdapat kegiatan yang	Melaksanakan rapat koordinasi	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							diagendakan oleh pimpinan dan anggota DPRD untuk kunjungan kerja dalam daerah	untuk membahas agenda tahunan dewan pada tahun anggaran terkait.	
				Pelaksanaan Reses	100%	20.69%	Adanya transisi dari DPRD Periode 2019-2024 ke DPRD Periode 2024-2029 membuat 1 dari 3 kegiatan reses tidak dapat dilaksanakan.	-	-
				Fasilitasi Tugas DPRD	100%	84.26%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	84.26%	Perubahan dari Perpres 53 Tahun 2023 (Pembayaran Perjalanan Dinas secara Lumpsum) ke Perpres 33 Tahun 2020 (Pembayaran Perjalanan Dinas secara at cost) menimbulkan kesulitan pencapaian target realisasi anggaran.	-	-
							-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30		Badan Kesbangpol	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	83,28%	-	-	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	78,62%	Dikarenakan padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan di Kesbangpol Kab. Muara Enim	Akan diperbaiki di tahun mendatang	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	79,17%	Dikarenakan terjadinya perpindahan ASN di Kesbangpol Kab. Muara Enim	Akan diperbaiki di tahun mendatang	-
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	90,61%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	82,59%	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,33%	98,07%	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	78,81%	Dikarenakan sesuai pemakaian air, listrik di Kesbangpol Kab. Muara Enim	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	89,22%	-	-	-
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%	95,56%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%	95,56%	-	-	-
				<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	100%	99,75%	-	-	-
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Domokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	100%	99,75%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik					
				<b>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	100%	97,38%	-	-	-
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	97,38%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</b>	100%	94,56%	-	-	-
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100%	94,56%	-	-	-
				<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>	100%	96,23%	-	-	-
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan	100%	96,23%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Perencanaan	Bappeda	Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota</b>	100%	86,55%	-	-	
			Peningkatan pelaksanaan CSR PKBL	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	92,04%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perencana	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	89,46%	-	-	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	80,30%	-	-	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	66,32%	Dikarenakan padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan di Bappeda Kab. Muara Enim	Akan diperbaiki di tahun mendatang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	85,21%	-	-	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	97,56%	-	-	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	100%	88,41%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemerintah Daerah					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	93,08%	-	-	
				<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	100%	84,52 %	-	-	
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	85,10 %	-	-	
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	80,44 %	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	88,02 %	-	-	
				<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	100%	89,66 %	-	-	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	84,93 %	-	-	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100%	88,26 %	-	-	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	95,81 %	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Urusan Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daeah</b>	100%	<b>50.15%</b>			Rekomendasi Komisi II : Transparansi dan infomasi sistem alur keuangan daerah yang menurut Komisi II perlu kinerja OPD terkait baik yang diperuntukkan sesama instansi maupun terhadap masyarakat.
				<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	<b>92.49%</b>			Rekomendasi Komisi II : Transparansi dan infomasi



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									sistem alur keuangan daerah yang menurut Komisi II perlu kinerja OPD terkait baik yang diperuntukkan sesama instansi maupun terhadap masyarakat.
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	91.48%			Melakukan efisiensi pelaksanaan kegiatan
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	93.90%			Melakukan survey harga sebelum pelaksanaan kegiatan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	91.99%			Mengurangi anggaran yang tidak digunakan pada saat penyusunan RAPBD-P agar penyerapan anggaran lebih maksimal.
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%	93.10%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	90.29%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	94.18%			
				<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	<b>47.92%</b>			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	47.58%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	90.09%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	78.62%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	84.60%			
				<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	100%	<b>84.04%</b>			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	84.04%			
				<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	<b>11.90%</b>			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	11.90%			
				<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	<b>84.35%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	90.38%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	90.05%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	83.54%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	88.96%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	78.36%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	67.07%			
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	<b>79.48%</b>			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	78.25%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	88.18%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	70.12%			
				<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	<b>90.59%</b>			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	87.94%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	93.78%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	39.98%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	79.00%			
				<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	100%	<b>62.18%</b>			
				<b>Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	100%	<b>62.18%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyusunan Standar Harga	100%	69.13%			
				Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	59.53%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	68.41%			
				Penilaian Barang Milik Daerah	100%	59.12%			
				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	88.76%			
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%	54.95%			
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	54.59%			
				<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	100%	<b>96.83%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	100%	<b>90.72%</b>			
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	100%	89.78%			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%	81.92%			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%	99.27%			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%	82.38%			
				<b>Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	100%	<b>79.51%</b>			
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%	78.77%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%	58.19%			
				Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	100%	81.82%			
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%	41.96%			
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	52.06%			
				<b>Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	100%	<b>83.93%</b>			
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	100%	83.00%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%	67.44%			
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%	88.42%			
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	89.30%			
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	90.61%			
				Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	97.26%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	97.26%			
				<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	0.00%	<b>0.00%</b>			
				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	0%	0.00%			
				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0%	0.00%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 oleh Badan Kepegawaian Negara RI yang baru dirilis pada Bulan September 2024 terhadap 6.871 ASN, IP ASN Kabupaten Muara Enim mendapatkan nilai 77,57 dengan	Mengupayakan Peningkatan jenjang/tingkat pendidikan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui peningkatan program tugas belajar bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.	BKPSDM telah membentuk Panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), namun belum mendapat rekomendasi dari Mendagri untuk pelaksanaan seleksinya.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>kategori sedang dengan rentang nilai antara 71-80.dari hasil pengukuran terdapat 3 (tiga) dimensi dengan nilai rata-rata baik yaitu Dimensi Kinerja (24,99) dengan bobot penilaian 30% , Dimensi Disiplin (5) dengan bobot penilaian 5% dan Dimensi Kualifikasi (21,46) dengan bobot penilaian 25%,</p>		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							sedangkan untuk 1 (satu) dimensi dengan nilai rata rendah yaitu Dimensi Kompetensi (26,12) dengan bobot 40%, tidak tercapainya target kinerja tersebut dikarenakan untuk kegiatan peningkatan kompetensi aparatur telah dilaksanakan namun belum berjalan secara maksimal dikarenakan		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi lebih rendah dibanding jumlah ASN yang ada.		
				<b>Pendapatan</b>				Mengupayakan peningkatan kegiatan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan fungsional, serta pelatihan teknis dan kegiatan pengembangan lainnya bagi Aparatur di lingkungan pemerintah	BKPSDM telah berkoordinasi dengan BKN dalam penerimaan CPNS dan PPPK, dan berhasil mendapatkan alokasi formasi PNS sebanyak 856 dan PPPK sebanyak 6.414 serta diizinkan untuk



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								kabupaten Muara Enim.	melakukan optimalisasi terhadap formasi belum terisi sehingga penyerapan penerimaan pegawai baru dapat dimaksimalkan.
				Hasil Retribusi Daerah				Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan kedinasan, terutama pembangunan gedung diklat.	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				Menerapkan cascading kinerja kedalam perjanjian	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								kinerja individu.	
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja ASN.	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Bulan			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	-			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan			
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan			
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
				Pemulangan Pegawai yang Pensiun	270 Orang	289 Orang			
				Pemindahan Tugas ASN	120 Orang	71 Orang			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Orang	12 Orang			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13 Paket	13 Paket			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62 Paket	62 Paket			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35 Paket	35 Paket			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10 Paket	10 Paket			
				Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	102 Laporan			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	2 Unit	2 Unit			
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	800 Laporan	800 Laporan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Laporan	3 Laporan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	16 Laporan	14 Laporan			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	1 Unit			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit			
				<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>					
				<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>					
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen			
				<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>					
				Pengelolaan Mutasi ASN	25 Dokumen	71 dokumen			
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dokumen	1108 Dokumen			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan Promosi ASN	575 Dokumen	293 dokumen			
				<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>					
				Peningkatan Kapasitas Kinerja	1 Orang	1 Orang			
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	55 Orang	30 Orang			
				<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>					
				Pembinaan Disiplin PNS	1 Laporan	1 Laporan			
				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>					
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>					
				<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	9 Laporan	16 Laporan			
				Pembinaan , Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan.	1 Dokumen	1 Dokumen			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34		Inspektorat Kabupaten	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	88.69%	Disiplin dan Integritas yang masih rendah.	Pengendalian/ melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pengawasan.	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	55.38%	Pemahaman aparatur terkait perkembangan teknologi informasi masih rendah.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam teknis pengawasan melalui pengikutsertaan dalam diklat sertifikasi keahlian dan diklat teknis pengawasan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								yang diselenggarakan oleh instansi terkait.	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	91.99%	Kemampuan personil Auditor/P2UPD untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu masih terbatas.	Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	79.81%	Kemampuan personil Auditor/P2UPD yang memberikan bimbingan/konsultasi kepada Organisasi Perangkat Daerah masih terbatas.		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	98.77%	Tidak tercapainya target persentase temuan BPK terhadap APBD dikarenakan terdapat temuan	Guna meminimalisir persentase temuan BPK terhadap APBD	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pemeriksaan yang signifikan yaitu aspek pelaksanaan kontrak/kegiatan pada temuan kekurangan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak pekerjaan Belanja Modal pada Lima SKPD dan aspek pembayaran dan pertanggungjawaban pada realisasi belanja perjalanan dinas pada 23 SKPD tidak sesuai ketentuan. Kemudian, terdapat kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan pada penyusunan laporan keuangan,	kedepannya perlu memperkuat pengendalian intern pada setiap perangkat daerah.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pendapatan, belanja, dan aset.		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	90.26%	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti tidak sesuai target dikarenakan masih berproses penagihan/evaluasi tindak lanjut terhadap temuan yang memiliki nominal/nilai material. Selain itu, objek pemeriksaan kurang kooperatif/tidak merespon dalam percepatan penyelesaian hasil pemeriksaan (rekomendasi).	a. Melibatkan pihak Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Muara Enim untuk melakukan pendampingan penagihan melalui perdata/tata usaha negara. b. Melakukan evaluasi berkala terhadap tindak lanjut temuan dengan melakukan stressing ulang agar segera	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								menindaklanjuti. c. Melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak/objek yang belum menindaklanjuti hasil temuan audit serta meminta pernyataan tanggung jawab mutlak (SKTJM).	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	57.63%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	73.79%			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	93.51%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	100%	68.14%			
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	100%	72.38%			
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	61.87%			
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	100%	29.40%			
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	21.47%			
				Pendampingan dan Asistensi	100%	61.87%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35		Badan Pendapatan Daerah	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa di Sektor Agribisnis, Agroindustri, dan Agropolitan	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	100%	83.88%	Hambatan a) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib pungut. • Sebagian wajib pajak perdesaan masih enggan menyetorkan langsung ke Kas Daerah atau Bank terdekat yang telah ditunjuk. • Wajib Pajak dalam menyampaikan data mengenai objek dan subjek pajak	Melakukan sosialisasi penyuluhan tentang Pajak Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait.	Melakukan koordinasi dan konfirmasi serta sosialisasi kepada perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Muara Enim melalui Dana Hibah Peran Serta sebagai amanat Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Peran Serta Badan Usaha, Masyarakat dan Luar Negeri untuk peningkatan pemanfaatan di Kabupaten Muara Enim.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>masih belum akurat/transparan sehingga masih perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap objek pajak di lapangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wajib pungut pajak daerah masih ada yang belum melakukan pemungutan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							b) Kondisi ekonomi masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian besar masyarakat Kabupaten Muara Enim hidup dari mata pencaharian pertanian, rendahnya harga jual hasil pertanian dan perkebunan mengalami penurunan.</li> <li>• Masyarakat wajib pajak lebih mengutamakan kebutuhan</li> </ul>		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							primer untuk kelangsungan kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak sekolah. c) Akurasi data subjek dan objek pajak. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data wajib pajak yang belum akurat.</li> <li>• Adanya wajib pajak yang sudah tidak berada di alamat terdaftar.</li> <li>• Masih adanya objek pajak ganda, tidak ada</li> </ul>		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							objek dan keberatan.		
			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>Perencanaan, Penganggaran &amp; Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	90.33%	2) Kendala a) Database Pajak Daerah yang masih harus disempurnakan. b) Lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak. c) Kurangnya SDM aparatur yang berkualifikasi perpajakan. d) Masih rendahnya	Melakukan kerja sama dengan Kantor Pos, Bank Sumsel Babel dan Bank BRI untuk melayani penerimaan pembayaran Pajak Daerah terutama PBB-P2 dan BPHTB.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Daerah.</p> <p>e) Subjek Pajak Daerah berada di luar daerah sehingga sulit untuk melakukan penagihan pajak.</p> <p>f) Pada tahun anggaran 2024 terdapat objek ganda tidak ada objek dan subjek sebanyak 1.766 SPPT dengan nilai Rp124.323.284,</p>		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							00 maka penerimaan Pendapatan PBB P2 belum mencapai target yang telah ditetapkan pada APBD. g) Penerimaan pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah, terutama dari sektor Pajak Daerah khususnya PBB P2 masih mengalami hambatan dan kendala, dalam		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pelaksanaan penerbitan SPPT PBB P2 masih terdapat objek ganda, tidak ada objek dan keberatan. Penagihan PBB P2 khususnya Perdesaan sebagian besar harus dilakukan secara langsung oleh petugas Badan Pendapatan Daerah, UPTB Pendapatan dengan cara Door-to-Door ke desa-		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							desa/kelurahan, masih banyak masyarakat perdesaan yang enggan menyetorkan pembayaran PBB P2 langsung ke Kas Daerah atau Bank terdekat yang telah ditunjuk untuk menerima setoran PBB P2 dan masih rendahnya kesadaran wajib pajak karena kurang mengertinya manfaat dari		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>pembayaran Pajak serta alasan masalah ekonomi. Pada saat petugas Badan Pendapatan Daerah dan UPTB Pendapatan melakukan penagihan Door-to-Door banyak ditemui masyarakat Perdesaan sedang tidak ada di rumah.</p> <p>h) Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah</p>		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kabupaten Muara Enim menerbitkan SPPT PBB P2 sebanyak 162.557 lembar dengan jumlah ketetapan Rp16.754.375.763,00, terdapat objek ganda dan tidak ada objek sebanyak 1.766 SPPT dengan jumlah ketetapan sebesar Rp124.323.284,00 maka perlunya pembaruan database pajak agar tidak ada		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							lagi SPPT dengan objek ganda maupun tidak ditemukan objeknya.		
				Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	100%	90.06%		Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim dengan PT Bank Pembangunan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Muara Enim Tanggal 7 Januari 2019 Nomor 900/09/Bape nda-I/2019, 900/35/BPKA D-2/2019 dan 010/MRE/1/B/ 2019 tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah secara Online Pemerintah Kabupaten Muara Enim.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	90.06		Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dengan PT Pos Indonesia (Persero) Tanggal 7 Januari 2019 Nomor 900/09/Bapenda-I/2019, 25/REG3/JK RJ/HK/ 0119 tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pemerintah Kabupaten Muara Enim.	
				Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	100%	92.18%		Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Tanggal 7 Januari 2019 Nomor 900/09/Bapenda-I/2019, 92/180.2-16.03/1/2019 tentang	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Muara Enim.	
				Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	91.93%		Melakukan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Tanggal 23 Mei 2019 Nomor 35/MOU/Bap peda/ 2019, 269/100-16.03/V/2019 tentang Kerja Sama di Bidang Pertanahan	
				Koordinasi & Penyusunan Lap Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	90.92%		Melakukan Kesepakatan Bersama Antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tanggal 23 Mei 2019 Nomor Kep-329/WPJ.03/2019, 34/MOU/Bappeda/2019 Tentang Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi.	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	84.09%		Menerbitkan Surat Edaran Bupati Muara	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Enim Tanggal 10 Juni 2019 Nomor 973/1114/BA PENDA-III/2019 tentang Pelaporan dan Pembayaran Transaksi Pajak Hiburan Melalui Sistem Online.	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	79.16%		Menerbitkan Surat Edaran Bupati Muara Enim Tanggal 31 Januari 2020 Nomor 973/04/BAPE NDA-II/2020 tentang Kewajiban Wajib Pajak	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								dan Wajib Pungut yang Telah Dipasang/ Terintegrasi Alat Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Web Services (Transaction Monitoring Device) di Hotel, Restoran, Hiburan, Rumah Makan, Kantin dan Warung dalam Kabupaten Muara Enim.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	78.83%		Menerbitkan Surat Bupati Muara Enim Tanggal 23 Maret 2020 Nomor 970/0309/X.B apenda-II/2020 tentang Pengintegrasian Alat Perekam Transaksi E-Tax/TMD.	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	100%	99.54%		Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih dengan Pemerintah	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kabupaten Muara Enim Tanggal 30 Juli 2019 Nomor Kep.068/WPJ.03/KP/2019, 970/60/Bapenda-I/PKS/2019 tentang Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	91.01%		Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Muara Enim Tanggal 13 Desember 2019 Nomor 900/43/Bapenda-I/2019, 900/96/BPKA	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								D-2/2019, B.7070-KC-IV/12/2019 tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemerintah Kabupaten Muara Enim secara Online.	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	91.01%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	4.49%			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	4.49%			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	97.84%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100%	99.60%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99.50%			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	98.51%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	91.53%			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	98.90%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	66.89%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	60.63%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	99.68%			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	95.16%			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	95.03%			
				Pengadaan Mebel	100%	96.01%			
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	90.47%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	76.53%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	83.95%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	95.00%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	98.88%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	100%	97.11%			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	99.39%			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	100%	92.51%			
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	100%	96.24%			
				<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	100%	96.24%			
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100%	93.02%			
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	100%	99.79%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100%	77.87%			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100%	98.11%			
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100%	99.45%			
				Pengolahan, Pemeliharaan & Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100%	99.62%			
				Penilaian Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	100%	90.00%			
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	100%	99.17%			
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100%	98.47%			
				Penagihan Pajak Daerah	100%	95.46%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100%	92.03%			
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	100%	99.79%			
				Pembinaan & Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%	95.07%			

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Urusan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100%	75.85%			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	80.52%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	81.10%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	94.50%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	82.68%			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	94.39%			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%	60.34%	Adanya perubahan pencetakan DPA-SKPD Tahun 2024.	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan (efisiensi).	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	67.38%	Perbedaan antara pagu anggaran SIPD dengan nilai riil lapangan.	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan (efisiensi).	
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>77.72%</b>			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	77.60%	Pengangkatan Pejabat Eselon III sudah	Penggunaan anggaran	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							memasuki bulan Juli 2024.	sesuai kebutuhan.	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	75.85%	Perbedaan antara pagu anggaran SIPD dengan nilai riil lapangan.	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan (efisiensi).	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%	90.04%			
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>98.36%</b>			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	99.46%			
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	95.18%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	29.81%			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	29.81%	Pemberian tugas untuk mengikuti Diklat/ Bimtek disesuaikan dengan kebutuhan.	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan (efisiensi).	
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	64.87%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	77.02%	Perbedaan antara pagu anggaran SIPD dengan nilai riil lapangan.	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan (efisiensi).	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	92.89%			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	78.30%	Perbedaan antara pagu anggaran SIPD	Penggunaan anggaran sesuai	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dengan nilai riil lapangan.	kebutuhan (efisiensi).	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	74.83%	Perbedaan antara pagu anggaran SIPD dengan nilai riil lapangan.	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan (efisiensi).	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	99.81%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	100%	89.00%			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	99.95%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	44.78%	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan (efisiensi).	Efisiensi anggaran	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah	100%	98.65%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	95.48%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pedukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	99.65%			
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>93.30%</b>			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	85.92%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>85.98%</b>			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	100%	26.84%	Estimasi kebutuhan	Penghematan anggaran	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan			pemeliharaan kendaraan terlalu tinggi.		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	85.20%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	99.97%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	96.06%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	99.24%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Program Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>	100%	63.57%			
				<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	100%	59.33%			
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	100%	52.74%	Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan.	Efisiensi anggaran	
				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	100%	55.37%	Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan.	Efisiensi anggaran	
				Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	100%	67.94%	Penggunaan anggaran disesuaikan dengan	Efisiensi anggaran	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kebutuhan riil kegiatan.		
				<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>62.34%</b>			
				Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100%	37.72%	Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan.	Efisiensi anggaran	
				Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	100%	67.05%	Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan.	Efisiensi anggaran	
				Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	100%	77.57%	Penggunaan anggaran disesuaikan dengan	Efisiensi anggaran	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kebutuhan riil kegiatan.		
				Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	100%	51.46%	Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan.	Efisiensi anggaran	
				Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	100%	67.29%	Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan.	Efisiensi anggaran	
				<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>100%</b>	<b>68.83%</b>			
				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100%	64.96%	Penggunaan anggaran disesuaikan dengan	Efisiensi anggaran	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kebutuhan riil kegiatan.		
				Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	78.77%	Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan.	Efisiensi anggaran	
				<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>100%</b>	<b>64.53%</b>			
				Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100%	67.75%	Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan.	Efisiensi anggaran	
				Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	100%	58.36%	Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan.	Efisiensi anggaran	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	100%	54.53%	Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan.	Efisiensi anggaran	
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100%	70.54%	Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan.	Efisiensi anggaran	
				Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	100%	68.33%	a. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan riil kegiatan.	a. Efisiensi anggaran	
							b. Alokasi dana belanja pendaftaran HAKI untuk masyarakat belum	b. Koordinasi dengan Bagian Hukum terkait payung	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dilaksanakan terkait belum adanya Perda/Perbup mengatur hal tersebut.	hukum pemberian dana pendaftaran HAKI untuk masyarakat.	



### 3.1.5 Urusan Kecamatan

**Tabel 3.5**  
**Pelaksanaan Kecamatan**  
**di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Semende Darat Ulu	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	100%	<b>89.19%</b>			.
				<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	<b>61.88%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	66.16%			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	0.00%			
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	<b>88.44%</b>			
				Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	100%	89.03%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	100%	49.57%			
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	100%	<b>95.20%</b>			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	94.59%			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	96.00%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	100.00%			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100.00%			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	100.00%			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	78.00%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	99.70%			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	92.23%			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	98.99%			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	64.00%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	98.15%			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	0.00%			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	74.49%			
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	100%	<b>99.46%</b>			
				Pengadaan Mebel	100%	100.00%			
				Honor Pejabat Pengadaan	100%				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	98.48%			
				Honor Pejabat Pengadaan	100%	100.00%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan gedung Kantor dan Peralatan atau Bangunan Lainnya	100%	99.53%			
				Honor Pejabat Pengadaan	100%	100.00%			
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	<b>70.91%</b>			
				Peyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	98.93%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	65.43%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	69.44%			
				<b>Pemeiharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	<b>95.91%</b>			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	100%	80.12%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100.00%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	99.08%			
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	100%	<b>92.97%</b>			
				<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	100%	<b>100.00%</b>			
				Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	100%	100.00%			
				<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang</b>	100%	<b>87.85%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Dilimpahkan Kepada Camat</b>					
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100%	92.19%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaist dengan Non Perizinan	100%	92.19%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	80.44%			
				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	100%	<b>95.46%</b>			
				<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	100%	95.46%			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	100%	100.00%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	83.39%			
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	100%	<b>92.55%</b>			
				<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah</b>	100%	<b>92.55%</b>			
				Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memaantkan pengamalan pancasila pelaksanaan UUD RI 1945, Pelestarian Bhinika Tunggal Ika serta peertahanan dan	100%	90.03%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan RI.					
				Pelaksanaan tugas forum koordinasi di Kecamatan	100%	97.92%			
				<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	100%	<b>85.59%</b>			
				<b>Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100%	<b>91.23%</b>			
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	91.91%			
				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100%	81.91%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Semende Darat Tengah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	77%			Tidak ada
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Pemerintah Daerah	100%	99%			Tidak ada
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	99%			Tidak ada
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	99%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99%			Tidak ada
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	67%			Tidak ada
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	67%	Kekurangan Pegawai (banyak kekosongan jabatan) di Kantor Kecamatan Semende Darat Tengah	Mengajukan usulan penambahan pegawai ke BKPSDM Kabupaten Muara Enim	Tidak ada
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	99%			Tidak ada
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%	98%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	78%			Tidak ada
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	78%			Tidak ada
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	55%			Tidak ada
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100%			Tidak ada
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	0	Kegiatan Diklat sudah dibiayai oleh Dinas yang bersangkutan sehingga anggaran yang ada tidak habis terpakai	Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut akan mengikuti kegiatan bimtek dan diklat	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	94%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	98%			Tidak ada
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	96%			Tidak ada
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	89%			Tidak ada
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	93%			Tidak ada
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	45%	dalam kegiatan tersebut masih belum dioptimalkan dikegiatan makan dan minum tidak seluruhnya diambil dikarenakan sudah ada	Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut akan dioptimalkan dalam anggaran tahun berikutnya	Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dimasukan dalam kegiatan makan dan minum kegiatan rutin sehingga anggaran yang ada tidak habis terpakai		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%			Tidak ada
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			Tidak ada
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%			Tidak ada
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	96%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%			Tidak ada
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	65%			Tidak ada
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99%			Tidak ada
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%			Tidak ada
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99%			Tidak ada
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	95%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	99%			Tidak ada
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	99%			Tidak ada
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%			Tidak ada
				Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	100%	74 Unit	Banyak ditemukan titik-titik lampu jalan yang tidak kunjung diperbaiki	Perbaikan titik-titik lampu yang rusak sesuai dengan usulan/laporan Kepala Desa	Mengusulkan penambahan anggaran agar titik lampu jalan yang rusak dapat diperbaiki lebih banyak
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	100%	99%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dilimpahkan kepada Camat					
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100%	100%			Tidak ada
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	100%	100%			Tidak ada
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	99%			Tidak ada
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	87%			Tidak ada
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	87%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	98%			Tidak ada
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	83%			Tidak ada
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	46%			Tidak ada
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	46%			Tidak ada
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	100%	46%	Dalam kegiatan tersebut penggunaan ATK belum Maksimal,	Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut akan dioptimalkan dalam	Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Vertikal di Wilayah Kecamatan			Belanja makan minum kegiatan tidak digunakan seluruhnya sehingga anggaran tidak terpakai sepenuhnya	anggaran tahun berikutnya	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	85%			Tidak ada
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	85%			Tidak ada
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	100%	93%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	62%	Kegiatan Rapat Kordinasi belum dialokasikan secara maksimal sehingga alokasi anggaran belum terserap sepenuhnya	Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut akan dioptimalkan dalam anggaran tahun berikutnya	Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	94%			Tidak ada
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	94%			Tidak ada
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	95%			Tidak ada
				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100%	86%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Semende Darat Laut	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>PROGRAM KECAMATAN</b>	100%	87.65%	-	-	
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100%	88.23%	-	-	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	82.71%	Dalam kegiatan tersebut penggunaan ATK belum Maksimal	Untuk tahun selanjutnya kegiatan tersebut direncanakan memaksimalkan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Penggunaan ATK	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	85.85%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	0.00%	Dalam kegiatan tersebut untuk pembayaran asuransi kendaraan dinas dikarenakan kendaraan yang akan diasuransikan dalam keadaan rusak dan dalam tahap perbaikan/ service	Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut untuk tahun berikutnya akan dibayarkan asuransinya dan mobil dinas tersebut sudah bisa digunakan lagi untuk operasional kecamatan	
				Kegiatan Administrasi	100%	0.00%	Kegiatan Diklat sudah dibiayai	Dalam Upaya mengatasi	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kepegawaian Perangkat Daerah			oleh Dinas yang bersangkutan sehingga anggaran yang ada tidak habis terpakai	permasalahan tersebut akan mengikuti kegiatan bimtek dan diklat	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	80.81%	Dalam kegiatan tersebut Komponen listrik dikantor kecamatan masih dalam keadaan baik dan masih bisa dipergunakan	Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut akan dioptimalkan lagi dan semua komponen listrik akan dipelihara semua	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100.00%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	96.81%	-	-	
				<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	100%	<b>94.80%</b>	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100.00%	-	-	
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	88.84%	-	-	Untuk Kegiatan Pemeliharaan Lampu Jalan di Kecamatan Semende Darat Laut sudah ada dianggarkan pemeliharaan lampu jalan dan kegiatan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									tersebut sudah dilaksanakan
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	100%	<b>99.82%</b>	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	83.27%	dalam kegiatan tersebut masih belum dioptimalkan dikegiatan makan dan minum tidak seluruhnya diambil dikarenakan sudah ada dimasukan dalam kegiatan makan dan minum kegiatan rutin sehingga	Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut akan dioptimalkan dalam anggaran tahun berikutnya	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							anggaran yang ada tidak habis terpakai		
				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	<b>81.58%</b>	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	81.58%	Dalam kegiatan tersebut penggunaan ATK belum Maksimal	Untuk tahun selanjutnya kegiatan tersebut direncanakan memaksimalkan Penggunaan ATK	
				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	<b>90.37%</b>	-	-	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	100%	90.37%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penugasan Kepala Daerah					
				<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100%	0.00%	-	-	
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	0.00%	dalam kegiatan tersebut masih belum dioptimalkan dikarenakan kegiatan tersebut tidak ada yang mengkoordinir	Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut akan dioptimalkan dalam anggaran tahun berikutnya	



No		Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
40		Unsur Kewilayahan	Kecamatan Tanjung Agung	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	98%	-	-	Terhadap rekomendasi DPRD kepada OPD Kecamatan, maka Kecamatan Tanjung Agung telah menganggarkan Pemeliharaan Lampu Jalan sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) titik di tahun 2024 dengan capaian output sebesar 100 %
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100%	100%			



No		Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kinerja Perangkat Daerah					
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%			
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	85%			
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			



No		Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%			
					Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%			
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	100%	100%			



No		Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
					yang Dilimpahkan Kepada Camat					
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	98,6%			
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	98,6%			
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	100%	100%			
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%			
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%			



No		Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%			
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%			
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Lawang Kidul	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	82.75%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	41.54%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	82.15%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	43.20%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	37.50%	Terdapat Kegiatan yang tidak terealisasi dikarenakan waktu penambahan dana dan pelaksanaan terlalu mepet dengan akhir tahun.		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	91.57%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	100%	95.66%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	96.38%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	83.23%			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	96.39%			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	95.21%			
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum	100%	98.78%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat.	100%	94.58%			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	75.67%			
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	91.59%			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	61.05%			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	85.78%			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	85.78%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sesuai Penugasan Kepala Daerah.					
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.	100%	0%			
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.	100%	0%			

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Muara Enim	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional,	<b>PROGRAM KECAMATAN</b>	100%	<b>87.23%</b>	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik						
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100%	<b>83.96%</b>	-	-	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	91.36%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	80.13%	Kekurangan Pegawai (banyak kekosongan jabatan) baik di KantorKecamatan maupun kelurahan	Mengajukan usulan penambahan pegawai ke BKPSDM Kabupaten Muara Enim	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100%	49.98%	Mobil dinas sekretaris camat belum terdaftar asuransinya	Mendaftarkan asuransi mobil dinas sekretaris camat	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0.00%	Kurangnya minat pegawai yang mengikuti bimtek/ diklat/ pelatihan dan banyak juga bimtek/ diklat/ pelatihan sudah dianggarkan pada dinas terkait	Memberi pengarahan kepada pegawai untuk mengikuti bimtek/ diklat/ pelatihan	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	93.22%	-	-	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	95.33%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	100%	98.34%	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	81.10%	-	-	
				<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	100%	<b>91.93%</b>	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan	100%	96.61%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sarana Pelayanan Umum					
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	82.71%	-	-	
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	100%	<b>93.76%</b>	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	80.44%	-	-	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	97.06%			
				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan</b>	100%	<b>80.85%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Ketertiban Umum</b>					
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	80.85%			
				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	<b>76.33%</b>	-	-	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	76.33%	-	-	
				<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100%	<b>73.40%</b>	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	73.40%	Administrasi pemerintahan desa dan administrasi keuangan (spj) desa masih banyak yang belum sesuai aturan yang berlaku	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa dan administrasi keuangan secara berkala.	

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Ujan Mas	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	76%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pelayanan Publik						
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	27%	Dalam kegiatan tersebut penggunaan ATK belum Maksimal	Untuk tahun selanjutnya kegiatan tersebut direncanakan memaksimalkan Penggunaan ATK	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	72%	Belum terisinya beberapa jabatan di kantor camat, menyebabkan beberapa tugas pokok di beberapa bidang harus tumpang tindih dibidang yang lain, besar harapan kami	Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut kami sudah mengusulkan ke BKPSDM Kabupaten Muara Enim	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							untuk penambahan pegawai di kantor camat Ujan Mas.		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	59%	Kegiatan Diklat sudah dibiayai oleh Dinas yang bersangkutan sehingga anggaran yang ada tidak habis terpakai	Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut akan mengikuti kegiatan bimtek dan diklat	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	97%	-	-	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan	100%	93%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemerintahan Daerah					
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	98%	-	-	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	96%	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	Masih Banyak Ditemukan Titik-Titik Lampu Jalan yang Rusak tidak Kunjung diperbaiki		Telah dianggarkan dan diperbaiki untuk titik-titik Lampu Jalan yang Rusak
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	100%	89%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dilimpahkan kepada Camat					
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	100%	<b>73%</b>	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	73%	Ada beberapa kegiatan yang tidak sempat dilaksanakan dikarenakan bertabrakan dengan pemilu dan pilkada	Pelaksanaan Kegiatan akan dimaksimalkan lagi	
				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	<b>72%</b>	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	72%	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan maksimal	Akan dianggarkan sesuai kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	94%	-	-	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	94%	-	-	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	17%	-	-	
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	17%	Ada beberapa kegiatan yang tidak sempat dilaksanakan dikarenakan bertabrakan dengan pemilu dan pilkada	Pelaksanaan Kegiatan akan dimaksimalkan lagi	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Benakat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	92%	-	-	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	66%	Dalam kegiatan tersebut penggunaan ATK belum Maksimal	Untuk tahun selanjutnya kegiatan tersebut direncanakan memaksimalkan Penggunaan ATK	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	92%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100%	0%	dalam kegiatan tersebut terdapa asuransi kendaraan dinas yang belum dilaksanakan karena jatuh tempo	untuk tahun selanjutnya kegiatan tersebut akan dialihkan kepada kegiatan yg lain yg lebih prioritas	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	33%	Kegiatan Diklat sudah dibiayai oleh Dinas yang bersangkutan sehingga anggaran yang ada tidak habis terpakai	Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut akan mengikuti kegiatan bimtek dan diklat	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	91%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	84%	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	89%	-	-	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	86%	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	90%	-	-	terhadap rekomendasi DPRD kepada OPD Kecamatan,



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									maka Kecamatan Benakat telah menganggarkan program pemeliharaan lampu jalan sebanyak 50 (Lima Puluh) buah di tahun 2024 dengan capaian output nya sebesar 100 persen.
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	90%	-	-	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	90%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	90%			
				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	<b>84%</b>	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	84%			
				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	<b>94%</b>	-	-	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	<b>94%</b>	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	41%	-	-	
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	41%	Ada beberapa kegiatan yang tidak sempat dilaksanakan dikarenakan bertabrakan dengan pemilu dan pilkada	Pelaksanaan Kegiatan akan dimaksimalkan lagi	

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Gunung Megang	Mewujudkan Tata	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	87.29%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Daerah Kabupaten/Kota					
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	98.33%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%			
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	1012 Unit	Masih banyak ditemukan titik-titik lampu jalan yang rusak tidak kunjung diperbaiki	Memperbaiki titik-titik lampu yang rusak sesuai dengan usulan/laporan Kepala Desa/Lurah	terhadap rekomendasi DPRD kepada OPD Kecamatan, maka Kecamatan Gunung Megang telah menganggarkan Program pemeliharaan lampu jalan di Tahun 2024 dengan capaian output nya sebesar 100 Persen



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%			
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%			
				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%			
				Program Penyelenggaraan Urusan	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemerintahan Umum					
				Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%			
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Rambang Niru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>PROGRAM KECAMATAN</b>	100%	<b>95.21%</b>	-	-	Terhadap Program Pemeliharaan lampu jalan diseluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim masih banyak di temukan titik titik lampu jalan yang rusak tidak kunjung diperbaiki
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100%	<b>94.14%</b>	-	-	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	100%	77.71%	Dalam kegiatan tersebut penggunaan	Untuk tahun selanjutnya kegiatan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			ATK belum Maksimal	tersebut direncanakan memaksimalkan Penggunaan ATK	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	92.22%	Adanya pegawai yang pindah tugas dan Belum terisinya beberapa jabatan di kantor camat, menyebabkan beberapa tugas pokok di beberapa bidang harus tumpang tindih di bidang yang lain, besar harapan kami untuk penambahan	Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut kami sudah mengusulkan ke BKPSDM Kabupaten Muara Enim	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pegawai di kantor camat Ujan Mas.		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	95.61%	Kegiatan Diklat sudah dibiayai oleh Dinas yang bersangkutan sehingga anggaran yang ada tidak habis terpakai	Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut akan mengikuti kegiatan bimtek dan diklat	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	99.83%	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	100%	99.34%	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan	100%	98.18%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemerintahan Daerah					
				<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	100%	<b>99.16%</b>	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	99.11%	-	-	
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	99.21%	-	-	
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	100%	<b>99.82%</b>	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	99.82%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	<b>97.08%</b>	-	-	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	97.08%	-	-	
				<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100%	<b>99.89%</b>	-	-	
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	99.89%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Lubai	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>PROGRAM KECAMATAN</b>	100%	<b>95.58%</b>	-	-	
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100%	<b>95.11%</b>	-	-	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99.72%	Dalam kegiatan tersebut penggunaan ATK belum Maksimal	Untuk tahun selanjutnya kegiatan tersebut direncanakan memaksimalkan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Penggunaan ATK	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	93.71%			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	23.91%	Kegiatan Diklat sudah dibiayai oleh Dinas yang bersangkutan sehingga anggaran yang ada tidak habis terpakai	Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut akan mengikuti kegiatan bimtek dan diklat	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	87.05%	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	98.94%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99.75%	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	86.66%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	98.78%	-	-	
				<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	100%	<b>99.99%</b>	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan	100%	100%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sarana Pelayanan Umum					
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	99.96%	-	-	
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	100%	<b>90.60%</b>	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	90.60%	-	-	
				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	<b>94.30%</b>	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	94.30%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	99.67%			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	99.67%			
				<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100%	<b>98.31%</b>	-	-	
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	98.31%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Rambang	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	99%	Sudah dialokasikan sesuai kebutuhan	Sudah dialokasikan sesuai kebutuhan	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pengadaan Mebel	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	93%	Sudah dialokasikan sesuai kebutuhan	Sudah dialokasikan sesuai kebutuhan	-
				Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	100%	80%	Sudah dialokasikan sesuai kebutuhan	Sudah dialokasikan sesuai kebutuhan	-
				Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	100%	-	-	-
				SubKegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelayanan Perizinan Non Usaha					
				SubKegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	100%	100%	-	-	-
				SubKegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	100%	100%	-	-	-
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	95%	Sudah dialokasikan sesuai kebutuhan	Sudah dialokasikan sesuai kebutuhan	-
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	95%	Sudah dialokasikan sesuai kebutuhan	Sudah dialokasikan sesuai kebutuhan	-
				Subkegiatan Peningkatan	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					
				Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	90%	Sudah dialokasikan sesuai kebutuhan	Sudah dialokasikan sesuai kebutuhan	-
				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
				Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100%	-	-	-
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Subkegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Fasilitas Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	100%	100%	-	-	-
				Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Lebak	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	82,27%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	97.05%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	97.83%			
				Kegiatan Administrasi Barang	100%	99.89%.			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100.00%	Terdapat kegiatan yang tidak terealisasi terkait peraturan tidak boleh melaksanakan kegiatan makan minum untuk rapat staf	Dialihkan makan minum rapat untuk kunjungan tamu saja, dan efisiensi pada kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	72.59%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	99,70%.			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	100%	96.65%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Urusan Pemerintahan Daerah					
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99.89%			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	98.13%			
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100.00%	Terdapat 198-titik lampu jalan yang rusak	Lampu jalan yang rusak telah diperbaiki sebanyak 80 titik sesuai dengan anggaran yang ada pada tahun 2024, dan	Telah Dilaksanakan pada Anggaran Tahun 2024



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								dianggarkan sebanyak 135 titik untuk tahun 2025	
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	94.69%			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	58.83%			
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	58.83%			
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	82.80%			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	100%	82.80%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ketenteraman dan Ketertiban Umum					
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	89.96%			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	89.96%			
				Progrm Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	83.53%			
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	99.97%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Kelekat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100%	98%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Barang Milik Daerah					
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	85%			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemerintahan Daerah					
				<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	100%	<b>100%</b>	Terhadap Program Pemeliharaan lampu jalan diseluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim masih banyak di temukan titik titik lampu jalan yang rusak tidak kunjung diperbaiki	Melakukan Pemeliharaan atau memperbaiki titik-titik lampu yang rusak sesuai usulan/laporan dari Kepala Desa	Kecamatan Kelekar telah menganggarkan sebesar Rp. 49.500.000,- untuk Perbaikan/Pemeliharaan Lampu Jalan sebanyak 38 (Tiga Puluh Delapan) titik di tahun 2024 dengan capaian output sebesar 100 %
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sarana Pelayanan Umum					
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	100%			
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	100%	<b>100%</b>			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%			
				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban</b>	100%	<b>100%</b>			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Gelumbang	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100%	87.29%	-	-	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	98.33%	-	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	112 Unit	Masih banyak ditemukan titik-titik lampu jalan yang rusak tidak kunjung diperbaiki	Memperbaiki titik-titik lampu yang rusak sesuai dengan usulan/laporan Kepala Desa/Lurah	Mengusulkan penambahan anggaran agar titik lampu yang diperbaiki lebih banyak
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	-	-	-
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	-	-	-
				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	-	-	-
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penugasan Kepala Daerah					
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	-	-	-
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Sungai Rotan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100%	90,60%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	83.30%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	89.40%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	93,80%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	43.10%	Terdapat kegiatan yang tidak terealisasi terkait peraturan tidak boleh melaksanakan kegiatan makan minum untuk rapat staf	Dialihkan makan minum rapat untuk kunjungan tamu saja, dan efisiensi pada kegiatan fasilitas kunjungan tamu	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	83.30%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	99,70%.			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	81.30%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	93.60%			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	94,70%.			
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	86.20%	Terdapat 105-titik lampu jalan yang rusak	Lampu jalan yang rusak telah diperbaiki sebanyak 50 titik sesuai dengan anggaran yang ada pada tahun 2024, dan dianggarkan sebanyak 55	Telah Dilaksanakan pada Anggaran Tahun 2024



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								titik untuk tahun 2025	
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	91.60%			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	100%	86.20%			
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	86.20%			
				Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	100%	99.50%			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	99.50%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	97.70%			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	97.70%			
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	98.40%			
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	98.40%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Muara Belida	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100%	<b>88.98%</b>			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	<b>83.29%</b>			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	67.38%	-	Memaksimalkan upaya penggandaan dokumen RKA SKPD	
				Koordinasi dan Penyusunan	100%	89.19%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dokumen DPA-SKPD					
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99.43%	-	-	
				<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	100%	<b>91.8%</b>			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	91.77%	Tidak bisa direalisasikannya cadangan gaji untuk pegawai baru	digunakan untuk anggaran tahun 2025	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	99.02%	Belum maksimalnya koordinasi antara Panitia dan Pelaksana Kegiatan	Memaksimalkan koordinasi antar tim	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	100%	93.27%	Belum maksimalnya koordinasi antara Panitia dan Pelaksana Kegiatan	Memaksimalkan koordinasi antar tim	
				<b>Administrasi Barang Milik</b>	100%	<b>0</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Daerah pada Perangkat Daerah</b>					
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	0			
				<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%	35.25%	Kurangnya informasi untuk mengikuti pelatihan pegawai	mencari informasi tentang pendidikan dan pelatihan pegawai	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	0			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%			
				<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	78.8%			
				Penyediaan Komponen Instalasi	100%	87.01%	Belum adanya kebutuhan komponen instalasi	Memaksimalkan kebutuhan kpmponen instalasi	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			listrik/penerangan kantor	listrik /penerangan kantor	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	97.73%	Belum maksimalnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Memaksimalkan kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	86.05%	Belum maksimalnya penyediaan bahan logistik kantor	Memaksimalkan penyediaan bahan logistik kantor	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	99.69%	Belum maksimalnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Memaksimalkan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
				Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	99.17%	Belum maksimalnya fasilitas kunjungan tamu	Memaksimalkan fasilitas kunjungan tamu	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	73.8%	Belum maksimalnya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	<b>93.84%</b>			
				Pengadaan Mebel	100%	<b>99.47%</b>	Belum maksimalnya pengadaan mebel	Memaksimalkan pengadaan mebel	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	<b>90.86%</b>	Belum maksimalnya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Memaksimalkan pengadaan peralatan dan mesin lainnya	
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	<b>99.92%</b>			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	<b>99.7%</b>	-	-	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	<b>100%</b>			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan	100%	<b>98.45%</b>	Belum maksimalnya penyediaan jasa	memaksimalkan penyediaan jasa	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perlengkapan Kantor			komunikasi, sumber daya air dan listrik		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%			
				<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100%	75%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	80.09%	Belum maksimalnya jasa pemeliharaan, biaya, pajak dan sebagainya	Memaksimalkan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya, pajak dan sebagainya	
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor	100%	55.69%	Belum maksimalnya pemeliharaan/rehab	Memaksimalkan pemeliharaan/rehab	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Bangunan Lainnya			gedung kantor dan bangunan lainnya	gedung kantor dan bangunan lainnya	
				<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	100%	<b>99.13%</b>			
				<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	100%	<b>99.68%</b>			
				Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta	100%	<b>99.68%</b>	Belum maksimalnya pemeliharaan lampu jalan	Memaksimalkan pemeliharaan lampu jalan	TERHADAP PROGRAM PEMELIHARAAN LAMPU JALAN DI SELURUH WILAYAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM MASIH BANYAK DI TEMUKAN TITIK - TITIK



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									LAMPU JALAN YANG RUSAK TIDAK KUNJUNG DI PERBAIKI
				Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	96.9%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100%	72.31%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan	100%	99.17%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	100%	96.86%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	100%	<b>98.84%</b>			
				<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	100%	<b>98.84%</b>			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	99.8%			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di	100%	98.67%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Wilayah Kecamatan					
				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	100%			
				<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	100%			
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	100%			
				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	95.67%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	95.67%			
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	81.4%			
				<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100%	<b>69.23%</b>			
				<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa</b>	100%	<b>69.23%</b>			
				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	<b>65.39%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100%	97.79%			

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Belimbing	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	83%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Peningkatan Pelayanan Publik						
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Pemerintah Daerah	100%	94.74%			Tidak ada
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	94%			Tidak ada
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	98%			Tidak ada
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	85%			Tidak ada
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	82%			Tidak ada
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	82%			Tidak ada
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	98%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100%	85%			Tidak ada
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	2.1%			Tidak ada
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%	0	Gagal saat lelang	Di alihkan di ABT	Tidak ada
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	31%			Tidak ada
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0			Tidak ada
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	0			Tidak ada
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	86%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	87%			Tidak ada
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	48%			Tidak ada
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	53%			Tidak ada
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	56%			Tidak ada
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	93%			Tidak ada
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	99.96%			Tidak ada
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	99.83%			Tidak ada
				Pengadaan Mebel	100%	100%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%			Tidak ada
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	99.67%			Tidak ada
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100%			Tidak ada
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	88.17%			Tidak ada
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	98%			Tidak ada
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	78%			Tidak ada
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%				Tidak ada
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	100%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99.36%			Tidak ada
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	92%			Tidak ada
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	99.51%			Tidak ada
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	99.74%			Tidak ada
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	92.14%			Tidak ada
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	100%	100%			Tidak ada
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	87.42%			Tidak ada
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	100%	71%			Tidak ada
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	100%	72%			Tidak ada
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100%	100%			Tidak ada
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	81.34%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	81.34%			Tidak ada
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	97%			Tidak ada
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	80%			Tidak ada
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100%	99.94%			Tidak ada
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	99.96%			Tidak ada
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	100%	99.96%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Vertikal di Wilayah Kecamatan					
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	99.8%			Tidak ada
				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100%	99.8%			Tidak ada
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100%	97.75%			Tidak ada
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	97.75%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sesuai Penugasan Kepala Daerah					
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	98%			Tidak ada
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	95%			Tidak ada
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	81.2%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	81.2%			Tidak ada
				Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	100%	90%			Tidak ada
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	100%	58%			Tidak ada
				Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	100%	99%			Tidak ada



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Belida Darat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>PROGRAM KECAMATAN</b>	100%	<b>90.62%</b>	-	-	
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100%	<b>90.97%</b>	-	-	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	81.31%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	89.36%	Kekurangan Pegawai (banyak pegawai memasuki masa purnabakti) namun berpengaruh dengan jenjang karier bawahan.	Mengajukan usulan karier (eselon) pegawai tersedia (bukan dari luar) dan penambahan pegawai teknis ke BKPSDM Kabupaten Muara Enim	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0.00%	Kurangnya minat pegawai yang mengikuti bimtek/diklat/pelatihan dan banyak juga bimtek/diklat/pelatihan sudah dianggarkan pada dinas terkait	Memberi pengarahan kepada pegawai untuk mengikuti bimtek/diklat/pelatihan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	92.06%	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	100%	97.08%	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	97.58%	-	-	
				<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	100%	<b>97.47%</b>	-	-	
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	99.82%	Banyak kerusakan alat elektronik akibat tegangan tidak stabil (tdk sampai 220V), termasuk	Meningkatkan daya contoh dikantor camat dari 2200 VA ke 3500VA namun tdk berpengaruh	Mohon dibantu penambahan Trafo baru



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							lampu jalan sering rusak (lampu, photocell dll)	karena Tegangan Distribusi Induk yg Tidak Stabil	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	96.15%	-	-	
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	100%	<b>69.65%</b>	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	69.65%	-	-	
				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	<b>34.15%</b>			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan	100%	34.15%	Kurang terkoodinirnya	Rescheduling Jadwal rakor	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ketentraman dan Ketertiban Umum			Rakor dgn Tripika Lingkup Kec. Belida Darat		
				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	<b>100.00%</b>	-	-	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100.00%	-	-	
				<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100%	<b>93.69%</b>	-	-	
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	100%	93.69%	Administrasi pemerintahan desa dan administrasi keuangan (spj)	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa dan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengawasan Pemerintahan Desa			desa masih banyak yang belum sesuai aturan yang berlaku	administrasi keuangan secara berkala.	

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Lubai Ulu	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan	<b>PROGRAM KECAMATAN</b>	100%	90.62%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pelayanan Publik						
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>100%</b>	<b>82.99%</b>	-	-	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99.66%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	80.18%	Kekurangan Pegawai (banyak pegawai memasuki masa purnabakti)	Mengajukan usulan penambahan pegawai ke BKPSDM Kabupaten Muara Enim	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik	100%	58.10%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Daerah Pada Perangkat Daerah					
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	74.32%	Kurangnya minat pegawai yang mengikuti bimtek/diklat /pelatihan	Memberi pengarahan kepada pegawai untuk mengikuti bimtek/diklat/p elatihan	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	89.15%	-	-	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	99.72%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	85.09%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	82.89%			
				<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	100%	92.49%	-	-	
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	98.16%	-	-	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	88.16%	-	-	
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	100%	68.52%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	68.52%		-	
				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>91.98%</b>			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	91.98%			
				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	-	-	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	100%	96.61%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penugasan Kepala Daerah					
				<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>99.47%</b>	-	-	
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	99.47%	Administrasi pemerintahan desa dan administrasi keuangan (spj) desa masih banyak yang belum sesuai aturan yang berlaku	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa dan administrasi keuangan secara berkala.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Empat Petulai Dangku	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	100%	95.03%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	92.19%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	95.22%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	0%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0%			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	98.44%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	99.57%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	91.06%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	51.79%			
				<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>100%</b>	<b>96.01%</b>			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	98.61%			Terhadap rekomendasi DPRD kepada OPD Kecamatan, maka Kecamatan Empat Petulai Dangku telah menganggarkan Pemeliharaan Lampu Jalan sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) titik di tahun 2024 dengan capaian output sebesar 100 %
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	100%	95.17%			
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>67.10%</b>			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	67.10%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>99.39%</b>			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	99.39%			
				<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>96.62%</b>			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	97.62%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Panang Enim	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	81%	-	-	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	60%	Dalam kegiatan tersebut penggunaan ATK belum Maksimal	Untuk tahun selanjutnya kegiatan tersebut direncanakan memaksimalkan Penggunaan ATK	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	91%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100%	0%	dalam kegiatan tersebut terdapa asuransi kendaraan dinas yang belum dilaksanakan karena jatuh tempo	untuk tahun selanjutnya kegiatan tersebut akan dialihkan kepada kegiatan yg lain yg lebih prioritas	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	51%	Kegiatan Diklat sudah dibiayai oleh Dinas yang bersangkutan sehingga anggaran yang ada tidak habis terpakai	Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut akan mengikuti kegiatan bimtek dan diklat	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	78%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	85%	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	85%	-	-	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	86%	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	75%	-	-	terhadap rekomendasi DPRD kepada OPD Kecamatan,



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									maka Kecamatan Panang Enim telah menganggarkan program pemeliharaan lampu jalan sebanyak 30 (Lima Puluh) buah di tahun 2024 dengan capaian output nya sebesar 100 persen.
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	90%	-	-	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	87%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	87%			
				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	84%	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	70%			
				<b>Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	94%	-	-	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	94%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	42%	-	-	
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	42%	Ada beberapa kegiatan yang tidak sempat dilaksanakan dikarenakan bertabrakan dengan pemilu dan pilkada	Pelaksanaan Kegiatan akan dimaksimalkan lagi	



### 3.2 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

#### 1. URUSAN PENDIDIKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

##### 1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan diselenggarakan oleh perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Pada tahun 2024, dengan alokasi anggaran belanja sebesar **Rp. 807.954.749.759** dan terealisasi sebesar **Rp. 778.710.167.141** atau **96,38%** dan kinerja keluaran (output) sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

###### a. Belanja Operasional

Belanja Operasional dialokasikan sebesar **Rp. 683.637.124.140** terealisasi sebesar **Rp. 656.784.430.842** atau **93,88%** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi

###### b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 124.317.625.619** terealisasi sebesar **Rp. 121.952.736.299** atau **98,08%** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim

##### 2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim melaksanakan 9 Program dan 23 Kegiatan , dan 106 Sub Kegiatan antara lain yaitu:

###### A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk program pelayanan administrasi perkantoran sebesar **Rp. 540.571.945.333** dengan realisasi sebesar **Rp. 519.948.047.921** atau **96,18%** program ini terdiri dari 8 (Delapan) Kegiatan , dan 30 Sub Kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp.293.654.150** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 247.938.600** atau sebesar **84,43%**.

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp.25.111.150** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 8.297.300** atau sebesar **33,04 %**. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen Renstra dan Renja SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.47.521.800** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 38.737.200** atau sebesar **81,51%**. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen RKA-SKPD tahun anggaran 2024 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan



- RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.45.772.600** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.37.196.000** atau sebesar 81,26%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen RKA ABT-SKPD tahun anggaran 2024 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.64.602.300** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 60.560.000** atau sebesar 93,74%. adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen DPA-SKPD tahun anggaran 2024 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.56.020.900** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 53.940.600** atau sebesar 96,29%. Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen DPA ABT-SKPD tahun anggaran 2024 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.17.539.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 14.124.300** atau sebesar 80,53%. adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen Laporan bulanan tahun anggaran 2024 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 37.086.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 35.083.200** atau sebesar 94,60%. adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD tahun anggaran 2023 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp.524.998.692.033** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 505.296.925.762** atau sebesar 96,25%.
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar **Rp.524.714.378.653** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.505.045.009.562** atau sebesar 96,25%. adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen Pembayaran Gaji dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar **Rp.150.849.980** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.137.203.000** atau sebesar 90,95%. adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

- Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.59.954.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 51.289.600** atau sebesar 85,55%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun anggaran 2024 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.73.509.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.63.423.600** atau sebesar 86,26%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran tahun anggaran 2024 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 173.625.096** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 167.092.635** atau sebesar 96,24%.
    - a. Sub Kegiatan Pengamanan barang milik daerah dengan anggaran sebesar **Rp.99.180.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.98.965.035** atau sebesar 99,78%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
    - b. Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.74.445.096** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.68.127.600** atau sebesar 91,51%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Dokumen dokumen inventaris aset/barang inventaris tahun anggaran 2024 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 649.864.200** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 584.431.260** atau sebesar 89,93%.
    - a. Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya dengan anggaran sebesar **Rp. 100.000.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 96.847.500** atau sebesar 96,85%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
    - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan anggaran sebesar **Rp.549.864.200** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 487.583.760** atau sebesar 88,67%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah dokumen hasil laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 2.999.736.458** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.**

**2.722.866.747** atau sebesar 87,40%.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 211.459.341** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.130.297.500** atau sebesar 61,62%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor dengan anggaran sebesar **Rp.1.401.978.469** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.301.563.800** atau sebesar 93,34%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah dan jenis peralatan kebersihan yang disediakan, jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor dengan anggaran sebesar **Rp.84.992.548** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.64.487.100** atau sebesar 75,87%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar **Rp.34.989.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.34.988.000** atau sebesar 100%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah dan jenis barang dan cetakan yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar **Rp. 276.600.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 214.554.000** atau sebesar 77,57%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah dan jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- f. Sub Kegiatan Fasilitas kunjungan tamu dengan anggaran sebesar **Rp.34.973.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 19.523.000** atau sebesar 55,82%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah peserta rapat yang dipenuhi kebutuhan makan dan minum dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.954.743.700** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.950.453.347** atau sebesar 99,55%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah aparatur yang mengikuti rapat dalam dan luar daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 4.661.205.452** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 4.371.236.000** atau sebesar **93,78%**.
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan dengan anggaran **Rp. 4.661.205.452** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 4.371.236.000** atau sebesar **93,78%**. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah Kendaraan dinas yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar **0%**.
  
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 820.731.800** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 698.997.692** atau sebesar **85,17%**.
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar **Rp. 5.676.600** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 5.600.000** atau sebesar **98,65%**. Adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah dan jenis kelengkapan surat menyurat yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik dengan anggaran sebesar **Rp.506.895.200** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 481.537.692** atau sebesar **95%**. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah aplikasi yang dibayarkan biaya hosting, jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebesar **Rp.308.160.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.211.860.000** atau sebesar **68,75%**. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
  
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar **Rp.5.974.436.144** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 5.858.559.225** atau sebesar **98,06%**.
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar **Rp.225.040.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 213.315.525** atau sebesar **94,79%**. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah dan jenis perizinan yang dibayar, jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin berkala dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
  - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

- Gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 5.628.000.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 5.535.968.700** atau sebesar 98,36%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara dan terpenuhi sara prasarananya dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar **Rp.28.880.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 21.850.000** atau sebesar 75,66%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah dan jenis peralatan kantor yang dipelihara dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar **Rp.92.516.144** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 87.425.000** atau sebesar 94,50%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dipelihara dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

## **B. Program Pengelolaan Pendidikan**

Alokasi anggaran untuk program Pengelolaan Pendidikan sebesar **Rp. 244.722.017.236** dengan realisasi sebesar **Rp. 238.130.278.351** atau **94,80 %** program ini terdiri dari 4 (Empat) Kegiatan, dan 60 Sub Kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar dengan anggaran sebesar **Rp.146.974.969.162** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.144.584.804.658** atau sebesar **98,37 %**.
  - a. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru Sekolah/Kepala Sekolah/TU dengan anggaran sebesar **Rp.2.155.225.592** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.2.150.630.000** atau sebesar 99,79 %. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Ruang kelas yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.694.415.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 693.080.000** atau sebesar 99,81%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.892.663.190** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.891.280.000** atau sebesar 99,85%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun sebanyak dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- d. Sub Kegiatan Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dengan anggaran sebesar **Rp. 12.994.932.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 12.982.686.000** atau sebesar 99,91%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah Perpustakaan yang dibangun sebanyak dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. Sub Kegiatan Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.1.783.340.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.766.159.520** atau sebesar 99,04%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah pagar sekkolah yang dibangun, jumlah conblok yang dibangun, jumlah wc/toilet yang dibangun dan jumlah jaringan instalasi listrik sekolah yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- f. Sub Kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang guru/kepala sekolah/Tu dengan anggaran sebesar **Rp. 524.158.428** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 522.691.000** atau sebesar 99,81%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- g. Sub Kegiatan rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.301.758.750** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.300.789.000** atau sebesar 99,68%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah perpustakaan yang direhab dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- h. Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala sekolah/guru/Penjaga sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.2.406.130.740** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.402.786.000** atau sebesar 99,86%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Perpustakaan yang direhab dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- i. Sub Kegiatan Pengadaan mebel sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.9.011.090.200** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 8.969.605.200** atau sebesar 99,54%.
- j. Sub Kegiatan Pengadaan alat praktek dan peraga siswa dengan anggaran sebesar **Rp.3.250.000.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.590.210.000** atau sebesar 79,70%.
- k. Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa(SD) dengan anggaran sebesar **Rp.698.252.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.632.138.000** atau sebesar 90,53%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah siswa yang mengikuti kompetensi/lomba akademik/non akademik yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- l. Sub Kegiatan kelembagaan dan manajemen sekolah SD dengan



- anggaran sebesar **Rp.1.152.159.816** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.686.607.503** atau sebesar 59,59%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah dokumen laporan hasil ujian dan bimtek Penyelenggaraan proses belajar dan ujian dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- m. Sub Kegiatan Pengelolaan dana BOS Sekolah dasar dengan anggaran sebesar **Rp. 70.248.542.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 69.624.256.146** atau sebesar 99,04%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah SD Negeri yang mendapat dana bantuan operasional sekolah (BOS) APBD dan Jumlah siswa yang mendapatkan seragam batik dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- n. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah dasar dengan anggaran sebesar **Rp.712.009.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.611.661.123** atau sebesar 85,91%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah dokumen hasil bimtek pengelolaan dana BOS dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- o. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar dengan anggaran sebesar **Rp.2.724.484.636** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.2.721.643.000** atau sebesar 99,90%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah ruang laboratorium yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- p. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar **Rp.117.815.540** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.102.954.090** atau sebesar 87,39%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- q. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar **Rp.100.000.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.99.705.000** atau sebesar 99,71%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- r. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik dengan anggaran sebesar **Rp. 15.095.200.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 14.874.294.009** atau sebesar 98,54 %. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- s. Sub Kegiatan Pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran sebesar **Rp.4.937.023.368** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.890.088.805** atau sebesar 99,05%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas yang dibangun

- dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- t. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.1.711.764.296** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.1.708.534.000** atau sebesar 99,81%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - u. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas Sekolah dengan anggaran sebesar **Rp. 15.269.312.766** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.15.177.541.315** atau sebesar 99,40%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran sebesar **Rp.74.486.800.113** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.72.143.341.402** atau sebesar 91,62 %.
- a. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan anggaran sebesar **Rp.311.774.240** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 307.152.000** atau sebesar 98,52%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Sub Kegiatan Pembangunan perpustakaan sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.423.580.320** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.414.897.068** atau sebesar 97,95%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah ruang laboratorium yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium dengan anggaran sebesar **Rp.2.750.765.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.2.710.576.475** atau sebesar 98,54%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah ruang laboratorium yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - d. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.412.984.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.402.561.000** atau sebesar 97,48%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - e. Sub Kegiatan Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.2.120.727.860** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.2.117.514.000** atau sebesar 99,85%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah pagar sekolah yang dibangun, jumlah conblok yang dibangun, jumlah ruang ibadah yang dibangun dengan capaian output/keluaran

- sebesar 100%.
- f. Sub Kegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas dengan anggaran sebesar **Rp.6.625.582.668** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.6.531.954.531** atau sebesar 98,29%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas yang direhab dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - g. Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.1.553.268.125** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.1.548.046.000** atau sebesar 99,66%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah perpustakaan yang direhab dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - h. Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium dengan anggaran sebesar **Rp.466.581.625** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.465.204.000** atau sebesar 99,70%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Laboratorium yang direhab dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - i. Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan utilitas sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.1.495.795.250** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.1.491.338.000** atau sebesar 99,70%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah ruang ibadah yang direhab, dan Jumlah toilet(jamban) yang direhab dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - j. Sub Kegiatan Pengadaan mebel sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.5.256.560.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.5.236.919.000** atau sebesar 99,63%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah mebel ruang kelas yang disediakan, Jumlah mebel ruang Perpustakaan yang disediakan, Jumlah mebel ruang pimpinan yang disediakan dan jumlah mebel sekolah yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - k. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (SMP) dengan anggaran sebesar **Rp.2.098.475.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.1.638.490.000** atau sebesar 78,08%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah perlengkapan siswa yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - l. Sub Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa dengan anggaran sebesar **Rp.877.440.600** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 584.414.240** atau sebesar 66,60%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah sekolah yang mengikuti kejuaraan sepakbola gala siswa SMP, dan Jumlah siswa yang mengikuti OSN dan O2SN Tingkat kabupaten dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - m. Sub Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah

- dengan anggaran sebesar **Rp.850.004.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.741.085290** atau sebesar 87,19%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pengawasan sekolah SMP, jumlah sekolah yang mendapatkan penilaian akreditasi dan jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi pengelolaan sekolah adiwiyata dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- n. Sub Kegiatan Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran sebesar **Rp.35.807.580.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 35.757.001.336** atau sebesar 99,86%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah SD Negeri yang mendapat dana bantuan operasional sekolah (BOS) APBD Negeri dan Jumlah siswa yang mendapatkan seragam batik dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - o. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran sebesar **Rp. 550.899.960** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 489.656.960** atau sebesar 88,88%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah dokumen hasil bimtek pengelolaan dana BOS dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - p. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (SMP) dengan anggaran sebesar **Rp.212.969.060** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 183.477.185** atau sebesar 86,15%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah dokumen hasil bimtek Pelatihan Penggunaan Aplikasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - q. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (SMP) dengan anggaran sebesar **Rp.310.000.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 99.761.000** atau sebesar 32,18%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah dokumen hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - r. Sub Kegiatan Pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran sebesar **Rp. 1.696.123.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.689.310.800** atau sebesar 99,60%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas yang dibangun, jumlah conblok yang dibangun, jumlah ruang ibadah yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - s. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (SMP) dengan anggaran sebesar **Rp.849.168.280** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 625.059.400** atau sebesar 73,61%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah dokumen hasil bimtek Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- t. Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa dengan anggaran sebesar **Rp. 8.463.213.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 7.763.311.940** atau sebesar 91,73%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah dokumen hasil bimtek Pelatihan Penggunaan Aplikasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - u. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan anggaran sebesar **Rp. 1.353.307.625** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.1.345.611.177** atau sebesar 99,43%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab, dan Jumlah toilet(jamban) yang direhab dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran sebesar **Rp.18.390.487.241** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 17.179.451.898** atau sebesar 89,85%.
- a. Sub Kegiatan Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD dengan anggaran sebesar **Rp.774.172.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 773.065.800** atau sebesar 99,86%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah Area Bermain yang dibangun dan jumlah toilet(jamban) yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Sub Kegiatan rehabilitasi sedang/berat Gedung/Ruang kelas/Ruang guru PAUD dengan anggaran sebesar **Rp.1.615.092.310** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.587.610.200** atau sebesar 98,30%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas yang direhab dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Sub Kegiatan rehabilitasi sedang/berat Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD dengan anggaran sebesar **Rp. 276.560.250** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 276.052.000** atau sebesar 99,82%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas yang direhab dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - d. Sub Kegiatan Pengadaan mebel PAUD dengan anggaran sebesar **Rp.2.730.000.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.353.845.000** atau sebesar 86,22%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah mebel PAUD yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - e. Sub Kegiatan Pengadaan alat praktek dan peraga siswa dengan anggaran sebesar **Rp.880.000.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 879.350.000** atau sebesar 99,93% adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah APE luar ruang PAUD yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - f. Sub Kegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD

- dengan anggaran sebesar **Rp.1.224.462.681** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.085.246.872** atau sebesar 88,63%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah dokumen laporan hasil Kegiatan , jumlah tutor PAUD dan PNF yang mengikuti sosialisasi dan jumlah lembaga PAUD yang mengikuti sosialisasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- g. Sub Kegiatan Pengelolaan dana BOP PAUD dengan anggaran sebesar **Rp.7.898.525.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 7.390.093.728** atau sebesar 93,56%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah TK Negeri yang mendapat dana bantuan operasional sekolah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - h. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dana BOP PAUD dengan anggaran sebesar **Rp.728.034.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 603.081.066** atau sebesar 82,84%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah kepala satuan PAUD dan PKBM yang mengikuti bimtek dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - i. Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan PAUD dengan anggaran sebesar **Rp.100.000.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 99.594.000** atau sebesar 99,59%.
  - j. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan bidang Pendidikan (APBD-P) dengan anggaran sebesar **Rp.396.397.600** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 366.128.032** atau sebesar 92,36%.
  - k. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan anggaran sebesar **Rp.462.054.800** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 461.596.200** atau sebesar 99,90%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - l. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan anggaran sebesar **Rp.1.305.187.200** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.303.789.000** atau sebesar 99,89%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah ruang kelas yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar **Rp.4.896.760.720** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.222.680.393** atau sebesar 86,71%.
- a. Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah NonFormal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar **Rp.243.477.600** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 141.831.580** atau sebesar 58,25%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pembinaan

- kelembagaan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan dana BOP sekolah Non Formal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar **Rp.4.354.892.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 3.885.724.823** atau sebesar 89,23%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah PKBM yang mendapat dana bantuan operasional dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar **Rp.105.389.220** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 35.116.000** atau sebesar 33,32 %. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen bimtek pelatihan penggunaan aplikasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - d. Sub Kegiatan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar **Rp.166.001.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 160.007.990** atau sebesar 33,32 %. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah dokumen bimtek pelatihan penggunaan aplikasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

### C. Program Pengembangan Kurikulum

Alokasi anggaran untuk program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar **Rp. 1.496.349.175** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.294.957.853** atau **86,54%** program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan , dan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan anggaran sebesar **Rp. 1.024.195.675** dengan realisasi sebesar **Rp. 977.283.789** atau 95,42%.
  - a. Sub Kegiatan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar dengan anggaran sebesar **Rp. 1.024.195.675** dengan realisasi sebesar **Rp. 977.283.789** atau 95,42%, output dari sub Kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil dari pelatihan penetapan kurikulum dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
2. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dengan anggaran sebesar **Rp. 472.153.500** dengan realisasi sebesar **Rp. 317.674.064** atau 67,28%.
  - a. Sub Kegiatan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar dengan anggaran sebesar **Rp. 472.153.500** dengan realisasi sebesar **Rp. 317.674.064** atau 67,28%.output dari sub Kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil dari pelatihan penetapan kurikulum dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

### D. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Alokasi anggaran untuk program Pendidik dan Tenaga



Kependidikan sebesar **Rp 18.376.609.815** dengan realisasi sebesar **Rp 16.820.665.557** atau **91,53 %** program ini terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan , dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar **Rp 18.376.609.815** dengan realisasi sebesar **Rp 16.820.665.557** atau **91,53 %**
  - a. Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar **Rp.1.853.030.300** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.1.010.324.037** atau sebesar 54,52%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah dokumen pengawasan satuan pendidikan SMP, guru pemula yang mengikuti program induksi guru pemula, guru yang berkompeten sebagai tim penilai angka kredit jabatan fungsional guru, guru yang mengajukan permohonan penilaian angka kredit jabatan guru, sekolah yang memiliki dokumen penilaian akreditasi yang mendapatkan upah harian lepas dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar **Rp.16.523.579.515** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.15.810.341.520** atau sebesar 95,68%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah guru pengabdian program Muara Enim cerdas, jumlah guru yang mengikuti penyiapan calon kepala sekolah, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan jenjang PAUD, SD, SMP yang mendapatkan upah harian lepas dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

#### **E. Program Pengendalian perizinan pendidikan**

Alokasi anggaran untuk program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar **Rp. 44.265.000** dengan realisasi sebesar **Rp. 14.899.500** atau **33,66%** program ini terdiri dari 1 Kegiatan , dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat dengan anggaran sebesar **Rp. 1.024.195.675** dengan realisasi sebesar **Rp. 977.283.789** atau 95,42%.
  - a. Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dengan anggaran sebesar **Rp.1.024.195.675** dengan realisasi sebesar **Rp.977.283.789** atau 95,42%, output dari sub Kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil dari pelatihan penetapan kurikulum dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



#### F. Program Pengembangan Kebudayaan

Alokasi anggaran untuk program Pengembangan Kebudayaan sebesar **Rp. 1.448.316.700** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.310.147.026** atau 90,46 % program ini terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan , dan 3 Sub Kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp.1.253.316.700** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.115.927.026** atau sebesar 89,04%.
  - a. Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi budaya dengan anggaran sebesar **Rp.632.305.100** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 580.208.750** atau sebesar 91,76% adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah pakaian adat yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan Prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan Kebudayaan dengan anggaran sebesar **Rp.621.011.600** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 535.718.276** atau sebesar 86,27% adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah pakaian adat yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
2. Kegiatan Pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp.195.000.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 194.220.000** atau sebesar 99,60%.
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan Lembaga adat dengan anggaran sebesar **Rp.195.000.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 194.220.000** atau sebesar 99,60%.

#### G. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Alokasi anggaran untuk program Pengembangan Kesenian tradisional sebesar **Rp. 934.523.700** dengan realisasi sebesar **Rp. 853.827.798** atau 91,37 % program ini terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan , dan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pembinaan kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar **Rp. 934.523.700** dengan realisasi sebesar **Rp. 853.827.798** atau 91,37 %
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional dengan anggaran sebesar **Rp.441.688.300** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 368.503.798** atau sebesar 83,43%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah jumlah kelompok paduan suara Kabupaten Muara Enim yang terpenuhi sebanyak 1 grup dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



- b. Sub Kegiatan Peningkatan tata Kelola Lembaga kesenian tradisional dengan anggaran sebesar **Rp.492.835.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.485.324.000** atau sebesar 98,48%. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah dokumen pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, dan dokumen sistem informasi database bidang kebudayaan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

#### **H. Program Pembinaan Sejarah**

Alokasi anggaran untuk program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebesar **Rp. 150.707.800** dengan realisasi sebesar **Rp. 143.381.000** atau **95,14%** program ini terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan , dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pembinaan Sejarah lokal dalam 1 daerah Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar **Rp. 150.707.800** dengan realisasi sebesar **Rp. 143.381.000** atau **95,14%**
  - a. Sub Kegiatan Pemberdayaan sumber daya manusia dan Lembaga sejarah local kabupaten/kota dengan anggaran sebesar **Rp. 150.707.800** dengan realisasi sebesar **Rp. 143.381.000** atau **95,14%**. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah dokumen pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, dan dokumen sistem informasi database bidang kebudayaan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

#### **I. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya**

Alokasi anggaran untuk program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebesar **Rp. 210.015.000** dengan realisasi sebesar **Rp. 193.962.135** atau **92,36%** program ini terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan , dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp. 210.015.000** dengan realisasi sebesar **Rp. 193.962.135** atau **92,36%**.
  - a. Sub Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya dengan anggaran sebesar **Rp. 150.707.800** dengan realisasi sebesar **Rp. 210.015.000** dengan realisasi sebesar **Rp. 193.962.135** atau **92,36%**. adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah dokumen pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, dan dokumen system informasi database bidang kebudayaan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%

### 3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Dibuat dalam bentuk matriks sebagai berikut:

**Tabel 3.6. Matrik Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

TUJUAN	SASARAN				% CAPAIAN
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Bermutu di Seluruh Jenjang Pendidikan	Angka Melek Huruf	99,19	98,83	99,64
		Angka rata - rata lama sekolah	8,18	8,27	101,10
		Angka Harapan Lama Sekolah	12,07	12,02	99,59
		Persentase Akreditasi satuan Pendidikan minimal B	83,31	73,55	88,28
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	67,10	53,41	79,59
		Angka partisipasi kasar (APK Pendidikan dasar)	100	87,04	87,04
		SD	100	93,22	93,22
		SMP	92,34	74,98	81,19
		Angka partisipasi murni (APM Pendidikan dasar)	93,98	70,62	75,14
		SD	100	76,52	76,52
		SMP	85,01	59,10	69,52
		Angka Melanjutkan sekolah			
		- SD/MI ke SMP/MTs	100	104,72	104,72
		Angka Siswa Putus Sekolah			
		- SD/MI	0	0,11	0
		- SMP/MTs	0	0,0092	0
	Meningkatnya Satuan Pendidikan Yang Memenuhi Standar Jumlah dan Kualitas	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Bersertifikasi Pendidik	40,50	29,25	72,22

TUJUAN	SASARAN				% CAPAIAN
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	
	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang Profesional				
		Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi Minimal S1	89,56	79,25	88,48
	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan				
		Angka Kelulusan (AL)			
		- SD/MI	100	98,32	98,32
		- SMP/MTs	100	98,35	98,35
		Meningkatnya Index SPM	96,4	70,68	73,32
		A.1 Kemampuan Literasi SD	54,34	68,52	126,09
		A.1 Kemampuan Literasi SMP	67,41	54,35	80,63
		A.2 Kemampuan Numerasi SD	39,63	53,66	135,40
		A.2 Kemampuan Numerasi SMP	63,73	52,71	82,71
		B.10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	100	77,45	77,45
		B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	100	97,82	97,28
		B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	100	6,53	6,53
		B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	71,21	68,09	95,61
		C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	43,59	56,54	129,71
		D.4 Iklim Keamanan SD	74,35	69,52	93,50



TUJUAN	SASARAN				%
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		D.4 Iklim Keamanan SMP	72,44	<b>64,57</b>	<b>89,13</b>
		D.8 Iklim Kebinekaan SD	71,29	<b>61,94</b>	<b>86,88</b>
		D.8 Iklim Kebinekaan SMP	69,29	<b>63,37</b>	<b>91,46</b>

#### 4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### 5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

1. Juara II Lomba Renang 02SN tingkat Provinsi atas nama Alfaiz Darwin Azmi Pulungan SDN Islam Terpadu Rabani
2. Juara II Lomba Atletik 02SN tingkat Provinsi atas Jika Aliya SDN 4 Lembak
3. Juara II Lomba Bulu Tangkis 02SN tingkat Provinsi atas nama Zalianti Khanza Zhafira SDN Islam Terpadu Rabani
4. Juara III Lomba Renang 02SN tingkat Provinsi atas nama Naomi Leyana SMP Xaverius Emmanuel Tanjung Enim
5. Juara III Lomba Karate 02SN tingkat Provinsi atas nama M. Marchel Ramadhan SMP Xaverius Emmanuel Tanjung Enim
6. Juara III Lomba Karate 02SN tingkat Provinsi atas nama Jihan Anasya SMPN 2 Lawang Kidul
7. SDN 12 Lawang Kidul Sekolah Adiwiyata Nasional 2024
8. SDN 14 Lawang Kidul Sekolah Adiwiyata Nasional 2024
9. SDN 20 Rambang Niru Sekolah Adiwiyata Nasional 2024
10. SDN 23 Lawang Kidul Sekolah Adiwiyata Nasional 2024
11. SDN 3 Muara Enim Sekolah Adiwiyata Nasional 2024
12. SDN 3 Panang Enim Sekolah Adiwiyata Nasional 2024
13. SDN 5 Tanjung Agung Sekolah Adiwiyata Nasional 2024
14. SDN 6 Tanjung Agung Sekolah Adiwiyata Nasional 2024
15. SDN 7 Lubai Ulu Sekolah Adiwiyata Nasional 2024
16. SDN 16 Lawang Kidul Sekolah Adiwiyata Mandri 2024
17. SDN 20 Lawang Kidul Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
18. SDN 7 Muara Enim Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
19. SDN 9 Semende Darat Tengah Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
20. SDN 2 Tanjung Agung Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
21. SDN 24 Lawang Kidul Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024



22. SDN 15 Lawang Kidul Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
23. SDN 3 Tanjung Agung Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
24. SDN 6 Panang Enim Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
25. SDN 7 Tanjung Agung Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
26. SDN 1 Panang Enim Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
27. SDN 4 Semende Darat Tengah Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
28. SDN 1 Semende Darat Laut Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
29. SDN 18 Lawang Kidul Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
30. SDN 14 Rambang Niru Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
31. SDN 2 Muara Enim Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
32. SDN 10 Muara Enim Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
33. SDN 15 Muara Enim Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
34. SDN 9 Tanjung Agung Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
35. SDN 4 Semende Darat Ulu Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
36. SDN 22 Muara Enim Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
37. SDN 15 Tanjung Agung Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
38. SDN 4 Muara Enim Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
39. SDN 23 Muara Enim Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
40. SMPN 7 Muara Enim Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024
41. Juara I GTK Inovatif - Pengawas Dikdas atas nama Mberang Udin, S.Pd.,M.Pd.
42. Juara I GTK Dedikatif - Guru SMP atas nama Irnansyah, M.Pd
43. Juara I GTK Inovatif - Guru PPG Prajab atas nama Nelda Diti Efrianti, S.Pd.Gr
44. Juara II GTK Dedikatif - Pengawas Dikdas atas nama Effi Erlan, S.Pd.,M.Si.
45. Juara II GTK Inovatif - Guru SMP atas nama Wahyu Kurniawan,



- S.Pd.
46. Juara II GTK Inovatif – Kepala TK atas nama Santi Ratih Puspa, S.Pd.
  47. Juara II GTK Dedikatif – Guru SMP atas nama Riszky Pabela Pratiwi, M.Pd
  48. Juara II GTK Inovatif – Pengawas Dikmen atas nama Novti Dewita, S.Pd., M.Pd
  49. Juara II GTK Inovatif – Guru PPG Daljab atas nama Heny Sriyanti, S.Pd.
  50. Juara III GTK Inovatif – Guru TK atas nama Utari Rizki Irawan, S.Pd.
  51. Juara III GTK Dedikatif – Guru SD atas nama Dwi sahorsani, S.Pd.I



## 2. URUSAN KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN DAN RSUD H. M. RABAIN

### 1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Urusan wajib Kesehatan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Pada tahun anggaran 2024 alokasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp 410.592.718.955,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp 389.745.669.950,-** atau sebesar **90.05%**, dan **kinerja keluaran (output) sebesar 100 %** dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

#### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp 343.755.346.834,- terealisasi sebesar Rp. 306.665.323.066,- atau 89.21% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

#### b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp 66.837.372.121,- terealisasi sebesar Rp. 63.673.145.262,- atau 95.27%, yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

#### c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp 0,- .teralisasi sebesar Rp. 0 atau 0% yang dialokasikan untuk membiayai keperluan darurat yang mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

#### d. Belanja Transfer

Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp. 0 terealisasi sebesar Rp. 0(nol) atau - % yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

### 2. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan, capaian program indikator sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terdiri dari 5 Program. 15 Kegiatan dan 80 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 212.442.313.179,- dengan realisasi sebesar Rp



187.243.392.344,- atau 88.14%. Program ini terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan dan 26 Sub Kegiatan sebagai berikut :

**1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 300.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 197.500.000,- atau sebesar 65.83%, Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Pembangunan Puskesmas Pulau Pangung, Pembangunan Ruang Operasi RSUD Gelumbang, Pembangunan Ruang Operasi RSUD Semende Darat Laut)
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 15.006.025,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 13.056.500,- atau sebesar 87.01%, Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen RKA Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim sebanyak 27 Buku.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD dengan anggaran sebesar Rp 21.223.129,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 10.660.500,- atau sebesar 50.23%, Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan dokumen perubahan RKA Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim sebanyak 30 buku.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 21.830.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 15.950.000,- atau sebesar 73.06%, Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan DPA Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim sebanyak 60 buku.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD dengan anggaran sebesar Rp 19.549.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 7.880.000,- atau sebesar 40.31%, Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan perubahan DPA Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim sebanyak 35 buku.
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 7.835.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 6.236.000,- atau sebesar 79.59 %, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan 3 dokumen laporan capaian kinerja (LKPI, LPPD dan LAKIP) sebanyak 15 Buku.
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 24.483.300,- dan realisasi keuangan

sebesar Rp 24.410.000,- atau sebesar 99.70%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen laporan keuangan dan BMN sebanyak 12 buku.

## **2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 193.948.574.934,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 170.480.800.645,- atau sebesar 87.90%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji ASN sebanyak 1.340 pegawai, PPPK 382 pegawai dan tunjangan kinerja ASN sebanyak 1.331 pegawai dan PPPK sebanyak 382 pegawai dilingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim selama 12 bulan.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dengan anggaran sebesar Rp 13.829.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 12.196.000,- atau sebesar 88.19%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ dan tahunan sebanyak 12 buku laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim tahun 2024

## **3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp 1.001.111.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 683.786.504,- atau sebesar 68.30 %, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Penetapan angka kredit bagi tenaga fungsional di puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Dinas Kesehatan; ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis; Terselenggaranya Kegiatan Pra Uji Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional, Terselenggaranya Konsultasi ke BKN pusat Jakarta, Kemenkes RI Dirjen Nakes, Dinkes Provinsi Sumsel terkait SDM Kesehatan, Monitoring dan Evaluasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional di 22 Puskesmas dan 3 RSUD di Kabupaten Muara Enim, Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Rencana Kebutuhan SDM Dalam Aplikasi Rencana Kebutuhan SDM Se-Kabupaten Muara Enim, Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Profil SDM Dalam Pemutakhiran Data Aplikasi Propil SDM Se- Kabupaten Muara Enim dan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kabupaten Muara Enim.
- b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan dengan anggaran sebesar Rp 20.520.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 19.471.200,- atau sebesar 94.88%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah bimbingan mental kerohanian bagi karyawan/I dan Dharma



Wanita Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim sebanyak 4 kali dihadiri 120 orang dalam setiap pertemuan, kegiatan berupa ceramah oleh ustadz dan ustadzah dari Kabupaten Muara Enim.

#### **4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 287.783.250,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 131.080.300,- atau sebesar 45.55%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor untuk keperluan Dinas Kesehatan selama 12 bulan terdiri dari 12 jenis komponen diantaranya baterai kecil dan besar, Lampu TL dan spiral, Kabel, Fiting lampu, stop kontak dsbnya.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 1.054.392.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 916.100.000,- atau sebesar 86.88%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah pengadaan CCT Indoor 1 paket untuk RSUD Semende Darat Laut; CCTV Kantor sebanyak 2 paket, 1 unit lensa kamera, 1 unit drone, 37 unit Personal Computer all in one, 37 unit printer dan 1 unit Scanner untuk di Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim; pengadaan mesin penghancur kertas sebanyak 6 unit untuk keperluan di Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp 48.388.620,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 32.180.100,- atau sebesar 66.50%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan rumah tangga yang terdiri dari alat kebersihan dan pembersih untuk keperluan Dinas Kesehatan selama 12 bulan berupa 27 jenis alat kebersihan dan bahan pembersih lantai dan ruangan.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp 63.216.972,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 40.413.750,- atau sebesar 63.93%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Penyediaan logistik kantor berupa alat tulis kantor untuk keperluan Dinas Kesehatan baik rutin atau pun program terdiri dari 43 jenis ATK, BBM kendaraan operasional Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim berupa BBM pertamax sebanyak 248 liter selama 12 bulan dan BBM Dexlite Sebanyak 423 Liter.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 47.026.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 43.105.000,- atau sebesar 91.66%, Adapun output/keluaran dari penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 jenis cetakan (Map dinas, amplop dinas, buku agenda kerja, spanduk, umbul-umbul bahan kain dan kop garuda mas) serta 40.022 lembar penggandaan untuk keperluan

Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp 8.856.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 8.360.000,- atau sebesar 94.39%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah adalah penyediaan 5 jenis surat kabar untuk bahan bacaan dinas kesehatan selama 4 bulan.
- g. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp 80.000.000,- dan realisasi Rp 78.110.000,- atau sebesar 97.64%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan sebanyak 23 kali pertemuan atau rapat-rapat di Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim.
- h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 1.484.497.423,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 1.484.403.619,- atau sebesar 99.99%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah 325 kali perjalanan dinas yang terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim untuk melakukan rapat koordinasi dan bimbingan teknis ke puskesmas dan kecamatan sebanyak 169 kali dan perjalanan dinas luar daerah dalam dan luar provinsi sebanyak 156 kali selama 12 bulan.

#### **5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 4.012.640.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 3.992.800.000,- atau sebesar 99.51%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Kendaraan dinas operasional untuk kegiatan operasional atau lapangan yaitu 1 unit mobil operasional distribusi obat dan BMHP, 1 unit Ambulance puskesmas Gunung Megang, 1 unit Ambulance puskesmas Lembak, 1 unit Ambulance puskesmas Pajar Bulan, 1 unit Ambulance puskesmas Pulau Pangung, 1 unit Ambulance puskesmas Ujan Mas.
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp 6.691.028.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 6.046.737.600,- atau sebesar 90.37%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Pemasangan kaca riben gedung RSUD Kelas D Gelumbang; pengadaan AC 1 PK 20 unit ( Puskesmas Benakat 4 unit, puskesmas Teluk Lubuk 3 unit, puskesmas Sumaja Makmur 4 unit, puskesmas Panang Enim 4 unit, puskesmas Empat petulai 4 unit; 2 unit RSUD Gelumbang dan 1 unit untuk di Dinas Kesehatan); pengadaan AC 2 PK 12 unit



(Puskesmas Benakat 3 unit; puskesmas Teluk Lubuk 2 unit; puskesmas Sumaja Makmur 2 unit; puskesmas Panang Enim 2 unit; puskesmas Empat Petulai 3 unit); Pembuatan dan Instalasi Tower Air RSUD Gelumbang dan RSUD Lubai Ulu; Pemasangan Tirai Pembatas RSUD Gelumbang; Pembuatan sumur Bor poskesdes Kasih Dewa Kecamatan Rambang Niru; Pembuatan sumur Bor poskesdes Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Laut; Pembangunan pagar poskesdes Desa Karang Enda Kecamatan Gelumbang; Pembangunan pagar poskesdes Suban Baru Kecamatan Kelekar; Pembangunan pagar poskesdes Tanjung Baru Kecamatan Lembak; Pembangunan pagar poskesdes Sebau Kecamatan Gelumbang; Pembangunan pagar pustu Desa Tambang Kelekar Kecamatan Kelekar; Pemasangan conblok jalan RSUD Gelumbang Kecamatan Gelumbang; Pembangunan pagar puskesmas Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu; Pembangunan pagar puskesmas Sumaja Makmur Kecamatan Gunung Megang; Pembangunan pagar puskesmas Gunung Megang Kecamatan Gunung Megang; Pembangunan dinding penahan tanah puskesmas Muara Belida; Pembuatan dinding penahan tanah poskesdes Tebing Abang Kecamatan Semende darat Tengah; Administrasi kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

#### **6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp 8.030.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 3.000.000,- atau sebesar 37.36%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah pembelian materai sebanyak 300 lembar untuk kelengkapan dokumen- dokumen bermeterai dan pengiriman surat menyurat ke puskesmas (kecamatan), ke provinsi maupun ke Jakarta (pusat) sebanyak 0 pengiriman selama 12 bulan
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp 1.382.413.444,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 1.317.979.945,- atau sebesar 95.34%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Pembayaran rekening listrik di Gedung Dinas Kesehatan, Gudang Farmasi, Labkesda, rumah dinas, Gudang P2M, Puskesmas di Kecamatan Panang Enim, Puskesmas Empat Petulai dan 3 RSUD, rekening PDAM Dinas Kesehatan, gudang farmasi, Labkesda, Labkesda gedung baru, rumah dinas; pembayaran Internet di 5 Titik (Dinas Kesehatan 3 titik, Labkesda dan Gudang Farmasi) selama 12 bulan.

**7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 323.818.080,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 194.647.681,- atau sebesar 60.11%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Penyediaan pajak kendaraan dinas 7 kendaraan dinas Operasional Dinas Kesehatan dan Operasional Dinas Kesehatan Kab Muara Enim Tahun 2024, servis dan suku cadang kendaraan dinas roda empat sebanyak 38 unit selama 12 bulan.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 1.400.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 1.370.900.000,- atau sebesar 97.92%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah rehabilitasi gedung gudang farmasi dan rehabilitasi rumah dinas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 156.257.802,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 117.627.000,- atau sebesar 75.27%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Pemeliharaan Komputer dan servis komputer serta suku cadang sebanyak 8 unit, pemeliharaan alat pendingin sebanyak 61 unit (cuci,tambah preon dan servis untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim selama 12 bulan.

**B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.**

Alokasi anggaran untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp 187.309.822.574 dengan realisasi sebesar Rp 174.369.071.236,- atau 93.09%. Program ini terdiri dari 4 (Empat) kegiatan dan 46 sub kegiatan sebagai berikut :

**1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 1.348.153.818,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 268.110.000,- atau sebesar 19.89%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Pembangunan ruang limbah Labkesda; Pembangunan Posyandu Asoka Kelurahan Muara Enim.
- b. Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas dengan anggaran sebesar Rp 2.506.560.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 2.491.045.500,- atau sebesar 99.38% Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah
  - Penambahan ruang Puskesmas Belida Darat Kecamatan Belida



- Darat; jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi Penambahan ruang Puskesmas Belida Darat Kecamatan Belida Darat; dan dan Jasa kajian konsultasi Perencanaan (DED) Penambahan ruang Puskesmas Belida Darat Kecamatan Belida Darat;
- Administrasi kegiatan pengembangan puskesmas
- c. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dengan anggaran sebesar Rp 3.225.367.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 3.198.751.500,- atau sebesar 99.17%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah :
- Rehabilitasi berat Puskesmas Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas; jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi Rehabilitasi berat Puskesmas Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas dan Jasa kajian konsultasi Perencanaan (DED) Rehabilitasi berat Puskesmas Ujan Mas Kecamatan Ujan Mas;
  - Administrasi kegiatan pengembangan puskesmas
- d. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 7.362.151.300,- dan realisasi sebesar Rp 7.011.293.101,- atau sebesar 95.23%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah:
- Jasa Konsultasi Pengawasan (Rehab Total Poskesdes Air Asam Kec. Lubai, Rehab Total Poskesdes Kasih Dewa Kec. Rambang Niru, Rehab Berat Poskesdes Kepur Kecamatan Muara Enim, Rehab Total Pustu Lubai persada Kecamatan Lubai Ulu, Rehab Total Pustu Muara Lematang Kecamatan Sungai Rotan)
  - Rehabilitasi total poskesdes Air Asam Kecamatan Lubai;
  - Rehabilitasi berat poskesdes Sukarami Kecamatan Rambang;
  - Rehabilitasi Total Poskesdes Kasih Dewa kecamatan Rambang Niru;
  - Rehabilitasi Berat Poskesdes Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah.
  - Rehabilitasi Total Pustu Desa Penyandingan Kecamatan Semende Darat Laut;
  - Rehabilitasi Total Poskesdes Jambu Kecamatan Gelumbang;
  - Rehabilitasi Berat Poskesdes Kepur Kecamatan Muara Enim;
  - Rehabilitasi Total Pustu Lubai persada Kecamatan Lubai Ulu;
  - Rehabilitasi Total Pustu Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang;
  - Rehabilitasi Total Pustu Muara Lematang Kecamatan Sungai Rotan;
  - Rehabilitasi Total Poskesdes Teluk Limau Kecamatan Gelumbang;
  - Rehabilitasi Total Poskesdes Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung;

- Rehabilitasi Ringan Poskesdes Alai Selatan Kecamatan Lembak;
  - Rehabilitasi Ringan Poskesdes Pagar Gunung Kec. Lubai;
  - Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor Labkesda;
  - Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Rehab Total Pustu Muara Lematang Kecamatan Sungai Rotan; Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Rehab Total Poskesdes Teluk Limau Kecamatan Gelumbang; Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Rehab berat poskesdes Sukarami Kecamatan Rambang; Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Rehab Berat Pustu Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang; Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Rehab Total Poskesdes Jambu Kecamatan Gelumbang; Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Rehab Berat Poskesdes Palak Tanah Kecamatan Semende Darat Tengah; Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Rehab Total Poskesdes Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung; Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Rehab Total Pustu Desa Penyandingan Kecamatan Semende Darat Laut
  - Administrasi Kegiatan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan.
- e. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 1.306.560.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 1.292.611.810,- atau sebesar 98.93%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) rehab total rumah dinas Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing rehab total rumah dinas dokter 1 unit; rehab total rumah dinas Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing; jasa konsultasi pengawasan rehab total rumah dinas Teluk Lubuk Kecamatan Belimbing dan Administrasi kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan.
- f. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 22.951.958.469,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 21.141.107.451,- atau sebesar 92.11%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah pengadaan alat kedokteran umum (DAK Fisik) sebanyak 201 Unit; pengadaan alat Alat Kedokteran Radiodiagnostic (DAK Fisik) sebanyak 7 unit; pengadaan alat Alat Laboratorium Umum (DAK Fisik) sebanyak 7 unit; dan pengadaan alat kedokteran umum (APBDP) sebanyak 575 unit.
- g. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi dengan anggaran sebesar Rp 289.141.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 283.555.000,- atau sebesar 98.07%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan kalibrasi alat kesehatan sebanyak 606 unit alat kesehatan di 22 puskesmas di Kabupaten Muara Enim dengan hasil kalibrasi 572 LAIK dan 34

TIDAK LAIK.

- h. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alkes/Alat Penunjang Medik Fasyankes dengan anggaran sebesar Rp 44.088.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 29.300.000,- atau sebesar 66.46%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan kalibrasi alat kesehatan sebanyak alat kesehatan di 22 puskesmas (Sanitarian Kit) di Kabupaten Muara Enim.
- i. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit dengan anggaran sebesar Rp 14.397.239.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 14.018.232.350,- atau sebesar 97.37% Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah
- Jasa Konsultasi Pengawasan (pembangunan ruang gas medis RSUD Gelumbang Kecamatan Gelumbang; pembangunan ruang gas medis RSUD Lubai Ulu Kecamatan Lubai Ulu; pembangunan ruang gas medis RSUD Semende Darat Laut Kecamatan Semende Darat Laut; pembangunan ruang radiologi RSUD Gelumbang; pembangunan ruang radiologi RSUD Lubai Ulu Kecamatan Lubai Ulu, pembangunan ruang radiologi RSUD Semende Darat Laut Kecamatan Semende Darat Laut)
  - Pembangunan ruang gas medis RSUD Gelumbang Kecamatan Gelumbang;
  - Pembangunan ruang gas medis RSUD Lubai Ulu Kecamatan Lubai Ulu;
  - Pembangunan ruang gas medis RSUD Semende Darat Laut Kecamatan Semende Darat Laut;
  - Pembangunan ruang gas radiologi RSUD Gelumbang Kecamatan Gelumbang;
  - Pembangunan ruang gas radiologi RSUD Lubai Ulu Kecamatan Lubai Ulu;
  - Pembangunan ruang gas radiologi RSUD Semende Darat Laut Kecamatan Semende Darat Laut;
  - Pembangunan ruang limbah RSUD Gelumbang Kecamatan Gelumbang
  - Pembangunan ruang limbah RSUD Lubai Ulu Kecamatan Lubai Ulu;
  - Pembangunan ruang limbah RSUD Semende Darat Laut Kecamatan Semende Darat Laut;
  - Kajian konsultasi perencanaan (DED), (pembangunan ruang gas medis RSUD Gelumbang Kecamatan Gelumbang; pembangunan ruang gas medis RSUD Lubai Ulu Kecamatan Lubai Ulu; pembangunan ruang gas medis RSUD Semende Darat Laut Kecamatan Semende Darat Laut; pembangunan ruang radiologi RSUD Gelumbang; pembangunan ruang radiologi RSUD Lubai Ulu Kecamatan Lubai Ulu, pembangunan ruang radiologi RSUD Semende Darat Laut Kecamatan Semende Darat Laut;



- Administrasi kegiatan Pengembangan Rumah Sakit.
- j. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai , Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 11.815.652.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 11.419.475.099,- atau sebesar 96.65%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Pengadaan obat-obatan dan BMHP untuk kebutuhan puskesmas dan jaringannya serta 3 RSUD kelas D yang ada di Kabupaten Muara Enim; Monitoring dan evaluasi pengelolaan obat puskesmas di 24 puskesmas, 3 RSUD kelas D.
- k. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga dengan anggaran sebesar Rp 192.644.298,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 165.491.243,- atau sebesar 85.91%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Calon Jemaah Haji Kabupaten Muara Enim dari Tahap akan keberangkatan sampai kepulangan Jemaah Haji ke Indonesia di 9 Puskesmas Pemeriksa dan 1 RSUD Rujukan; Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Tahap 1, Tahap 2 dan Rapat Koordinasi Lintas Program PIS-PK Tahun 2024; Pertemuan Perkesmas Tahun 2024.
- l. Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya dengan anggaran sebesar Rp 291.550.474,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 286.016.770,- atau sebesar 98.10%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya Distribusi obat dan bahan habis pakai (BMHP) untuk 24 puskesmas dan 3 RSUD kelas D di Kabupaten Muara Enim selama 12 Bulan.

**2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan anggaran sebesar Rp 1.506.385.902,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 1.313.335.300,- atau sebesar 87.18%, Adapun output/keluaran Terlaksananya Kegiatan Rapat Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Bayi sebanyak 35 orang; Terlaksananya Kegiatan Workshop Pemanfaatan Aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) di Kabupaten Muara Enim sebanyak 40 orang; Pemberian susu Ibu Hamil sebanyak 18648 kotak, pemberian selama 3 (tiga) bulan diberikan kepada ibu hamil sebanyak 516 Bumil KEK; Cetak Buku KIA sebanyak 12.000 Buku; Monitoring dan evaluasi program ke 18 puskesmas.
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin dengan anggaran sebesar Rp 77.700.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 66.478.250,- atau sebesar 85.56% Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Pendampingan Tim Ahli ke Puskesmas dan



FKTP Lainnya dalam Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Simtem Rujukan Maternal Neonatal diikuti sebanyak 545 peserta dengan pelaksanaan kegiatan sebanyak 6 (enam) lokasi Puskesmas yaitu Puskesmas Tanjung Raya, Puskesmas Tanjung Enim, Puskesmas Lembak, Puskesmas Tebat Agung, Puskesmas Belida Darat.

- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan anggaran sebesar Rp 1.180.587.288,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 246.938.700,- atau sebesar 76.30% Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Pertemuan Evaluasi Program SHK di Kabupaten Muara Enim dengan jumlah peserta sebanyak 44 orang; Pemeriksaan sampel SHK sebanyak 341 sampel; Pengadaan BMHP SHK sebanyak 22 paket (APBD- P) dan 22 paket (DAK Non Fisik) dan Konsultasi program ke Provinsi sebanyak 2 kali;
- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita dengan anggaran sebesar Rp 271.459.356,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 220.508.950,- atau sebesar 81.23% Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Kegiatan Lomba Balita Indonesia Tingkat Kabupaten sebanyak 48 peserta, Pertemuan Diseminasi Hasil supervisi fasilitatif program anak balita sebanyak 60 peserta, Pertemuan Tindak Lanjut Pembahasan Gizi Buruk dengan peserta 44 peserta serta Pelacakan gizi buruk dengan jumlah kasus gizi buruk sebanyak 9 kasus dari 16 Puskesmas serta Pertemuan LP/LS Program KIA dengan sebanyak 55 peserta.
- e. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar dengan anggaran sebesar Rp 81.601.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 64.162.748,- atau sebesar Rp. 78.63%, Adapun output/keluaran pertemuan Rapat Koordinasi tim Pembina UKS tingkat kabupaten dengan peserta sebanyak 22 Orang dan pertemuan rapat koordinasi tingkat kecamatan dengan peserta sebanyak 22 orang pengelola program UKS di Puskesmas; pembinaan sekolah sehat ke puskesmas yang belum melakukan penjangkaran yaitu puskesmas 12 Puskesmas dalam Kabupaten Muara Enim dan Konsultasi ke Dinas Kesehatan Provinsi sebanyak 1 kali.
- f. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif dengan anggaran sebesar Rp 1.831.786.730,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 1.291.236.051,- atau sebesar Rp. 70.49%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Peningkatan Kualitas Hidup pada Usia Produktif dengan Pengadaan BMHP Kolesterol, Asam Urat, Gula Darah dan Posbindu Kit berupa strip kolesterol 1040 bok, strip Asam urat 860 bok, strip Gula Darah 1.765 bok, alkohol swap 1.305 bok, dan blood lanset 1.305 bok; Monev peningkatan pelayanan kesehatan pada usia produktif ke Puskesmas; Rapat Koordinasi Lintas sektor Pelayanan Kesehatan



Reproduksi CATIN yang di ikuti oleh 60 peserta; Peningkatan Kapasitas Program KB di Kabupaten Muara Enim diikuti 24 peserta; Melakukan minitoring dan evaluasi program ke puskesmas sebanyak 12 puskesmas; Konsultasi dan koordinasi program ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

- g. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut dengan anggaran sebesar Rp 523.660.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 434.894.800,- atau sebesar Rp. 83.05%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pelatihan Tenaga Kesehatan dalam Deteksi Dini Faktor Resiko PTM dan Lansia di Kabupaten Muara Enim dengan peserta dari 44 puskesmas (1 orang pemegang program lansia dan 1 orang bidan desa); Cetak Buku Lansia sebanyak 15.000 buku; monitoring dan evaluasi program ke 10 puskesmas.
- h. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dengan anggaran sebesar Rp 1.192.345.120,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 1.184.188.300,- atau sebesar 99.32%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Monev peningkatan kualitas hidup pada penderita Hipertensi ke puskesmas dan Konsultasi dan Koordinasi Program hipertensi ke Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- i. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus dengan anggaran sebesar Rp 899.007.220,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 816.403.680,- atau sebesar 90.81%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Deteksi Dini Faktor Risiko PTM pada 10 Instansi dengan sasaran 500 Peserta, Monitoring dan evaluasi Peningkatan Kualitas Hidup pada Penderita Diabetes Melitus ke puskesmas; Konsultasi dan Koordinasi Program Diabetes Melitus ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera selatan dan Pengadaan BMHP Gula Darah.
- j. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Orang dengan Gangguan Jiwa Berat dengan anggaran sebesar Rp 67.575.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 57.362.700,- atau sebesar 84.89%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah pendampingan Dokter Spesialis Jiwa bagi petugas kesehatan ke 4 puskesmas Muara Belida, Belida Darat, Sumber Mulia, dan Beringin.
- k. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dengan anggaran sebesar Rp 408.751.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 341.201.825,- atau sebesar 78.76%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Pertemuan monitoring dan evaluasi program TB dengan peserta kegiatan adalah pengelola TB di layanan Puskesmas dan Rumah Sakit tujuan dari kegiatan ini adalah membahas capaian penemuan terduga TB dan pengobatan pasien TB, pelatihan TBC bagi bidan, penyisiran kasus di klinik dan rumah sakit swasta, pengadaan logistik dan

bahan KIE ke masyarakat.

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV dengan anggaran sebesar Rp 275.903.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 248.003.200,- atau sebesar 96.06%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Sero survey di Lapas Muara Enim; Monitoring dan evaluasi program HIV bagi pengelola program di puskesmas dan pengiriman sampel viraloud ke RSMH Palembang dan BMHP rapid HIV.
- m. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 4.517.003.406,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 3.177.796.879,- atau sebesar 70.35%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah :
  - Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit dan Gizi Buruk dengan peserta sebanyak 18 orang (5 orang dokter, 6 orang petugas gizi dan 7 orang bidan/perawat) dari 6 Puskesmas di wilayah Kabupaten Muara Enim
  - Workshop Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) dengan peserta sebanyak 44 orang (petugas Gizi dan bidan koordinator) dari 22 Puskesmas
  - Pengadaan BMHP Strip HB Skrining Anemia Pada Remaja Puteri sebanyak 2405 kotak untuk remaja puteri di Sekolah SMP/SMA sederajat di wilayah Kabupaten Muara Enim
  - Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin (susu bubuk) sebanyak 24766 kotak untuk 516 balita stunting,
  - Pertemuan Koordinasi Pencegahan Stunting di Institusi Pendidikan dengan peserta berjumlah 48 orang yang terdiri dari 24 orang petugas gizi Puskesmas dan 24 orang guru UKS di wilayah Kabupaten Muara Enim.
  - Pertemuan Koordinasi Program Gizi dengan peserta sebanyak 44 orang dari 22 Puskesmas
  - Pertemuan Lintas Sektor dalam rangka Pencegahan Stunting melalui Pemantauan Pertumbuhan Balita di Posyandu dengan peserta sebanyak 66 orang terdiri dari 22 orang TP-PKK Kecamatan, 22 orang kasi PMD Kecamatan dan 22 orang petugas gizi Puskesmas.
  - Pertemuan Pencatatan dan Pelaporan Program Gizi melalui Aplikasi E-PPGBM dengan peserta sebanyak 48 orang (petugas gizi /petugas penginput laporan) dari 24 Puskesmas
  - Pertemuan Tim Koordinasi Penanggulangan Gizi Buruk dan Gizi Kurang dengan peserta berjumlah 72 orang Yang terdiri dari Lintas Sektor, Lintas Program, bidan koordinator dan petugas gizi puskesmas
  - Publikasi Stunting yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menginformasikan data stunting dengan peserta lintas sektor dan lintas program terkait dengan jumlah peserta 60 orang.



- Rujukan anak stunting ke Rumah Sakit adalah rujukan anak stunting yg akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya sewa mobil dan pendampingan oleh petugas kesehatan dalam merujuk balita stunting puskesmas yang melaksanakan ada dua puskesmas PKM Tanjung Agung dan puskesmas Tanjung Enim
  - Koordinasi dan Penilaian Kinerja Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan penurunan Stunting yaitu kegiatan penilaian dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Prov. Sumsel
- n. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp 356.247.950,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 319.504.268,- atau sebesar 89.69%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah
- Upaya Peningkatan kebugaran jasmani (senam pagi) sebanyak 19 kali
  - Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan olahraga ke Puskesmas sebanyak 11 kali
  - Pemeriksaan kebugaran jasmani bagi Calon Jamaah Haji dan Anak Sekolah di 9 Lokasi
  - Koordinasi dan monitoring kegiatan Pos UKK / Perusahaan sebanyak 6 kali
  - Orientasi GP2SP dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang yang berasal dari Puskesmas dan Perusahaan.
  - Pelatihan K3 Fasyankes dengan jumlah peserta sebanyak 28 orang yang berasal dari Puskesmas, RS dan Dinas Kesehatan.
  - Konsultasi/koordinasi program upaya kesehatan kerja dan olahraga Provinsi Sumatera Selatan (Dinkes Prop dan Bapekes) sebanyak 5 kali.
- o. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp 9.694.498.370,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 9.551.365.070,- atau sebesar 98.52%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah :
- Uji petik sampel makanan secara kimia dan mikrobiologi dalam wilayah kerja Dinkes Kab. Muara Enim sebanyak 30 sampel;
  - Inspeksi kesehatan lingkungan TPM ke 14 lokasi TPM;
  - Inspeksi kesehatan lingkungan TTU ke 10 lokasi;
  - Konsultasi dan koordinasi program TPM/limbah medis ke Provinsi Sumatera Selatan sebanyak sebanyak 5 kali;
  - Pembinaan dan pemantauan pengelolaan limbah medis RS/Puskesmas ke 21 puskesmas;
  - Pengiriman sampel makanan ke Balai Tehnik Kesehatan Lingkungan Palembang sebanyak 3 kali;

- Uji laki PDAM di dua kecamatan Sebanyak 3 PDAM Kec. Muara Enim Dan Tanjung Enim;
- Uji Laik Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) dilaksanakan 5 kali di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
- Inspeksi Kesehatan Lingkungan DAMIU dilaksanakan di 5 lokasi dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
- Sasaran Inspeksi Kesehatan Lingkungan SAB di 5 lokasi yaitu Kecamatan Muara Emburung, Muara Enim, Gunung Megang, Semende Darat Laut, Sugihwaras di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
- Konsultasi dan Koordinasi Program PKAM Ke Dinkes Provinsi dan BTKL Palembang Sumatera Selatan;
- Pengambilan sampel DAMIU dilaksanakan di 5 lokasi di dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim;
- Pengambilan sampel Sarana Air Bersih (SAB) di 5 lokasi dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim;
- Pemeriksaan sampel Kualitas air di lokasi sarana Air Bersih KK stunting di 10 lokasi (Kec. Rambang Kec. Tanjung Agung, Kec. Muara Enim );
- Pendampingan TTG sarana air bersih di lokasi desa Marga Mulya, Kecamatan Rambang;
- Pelatihan PKAM ( Pengawasan Kualitas Air minum ) dengan sasaran peserta 44 orang dari 22 Puskesmas , di wilayah Kabupaten Muara Enim.
- Bimbingan Teknis Program Kesehatan Lingkungan ke Puskesmas di 12 Lokasi.
- Pengadaan Cetak Buku Panduan Kegiatan Study EHRA sebanyak 65 Buku dan Kuesioner Pendataan Sebanyak 2.000 Eksemplar.
- Sosialisasi dan Monitoring kegiatan Intervensi Kesehatan Lingkungan (Pembangunan dan jamban) di 19 Desa wilayah Kecamatan Empat Petulai Dangku, Rambang Niru, Lubai Ulu, Panang Enim, Lubai dan Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Pembangunan Jamban dan CTPS di Lokasi di wilayah Kab. Muara Enim sebanyak 361 paket di 15 desa (Banuayu, Baturaja, Dangku, Kuripan Selatan, Siku, Jemenang, Karang Mulya, Lecah, Lubai Makmur, Mekar Jaya, Sumber Mulya, Pagar Jati, Sukaraja, Sugihwaras, Lubuk Nipis) dengan pelaksanaan oleh pihak ketiga dan 300 paket di 4 desa wilayah Kecamatan Lubai Ulu (Desa Karang Agung), Lubai (Desa Beringin dan Air Asam dan Kecamatan Tanjung Agung (Desa Tanjung Agung dengan sistem pelaksanaan Pihak ketiga melalui Anggaran Perubahan, jadi total paket pembangunan jamban dan Cuci Tangan Pakai Sabun



(CTPS) dalam rangka percepatan Open Defecation free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan berjumlah 661 Paket;

- Jasa tenaga ahli fasilitator STBM dan tenaga pendamping/Supervisor kegiatan pendampingan intervensi kesehatan lingkungan (pembangunan jamban dan CTPS);
  - Sosialisasi Study *Environmental Health Risk Assessment*/Penilaian Resiko kesehatan Lingkungan dengan Sasaran Enumerator, Entri data, analisa data sebanyak 115 Peserta dari 24 Puskesmas di Kabupaten Muara Enim
  - Jasa Tenaga Ahli Kegiatan Study *Environmental Health Risk Assessment*/Penilaian Resiko kesehatan Lingkungan.
  - Pelaksanaan Kegiatan Study *Environmental Health Risk Assessment*/Penilaian Resiko kesehatan Lingkungan di 50 Lokasi di Kabupaten Muara Enim
  - Konsultasi dan Koordinasi Kegiatan Study *Environmental Health Risk Assessment*/Penilaian Resiko kesehatan Lingkungan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
  - Konsultasi dan Koordinasi Program Intervensi Kesehatan Lingkungan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
  - Monitoring atau pemantauan desa pelaksana STBM di 10 lokasi/desa;
  - Pengadaan Printer 1 unit Laptop untuk operasional seksi kesehatan lingkungan.
- p. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 627.493.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 535.872.450,- atau sebesar 85.40%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah :
- Pengadaan cetak media promosi kesehatan sebanyak 5 item yaitu (cetak spanduk sebanyak 160 Meter, roll banner sebanyak 30 buah, kipas promosi Kesehatan sebanyak 1500 buah, leaflet sebanyak 8500 lembar, dan mug promosi Kesehatan sebanyak 1500 buah);
  - Pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit prioritas (Kardiovaskuler, kanker, jantung, stroke, urinefrologi) yaitu pemeriksaan berkala pada anak sekolah di SMA Negeri 1 Lawang Kidul dengan peserta 150 siswa.
  - Terlaksananya pertemuan koordinasi mitra dalam rangka mendukung pelaksanaan Germas dengan peserta lintas sektor, lintas program dan mitra yang mendukung pelaksanaan germas yang dilakukan 2 kali dengan jumlah peserta masing-masing 70 orang.
  - Pengadaan Media KIE untuk Posyandu/Alat Bantu Kader dengan item cetak yaitu buku pedoman pengelolaan posyandu sebanyak 410 buku, form kunjungan rumah posyandu sebanyak 410 buah, lembar balik ibu balita sebanyak 410 buah



- dan Pin tanda kecakapan kader sebanyak 300 buah. (DAK Non Fisik)
- Pelaksanaan gerakan kebugaran jasmani (kegiatan skrining kesehatan dan sosialisasi Sistem Informasi Kebugaran dengan melakukan pemeriksaan kebugaran pada siswa di SMA N 2 Muara Enim sebanyak 250 orang. (DAK Non Fisik)
  - Pelaksanaan jambore kader bersama mitra/kelompok masyarakat dengan peserta sebanyak 500 orang yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. (DAK on Fisik)
  - Cetak kartu imunisasi anak sekolah (KIAS) sebanyak 10.021 lembar, Pelaksanaan gerakan vaksinasi bersama mitra/kelompok masyarakat tidak dilaksanakan karena kurangnya ketersediaan vaksin Td (BIAS) dari pusat (Kemenkes);
  - Penguatan Upaya Kesehatan Lansia bagi LP/LS, Rumah Sakit Rujukan, LSM, NGO di Kabupaten Muara Enim dengan peserta 20 orang dari Lintas Program, Lintas Sektor, Rumah Sakit dan Organisasi Profesi;
  - Penguatan Upaya Kesehatan Reproduksi calon Pengantin bagi LP/LS, Organisasi Profesi, LSM dan NGO di Kabupaten Muara Enim dengan jumlah peserta 20 orang dari Lintas Program, Lintas Sektor, Rumah Sakit dan Organisasi Profesi
- q. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 72.516.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 32.555.000,- atau 44.89%, Adapun output/keluaran dari pembinaan terhadap pengelola kesehatan tradisional dan pelayanan kesehatan tradisional di 22 puskesmas; Pembinaan Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga sebanyak 10 Asuhan Mandiri di 16 puskesmas; Pendataan penyehat tradisional dan Pengawasan Toga Puskesmas di 22 puskesmas dalam wilayah Kabupaten Muara Enim; Pertemuan Evaluasi Kestrad Tahun 2024.
- r. Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 311.803.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 204.328.395,- atau sebesar 65.53%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah :
- Pertemuan monitoring dan evaluasi program surveilans dengan peserta 44 orang dengan rincian 22 orang pengelola surveilans dan 22 orang pimpinan puskesmas dari 22 puskesmas;
  - Pertemuan Validasi data surveilans dengan peserta 22 orang pengelola surveilans puskesmas dari 22 puskesmas;
  - Monitoring dan Evaluasi pelaporan SKDR dengan peserta 22 orang dari 22 puskesmas;
  - Terlaksananya kegiatan Penyelidikan Epidemiologi KLB /

- Wabah, PD3I dan Penyakit menular lainnya sebanyak 35 kali (suspek PD3I dan penyakit menular lainnya sebanyak 15 kasus, Kasus KLB sebanyak 5 kali dan terlaksananya pemantauan daerah rawan bencana sebanyak 16 kali )
- Terlaksananya konsultasi program survailans ke dinas kesehatan provinsi Sumatera Selatan dengan sebanyak 2 kali dan pengambilan bantuan bencana ke Pusat Krisis di Palembang 1 kali;
  - Terlaksana Pengiriman sampel suspek kasus KLB / Wabah, PD3I dan penyakit menular lainnya ke BBLK Palembang dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dengan sebanyak 27 kali dengan hasil 6 sampel positif campak rubella dan 8 sampel positif pertusis dan telah dilakukan tindaklanjut.
- s. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK) dengan anggaran sebesar Rp 29.934.920,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.959.900,- atau sebesar 83.38%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah kegiatan ini adalah Skrining masalah kesehatan jiwa di 22 Puskesmas Kabupaten Muara Enim.
- t. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan Napza dengan anggaran sebesar Rp 243.000.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 223.740.000,- atau sebesar 94.54 %, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Pelatihan Tenaga Kesehatan masalah kesehatan jiwa bagi perawat puskesmas dari 22 Puskesmas diwilayah Kabupaten Muara Enim.
- u. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular, Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular, Pelayanan Surveillance dengan anggaran sebesar Rp 2.159.926.950,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 1.176.915.203,- atau sebesar 54.49%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah :
- Pertemuan pengelola program Kusta, malaria, Diare dan ISPA.
  - Kegiatan penyusunan RAD AIDS-TB-Malaria
  - Monitoring dan evaluasi program ISPA Ke Puskesmas
  - Monitoring dan Evaluasi program IVA 5 kali
  - Konsultasi dan koordinasi Program IVA ke Dinkes Provinsi Sumsel 2 kali
  - Pertemuan pengelola Gangguan Indera Fungsional (aplikasi ASIK) bagi Pengelola program puskesmas di kab. Muara Enim Tahun 2024 sebanyak 22 orang pengelola puskesmas
  - Monitoring dan evaluasi program GIF ke Puskesmas 9 kali
  - Konsultasi dan koordinasi program Gangguan Indera Fungsional ke Dinkes provinsi Sumsel 2 kali
  - Pengaduan BMHP IVA tes (kapas lidi , desinfektan, handscoon)

- Pengadaan BMHP EKG terdiri dari paper thermal dan gel;
  - Pemeriksaan sampel SHK berupa jasa pemeriksaan laboratorium rujukan yaitu RSMH Palembang sebanyak 341 sampel
  - Monitoring dan evaluasi 3 M+ dengan peserta 80 orang dan pengambilan Logistik ke Provinsi sebanyak 3 kali;
  - Pertemuan POKJA KIPI dengan peserta 40 orang dokter Puskesmas dan pengelola Imunisasi dari 22 puskesmas;
  - Pertemuan evaluasi program Imunisasi dengan peserta 22 pengelola program imunisasi dari 22 puskesmas;
  - Pertemuan Validasi Data Imunisasi dengan peserta 22 orang pengelola pelayanan Imunisasi Puskesmas di 22 puskesmas;
  - Validasi data imunisasi ke puskesmas sebanyak 10 kali;
  - Monitoring dan Evaluasi validasi data Imunisasi ke Puskesmas sebanyak 7 kali;
  - Melaksanakan Konsultasi program imunisasi ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4 kali;
  - Rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan deteksi dini, preventif, dan respon penyakit tingkat Kab/Kota (Melibatkan : Semua puskesmas, Camat terpilih, Lintas Sektor di Kab/Kota, Lintas Program kesmas, Yankes, Farmalkes, SDM) dengan peserta 90 orang Lintas Sektor dan Lintas Program sebanyak 2 kali kegiatan;
  - Pendampingan, Pembinaan, dan Koordinasi LS/LP Pencegahan penyakit Menular Prioritas serta Faktor resiko dan Penyakit Tidak Menular Prioritas, UBM, serta Imunisasi dan Penyehatan Lingkungan ke Puskesmas ; sebanyak 30 kali;
  - Sosialisasi Program Imunisasi LP/LS (ABT) dengan peserta 100 orang Lintas Program dan Lintas Sektor;
  - Pelatihan Aplikasi ASIK Bagi Bidan Desa dengan peserta 256 bidan desa di 22 puskesmas.
- v. Sub Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan) dengan anggaran sebesar Rp 84.732.309.133,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 82.997.271.159,- atau sebesar 97.95%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah :
- Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 yang di daftarkan Pemerintah Daerah (Program Berobat Mudah dan Gratis Kabupaten Muara Enim) bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim selama 12 bulan, iuran peserta BPJS Kesehatan Program Berobat Mudah dan Gratis Kabupaten Muara Enim, sebanyak 181.254 jiwa. Pembayaran iuran ini berdasarkan jumlah peserta terdaftar aktif pada awal bulan berjalan dan peserta susulan dan bayi baru lahir pada bulan berjalan.

- Pembayaran Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Mandiri selama 12 bulan, Pembayaran Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Mandiri sebanyak 9434 jiwa. Pembayaran iuran ini berdasarkan jumlah peserta terdaftar aktif pada awal bulan berjalan;
  - Terlaksananya kegiatan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program JKN dengan jumlah peserta 62 peserta/Orang;
  - Terlaksananya kegiatan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Rujukan dengan jumlah peserta 62 peserta/Orang
  - Monitoring dan Evaluasi program JKN dan program rujukan di 25 puskesmas dan 7 rumah sakit
  - Menghadiri Pertemuan JKN Tingkat Provinsi sebanyak 1 kali dan menghadiri pertemuan Rujukan/Sisrute Tingkat Provinsi sebanyak 2 kali;
  - Melakukan Pertemuan dan Rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan 4 kali, Pertemuan dan rekonsiliasi Pajak Rokok 2 kali
  - Pertemuan Lintas Sektor Program JKN sebanyak 2 kali;
  - Konsultasi Program JKN dan program rujukan ke Dinas Kesehatan Provinsi sebanyak 1 kali.
- w. Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional dengan anggaran sebesar Rp 96.060.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 6.318.500,- atau sebesar 6.58%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit potensi KLB ke Laboratorium rujukan / Nasional sebanyak 12 sampel dengan hasil 2 sampel dinyatakan positif Pertusis dan 1 sampel positif campak rubella dan telah dilakukan tindak lanjut; Pengiriman sampel SHK ke Laboratorium Rujukan RSMH Palembang.
- x. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dengan anggaran sebesar Rp 414.329.324,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 358.117.600,- atau sebesar 86.43%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan KKS dan Forum Kabupaten Sehat berupa penyediaan Alat Tulis Kantor, terselenggaranya rapat/evaluasi baik tim Pembina, tim teknis maupun forum kabupaten sehat sebanyak 8 kali, kegiatan kaji banding/studi tiru forum kabupaten sehat dan tim Pembina ke Kabupaten Subang provinsi Jawa Barat, kegiatan sosialisasi ke 8 kecamatan, Rapat Koordinasi satu kali, konsultasi dan koordinasi ke dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3 kali, dan bimbingan teknis ke puskesmas sebanyak 3 kali.
- y. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit dengan anggaran sebesar Rp 4.734.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 4.029.187.258,- atau sebesar 85.11%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan operasional 3

RSUD kelas D berupa logistik bahan bakar minyak 14.600 liter, Isi ulang tabung gas elpiji dan tabung O2 sebanyak 254 buah, alat tulis kantor 47 jenis materai 1200 lembar, cetakan 3 jenis (amplop, map dan kertas kop), peralatan kebersihan dan rumah tangga 44 jenis, pemenuhan kebutuhan makan dan minun bagi pasien di 3 RSUD kelas D selama 12 bulan.

- z. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan, Hibah PMI) dengan anggaran sebesar Rp 2.662.717.300,- dan realisasi keuangan Peningkatan Mutu pelayanan Laboratorium kesehatan; Pengadaan reagen dan Bahan Habis Pakai Labkesda; terlaksananya operasional Palang Merah Indonesia (PMI).sebesar Rp 2.041.952.733,- atau sebesar 76.69%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Belanja Bahan Bakar Genset (Dexlite), Refill/Isi Tabung Pemadam Kebakaran, Pengadaan Reagen dan Alat Kesehatan Habis Pakai Labkesda; UPS Alat Laboratorium, CCTV, Neon Box, Videotron, Wastafel Biasa dan Wastafel Medis, Belanja Lemari Mikroskop dengan lampu, meja granit besar, dan meja granit sedang, Kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal (PME), Perbaikan an Alat Laboratorium, Pemusnahan Limbah Padat dan Cair Infeksius Labkesda, Kegiatan Kalibrasi, Belanja Modal APAR, Belanja Modal Personal Computer, tersedianya ekstrafooding untuk petugas labkesda; Kegiatan Temu Mitra Labkesda bagi pimpinan puskesmas, dinkes, perusahaan dan PDAM sebanyak 65 orang; terlaksananya semua operasional labkesda;; terlaksananya operasional Palang Merah Indonesia (PMI); Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Persiapan Penguatan Kolaborasi Puskesmas dengan Klinik Pratama dan TPMD dalam Pelayanan Program Prioritas di 24 Puskesmas, 28 Klinik, dan 25 TPMD sebanyak 1 kali.
- aa. Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 487.049.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 172.731.489,- atau sebesar 35.46%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah terakreditasinya fasyankes di Kabupaten Muara Enim. Pada saat ini, 7 Rumah sakit terakreditasi, 22 Puskesmas terakreditasi, dan 23 Klinik terakreditasi. Kenaikan jumlah fasyankes terakreditasi 5 Fasyankes klinik dan 1 klinik yang terakreditasi dikarenakan perubahan lokasi serta 1 Laboratorium Kesehatan terakreditasi tahun 2024. Realisasi Keuangan masih jauh dibawah standar dikarenakan.
- bb. Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) dengan anggaran sebesar Rp 4.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 1.350.000,- atau sebesar 30%, (DAK Non Fisik) Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah investigasi kejadian pasca

- pemberian Imunisasi pada bayi dan balita sebanyak 3 kali di RS Prabumulih, Puskesmas Tebat Agung dan Puskesmas Beringin.
- cc. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan anggaran sebesar Rp 493.658.176,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 436.237.871,- atau sebesar 88.37%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah :
- Pembayaran Jasa Tenaga Kesehatan Kegiatan PSC 119 (Non ASN) kegiatan yang dilaksanakan dari bulan Januari s/d Desember 2024.
  - Pengadaan Extrafooding/Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh Susu Bearbrand sebanyak 1950 kaleng (13 lokasi @150 kaleng).
  - Pembayaran Sewa Alat Komunikasi PSC 119 selama 10 bulan;
  - Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tim PSC 119 MANTAP dan Jejaring dalam Tatalaksana Kegawatdaruratan Medis Pra-Fasyankes di Kabupaten Muara Enim dengan jumlah peserta 100 orang;
  - Monitoring dan Evaluasi program PSC 119 di 24 puskesmas dan 3 RSUD kelas D Jejaring PSC 119;
  - Kegiatan Pelayanan PSC 119 dan P3K/event di Kabupaten Muara Enim sebanyak 55 kegiatan;
  - Terlaksananya kegiatan Rujukan Pasien ke Rumah Sakit Sebanyak 7 Kali;
  - Terlaksananya Kegiatan PSC 119 Penanggulangan Bencana Sebanyak 6 Kali.
- dd. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis dengan anggaran sebesar Rp 80.712.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 63.571.600,- atau sebesar 78.76%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah cetak formulir untuk pasien TB, Pertemuan rapat koordinasi Penanggulangan TBC dan pertemuan publik private mix untuk meningkatkan jejaring TBC, monitoring pengobatan pasien TBC
- ee. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV) dengan anggaran sebesar Rp 63.734.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 61.223.879,- atau sebesar 96.06%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah pengiriman sampel viral load ke RSMH Palembang melalui Dinas Kesehatan provinsi Sumatera Selatan; cetak lembar balik sebanyak 25 buah dan cetak banner sebanyak 16 buah; pertemuan pengelola TB dan pengelola HIV puskesmas sebanyak 44 peserta.
- ff. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria dengan anggaran sebesar Rp 276.784.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 214.581.908,- atau sebesar 77.53%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah BMHP MALARIA yaitu pengadaan RDT, Larvasida dan Reagen yang di distribusikan ke 22 Puskesmas,

Monitoring Evaluasi program bagi pengelola program malaria, Pelatihan tenaga mikroskopis bagi pengelola program malaria, di wilayah Kabupaten Muara Enim.

gg. Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dengan anggaran sebesar Rp 603.393.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 516.850.000,- atau sebesar 85.66%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Belanja Bahan Lainnya Skrining Upaya Berhenti merokok (Smokerlizer) sebanyak 25 buah; Cetak spanduk Kawasan tanpa rokok sebanyak 30 Buah, cetak stiker sebanyak 560 buah; dan terlaksananya louncing desa Kawasan Tanpa Rokok di Desa Alai Selatan Kecamatan Lembak.

hh. Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak dengan anggaran sebesar Rp 73.241.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 62.268.300,- atau sebesar 85.02%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah Pendampingan Tim Ahli (Sp.A dan Sp.OG) ke Puskesmas dan FKTP Lainnya dalam Pelayanan KIA, Kegawatdaruratan dan Sistem Rujukan Maternal dan Neonatal (DAK NON FISIK) ke 5 Lokasi (Puskesmas Ujan Mas, Teluk Lubuk, Benakat, Gelumbang dan Kelekar) dan Pertemuan Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak hamil, ANC dan Stunting sebanyak 2 kali pertemuan diikuti masing-masing 50 peserta (DAK NON FISIK).

### **3. Kegiatan Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**

Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 16.968.033,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.912.500,- atau sebesar 64.31%, adapun output/keluaran dari terlaksananya penyusunan buku profil kesehatan tahun 2023 sebanyak 35 buku yang telah di distribusikan ke Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Instansi terkait dan 22 puskesmas.

### **4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

a. Sub Kegiatan pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas pelayanan Kesehatan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 194.580.767,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 141.240.346,- atau sebesar 72.59%, Adapun output/keluaran adalah terlaksananya monitoring dan pengawasan terhadap seluruh fasyankes di wilayah Kabupaten Muara Enim, serta sosialisasi perizinan ke seluruh fasyankes

b. Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 315.528.870,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 112.514.600,- atau sebesar 35.66%, Adapun



output/keluaran dari kegiatan ini Adalah jumlah fasyankes yang melaksanakan pengukuran INM dan IKP dengan sasaran 7 RS, 22 Puskesmas dan 27 Klinik. Berdasarkan hasil monitoring dashboard di Mutufasyankes.kemkes.go.id dengan pelaksanaan monev ke fasyankes jika diperlukan maka berdasarkan data keterisian INM dan IKP 90% telah dilaksanakan oleh fasyankes. Secara fisik kegiatan ini telah terlaksana 100%.

### **3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar **Rp 9.589.509.196,-** dengan realisasi sebesar **Rp 7.275.455.154,-** atau **75.87 %**. Program ini terdiri dari 2 (Dua) kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar dengan anggaran sebesar Rp 8.064.900.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 6.024.800.000,- atau sebesar 79.39%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah sebanyak 241 orang tenaga kontrak di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim ( Dinas Kesehatan, 3 RSUD, Labkesda, Gudang Farmasi) yang terdiri dari 3 orang Apoteker, 9 orang dokter spesialis, 6 orang dokter gigi dan dokter umum dan 223 orang tenaga administrasi lainnya.
- b. Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 220.426.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 125.557.920,- atau sebesar 56.96%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah :
  - Terlaksananya kegiatan advokasi penyelenggaraan labkesmas, kegiatan bimbingan teknis penyelenggaraan labkesmas ke 24 puskesmas, dan kegiatan evaluasi penyelenggaraan labkesmas
  - Terlaksananya Pendampingan Pelaksanaan ILP di 4 Puskesmas Lokus dan Terlaksananya Persiapan Pelaksanaan ILP berupa Sosialisasi Pelaksanaan ILP dengan peserta 82 peserta yang terdiri Dinas Kesehatan, Puskesmas, Lintas Program dan Lintas Sektor terkait.
  - Terlaksananya 35 orang

#### **2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ dengan anggaran sebesar Rp 1.304.182.596,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 747.097.234,- atau sebesar 57.28%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah :



- Terlaksananya pertemuan koordinasi teknis petugas promkes dan pemberdayaan masyarakat dengan jumlah peserta 22 orang dari 22 puskesmas.
- Terlaksananya pertemuan koordinasi teknis instruktur Saka Bakti Husada dalam upaya penggerakan Germas dengan jumlah peserta 22 orang dari 22 puskesmas.
- Pelatihan Komunikasi Antar Pribadi dengan jumlah peserta sebanyak 44 orang terdiri dari petugas promkes dan petugas gizi Puskesmas
- Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku dengan jumlah peserta 22 orang yang terdiri dari petugas promkes Puskesmas.
- Terlaksananya pertemuan Peningkatan Kapasitas pengelola ASPAK sebanyak 60 peserta dari Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Labkesda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
- Terlaksananya Pertemuan Orientasi Penyelenggaraan ILP bagi Petugas Puskesmas dan Orientasi Penyelenggaraan Posyandu Prima/Pustu bagi Petugas Pustu/Poskesdes serta Dinas Kesehatan sebanyak 43 peserta.
- Pelatihan Konseling Menyusui sebanyak 25 peserta (petugas gizi dan bidan koordinator)
- Kegiatan Workshop Kesehatan Catin & KB bagi Pemegang Program, LP/LS, Nakes Prov/Kab/Kota
- Pelatihan petugas TBC dalam melakukan diagnosa, penemuan, pengobatan TB serta manajemen pelaporan dan logistik TB, dengan 30 peserta pengelola TB puskesmas dengan narasumber dari Bapelkes dan Dinas Kesehatan provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten yang kegiatannya dilakukan di Bapelkes.

#### 4). Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan

Minuman Alokasi anggaran untuk Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebesar **Rp 666.112.706,-** dengan realisasi sebesar **Rp 448.548.096,-** atau **67.34%**. Program ini terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan dan 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

##### 1. Kegiatan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tingkat Lanjut Pengawasan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan anggaran sebesar Rp 107.859.700,- dan realisasi sebesar Rp 86.214.600,- atau sebesar 79.93%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah terbitnya rekomendasi teknis perizinan baru apotek / toko obat sebanyak 9 sarana, rekomendasi teknis perpanjangan / perubahan perizinan apotek / toko obat sebanyak 8 sarana; Monitoring Evaluasi dan pengawasan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) di wilayah Kabupaten Muara Enim (Apotik,toko obat) sebanyak 40



sarana; Kegiatan Bimbingan Teknis hasil pengawasan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) di wilayah Kabupaten Muara Enim sebanyak 80 orang peserta.

**2. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produksi Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga**

Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan, sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRTP sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat di Produksi oleh Industri Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp 294.940.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 207.947.600,- atau sebesar 70.50%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pemenuhan komitmen pelaku usaha P-IRT dengan kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan sebanyak 2 kali (Dana APBD dan DAK POM) dengan total peserta 110 pelaku usaha, dilanjutkan dengan pengawasan dan pemeriksaan sarana ke 40 sarana IRTP (dana APBD dan DAK POM) selai itu juga ada kegiatan Orientasi HSP dan Penjamah Makanan siap saji 1 kali.

**3. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Industri Rumah Tangga**

Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp 263.312.306,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 157.385.896,- atau sebesar 58.63% adalah terlaksana kegiatan bimbingan teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi pelaku usaha P-IRT dua kali (Dana APBD dan DAKPOM) dengan total peserta 130 orang, dilanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan sarana ke 10 sarana IRTP, pemeriksaan sampel produk IRTP sebanyak 20 sampel dan Food Security pada pasar menjelang Ramadhan, Idul fitri dan Idul Adha dan Calon Jemaah Haji sebanyak 4 kali, serta Pemeriksaan Jajanan Anak sekolah ke 5 sekolah.

**5). Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar **Rp 584.961.300,-** dengan realisasi sebesar **Rp 409.203.120,-** atau **69.95 %**. Program ini terdiri dari 3 (Tiga) kegiatan dan 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

**1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**



- a. Sub kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 139.072.300- dan realisasi keuangan sebesar Rp 112.058.300,- atau sebesar 80.58%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah:
- Terlaksananya kegiatan Aktifitas fisik bersama bersama masyarakat serta Gerakan Gemar makan buah dan sayur dengan jumlah sasaran sebanyak 1000 orang;
  - Terlaksananya kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala sebanyak 500 orang dalam rangka Hari Kesehatan Nasional yang ke 79 Tahun di Kabupaten Muara Enim.
  - Terlaksananya kegiatan Seminar Kesehatan dalam rangka HUT Kesehatan ke 79 tahun di Kabupaten Muara Enim dengan jumlah peserta 150 orang.

## **2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dengan anggaran sebesar Rp 192.580.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 161.550.120,- atau sebesar 83.89%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah
- Pengadaan spanduk kegiatan hari-hari besar sebanyak 336 meter spanduk berbagai tema hari-hari besar
  - Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Germas dengan Mobil Keliling di 6 lokasi.
  - Kegiatan Aktivitas fisik bersama dalam rangka hari kesehatan nasional dalam rangka HKN
  - Kegiatan Iklan Layanan Masyarakat (Radio Spot). Kegiatan ini dilakukan ini dengan Serasan Radio 100,8 FM dan Radio Balebat Enim Jaya.
  - Terlaksananya kegiatan pembinaan pelaksanaan PHBS ke Puskesmas di 15 Puskesmas.

## **3. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sepervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)(Pembinaan/Pelatihan Satuan Karya Pramuka (Saka) Bhakti Husada, Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat TK SD Sekolah Menengah dan Sederajat dengan anggaran sebesar Rp 253.308.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 135.594.700,- atau sebesar 53.53%, Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah :
- Kegiatan Pembinaan Satuan Karya Pramuka (SAKA) Bakti Husada dilaksanaka 24 kali selama 6 bulan dan beranggotakan 60 orang dari SMA yang ada di Kabupaten Muara Enim;



- Penguksuhan Anggota Saka Bakti Husada di ikuti oleh 100 orang di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
- Bimbingan kelompok kerja oprasional (Pokjanal) Posyandu dalam pengelolaan posyandu prima dan posyandu dalam transformasi layanan primer dilakukan di 4 lokasi yaitu Puskesmas Beringin, Puskesmas Kelekar, Puskesmas Gelumbang dan Puskesmas Tanjung Agung.
- Pertemuan Bimtek Kelompok Kerja Oprasional Posyandu dalam pengelolaan posyandu prima dan posyandu dalam transformasi layanan primer. Kegiatan ini dilakukan di 2 lokasi yaitu Puskesmas Benakat dan Puskesmas Muara Enim.
- Pertemuan Advokasi kelompok kerja operasional posyandu dalam pengelolaan posyandu prima dan posyandu dalam transformasi. Kegiatan ini dilakukan dengan dihadiri Pimpinan Puskesmas dan Camat yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim.
- Kegiatan Sosialisasi 25 kecakapan kader bagi petugas promkes Puskesmas. Kegiatan dihadiri oleh 22 petugas Promkes Puskesmas yang ada di Wilayah Kabupaten Muara Enim.
- Pertama Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu dalam Pengelolaan Posyandu prima dan posyandu dalam transformasi layanan primer.

### 3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Capaian indikator kinerja daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.7 Matrik Capaian Indikator Kinerja  
Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Tujuan Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	0.6	0.59	98.33%
2.	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Angka Harapan Hidup	69.83	69.98	100.21%

**Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim**



INDIKATOR SPM		Target 2023	Sasaran (sesuai SK bupati)	Total Capaian 2024	
				Realisasi	% Cakupan
1		2	3	4	5
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	10.900	10116	92.81
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	10.212	9.495	92.98
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	10.211	9511	93.14
4	Pelayanan kesehatan anak balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	51.469	45.636	90.42
5	Pelayanan kesehatan anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	24.490	24.065	98.26
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	410.948	393.860	95.84
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	52.622	50.787	96.51
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	138.990	135.566	97.54
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	40.048	38.991	97.36
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1.280	1103	86.17
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	11.998	11.222	93.53
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar	100%	15.150	14.040	98.98

Berdasarkan tabel di atas, secara umum indikator kinerja dan Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 telah



berhasil dilaksanakan, namun belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan ada beberapa sub kegiatan yang realisasi keuangan yang masih di bawah 80%, berikut penjelasannya :

#### 4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 92.81% belum mencapai target yang ditetapkan karena kurangnya pengetahuan ibu tentang pemeriksaan kehamilan, belum semua sasaran terdata, capaian pelayanan di fasilitas swasta tidak dilaporkan, faktor geografis yang sulit, dan sasaran yang berpindah tempat.	Akan dilakukan transformasi sistem pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat melalui Integrasi Pelayanan Primer (ILP) sampai ke desa. Dengan mengintegrasikan semua program yang ada di Dinas Kesehatan. Layanan primer adalah layanan dasar yang dilakukan oleh puskesmas. Integrasi dilakukan ke semua program termasuk FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) lainnya.
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar capaian di tahun 2024 sebesar 92.98%, capaian ini belum sesuai dengan target dikarenakan masih ada persalinan dirumah, ibu bersalin di fasilitas kesehatan lain/swasta tidak terdata/terlaporkan, dan sasaran yang berpindah tempat	sda
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar belum mencapai target sebesar 93.14 karena tidak dilaporkan/terdata bayi yang lahir di pelayanan kesehatan swasta dan ditolong non nakes.	sda
4.	Pelayanan kesehatan anak balita mendapatkan pelayanan sesuai standar belum mencapai target sebesar 90.42% karena masih ada balita yang tidak memantau pertumbuhan dan perkembangannya ke Posyandu/Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	sda

No	Permasalahan	Solusi
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target yaitu sebesar 98.26% karena ada siswa yang tidak hadir saat skrining dan siswa yang putus sekolah/pindah.	sda
6.	Capaian Pelayanan kesehatan pada usia produktif usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar masih dibawah target yaitu 95.84 % hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat usia >15 tahun tentang posbindu PTM dalam pelaksanaan deteksi dini faktor resiko PTM, serta ketersediaan posbindu kit di posyandubar baru dipenuhi pada akhir tahun 2024.	sda
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar belum mencapai target sebesar 96.51 dikarenakan kurangnya partisipasi usia lanjut untuk melakukan pelayanan kesehatan di posyandu.	sda
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar capaian di tahun 2024 sebesar 97.54% capaian ini masih jauh dibawah target dikarenakan kurangnya tingkat kepatuhan penderita Hipertensi untuk kontrol dan minum obat setiap hari	sda
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target yaitu sebesar 97.36% hal ini dikarenakan kurang maksimalnya pelaksanaan posyandu PTM di masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan deteksi dini faktor resiko PTM.	sda
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 86.17 hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang lebih memilih melakukan pengucilan terhadap penderita gangguan jiwa, terutama bagi yang dalam kondisi mengganggu masyarakat.	sda

No	Permasalahan	Solusi
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis belum mencapai target sebesar 93,53% hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit TBC, masih ada masyarakat yang tidak mau memberikan sampel sputum, capaian pelayanan di fasilitas swasta tidak dilaporkan, faktor geografis yang sulit, dan kurangnya pengetahuan bidan desa mengenai program TBC.	sda
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar sesuai dengan target sebesar 98.98% karena adanya temuan kasus TB yang merupakan salah satu target dalam SPM HIV belum tercapai	sda

## 5. PRESTASI DAN PENGHARGAAN (2024)

Prestasi yang diperoleh Dinas Kesehatan dalam bidang kesehatan pada tahun 2024 adalah :

- 1) Penghargaan Implementasi KTR (Kawasan Tanpa Rokok) dari Adinkes Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim
- 2) Penghargaan dari Adinkes Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam upaya mendukung upaya Penanggulangan AIDS-Tuberkulosis-Malaria (ATM) Tahun 2024.
- 3) Penghargaan dari Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim sebagai Dinas Kesehatan Terbaik I dalam penyelenggaraan Embarkasi/Debakasi haji Tahun 2024 M / 1445 H.
- 4) Penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim atas prestasinya sebagai Kabupaten/Kota Terbaik dalam rangka Kewaspadaan Dini dan Respon Terhadap Penyakit yang menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) / Wabah
- 5) Terbaik III Kategori Dokter Gigi pada Penganugerahan Sumber Saya Manusia Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 A.n drg. Nina Fitriah dari Puskesmas Lembak Kab. Muara Enim.
- 6) Terbaik III Kategori Dokter Umum pada Penganugerahan Sumber Saya Manusia Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 A.n dr. Yosepa, M.Kes dari Puskesmas Ujan Mas Kab. Muara Enim.
- 7) Terbaik III Kategori Tenaga Kefarmasian pada Penganugerahan Sumber Saya Manusia Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 A.n Rika Oktarina, S.Farm,Apt dari



Puskesmas Lembak Kab. Muara Enim.

- 8) Terbaik III Kategori Tenaga Gizi pada Penganugerahan Sumber Saya Manusia Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 A.n drg. Theresia Sri Guslin Marbun,A.Md.Gz dari RSUD Gelumbang Kab. Muara Enim.
- 9) Terbaik III Kategori Tenaga Kesehatan Lingkungan pada Penganugerahan Sumber Saya Manusia Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 A.n Refani Pradhita Utami, A.Md.KL dari RSUD Gelumbang Kab. Muara Enim.
- 10) Terbaik III Kategori Tenaga Perawat pada Penganugerahan Sumber Saya Manusia Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 A.n Ns. Yogi Saprianto,S.Kep dari RSUD Semendo Darat Laut Kab. Muara Enim.
- 11) Penghargaan Universal Health Coveragi (UHC).
- 12) Penghargaan diberikan kepada Dinas Kesehatan sebagai TOP 10 Inovasi Daerah Kategori Perangkat Daerah dalam rangka penilaian/asistensi Inovasi daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan judul inovasi ANTING (Aplikasi Pemantauan Intervensi Penanganan Stunting).



### 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)

#### 1. ALOKASI ANGGARAN

Urusan Wajib Pekerjaan Umum diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim. Total Alokasi Belanja pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp918.259.441.489,00 (sembilan ratus delapan belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp851.855.863.940,00 (delapan ratus lima puluh satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 92,77%.

##### a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek yang dialokasikan untuk membiayai belanja rutin seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dalam program dan kegiatan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim. Anggaran belanja operasi dialokasikan sebesar Rp144.408.684.094,00 (seratus empat puluh empat miliar empat ratus delapan juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan puluh empat rupiah) dengan realisasi sebesar Rp115.727.081.652,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar 80,14%.

##### b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi dalam program dan kegiatan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim. Anggaran belanja modal dialokasikan sebesar Rp773.850.757.395,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp736.128.782.288,00 (tujuh ratus tiga puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar 95,13%. Adapun program dan kegiatan, capaian indikator sasaran, program, dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 2. PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN.

Pada tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim melaksanakan 10 (sepuluh) program, 22 (dua puluh dua) kegiatan,



dan 81 (delapan puluh satu) Sub Kegiatan, yaitu:

### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini digunakan untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim dan pelaksanaan *grand design* reformasi birokrasi. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp13.561.630.365,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp10.729.385.708,00 (sepuluh miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan rupiah) atau 79,12%. Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 29 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut yaitu:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tujuan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk memenuhi amanat: a) Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan c) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Hasil dari kegiatan ini berupa ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan keuangan sebagai akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Untuk target kinerja, telah tercapai sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 sebesar Rp185.770.750,00 (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp158.785.600,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) atau 85,47%. Terdiri dari 6 (enam) Sub Kegiatan, yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp64.464.400,00 (enam puluh empat juta empat ratus enam puluh empat ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp61.530.700,00 (enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu tujuh ratus rupiah) atau 95,45%. Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa dokumen rencana kerja tahun 2025 sebanyak 2 buku dan dokumen perubahan rencana kerja tahun 2024 sebanyak 2 buku. Dengan realisasi kinerja output sebesar 100%.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan keluaran, yaitu dokumen RKA tahun 2024 sebanyak 12 buku dan 2025 sebanyak 6 buku dengan target kinerja telah tercapai 100%.



Alokasi anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tahun 2024 sebesar Rp41.150.500,00 (empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp30.964.200,00 (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) atau 75,25%. Rendahnya penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan ini dipengaruhi oleh tidak maksimalnya realisasi pada belanja makanan dan minuman rapat serta belanja jasa tenaga administrasi, yaitu masing-masing realisasi sebesar 67,46% dan 66,67%.

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan keluaran (output), yaitu dokumen RKA Perubahan tahun 2024 sebanyak 6 buku dengan target kinerja telah tercapai 100%. Alokasi anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2024 sebesar Rp29.045.400,00 (dua puluh sembilan juta empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp20.828.000,00 (dua puluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau 71,71%. Rendahnya penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan ini dipengaruhi oleh tidak terealisasinya belanja jasa tenaga administrasi.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan keluaran (output), yaitu dokumen DPA tahun 2024 sebanyak 12 buku dengan target kinerja telah tercapai sebesar 100%. Alokasi anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD tahun 2024 sebesar Rp18.771.750,00 (delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp17.548.900,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) atau 93,49%.
- 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan keluaran, yaitu dokumen DPA Perubahan tahun 2024 sebanyak 6 buku dengan target kinerja telah tercapai sebesar 100%. Alokasi anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD tahun 2024 sebesar Rp16.430.600,00 (enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) realisasi sebesar Rp13.879.800,00 (tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atau 84,48%.
- 6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dengan keluaran, yaitu dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 sebanyak 6 buku dan dokumen LKPJ sebanyak 1 buku dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD tahun 2024 sebesar Rp15.908.100,00 (lima belas juta sembilan ratus delapan ribu seratus rupiah) terealisasi sebesar Rp14.034.000,00 (empat belas juta tiga puluh empat ribu rupiah) atau 88,22%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat a) PP Nomor 22 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah dan b) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi anggaran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar Rp8.462.082.077,00 (delapan miliar empat ratus enam puluh dua juta delapan puluh dua ribu tujuh puluh tujuh rupiah) terealisasi sebesar Rp6.776.415.984,00 (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) atau 80,08%. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan untuk pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan kepada ASN sebanyak 54 orang selama 12 (dua belas) bulan serta pembayaran gaji 13 dan 14 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp Rp8.354.802.817,00 (delapan miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) terealisasi sebesar Rp6.684.984.575,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) atau 80,01%.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dilaksanakan untuk penyusunan dokumen neraca keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa dokumen neraca sebanyak 2 buku dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD tahun 2024 sebesar Rp35.333.600,00 terealisasi Rp32.766.632,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) atau 92,74%.
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output/keluaran berupa laporan keuangan akhir tahun sebanyak 2 buku. Dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun 2024 sebesar Rp35.954.830,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp23.914.000,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) atau 66,51%. Rendahnya penyerapan anggaran Sub Kegiatan ini dipengaruhi oleh belanja jasa tenaga operator komputer yang terealisasi hanya sebesar 25%.
- 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan keluaran/output berupa laporan keuangan bulanan sebanyak 12 buku dan laporan semesteran sebanyak 2 buku. Alokasi anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp35.990.830,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) terealisasi

sebesar Rp34.750.777,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 96,55%.

- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan indikator kinerja berupa jumlah premi asuransi kendaraan bermotor barang milik daerah dengan target sebanyak 8 (delapan) unit dan realisasi sebanyak 8 atau 100%. Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp53.130.000,00 (lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp52.766.945,00 (lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau 99,32%.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki 1 (satu) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan indikator kinerja berupa jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam 1 tahun capaian kinerja sebesar 50%. Keluaran/output Sub Kegiatan ini berupa jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan sebanyak 5 (lima) orang dalam 1 tahun. Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp206.250.000,00 (dua ratus enam juga dua ratus lima puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp86.200.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) atau 41,79%. Rendahnya penyerapan anggaran ini dikarenakan tidak adanya undangan dari lembaga tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis yang sesuai dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendukung operasional dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp 1.199.635.040,00 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp1.067.214.683,00 (satu miliar enam puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) atau 88,96%. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah terdiri dari 7 (tujuh) Sub Kegiatan, yaitu:
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa 7 jenis alat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Selama 1 tahun, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp26.624.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp26.033.400,00 (dua puluh enam juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau 97,78%.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa jumlah dan jenis peralatan yang dipenuhi dengan output (keluaran) 22 jenis perabot kantor dan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp32.349.370,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) teralisasi sebesar Rp32.321.370,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) atau 99,91%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan jenis Komponen adalah jumlah dan jenis Bahan Logistik Kantor dan jenis Komponen yang disediakan dengan output (keluaran), yaitu Jumlah dan jenis alat tulis kantor berupa 43 jenis di tahun 2024, Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp77.636.900,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp76.154.000,00 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) atau 98,09%.
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan output(keluaran) berupa 6 jenis cetakan yaitu, amplop kop dinas, spanduk, Blangko SPPD, Lembar Disposisi, Map Snel Kop Dinas; dan fotocopy untuk target kinerja telah tercapai sebesar 100% Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp54.035.100,00 (lima puluh empat juta tiga puluh lima ribu seratus rupiah) terealisasi sebesar Rp53.811.600,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu enam ratus rupiah) atau 99,59%.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Output/keluaran berupa surat kabar sebanyak 20 eksemplar selama 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) terealisasi sebesar Rp44.135.000,00 (empat puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) atau 91,95%.
- 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa laporan hasil koordinasi dan konsultasi sebanyak 12 buku. Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp887.900.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp774.389.313,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas rupiah) atau 87,22%.
- 7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan output/keluaran berupa arsip dinamis dan arsip statis, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp73.089.670,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dan terealisasi sebesar Rp60.370.000,00 (enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 82,60%.

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Output/keluaran kegiatan ini berupa Jumlah Unit kendaraan mobil dinas/jabatan dan jumlah kendaraan motor dinas/ jabatan tercapai dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp890.976.690,00 (delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp486.328.900,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) atau 54,58%. Sub Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp107.664.000,00 (seratus tujuh juta enam ratus enam puluh empat rupiah) dan realisasi sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) atau 98,45%. Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor, yaitu Filing Cabinet 4 Laci Type D4A sebanyak 4 unit; Lemari Arsip Besi Vipool sebanyak 1 set; dan Lemari Arsip Pintu Sleding Glass Type sebanyak 5 buah dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp650.859.600,00 (enam ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp248.916.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) atau 38,24%. Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa belanja modal alat pendingin, yaitu AC 1 PK sebanyak 8 unit; belanja modal alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sebanyak 35 jenis; serta belanja modal personal komputer, yaitu laptop sebanyak 6 unit dengan capaian kinerja sebesar 40%. Rendahnya capaian kinerja Sub Kegiatan ini karena tidak terealisasinya belanja modal alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sebanyak 35 jenis dengan anggaran sebesar Rp399.999.600,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- 3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp132.453.090,00 (seratus tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) realisasi sebesar Rp131.412.900 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus dua belas ribu sembilan ratus rupiah) atau 99,21%. Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa belanja modal perabot kantor, yaitu hordeng kantor sebanyak 277 meter dengan capaian kinerja sebesar 100%.

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan operasional kantor dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp660.276.300,00 (enam ratus enam puluh juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah) terealisasi sebesar

Rp624.068.491,00 (enam ratus dua puluh empat juta enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) atau 94,52%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan), yaitu:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa pembayaran rekening Telepon, Air PDAM, Listrik, dan Internet selama 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp229.236.300,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) teralisasi sebesar Rp206.568.491,00 (dua ratus enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) atau 90,11%
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor output/keluaran berupa pembiayaan perbaikan Komputer sebanyak 15 unit dan Printer sebanyak 25 unit dan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk Sub Kegiatan ini Sebesar Rp.28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau 97,52%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output/keluaran berupa penyediaan tenaga kebersihan kantor dan UPTD sebanyak 14 orang selama 1 tahun; operator komputer sebanyak 11 orang, dan tenaga keamanan kantor dan UPTD sebanyak 8 orang selama 1 tahun dan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja sebesar Rp402.840.000,00 (empat ratus dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) teralisasi sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) atau 96,81%.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengamanan barang milik daerah sesuai amanat PMDN 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.903.509.508,00 (satu miliar sembilan ratus tiga juta lima ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp1.477.605.105,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima ribu seratus lima puluh rupiah) atau 77,63%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output/keluaran berupa pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 44 jenis dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp1.549.479.908,00 (satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp1.195.054.888,00 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) atau



77,13%. Rendahnya capaian realisasi pada Sub Kegiatan ini dipengaruhi oleh belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan yang terealisasi sebesar 63,10%.

- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan output pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim. Alokasi anggaran belanja untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp339.999.600,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp268.550.217,00 (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus tujuh belas rupiah) atau 78,99%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan output beban jasa service AC sebanyak 40 unit dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi Anggaran belanja untuk sub kegiatan ini sebesar Rp14.030.000,00 (empat belas juta tiga puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau 99,79%.

## 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten dengan indikator kinerja yaitu rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 100% di mana sebanyak 214 daerah irigasi kewenangan kabupaten sesuai Permen PU 14 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Kewenangan Daerah Irigasi telah memiliki jaringan irigasi. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp104.507.919.798,00 (seratus empat miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) realisasi kinerja sebesar Rp91.243.195.206,00 (sembilan puluh satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus enam rupiah) atau 87,31%. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai dengan pagu anggaran sebesar Rp5.700.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus juta rupiah) realisasi sebesar Rp5.193.157.000,00 (lima miliar seratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) atau 91,11%. Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa Pemeliharaan Sungai Lingkis di Kecamatan Sungai Rotan dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - b. Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dengan pagu anggaran sebesar Rp66.598.349.998,00 (enam puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) terealisasi sebesar Rp54.858.979.100,00 (lima puluh empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah) atau 82,37%.



- c. Sub Kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp99.999.400,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) realisasi sebesar Rp0,00. Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa pembangunan Cek Dam di Kecamatan Panang Enim dengan target sebanyak 3 unit dan capaian kinerja sebesar 0,00%.
  - d. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah) realisasi sebesar Rp2.933.119.500,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) atau 91,66%. Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa belanja jasa konsultasi konstruksi, yaitu Pembuatan dan Penyusunan Dokumen AMDAL Pengembangan Daerah Irigasi Rawa Kecamatan Sungai Rotan; Pembuatan dan Penyusunan Dokumen AMDAL Pengembangan Jaringan Irigasi di Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Belimbing; Pembuatan dan Penyusunan UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) Pengembangan Jaringan Irigasi DI Ataran Air Empelu; Pembuatan dan Penyusunan UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) Pengembangan Jaringan Irigasi DI Desa Jiwa Baru; Pembuatan dan Penyusunan UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) Pengembangan Jaringan Irigasi DI Air Lemutu dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja berupa persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Kegiatan ini dicapai melalui 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut:
    - a. Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, dengan pagu sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp5.106.836.700,00 (lima miliar seratus enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) atau 94,57%. Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa pembangunan 12 (dua belas) jaringan irigasi di lima kecamatan, yaitu SDU sebanyak 4 jaringan; SDL sebanyak 2 jaringan; SDT sebanyak 2 jaringan; Tanjung Agung sebanyak 2 jaringan; dan Panang Enim sebanyak 2 jaringan. Capaian kinerja Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan sebesar 100%.
    - b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, dengan pagu sebesar Rp22.231.661.100,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp22.098.983.050,00 (dua puluh dua miliar sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima puluh

- rupiah) atau 99,40%. Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 29 kegiatan di Kecamatan SDU, SDT, SDL, Tanjung Agung, dan Panang Enim. Capaian kinerja Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan sebesar 100%.
- c. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan pagu sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terealisasi sebesar Rp498.966.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) atau 99,79%. Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa 1 (satu) paket kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten Muara Enim dengan capaian kinerja sebesar 100%.
  - d. Sub Kegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi, dengan pagu sebesar Rp777.909.300,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) realisasi sebesar Rp553.153.856,00 (lima ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau 71,11%.

### **3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**

Program ini dilaksanakan untuk memenuhi akses masyarakat terhadap air minum melalui SPAM baik jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi, dengan indikator kinerja persentase rumah tangga berakses air minum dengan target sebesar 100% dan realisasi sebesar 73,58%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tahun 2024 sebesar Rp21.437.944.519,00 (dua puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan belas rupiah) terealisasi sebesar Rp21.072.014.841,00 (dua puluh satu milyar tujuh puluh dua juta empat belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) atau 98,29%.

Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.502.612.545,00 (empat miliar lima ratus dua juta enam ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) realisasi sebesar Rp4.367.524.079,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah) atau 97,00%. Output/keluaran.  
Sub Kegiatan ini berupa belanja persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat, yaitu pembangunan sistem penyediaan air minum sebanyak 15 paket kegiatan. Rincian capaian kinerja Sub Kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 3.8 Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  
Bukan Jaringan Perpipaan**

No	Uraian Kegiatan	Kecamatan	Target	Realisasi	(Rp)
1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Kayu Ara Sakti Kecamatan Gunung Megang	Gunung Megang	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000
2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Pajar Indah Kecamatan Gunung Megang	Gunung Megang	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000
3	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Ibul Kecamatan Belide Darat	Belide Darat	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000
4	Pembangunan Sumur Bor Desa Tanjung Muning Kecamatan Gunung Megang	Gunung Megang	2 Unit	2 Unit	Rp150.000.000
5.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Talang Beliang Kecamatan Belide Darat	Belide Darat	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000
6.	Pembangunan Sumur Bor Desa Sidomulyo Kecamatan Gunung Megang (TMMD)	Gunung Megang	1 Unit	1 Unit	Rp75.000.000
7.	Pembangunan Sumur Bor Arah TPA Bukit Kancil 1 RT/RW 04/05 Air Lintang Muara Enim	Muara Enim	1 Unit	1 Unit	Rp75.000.000
8.	Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Embawang (Lok Adak) Kec. Tanjung Agung	Tanjung Agung	1,2 km	1,2 km	Rp199.996.500
9.	Pembangunan Sumur Bor Desa Beringin	Lubai	1 Unit	1 Unit	Rp225.000.000
10.	Pembangunan Sumur Bor Talang Penantian Desa Baru Rambang, Rambang	Rambang	1 Unit	1 Unit	Rp75.000.000
11.	Pembangunan Sumur Bor SP 1 Lubai Persada	Lubai Ulu	1 Unit	1 Unit	Rp75.000.000
12.	Pembangunan Sumur Bor Pagar Dewa/Dusun 6, Lubai Ulu	Lubai Ulu	1 Unit	1 Unit	Rp75.000.000
13.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Sugih Waras Barat Kec. Rambang	Rambang	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000

No	Uraian Kegiatan	Kecamatan	Target	Realisasi	(Rp)
14.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Sugih Waras Kecamatan Rambang	Rambang	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000
15.	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Air Keruh Kecamatan Rambang	Rambang	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000

- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan pagu anggaran sebesar Rp137.565.129,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) realisasi sebesar Rp135.458.400,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) atau 98,47%. Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya dan capaian kinerja sebesar 100%.
- 3) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi, dan Teknis SPAM, dengan pagu anggaran sebesar Rp2.395.000.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) terealisasi sebesar Rp2.286.768.500,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) atau 95,48%. Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa belanja jasa konsultasi konstruksi sebanyak 3 kegiatan, yaitu Penyusunan Dokumen Kebijakan Strategis Daerah (Jasktrada) Air Minum Kabupaten Muara Enim DAU yang Ditentukan Penggunaannya-Bidang Pekerjaan Umum) untuk DAU 2024; Penyusunan Rencana Pengembangan SPAM IKK Pelita Sari Kabupaten Muara Enim DAU yang Ditentukan Penggunaannya-Bidang Pekerjaan Umum) untuk DAU 2024; dan Penyusunan Rencana Pengembangan SPAM IKK Talang Jawa Kabupaten Muara Enim DAU yang Ditentukan Penggunaannya-Bidang Pekerjaan Umum) untuk DAU 2024 dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 4) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, dengan pagu anggaran sebesar Rp10.789.799.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) terealisasi sebesar Rp10.750.806.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus lima puluh juta delapan ratus enam ribu rupiah) atau 99,64%. Output/keluaran kegiatan ini berupa pembangunan sistem penyediaan air minum sebanyak 14 unit dengan capaian kinerja sebesar 100%. Selain itu, Sub Kegiatan ini juga memiliki keluaran berupa belanja hibah sebanyak 2 paket yang menggunakan dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK). Rincian capaian kinerja Sub Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 3.9. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  
Jaringan Perpipaan**

No	Uraian Kegiatan	Kecamatan	Target	Realisasi	(Rp)
1.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Air Asam Kec. Lubai	Lubai	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000
2.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Aur Kec. Lubai	Lubai	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000
3.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Gaung Asam Kec. Belide Darat	Belide Darat	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000
4.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Gunung Raja Kec. Empat Petulai Dangku	Empat Petulai Dangku	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000
5.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Menanti Kec. Lubai	Lubai	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000
6.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Pagar Gunung Kec. Lubai	Lubai	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000
7.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Suban Jeriji Kec. Rambang Niru	Rambang Niru	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000
8.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Sukamerinndu Kec. Lubai	Lubai	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000
9.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Tebat Agung Kec. Rambang Niru	Rambang Niru	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000
10.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Lubai Persada Kec. Lubai Ulu	Lubai Ulu	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000

No	Uraian Kegiatan	Kecamatan	Target	Realisasi	(Rp)
11.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Beringin Kampung 9 Kec. Lubai	Lubai	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000
12.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Pagar Agung Kec. Rambang	Rambang	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000
13.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Beringin Kec. Lubai	Lubai	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000
14.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Mekar Jaya Kec. Lubai Ulu	Lubai Ulu	1 Unit	1 Unit	Rp485.000.000
15.	Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi Dia. 200 Mm Wilayah Bogenfill Rumah Tumbuh Kecamatan Muara Enim (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus)	Muara Enim	1 Unit	1 Unit	Rp1.499.844.000
16.	Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Distribusi Dia. 300 Mm Jalan Cik Agus Keimas Islamic Center Kecamatan Muara Enim (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus)	Muara Enim	1 Unit	1 Unit	Rp2.499.955.000

5) Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.612.967.845,00 (tiga miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) terealisasi sebesar Rp3.531.457.862,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) atau 97,74%. Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa belanja persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat sebanyak 6 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Rincian capaian kinerja Sub Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel di bawah.



**Tabel 3.10 Sub Kegiatan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  
Bukan Jaringan Perpipaan**

No	Uraian Kegiatan	Kecamatan	Target	Realisasi	(Rp)
1.	Pengembangan Jaringan Perpipaan Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu	Semende Darat Ulu	5.5 Km	5.5 Km	Rp 852.500.000
2.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Ataran Talang Dengung Dusun 1 Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut	Semende Darat Laut	6.3 Km	6.3 Km	Rp 976.500.000
3.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Pajar Bulan Kecamatan Semende Darat Ulu	Semende Darat Ulu	3.5 Km	3.5 Km	Rp 542.500.000
4.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Seri Tanjung Kecamatan Semende Darat Tengah	Semende Darat Tengah	4 Unit	4 Unit	Rp 620.000.000
5.	Optimalisasi Jaringan Perpipaan Desa Bitis Kecamatan Gelumbang	Gelumbang	1 Unit	1 Unit	Rp 100.000.000
6.	Optimalisasi Jaringan Perpipaan Desa Ibul Kecamatan Belide Darat	Belide Darat	1 Unit	1 Unit	Rp 100.000.000

#### 4) Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas pengurangan sampah dengan indikator kinerja berupa persentase cakupan ketersediaan fasilitas pengurangan sampah dan alokasi anggaran sebesar Rp55.651.947.000,00 (lima puluh lima miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp47.278.450.350,00 (empat puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 84,95%. Program ini memiliki satu kegiatan dan dua Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, dengan alokasi anggaran Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS tahun 2024 adalah sebesar Rp55.246.232.500,00 (lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp46.880.071.350,00 (empat puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh juta tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 84,86%. Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa

pembangunan TPS 3R sebanyak 5 unit yaitu lokasi desa Sidomulyo, desa Gunung Megang Dalam, desa Kota Baru, Desa Betung dan Desa Beringin lengkap dengan pengadaan motor sampah dan mesin-mesin pencacah dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan, dengan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp405.714.500,00 (empat ratus lima juta tujuh ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp398.379.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) atau 98,19%. Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa belanja jasa konsultasi konstruksi, yaitu Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup TPA Lubai sebanyak 1 paket dengan capaian kinerja sebesar 100%.

#### 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini dilaksanakan untuk pemenuhan pelayanan pengelolaan air limbah domestik di rumah tangga dengan alokasi pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp15.036.454.763,00 (lima belas miliar tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp13.696.935.290,00 (tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) atau 91,09%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dan 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman dengan pagu anggaran sebesar Rp13.136.703.100,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga ribu seratus rupiah) realisasi sebesar Rp12.438.207.996,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) atau 94,68%. Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa Penyusunan DED TPA Lubai sebanyak 1 paket dengan capaian kinerja sebesar 100%. Output/keluaran Sub Kegiatan ini juga berupa belanja pemeliharaan, yaitu Rehab IPLT Bukit Kancil Muara Enim dengan capaian kinerja 100%. Selain itu, keluaran Sub Kegiatan ini berupa belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebanyak 14 paket dengan capaian kinerja sebesar 89,02% lebih rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 3.11 Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman**

No	Uraian Kegiatan	Kecamatan	Target	Realisasi
1	Pembangunan Jamban dan Tangki Septik untuk MBR di Kecamatan Rambang	Rambang	100 unit	100 unit

No	Uraian Kegiatan	Kecamatan	Target	Realisasi
	(DAU yang ditentukan penggunaannya - Bidang Pekerjaan Umum untuk DAU 2024)			
2	Pembangunan Jamban dan Tangki Septik untuk MBR di Desa Pagar Dewa Kecamatan Lubai Ulu (DAU yang ditentukan penggunaannya - Bidang Pekerjaan Umum untuk DAU 2024)	Lubai Ulu	90 unit	90 unit
3	Pembangunan Jamban dan Tangki Septik untuk MBR di Desa Bedegung Kecamatan Panang Enim (DAU yang ditentukan penggunaannya - Bidang Pekerjaan Umum untuk DAU 2024)	Panang Enim	76 unit	76 unit
4	Pembangunan Jamban dan Tangki Septik untuk MBR di Desa Lambur Kecamatan Panang Enim (DAU yang ditentukan penggunaannya - Bidang Pekerjaan Umum untuk DAU 2024)	Panang Enim	73 unit	73 unit
5	Pembangunan Jamban dan Tangki Septik untuk MBR di Desa Pandan Dulang Kecamatan Panang Enim (DAU yang ditentukan penggunaannya - Bidang Pekerjaan Umum untuk DAU 2024)	Panang Enim	54 unit	54 unit
6	Pembangunan Jamban dan Tangki Septik untuk MBR di Desa Suban Jeriji Kec. Rambang Niru (DIF)	Rambang Niru	161 unit	161 unit
7	Pembangunan Jamban dan Tangki Septik untuk MBR	Rambang Niru	156 unit	156 unit



No	Uraian Kegiatan	Kecamatan	Target	Realisasi
	di Desa Aur Duri Kec. Rambang Niru (DIF)			
8	Pembangunan Jamban dan Tangki Septik untuk MBR di Desa Suka Merindu	Sungai Rotan	70 unit	70 unit
9	Pembangunan Jamban dan Tangki Septik untuk MBR di Desa Muara Lematang	Sungai Rotan	50 unit	50 unit
10	Pembangunan Jamban dan Tangki Septik untuk MBR di Desa Beringin	Lubai	50 unit	50 unit
11	Pembangunan Jamban dan Tangki Septik untuk MBR di Desa Menanti Kecamatan Kelekar	Kelekar	15 unit	15 unit

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja, dengan pagu anggaran sebesar Rp1.424.218.900,00 (satu miliar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah) realisasi sebesar Rp1.128.350.000,00 (satu miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atau 79,23%. Output keluaran Sub Kegiatan ini berupa belanja modal kendaraan bermotor dengan spesifikasi, yaitu Pengadaan Mesin Sedot Tinja sebanyak 2 unit; Pengadaan Motor Sedot Tinja sebanyak 2 unit; dan Pengadaan Truk Tinja sebanyak 1 unit dengan capaian kinerja sebesar 100%. Untuk Pengadaan mesin sedot tinja tidak terealisasi karena dianggap belum dibutuhkan.
- 3) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dengan pagu anggaran sebesar Rp197.763.063,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah) realisasi sebesar Rp23.779.794,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 12,02%. Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang di Operasikan dan di Pelihara dengan capaian kinerja sebesar 12,02%. Rendahnya penyerapan anggaran pada sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ini dikarenakan :
- Masih dalam proses pengalihan asset berupa IPLT dan Truk Tanki Tinja dan asset yang sudah diterima dalam kondisi rusak dan perlu perbaikan;
  - IPLT sedang dalam proses renovasi sehingga belum bisa digunakan;
  - Truk Tanki Tinja yang sudah dialihkan masih dalam kondisi rusak, sedangkan truk tanki tinja yang bisa dioperasikan masih dalam proses

- pengalihan asset dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke Dinas PUPR;
- d. Belum tersedianya operator Sedot Tinja berupa Sopir dan Kernet Truk Tanki Tinja; dan
  - e. Belum tersedianya operator pengelola lumpur tinja di IPLT.
- 4) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dengan pagu anggaran sebesar Rp277.769.700,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) realisasi sebesar Rp106.597.500,00 (seratus enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau 38,38%. Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa penyelenggaraan pembinaan kepada masyarakat terkait pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik target kinerja sebanyak 20 orang peserta pembinaan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Rendahnya penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) disebabkan oleh:
- a. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan, semula direncanakan pelaksanaannya selama 2 (dua) hari, dikarenakan termasuk kegiatan APBDP adanya keterbatasan waktu, sehingga pelaksanaannya dilaksanakan selama 1(satu) hari.
  - b. Belanja Perjalanan Dinas, dikarenakan adanya keterbatasan waktu untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi.
  - c. Belanja Tenaga Administrasi, dikarenakan tidak adanya penambahan untuk tenaga honorer, sehingga menggunakan tenaga honorer yang sudah ada di dinas.

#### **6) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi luasan kawasan permukiman rawan banjir dengan alokasi anggaran sebesar Rp63.530.702.538,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus dua ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) terealisasi Rp62.205.058.946,00 (enam puluh dua miliar dua ratus lima juta lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) atau 97,91%. Program ini terdiri dari satu kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan dengan pagu anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa pembangunan SPAL dengan target sebanyak 10 kegiatan, yaitu sebanyak 4 kegiatan di kecamatan Muara Enim dan 6 kegiatan di kecamatan Belimbing serta capaian kinerja sebesar 100%.
- 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dengan pagu anggaran sebesar Rp13.386.901.388,00 (tiga belas miliar tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah)

teralisasi sebesar Rp13.158.143.505,00 (tiga belas miliar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima rupiah) atau 98,29%. Adapun output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa rehab/perbaikan saluran drainase di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul, Rambang, Lembak, dan SDL dengan target sepanjang 19.162,42 m.

- 3) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dengan pagu anggaran sebesar Rp46.943.801.150,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus satu ribu seratus lima puluh rupiah) realisasi sebesar Rp46.053.406.441 (empat puluh enam miliar lima puluh tiga juta empat ratus enam ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) atau 98,10%. Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa pembangunan drainase perkotaan dengan target sepanjang 50.366,80 m.
- 4) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) realisasi sebesar Rp0,00. Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa belanja pemeliharaan dalam kegiatan penyusunan rencana kebijakan strategis dan sistem drainase perkotaan dengan target sebanyak 5 (lima) paket.
- 5) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase memiliki indikator kinerja, yaitu panjang saluran drainase dalam keadaan baik atau tidak tersumbat. Alokasi anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terealisasi sebesar Rp199.104.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat ribu rupiah) atau 99,55%. Output/keluaran. Sub Kegiatan ini berupa belanja operasional dan pemeliharaan drainase perkotaan dengan target sebanyak 1 paket dan capaian kinerja sebesar 100%.

#### **7) Program Penataan Bangunan Gedung**

Tujuan Program Penataan Bangunan Gedung adalah meningkatnya Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan sesuai fungsinya. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Penataan Bangunan Gedung sebesar Rp34.546.681.240,00 (tiga puluh empat miliar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp21.820.641.453,00 (dua puluh satu miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) atau 63,16%. Pada Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Keluaran (output) dari pelaksanaan masing-masing Sub Kegiatan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu



anggaran sebesar Rp15.922.910.300,00 (lima belas miliar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) realisasi sebesar Rp8.142.970.300,00 (delapan miliar seratus empat puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) atau 51,14%. Output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa belanja konsultansi sebanyak 1 kegiatan, yaitu Supervisi Rehab Berat Gedung Mapolres Muara Enim yang merupakan pelaksanaan pekerjaan yang melampaui tahun anggaran sebelumnya. Belanja modal sebanyak 2 paket, yaitu Rehab Eks Rumah Dinas Wakil Bupati Muara Enim dan Rehab Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Bupati Muara Enim. Capaian kinerja Sub Kegiatan ini sebesar 50%. Tidak maksimalnya capaian realisasi Sub Kegiatan ini dipengaruhi oleh belanja hibah sebanyak 5 paket yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu Rehab Berat Gedung Satuan Lalu Lintas Polres Muara Enim; Rehab Berat Gedung Satuan Reserse Kriminal Polres Muara Enim; Rehab Berat Mess Polwan, Barak Bintara Remaja dan Gapura Pintu Masuk Aspol Perwira Talang Jawa; Rehab Fasilitas Umum Pada Kantor Pengadilan Negeri Muara Enim Dan Rumah Dinas Jabatan Pengadilan Negeri Muara Enim; Rehab Berat Gedung Mapolres Muara Enim (Penganggaran Belanja dengan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang Melampaui Tahun Anggaran).

- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan pagu anggaran sebesar Rp126.583.590,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) realisasi sebesar Rp38.861.590,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) atau 30,70%. Output/keluaran. Sub Kegiatan ini berupa dokumen kebijakan penyelenggaraan bangunan gedung dengan target 1 dokumen, rendahnya realisasi dikarenakan adanya perubahan terkait kebijakan yang dapat diterbitkan oleh pemerintah daerah tentang penyelenggaraan bangunan gedung.
- 3) Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp17.459.280.550,00 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) realisasi sebesar Rp13.401.469.600,00 (tiga belas miliar empat ratus satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) atau 76,76%. Output/keluaran Sub Kegiatan ini adalah sebagai berikut:
  - a) Belanja jasa konsultasi sebanyak 2 paket, yaitu DED Pembangunan Gedung Diklat Kabupaten Muara Enim dan Penyusunan DED Gedung dan Halaman Lingkungan Kantor Bupati Muara Enim;
  - b) Belanja hibah sebanyak 4 paket, yaitu Design Enggining Detail (DED) Polsek Kota Muara Enim; Pembangunan Pagar Polsek Rambang Dangku; Pembangunan Pagar Polsek Tanjung Agung; dan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah di Aspol Perwira Talang Jawa;

- c) Belanja modal sebanyak 3 paket, yaitu Pembangunan Gedung UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas PUPR Muara Enim; Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Wakil Bupati; dan Pembangunan Fasilitas Pendukung Rencana Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Muara Enim (Penganggaran Belanja Dengan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Yang Melampaui Tahun Anggaran); dan
- d) Belanja modal pengadaan meubeler sebanyak 1 paket.

Adapun capaian kinerja Sub Kegiatan ini sebesar 30%. Rendahnya capaian kinerja ini dipengaruhi oleh tidak terlaksananya belanja hibah sebanyak 4 paket yaitu ; Design Engginering Detail (DED) Polsek Kota Muara Enim; Pembangunan Pagar Polsek Rambang Dangku; Pembangunan Pagar Polsek Tanjung Agung; dan Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah di Aspol Perwira Talang Jawa.

- 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG. Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp1.037.906.800,00 (satu miliar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp237.339.963,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) atau 22,87%. Rendahnya capaian kinerja Sub Kegiatan ini dikarenakan tidak semua dokumen permohonan yang diajukan melalui Sistem Manajemen Bangunan Gedung yang sesuai dengan persyaratan.

#### 8) Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemantapan jalan kewenangan kabupaten kota dengan capaian kinerja sebesar 92,79% atau nilai Baik. Program penyelenggaraan jalan ditahun 2024 di anggarkan sebesar Rp605.041.801.014,00 (enam ratus lima miliar empat puluh satu juta delapan ratus satu ribu empat belas rupiah) terealisasi sebesar Rp580.238.307.071,00 (lima ratus delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah) atau sebesar 95,90%. Dilaksanakan melalui sebanyak 1 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
  - a) Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp133.253.900,00 (seratus tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) realisasi sebesar Rp11.314.900,00 (sebelas juta tiga ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) atau 8,49%.
  - b) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan. Dengan pagu anggaran Rp3.567.115.600,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh tujuh juta seratus lima belas ribu enam ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp3.526.049.082,00



(tiga miliar lima ratus dua puluh enam juta empat puluh sembilan ribu delapan puluh dua rupiah) atau 98,85%. Adapun output dari Sub Kegiatan ini berupa dokumen perencanaan pengembangan jaringan jalan/perencanaan teknis penyelenggaraan jembatan dengan target sebanyak 7 dokumen, yaitu (DED Pembangunan Jalan Baru Desa Tanjung Baru Kec.Muara Belida; Feasibility Study Pembangunan Fly Over / Underpass di Perlintasan Sebidang Dalam Kota Muara Enim; Penyusunan AMDAL Ruas Jalan Sp. Metur - Muara Enim; Penyusunan Data Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun 2024 Kabupaten Muara Enim; Penyusunan Pengembangan Jaringan Jalan di Kecamatan Muara Enim; Perencanaan Ruas Jalan Kabupaten Muara Enim untuk Kegiatan DAK; dan Kajian dan DED Pengalihan Trase Ruas Jalan Sukarami - Muara Lematang Kec. Sungai Rotan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- c) Sub Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp299.248.100, (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus rupiah) realisasi sebesar Rp25.857.300,00 (dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) atau 8,64%.
- d) Sub Kegiatan Penggantian Jembatan dengan pagu anggaran sebesar Rp12.503.069.700,00 (dua belas miliar lima ratus tiga juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) realisasi sebesar Rp10.110.531.000,00 (sepuluh miliar seratus sepuluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) atau 80,86%.
- e) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan dengan pagu anggaran Rp23.653.146.900,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp19.515.633.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) atau 82,51%. Sub kegiatan ini merupakan pekerjaan pembukaan jalan baru yang mana trase jalan belum ada menjadi ada (dalam kondisi tanah).
- f) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp325.785.902.238,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp315.739.296.297,00 (tiga ratus lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 96,92%. Sub kegiatan ini merupakan pekerjaan peningkatan lapisan perkerasan yang ada misalnya dari perkerasan agregat menjadi lapisan beton atau lapisan aspal ataupun dari lapisan tanah menjadi agregat atau lapisan beton atau lapisan aspal. Adapun output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa panjang jalan yang direkonstruksi dengan target sepanjang 89.042,86 m.



- g) Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp51.314.400,00 (lima puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) realisasi sebesar Rp28.468.900,00 (dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) atau 55,48%.
- h) Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar dengan pagu anggaran Rp18.003.143.000,00 (delapan belas miliar tiga juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp17.795.743.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) atau 98,85%. Sub kegiatan ini merupakan pekerjaan pelebaran jalan agar sesuai dengan standar, yaitu dengan lebar menjadi 4,5 – 5 meter.
- i) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan pagu anggaran sebesar Rp300.285.500,00 (tiga ratus juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp267.686.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) atau 89,14%. Adapun output Sub Kegiatan ini berupa operasional pemeliharaan jembatan dengan realisasi kinerja pemeliharaan jembatan sebanyak 15 unit atau sebesar 100%. Sub Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola berupa pembelian barang dan pembayaran jasa dimana tenaga kerja yang di berdayakan berasal dari masyarakat setempat.
- j) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan dengan pagu anggaran sebesar Rp6.952.300.500,00 (enam miliar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp6.781.330.950,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau 97,54%. Sub kegiatan ini merupakan pekerjaan rehabilitasi jembatan (jembatan gantung, jembatan pipa) dapat berupa pengecatan, perbaikan plat, dan pipa. Adapun output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa jumlah jembatan yang direhab dengan target 15 unit dan realisasi 15 unit atau 100%.
- k) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan pagu anggaran sebesar Rp82.398.878.680,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp77.320.509.170,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah) atau 93,84%. Sub Kegiatan ini merupakan pekerjaan pembangunan jembatan berupa jembatan gantung, jembatan pipa, jembatan beton.
- l) Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan dengan pagu anggaran sebesar Rp300.398.156,00 realisasi sebesar Rp50.819.156,00 (lima puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh enam rupiah) atau 16,92%.

- m) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp130.543.803.640,00 (seratus tiga puluh miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp128.202.952.716,00 (seratus dua puluh delapan miliar dua ratus dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus enam belas rupiah) atau 98,21%. Sub Kegiatan ini merupakan pekerjaan memperbaiki kondisi jalan yang rusak kembali menjadi kondisi baik yang dapat dilalui dengan kecepatan 40 km/jam. Adapun output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa panjang jalan direhabilitasi dengan target 71.912,15 M.
- n) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp549.940.700,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp471.231.200,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) atau 85,69%. Sub Kegiatan ini merupakan pekerjaan tebas bayang yaitu membersihkan tanaman yang menutupi badan jalan. Adapun output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa panjang jalan yang diperbaiki dengan capaian sebesar 100%.

#### **9) Program Pengembangan Jasa Konstruksi**

Tujuan program Pengembangan Jasa Konstruksi adalah peningkatan kualifikasi tenaga terampil konstruksi bersertifikat dan peningkatan kualifikasi usaha bagi badan usaha jasa konstruksi, tenaga terampil. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Pengembangan Jasa Konstruksi sebesar Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Pengembangan Jasa Konstruksi alokasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp376.058.190,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) terealisasi Rp43.882.490,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau 11,67%. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, memiliki indikator kinerja yaitu persentase peningkatan kualifikasi usaha bagi badan usaha jasa konstruksi. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi terdiri atas satu Sub Kegiatan, yaitu Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi dengan indikator kinerja yaitu jumlah lembaga jasa konstruksi yang ditingkatkan kapasitasnya dan target sebanyak 30 lembaga. Output (keluaran) Sub Kegiatan ini adalah pemberian kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan ini sebesar Rp264.276.890,00 (dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp8.578.690,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) atau 3,25%.

- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Indikator kinerja kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah tersedianya informasi material/peralatan di Kabupaten Muara Enim. Output (keluaran) dari kegiatan tersebut adalah tersedianya informasi material/peralatan di Kabupaten Muara Enim. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas satu Sub Kegiatan, yaitu Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp111.781.300,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp35.303.800,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) atau 31,58%.

#### **10) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan untuk meningkatkan ketaatan para pemangku kepentingan di bidang penataan ruang (pemerintah/swasta/masyarakat) terhadap tata ruang. Untuk meningkatkan ketaatan tersebut, maka dilaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan dokumen yang mengatur terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, dokumen pengendalian penataan ruang serta upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu sebesar Rp4.568.302.062,00 (empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua ribu enam puluh dua rupiah) dan terealisasi sebesar Rp3.027.992.585,00 (tiga miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) atau 66,28%.

Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan menetapkan Rencana Tata Ruang yang telah disusun menjadi produk hukum daerah sesuai dengan tahapan dalam aturan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan Indikator kinerja tingkat keberadaan peraturan rencana tata ruang. Adapun output (keluaran) dari kegiatan tersebut adalah jumlah dokumen peraturan rencana tata ruang dengan realisasi kinerja sebanyak 1 dokumen atau sebesar 100%. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp2.481.437.600,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp1.721.011.016,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta sebelas ribu enam belas rupiah) atau 69,36%. Pada tahun 2024, kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota dengan tolak ukur output serta target dari sub kegiatan adalah jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen Revisi RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun 2018-2038. Alokasi anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp992.708.600,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus



delapan ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp720.167.510,00 (tujuh ratus dua puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah) atau 72,55%. Rendahnya penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan ini dipengaruhi oleh belanja makanan dan minuman rapat yang terealisasi sebesar 45,71%; belanja perjalanan dinas realisasi sebesar 58,86%. Hal ini dikarenakan Koordinasi untuk Pembahasan Revisi RTRW Kabupaten Muara Enim 2018-2038 banyak dilaksanakan secara Hybrid Meeting.

- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp692.736.900,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp487.072.897,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 70,31%. Adapun output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa dokumen RDTR Kawasan Pekotaan Kecamatan Rambang sebanyak 1 dokumen dan capaian kinerja sebesar 100%. Rendahnya penyerapan anggaran Sub Kegiatan hal ini dikarenakan Undangan untuk acara Pembahasan RDTR banyak dilaksanakan secara Hybrid Meeting karena keterbatasan anggaran Kemeterian ATR.
  - c) Sub Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp699.221.400,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp427.046.909 (empat ratus dua puluh tujuh juta empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) atau 61,07%. Output/keluaran Sub Kegiatan ini yaitu 1 publikasi informasi penataan ruang berupa Majalah Edukasi Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim - Sumatera Selatan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Tidak maksimalnya penggunaan anggaran Sub Kegiatan ini dikarenakan untuk Koordinasi untuk pembuatan majalah banyak dilakukan secara zoom meeting.
  - d) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp96.770.700,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp86.723.700,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) atau 89,62%. Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa kegiatan sosialisasi kepada badan-badan dan masyarakat dengan target sebanyak 100 peserta dan realisasi kinerja sebanyak 100 peserta yaitu Sosialisasi Peraturan Perundangan Dan Pedoman Bidang Penataan Ruang.
- 2) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan penyusunan perencanaan tata ruang daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pemangku kepentingan baik dari Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Adapun indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah tingkat keselarasan antar dokumen rencana tata ruang dan output (keluaran) dari kegiatan tersebut adalah keselarasan antar

dokumen rencana tata ruang. Pada Tahun 2024 untuk target kinerja telah tersebut telah tercapai sebesar 100% dimana antar dokumen rencana tata ruang yang disusun telah dilakukan penyesuaian antar pemangku kepentingan sesuai dengan pedoman penyusunan rencana tata ruang yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang dengan tolak ukur serta target sub kegiatan jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan yaitu sebanyak 1 orang. Adapun output (keluaran) dari sub kegiatan ini adalah fasilitasi pendidikan dan pelatihan sistem informasi geografis kegiatan peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang kepada 100 orang dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang sebesar Rp396.208.700,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp262.867.753,00 (dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) atau 66,35%. Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini dipengaruhi belanja perjalanan dinas yang terealisasi hanya sebesar 34,57%. Hal ini dikarenakan kegiatan peningkatan kompetensi SDM Bidang Tata Ruang dilaksanakan di dalam Lingkup Kabupaten Muara Enim.

- 3) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kinerja berupa tingkat kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp627.774.800,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp373.166.394,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 59,44% dan capaian kinerja sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) Sub Kegiatan sebagai berikut:
  - a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan tolak ukur dan target sub kegiatan ini adalah 1 (satu) layanan persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku. Alokasi anggaran sebesar Rp40.542.100,00 (empat puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp26.068.000,00 (dua puluh enam juta enam puluh delapan ribu rupiah) atau 64,30%. Adapun output (keluaran) Sub Kegiatan ini berupa dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan target sebanyak 1 dokumen dan capaian kinerja sebesar 100%.
  - b) Sub Kegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang dengan tolak ukur kinerja jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang. Adapun output/keluaran Sub Kegiatan ini berupa 1 Dokumen berupa Dokumen System Informasi Penataan Ruang dengan capaian kinerja sebesar 100%. target kinerja telah tercapai sebesar 100% melalui alokasi anggaran sebesar Rp587.232.700,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp347.098.394,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh

delapan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 59,11%. Rendahnya penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan ini dipengaruhi oleh tidak terealisasinya belanja makanan dan minuman rapat karena rapat dilakukan dengan secara zoom meeting.

- 4) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja adalah tingkat pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang telah berlangsung. Adapun output (keluaran) dari kegiatan tersebut adalah tersedianya dokumen laporan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahun 2024 target kinerja tersebut telah tercapai sebesar 100% sedangkan untuk alokasi anggaran sebesar Rp1.062.880.962,00 (satu miliar enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah) dengan realisasi sebesar Rp670.947.422,00 (enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) atau 63,13%. Untuk kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK dengan tolak ukur output sub kegiatan yaitu dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan target 2 dokumen. Adapun target kinerja pada tahun 2024 telah tercapai 100% dengan Alokasi anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp59.191.662,00 (lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dengan realisasi sebesar Rp38.688.462,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) atau 65,36%. Rendahnya penyerapan anggaran Sub Kegiatan ini dipengaruhi oleh belanja perjalanan dinas yang hanya terealisasi sebesar 21,85% Hal ini dikarenakan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK dilakukan secara online.
  - b) Sub Kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang dengan tolak ukur output Sub Kegiatan jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi forum penataan ruang target sebanyak 2 laporan dan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp941.722.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp578.682.803,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah) atau 61,45%. Rendahnya penyerapan anggaran pada Sub Kegiatan ini dipengaruhi oleh tidak terealisasinya belanja makanan dan minuman rapat karena rapat dilakukan dengan secara zoom meeting.
  - c) Sub Kegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat dengan indikator jumlah dokumen hasil penilaian kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang dan penilaian

kinerja fungsi dan manfaat. Adapun target kinerja pada tahun 2024 telah tercapai 100% melalui output (keluaran) dari sub kegiatan tersebut adalah 2 laporan pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp61.967.300,00 (enam puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp53.576.157,00 (lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) atau 86,46%.

### 3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan target kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka capaian indikator kinerja pada tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya akses dan kualitas layanan Kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses sarana air bersih masyarakat	Persentase penduduk berakses air minum	79,06	73,58	93,07
2.		Meningkatnya akses jamban sehat masyarakat	Persentase rumah tangga dengan jamban sendiri	89,00	89,02	100,02
3.	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antar daerah sesuai dengan RTRW	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar ke-PU-an	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	53,01		
4.			Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	93,33		
5.	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya ketaatan terhadap RTRW	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100	100	100,00

#### 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

##### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2024, alokasi pendapatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) atau 0% dan kinerja keluaran (output) sebesar 0% dan alokasi belanja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp. 229.590.633.780,- (dua ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus tiga Rp. 214.437.385.062,99,- (dua ratus empat belas miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam puluh dua rupiah koma sembilan puluh sembilan sen) atau 93,40% dan kinerja keluaran (output) sebesar 91,81% dengan rincian sebagai berikut :

##### a) Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 109.050.529.175,- (seratus sembilan miliar lima puluh juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) terealisasi sebesar Rp. 100.530.558.472,- (seratus miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) atau 92,19%, yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

##### b) Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 120.540.104.605,- (seratus dua puluh miliar lima ratus empat puluh juta seratus empat ribu enam ratus lima rupiah) terealisasi sebesar Rp. 113.906.826.590,99 (seratus tiga belas miliar sembilan ratus enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah koma sembilan puluh sembilan sen) atau 94,50% yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.

##### 2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Terdiri dari 8 Program, 20 kegiatan dan 50 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 176.396.600,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 172.301.000,- atau 97,68% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, alokasi sebesar Rp. 26.532.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.741.500,- atau 93,25% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD alokasi sebesar Rp. 17.943.900 dengan realisasi sebesar Rp. 17.652.900,- atau 98,38% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, alokasi sebesar Rp. 25.968.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.551.500,- atau 98,40% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, alokasi sebesar Rp. 18.346.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.006.800,- atau 98,15% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi sebesar Rp. 40.763.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.768.800,- atau 97,56% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
  - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi sebesar Rp. 46.842.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 46.579.500,- atau 99,44% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.378.478.436,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 5.460.489.175,- atau 85,61% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi sebesar Rp. 6.277.267.036,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.368.020.675,- atau 85,52% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi sebesar Rp. 51.159.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.074.500,- atau 86,15% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD alokasi sebesar Rp. 50.052.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.394.000,- atau 96,69% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 38.391.500,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 31.374.400,- atau 81,72% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD alokasi sebesar Rp. 38.391.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 31.374.400,- atau 81,72% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 130.900.000,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 55.900.000,- atau 90,36% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 70,59%.
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi alokasi sebesar Rp. 110.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.600.000,- atau 33,12% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 41,18%.  
Realisasi Keuangan dan Output/keluaran masih rendah dikarenakan pegawai yang akan mengikuti pendidikan/pelatihan tersebut memiliki

- juga agenda kegiatan di lapangan di waktu yang bersamaan dan juga sisa waktu tahun anggaran 2024 yang akan berakhir.
- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan alokasi sebesar Rp. 20.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.300.000,- atau 94,61% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.319.695.488,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 1.206.483.544,- atau 91,42% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor alokasi sebesar Rp. 356.251.760,- dengan realisasi sebesar Rp. 323.903.200,- atau 90,92% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar Rp. 6.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.200.000,- atau 100% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi sebesar Rp. 44.813.028,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.838.418,- atau 82,20% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi sebesar Rp. 41.654.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.240.000,- atau 99,01% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan alokasi sebesar Rp. 27.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.570.000,- atau 99,89% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi sebesar Rp. 843.176.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 770.731.926,- atau 91,41% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.077.285.800,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 1.073.085.800,- atau 51,66% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 75%.
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel alokasi sebesar Rp. 59.085.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 59.085.800,- atau 100% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
  - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya alokasi sebesar Rp. 818.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 815.500.000,- atau 99,67% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
  - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 1.000.000.000,- atau 0% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 0%.
- Realisasi Keuangan dan Output/keluaran masih rendah dikarenakan tidak ada penyedia yang lulus evaluasi penawaran. Tindak lanjut tender gagal tidak dapat dilaksanakan mengingat sisa waktu pekerjaan yang tersedia, sehingga pokja pemilihan membatalkan proses tender.

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 198.500.000,- atau 99,25% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.521.769.800,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 1.133.815.256,- atau 74,51% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat alokasi sebesar Rp. 6.720.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.716.000,- atau 99,94% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi sebesar Rp. 1.399.489.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.032.939.256,- atau 73,81% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%. Realisasi Keuangan dan Output/keluaran masih rendah dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi sebesar Rp. 115.560.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 94.160.000,- atau 81,48% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 629.359.287,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 506.740.114,- atau 80,52% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 70,83%.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi sebesar Rp. 331.839.777,- dengan realisasi sebesar Rp. 216.340.114,- atau 65,19% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%. Realisasi Keuangan dan Output/keluaran masih rendah dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan.
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya alokasi sebesar Rp. 285.899.510,- dengan realisasi sebesar Rp. 284.700.000,- atau 99,58% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi sebesar Rp. 4.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 0%. Realisasi Keuangan dan Output/keluaran masih rendah dikarenakan sarana dan prasarana gedung kantor masih dalam kondisi baik.
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi sebesar Rp. 7.320.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.700.000,- atau 77,87% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 83,33%. Realisasi Keuangan dan Output/keluaran masih rendah dikarenakan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor masih dalam kondisi baik.

## 2. Program Pengembangan Perumahan

a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar Rp. 578.734.300,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 389.674.200,- atau 67,33% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.

- Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan alokasi sebesar Rp. 123.813.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 28105.343.000,- atau 85,08% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota alokasi sebesar Rp. 344.231.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 227.849.100,- atau 66,19% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.

Realisasi Keuangan masih rendah dikarenakan adanya rekening belanja perjalanan dinas dalam kota yang tidak bisa digunakan; tidak terealisasi makan minum rapat dan kurangnya perjalanan dinas.

- Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota alokasi sebesar Rp. 110.689.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 56.482.100,- atau 51,03% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.

Realisasi Keuangan masih rendah dikarenakan adanya rekening belanja perjalanan dinas dalam kota yang tidak bisa digunakan; tidak terealisasi makan minum rapat dan kurangnya perjalanan dinas.

b. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar Rp. 168.610.000,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 151.834.100,- atau 90,05% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.

- Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Pengganti Hak atas Tanah dan/atau Bangunan alokasi sebesar Rp. 168.610.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 151.834.100,- atau 90,05% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.

c. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.369.873.800,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 42.497.320,- atau 3,10% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 0%.

- Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota alokasi sebesar Rp. 1.369.873.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.497.320,- atau 3,10% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 0%.

Realisasi Keuangan dan Kinerja Keluaran (*output*) masih rendah dikarenakan tidak terealisasi belanja modal bangunan gedung tempat tinggal lainnya, penyebabnya karena belum ada peraturan dasar dan peraturan daerah yang mengatur perihal pembangunan rumah relokasi rawan bencana; tidak terealisasinya beban jasa konsultasi perencanaan arsitektur, jasa desain arsitektur, DED Rumah Korban Bencana atau



Relokasi Program Kabupaten/Kota; tidak terealisasinya makan minum rapat dan kurangnya perjalanan dinas.

- d. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 449.552.800,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 133.225.400,- atau 29,64% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegritas Secara Elektronik alokasi sebesar Rp. 230.176.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.826.400,- atau 22,08% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.  
Realisasi Keuangan masih rendah dikarenakan tidak terealisasinya honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia; makan minum rapat; bahan cetak spanduk, dan kurangnya perjalanan dinas.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan alokasi sebesar Rp. 174.673.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.717.200,- atau 30,75% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.  
Realisasi Keuangan masih rendah dikarenakan tidak terealisasi bahan cetak spanduk, dan kurangnya perjalanan dinas serta makan minum rapat.
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum alokasi sebesar Rp. 44.702.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.682.100,- atau 64,16% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.  
Realisasi Keuangan dan Output/keluaran masih rendah dikarenakan tidak terealisasi makan minum rapat, bahan cetak spanduk, dan kurangnya perjalanan dinas.

### 3. Program Kawasan Permukiman

- a. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Alokasi Anggaran sebesar Rp. 130.515.600,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 100.966.326,- atau 77,36% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh alokasi sebesar Rp. 130.515.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 100.966.326,- atau 77,36% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.  
Realisasi Keuangan dan Output/keluaran masih rendah dikarenakan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sedapat mungkin dilakukan bersamaan dengan kegiatan lainnya guna untuk efisiensi serta juga menggunakan pola koordinasi secara daring.
- b. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di bawah 10 Ha Alokasi Anggaran sebesar Rp.



84.231.600,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 59.777.000,- atau 70,97% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.

- Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh alokasi sebesar Rp. 84.231.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 59.777.000,- atau 70,97% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.

Realisasi Keuangan dan Output/keluaran masih rendah dikarenakan pelaksanaan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud lebih banyak menggunakan komunikasi secara lisan melalui telepon.

- c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Alokasi Anggaran sebesar Rp. 22.868.283.700,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 22.562.110.074,- atau 98,66% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100,25%.

- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni alokasi sebesar Rp. 22.174.720.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.960.523.474,- atau 99,03% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100,50%.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh alokasi sebesar Rp. 693.563.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 601.586.600,- atau 86,74% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.

#### 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

- a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 173.653.932.348,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 168.358.396.104,99,- atau 96,95% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 93,75%.

- Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan alokasi sebesar Rp. 82.140.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 74.764.315,- atau 91,02% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.

- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian alokasi sebesar Rp. 173.223.240.948,- dengan realisasi sebesar Rp. 168.000.336.797,99,- atau 96,98% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan alokasi sebesar Rp. 248.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 242.529.515,- atau 97,62% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.

- Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang alokasi sebesar Rp. 100.110.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.765.477,- atau 40,72% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 75%.

Realisasi Keuangan dan Output/keluaran masih rendah dikarenakan masih banyak developer/pengembang yang belum menyerahkan PSU Perumahan yg sudah dibangun ke Pemkab Muara Enim sehingga Penyerahan PSU Perumahan Kab. Muara Enim belum terlaksana dengan maksimal



5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar Rp. 507.467.900,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 403.332.245,- atau 79,48% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 91,67%.
- Sub Kegiatan Inventaris Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota alokasi sebesar Rp. 292.144.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 264.354.787,- atau 90,49% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100%.
  - Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota alokasi sebesar Rp. 215.323.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 138.977.458,- atau 64,54% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 83,33%.
- Realisasi Keuangan dan Output/keluaran masih rendah dikarenakan tidak optimalnya penyerapan anggaran belanja perjalanan dinas luar Kabupaten dan luar provinsi yang meliputi BBM, Tiket Pesawat dan biaya Penginapan.
6. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
- a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar Rp. 16.723.054.221,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 11.887.547.790,- atau 71,08% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 85%.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota alokasi sebesar Rp. 16.723.054.221,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 11.887.547.790,- atau 71,08% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 85%.
- Realisasi Keuangan dan Output/keluaran masih rendah dikarenakan :
1. Cadangan anggaran biaya kompensasi bangunan milik masyarakat yang berada di sepanjang bantaran sungai yang terdampak akibat pembangunan dinding penahan tanah jembatan Enim 1 - jembatan Enim 2 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Muara Enim serta tidak sepakatnya 3 orang pemilik bangunan terhadap hasil penilaian kompensasi oleh Tim Penilai Tanah/appraisal.
  2. Terhadap pengadaan tanah jalan Desa Kasai pada prinsipnya sudah dilaksanakan pengukuran dan penilaian tanah oleh KJPP akan tetapi DED Jalan Sungai Rotan - Muara Lematang yang dibuat oleh Dinas PUPR pada APBD Perubahan Tahun 2024 khususnya yang berada pada areal Desa Kasai, bahwa masyarakat menolak trase jalan Desa Kasai tersebut dengan alasan bahwa rencana jalan membelah tanah mereka sehingga sisa tanah tidak dapat dimanfaatkan dan masyarakat mengusulkan membuat trase baru dengan harapan tanah yang terkena untuk pembangunan jalan mengambil areal pinggir tanah milik masyarakat.

7. Program Pengelolaan Tanah Kosong
  - a. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Alokasi Anggaran sebesar Rp. 566.552.500,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 550.585.514,- atau 97,18% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
    - Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong alokasi sebesar Rp. 566.552.500,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 550.585.514,- atau 97,18% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
  
8. Program Penatagunaan Tanah
  - a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar Rp. 217.548.100,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 157.249.700,- atau 72,28% dan kinerja keluaran (output) sebesar 90%.
    - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah alokasi sebesar Rp. 217.548.100,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 157.249.700,- atau 72,28% dan kinerja keluaran (output) sebesar 90%.  
Realisasi Keuangan dan Output/keluaran masih rendah dikarenakan tidak optimalnya penyerapan anggaran belanja perjalanan dinas luar Kabupaten dan luar provinsi yang meliputi BBM, Tiket Pesawat dan biaya Penginapan.

### 3. Capaian Indikator Kinerja

**Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Dinas PUPR**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	- Jumlah rumah korban bencana yang tertangani	5 Unit	0 Unit	0 %
			- Jumlah rumah yang terdampak relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang tertangani	5 Unit	1.005 Unit	100,50 %
			- Jumlah rumah tidak layak huni	1.000 Unit	0 Unit	0 %

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			yang tertangani			
		2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	- Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani	2 Ha		
		3. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	- Luas tanah milik pemerintah yang tercatat di KIB	4 Persil	33 Persil	825 %

#### 4. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1	Tidak terlaksananya Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota karena belum ada Dasar Hukum untuk pelaksanaannya.	-
2	Masih banyak developer/pengembang yang belum menyerahkan PSU Perumahan yang sudah dibangun ke Pemkab Muara Enim sehingga Penyerahan PSU Perumahan Kab. Muara Enim belum terlaksana dengan maksimal.	Telah dilakukan publikasi terkait serah terima asset dari Developer ke Pemerintah Daerah.
3	Terdapat 2 paket kegiatan fisik yang belum selesai pada Tahun Anggaran 2024.	Diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan dengan tetap diberlakukan denda sesuai dengan kesepakatan.
4	Tidak terealisasinya pendapatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan pada Tahun Anggaran 2024.	Telah dilakukan sosialisasi kepada pemilik permainan anak terkait aturan retribusi yang akan diterapkan. Kemudian Desember 2024 saat penerbitan izin baru, telah ditambahkan ketentuan terkait retribusi dimaksud. Hal ini bertujuan agar target PAD untuk Tahun 2025 dapat direalisasikan.
5	Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Desa Kasai Kec. Sungai Rotan tidak mencapai kesepakatan dengan pemilik lahan sehingga tidak dapat diproses.	Membuat trase baru dengan harapan tanah yang terkena untuk pembangunan jalan Sungai Rotan - Muara Lematang mengambil areal pinggir tanah milik masyarakat.



5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024, alokasi belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim sebesar Rp.15.413.993.669,- (Lima Belas Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.12.653.616.141,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) atau sebesar 82,09 Persen, untuk membiayai belanja operasi dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 14.490.294.094,- (Empat Belas Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.11.741.943.641,- (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) atau **81,03** Persen yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp.923.699.575** (*Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp.911.672.500,-** (*Sembilan Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) atau **98,70** yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kinerja Satpol PP dan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. Program kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim melaksanakan sebanyak **2** (dua) program dan **10** (Sepuluh) kegiatan, dan **44** (empat puluh empat) Sub Kegiatan yaitu:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Alokasi anggaran untuk program **penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota** sebesar **Rp.13.733.087.929,-** (*Tiga Belas Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp.11.986.817.101,-** (*Sebelas*



*Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Seratus Rupiah*) atau sebesar **87,28 Persen** program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan sebagai berikut :

**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dengan anggaran sebesar **Rp.6.336.100-** (*Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah*) dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.5.564.800,-** (*Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*) atau sebesar **87,83** Persen. Adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah 2 (Dua) dokumen yang terdiri dari Rencana Kerja Satpol PP tahun 2025 dan Rencana Kerja Perubahan Satpol PP tahun 2024 sebanyak 6 (Enam) buku dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- b. Sub Kegiatan Kordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.8.981.900,-** (*Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.5.657.000** (*Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) atau sebesar **63,43%** Persen. Adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah berupa 1 (Satu) dokumen yang terdiri atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satpol PP tahun anggaran 2025 sebanyak 10 (Sepuluh) buku dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan efisiensi pada belanja alat tulis kantor.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.6.369.800,-** (**Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah**) dan realisasi keuangan sebesar **Rp.5.741.000,-** (**Enam Juta Lima Ribu Rupiah**) atau sebesar **90.13** Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah berupa 1 (Satu) dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satpol PP tahun anggaran 2024 sebanyak 10 (Sepuluh) buku dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri no mor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.8.989.500,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.8.018.500,- (Delapan Juta Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)** atau sebesar **89,20 Persen**. Adapun Output / Keluaran adalah berupa 1 (satu) dokumen DPA-SKPD Satpol PP tahun anggaran 2024 sebanyak 65 (Enam puluh lima) buku dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.21.390.300,- (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.18.330.600,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau sebesar **85,70 Persen**. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa 1 (satu) Perubahan dokumen DPPA-SKPD Satpol PP tahun anggaran 2024 sebanyak 65 (Enam puluh lima) dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.4.476.350,- (Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)** realisasi keuangan sebesar Rp.2.730.200,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 60,99 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa 4 (empat) laporan yang terdiri dari Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP dan PK sebanyak 4 (Empat) buku dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen. Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan efisiensi pada belanja alat tulis kantor.
- 2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp.4.467.165.763,- (Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.3.396.015.744,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah) atau sebesar 76,02 Persen. Sub Kegiatan ini untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang direncanakan dengan target sebanyak 26 (Dua puluh enam) orang, dengan realisasi sebanyak 24 (Dua puluh empat) orang selama 12 (dua belas) bulan. Terhadap realisasi keuangan yang hanya sebesar 76,02 Persen yang dikarenakan adanya kekosongan ASN di Satuan Polisi Pamong Praja baik 1

- (Satu) Kepala Satuan, 1 (Satu) Kepala Bidang, dan 1 (Satu) Kepala Seksi sehingga target Sub Kegiatan ini belum tercapai.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp.5.103.780.000,- (Lima Milyar Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.839.365.000,- (Empat Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 94,82 Persen. Adapun Output/ Keluaran dari Sub Kegiatan ini digunakan untuk membiayai tenaga kerja waktu tertentu yang direncanakan sebanyak 393 (Tiga ratus sembilan puluh tiga) orang, dengan realisasi sebanyak 368 orang guna mendukung pelaksanaan tugas pokok Satpol PP.
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp.9.401.600,- (Sembilan Juta Empat Ratus Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.7.925.000,- (Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 84,29 Persen. Adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 (Satu) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulan / Semester SKPD dengan anggaran sebesar Rp.10.530.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.8.437.500,- (Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 80,13 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah laporan keuangan bulanan / Triwulan / Semester SKPD sebanyak 14 (Empat belas) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **3. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat daerah**

- a. Sub Kegiatan Pengamanan barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp.60.045.150,- (Enam Puluh Juta Empat Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.50.616.000,- (nol rupiah) atau 84,30 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa asuransi kendaraan roda empat sebanyak 7 (Tujuh) unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp.7.424.100,- (Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasi

keuangan sebesar Rp.5.977.400,- (Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 80,51 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah laporan penatausahaan barang milik daerah sebanyak 1 (Satu) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

#### **4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp.13.821.700 (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.12.680.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 91,74 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian sebanyak 1 (Satu) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen
- b. Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas dengan anggaran sebesar Rp.124.673.500,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.20.250.000,- (dua puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) atau sebesar 16,24 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa 12 (Dua belas) laporan upacara persemayaman ASN yang meninggal dunia yang dialokasikan sebanyak 20 (Dua) kegiatan, dengan realisasi sebanyak 10 (Dua puluh) kali atau sebesar 50 persen. Terhadap realisasi keuangan yang hanya sebesar 16,24 Persen dikarenakan adanya efisiensi pada belanja makan minum, uang saku anggota dan belanja perjalanan dinas.
- c. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan anggaran sebesar Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.0,- (nol rupiah) atau sebesar 0 Persen. Sub Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan SDM yang dimiliki Satpol PP untuk mengikuti pelatihan diklat yang telah dianggarkan serta anggaran untuk diklat Perencanaan (Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029) yang diselenggarakan oleh UGM telah dianggarkan oleh Bappeda Kabupaten Muara Enim.

## 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar Rp.17.676.500,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.17.550.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 99,28 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah 1 (satu) paket alat listrik dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.71.692.800,- (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.53.963.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua ribu rupiah) atau sebesar 75,27 Persen. Adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah 2 (dua) paket yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) jenis perabot kantor dan isi ulang tabung apar, dengan capaian output / keluaran sebesar 96 Persen.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp.26.070.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.25.860.000 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 99,19 Persen. Adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah 2 (Dua) jenis peralatan rumah tangga yang terdiri dari Dispenser sebanyak 4 (Empat) buah; Gorden ruangan kerja sebanyak 20 (Dua puluh) set dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan logistik kantor dengan anggaran sebesar Rp.718.615.800,- (Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.685.076.800,- (Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau sebesar 95,33 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah 3 (Tiga) jenis bahan logistik yang terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk genset sebanyak 1.320 Liter dan untuk kendaraan operasional sebanyak 17.280 liter; Alat tulis kantor sebanyak 43 (Empat puluh tiga) jenis; makan dan minum anggota piket sebanyak 30 orang x 1 kali x 30 hari x 12 bulan, dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp.116.594.500,- (sembilan puluh enam juta empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.114.430.000,- (Seratus Empat Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 98,14 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah 10 (sepuluh) jenis barang cetakan dan penggandaan dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.

- f. Sub Kegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp.15.840.000,- (Lima Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.1.800.000,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) atau sebesar 11,36 Persen. Adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah 6 (enam) jenis surat kabar selama 12 (Dua Belas) bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 50 Persen. Terhadap penyerapan realisasi keuangan yang tidak mencapai target dikarenakan efisiensi belanja langganan surat kabar hanya untuk 3 (tiga) jenis bahan bacaan.
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp.931.175.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.921.176.922,- (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 98,93 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa 12 (Dua belas) laporan hasil koordinasi dan konsultasi baik ke dalam daerah maupun ke luar daerah dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.

**6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah**

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp.16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.15.900.000,- (Lima Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 99,38 Persen. Adapun Output /Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah 2 (Dua) unit Lemari Arsip dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.322.454.575,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.317.035.000,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 98,32 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa 20 (dua puluh) peralatan dan mesin terdiri dari CCTV sebanyak 1 (Satu) paket; Mesin Fingerprint sebanyak 1 (Satu) unit; Mesin penghancur kertas sebanyak 3 (Tiga) unit; Pintu Door Lock sebanyak 1 (Satu) Paket; AC sebanyak 5 (Lima) unit; Laptop sebanyak 1 (Satu) unit; Komputer sebanyak 5 (Lima) unit; Printer sebanyak 3 (Tiga) unit, dengan capaian output / keluaran sebesar 95 Persen.
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.659.300.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.653.317.500,- (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga

Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 99,09 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa 9 (Sembilan) unit terdiri dari pembuatan Pos kamling sebanyak 4 (Empat) unit paket; rehab pembangunan gudang sebanyak 1 (Satu) unit; pembangunan pos jaga PTI Kantor Satpol PP sebanyak 1 (Satu) unit; Tempat Parkir sebanyak 2 (Dua) Unit; intalasi listrik gedung kantor Satpol PP sebanyak 2 (Dua) paket, dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.

#### **7. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp.9.051.600,- (Sembilan Juta Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.6.720.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 74,24 persen. Adapun output / keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa 3 (Tiga) jenis terdiri dari Materai 10.000 sebanyak 600 (Enam ratus) buah; pembelian cek sebanyak 12 (Dua belas) buku; Paket pengiriman sebanyak 6 (Enam) paket, dengan capaian output / keluaran sebesar 99 persen. Terhadap penyerapan realisasi keuangan yang tidak mencapai target dikarenakan efisiensi belanja buku cek dan belanja paket.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp.134.062.500,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp. 80.598.135,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 60,12 persen. Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa 3 (Tiga) jenis terdiri dari Belanja tagihan air, belanja tagihan listrik, dan belanja tagihan internet berlangganan selama 12 (Dua belas) bulan. Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan adanya efisiensi penggunaan/pemakaian belanja air, listrik dan internet kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

#### **8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan anggaran sebesar Rp.39.695.750,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.34.545.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 87,02 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa biaya pajak dan biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



- sebanyak 1 (Satu) unit, dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar Rp.378.325.081,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.368.875.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 97,50 Persen. Adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah 25 (Dua puluh lima) unit yang terdiri dari Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) sebanyak 16 (Enam belas) unit, Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) sebanyak 7 (Tujuh) unit, dan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 (Dua) sebanyak 2 (Dua) unit, dengan capaian output / keluaran sebesar 88 Persen.
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.96.121.060,- (Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.95.960.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 99,83 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa 4 (Empat) jenis terdiri service mesin fotocopy sebanyak 1 (Satu) unit, service PC dan laptop sebanyak 20 (Dua puluh) unit, service printer sebanyak 12 (Dua belas) unit dan pengurusan izin senjata api sebanyak 6 (Enam) unit dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.
  - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp.182.080.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.182.001.000,- (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Seribu Rupiah) atau sebesar 99,96 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa pemeliharaan halaman gedung / bangunan kantor sebanyak 1 (Satu) unit dan perbaikan ruang musholla Kantor Satpol PP sebanyak 1 (satu) unit, dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.
  - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung pendukung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp.25.010.000,- (Dua Puluh Lima Juta Sepuluh Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.24.700.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 98,76 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa pemeliharaan air conditioner sebanyak 41 (Empat puluh satu) unit dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.

**b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Alokasi anggaran untuk program **peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum** sebesar **Rp.1.680.905.740,-** (*Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp.666.799.040,-** (*Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Rupiah*) atau **39,67** Persen. Program ini terdiri dari **2** kegiatan, dan **10** Sub Kegiatan sebagai berikut.

**1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam (satu) daerah Kabupaten / Kota**

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota dengan anggaran sebesar Rp.16.055.000,- (Enam Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.13.894.750,- (Tiga Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh rupiah) atau sebesar 86,54 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten / Kota sebanyak 1 (Satu) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum semula anggaran sebesar **Rp.2.372.137.000,-** (*Enam Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*) berubah menjadi **Rp.0 (Nol Rupiah)**. Anggaran Sub Kegiatan ini dihapuskan karena semula dianggarkan untuk kegiatan pengamanan pemilu dan pemilu kada serentak dimana uang saku jasa pengamanan anggota satlinmas telah dianggarkan oleh KPU dan Sub Kegiatan ini kurang tepat untuk penganggaran kegiatan pengamanan.
- c. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia dengan anggaran sebesar Rp.317.669.940,- (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.90.435.640,- (Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah) atau sebesar 28,47 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah pelatihan anggota Satpol PP sebanyak 237 (Dua ratus tiga puluh tujuh) orang anggota terdiri dari 62 (Enam puluh dua) orang anggota Satpol PP, 25 (Dua puluh lima) orang anggota korsik, dan 150 (Seratus lima puluh) anggota Satlinmas lingkup Kabupaten Muara Enim, dengan capaian output / keluaran sebesar 37 Persen. Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan tidak dilaksanakannya pelatihan anggota satlinmas.

- d. Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran sebesar Rp.55.564.000,- (Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.45.307.600,- (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus) atau sebesar 81,54 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan sebanyak 1 (Satu) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- e. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan dengan anggaran sebesar Rp.340.441.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.204.776.400,-(Dua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus rupiah) atau sebesar 60,15 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah 12 (Dua belas) laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, dan pengawalan. Rendahnya belanja makanan dan minuman rapat, belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
- f. Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan anggaran sebesar **Rp.48.490.000,-** (*Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) realisasi keuangan sebesar **Rp.48.316.850,-**( *Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*) atau sebesar **99,64** Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah 12 (Dua belas) Laporan penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.
- g. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran sebesar Rp.7.875.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) realisasi keuangan sebesar Rp.7.560.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 96 Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Tongkat lampu lintas sebanyak 63 (Enam puluh tiga) unit dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.

2. **Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota**
- a. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / walikota dengan anggaran sebesar **Rp.92.115.800** (*Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah*) realisasi keuangan sebesar **Rp.47.942.200,-** (*Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah*) atau sebesar **52,05** Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlokasi di 3 (tiga) sekolah dalam wilayah Kabupaten Muara Enim dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen. Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan efisiensi pada belanja bahan cetak, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia, belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, dan belanja sewa bangunan gedung tempat bangunan karena sosialisasi dilaksanakan di gedung sekolah.
  - b. Sub Kegiatan Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan anggaran sebesar **Rp.671.315.000,-** (*Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*) realisasi keuangan sebesar **Rp.128.430.600,-** (*Seratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus*) atau sebesar **19,13** Persen. Adapun Output / Keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa 12 (Dua belas) Laporan pelaksanaan penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah sesuai SOP dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen. Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan efisiensi pada belanja bahan cetak, honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan dan belanja perjalanan dinas biasa.
  - c. Sub Kegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati / walikota dengan anggaran sebesar **Rp.131.380.000,-** (*Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) realisasi keuangan sebesar **Rp.80.135.000,-** (*Delapan Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*) atau sebesar **60,99** Persen. Adapun Output/keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebanyak 12 (Dua belas) laporan dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen. Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan efisiensi pada belanja bahan cetak dan belanja perjalanan dinas biasa.

### 3. Capaian Indikator Kinerja

**Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Angka Kriminalitas	9	8.60	104.65%
		Meningkatnya Kualitas Trantibumas dalam menegakan Perda dan Perkada	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75%	100%	133,33%
		Meningkatkan kinerja tata kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	68,5	68,25	99,64%

### 4. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2025 telah berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi Satpol PP dan solusi yang diajukan sebagai berikut:

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Masih Tingginya Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum (Kamtibmas) berupa Konflik Berbasis SARA, Anarkis, Separatisme, Pencurian dan Kekerasan, Curanmor dan Tawuran.	Mengimplementasikan sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, serta melakukan patroli rutin di area rawan kejahatan.
		Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait secara intensif.
2.	Masih Tingginya Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatkan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang Perda dan Perkada;
		Memberdayakan masyarakat dan anggota linmas di desa dalam

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
		<p>penanganan aksi cepat tanggap rawan bencana serta menjaga keamanan dan ketertiban di desa;</p> <p>Peningkatan kompetensi SDM melalui pendelegasian pegawai untuk mengikuti beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, mulai dari bidang perencanaan, administrasi hingga teknis operasional</p> <p>Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana ketertiban umum</p>

#### 5. Penghargaan dan Prestasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 memperoleh peringkat 6 besar dari 10 Inovator OPD atas inovasi TIM Tiger (Tindakan, Integritas melalui Patroli Tanggap, Tegas dan Gerak Cepat).

## OPD : DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (DPKP)

### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Pada tahun 2024, alokasi belanja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Muara Enim sebesar Rp.20.944.895.323 (*dua puluh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp.19.570.329.721 (*sembilan belas milyar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*) atau 93,44% untuk membiayai belanja operasi dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 12.241.274.873 (*dua belas milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 10.891.292.721 (*sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah*) atau 88,97% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

#### b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 8.703.620.450 (*delapan milyar tujuh ratus tiga juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*) terealisasi sebesar Rp. 8.678.737.000 (*delapan milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) atau 99,71% yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

### 2. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim melaksanakan sebanyak 2 (dua) program, 13 (tiga belas) kegiatan, dan 47 (empat puluh tujuh) Sub kegiatan yaitu :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 16.630.114.305 (*enam belas milyar enam ratus tiga puluh juta seratus empat belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 15.846.437.881 (*lima belas milyar delapan ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah*) atau 95,29% program ini terdiri dari 8 (*delapan*) kegiatan, dan 32 (*tiga puluh dua*) Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp.74.010.600. Dengan Realisasi sebesar Rp.72.449.000 atau sebesar 97,89%.

a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6.788.900 (*enam juta tujuh ratus*



*delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)* dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.354.200 (*enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah)* atau sebesar 93,60%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan tahun 2024 sebanyak 10 Buku dan perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan tahun 2024 sebanyak 10 Buku, guna memenuhi amanat Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.13.429.700 (*tiga belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)* dan realisasi keuangan sebesar Rp.13.199.000 (*tiga belas juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)* atau sebesar 98,28%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah berupa dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan tahun anggaran 2024 sebanyak 12 Buku, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD dengan anggaran sebesar Rp.13.119.400 (*tiga belas juta seratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah)* dan realisasi keuangan sebesar Rp.12.945.000 (*dua belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)* atau sebesar 98,67%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah berupa dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan tahun anggaran 2024 sebanyak 30 Buku, guna memenuhi amanat Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 14.463.100 (*empat belas juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah)* dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.373.000 (*empat belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)* atau sebesar 99,38%. Adapun Output/keluaran adalah berupa dokumen DPA-SKPD Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan tahun anggaran 2024 sebanyak 40 buku, guna memenuhi amanat Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 16.157.800 (*Enam Belas Juta Seratus*

*Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus rupiah)* dan realisasi keuangan sebesar Rp.15.795.000 (*lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) atau sebesar 97,75%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini berupa Perubahan dokumen DPPA-SKPD Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan tahun anggaran 2024 sebanyak 39 Buku, guna memenuhi amanat Permendagri No. 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- f. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 10.051.700 (*sepuluh juta lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.782.800 (*sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) atau sebesar 97,32%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah 3 Laporan yaitu Laporan AKIP, Laporan LPPD, Laporan PMPRB guna memenuhi amanat Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp.5.853.597.933. Dengan Realisasi sebesar Rp.5.603.543.464 atau sebesar 95,73%.
    - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 5.845.696.133 (*lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh tiga rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.596.261.064 (*lima milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam puluh satu ribu enam puluh empat rupiah*) atau sebesar 95,73%. Sub kegiatan ini untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN sebanyak 26 orang selama 12 (dua belas) bulan.
    - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.745.000 (*tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.330.600 (*tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah*) atau sebesar 88,93%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 Buku (Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD), guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
    - c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.156.800 (*empat juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.951.800 (*tiga juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah*) atau sebesar 95,07%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semester SKPD sebanyak 4 Buku (Laporan



Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD) guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp.222.593.940. Dengan Realisasi sebesar Rp.205.778.280 atau sebesar 92,45%.
  - a. Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 7.261.040 (*tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu empat puluh rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.867.400 (*enam ratus delapan ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) atau sebesar 94,58%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah berupa dokumen perencanaan Kebutuhan barang Milik Daerah SKPD Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan tahun 2024 sebanyak 1 (satu) Dokumen, guna memenuhi amanat Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - b. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 209.140.800 (*dua ratus sembilan juta seratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 192.925.480 (*seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah*) atau sebesar 92,25%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini berupa asuransi kendaraan roda empat sebanyak 15 (lima belas) unit, guna memenuhi amanat Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - c. Sub kegiatan Penatausahaan barang milik daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 6.192.100 (*enam juta seratus sembilan puluh dua ribu seratus rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.985.400 (*lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah*) atau sebesar 96,66%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan/buku barang aset milik daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 1 laporan/buku aset barang milik daerah.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp.537.640.800. Dengan Realisasi sebesar Rp.511.008.800 atau sebesar 95,05%.
  - a. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 482.740.000 (*empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp.470.490.000 (*empat ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*) atau sebesar 97,46%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah pakaian kerja lapangan sebanyak 5 Jenis yaitu Sepatu, Kaos Lapangan Atribut Kelengkapan Pakaian PDU I, Baju Tahan Panas dan Seragam

PDU I Pemadam Kebakaran.

- b. Sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 2.900.800 (*dua juta sembilan ratus ribu delapan ratus rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.418.800 (*dua ratus empat ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah*) atau sebesar 83,38%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan administrasi kepegawaian dengan capaian output/keluaran sebesar 1 Dokumen administrasi kepegawaian.
  - c. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 52.000.000 (*lima puluh dua juta rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.100.000 (*tiga puluh delapan juta seratus ribu rupiah*) atau sebesar 73,27%. Adapun Output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 4 (empat) orang untuk Pelatihan/Bimtek/Diklat/Sosialisasi dan 5 (lima) orang untuk kursus, Pelatihan dan diklat penyelamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 9 orang.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp.1.523.285.223. Dengan Realisasi sebesar Rp.1.287.857.387 atau sebesar 84,54%.
- a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 15.661.702 (*lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.661.000 (*lima belas juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah*) atau sebesar 100%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah 10 paket yang terdiri dari Baterai Alkalin 2A, Stop Kontak, Kabel Listrik - Lampu 20 Watt, Lampu 20 Watt, Klem Kabel, Fitting Lampu, Kabel NYM 2x2,5 mm, Kabel NYY 2x1,5 mm, Lampu 18 Watt, dan Saklar Ganda.
  - b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 291.834.060 (*dua ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam puluh rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 277.357.000 (*dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) atau sebesar 95,04%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah 45 Jenis yang terdiri dari Belanja Barang dan Belanja Modal. Belanja Barang berupa Gayung Plastik, Kain Serbet, Karbol Wangi 450ml, Keranjang Sampah Bertutup, Kertas Tisu 900 Gram 2 Ply, Keset Kaki, Lap Kain Bahan Handuk/Lap Majun, Lap Kanebo, Pel Dorong Slmbu, Pembersih Kaca, Pembersih Kloset 450ml, Pembersih Lantai, Perabotan Kantor-Ember Plastic Ukuran Sedang, Perabotan Kantor, Kapur Barus Bulat Besar, Pewangi Gantung, Pewangi Kendaraan, Pewangi Ruangan Semprot, Pewangi Ruangan Spray, Sabun Cuci, Sabun Cuci Tangan, Sapu Bulu Ayam,



- Sapu Lantai, Sapu Lidi, Serok Sampah Sikat Kloset+Gagang, Obat Amoxicillin 250 Mg/5/ML Botol, Obat Asam Mefenamat 500mg, Obat Calcitriol 0,50 Mcg Kap, Obat Ibuprofen 400 Mg, Dan Obat Paracetamol Drops dan Belanja Modal berupa Ac Split, Dispenser, Kipas Angina, Gorden, Kasur Busa, Printer, Speker Aktif, Action Cam, Drone + Kelengkapan Tambahan, Genset, Lampu Emergency, UPS, Laptop.
- c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 210.668.852 (*dua ratus sepuluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 200.307.925 (*dua ratus juta tiga ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) atau sebesar 95,08%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah 35 paket yang terdiri dari BBM Pertamina, BBM Peralite, Mistar Plastik, Bantalan Cap, Binder Clip No.155, Binder Clips No 111, Binder Klip No.155, Block Note Polos, Box Arsip Besar, Box Rsip Kecil Ukuran 9cm, Buku Agenda Besar Ukuran 20.5 X 30, Isi 200 Lbr, Kulit Tebal, Buku Agenda Folio Isi 200 Lembar, Catridge Canon 740 (Hitam), Cutter, Gunting Kertas Ukuran Besar, Isi Necis Kecil Merk Max No.10, Kertas A4 70 Gram, Kertas HVS 80 Gram Ukuran F4, Klip Kertas No.03, Lakban Hitam, Map Folio Kertas Karton, Map Snelhecter (Bahan Plastic), Mistar Besi 30 Cm, Necis Besar, Pelobang Kertas, Pena Balliner, Pena Biasa Pilot/Standar, Penghapus Pensil Steadler, Pensil 2B, Plastik Jilid/Plastic Cover Transparan, Refill Tinta Data Print Suntikan, Refill Tinta Epson 664 Hitam, Spidol White Board, Stabile, Tinta Stempel, Tip-X Ukuran 20ml, Toner Black (Mesin Fotocopy), Amplop, Amplop Dinas Kecil Ukuran 14x26, Bahan Kertas Kesting Tebal, Warna Coklat, Kartu Kendali Masuk Dan Keluar, Gula Pasir, Isi Ulang Galon, Kopi Bubuk, Persediaan Makan/Minum (Teh Kotak), Nasi Kotak/Prasmanan.
- d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dengan anggaran sebesar Rp. 66.384.180 (*enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 65.504.600 (*enam puluh lima juta lima ratus empat ribu enam ratus rupiah*) atau sebesar 98,68%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah 11 Paket yang terdiri dari amplop bupati uk. 14 x 26 cm kertas Samson x super cabinet, amplop dinas kecil pakai ambang daerah berwarna, bahan kissing tebal ukuran 10x25m cabinet, amplop sekda kecil ukuran 14x26cm bahan kissing tebal warna, bahan cetakan barang cetakan – cetak lembar disposisi, jilid spiral, cetak benner/spanduk bahan jenis flexi 280gr, cetak buku + jilid soft cover sampai dengan 250 lembar, kop bupati besar lambing garuda tinta emas uk. Kertas HVS f4, 80 gram, kop surat ½ F4, map snelhecter kop dinas bahan sonstruct dan biaya fotocopy.
- e. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

- undangan dengan anggaran sebesar Rp. 12.800.000 (*dua belas juta delapan ratus ribu rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.120.000 (*sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah*) atau sebesar 71,25%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah 6 dokumen yaitu belanja surat kabar atau koran sebanyak 64 (enam puluh empat) eksemplar.
- f. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 920.408.800 (*sembilan ratus dua puluh juta empat ratus delapan ribu delapan ratus rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 714.844.162 (*tujuh ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah*) atau sebesar 77,67%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini berupa 3660 laporan hasil koordinasi dan konsultasi baik ke dalam daerah maupun ke luar daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
  - g. Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 5.527.629 (*lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.062.700 (*lima juta enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah*) atau sebesar 91,59%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah tingkat pengelolaan arsip dinamis dengan capaian output/keluaran sebesar 1 Dokumen terdiri dari Box Arsip Kecil Ukuran 9cm, Catridge Printer 810, Cutter, Gunting Kertas Ukuran Besar, Isi Necis Kecil Merk Max No.10, Kertas Foto/Glossy, Kertas HVS 70 Ukuran A4, Lem Glukos Ukuran Sedang, Map Folio Kertas Karton, Necis Kecil, Pena Balliner, Pena Biasa Pilot/Standar, Spidol White Board dan Fotocopy.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp.7.220.000.000. Dengan Realisasi sebesar Rp.7.220.000.000 atau sebesar 100%.
    - a. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 7.175.000.000 (*tujuh milyar seratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.175.000.000 (*tujuh milyar seratus tujuh puluh lima juta ribu rupiah*) atau sebesar 100%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 4 unit yaitu fire jeep single cabin 4x4 1 unit, pengadaan mobil pemadam kebakaran 3 unit.
    - b. Sub kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.0000 (*empat puluh lima juta rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.000.000 (*empat puluh lima juta rupiah*) atau sebesar 100%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 6 jenis yaitu Kursi eselon II 1 buah, Lemari

- arsip 4 unit, loker 12 pintu 1 buah.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 401.257.033. Dengan Realisasi sebesar Rp. 361.748.818 atau sebesar 90,15%.
  - d. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp.20.549.200 (*dua puluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp.13.514.400 (*tiga belas juta lima ratus empat belas ribu empat ratus rupiah*) atau sebesar 65,77%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah dan jenis belanja paket pengiriman, dokumen bermaterai, berperangko dan jenis dokumen kilat tercatat dengan capaian output/keluaran sebesar 2142 laporan.
  - e. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 130.552.490 (*seratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 98.242.418 (*sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah*) atau sebesar 75,25%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah rekening yang dibayar yaitu sebanyak 4 rekening yaitu, pembayaran tagihan komunikasi, air, listrik, telepon dan speedy.
  - f. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp.250.155.343 (*dua ratus lima puluh juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp.249.992.000 (*dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*) atau sebesar 99,93%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah jasa tenaga kebersihan dan tenaga pelayanan umum dengan capaian output/keluaran sebesar 4 orang.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 797.728.776. Dengan Realisasi sebesar Rp. 584.052.132 atau sebesar 73,21%.
- a. Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 48.583.948 (*empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.307.150 (*tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh ribu seratus lima puluh rupiah*) atau sebesar 72,67%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah dan jenis pajak kendaraan dinas/operasional dengan capaian output/keluaran sebesar 2 unit yaitu kendaraan kepala dinas dan kendaraan sekretaris.
  - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 604.354.540 (*enam ratus empat juta tiga ratus lima puluh*

*empat ribu lima ratus empat puluh rupiah)* dan realisasi keuangan sebesar Rp. 431.704.982 (*empat ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)* atau sebesar 71,43%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan pajak kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4 dengan capaian output/keluaran sebesar 12 unit mobil operasional pemadam kebakaran.

- c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 45.998.000 (*empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)* dan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.900.000 (*empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)* atau sebesar 99,79%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah dan jenis kantor yang dipelihara dengan capaian output/keluaran sebesar 3 jenis gedung bangunan pemadam.
- d. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.17.220.000 (*tujuh belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)* dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.980.000 (*enam belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)* atau sebesar 98,61%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara/rutin dengan capaian output/keluaran sebesar 6 jenis yaitu pemeliharaan personal computer/notebook sebanyak 15 unit/tahun, pemeliharaan UPS sebanyak 1 kali, pemeliharaan printer 8 unit/tahun.
- e. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 81.572.288 (*delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah)* dan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.160.000 (*lima puluh empat ribu seratus enam puluh ribu rupiah)* atau sebesar 66,40%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/terpelihara dengan capaian output/keluaran sebesar 2 jenis yaitu Isi ulang Alat Pemadam Api Ringan(APAR) sebanyak 81 kali, Service Mesin Fotocopy sebanyak 1 jenis x 4 kali, Pemeliharaan AC Split sebanyak 60 Kali.

## **2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran**

Alokasi anggaran untuk program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp. 4.314.781.018 (*empat milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan belas rupiah)* dengan realisasi sebesar Rp.3.723.891.840 (*tiga milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu*



*delapan ratus empat puluh rupiah*) atau 86,00% program ini terdiri dari 5 (*lima*) kegiatan, dan 13 (*tiga belas*) Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, pemadam, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi Anggaran sebesar Rp.2.040.835.298. Dengan Realisasi sebesar Rp.1.755.168.673 atau sebesar 86,00%.
  - a. Sub kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.50.770.300 (*lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.637.700 (*tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah*) atau sebesar 70,19%. Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan kebakaran. Dengan peserta yaitu perangkat desa, masyarakat desa, dan kelompok ibu-ibu desa wisma. Adapun pusat pelayanan masyarakat yaitu kantor kepala desa.
  - b. Sub kegiatan Pemadam dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.139.413.900 (*satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp.897.271.892 (*delapan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah*) atau sebesar 78,75%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah laporan kebakaran ada 66 (*enam puluh enam*) kejadian dan penanganan kebakaran waktu tanggap (*response time*) ada 22 dari 66 kejadian.
  - c. Sub kegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.24.847.400 (*dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp.20.143.050 (*dua puluh juta seratus empat puluh tiga ribu lima puluh rupiah*) atau sebesar 81,07%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini sebesar 1 laporan/data yaitu laporan penanganan bahan berbahaya dan beracun yang ditangani.
  - d. Sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp.758.697.740 (*tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp.757.555.455 (*tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*) atau sebesar 99,85%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah aparatur yang lulus bersertifikat Diklat Pemadam I Jumlah 60 Orang Persentase 100%.
  - e. Sub kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran dengan anggaran sebesar Rp.



67.105.958 (*enam puluh tujuh juta seratus lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.560.576 (*empat puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah*) atau sebesar 66,40%. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah perjanjian kerja sama yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Muara Enim yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Pali, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, Dan Kabupaten OKu Induk.

2. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran. Alokasi Anggaran sebesar Rp.36.037.280. Dengan Realisasi sebesar Rp.35.091.000 atau sebesar 97,37%.
  - a. Sub kegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp.12.325.670 (*dua belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp.11.914.500 (*sebelas juta sembilan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*) atau sebesar 96,66%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini sebesar 1 laporan yaitu laporan jumlah sarana proteksi kebakaran yang di data. Tempat yang dilaksanakan yaitu di perusahaan di Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Gelumbang, dan Kecamatan Lembak. Dilanjutkan dengan Perusahaan berupa Bank BRI, Bank BNI, Bank Sumsel dan Bank Mandiri di Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.
  - b. Sub kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp.23.711.610 (*dua puluh tiga juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus sepuluh rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.176.500 (*dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah*) atau sebesar 97,74%. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah tempat yang dilaksanakan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran yaitu di perusahaan di Kecamatan Lawang Kidul, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Belimbing, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Gelumbang, dan Kecamatan Lembak. Dilanjutkan dengan Perusahaan berupa Bank BRI, Bank BNI, Bank Sumsel dan Bank Mandiri di Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim.
3. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran. Alokasi Anggaran sebesar Rp.72.927.148. Dengan Realisasi sebesar Rp.62.801.410 atau sebesar 86,12%.
  - a. Sub kegiatan Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dengan anggaran sebesar Rp.72.927.148 (*tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp.62.801.410 (*enam puluh dua juta delapan ratus satu ribu empat ratus sepuluh rupiah*) atau sebesar 86,12%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini sebesar 1 laporan yaitu laporan jumlah penelitian, pengujian penyebab kejadian kebakaran yang diinvestigasi.



4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran. Alokasi Anggaran sebesar Rp.448.462.825. Dengan Realisasi sebesar Rp.416.039.557 atau sebesar 92,77%.
  - a. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.112.341.525 (*seratus dua belas juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp.101.654.650 (*seratus satu juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*) atau sebesar 90,49%. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah peserta sosialisasi pencegahan penanggulangan dengan capaian output/keluaran sebesar 1 laporan (laporan yang sudah dilakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat) sebanyak 40 desa.
  - b. Sub kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp.336.121.300 (*tiga ratus tiga puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp.314.384.907 (*tiga ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh rupiah*) atau sebesar 93,53%. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya sebanyak 100 Desa/Kelurahan.
5. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia. Alokasi Anggaran sebesar Rp.1.716.518.467. Dengan Realisasi sebesar Rp.1.454.791.200 atau sebesar 84,75%.
  - a. Sub kegiatan Penyelenggaraan Operasi pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam kesehatan manusia dengan anggaran sebesar Rp.654.588.017 (*enam ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh belas rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp.441.391.200 (*empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*) atau sebesar 67,43%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah persentase penanganan peristiwa membahayakan atau mengancam manusia yang ditindak lanjuti dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Laporan. Adapun laporan penyelamatan ada 48 (empat puluh delapan) kejadian. Kejadian yang terdiri dari orang hanyut, pemusnahan sarang tawon, evakuasi anjing dalam sumur, evakuasi ular, evakuasi kucing, evakuasi orang masuk sumur, evakuasi pohon tumbang dan evakuasi penanganan cincin.
  - b. Sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan

Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi dengan anggaran sebesar Rp. 94.000.000 (*sembilan puluh empat juta rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.500.000 (*empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) atau sebesar 48,40%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini jumlah Laporan hasil pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Laporan.

- c. sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi dengan anggaran sebesar Rp. 967.930.450 (*sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah*) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 967.900.000 (*sembilan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus ribu rupiah*) atau sebesar 100%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi sesuai dengan standar teknis dengan capaian output/keluaran sebesar 31 unit.

### 3. Capaian Indikator Kinerja

Sesuai dengan target kinerja sasaran dalam Renstra, capaian indikator kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.15 Matrik Capaian Indikator Kinerja  
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim  
Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan pelayanan pencegahan, pemadam dan penyelamatan bahaya kebakaran	.Meningkatkan pelayanan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran serta penyelamatan korban jiwa/aset harta benda akibat kejadian kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100%	50%	50%
			Peningkatan capaian waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran	100%	88%	88%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			(WMK)			
			Persentase aparaturn pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	100%	90%	90%
			Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	100%	82%	82%
		2.Meningkatnya kinerja aparaturn	Nilai Sakip	BB	NA	NA

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim, Tahun 2024

#### 4. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1	Masih kurangnya aparaturn yang bersertifikat	Perlu dilaksanakan pelatihan dan pendidikan aparaturn ASN dan non ASN
2	Adanya permukiman penduduk yang belum memenuhi standar permukiman	Perlunya koordinasi dengan instansi terkait apar memenuhi standar permukiman
3	Cakupan luasan wilayah	Perlunya penambahan pengadaan unit wilayah manajemen kebakaran
4	Masih kurangnya sarana dan prasarana armada Pemadam Bahaya Kebakaran sehingga membuat personil damkar sering sekali kurang optimal ketika sedang berada di lokasi kebakaran, hambatan yang sering terjadi di lapangan yaitu kondisi jalan menuju ke lokasi kejadian dan keterlambatan laporan dari masyarakat	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran yang dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim berjumlah 23 (dua puluh tiga) unit. Ke depan jumlah mobil Pemadam Kebakaran dan personil masih perlu ditambah
5	Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia serta kurangnya pelatihan- pelatihan	Melakukan pengembangan peningkatan produktivitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan



No	Permasalahan	Solusi
	terhadap bencana terutama bagi personil Pemadam Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan	dan Pelatihan secara terus menerus kepada seluruh pegawai agar mampu mengemban tugas dan pekerjaan sebaik mungkin
6	Aksesibilitas (Jalan Sempit, Gapura, Portal)	Telah terbentuknya Forum Komunikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Muara Enim
7	Kurangnya sarana dan prasarana (Mobil DAMKAR)	Mengajukan pembuatan usulan pengadaan Sarpras melalui dana DAK Provinsi, Pusat dan Hibah serta Proposal ke Perusahaan
8	Kurangnya sumber air (Hydran, kolam, bak penampungan, sungai) yang dapat dipergunakan	Pembangunan Infrastruktur Khusus seperti Penampungan Air Cadangan
9	Kepadatan lalu lintas dalam kota	Perlu memprioritaskan mobil Pemadam Kebakaran untuk lewat ketika ada kejadian kebakaran agar cepat sampai lokasi
10	Kerapatan bangunan dari satu bangunan ke bangunan yang lain	Telah melakukan konsolidasi dengan pihak perusahaan dalam wilayah Kabupaten Muara Enim mengenai penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
11	Belum idealnya sarana prasarana penanggulangan kebakaran, penyelamatan serta bencana lainnya	Telah menyediakan peralatan anggota relawan desa untuk pemadam dan penyelamatan
12	Belum maksimalnya pos dan armada pemadam	Membuat perencanaan pengembangan POS/UPT di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim
13	Belum adanya peralatan penyelamatan (mobil Rescue, Mobil Ambulance, Perahu Karet serta perlengkapan penyelamatan lainnya)	Telah melakukan pendapatan peralatan DAMKAR dan Rescue di perusahaan dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim
14	Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil dibidang DAMKAR dan Penyelamatan	Telah melakukan MOU dengan kabupaten-kabupaten Kota yang ada di perbatasan untuk kerjasama manajemen penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
15	Gedung kantor kurang memadai	Perlu penambahan Pos dan Armada Pemadam

Selanjutnya, terhadap kejadian-kejadian tersebut diatas, pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menempuh upaya-upaya penanggulangan yang meliputi tahap pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat serta upaya pemulihan pasca bencana, antara lain :

#### 1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a. Untuk mengurangi resiko yang terjadi, telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Camat dan Kades untuk terus waspada dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana seperti saat memasuki musim kemarau dan musim penghujan.
- b. Rapat koordinasi kesiapsiagaan dengan melibatkan seluruh OPD terkait dalam Kabupaten Muara Enim
- c. Membuat surat Edaran Bupati Muara Enim yang ditujukan kepada seluruh Camat untuk diteruskan ke Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mewaspadaai kondisi cuaca dengan mendorong kesiapsiagaan masyarakat.
- d. Menginventarisasi potensi penanggulangan bencana kebakaran yang dimiliki dengan mendata personil dan peralatan yang ada di Kabupaten Muara Enim
- e. Merekrut tenaga relawan yang berasal dari desa-desa dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.
- f. Mengusulkan kegiatan normalisasi sungai dan perkuatan tebing sungai melalui sumber dana APBD Provinsi Sumatera Selatan dan APBN.

#### 2. Tanggap Darurat

- a. Memberikan peringatan kepada masyarakat yang bermukim atau beraktivitas di daerah rawan bencana Kebakaran atau sedang terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan
- b. Mengupayakan pemulihan minimal terhadap prasarana masyarakat yang rusak akibat kebakaran.
- c. Berkoordinasi dengan BPBD, Tim SAR PT. Bukit Asam (Persero) Tbk dan Tim SAR PT. Pama Persada Nusantara dan Unit Kebakaran pada daerah – daerah perbatasan seperti Kabupaten Lahat, Prabumulih, Ogan Ilir, OKU dalam memberikan pertolongan kepada anggota masyarakat yang tertimpa musibah bencana kebakaran
- d. Menggalakkan gotong-royong di masyarakat dalam melakukan pemulihan terhadap kerusakan rumah tinggal dan prasarana masyarakat yang rusak akibat bencana Kebakaran
- e. Melaporkan kejadian Bahaya Kebakaran kepada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan.

#### 3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap prasarana masyarakat yang dianggap sangat penting dalam mendukung aktivitas masyarakat.
- b. Mendirikan bangunan yang bersifat perlindungan terhadap pemukiman dan prasarana masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran dan



keselamatan

4. Status Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan. Skala kejadian bahaya kebakaran dan Penyelamatan yang terjadi sepanjang tahun 2024 secara umum bersifat lokal dan penetapan/ pernyataan status bahaya secara formal, hanya melalui mekanisme di tingkat Pemerintah Kabupaten.
5. Sumber Anggaran Sumber pendanaan dalam menghadapi Bahaya Kebakaran bersumber dari APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024 melalui Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim.
6. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana. Upaya antisipasi untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh kejadian bahaya kebakaran dan kejadian penyelamatan lainnya yang telah dan akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Muara Enim diantaranya:
  - a. Melaksanakan koordinasi bersama instansi terkait melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Muara Enim serta melibatkan BUMN/BUMS dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Muara Enim dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan
  - b. Meningkatkan kesiapsiagaan seluruh masyarakat dalam mengantisipasi potensi bahaya kebakaran dan penyelamatan melalui pemberitahuan pencegahan penyebab kebakaran dan kejadian penyelamatan di Kabupaten Muara Enim.
  - c. Peningkatan jumlah dan kelengkapan sarana dan fasilitas yang diperlukan dalam penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan
  - d. Menggalang peran aktif masyarakat dan dunia usaha untuk bersama-sama menyikapi dalam setiap upaya penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan khususnya di Kabupaten Muara Enim.
  - e. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi bagi aparaturnya penanggulangan bahaya kebakaran dan Penyelamatan bekerja sama dengan BUMN dan pihak swasta serta masyarakat.
7. Potensi Bencana yang Diperkirakan. Perkiraan akan kejadian risiko bencana berkaitan erat dengan upaya antisipatif untuk pengurangan dampak kerugian dari suatu kejadian bencana (*hazard reduced impact*). Sebagai acuan dalam penyusunan program antisipatif dimaksud ketersediaan. Peta Daerah Rawan bahaya kebakaran merupakan syarat utama serta untuk kegiatan penyelamatan di suatu kejadian. Untuk Kabupaten Muara Enim sudah ada peta daerah rawan bahaya kebakaran terutama hutan dan lahan, dan akan ditindaklanjuti dengan pencegahan sebagai bagian dari upaya pengurangan dampak kerugian dari suatu kejadian bahaya kebakaran. Adapun Potensi Bencana yang diperkirakan dapat terjadi di Kabupaten Muara Enim adalah:
  - a) Bencana Kebakaran Pemukiman / bangunan
  - b) Bencana Kebakaran lahan dan hutan
  - c) Bencana Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3),



- d) Transportasi Di Jalan Raya,
- e) Penyelamatan di Air,
- f) Penyelamatan di Ketinggian,
- g) Pada Bangunan Runtuh

## 5. Penghargaan Dan Prestasi

No	Nama Penghargaan	Tahun	Tingkat (Nasional/ Provinsi)	Dinas/Instansi Penerima
1	Peringkat II Audit Kearsipan internal organisasi Perangkat daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024	2024	Kabupaten	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



## OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

### 1. URUSAN WAJIB

Urusan Wajib Badan Penanggulangan Bencana Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2024, alokasi belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar **Rp. 10.156.969.160,00 (Sepuluh Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)** dan terealisasi sebesar **Rp. 7.288.130.200,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)** atau **71,75% (Tujuh Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Lima Persen)**. dan kinerja keluaran (output) sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar **Rp. 9.659.182.787,00 (Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)** terealisasi sebesar **Rp. 6.823.630.200,00 (Enam Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)** atau **70,64% (Tujuh Puluh Koma Enam Puluh Empat Persen)** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

#### b. Belanja Modal

Belanja Langsung dialokasikan sebesar **Rp. 497.786.373,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah)** terealisasi sebesar **Rp. 464.500.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** atau **93,31% (Sembilan Puluh Tiga Koma Tiga Puluh Satu Persen)** yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja Aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan, capaian indikator sasaran, yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 - 2029 serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim melaksanakan sebanyak 2 program, 12 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan, antara lain yaitu :



1) **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

Alokasi anggaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 6.536.771.737,00 (Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.478.173.156,00 (Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah)** atau **78,01% (Tujuh Puluh Delapan Koma Satu Persen)**, dengan capaian kinerja output **78,01% (Tujuh Puluh Delapan Koma Satu Persen)**. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan urusan Wajib Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 8 kegiatan dan 26 Sub Kegiatan sebagai berikut.

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat : a) Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah; b) Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan hasil kegiatan berupa ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan sebagai akuntabilitas kinerja perangkat daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 5.485.400,00 (Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 5.349.500,00 (Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 97,52% (Sembilan Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Dua Persen), Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD sebanyak 1 Dokumen.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 5.485.400,00 (Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 5.259.600,00 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 95,88% (Sembilan Puluh Lima Koma Delapan Puluh Delapan Persen), Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa DPPA Tahun Anggaran 2024 dan DPA tahun anggaran 2025 sebanyak 1 Dokumen.

- c. Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 12.960.800,00 (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 12.654.200,00 (Dua Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 97,63% (Sembilan Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Tiga Persen). Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa DPPA Perubahan Tahun Anggaran 2024 dan DPA Perubahan sebanyak 1 Dokumen.
- d. Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 6.294.500,00 (Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 6.294.500,00 (Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 100% (Seratus Persen). Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 sebanyak 1 Dokumen.

## **2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat PP 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah; dan Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- a. Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 4.055.350.484,00 (Empat Milyar Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.2.421.776.574,00 (Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau 59,72% (Lima Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Dua Persen). Sub Kegiatan ini untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN sebanyak 19 orang selama 12 (dua belas) bulan dan pembayaran gaji 13 dan 14 dengan capaian output/keluaran sebesar 59,72%. (Karena perkiraan pada Bulan Agustus 2024 OPD BPBD Kabupaten Muara Enim meningkat menjadi eselon II.b sehingga untuk anggaran gaji pegawai dianggarkan sesuai dengan kebutuhan peningkatan Esselon dari Esselon III.a menjadi Esselon II.b namun sampai Desember belum terealisasi).
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 4.614.500,00 (Empat Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar dengan realisasi sebesar Rp.1.850.200,00 (Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) atau Rp. 40,10% (Empat Puluh Koma Sepuluh Persen). Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersusunnya Jumlah Dokumen/Laporan Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir sebanyak 1 Laporan. (Karena adanya faktor kekeliruan dalam mengadministrasikan dalam pemberkasan).

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 3.099.300,00 (Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.952.400,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 95,26% (Sembilan Puluh Lima Koma Dua Puluh Enam Persen). Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersusunnya Jumlah Dokumen/Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran sebanyak 1 Laporan.

### **3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.**

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp 63.099.300,00 (Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 63.023.800,00 (Enam Puluh Tiga Juta Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 99,88% (Sembilan Puluh Sembilan koma Delapan Puluh Delapan Persen). Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersusunnya Jumlah Dokumen/Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 1 Dokumen.
- b. Sub Kegiatan Pengaman Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp 79.594.535,00 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 77.516.000 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) atau 97,39% (Sembilan Puluh Tujuh koma Tiga Puluh Sembilan Persen). Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengamanan barang milik daerah berupa pembayaran asuransi kendaraan roda 4 sebanyak 10 unit.
- c. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp 3.099.300,00 (Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen). Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengamanan barang milik daerah berupa Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang pada SKPD BPBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 sebanyak 1 Laporan. (karena buffer stock ATK masih cukup dan tersedia sehingga belum direalisasikan atau at cost).

#### **4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 39.780.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribuh Rupiah) atau 53,04% (Lima Puluh Tiga Koma Nol Empat Persen). Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Kursus Singkat atau Pelatihan dan Bimbingan Teknis 22 orang, Kursus Singkat atau Pelatihan 22 Orang. (Karena Kegiatan Bimtek dan Pelatihan belum ada yang mengaju pada pengembangan Kompetensi ASN di bidang Kebencanaan sehingga hanya sebagian kegiatan pelatihan serta bimtek yang bisa terserap).

#### **5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 15.289.000,00 (Lima Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribuh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 8.744.900,00 (Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribuh Sembilan Ratus Rupiah) atau 57,20% (Lima Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Persen). Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersusunnya Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan berupa (pembelian alat listrik sebanyak 1 Paket terdiri dari : 1). Baterai 2). Bola Lampu 3). Lampu Sorot LED 100 Watt 4). Fitting Lampu 5). Starter Listrik 6). Stekker Listrik 7). Stop Kontak Listrik 8). MCB 9). Roll Kabel NYM 2 x 2,5 MM 10). Kabel NYM 4 x 2,5 MM 11). Stik Lampu 12). Isolasi Kabel 13). Klem Kabel selama 12 bulan. (Karena persediaan peralatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor masih tercukupi sehingga tidak terealisasikan).
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 17.750.112,00 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribuh Seratus Dua Belas Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 17.719.584,00 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribuh Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) atau 99,83% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Tiga Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah : 1 Paket (Perabot Kantor).
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 137.117.299,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Belas Ribuh Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 129.224.300,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat

- Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau 94,24% (Sembilan Puluh Empat Koma Dua Puluh Empat Persen). Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersusunnya Jumlah dan Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan sebanyak 4 Paket berupa (Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabotan Kantor).
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 16.389.300,00 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 16.097.700,00 (Enam Belas Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau 98,22% (Sembilan Puluh Delapan Koma Dua Puluh Dua Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan sebanyak 2 Paket berupa (cetak dan penggandaan (ATK dan Bahan Cetak, Foto Copy) dengan capaian output keluaran sebesar 98,22% (Sembilan Puluh Delapan Koma Dua Puluh Dua Persen).
  - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 6.722.600,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 6.570.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau 97,73% (Sembilan Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tiga Persen). Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersusunnya Jumlah dan Jenis Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan sebanyak 7 Dokumen surat kabar/majalah dengan capaian output keluaran sebesar 97,73% (Sembilan Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Tiga Persen).
  - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 714.128.890,00 (Tujuh Ratus Empat Belas Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 617.944.499,00 (Enam Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau 86,53% (Delapan Puluh Enam Koma Lima Puluh Tiga Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersusunnya Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BPBD dan Makan Minum Rapat sebanyak 2 Laporan dengan capaian output keluaran sebesar 86,53% (Delapan Puluh Enam Koma Lima Puluh Tiga Persen).

## **6. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 437.786.373,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus



Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 404.500.000 (Empat Ratus Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau 92,40% (Sembilan Puluh Dua Koma Empat Puluh Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 2 Unit berupa terlaksananya Jumlah Pembelian Peralatan Mesin Senso Besar, Generator Set, ATS/AMF, Laptop, PC All in One, Printer A3, Printer, Diaroma Dimensi Bencana (Banjir, Longsor, Gempa Bumi, Kebakaran) dengan capaian output keluaran sebesar 92,40% (Sembilan Puluh Dua Koma Empat Puluh Persen).

**7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- a. Sub Kegiatan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 8.960.000,00 (Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) atau 23,44% (Dua Puluh Tiga Koma Empat Puluh Empat Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah berupa terlaksananya Jumlah Pembelian Dokumen Bermaterai 2 Jenis : 1). Materai 10.000 sebanyak 800 Lembar dengan capaian output keluaran sebesar 23,44% (Dua Puluh Tiga Koma Empat Puluh Empat Persen). (Karena adanya kesenjangan waktu dari bidang akuntansi, sehingga belum terlaksananya kegiatan cetak akhir tahun fotocopy, cetak buku, jilid cover).
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 169.393.020,00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 106.383.992,00 (Seratus Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau 62,80% (Enam Puluh Dua Koma Delapan Puluh Persen). Adapun output/keluaran dari Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersusunnya 4 Laporan belanja tagihan tlp, air, listrik, telepon dan internet selama 12 bulan. (at cost dibayarkan sesuai dengan pengeluaran dikantor).

**8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 4.607.775,00 (Empat Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau 25,60% (Dua Puluh Lima Koma Enam Puluh Persen). Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini 1 Unit Kendaraan Roda 4 berupa Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan. (Karena Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Lapangan hanya melakukan pemeliharaan servis ringan sehingga anggaran tidak seluruhnya terserap).

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 550.873.600,00 (Lima Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 422.213.132,00 (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah) atau 76.64% (Tujuh Puluh Enam Koma Enam Puluh Empat Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dan Jenis Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Disediakan sebanyak 36 Unit Kendaraan. (Karena pajak kendaraan operasional lapangan 5 Unit berplat B, hanya dibayarkan mutasi plat dan BPKB untuk Administrasi pembayaran pengurusan BPKB di kantor Satlantas belum teranggarkan. Untuk servis diambil sesuai dengan kebutuhan atau at cost).
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar, Rp. 55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) atau 100% (Seratus Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa pembuatan plang nama dan Logo kantor Besar serta Interior Ruang Tunggu.
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 53.596.000,00 (Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar, Rp.31.410.000,00 (Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau 58,61% (Lima Puluh Delapan Koma Enam Puluh Satu Persen). Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kerja yang dipelihara Secara Rutin/Berkala sebanyak 4 Unit Peralatan berupa (Pemeliharaan CCTV, Perbaikan Cainsaw, Servis Mesin Rumput, Pemeliharaan Intalasi Air, Servis Mesin Portable, Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA,Service dan pergantian Spearpart Computer, Pemeliharaan Printer. (Karena kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebagian masih dalam kondisi baik sehingga hanya sedikit memakai biaya pemeliharaan).

- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 21.682.024,00 (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi sebesar, Rp. 19.200.500,00 (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 88,55% (Delapan Puluh Delapan Koma Lima Puluh Lima Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kerja yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala sebanyak 3 Unit berupa (Isi Ulang Tabung Apar, Isi Ulang Tabung gas LPG 12 KG, Jasa Pasang Rambu-Rambu Bencana, Pemeliharaan AC Split, Jasa Bongkar Pasang AC, Jasa Service AC Standing).

## 2.) Program Penanggulangan Bencana.

Program ini dilaksanakan untuk;

- a) Memberikan informasi layanan rawan bencana yang keberhasilannya diukur melalui Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di 5 Sekolah Dasar Kecamatan Ujanmas agar warga negara dapat memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan target yang ditetapkan sebesar 100% dan capaian kinerja sebanyak 250 siswa Sekolah Dasar di SDN 11 Ujanmas, SDN 5 Ujanmas, SDN 6 Ujanmas, SDN 8 Ujanmas, dan SDN 3 Ujanmas dengan realisasi sebesar 61,41%.
- b) Memberikan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target yang ditetapkan sebanyak 101 orang dan capaian kinerja sebanyak 101 orang atau realisasi sebesar 79,88%.
- c) Memberikan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana yaitu respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota dengan target jumlah dokumen Surat Keputusan Penetapan Status Darurat Bencana sebanyak 2 Dokumen selama 1 Tahun berjalan, Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana Kabupaten/Kota sebanyak 50 Paket untuk warga yang terdampak bencana alam di Kabupaten Muara Enim. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah salah satu kegiatan penanganan bencana yang mana kegiatan ini melibatkan seluruh Instansi di Kabupaten Muara Enim dalam melakukan kegiatan penanggulangan/penanganan penanggulangan bencana secara terkoordinir dan terpadu dengan target pendirian Pos Komando sebanyak 5 Pos (Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan Gelumbang, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Tanjung Agung) dan Kantor Induk di Kantor BPBD Kabupaten Muara Enim realisasi sebesar 70,25%.
- d) Memberikan layanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana. Tersusunnya rancangan peraturan bupati tentang Kajian



Resiko Bencana (KRB) dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui kerjasama dengan tenaga Ahli Kanwil Kemenkum HAM Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 2 Peraturan Bupati, terbentuknya draf Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim dan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada 10 desa tangguh bencana di Kabupaten Muara Enim dan terlaksananya kegiatan *Forum Grup discussion* (FGD) dan perjanjian kerjasama (PKS) penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan, BPBD Kota Pagar Alam, Palang Merah Indonesia (PMI), Parmuka Kwartir Muara Enim, Orari, Senkom serta Terbinanya Tim Jitupasna Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaa pembuatan laporan Pasca Bencana serta terlaksananya monitoring Pasca Bencana di Kabupaten Muara Enim. realisasi sebesar 82,84%.

- e) Alokasi anggaran untuk program Penanggulangan Bencana sebesar **Rp. 3.147.472.900,00 (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.212.098.682,00 (Dua Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah)** atau **72,97% (Tujuh Puluh Dua Koma Sembilan Puluh Tujuh Persen)**. Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan sebagai berikut.

#### **1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.**

##### **Kegiatan ini dilaksanakan untuk:**

- a. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenia Bencana) dengan anggaran sebesar Rp. 157.416.795,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 96.674.200,00 (Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 61,41% (Enam Puluh Satu Koma Empat Puluh Satu Persen). Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa (250) Pelajar Sekolah Dasar atau Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggal sebanyak 250 Pelajar Sekolah Dasar. (Karena terdapat biaya perjalanan dinas yang tidak bisa direalisasikan di biaya tiket pesawat dan biaya penginapan untuk narasumber).

#### **2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.**

Memberikan informasi rawan bencana di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana yang keberhasilannya diukur



berdasarkan perbandingan penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi terhadap keseluruhan penduduk dengan target sebesar 100% dan capaian kinerja sebanyak 250 Pelajar SD Daerah Rawan Bencana atau realisasi sebesar 79,88

- a. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan anggaran sebesar Rp. 187.506.072,00 (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 162.981.800,00 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 86,92% (Delapan Puluh Enam Koma Sembilan Puluh Dua Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana sebanyak 35 Orang dengan output keluaran 86,92%
- b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.425.935.462,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.215.954.528,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau 85,27% (Delapan Puluh Lima Koma Dua Puluh Tujuh Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa terlatihnya sebanyak 55 Orang Tim Reaksi Cepat BPBD dengan output keluaran sebesar 85,27%.
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi dengan anggaran sebesar Rp. 223.666.400,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 146.488.700,00 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau 65,49% (Enam Puluh Lima Koma Empat Puluh Sembilan Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa (ATK, Bahan Cetak, Makan dan Minum Rapat, Honorarium : Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan, Jasa Tenaga Ahli, SPJ dengan output keluaran sebesar 65,49%. (Karena terdapat biaya Honorarium Tim Tenaga Ahli menyesuaikan dengan SK Bupati dan perjalanan dinas yang tidak bisa direalisasikan sesuai dengan ketentuan pada Perpres no. 33 Tahun 2020. Dan hasil koordinasi bagian Hukum Setda sehingga Anggaran untuk Honorarium tidak direalisasikan).
- d. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 408.007.675,00 (Empat Ratus Delapan Juta Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 267.998.488,00 (Dua



Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) atau 65,68% (Enam Puluh Lima Koma Enam Puluh Delapan Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana sebanyak 35 Orang dengan output keluaran 65,68%. (Karena biaya setor menyesuaikan dari pusklat BNPB dan perjalanan dinas pelatihan dianggarkan sebesar Rp. 8.500.000,00 per orang sebanyak 35 orang, terealisasi hanya Rp. 5.000.000,00 sesuai dengan ketentuan Pusklat dengan 50 jam pelajaran).

**3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.**

- a. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 87.652.900,00 (Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 82.758.872,00 (Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) atau 94,42% (Sembilan Puluh Empat Koma Empat Puluh Dua Persen).
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 84.889.899,00 (Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 73.213.080,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Delapan Puluh Rupiah) atau 86,24% (Delapan Puluh Enam Koma Dua Puluh Empat Persen).
- c. Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 533.116.885,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 339.761.419,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau 63,73% (Enam Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Persen). Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa Bahan Bakar dan Pelumas, ATK, bahan cetak, Natura dan Pakan Natura dan Pakan Lainnya, Penambah Daya Tahan Tubuh, Makan dan Minum Aktivasi Lapangan, Jasa Tenaga Penanganan Bencana, SPJ. (Karena honor petugas penanganan bencana dan makan minum petugas penanganan bencana karena sesuai dengan kebutuhan pada saat penanganan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan serta siaga Banjir Longsor).

#### 4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 123.546.433,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 95.824.864,00 (Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau 77,56% (Tujuh Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Enam Persen). Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya 2 Dokumen berupa Peraturan Bupati Kajian Resiko Bencana dan Peraturan Bupati Penanggulangan Bencana. (Karena dalam pembahasan Kegiatan Penyusunan Perbup KRB dan RPB banyak dilaksanakan dan di fasilitasi di Kanwil Kemenkum HAM Palembang sehingga anggaran makan minum tidak terealisasi, kegiatan dan koordinasi pembahasan Perbup KRB dan RPB adanya pembatasan waktu dari Kemenkum HAM sehingga anggaran perjalanan Dinas kurang terserap karena keterbatasan waktu dan tidak dilaksanakannya kegiatan harmonisasi).
- b. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 70.761.014,00 (Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Belas Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 52.762.223,00 (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau 74,56% (Tujuh Puluh Empat Koma Lima Puluh Enam Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersusunnya 1 Dokumen Tata Kelola kelembagaan Bencana Daerah melalui Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan di daerah/kawasan Rawan Bencana. (Karena pelaksanaan koordinasi ke dunia usaha tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan keterbatasan waktu dan Sumber Daya Manusia yang tersedia di BPBD sehingga beban biaya perjalanan dinas tidak terserap sepenuhnya).
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 26.145.392,00 (Dua Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 14.603.225,00 (Empat Belas Juta Enam Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau 55,85% (Lima Puluh Lima Koma Delapan Puluh Lima Persen). Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terselenggaranya pola pengumpulan data informasi di setiap wilayah/kawasan rawan bencana berupa 1 Dokumen. (Karena tidak ada kegiatan yang terkait Evaluasi atau revisi Raperda Penanggulangan Bencana ke Luar

Daerah sehingga anggaran Perjalanan Dinas ke Luar Daerah tidak terealisasi).

- d. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 197.472.614,00 (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 193.191.349,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau 97,83% (Sembilan Puluh Tujuh Koma Delapan Puluh Tiga Persen).
- e. Sub Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 94.079.882,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 67.744.296,00 (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau 72,01% (Tujuh Puluh Dua Koma Kosong Satu Persen). output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan berupa 1 Kegiatan. (tidak terserapnya perjalanan dinas pasca bencana dikarenakan kejadian bencana lebih sedikit dari perhitungan dan persiapan anggaran perjalanan dinas, dan masih adanya anggaran pembuatan sertifikat dalam kegiatan tersebut).

## 2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan target kinerja sasaran dalam Renstra, capaian indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim pada Tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.16 Matrik Capaian Indikator Kinerja  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim  
Tahun 2023**

Tujuan	Sasaran				Persen Capaian	
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi		
Meningkatnya mutu informasi tentang jenis dan resiko bencana kepada masyarakat	1	Meningkatkan Mutu Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	1.732 Orang	1.150 Orang	100%



Tujuan	Sasaran				Persen Capaian	
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi		
Meningkatkan kualitas pelayanan pencegahan kesiapsiagaan masyarakat dan pemangku jabatan dalam penanggulangan bencana, meningkatkan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terkoordinasi, terbentuknya kapasitas masyarakat dan relawan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	2	Meningkatkan Mutu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	55 Orang (Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	55 Orang (Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	100%
Meningkatkan pelayan respon cepat disetiap kejadian luar biasa dan darurat bencana	3	Meningkatkan Mutu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	55 Orang (Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	55 Orang (Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	100%
Meningkatkan mutu pelayanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	4	Tersedianya regulasi pendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan tersedianya data serta informasi kebencanaan	Jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dan jumlah data serta info kebencanaan yang tersedia	4 Rancangan Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Legalisasi KRB dan RPB	3 Regulasi	100%

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim. Tahun 2024



Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2023 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik, hal ini dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerjanya sesuai Renstra Perangkat Daerah. Namun masih ada 29 (Dua Puluh Sembilan) indikator yang capaian kinerjanya dibawah 85% yaitu :

- a.) Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi anggaran sebesar Rp. 4.055.350.484,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.421.776.574,00 atau 59,72%.
- b.) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 4.614.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.850.200,00 atau 40,10%.
- c.) Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang pada SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.099.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%
- d.) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 39.780.000,00 atau 53,04%
- e.) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 15.289.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.744.900,00 atau 57,20%
- f.) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp. 8.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.100.000,00 atau 23,44%
- g.) Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 169.393.020,00 dengan realisasi sebesar Rp. 106.383.992,00 atau 62,80%
- h.) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.607.775.00 atau 25,60%
- i.) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 550.873.600,00 dengan realisasi sebesar Rp.422.213.132,00 atau 76,64%.
- j.) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 53.596.000,00 dengan realisasi sebesar, Rp.31.410.000,00 atau 58,61%
- k.) Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan anggaran sebesar Rp. 157.416.795,00 dengan realisasi sebesar Rp. 96.674.200.00 atau 61.41%
- l.) Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi dengan anggaran sebesar Rp. 223.666.400,00 dengan realisasi sebesar, Rp. 146.488.700.00 atau 65.49%
- m.) Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 408.007.675,00 dengan realisasi sebesar, Rp. 267.998.488.00 atau 65.68%

- n.) Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, alokasi anggaran sebesar Rp.533.116.885,00 dengan realisasi sebesar Rp. 339.761.419,00 atau 63,73%
- o.) Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.123.546.433,00 dengan realisasi sebesar Rp. 95.824.864,00 atau 77,56%
- p.) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 70.761.014,00 dengan realisasi sebesar Rp. 52.762.223,00 atau 74,56%.
- q.) Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan, alokasi anggaran sebesar Rp. 26.145.392,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.603.225,00 atau 55,85%.
- r.) Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp. 94.079.882,00 dengan realisasi sebesar Rp. 67.744.296,00 atau 72,01%.

### 3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan	Solusi
<p>1. Indikator Kinerja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya Jumlah Dokumen Penyediaan Gaji dan Uang Makan sebanyak 14 Bulan dengan capaian output keluaran sebesar 59,72% (Lima Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Dua Persen). Sub Kegiatan ini untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN sebanyak 19 orang selama 12 (dua belas) bulan dan pembayaran gaji 13 dan 14 dengan capaian output/keluaran sebesar 59,72%. (Karena perkiraan pada Bulan Agustus 2024 OPD BPBD Kabupaten Muara Enim meningkat menjadi eselon II.b sehingga untuk anggaran gaji pegawai dianggarkan sesuai dengan kebutuhan peningkatan Esselon dari Esselon III.a menjadi Esselon II.b namun sampai Desember belum terealisasi).</p> <p>2. Indikator Kinerja Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersusunnya Jumlah Dokumen/Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir sebanyak 1 Laporan. (Karena adanya faktor kekeliruan dalam mengadministrasikan dalam pemberkasan).</p> <p>3. Indikator Kinerja Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang pada SKPD Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah berupa Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan</p>	<p>1. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN untuk Anggaran Gaji tetap dianggarkan dan akan disesuaikan kembali sesuai dengan peningkatan Esselon Kantor menjadi Esselon II dan juga menghitung anggaran gaji untuk penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, untuk kedepannya agar dilaksanakan dan segera ditindaklanjuti</p> <p>3. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi akan tetap dianggarkan guna meningkatkan profesionalisme serta kompetensi ASN untuk menunjang kinerja Pemerintahan sesuai dengan Informasi Bimtek yang legal dari Pemerintah.</p> <p>4. Kegiatan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor, sehubungan dengan peningkatan Esselon Kantor menjadi Esselon II sehingga kebutuhan penyediaan peralatan listrik banyak ruang yang memerlukan sumber daya dari alat pendukung listrik sehingga biaya alat listrik masih perlu dianggarkan dan bisa</p>



Permasalahan	Solusi
<p>Laporan Barang pada SKPD BPBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 sebanyak 1 Laporan dengan capaian output keluaran sebesar 0% (Nol Persen). (karena buffer stock ATK masih cukup dan tersedia sehingga belum direalisasikan atau at cost).</p> <p>4. Indikator Kinerja Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 39.780.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau 53,04% (Lima Puluh Tiga Koma Nol Empat Persen). Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Kursus Singkat atau Pelatihan dan Bimbingan Teknis 22 orang, Kursus Singkat atau Pelatihan 22 Orang</p> <p>5. Indikator Kinerja Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah tersusunnya Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan berupa (pembelian alat listrik sebanyak 1 Paket terdiri dari : 1). Baterai 2). Bola Lampu 3). Lampu Sorot LED 100 Watt 4). Fitting Lampu 5). Starter Listrik 6). Stekker Listrik 7). Stop Kontak Listrik 8). MCB 9). Roll Kabel NYM 2 x 2,5 MM 10). Kabel NYM 4 x 2,5 MM 11). Stik Lampu 12). Isolasi Kabel 13). Klem Kabel selama 12 bulan. dengan capaian output keluaran 57,20% (Lima Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Persen). (Karena persediaan peralatan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor masih tercukupi sehingga tidak terealisasikan).</p> <p>6. Indikator Kinerja jasa surat menyurat Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa terlaksananya Jumlah Pembelian Dokumen Bermaterai 2 Jenis : 1). Materai 10.000 sebanyak 800 Lembar dengan capaian output keluaran sebesar 23,44% (Dua Puluh Tiga Koma Empat Puluh Empat Persen). (Karena adanya kesenjangan waktu dari bidang akuntansi, sehingga belum terlaksananya kegiatan cetak akhir tahun (fotocopy, cetak buku, jilid cover).</p> <p>7. Indikator Kinerja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Adapun output/keluaran dari Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersusunnya 4 Laporan belanja tagihan tlp, air, listrik, telepon dan internet selama 12 bulan dengan capaian output sebesar 62,80% (Enam Puluh Dua Koma Delapan Puluh Persen).(at cost</p>	<p>memungkinkan akan bertambah sesuai dengan keperluan yang ada.</p> <p>5. Kegiatan Surat Menyurat untuk kedepannya agar diteliti dan cermat sesuai Administrasi</p> <p>6. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan tetap dianggarkan mengingat masa garansi gratis sudah habis dan ditahun berjalan pajak Kendaraan Dinas Jabatan harus dibayar.</p> <p>7. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tetap dianggarkan di tahun berjalan dan untuk anggaran servis dikarenakan BPBD masih memiliki Kendaraan roda 6 sebanyak 4 Unit.</p> <p>8. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya untuk lebih cermat dalam menghitung kebutuhan anggaran.</p> <p>9. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dilakukan pergeseran, pengurangan atau perubahan anggaran pada APBD Perubahan</p> <p>10. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi dilakukan pergeseran, pengurangan atau perubahan anggaran pada APBD Perubahan</p> <p>11. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota untuk pelatihan berikutnya tetap dianggarkan sebesar Rp. 8.500.00,000 dikarenakan biaya setor balik pelatihan bervariasi sesuai dengan ketentuan BNPB</p> <p>12. Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dilakukan pergeseran, pengurangan atau perubahan anggaran pada APBD Perubahan</p> <p>13. Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota agar dilaksanakan lebih terperinci dan cermat sesuai dengan kebutuhan</p>

Permasalahan	Solusi
<p>dibayarkan sesuai dengan pengeluaran dikantor).</p> <p>8. Indikator Kinerja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini 1 Unit Kendaraan Roda 4 berupa Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan dengan capaian output sebesar 25,60% (Dua Puluh Lima Koma Enam Puluh Persen). (Karena Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Lapangan hanya melakukan pemeliharaan servis ringan sehingga anggaran tidak seluruhnya terserap).</p> <p>9. Indikator Kinerja Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dan Jenis Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Disediakan sebanyak 36 Unit Kendaraan dengan capaian output sebesar 76.64% (Tujuh Puluh Enam Koma Enam Puluh Empat Persen). (Karena pajak kendaraan operasional lapangan 5 Unit berplat B, hanya dibayarkan mutasi plat dan BPKB untuk Administrasi pembayaran pengurusan BPKB di kantor Satlantas belum teranggarkan. Untuk servis diambil sesuai dengan kebutuhan atau at cost).</p> <p>10. Indikator Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kerja yang dipelihara Secara Rutin/Berkala sebanyak 4 Unit Peralatan berupa (Pemeliharaan CCTV, Perbaikan Cainsaw, Servis Mesin Rumput, Pemeliharaan Intalasi Air, Servis Mesin Portable, Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA,Service dan pergantian Spearpart Computer, Pemeliharaan Printer dengan capaian output sebesar 58,61% (Lima Puluh Delapan Koma Enam Puluh Satu Persen). (Karena kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebagian masih dalam kondisi baik sehingga hanya sedikit memakai biaya pemeliharaan).</p> <p>11. Indikator Kinerja Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa (250) Pelajar Sekolah Dasar atau Orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi</p>	<p>14. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota untuk lebih cermat dalam menghitung biaya Perjalanan Dinas</p> <p>15. Kegiatan Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota untuk lebih cermat dalam menghitung kebutuhan biaya Perjalanan Dinas dan tidak lagi menganggarkan biaya sertifikat kegiatan.</p>

Permasalahan	Solusi
<p>(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada di Kawasan Tempat Tinggal sebanyak 250 Pelajar Sekolah Dasar dengan capaian output sebesar 61,41% (Enam Puluh Satu Koma Empat Puluh Satu Persen). (Karena terdapat biaya perjalanan dinas yang tidak bisa direalisasikan di biaya tiket pesawat dan biaya penginapan untuk narasumber).</p> <p>12. Indikator Kinerja Penyusunan Rencana Kontijensi dengan Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa (ATK, Bahan Cetak, Makan dan Minum Rapat, Honorarium : Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan, Jasa Tenaga Ahli, SPJ dengan capaian output sebesar 65,49% (Enam Puluh Lima Koma Empat Puluh Sembilan Persen). (Karena terdapat biaya Honorarium Tim Tenaga Ahli menyesuaikan dengan SK Bupati dan perjalanan dinas yang tidak bisa direalisasikan sesuai dengan ketentuan pada Perpres no. 33 Tahun 2020. Dan hasil koordinasi kebagian Hukum Setda sehingga Anggaran untuk Honorarium tidak direalisasikan).</p> <p>13. Indikator Kinerja Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana sebanyak 35 Orang dengan capaian output sebesar 65,68% (Enam Puluh Lima Koma Enam Puluh Delapan Persen). (Karena biaya setor menyesuaikan dari pusdiklat BNPB dan perjalanan dinas pelatihan dianggarkan sebesar Rp. 8.500.000,00 per orang sebanyak 35 orang, terealisasi hanya Rp. 5.000.000,00 sesuai dengan ketentuan Pusdiklat dengan 50 jam pelajaran).</p> <p>14. Indikator Kinerja Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini berupa Bahan Bakar dan Pelumas, ATK, bahan cetak, Natura dan Pakan Natura dan Pakan Lainnya, Penambah Daya Tahan Tubuh, Makan dan Minum Aktivasi Lapangan, Jasa Tenaga Penanganan Bencana, SPJ dengan capaian output sebesar 63,73% (Enam Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Tiga Persen). (Karena untuk honor dan makan minum kegiatan banjir longsor tidak begitu masiv dan di ABT ditambahkan kegiatan Pam Prapemilukada DPR dan DPRD untukantisipasi terjadinya bencana sosial pada saat</p>	

Permasalahan	Solusi
<p>Prapemilukada yang terdiri dari beberapa OPD terkait).</p> <p>15. Indikator Kinerja Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya 2 Dokumen berupa Peraturan Bupati Kajian Resiko Bencana dan Peraturan Bupati Penanggulangan Bencana dengan capaian output sebesar 77,56% (Tujuh Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Enam Persen). (Karena dalam pembahasan Kegiatan Penyusunan Perbup KRB dan RPB banyak dilaksanakan dan di fasilitasi di Kanwil Kemenkum HAM Palembang sehingga anggaran makan minum tidak terealisasi, kegiatan dan koordinasi pembahasan perbup KRB dan RPB adanya pembatasan waktu dari Kemenkum HAM sehingga anggaran perjalanan Dinas kurang terserap karena keterbatasan waktu dan tidak di laksanakan kegiatan harmonisasi).</p> <p>16. Indikator Kinerja Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Tersusunnya 1 Dokumen Tata Kelola kelembagaan Bencana Daerah melalui Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Penguatan Kelembagaan di daerah/kawasan Rawan Bencana dengan capaian output sebesar 74,56% (Tujuh Puluh Empat Koma Lima Puluh Enam Persen). (Karena pelaksanaan koordinasi ke dunia usaha tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakan keterbatasan waktu dan Sumber Daya Manusia yang tersedia di BPBD sehingga beban biaya perjalanan dinas tidak terserap sepenuhnya).</p> <p>17. Indikator Kinerja Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terselenggaranya pola pengumpulan data informasi disetiap wilayah/kawasan rawan bencana berupa 1 Dokumen dengan capaian output sebesar 55,85% (Lima Puluh Lima Koma Delapan Puluh Lima Persen). (Karena tidak ada kegiatan yang terkait Evaluasi atau revisi Raperda Penanggulangan Bencana ke Luar Daerah sehingga anggaran Perjalanan Dinas ke Luar Daerah tidak terealisasi).</p> <p>18. Indikator Kinerja Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah terselenggaranya pola pengumpulan data informasi disetiap wilayah/kawasan rawan bencana berupa 1 Kegiatan dengan capaian output sebesar 59,32%</p>	

Permasalahan	Solusi
<p>(Lima Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Dua Persen). (Karena Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna), rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dilaksanakan sepenuhnya, namun ada beberapa Anggaran yang tidak terserap dikarenakan pembuatan sertifikat (pembuatan sertifikat dibuat secara elektronik oleh Pusdiklat BNPB sendiri), tidak terserapnya Anggaran Koordinasi (Perjalanan Dinas) ke Pusdiklat BNPB dan BNPB Pusat.</p>	

#### 4. Penghargaan dan Prestasi

-

## 6. URUSAN SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL

### 1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Wajib Sosial diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun Anggaran 2024, alokasi belanja Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. **31.197.225.329,-** dan Terealisasi sebesar **-Rp.22.109.810.047,-** atau sebesar **(70.87)%**

#### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. **21.182.461.611,-** terealisasi sebesar Rp. **14.797.587.123,-** atau **(69,86)%** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

#### b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. **10.014.763.718,-** terealisasi sebesar Rp. **7.303.815.000,-** atau **(72,93)%** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Capaian Program Indikator sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Terdiri dari 6 Program, 15 Kegiatan, dan 47 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

##### 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. **164.392.440** dengan realisasi sebesar Rp. **125.625.400** atau sebesar **(76.42)%**

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 34.994.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.943.200,- atau sebesar (85.56)%
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 6.885.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.111.200,- atau sebesar (16.14)%
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 21.229.740,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.214.000,- atau sebesar (81.08)%
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 25.257.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.509.500,- atau sebesar (21.81)%

- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ihktisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 52.875.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 51.358.500,- atau sebesar (97.13)%
  - f. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 23.149.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.489.000,- atau sebesar (88.51)%
- 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.411.300.316 dengan realisasi sebesar Rp. 2.968.657.762 atau sebesar (67.30)%**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 4.332.124.616,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.900.151.762,- atau sebesar (66.95)%
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 34.570.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.168.000,- atau sebesar (72.80)%
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 44.605.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.338.000,- atau sebesar (97.15)%
- 3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 54.273.000 dengan realisasi sebesar Rp. 46.922.287 atau sebesar (86.46)%**
- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 54.273.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.46.922.287,- atau sebesar (86.46)%
- 4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 692.831.750 dengan realisasi sebesar Rp. 537.540.475 atau sebesar (77.59)%**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 12.091.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.645.000,- atau sebesar (79.77)%
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 19.718.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.14.044.500,- atau sebesar (71.22)%
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor anggaran sebesar Rp. 107.420.250,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 86.361.300,- atau sebesar (80.40)%
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan anggaran sebesar Rp.2.144.800,- dan realisasi keuangan sebesar

- Rp. 1.608.000,- atau sebesar (74.97)%
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan anggaran sebesar Rp. 96.262.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 79.522.000,- atau sebesar (82.61)%
  - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran sebesar Rp.455.194.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 455.194.000,- atau sebesar (76.09)%
- 5 Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Alokasi anggaran sebesar Rp. 9.663.211.718 dengan realisasi sebesar Rp. 6.958.965.000 atau sebesar (72.02)%**
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan anggaran sebesar Rp.1.378.947.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.800.240.000,- atau sebesar (58.03)%
  - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel anggaran sebesar Rp.71.264.218,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.61.275.000,- atau sebesar (85.98)%
  - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin anggaran sebesar Rp.60.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.59.950.000,- atau sebesar (99.92)%
  - d. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan anggaran sebesar Rp.8.153.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.037.500.000,- atau sebesar (74.05)%
- 6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 241.911.520 dengan realisasi sebesar Rp. 222.783.529 atau sebesar (92.09)%**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran sebesar Rp.3.595.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.210.000,- atau sebesar (89.29)%
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik anggaran sebesar Rp.121.666.320,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 112.183.529,- atau sebesar (92.21)%
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran sebesar Rp. 24.370.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.180.000,- atau sebesar (66.39)%
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran sebesar Rp.92.280.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.210.000,- atau sebesar (98.84)%
- 7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 350.911.775 dengan realisasi sebesar Rp. 343.281.475 atau sebesar (97.83)%**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran sebesar Rp.254.359.775,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 247.481.475,- atau sebesar (97.29)%

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Anggaran sebesar Rp.96.552.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.95.800.000,- atau sebesar (99.22)%

## **2 Program Pemberdayaan Sosial**

### **1 Kegiatan tersebut adalah Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Alokasi anggaran sebesar Rp. 113.655.045 dengan realisasi semester 2 sebesar Rp. 97.356.800 atau sebesar (85.66)%**

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT Anggaran sebesar Rp.113.655.045,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 97.356.800,- atau sebesar (85.66)%

### **2 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 11.980.029.589 dengan realisasi sebesar Rp. 7.803.569.903 atau sebesar (65.14)%**

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran sebesar Rp.10.632.658.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.6.533.571.674,- Atau sebesar (63.30)%
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran Sebesar Rp.762.160.542,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 592.196.399,- Atau sebesar (77.69)%
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Anggaran Sebesar Rp.80.186.405,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.092.574,- Atau sebesar (73.69)%

## **3 Program Rehabilitasi Sosial**

### **1 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial Alokasi anggaran sebesar Rp. 480.025.200 dengan realisasi sebesar Rp. 319.799.450 atau sebesar (66.62)%**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Anggaran Sebesar Rp. 35.799.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.734.200,- Atau sebesar (63.50)%
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Alat bantu Anggaran Sebesar Rp.118.644.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.934.900,- atau sebesar (77.49)%



- c. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Anggaran Sebesar Rp.196.959.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.165.445.700,- Atau sebesar (84.00)%
- d. Sub Kegiatan pemberian layanan penelusuran keluarga Anggaran Sebesar Rp.24.242.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.480.900,- Atau sebesar (18.48)%
- e. Sub Kegiatan pemberian layanan rujukan/disabilitas terlantar Anggaran Sebesar Rp.104.379.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.203.750,- Atau sebesar (33.73)%

**2 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Panti Sosial Alokasi anggaran sebesar Rp. 762.650.500 dengan realisasi sebesar Rp. 612.907.913 atau sebesar (80.37)%**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu Anggaran Sebesar Rp.479.715.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 389.216.850,- atau sebesar (81.13)%
- b. Sub Kegiatan Pemberian layanan rujukan Anggaran Sebesar Rp.282.935.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 223.691.063,- atau sebesar (79.06)%

**4 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

**1 Kegiatan Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar Alokasi anggaran sebesar Rp. 74.142.700 dengan realisasi sebesar Rp. 19.602.600 atau sebesar (26.44)%**

- a. Sub Kegiatan Rujukan Anak Terlantar Anggaran Sebesar Rp.74.142.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.602.600,- atau sebesar (26.44)%

**2 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Pendataan Fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 291.727.832,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 278.608.400,- atau sebesar (95,50)%, Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang Tersedia dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 209.421.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 186.850.450,-



atau sebesar (89,22)%, Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Verifikasi dan Validasi Data dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 285.986.816,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 276.557.200,- atau sebesar (96,70)%, Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Jumlah KPM Penerima BPNT dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 72.605.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 71.582.350,- atau sebesar (98,59)%, Adapun output/keluaran dari Sub Kegiatan ini adalah Tersedianya Laporan Monev Bantuan KUBE dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

## **5 Program Penanganan Bencana**

### **1 Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.038.855.950 dengan realisasi semester 2 sebesar Rp. 1.010.163.216 atau sebesar (97.24)%**

- a Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Anggaran Sebesar Rp.1.038.855.950,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.010.163.216,- Atau sebesar (97.24)%

## **6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

### **1 Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 443.902.126 dengan realisasi sebesar Rp. 428.432.431 atau sebesar (96.52)%**

- a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Kabupaten/Kota Anggaran Sebesar Rp.251.921.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.250.971.700,- Atau sebesar (99.62)%
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Anggaran Sebesar Rp.191.980.426,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 177.460.731,- Atau sebesar (92.44)%

## **3. Capaian Indikator Kinerja**



Sesuai dengan target kinerja sasaran dalam Renstra, Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.17 Matrik Capaian Indikator Kinerja  
Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kesejahteraan PMKS	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase jumlah PMKS yang menerima layanan dan jaminan sosial	85 %	78.83 %	92.75 %

#### 4. Permasalahan dan Solusi

NO	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	2	3
1	Keterlambatan pengesahan APBD menyebabkan dokumen RKA tidak dicetak (langsung cetak DPA), sehingga berimplikasi pada kurang maksimalnya penyerapan anggaran.	Mengevaluasi kembali target anggaran untuk sub kegiatan yang terkait.
3	Banyaknya jabatan yang belum terisi yang dibutuhkan mengakibatkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Muara Enim	Mengevaluasi, mengkaji dan mengusulkan penambahan pegawai terkait jabatan yang belum terisi
4	Beberapa penyediaan operasional kantor memiliki Standar Harga di SSH SIPD lebih besar daripada harga toko	Mengevaluasi standar harga yang ada di SIPD dan disesuaikan dengan harga yang ada di pasaran
7	Tidak terlaksananya pengadaan kendaraan operasional roda empat (hiace) satu unit dikarenakan tidak tersedianya stok roda empat yang dibutuhkan	Melakukan pengkajian ulang dan mengecek ketersediaan stok kendaraan roda empat yang dimaksud (hiace)
8	Waktu yang dibutuhkan untuk proses pembangunan gedung kantor 100% tidak cukup sehingga pembangunan gedung secara fisik mencapai 95%	Melakukan penyelesaian pembangunan gedung kantor di tahun anggaran selanjutnya
10	Tidak terlaksananya kegiatan pemberian	Mengevaluasi dan mengkaji ulang

	Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat.	kegiatan BLT dengan aturan yang berlaku dan program prioritas bupati periode 2025-2029
11	Minimnya masyarakat yang melakukan konsultasi ke LK3 sehingga kegiatan tidak dapat dilakukan dengan maksimal	Mengevaluasi kembali target kinerja dan anggaran untuk kegiatan LK3

## 5. Penghargaan dan Prestasi

1. Piagam Penghargaan Komitmen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2024
2. Piagam Penghargaan Dalam Rangka Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023
3. Piagam penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" tahun 2023

### 3.3. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

#### 1. URUSAN TENAGA KERJA OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

##### 1) Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Urusan Wajib Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024, alokasi belanja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 13.214.219.778,00 (*Tiga Belas Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp **12.319.934.568,00** (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) atau 93,23 Persen dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100 Persen dengan rincian sebagai berikut:

##### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp **12.475.401.930,00** (*Dua Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*) terealisasi sebesar Rp **11.585.777.586,00** (*Sebelas Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) atau **92,87** Persen yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

##### b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp **738.817.848,00** (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) terealisasi sebesar Rp **734.157.000,00** (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) atau **99,37** Persen yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

#### 2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun program dan kegiatan, capaian program indikator sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim melaksanakan 5 program dan 17 kegiatan, dan 44 sub kegiatan yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Program Alokasi Anggaran Rp 9.115.771.719,00 Dengan Realisasi Sebesar Rp 8.311.774.818,00.

- 1) Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 100.475.200 Dengan Realisasi sebesar Rp 94.898.200



- a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 13.314.000 dengan realisasi sebesar Rp 12.477.200
  - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 13.580.000 dengan realisasi sebesar Rp 12.716.800
  - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD alokasi anggaran sebesar Rp 13.581.200 dengan realisasi sebesar Rp 12.718.000
  - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 15.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 14.468.600
  - e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 15.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 14.458.600
  - f) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 15.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 14.051.600
  - g) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 15.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 13.997.400
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 5.791.274.625 dengan realisasi sebesar Rp 5.333.438.840
    - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi anggaran sebesar Rp 5.727.968.965 dengan realisasi sebesar Rp 5.272.331.040
    - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 20.288,660,00 dengan realisasi sebesar Rp 19.354.600,00
    - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 43.017,000,00 dengan realisasi sebesar Rp 41.753.200,00
  - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 32.102.400 dengan realisasi sebesar Rp 30.657.060. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 38,522,880,00 dengan realisasi sebesar Rp 37.659.650,00
  - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 118.031.200,00 Dengan Realisasi Sebesar Rp 112.954.000,00
    - a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya alokasi anggaran sebesar Rp 23.320.000 dengan realisasi sebesar Rp 22.790.000



- b) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi alokasi anggaran sebesar Rp 82.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 78.950.000,00
  - c) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan alokasi anggaran sebesar Rp 12.211.200,00 dengan realisasi sebesar Rp11.214.000,00
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 1.571.033.786,00 Dengan Realisasi Sebesar Rp 1.542.588.067,00
- a) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 48.550.800 dengan realisasi sebesar Rp 36.129.000
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 604.475.466 dengan realisasi sebesar Rp 599.644.000
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 173.962.220,00 dengan realisasi sebesar Rp 172.399.000,00
  - d) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi anggaran sebesar Rp 39.431.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 35.980.000,00
  - e) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan alokasi anggaran sebesar Rp 7.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.200.000,00
  - f) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu alokasi anggaran sebesar Rp 6.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.160.000,00
  - g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 691.094.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 688.076.067,00
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 137.595.348,00 dengan realisasi sebesar Rp 136.050.000,00. Sub Kegiatan Pengadaan Meubel alokasi anggaran sebesar Rp 137.595.348,00 dengan realisasi sebesar Rp. 41.580.000,00 dan Rp. 94.470.000
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 622.275.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 406.307.620,00
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat alokasi anggaran sebesar Rp 7.735.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.000.000,00
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi anggaran sebesar Rp 356.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 185.037.620,00

- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 41.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp41.150.000,00
  - d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 156.960.000,00 dengan realisasi sebesar Rp174.120.000,00
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 736.562.880 dengan realisasi sebesar Rp 647.898.441
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan alokasi anggaran sebesar Rp 280.080.000 dengan realisasi sebesar Rp 191.878.441
  - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp 440.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 440.000.000
  - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp 16.532.880 dengan realisasi sebesar Rp 16.520.000
- B. Program Perencanaan Tenaga Kerja Alokasi Anggaran Rp 96.090.800 Dengan Realisasi Sebesar Rp 92.041.406. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Alokasi Anggaran sebesar Rp 139.357.450 Dengan Realisasi sebesar Rp 137.735.146. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro alokasi anggaran sebesar Rp 139.357.450 dengan realisasi sebesar Rp137.735.146.
- C. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Alokasi Anggaran Rp 2.669.283.550,00 Dengan Realisasi Sebesar Rp 2.607.174.041,00
1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Alokasi Anggaran sebesar 2.560.948.150.00 Dengan Realisasi sebesar Rp 2.504.807.501,00. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi alokasi anggaran sebesar 2.560.948.150,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.504.507.501,00
  2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Alokasi Anggaran sebesar 48.257.300,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 45.305.715,00. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta alokasi anggaran sebesar Rp 40.287.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 45.305.715,00
  3. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil alokasi anggaran sebesar Rp 60.078.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 57.060.825,00. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 60.078.100,00 dengan realisasi Rp

- 57.060.825,00
- D. Program Penempatan Tenaga Kerja Alokasi Anggaran Rp 567.607,459,00  
Dengan Realisasi Sebesar Rp 545.968.515,00
- 1) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp 352.418.330,00 dengan realisasi sebesar Rp335.138.466,00
    - a) Sub Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar 201.381.000,00 dengan realisasi sebesar 197.750.292,00
    - b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan alokasi anggaran sebesar 134.570.050,00 dengan realisasi sebesar 121.586.074,00
    - c) Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja alokasi anggaran Rp 16.467.200,00 dengan realisasi sebesar 15.802.100,00
  - 2) Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja alokasi anggaran Rp 108.763.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 104.513.728,00. Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja alokasi anggaran Rp 108.763.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 104.313.728,00
  - 3) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran Rp 106.425.829,00 dengan realisasi sebesar Rp 106.316.321,00. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran alokasi anggaran Rp. 106.425.829,00 dengan realisasi sebesar Rp 106.316.321,00
- E. Program Hubungan Industrial Alokasi Anggaran Rp 722.199.600,00  
Dengan Realisasi Sebesar Rp 717.282.066
- 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp 476.619.500 dengan realisasi sebesar Rp472.812.266
    - a) Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan bagi Perusahaan dengan alokasi anggaran sebesar 109.709.100 dengan realisasi sebesar 107.739.575
    - b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan alokasi anggaran sebesar Rp 366.910.400 dengan realisasi sebesar Rp 365.072.691
  - 2) Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Rp 245.580.100 dengan realisasi sebesar Rp244.469.800
    - a) Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang



Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp 180.817.300 dengan realisasi sebesar Rp179.909.840

- b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja//Serikat Buruh serta Non Afiliasi alokasi anggaran sebesar Rp 64.762.800 dengan realisasi sebesar Rp 64.559.960

Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengelola Pendapatan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA). *Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing*, maka Realisasi Pendapatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim untuk Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perpanjangan Ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)/ RPTKA Tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.198.793.000 (Dua Miliar Seraetus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau 109.39 % dari target Rp 2.010.000.000 (Dua Miliar Sepuluh Juta Rupiah).

### 3. Capaian Indikator Kinerja

**Tabel 3.17 Matrik Capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Menurunkan Pengangguran Terbuka	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing	Pesentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang tersertifikasi kompetensi	74,5%	97.67%	131.10%
	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	Tingkat kesempatan kerja	65%	95.96%	147.63%
	Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis	Persentase perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	90%	91.1%	101.22%

#### 4. Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1	<b>Bidang Hubungan Industrial</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan di wilayah ataupun dalam suatu perusahaan</li><li>b. Menerapkan strategi yang sesuai dalam melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial</li><li>c. Terus melakukan evaluasi dan penyesuaian dalam melakukan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial</li><li>d. Mengadopsi pendekatan komunikasi yang efektif dan persuasive dalam menangani kasus perselisihan hubungan industrial baik perselisihan hak, perselisihan pemutusan hubungan kerj, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.</li></ol>

#### 5. Penghargaan Dan Prestasi

- a) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerima penghargaan sebagai 'PEMBINA PRODUKTIVITAS TERBAIK'
- b) Menerima penghargaan sebagai Narasumber pada Sosialisasi Monitoring Pembinaan Ahli dari SBS Mining Solution.
- c) Juara Harapan III Audit Kearsipan Internal Tingkat Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024



## 2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

### 1. URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 13.778.025.422,00** dan terealisasi tahun 2024 sebesar **Rp.12.302.023.215,00** dengan persentase **89,29%**

Terdiri dari **7 (Tujuh)** program dan **20 (dua puluh)** kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### 2. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 106.476.246,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 102.979.950,00
  - a. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp.47.414.100,00 dengan Realisasi sebesar Rp.46.898.750,00 dengan persentase 98,91%
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp.15.438.600,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 14.956.200,00 dengan persentase 96,88%
  - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp.13.399.600,00 dengan Realisasi sebesar Rp.13.236.100,00. dengan persentase 98,78%
  - d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 12.907.546,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 11.276.700,00. dengan persentase 87,37%
  - e. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi anggaran sebesar Rp.17.316.400,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 16.612.200,00 dengan persentase 95,93%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp.4.627.667.930,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.197.056.911,00
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi anggaran sebesar Rp.4.567.125.830,00 dengan Realisasi sebesar Rp.4.197.761.911,00 dengan persentase 90,86%
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN alokasi anggaran sebesar Rp. 10.350.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- dengan persentase 0%. Hal ini dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi



- c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi anggaran sebesar Rp. 10.353.300,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 10.000.600,00. dengan persentase 96,59%
  - d. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD alokasi anggaran sebesar Rp.39.838.800,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 37.294.400,00. dengan persentase 93,61%
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 76.119.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 75.096.000,00
  - a. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp.76.119.250,00 dengan realisasi sebesar Rp.75.096.000,00. dengan persentase 98,66%
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 79.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.70.550.010,00
  - a. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Alokasi anggaran sebesar Rp. 79.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.70.550.010,00. dengan persentase 88,74%
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp.2.535.202.208,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.420.016.214,00
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Alokasi anggaran sebesar Rp. 9.321.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.522.000,00. dengan persentase 91,42%
  - b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alokasi anggaran sebesar Rp.181.143.708,00 dengan realisasi sebesar Rp.162.569.500,00. dengan persentase 89,75%
  - c. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Alokasi anggaran sebesar Rp.1.283.759.200,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.265.161.500,00. dengan persentase 98,55%
  - d. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Alokasi anggaran sebesar Rp.248.898.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.245.043.500,00. dengan persentase 98,45%
  - e. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Alokasi anggaran sebesar Rp.16.981.600,00 dengan realisasi sebesar Rp.14.896.800,00. dengan persentase 87,72%
  - f. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.640.000,00. dengan persentase 94%
  - g. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Alokasi anggaran sebesar Rp.789.097.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 718.182.914,00. dengan persentase 91,01%

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.252.810.371,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.190.457.131,00
  - a. Sub kegiatan Pengadaan Mebel alokasi anggaran sebesar Rp.481.865.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 432.440.000,00. dengan persentase 89,74%
  - b. Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp. 95.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 94.860.600,00. dengan persentase 99,85%
  - c. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp.675.945.371,00 dengan realisasi sebesar Rp. 663.156.531,00. dengan persentase 98,11%
  
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 707.016.236,00 dengan realisasi sebesar Rp. 590.221.789,00
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.560.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.800.000,00. dengan persentase 86,32%
  - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi anggaran sebesar Rp.621.205.336,00 dengan realisasi sebesar Rp. 508.381.789,00. dengan persentase 81,84%.
  - c. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi anggaran sebesar Rp.80.250.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 77.040.000,00. dengan persentase 96%
  
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 120.210.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 102.666.675,00
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.910.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 81.616.675,00. dengan persentase 82,52%
  - b. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp. 21.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.050.000,00. dengan persentase 98,83%

### **3. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 144.438.650,00 dengan realisasi sebesar Rp. 136.834.770,00
  - a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp. 65.278.875,00 dengan realisasi sebesar Rp. 63.203.030,00. dengan persentase 96,82%



- b. Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG alokasi anggaran sebesar Rp. 79.159.775,00 dengan realisasi sebesar Rp. 73.631.740,00. dengan persentase 93,02%
2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 118.618.950,00 dengan realisasi sebesar Rp.111.740.601,00 :
    - a. Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Alokasi anggaran sebesar Rp. 48.784.985,00 dengan realisasi sebesar Rp.47.272.351,00. dengan persentase 96,90%
    - b. Sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi alokasi anggaran sebesar Rp 69.833.965,00 dengan realisasi sebesar Rp. 64.468.250,00. dengan persentase 92,32%
  3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.178.009.665,00 dengan realisasi sebesar Rp. 164.110.585,00. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Alokasi anggaran sebesar Rp.178.009.665,00 dengan realisasi sebesar Rp. 164.110.585,00. dengan persentase 92,19%

#### **4. Program Perlindungan Perempuan**

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 656.970.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 572.981.541,00
  - a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.50.698.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 50.676.000,00 dengan persentase 99,96%
  - b. Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.606.272.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.522.305.541,00dengan persentase 86,15%
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 127.508.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.982.000,00
  - a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.127.508.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.982.000,00dengan



persentase 7,04% dikarenakan sesuai dengan jumlah korban yang dilayani di Unit Pelayanan Dinas Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak berupa Pelayanan Visum dan Pendampingan Korban Perempuan.

#### **5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga**

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 391.328.713,00 dengan realisasi sebesar Rp. 356.285.777,00
  - a. Sub kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 75.556.555,00 dengan realisasi sebesar Rp. 69.057.360,00 dengan persentase 91,40%
  - b. Sub kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 315.772.158,00 dengan realisasi sebesar Rp.287.228.417,00 dengan persentase 90,96%

#### **6. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 591.198.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 514.977.297,00
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 235.249.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 173.257.242,00 dengan persentase 73,65%
  - b. Sub kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.355.948.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.341.720.055,00 dengan persentase 96,00%

#### **7. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 360.908.145,00 dengan realisasi sebesar Rp. 314.172.291,00
  - a. Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 202.672.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 169.966.432,00 dengan persentase 83,86%
  - b. Sub kegiatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 158.236.145,00 dengan realisasi sebesar Rp. 144.205.859,00 dengan persentase 91,13%



2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 884.730.258,00 dengan realisasi sebesar Rp. 841.721.023,00
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.135.007.490,00 dengan realisasi sebesar Rp. 127.012.334,00 dengan persentase 94,08%
  - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 234.350.918,00 dengan realisasi sebesar Rp. 218.512.757,00 dengan persentase 93,24%
  - c. Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 337.507.960,00 dengan realisasi sebesar Rp.322.229.065,00 dengan persentase 95,47%
  - d. Sub kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 177.863.890,00 dengan realisasi sebesar Rp. 173.966.867,00 dengan persentase 97,81%

## **8. Program Khusus Anak**

1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 272.121.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 203.408.894,00
  - a. Sub kegiatan Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.50.802.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 50.802.000,00. dengan persentase 100%
  - b. Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Alokasi anggaran sebesar Rp.221.319.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 152.606.894,00. dengan persentase 68,95% dikarenakan efisiensi perjalanan dinas.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 478.171.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 272.181.756,00
  - a. Subkegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 370.199.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 257.851.689,00. dengan persentase 69,65% dikarenakan efisiensi perjalanan dinas.
  - b. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Alokasi anggaran sebesar Rp. 107.972.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.14.330.067,00



dengan persentase 13,27% dikarenakan sesuai dengan jumlah korban yang dilayani di Unit Pelayanan Dinas Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak berupa Pelayanan Visum dan Pendampingan Korban Perempuan.

3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.69.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 55.582.000,00
  - a. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 69.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 55.582.000,00. dengan persentase 80,53% dikarenakan efisiensi perjalanan dinas.

### 3. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.18 Capaian Realisasi Anggaran Dinas PPA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.1		Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Resposif Gender (ARG)	9%	11,21%	124,55%
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,55%	89,82% (data 2023)	100,38%
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,90%	69,66% (data 2023)	110,75%
1.2		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan	100%	100%	100%
			Penanganan Kekerasan Terhadap Anak	100%	100%	100%
1.3		Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	701 (nindya)	966,22 (Penilaian Mandiri)	

#### 4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

##### Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kabupaten Muara Enim adalah:

- a. Belum Optimalnya Kualitas Informasi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Masih tingginya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan.
- c. Masih tingginya Kasus Kekerasan terhadap Anak.
- d. Belum Optimalnya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus.
- e. Petugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) belum optimal.
- f. Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten.
- g. Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, yang terstandarisasi masih belum maksimal.
- h. Masih Kurangnya Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor.
- i. Belum Semua Perangkat Daerah Melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- j. Rendahnya Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga.
- k. Belum Optimalnya Pemberdayaan Pada Distabilitas dan Lansia Perempuan.
- l. Belum Optimalnya Perempuan sebagai Tenaga Profesional.
- m. Masih Kurangnya Partisipasi Perempuan Sebagai Tenaga Profesional dan Lembaga Legislatif.

##### Solusi

Adapun solusi yang telah dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) Kabupaten Muara Enim dalam menanggulangi permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan anggaran tahun berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Muara Enim.
- c. Bekerjasama dengan lembaga yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- d. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak - hak anak.
- e. Dukungan dari organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha dalam mengoptimalkan peran Relawan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- f. Meningkatkan dukungan OPD terkait dalam peningkatan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



- g. Tersedianya lembaga layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.
- h. Meningkatkan peran Forum Anak Kabupaten, Forum Anak Kecamatan dan Forum anak Desa/Kelurahan sebagai Pelopor dan Pelapor.
- i. Peningkatan koordinasi Gugus Tugas KLA melalui rakor KLA.
- j. Mempromosikan Kabupaten Layak Anak melalui media luar ruang/ spanduk/banner di tempat umum.
- k. Penguatan Standarisasi Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak.
- l. Meningkatkan Sarana Pemenuhan Hak Anak di berbagai sektor misalnya Ruang Bermain Ramah Anak yang Terstandarisasi, akses informasi berbasis anak gratis, Menyediakan taman bermain anak, menyediakan ruang laktasi di kantor-kantor pemerintahan dan tempat pelayanan publik, menyediakan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).

**a. Kegiatan dan Inovasi Dinas PPPA**

- i. SAPA FANSS di MOL (Sarana Aspirasi Dan Partisipasi Forum Anak Serasan Sekundang Di Media Online)
- ii. Relawan Peduli Perempuan dan Anak (RPPA)
- iii. Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)
- iv. SETIA (Sekolah Pengantin Anyar)
- v. Pengembangan Desa Ramah Anak Peduli Anak melalui SIGERMAS (Sinergi Gerakan Membangun Aliansi Strategis)

**5. Penghargaan dan Prestasi Dinas PPPA**

- a. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Predikat Nindya yang diberikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2022.
- b. Penghargaan Tingkat Nasional Sebagai salah satu pemerintah kabupaten terbaik di Indonesia yang dinilai berkomitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP) yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tanggal 21 Juli 2022.
- c. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Predikat Nindya yang kedua kalinya diberikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2023.
- d. Penghargaan Tingkat Nasional Peringkat ke 2 (dua) sebagai salah satu pemerintah Kabupaten terbaik di Indonesia yang dinilai berkomitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP) yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tanggal 22 Juli 2023.
- e. Penghargaan Tingkat Nasional Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Predikat Pratama yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2023.



### 3. URUSAN PANGAN OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN

#### 1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan wajib bidang Ketahanan Pangan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024, alokasi belanja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 12.009.256.381,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.395.104.158,- atau 86,56% dan kinerja keluaran sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

##### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 11.699.114.201,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.091.675.158,- atau 86,26% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk komponen belanja operasi.

##### b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 310.142.180,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 303.429.000,- atau 97,84% yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Adapun Program, Kegiatan dan Subkegiatan, capaian program, indikator sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 2. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Pada Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim melaksanakan 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Subkegiatan, yaitu:

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 5.842.035.981,- dengan Realisasi sebesar Rp. 5.043.283.122,- atau 86,33%. Program ini terdiri 7 (tujuh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 96.624.700,- dengan Realisasi sebesar Rp. 80.452.100,- atau 83,26% terdiri dari :
  - a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 23.610.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 22.186.400,- atau 93,97%. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 12.280.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.970.000,- atau 64,90%, Kegiatan ini sudah terealisasi sisanya dikarenakan selisih harga dengan anggaran yang ada. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA



- Perubahan SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 11.810.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.808.200,- atau 66,11%, Kegiatan ini sudah terealisasi sisanya dikarenakan selisih harga dengan anggaran yang ada.  
Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %
  - d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 12.326.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.996.000,- atau 64,87%, Kegiatan ini sudah terealisasi sisanya dikarenakan selisih harga dengan anggaran yang ada.  
Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
  - e. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 17.486.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 15.932.300,- atau 91,11%. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian output/Keluaran sebesar 100 %.
  - f. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 19.111.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp.18.559.200,- atau 97,11%.  
Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Renstra/Renja dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp.4.102.641.600,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 3.479.706.641,- atau 84,82% terdiri dari :
- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 4.087.335.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.469.251.241,- atau 84,88% Kegiatan ini sudah terealisasi sisanya dikarenakan ada Tambahan Penghasilan Pegawai yang dianggarkan tetapi jabatannya masih kosong .  
Output/keluaran dari kegiatan ini adalah pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim per 31 Desember Tahun Anggaran 2024.
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 15.306.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.455.400,- atau 68,31% Kegiatan ini sudah terealisasi sisanya dikarenakan selisih harga dengan anggaran yang ada.  
Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 58.220.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 53.420.000,- atau 91,76% terdiri dari :
  - a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 66.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.000.000,- atau 10,61%, kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan Bimtek yang di ikuti banyak di tanggung oleh pihak penyelenggara.  
Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan capaian output/keluaran sebesar 25 %.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 694.164.266,- dengan Realisasi sebesar Rp. 651.653.031,- atau 93,88% terdiri dari :
  - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar . Rp. 10.037.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.822.800,- atau 97,86%.  
Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim dan disesuaikan kebutuhan yang ada dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
  - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 83.494.966,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 77.792.700,- atau 93,17%.  
Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah dan jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, jumlah dan jenis peralatan kebersihan yang disediakan dan jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran 100%.
  - c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp.70.339.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 56.977.500,- atau 81,00%.  
Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024 dengan capaian output/keluaran 100 %.
  - d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 21.508.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 16.815.900,- atau 78,18%, Kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan belanja disesuaikan dengan harga pasaran, sedangkan belanja spanduk di cetak sesuai dengan surat edaran yang ada.  
Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dengan capaian

- output/keluaran 100 %.
- e. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan dengan anggaran sebesar Rp. 10.570.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.570.500,- atau 100%.
- Output/keluaran dari Subkegiatan ini Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan capaian output/keluaran 100 %.
- f. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 34.650.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 18.000.000,- atau 51,95%, kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan Makan Minum di pergunakan saat ada Rapat yang mengundang tamu dari luar.
- Output/Keluaran dari Subkegiatan ini merupakan makan minum rapat di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim selama Tahun 2024 dengan capaian output/keluaran 80 %.
- g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 463.563.400,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 461.673.631,- atau 99.59%.
- Output/keluaran dari Subkegiatan ini merupakan jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah dan jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan capaian output/keluaran 100%.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 40.142.180,- dengan Realisasi sebesar Rp. 34.950.000,- atau 87,00% terdiri dari:
- a. Subkegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 40.142.180,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 34.950.000,- atau 87,00%.
- Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Mebel 20 unit dengan capaian output/keluaran 100 %.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 235.200.860,- dengan Realisasi sebesar Rp. 196.214.550,- atau 83,42% terdiri dari :
- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 2.497.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.230.000,- atau 89,29%.
- Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis materai yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024 dengan capaian output/keluaran 100 %.
- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 106.393.260,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 67.674.550,- atau 63,61%, kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan sesuai dengan pemakaian.
- Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dari Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024 dengan capaian output/keluaran 100 %.

- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 10.750.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.750.000,- atau 100%.

Output/Keluaran dari Subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki dengan capaian output/keluaran 100%.

- d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 115.560.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 115.560.000,- atau 100%.

Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah jumlah jasa keamanan kantor yang disediakan dan jumlah petugas kebersihan kantor yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024 dengan capaian output/keluaran 100 %.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 607.262.375,- dengan Realisasi sebesar Rp. 593.306.800,- atau 97,70% :

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 191.062.375,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 177.548.800,- atau 92,93%.

Output/keluaran Jumlah dan jenis perizinan kendaraan dinas yang dibayar dan jumlah dan jenis suku cadang yang disediakan dengan capaian output/keluaran 100 %.

- b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 399.558.000,- atau 99,89%.

Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 2 unit dengan capaian output/keluaran 100%.

- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 16.200.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 16.200.000,- atau 100%.

Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diperbaiki dengan capaian output/keluaran 100 %.

## **2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan sebesar Rp. 2.188.933.500,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 2.075.500.964,00 atau 94,82%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan sebagai berikut :



1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 2.188.933.500,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 2.075.500.964,- atau 94,82% terdiri dari :

a. Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 491.576.000,- telah sebesar Rp. 408.370.346,- atau 83,07% dengan target jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan sebanyak 1 unit. Sosialisasi Pendampingan Penggunaan Aplikasi Posting Cinta dengan peserta sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang terdiri dari tenaga kesehatan/petugas gizi/kader posyandu yang berasal dari puskesmas lingkup Kabupaten Muara Enim. Guna mendukung kelancaran penggunaan Aplikasi Posting Cinta dilakukan pemeliharaan (maintenance) aplikasi menggunakan jasa pihak ketiga. Disamping itu, kegiatan lain yang dilakukan pada Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya adalah penyerahan dukungan CSR (Corporate Social Responsibility) pada Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Adapun beberapa Perusahaan yang mendukung Program GSMP adalah PT. Satria Bahana Sarana (SBS) dan PT. BPR Gerbang Serasan. Dukungan ini berupa paket budidaya ikan dalam ember (budikamber) termasuk benih ikan dan pakan, serta benih sayur-sayuran yang diberikan kepada 11 Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Tegal Rejo Kecamatan Lawang Kidul yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 1188/KPTS/DTPHP/2021 tentang Daftar Penerima Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan.

Realisasi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 tidak terealisasi sebesar 16,56% dikarenakan selisih harga belanja alat tulis kantor, belanja cetak, serta belanja perjalanan dinas biasa dan dalam kota, serta Honor Pendamping Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dan Pendamping Aplikasi Mobile Apps sebanyak 1 Bulan tidak dibayarkan karena honor dianggarkan sebanyak 4 Bulan pada anggaran perubahan sedangkan anggaran perubahan disahkan pada bulan Oktober 2024 (Honor dibayarkan hanya sebanyak 3 bulan),

b. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik dengan anggaran sebesar Rp. 83.835.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 74.520.000,- atau 88,89%, dengan target Sosialisasi sebanyak 75 orang kelompok lumbung pangan, bertujuan agar kelompok lumbung dapat mengelola cadangan pangan masyarakat sehingga bermanfaat bagi anggota dan masyarakat sekitar, Lokasi Kegiatan di Desa Pelakat Kecamatan SDU, Desa Kuripan Selatan Kecamatan Empat Petulai Dangku dan Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida.



- c. Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.613.522.500,- telah terealisasi sebesar Rp. 1.592.610.618,- atau 98,70% dengan rincian sebagai berikut:
- Pembangunan Gudang Lumbung 1 unit di Gapoktan Ulak Limau Desa Muara Meo Kecamatan Panang Enim,
  - Pembangunan Gudang RMU 1 unit di Gapoktan Sumber Rahayu Desa Gedung Buruk Kecamatan Muara Belida.
  - Pembangunan Gudang RMU 1 unit di Poktan Usaha Maju Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida.
  - Pembangunan Gudang RMU 1 unit di Poktan Ulak Jaya Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida.
  - Pengadaan Mesin RMU 1 unit di Poktan Usaha Maju Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida.
  - Pengadaan Mesin RMU 1 unit di poktan Ulak Jaya Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida.
  - Mesin Bed Dryer 1 unit di Gapoktan Mitra Tani Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida.

### **3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 2.948.731.500,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 2.354.804.559,- atau 79,86% Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 10 (sepuluh) subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 1.173.660.300,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 812.389.236,- atau 69,22% terdiri dari :
  - a. Subkegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan anggaran sebesar Rp. 90.435.500,- telah terealisasi sebesar Rp. 85.608.200,- atau 94,66% dengan target yaitu Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas dan Desa Perjito Kecamatan Gunung Megang. Pelatihan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari bertempat di Kantor Kepala Desa Ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas dan Kantor Kepala Desa Perjito Kecamatan Gunung Megang dengan peserta total sebanyak 100 (seratus) orang yang terdiri dari masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM). Pelatihan Kemandirian Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2024 dengan tema “Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Melalui Pelatihan Kemandirian Pangan”. Pelatihan ini bertujuan agar keluarga dapat tetap mandiri dan berdaya memenuhi kebutuhan pangan keluarga yang bersumber dari pangan lokal yang berada di sekitarnya dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga. Selain itu melalui pelatihan ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat sehingga dapat menciptakan dan menerapkan pola makan yang benar, tidak asal



kenyang tapi memenuhi angka kecukupan gizi yang tepat melalui pemenuhan kebutuhan pangan keluarga yang berasal dari sumber daya lokal seperti pemanfaatan pekarangan rumah.

b. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi pangan Pokok dan Pangan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.138.297.700,- telah terealisasi sebesar Rp. 108.210.974,- atau 78,24% dengan target 4 kali sidak, sub kegiatan ini sesuai Keputusan Bupati Muara Enim Tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim Nomor: 289/KPTS/DKP/2024 Tanggal 6 Mei 2024 yang bertugas untuk memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 12 (dua Belas ) Bahan Pangan yaitu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng. Melakukan sidak ketersediaan dan harga pangan ke pasar di Kecamatan Muara Enim, Gelumbang dan Lawang Kidul sebanyak 4 kali sidak yaitu :

- Menjelang Puasa Ramadhan 1445 H
- Menjelang Hari Rya Idul Fitri 1445 H
- Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 H
- Menjelang Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025

Anggaran yang tidak terealisasi Karena adanya selisih Harga Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Tulis Kantor, selisih harga bahan Cetak, sisa perjalanan dinas dan Sisa Honorarium Satuan Tugas Ketahanan Pangan Yang tidak bisa di salurkan kerana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2020 Tentang Stadar Harga Satuan Regional. Lampiran No 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

c. Subkegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 80.163.300,- telah terealisasi sebesar Rp. 72.858.122,- atau 90,89%, Kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap Gapoktan/kelompok tani guna meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan pendapatan sebanyak 7 gapoktan/kelompok tani yaitu :
  - a) Gapoktan Sinar Dewa Desa Pagar Dewa Kecamatan Tanjung Agung
  - b) Gapoktan Serasi Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida
  - c) Gapoktan Cahaya Gemilang Desa Cahaya Alam Kecamatan SDU
  - d) Gapoktan Jiwa Bersama Desa Jiwa Baru Kecamatan Lubai
  - e) Gapoktan Sepakat Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan Mas
  - f) Gapoktan Berkat Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru



- g) Gapoktan Tunas Mekar Desa Talang Nangka Kecamatan Lembak
- 2) Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 48 kali baik mandiri, APBN dan APBD di 22 kecamatan dan desa berkolaborasi dengan Perum Bulog, Dinas TPHP, Dinas Perikanan dan Dinas Perkebunan.
- d. Subkegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 124.817.700,- telah terealisasi sebesar Rp. 115.199.055,- atau 92,29% terdiri dari :  
Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Rembug Utama Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional dan Expo Tahun 2024, dilaksanakan di Kabupaten Tabanan Bali pada tanggal 26 - 29 Juli 2024 dengan peserta sebagai berikut :
- 1) Ketua KTNA Kabupaten
  - 2) Bendahara KTNA Kabupaten
  - 3) Ketua KWT Kecamatan Lawang Kidul
  - 4) Pendamping
- e. Subkegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 624.704.300,- telah terealisasi sebesar Rp. 331.128.600,- atau 53,01% dengan target 22 Kecamatan selama 12 bulan, Lokasi 22 Kecamatan, terdiri dari :
1. Dalam rangka pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melaksanakan kegiatan penyaluran beras premium bersubsidi dengan “Gerakan Pangan Murah”. Program ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara pemerintah dalam menjaga inflasi daerah yang sering terjadi apabila terjadi gejolak harga disaat-saat menjelang perayaan natal dan tahun baru ataupun hari besar keagamaan lainnya, untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan pengendalian inflasi daerah ini dilaksanakan melalui Gerakan Pangan Murah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mensubsidi harga beras premium sebesar Rp. 3.000,- per kilogram dengan kemasan 5 Kg. Saat ini pelaksanaan gerakan pangan murah telah dilaksanakan sebanyak 30 kali dengan total beras premium sebanyak 84.000 kg.
  2. Pemantauan dan pengumpulan data secara rutin (mingguan) di pasar grosir dan eceran terbesar baik pasar di kecamatan maupun pasar di kabupaten sudah berjalan selama 2 bulan yang dilakukan oleh Petugas Pendata (Enumerator).
  3. Monitoring harga dan ketersediaan bahan pangan pokok hanya dilaksanakan pada Hari Natal dan Menjelang Tahun Baru dilakukan oleh petugas pendata harga pangan pemantauan dan pengumpulan data dan untuk monitoring harga ketersediaan bahan pangan pokok yang dilakukan di 22 (dua puluh dua) kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim

4. Subkegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dengan anggaran sebesar Rp. 115.241.800,- telah terealisasi sebesar Rp. 99.384.285,- atau 86,24% dengan target Informasi Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM), adapun kegiatan ini untuk :
  - a. Survey Ketersediaan 9 (Sembilan) Kelompok Pangan. Survey kelompok pangan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap, yaitu pada bulan Maret s.d April, Juni s.d Juli, September s.d Oktober Tahun 2024, kelompok Pangan dimaksud yaitu : Padi-padian (Beras), Umbi-umbian (ubi kayu), pangan hewani (daging sapi), minyak dan lemak (minyak goreng), buah/biji berminyak (kelapa), kacang-kacangan (kacang kedelai), gula (gula pasir), sayur dan buah serta bumbu dan lain-lain (bumbu-bumbuan). Adapun data yang didapat dari survey ini digunakan untuk data tambahan pengolahan Neraca Bahan Makanan.
  - b. Neraca Bahan Makanan (NBM). Neraca Bahan Makanan (NBM) berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh sebagai berikut : Ketersediaan energi di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 sebesar 2.544 kkal/kap/hari, dengan mutu ketersediaan pangan yang ditunjukkan skor PPH sebesar 81,60. Tingkat ketersediaan di Kabupaten Muara Enim mencapai 106% yang menunjukkan bahwa ketersediaan energi di Kabupaten Muara Enim tergolong **normal** atau **tahan pangan**.
  
2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 557.673.000,- Realisasi sebesar Rp. 369.507.936,- atau 66,26% terdiri dari :
  - a. Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal dengan anggaran sebesar Rp. 253.572.600,- telah terealisasi sebesar Rp. 128.697.680,- atau 50,75% dengan target 1 tingkat nasional, 1 tingkat provinsi, kegiatan ini untuk mendorong kelompok usaha masyarakat dalam mengembangkan olahan pangan dari sumberdaya pangan setempat sehingga dapat bersaing dengan daerah lain, Memperkenalkan produk olahan pangan dari Kabupaten Muara Enim kepada masyarakat luas, Untuk menyebarluaskan informasi produk unggulan daerah kepada calon konsumen yang potensial. Ada beberapa belanja untuk Kegiatan Pameran Tingkat Nasional dalam rangka Hari Pangan Sedunia (HPS) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian RI c/q Badan Pangan Nasional (NFA) untuk tahun 2024 ditiadakan, hanya dilaksanakan Upacara Memperingati Hari Pangan Sedunia (HPS) dengan Zoom Meeting, sehingga Belanja Kegiatan tersebut tidak terealisasi berupa :
    - a. Sewa Stand Pameran : Rp.35.000.000,-
    - b. Sewa Kendaraan untuk Kepala Daerah : Rp. 7.000.000,-
    - c. Belanja Dekorasi Pameran : Rp. 25.000.000,-



- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| d. Belanja Natura (Materi Pameran) | : Rp.22.500.000,-         |
| e. Perjalanan Dinas Biasa          | : Rp. 45.186.320,-        |
| f. Makan Minum Rapat               | : Rp. 945.000,            |
| <b>Jumlah</b>                      | <b>: Rp.135.631.320,-</b> |
- b. Subkegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 304.101.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 244.255.876,- atau 80,32%, dengan rincian pengadaan beras medium sebanyak 10 ton untuk 5 Gapoktan yaitu:
- 1) Gapoktan Cahaya Gemilang Desa Cahaya Alam Kecamatan SDU
  - 2) Gapoktan Jiwa Bersama Desa Jiwa Baru Kecamatan Lubai
  - 3) Gapoktan Sepakat Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan Mas
  - 4) Gapoktan Berkat Desa Lubuk Raman Kecamatan Rambang Niru
  - 5) Gapoktan Tunas Mekar Desa Talang Nangka Kecamatan Lembak
3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan anggaran sebesar Rp. 1.217.397.600,- Realisasi sebesar Rp. 1.172.907.387,- atau 96,35% terdiri dari :
- a. Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per Tahun dengan anggaran sebesar Rp. 880.921.500,- telah terealisasi sebesar Rp. 853.526.092,- atau 96,89%. dengan target 1 dokumen, Kegiatan ini untuk :
- Pola Pangan Harapan Konsumsi Telah dilaksanakan, dengan hasil Skor PPH Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya pada tahun 2023 mencapai sebesar 91,6 dan untuk di tahun 2024 ini mencapai sebesar 94,53.
  - Tingkat konsumsi pangan penduduk Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 mencapai 2.203 kkal/kap/hari capaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2.021 kkal/kap/hari, secara kuantitas sudah mencapai Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan yaitu 2.100 kkal/kap/hari.
  - Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan berjalan dengan lancar, dan semua peserta sangat antusias dan bersemangat dalam menerima program ini.
  - Penyaluran bantuan prasarana pemanfaatan pekarangan yaitu sebanyak 17 KWT dari 9 Kecamatan 17 desa yaitu :
    - Kecamatan Rambang : Desa Pagar Agung, Desa Sumber Rahayu, Desa Tanjung Raya, Desa Sugihan, dan Desa Sugih Waras;
    - Kecamatan Tanjung Agung : Desa Tanjung Agung, Desa Paduraksa, Desa Penyandingan, dan Desa Seleman;
    - Kecamatan Panang Enim : Desa Bedegung, dan Desa Muara Meo;
    - Kecamatan Belida Darat : Desa Talang Beliung;
    - Kecamatan Lembak : Desa Sungai Duren;
    - Kecamatan Semende Darat Ulu : Desa Tanjung Tiga;

- Kecamatan Semende Darat Laut : Desab Babatan;
  - Kecamatan Belimbing : Desa Belimbing Jaya;
  - Kecamatan Gelumbang : Desa Sigam;
- b. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragam Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan anggaran sebesar Rp. 336.476.100,- telah terealisasi sebesar Rp. 319.381.295,- atau 94,92%, dengan target 7 Kecamatan 20 Desa, 10 Kelompok, 6 Pemenang, tingkat nasional dan tingkat provinsi, kegiatan ini untuk :
- Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Tingkat Desa untuk mendukung Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 120, jumlah peserta sebanyak 40 orang masing – masing desa , jadwal pelaksanaan yaitu :
    - Balai Desa Sidomulyo Kecamatan Gunung Megang (Peserta dari Desa Sidomulyo dan Desa Fajar Indah), dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024 Pukul 9.00 WIB – 12.00 WIB;
    - Kantor Desa Sumaja Makmur Kecamatan Gunung Megang (Peserta dari Desa Sumaja Makmur), dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024 Pukul 13.00 WIB – 16.00 WIB.
  - Pelaksanaan kegiatan sosialisasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Tingkat Kecamatan tahun 2024, jumlah peserta sebanyak 20 orang masing – masing kecamatan, jadwal pelaksanaan yaitu :
    - Balai Kantor Camat Gelumbang (Peserta dari Kecamatan Sungai Rotan dan Kecamatan Gelumbang), dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024;
    - Balai Kantor Camat Belimbing (Peserta dari Kecamatan Gunung Megang dan Kecamatan Belimbing), dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024;
    - Balai Kantor Camat Rambang (Peserta dari Kecamatan Rambang), dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2024;
    - Balai Kantor Camat Tanjung Agung (Peserta dari Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung, dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2024.
  - Pelaksanaan kegiatan Lomba Kreasi Menu B2SA Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 120 Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 bertempat di Halaman Balai Desa Sidomulyo Kecamatan Gunung Megang, dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024
  - Pelaksanaan kegiatan Lomba Masak Menu B2SA Berbasis Sumber Daya Lokal Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 bertempat di Gedung Serbaguna Lima Putri Muara Enim, dilaksanakan pada tanggal 15 November 2024.

#### 4. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Alokasi anggaran untuk program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 600.359.400,- dengan Realisasi sebesar Rp. 584.809.963,- atau 97,41%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 600.359.400,- dengan Realisasi sebesar Rp. 584.809.963,- atau 97,41% terdiri dari :
  - a. Subkegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 600.359.400,- dengan Realisasi sebesar Rp. 584.809.963,- atau 97,41%, dengan target 1050 Paket Sembako dan Peta SKPG. di dialokasikan untuk daerah rawan pangan dan daerah stunting sebanyak 21 (dua puluh satu) desa di 5 Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :
    1. Kecamatan Tanjung Agung (Desa Seleman, Desa Tanjung Karang dan Desa Penyandingan).
    2. Kecamatan Lubai (Desa Gunung Raja dan Desa Jiwa Baru).
    3. Kecamatan Gelumbang (Desa Teluk Limau, Desa Gumai dan Desa Talang Taling)
    4. Kecamatan Sungai Rotan (Desa Suka Maju, Desa Petar Dalam, Desa Petar Luar, Desa Sungai Rotan, Desa Suka Merindu, Desa Tanding Marga, Desa Muara Lematang dan Desa Paya Angus)
    5. Kecamatan Muara Belida (Desa Tanjung Baru, Desa Kayu Ara Batu, Desa Mulia Abadi, Desa Patra Tani dan Desa Gedung Buruk)

Adapun jenis bantuan bahan pangan yang diberikan masing-masing setiap kepala keluarga berupa Beras 20 Kg, Minyak Goreng 2 Liter, Gula Pasir 2 kg dan Ikan Sarden Kaleng 3 Kaleng.

Untuk Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

Informasi tersebut dituangkan dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas /FSVA*) yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. FSVA disusun

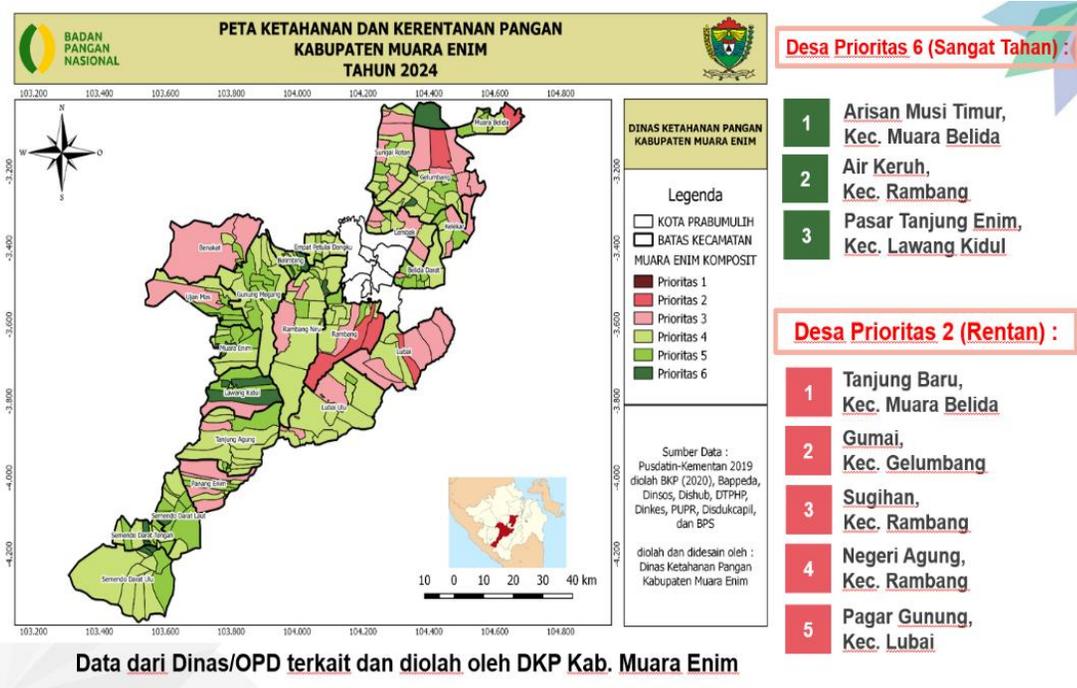


menggunakan enam indikator yang mewakili tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Melalui FSVA dapat dilihat indikator utama yang menjadi pemicu terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan.

Berdasarkan hasil analisis sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut : Hasil analisis FSVA 2024 dari 256 desa terdapat 0 Desa (0%) Prioritas 1 (Sangat Rentan); 5 desa (1,95%) Prioritas 2 (Rentan); 39 desa (15,23%) Prioritas 3 (Agak Rentan); 117 desa (45,70%) Prioritas 4 (Agak Tahan); 72 desa (28,13%) Prioritas 4 (Tahan); dan 23 desa (8,98%) Prioritas 6 (Sangat Tahan).

Untuk Penanganan Daerah Rawan Pangan ke depannya dikarenakan tidak ada Desa Sangat Rentan (Prioritas 1) maka akan diprioritaskan pada Daerah Rentan Pangan (Prioritas 2) yaitu : Desa Tanjung Baru Kec. Muara Belida, Desa Gumai Kec. Gelumbang, Desa Sugihan Kec. Rambang, Desa Negeri Agung Kec. Rambang dan Desa Pagar Gunung Kec. Lubai

### Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Tahun 2024 Kabupaten Muara Enim



#### 5. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Alokasi anggaran untuk program Pengawasan Keamanan Pangan ini sebesar Rp. 429.196.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 336.705.550,- atau 78,45%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 429.196.000,- Realisasi sebesar Rp. 336.705.550,- atau 78,45% terdiri dari :
  - a. Subkegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal tumbuhan dengan anggaran sebesar Rp. 117.947.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 96.092.200,- atau 81,47%,



target target pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan Segar di Tingkat Kabupaten 1 (Satu) kali dan Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Tingkat Kecamatan sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu di Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Muara Belida dan di Kecamatan Semende Darat Laut. Sosialisasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dan untuk Peningkatan pengetahuan masyarakat akan pentingnya pangan yang aman dan langkah yang akan dilakukan guna mewujudkan pangan yang aman tersebut.

Sosialisasi keamanan pangan tingkat Kabupaten dilaksanakan selama 1 ( Satu) hari di Hotel Griya Serasan Sekundang dengan Peserta sebanyak 50 orang yang berasal dari seluruh Kecamatan dalam Kabupaten Mura Enim terdiri dari Pelaku Usaha, Gapoktan, Petani dan Petugas Lapangan / Penyuluh Pertanian. Sedangkan untuk Sosialisasi Keamanan Pangan di Kecamatan Rambang Niru dilaksanakan di BPP Tebat Agung dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang , untuk Sosialisasi Keamanan Pangan di Kecamatan Muara Belida dilaksanakan di BPP Patra Tani dengan jumlah peserta 30 orang, dan untuk Sosialisasi Keamanan Pangan di Kecamatan Semende Darat Laut dilaksanakan di BPP Pulau Panggung dengan jumlah peserta 30 orang, .

Tujuan diselenggarakan Sosialisasi Keamanan Pangan adalah :

- Meningkatkan wawasan dan pengetahuan Pelaku Usaha, Gapoktan, Kelompok Tani dalam mengajukan Registrasi / Izin Edar dan Sertifikasi Jaminan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan
- Memberikan Pemahaman Peserta bagaimana memilih Pangan yang Aman, bebas segala cemaran seperti cemaran Biologi, Kimia dan Benda lainnya yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

b. Subkegiatan Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan anggaran sebesar Rp. 107.029.400,- telah terealisasi sebesar Rp. 71.486.500,- atau 66,79%, 10 Sertifikat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang merupakan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan dalam upaya memberikan Jaminan dan perlindungan masyarakat serta mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan Mutu dan Keamanan pangan produk. Tahun 2024 Pangan Segar Asal Tumbuhan yang telah memperoleh Sertifikat sebanyak 8 sertifikat yang terdiri yaitu Sertifikat Prima 3 (tiga) sebanyak 8 komoditi. yaitu :

- Sertifikat Prima 3 (tiga) Komoditi Nanas di Desa Menamti Selatan Kecamatan Kelekar.
- Sertifikat Prima 3 (tiga) Komoditi Sawo di Desa Dangku Kecamatan Empat Petulai Dangku.
- Sertifikat Prima 3 ( tiga) Komoditi Jeruk Siam sebanyak 2 kelompok di Desa Air Talas Kecamatan Rambang Niru.



- Sertifikat Prima 4 (Empat) Komoditi yaitu Bawang Merah, Daun Nawang, Terong dan Kol di Desa Gunung Agung Kecamatan Semendo Darat Tengah.
- c. Subkegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 204.219.600,- telah terealisasi sebesar Rp. 169.126.850,- atau 82,82%, dengan target pengujian pangan segar asal tumbuhan untuk tahun 2024 sebanyak 45 sampel pangan segar. Pengambilan sampel Pangan segar Asal Tumbuhan dilaksanakan dalam rangka pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan telah dilaksanakan pengambilan sampel sesuai dengan target yaitu sebanyak 45 sampel pangan segar pada bulan Juli 2024 dan bulan November 2024 sebagai berikut
- Pengambilan sampel Pertama yaitu bulan Juli 2024 sebanyak 15 sampel yang terdiri dari 6 sampel buah Impor dan 9 sampel sayuran yaitu : Buah Apel Fuji, Buah BuahPir, Bawang merah, bawang putih, kentang yang berasal dari para pedagang sayur dan buah di 3 (tiga) pasar di 3 Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim yaitu Pasar Muara Enim Kecamatan Muara Enim, Pasar Tanjung Enim Kecamatan LawangKidul, dan Pasar Gelumbang Kecamatan Gelumbang.
  - Pengambilan sampel yang ke 2(dua) yaitu bulan November 2024 sebanyak 30 sampel yang terdiri dari 12 sampel buah Impor dan 18 sampel sayuran yaitu : Apel Merah, Apel Hijau, Jeruk Medan, Buah Naga , Timun, Wortel, Kol, Cabe Merah, Cabe Burung, Tomat yang berasal dari para pedagang sayur dan buah di 3(tiga) pasar di 3 Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim yaitu Pasar Muara Enim Kecamatan Muara Enim, Pasar Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul,dan Pasar Gelumbang Kecamatan Gelumbang.

Selanjutnya sampel PSAT tersebut dilaksanakan pengujian diLaboratorium yang terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) yang merupakan Rekomendasi dari Kementan RI yaitu Laboratorium Pusat promosi dan sertifikasi Hasil Pertanian yang berlokasi di Cibubur Jakarta Timur. Tujuan pengujian tersebut untuk mengetahui keamanan produk yang beredar di masyarakat khususnya Pangan Segar Asal Tumbuhan. Selain itu dengan melaksanakan pengujian secara berkesinambungan diharapkan dapat mengurangi produk pangan segar yang kurang aman untuk dikonsumsi yang beredar di masyarakat.

Selain pengujian keamanan pangan melalui Laboratorium juga dilaksanakan pengawasan dengan melaksanakan dengan cara cepat menggunakan Rapid Test Kit untuk mengetahui kandungan pestisida dan juga formalin pada PSAT dilaksanakan terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan Buah dan Sayuran yang diperjualbelikan dipasar.

### 3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tabel 3.19 Capaian Realisasi Anggaran Dinas Pangan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemantapan Ketahanan Pangan Wilayah	Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	87	94,53	108

### 4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### 1. Permasalahan

- a. Hasil Pengujian Laboratorium Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan belum mewakili secara keseluruhan Kabupaten Muara Enim karena baru 3 Kecamatan yang sampelnya diujikan melalui Laboratorium mengingat biaya pengujian yang cukup tinggi dan keterbatasan Anggaran.
- b. Untuk Kegiatan Sertifikasi Prima 3 (tiga) tahun ini tidak terealisasi 100 % dikarenakan biaya pengujian sampel yang tinggi dari 10 Sampel yang ditargetkan biaya pengujian hanya cukup untuk 8 komoditi.
- c. Masih kurangnya Pelaku Usaha, Kelompok Tani dan Gapoktan yang mengajukan Registrasi dan Sertifikasi Jaminan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan seperti Sertifikasi Buah, Sayuran dan Registrasi beras.
- d. Masih perlunya Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), selain TP PKK seperti Ibu - ibu hamil dan remaja putri.
- e. Karena terbatasnya SDM, sehingga untuk monitoring dan menginventarisasi data kelompok pangan olahan di lapangan mengalami kesulitan.
- f. Perlu adanya koordinasi yang lebih efektif, lebih erat lagi dengan kelompok KTNA.
- g. Budaya masyarakat belum mendukung kreasi pangan lokal.
- h. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal
- i. Kesadaran masyarakat masih kurang dalam membudayakan pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
- j. Masih rendahnya konsumsi masyarakat terhadap kelompok umbi - umbian dan pangan lokal lainnya

#### 2. Solusi

- a. Untuk Kecamatan- kecamatan lain yang pengawasan keamanan pangannya belum dilakukan pengujian melalui Laboratorium , maka dilakukan pengujian dengan cara cepat dengan menggunakan Rapid Test Kit Formalin dan Rapid Test Kit Pestisida mengetahui kandungan formalin dan Cemarkan Pestisida pada PSAT ( Pangan Segar Asal Tumbuhan ) yang beredar.



- b. Secara berkala memberikan Informasi kepada masyarakat dengan melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan baik di Tingkat Kabupaten maupun di Kecamatan dengan melibatkan langsung Pelaku Usaha, Kelompok Tani, Gapoktan, dan Petugas lapangan / penyuluh pertanian serta melaksanakan pembinaan langsung ke pelaku usaha.
- c. Perlunya penambahan anggaran untuk biaya pengujian Laboratorium kegiatan Sertifikasi PSAT agar lebih banyak komoditi yang memenuhi syarat jaminan keamanan pangan di tingkat produsen atau pelaku usaha.
- d. Diharapkan jumlah pesertanya ditambah agar semakin banyak peserta yang bisa mengikuti sosialisasi.
- e. Sebaiknya anggaran hadiah hiburan ditambah untuk lebih semangat lagi peserta mengikuti lomba.
- f. Untuk mendapatkan data kelompok pangan olahan kecamatan sebaiknya berkoordinasi ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan.
- g. Kedepanya agar dianggarkan bantuan berupa demplot untuk kelompok KTNA kecamatan sesuai sentra produksi.
- h. Agar dianggarkan pengadaan bantuan alat Pangan Lokal Sederhana.
- i. Agar diadakan kegiatan pelatihan olahan pangan lokal
- j. Perlu diadakan kegiatan Sosialisasi pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)



#### 4. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

##### 1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan wajib Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun Anggaran 2024, dialokasikan belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 26.138.579.196,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasional terdiri dari :  
Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp 6.789.883.406,- yang di arahkan untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS, Pembulatan Gaji serta Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk 66 orang pegawai lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dan Honor panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.  
Belanja barang dan jasa dialokasikan sebesar Rp 16.426.303.408,- untuk membiayai sebanyak 11 Program, 22 Kegiatan dan 57 Sub Kegiatan lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim
- b. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp 2.922.392.382,- yang diarahkan untuk membiayai belanja peralatan penunjang operasional lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.

##### 2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2024 alokasi anggaran Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim adalah sebesar Rp 26.138.579.196,- (Dua Puluh Enam Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp 19.864.195.646,- (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) atau 76,00% dengan melaksanakan 11 program, 22 kegiatan, dan 57 Sub kegiatan.

###### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 15.744.427.941,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 11.319.329.916,- atau 71,89 %. Program ini terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) Sub kegiatan yaitu :

- (1) Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 29.029.800,- terealisasi sebesar Rp 21.249.150,- atau 73,20%. Hal ini disebabkan karena seluruh Alat Tulis Kantor, Perjalanan Dinas dan Honor Operator telah direalisasikan sepenuhnya, untuk dokumen output berupa Renstra 2024-2026, Rencana Kerja 2025 dan rencana Kerja Perubahan masing-masing hanya direalisasikan atau dicetak sesuai kebutuhan. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Dinas sebanyak 12 dokumen terealisasi 95%.



- b. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 20.415.300,- terealisasi sebesar Rp 2.267.500,- atau 11,11%. Hal ini disebabkan karena RKA sudah dicetak, belanja perjalanan dinas tidak terlaksana dikarenakan tidak ada undangan untuk rapat dan koordinasi. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 6 dokumen terealisasi 100%.
  - c. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 9.346.500,- terealisasi sebesar Rp 3.937.500,- atau 42,13%. Hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan belanja fotokopi, dan cetak penggandaan, sedangkan untuk perjalanan dinas yang di anggarkan untuk 4 orang hanya di gunakan untuk 2 orang yang disesuaikan dengan kebutuhan. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 6 dokumen dan terealisasi 100%.
  - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 11.392.000,- terealisasi sebesar Rp 1.960.000,- atau 17,21%. Hal ini dikarenakan dokumen di cetak sesuai dengan kebutuhan. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 20 dokumen dan terealisasi 100%.
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 11.392.000,- terealisasi sebesar Rp 2.596.000,- atau 22,79%. Hal ini disebabkan karena DPA Perubahan telah di cetak sesuai dengan kebutuhan. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 20 dokumen dan terealisasi 95%.
  - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 18.288.000,- terealisasi sebesar Rp 14.530.000,- atau 79,45%. Hal ini disebabkan karena Alat Tulis Kantor dan Honor Operator serta dokumen LKPJ, LPPD LKJIP di cetak sesuai kebutuhan. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 15 laporan dan terealisasi 95%.
- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 6.784.443.406,- terealisasi sebesar Rp 6.465.780.911,- atau 95,30%. Keluaran (output) dari kegiatan ini berupa jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN sebanyak 57 orang/bulan terealisasi 100%.

- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp 6.040.000,- terealisasi sebesar Rp 5.440.000,- atau 90,07%. Keluaran (output) dari kegiatan ini berupa Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 1 dokumen terealisasi 100%.
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp 4.567.400,- terealisasi sebesar Rp 3.867.500,- atau 84,68%. Keluaran (output) dari kegiatan ini berupa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 2 laporan terealisasi 100%
  - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ semesteran dengan anggaran sebesar Rp 30.768.200,- terealisasi sebesar Rp 27.943.500,- atau 90,82%. Keluaran (output) dari kegiatan ini berupa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD sebanyak 5 Laporan terealisasi 100%.
- (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan antara lain :
- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp 76.775.500,- terealisasi sebesar Rp 26.811.600,- atau 34,92%. Hal ini disebabkan karena anggaran penatausahaan BMD tahun 2024 dikarenakan anggaran yg digunakan sebesar 70% sudah mencukupi kebutuhan kegiatan BMD sepanjang tahun 2024. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan realisasi 70%.
- (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp 127.500.000,- terealisasi sebesar Rp 12.000.000,- atau 9,41%. Hal ini disebabkan karena jadwal diklat yang dimaksud berada di akhir tahun dan beberapa diklat Barang dan jasa Tipe C yang diikuti oleh 8 orang di biayai oleh anggaran BKPSDM. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 25 orang yang realisasi 32%.
  - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang dengan anggaran sebesar Rp 11.205.000,- terealisasi sebesar Rp 0,- atau 0%. Hal ini disebabkan karena tidak dilaksanakannya sosialisasi peraturan perundang-undangan tersebut sebanyak 45 orang yang realisasi 0%.
  - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang dengan anggaran sebesar Rp 67.500.000,- terealisasi sebesar Rp 0,- atau 0%. Hal ini disebabkan karena jadwal Bimbingan Teknis

Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud berada di akhir tahun. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 12 orang yang terealisasi 0%.

- (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 8.068.000,- terealisasi sebesar Rp 8.025.000,- atau 99,47%. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah paket komponen dan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 1 paket yang terealisasi 100%.
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 118.027.219,- realisasi sebesar Rp 113.936.000,- atau 96,53%. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 3 paket realisasi 100%.
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp 2.789.984.200,- terealisasi sebesar Rp 1.499.530.724,- atau 53,75%. Hal ini disebabkan penyesuaian kebutuhan yang terjadi di lapangan. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 2 paket realisasi 100%.
  - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 52.990.700,- terealisasi sebesar Rp 27.830.000,- atau 52,52%. Hal ini disebabkan karena belum ada kegiatan yang membutuhkan plakat. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 2 paket realisasi 100%.
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang dengan anggaran sebesar Rp 12.000.000,- realisasi sebesar Rp 8.069.700,- atau 67,25%. Hal ini disebabkan karena belanja di sesuaikan dengan kebutuhan. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 2 paket realisasi 100%.
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 960.591.500,- terealisasi sebesar Rp 504.235.818,- atau 52,49%. Hal ini disebabkan karena Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD, makan minum rapat, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan tehknis PNS disesuaikan dengan undangan. Keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu 12 laporan realisasi 100%.
  - g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp 15.740.000,- terealisasi sebesar Rp 15.240.000,- atau 96,82%. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dokumen

penatausahaan arsip dinamis pada SKPD sebanyak 1 dokumen realisasi 100%.

(6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 1.395.004.000,- realisasi sebesar Rp 775.920.000,- atau 55,62%. Hal ini di karenakan seluruh dealer pemegang hak merek tidak menerima orderan untuk pengadaan mobil Dinas Operasional pada akhir November dikarenakan ada penambahan PPN 12% dan perhitungan pajak opsen pada bulan Januari. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan sebanyak 6 unit realisasi 83,3%.
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 529.998.282,- terealisasi sebesar Rp 282.650.000,- atau 53,33%. Hal ini disebabkan karena UPS yang di anggarkan tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak sesuai dengan harga di lapangan. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan sebanyak 8 paket realisasi 35%.

(7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp 6.497.800,- terealisasi sebesar Rp 5.370.000,- atau 82,64%. Hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 Laporan realisasi 90%.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp 230.843.376,- terealisasi sebesar Rp 190.756.328,- atau 82,64%. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan sebanyak 1 Laporan realisasi 100%.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp 128.400.000,- terealisasi sebesar Rp 93.090.000,- atau 72,50%. Hal ini disebabkan karena jumlah tenaga kebersihan hanya 4 orang dari 6 orang dan tenaga keamanan hanya 3 orang dari 4 orang. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah tenaga petugas keamanan sebanyak 4 orang dan jumlah tenaga petugas kebersihan sebanyak 6 orang realisasi 80%.

- (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan sub kegiatan :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp 47.684.250,- terealisasi sebesar Rp 21.222.091,- atau 44,51%. Hal ini disebabkan karena kendaraan dinas jabatan disesuaikan dengan kerusakan yang terjadi. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya sebanyak 1 unit realisasi 50%.
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 1.200.525.061,- terealisasi sebesar Rp 479.930.750,- atau 39,98%. Hal ini disebabkan karena Hidup Kabupaten Muara Enim dan disesuaikan dengan kerusakan yang terjadi dan beberapa kendaraan dinas operasional atau lapangan STNK nya bukan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim melainkan Dinas PU Cipta Karya dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perda Nomor 3 Tahun 2023 bahwa Dinas PU Cipta Karya berubah nomenklaturnya menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga mengalami kesulitan dalam proses pembayaran pajak. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 42 unit realisasi 80,5%.
  - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat dengan anggaran sebesar Rp 791.074.447,- realisasi sebesar Rp 500.161.844,- atau 63,23%. Hal ini disebabkan karena dana tersebut direncanakan untuk memperbaiki alat berat excavator cattettillar 320. Tetapi anggaran tersebut tidak mencukupi untuk memperbaiki alat tersebut sesuai dengan penawaran dari PT. Trakindo. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya sebanyak 4 unit realisasi 75%.
  - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 6.300.000,- terealisasi sebesar Rp 500.000,- atau 7,94%. Hal ini disesuaikan dengan kerusakan yang terjadi. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 17 unit realisasi 35%.
  - e. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 133.836.000,- terealisasi sebesar Rp 133.542.000,- atau 99,78%. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 2 unit realisasi 100%.



- f. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 108.200.000,- terealisasi sebesar Rp 70.927.000,- atau 65,55%. Sebagian besar Sarana dan Prasarana Gedung kantor dalam kondisi baik, sehingga anggaran dibelanjakan sesuai kebutuhan. Keluaran (output) dari sub kegiatan ini yaitu jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi sebanyak 48 unit realisasi 60%

## **2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Alokasi anggaran untuk Program Perencanaan Lingkungan Hidup sebesar Rp 866.125.290,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 489.098.910,- atau 56,47%. Program ini terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 3 (Tiga) sub Kegiatan yaitu

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan :
  - a. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp 210.632.300,- terealisasi sebesar Rp 89.899.996,- atau 42,68% hal ini disebabkan karena kegiatan yang terlaksana berupa penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah selesai 100% dilaksanakan dan mendapat penghargaan Gubernur. Namun Kegiatan Evaluasi yang melibatkan tenaga Ahli Penyusunan dan Pembuatan Video paparan Bupati tidak terlaksana, karena tidak ada perintah/pedoman dari KLH. Biasanya dilaksanakan pada bulan November tahun berjalan sampai akhir tahun 2024 pedomannya tidak di terbitkan. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota sebanyak 20 dokumen terealisasi sebesar 75%.
  - b. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 103.175.000,- terealisasi sebesar Rp 27.629.865,- atau 26,78% hal ini dikarenakan penyusunan RPPLH dan evaluasi dalam seluruh tahun Program Pembentukan Perda sudah dilaksanakan. Namun sampai akhir tahun anggaran belum ada ketetapan Perda sehingga Rencana Sosialisasi dan Pembahasan yang dianggarkan melibatkan Tim Ahli, OPD dalam dan luar Pemerintah Kabupaten Muara Enim tidak jadi dilaksanakan. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah dokumen RPPLH di Kabupaten/Kota yang berisi arahan/muatan RPPLH Kabupaten/Kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi sebanyak 10 Dokumen terealisasi 60%.

2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Muara Enim dengan Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJD dengan anggaran sebesar Rp 552.317.990,- terealisasi sebesar Rp 371.569.049,- atau 67,27%. Hal ini disebabkan karena dana tidak terserap terutama dari anggaran rapat yang dialihkan menjadi rapat online dan cetak buku untuk pemeriksaan yang sebelumnya menjadi syarat pada rapat Pravalidasi untuk dibagi Tim Pemeriksa, diganti dengan Format PDF. Keluaran (output) pada kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten /Kota yang Disusun 10 Dokumen realisasi 95%.

### 3. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp 1.950.245.705,- terealisasi sebesar Rp 1.457.615.077,- atau 74,74%. Program ini terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 5 (Lima) sub Kegiatan yaitu :

- 1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten dengan sub kegiatan :
  - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan anggaran sebesar Rp 215.545.100,- terealisasi sebesar Rp 191.620.853,- atau 88,90%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut sebanyak 4 dokumen terealisasi 100%.
  - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan anggaran sebesar Rp 337.772.900,- terealisasi sebesar Rp 103.659.548,- atau 30,69% hal ini disebabkan karena serapan anggaran 30,69% yang dituju untuk pembinaan desa dan koordinasi dengan provinsi. Kegiatan yang tidak terselenggara yaitu koordinasi dengan provinsi. Kegiatan yang tidak terselenggara yaitu perhitungan/inventarisasi Gas Rumah Kaca karena Tim dari BSPJI Palembang yang telah menawarkan kerjasama mengundurkan diri. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan sebanyak 12 Dokumen terealisasi 60%.
  - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 1.049.850.505,- terealisasi sebesar Rp 814.386.820,- atau 80,14%. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya operasional Laboratorium Lingkungan disebabkan belum selesainya pembentukan BLUD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan sebanyak 2 Dokumen terealisasi 95%.



- 2) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten dengan sub kegiatan :
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran dengan anggaran sebesar Rp 97.874.500,- terealisasi sebesar Rp 90.061.210,- atau 92,02%, Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di Kabupaten/Kota sebanyak 4 kegiatan terealisasi 100%.
  - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi dengan anggaran sebesar Rp 249.202.700,- terealisasi sebesar Rp 230.886.646,- atau 92,65% keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di Kabupaten/Kota sebanyak 3 kegiatan terealisasi 100%.

#### **4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) sebesar Rp 384.145.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 70.252.750,- atau 18,29%. Program ini terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 3 (Tiga) sub Kegiatan yaitu :

- 1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
  - a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan anggaran sebesar Rp 178.794.000,- terealisasi sebesar Rp 67.745.000,- atau 37,89%. Hal ini disebabkan karena kegiatan terlaksana sebanyak dua kali pembersihan di empat lokasi RTH dan kegiatan pemangkasan di enam lokasi. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 3.79 Ha terealisasi 50%.
  - b. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati dengan anggaran sebesar Rp 55.991.200,- terealisasi sebesar Rp 549.850,- atau 0,98%. Hal ini dikarenakan terlampir tidak terlaksana, hanya perjalanan dinas yang dilakukan untuk bahan evaluasi dan penyusunan rencana aksi Keanekaragaman hayati. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola sebanyak 12 unit terealisasi 13%.
  - c. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan dengan anggaran sebesar Rp 149.360.300,- terealisasi sebesar Rp 1.957.900,- atau 1,31%. hal ini disebabkan karena tidak adanya tenaga KKWT menyanggupi menjadi petugas pembersihan, namun dari perencanaan mengalami peningkatan yaitu adanya Pendampingan Penyusunan rencana Aksi Pengelolaan Taman Kehati oleh BKSDA dan KLHK. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu Unit Taman Kehati diluar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 10 unit terealisasi 15%.



**5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp 150.385.360,- dan terealisasi sebesar Rp 99.480.760,- atau 66,15%. Program ini terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan sub kegiatan :
  - a. Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan anggaran sebesar Rp 60.547.500,- terealisasi sebesar Rp 24.967.000,- atau 41,24%. Hal ini di karenakan untuk kewenangan Kabupaten berupa kegiatan Perkebunan dan Peternakan sedangkan kegiatan lainnya menjadi kewenangan Pusat (KLHK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021. Keluaran (Output) Jumlah Laporan Kegiatan verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 dengan 2 laporan terealisasi 70%.
- 2) Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
  - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan dengan anggaran sebesar Rp 89.837.860,- terealisasi sebesar Rp 74.513.760,- atau 82,94% hal ini disebabkan karena tidak terealisasi dikarenakan kegiatan Rapat dan Sosialisasi dilaksanakan secara online oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dengan melibatkan perusahaan. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang bukan menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang sesuai dengan Kewenangannya sebanyak 2 dokumen laporan terealisasi 85%.

**6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

Alokasi anggaran untuk Program ini sebesar Rp 184.218.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 149.306.327,- atau 81,05%. Program ini terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin dengan sub kegiatan :
  - a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan anggaran sebesar Rp 101.426.000,- terealisasi sebesar Rp 70.257.928,- atau 69,27%. Hal ini dikarenakan diterbitkan 2 PKPLH, 2 rekomendasi SKKL 1 rekom DELH dan 6 UKL UPL yang dibahas tapi belum sampai diterbitkan PKPPLH sampai

akhir tahun anggaran. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan dengan 5 dokumen terealisasi 85%.

- b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp 82.792.700,- terealisasi sebesar Rp 79.048.399,- atau 95,48%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terealisasi 100%.

#### **7. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**

Alokasi anggaran untuk Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH sebesar Rp 57.642.300,- dan terealisasi sebesar Rp 50.982.400,- atau 88,45%. Program ini Terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan sub kegiatan :
  - a. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH dengan anggaran sebesar Rp 57.642.300,- terealisasi sebesar Rp 50.982.400,- atau 88,45%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah dokumen kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan sebanyak 1 dokumen terealisasi 85%.

#### **8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat sebesar Rp 192.693.800,- dengan realisasi sebesar Rp 183.758.777,-. Program ini Terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
  - a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp 192.693.800,- terealisasi sebesar Rp 183.758.777,- atau 95,36%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah Pendampingan Gerak Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan sebanyak 1 Dokumen terealisasi 100%.



## 9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Alokasi anggaran untuk Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat sebesar Rp 236.343.900,- dengan realisasi sebesar Rp 200.027.843,- atau 84,63%. Program ini Terdiri Dari 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan yaitu :

- 1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
  - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha / Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp 236.343.900,- terealisasi sebesar Rp 200.027.843,- atau 84,63% hal ini dikarenakan pada kegiatan pemberian penghargaan dibidang lingkungan dari Kabupaten/Kota ada penghargaan Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri yang dianggarkan untuk 15 sekolah yang mendapatkan Penghargaan 11 sekolah dan Adiwiyata Kabupaten dianggarkan 25 sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Kabupaten 19 Sekolah. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH sebanyak 1 Entitas terealisasi 100%.

## 10. Program Penanganan Pengaduan Masyarakat Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk Program Penanganan Pengaduan Masyarakat Lingkungan Hidup sebesar Rp 171.138.100,- dengan realisasi sebesar Rp 167.656.286,-. Program ini Terdiri Dari 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan yaitu :

- 1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
  - a. Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 107.074.100,- terealisasi sebesar Rp 104.997.786,- atau 98,06%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani sebanyak 1 Pengaduan terealisasi 100%.
  - b. Penerapan Sanksi Administrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp 64.064.000,- terealisasi sebesar Rp 62.658.500,- atau 97,81%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taan dan menjadi kewenangan kabupaten/kota sebanyak 1 perkara terealisasi 86%.

## 11. Program Pengelolaan Persampahan

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp 6.201.212.600,- terealisasi sebesar Rp 5.676.686.600,- atau 91,54%. Program ini Terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 5 (Lima) sub Kegiatan yaitu :

- 1) Pengelolaan Sampah dengan sub kegiatan :
  - a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan anggaran sebesar Rp 227.879.600,- terealisasi sebesar Rp 101.861.700,- atau 44,70%. dikarenakan untuk kegiatan ini bersinergi dengan OPD lain. Untuk Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah Masyarakat, kelompok Masyarakat atau Para Pihak lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat sebanyak 150 orang dan terealisasi sebanyak 140 orang atau 94,67%.
  - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 1.461.197.100,- terealisasi sebesar Rp 1.300.013.710,- atau 88,97%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilihan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir sebanyak 22 unit terealisasi 100%.
  - c. Penanganan Sampah melalui Pengangkutan dengan anggaran sebesar Rp 4.161.888.000,- terealisasi sebesar Rp 4.072.810.400,- atau 97,86%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan sebanyak 80 Ton terealisasi 100%.
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta dengan sub kegiatan :
  - a. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah dengan anggaran sebesar Rp 75.271.900,- terealisasi sebesar Rp 14.930.800,- atau 19,84%. Hal ini disebabkan karena masih terdapat beberapa kelompok swadaya masyarakat pengelola TPS 3R, Bank Sampah dan Rumah Pengomposan tidak aktif dalam pengelolaan sampah. Kelompok Masyarakat dalam pengelolaan Sampah yang melaksanakan penilaian kinerja sebanyak 4 Kelompok swadaya Masyarakat, terdiri dari Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola TPS 3R Rumah Tumbuh Kelurahan Muara Enim, Pengelola TPS 3R Desa Tebat Agung, Pengelola Bank Sampah Kirab Remaja Kelurahan Air Lintang Muara Enim, Pengelola Mesin Pemusnah Sampah TPA Bukit Kancil Muara Enim. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu Jumlah unit/usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/ Lembaga dalam Pengelolaan sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja sebanyak 4 KSM terealisasi 85%.
  - b. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah dengan anggaran sebesar Rp 274.976.000,- terealisasi sebesar Rp 187.069.990,- atau 68,03%. Target kinerja yang di tetapkan berupa Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan



Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan sampah Kabupaten/Kota terdiri dari Laporan Kebijakan dan Strategi Kabupaten dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Semester I dan Semester II) dan Laporan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota sebanyak 3 laporan terealisasi 100%.

### 3. Capaian Indikator Kinerja

Tabel 3.20 Capaian Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,94	64,35	103,89%
		1. Terpeliharanya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	57,21	53,25	93,07%
		2. Terpeliharanya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	80,18	87,34	108,92%
		3. Meningkatnya penanganan sampah	Persentase Cakupan area pelayanan persampahan (Pelayanan sampah skala Kabupaten)	34,42%	34,42%	100%
		4. Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase banyaknya pengaduan yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
			Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundang-undangan (Monev, pelaporan AMDAL, UKL/UPL, SPPL)	90%	90%	100%
			Persentase kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundang-	80%	100%	125%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			undangan (Proper)			
			Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha/ kegiatan yang mempunyai dokumen lingkungan	80%	100%	125%
			Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengendalian lingkungan (Pengelolaan sampah melalui Bank sampah /TPS3R/Pelapak)	60%	60%	100%
			Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi kriteria kota bersih, hijau dan Teduh (Adipura)	86%	85,37	99,26%
			Persentase Sekolah yang memenuhi kriteria Sekolah Adiwiyata	90%	100%	111%
		6.Meningkatnya fungsi koordinasi dalam identifikasi tutupan Vegetasi	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	36,33	40,90	112,5%
			Persentase Peningkatan Luasan Lahan yang di informasikan tingkat kerusakannya akibat produksi biomassa	60%	104,62%	174,36%
		7. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim	Persentase peningkatan lokasi Proklamasi yang melaksanakan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	75%	20%	26,6%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase peningkatan MHA yang mendapat pengakuan hak	50%	0%	0%
		8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai SAKIP SKPD	A (80)	nilai sakip opd diberi dari inspektorat, namun hingga januari 2025 belum disampaikan nilai sakip dinas lingkungan hidup sehingga belum diketahui berapa realisasi dan capaian nilai sakip tahun 2024	-

#### 4. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1.	Semakin bertambahnya jumlah Perusahaan terutama dibidang Energi dan Pertambangan serta aktivitas pendukung dan pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional di wilayah Kabupaten Muara Enim yang berakibat meningkatnya sumber pencemar di wilayah Kabupaten Muara Enim.	Meningkatkan pengawasan kepada Perusahaan dan/atau Pelaku Usaha/ Kegiatan di wilayah Kabupaten Muara Enim dengan didukung oleh anggaran dan sarana prasarana yang memadai.
2.	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Hal ini dapat dilihat dari formasi pejabat eselon IV, pejabat fungsional dan staf yang masih kosong.	Diharapkan pada tahun yang akan datang dapat dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk pengalokasian Pejabat dan staf untuk Dinas Lingkungan Hidup.



No	Permasalahan	Solusi
3.	Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional kinerja Dinas seperti lemari arsip, komputer, printer dan kendaraan operasional untuk pengangkutan sampah.	Perlu dianggarkan untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang kinerja dan operasional sesuai kebutuhan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
4.	Masih kurangnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) sehingga pengawasan terhadap usaha dan/ atau kegiatan menjadi tidak maksimal.	Perlu untuk mengirim ASN untuk mengikuti Diklat Pejabat Pengawas Lingkungan sesuai dengan kebutuhan Dinas.
5.	Perubahan peraturan dan kebijakan di Pemerintah Pusat yang membatasi kewenangan dan ruang gerak Pemerintah Daerah sehingga memerlukan petunjuk teknis ataupun aturan turunan yang lebih spesifik dan jelas ditingkat Kementerian Teknis terkait.	Diperlukan bimbingan teknis/sosialisasi terhadap peraturan dan kebijakan pemerintah pusat yang sangat berdampak pada kebijakan dan peraturan di tingkat Pemerintah Daerah.

#### 5. Penghargaan dan Prestasi

Beberapa prestasi dan penghargaan yang diperoleh dalam bidang lingkungan hidup selama tahun 2024, yaitu :

**Tabel 3.21. Penghargaan dan Prestasi Dinas Lingkungan Hidup**

No.	Nama Sekolah	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Anggaran
1.	SDN 9 Rambang	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024
2.	SDN 5 Semende Darat Laut	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024
3.	SDN 6 Lubai	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024
4.	SDN 11 Semende Darat Laut	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024
5.	SDN 10 Lubai Ulu	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024
6.	SDN 6 Lubai Ulu	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024
7.	SDN 3 Semende Darat Laut	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024
8.	SDN 2 Semende Darat Laut	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024
9.	SDN 9 Panang Enim	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024
10.	SDN 21 Gunung Megang	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024



No.	Nama Sekolah	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Anggaran
11.	SDN 4 Lubai Ulu	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024
12.	SDN 12 Lubai Ulu	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024
13.	SDN 17 Lubai Ulu	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024
14.	SDN 14 Semende Darat Laut	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024
15.	SDN 11 Panang Enim	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024
16.	SDN 2 Kelekar	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024
17.	SDN 11 Lubai	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024
18.	SDN 5 Lubai Ulu	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024
19.	SMPN 3 Muara Enim	Adiwiyata Tk Kabupaten	Bupati	2024
20.	SDN 4 Semende Darat Laut	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
21.	SDN 4 Semende Darat Tengah	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
22.	SDN 9 Semende Darat Tengah	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
23.	SDN 1 Semende darat Laut	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
24.	SDN 1 Panang Enim	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
25.	SDN 6 Panang Enim	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
26.	SDN 2 Tanjung Agung	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
27.	SDN 3 Tanjung Agung	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
28.	SDN 7 Tanjung Agung	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
29.	SDN 9 Tanjung Agung (matas)	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
30.	SDN 14 Tanjung Agung	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
31.	SDN 15 Tanjung Agung	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
32.	SDN 15 Lawang Kidul	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
25.	SDN 6 Panang Enim	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
26.	SDN 2 Tanjung Agung	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
27.	SDN 3 Tanjung Agung	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
28.	SDN 7 Tanjung Agung	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024



No.	Nama Sekolah	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Anggaran
29.	SDN 9 Tanjung Agung (matas)	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
30.	SDN 14 Tanjung Agung	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
31.	SDN 15 Tanjung Agung	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
32.	SDN 15 Lawang Kidul	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
33.	SDN 18 Lawang Kidul	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
34.	SDN 20 Lawang Kidul	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
35.	SDN 24 Lawang Kidul	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
36.	SDN 2 Muara Enim	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
37.	SDN 4 Muara Enim	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
38.	SDN 7 Muara Enim	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
39.	SDN 10 Muara Enim	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
40.	SDN 12 Muara Enim	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
41.	SDN 15 Muara Enim	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
42.	SDN 22 Muara Enim	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
43.	SDN 23 Muara Enim	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
44.	SDN 14 Rambang Niru	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
45.	SMPN 7 Muara Enim	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2024
46.	SDN 3 Panang Enim	Adiwiyata Tk Nasional	Menteri	2024
47.	SDN 5 Tanjung Agung (dulu 9 TA)	Adiwiyata Tk Nasional	Menteri	2024
48.	SDN 6 Tanjung Agung	Adiwiyata Tk Nasional	Menteri	2024
49.	SDN 12 Lawang Kidul	Adiwiyata Tk Nasional	Menteri	2024
50.	SDN 14 Lawang Kidul	Adiwiyata Tk Nasional	Menteri	2024
51.	SDN 23 Lawang Kidul	Adiwiyata Tk Nasional	Menteri	2024
52.	SDN 3 Muara Enim	Adiwiyata Tk Nasional	Menteri	2024
53.	SDN 20 Rambang Niru	Adiwiyata Tk Nasional	Menteri	2024
54.	SDN 7 Lubai Ulu	Adiwiyata Tk Nasional	Menteri	2024



No.	Nama Sekolah	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Anggaran
55.	SDN 4 Lawang Kidul	Adiwiyata Tk Mandiri	Menteri	2024
56.	SDN 16 Lawang Kidul	Adiwiyata Tk Mandiri	Menteri	2024

### **Penghargaan Di Bidang Lingkungan Sekolah Adiwiyata**

- 1) Penghargaan Adiwiyata Provinsi Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendapatkan beberapa penghargaan dibidang lingkungan, yaitu Penghargaan Nirwasita Tantra dan penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi.
- 2) Penyerahan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional dan Sekolah Adiwiyata Mandiri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 mendapat penghargaan sekolah Adiwiyata Nasional 10 (sepuluh) sekolah dan Adiwiyata Mandiri sebanyak 2 (dua) sekolah. Kabupaten Muara Enim di Tahun 2024 melalui Dinas Lingkungan Hidup yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berhasil meraih predikat Sekolah Adiwiyata Nasional sebanyak 9 (sembilan) sekolah yaitu SDN 12 Lawang Kidul, SDN 14 Lawang Kidul, SDN 20 Rambang Niru, SDN 23 Lawang Kidul, SDN 3 Muara Enim, SDN 3 Panang Enim, SDN 5 Tajung Agung, SDN 6 Tanjung Agung, SDN 7 Lubai Ulu kemudian untuk Predikat Sekolah Adiwiyata Mandiri diraih oleh SDN 16 Lawang Kidul dan SDN 4 Lawang Kidul.



## 5. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

### 1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

#### 1) Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun Anggaran 2024 alokasi belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 12.259.292.086,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.260.270.326,- atau 83,69 % dan kinerja keluaran (output) sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut

##### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 11.110.923.786,- terealisasi sebesar Rp. 9.180.804.926,- atau 82,63%, yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

##### b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 1.148.368.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.079.465.400,- atau 94,00% yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Adapun program, kegiatan, dan subkegiatan capaian kinerja program indikator sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim melaksanakan 5 Program, 15 Kegiatan, dan 37 subkegiatan antara lain yaitu :

#### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar RP. 9.173.394.546,- dengan realisasi sebesar RP. 7.791.854.949,- atau 84,94% dengan capaian kinerja output sebesar 100 %. Outcome dari Program ini adalah Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran Program ini terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan sebagai berikut.

##### 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar RP. 49.905.129,- dengan realisasi sebesar RP. 40.202.000,-. Adapun Output dari kegiatan ini adalah persentase dokumen perencanaan, dokumen penganggaran



dan evaluasi kinerja yang disusun.

- a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar RP. 12.638.000,- dan realisasi keuangan sebesar RP 9.418.000,- atau sebesar 74,52%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis dokumen RKA OPD yang disusun sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD dengan anggaran sebesar RP. 7.284.900,- dan realisasi keuangan sebesar RP 5.405.700,- atau sebesar 74,20%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis dokumen RKA Perubahan yang tersusun sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar RP. 11.062.300,- dan realisasi keuangan sebesar RP 8.995.500, atau sebesar 81,32%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis dokumen DPA OPD yang tersusun sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar RP. 13.682.929,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 11.148.400,- atau sebesar 81,48%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis dokumen DPPA OPD yang disusun sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - e. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar RP. 5.237.000, dan realisasi keuangan sebesar Rp 5.234.400,- atau sebesar 99,95%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis dokumen SAKIP perangkat daerah yang disusun sebanyak 3 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.  
Alokasi anggaran untuk kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar RP. 6.015.773.867,- dengan realisasi sebesar RP. 5.218.404.416,-. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu.
- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar RP. 5.996.214.667,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 5.207.909.516,- atau sebesar 86,85%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu selama 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar RP. 14.160.000,- dan realisasi

- keuangan sebesar RP. 5.100.000,- atau sebesar 36,02%. Adapun output/keluar dari subgkegiatan ini adalah pelaksanaan tugas ASN sebanyak 80 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar RP. 2.850.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 2.847.900,- atau sebesar 99,93%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan perangkat daerah sebanyak 1 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar RP. 2.549.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 2.547.000,- atau sebesar 99,91%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis laporan keuangan perangkat daerah sebanyak 18 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar RP. 71.313.650,- dengan realisasi sebesar RP. 68.922.053,-. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Laporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu.
- a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar RP. 71.313.650,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 68,922.053,atau sebesar 96,65%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah dan jenis barang milik daerah yang dibayarkan asuransi sebanyak 4 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Alokasi anggaran sebesar RP. 53.250.000,- dengan realisasi sebesar RP. 51.640.000,- Adapun Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis.
- a. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya dengan anggaran sebesar RP. 20.250.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 19.440.000,- atau sebesar 96,00%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah Pakaian Dinas beserta atributnya 1 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar RP. 33.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 32.200.000,- atau sebesar 97,58%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan sebanyak 4 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Alokasi anggaran sebesar RP. 2.057.782.840,- dengan realisasi sebesar RP. 1.690.077.010,- atau sebesar 82,13% Adapun Output dari kegiatan ini adalah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi.

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor RP. 12.968.700,- dan realisasi keuangan sebesar RP 12.354.000,- atau sebesar 95,19%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan sebanyak 4 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar RP. 959.140.000,- dan realisasi keuangan sebesar RP 905.545.400,- atau sebesar 94,41%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan sebanyak 2 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar RP. 25.276.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 18.644.000,atau sebesar 73,76%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang diadakan sebanyak 4 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar RP. 147.349.200,- dan realisasi keuangan sebesar RP 103.138.400,- atau sebesar 70,00%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis bahan logistik dan alat tulis kantor yang disediakan sebanyak 4 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar RP. 29.948.140,- dan realisasi keuangan sebesar RP 27.167.500,- atau sebesar 90,72 % hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan kebutuhan kantor. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 4 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- f. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar RP. 29.520.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 6.000.000,- atau sebesar 20,33% sesuai dengan tagihan surat kabar. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis surat kabar harian yang disediakan sebanyak 4 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar RP. 853.580.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 617.236.710,- atau sebesar 72.31%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 24 laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan keluar daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.  
Alokasi anggaran sebesar RP. 123.927.000,- dengan realisasi sebesar Rp 115.095.000,- Adapun Output dari kegiatan ini adalah Barang Milik Daerah yang Tersedia.
- a. Subkegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar RP. 123.927.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 115.095.000,- atau sebesar 92.87%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis kendaraan dinas yang diadakan sebanyak 2 Jenis dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
7. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.  
Alokasi anggaran sebesar RP. 519.962.000,- dengan realisasi sebesar RP. 411.940.745,- Adapun Output dari kegiatan ini adalah Jasa Penunjang Perkantoran yang tersedia.
- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar RP. 99.859.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 63.675.900,- atau sebesar 63,77% sesuai dengan tagihan PT. POS Cabang Muara Enim. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah paket pos pengiriman dokumen kependudukan dan benda pos (materai) yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar RP. 218.112.500,- dan realisasi keuangan sebesar RP 179.024.845,- atau sebesar 82,08% hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan kebutuhan kantor. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis rekening yang dibayar sebanyak Rekening 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar RP. 57.150.000,- dan realisasi keuangan sebesar RP 55.430.000,- atau sebesar 96,99%, sesuai dengan kebutuhan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah peralatan kerja yang diperbaiki sebanyak 2 jenis (Laptop dan printer) dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebesar RP. 144.840.000,- dan realisasi keuangan sebesar RP 113.810.000,- atau sebesar 78,58%. Adapun

output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah tenaga bersih dan tenaga keamanan kantor sebanyak 9 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Alokasi anggaran sebesar RP. 281.480.060,- dengan realisasi sebesar RP. 195.573.725,- Adapun Output dari kegiatan ini adalah Barang milik daerah yang terpelihara.

- a. Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar RP. 14.020.000,- dan realisasi keuangan sebesar RP 1.655.000,- atau sebesar 11,80%, direalisasikan sesuai dengan kebutuhan servis kendaraan dinas jabatan dan biaya pajak kendaraan. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah kendaraan yang dibayarkan pajak bermotor dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala sebanyak 1 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar RP. 139.250.212,- dan realisasi keuangan sebesar RP 84.588.275,- atau sebesar 60,75% direalisasikan sesuai dengan kebutuhan servis dan biaya pajak kendaraan dinas operasional. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak bermotor dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala sebanyak 10 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar RP. 100.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar RP 84.332.800,- atau sebesar 84,33%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis gedung kantor sebanyak 1 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar RP. 28.209.848,- dan realisasi keuangan sebesar RP 24.997.650,- atau sebesar 88,61%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala sebanyak 2 jenis dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2) **Program Pendaftaran Penduduk.**

Alokasi anggaran untuk Program ini sebesar RP. 2.153.480.140,- dengan realisasi sebesar RP. 1.772.346.059,- Adapun outcome dari Program ini adalah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang terpenuhi.

1) Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar RP. 1.831.169.340,- dengan realisasi sebesar RP. 1.542.574.277,- Adapun Output dari kegiatan ini adalah dokumen administrasi kependudukan yang terpenuhi.

- a. Subkegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan dengan anggaran sebesar RP. 128.119.440,- dan realisasi keuangan sebesar RP 18.756.365,- atau sebesar 14,64% hal ini dikarenakan sesuai dengan kondisi kerentanan administrasi kependudukan yang disebabkan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Muara Enim. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah sebanyak 4 Dokumen dengan capaian output/ keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan anggaran sebesar RP. 1.703.049.900,- dan realisasi keuangan sebesar RP 1.523.817.912,- atau sebesar 89,48%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah sebanyak 4 jenis dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk yang terdiri dari Kartu Keluarga sebanyak 41.046, KTP-el sebanyak 47.106, KIA sebanyak 12.716 dan Surat Pindah Datang sebanyak 7.993 serta Surat Pindah Keluar sebanyak 9.402. Dari jumlah tersebut hasil pelayanan jemput bola ke desa, sekolah, panti asuhan, pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan dil sebanyak KK 470, KTP 5.263 dan KAI 220.

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar RP. 322.310.800,- dengan realisasi sebesar RP. 229.771.782,- Adapun output dari kegiatan ini adalah dokumen kependudukan.

- a. Subkegiatan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kab/Kota dalam penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan anggaran sebesar RP. 154.500.500,- dengan realisasi sebesar RP. 93.287.280 atau sebesar 60,38%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah sebanyak 9 lembaga dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi pemangku kepentingan dan masyarakat dengan anggaran sebesar RP. 167.810.300,- dengan realisasi sebesar RP. 136.484.502 atau sebesar 81,33%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 2 dokumen inovasi tahun 2024 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%



### 3) Program Pencatatan Sipil.

Alokasi anggaran untuk Program ini sebesar RP. 563.670.700,- dengan realisasi sebesar RP. 386.409.625,- Adapun outcome dari Program ini adalah Penduduk

#### 1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar RP. 268.325.200,- dengan realisasi sebesar RP. 174.786.892,- Adapun Output dari kegiatan ini adalah Dokumen Catatan Sipil yang tersedia.

- a. Subkegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar RP. 268.325.200,- dan realisasi keuangan sebesar RP 174.786.892,- atau sebesar 65,14% hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan kebutuhan kantor. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Akta Kelahiran yang dicetak untuk masyarakat melalui jemput bola sebanyak 18.444 Akta Catatan Sipil dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

#### 2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar RP. 295.345.500,- dengan realisasi sebesar RP. 211.622.733,- Adapun Output dari kegiatan ini adalah Data Pencatatan Sipil yang terpenuhi.

- a. Subkegiatan Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil dengan anggaran sebesar RP. 295.345.500,- dan realisasi sebesar RP 211.622.733,- atau sebesar 71 ,65%. Hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran pada pengadaan sampul plastik Akta dan formulir pencatatan sipil serta penghematan perjalanan dinas. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah sebanyak 73,41% akta catatan sipil melalui pelayanan jemput bola dan inovasi pelayanan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

### 4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk Program ini sebesar RP. 286.410.300,- dengan realisasi sebesar RP. 231.779.734,- Adapun outcome dari Program ini adalah Cakupan Layanan Informasi Data Kependudukan.

#### 1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Sebesar RP. 183.700.600,- dengan realisasi sebesar RP. 146.678.534,- Adapun Output dari kegiatan ini adalah Data Kependudukan dan Jumlah Lembaga/Instansi yang memanfaatkan Data yang terakomodasi.

- a. Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 101.410.400,- dengan realisasi Rp. 94.489.458,atau sebesar 93,18%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini 1 laporan dengan capaian output/keluaran 100%.

b. Subkegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 82.290.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 52.189.076,- atau sebesar 63,42% hal ini dikarenakan adanya penghematan biaya perjalanan dinas luar daerah serta penghematan belanja makan minum yang direalisasikan sesuai harga pasar. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan data kependudukan sebanyak 2 dokumen PKS baru dan 3 PKS masih berlaku dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 102.709.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 85.101.200,- Adapun Output dari kegiatan ini adalah Koordinasi dengan lembaga pelayanan publik yang terlaksana.

a Subkegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp. 102.709.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 85.101.200,- atau sebesar 82,86% hal ini dikarenakan adanya penghematan biaya perjalanan dinas luar daerah. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah peserta sosialisasi sebanyak 250 peserta di 5 lokasi kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

**5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.**

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Sebesar Rp. 82.336.400 dengan realisasi sebesar Rp. 77.879.959,- Adapun Output dari kegiatan ini adalah cakupan profil kependudukan.

1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Sebesar Rp. 82.336.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 77.879.959,- Adapun Output dari kegiatan ini adalah Buku Profil yang disusun

a. Subkegiatan Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain dengan anggaran sebesar Rp. 82.336.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 77.879.959,- atau sebesar 94,59%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis buku yang disusun sebanyak 1 Dokumen buku profil dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

### 3. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

**Tabel 3.22 Matrik Capaian Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muara Enim 2024**

No.	Uraian Program / Kegiatan		Anggaran (Rp)	Target	Realisasi Keuangan (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi
1	2		3	4	5	6	7
1	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9,173,394,546	100%	84.94		
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49,905,129	100%	80.56		
	1	Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	12,638,000	1 dokumen	74.52		
	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	7,284,900	1 dokumen	74.20		
	3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11,062,300	1 dokumen	81.32	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar	-
	4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13,682,929	1 dokumen	81.48	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar	-
	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,237,000	3 Laporan	99.95	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar	-
	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.015.773.867	100%	86.75		
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,996,214,667	40 Orang/Bulan	86.85		
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14,160,000	80 orang	36.02		
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,850,000	1 Laporan	99.93		
	3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	71,313,650	4 Dokumen	96.65		
	1	Pengamanan Barang Milik Daerah	71,313,650	4 Dokumen	96.65		
	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53,250,000	14 Orang	96.98		
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	20,250,000	1 Paket	96.00		
	2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33.000.000	4 Orang	97.58		



No.	Uraian Program / Kegiatan		Anggaran (Rp)	Target	Realisasi Keuangan (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi
1	2		3	4	5	6	7
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,057,782,840	100%	82.13		
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12,968,700	4 Paket	95.19		
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	959,140,000	2 Paket	94.41		
	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25,276,600	4 Paket	73.76	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar	
	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147,349,200	4 Paket	70.00	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar	
	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	29,948,140	4 Paket	90.72		
	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29,520,000	4 Dokumen	20.33	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar	
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	853,580,200	24 laporan	72.31		
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123,927,000	100%	92.87		
	1	Pengadaan Mebel	123,927,000	2 Jenis	92.87		
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	519,962,000	100%			
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	99,859,500	4 Laporan	79.23	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	218,112,500	4 Laporan	63.77		
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57,150,000	4 Laporan	82.08		
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	144,840,000	4 Laporan	96.99		
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	281,480,060	100%		78.58	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.020.000	1 unit	69.48	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar	
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	139.250.212	10 unit	11.80	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan	



No.	Uraian Program / Kegiatan			Anggaran (Rp)	Target	Realisasi Keuangan (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi
1	2			3	4	5	6	7
			Dinas Operasional atau Lapangan				harga pasar	
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau bangunan lainnya	100,000,000	1 unit	60.75		
		4	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.209.848	1 Unit	84.33		
	2	Program Pendaftaran Penduduk		2,153,480,140	99%	82.30		
		1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1,831,169,340	90%	84.24		
		1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	128,119,440	4 Dokumen	14.64	Dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar	
		2	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1,703,049,900	4 dokumen	89.48		
		2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	322,310,800		71.29		
		1	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kab/Kota dalam penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	154,500,500	4 Lembaga	60.38		
		2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi pemangku kepentingan dan Masyarakat	167,810,300	2 Dokumen	81.33		
	3	Program Pencatatan Sipil		563,670,700	68%	68.55		
		1	Pelayanan Pencatatan Sipil	268,325,200	68%	65.14		
		1	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	268,325,200	3 Layanan	65.14		
		2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	295,345,500	75%	71.65		
		1	Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	295,345,500	3 Laporan	71.65		
	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		286,410,300	99%	80.93		
		1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	183,700,600	87%	79.85		



No.	Uraian Program / Kegiatan		Anggaran (Rp)	Target	Realisasi Keuangan (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi
1	2		3	4	5	6	7
		1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	101,410,400	1 Laporan	93.18	
		2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	82,290,200	2 Dokumen	63.42	
		2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	102,709,700		82.86	
		1	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	102,709,700	250 peserta	82.86	
	5		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	82.336.400		94.59	
		1	Penyusunan Profil Kependudukan	82.336.400		94.59	
		1	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan dan kebutuhan yang lain	82.336.400	1 Jenis Buku Profil	94.59	



## 6. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Urusan wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa diselenggarakan oleh perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024, alokasi belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp.42.792.699.513.**, dan terealisasi sebesar **Rp. 39.151.549.989.**, atau **91,49** persen dan kinerja keluaran (output) sebesar **100,00** persen dengan rincian sebagai berikut :

- a Belanja operasi dialokasikan sebesar **Rp. 42.225.571.177.**, terealisasi sebesar **39.155.581.989.**, atau **91,50** persen yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.
- b Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp.567.128.336.**, terealisasi sebesar **Rp.547.123.000.-** atau **96,47** persen yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan, capaian program indikator sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 2. Program kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim melaksanakan 5 program,12 kegiatan dan 46 sub kegiatan, antara lain :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran persen.
  - a Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp22.450.510,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp18.071.300,00** atau sebesar **80.49%** persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 60 buku dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
  - b Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp23.279.700,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp17.799.550,00** atau sebesar **76,46** persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 60 buku dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
  - c Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar **Rp24.311.200,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp19.823.900,00** atau sebesar **81.54%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah



Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 10 buku dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.

- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Sub kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar **Rp9.030.466.381,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp7.895.293.483,00** atau sebesar **87.43%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
  - b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar **Rp31.308.896,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp20.285.000,00** atau sebesar **64.79%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan adalah terlaksananya kegiatan administrasi lelang sebanyak 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
  - c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar **Rp11.399.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp10.385.800,00** atau sebesar **87,87** persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 5 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
  - d. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar **Rp26.806.400,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp23.861.200,00** atau sebesar **89.01%**persen adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Semesteran 5 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar **Rp40.713.750** dan realisasi keuangan sebesar **Rp40.289.375** atau sebesar **98,96** persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah asuransi kendaraan dinas sebanyak 6 unit dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
  - b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.25.040.600** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.21.690.200** atau sebesar **86,62** persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah asuransi kendaraan dinas sebanyak 9 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - a. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp175.453.000,00 dan realisasi keuangan sebesar **Rp140.252.827,00** atau sebesar **96.77%** persen adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Pelatihan pegawai sebanyak 16 orang dengan capaian output/keluaran sebesar



100,00 persen.

5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp25.209.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp23.290.000,00** atau sebesar **92.39%** persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah tersedianya komponen Listrik/ Penerangan kantor sebanyak 5 jenis dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
- b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp571.346.236,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp546.727.000,00** atau sebesar **99,73** persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 30 jenis dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
- c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar **Rp69.258.400,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp61.383.000,00** atau sebesar **88.63%** persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Alat Tulis Kantor 37 jenis dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
- d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar **Rp21.858.500,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp19.820.000,00** atau sebesar **90.67%** persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 6 jenis dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
- e. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar **Rp19.200.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp18.580.000,00** atau sebesar **99,24** persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 3 Jenis dengan capaian output/keluaran sebesar **100** persen.
- f. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar **Rp75.600.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp67.375.000,00** atau sebesar **89.12%** persen adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat sebanyak 36 Kali dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen
- g. Sub kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar **Rp827.107.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp824.853.484,00** atau sebesar **99.73%** persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya rapat sebanyak 707 OH koordinasi dan konsultasi dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen
- h. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada OPD dengan anggaran sebesar **Rp37.288.300,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp33.970.000,00** atau sebesar **91.10%** persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini



adalah terlaksananya rapat sebanyak 9 Jenis dan 9 Dokumen Kali dengan dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen

- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Subkegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar **Rp50.838.000,00** dan realisasi anggaran sebesar **Rp46.000.000,00** atau sebesar **90.48%** adapun output/keluaran sub kegiatan ini adalah kursi dan meja masingmasing sebanyak 5 buah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar **Rp6.511.600,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp5.800.000,00** atau sebesar **89.07%** persen adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen bermeterai sebanyak 400 Materai dan 12 Cek dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
  - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar **Rp193.954.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp166.708.620,00** atau sebesar **85.95%** persen adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 3 jenis rekening dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
  - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp32.780.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp30.430.000,00** atau sebesar **92.83%** persen adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 26 Laptop/Komputer dan 17 Printer dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
  - d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar **Rp218.280.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp209.720.000,00** atau sebesar **96.08%** persen adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor sebanyak 12 Bulan dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar **Rp368.337.850,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp316.942.550,00** atau sebesar **86.05%** persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Pengadaan Mebel sebanyak 8 Mobil dan 22 Motor dengan capaian output/keluaran sebesar **100** persen.



- b. Pemeliharaan/Rehabilitas gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp88.300.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp88.150.000,00** atau sebesar **99.83%** persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pengadaan Mebel sebanyak 1 Unit Gedung Kantor dengan capaian output/keluaran sebesar **100** persen.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - i. dengan anggaran sebesar **Rp36.400.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp36.320.000,00** atau sebesar **99.78%** persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Pengadaan Mebel sebanyak 45 Unit AC dengan capaian output/keluaran sebesar **100** persen.

### 3. Program Penataan Desa

Alokasi anggaran untuk Program Penataan Desa sebesar Rp 20.868.531.520,00 dengan realisasi sebesar Rp19.924.950.954,001 (Unaudited) atau 95.48% persen dengan capaian kinerja output sebesar 100,00 persen. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 2 subkegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa
  - a. Subkegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa dengan anggaran sebesar **Rp249.182.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp177.689.848,00** atau sebesar **71.31%** persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya pemekaran dusun sebanyak 5 dusun dengan capaian output/keluaran sebesar **10,00** persen.
  - b. Subkegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa dengan anggaran sebesar **Rp20.619.349.520,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp19.747.261.106,00** atau sebesar **95.77%** persen adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan sarana prasarana desa sebanyak 72 unit dengan rincian Pembangunan Balai desa 13 Unit, Pembangunan/Rehab Gedung Kantor Kades 8 Unit, Pembangunan/Rehab Pasar Desa 4 Unit, Lanjutan Interior 1 unit, Pembangunan Kantor Kades 13 Desa, Pemasangan Atap Kantor 1 Desa, Pembangunan Partisi Kantor 2 Desa, Pembangunan Pagar Kantor 20 Desa, Pemasangan Plafon 2 Desa, Pembangunan Talud Balai 1 Unit, dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.

### 4. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Kerjasama Desa sebesar Rp196.991.200,00 dengan realisasi sebesar Rp193.162.496,00 atau **98.06%**persen dengan capaian kinerja output sebesar **100,00** persen. Program ini terdiri dari **1** kegiatan dan1 subkegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Fasilitasi kerja sama antar desa
  - a. Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp193.162.496,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp193.162.496,00** atau sebesar **88,86** persen adapun



output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Pengelola BUMDesa bersama LKD sebanyak 9 Kelembagaan BUMDesa bersama LKD dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00 persen.

#### 5. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk Program Administrasi Pemerintahan Desa sebesar **Rp5.087.141.400,00** dengan realisasi sebesar **Rp4.009.603.761,00** atau **78.82%** persen dengan capaian kinerja output sebesar **100,00** persen. Program ini terdiri dari **1** kegiatan dan **10** sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
  - a. Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar **Rp518.360.500,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp442.226.950,00** atau sebesar **85.31%** persen adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa sebanyak 246 desa dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
  - b. Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan anggaran sebesar **Rp.268.362.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.255.932.351** atau sebesar **95,37** persen adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan, pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa bagi operator Siskeudes desa sebanyak 245 orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
  - c. Sub kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar **Rp950.947.600,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp890.386.993,00** atau sebesar **93.63%** persen adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sebanyak 246 Perangkat Desa dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
  - d. Sub kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa dengan anggaran sebesar **Rp181.936.200,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp160.862.800,00** atau sebesar **88.42%** persen adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan RAPBDes Desa sebanyak 246 desa dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
  - e. Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa dengan anggaran sebesar **Rp811.173.200,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp620.311.862,00** atau sebesar **76.47%** persen adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Pengelola BUM Desa sebanyak 245 BUMDes dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
  - f. Sub kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa dengan anggaran sebesar **Rp393.041.700,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp271.726.126,00** atau sebesar **69.13%** persen adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Profil Desa sebanyak 80 Desa dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.



- g. Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa dengan anggaran sebesar **Rp204.459.700,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp162.525.250,00** atau sebesar **79.49%** persen adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Pembinaan pengelola Aset Desa sebanyak 246 Orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
- h. Sub kegiatan Fasilitasi Penetapan dan penegasan Batas Desa dengan anggaran sebesar **Rp438.668.300,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp337.246.448,00** atau sebesar **76.88%** persen adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah pemasangan pilar batas desa sebanyak 5 Desa dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
- i. Subkegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan anggaran sebesar **Rp464.510.300,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp287.356.338,00** atau sebesar **61.86%** persen adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Pelaksanaan Lomba Desa sebanyak 6 Desa dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
- j. Subkegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dengan anggaran sebesar **Rp835.016.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp550.604.247,00** atau sebesar **65.94%** persen adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Pembinaan Kapasitas Aparatur Anggota BPD sebanyak 246 Orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen

#### **6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat**

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat Sebesar **Rp4.548.373.960,00** dengan realisasi sebesar **Rp4.279.223.554,00** atau **94.08%** persen dengan capaian kinerja output sebesar 100 persen. Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 7 subkegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar **Rp876.175.600,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp827.147.536,00** atau sebesar **94.40%** persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pembinaan Lembaga Adat desa sebanyak 131 Desa dan Pembinaan 25 Lembaga Adat eks marga dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
  - b. Sub kegiatan Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat dengan anggaran sebesar **Rp194.237.600,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp179.260.966,00** atau sebesar **92.29%** persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pembinaan 245



- KPM (Kader Pembangunan Manusia) dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
- c. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan anggaran sebesar **Rp355.103.220,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp348.289.024,00** atau sebesar **98.08%** persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Evaluasi KP SPAMS Desa dari 156 Desa dan Penilaian KP SPAMS Award 2024 tingkat Kabupaten capaian output / keluaran sebesar **100,00** persen.
  - d. Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan anggaran sebesar **Rp262.704.400,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp255.650.072,00** atau sebesar **97.31%**persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Inventarisasi Data Pengelola Pasar desa se Kabupaten Muara capaian output/keluaran sebesar **100.00** persen.
  - e. Sub kegiatan Fasiltasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan anggaran sebesar **Rp546.992.670,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp500.963.421,00** atau sebesar **91.59%** persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pembinaan Pengurus Posyantek desa 131 Desa dan Penilaian Posyantek Desa sebanyak 22 Kecamatan, dan Gelar Teknologi Tepat Guna 22 Kecamatan. Penilaian Tingkat Propinsi dan TTG tingkat nasional capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
  - f. Sub kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan anggaran sebesar **Rp495.166.390,00** dan realisasi keuangan sebesar Rp464.255.341,00 atau sebesar **93.76%** persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Penilaian Bulan Bhkati Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di 22 Kecamatan dan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) di 3 Desa dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
  - g. Sub kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran sebesar **Rp1.817.994.080,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp1.703.657.194,00** atau sebesar **93.71%** persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pembinaan kepada Kader PKK sebanyak 255 Desa/Kelurahan, Lomba- lomba PKK tingkat Kabupaten & Tingkat Provinsi dengan capaian output/keluaran sebesar **100.00** persen.

### 3. Capaian Indikator Kinerja

Dibuat dalam bentuk matrik sebagai berikut:

**Tabel 3.23. Matrik Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Muara Enim 2024**

Tujuan	Sasaran				Persen Capaian
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	
Meningkatkan Tata Kelola Pemberdayaan Masyarakat dan desa	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga	Persentase Bumdes yang berbadan hukum	70%	70%	100%
		Persentase Pengisian Buku Laporan Administrasi	85%	85%	88%
		Persentase Pendokumentasian aset desa	80%	80%	100%
		Persentase Penyampaian APBDes tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Desa Yang Mempunyai Peta Desa	87%	87%	96%

### 4. Permasalahan dan Solusi

- tidak ada-

### 5. Penghargaan dan Prestasi

1. Juara I. Lomba Desa Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 (Desa Sugihwaras Kec. Rambang).
2. Juara I Lomba Swadaya Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kab.Muara Enim Tahun 2023 (Desa Belimbing Kec.Belimbing)
3. Juara I Lomba KP SPAMS Desa Karang Sari kec. Lubai Ulu.
4. Juara I Lomba Cakupan Balita Ke Posyandu Tingkat Kab.Muara Enim Tahun 2023 (Desa Pajar Bulan Kec. Semende Darat Ulu).
5. Juara I Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa Tingkat Kab.Muara Enim Tahun 2023 (Desa Belimbing Kec.Belimbing).
6. Juara I Lomba Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Kategori Umum tingkat kab.Muara Enim tahun 2023. (Kec.Gelumbang)
7. Juara I Lomba Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Kategori Sekolah Tingkat Kab.Muara Enim Tahun 2023. ( Kec.Kelekar)



8. Juara I Lomba KPM Desa Berugo Kec. Belimbing Tingkat Kab.Muara Enim Tahun 2023.
9. Juara Harapan I Lomba Desa Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 (Desa Midar Kec. Gelumbang).
10. Juara II Lomba Sekolah Menengah Kejuruan Negeri II Kec.Muara Enim (TTG) Tahun 2023
11. Juara II Lomba Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Kategori Umum Tingkat Kab.Muara Enim Tahun 2023.
12. Juara II Lomba Swadaya Gotong royong Masyarakat Tingkat Kab.Muara Enim Tahun 2023 (Desa Midar Kec.Gelumbang)
13. Juara II Kader Pembangunan Manusia Berprestasi tingkat Kab.Muara Enim Tahun 2023 (Desa Lecah Kec. Lubai Ulu)
14. Juara II Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP SPAMS) Awards Tingkat Kab.Muara Enim Tahun 2023.
15. Juara II Lomba Cakupan Balita Ke Posyandu Tingkat Kab.Muara Enim Tahun 2023.
16. Juara II Lomba Desa Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 (Desa Muara Gula Baru Kec. Ujan Mas).
17. Juara Harapan II Lomba Desa Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 (Desa Sumaja Makmur Kec. Rambang Niru).
18. Juara III Lomba Cakupan balita Ke Posyandu Tingkat Kab.Muara Enim Tahun 2023.
19. Juara III Lomba Kelompok Pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi (KP SPAMS) Awards Tingkat Kab.Muara Enim Tahun 2023.
20. Juara III Lomba Desa Tingkat Kab.Muara Enim Tahun 2023 (Desa Penyandingan Kec.Semende Darat laut)
21. Juara III Kader Pembangunan Manusia (KPM) Berprestasi Tingkat Kab.Muara Enim tahun 2023
22. Juara III Perlombaan Swadaya Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kab.Muara Enim Tahun 2023.
23. Juara III Perlombaan Pos Pelayaana Teknologi (POSYANTEK) Desa Tingkat Kab.Muara Enim Tahun 2023.



## 7. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muara Enim diselenggarakan oleh perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024, alokasi belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp. 22.732.713.450,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 20.914.312.761,-** atau **92,00%** dan kinerja keluaran (output) sebesar **100%** dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp. 20.569.418.650,-** terealisasi sebesar **Rp.18.837.667.761,-** atau **91,58%** yang diarahkan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

#### b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 2.163.294.800,-** terealisasi sebesar **Rp.2.076.645.000,00,-** atau **95,99%** yang diarahkan untuk membiayai belanja modal berupa peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

### 2. Program kegiatan dan Sub Kegiatan

Adapun program dan kegiatan, capaian program indikator sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muara Enim serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut : Pada tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muara Enim melaksanakan 4 (empat) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 54 (Lima Puluh Empat) Sub Kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp.8.538.604.412,-** dengan realisasi sebesar **Rp.7.630.973.892,-** atau **89,37%**. Program ini terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.147.963.810,-** dengan realisasi sebesar **Rp.92.300.699,-** atau sebesar **62,38%**. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar **Rp.40.646.180,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.39.457.099,-** atau sebesar **97,07%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen RKA-



- SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 39.306.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.482.600,- atau sebesar 67,37%. Realisasi masih rendah dikarenakan selisih standar harga di DPA dengan harga kontrak. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 12.866.340,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.741.000,- atau sebesar 83,48%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 21.144.590,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.875.000,- atau sebesar 46,70%. Realisasi masih rendah dikarenakan selisih standar harga di DPA dengan harga kontrak dan menyesuaikan kebutuhan. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 34.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.745.000,- atau sebesar 16,90%. Realisasi masih rendah dikarenakan selisih standar harga di DPA dengan harga kontrak dan menyesuaikan kebutuhan. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 7 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.549.099.164,- dengan realisasi sebesar Rp.3.061.782.803,- atau sebesar 86,27%.
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp.3.473.473.094,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.999.657.803 atau sebesar 86,36%.  
Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 21 Orang/bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 75.626.070,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 62.125.000,- atau sebesar 82,15%.  
Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Laporan

Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD sebanyak 12 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.134.622.900,- dengan realisasi sebesar Rp.104.304.618,- atau sebesar 77,48%.
  - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang milik Daerah SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.134.622.900,- dengan realisasi sebesar Rp.104.304.618,- atau sebesar 77,48%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 2 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.105.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.70.125.000,- atau sebesar 66,79%.
  - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan anggaran sebesar Rp.105.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.70.125.000,- atau sebesar 66,79%. Realisasi masih rendah karena sesuai jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah sejumlah 8 Orang ASN yang mengikuti pelatihan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.588.728.063,- dengan realisasi sebesar Rp.2.448.991.923,- atau sebesar 94,60%.
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 3.692.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.678.000,- atau sebesar 99,62%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Komponen alat/bahan Instalasi listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan sebanyak 1 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.1.285.018.594,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.236.922.000,- atau sebesar 96,26%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan yang terdiri dari:

    - Penyimpanan perlengkapan Kantor sebanyak 20 unit.
    - Filling dan Lemari Arsip sebanyak 14 unit.
    - Alat pendingin sebanyak 3 unit.
    - Sound System Rapat sebanyak 1 set.
    - Kursi Kerja Pejabat sebanyak 1 unit.

- Kursi Tamu Ruang Pejabat sebanyak 1 set.
- Sound System sebanyak 12 unit untuk Balai Penyuluh KB di 22 Kecamatan.
- Mic Wireless sebanyak 22 set.
- Kamera sebanyak 1 unit.
- Personal Computer (Printer) + Laptop sebanyak 15 unit untuk Balai Penyuluh KB di 22 Kecamatan.
- Printer Laser sebanyak 2 unit

dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp. 66.909.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.349.500,- atau sebesar 88,70%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Komponen Peralatan Rumah Tangga yang disediakan sebanyak 1 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 105.297.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 105.208.700,- atau sebesar 99,92%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Komponen Bahan Logistik Kantor yang disediakan sebanyak 4 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp.390.564.069,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.359.988.500,- atau sebesar 92,17%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah cetakan urusan administrasi perkantoran sebesar 1 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 12.648.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.12.648.000,- atau sebesar 100%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Bahan Bacaan (koran) dan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak 8 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- g. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp.63.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.32.771.000,- atau sebesar 52,02%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah pembelian makan dan snack Rapat Koordinasi selama 6 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp 729.621.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 708.236.823,- atau sebesar 97,07%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terselenggaranya koordinasi dan konsultasi SKPD selama 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.017.025.000,- dengan realisasi sebesar Rp.964.469.800,- atau sebesar 94,83%.
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp.1.017.025.000,- dengan realisasi sebesar Rp.964.469.800,- atau sebesar 94,83%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pembangunan 2 Unit Balai Penyuluh KB (Kecamatan Lubai Ulu dan Gunung Megang) serta DED Pembangunan Gudang arsip, gudang alokon, dan ruang kerja DPPKB ngan capaian output/keluaran sebesar 100%.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.249.409.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 241.781.588,- atau sebesar 96,94%.
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp. 2.725.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.700.000,- atau sebesar 99,06%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Laporan Penyediaan jasa surat menyurat yang bermaterai sebanyak 12 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp.76.684.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 70.401.588,- atau sebesar 91,81%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran telepon, PDAM dan listrik kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Muara Enim selama 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp.170.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.168.680.000,- atau sebesar 99,22%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa tenaga kebersihan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 746.755.975,- dengan realisasi sebesar Rp.647.217.461,- atau sebesar 86,67%.
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 319.082.175,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.227.727.361,- atau sebesar 71,37%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pembayaran

- Pajak Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan sebanyak 7 Unit Kendaraan Roda 4 (empat) dan 116 Unit Kendaraan Roda 2 (dua) selama 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 401.890.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 398.920.100,- atau sebesar 99,26%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan yang terdiri dari rehabilitasi gedung Balai penyuluh KB di Kecamatan Muara Enim dan Kecamatan Lubai serta pemeliharaan gedung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 14.039.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.8.850.000,- atau sebesar 63,04%. Realisasi masih rendah karena sesuai penggunaan. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang disediakan berupa printer dan pendukung Personal Komputer dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 11.743.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.720.000 atau sebesar 99,80%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor berupa AC kantordisediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

## **2. Program Pengendalian Penduduk**

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian Penduduk sebesar Rp. 695.205.189,- dengan realisasi sebesar Rp. 607.807.197,- atau 91,37%. Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 281.434.094,- dengan realisasi sebesar Rp.247.940.100,- atau sebesar 94,92%.
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.63.886.989,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.60.668.200,- atau sebesar 94,96%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya orientasi pada sekolah siaga kependudukan serta



sarana pojok kependudukan sebanyak 6 sekolah di SMPN 1 Gunung Megang, SMPN 1 Benakat, SMPN 1 Belimbing, SMPN 3 Tanjung Agung, SMPN 1 Tanjung Agung, dan SMPN 1 Rambang Niru dengan capaian serta melaksanakan sosialisasi tingkat kabupaten sebanyak 1x dengan output/keluaran sebesar 100%.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana, dengan anggaran sebesar Rp. 217.547.105,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 187.271.900,- atau sebesar 86,08%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pengendalian Program Bangga Kencana, Rapat Koordinasi TPPS, dan Rembuk Stunting dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Muara Enim, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.383.771.095,- dengan realisasi sebesar Rp.359.867.097,- atau sebesar 93,77%.

- a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Rp.1.928.755,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.800.000,- atau sebesar 93,32%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga sebanyak 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Data Dan Informasi Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp.242.304.006,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.223.627.097,- atau sebesar 92,29%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya laporan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia sebanyak 1 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- c. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, dengan anggaran sebesar Rp.139.538.334,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 134.440.000,- atau sebesar 96.35%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya laporan Dallap dan Pelayanan KB sebanyak 12 laporan selama 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

### 3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebesar Rp.6.799.075.640,- dengan realisasi sebesar Rp.6.175.773.212,- atau 90,83%. Program ini terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan anggaran sebesar Rp. 1.756.534.529,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.457.746.313,- atau sebesar 82,99%.



- a. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK, dengan anggaran sebesar Rp.180.266.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.150.752.350,- atau sebesar 83,63%.  
Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pertemuan Audit Stunting sebanyak 4 kali dan diseminasi sebanyak 2 kali dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK, dengan anggaran sebesar Rp.1.000.416.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.761.533.763,- atau sebesar 76,12%.  
Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Operasional di Balai Penyuluh KB sebanyak 18 balai dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Program KKBPK Melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), dengan anggaran sebesar Rp.347.216.423,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.327.617.500,- atau sebesar 94,36%.  
Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pertemuan Mekanisme Operasional melalui kegiatan Pertemuan Mekanisme Operasional dan Mini Lokakarya di 22 Kecamatan sebanyak 4 kali dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - d. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta media luar ruang, dengan anggaran sebesar Rp.38.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.000.000,- atau sebesar 94,74%.  
Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Promosi Media KIE melalui Media Cetak Dan Elektronik Media dengan capaian 6 laporan serta capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - e. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan anggaran sebesar Rp. 190.635.006,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.181.842.700,- atau sebesar 95,39%.  
Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlakanaya KIE kepada Pasangan Usia Subur (PUS) selama 12 bulan oleh petugas BP4 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan anggaran sebesar Rp.2.150.214.856,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.983.287.200,- atau sebesar 92,24%.
    - a. Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, dengan anggaran sebesar



Rp.1.137.955.128,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.125.400.000,- atau sebesar 98.90%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pertemuan IMP bagi Kader PPKBD dan sub PPKBD sebanyak 1 kali dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), dengan anggaran sebesar Rp. 1.012.259.728,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 857.887.200,- atau sebesar 84,75%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Operasional bagi PPKB dan Sub PPKBD dengan jumlah Kader sebanyak 680 orang selama 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

3. Kegiatan Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp. 2.170.965.081,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.054.090.310,- atau sebesar 94,62%

a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan anggaran sebesar Rp. 615.728.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 605.324.818,- atau sebesar 98,31%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah mendistribusikan Alokasi ke-58 Faskes dan 248 Jejaring dalam Kabupaten Muara Enim dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dengan anggaran sebesar Rp. 1.374.112.781,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.317.488.130,- atau sebesar 95,88%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya pemasangan Implant sebanyak 12.661 Akseptor
- Terlaksananya pemasangan IUD sebanyak 1.590 Akseptor.

c. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya, dengan anggaran sebesar Rp.70.233.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.56.776.300,- atau sebesar 80,84%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Operasional koordinasi pembinaan pelayanan KB di Faskes dan petugas RR Faskes sebanyak 306 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

d. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria, dengan anggaran sebesar Rp.110.890.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 74.501.062,- atau sebesar 67,18%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Sosialisasi / Rapat Pembinaan dan Promosi Partisipasi Pria Dalam ber-KB bagi



Petugas Lapangan dan Kader Kelompok KB Pria dengan peserta sebanyak 7 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

4. Kegiatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan anggaran sebesar Rp.721.361.174,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 680.649.389,- atau sebesar 94,36%.
  - a. Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB, dengan anggaran sebesar Rp. 50.434.202,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47,958.345,- atau sebesar 95,09%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini pertemuan pengelolaan rumah data kampung KB dan pembinaan rumah data kampung KB sebanyak 6 kampung KB dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB, dengan anggaran sebesar Rp. 670.926.972,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 632.691.044,- atau sebesar 94,30%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini terlaksananya Pertemuan Pengelolaan Kampung KB melalui Pertemuan Pokja Kampung KB dan Pertemaun Poktan sebanyak 4 kali di 22 kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

#### **4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sebesar Rp. 6.729.828.209,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.499.758.460,- atau 96,58%. Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp.6.135.055.654,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.975.094.061,- atau sebesar 97,39%.
  - a. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) dengan anggaran sebesar Rp. 341.252.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 331.194.128,- atau sebesar 97,05%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini terlaksananya orientasi Tentang Kita bagi PKB dan anggota PIK Remaja dalam Kabupaten Muara Enim sebanyak 50 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)),



dengan anggaran sebesar Rp.1.078.266.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.054.589.502,- atau sebesar 97,80%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini 102 unit BKB KIT untuk lokus stunting dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- c. Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)), dengan anggaran sebesar Rp.205.775.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.183.217.009,- atau sebesar 89,04%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah orientasi 1.001 cara bicara sebanyak 50 anggota PKB dan kader BKR dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- d. Sub Kegiatan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) dengan anggaran sebesar Rp.253.304.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.235.520.100,- atau sebesar 92,98%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan terlaksana kegiatan edukasi 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) sebanyak 720 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- e. Sub Kegiatan Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) dengan anggaran sebesar Rp.183.183.954,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.155.005.200,- atau sebesar 84,62%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini terlaksananya sosialisasi UPPKA serta pengadaan ATTG (Alat Teknologi Tepat Guna) serta Puncak Hari Keluarga Nasional ke-30 di Kota Lubuklinggau dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)), dengan anggaran sebesar Rp. 3.530.520.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.530.520.000,- atau sebesar 100%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini tersalurkannya biaya operasional bagi Tim pendamping Keluarga sebanyak 1.401 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- g. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Rp.308.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.281.880.000,- atau sebesar 91,52%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini terlaksananya pelayanan konseling satyagraha di 18 Balai Penyuluh KB dalam Kabupaten Muara Enim dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



- h. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) dengan anggaran sebesar Rp. 234.752.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.203.168.122,- atau sebesar 86,55%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini terlaksananya penyediaan 1.000 buku Bangga Kencana untuk Kelompok Kegiatan dalam Kabupaten Muara Enim dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran sebesar Rp.594.772.555,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.524.664.399,- atau sebesar 88,21%.

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)) dengan anggaran Rp.403.549.455,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.361.691.603,- atau sebesar 89,63%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini yaitu:

- Terlaksananya peningkatan kapasitas BKB 5 angkatan dengan jumlah peserta 250 orang yang terdiri dari kader BKB dan PKB.
- Lomba Poktan BKB dan UPPKA.

Dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja dengan anggaran sebesar Rp.191.223.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.162.972.796,- atau sebesar 85,23%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini terlaksananya lomba BKR dan PIK-R tingkat Kabupaten dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

### 3. Capaian Indikator Kinerja

Dibuat dalam bentuk matrik sebagai berikut:

**Tabel 3.24 Capaian Indikator Kinerja**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,02	1,2	82%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Angka Kelahiran Total	2,4	2,2	91.67%
3.	Meningkatnya Pembangunan Keluarga	Meningkatkan Pembangunan Keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	57,56	64,88	112%

#### 4. Permasalahan dan Solusi

Dibuat dalam bentuk matrik sebagai berikut:

No	Permasalahan	Solusi
1.	Masih Kurang Optimalnya Koordinasi antar Perangkat Daerah	- Pembentukan Tim Koordinasi - Penugasan Penanggung Jawab Koordinasi - Penyelenggaraan Rapat dan Pertemuan Rutin
2.	Capaian akseptor KB Pria masih rendah.	Meningkatkan kesadaran dan pemahaman pria tentang berbagai metode kontrasepsi yang tersedia.

#### 5. Penghargaan dan Prestasi

- a. Pemenang iBangga Award tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
- b. Terbaik III Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2024.
- c. Juara 1 Total Pencapaian Pelayanan KB Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Kategori Target Total > 1.300 Akseptor.
- d. Juara I Capaian Pelayanan KB MKJP Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
- e. Juara I Total Capaian Pelayanan KB MKJP Kelompok Target >500 akseptor.
- f. Juara 1 tingkat Provinsi Lomba Poktan BKB Tahun 2024
- g. Kader BKB terbaik Tingkat Provinsi
- h. Juara 1 Nasional PIK-R Segmentasi Berani (PIK-R Gembira SMP Negeri 1 Semende Darat Laut)
- i. Juara 2 Tingkat Propinsi Sumatera Selatan BKR Percontohan Desa Sugihwaras Kecamatan Rambang



## 6. URUSAN PERHUBUNGAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN

Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan Alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp.19.477.173.903,00 ( Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Tiga Ribu Sembilan Puluh Tiga Rupiah ) dan terealisasi sebesar 17.613.071.253,00 ( Tujuh Belas Miliar Enam Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah ) atau 90,43 %.

Terdiri dari 3 (tiga) program dan 17 (Tujuh belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah meningkatkan kinerja aparatur dengan sasaran meningkatnya kinerja pelayanan OPD serta indikator sasaran berupa indeks kepuasan masyarakat. Alokasi anggaran untuk program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 11.425.027.716,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.937.362.796,00 atau 86,98 % dengan capaian kinerja output sebesar 100 % Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan sebagai berikut :

#### 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat : a) Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah; b) Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan hasil kegiatan berupa ketersediaan buku perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan sebagai akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Alokasi anggaran belanja untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar Rp.56.693.668,00 terealisasi sebesar Rp.45.011.200,00 atau 79,39 %.Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Anggaran sebesar Rp. 5.902.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.820.000,00 atau sebesar 81,67 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Buku Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim (Renja) sebanyak 1 (satu) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.



- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 9.187.706,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.812.800,00 atau sebesar 95,92 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Dokumen RKA Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim 1 (satu) Dokumen RKA dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 11.017.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.825.600,00 atau sebesar 71,03 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Dokumen RKA Perubahan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan Anggaran sebesar Rp.15.768.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.11.581.300,00 atau sebesar 73,45 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Dokumen DPA Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan Anggaran sebesar Rp.7.495.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.014.000,00 atau sebesar 80,23 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Dokumen DPA Perubahan Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dengan Anggaran sebesar Rp.3.743.562,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.365.600,00 atau sebesar 89,90 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan LKPJ Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim sebanyak 2 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Anggaran sebesar Rp.3.579.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.591.900,00 atau sebesar 72,42 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKIJIP) Tahun 2024 sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

## **2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat a) PP 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah; dan b) Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi anggaran belanja untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar Rp. 5.960.625.283 terealisasi sebesar Rp. 4.639.181.795 atau 77,83%. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:



- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Anggaran sebesar Rp. 5.943.889.983,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.625.404.195,00 atau sebesar 85,00 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa terlaksananya dan terbayarnya Gaji, TPP, ASN dan PPPK Dishub Kabupaten Muara Enim selama 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Anggaran sebesar Rp.7.811.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.6.671.000,00 atau sebesar 85,40 %. Hal ini dikarenakan pada Sub Kegiatan ini di realisasikan berupa ATK dan Cetak untuk Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan /semesteran SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 8.923.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.106.600,00 atau sebesar 79,64 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Dokumen Laporan Keuangan Bulanan sebanyak 12 Laporan Bulanan / 4 Laporan Triwulan 2 Laporan Semesteran dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

### 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa pengguna BMD berkewajiban untuk melakukan pengamanan BMD. Alokasi anggaran belanja untuk Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar Rp. 181.829.190,00 terealisasi sebesar Rp. 175.991.930,00 atau 96,79 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dengan Anggaran sebesar Rp. 181.829.190,00 terealisasi sebesar Rp. 175.991.930,00 atau 96,79 % . Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jaminan Asuransi kendaraan dinas untuk 14 unit kendaraan roda 4 dan roda 6 meliputi : 11 unit Microbus Bus,1 unit BG 8134 DZ, 1 Unit BG 8053 DZ 1 Unit BG 8129 DZ dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

### 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim. Alokasi anggaran belanja untuk Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar Rp. 343.403.500,00 terealisasi sebesar Rp. 318.426.702,00 atau 92,73 %.

Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan Anggaran sebesar Rp. 87.587.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.74.217.946,00 atau sebesar 84,74 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa ASN dan PPPK yang



mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 4 (empat) orang, 5 (Lima) ASN dan PPPK yang mengikuti Bimtek dengan sertifikat, yaitu Bimtek Penyusunan Renstra SKPD, Bimtek Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara SKPD, Diklat, Diklat Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan 37, Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 1 Tahun 2024, Bimtek Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C. dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

- b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Anggaran sebesar Rp. 238.827.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.229.778.356,00 atau sebesar 96,21 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah siswa SMU/Sederajat yang mengikuti sosialisasi Pola pembibitan sekolah ikatan dinas STTD-PTDI sebanyak 1000 (Seribu) orang dari 10 (sepuluh) sekolah yaitu SMA N 1 MUARA ENIM, SMA N 2 MUARA ENIM, SMKN 1 MUARA ENIM, SMKN 2 MUARA ENIM, SMAN 1 UJAN MAS, SMAN 1 RAMBANG, SMAN 1 LUBAI, SMAN 1 LUBAI ULU, SMKN 1 LUBAI ULU, SMKN 1 GELUMBANG dan Jumlah siswa SMU/Sederajat yang mengikuti sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas sebanyak 630 orang (enam ratus tiga puluh) orang dari 7 (tujuh) sekolah yaitu SMP IT RABBANI MUARA ENIM, SMPN 5 GUNUNG MEGANG, SMPN 1 GUNUNG MEGANG, SMPN 2 GUNUNG MEGANG, SMPN 4 GUNUNG MEGANG, MTS ROWDHOTUT TAUFIK MUARA ENIM, SMPN 4 MUARA ENIM dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- c. Sub Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan dengan Anggaran sebesar Rp. 16.989.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.430.400,00 atau sebesar 84,94 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Bimbingan Teknis Pelatihan tata cara Peraturan bari-berbaris dan sosialisasi Peraturan Perundangundangan yang berlaku kepada seluruh Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim sebanyak 212 Orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

#### **5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Perangkat Daerah. Alokasi anggaran belanja untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2024 sebesar Rp. 1.073.496.401 terealisasi sebesar Rp. 1.029.056.527 atau 95,86 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor dengan Anggaran sebesar Rp. 21.948.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.18.517.500,00 atau sebesar 84,37 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah dan



jenis komponen alat listrik/elektronik sebanyak 31 (tiga puluh satu) jenis yaitu sebagai berikut : dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

**Tabel 3.25 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan  
Bangunan Kantor**

No	Nama Barang	Banyaknya	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp
1	Baterai Ukuran Kecil	45 Buah	10.000	450.000
2	Baterai Alkalin 3A	22 Buah	18.000	396.000
3	Baterai Besar	45 Buah	9.000	405.000
4	Baterai Kotak	22 Dus	15.000	330.000
5	Bola Lampu TL 18 Watt	25 Buah	31.000	775.000
6	Clam Kabel 10 mm	17 Per Bungkus	13.500	229.500
7	Clam Kabel 12mm	4 Per Bungkus	15.500	62.000
8	Isolasi 3 m	5 M	13.500	67.500
9	Kabel Tiss 20 cm	9 Per Bungkus	30.000	270.000
10	Klem Kabel	18 Buah	22.000	396.000
11	Piting Lampu	21 Buah	29.000	609.000
12	Sakeral Engkel Panasonic	2 Buah	40.000	80.000
13	Sakeral Seri Panasonic	6 Buah	54.000	324.000
14	Stop Kontak+Inbo Dus	1 Set	38.000	38.000
15	Stop Kontak Panasonic	7 Buah	30.000	210.000
16	Lampu LED 30 Watt	20 Buah	200.000	4.000.000
17	Senter LED	3 Buah	210.000	630.000
18	Stater Lampu	20 Buah	11.000	220.000
19	Stekker Lampu	8 Buah	18.000	144.000
20	Stop Kontak	47 Buah	26.500	1.245.500
<b>UPTD PKB Muara Enim</b>				
1	Lampu Emergency	5 Buah	192.000	960.000
2	Senter LED	2 Buah	210.000	420.000
3	Stabilizier	1 Buah	555.000	555.000
4	Stekker Lampu	8 Buah	18.000	144.000
5	Tespen Listrik	1 Buah	32.000	32.000
<b>UPTD Terminal Muara Enim</b>				
1	Breaker 32 A	1 Buah	799.000	799.000
2	Kabel NYM 2 X 2,5 mm	180 Meter	22.000	3.960.000
3	Kabel NYY HY 0,75	10 Meter	7.500	75.000
4	Panel Box 40 x 50 x 20	1 Buah	555.000	555.000
5	Pilot 25/10	2 Buah	27.500	55.000
6	Secum 25/10	9 Buah	9.000	81.000
	<b>Jumlah</b>			<b>18.517.500,-</b>



- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan Anggaran sebesar Rp. 55.109.601,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.073.500,00 atau sebesar 99,93 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah peralatan kantor dan alat rumah tangga sebanyak 36 item berupa alat kebersihan Kantor, bahan kimia untuk pembersih, bahan pembersih lainnya dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik dengan Anggaran sebesar Rp. 137.825.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 109.384.900,00 atau sebesar 79,36 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Alat Tulis Kantor sebanyak 40 jenis, Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 2 jenis berupa BBM kendaraan Kepala Dinas dan BBM Mesin Genset, mesin Rumput dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Anggaran sebesar Rp. 30.448.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.566.000,00 atau sebesar 87,25 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah barang cetak dan penggandaan sebanyak 12 (dua belas) jenis berupa Cetak Amplop, Cetak buku kas umum, cetak bend 16 penerimaan, cetak surat tanda setoran, cetak bend 26 kertas ncr & ds warna, cetak lembar disposisi, Cetak map rapat, Cetak Spanduk, Cetak Kwitansi, cetak kop surat, Cetak Amplop Dinas dan Cetak Lainnya dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Bacaan dan peraturan Perundang-undangan dengan Anggaran sebesar Rp. 10.808.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.10.600.000,00 atau sebesar 98,08 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah dan jenis surat kabar yg berlangganan sebanyak 6 (enam) jenis berupa Surat Kabar/Majalah Belanja Harian Lokal, Majalah/Tabloid dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 787.033.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 779.889.627,00 atau sebesar 99,09 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Laporan hasil perjalanan dinas sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) berkas laporan notulen rapat dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- g. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 30.322.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.025.000,00 atau sebesar 95,72 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Kelengkapan Penyimpanan Arsip yang tersedia sebanyak 4 (empat) jenis yaitu Rak Arsip Dokumen / Rak filing cabinet / Rak Besi Lubang dengan capaian

output/keluaran sebesar 100%.

## **6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Perangkat Daerah sesuai amanat Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Alokasi anggaran belanja untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2024 sebesar Rp. 448.085.000 terealisasi sebesar Rp. 443.840.000 atau 99,05 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan Anggaran sebesar Rp.68.990.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.68.400.000,00 atau sebesar 99,14%. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Mabellair Lainnya sebanyak 5 (Lima) unit Yaitu Kursi Tunggu 4 Set , Meja Kursi Tamu Kayu, Kursi Kerja, Kursi Rapat, Meja Kerja dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 264.095.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.261.210.000,00 atau sebesar 98,91 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Laptop Acer sebanyak 2 (dua) Jenis / 25 Unit yaitu alat bantu lainnya, alat angkutan darat bermotor, alat komunikasi lainnya peralatan komunikasi navigasi, Personal Komputer, Peralatan Komputer, dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- c. Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 115.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.114.230.000,00 atau sebesar 99,36 %.Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Gudang Arsip sebanyak 1 (Satu) Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

## **7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan operasional dan administrasi perkantoran Alokasi anggaran belanja untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2024 sebesar Rp. 2.819.714.166 terealisasi sebesar Rp. 2.773.389.492 atau 98,36 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Anggaran sebesar Rp. 4.038.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.330.00,00 atau sebesar 82,46 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Materai sebanyak 285 lembar dan Pembelian Cek hanya bisa direalisasikan sebanyak 5 (lima) buku sesuai dengan kebutuhan, dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik dengan Anggaran sebesar Rp. 233.401.450,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.213.509.492,00 atau sebesar 91,48 %. Adapun keluaran



- (output) dari sub kegiatan ini terbayarnya tagihan air, tagihan listrik dan internet/wifi/TV untuk Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Kantor UPTD PKB Muara Enim, Kantor UPTD Pengelolaan Terminal Muara Enim, Kantor UPTD Pengelolaan Terminal Lawang Kidul, dan Terminal Sp. Kodim Muara Enim selama 12 (dua belas) bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- c. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Anggaran sebesar Rp. 30.654.216,00 dan realisasi keuangan sebesar 18.700.000,00 atau sebesar 61,00 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah AC yang dirawat/diservice sebanyak 12 unit, dan peralatan computer dan printer yang di perbaiki/dirawat sebanyak 10 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
  - d. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Anggaran sebesar Rp.2.551.620.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.537.850,00 atau sebesar 99,46%. Adapun keluaran (Output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Tenaga Kerja Waktu Tertentu (TKWT) Dishub Kab.Muara Enim / Tenaga Non ASN sebanyak 188 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

#### **8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Perangkat Daerah sesuai amanat Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Alokasi anggaran belanja untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2024 sebesar Rp. 541.180.508 terealisasi sebesar Rp. 512.465.150 atau 94,69 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Jabatan dengan Anggaran sebesar Rp. 217.534.350,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 195.253.000,00 atau sebesar 89,76 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah kendaraan dinas jabatan yg dirawat, diservice dan pembayaran pajak tahunan, 5 tahunan (STNK,BPKB) sebanyak 5 unit kendaraan
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Anggaran sebesar Rp. 323.646.158,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 317.212.150,00 atau sebesar 98,01 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yg dirawat, diservice dan pembayaran pajak tahunan, 5 tahunan (STNK,BPKB,KIR) sebanyak 15 unit kendaraan roda 4 dan roda 6 yaitu : %.

## 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Tujuan program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Adalah untuk meningkatnya Insfrastruktur Suprastruktur Dasar yang Berkualitas Secara Merata dan Mendukung Terwujudnya Jalan Tol Muara Enim - Indralaya - Palembang serta indikator sasaran berupa Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik. Alokasi Anggaran untuk program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sebesar Rp. 6.913.205.287,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.542.218.343,00 atau 94,63 % dengan capaian kinerja output sebesar 100 %. Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 20 (dua Puluh) sub kegiatan sebagai berikut :

### 1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota di bidang Perhubungan Alokasi Anggaran belanja untuk Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota tahun 2024 sebesar Rp. 2.960.768.200 terealisasi sebesar Rp. 2.926.195.161 atau 98,83 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten Kota dengan Anggaran sebesar Rp. 74.257.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 69.322.450 atau 93,35 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa 1 unit Halte dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota dengan Anggaran sebesar Rp. 1.160.989.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.143.987.440 atau 98,54 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa terpasangnya Rambu Lalu Lintas sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit, Rambu Lalu Lintas Portable sebanyak 3 (tiga) unit, terpasangnya Guardrail sebanyak 40 (empat puluh) set, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sebanyak 2 unit dan Zona Selamat Sekolah sebanyak 17 paket dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.
- Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan Anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.556.000,00 atau sebesar 98,52 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa 1 Unit Halte dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan Anggaran sebesar Rp. 1.695.521.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.683.329.271,00 atau sebesar 99,28 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa jumlah Marka yang direhabilitasi dan dipelihara sebanyak 8.726,133 meter, Jumlah Rambu lalu lintas yang direhabilitasi dan dipelihara sebanyak 30 unit dan Jumlah Warning Light yang yang direhabilitasi dan dipelihara sebanyak 11 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.



## **2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Terpenuhinya Dokumen Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota Muara Enim. Alokasi Anggaran belanja sebesar Rp. 81.755.000 terealisasi sebesar Rp. 76.163.000 atau 93,16 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang dengan Anggaran sebesar Rp. 50.000.000 terealisasi sebesar Rp. 49.889.000 atau 99,78 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa 2 (Dua) Unit Pembangunan Mushola dan Ruang Menyusui dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- Sub Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung) dengan Anggaran sebesar Rp. 50.000.000 terealisasi sebesar Rp. 49.889.000 atau 99,78 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa 1 Unit Pemeliharaan Instalasi Listrik Exs Terminal Samping Kodim dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

## **3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Terpenuhinya Dokumen Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Muara Enim. Alokasi Anggaran belanja untuk Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir tahun 2024 sebesar Rp. 52.417.100 terealisasi sebesar Rp. 51.841.200 atau 98,90%. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Anggaran sebesar Rp. 52.417.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 51.841.200,00 atau sebesar 97,59 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah peserta Sosialisasi Petugas Juru Parkir sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang peserta Juru Parkir Kecamatan Muara Enim dan Kec. Lawang Kidul dan 150 (seratus lima puluh) buah rompi Scoth Light dan kegiatan ini dilakukan di UPTD Kec. Lawang Kidul dan Kantor Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

## **4. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Kegiatan ini dilaksanakan Terpenuhinya Kendaraan Lulus Uji di Bidang Perhubungan. Alokasi Anggaran belanja untuk Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tahun 2024 sebesar Rp. 703.692.687 terealisasi sebesar Rp.676.477.620 atau 96,13 %. Keluaran (output) dari masing-



masing sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Anggaran sebesar Rp. 98.355.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 91.732.000,00 atau sebesar 93,27 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa EV Dynamo Meter, Insulation meter 1000 V AC/DC, Multi meter/volmeter 1000 V AC/DC, Scanner / Scantools OBD 11, Tangmeter 1000 V AC/DC, Thermometer Gun, Tools listrik 500-1000 V Alat pelindung Lainnya aprod dada, helm, kacamata, masker, sarung tangan, sepatu karet. dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %. Sarana dan prasarana tersebut dibeli untuk kelengkapan peralatan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
- Sub Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Anggaran sebesar Rp. 75.568.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 66.346.000,00 atau sebesar 87,80%. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Penguji sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Diklat Pengujian kendaraan Bermotor Dasar dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Anggaran sebesar Rp. 47.781.087,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.43.178.500,00 atau sebesar 90,37 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa ATK dan Fotocopy serta Kartu Induk Mobil Barang sebanyak 200 Lembar, kartu induk mobil bus sebanyak 122 lembar dan Alat Tulis Kantor sebanyak 12 jenis dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Anggaran sebesar Rp. 62.500.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 62.500.000,00 atau sebesar 100 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah BLUe (Bukti Lulus Uji Elektronik) berupa Kartu Uji sebanyak 2500 set dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan Anggaran sebesar Rp.13.533.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.13.521.400,00 atau sebesar 99,32%. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Identifikasi kendaraan yang diidentifikasi sebanyak 50 kendaraan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dengan Anggaran sebesar Rp.366.508.700,00 dan realisasi keuangan sebesar



Rp.364.024.340,00 atau sebesar 99,32%. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini Pemeliharaan alat uji/ Kalibrasi sebanyak 1 kali pada 9 (Sembilan) yaitu Pemeliharaan Generator set, pemeliharaan alat uji headlight tester, alat uji pit whell suspension tester ,alat ujinCO-HC tester , alat uji sound level tester, alat uji bogie roller, alat uji tint tester, alat uji diesel smoke tester, alat uji slide slip, alat uji speedometer tester, alat uji brake tester Axie Load Tester, dan Pemeliharaan Air Compressor dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

- Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Anggaran sebesar Rp. 39.446.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.35.175.380,00 atau sebesar 89,17 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan berupa Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 2 (dua) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

#### **5. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini dilaksanakan Terwujudnya Lalu Lintas yang Tertib dan Lancar di bidang Perhubungan. Alokasi Anggaran belanja untuk Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota tahun 2024 sebesar Rp. 1.589.480.500 terealisasi sebesar Rp. 1.292.473.766 atau 81,31 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan Anggaran sebesar Rp. 1.490.549.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.212.917.096,00 atau sebesar 81,37 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Petugas pengendalian lalu lintas, angkutan dan parkir yang bertugas di dalam/luar kecamatan Muara Enim, sebanyak 60 orang, Jumlah Petugas Pelaksana Layanan Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru sebanyak 220 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota dengan Anggaran sebesar Rp.36.859.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.518.770,00 atau sebesar 85,51 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Laporan Notulen Rapat sebanyak 3 (tiga) laporan dengan peserta Dinas /Instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan Kab. Muara Enim, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Satlantas Polres Muara Enim, Satpol PP, PT. KAI, Organda Kab. Muara Enim dan PT. Jasa Raharja dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

- Sub Kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota dengan Anggaran sebesar Rp. 62.071.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.037.900,00 atau sebesar 77,39 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa 3 (Tiga) laporan terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

**6. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini dilaksanakan Terpenuhinya Rekomendasi Hasil Andalalin Alokasi Anggaran belanja untuk Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota tahun 2024 sebesar Rp. 70.576.500 terealisasi sebesar Rp. 66.688.247 atau 94,49 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin dengan Anggaran sebesar Rp. 70.576.500 terealisasi sebesar Rp. 66.688.247 atau 94,49 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Buku Penilaian Hasil Andalalin sebanyak 5 (lima) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

**7. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**

Kegiatan ini dilaksanakan Terpenuhinya Laporan Hasil Audit Lalu Lintas dan Angkutan. Alokasi Anggaran belanja untuk Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan tahun 2024 sebesar Rp. 61.029.800 terealisasi sebesar Rp. 60.723.300 atau 99,50 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, audit dan pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Anggaran sebesar Rp. 61.029.800 terealisasi sebesar Rp. 60.723.300 atau 99,50 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Kendaraan yang diuji petik sebanyak 100 (seratus) kendaraan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

**8. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini dilaksanakan Tersedianya Angkutan Orang dan atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Alokasi Anggaran belanja untuk Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota tahun2024 sebesar Rp. 1.393.485.500 terealisasi sebesar Rp. 1.391.656.049 atau 99,87 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran sebesar Rp. 1.393.485.500 terealisasi sebesar Rp. 1.391.656.049 atau 99,87 %. Adapun keluaran



(output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah BBM yang tersedia pengadaan Bus Sekolah sebanyak 1 (satu) unit 2,sewa Bus Haji untuk pengantaran dan penjemputan jamaah haji dari muara enim ke Palembang, (solar dan pertalite) untuk kendaraan Bus Rapid Trans, bus sekolah dan Mobil Derek dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

### **3. Program Pengelolaan Pelayaran**

Tujuan program Pengelolaan Pelayaran adalah Terciptanya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau yang Murah, Mudah dan Selamat. Alokasi Anggaran untuk program Pengelolaan Pelayaran sebesar Rp. 476.219.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 467.094.200,00 atau 98,08 % dengan capaian kinerja output sebesar 100 %. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Tersedianya Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau di bidang Perhubungan Alokasi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau tahun 2024 sebesar Rp. 1.138.940.900 terealisasi sebesar Rp. 1.133.490.114 atau 99,52 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga sungai dan danau dengan Anggaran sebesar Rp. 988.940.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 984.670.114,00 atau 99,57 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa 4 (empat) Unit bangunan dermaga di Desa kayu ara batu kec. Muara belida , desa Siku kec. Empat petulai dangku, dsn talang kapuk desa patra tani kec. Muara belida, desa mulya abadi kec. Muara belida dan tambatan Perahu/Tambatan Apung desa sukarami kec. Sungai rotan sebanyak 4 (empat) unit di dusun 1 2 unit, dusun 4 1 unit dan dusun 3 1 unit dengan capaian kinerja output sebesar 100 %.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Dermaga sungai dan danau dengan Anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 74.446.000,00 atau 99,26 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Perawatan dan Pengecetan penggantian pipa dan pemasangan atap dan instalasi listrik serta pelataran parkir seluas 148,24 M dengan capaian kinerja output sebesar 100 %.

### **2. Capaian Indikator Kinerja**

Sesuai dengan target kinerja sasaran dalam renstra, capaian indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 3.26 Matrik Capaian Indikator Kinerja  
Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

Tujuan	Uraian	Sasaran			% Capaian
		Indikator	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
Terciptanya Pelayanan Transportasi yang Mudah, Murah, Cepat, Aman, Nyaman dan Selamat.	1.Meningkatnya Ketertiban Berlalulintas di Jalan	1. Rasio Izin Trayek	0,01	0,01	100 %
		2. Persentase Angkutan Laik Jalan	94	94	100 %
	3. Lama Proses Pengujian Kelayakan Kendaraan	20	20	100 %	
	2.Meningkatnya Kuantitas, kualitas sarana dan prasarana transportasi	4. Jumlah Kendaraan yang di uji berkala per tahun	2.450	2.315	94,48 %
		5. Jumlah terminal angkutan Umum	2	2	100 %
		6. Jumlah Angkutan Umum yang Tersedia	13	13	100 %
		7. Jumlah Panjang Jalan per-jumlah kendaraan	0.00672	0,00559	83,18 %
8. Jumlah orang yang terangkut angkutan umum		474.000	496.313	105 %	
	9. Jumlah Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum yang tersedia	2	2	100 %	

Tujuan	Uraian		Sasaran		Realisasi	% Capaian
			Indikator	Target		
1	2		3	4	5	6
		10.	Jumlah Fasilitas Tempat Khusus Parkir	1	4	400 %
		11.	Jumlah Orang melalui terminal pertahun	215.040	169.400	78,77%
		12.	Persentase Layanan Angkutan Sungai	50	50 %	100%
		13.	Persentase Ruas Jalan yang dilengkapi Kelengkapan Jalan	60	40%	66,66%

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, tahun 2024

Secara Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, hal ini dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerjanya sesuai Renstra Perangkat Daerah. Namun masih ada beberapa indikator yang capaian kinerjanya dibawah 80 % yaitu :

- a) Jumlah Orang melalui terminal per-tahun
- b) Persentase Ruas Jalan yang dilengkapi Kelengkapan Jalan

### 3. Kegiatan dan Inovasi

Kegiatan dan inovasi yang dilaksanakan pada tahun 2024 yaity Berpartisipasi dalam rangka pengukuran indeks inovasi daerah (IID) Tahun 2024 / Inovative Government Award (IGA) Kabupaten Muara Enim.



## 9. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh perangkat daerah Dinas komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2024, alokasi belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim sebesar

**Rp. 28.586.806.264,-** terealisasi sebesar **Rp.27.357.025.071,10,-** atau **95,70 %** dan kinerja keluaran (*output*) sebesar **100%** dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp.27.268.243.144,-** terealisasi sebesar **Rp.26.055.666.151,10,-** atau **95,55%** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

#### b. Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan sebesar **Rp.1.318.563.120,-** terealisasi **Rp. 1.301.358.920,-** atau **98,70 %** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

### 2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

#### 1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar **Rp.27.739.462.264,-** dan terealisasi sebesar **Rp.26.515.016.464,10,-** atau **95,59%**

Terdiri dari 3 Program, 11 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Sebesar **Rp.8.453.049.874,-** dengan realisasi sebesar **Rp.7.909.243.911,10,-** atau **93,57%** program ini terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan sebagai berikut :

##### a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sebesar **Rp.46.976.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp.44.645.400,-** atau **95,04%** kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD  
Alokasi anggaran sebesar **Rp.20.236.000,-** dan realisasi keuangan



sebesar **Rp.19.944.200,-** atau sebesar **98,56%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD

Alokasi anggaran sebesar **Rp.8.238.700,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.7.498.700,-** atau sebesar **91,02%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD

Alokasi anggaran sebesar **Rp.4.819.000,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.563.500,-** atau sebesar **94,70%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD  
Alokasi anggaran sebesar **Rp.2.500.000,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.2.375.000,-** atau sebesar **95,00%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Alokasi anggaran sebesar **Rp.5.143.000,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.855.000,-** atau sebesar **94,40%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang ditargetkan sebanyak 12 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah

Alokasi anggaran sebesar **Rp.6.039.800,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.5.409.000,-** atau sebesar **89,56%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditargetkan sebanyak 5 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

#### **b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sebesar **Rp.4.687.025.704,-** dengan realisasi sebesar **Rp.4.183.083.845,-** atau **89,25%**. Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan yaitu antara lain:

- Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Alokasi anggaran sebesar **Rp.4.675.100.604,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.171.934.145,-** atau sebesar **89,24%**. Adapun



output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ditargetkan sebanyak 34 Orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Alokasi anggaran sebesar **Rp.6.241.400,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.5.775.200,-** atau sebesar **92,53%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD Alokasi anggaran sebesar **Rp.5.683.700,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.5.374.500,-** atau sebesar **94,56%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang ditargetkan sebanyak 2 laporan keuangan semesteran dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

**c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah sebesar **Rp.36.377.250,-** dengan realisasi sebesar **Rp.36.175.857,10,-** atau **99,45%**. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan antara lain :

- Sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.36.377.250,-** dengan realisasi sebesar **Rp.36.175.857,10,-** atau **99,45%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

**d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar **Rp.76.500.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.76.161.500,-** atau **99,56%**. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan antara lain :

- Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Alokasi anggaran sebesar **Rp.76.500.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.76.161.500,-** atau **99,56%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah SDM yang mengikuti bimtek/pelatihan yang ditargetkan sebanyak 14 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

**e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebesar **Rp.1.834.519.640,-** dengan realisasi **Rp.1.811.989.321,-** atau **98,77%**. Kegiatan ini terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan antara lain :

- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor  
Alokasi anggaran sebesar **Rp.31.530.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.31.191.000,-** atau **98,92%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ditargetkan sebanyak 1 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor  
Alokasi anggaran sebesar **Rp.604.594.400,-** dengan realisasi sebesar **Rp.590.239.700,-** atau **97,63%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dan jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 10 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga  
Alokasi anggaran sebesar **Rp. 62.388.040,-** dengan realisasi sebesar **Rp.61.997.000,-** atau **99,37%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 3 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor  
Alokasi anggaran sebesar **Rp.133.426.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.128.550.000,-** atau **96,35%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 2 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan  
Alokasi anggaran sebesar **Rp.44.261.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp.42.320.000,-** atau **95,61%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 1 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  
Alokasi anggaran sebesar **Rp.13.574.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.13.030.000,-** atau **95,99%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang ditargetkan sebanyak 10 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu  
Alokasi anggaran sebesar **Rp.3.996.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.3.960.000,-** atau **99,10%**. Adapun output/keluaran dari sub

kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu yang ditargetkan sebanyak 12 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Alokasi anggaran sebesar **Rp.940.749.700,-** dengan realisasi sebesar **Rp.940.701.621,-** atau **99,99%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang ditargetkan sebanyak 150 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

**f. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Alokasi anggaran untuk kegiatan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar **Rp.521.968.720,-** dengan realisasi **Rp.520.228.720,-** atau **99,67%**. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan antara lain :

- Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

Alokasi anggaran sebesar **Rp.290.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.288.800.000,-** atau **99,59%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 1 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- Sub kegiatan pengadaan Mebel

Alokasi anggaran sebesar **Rp.231.968.720,-** dengan realisasi sebesar **Rp.231.428.720,-** atau **99,77%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 2 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

**g. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Alokasi anggaran untuk kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar **Rp.262.718.160,-** dengan realisasi **Rp.258.282.580,-** atau **98,31%**. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

- Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Alokasi anggaran sebesar **Rp.9.517.200,-** dengan realisasi sebesar **Rp.9.423.500,-** atau **99,02%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang ditargetkan sebanyak 2 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Alokasi anggaran sebesar **Rp.132.840.960,-** dengan realisasi sebesar **Rp.128.499.080,-** atau **96,73%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang harus dibayar yang ditargetkan

sebanyak 3 rekening dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor  
Alokasi anggaran sebesar **Rp.120.360.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.120.360.000,-** atau 100%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang ditargetkan sebanyak 3 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

**h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Alokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar **Rp.986.963.900,-** dengan realisasi **Rp.978.676.688,-** atau 99,16%. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan  
Alokasi anggaran sebesar **Rp.299.253.900,-** dengan realisasi sebesar **Rp.297.874.455,-** atau 99,54%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan yang dibayar pajak yang ditargetkan sebanyak 19 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya  
Alokasi anggaran sebesar **Rp.639.300.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.632.587.233,-** atau 98,95%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara yang ditargetkan sebanyak 1 unit gedung kantor dan bandengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya  
Alokasi anggaran sebesar **Rp.24.950.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.24.815.000,-** atau 99,46%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/rehabilitasi ditargetkan sebanyak 35 unit yaitu pemeliharaan personal komputer/laptop, printer dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya  
Alokasi anggaran sebesar **Rp.23.460.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.23.400.000,-** atau 99,74%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/rehabilitasi yang ditargetkan sebanyak 2 unit yaitu pemeliharaan AC dan pemeliharaan instalasi listrik dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

## 2. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Alokasi anggaran untuk program informasi dan komunikasi publik sebesar Rp. 7.868.107.040,- dengan realisasi Rp.7.826.318.594,- atau 99,47%. program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 7 (Tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

### a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 7.868.107.040,- dengan realisasi Rp.7.826.318.594,- atau 99,47%. Kegiatan ini terdiri dari 7 (Tujuh) sub kegiatan berikut :

- Sub kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik  
Alokasi anggaran sebesar Rp.244.635.500,- dengan realisasi sebesar Rp.243.968.850,- atau 99,73%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- Sub kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik  
Alokasi anggaran sebesar Rp.843.801.100,- dengan realisasi sebesar Rp.834.950.202,- atau 98,95%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik yang ditargetkan sebanyak 5 dokumen yaitu melalui baliho, spanduk, leaflet, billboard, majalah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- Sub kegiatan pengelolaan media komunikasi publik  
Alokasi anggaran sebesar Rp.405.717.740,- dengan realisasi sebesar Rp.395.043.603,- atau 97,37%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- Sub kegiatan pelayanan informasi publik  
Alokasi anggaran sebesar Rp.147.676.900,- dengan realisasi sebesar Rp.146.936.863,- atau 99,50%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- Sub kegiatan layanan hubungan media  
Alokasi anggaran sebesar Rp.54.228.700,- dengan realisasi sebesar Rp.53.038.213,- atau 97,80%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah layanan hubungan media yang ditargetkan sebanyak 1 layanan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- Sub kegiatan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik  
Alokasi anggaran sebesar Rp.177.322.600,- dengan realisasi sebesar

**Rp.172.633.946,-** atau **97,36%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya yang ditargetkan sebanyak 450 orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- Sub kegiatan penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunikasi

Alokasi anggaran sebesar **Rp.5.994.724.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp.5.979.746.917,-** atau **99,75%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan yang ditargetkan sebanyak 7 dokumen adventorial yaitu majalah, media online, media TV, media tv greetings, surat kabar harian/mingguan, media buku, media kanal (online) yaitu dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

### **3. Program Aplikasi Informatika**

Alokasi anggaran untuk program aplikasi informatika sebesar **Rp.11.418.305.350,-** dengan realisasi **Rp.10.779.453.959,-** atau **94,41%**. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan sebagai berikut :

#### **a. Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.**

Alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp.9.500.908.400,-** terealisasi sebesar **Rp.8.885.313.900,-** atau **93,52%**. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah dengan anggaran sebesar **Rp.9.500.908.400,-** dengan realisasi sebesar **8.885.313.900,-** atau **93,52%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah yang ditargetkan sebanyak 5 unit yaitu bandwich Internet, metro ethernet, Internet Via Vsat, Collocation, firewall dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

#### **b. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp.1.917.396.950,-** terealisasi sebesar **Rp.1.894.140.059,-** atau **98,79%**. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah  
Alokasi anggaran sebesar **Rp.551.866.700,-** dengan realisasi sebesar



- Rp.551.292.362,-** atau **99,90%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen SPBE dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- Sub kegiatan pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik  
Alokasi anggaran sebesar **Rp.372.361.850,-** dengan realisasi sebesar **Rp.361.452.170,-** atau **97,07%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan yang ditargetkan sebanyak 2 aplikasi dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
  - Sub kegiatan pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas  
Alokasi anggaran sebesar **Rp.438.399.400,-** dengan realisasi sebesar **Rp.431.126.900,-** atau **98,34%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai masterplan smart city yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
  - Sub kegiatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah  
Alokasi anggaran sebesar **Rp.554.769.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.550.268.627,-** atau **99,19%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

## 2. Urusan Bidang Statistik

Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar **Rp.428.423.800,-** terealisasi **Rp. 427.205.098,-** atau **99,72%**. Terdiri dari 1 Program, 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### 1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan statistik sektoral sebesar **Rp.428.423.800,-** terealisasi **Rp. 427.205.098,-** atau **99,72%**.

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota sebesar **Rp.428.423.800,-** terealisasi **Rp. 427.205.098,-** atau **99,72%**.

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :



- Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral Alokasi anggaran sebesar **Rp.316.396.400,-** dengan realisasi sebesar **Rp.316.178.152,-** atau **99,93%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral yang ditargetkan sebanyak 3 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi dengan anggaran sebesar **Rp.112.027.400** dengan realisasi sebesar **Rp.111.026.946,-** atau **99,11%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi yang ditargetkan sebanyak 200 orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

### 3. Urusan Bidang Persandian

Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar **Rp.418.920.200,-** terealisasi **Rp.414.803.509,-** atau **99,02%**.

Terdiri dari 1 Program, 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Alokasi anggaran untuk program program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi sebesar **Rp.418.920.200,-** terealisasi **Rp.414.803.509,-** atau **99,02%**. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

##### a. Kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 298.397.900,-** terealisasi **Rp. 294.769.763,-** atau **98,78%**. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

##### - Sub kegiatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik

Alokasi anggaran sebesar **Rp.174.385.300,-** dengan realisasi sebesar **Rp.173.921.000,-** atau **99,73%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik yang di targetkan sebanyak 4 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

##### - Sub kegiatan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

Alokasi anggaran sebesar **Rp.124.012.600,-** dengan realisasi sebesar



**Rp.120.848.763,-** atau **97,45%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditargetkan sebanyak 57 OPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- b. Kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota.

Alokasi anggaran untuk kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota sebesar **Rp. 120.522.300,-** terealisasi **Rp. 120.033.746,-** atau **99,59%**. Kegiatan ini terdiri dari 1 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- Sub kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Alokasi anggaran sebesar **Rp. 120.522.300,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 120.033.746,-** atau **99,59%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi yang ditargetkan sebanyak 57 OPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

### 3. Capaian Indikator Kinerja

**Tabel 3.27 Matrik Capaian Indikator Kinerja  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
1.	Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3	3,29	100%
2.		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Informasi Publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	100%	100%	100%

### 4. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1.	Masih terdapatnya daerah sinyal lemah dan blankspot	Melakukan koordinasi ke Kementerian Kominfo melalui Direktorat telekomunikasi dan memberikan data teknis beserta pendukung desa-desa yang masih dalam kondisi sinyal lemah dan blankspot, melakukan survey bersama



No	Permasalahan	Solusi
		dengan penyelenggara telekomunikasi/ provider ke desa-desa yang potensial untuk di bangun Base Transceiver Station (BTS) baru. Sesuai kewenangan pemerintah daerah sebagai salah satu cara untuk mengatasi desa sinyal lemah dan blankspot Dinas Kominfo SP memfasilitasi jaringan internet desa bagi 256 desa dan kelurahan se Kabupaten Muara Enim, 24 UPTD Puskesmas yang berada di Kecamatan serta 15 UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah yang berada di Kecamatan.
2.	Lemahnya standar keamanan informasi	Meningkatkan keamanan informasi dengan standar manajemen keamanan informasi.

## 5. Penghargaan dan Prestasi Tahun 2024

Beberapa prestasi yang diperoleh sebagai berikut :

- a. Penghargaan dari Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia diberikan kepada LPPL Radio Suara Muara Enim Sumatera Selatan sebagai Radio Peduli Pariwisata.
- b. Penghargaan dari Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia diberikan kepada LPPL Radio Suara Muara Enim Sumatera Selatan sebagai Radio Peduli UMKM dan Kuliner.
- c. Penghargaan dari PPID Utama Provinsi Sumatera Selatan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim Predikat Baik Sekali SLIP AWARD Tahun 2024.
- d. Penghargaan dari TVRI Sumatera Selatan diberikan kepada Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim sebagai Mitra Terbaik Kerjasama PNBP TVRI SUMSEL AWARDS



## **7. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH OLEH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

### **1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muara Enim di tahun 2024 melaksanakan 7 Program dan 14 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar RP. 12.852.036.494,- dan terealisasi sebesar RP. 11.468.160.353,- atau 89,23%, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasional sebesar RP. 11.544.013.794,- terealisasi RP. 10.171.077.847,- atau 88,11%.
- b. Belanja Modal sebesar RP. 1.308.022.700,- terealisasi RP. 1.297.082.506,atau 99,16%.

### **2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Terdiri dari 7 Program, 14 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar RP. 166.128.600,- dengan realisasi sebesar RP. 134.408.300,- atau 80,91 persen.
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar RP. 56.311.400,- dan terealisasi sebesar RP. 38.531.100 atau 68,43 persen.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, alokasi sebesar RP. 18.582.900,- dengan realisasi sebesar RP. 17.511.200,- atau 94,23 persen.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, alokasi sebesar RP. 18.101.200,- dengan realisasi sebesar RP. 17.720.500,atau 97,90 persen.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD, alokasi sebesar RP. 18.599.900,- dengan realisasi sebesar RP. 18.146.800,- atau 97,56 persen.
- f. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD, alokasi sebesar RP. 16.193.700,- dengan realisasi sebesar RP. 15.700.500,- atau 96,95 persen.
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi sebesar RP. 38.339.500,- dengan realisasi sebesar RP. 26.798.200,- atau 69,90 persen.
- h. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar sebesar RP. 4.934.655.654,- dengan realisasi RP. 4.530.793.690,- atau 91,82 persen.
- i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi sebesar RP.4.897.046.454,- dengan realisasi sebesar RP 4.494.470.690 atau 91 ,78 persen.
- j. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, alokasi sebesar RP. 5.147.000,- dengan realisasi sebesar RP. 4.518.500,atau 87,79 persen.
- k. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar RP. 32.462.200,- dan realisasi RP. 31.804.500,- atau 97,97 persen.



- l. Administrasi Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar RP. 38.390.800,- dan realisasi sebesar RP. 38.264.900,- atau 99,67 persen. Pengamanan Barang Milik Daerah alokasi sebesar RP. 38.390.800,- dengan realisasi sebesar RP. 38.264.900,- atau 99,67 persen.
- m. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar RP. 45.000.000,- dengan Realisasi sebesar RP. 8.875.000,- atau 19,72 persen.
- n. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, alokasi sebesar RP. 45.000.000,- dengan realisasi sebesar RP. 8.875.000,- atau 19,72 persen.
- o. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar RP. 1.014.708.180,- dengan Realisasi sebesar RP. 928.895.974,- atau 91,54 persen.
- p. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor, alokasi sebesar RP. 5.652.500,- dengan realisasi sebesar RP. 5.633.400,atau 99,66 persen.
- q. Peralatan Rumah Tangga,alokasi sebesar RP. 9.516.880,- dengan realisasi sebesar RP. 7.233.500,- atau 76,01 persen.
- r. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, alokasi sebesar RP. 76.639.100,- dengan realisasi sebesar RP. 67.681.100,- atau 88,31 persen.
- s. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, alokasi sebesar RP. 72.670.000,- dengan realisasi sebesar RP. 70.453.400,- atau 96,95 persen.
- t. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, alokasi sebesar RP. 9.597.000,- dengan realisasi sebesar RP. 9.390.000,- atau 97,84 persen.
- u. Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar RP. 68.040.000,- dengan realisasi sebesar RP. 2.100.000,- atau 3,09 persen.
- v. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi sebesar RP. 772.592.700,- dengan realisasi sebesar RP. 766.404.574,atau 99,20 persen.
- w. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar RP. 1.319.190.700,- dan realisasi sebesar RP. 1.308.082.500,- atau 99,16 persen
- x. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi sebesar RP. 719.072.700,- dengan realisasi sebesar RP. 714.031.000,- atau 99,30 persen.
- y. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi sebesar RP. 500.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar RP. 494.201.500,atau 98,84 persen.
- z. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi sebesar RP. 100.118.000,- dengan realisasi sebesar RP. 99.850.000,- atau 99,73 persen.
- aa. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Alokasi Anggaran sebesar RP. 204.423.160,- dengan Realisasi sebesar RP. 143.765.900,atau 70,33 persen. Jasa Surat Menyurat, alokasi sebesar RP. 4.984.100,- dengan realisasi sebesar RP. 4.800.000,- atau 96,31 persen.



- bb. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi sebesar RP. 173.759.060,- dengan realisasi sebesar RP. 123.985.900,- atau 71 persen.
- cc. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi sebesar RP. 25.680.00,- dengan realisasi sebesar RP. 14.980.000,- atau 58,33 persen.
- dd. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Alokasi Anggaran sebesar RP. 367.320.900,- dengan Realisasi sebesar RP. 330.041.302,- atau 89,85 persen.
- ee. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi sebesar RP. 308.076.452,- dan realisasi anggaran sebesar RP. 271.017.302,- atau 87,97 persen.
- ff. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi sebesar RP. 29.684.600,- dengan realisasi sebesar RP. 29.605.000,- atau 99,73 persen.
- gg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi sebesar RP. 29.559.848,- dengan realisasi sebesar RP. 29.419.000,- atau 99,52 persen.

## **2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**

- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP/USP yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran sebesar RP. 108.437.000,- dengan Realisasi sebesar RP. 79.555.894,- atau 73,37 persen. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi sebesar RP. 108.437.000,- dengan realisasi sebesar RP. 79.555.894,- atau 73,37 persen.

## **3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**

- a. Penilaian Kesehatan Koperasi, KSP/USP yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota, Alokasi Anggaran sebesar RP. 95.107.000,- dengan realisasi sebesar RP. 36.773.400,- atau 38,67 persen. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi sebesar RP. 95.107.000,- dengan realisasi sebesar RP. 36.773.400,- atau 38,672 persen.

## **4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran sebesar RP. 381.786.700,- dengan realisasi sebesar RP. 363.401.199,- atau 95,18 persen.
- b. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi sebesar RP. 381.786.700,- dengan realisasi sebesar RP. 363.401.199,atau 95,18 persen.



### 5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

- a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran sebesar RP. 1.315.833.100, dengan realisasi sebesar RP. 1.074.493.717,- atau 81 persen. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi sebesar RP. 1.315.833.100,- dengan realisasi sebesar RP. 1.074.493.717, atau 81 ,66 persen.

### 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM).

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan dengan alokasi anggaran sebesar RP. 1.126.401.400,- dan realisasi sebesar RP. 958.256.116,- atau sebesar 85,07 persen.
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro, alokasi sebesar RP. 805.202.900,- dengan realisasi sebesar RP. 740.465.354,- atau 91,96 persen.
  - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro dengan alokasi anggaran sebesar RP. 235.662.700,- dengan realisasi sebesar RP. 161.414.662,- atau 68,49 persen.
  - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro, alokasi sebesar RP. 85.535.800, dengan realisasi sebesar RP. 56.376.100,- atau 65,91 persen.

### 7. Program Pengembangan UKM

- a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan alokasi anggaran sebesar RP. 1.734.653.300,- dengan realisasi sebesar RP. 1.532.552.461,- atau 88,35 persen.
- Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi, alokasi sebesar RP. 1.734.653.300,- dengan realisasi sebesar RP. 1.532.552.461, atau 88,35 persen.

## 3. Capaian Indikator Kinerja

Tabel 3.28 Matrik Capaian Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1 .	Meningkatkan kualitas Koperasi dan IJMK	Meningkatkan kualitas Koperasi dan UMK	a. Persentase Koperasi Sehat	22,30	12,91	57,89
			b. Persentase UMK Naik Kelas	16,34	30,02	183,72



#### 4. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1 .	Belum optimalnya capaian kinerja Koperasi Sehat	<ol style="list-style-type: none"><li>Meningkatkan peran pengurus koperasi dalam melaksanakan RAT.</li><li>Melakukan pendampingan usaha dalam meningkatkan volume dan jangkauan usaha.</li><li>Meningkatkan kapasitas pengurus koperasi melalui pelatihan dan sosialisasi.</li><li>Meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan koperasi melalui pendampingan penyusunan laporan keuangan.</li></ol>
2.	Realisasi keuangan pada beberapa subkegiatan masih ada yang kurang dari 85% antara lain : <ol style="list-style-type: none"><li>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.</li><li>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</li><li>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.</li><li>Penyediaan Surat Menyurat</li><li>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li></ol>	Tidak tercapainya realisasi keuangan pada beberapa subkegiatan tersebut karena pengeluaran belanja yang digunakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga meskipun realisasi keuangan di bawah 85% namun realisasi fisik tetap terlaksana 100%. Telah dilakukan penyusunan anggaran secara cermat berdasarkan kebutuhan di tahun anggaran 2025.

#### 5. Penghargaan dan Prestasi

Menerima penghargaan Bhakti Koperasi Tahun 2024 a.n H. Husin Aswadi, S.E, M.M, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muara Enim dari Kementerian Koperasi dan IJKM Republik Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2024.



## 11. URUSAN PENANAMAN MODAL OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024, alokasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 13.372.191.845 dan terealisasi sebesar Rp. 11.069.180.245 atau 82,78% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 12.616.622.955 terealisasi sebesar Rp. 10.384.736.209 atau 82,31% yang dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

#### b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 755.568.890 terealisasi sebesar Rp. 754.825.900 atau 99,90% yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

### 2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun anggaran 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 program, 14 kegiatan, dan 41 sub kegiatan yaitu:

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 9.597.305.131 dengan realisasi sebesar Rp. 8.337.875.281 atau sebesar 86,88% dengan capaian kinerja output sebesar 100,00%. Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan sebagai berikut: 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

##### Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 25.517.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.007.500 atau sebesar 90,16%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen RKA-SKPD tahun 2025 dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 15.670.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.012.000 atau sebesar 89,42%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2024 dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.
- c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 22.552.700 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.622.500 atau



- sebesar 95,88%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen DPA-SKPD dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 8.668.700 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.690.800 atau sebesar 88,72%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.
  - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 7.733.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.324.400 atau sebesar 81,78%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen LPPD dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 81,78%, hal ini dikarenakan adanya penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja.
  - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 14.245.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.850.000 atau sebesar 83,19%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen Renstra, Renja, IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan LKJIP SKPD dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 83,19%, hal ini dikarenakan adanya penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 5.523.541.391 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.631.434.198 atau sebesar 83,85%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya 32 Orang ASN per bulan yang menerima Gaji dan Tunjangan dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 83,85%, hal ini dikarenakan dianggarkan untuk ASN pegawai baru.
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp. 28.080.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.120.000 atau sebesar 50,28%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 50,28%, hal ini dikarenakan adanya pergeseran kode rekening belanja sehingga hanya dapat direalisasikan pada APBD Perubahan tahun 2024 (3 bulan).
  - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 10.267.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.019.000 atau sebesar 87,84%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah 10 Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 50.601.880 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.336.000 atau sebesar 95,52%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah 6 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 148.519.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 124.763.041 atau sebesar 84,00%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah asuransi kendaraan dinas roda empat dan asuransi pengamanan gedung kantor. Terhadap realisasi keuangan mencapai 84,00%, hal ini dikarenakan adanya penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja.
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.285.000 atau sebesar 65,71%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah sebanyak 42 ASN yang mengikuti diklat/bimtek/dan sejenisnya dari target sebanyak 20 orang ASN berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan capaian output / keluaran sebesar 210%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 65,71%, hal ini dikarenakan adanya penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja.
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 46.433.088 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.633.500 atau sebesar 85,36%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah komponen/instalasi listrik untuk penerangan kantor, dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.
    - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 408.904.971 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 394.144.500 atau sebesar 96,39%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah peralatan dan perlengkapan kantor antara lain belanja rak besi arsip, speaker dan soundsystem MPP dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.
    - c. Penyediaan Bahan Logistik dengan anggaran sebesar Rp. 187.700.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 149.620.700 atau sebesar 79,71%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini antara lain belanja alat tulis kantor, bbm genset dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 79,71%, hal ini

- dikarenakan adanya penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja.
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 143.906.100 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 143.341.000 atau sebesar 99,61%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 10.600.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.610.000 atau sebesar 43,49%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah buku peraturan perundang-undangan dan media cetak harian surat kabar dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 43,49%, hal ini dikarenakan adanya penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja.
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 822.464.651 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 758.299.185 atau sebesar 92,20%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini berupa Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 499.602.900 atau sebesar 99,92%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pembangunan pagar Gedung kantor, Pembangunan rooftop lantai 2 dan pagar stainless, dan Pembangunan post pengamanan yang disediakan dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Penyediaan Jasa Surat - Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 5.988.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.093.920 atau sebesar 85,07%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini berupa pembelian materai, dan jasa pengiriman surat menyurat dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 378.501.510 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 278.632.106 atau sebesar 73,61%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah pembayaran rekening Listrik, rekening air, dan telepon/internet untuk keperluan kantor dengan capaian output / keluaran sebesar 100%, hal ini dikarenakan pengeluaran belanja sesuai dengan tagihan PLN, PDAM, dan Telkom.
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 812.891.285 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 810.491.244 atau

sebesar 99,70%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah pembayaran jasa outsourcing pengamanan kantor dan kebersihan kantor penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 150.697.255 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 122.086.787 atau sebesar 81,01%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah membiayai pemeliharaan dan pembayaran pajak bagi 14 Unit kendaraan dinas (roda empat dan roda dua) dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 81,01%, hal ini dikarenakan biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak sesuai dengan tagihan yang dikeluarkan oleh pihak penyedia jasa.
  - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 13.260.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.809.100 atau sebesar 96,60%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah pemeliharaan operasional mesin genset kantor dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.
  - c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 65.400.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 65.400.000 atau sebesar 100,00%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah pemeliharaan rutin gedung kantor dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.
  - d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 59.660.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.010.000 atau sebesar 80,47%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah pemeliharaan rutin peralatan kerja (komputer, printer, running text, dan ups) dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 80,47%, hal ini dikarenakan adanya penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja.
  - e. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 60.500.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.635.900 atau sebesar 73,78%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah pemeliharaan AC dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 73,78%, hal ini dikarenakan adanya penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja.

## **B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Alokasi anggaran Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp. 982.612.768 dengan realisasi sebesar Rp. 852.361.358 atau sebesar 86,74% dengan capaian kinerja output sebesar 100,00%. Terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
  - a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 210.574.568 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 173.927.767 atau sebesar 82,60%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Standar Pelayanan (SP) dan Dokumen rancangan Keputusan Kepala DPMPTSP tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Produk Layanan Perizinan dan Nonperizinan dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 82,60%, hal ini dikarenakan adanya efisiensi dan penghematan dalam pembiayaan tim tenaga ahli penyusunan dokumen.
  - b. Fasilitas Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 157.883.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 124.442.731 atau sebesar 78,82%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen Kesepakatan kemitraan antara usaha besar (PMDN) dengan BUMDes, fasilitas peningkatan kompetensi pelaku usaha dan sosialisasi program kemitraan serta rapat fasilitas dan evaluasi pelaksanaan kemitraan usaha dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 78,82%, hal ini dikarenakan adanya penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja.
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota
  - a. Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) dengan anggaran sebesar Rp. 190.793.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 140.156.473 atau sebesar 73,46%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah pemutakhiran data potensi investasi regional (PIR) koneksi/link aplikasi bedah investasi pada website DPMPTSP serta melakukan upgrade website DPMPTSP dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 73,46%, hal ini dikarenakan Belanja Jasa Tenaga Ahli hanya dapat direalisasikan sebanyak 2 (dua) bulan (APBD Perubahan 2024).
  - b. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 423.361.100 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 413.834.387 atau sebesar 97,75%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksanya Dokumen profil potensi unggulan dan peluang investasi Kabupaten Muara Enim dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.



### C. Program Promosi Penanaman Modal

Alokasi anggaran Program Promosi Penanaman Modal sebesar Rp. 660.146.600 dengan realisasi sebesar Rp. 469.878.929 atau sebesar 71,18% dengan capaian kinerja output sebesar 100,00%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota
  - a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 475.147.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 340.537.022 atau sebesar 71,67%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah dokumen laporan dan keikutsertaan dalam kegiatan promosi penanaman modal di Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Nasional dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 71,67%, hal ini dikarenakan Provinsi Sumatera Selatan tidak menyelenggarakan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Tingkat Provinsi tahun 2024.
  - b. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 184.999.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 129.341.907 atau sebesar 69,91%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah penyusunan dokumen Potensi dan Peluang Investasi, penyusunan dokumen IPRO (*Investment Project Ready to Offer*) dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 69,91%, hal ini dikarenakan adanya penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja.

### D. Program Pelayanan Penanaman Modal

Alokasi anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp. 1.093.519.488 dengan realisasi sebesar Rp. 731.418.675 atau sebesar 66,89% dengan capaian kinerja output sebesar 100,00%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 123.267.700 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 94.323.710 atau sebesar 76,52%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal pusat dan daerah kepada pelaku usaha dan OPD Teknis terkait dalam Kabupaten Muara Enim dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 76,52%, hal ini dikarenakan adanya penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja.
  - b. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik



- dengan anggaran sebesar Rp. 661.113.088 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 416.478.296 atau sebesar 63,00%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam Kabupaten Muara Enim, sosialisasi pembuatan NIB kepada Pelaku Usaha sebanyak 50 Pelaku Usaha dan jemput bola dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 6.453 NIB dari target 1.415 NIB tahun 2024. Terhadap realisasi keuangan mencapai 63,00%, hal ini dikarenakan adanya penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja.
- c. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan anggaran sebesar Rp. 248.004.900 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 161.961.820 atau sebesar 65,31%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah penyelenggaraan fasilitasi konsultasi dan penanganan pengaduan bagi pelaku usaha terkait perizinan dan non perizinan serta pembuatan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM Online) dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 65,31%, hal ini dikarenakan adanya penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja.
  - d. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan anggaran sebesar Rp. 61.133.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 58.654.849 atau sebesar 95,95%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi komitmen perizinan berusaha berbasis risiko dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.

#### **E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Alokasi anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 699.432.220 dengan realisasi sebesar Rp. 470.678.170 atau sebesar 67,29% dengan capaian kinerja output sebesar 100,00%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Penyelesaian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp. 75.986.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 56.710.740 atau sebesar 74,63%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah fasilitasi penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) kepada pelaku usaha dan fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya baik melalui klinik LKPM di MPP maupun pendampingan di lapangan atau di Lokasi usaha dengan capaian output / keluaran sebanyak 7 Kegiatan Usaha dari target 5 Kegiatan Usaha atau sebesar 140% tahun 2024. Terhadap realisasi keuangan mencapai 74,63%, hal ini dikarenakan belanja jasa Narasumber tidak



dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu dari narasumber yang direncanakan.

- b. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 294.033.220 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 176.933.950 atau sebesar 60,17%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah penyelenggaraan bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko kepada 90 Pelaku Usaha dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 60,17%, hal ini dikarenakan belanja jasa Narasumber dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu dari narasumber yang direncanakan.
- c. Pengawasan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 329.412.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 237.033.480 atau sebesar 71,96%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah melaksanakan pengawasan perizinan berusaha terkoordinasi dan terintegrasi dengan OPD Teknis terhadap 25 Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha, melaksanakan rapat-rapat Analisa dan verifikasi data profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha, melakukan rapat-rapat evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha, melaksanakan sosialisasi penilaian kepatuhan pelaku usaha melalui LKPM, melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan Top 10 atas LKPM Pelaku Usaha, melaksanakan pemantauan realisasi investasi penanaman modal dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 71,96%, hal ini dikarenakan adanya penghematan dan efisiensi belanja khususnya biaya transportasi dan akomodasi Narasumber tidak dapat direalisasikan karena dilaksanakan secara *daring/zoom*.

F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Alokasi anggaran Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar Rp. 339.175.638 dengan realisasi sebesar Rp. 206.967.832 atau sebesar 61,02% dengan capaian kinerja output sebesar 100,00%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
  - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 339.175.638 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 206.967.832 atau sebesar 61,02%. Adapun output / keluaran dari sub kegiatan ini adalah penyusunan laporan capaian jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tahun 2024, penyusunan laporan jumlah persetujuan bangunan Gedung (PBG) tahun 2024, penyusunan laporan jumlah nomor induk berusaha



(NIB) tahun 2024, pembuatan aplikasi system antrian pengunjung MPP, melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Aplikasi siCantik Cloud kepada 50 tenaga Kesehatan dan tenaga medis dengan capaian output / keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan mencapai 61,02%, hal ini dikarenakan adanya penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja.

### 3. Capaian Indikator Kinerja

Tabel 3.29 Matrik Capaian Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Iklim, Investasi, dan Pelayanan Prima	Meningkatnya Peluang Investasi	Jumlah Kajian Pemetaan Potensi Investasi	1 Kajian	1 Kajian	100%
			Jumlah Promosi / Pameran yang diikuti	2 Event	7 Event	350%
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri	931 M	5.535 M *	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Ketepatan Waktu Perizinan	1.350 NIB	6.463 NIB	478,74%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (rata-rata/ tahun)	85	91,83	108,03%

Keterangan: \* Data sampai dengan bulan September 2024 (TW III 2024)

Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM RI

### 4. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1.	DPMPTSP masih dibebankan target penerimaan retribusi PBG sedangkan sesuai dengan ketentuan baik PP 6 tahun 2021, Permendagri 138 tahun 2017 maupun Perpres 97 tahun 2014 seharusnya tidak di bebaskan target penerimaan retribusi PBG	Diusulkan kiranya anggaran target penerimaan retribusi PBG dialihkan ke Dinas Teknis (Dinas PUPR)



No	Permasalahan	Solusi
2.	Masih adanya Pelayanan perizinan dari OPD Teknis yang belum bergabung di MPP Kabupaten Muara Enim	Penempatan petugas pelayanan perizinan OPD Teknis di MPP Kabupaten Muara Enim

## 5. Penghargaan dan Prestasi

1. Predikat Kualitas Tertinggi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI (Nilai 89,19)
2. Top 10 Inovasi Daerah Kategori Perangkat Daerah dalam Rangka Penilaian Asistensi Inovasi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024



## 12. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA OLEH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Alokasi Anggaran Pendapatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Adalah Sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** terealisasi sebesar **Rp. 438.755.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima puluh lima ribu rupiah)** atau 43,88%

Alokasi Anggaran belanja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **64.539.634.850,05,- ( Enam Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah koma 5 sen)** dan terealisasi sebesar **Rp. 51.006.019.932,00 (Lima Puluh satu milyar Enam Juta sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah)** atau 79,03% dan kinerja keluaran (output) sebesar 98,78% Persen dengan rincian sebagai berikut :

#### A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp. 43.787.004.865,05 ( Empat Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah koma lima Sen)** terealisasi sebesar **Rp. 30.897.469.031,- (Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah)** atau 70,56 % yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, Belanja Hibah dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

#### B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 20.752.629.985,- (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)** terealisasi sebesar **Rp. 21.104.201.438,- (Dua Puluh Satu Milyar Seratus Empat Juta Dua Ratus Satu ribu Empat ratus tiga puluh delapan rupiah )** atau 101,69 % Persen yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

### 2. Program kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2024 Dinas **Kepemudaan dan Olahraga** Kabupaten Muara Enim melaksanakan 4 program dan 15 kegiatan, dan 44 Subkegiatan yaitu

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp 16.293.797.608,00 (Enam Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 14.336.609.955,00 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh lima rupiah)** atau 87,99% Persen program ini terdiri dari 7 kegiatan, dan 25 Subkegiatan



sebagai berikut :

**1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 18.125.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.519.200,00 atau sebesar 96,65%. adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah dokumen RKA - SKPD Dengan capaian output/ keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 18.224.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.015.200,00 atau sebesar 87,88 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah dokumen perubahan RKA SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 13.906.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.685.100,00 atau sebesar 84,02 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah dokumen DPA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- d. Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 30.962.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.863.000 atau sebesar 99,68 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah dokumen perubahan DPA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- e. Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 20.074.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.071.300,00 atau sebesar 99,98 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen
- f. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 38.930.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.560.500,00 atau sebesar 93,91 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah tersedianya Laporan Capaian Kinerja dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

**2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 5.550.206.019,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.638.131.578,00 (Unaudited) atau sebesar 83,57 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji ASN dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp 24.324.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.324.300,00 atau sebesar 100



Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen

- c. Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp 12.799.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.654.900,00 atau sebesar 98,87 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan semesteran dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen

### **3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp 171.107.584,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.362.066,00 atau sebesar 16,58 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

### **4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp 59.086.650,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.115.000,00 atau sebesar 79,74 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 901.380.475,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 828.210.000,00 atau sebesar 91,88 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jenis perlengkapan kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 281.335.950,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 186.133.600,00 atau sebesar 66,18 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah bahan logistik kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 54.647.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.916.000,00 atau sebesar 93,17 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- e. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 14.400.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.225.000,00 atau sebesar 43,23 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.



- f. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 79.254.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.625.000,00 atau sebesar 4,57 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- g. Subkegiatan Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 803.746.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 474.460.627,00 atau sebesar 59,03 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- a. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp 60.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 57.900.000,00 atau sebesar 99,50 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Lanjutan Pembangunan gedung kantor dengan capaian output/keluaran 100 persen.
- b. Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Jasa Konsultan Pengawasan Gedung Kantor) sebesar Rp 100.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.705.000,00 atau sebesar 99,71 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Lanjutan Pembangunan gedung kantor dengan capaian output/keluaran 100 persen.
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp.16.184.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.000.000,00 atau sebesar 49,43 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dokumen bermaterai dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik sebesar Rp. 806.766.860,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 680.680.584,00 atau sebesar 84,37 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian output/keluaran 100 persen.
- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 64.782.288,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.560.000,00 atau sebesar 76,50 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah peralatan kantor yang diperbaiki dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar 1.272.600.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.190.830.000,00



atau sebesar 93,57 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan waktu penyediaan jasa keamanan kantor dan jasa kebersihan kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

**7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 272.062.010,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 258.702.000,00 atau sebesar 95,09 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen,
- b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp.8.889.772,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.860.000,00 atau sebesar 99,67 Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah perlengkapan yang disediakan jasa pemeliharaan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

**2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Alokasi anggaran untuk program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar Rp 5.230.084.993,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.464.566.696,00 atau 66,24 Persen program ini terdiri dari 2 kegiatan, dan 6 Subkegiatan sebagai berikut.

1. Penyadaran , Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
  - a. Subkegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula dengan anggaran sebesar Rp 1.427.201.533,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.122.624.063,00 atau sebesar 78,66 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah pelatihan manajemen kewirausahaan pemuda dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 1.291.616.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 909.063.790,00 atau sebesar 70,38 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah peserta jamboree tingkat kabupaten dan provinsi, sumpah pemuda CUP dengan realisasi capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - c. Subkegiatan Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah / RAD Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 503.999.600,00 dan realisasi keuangan sebesar



Rp.252.928.909,00 atau sebesar 50,18 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Dokumen Penyusunan RAD dengan realisasi capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

- d. Subkegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda Yang Berjasa dan/atau Berprestasi dengan anggaran sebesar Rp 1.472.695.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 772.246.510,00 atau sebesar 52,44 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah penerima beasiswa dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- e. Subkegiatan Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Sukarelawan Pemuda dengan anggaran sebesar Rp 261.177.480,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 165.075.032,00 atau sebesar 63,20 Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah jumlah pesertra yang mengikuti pelatihan pemuda tanggap bencana dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

2. Pemberdayaan dan Pembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

- a. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp 273.394.080,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 242.628.392,00 atau sebesar 88,75 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah pelatihan manajemen kewirausahaan pemuda dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

**3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**

Alokasi anggaran untuk program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebesar Rp 42.158.158.009,05 dengan realisasi sebesar Rp. 32.382.313.207,00 atau 76,81 Persen program ini terdiri dari 5 kegiatan, dan 11 Subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar dengan anggaran sebesar Rp 1.422.219.445,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.284.039.596,00 atau sebesar 90,28 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah tersedianya sarana dan pendidikan dasar dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 25.547.674.093,05 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.928.981.097,00 atau sebesar 97,58 Persen.



Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah tersedianya sarana dan prasarana olahraga dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Subkegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 1.516.920.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.154.585.858,00 atau sebesar 76,11 Persen. Adapun output/keluaran pada subkegiatan ini adalah atlet/pelajar di Kabupaten Muara Enim dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dengan anggaran sebesar Rp.4.214.387.150,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.529.238.536,00 atau sebesar 36,29 Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah jumlah atlet yang mengikuti Partisipasi dan Keikutsertaan jumlah peserta yang terpilih seleksi dan kegiatan KONI dengan capaian output/keluaran 100 persen.
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
  - a. Subkegiatan Pemusatan Latihan Daerah, ilmu pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) dengan anggaran sebesar Rp. 198.739.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 183.847.189,00 atau sebesar 92,51 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah peserta dan pembinaan olahragawan berbakat (PPLD) sebanyak 1 cabang olahraga dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 1.090.714.350,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 900.104.574,00 atau sebesar 82,52 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah peserta dan pembinaan olahragawan berbakat (PPLD) sebanyak 1 cabang olahraga dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - c. Subkegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 2.158.106.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.975.547.403,00 atau sebesar 91,54 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah peserta dan pembinaan olahragawan berbakat (PPLD) sebanyak 1 cabang olahraga dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.



4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
  - a. Subkegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan (HIBAH KONI) dengan anggaran sebesar Rp 4.550.178.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah organisasi olahraga dengan capaian output/keluaran sebesar 0 persen.
  
5. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
  - a. Subkegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi dengan anggaran sebesar Rp. 859.219.361,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 276.298.315,00 atau sebesar 32,16 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah peserta senam sehat bersama dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Pengembangan Olahraga Wisata , Tantangan dan Petualangan dengan anggaran sebesar Rp 299.999.640,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.641.600,00 atau sebesar 0,88 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah peserta dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - c. Subkegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 299.999.170,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 147.029.039,00 atau sebesar 49,01Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah lomba olahraga tradisional dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

#### **4. Program Pengembangan Kapasitas Pramuka**

Alokasi anggaran untuk program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebesar Rp 857.594.240,00 dengan realisasi sebesar Rp. 822.530.074,00 atau 95,91 Persen program ini terdiri dari 1 kegiatan, dan 2 Subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
  - a. Subkegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 148.662.240,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 113.598.074,00 atau sebesar 76,41 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah kegiatan kepramukaan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan ( Hibah Pramuka ) dengan anggaran sebesar Rp 708.932.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 708.932.000,00 atau sebesar 100 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah kegiatan kepramukaan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.



Mendesripsikan terkait program-program, kegiatan, dan program dan sub kegiatan menjelaskan secara detail menjelaskan terkait pelaksanaan anggaran dan realisasi anggaran (dalam bentuk nominal dan presentase)

### 3. Capaian Indikator Kinerja

Dibuat dalam bentuk matrik sebagai berikut:

**Tabel 3.30 Matrik Capaian Indikator Kinerja  
Dinas Pemuda dan Olahraga Muara Enim 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pemuda yang Mandiri	Meningkatnya peran serta pemuda dalam organisasi Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	49 %	82.12%	82.12%
2.	Meningkatnya Pembangunan Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Olahraga	16 %	96.94%	96.94%

### 4. Permasalahan dan Solusi

Dibuat dalam bentuk matrik sebagai berikut:

No	Permasalahan	Solusi
1.	<p>a. Subkegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi indikator jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal yang capaiannya &lt; 80 % dikarenakan realisasi yang dikeluarkan sesuai kebutuhan.</p> <p>b) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor indikator jenis perlengkapan kantor yang disediakan yang capaiannya &lt; 80 % dikarenakan realisasi yang dikeluarkan sesuai kebutuhan.</p> <p>c) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan indikator adalah jumlah dan jenis bahan bacaan dan perundang- undangan yang disediakan yang capaiannya &lt; 80 % dikarenakan realisasi yang dikeluarkan sesuai kebutuhan.</p> <p>d) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor indikator jenis perlengkapan kantor yang disediakan yang capaiannya &lt; 80 % solusinya adalah</p>	<p>Subkegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi indikator jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal yang capaiannya &lt; 80 % solusinya adalah peningkatan terhadap kinerja.</p>



No	Permasalahan	Solusi
	<p>peningkatan terhadap kinerja.</p> <p>e) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan indikator adalah jumlah dan jenis bahan bacaan dan perundang- undangan yang disediakan yang capaiannya &lt; 80 % solusinya adalah peningkatan terhadap kinerja.</p> <p>f) Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu indikator adalah jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman yang capaiannya &lt; 80 % solusinya adalah peningkatan terhadap kinerja.</p> <p>g) Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya indikator adalah mengikat kontrak baru dengan vendor yang lebih baik dan bertanggungjawab.</p> <p>h) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat indikator adalah jumlah dokumen bermaterai yang capaiannya &lt; 80 % solusinya adalah peningkatan terhadap kinerja.</p> <p>i) Subkegiatan pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi indikator jumlah penerima beasiswa yang capaiannya &lt; 80 % solusinya adalah peningkatan terhadap kinerja.</p> <p>j) Subkegiatan Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Sukarelawan Pemuda dengan indicator adalah jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemuda tanggap bencana yang capaiannya &lt;80% solusinya adalah peningkatan terhadap kinerja.</p> <p>k) Subkegiatan Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan dengan indikator adalah jumlah peserta yang capaiannya &lt; 80 % solusinya adalah peningkatan terhadap kinerja.</p> <p>l) Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu indikator adalah jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman yang capaiannya &lt; 80 % dikarenakan realisasi yang dikeluarkan sesuai kebutuhan</p> <p>m) Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya indikator adalah Jumlah Gedung kantor yang dibangun yang capaiannya &lt; 80 % dikarenakan pembangunan Gedung kantor Dispora tidak</p>	



No	Permasalahan	Solusi
	<p>sesuai progress sehingga terjadi putus kontrak.</p> <p>n) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat indikator adalah jumlah dokumen bermaterai yang capaiannya &lt; 80 % dikarenakan realisasi yang dikeluarkan sesuai kebutuhan</p> <p>o) Subkegiatan pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi indikator jumlah penerima beasiswa yang capaiannya &lt; 80 % dikarenakan Peraturan Bupati mengenai Penghargaan baru diterima bulan Juli, dibulan selanjutnya diadakan permintaan data dan data masuk dipertengahan oktober, jadi tidak dilaksanakan.</p> <p>p) Subkegiatan Peningkatan Kepemimpinan Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda dengan indicator adalah jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pemuda tanggap bencana yang capaiannya &lt;80% dikarenakan seleksi pemuda pelopor yang berprestasi di tingkat kecamatan tidak dilaksanakan.</p> <p>q) Subkegiatan Pengembangan Olahraga Wisata , Tantangan dan Petualangan dengan indikator adalah jumlah peserta yang capaiannya &lt; 80% dikarenakan ada sub kegiatan Festival layang-layang yang semula dianggarkan diinduk menjadi dianggarkan di perubahan karena terdapat indicator kinerja yang salah, namun karena factor alam (memasuki musim hujan) kegiatan tersebut dibatalkan.</p>	

## 5. Penghargaan dan Prestasi



### 13. URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2024, alokasi belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 16.915.228.993 (Enam Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) terealisasi sebesar Rp 9.995.832.066 (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Puluh Enam Rupiah) atau 59,09%, untuk membiayai belanja operasi dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp 10.795.028.993 (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) terealisasi sebesar Rp 9.668.882.066 (Sembilan Milyar Enam Ratus Enam puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Puluh Enam Rupiah) atau 89,57% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%, yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

#### b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp 6.120.200.000 (Enam Milyar Seratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp 326.950.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 5,34% yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kinerja Dinas Perpustakaan dan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Adapun program, kegiatan dan Subkegiatan, capaian program indikator sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim tahun 2024 serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Pada Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim melaksanakan 5 (lima) Program, 16 (enam belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) subkegiatan, antara lain yaitu :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 13.309.629.910 (Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 6.665.332.679 (Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau 50,08%. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan urusan perpustakaan dengan target sebesar 100 persen dengan realisasi 100 persen yang dicapai melalui 8 (delapan)



kegiatan dan 22 (dua puluh dua) subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 38.005.420 (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 37.797.500 (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99,45%.
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 29.891.997 (Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 27.764.500 (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 92,88%.
  - c. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 23.790.376 (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 23.710.000 (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau 99,66%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 5.861.524.734 (Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 5.328.348.061 (Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) atau 90,90%.
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp 28.069.488 (Dua Puluh Delapan Juta Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 23.132.000 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 82,41%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp 37.538.500 (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 33.363.250 (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 88,88%.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 45.350.000 (Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 82,45%



5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 12.314.500 (Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp10.552.500 (Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 85,69%.
  - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 29.504.213 (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Ribu Dua Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 24.728.000 (Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) atau 83,81%.
  - c. Subkegiatan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp 64.897.410 (Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 52.974.700 (Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau 81,63%.
  - d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 113.942.800 (Seratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 14.952.000 (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 13,12%.
  - e. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 538.396.100 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 536.260.839 (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) atau 99,60%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Subkegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp 900.000.000 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0 atau 0%
  - b. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp 148.200.000 (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 146.950.000 (Seratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 99,16%
  - c. Subkegiatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 0 atau 0%
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan operasional dan administrasi perkantoran yang dicapai melalui Subkegiatan sebagai berikut ;



- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp 3.550.500 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 3.550.000 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 100%
  - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp 121.830.435 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 76.488.678 (Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau 62,78%
  - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp 372.120.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 178.920.000 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau 48,08%
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 50.753.614 (Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 45.123.151 (Empat Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) atau 88,91%
  - b. Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta) dan realisasi keuangan sebesar Rp 24.937.500 (Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 99,75%
  - c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp 55.300.323 (Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 30.430.000 (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) atau 55,03%

## 2. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini dilaksanakan untuk ;

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Subkegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan anggaran sebesar Rp 28.466.000 (Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 27.952.830 (Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau 98,20%.
  - b. Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan ditingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 86.506.031 (Delapan



- Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Ribu Tiga Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 76.245.210 (Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau 88,14%.
- c. Subkegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 139.147.814 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 110.086.400 (Seratus Sepuluh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 79,11%.
  - d. Subkegiatan Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp 108.183.422 (Seratus Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 103.543.126 (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau 95,71%
  - e. Subkegiatan Peningkatan kapasitas tenaga pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp 150.556.000 (Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 134.737.849 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau 89,49%
  - f. Subkegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 125.146.804 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 107.923.022 (Seratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Dua Rupiah) atau 86,24%
  - g. Subkegiatan Pengembangan Bahan Pustaka dengan anggaran sebesar Rp 296.154.500 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 269.802.459 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau 91,10%
2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- a. Subkegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Khusus serta Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 178.571.700 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 173.006.375 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau 96,88%.
  - b. Subkegiatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp 1.200.000.000 (Satu



Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 1.183.301.000 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah) atau 98,61%.

- c. Subkegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca dengan anggaran sebesar Rp 104.047.300 (Seratus Empat Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 92.235.500 (Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 88,65%
- d. Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dengan anggaran sebesar Rp 163.083.966 (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Enam Puluh Enam Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 157.721.864 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah) atau 96,71%
- e. Subkegiatan Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 81.285.922 (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 69.162.000 (Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 85,08%.

### **3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**

Program ini dilaksanakan untuk menyelamatkan/melindungi naskah kuno melalui diakuisisi atau dialih media (digitalisasi) atau terdaftar yang ada di Kabupaten Muara Enim yang keberhasilannya ditandai dengan cakupan naskah kuno yang diakuisisi.

Alokasi anggaran untuk Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno sebesar Rp 84.512.600 (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 68.395.400 (Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 80,93% dengan capaian kinerja keluaran (output) sebesar 100%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut :

#### **1. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melestarikan naskah kuno yang ada di Kabupaten Muara Enim

- a. Pengembangan, pengelolaan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan di dayagunakan dengan anggaran sebesar 84.512.600 (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Enam Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 68.395.400 (Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 80,93%.

### **4. Program Pengelolaan Arsip**

Program ini dilaksanakan untuk Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Arsip sebesar Rp.694.496.400 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.629.272.620 (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh



Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 90,61%. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Subkegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis dengan anggaran sebesar Rp 80.816.600 (Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 73.293.700 (Tujuh Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau 90,69%
  - b. Subkegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 273.954.600 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 253.852.720 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 92,66%.
2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Subkegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis dengan anggaran sebesar Rp 77.662.300 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 69.607.061 (Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) atau 89,63%.
3. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
  - a. Subkegiatan Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN dengan anggaran sebesar Rp 116.621.900 (Seratus Enam Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 95.700.489 (Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau 82,06%
  - b. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 145.441.000 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 136.818.650 (Seratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 94,07%

#### **5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

Alokasi anggaran untuk Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sebesar Rp 165.440.624 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 127.113.732 (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) atau 76,83%. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut :

1. Pemusnahan Arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi di bawah 10 tahun.



- a. Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun dengan anggaran sebesar Rp 89.910.865 (Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 58.890.100 (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Rupiah) atau 65,50%
2. Autentikasi Arsip statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota
    - a. Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip dengan anggaran sebesar Rp 75.529.759 (Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 68.223.632 (Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) atau 90,33%

### 3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan target kinerja sasaran dalam Renstra, capaian indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.31**  
**Matrik Capaian Indikator Kinerja**  
**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1.Meningkatnya Pelayanan, Minat dan Budaya Baca Masyarakat Muara Enim	1.1.1.Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	70%	100%	69,99%
			1.1.2.Indeks Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	80%	100%	61,24%
2.	Meningkatnya Tata kelola dan akreditasi Pengelola Kearsipan Kabupaten Muara Enim	2.1.Meningkatnya Sistem administrasi Dan pengelolaan Kearsipan daerah	2.1.1.Nilai Akreditasi Pengelolaan Kearsipan	75%	100%	75%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

Secara umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024 telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, hal ini dilihat dari tingkat pencapaian indikator kerjanya sesuai Renstra



Perangkat Daerah. Namun masih ada beberapa indikator yang capaian kinerjanya di bawah 80% yaitu Persentase Perangkat Daerah yang mengelola kearsipan secara baku.

**Mengapa pengelolaan arsip dinamis belum di kelola secara optimal, faktor penyebabnya :**

1. Masih perlu peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan kearsipan di masing-masing Perangkat Daerah.
2. Regulasi yang masih perlu dibuat.
3. JIKN dan SRIKANDI perlu dipublikasi dan promosi agar berjalan sesuai perkembangan
4. Peran Arsiparis masih sangat dibutuhkan dalam pembinaan dan pengelolaan kearsipan.

**Pemecahan Masalah :**

1. Memberikan bimbingan dan konsultasi pengelolaan kearsipan secara baku.
2. Memberikan Reward dan Punishment kepada OPD yang terbaik.
3. Melaksanakan sosialisasi dalam implementasi penyelenggaraan kearsipan melalui Aplikasi JIKN dan Srikandi.
4. Memberikan dorongan terhadap unit kearsipan untuk melakukan tata kearsipan secara benar.

**4. Permasalahan dan Solusi**

1. Permasalahan

- Bidang Perpustakaan :
  - a. Minat baca masyarakat masih rendah.
  - b. Perpustakaan Umum Kabupaten Muara Enim belum memiliki gedung sesuai Tipologi Standar Nasional.
  - c. Sarana dan prasarana Perpustakaan dan kearsipan perlu selalu dikembangkan.
  - d. SDM tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan perlu ditingkatkan kompetensinya.
  - e. Pertumbuhan jenis Perpustakaan umum, Perpustakaan kelurahan masih menjadi tantangan.
  - f. Layanan Perpustakaan keliling belum menjangkau keseluruhan wilayah Kabupaten Muara Enim.
  - g. Masih perlu peningkatan koleksi buku dalam melayani masyarakat.
- Bidang Kearsipan :
  - a. Masih perlu adanya Bimbingan Teknis Kearsipan untuk peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan kearsipan di masing-masing Perangkat Daerah.
  - b. Regulasi yang masih perlu dibuat.
  - c. JIKN dan Srikandi perlu di publikasikan dan promosi agar berjalan sesuai perkembangan.



- d. Peran Arsiparis masih sangat dibutuhkan dalam pembinaan dan pengelolaan kearsipan.

## 2. Solusi

Untuk meningkatkan minat baca masyarakat dengan cara :

1. Mengadakan kegiatan gemar membaca contohnya dengan mengadakan lomba-lomba dan menambah koleksi buku.
2. Mengadakan Sosialisasi dan promosi untuk meningkatkan pembudayaan gemar membaca di Kabupaten Muara Enim.
3. Mengadakan Event pameran buku dan bursa buku.
4. Meningkatkan kegiatan yang di lakukan forum / kelompok literasi
5. Memberikan penghargaan kepada penggiat literasi

Untuk meningkatkan pengelolaan arsip di OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan cara :

1. Melakukan pembinaan pengelolaan kearsipan di setiap OPD dan Kecamatan.
2. Melakukan pengawasan secara berkala dengan sistem monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan di seluruh OPD dan Kecamatan.
3. Melaksanakan sosialisasi dalam implementasi penyelenggaraan kearsipan.
4. Mengembangkan budaya kerjasama dan menjalin komunikasi yang intensif.
5. Memberikan motivasi terhadap unit kearsipan OPD untuk melakukan tata kearsipan secara benar.
6. Memberikan bimbingan dan konsultasi tentang pengelolaan kearsipan secara baku.
7. Memberikan Reward Punishment kepada OPD yang terbaik dan terburuk.

## 5. Prestasi dan Penghargaan

1. Juara 1 Lomba Bertutur Tingkat Provinsi Sumatera Selatan



### 3.4. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

#### 1. URUSAN PERIKANAN OLEH DINAS PERIKANAN

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2024, alokasi belanja Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp. 22.640.138.005,00 (Unaudited)** dan terealisasi sebesar **Rp.19.056.392.858,00 (Unaudited)** atau **84,17%**, dengan rincian sebagai berikut :

##### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp. 21.821.265.458,50 (Unaudited)** terealisasi sebesar **Rp. 18.257.263.858,00 (Unaudited)** atau **83,67%** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

##### b. Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan sebesar **Rp. 818.872.547,00 (Unaudited)** dan terealisasi sebesar **Rp. 799.129.000,00 (Unaudited)** atau sebesar **97,59%**, yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Adapun program dan kegiatan, capaian program indikator sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 2. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Pada Tahun 2024, Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim melaksanakan 4 program, 15 kegiatan dan 42 subkegiatan antara lain yaitu :

##### 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 7.666.980.864,00 (Unaudited)** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.479.451.019,00 (Unaudited)** atau **71,47%**. Program tersebut terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) subkegiatan, yaitu :

##### 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp.20.740.794,00 (Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.12.215.900,00 (Unaudited)** atau sebesar **58,90%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 3 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.69.933.174,00 (Unaudited)** dan



realisasi keuangan sebesar Rp.55.503.600,00 (**Unaudited**) atau sebesar 79,37%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.6.657.780,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.750.000,00 (**Unaudited**) atau sebesar 56,33%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.8.537.010,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.773.000,00 (**Unaudited**) atau sebesar 55,91%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - e. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.6.657.780,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.150.000 (**Unaudited**) atau sebesar 47,31%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - f. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.26.168.727,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.22.128.300,00 (**Unaudited**) atau sebesar 84,56%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 5 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Subkegiatan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp.5.276.541.883,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.372.177.123,00 (**Unaudited**) atau sebesar 63,91%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 32 orang/bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp.22.404.187,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.19.280.200,00 (**Unaudited**) atau



sebesar 86,06%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 20 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp.60.523.483,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.49.345.500,00 (**Unaudited**) atau sebesar 81,53%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD sebanyak 14 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

### 3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp.60.000.000,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.50.800.000,00 (**Unaudited**) atau sebesar 84,67%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 8 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

### 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.14.519.843,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.11.246.000,00 (**Unaudited**) atau sebesar 77,45%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 9 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.269.072.547,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.262.830.000,00 (**Unaudited**) atau sebesar 97,68%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 5 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp.43.316.110,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.27.244.250,00 (**Unaudited**) atau sebesar 62,90%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah paket peralatan rumah tanggayang disediakan sebanyak 29 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



- d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp.89.566.605,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.49.984.000,00 (**Unaudited**) atau sebesar 55,81%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 3 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - e. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp.35.841.900,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.24.725.250,00 (**Unaudited**) atau sebesar 68,98%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 1 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - f. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan dengan anggaran sebesar Rp.35.520.000,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.19.600.000,00 (**Unaudited**) atau sebesar 55,18%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sebanyak 13 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp.387.589.950,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.385.738.500,00 (**Unaudited**) atau sebesar 99,52%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.350.000.000,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.338.100.000,00 (**Unaudited**) atau sebesar 96,60%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan sebanyak 1 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp.2.240.000,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.240.000,00 (**Unaudited**) atau sebesar 100,00%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp.182.729.300,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.111.409.705,00 (**Unaudited**) atau sebesar 60,97%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 4 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.22.732.800,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.22.442.500,00 (**Unaudited**) atau sebesar 90,72%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp.154.080.000,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.154.080.000,00 (**Unaudited**) atau sebesar 100,00%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 48 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp.201.606.991,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.163.087.191,00 (**Unaudited**) atau sebesar 80,89%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 12 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.320.000.000,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.313.600.000,00 (**Unaudited**) atau sebesar 98,00%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

## 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar **Rp. 2.832.246.017,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.741.692.921,00**



atau **96,80%**. Program tersebut terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) subkegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan dengan anggaran sebesar Rp. 218.391.971,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 204.581.900,00 (**Unaudited**) atau sebesar 93,68%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
  - b. Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp.2.209.668.723,50 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.162.622.600,00 (**Unaudited**) atau sebesar 97,87%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia sebanyak 910 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
  
2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dengan anggaran sebesar Rp.310.379.078,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.289.094.321,00 (**Unaudited**) atau sebesar 93,41%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya sebanyak 30 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dengan anggaran sebesar Rp.32.043.911,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.28.684.400,00 (**Unaudited**) atau sebesar 89,52%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya sebanyak 13 kelompok dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
  - c. Subkegiatan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 61.762.333,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 56.709.700,00 (**Unaudited**) atau sebesar 91,82%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha sebanyak 4 Unit Usaha dengan capaian output/keluaran sebesar 100%



### 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar **Rp. 7.836.326.927,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.837.658.239,00** atau **87,26%**. Program tersebut terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) subkegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.
  - a. Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dengan anggaran sebesar Rp.409.229.991,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.382.728.475,00 (**Unaudited**) atau sebesar 93,52%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas sebanyak 30 kelompok dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
  - b. Subkegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil dengan anggaran sebesar Rp.246.782.189,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.237.454.458,00 (**Unaudited**) atau sebesar 96,22%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan sebanyak 14 kelompok dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
  - c. Subkegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha dengan anggaran sebesar Rp.76.698.538,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.59.610.850,00 (**Unaudited**) atau sebesar 77,72%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usahanya sebanyak 10 kelompok dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
2. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Subkegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.133.401.165,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.66.891.900,00 (**Unaudited**) atau sebesar 50,14%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah rekomendasi perizinan berusaha bagi pembudidayaan ikan kecil yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebanyak 20 rekomendasi dengan capaian output/keluaran sebesar 92,93%.



3. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
  - a. Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.272.686.859,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.152.498.800,00 (**Unaudited**) atau sebesar 55,92%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 88,79%.
  - b. Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.5.043.485.866,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.678.635.397,00 (**Unaudited**) atau sebesar 92,77%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 15 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 99,36%.
  - c. Subkegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.273.970.815,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.99.485.700,00 (**Unaudited**) atau sebesar 36,31%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 49,39%.
  - d. Subkegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat dengan anggaran sebesar Rp.341.244.493,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.307.417.850,00 (**Unaudited**) atau sebesar 90,09%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi sebanyak 10 Ha dengan capaian output/keluaran sebesar 95,62%.
  - e. Subkegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat dengan anggaran sebesar Rp.1.038.827.011,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.852.934.809,00 (**Unaudited**) atau sebesar 82,11%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat sebanyak 150 Orang dengan capaian output/keluaran sebesar 97,41%.



#### 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar **Rp. 4.304.584.198,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.997.509.679,00** atau **92,87%**. Program tersebut terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) subkegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.
  - a. Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.596.591.144,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.445.410.057,00 (**Unaudited**) atau sebesar 74,66%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan risiko sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 94,58%.
2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
  - i. Subkegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dengan anggaran sebesar Rp.350.218.572,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.316.349.100,00 (**Unaudited**) atau sebesar 90,33%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko sebanyak 20 unit usaha dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Subkegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.1.887.733.738,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.821.820.300,00 (**Unaudited**) atau 96,51%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 18000 ton suplier dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



- b. Subkegiatan Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.1.470.040.744,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.414.011.222,00 (**Unaudited**) atau 96,19%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 20 pelaku usaha dengan capaian output/keluaran sebesar 100%

### 3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan target kinerja sasaran dalam Renstra, capaian indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.32 Matrik Capaian Indikator Kinerja SKPD  
Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	
1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan	2.1	Meningkatnya usaha budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya (%)	4,00 (8.881,28 ton)	4,16 (9.245,41 ton)	104,10%
		2.2	Meningkatnya usaha perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (%)	1,00 (3.467,10 ton)	1,00 (3.484,26 ton)	100,49%
		2.3	Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil perikanan	Produksi produk hasil olahan perikanan (%)	6,84 (1.069,00 ton)	7,31 (1.135,98 ton)	106,86%

Pada tahun 2024, dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan, 3 (tiga) indikator pada tabel diatas merupakan indikator kinerja utama yang termuat pada Renstra SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim dan telah terlaksana dengan baik.

### 4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI



## **2. URUSAN PARIWISATA OLEH DINAS PARIWISATA**

### **1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA**

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Tahun Anggaran 2024 dengan alokasi dana sebesar Rp. 17.293.755.193,- dan terealisasi Rp.15.938.451.073,- atau 92,16% sebesar dengan rincian sebagai berikut

- A. Belanja Operasional sebesar Rp. 9.819.706.993,- realisasi
- B. Belanja Modal sebesar Rp. 7.474.048.200,-

### **2.PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi sebesar Rp. 12.005.868.839,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.005.140.106 atau 91,66 %**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 201.765.800,- (Dua Ratus Satu Juta Tujuh Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) Dengan Realisasi sebesar Rp. 158.439.628,- (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD alokasi sebesar Rp. 31.597.700,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 28.555.650,- (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 90,37%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD alokasi sebesar Rp. 36.997.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 31.897.778,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 86,22%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD alokasi sebesar Rp. 17.410.600,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 13.000.400,- (Tiga Belas Juta Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 74,67%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD alokasi Rp. 20.143.500,- (Dua Puluh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu



- Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 17.216.010,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Sepuluh Rupiah) atau sebesar 85,47%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi sebesar Rp. 49.039.700,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 29.935.600,- (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) atau sebesar 61,04%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%
  - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi sebesar Rp. 46.577.300,- (Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 37.834.190,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah) atau sebesar 85,52%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.177.620.733,- (Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) Dengan Realisasi sebesar Rp. 3.626.205.905,- (Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah)
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi sebesar Rp. 4.091.318.733,- (Enam Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.549.635.845,- (Tiga Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 86,76%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Hasil Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian Output/Keluaran sebesar 100%
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi sebesar Rp. 43.189.200,- (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 39.627.400,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar 91,75%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil

- Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD alokasi sebesar Rp. 42.112.800,- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 36.942.660 ,- (Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) atau sebesar 85,69%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 19.354.500,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) Dengan Realisasi sebesar Rp. 11.542.500,- (Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
- Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD alokasi sebesar Rp. 19.354.500,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 11. 542.500,- (Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 59,64%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya BMD yang diasuransikan dan Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 72.250.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Dengan Realisasi sebesar Rp. 38.375.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya alokasi sebesar Rp. 12.250.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.12.250.000,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 100.00% adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Laporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100% Karena Belum Terealisasi Karena Belum Ada Perda Mengenai Pakaian Dinas ASN.
  - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi alokasi sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 26.125.000,- (Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 43.54% adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Pegawai yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Laporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%

- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.077.245.136,- (Satu Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) Dengan Realisasi Rp.996.903.674,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Empat Puluh Tujuh Rupiah)
- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor alokasi sebesar Rp. 10.999.100,- ( Sepuluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 9.036.300,- (Sembilan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau sebesar 82.70%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya alat/kelengkapan listrik yang disediakan dan Laporan Hasil Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi sebesar Rp. 138.953.988,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 113.332.500,- (Serastus Tiga Belas Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 81.56%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dan Laporan Hasil Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Logistik Kantor alokasi sebesar Rp. 100.222.400,- (Seratus Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 61.464.100,- (Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah) atau sebesar 61.33%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Jenis Logistik Kantor yang tersedia dan Laporan Hasil Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi sebesar Rp. 56.496.648,- (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 42.551.550,- (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 75.32%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dan Laporan Hasil Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



alokasi sebesar Rp. 770.573.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 770.459.224,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 99,99%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Laporan Notulen Rapat, Laporan Perjalanan Dinas dan Laporan Hasil Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian Output/Keluaran sebesar 100%

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.462.442.270,- (Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) Dengan Realisasi Rp. 5.334.088.000,- (Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Puluh Delapan Rupiah)
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya alokasi sebesar Rp. 561.923.850,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 554.525.000, (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau sebesar 98.68%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Laporan Hasil Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian Output/Keluaran sebesar 100%
  - Sub Kegiatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 533.373.120,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Ratus) dengan realisasi sebesar Rp. 489.326.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah) atau sebesar 91.74% adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%
  - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi sebesar Rp. 3.696.000.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.620.937.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) atau sebesar 97.97% adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Gedung yang dibangun dan Laporan Hasil Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian Output/Keluaran sebesar 100%
  - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sebesar Rp. 671.145.300,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 669.300.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 99.73% adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah tersedianya pengadaan Mebel dengan capaian output/keluaran sebesar 100%



- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 682.500.400,- (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Empat Ratus Rupiah) Dengan Realisasi Rp. 624.899.524,- ( Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat alokasi sebesar Rp. 3.550.400,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.170.000( Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 89,29%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Materai yang terbeli dan Laporan Hasil Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi sebesar Rp. 135.120.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.115.999.524,- (Seratus Lima Belas Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Rupiah) atau sebesar 85,85%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Pembayaran Langganan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Laporan Hasil Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi sebesar Rp. 14.990.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 14.340.000,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 95,92%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki dan Laporan Hasil Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi sebesar Rp. 528.840.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 491.390.000,- (Empat Ratus Sembilan Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 92,92%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan Kantor dan UPTD dan Laporan Hasil Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 312.690.000,- (Tiga Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) Dengan Realisasi Rp. 214.685.875,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi



sebesar Rp. 159.230.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 138.785.875,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 87,16%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Kendaraan Kendaraan dinas/operasioanal yang dipelihara, Jumlah Kendaraan yang diperbaharui perizinannya dan Laporan Hasil Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya alokasi sebesar Rp. 153.460.000,- (Seratus Lima Puluh Tufa Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 75.900.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 49,46%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Laporan Hasil Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%

## **2. Program Peningkatan Daya Tarik Daya Destinasi Pariwisata**

- a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.765.866.840,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.721.446.521,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)
  - Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota alokasi sebesar Rp. 81.999.765,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 79.970.165,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah) atau sebesar 97,52%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Penetapan Daya Tarik Wisata dan Laporan Hasil Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%
- b. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.573.867.486,- (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.535.463.706,- (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah)
  - Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota alokasi sebesar Rp. 2.573.867.486,- (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu



Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.535.463.706,- (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah) atau sebesar 98,51%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Perencanaan Kawasan Strategis dan Laporan Hasil Perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dengan capaian Output/Keluaran sebesar 100%

- Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 2.573.867.486,- (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.535.463.706,- (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah) atau sebesar 94,52%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Laporan Hasil Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan capaian Output/Keluaran sebesar 100%

c. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar Rp. 109.999.589,- (Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 106.012.650,- (Seratus Enam Juta Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 109.999.589,- (Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 106.012.650,- (Seratus Enam Juta Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 96,38%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Usaha Pariwisata yang dibina dan diawasi dan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata dengan capaian Output/Keluaran sebesar 100%

### 3. Program Pemasaran Pariwisata

- Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 1.707.045.070,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.456.226.424,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)**
- Sub Kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan



Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri dengan anggaran sebesar **Rp. 129.999.350,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 127.313.696,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tigas Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)** atau sebesar **97,93%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Terlaksananya Produk Promosi Media Informasi Pariwisata dan Laporan Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**

- Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp. 299.999.820,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 298.151.150,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)** atau sebesar **97,93%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Terlaksananya Kegiatan Penyambutan 5 Even Tertentu dan Laporan Hasil Fasilitas Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**
- Sub Kegiatan Peningkatan Kerja sama dan Kemitaraan Pariwisata baik dalam dan luar negeri dengan anggaran sebesar **Rp. 1.157.046.000,- (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 917.918.178,- (Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)** atau sebesar **79,33%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata dan Laporan Hasil Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**

4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- a. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 694.974.544,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 653.159.200,- (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)**
  - Sub Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran dengan anggaran sebesar **Rp. 494.974.544,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 467.393.281,- (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua**



**Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)** atau sebesar **94,43%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini **adalah Partisipasi dan Terlaksananya Kegiatan Bazaar Ekraf dan Laporan Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**

- Sub Sub Kegiatan Fasilitasi Kekayaan Intelektual dengan anggaran sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 185.765.919,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah)** atau sebesar **92,98%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini **adalah Terlaksananya Fasilitasi Kekayaan Intelektual dan Laporan Hasil Fasilitasi Kekayaan Intelektual** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**

5. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 119.999.900,- (Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 102.478.822,- ( Seratus Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)**
  - b. Sub Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif **Rp. 199.999.900,- (Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)**dengan realisasi sebesar **Rp. 102.478.822,- ( Seratus Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)** atau sebesar **85,40%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini **adalah Tersedianya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata dan Laporan Hasil Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**

### 3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Dibuat dalam bentuk matrik sebagai berikut:

**Tabel 3.33 Matrik Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pembangunan Pariwisata	-Jumlah kunjungan wisatawan -Rata-rata lama tinggal	-Jumlah kunjungan wisatawan -Rata-rata lama tinggal	45.000 Orang 2 Hari	90%	90%



		Wisatawan	Wisatawan			
2.	Meningkatnya Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	20 Orang	90%	90%

#### 4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dibuat dalam bentuk matrik sebagai berikut:

No	Permasalahan	Solusi
1	Kurangnya Sarana dan Prasarana (Mobil Dinas)	Penambahan Sarana dan Prasarana (Mobil Dinas)
2.	Masih Kurangnya Pegawai / ASN Di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penambahan Pegawai/ ASN Di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

#### 5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Selama Tahun 2024 Dinas Pariwisata telah meraih Penghargaan Desa Wisata Pinang Banjar Juara 2 dengan Kategori Daya Tarik Wisata Anugerah Pesona Desa Wisata Sumatera Selatan Tahun 2024, Pada bulan Juli 2024 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim Mengirim Bujang Gadis Muara Enim Tahun 2024 untuk mengikuti Ajang Pemilihan Putra Putri Sriwijaya tahun 2024 di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Palembang dan mendapatkan Penghargaan penobatan Putra Sriwijaya dengan kategori Putra Sriwijaya Harapan III Sekaligus mendapatkan Video Potensi Daerah tahun 2024 Terfavorite Putra, dan mendapatkan Penobatan Putri Sriwijaya Favorite tahun 2024.



### 3. URUSAN PERTANIAN OLEH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN, DAN DINAS PERKEBUNAN

#### 1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan pilihan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 76.224.974.918,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 67.275.851.437,00** atau sebesar **88,26%** dan kinerja keluaran (*output*) sebesar **98,85%**, dengan rincian sebagai berikut:

##### a. Belanja Operasi

Belanja operasi dialokasikan sebesar **Rp 73.884.174.298** terealisasi sebesar **Rp 64.957.049.139** atau **87,92%** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

##### b. Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan sebesar **Rp 2.340.800.620** terealisasi sebesar **Rp 2.318.802.298** atau **99,06%** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pada Tahun 2024, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 program, 18 kegiatan dan 50 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

#### 2. PROGRAM DAN KEGIATAN

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 28.063.883.639** dengan realisasi sebesar **Rp 22.536.168.742,00** atau **80,30%** dengan kinerja output program sebesar **100%**. Realisasi output kinerja sebesar 100% ini dikarenakan kegiatan pada program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan seluruhnya, namun pada realisasi anggaran terdapat anggaran laporan Aset yang tidak direalisasikan dikarenakan proses pelaporan Aset saat ini dilakukan secara online, rendahnya realisasi keuangan dikarenakan terdapat perbedaan harga ATK pada SSH dengan kondisi di lapangan.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan yang didalamnya memuat 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

a. **Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.** Alokasi Anggaran sebesar Rp 52.746.200 Dengan Realisasi sebesar Rp 41.083.000,00 atau 77,89% dengan kinerja output kegiatan sebesar **100%**. Dengan rincian 6 (enam) subkegiatan sebagai berikut:

1) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Alokasi Anggaran sebesar Rp 6.285.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 3.870.000,00 atau 61,58% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Hal ini dikarenakan penyusunan dokumen RKA 2024 telah selesai dilaksanakan menggunakan anggaran induk 2024, namun RKA 2025 belum disahkan



- hingga akhir Desember 2024 sehingga Pengandaan dan penyusunan RKA 2025 akan menggunakan anggaran kegiatan tahun 2025.
- 2) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Alokasi Anggaran sebesar Rp 4.285.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 3.305.000,00 atau 77,13% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Rendahnya realisasi keuangan dikarenakan adanya perbedaan harga Jilid Perubahan RKA SKPD yang terdapat pada SSH SIPD dengan harga dilapangan.
  - 3) SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Alokasi Anggaran sebesar Rp 20.920.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 20.612.200,00 atau 98,53% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Terdiri atas Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (fotocopy dan Jilid dokumen DPA) dan belanja Jasa Pengadministrasi Pengolah dan Penginput RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD.
  - 4) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Alokasi Anggaran sebesar Rp 8.848.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 6.924.000,00 atau 78,25% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
  - 5) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Alokasi Anggaran sebesar Rp 2.996.200 Dengan Realisasi sebesar Rp 2.519.800,00 atau 84,10% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Sisa anggaran senilai Rp 476.400,00 merupakan selisih harga pada SSH SIPD dan harga dilapangan.
  - 6) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp 9.412.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 3.852.000,00 atau 40,93% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Rendahnya realisasi keuangan pada Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dikarenakan sebesar Rp 4.494.500 yang dianggarkan untuk Penyusunan Laporan Inventaris Aset tidak direalisasikan dikarenakan pelaporan Aset tahun 2024 sebagian telah dilakukan secara online.

**b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.** Alokasi Anggaran sebesar Rp 25.365.261.790 Dengan Realisasi sebesar Rp 20.082.609.459,00 atau 79,17% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 3 (tiga) subkegiatan sebagai berikut:

- 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Alokasi Anggaran sebesar Rp 25.302.626.790 Dengan Realisasi sebesar Rp 20.022.943.459,00 atau 79,13% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Kelebihan anggaran gaji tahun 2024 terdapat pada Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dan Gaji Pokok PNS dikarenakan terdapat ASN dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan yang mutasi dan purnabakti, dimana pegawai yang purnabakti sebagian besar adalah penyuluh dengan kelas jabatan ahli madya atau golongan IV.



- 2) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Alokasi Anggaran sebesar Rp 26.910.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 25.410.000,00 atau 94,43% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- 3) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD, Alokasi Anggaran sebesar Rp 35.725.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 34.256.000,00 atau 95,89% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.

**c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.**

Alokasi Anggaran sebesar Rp 32.315.461 Dengan Realisasi sebesar Rp 32.197.575,00 atau 99,64% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut:

- 1) Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Alokasi Anggaran sebesar Rp 32.315.461 Dengan Realisasi sebesar Rp 32.197.575,00 atau 99,64% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.

**d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**

Alokasi Anggaran sebesar Rp 123.000.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 104.910.000,00 atau 85,29% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut:

- 1) Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Alokasi Anggaran sebesar Rp 123.000.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 104.910.000,00 atau 85,29% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Adapun pelatihan yang diikuti pada tahun 2024 yaitu: pelatihan dan bimbingan teknis sosialisasi Permentan RB No 6 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja ASN Serta Implementasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2024 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional (9 orang), Bimbingan teknis Inseminator Sapi/Kerbau (1 orang), Pendidikan dan pelatihan pemantapan Tugas Sekretaris Perangkat Daerah mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi kinerja angkatan III tahun 2024 (1 orang), Pelatihan Penyusunan rencana strategis Pemerintah Daerah (3 orang), Bimbingan Teknis Bendahara Keuangan Daerah Angkatan II Tahun 2024 (1 Orang), Pelatihan Bendahara Pemerintah Daerah batch III (1 orang).

**c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp 1.182.614.452,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 1.127.264.647,00 atau 95,32% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 7 (tujuh) subkegiatan sebagai berikut:**

- 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Alokasi Anggaran sebesar Rp 18.349.200,00 Dengan



Realisasi sebesar Rp 18.317.000,00 atau 99,82% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.

- 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alokasi Anggaran sebesar Rp 432.974.520,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 416.516.000,00 atau 96,20% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- 3) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Alokasi Anggaran sebesar Rp 175.224.800,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 156.780.990,00 atau 89,47% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- 4) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Alokasi Anggaran sebesar Rp 9.353.100,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 8.880.000,00 atau 94,94% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- 5) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan, Alokasi Anggaran sebesar Rp 17.940.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 14.160.000,00 atau 78,93% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Hal ini dikarenakan pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah tagihan koran yang diterima tahun 2024.
- 6) Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Alokasi Anggaran sebesar Rp 52.180.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 36.150.000,00 atau 69,28% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp16.030.000,00 dikarenakan belanja makan dan minum salah satu BPP yaitu BPP Sri Tanjung Kecamatan Semende Darat Tengah tidak melakukan penagihan biaya makan minum kegiatan rapat. Selain itu, tahun 2024 terdapat hasil pemeriksaan BPK RI bahwa kegiatan rapat internal yang di hadiri pegawai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim tidak dapat memperoleh anggaran makan minum rapat, kecuali apabila terdapat peserta rapat dari luar Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim.
- 7) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Alokasi Anggaran sebesar Rp 476.592.832,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 476.460.657,00 atau 99,97% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.

**e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Alokasi Anggaran sebesar Rp 810.394.202 Dengan Realisasi sebesar Rp 670.620.947,00 atau 82,75% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%.

Dengan rincian 3 (tiga) subkegiatan sebagai berikut:

- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alokasi Anggaran sebesar Rp 5.600.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 5.000.000,00 atau 89,29% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Alokasi Anggaran sebesar Rp 358.634.202 Dengan Realisasi sebesar Rp 229.090.947,00 atau 63,88% dengan kinerja output subkegiatan sebesar



100%. Dikarenakan tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim berhasil melakukan penghematan energi listrik untuk penggunaan listrik di lapangan salah satunya ADC Dinas TPHP dikarenakan sayuran dan buah-buah yang dihasilkan oleh petani langsung dibeli oleh penjual/distributor, sehingga dapat melakukan efisiensi untuk anggaran pembayaran listrik sebesar Rp 64.570.533, dimana sayuran dan buah-buahan tidak lagi disimpan terlebih dahulu di ADC. Telah dilakukan efisiensi tagihan air yang dianggarkan senilai Rp 45.247.500,00 dan hanya terealisasi Rp 11.990.450 sesuai dengan kebutuhan dan karena adanya kerusakan/macet air PDAM dinas selama kurang lebih 6 bulan. Efisiensi anggaran dilakukan pada pembayaran Belanja kawat/faksimili/internet yang dianggarkan Rp 64.475.000,00 dan terealisasi senilai Rp 33.034.440,00 sesuai dengan tagihan Belanja kawat/faksimili/internet yang ada pada tahun 2024.

- 3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor, Alokasi Anggaran sebesar Rp 446.160.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 436.530.000,00 atau 97,84% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.

**f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Alokasi Anggaran sebesar Rp 497.551.534,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 477.483.114,00 atau 95,97% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 4 (empat) subkegiatan sebagai berikut:

- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Alokasi Anggaran sebesar Rp 293.246.800,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 274.977.784,00 atau 93,77% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- 2) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Alokasi Anggaran sebesar Rp 136.300.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 135.488.000,00 atau 99,40% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- 3) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Alokasi Anggaran sebesar Rp 42.740.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 41.957.330,00 atau 98,17% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Alokasi Anggaran sebesar Rp 25.264.734,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 25.060.000,00 atau 99,19% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Keluaran (*output*) dari pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tersebut adalah :



- a. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen
- b. Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen
- c. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen
- d. Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen
- e. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP sebanyak 1 laporan
- f. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 1 laporan
- g. Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 180 orang/bulan
- h. Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 2 dokumen
- i. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebanyak 3 laporan
- j. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 1 dokumen
- k. Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 1 paket
- l. Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 12 orang
- m. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket
- n. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket
- o. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket
- p. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 1 dokumen
- q. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan
- r. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 laporan
- s. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 1 laporan
- t. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 83 unit



- u. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit
- v. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 21 unit
- w. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 5 unit.
- x. Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 1 laporan

**d. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar **Rp. 12.762.770.360,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 11.704.207.000,00** atau **91,71%** dengan kinerja output program sebesar **99,64%**. Dalam program ini realisasi anggaran yang ditargetkan tidak maksimal dicapai hal ini disebabkan adanya kendala pada Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Subkegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi. Kendala tersebut berupa dalam subkegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi terdapat kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dan APBD. Terdapat total anggaran perjalanan Dinas senilai Rp. 211.672.000 terdiri atas perjalanan dinas untuk Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian sebesar Rp. 36.545.500.

Kegiatan Pengembangan Infrastruktur dan Kelembagaan Pengelolaan Lahan dan Air sebesar Rp. 3.964.500 dan Perjalanan Dinas untuk Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Dana Penunjang 5% DAK Fisik Penugasan) sebesar Rp. 171.162.000. Rendahnya realisasi dikarenakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan DAK Fisik Penugasan senilai Rp. 171.162.000 ini hanya dapat dilakukan dalam daerah sesuai dengan Juknis DAK Fisik Penugasan. Pada penyaluran Dana DAK Fisik Penugasan Tahap III ke KASDA Muara Enim telah dilakukan efisiensi anggaran sehingga dana perjalanan dinas yang ditransfer dalam KASDA hanya sesuai kebutuhan yaitu Rp.71.162.000 dengan realisasi perjalanan dinas Kegiatan Monitoring DAK Fisik Penugasan Sebesar Rp. 70.490.450 (99,06%). Sehingga setelah dilakukan efisiensi anggaran Pagu Belanja Perjalanan Dinas pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik menjadi Rp. 111.672.000 dengan realisasi Rp. 82.972.700 (74,30%). Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang didalamnya memuat 8 (delapan) Subkegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.** Alokasi Anggaran sebesar Rp 1.069.839.360,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 788.820.435,00 atau 73,73% dengan kinerja output kegiatan sebesar 98,88%. Dengan rincian 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut:



- 1) Subkegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi. Alokasi Anggaran sebesar Rp 466.745.400,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 321.985.200,00 atau 68,99% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 98,50%. Dikarenakan alokasi dalam subkegiatan tersebut sebesar Rp 407.562.000,00 adalah Dana Penunjang 5% DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian yang terdiri atas Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah (Dana Penunjang 5% DAK Fisik Penugasan), Jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (Dana Penunjang 5% DAK Fisik Penugasan), Belanja Jasa Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Dana Penunjang 5% DAK Fisik Penugasan), Belanja Jasa Pengawasan Kegiatan Kontraktual Dana Penunjang 5% DAK Fisik Penugasan, dan Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan (Dana Penunjang 5% DAK Fisik Penugasan) senilai Rp 171.162.000. Belanja perjalanan dinas ini Pada penyaluran Dana DAK Fisik Penugasan Tahap III ke KASDA Muara Enim telah dilakukan efisiensi anggaran sehingga dana perjalanan dinas yang ditransfer dalam KASDA hanya sesuai kebutuhan yaitu Rp.71.162.000 dengan realisasi perjalanan dinas Kegiatan Monitoring DAK Fisik Penugasan Sebesar Rp. 70.490.450 (99,06%). Sehingga setelah dilakukan efisiensi anggaran Pagu Belanja Perjalanan Dinas pada Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi Dan Spesifik menjadi Rp. 111.672.000 dengan realisasi Rp. 82.972.700 (74,30%).
- 2) Subkegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian. Alokasi Anggaran sebesar Rp 603.093.960,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 466.835.235,00 atau 77,41% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 99,25%. Rendahnya realisasi dikarenakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang diperuntukkan pengendalian inflasi daerah hanya terealisasi Rp. 21.000.000 (17%) dari pagu anggaran senilai Rp. 120.000.000. Hal ini dikarenakan dari target pelaksanaan pasar murah sebanyak 75 kali hanya dilaksanakan sebanyak 14 kali dikarenakan inflasi Kabupaten Muara Enim pada bulan Juni 2024 telah menurun di angka 2,17%, pada bulan Juli 1,04% dan angka inflasi ini sudah berada dibawah rata-rata inflasi Provinsi Sumsel yang sebesar 2,13% tren tersebut berlanjut sampai Desember 2024.

**b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewangan Kabupaten/Kota.** Alokasi Anggaran sebesar Rp 4.188.525.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 3.777.437.645,00 atau 90,19% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 3 (tiga) subkegiatan sebagai berikut:

- 1) Subkegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman. Alokasi Anggaran sebesar Rp 481.607.500,00 Dengan Realisasi sebesar Rp



456.452.639,00 atau 94,78% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.

- 2) Subkegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman. Alokasi Anggaran sebesar Rp 1.584.727.400,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 1.442.598.876,00 atau 91,03% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- 3) Subkegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman. Alokasi Anggaran sebesar Rp 2.122.190.100,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 1.878.386.130,00 atau 88,51% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.

**c. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota.**

Alokasi Anggaran sebesar Rp 1.081.320.400,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 1.014.796.328,00 atau 93,85% dengan kinerja output kegiatan sebesar 99,67%. Dengan rincian 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut:

- 1) Subkegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil. Alokasi Anggaran sebesar Rp 1.081.320.400,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 1.014.796.328,00 atau 93,85% dengan kinerja output program sebesar 99,67%.

**d. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Ternak Daerah Kabupaten/Kota.**

Alokasi Anggaran sebesar Rp 6.423.085.600,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 6.123.152.592,00 atau 95,33% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut:

- 1) Subkegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan. Alokasi Anggaran sebesar Rp 977.644.100,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 914.589.697,00 atau 93,55% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- 2) Subkegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak. Alokasi Anggaran sebesar Rp 5.445.441.500,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 5.208.562.895,00 atau 95,65% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah :

- a. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sebanyak 1 laporan
- b. Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sebanyak 1 laporan
- c. Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman sebanyak 1 dokumen
- d. Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman sebanyak 1 dokumen



- e. Jumlah SDG Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian sebanyak 1 varietas unggul baru (VUB)
- f. Jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil sebanyak 1 laporan
- g. Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan sebanyak 1 laporan
- h. Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar sebanyak 1 laporan

### 3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar **Rp. 30.972.154.578,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 29.183.482.889,00** atau **94,22%** dengan kinerja output program sebesar **98,98 %**. Dalam program ini terdapat kegiatan dengan pencapaian realisasi kurang maksimal yaitu kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian pada subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan dengan pagu anggaran Rp. 785.857.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 156.146.193,- atau 19,87%. Hal ini disebabkan karena Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural yang dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000,- yang terdiri dari jasa desain arsitektur Pembangunan RPH Ruminansia sebesar Rp. 150.000.000,- dan belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air (pembuatan dan penyusunan UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) Pembangunan RPH Ruminansia sebesar Rp. 450.000.000,- belum dapat direalisasikan karena belum didapatkan calon lokasi/lahan milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang memenuhi syarat-syarat untuk pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal 6 Permentan nomor 13 Tahun 2010. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang didalamnya memuat 8 (delapan) Subkegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. **Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian.** Alokasi Anggaran sebesar Rp 7.713.672.946,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 6.880.215.961,00 atau 89,20% dengan kinerja output kegiatan sebesar 99,94%. Dengan rincian 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut:
  - 1) Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana dan Pendukung Pertanian Lainnya. Alokasi Anggaran sebesar Rp 405.512.446,00 dengan Realisasi sebesar Rp 342.606.223,00 atau 84,49% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Pada subkegiatan ini terdapat Belanja Jasa Tenaga Administrasi yang dialokasikan sebesar Rp 43.320.000 untuk 3 orang (2 orang S1 dan 1 orang SMA), dikarenakan 1 orang tenaga administrasi telah mengundurkan diri dan hanya menerima upah selama 7 bulan, sehingga realisasi belanja jasa tenaga administrasi hanya Rp 32.290.000,00 atau 74,53%. Pada sub kegiatan juga dilakukan efisiensi perjalanan dinas terutama perjalanan dinas dalam daerah dengan total efisiensi senilai Rp 32.998.623,00.



- 2) Subkegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B. Alokasi Anggaran sebesar Rp 7.308.160.500,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 6.537.609.738,00 atau 89,46% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 99,88%. Pada subkegiatan ini terdiri atas belanja yang diserahkan kepada masyarakat senilai Rp 7.096.381.500,00 dan realisasi Rp 6.417.900.838,00 terdapat sisa anggaran senilai Rp 678.480.662,00 dikarenakan perbedaan harga yang direncanakan dengan harga yang terdapat pada e catalog. Selain itu, telah dilakukan efisiensi perjalanan dinas sehingga sesuai dengan kebutuhan selama Tahun anggaran 2024. Terdapat Belanja Jasa Tenaga Administrasi yang hanya direalisasikan selama 5 bulan dikarenakan salah satu Tenaga Administrasi telah diterima sebagai PPPK pada SKPD lain.

**b. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.** Alokasi Anggaran sebesar Rp 22.597.015.132,00 dengan Realisasi sebesar Rp 21.687.589.265,00 atau 95,98% dengan kinerja output kegiatan sebesar 97%. Dengan rincian 5 (lima) subkegiatan sebagai berikut:

- 1) Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani. Alokasi Anggaran sebesar Rp 8.905.815.807,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 8.866.291.904,00 atau 99,56% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- 2) Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit. Alokasi Anggaran sebesar Rp 240.000.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp 240.000.000,00 atau 100% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit dialokasikan pada anggaran pergeseran dikarenakan termasuk dalam kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian yang dilaksanakan secara Swakelola oleh kelompok tani penerima manfaat.
- 3) Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya. Alokasi Anggaran sebesar Rp 8.400.000.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 8.225.753.983,00 atau 97,93% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Subkegiatan ini berisi kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian senilai Rp. 8.200.000.000 dan kegiatan APBD P berupa Pembangunan Gudang Pakan Ternak Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul senilai Rp 200.000.000,00.
- 4) Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani. Alokasi Anggaran sebesar Rp 4.265.341.525,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 4.210.826.185,00 atau 98,72% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- 5) Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan. Alokasi Anggaran sebesar Rp 785.857.800,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 144.717.193,00 atau 18,42% dengan kinerja output



subkegiatan sebesar 85%. Hal ini dikarenakan Hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural yang dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000,- yang terdiri dari jasa desain arsitektur Pembangunan RPH Ruminansia sebesar Rp. 150.000.000,- dan belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air (pembuatan dan penyusunan UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) Pembangunan RPH Ruminansia sebesar Rp. 450.000.000,- belum dapat direalisasikan karena belum didapatkan calon lokasi/lahan milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang memenuhi syarat-syarat untuk pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal 6 Permentan nomor 13 Tahun 2010 tentang Persyaratan Lokasi Rumah Potong Hewan Ruminansia yaitu:
  - Lokasi RPH harus sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) dan Rencana Detil Tata Ruang Daerah (RDTRD) atau daerah yang diperuntukkan sebagai area agribisnis.
  - Lokasi RPH harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut :
    - Tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya.
    - Tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan.
    - Letaknya lebih rendah dari pemukiman.
    - Mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan atau desinfeksi.
    - Tidak berada dekat industry logam dan kimia.
    - Mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH.
    - Terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH babi atau dibatasi dengan pagar tembok dengan tinggi minimal 3 (tiga) meter untuk mencegah lalulintas orang, alat dan produk antar rumah potong.
  - Berdasarkan ketentuan di atas maka anggaran tersebut belum bisa direalisasikan (nihil) karena belum ditemukan calon lokasi lahan yang tepat untuk pembangunan RPHR tersebut.
- b. Belanja sosialisasi ke Petugas RPH Pemotongan Hewan Ternak di Kabupaten Muara Enim (uang transport peserta kegiatan) dengan anggaran Rp. 3.000.000,- belum bisa direalisasikan atau nihil. Hal ini dikarenakan kegiatan sosialisasi ke petugas RPH belum bisa dilaksanakan. Di Kabupaten Muara Enim belum terdapat RPH Ruminansia yang beroperasi. Pemotongan hewan ternak masih dilaksanakan di tempat pemotongan hewan (TPH) milik para tukang potong. Sehingga yang dilakukan adalah rapat koordinasi dengan



para tukang potong dan Dinas TPHP Kabupaten Muara Enim tentang kegiatan pemotongan dan retribusi pemotongan hewan.

- c. Belanja perjalanan dinas yang dianggarkan Rp.78.778.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 41.606.893,- atau 53%. Hal ini disebabkan karena efisiensi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan masih terkendalanya administrasi Pembangunan RPH.

- c. **Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.** Alokasi Anggaran sebesar Rp 661.466.500,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 615.677.663,00 atau 93,08% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Ternak dan Rumpun/Galur Ternak. Alokasi Anggaran sebesar Rp 661.466.500,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 615.677.663,00 atau 93,08% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian tersebut adalah :

- a. Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya sebanyak 3 laporan
- b. Lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan Cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B yang dikelola sebanyak 1 dokumen
- c. Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara sebanyak 55 unit
- d. Jumlah DAM Parit yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara sebanyak 2 unit
- e. Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara sebanyak 19 unit
- f. Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi sebanyak 27 unit
- g. Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara sebanyak 2 unit
- h. Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan sebanyak 1 laporan

#### **4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar **Rp. 1.285.417.200,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 982.069.099,00** atau **76,40 %** dengan kinerja output program sebesar **98,50%**. Terdapat kegiatan dengan pencapaian realisasi kurang maksimal yaitu kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner masing-masing pada subkegiatan



Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan dan subkegiatan Pengawasan unit usaha hewan.

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang didalamnya memuat 3 (tiga) Subkegiatan, yaitu sebagai berikut:

**a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota.** Alokasi Anggaran sebesar Rp 761.714.700,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 667.970.399,00 atau 87,69% dengan kinerja output kegiatan sebesar 97%. Dengan rincian 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut:

- 1) Subkegiatan Pelaksanaan Surveilens Penyakit Hewan dan Zoonosis Pada Hewan. Alokasi Anggaran sebesar Rp 761.714.700,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 667.970.399,00 atau 87,69% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 97%. Rendahnya realisasi keuangan dikarenakan beberapa belanja sebagai berikut:
  - a) Belanja bahan kimia dengan pagu anggaran Rp. 586.000,- dan tidak terealisasi (nihil), Hal ini dikarenakan bahan kimia yang ada masih cukup untuk pelaksanaan kegiatan.
  - b) Belanja alat tulis kantor (ATK) dengan pagu anggaran Rp. 14.655.800,- dan terealisasi Rp. 12.195.000,- atau 83,21%. Hal ini dikarenakan ada penawaran harga dari pihak penyedia yang lebih murah atau lebih rendah, sehingga terdapat silva.
  - c) Belanja cetak dan foto kopi dengan pagu anggaran Rp. 24.072.200,- dan terealisasi Rp. 18.674.400,- atau 77,58%. Hal ini dikarenakan biaya cetak dan fotokopi yang digunakan dari pihak penyedia lebih rendah atau lebih murah sehingga terdapat silva.
  - d) Belanja makanan dan minuman rapat dengan pagu anggaran Rp. 5.840.000,- dan terealisasi Rp. 4.440.000,- atau 76,03%. Hal ini dikarenakan hanya kegiatan untuk makan dan minum kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular ternak pada siswa siswi sekolah menengah pertama (SMP) yang terealisasi sebesar Rp. 4.440.000,- sedangkan yang belanja makan dan minum kegiatan penyuluhan / sosialisasi penanggulangan penyakit hewan menular pada kegiatan tentara manunggal masuk desa (TMMD) tidak terealisasi. Hal ini dikarenakan kegiatan penyuluhan / sosialisasi penanggulangan penyakit hewan menular tersebut telah dilaksanakan oleh petugas yang ada di lapangan berbarengan dengan penyuluhan tanaman obat keluarga (TOGA) oleh petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) bersama kelompok jabatan fungsional (KJF).
  - e) Belanja jasa tenaga laboratorium dengan pagu anggaran Rp. 26.500.000,- dan terealisasi Rp. 11.000.000,- atau 41,51%. Hal ini dikarenakan tidak terealisasinya pengujian sampel darah untuk



penyakit pada hewan besar sapi. Hal tersebut karena pengujian penyakit pada ternak besar sudah dilakukan oleh Laboratorium Balai Veteriner Lampung dan Balai Karantina Kelas I Palembang.

**b. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.** Alokasi Anggaran sebesar Rp 523.702.500,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 314.098.700,00 atau 59,98% dengan kinerja output program sebesar 100%. Dengan rincian 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut:

1) Subkegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan. Alokasi Anggaran sebesar Rp 367.354.300,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 194.583.500,00 atau 52,97% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Rendahnya realisasi keuangan dikarenakan Belanja perjalanan dinas yang dianggarkan sebesar Rp. 111.403.000,- ternyata hanya terealisasi sebesar Rp. 38.223.400,- atau sebesar 47%. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada sehingga anggaran perjalanan dinas tidak dapat terserap secara maksimal tetapi pekerjaan-pekerjaan utama dalam kegiatan ini sudah dapat diselesaikan 100%. Selain itu Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat berupa subsidi komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras yang dijual saat pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah (OPM) dan gerakan pangan murah (GPM) beserta operasionalnya dalam rangka penanganan inflasi dengan pagu anggaran Rp. 82.500.000,- dan terealisasi Rp. 10.500.000,- atau 12,73%. Hal ini dikarenakan sebagai berikut :

- Biaya subsidi yang terealisasi hanya untuk subsidi komoditas telur ayam ras, sedangkan yang untuk daging ayam tidak terealisasi. Hal ini disebabkan komoditas telur ayam ras lebih digemari masyarakat karena sebagai bahan pangan yang lebih tahan lama (tidak mudah rusak) dan dapat dibuat menjadi berbagai ragam makanan serta harganya yang lebih murah atau terjangkau oleh masyarakat bila dibandingkan dengan komoditas daging ayam ras. Sehingga pada saat kegiatan OPM maupun GPM komoditas telur ayam ras yang lebih sering dihadirkan untuk mengisi stand dalam kegiatan OPM dan GPM dari pada komoditas daging ayam ras.
- Adanya sebagian subsidi untuk komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras pada saat awal-awal kegiatan OPM dan GPM sudah dibayarkan oleh OPD-OPD yang menjadi penanggungjawab kegiatan OPM dan GPM sehingga tidak bisa dibayarkan lagi melalui anggaran subsidi ini,
- Untuk anggaran operasional bagi petugas dalam pelaksanaan kegiatan OPM dan GPM yang dianggarkan sebesar Rp. 7.500.000,- ini tidak dapat direalisasikan karena untuk operasional bagi



petugas menggunakan anggaran perjalanan dinas yang ada dalam kegiatan ini.

- 2) Subkegiatan Pengawasan unit usaha hewan. Alokasi Anggaran sebesar Rp 156.348.200,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 119.515.200,00 atau 76,44% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Rendahnya realisasi keuangan dikarenakan pada Belanja cetak spanduk dan fotocopy materi sosialisasi Produk ASUH yang dianggarkan sebesar Rp. 3.030.500,- ternyata hanya terealisasi sebesar Rp. 2.379.600,- atau sebesar 78,52%. Hal ini dikarenakan biaya cetak spanduk yang lebih rendah dan materi pelatihan yang difotocopy jumlahnya tidak terlalu banyak dari jumlah anggaran yang ada. Selain itu, Belanja perjalanan dinas yang dianggarkan sebesar Rp. 78.454.000,- ternyata hanya terealisasi sebesar Rp. 37.223.400,- atau sebesar 47%. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang ada sehingga anggaran perjalanan dinas tidak bisa terserap maksimal tetapi pekerjaan-pekerjaan utama dalam kegiatan ini sudah dapat diselesaikan 100%.

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner kegiatan tersebut adalah :

- a. Jumlah Wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan sebanyak 2 wilayah
- b. Jumlah bibit/benih ternak yang beredar sebanyak 1 laporan
- c. Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik sebanyak 1 unit usaha

## 5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar **Rp 719.982.100,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 641.525.512,00** atau **89,10 %** dengan kinerja output program sebesar **99%**.

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang didalamnya memuat 3 (tiga) Subkegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. **Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota.** Alokasi Anggaran sebesar Rp 719.982.100 Dengan Realisasi sebesar Rp 641.525.512,00 atau 89,10 % dengan kinerja output kegiatan sebesar 99%. Dengan rincian 3 (tiga) subkegiatan sebagai berikut:
  - 1) Subkegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Alokasi Anggaran sebesar Rp 322.226.500,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 253.468.722,00 atau 78,66% dengan kinerja output program sebesar 97%. Subkegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dianggarkan untuk menanggulangi serangan hama, dan Tahun 2024 tidak banyak serangan hama karena petani telah melakukan budidaya sesuai



dengan anjuran teknik budidaya. Terdapat racun hama yang tidak dibelanjakan dikarenakan harga pada SSH lebih kecil dibandingkan harga di lapangan. Anggaran Makan Minum untuk pelaksanaan kegiatan Gerdal senilai Rp 24.324.000,00 hanya terealisasi sebanyak Rp 4.800.000,00 dikarenakan kendala administrasi berupa NPWP, Cap Warung, dan lain-lain yang sebagian besar warung kecil belum memiliki sehingga meskipun kegiatan Gerdal terealisasi 100% namun anggaran makan dan minum hanya terealisasi Rp 4.800.000,00.

- 2) Subkegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Alokasi Anggaran sebesar Rp 259.690.600,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 255.796.490,00 atau 98,50% dengan kinerja output program sebesar 100%.
- 3) Subkegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Alokasi Anggaran sebesar Rp 138.065.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 132.260.300,00 atau 95,80% dengan kinerja output program sebesar 100%.

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian tersebut adalah :

- a. Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan sebanyak 80 Ha
- b. Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani sebanyak 80 Ha
- c. Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan sebanyak 1 laporan

## 6. Program Penyuluhan Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyuluhan Pertanian sebesar **Rp. 2.420.767.041,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.228.398.195,00** atau **92,05%** dengan kinerja output sebesar **98,33%**. Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan, yaitu :

**a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian.** Alokasi anggaran untuk kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. **2.420.767.041,00** dengan realisasi sebesar Rp. **2.228.398.195,00** atau 92,05% dengan kinerja output kegiatan sebesar 98,33%. Terdiri atas 3 (tiga) subkegiatan yaitu:

- 1). Subkegiatan Peningkatan kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa. Alokasi anggaran untuk Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 1.242.520.841,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.109.145.736,00 atau 89,27% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 95%. Terdapat belanja yang tidak direalisasikan yaitu Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia senilai Rp 600.000,00 dan belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan senilai Rp



5.300.000,00. Tidak dibelanjakan karena panitia dan tim pelaksana merupakan ASN.

- 2). Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Alokasi anggaran untuk Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 197.179.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 165.180.551,00 atau 83,77% dengan kinerja output sebesar 100%. Rendahnya realisasi dikarenakan telah dilakukan efisiensi perjalanan dinas senilai Rp 28.720.449,00 sesuai dengan kebutuhan selama tahun 2024. Sehingga realisasi perjalanan dinas dari pagu Rp 63.883.500,00 hanya terealisasi senilai Rp 35.163.051,00 atau 55,04%.
- 3). Subkegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian. Alokasi anggaran untuk Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 981.066.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 954.071.908,00 atau 97,25 % dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian tersebut adalah:

1. Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 8 unit
2. Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya sebanyak 13 unit
3. Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian sebanyak 14 unit

### **CAPAIAN REALISASI ANGGARAN**

Realisasi anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim tahun 2024 senilai Rp 67.275.851.437,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp 76.224.974.918,00 dengan persentase realisasi sebesar 88,26%. Dengan besaran output senilai 99,07%. Dengan rincian capaian realisasi anggaran program dan kegiatan perangkat daerah tahun anggaran 2024 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Muara Enim terlampir pada tabel 3.2.1 (Lampiran).



### 3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Capaian indikator kinerja daerah bidang pertanian pada tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel 3.34 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Bidang Urusan Pertanian**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Tujuan: Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian / Sasaran: Meningkatnya produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan	Persentase Peningkatan Produksi padi (1,5%), Sayuran (5%), buahan (5,5%), Daging (3%), Telur (3%)			
		Produksi Padi	1,5%	1,77%	100,26
		Produksi Sayuran	5,5%	11,03%	105,24
		Produksi Buah	5%	5,46%	100,44
		Produksi Daging	3%	3,10%	100,10
Produksi Telur	3%	3,09%	100,09		

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim, Tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja SKPD pada Tabel 1 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Produksi Padi tahun 2024 sebanyak 203.557,28 ton GKP dengan target kenaikan 1,5% atau 203.022,68 ton GKP sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,26%. Kebutuhan beras untuk masyarakat Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 dengan jumlah penduduk sekitar 667.181 jiwa adalah sebanyak 76.118,68 ton, beras tersedia sebanyak 111.418,61 ton sehingga diperoleh surplus beras sebanyak 35.299,93 ton. Adapun sentra surplus beras terdapat di Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Tengah, Semende Darat Ulu, Tanjung Agung, Panang Enim, Muara Enim, Ujan Mas, Empat Petulai Dangku, Muara Belida, dan Sungai Rotan.

Untuk produksi komoditas Sayuran Unggulan (Kentang, Cabe, Tomat) tahun 2024 Terdapat tambahan komoditi sayuran unggulan yaitu Bawang Merah sehingga total sayuran unggulan sebanyak 13.199,80 ton dengan target kenaikan produksi sebesar 5,5% atau 12.542,90 ton sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 105,24%. Untuk produksi Buah unggulan (Alpukat, Durian, Duku, dan Sawo) tahun 2024 sebanyak 13.075,00 ton dengan target kenaikan produksi sebanyak 5% atau 13.017,38 ton sehingga diperoleh capaian kinerja 100,44%.

Produksi Daging tahun 2024 terdiri atas daging Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam Ras Pedaging, Ayam ras Petelur, Ayam Buras, dan Itik dengan total produksi 11.382,51 ton dan target kenaikan produksi 3% atau 11.371,41 ton sehingga

diperoleh persentase capaian kinerja senilai 100,10%. Produksi Telur tahun 2024 terdiri atas telur ayam kampung/Buras, Ayam Ras Petelur, dan itik dengan total produksi sebanyak 7.760,00 ton, target kenaikan produksi sebesar 3% atau 7.752,86 ton. Sehingga persentase capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100,09%.

Selanjutnya disampaikan realisasi kinerja Program pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim berdasarkan target RENSTRA OPD pada Tabel 2 sebagai berikut :

**Tabel 3.35 Capaian indikator Program Prioritas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim**

Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Target
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian / Meningkatnya produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.1 Persentase peningkatan produksi, produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan			
		1.1.a. Produksi padi	1,5%	1,77	118,00
		1.1.b. Produksi sayuran	5,5%	11,03	200,55
		1.1.c. Produksi buahan	5%	5,46	109,20
		1.1.d. Produksi Daging	3%	3,10	103,33
		1.1.e. Produksi Telur	3%	3,09	103,00
		1.2 Luas Penangkar Benih yang Bersertifikat (Ha)	154 Ha	52	33,77
		1.3 Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Penanggiran	20%	20	100,00
	1.4 Pengembangan Kawasan BBI Pandan Enim	20%	20	100,00	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	2.1 Persentase Penyediaan dan Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian			
		2.1.a. Pembangunan Irigasi	5%	176,47	3529,41
		2.1.b. Pembangunan Jalan Usaha Tani	5%	11,32	226,42
		2.1.c. Pembangunan Embung	5%	-33,33	-6,67

Tujuan/ Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	% Capaian Terhadap Target
		2.1.d. Pembangunan Rumah Potong Hewan	30%	5	16,67
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.1 Persentase Tingkat Kematian Ternak			
		3.1.a Ternak Besar	1%	0,95	105,00
		3.1.b Ternak Kecil	1%	0,92	108,00
		3.1.c. Ternak Unggas	5%	4,62	107,60
		3.2 Persentase Tingkat Produksi Produk Hasil Pternakan	2,5%	2,97	118,8
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4.1 Persentase Penanganan Kelompok Tani yang Terdampak Gangguan Perlindungan Tanaman	100%	100	100
	Program Penyuluhan Pertanian	5.1 Persentase Peningkatan Pembinaan Lembaga Tani			
		5.1.a. Pemula	2%	2,11	105,34
		5.1.b. Lanjut	2%	2,04	102,04
		5.1.c. Madya	0,5%	0,64	128,62
		5.1.d. Utama	0,05%	2,00	4.000,00

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, hal ini dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerjanya sesuai Renstra OPD. Capaian prioritas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim pada Tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. 1 Peningkatan Persentase peningkatan produksi, produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan**

Capaian indikator kinerja terkait Peningkatan Produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan melalui :

- a. **Tanaman Pangan**, pada tahun 2024 data luas panen tanaman padi di kabupaten Muara Enim seluas 39.618 hektar, luas tanam 40.340 Ha dengan produktivitas 51,38 kw/ha, sehingga diperoleh produksi padi tahun 2024 sebanyak 203.557,28 ton GKP. Pencapaian produksi padi pada tahun 2024 didukung oleh program-program pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim, terutama



program / kegiatan Bidang Tanaman Pangan. Dukungan program / kegiatan tersebut antara lain:

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian Sumber Daya Genetik Hewan/ Tanaman berupa bantuan benih padi benih sebar (BR) untuk Intensifikasi Lahan Sawah Kegiatan Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija seluas 1.600 Ha. Dan bantuan benih padi melalui Optimalisasi Peningkatan Indeks Pertanaman seluas 1.600 Ha.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil berupa bantuan benih padi pokok, pupuk urea, pupuk NPK, dan kantong benih untuk penangkaran benih seluas 50 Ha dan 2 Ha BBI.

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota, Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berupa pengadaan barang persediaan Fungisida sebanyak 200 botol, Rodentisida sebanyak 400 kg, Molustisida sebanyak 800 bungkus, Bio-Insektisida sebanyak 1.000 sachet. Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan berupa bantuan benih kacang tanah sebanyak 5.000 kg. Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa bantuan terpal jemur sebanyak 17 lembar dan bantuan Power Thresher sebanyak 2 unit.

- b. **Produksi Sayur Unggulan** pada tahun 2024 sebesar 13.199,80 ton, dengan capaian kinerja sebesar 105,24% dari target produksi Sayur Unggulan sebesar 12.542,90 ton (5,5%). Berdasarkan sumber data Statistik Pertanian Produksi Tanaman Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim tahun 2024 diperoleh data produksi tanaman sayuran (kentang, cabe dan tomat) di Kabupaten Muara Enim meningkat 1.086,00 ton dari tahun sebelumnya sebesar 11.889,00 ton. Tahun 2024 terdapat tambahan Komoditi Sayuran Unggulan Berupa Bawang Merah. Komoditi sayuran unggulan di Kabupaten Muara Enim sebanyak 4 (empat) komoditi utama yaitu komoditi kentang, cabe, tomat. Dan Bawang Merah yang tersebar di beberapa kecamatan sentra komoditi hortikultura di Kabupaten Muara Enim diantaranya kecamatan Semende Darat laut, Semende darat



Tengah, Semende Darat Ulu, dan Gelumbang. Sayur Unggulan terbesar tahun 2024 didominasi oleh produksi Cabe meliputi Cabe Keriting Sebanyak 5.210,40 ton dan cabe Rawit 1.813,30 ton. Untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian produksi sayuran unggulan di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan melalui sub kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman melakukan belanja bahan kimia dan pupuk pupuk dan benih sayuran yang berkualitas guna pengembangan perbenihan/perbibitan tanaman sayuran di Kebun Dinas Kebun Dinas (BBI Aur Duri, ADC dan Penanggiran) dan di serahkan kepada masyarakat, belanja benih sayuran OPAL untuk pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan, dan adanya kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk mendukung kegiatan TMMD.

- c. **Produksi Buah Unggulan** di Kabupaten Muara Enim tahun 2024 tercapai 13.075,00 ton, dengan laju pertumbuhan 5,46% dibandingkan dari tahun 2023 dengan produksi 12.397,50 ton. Capaian kinerja untuk peningkatan produksi buah-buahan unggulan berada pada kisaran 100,44%. Komoditi buahan unggulan di Kabupaten Muara Enim sebanyak 4 (empat) komoditi utama yaitu komoditi Alpukat, Duku, Durian dan Sawo Daerah penghasil buah unggulan terbesar adalah Kecamatan Semende Darat Laut yang meliputi 2.695,90 ton dari total produksi buah unggulan. Diikuti oleh Kecamatan Muara Enim 1.373,90 ton, dan Kecamatan Gunung Megang 1.234,00 ton. Tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan melaksanakan sub kegiatan pemanfaatan kualitas SDG Hewan/Tanaman guna tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian terutama buah unggulan melalui belanja bahan kimia dan pupuk tanaman buah di kebun dinas untuk peningkatan produksi dan di serahkan kepada Masyarakat.

d. **Produksi Hasil Peternakan: Produksi Daging**

Produksi daging di Kabupaten Muara Enim tahun 2024 tercapai 11.382,51 ton, dengan peningkatan produksi sebesar 342,31 ton dibandingkan dari tahun 2023 dengan produksi mencapai 11.040,20 ton. Dari Tabel 2 dapat dilihat capaian kinerja untuk peningkatan produksi daging berada pada 100,10% dan capaian terhadap target sebesar 103,33%. Produksi daging tahun 2024 didominasi oleh produksi daging ayam ras pedaging meliputi 7002,33 ton dari total produksi daging. Salah satu faktor yang mendukung produksi daging meningkat pada tahun 2023 mulai berkembangnya kegiatan penggemukkan, pengembangan dan budidaya ternak sapi, kambing serta unggas di wilayah Kabupaten Muara Enim yang dapat dijadikan sebagai sumber



produksi daging/stok kebutuhan daging di wilayah Kabupaten Muara Enim.

#### **e. Produksi Hasil Peternakan: Produksi Telur**

Persentase produksi tahun 2024 tercapai realisasi capaian kinerja sebesar 3,09% Dari Tabel 1 dan capaian terhadap target pada tabel 2 sebesar 103%, Pencapaian produksi telur pada tahun 2024 sebesar 232,95 ton meningkat dari tahun 2023 sebesar 7.527,05 ton. Produksi telur terdiri dari telur ayam kampung/Buras sebanyak 2.084 ton, telur ayam ras petelur sebanyak 4,451 ton dan telur itik sebanyak 1.225 ton.

Dalam pencapaian target kinerja sasaran peningkatan produksi komoditi peternakan dengan indikator produksi daging dan telur, maka disusun suatu sub kegiatan penjaminan peredaran benih/bibit ternak yang berupa pengadaan ternak sapi, pengadaan ternak kambing, pengadaan ternak ayam buras, pengadaan ternak itik di kelompok-kelompok tani untuk dikembangkan/dibudidayakan dan pada sub kegiatan pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang didukung melalui penerapan teknologi Inseminasi Buatan untuk peningkatan kelahiran ternak (pedet/anak sapi) yang memiliki kualitas unggul sebagai bakalan ternak.

#### **1.2 Luas Penangkaran Benih Bersertifikasi**

Capaian indikator kinerja terkait dengan luas penangkaran benih bersertifikasi telah terpenuhi. Pada tahun 2024 capaian terhadap target hanya sebesar 33,77%. Luas penangkar benih yang ditargetkan dalam renstra seluas 154 Ha. Realisasi sertifikasi benih pada tahun 2024 seluas 50 Ha dan tambahan luas BBI 2 Ha sehingga total 52 Ha. Untuk mencapai realisasi sertifikasi benih tahun 2023 dilaksanakan melalui sub kegiatan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil untuk kegiatan sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan. Penurunan luasan penangkaran terjadi disebabkan adanya pengoptimalan anggaran. Pada anggaran tahun 2023 hanya dibantu benih pokok sehingga benih yang dihasilkan kurang maksimal. Untuk tahun 2024 difasilitasi pupuk NPK, pupuk urea, fungisida dan insektisida dan upah pengolahan lahan.

#### **1.3 Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Penanggiran**

Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Penanggiran telah termasuk dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (RPD). Nantinya akan dilakukan system pertanian terpadu di Penanggiran yang melibatkan komoditas Peternakan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura di dalamnya. Tahun 2024 ini progres kegiatan Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu penanggiran telah sesuai dengan target program yaitu 20% pelaksanaan, berupa Pembangunan sumur bor, belanja modal



bangunan gedung tempat tinggal lainnya berupa rehab rumah jaga senilai Rp. 195.000.000 pada subkegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan, pengadaan benih buah untuk kebun Penanggiran senilai Rp17.157.500 yang terdapat pada subkegiatan pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.

#### **1.4 Pengembangan Kawasan BBI Pandan Enim**

Tahun 2024 pengembangan Kawasan BBI Pandan Enim dimulai dengan penyediaan Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama dan Fumigasi - Balai Benih Padi. Telah direncanakan pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan pendapatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan berupa pengadaan bed dryer pada balai benih induk, namun dilakukan perubahan pada Anggaran Perubahan dan direncanakan kembali pada Tahun 2025.

### **2.1 Persentase Penyediaan dan Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian**

#### **Pembangunan Irigasi**

Tahun 2023 pembangunan jaringan irigasi yang di anggarkan melalui APBD sebanyak 17 Unit dan Tahun 2024 meningkat menjadi sebanyak 47 Unit dengan target persentase peningkatan yang terdapat pada renstra 2024-2026 sebesar 5% sehingga diperoleh persentase realisasi Sebesar 176,47% dan capaian terhadap target senilai 3.529,41%.

#### **Pembangunan Jalan Usaha Tani**

Tahun 2023 pembangunan jalan usaha tani yang di anggarkan melalui APBD sebanyak 53 Unit dan Tahun 2024 meningkat menjadi sebanyak 59 Unit dengan target persentase peningkatan yang terdapat pada renstra 2024-2026 sebesar 5% sehingga diperoleh persentase realisasi Sebesar 11,32% dan persentase capaian terhadap target senilai 226,42%.

#### **Pembangunan Embung**

Tahun 2023 pembangunan embung yang di anggarkan melalui APBD sebanyak 6 Unit dan Tahun 2024 menurun menjadi sebanyak 4 Unit dengan target persentase peningkatan yang terdapat pada renstra 2024-2026 sebesar 5% sehingga diperoleh persentase realisasi Sebesar -33,33% dan persentase capaian terhadap target senilai -6,67%. Pelaksanaan Pembangunan embung tahun 2024 hanya dilaksanakan pada Anggaran Perubahan APBDP dan akan dilakukan Pembangunan embung pada tahun 2025.

#### **Pembangunan Rumah Potong Hewan**

Tahun 2024 telah dianggarkan Jasa Desain Arsitektur Pembangunan RPH Ruminansia senilai Rp 150.000.000 dan Pembuatan dan penyusunan UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) Pembangunan RPH Ruminansia senilai Rp 450.000.000



namun belum dapat dilaksanakan dikarenakan lokasi Pembangunan Rumah Potong Hewan masih perlu dilakukan kaji ulang.

### **Persentase Tingkat Kematian Ternak**

Pada capaian indikator kinerja terkait tingkat kematian ternak terdiri dari :

- 1) Tingkat kematian ternak besar sebesar 0,95% dari target 1%. Dengan Jumlah Kematian Ternak sebanyak 223 ekor dari Populasi sebanyak 23.430 ekor;
- 2) Tingkat kematian ternak kecil sebesar 0,92% dari target 1%. Dengan Jumlah Kematian Ternak sebanyak 636 ekor dari Populasi sebanyak 68.987 ekor;
- 3) Tingkat kematian ternak unggas sebesar 4,62 % dari target 5%. dengan jumlah kematian sebanyak 175.566 ekor dari total populasi sebanyak 3.800.219 ekor. Kematian ternak disebabkan oleh pemeliharaan ternak yang masih bersifat tradisional (kurang memperhatikan aspek kebersihan kandang dan ternak) dan sebagian ternak yang masih diliarikan sehingga dalam pemeliharaan dan pengawasan kesehatannya kurang terkontrol. Penyakit-penyakit yang menyerang ternak besar dan ternak kecil berupa

Penyakit hewan menular *stategis* (PHMS), Penyakit Kurap (Scabies), Cacingan (*Helminthiasis*), *Xerophthalmia* dan *pinx eye* pada mata, gangguan pencernaan seperti kembung (*bloat / tymphani*) dan diare, keracunan, kesulitan melahirkan (*distokia*), *prolapsus vagina*, dan *prolapsus uteri*, kekurangan pakan (malnutrisi) dll. Sedangkan penyakit-penyakit yang menyerang ternak unggas pekarangan sektor 4 milik masyarakat antara lain berupa Penyakit *Newcastle Disease* (ND) atau tetelo, *Avian Influenza* (AI) atau Flu Burung, berak kapur (*Pullorum*), Snot (*Infeksius Coryza*), penyakit chronic respiratory disease (CRD) atau ngorok, dll.

Untuk perhitungan tingkat kematian ternak ini berbanding terbalik dari target, semakin kecil realisasi dibandingkan dengan target maka hasil capaian kinerja yang didapat semakin baik. Program dan Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator antara lain pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak melalui penyediaan obat-obatan hewan, hormon, vitamin, vaksin dan desinfektan. Selain itu juga dilaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Bahan Asal Hewan (BAH) dan Pangan Asal Hewan (PAH) di wilayah Kabupaten Muara Enim, sehingga Bahan Asal Hewan (BAH) dan Pangan Asal Hewan (PAH) yang beredar di wilayah Kabupaten Muara Enim benar-benar aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

### **Persentase Tingkat Produksi Produk Hasil Peternakan**

Produksi hasil olahan peternakan sampai akhir triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 270,44 ton atau mengalami peningkatan sebesar 2,97% dari produksi tahun 2023 yang hanya sebesar 262,63 ton. Dari Tabel 2, dapat dilihat capaian terhadap target produksi olahan peternakan sampai



akhir triwulan IV telah mencapai 118,8% dengan target sebesar 2,5%. Produk hasil olahan peternakan antara lain bakso 256,64 ton, kerupuk kulit 5,88 ton, keripik usus 0,26 ton, dan telur asin/telur asap 7,65 ton. Daerah penghasil produk olahan hasil peternakan didominasi Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Gelumbang. Dalam rangka pencapaian target kinerja dan sasaran maka disusun suatu sub kegiatan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan untuk mendapatkan produk hasil olahan ternak yang layak dikonsumsi masyarakat dalam memenuhi syarat Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

**Persentase Penanganan Kelompok Tani yang Terdampak Gangguan Perlindungan Tanaman**

Tahun 2024 untuk melakukan penanganan kelompok tani yang terdampak Gangguan Perlindungan tanaman secara berkala dilaksanakan Gerdal yang bekerja sama antara Petani, PPL, dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim. Pada Subkegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dilakukan pengadaan insektisida, moluscisida, dan Rodentisida senilai Rp138.000.000 untuk mendukung gerakan pengendalian OPT. Sehingga Persentase Penanganan Kelompok Tani yang Terdampak Gangguan Perlindungan Tanaman telah dilaksanakan 100%.

**Pembinaan Lembaga Tani**

Pembinaan Lembaga tani dilakukan melalui subkegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Sehingga diperoleh jumlah kelompok tani pada kelas pemula Tahun 2024 sebanyak 727 Kelompok Tani, Kelompok Tani kelas lanjut sebanyak 1200 Kelompok. Kelompok tani kelas Madya sebanyak 313 Kelompok, dan Kelompok tani kelas Utama sebanyak 51 Kelompok Tani. Total seluruh Kelompok Tani tahun 2024 sebanyak 2291 Kelompok.

**4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Berdasarkan evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan dan hasil evaluasi capaian kinerja SKPD, mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian saat ini hingga masa mendatang serta solusi yang akan diterapkan, mencakup aspek seperti :

No	Permasalahan	Solusi
1.	Alih Fungsi Lahan Sawah ke Lahan Non Pertanian	Pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dan direncanakan penyusunan Perda LP2B pada Tahun 2026



No	Permasalahan	Solusi
2.	Pertumbuhan Produksi dan Produktivitas Belum Optimal	Analisis tentang kerentanan dampak perubahan iklim, inventarisasi dan peta wilayah yang terkena dampak, penyusunan road map rencana aksi adaptasi dan tindakan perubahan iklim dan lingkungan. Selain itu perlu disiapkan berbagai teknologi adaptasi yang baik seperti varietas unggul, teknologi pengelolaan lahan dan air, pemupukan dan paket teknologi adaptasi perubahan iklim.
3.	Daya Saing Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura Rendah	Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok tani di desa dan kecamatan sehingga dengan semakin optimalnya kelompok tani, penyediaan produk pertanian secara berkelanjutan dan peningkatan peluang pasar dapat diwujudkan
4.	Permasalahan di bidang peternakan meliputi belum tersedianya Rumah Potong Hewan, adanya penyakit hewan menular, kurangnya ketersediaan benih/bibit ternak	Melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan penjaminan peredaran ternak di masyarakat melalui belanja yang diserahkan kepada masyarakat berupa ternak sapi, kambing, itik, dan ayam kepada poktan sehingga dapat menunjang pemenuhan produk hasil peternakan secara berkelanjutan. Selain itu, Pembangunan Rumah Potong Hewan berserta Sarana dan prasarana pendukungnya akan dianggarkan kembali pada tahun 2024-2026 secara bertahap

**a). Alih Fungsi Lahan Sawah ke Lahan Non Pertanian**

Penurunan kepemilikan lahan pertanian disebabkan karena meningkatnya konversi lahan sawah ke lahan pemukiman dan fasilitas umum serta perubahan status lahan karena proses pewarisan keluarga. Permasalahan mendasar lainnya yang menyangkut alih fungsi lahan sawah ke lahan non pertanian meliputi:

**1. Intensitas Pemanfaatan Lahan yang Rendah (IP 100)**

Pemanfaatan lahan pertanian terutama lahan sawah saat ini masih rendah. Meskipun beberapa daerah dalam Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Semende Darat Laut, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Muara Belida dan Kecamatan Sungai Rotan telah melakukan Pertanaman dengan IP 200, sebagian besar lahan sawah masih menerapkan sistem pertanaman satu kali dalam setahun (IP 100).



Selain itu, Peran petani dalam memanfaatkan lahan terlantar dan lahan pekarangan masih sangat rendah. Apabila merujuk pada potensi peningkatan produksi pangan, pemanfaatan lahan terlantar dan lahan pekarangan memberikan nilai positif mengingat keterbatasan lahan sawah. Namun hal ini sangat dimaklumi karena untuk memanfaatkan lahan tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit sementara petani tidak memiliki cukup modal untuk melakukan rotasi budidaya pertaniannya. Untuk itu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim berusaha meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dan direncanakan penyusunan Perda LP2B pada Tahun 2026.

**b). Pertumbuhan Produksi dan Produktivitas Belum Optimal**

Produksi dan Produktivitas yang belum optimal disebabkan oleh banyak hal, baik yang berkaitan dengan manusia maupun dengan alam. Faktor yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan hal tersebut ialah melalui pendayagunaan dan pengayaan teknologi pertanian. Saat ini, sebagian besar usaha budidaya pertanian masih dilakukan menggunakan teknologi yang sederhana. Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya fasilitas bermutu serta sarana pendukungnya seperti pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian. Tantangan ke depan bagaimana terus mengembangkan penangkar benih padi unggul lokal, menumbuhkan kelembagaan jasa alsintan, penggunaan pupuk organik dan penggunaan pestisida dan obat-obatan ramah lingkungan.

Disisi lain, langkah untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan antisipasi dampak perubahan iklim adalah melalui pelatihan dan pertemuan sekolah lapang iklim, pertemuan sekolah lapang pengelolaan hama terpadu, penggunaan varietas tahan perubahan iklim, pencatatan curah hujan dan fenomena perubahannya.

Belum optimalnya produksi dan produktivitas juga dipengaruhi oleh adanya inflasi yang berpengaruh terhadap kesejahteraan petani melalui kemampuan petani dalam memenuhi fasilitas pendukung pertanian seperti pupuk dan benih yang menunjang produksi dan produktivitas pertanian.

**c). Daya Saing Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura Rendah**

Adapun faktor yang mempengaruhi rendahnya daya saing produk tanaman pangan dan hortikultura meliputi :

1. Masih minimnya inovasi dibidang pertanian yang dapat meningkatkan pemasaran hasil pertanian.
2. Belum optimalnya kemampuan penyediaan produk hasil tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan dan konsisten
3. Rendahnya mutu produk karena penanganan pasca panen yang kurang tepat serta penggunaan pestisida yang berlebihan



4. Belum berkembangnya tata kelola pengembangan kawasan agribisnis terpadu terutama tanaman padi dan hortikultura,
5. Infrastruktur pendukung didalam dan menuju kawasan sentra produksi kurang tersedia,
6. Usaha tani masih skala kecil dan tidak dalam satu hamparan,
7. Produk yang dihasilkan masih bersifat musiman,
8. Rendahnya Pengenalan Produk Lokal Unggulan kepada masyarakat domestik maupun luar daerah.

**d). Permasalahan di bidang peternakan antara lain :**

1. Masih banyak terjadinya penyebaran penyakit ternak tahunan (endemik), zoonosis (menyebarkan ke manusia), dan penyakit hewan/ternak menular (Penyakit Mulut dan Kuku/PMK yang menyerang ternak besar khususnya sapi. Tahun 2024 penyakit yang masih menyerang ternak di Kabupaten Muara Enim diantaranya, *Lumpy Skin Disease* (LSD) atau kulit berbenjol, Penyakit Kurap (Scabies), Cacingan (Helminthiasis), *Xerophthalmia* dan *pinx eye* pada mata, gangguan pencernaan seperti kembung (bloat / tymphani) dan diare, keracunan, kesulitan melahirkan (distokia), prolapsus vagina, dan prolapsus uteri, kekurangan pakan (malnutrisi karena kemarau panjang elnino dengan kondisi pakan / rumput lapangan yang kering), dll. Sedangkan penyakit-penyakit yang menyerang ternak unggas pekarangan sektor 4 milik masyarakat antara lain berupa Penyakit *Newcastle Disease* (ND) atau tetelo, *Avian Influenza* (AI) atau Flu Burung, berak kapur (Pullorum), Snot (Infeksius Coryza), Gumboro (Infectious Bursal Disease / IBD), dll.
2. Masih kurangnya pembukaan pasar untuk produk hasil peternakan (Telur Ayam kampung). Tahun 2024 dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim melalui kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota dan untuk menjamin peredaran ternak memberikan Belanja Diserahkan Kepada Masyarakat Kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak berupa ternak ayam dan itik. Namun untuk saat ini, pemasaran telur khususnya telur ayam kampung masih dilaksanakan secara mikro.
3. Belum tersedianya Rumah Potong Hewan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Adanya rumah potong hewan akan memberikan fasilitas yang optimal terkait penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan pemotongan hewan ternak sesuai dengan persyaratan Kesehatan masyarakat veteriner, Kesehatan hewan, dan syariah agama.
4. Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan belum tangguh dan mandiri.
5. Bibit Ternak: kurangnya betina produktif (sapi), *inbreeding* dan belum luasnya capaian hasil program Inseminasi Buatan dan Embrio Transfer
6. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas pakan Ternak



7. Reproduksi ternak belum dikelola dengan baik.
8. Modal, Peralatan dan Teknologi, Harga pasar dan Posisi Tawar Peternak masih bersifat kecil dan belum menjadi orientasi bisnis.

Adapun **solusi dan langkah antisipatif** untuk menghadapi permasalahan tersebut meliputi :

1. Pemanfaatan lahan yang rendah ditindak lanjuti melalui adanya pembinaan yang berkelanjutan, hal ini berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan kesadaran petani untuk melakukan usaha budidaya pertanian di lahannya. Pembinaan petani ini dilakukan melalui penyuluhan dan pembinaan yang difokuskan pada kelembagaan petani yakni kelompok tani, Kelompok pengelola alsintan, kelompok perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan berbagai kelembagaan lain. Proses pembinaan ini harus dilakukan secara bersinergi agar proses budidaya pertanian dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk meningkatkan Pendapatan Petani perlu dilakukan penanganan terhadap produk hasil pertanian melalui kerjasama dengan berbagai *stakeholder*, baik Dinas Perdagangan, UMKM, Koperasi, maupun Swasta. Penanganan produk hasil pertanian diupayakan dapat meningkatkan nilai produk tersebut dengan cara mengolah menjadi produk olahan pangan serta Grading/klasifikasi produk. Selain itu pemanfaatan lahan untuk menambah pendapatan petani dengan melakukan pengayaan jenis tanaman atau komoditas pertanian dalam satu lahan atau disebut sebagai tumpang sari. Disisi budidaya, biaya produksi harus dapat ditekan dengan cara pemanfaatan teknologi tepat guna.

Adanya kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dan Pembangunan *Green House/Screen House*. Hal ini dapat Meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan menjadi lebih optimal. Melalui sub kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman permasalahan pemanfaatan lahan yang rendah diatasi melalui kegiatan Obor Pangan Lestari (OPAL) di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan guna pemanfaatan pekarangan dan pengembangan pangan. Tahun 2024 juga dilaksanakan kegiatan pemanfaatan pekarangan dan sebagai bentuk percepatan penanggulangan inflasi dan peningkatan produksi di Kabupaten Muara Enim.

2. Target pencapaian produksi padi guna tujuan swasembada beras akan sangat dipengaruhi oleh fenomena perubahan iklim yang telah menjadi isu global dan sangat berdampak terhadap kelangsungan pembangunan pertanian di masa yang akan datang. Untuk menyiapkan langkah antisipatifnya diperlukan analisis tentang kerentanan dampak perubahan iklim, inventarisasi dan peta wilayah yang terkena dampak, penyusunan *road map* rencana aksi adaptasi dan tindakan perubahan iklim dan lingkungan. Selain itu perlu disiapkan berbagai teknologi adaptasi yang baik seperti varietas unggul, teknologi pengelolaan lahan dan air, pemupukan dan paket teknologi adaptasi perubahan iklim.



3. Upaya untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dapat di tempuh melalui berbagai cara, salah satunya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim telah melakukan Penyusunan Dokumen Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Muara Enim untuk mengantisipasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Muara Enim sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menerbitkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2018 Tanggal 4 Januari 2018 Tentang Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim dan Pada Tahun 2021 dilakukan Audit lahan & verifikasi ulang lahan baku sawah oleh Kementerian ATR/BPN & Pusdatin Kementerian Pertanian Republik Indonesia sebagai dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pada tanggal 27 November 2020 telah disahkan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berkaitan dengan hal ini Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan merasa sangat perlu untuk melakukan upaya agar peraturan tersebut dapat dijadikan sebagai Perda, agar perlindungan terhadap luas lahan pangan berkelanjutan dapat memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Tahun 2023 telah disusun Naskah Akademik yang merupakan salah satu syarat penyusunan Perda LP2B selanjutnya tahun 2026 akan dilaksanakan penyusunan perda LP2B.

Untuk meningkatkan daya saing produk pertanian, dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok tani di desa dan kecamatan sehingga dengan semakin optimalnya kelompok tani, penyediaan produk pertanian secara berkelanjutan dan peningkatan peluang pasar dapat diwujudkan.

4. Untuk mengatasi dampak inflasi di bidang pertanian telah dilaksanakan pengadaan benih padi dan pupuk NPK serta pengadaan bibit cabai dan bawang merah beserta sarana produksi pertanian yang diserahkan kepada kelompok tani/masyarakat. Adanya pemenuhan fasilitas pendukung pertanian seperti pupuk dan benih dapat mendukung peningkatan produksi pertanian dan mengurangi tingginya biaya usaha tani yang ada pada masyarakat/petani.
5. Untuk mengatasi permasalahan dibidang peternakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan telah melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan penjaminan peredaran ternak di masyarakat melalui belanja yang diserahkan kepada masyarakat berupa ternak sapi,



kambing, itik, dan ayam kepada poktan sehingga dapat menunjang pemenuhan produk hasil peternakan secara berkelanjutan. Selain itu, Pembangunan Rumah Potong Hewan berserta Sarana dan prasarana pendukungnya akan dianggarkan kembali pada tahun 2024-2026 secara bertahap yang akan memberikan fasilitas yang optimal terkait penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan pemotongan hewan ternak sesuai dengan persyaratan Kesehatan masyarakat veteriner, Kesehatan hewan, dan syariah agama. Untuk meningkatkan peluang pasar produk hasil pertanian dan peternakan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan melaksanakan pasar tani di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan.

## **II. PENGHARGAAN DAN PRESTASI DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN DALAM KURUN WAKTU TAHUN 2024**

Tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Muara Enim meraih penghargaan sebagai berikut:

- a. Juara III Statistik Sektor (SISTER) Tahun 2024 Kategori Perangkat Daerah
- b. TOP 10 Inovasi Daerah kategori Perangkat Daerah dalam Rangka Penilaian/Asistensi Inovasi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- c. Pelepasan varietas Padi Lokal "Jambat Teras" yang diterima oleh Bupati Muara Enim dan disahkan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia

## **C. TUGAS PEMBANTUAN**

### **1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

- a. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25/KPTS/DIS.PTPH/2022 Tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
- b. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Nomor 120/KPTS/SEKR/DIS.PTPH/2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024
- c. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Tahun 2024 Nomor : SP DIPA - 018.08.4. 119137/2024 Tanggal 24 November 2023



## 2) GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI

### a. Instansi Pemberi Tugas

Instansi Pemberi Tugas Kementerian Pertanian Republik Indonesia, melalui Unit Organisasi adalah sebagai berikut :

- 1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Air Irigasi Pertanian
- 2) Direktorat Jenderal Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan
- 3) Direktorat Jenderal Pupuk dan Pestisida

### b. Program dan Kegiatan yang di tugaskan

Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya dalam rangka pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2024, Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim, adalah: **“Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas”**

#### 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

##### a) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

- a. Kegiatan Irigasi Peripaan 12 Unit
  - UPKK Gapoktan Cinta Usaha
  - UPKK Gapoktan Tambelang Jaya
  - UPKK Gapoktan Sinar Tani
  - UPKK Kelompok Tani Tebat Mampur
  - UPKK Kelompok Tani Muda Sepakat
  - UPKK Kelompok Tani Air Mio
  - UPKK Kelompok Tani Muda Ceria
  - UPKK Kelompok Tani Ulu Dusun
  - UPKK Kelompok Tani Padu Ringkih
  - UPKK Kelompok Tani Padang Baru
  - UPKK Kelompok Tani Paraku 2
  - UPKK Kelompok Tani Padang Selepah

- b. Kegiatan Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat Dana APBN Satker

❖ Kegiatan Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat 23 Unit

- UPKK Kelompok Tani Srikandi
- UPKK Kelompok Tani Pendecul Jaya
- UPKK Kelompok Tani Harapan Tani
- UPKK Kelompok Tani Suka Maju
- UPKK Kelompok Tani Pantai Selatan
- UPKK Kelompok Tani Himbe Pedare I
- UPKK Kelompok Tani Himbe Hawang II
- UPKK Kelompok Tani Seputih
- UPKK Kelompok Tani Lempaung
- UPKK Gapoktan Cinta Usaha



- UPKK Kelompok Tani Sinar Pagi
  - UPKK Kelompok Tani Sekenyang
  - UPKK Kelompok Tani Citra Tani
  - UPKK Kelompok Tani Sungai Bahu
  - UPKK Kelompok Tani Pinang Piji II
  - UPKK Kelompok Tani Karya Tani
  - UPKK Kelompok Tani Subur Makmur
  - UPKK Kelompok Tani Pinang Rapat
  - UPKK Kelompok Tani Danau Dangku
  - UPKK Kelompok Tani Suka Maju II
  - UPKK Kelompok Tani Darmojaya
  - UPKK Kelompok Tani Lebung Kecik
  - UPKK Kelompok Tani Maju Tani Sejahtera
- c. Kegiatan Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (Air Tanah) 15 Unit
- UPKK Kelompok Tani Harapan Bangsa
  - UPKK Kelompok Tani Jasa Tani
  - UPKK Kelompok Tani Padang 1
  - UPKK Kelompok Tani Sumber Makmur
  - UPKK Kelompok Tani Usaha Tani Mandiri
  - UPKK Kelompok Tani Jaya Bersama
  - UPKK Kelompok Tani Maju Bersama II
  - UPKK Kelompok Tani Usaha Maju
  - UPKK Kelompok Tani Sekundang Jaya
  - UPKK Kelompok Tani Karang Lantang
  - UPKK Kelompok Tani Lebak Tirta
  - UPKK Kelompok Tani Jaya Mulia
  - UPKK Kelompok Tani Beringin Jaya
  - UPKK Kelompok Tani Serasan Sekundang II
  - UPKK Kelompok Tani Gotong Royong I
- d. Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Dana APBN Pusat**
- a. Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) sebanyak 5 Unit
- UPKK Kelompok Tani Tembatu
  - UPKK Kelompok Tani Sinar Jaya
  - UPKK Kelompok Tani Usaha Maju
  - UPKK Kelompok Tani Ulak Rengas
  - UPKK Kelompok Tani Susukan
- b) Perlindungan dan Penyediaan Lahan**
- a. Kegiatan Optimasi Lahan 2.400 Ha
- 1.086 Ha
  - ❖ Kelompok Tani Serasan Sekundang I



- ❖ Kelompok Tani Serasan Sekundang II
- ❖ Kelompok Tani Harapan Baru
- ❖ Kelompok Tani Alam Karya
- ❖ Kelompok Tani Tanjung Perasinan
- ❖ Kelompok Tani Tunas Baru II
- ❖ Kelompok Tani Maju Bersama II
- ❖ Kelompok Tani Gotong Royong II
- ❖ Kelompok Tani Lebak Abadi
- ❖ Kelompok Tani Karya Bersama
- ❖ Kelompok Tani Setia
- ❖ Kelompok Tani Tunas Baru II
- ❖ Kelompok Tani Karya Bersama II
- ❖ Kelompok Tani Setia Kawan
- ❖ Kelompok Tani Karya Tani
- ❖ Kelompok Tani Sejahtera 1
- ❖ Kelompok Tani Mekar Jaya 2
- ❖ Kelompok Tani Kerabat Tani
- ❖ Kelompok Tani Seresah Jaya
- ❖ Kelompok Tani Mandiri Tani
- ❖ Kelompok Tani Setia Bersama
- ❖ Kelompok Tani Usaha Tani Mandiri
- ❖ Kelompok Tani Harapan Maju
- ❖ Kelompok Tani Kembang Harapan
- ❖ Kelompok Tani Sinar Harapan
- ❖ Kelompok Tani Lebak Penjalin
- ❖ Kelompok Tani Lebak Serasan
- ❖ Kelompok Tani Belida Elok
- ❖ Kelompok Tani Maju Bersama
- ❖ Kelompok Tani Doa Bersama
- ❖ Kelompok Tani Sejahtera
- ❖ Kelompok Tani Tunas Harapan
- ❖ Kelompok Tani Mitra Tani
- ❖ Kelompok Tani Ingin Jaya
- **1.314 Ha**
- ❖ Kelompok Tani Sungai Mampat
- ❖ Kelompok Tani Mitra Tani I
- ❖ Kelompok Tani Tunas Baru I
- ❖ Kelompok Tani Sungai Kakap II
- ❖ Kelompok Tani Swakarya Tani
- ❖ Kelompok Tani Suka Maju I
- ❖ Kelompok Tani Suka Maju II
- ❖ Kelompok Tani Gotong Royong I
- ❖ Kelompok Tani Beringin Jaya
- ❖ Kelompok Tani Merak Jaya
- ❖ Kelompok Tani Maju Bersama



- ❖ Kelompok Tani Usaha Bersama II
- ❖ Kelompok Tani Ulak Jaya
- ❖ Kelompok Tani Ulak Kembang
- ❖ Kelompok Tani Tumbuh Bersama
- ❖ Kelompok Tani Ampera Sejahtera
- ❖ Kelompok Tani Pipa
- ❖ Kelompok Tani Kepayang
- ❖ Kelompok Tani Bemban Burung
- ❖ Kelompok Tani Becat laut
- ❖ Kelompok Tani Becat Tengah
- ❖ Kelompok Tani Kembuaian
- ❖ Kelompok Tani Becat Pinggir
- ❖ Kelompok Tani Sungai Rotan Bontong
- ❖ Kelompok Tani Muara Becat
- ❖ Kelompok Tani Alur Becat
- ❖ Kelompok Tani Air Hitam
- ❖ Kelompok Tani Ampuan
- ❖ Kelompok Tani Buluran Kecil
- ❖ Kelompok Tani Salak
- ❖ Kelompok Tani Lingkis
- ❖ Kelompok Tani Sungai Lumut
- ❖ Kelompok Tani Lumpatan
- ❖ Kelompok Tani Arisan
- ❖ Kelompok Tani Langsung
- ❖ Kelompok Tani Semangi
- ❖ Kelompok Tani Teras
- ❖ Kelompok Tani Naburing II
- ❖ Kelompok Tani Cempaka Jaya
- ❖ Kelompok Tani Kembang Mawar
- ❖ Kelompok Tani Maju Bersama
- ❖ Kelompok Tani Setuntut
- ❖ Kelompok Tani Lebong Mangkuang
- ❖ Kelompok Tani Lebak Purun
- ❖ Kelompok Tani Sukamaju 2

b. Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan

- 1.086 Ha
- ❖ UPKK Gapoktan Mitra Usaha
- ❖ UPKK Gapoktan Sumber Rahayu
- ❖ UPKK Gapoktan Sinar Alam
- ❖ UPKK Gapoktan Bunga Harapan
- ❖ UPKK Gapoktan Mitra Tani
- ❖ UPKK Gapoktan Usaha Bersama
- ❖ UPKK Gapoktan Maju Bersama
- 1.314 Ha



- ❖ UPKK Gapoktan Mitra Usaha
- ❖ UPKK Gapoktan Sumber Rahayu
- ❖ UPKK Gapoktan Sinar Alam
- ❖ UPKK Gapoktan Bunga Harapan
- ❖ UPKK Gapoktan Mitra Tani
- ❖ UPKK Gapoktan Usaha Bersama
- ❖ UPKK Gapoktan Jaya Bersama
- ❖ UPKK Gapoktan Serasan
- ❖ UPKK Gapoktan Bekarya
- ❖ UPKK Kelompok Tani Maju Bersama
- ❖ UPKK Gapoktan Setuntut
- ❖ UPKK Gapoktan Lebong Mengkuang
- ❖ UPKK Gapoktan Lebak Purun
- ❖ UPKK Gapoktan Suka Maju II

c) **Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP**

- a. Layanan Dukungan Manajemen Satker

d) **Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian**

- a. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian

3) **PAGU ANGGARAN DAN REALISASI**

a. **Pagu Anggaran**

Pagu Anggaran Program dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim, Dana APBN Tugas Pembantuan sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor Tahun Anggaran 2024 Nomor DIPA : 018.08.4.119137/2024 tanggal 24 November 2023; Dapat dilihat pada Tabel Berikut :

**Tabel 3.36 Capaian Realisasi Anggaran Pagu Anggaran Program dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim**

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
-	<u>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</u>	<u>19.312.500.000,-</u>	<u>18.900.667.850,-</u>	<u>97,87</u>
1	<u>Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian</u>	<u>5.760.000.000,-</u>	<u>5.537.096.800,-</u>	<u>96,13</u>
a.	<u>Irigasi Perpipaan</u>	<u>1.200.000.000,-</u>	<u>1.157.466.800,-</u>	<u>96,46</u>
b.	<u>Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat</u>	<u>4.560.000.000</u>	<u>4.379.630.000</u>	<u>96,04</u>
2	<u>Perlindungan dan Penyediaan Lahan</u>	<u>13.542.500.000,-</u>	<u>13.358.821.050,-</u>	<u>98,64</u>
a.	<u>Optimasi Lahan</u>	<u>13.542.500.000</u>	<u>13.358.821.050</u>	<u>98,64</u>



3	<u>Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian</u>	<u>10.000.000,-</u>	<u>4.750.000,-</u>	<u>47,50</u>
a	<u>Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian</u>	<u>10.000.000,-</u>	<u>4.750.000,-</u>	<u>47,50</u>
-	<b><u>Program Dukungan Manajemen</u></b>	<b><u>47.280.000,-</u></b>	<b><u>36.555.000,-</u></b>	<b><u>77,32</u></b>
1	<u>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian</u>	<u>47.280.000,-</u>	<u>36.555.000,-</u>	<u>77,32</u>
a	<u>Layanan Manajemen Keuangan</u>	<u>47.280.000,-</u>	<u>36.555.000,-</u>	<u>77,32</u>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>19.359.780.000,-</u></b>	<b><u>18.937.222.850,-</u></b>	<b><u>97,82</u></b>

#### b. Realisasi Keuangan

Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan terhadap Pagu DIPA Tugas Pembantuan Tahun 2024, adalah sebesar Rp. 18.937.222.850,- atau sebesar 97,82% dari jumlah pagu sebesar Rp. 19.359.780.000,-

#### 4) REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

##### A. Program ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Realisasi Program ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas Dana Tugas Pembantuan Tahun 2023, melalui beberapa Kegiatan dan subkegiatan, adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

##### 1) Irigasi Perpipaan

Tabel 3.37 Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (Perpipaan)

No.	Desa/Kecamatan	Kelompok Tani	Volume (Unit)	Realisasi Fisik (%)
1.	Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujan Mas	UPKK Gapoktan Cinta Usaha	1 Unit	100
2.	Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim	UPKK Gapoktan Tambelang Jaya	1 Unit	100
3.	Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim	UPKK Gapoktan Sinar Tani	1 Unit	100
4.	Desa Muara Danau Kecamatan Semende Darat Laut	UPKK Kelompok Tani Tebat Mampur	1 Unit	100
5.	Desa Pagar Agung Kecamatan Semende Darat Laut	UPKK Kelompok Tani Muda Sepakat	1 Unit	100
6.	Desa Muara Danau Kecamatan Semende Darat Laut	UPKK Kelompok Tani Air Mio	1 Unit	100
7.	Desa Tenam Bungkok Kecamatan Semende Darat Tengah	UPKK Kelompok Tani Muda Ceria	1 Unit	100
8.	Desa Sri Tanjung Kecamatan Semende Darat Tengah	UPKK Kelompok Tani Ulu Dusun	1 Unit	100
9.	Desa Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu	UPKK Kelompok Tani Padu Ringkih	1 Unit	100



10.	Desa Datar Lebar Kecamatan Semende Darat Ulu	UPKK Kelompok Tani Padang Baru	1 Unit	100
11.	Desa Muara Emil Kecamatan Tanjung Agung	UPKK Kelompok Tani Paraku 2	1 Unit	100
12.	Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu	UPKK Kelompok Tani Padang Selepah	1 Unit	100

## 2) Kegiatan Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat

**Tabel 3.37 Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (Perpompaan Besar Wilayah Barat)**

No.	Desa/Kecamatan	Kelompok Tani	Volume (Unit)	Realisasi Fisik (%)
1.	Desa Dangku Kecamatan Empat Petulai Dangku	UPKK Kelompok Tani Srikandi	1 Unit	100
2.	Desa Dangku Kecamatan Empat Petulai Dangku	UPKK Kelompok Tani Pendecul Jaya	1 Unit	100
3.	Desa Gunung Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku	UPKK Kelompok Tani Harapan Tani	1 Unit	100
4.	Desa Batu Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku	UPKK Kelompok Tani Suka Maju	1 Unit	100
5.	Desa Kuripan Selatan Kecamatan Empat Petulai Dangku	UPKK Kelompok Tani Pantai Selatan	1 Unit	100
6.	Desa Tanjung Serian Kecamatan Muara Enim	UPKK Kelompok Tani Himbe Pedare I	1 Unit	100
7.	Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim	UPKK Kelompok Tani Himbe Hawang II	1 Unit	100
8.	Dess Ujan Mas Lama Kecamatan Ujan Mas	UPKK Kelompok Tani Seputih	1 Unit	100
9.	Desa Tanjung Serian Kecamatan Muara Enim	UPKK Kelompok Tani Lempaung	1 Unit	100
10.	Desa Pinang Belarik Kecamatan Ujan Mas	UPKK Gapoktan Cinta Usaha	1 Unit	100
11.	Desa Simpang Tanjung Kecamatan Belimbing	UPKK Kelompok Tani Sinar Pagi	1 Unit	100

## 3) Kegiatan Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat (Air Tanah)

No.	Desa/Kecamatan	Kelompok Tani	Volume (Unit)	Realisasi Fisik (%)
1.	Desa Pagar Agung Kecamatan Semende Darat Laut	UPKK Kelompok Tani Harapan Bangsa	1 Unit	100
2.	Desa Muara Harapan Kecamatan Muara Enim	UPKK Kelompok Tani Jasa Tani	1 Unit	100
3.	Desa Penyandingan Kecamatan Semende Darat Laut	UPKK Kelompok Tani Padang 1	1 Unit	100
4.	Desa Embawang Kecamatan Tanjung Agung	UPKK Kelompok Tani Sumber Makmur	1 Unit	100
5.	Desa Lesung Batu Kecamatan Tanjung Agung	UPKK Kelompok Tani Karang Lantang	1 Unit	100



No.	Desa/Kecamatan	Kelompok Tani	Volume (Unit)	Realisasi Fisik (%)
6.	Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida	UPKK Kelompok Tani Lebak Tirta	1 Unit	100
7.	Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida	UPKK Kelompok Tani Jaya Mulia	1 Unit	100
8.	Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida	UPKK Kelompok Tani Beringin Jaya	1 Unit	100
9.	Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida	UPKK Kelompok Tani Serasan Sekundang II	1 Unit	100
10.	Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida	UPKK Kelompok Tani Gotong Royong I	1 Unit	100
11.	Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida	UPKK Kelompok Tani Usaha Tani Mandiri	1 Unit	100
12.	Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida	UPKK Kelompok Tani Jaya Bersama	1 Unit	100
13.	Desa Gedung Buruk Kecamatan Muara Belida	UPKK Kelompok Tani Maju Bersama II	1 Unit	100
14.	Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida	UPKK Kelompok Tani Usaha Maju	1 Unit	100
15.	Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Beldia	UPKK Kelompok Tani Sekundang Jaya	1 Unit	100

## 2. Perlindungan dan Penyediaan Lahan

**Tabel 3.38 Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (Perlindungan dan Penyediaan Lahan)**

### 1) Kegiatan Optimasi Lahan

- 1.086 Ha

No.	Desa/Kecamatan	Kelompok Tani	Volume (Ha)	Realisasi Fisik (%)
1.	Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Serasan Sekundang I	45 Ha	100
2.	Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Serasan Sekundang II	37 Ha	100
3.	Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Harapan Baru	44 Ha	100
4.	Desa Gedung Buruk Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tan Alam Karya	37 Ha	100
5.	Desa Gedung Buruk Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Tanjung Perasinan	39 Ha	100
6.	Desa Gedung Buruk Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Tunas Baru II	35 Ha	100
7.	Desa Gedung Buruk Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Maju Bersama II	37 Ha	100
8.	Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Gotong Royong II	28 Ha	100
9.	Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Lebak Abadi	31 Ha	100
10.	Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Karya Bersama	19 Ha	100



No.	Desa/Kecamatan	Kelompok Tani	Volume (Ha)	Realisasi Fisik (%)
11.	Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Setia	6 Ha	100
12.	Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Tunas Baru II	10 Ha	100
13.	Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Karya Bersama II	21 Ha	100
14.	Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Setia Kawan	24 Ha	100
15.	Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Karya Tani	24 Ha	100
16.	Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Sejahtera 1	21 Ha	100
17.	Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Mekar Jaya 2	25 Ha	100
18.	Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Kerabat Tani	35 Ha	100
19.	Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Seresah Jaya	35 Ha	100
20.	Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Mandiri Tani	30 Ha	100
21.	Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Setia Bersama	32 Ha	100
22.	Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Usaha Tani Mandiri	36 Ha	100
23.	Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Harapan Maju	37 Ha	100
24.	Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Kembang Harapan	36 Ha	100
25.	Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Sinar Harapan	37 Ha	100
26.	Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Lebak Penjalin	38 Ha	100
27.	Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Lebak Serasan	34 Ha	100
28.	Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Belida Elok	38 Ha	100
29.	Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Maju Bersama	40 Ha	100
30.	Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Doa Bersama	41 Ha	100
31.	Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Sejahtera	23 Ha	100
32.	Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Tunas Harapan	39 Ha	100
33.	Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Mitra Tani	36 Ha	100
34.	Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Ingin Jaya	36 Ha	100



- 1.314 Ha

No.	Desa/Kecamatan	Kelompok Tani	Volume (Ha)	Realisasi Fisik (%)
1.	Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Sungai Mampat	44 Ha	100
2.	Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Mitra Tani I	50 Ha	100
3.	Desa Gedung Buruk Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Tunas Baru I	32 Ha	100
4.	Desa Gedung Buruk Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Sungai Kakap II	40 Ha	100
5.	Desa Gedung Buruk Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Swakarya Tani	38 Ha	100
6.	Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Suka Maju I	35 Ha	100
7.	Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Suka Maju II	38 Ha	100
8.	Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Gotong Royong I	35 Ha	100
9.	Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Serasan Jaya	30 Ha	100
10.	Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Sekundang Jaya	30 Ha	100
11.	Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Beringin Jaya	38 Ha	100
12.	Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Merak Jaya	35 Ha	100
13.	Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Maju Bersama	38 Ha	100
14.	Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Usaha Bersama II	35 Ha	100
15.	Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Ulak Jaya	32 Ha	100
16.	Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Ulak Kembang	42 Ha	100
17.	Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Tumbuh Bersama	33 Ha	100
18.	Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida	Kelompok Tani Ampera Sejahtera	38 Ha	100
19.	Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Pipa	24 Ha	100
20.	Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Kepayang	20 Ha	100
21.	Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Bemban Burung	24 Ha	100
22.	Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Becat Laut	24 Ha	100
23.	Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Becat Tengah	20 Ha	100
24.	Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Kembuaian	15 Ha	100



No.	Desa/Kecamatan	Kelompok Tani	Volume (Ha)	Realisasi Fisik (%)
25.	Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Becat Pinggir	24 Ha	100
26.	Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Sungai Rotan Bontong	23 Ha	100
27.	Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Muara Becat	20 Ha	100
28.	Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Alur Becat	21 Ha	100
29.	Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Air Hitam	16 Ha	100
30.	Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Ampuan	24 Ha	100
31.	Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Buluran Kecil	22 Ha	100
32.	Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Salak	15 Ha	100
33.	Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Lingkis	23 Ha	100
34.	Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Sungai Lumut	22 Ha	100
35.	Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Lumpatan	24 Ha	100
36.	Desa Petar Luar Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Arisan	22 Ha	100
37.	Desa Petar Luar Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Langsung	24 Ha	100
38.	Desa Petar Luar Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Semangi	23 Ha	100
39.	Desa Petar Luar Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Teras	23 Ha	100
40.	Desa Petar Luar Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Naburing II	24 Ha	100
41.	Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Cempaka Jaya	45 Ha	100
42.	Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Kembang Mawar	24 Ha	100
43.	Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Maju Bersama	24 Ha	100
44.	Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Setuntut	23 Ha	100
45.	Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Lebong Mangkuang	23 Ha	100
46.	Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan	Kelompok Tani Lebak Purun	10 Ha	100
47.	Desa Baturaja Kecamatan Empat Petulai Dangku	Kelompok Tani Sukamaju 2	25 Ha	100



## 2) Perbaikan Infrastruktur Optimasi Lahan

**Tabel 3.39 Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian (Perbaikan Optimalisasi Lahan)**

- 1.086 Ha

No.	Desa/Kecamatan	Kelompok Tani	Volume (Ha)	Realisasi Fisik (%)
1.	Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida	UPKK Gapoktan Mitra Usaha	126 Ha	100
2.	Desa Gedung Buruk Kecamatan Muara Belida	UPKK Gapoktan Sumber Rahayu	148 Ha	100
3.	Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida	UPKK Gapoktan Sinar Alam	163 Ha	100
4.	Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Belida	UPKK Gapoktan Bunga Harapan	146 Ha	100
5.	Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida	UPKK Gapoktan Mitra Tani	141 Ha	100
6.	Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida	UPKK Gapoktan Usaha Bersama	147 Ha	100
7.	Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida	UPKK Gapoktan Maju Bersama	215 Ha	100

- 1.314 Ha

No.	Desa/Kecamatan	Kelompok Tani	Volume (Ha)	Realisasi Fisik (%)
1.	Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida	UPKK Gapoktan Mitra Usaha	94 Ha	100
2.	Desa Gedung Buruk Kecamatan Muara Belida	UPKK Gapoktan Sumber Rahayu	110 Ha	100
3.	Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida	UPKK Gapoktan Sinar Alam	108 Ha	100
4.	Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Belida	UPKK Gapoktan Bunga Harapan	60 Ha	100
5.	Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida	UPKK Gapoktan Mitra Tani	146 Ha	100
6.	Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida	UPKK Gapoktan Usaha Bersama	145 Ha	100
7.	Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan	UPKK Gapoktan Jaya Bersama	361 Ha	40
8.	Desa Petar Luar Kecamatan Sungai Rotan	UPKK Gapoktan Serasan	116 Ha	16
9.	Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan	UPKK Gapoktan Bekarya	69 Ha	40
10.	Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan	UPKK Kelompok Tani Maju Bersama	24 Ha	24
11.	Desa Sukarami Kecamatan Sungai Rotan	UPKK Gapoktan Lebak Purun	10 Ha	10
12.	Desa Baturaja Kecamatan Empat Petulai Dangku	UPKK Gapoktan Suka Maju II	25 Ha	100



### 3) Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Dana APBN Pusat

**Tabel 3.40 Pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Dana APBN Pusat**

No.	Desa/Kecamatan	Kelompok Tani	Volume (Unit)	Realisasi Fisik (%)
1.	Desa Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas	UPKK Kelompok Tani Tembatu	1 Unit	100
2.	Desa Pandan Enim Kecamatan Tanjung Agung	UPKK Kelompok Tani Sinar Jaya	1 Unit	100
3.	Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut	UPKK Kelompok Tani Usaha Maju	1 Unit	100
4.	Desa Pandan Enim Kecamatan Tanjung Agung	UPKK Kelompok Tani Ulak Rengas	1 Unit	100
5.	Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung	UPKK Kelompok Tani Susukan	1 Unit	100

### 4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP

- a. Layanan Manajemen Keuangan

### 5) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

- a. Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian

## 5) PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

### A. PERMASALAHAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Dana APBN Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Muara Enim, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain sebagai berikut :

- Terdapat banyak kelompok tani/Gapoktan penerima manfaat Bantuan pemerintah yang berlokasi jauh dari ibukota Kabupaten, sehingga administrasi Kegiatan sering mengalami keterlambatan.
- Pembukaan Rekening bagi kelompok tani cukup sulit di Bank, karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi.
- Lambatnya Penyampaian Laporan Dari Lapangan / Kelompok Tani

### B. PEMECAHAN MASALAH

- Beberapa Petugas Dinas melakukan lembur diluar jam Dinas walaupun tidak ada uang lembur.
- Kelompok Tani berusaha dengan sabar untuk membuka rekening di Bank walaupun persyaratannya cukup banyak.
- Kelompok Tani berusaha mempercepat menyampaikan laporan ke Dinas



## D. LAPORAN DANA ALOKASI KHUSUS/DAK FISIK PENUGASAN

### 1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang diterima serta pelaksanaannya dalam rangka pelaksanaan Dana Alokasi Khusus 2024 (DAK Fisik Penugasan), pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim sesuai dengan hasil harmonisasi pada website KRISNA dan sesuai dengan Rencana Kerja (RK) yang telah disepakati oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim dan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian Republik Indonesia tanggal 6 Desember 2023, dengan nomenklatur subbidang Pertanian - Tematik Pengembangan Food Estate, Rincian Kegiatan sebagai berikut:

- a) Pembangunan/Rehabilitasi Sumber-sumber air (Irigasi air tanah dangkal/dalam, bangunan pelengkap irigasi dan dam parit)
- b) Pembangunan Screenhouse Modern Pengembangan Komoditas Hortikultura
- c) Pembangunan Unit Olahan Pakan Ternak (Ruminansia dan Unggas)
- d) Sarana data dan informasi Balai Penyuluhan Pertanian

#### A. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sumber-sumber air (Irigasi air tanah dangkal/dalam, bangunan pelengkap irigasi dan dam parit)

##### 1. Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Tanaman Pangan

Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Tanaman Pangan dilaksanakan secara swakelola oleh 2 kelompok tani penerima manfaat yaitu:

- a) Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Tanaman Pangan Kecamatan Muara Belida Desa Tanjung Baru Poktan Lebak Makmur I (DAK Fisik Penugasan)
- b) Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Tanaman Pangan Kecamatan Muara Belida Desa Tanjung Baru Poktan Mekar Jaya I (DAK Fisik Penugasan)

Realisasi Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Tanaman Pangan dengan total anggaran Rp 150.000.000,00 realisasi sebesar Rp 150.000.000,00 atau 100%.

**Tabel 3.41 Realisasi Kegiatan Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Tanaman Pangan**

No	Kegiatan	Volume	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Output (%)
	Belanja Persediaan untuk dijual/ diserahkan		150.000.000	150.000.000	100,00	
	Persediaan untuk dijual/ diserahkan kepada masyarakat					
1	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Tanaman Pangan Kecamatan Muara Belida Desa Tanjung Baru Poktan Lebak	1 Unit	75.000.000	75.000.000	100,00	100



No	Kegiatan	Volume	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Output (%)
	Makmur I (DAK Fisik Penugasan)					
2	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal Tanaman Pangan Kecamatan Muara Belida Desa Tanjung Baru Poktan Mekar Jaya I (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	75.000.000	75.000.000	100,00	100
	<b>TOTAL</b>		<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>100,00</b>	

## 2 Pembangunan/Rehabilitasi Damparit

Pembangunan/Rehabilitasi Damparit dilaksanakan secara swakelola oleh 2 kelompok tani penerima manfaat yaitu:

- a) Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit Poktan Tani Usaha Maju Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut
- b) Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit Poktan Matang Basung Desa Gunung Agung Kecamatan Semende Darat Tengah

Realisasi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Damparit dengan total anggaran Rp 240.000.000,00 realisasi sebesar Rp 240.000.000,00 atau 100%.

**Tabel 3.42 Realisasi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Damparit**

No	Kegiatan	Vol	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Output (%)
	<b>Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan</b>		<b>240.000.000</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat</b>					
1	Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit Poktan Tani Usaha Maju Desa Tanah Abang Kecamatan Semende Darat Laut	1 Unit	120.000.000	120.000.000	100,00	100
2	Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit Poktan Matang Basung Desa Gunung Agung Kecamatan Semende Darat Tengah	1 Unit	120.000.000	120.000.000	100,00	100
	<b>TOTAL</b>		<b>240.000.000</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,00</b>	



**e. Pembangunan Screenhouse Modern Pengembangan Komoditas Hortikultura**

Pembangunan Screenhouse Modern Pengembangan Komoditas Hortikultura terdiri atas Screenhouse modern komoditas Sayuran sebanyak 5 Unit dan Screenhouse Modern Komoditas Buah sebanyak 1 unit dengan total alokasi anggaran senilaiRp 3.000.000.000,00. Pembangunan screenhouse modern dilaksanakan pada 6 kelompok tani penerima yaitu:

Pembangunan Screen House Modern Pengembangan Hortikultura Komoditas Sayuran Kecamatan Gelumbang Desa Segayam Poktan Tunas Harapan (DAK Fisik Penugasan)

Pembangunan Screen House Modern Pengembangan Hortikultura Sayuran Kecamatan Gelumbang Desa Tambangan Kelekar Poktan Pancur II (DAK Fisik Penugasan)

Pembangunan screen house Modern Pengembangan Hortikultura Komoditas Sayuran Kecamatan Gunung Megang Desa Panang Jaya Poktan Sido Makmur (DAK Fisik Penugasan)

Pembangunan screen house Modern Pengembangan Hortikultura Komoditas Sayuran Kecamatan Semende Darat Tengah Desa Gunung Agung Poktan Matang Basung (DAK Fisik Penugasan)

Pembangunan screen house Modern Pengembangan Hortikultura Komoditas Sayuran Kecamatan Empat Petulai Danguku Desa Pangkalan Babat Poktan Babat Melake (DAK Fisik Penugasan)

Pembangunan screen house Modern Pengembangan Hortikultura Komoditas Buah Kecamatan Gelumbang Desa Paya Bakal Poktan Subur Tani (DAK Fisik Penugasan)

Realisasi Kegiatan Pembangunan Screenhouse Modern Pengembangan Komoditas Hortikultura dengan total anggaran Rp 3.000.000.000,00 realisasi sebesar Rp 2.925.500.000,00 atau 97,52%.

**Tabel 3.42 Realisasi Kegiatan Pembangunan Screenhouse**

No	Kegiatan	Volume	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Output (%)
	<b>Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan</b>		<b>3.000.000.000</b>	<b>2.925.500.000</b>	<b>97,52</b>	<b>100</b>
	<b>Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat</b>					
1	Pembangunan Screen House Modern Pengembangan Hortikultura Komoditas Sayuran Kecamatan Gelumbang	1 Unit	500.000.000	476.900.000	95,38	100



No	Kegiatan	Volume	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Output (%)
	Desa Segayam Poktan Tunas Harapan (DAK Fisik Penugasan)					
2	Pembangunan Screen House Modern Pengembangan Hortikultura Sayuran Kecamatan Gelumbang Desa Tambangan Kelekar Poktan Pancur II (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	500.000.000	499.600.000	99,92	100
3	Pembangunan screen house Modern Pengembangan Hortikultura Komoditas Sayuran Kecamatan Gunung Megang Desa Panang Jaya Poktan Sido Makmur (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	500.000.000	474.900.000	94,98	100
4	Pembangunan screen house Modern Pengembangan Hortikultura Komoditas Sayuran Kecamatan Semende Darat Tengah Desa Gunung Agung Poktan Matang Basung (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	500.000.000	474.900.000	94,98	100
5	Pembangunan screen house Modern Pengembangan Hortikultura Komoditas Sayuran Kecamatan Empat Petulai Dangku Desa Pangkalan Babat Poktan Babat Melake (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	500.000.000	499.600.000	99,92	100
6	Pembangunan screen house Modern Pengembangan Hortikultura Komoditas Buah	1 Unit	500.000.000	499.600.000	99,92	100



No	Kegiatan	Volume	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Output (%)
	Kecamatan Gelumbang Desa Paya Bakal Poktan Subur Tani (DAK Fisik Penugasan)					
	<b>TOTAL</b>	<b>6 Unit</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>2.925.500.000</b>	<b>97,52</b>	<b>100</b>

**f. Pembangunan Unit Olahan Pakan Ternak (Ruminansia dan Unggas)**

Pembangunan Unit Olahan Pakan Ternak Unggas pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim sebanyak 13 Unit terdiri atas bangunan gudang olahan pakan unggas dan alat dan mesin olahan pakan unggas dengan total seluruh alokasi anggaran pada Rencana Kerja (RK) adalah Rp 5.200.000.000,00. Pembangunan Unit Olahan Pakan Ternak Unggas dilaksanakan pada Kecamatan Muara Belida pada Kelompok Tani Berikut:

- Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida Poktan Doa Bersama
- Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida Poktan Sumber Rezeki
- Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida Poktan Musi Mandiri
- Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida Poktan Jaya Mulia
- Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida Poktan Sukses Bersama
- Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida Poktan Usaha Bersama
- Desa Gedung Buruk kecamatan Muara Belida Poktan Karya Utama II
- Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Poktan Beringin Jaya
- Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida Poktan Sekundang Jaya
- Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Poktan Gotong Royong I
- Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida Poktan Mitra Tani
- Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Poktan Lebak Jaya
- Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida Poktan Serasan Sekundang II

Realisasi Kegiatan Pembangunan Unit Olahan Pakan Ternak Unggas dengan total anggaran Rp 5.200.000.000,00 realisasi sebesar Rp 5.100.256.713,00 atau 98,08%.

**Tabel 3.43 Realisasi Kegiatan Pembangunan Unit Olahan Pakan Ternak Unggas**

No	Kegiatan	Volume	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Output (%)
	Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan  Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat		5.200.000.000	5.100.256.713	98,08	100



No	Kegiatan	Volume	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Output (%)
	<b>Pembangunan Gudang Olah Pakan Unggas</b>					100
1	Pembangunan Gudang Olah Pakan Unggas Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida Poktan Doa Bersama (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	200.000.000	199.993.341	100,00	100
2	Pembangunan Gudang Olah Pakan Unggas Desa Arisan Musi Kecamatan Muara Belida Poktan Sumber Rezeki (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	200.000.000	199.993.341	100,00	100
3	Pembangunan Gudang Olah Pakan Unggas Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida Poktan Musi Mandiri (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	200.000.000	199.993.315	100,00	100
4	Pembangunan Gudang Olah Pakan Unggas Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida Poktan Jaya Mulia (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	200.000.000	199.992.231	100,00	100
5	Pembangunan Gudang Olah Pakan Unggas Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida Poktan Sukses Bersama (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	200.000.000	199.993.341	100,00	100



No	Kegiatan	Volume	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Output (%)
6	Pembangunan Gudang Olah Pakan Unggas Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida Poktan Usaha Bersama (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	200.000.000	199.993.341	100,00	100
7	Pembangunan Gudang Olah Pakan Unggas Desa Gedung Buruk kecamatan Muara Belida Poktan Karya Utama II (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	200.000.000	199.994.451	100,00	100
8	Pembangunan Gudang Olah Pakan Unggas Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida Poktan Beringin Jaya (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	200.000.000	199.991.121	100,00	100
9	Pembangunan Gudang Olah Pakan Unggas Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida Poktan Sekundang Jaya (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	200.000.000	199.993.341	100,00	100
10	Pembangunan Gudang Olah Pakan Unggas Desa Mulia Abadi Kecamatan Muara Belida Poktan Gotong Royong I (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	200.000.000	199.994.451	100,00	100
11	Pembangunan Gudang Olah	1 Unit	200.000.000	199.973.805	99,99	100



No	Kegiatan	Volume	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Output (%)
	Pakan Unggas Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida Poktan Mitra Tani (DAK Fisik penugasan)					
12	Pembangunan Gudang Olahan Pakan Unggas Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida Poktan Lebak Jaya (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	200.000.000	199.992.231	100,00	100
13	Pembangunan Gudang Olahan Pakan Unggas Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida Poktan Serasan Sekundang II (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	200.000.000	199.994.445	100,00	100
	ALAT DAN MESIN OLAHAN PAKAN UNGGAS					
1	Mesin Mixer (DAK Fisik penugasan)	13 Unit	390.000.000	<b>342.500.000</b>	87,82	100
2	Mesin Penepung (DAK Fisik Penugasan)	13 Unit	871.000.000	<b>826.800.000</b>	94,93	100
3	Mesin Cetak Pelet (DAK Fisik Penugasan)	13 Unit	455.000.000	<b>449.800.000</b>	98,86	100
4	Timbangan (DAK Fisik Penugasan)	13 Unit	78.000.000	<b>77.470.918</b>	99,32	100
5	Mesin Jahit Karung (DAK Fisik Penugasan)	13 Unit	45.500.000	44.415.540	97,62	100
6	Karung ( DAK Fisik Penugasan)	3250 Lembar	19.500.000	<b>19.139.250</b>	98,15	100
7	Motor Roda 3 (ganti No)	13 Unit	520.000.000	<b>519.938.250</b>	99,99	100
8	Alat dan Mesin Pendukung (Mesin Pencacah Hijauan)	13 Unit	221.000.000	<b>220.300.000</b>	99,68	100



No	Kegiatan	Volume	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Output (%)
	TOTAL	13 Unit	5.200.000.000	5.100.256.713	98,08	100

**g. Sarana data dan informasi Balai Penyuluhan Pertanian**

Pengadaan sarana data dan informasi Balai Penyuluhan Pertanian sebanyak 1 Paket pada BPP Patra Tani Kecamatan Muara Belida dengan pagu anggaran Rp 50.000.000,00 dan Realisasi Rp 49.995.782,00 atau 99,99% terdiri atas 12 item yaitu:

**Tabel 3.44 Pengadaan sarana data dan informasi Balai Penyuluhan Pertanian**

No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan
1.	PC ALL in OneSpesifikasi: procesor i5, Ram 8gb, Ssd 512gb	1	Unit	15.956.250
2.	HDMI Splitter Spesifikasi : Input 1 port HDMI, Output 4 Port HDMI, FHD.	1	Unit	377.844
3.	Kabel HDMI 0,6 M Spesifikasi : Kecepatan Transmisi 48Gbps, Konektor 24K.	1	Unit	227.217
4.	LCD Projector (LCD Projector) Spesifikasi: Brightness 3600 Lumens, Aspect Ratio 4:3), Lens Auto Fokus, Resolution 1920x1080 FHD.	1	Unit	7.659.000
5.	Wireless Sound Speaker Spesifikasi : Woofer 10 in, USB MP3 Player, Bluetooth connection, Radio	1	Unit	6.727.155
6.	Multimedia Sound SpeakerSpesifikasi : Bluetooth connection, Radio, USB, SD Card/MMC, Aux, Line Input	1	Unit	1.659.450
7.	Wireless Microphone System Spesifikasi: 4-Channel, UHF, Dynamic range: >100d8	1	Unit	7.978.125
8.	Uninterruptible Power Supplu (UPS) Spesifkasi: Power 350W/700VA, Lead-acid battery.	1	Unit	1.385.003
9.	Web Camera Spesifikasi: Resolusi 1080p/30fps, USB 3.0.	1	Unit	528.471
10.	USB Extender Spesifikasi: USB-C, Port HDMI, PD 100W	1	Unit	302.531



No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan
11.	Smart TV Monitor 43 Inch (43 Inchi)Spesifikasi : Smart TV 43 Inch FHD, RAM 1,5 GB, ROM 8 GB)	1	Unit	6.663.330
12.	Kabel HDMI 5M Spesifikasi: Panjang 5 Meter, HDR, 18GBPS, 4k/60 Hz	1	Unit	531.407
	<b>Jumlah</b>			<b>49.995.782</b>

No	Kegiatan	Volume	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Output (%)
	<b>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya Berupa Sarana data dan informasi BPP Patra Tani Kecamatan Muara Belida (DAK Fisik Penugasan)</b>		<b>50.000.000</b>	<b>49.995.782</b>	<b>99,99</b>	
1	Sarana data dan informasi BPP Patra Tani Kecamatan Muara Belida (DAK Fisik Penugasan)	1 Unit	50.000.000	49.995.782	99,99	100
	<b>TOTAL</b>		<b>50.000.000</b>	<b>49.995.782</b>	<b>99,99</b>	

**h. Kegiatan Penunjang (DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian 5%)**

Kegiatan penunjang terdiri atas 5 pembagian yang mendukung terlaksananya kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun 2024 yaitu:

- c) Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual
- d) jasa pendamping/fasilitator non aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (penugasan)
- e) Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan)
- f) penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah)(penugasan)
- g) perjalanan Dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan (penugasan)

Total pagu anggaran untuk kegiatan penunjang awalnya yaitu Rp 407.562.000,00 dengan realisasi senilai Rp 306.068.950,00 atau 75,10%. Rendahnya realisasi dikarenakan perjalanan Dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan (penugasan) yang



dianggarkan Rp 171.162.000,00 pada penyaluran Tahap III telah dilakukan efisiensi sesuai dengan kebutuhan sehingga Anggaran yang di salurkan ke KASDA Muara Enim senilai 71.162.000,00. Dengan demikian realisasi Dana Penunjang yang seharusnya adalah dengan Pagu Anggaran Rp 307.562.000,00 dan realisasi Rp 306.068.950,00 atau 99,51%.

**Tabel 3.45 Realisasi Anggaran Kegiatan Penunjang**

No	Kegiatan	Volume	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Output (%)
1	09.01.00804 ( Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (penugasan tematik 04)	1 Paket	100.000.000	100.000.000	99.178.500	99,18	100
2	09.01.01004 ( jasa pendamping/fasilitator non aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola (penugasan) - tematik 04)	24 orang / bulan	38.400.000	38.400.000	38.400.000	100,00	100
3	09.01.01104 (Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan) - tematik 04	25 orang / bulan	87.500.000	87.500.000	87.500.000	100,00	100
4	09.01.01.01204 (penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah)(penugasan) - tematik 04	12 Frekuensi	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100,00	100
5	09.01.01304 (perjalanan Dinas ke/ dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan (penugasan) - tematik 04	144 Frekuensi	171.162.000	71.162.000	70.490.450	99,51	100
	<b>TOTAL</b>		<b>407.562.000</b>	<b>307.562.000</b>	<b>306.068.950</b>	<b>99,74</b>	



## URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN OPD DINAS PERKEBUNAN

### 1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2024, alokasi Belanja Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp.25.619.063.641,00 (Dua Puluh Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)** dan terealisasi sebesar **Rp. 20.759.317.255,00 (Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah)** atau **81,03%** dan kinerja keluaran (output) sebesar **95%** dengan rincian sebagai berikut :

#### 1) Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp.24.957.138.641,00 (Dua puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah)** terealisasi pada Tahun 2024 sebesar **Rp.20.124.788.255,00 (Dua puluh milyar seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh lima rupiah)** atau **80,64%** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

#### 2) Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp.661.925.000,00 (Enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)** terealisasi Tahun 2024 sebesar **Rp.634.529.000,00 (Enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)** atau **95,86%**, yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim khususnya Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Capaian Program Indikator Sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 2. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2024, Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 Program, 16 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan, antara lain yaitu :

#### 1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp.10.294.013.115,00 dengan realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp.9.137.003.015,00 (Sembilan milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ribu lima belas rupiah)** atau **91,25%** dengan capaian kinerja output sebesar 100%. Program ini terdiri dari 8 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan sebagai berikut :



- 1). **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.82.513.900,- dengan realisasi sebesar Rp.76.055.000,- atau sebesar 89,17%, dengan rincian Sub Keegiatannya sebagai berikut :**
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
  - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
  - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - 6) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  
- 2). **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.7.499.486.418.- dengan realisasi sebesar Rp.6.627.872.043.- atau sebesar 96,25% dengan rincian Sub Keegiatannya sebagai berikut :**
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan Semesteran SKPD;
  
- 3). **Kegiatan Administrasi Barang Milk Daerah Pada Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.91.008.700.- dengan realisasi sebesar Rp.46.084.146 atau sebesar 50,64% dengan rincian Sub Keegiatannya sebagai berikut :**
  - 1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
  - 2) Sub Kegiatan Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
  
- 4). **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.81.408.000 dengan realisasi sebesar Rp.51.604.527.- atau sebesar 72,50% dengan rincian Sub Keegiatannya sebagai berikut :**
  - 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  - 2) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang.
  
- 5) **Administrasi Umum Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.881.446.598 dengan realisasi sebesar Rp.797.965.351.- atau sebesar 90,40% dengan rincian Sub Keegiatannya sebagai berikut :**
  - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang;
  - 6) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu ;
  - 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6) **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.661.925.000,- dengan realisasi sebesar Rp.634.529.000,- atau sebesar 95,86%** dengan rincian Sub Keegiatannya sebagai berikut :
- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 7). **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.472.750.300,- dengan realisasi sebesar Rp.443.835.325,- atau sebesar 93,88%** dengan rincian Sub Keegiatannya sebagai berikut :
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8). **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.502.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp.446.081.621,- atau sebesar 88,71%** dengan rincian Sub Keegiatannya sebagai berikut :
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan. Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## 2). Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar **Rp.6.272.688.800,00** dengan realisasi sebesar **Rp.4.940.639.631,00** (Empat milyar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) atau **78,76%** dengan capaian kinerja output sebesar **96,87%**. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1). **Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, alokasi anggaran sebesar Rp.2.152.275.300,- dengan realisasi Semester 2 sebesar Rp.1.836.581.951,- atau sebesar 85.33%** dengan rincian Sub Keegiatannya sebagai berikut :



- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
- 2) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.

**2). Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.474.633.700.- dengan realisasi sebesar Rp.317.393.752.- atau sebesar 62,18% dengan rincian Sub Kejadiannya sebagai berikut :**

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
- 2) Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.

**3). Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.3.645.779.800.- dengan realisasi Semester 2 sebesar Rp.2.786.663.928.- atau sebesar 76,44% dengan rincian Sub Kejadiannya sebagai berikut :**

- 1) Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Tanaman Sekala Kecil.

### **3). Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar **Rp.6.150.270.800,00** dengan realisasi sebesar **Rp.5.629.407.513,00 (Lima milyar enam ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah)** atau 96,81% dengan capaian kinerja output sebesar 100%. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

**1). Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, alokasi anggaran sebesar Rp.968.961.900.- dengan realisasi sebesar Rp.841.132.218.- atau sebesar 86,81% dengan rincian Sub Kejadiannya sebagai berikut :**

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.

**2). Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, alokasi anggaran sebesar Rp.5.181.308.900.- dengan realisasi sebesar Rp.4.788.275.295.- atau sebesar 92,41% dengan rincian Sub Kejadiannya sebagai berikut :**

- 1) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

### **4). Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar **Rp.491.838.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp.379.266.355,00 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah)** atau 77,11% dengan capaian kinerja output sebesar 100%. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :



1). **Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.491.838.000.- dengan realisasi sebesar Rp.379.266.355.- atau sebesar 77,11% dengan rincian Sub Keegiatannya sebagai berikut :**

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, Dan Perkebunan;
- 2) Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

**5). Program Perizinan Usaha Pertanian**

Alokasi anggaran untuk Program Perizinan Usaha Pertanian sebesar **Rp.1.765.179.525,00** dengan realisasi sebesar **Rp.142.090.950,00 (Seratus empat puluh dua juta sembilan puluh sembilan ratus lima puluh rupiah)** atau 8,05% dengan capaian kinerja output sebesar 75%.. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

**1). Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.1.765.179.525,00 dengan realisasi sebesar Rp.142.090.950,00 atau sebesar 8,05% dengan rincian Sub Keegiatannya sebagai berikut :**

- 1) Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian.

**6). Program Penyuluhan Pertanian**

Alokasi anggaran untuk Program Penyuluhan Pertanian sebesar **Rp.645.073.400,00** dengan realisasi sebesar **Rp.530.909.791,00 (Lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah)** atau 82,30% dengan capaian kinerja output sebesar 100%. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

**1). Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, alokasi anggaran sebesar Rp.645.073.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.530.909.791,00 atau sebesar 82,30% dengan rincian Sub Keegiatannya sebagai berikut :**

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
- 2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.



### 3. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.46 Capaian Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan Muara Enim**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET	REALISASI	%
1	2			3	4	5
1.1.1 Meningkatnya produksi komoditas perkebunan.	a. Persentase Produksi Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet dan Kopi) (%).	%	Kelapa Sawit	1,00	1,01	101
			Karet	1,50	1,52	101
			Kopi	1,50	1,51	101
2.1.1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur.	a. Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran.	%		100	100	100
	b. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur.	%		100	100	100
	c. Persentase laporan kinerja dan keuangan yg disampaikan tepat waktu.	%		100	100	100
2.1.2 Meningkatnya kualitas aparatur.	a. Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi dibidangnya.	%		70	70	100

### 4.KEGIATAN INOVASI PADA TAHUN 2024

1. Inovasi Sekolah Petani Goes To School (Kegiatan Sekolah Petani Goes To School adalah kegiatan pengembangan diri untuk menumbuhkan wirausaha tani yang melibatkan generasi muda agar memiliki minat di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan agar terciptanya ekosistem generasi pertanian yang mandiri, maju dan berkelanjutan).

### 5.PENGHARGAAN DAN PRESTASI DI TAHUN 2024

1. Penghargaan Award Juara II Statistik Sektoral (Sister) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik.
2. Juara 1 Stand Terbaik pada Pameran Inovasi Produk dan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan KTNA AGRO Expo 2024 di Tabanan Bali.
3. Juara 1 Pameran Terpadu Investasi-Perdagangan Pertanian-Koperasi UMKM dan Pariwisata Tahun 2024 di Batam Kepulauan Riau.
4. Terbaik 3 Lomba Stand Terbaik Festival Kopi Lahat 2024 (Regional) di Lahat - Sumatera Selatan.



#### 4. URUSAN PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN ESDM OLEH DINAS PERDAGANGAN

##### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Urusan Pilihan Perdagangan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi Dan Sumber Daya Energi Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun Anggaran 2024 alokasi dana untuk membiayai urusan pilihan Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 26.596.998.772,- terealisasi sebesar Rp. 24.750.743.637 atau 92,54,- Persen dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

###### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 14.112.340.372,00 terealisasi sebesar Rp.12.350.640.687,- atau 88 Persen yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

###### b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 12.484.658.400,- terealisasi sebesar Rp. 12.261.546.000 atau 98 Persen yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

##### 2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2024, Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim melaksanakan 9 Program dan 14 Kegiatan, dan 34 Sub kegiatan yaitu :

###### a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota

Alokasi Anggaran untuk Program Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota sebesar Rp. 319.765.000 dengan realisasi Rp. 312.350.000,- atau 99,70%. Program ini terdiri dari (satu) Kegiatan dan (dua) sub kegiatan :

###### 1. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 123.765.000,- dengan realisasi Rp. 122.800.000,- atau 99,22%.
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 196.000.000,- dengan realisasi Rp. 189.550.000,- atau 96,71%.

###### b) Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.

Alokasi Anggaran untuk Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan sebesar Rp. 676.255.400,- dengan realisasi Rp. 646.697.826 atau 95,63 %. Program ini terdiri dari (satu) Kegiatan dan (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp. 676.255.400,- dengan realisasi sebesar 646.697.826,-.



- a. Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 676.255.400,- realisasi sebesar 646.697.826,- atau 95,63 Persen.

**c). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.**

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 10.042.028.196,- realisasi sebesar Rp. 9.112.218.228,- atau 91,18 Persen. Program ini terdiri dari 6 (enam) Kegiatan, dan 25 (dua puluh lima) Subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 19.311.330 realisasi sebesar Rp. 17.799.500,- atau 92,17 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah Dokumen Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim sebanyak 2 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 28.173.400,- realisasi sebesar Rp. 26.897.450 atau 95,47 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah Dokumen RKA Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 28.173.100,- realisasi sebesar Rp. 26.239.400,- atau 93,14 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah Dokumen Perubahan RKA Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 28.173.100,- atau realisasi sebesar Rp. 23.636.900,- 83,90 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah Dokumen DPA Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - e. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 28.173.300,- dengan realisasi Rp. 27.145.600,- atau 96,35 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah Dokumen Perubahan DPA Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral



- Kabupaten Muara Enim sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- f. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 19.954.500,- realisasi sebesar Rp. 16.838.100,- atau 84,38 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 5.295.016.658 realisasi sebesar Rp. 4.734.160.86,- atau 89,41 Persen, namun capaian kinerjanya adalah outputnya adalah 100 persen, hal ini dikarenakan beberapa pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim memasuki Pensiun. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Dinas Perindag ESDM Kab. Muara Enim dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 9.713.800,- realisasi sebesar Rp. 9.096.100,- atau 93,64 Persen, namun capaian kinerjanya adalah outputnya adalah 100 persen, hal ini dikarenakan standar harga menyesuaikan dengan standar harga di lapangan. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 8.519.700,- realisasi sebesar Rp. 7.463.700,- atau 87,61 Persen, namun capaian kinerjanya adalah outputnya adalah 100 persen, hal ini dikarenakan standar harga menyesuaikan dengan standar harga di lapangan. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah Laporan Keuangan Semesteran Tahun Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terdiri dari Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp.



88.500.000,- realisasi sebesar 34.350.000,- atau 38,81 Persen, dalam pelaksanaannya dalam rangka memenuhi kewenangan Kabupaten/kota untuk melaksanakan Tupoksi dibidang Kemetrolgian sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. : 48/M-DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrolgian yang berfungsi secara teknis dalam rangka mewujudkan terlaksananya Sistem Metrologi Legal di Indonesia, Dinas Perindag ESDM Kabupaten Muara Enim telah mengirimkan data ASN yang akan mengikuti diklat Kemetrolgian dan ASN tersebut sudah terdata pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Kemetrolgian Kementerian Perdagangan, namun Diklat tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ASN yang akan diberangkatkan untuk mengikuti diklat kemetrolgian telah dimutasikan sehingga capaian kinerja pada kegiatan ini sebesar 38,81 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan capaian output/keluaran sebesar 38,81 persen.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 70.613.370,- dengan realisasi sebesar Rp. 67.466.500,- atau 95,54 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan sebanyak 9 Jenis dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 52.382.671,- dengan realisasi sebesar Rp. 51.804.000,- atau 98,90 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah Jenis Peralatan Kebersihan yang disediakan sebanyak 38 Jenis dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 78.178.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 78.120.000,- atau 99,93 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah jenis bahan-bahan untuk Alat Tulis Kantor yang disediakan sebanyak 52 Jenis dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - e. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 52.019.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 52.013.600,- atau 99,99 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan sebanyak 8 Jenis dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - f. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran Rp. 17.280.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.040.000,- atau 81,25 Persen. Adapun output/keluaran dari



- subkegiatan ini adalah jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan sebanyak 12 Jenis dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 1.097.812.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.081.555.976,- atau 98,52 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam dan luar daerah serta penyediaan makan minum rapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
5. Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
    - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 18.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.000.000,- atau 100 Persen.
  6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
    - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa surat-menyurat dengan anggaran Rp.5.096.700,- dengan realisasi sebesar Rp 5.000.000 atau 98,10 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dokumen Surat Menyurat yang bermeterai dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
    - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 254.538.217,- dengan realisasi sebesar Rp. 212.050.828 atau 83,31 Persen, hal ini dikarenakan adanya efisiensi dalam penggunaan telepon, air dan listrik pada Kantor Dinas Perindag ESDM, UPTD Pasar Muara Enim, UPTD Pasar Tanjung Enim, Gerai-gerai oleh-oleh dan Anjungan Jakabaring Palembang. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah pembayaran rekening listrik, rekening air dan telepon Dinas Perindag ESDM, UPTD Pasar Muara Enim, UPTD Pasar Tanjung Enim, Gerai-gerai oleh-oleh dan Anjungan Jakabaring Palembang selama 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
    - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 1.599.320.000,- dengan realisasi sebesar Rp.11.439.581.000,- atau 90,01 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah pembayaran tenaga keamanan, tenaga kebersihan, Operator Komputer, Juru Tagih Retribusi dan Tata Usaha pada Kantor Dinas Perindag ESDM, UPTD Pasar, Gerai-gerai oleh-oleh dan Anjungan Jakabaring Palembang selama 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp. 229.627.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 166.068.714,- atau 72,32 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara sebanyak 10 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp. 13,450,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.450.000,- atau 100 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah jenis perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan mesin sebanyak 4 jenis dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 1.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 989.440.000,- atau 98,94 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah bangunan/Gedung kantor yang direhabilitasi sebanyak 2 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

**d) Program Peningkatan Sarana Distribusi**

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Sarana Distribusi sebesar Rp. 10.794.498.238,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.550.354.100,- atau 97,74 Persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. 10.550.354.100 atau 97,74 Persen.
  - a. Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran Rp. 10.550.354.100,- atau 97,74 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Bangunan Pasar Tradisional dibangun sebanyak 5 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

**e) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting**

Alokasi anggaran untuk Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting sebesar Rp. 1.485.016.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 824.639.986,- atau 55,53 Persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan, dan 2 (dua) Subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
  - a. Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting dan Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 175.418.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 155.657.186,- atau 88,73 Persen. Adapun output/keluaran



dari subkegiatan ini adalah Jumlah Monitoring Harga dan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat serta Barang Penting Lainnya pada 6 Pasar dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

- b. Subkegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 1.309.597.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 668.982.800,- atau 51,08 Persen. Capaian sebesar 51,08 Persen dikarenakan Dinas Perindag ESDM dinilai berhasil menekan dan mengendalikan inflasi sampai bulan November 1,13% menjadi alasan realisasi kegiatan kecil. Namun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Fasilitas Sembako Murah untuk Masyarakat di 22 Kecamatan sebanyak 2 Kali Kegiatan operasi pasar penanggulangan dampak inflasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

**f.) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen**

Alokasi anggaran untuk Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen sebesar Rp. 514.920.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 436.944.797,- atau 84,86 Persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan, dan 2 (dua) Subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.
  - a. Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan anggaran Rp. 243.664.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 197.643.502,- atau 81,11 Persen, hal ini dikarenakan Penguji Alat UTTP pada Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim yang akan dilakukan kalibrasi tidak dapat dilaksanakan karena alat penguji tersebut mengalami kerusakan sehingga alat penguji tersebut tidak dapat dikalibrasi. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Pengawasan alat UTTP dan BDKT dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal dengan anggaran Rp. 271.255.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 239.301.295,- atau 88,22 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Pelayanan tera dan tera ulang dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

**g.) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**

Alokasi anggaran untuk Program penggunaan dan pemasaran produk Dalam negeri sebesar Rp. Rp. 100.452.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 93.715.000,- atau 93,29 Persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.



- a. Subkegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran 100.452.700,- dengan 93.715.000,- realisasi sebesar atau 93,29 Persen.

**h) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**

Alokasi anggaran untuk Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri sebesar Rp. 2.157.901.363,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.138.391.146,- atau 99,10 Persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
  - a. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dengan anggaran Rp. 2.157.901.363,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.138.391.146 atau 99,10 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang bagi Industri Kecil dan Menengah dalam mempromosikan dan meningkatkan penjualan produknya dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

**i) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional sebesar Rp. 506.161.275,- dengan realisasi sebesar Rp. 496.875.604,- atau 98,17 Persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.
  - a. Subkegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas dengan anggaran Rp. 506.161.275,- dengan realisasi sebesar Rp. 496.875.604,- atau 98,17. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah keikutsertaan Kabupaten Muara Enim dalam pameran produk IKM tingkat Regional dan Nasional, Jumlah rehab sarana dan prasarana penunjang bagi IKM/UMKM dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

**3. Capaian Indikator Kinerja :**

Sesuai dengan target kinerja sasaran dalam renstra, capaian indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



**Tabel 3.47. Capaian Realisasi Anggaran Dinas Perindag Muara Enim 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Sektor Perdagangan	Meningkatnya Sektor Perdagangan	a.Persentase Koefisien Sestabilan Harga Barang Kebutuhan Pokok	10%	7,363%	73,63%
			b.Persentase Realisasi pendapatan Daerah Sektor Perdagangan	100%	83,01%	83,01%
2.	Meningkatnya Sektor Perindustrian	Meningkatnya Sektor Perindustrian	Persentase Pertumbuhan Jumlah industri kecil dan menengah	6,5%	6,6%	101,53%
3.	Peningkatan Kinerja Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Peningkatan Kinerja Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Sasaran Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	100%	92,54%	100%

#### 4. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini permasalahan yang terjadi terkait capaian indikator Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 beserta solusinya :

No	Permasalahan	Solusi
-	-	-

#### 5. Penghargaan dan Prestasi

Pada Tahun 2024, tidak terdapat penghargaan dan prestasi yang diterima oleh Dinas Perindag ESDM serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim.



### 3.5. FUNGSI PENUNJANG

#### 1. SEKRETARIAT DAERAH

##### 1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 100.906.711.095,00** terealisasi sebesar **Rp. 91.218.439.628,00** atau **90,40 Persen** dengan rincian sebagai berikut :

###### a. Belanja Operasi

Belanja tidak langsung dialokasikan sebesar **Rp. 84.686.916.643** terealisasi sebesar **Rp. 75.843.094.628** atau **89,56 Persen** dengan capaian kinerja **100 Persen** yang diarahkan untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS, Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (uang makan dan tunjangan kesejahteraan tahunan).

###### b. Belanja Modal

Belanja langsung dialokasikan sebesar **Rp. 16.219.794.452** terealisasi **Rp. 15.375.345.000** atau **94,79 Persen** dengan capaian kinerja **100 Persen** yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.

Adapun program dan kegiatan, capaian program indikator sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### 2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim melaksanakan 3 program, 19 Kegiatan dan 64 Subkegiatan antara lain yaitu :

###### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** sebesar **Rp. 78.324.495.061,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 70.094.783.330,00** atau **89,49 Persen** program ini terdiri dari **11** kegiatan, dan **41** Subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - a. SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 241.261.100** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 227.137.409,00** atau sebesar **94,15 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b. Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 157.930.600** dan realisasi keuangan



- sebesar **Rp. 128.016.994** atau sebesar **81,06 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- c. Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 136.135.700** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 114.023.355** atau sebesar **83,76 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - d. Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 75.369.300** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 39.42.101.000 Unaudited)** atau sebesar **55,86 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - e. Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 60.610.200** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 43.646.000** atau sebesar **72,01 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar **Rp. 21.860.048.428** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 19.936.742.195** atau sebesar **91,20 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Penyediaan Gaji dan Tunjangan 137 orang/bulan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b. Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 244.775.300** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 225.114.906** atau sebesar **91,97 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Bulan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan anggaran sebesar **Rp. 62.129.700** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 61.887.600** atau sebesar **99,61 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 355.597.800** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 296.**

**337.280.742 audited)** atau sebesar **94,85 Persen.** adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 15 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen.**

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 737.592.100** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 610.293.770** atau sebesar **82,74 Persen.** adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Pengamana Barang Milik Daerah 12 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen.**
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar **Rp. 582.604.950** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 573.016.000** atau sebesar **98,35 Persen.** adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 11 Paket dan 11 Jenis dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen.**
  - b. Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar **Rp. 274.132.100** dan realisasi keuangan sebesar **234.592.728** atau sebesar **85,58 Persen.** adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangn 50 Orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen.**
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 295.146.520** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 270.359.182** atau sebesar **91,60 Persen.** adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen.**
  - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 3.530.936.985** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 3.363.219.500** atau sebesar **91,25 Persen.** adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 57 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen.**
  - c. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar **Rp. 1.565.647.094** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.397.427.000** atau sebesar **89,26 Persen.** adapun



- Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 61 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 408.664.540** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 350.170.250** atau sebesar **85,69 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60 Jenis,13000 Lite Paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - e. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar **Rp. 814.964.300** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 758.294.200** atau sebesar **93,05 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Penyediaan Barang Cetak dan 27 Jenis, 40000 Lembar Paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - f. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar **Rp. 317.957.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 305.486.500** atau sebesar **96,08**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10 Bahan Bacaan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - g. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar **Rp. 5.148.000.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 4.992.022.150** atau sebesar **96,97 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Laporan dan 3 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - h. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 5.900.864.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 4.684.979.984** atau sebesar **79,93 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan dan 12 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar **Rp. 10.115.960.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 9.523.960.000** atau sebesar **94,15 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 16 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b. Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar **Rp. 988.900.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 957.600.000** atau sebesar

**96,83 Persen.** adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Pengadaan Mebel 7 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar **Rp. 324.962.300** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 242.750.000** atau sebesar **74,70 Persen.** adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen.**
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar **Rp 1.968.224.984** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.512.626.636** atau sebesar **76,85 Persen.** adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.18.33.8 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen.**
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 902.020.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 643.740.000** atau sebesar **71,37 Persen.** adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen.**
  - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 279.240.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 169.320.000** atau sebesar **60,64 Persen.** adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen.**
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar **Rp. 706.451.452** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 580.693.000** atau sebesar **82,20 Persen.** adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen.**
  - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar **Rp. 1.669.614.688** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.422.255.300** atau sebesar **85,18 Persen.** adapun Output/Keluaran dari



- subkegiatan ini adalah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 19.64 Unit dan 83 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 1.225.258.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.108.785.534** atau sebesar **90,74 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - d. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 104.420.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 83.97.516.500 Unaudited)** atau sebesar **93,39 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - e. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 378.965.175** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 299.585.000** atau sebesar **79,05 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3 Unit dan 6 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
9. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- a. Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 1.850.358.045** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.589.500.670** atau sebesar **85,90 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 12 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b. Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 378.240.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 139.100.000** atau sebesar **36,78 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 12 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
10. Kegiatan Penataan Organisasi.
- a. Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan anggaran sebesar **Rp. 652.570.900** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 638.069.700** atau sebesar **97,78 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah

- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 20.2.58 dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- b. Subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan anggaran sebesar **Rp. 433.123.800** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 418.096.780** atau sebesar **96,53 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 3.3.2 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - c. Subkegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar **Rp. 733.987.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 623.595.056** atau sebesar **84,96 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 30.1.1.65.2 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - d. Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan anggaran sebesar **Rp. 248.612.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 211.133.149** atau sebesar **84,92 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2.2 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - e. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 51.002.300** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 44.693.845** atau sebesar **87,63 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
11. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
- a. Subkegiatan Fasilitasi Keprotokolan dengan anggaran sebesar **Rp. 11.276.427.100 ( Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 10.053.716.151** atau sebesar **86,16 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Fasilitasi Keprotokolan 80.1.12.12.12 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b. Subkegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dengan anggaran sebesar **Rp. 614.088.200** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 550.537.244** atau sebesar **86,65 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - c. Subkegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan anggaran sebesar **Rp. 651.700.400** dan realisasi keuangan

sebesar **Rp. 611.697.300** atau sebesar **93,86 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Pendokumentasian Tugas Pimpinan 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

## 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Alokasi anggaran untuk program **Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** sebesar **Rp. 16.254.262.063** dengan realisasi sebesar **Rp. 14.032.062.496** atau **88,33 Persen** program ini terdiri dari **4** kegiatan, dan **12** Subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan.
  - a. Subkegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan anggaran sebesar **Rp. 264.057.900** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.19 190.210.840 Unaudited)** atau sebesar **72,03 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Penataan Administrasi Pemerintahan 2 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b. Subkegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan anggaran sebesar **Rp. 1.614.422.495** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.411.149.099** atau sebesar **87,41 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**
  - c. Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 952.227.223** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 94. 874.934.655 Unaudited)** atau sebesar **91,88 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.
  - a. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dengan anggaran sebesar **Rp. 4.007.467.700** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 3.215.370.439** atau sebesar **80,23 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 6 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dengan anggaran sebesar **Rp. 2.190.763.320** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.897.204.076** atau sebesar **86,60 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 4 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.



- c. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan anggaran sebesar **Rp. 4.416.843.700** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 3.715.466.639** atau sebesar **84,12 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 4 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
  - a. Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 749.830.700** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 685. 720.980.150** atau sebesar **96,15 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 2 dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b. Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan anggaran sebesar **Rp. 715.345.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 685. 710.355.780 audited)** atau sebesar **99,30 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Fasilitasi Bantuan Hukum 40 Kasus dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - c. Subkegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan anggaran sebesar **Rp. 517.639.100** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 509.262.788** atau sebesar **98,38 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 3 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
4. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah.
  - a. Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dengan anggaran sebesar **Rp. 491.558.625** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 460. 460.151.026 audited)** atau sebesar **93,61 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 10 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri dengan anggaran sebesar **Rp. 55.547.200** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 54.432.158** atau sebesar **97,99 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - c. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan anggaran sebesar **Rp. 278.558.700** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 74.877. 272.544.846** atau sebesar **97,84 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

### 3. Program Perekonomian dan Pembangunan

Alokasi anggaran untuk program **Perekonomian dan Pembangunan** sebesar **Rp. 6.327.953.971** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.793.164.944** atau **91,55 Persen** program ini terdiri dari **4** kegiatan, dan **11** Subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.
  - a. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dengan anggaran sebesar **Rp 591.320.634** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 573.635.775** atau sebesar **97,01 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Koordinasi Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b. Subkegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan anggaran sebesar **Rp. 583.999.392** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 541.809.341** atau sebesar **92,78 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - c. Subkegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dengan anggaran sebesar **Rp. 199.800.379** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 146.650.342** atau sebesar **73,40 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 0 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.
  - a. Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dengan anggaran sebesar **Rp. 197.505.932** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 194.250.649 Unaudited)** atau sebesar **98,35 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b. Subkegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan anggaran sebesar **Rp. 286.218.223** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 280.814.568** atau sebesar **98,11 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 Aplikasi dan 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - c. Subkegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan anggaran sebesar **Rp. 453.453.858** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 418.533.184** atau sebesar **92,30 persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah



Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 12 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.
  - a. Subkegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar **Rp. 2.174.442.200** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.114.063.722** atau sebesar **97,22 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b. Subkegiatan Pengelolaan Layanan Pengaturan secara Elektronik dengan anggaran sebesar **Rp. 1.246.184.360** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 973.067.000** atau sebesar **78,08 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Pengelolaan Layanan Pengaturan secara Elektronik 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - c. Subkegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar **Rp. 255.362.900** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 252.016.108** atau sebesar **98,69 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 150 Orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
4. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam.
  - a. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar **Rp. 155.789.943** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 145.433.981** atau sebesar **93,35 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar **Rp. 183.876.150** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 152.890.274** atau sebesar **83,15 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.



### 3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tabel 3.48 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Menciptakan Kualitas Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B
			Persentase Capaian Kinerja Keuangan	92	90	100
			Persentase Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik	100	100	100

### 4. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
	-	-

### 5. Penghargaan dan Prestasi

1. Piagam Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023

## 2. SEKRETARIAT DPRD

### 1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp92.631.268.157. Anggaran tersebut terdiri dari :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp90.863.527.457. Belanja operasi yang terealisasi sebesar Rp80.574.109.346 atau sebesar 88.86%, yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

b. Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan sebesar Rp1.767.740.700. Belanja modal yang terealisasi sebesar Rp1.739.515.000 atau sebesar 98.40%, yang digunakan untuk membiayai belanja modal alat kantor lainnya, belanja modal mebel, belanja modal alat rumah tangga lainnya dan belanja modal personal komputer.

### 2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada tahun 2024, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim melaksanakan 2 Program, 12 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan, antara lain yaitu :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota

Alokasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota sebesar Rp42.681.091.507 dengan realisasi sebesar Rp41.014.736.741 atau 96.10%. Program tersebut terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp4.747.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.295.000 atau 48.35%. Adapun output dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen dengan capaian output/keluaran dari sub kegiatan ini sebesar 100%.
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp4.358.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.530.000 atau 35.10%. Adapun output dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen dengan capaian output/keluaran dari sub kegiatan ini sebesar 100%.
- c) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp3.720.200 dengan realisasi keuangan sebesar Rp0 atau 0.00%. Adapun output dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen dengan capaian output/keluaran dari sub kegiatan ini sebesar 100%.



- d) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp3.720.200 dengan realisasi keuangan sebesar Rp0 atau 0.00%. Adapun output dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen dengan capaian output/keluaran dari sub kegiatan ini sebesar 100%.
  - e) Sub kegiatan Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp5.718.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.930.000 atau 51.24%. Adapun output dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen dengan capaian output/keluaran dari sub kegiatan ini sebesar 100%.
2. Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp31.620.958.197 dengan realisasi keuangan sebesar Rp30.442.816.311 atau 96.27%. Adapun output dari kegiatan ini adalah pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan dengan capaian output sebesar 100%.
  - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp4.747.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp0 atau 0.00%. Adapun output dari sub kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen dengan capaian output/keluaran dari sub kegiatan ini sebesar 100%.
  - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp2.454.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp1.0115.000 atau 41.35%. Adapun output dari sub kegiatan ini adalah 2 (dua) dokumen dengan capaian output/keluaran dari sub kegiatan ini sebesar 100%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah SKPD
- a) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp188.447.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp179.571.980 atau 95.29%. Adapun output dari sub kegiatan ini adalah pengamanan terhadap 3 jenis barang milik daerah SKPD dengan capaian output sebesar 100%.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan anggaran sebesar Rp207.000.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp150.912.000 atau 72.90%. Adapun output dari sub kegiatan ini adalah pendidikan dan pelatihan 33 ASN di lingkup Sekretariat DPRD dengan capaian output sebesar 100%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp16.574.000 dan realisasi keuangan sebesar 16.574.000 atau 100%. Output dari kegiatan ini berupa penyediaan 8 Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dengan capaian output sebesar 100%.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp1.805.709.830 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.771.934.130 atau 98.13%. Output dari sub kegiatan ini adalah pembelian barang dan jasa serta 4 jenis belanja modal dengan tingkat capaian output sebesar 100%.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp3.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp2.700.000 atau 90.00%. Output dari sub kegiatan ini berupa 1 paket pembelian peralatan rumah tangga dengan capaian output sebesar 100%.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp187.304.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp165.714.900 atau sebesar 88.47%. Output dari sub kegiatan ini berupa 1 paket pembelian bahan logistik kantor dengan capaian output sebesar 100%.
- e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp235.036.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp225.799.900 atau 96.07%. Output dari sub kegiatan ini berupa 2 paket pembelian barang cetak dan penggandaan dengan capaian output sebesar 100%.
- f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp187.800.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp123.406.000 atau 65.71%. Output dari sub kegiatan ini berupa 25 jenis bahan bacaan dan undang-undang dengan capaian output sebesar 100%.
- g) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp727.498.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp703.270.000 atau 96.67%. Output dari sub kegiatan ini adalah fasilitasi kunjungan tamu secara rutin selama 12 bulan dengan capaian output sebesar 100%.
- h) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp4.565.963.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp4.494.321.178 atau 98.43%. Output dari sub kegiatan ini adalah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD secara rutin selama 12 bulan dengan capaian sub kegiatan sebesar 100%.

6. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran



sebesar Rp8.999.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp4.100.000 atau 45.56%. Output dari sub kegiatan ini berupa pembelanjaan 2 jenis perlengkapan surat menyurat.

- b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp454.228.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp422.138.642 atau 92.94%. Output dari sub kegiatan ini berupa pembelanjaan listrik, wifi, telepon dan PDAM kantor Sekretariat DPRD dengan capaian sebesar 100%.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp21.300.000 dan realisasi keuangan sebesar 11.490.000 atau 53.94%. Output dari sub kegiatan ini merupakan pembelanjaan 3 jenis peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian sebesar 100%.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar 549.600.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp535.560.000 atau 97.45%. Output dari sub kegiatan adalah penggajian 36 Orang tenaga jasa pelayanan umum Sekretariat DPRD selama 12 bulan dengan capaian sebesar 100%.

#### 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan dengan anggaran sebesar Rp557.987.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp540.173.58 atau 96.81%. Output sub kegiatan ini berupa 3 jenis biaya pajak dan perizinan kendaraan dinas Sekretariat DPRD dengan capaian output 100%.
- b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp184.428.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp184.401.400 atau 99.99%. Output sub kegiatan ini adalah pemeliharaan 3 gedung Sekretariat DPRD dengan capaian output 100%.
- c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp149.448.480 dan realisasi keuangan sebesar Rp87.940.000 atau 58.84%. Output sub kegiatan ini berupa pemeliharaan 2 jenis sarana dan prasarana penunjang gedung dengan capaian output 100%.

#### 8. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- a) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dengan anggaran sebesar Rp966.343.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp944.190.000 atau 97.71%. Output dari sub kegiatan ini adalah pengadaan 4 paket pakaian dinas dan atribut DPRD dengan capaian output 100%.
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check-Up DPRD dengan



anggaran sebesar Rp14.000.000 dan realisasi keuangan Rp0 atau 0.00%.

## **2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  - a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan anggaran sebesar Rp159.218.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp0 atau 0.00%.
  - b) Sub Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dengan anggaran sebesar Rp303.375.650 dan realisasi keuangan sebesar Rp0 atau 0.00%.
  - c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp102.146.100 dan realisasi keuangan sebesar Rp0 atau 0.00%.
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli dengan anggaran sebesar Rp720.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp660.000.000 atau 91.67%. Output sub kegiatan ini berupa pengadaan kelompok pakar dan tim ahli selama 12 bulan dengan total capaian 100%.
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dengan anggaran sebesar Rp378.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp346.500.000 atau 91.67%. Output sub kegiatan ini berupa pengadaan tenaga ahli fraksi selama 12 bulan dengan total capaian 100%.
3. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  - a) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah dengan anggaran Rp194.866.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp0 atau 0.00%.
  - b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses dengan anggaran sebesar Rp360.315.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp74.533.957 atau 20.69%. Output sub kegiatan ini berupa pelaksanaan 3 kali kegiatan reses selama tahun anggaran 2024 dengan capaian output 100%.
4. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
  - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD dengan anggaran Rp47.732.255.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp40.217.806.368 atau 84.26%. Output sub kegiatan ini berupa koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD untuk 45 orang pimpinan dan anggota DPRD dengan tingkat capaian output 100%.



### 3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan target sasaran kinerja dalam Renstra OPD, capaian indikator kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.49 Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Dewan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan Pelayanan Anggota DPRD kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Survey Kepuasan Anggota DPRD	76%	85%	85%
			Nilai Hasil Survey Persepsi Masyarakat terhadap Anggota DPRD	76%	85%	85%

### 4. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, indikator kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2024 telah berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun Masih ada beberapa indikator kinerja yang capaian kinerjanya dibawah 85% dengan permasalahan dan solusi yang diajukan sebagai berikut :

No	Permasalahan	Solusi
1	Realisasi anggaran kegiatan di Sekretariat DPRD sangat tergantung pada kegiatan yang ingin dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksanakan jika tidak diagendakan oleh DPRD pada tahun anggaran 2024.	Melaksanakan rapat koordinasi dengan pimpinan dan anggota DPRD terkait agenda kegiatan yang ingin dilaksanakan pada tahun anggaran terkait.
2.	Perubahan Kebijakan dari Perpres 53 tahun 2023 dimana uang perjalanan dinas DPRD dibayar secara lumpsump ke Perpres 33 Tahun 2020 dimana uang perjalanan dinas DPRD dibayar secara at cost membuat target realisasi anggaran yang telah direncanakan menjadi sulit dicapai.	Perubahan kebijakan di tahun berjalan setelah APBD Perubahan merupakan hambatan eksternal. OPD Sekretariat DPRD hanya dapat menyesuaikan anggaran yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan tersebut pada tahun anggaran berikutnya.
3.	Kebutuhan atas barang dan jasa yang berubah-ubah sepanjang tahun menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kerja.	Melakukan monitoring secara berkala terkait kebutuhan barang dan jasa per bagian dalam lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim.

### 5. Penghargaan dan Prestasi

-



### 3. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

#### 1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2024, alokasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp.120.328.606.359 (Seratus Dua Puluh Miliar Tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 117.178.991.897 (Seratus Tujuh Belas Miliar Seratus Tujuh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)** atau **97,38 persen**, dengan kinerja keluaran (output) sebesar 100 persen, dengan rincian sebagai berikut :

##### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp 119.809.305.269 persen** terealisasi sebesar **Rp. 116.664.761.897** atau **90,34 persen**, yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

##### b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp 519.301.090 persen** dengan realisasi sebesar **Rp 514.230.000** atau **99,02 persen** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan, capaian program indikator sasaran, yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 2. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Pada Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim melaksanakan sebanyak 6 (enam) Program dan 14 (empat belas) Kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut :

##### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp 5.988.104.447** dengan realisasi sebesar **Rp 4.986.612.417** atau **78,62 persen** dengan capaian kinerja output sebesar 100 persen. Program tersebut terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) subkegiatan sebagai berikut :

##### 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 322.037.400 dengan realisasi sebesar Rp. 253.195.417 atau 78,62 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan sebagai berikut :



1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 16.271.100 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.16.261.000 atau sebesar 99,64 persen.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 58.707.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.700.700 atau sebesar 67,62 persen.
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 62.588.100 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 51.892.071 atau sebesar 82,91 persen.
4. Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 11.567.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.536.000 atau sebesar 99,73 persen.
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 88.290.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.513.810 atau sebesar 58,81 persen.
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 70.708.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 68.425.836 atau sebesar 96,77 persen.
7. Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 12.904.900 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.866.000 atau sebesar 99,70 persen.

#### **1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.935.585.434 dengan realisasi sebesar Rp. 3.115.763.674 atau 79,17 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 3.905.654.046 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.098.165.974 atau sebesar 79,33 persen.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 29.931.388 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.597.700 atau sebesar 58,79 persen.

#### **1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 22.201.500 dengan realisasi sebesar Rp. 20.116.000 atau 90,61 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai Berikut:

1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 22.201.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.116.000 atau 90,61 persen.

#### **1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 63.254.000 dengan realisasi sebesar Rp. 52.240.548 atau 82,59 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :



1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 63.254.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.240.548 atau sebesar 82,59 persen.

#### **1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 936.855.309 dengan realisasi sebesar Rp. 918.728.024 atau 98,07 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 14.906.330 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.226.000 atau sebesar 95,44 persen.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 189.513.739 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 185.877.500 atau sebesar 98,08 persen.
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 156.273.740 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 154.580.000 atau sebesar 98,92 persen.
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 171.527.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 166.327.900 atau sebesar 96,97 persen.
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 33.982.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.448.000 atau sebesar 89,60 persen.
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 7.440.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.830.000 atau sebesar 64,92 persen.
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan anggaran sebesar Rp. 363.212.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 362.438.624 atau sebesar 99,79 persen.

#### **1.6. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 175.841.090 dengan realisasi sebesar Rp. 175.250.000 atau 99,66 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 175.841.090 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 175.250.000 atau sebesar 99,66 persen.

#### **1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 226.853.300 dengan realisasi sebesar Rp. 175.250.000 atau 99,66 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 109.233.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 61.228.772 atau sebesar 56,05 persen.

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 59.880.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.810.000 atau sebesar 99,88 persen.
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 57.740.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 57.740.000 atau sebesar 100 persen.

#### **1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 305.476.414 dengan realisasi sebesar Rp. 272.539.575 atau 89,22 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 187.026.414 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 157.812.575 atau sebesar 84,38 persen.
2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 118.450.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 114.727.000 atau sebesar 96,86 persen.

### **2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.**

#### **2.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.382.416.767 dengan realisasi sebesar Rp. 2.276.621.767 atau 95,56 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.877.532.314 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.844.437.096 atau sebesar 98,24 persen.
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 224.972.040 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 180.394.920 atau sebesar 80,19 persen.
3. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 279.912.413 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 251.789.751 atau sebesar 89,95 persen.

### **3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.**

#### **3.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan**



**Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik.**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 62.028.105.245 dengan realisasi sebesar Rp. 61.872.139.392 atau 99,75 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp. 136.972.100 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 79.077.600 atau sebesar 57,73 persen.
2. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp. 156.653.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 145.007.950 atau sebesar 91,40 persen.
3. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp. 88.811.700 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.517.650 atau sebesar 59,13persen.
4. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp. 135.640.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 89.483.097 atau sebesar 65,97 persen.
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp. 61.508.027.645 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 61.506.053.095 atau sebesar 100 persen.

**4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.**

**4.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 509.705.000 dengan realisasi sebesar Rp. 496.327.166 atau 99,38 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran



sebesar Rp. 100.349.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 96.477.600 atau sebesar 96,14 persen.

2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 84.613.100 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 79.174.100 atau sebesar 96,57 persen.
3. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 140.597.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 139.711.466 atau sebesar 99,37 persen.
4. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 184.144.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 180.964.000 atau sebesar 98,27 persen.

## **5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.**

### **5.1 Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 693.845.900 dengan realisasi sebesar Rp. 656.131.349 atau 94,56 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 217.192.100 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 214.562.685 atau sebesar 98,79 persen.
2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 55.959.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.424.800 atau sebesar 99,04 persen.
3. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 246.164.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 227.340.880 atau sebesar 92,35 persen.
4. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 174.530.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 158.802.984 atau sebesar 90,99 persen.



**6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.**

**6.1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 48.726.429.000 dengan realisasi sebesar Rp. 46.891.160.213 atau 96,23 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 35.274.840.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.223.517.413 atau sebesar 99,85 persen.
2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 730.148.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 663.146.250 atau sebesar 90,82 persen.
3. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 12.721.439.900 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.004.496.550 atau sebesar 86,50 persen.

**3. CAPAIAN KINERJA KESBANGPOL KABUPATEN MUARA ENIM**

Sesuai dengan target kinerja sasaran dalam Renstra, capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.50 Capaian Kinerja Kesbangpol Kabupaten Muara Enim**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			Capaian		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026
Mewujudkan Situasi dan kondisi Kabupaten Muara Enim yang Aman, tenteram dan rukun	Meningkatnya rasa aman, demokratis, partisipatif	Persentase Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	100%	100%	100%	100%	-	-

#### 4. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Tabel 3.51 Capaian Realisasi Anggaran

No	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Tar get	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	1.Meningkatnya wawasan kebangsaan	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota</b>	100%	83,28%	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	78,62%	Dikarenakan padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan di Kesbangpol Kab. Muara Enim	Akan diperbaiki di tahun mendatang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	79,17%	Dikarenakan terjadinya perpindahan ASN di Kesbangpol Kab. Muara Enim	Akan diperbaiki di tahun mendatang
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	90,61%	-	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	82,59%	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	98,07%	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	78,81%	Dikarenakan sesuai pemakaian air,listrik di Kesbangpol Kab. Muara Enim	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	89,22%	-	-
		<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>	100%	95,56%	-	-
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Karakter Kebangsaan	100%	95,56%	-	-
	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan</b>	100%	99,75%	-	-	

No	Kebijakan	Uraian Program /Kegiatan	Tar get	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		<b>Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>				
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	100%	99,75%	-	-
		<b>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	100%	97,38%	-	-
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	97,38%	-	-
		<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</b>	100%	94,56%	-	-
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	100%	94,56%	-	-
		<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	100%	96,23%	-	-
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	96,23%	-	-



## **5. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

## **6. INOVASI**

Inovasi Kesbangpol Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 sebagai berikut :  
Ikhlasnya 45 Muara Enim Sejahtera

## **7. PENGHARGAAN DAN PRESTASI**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun 2022 ada Penghargaan yaitu Penghargaan atas Pelayanan Prima terhadap izin Riset dengan judul Penelitian “Nilai - Nilai Pendidikan Islam dalam Kearifan Lokal Sedekah Pedusunan di Desa Embacang Kelekar Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim” Tahun 2022.



## 4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### 1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2024, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18.617.179.452 (Delapan Belas Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 16.153.830.517 (Enam Belas Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah) atau 86,77 persen dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

### 2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Terdiri dari 3 Program, 14 Kegiatan, dan 55 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

##### 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 744.999.918 dengan realisasi sebesar Rp. 685.699.376 atau 92,04 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 121.690.700 dengan realisasi sebesar Rp. 101.499.900 atau 83,41 persen.
2. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 49.079.400 dengan realisasi sebesar Rp. 38.323.000 atau 78,08 persen.
3. Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 45.829.700 dengan realisasi sebesar Rp. 37.975.300 atau 82,86 persen.
4. Koordinasi penyusunan lap. capaian kinerja dan lap. capaian kinerja SKPD.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 398.640.500 dengan realisasi sebesar Rp. 388.574.600 atau 97,47 persen.
5. Evaluasi kinerja perangkat daerah.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 129.759.618 dengan realisasi sebesar Rp. 119.326.576 atau 91,96 persen.

##### 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.332.228.211 dengan realisasi sebesar Rp. 5.665.103.393 atau 89,46 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 6.195.097.169 dengan realisasi sebesar Rp. 5.555.567.893 atau 89,68 persen.
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 137.131.042 dengan realisasi sebesar Rp. 109.535.500 atau 79,88 persen.



### **1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 213.873.670 dengan realisasi sebesar Rp. 171.731.190 atau 80,30.

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengamanan barang milik daerah SKPD.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 157.875.150 dengan realisasi sebesar Rp. 130.508.190 atau 82,67.
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 55.998.520 dengan realisasi sebesar Rp. 41.223.000 atau 73,61. Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan tidak terealisasinya anggaran jasa tenaga operator komputer.

### **1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.366.655.200 dengan realisasi sebesar Rp. 906.377.019 atau 66,32 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 386.224.000 dengan realisasi sebesar Rp. 210.132.056 atau 54,41 persen, rendahnya realisasi anggaran dikarenakan padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan di Bappeda Kabupaten Muara Enim.
2. Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundangan-undangan.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 980.431.200 dengan realisasi sebesar Rp. 696.244.963 atau 71,01 persen. rendahnya realisasi anggaran dikarenakan tidak dilaksanakannya bimtek perencana karena padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan di Bappeda Kabupaten Muara Enim.

### **1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.725.638.816 dengan realisasi sebesar Rp. 1.470.335.713 atau 85,21 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 9 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 49.799.640 dengan realisasi sebesar Rp. 46.430.000 atau 93,23 persen.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 199.578.000 dengan realisasi sebesar Rp. 197.950.000 atau 99,18 persen.
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 56.472.576 dengan realisasi sebesar Rp. 54.910.000 atau 97,23 persen.
4. Penyediaan bahan logistik Kantor.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 152.378.600 dengan realisasi sebesar Rp. 142.398.100 atau 93,45 persen.
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 126.282.000 dengan realisasi sebesar Rp. 125.800.000 atau 99,62 persen.
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 43.200.000 dengan realisasi sebesar Rp. 36.405.000 atau 84,27 persen.
7. Fasilitas Kunjungan Tamu.



- Alokasi anggaran sebesar Rp. 85.050.000 dengan realisasi sebesar Rp. 65.040.000 atau 76,47 persen. Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan tidak terealisasinya makan minum rapat eksternal Bappeda.
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 987.171.200 dengan realisasi sebesar Rp. 779.047.713 atau 78,92 persen. Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan tidak terealisasinya makan minum rapat internal Bappeda.
  9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 25.706.800 dengan realisasi sebesar Rp. 22.354.900 atau 86,96 persen.

#### **1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 665.899.000 dengan realisasi sebesar Rp. 649.650.000 atau 97,56 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Mebel  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 9.950.000 atau 99,50 persen.
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 655.899.000 dengan realisasi sebesar Rp. 639.700.000 atau 97,53 persen.

#### **1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 435.620.000 dengan realisasi sebesar Rp. 385.140.141 atau 88,41 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.550.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.550.000 atau 100 persen.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 328.350.000 dengan realisasi sebesar Rp. 290.710.141 atau 88,54 persen.
3. Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 102.720.000 dengan realisasi sebesar Rp. 89.880.000 atau 87,50 persen.

#### **1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 707.741.800 dengan realisasi sebesar Rp. 658.745.975 atau 93,08 Persen.

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 180.736.856 dengan realisasi sebesar Rp. 152.920.125 atau 84,61 Persen.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 48.120.000 dengan realisasi sebesar Rp. 45.730.000 atau 95,03 Persen.
3. Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya.



Alokasi anggaran sebesar Rp. 359.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 354.905.850 atau 98,86 Persen.

4. Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 119.884.944 dengan realisasi sebesar Rp. 105.190.000 atau 87,74 Persen.

## **2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.**

### **2.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.380.994.616 dengan realisasi sebesar Rp. 1.175.231.808 atau 85,10 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Konsultasi Publik.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 138.488.600 dengan realisasi sebesar Rp. 71.263.500 atau 51,46 persen. Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD tahun 2026 yang direncanakan Desember 2024 akan dilaksanakan pada tahun 2025.

2. Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 145.004.600 dengan realisasi sebesar Rp. 127.516.300 atau 87,94 persen.

3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 453.689.229 dengan realisasi sebesar Rp. 433.196.163 atau 95,48 persen.

4. Penyiapan bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 43.963.529 dengan realisasi sebesar Rp. 28.873.400 atau 65,68 persen. Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan efisiensi anggaran namun demikian realisasi kinerja 100%.

5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 599.848.658 dengan realisasi sebesar Rp. 514.382.445 atau 85,75 persen.

### **2.2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 915.047.821 dengan realisasi sebesar Rp. 736.085.437 atau 80,44 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut.

1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 544.269.021 dengan realisasi sebesar Rp. 439.359.555 atau 80,72 persen.

2. Pembinaan, Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 136.104.800 dengan realisasi sebesar Rp. 96.074.482 atau 70,59 persen. Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan efisiensi anggaran untuk sewa gedung pertemuan dan makan minum peserta Pelaksanaan Forum CSR.

3. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 234.674.000 dengan realisasi sebesar



Rp. 200.651.400 atau 85,50 persen.

### **2.3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 504.867.600 dengan realisasi sebesar Rp. 444.379.963 atau 88,02 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 149.157.800 dengan realisasi sebesar Rp. 139.661.357 atau 93,63 persen.

2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 355.709.800 dengan realisasi sebesar Rp. 304.718.606 atau 85,66 persen.

## **3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**

### **3.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.651.759.400 dengan realisasi sebesar Rp. 1.402.759.577 atau 84,93 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 6 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 215.125.300 dengan realisasi sebesar Rp. 188.219.245 atau 87,49 persen.

2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 390.046.800 dengan realisasi sebesar Rp. 377.146.937 atau 96,69 persen

3. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 165.535.000 dengan realisasi sebesar Rp. 134.567.000 atau 81,29 persen. Hal ini disebabkan perjalanan dinas yang direncanakan untuk koordinasi dan studi tiru ke daerah lain tidak dilaksanakan.

4. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 201.310.900 dengan realisasi sebesar Rp. 197.319.575 atau 98,02 persen.

5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Dearah Bidang Pembangunan Manusia

Alokasi anggaran sebesar Rp. 270.278.500 dengan realisasi sebesar Rp. 204.711.074 atau 75,74 persen. Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan efisiensi anggaran, koordinasi dilaksanakan melalui zoom meeting maupun telpon. Namun demikian realisasi kinerja 100%.

6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Manusia.



Alokasi anggaran sebesar Rp. 409.462.900 dengan realisasi sebesar Rp. 300.795.746 atau 73,46 persen. Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan efisiensi anggaran, koordinasi dilaksanakan melalui zoom meeting maupun telpon. Namun demikian realisasi kinerja 100%.

### **3.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.148.559.300 dengan realisasi sebesar Rp. 1.013.769.734 atau 88,26 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).

Alokasi anggaran sebesar Rp. 300.945.700 dengan realisasi sebesar Rp. 277.576.138 atau 92,23 persen.

2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Alokasi anggaran sebesar Rp. 115.358.900 dengan realisasi sebesar Rp. 80.760.640 atau 70,01 persen. Rendahnya realisasi anggaran dikarenakan penggunaan anggaran untuk perjalanan dinas digunakan untuk hal yang relevan dengan jenis kegiatan dan dilakukan efisiensi terhadap jumlah personil yang melakukan perjalanan dinas.

3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pengembangan Daerah Bidang Perekonomian.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 438.814.400 dengan realisasi sebesar Rp. 399.417.717 atau 91,02 persen.

4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA RPJPD, RPJMD dan RKPD

Alokasi anggaran sebesar Rp. 178.062.400 dengan realisasi sebesar Rp. 163.671.300 atau 91,92 persen.

5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 115.377.900 dengan realisasi sebesar Rp. 92.343.939 atau 80,04 persen.

### **3.3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 823.294.100 dengan realisasi sebesar Rp. 788.821.191 atau 95,81 persen.

Kegiatan tersebut terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut.

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Alokasi anggaran sebesar Rp. 77.930.800 dengan realisasi sebesar Rp. 74.122.500 atau 95,11 persen.

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 120.791.100 dengan realisasi sebesar Rp. 117.593.828 atau 97,35 persen.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 242.669.200 dengan realisasi sebesar Rp. 240.665.624 atau 99,17 persen.



4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 141.150.800 dengan realisasi sebesar Rp. 134.671.446 atau 95,41 persen.
5. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan  
Alokasi anggaran sebesar Rp. 240.752.200 dengan realisasi sebesar Rp. 221.767.793 atau 92,11 persen.

**Tabel 3.52 Capaian Kinerja Bappeda Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran			Capaian		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Baik	Baik	Baik	Baik (89,60)	-	-

### 3. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

**Tabel 3.53 Capaian Realisasi Anggaran Bappeda Muara Enim 2024**

No	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
1	1. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah 2. Peningkatan pelaksanaan CSR PKBL 3. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perencana	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kota</b>	100%	86,55%	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	92,04%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	89,46%	-	-
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	80,30%	-	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	66,32%	Dikarenakan padatnya jadwal pelaksanaan kegiatan di Bappeda Kab. Muara Enim	Akan diperbaiki di tahun mendatang

No	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	85,21%	-	-
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	97,56%	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	88,41%	-	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	93,08%	-	-
		<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</b>	100%	84,52 %	-	-
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	85,10 %	-	-
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	80,44 %	-	-
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	88,02 %	-	-
		<b>Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	100%	89,66 %	-	-



No	Kebijakan	Uraian Prog/Keg	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	84,93 %	-	-
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100%	88,26 %	-	-
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	95,81 %	-	-

## 2. INOVASI

Inovasi Bappeda Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 sebagai berikut :  
CSR Tematik Kabupaten Muara Enim.

## 3. PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2018-2024

- a. Terbaik I AMPL Sriwijaya Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.
- b. Top 10 Smart Sanitation Award (SSA) dari Aliasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) Tahun 2018.
- c. Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 untuk Inovasi Gerbang Serasan.
- d. Penghargaan Indonesia's Attractiveness Award 2018 Katagori : Gold sebagai Kabupaten Terbaik Sektor Pelayanan Publik dari Indonesia's Attractiveness Award.
- e. Penghargaan Top 10 Inovasi Terbaik tingkat Kabupaten Tahun 2024.
- f. Penghargaan anugerah Pangripta Sriwijaya kategori terbaik I Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2024.



## 5. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Dilaksanakan oleh perangkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp630.938.604.616,00** dan terealisasi sebesar **Rp561.653.020.089,00** atau **85,00 Persen** dan kinerja keluaran (*output*) sebesar **100 Persen** dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp108.018.760.665,66** terealisasi sebesar **Rp59.025.030.316,00** atau **54,64 Persen** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

#### b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp1.219.966.900,00** terealisasi sebesar **Rp1.097.657.500,00** atau **89,97 Persen** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

#### c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar **Rp15.000.000.000,00** terealisasi sebesar **Rp720.000.000,00** atau **4,80 Persen** yang dialokasikan untuk membiayai keperluan darurat yang mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

#### d. Belanja Transfer

Belanja Transfer dialokasikan sebesar **Rp506.699.877.050,00** terealisasi sebesar **Rp506.699.877.050,00** atau **100,00 Persen** yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

### 2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Terdiri dari **3 (tiga)** program, **13 (tiga belas)** kegiatan, dan 49 Sub kegiatan yaitu :

#### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Alokasi anggaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp90.529.892.900,66** dengan realisasi sebesar **Rp45.404.269.807,00** atau **50,15 Persen** program ini terdiri dari 7 kegiatan, dan 26 Subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar **Rp48.760.800,00,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp45.097.000,00** atau **92,49 Persen**.

a) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp5.271.700,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp4.822.200,00** atau sebesar **91,48 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya



- Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- b) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp7.933.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp7.449.000,00** atau sebesar **93,90 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- c) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp19.496.500,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp17.934.000,00** atau sebesar **91,99 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- d) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp9.275.300,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp8.636.000,00** atau sebesar **93,10 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- e) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar **Rp3.444.300,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp3.110.000,00** atau sebesar **90,29 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- f) Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp3.339.500,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp3.145.200,00** atau sebesar **94,18 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar **Rp85.158.748.911,66** Dengan Realisasi sebesar **Rp40.808.051.121,00** atau **47,92 Persen**.
- a) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar **Rp84.455.019.462,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp40.183.195,298** atau sebesar **47,58 Persen**. adapun

- Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- b) Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar **Rp597.113.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp537.934.823,00** atau sebesar **90,09 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Administrasi Tugas ASN dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - c) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar **Rp54.766.350,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp43.056.000,00** atau sebesar **78,62 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - d) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar **Rp51.850.100,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp43.865.000,00** atau sebesar **84,60 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar **Rp129.852.000,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp109.128.695,00** atau **84,04 Persen**.
- a) Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar **Rp129.852.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp109.128.695,00** atau sebesar **84,04 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar **Rp42.000.000,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp5.000.000,00** atau **11,90 Persen**.
- a) Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar **Rp42.000.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp5.000.000,00** atau sebesar **11,90 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan

Tugas dan Fungsi dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar **Rp2.376.393.600,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp2.004.582.010,00** atau **84,35 Persen**.
  - a) Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp32.056.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp28.973.000,00** atau sebesar **90,38 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b) Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp1.039.466.900,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp936.037.500,00** atau sebesar **90,05 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - c) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar **Rp499.877.700,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp417.582.650,00** atau sebesar **83,54 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Logistik Kantor dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - d) Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar **Rp360.978.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp321.122.500,00** atau sebesar **88,96 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - e) Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar **Rp26.976.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp21.139.000,00** atau sebesar **78,36 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - f) Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar **Rp417.039.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp279.727.360,00** atau sebesar **67,07 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar **Rp726.985.500,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp577.823.502,00** atau **79,48 Persen**.
  - a) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar **Rp28.625.500,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp22.400.000,00** atau sebesar **78,25 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar **Rp364.000.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp320.983.502,00** atau sebesar **88,18 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - c) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar **Rp334.360.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp234.440.000,00** atau sebesar **70,12 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar **Rp2.047.152.089,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp1.854.587.479,00** atau **90,59 Persen**.
  - a) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar **Rp248.868.689,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp218.845.879,00** atau sebesar **87,94 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp1.613.333.400,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp1.513.044.400.337,00** atau sebesar **93,78 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - c) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp60.000.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp23.986.000,00** atau sebesar **39,98 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

atau Bangunan Lainnya dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

- d) Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp124.950.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp98.711.200,00** atau sebesar **79,00 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

## 2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alokasi anggaran untuk program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar **Rp535.964.528.876,00** dengan realisasi sebesar **Rp518.990.744.277,00** atau **96,83 Persen** program ini terdiri dari **5** kegiatan, dan **18** Sub kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah. Alokasi Anggaran sebesar **Rp1.629.619.570,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp1.478.349.499,00** atau **90,72 Persen**.
  - a) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan anggaran sebesar **Rp298.137.100,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp267.670.000,00** atau sebesar **89,78 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya KUA PPAS dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan dengan anggaran sebesar **Rp205.137.100,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp168.040.000,00** atau sebesar **81,92 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Perubahan KUA PPAS dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - c) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan anggaran sebesar **Rp679.554.560,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp674.589.636,00** atau sebesar **99,27 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - d) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan anggaran sebesar **Rp446.790.810,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp368.049.863,00** atau sebesar **82,38 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan



Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar **Rp11.572.498.960,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp9.200.738.258,00** atau **79,51 Persen**.
  - a) Sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan anggaran sebesar **Rp1.837.295.495,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp1.447.304.027,00** atau sebesar **78,77 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b) Sub kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan anggaran sebesar **Rp18.237.172,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp10.612.000,00** atau sebesar **58,19 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - c) Sub kegiatan Koordinasi Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas dengan anggaran sebesar **Rp9.148.316.850,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp7.485.321.723,00** atau sebesar **81,82 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - d) Sub kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan anggaran sebesar **Rp381.453.850,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp160.055.664,00** atau sebesar **41,96 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - e) Sub kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp187.195.593,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp97.444.844,00** atau sebesar **52,06 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.



3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar **Rp1.062.533.296,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp891.779.470,00** atau **83,93 Persen**.
- a) Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan anggaran sebesar **Rp116.703.300,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp96.866.400,00** atau sebesar **83,00 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b) Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan anggaran sebesar **Rp221.058.796,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp149.081.674,00** atau sebesar **67,44 Persen**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - c) Sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar **Rp375.029.300,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp331.618.377,00** atau sebesar **88,42 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - d) Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp205.668.300,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp183.671.619,00** atau sebesar **89,30 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - e) Sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp144.073.600,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp130.541.400,00** atau sebesar **90,61 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban



Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar **Rp521.699.877.050,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp507.419.877.050,00** atau **97,26 Persen**.
  - a) Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan anggaran sebesar **Rp521.699.877.050,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp507.419.877.050,00** atau sebesar **97,26 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  
5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar **Rp0** Dengan Realisasi sebesar **Rp0** atau **0 Persen**.
  - a) Sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar **Rp0** dan realisasi keuangan sebesar **Rp0** atau sebesar **0 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b) Sub kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp0** dan realisasi keuangan sebesar **Rp0** atau sebesar **0 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

### **3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Alokasi anggaran untuk program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar **Rp4.444.182.839,00** dengan realisasi sebesar **Rp2.763.198.84,00** atau **62,18 Persen** program ini terdiri dari **1** kegiatan, dan **8** Sub kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - a) Sub kegiatan Penyusunan Standar Harga dengan anggaran sebesar **Rp440.067.400,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp304.223.537,00** atau sebesar **69,13 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Standar Harga dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
  - b) Sub kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan anggaran



- sebesar **Rp51.865.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp30.873.200,00** atau sebesar **59,53 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- c) Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar **Rp1.030.008.439,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp704.596.980,00** atau sebesar **68,41 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- d) Sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar **Rp156.780.200,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp92.691.700,00** atau sebesar **59,12 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- e) Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar **Rp351.035.600,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp311.589.800,00** atau sebesar **88,76 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- f) Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar **Rp351.833.200,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp193.318.822,00** atau sebesar **54,95 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- g) Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp2.062.593.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp1.125.904.795,00** atau sebesar **54,59 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

### 3. Capaian Indikator Kinerja

**Tabel 3.54 Capaian Realisasi Anggaran Badan Keuangan Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Menciptakan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
			Persentase Sinkronisasi Program dan Kegiatan yang teralokasi antara KUA PPAS dengan RKA SKPD	100	100	100
			Persentase Akurasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan SKPKD	100	100	100
			Persentase Kelengkapan Dokumen Perencana, Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	100	100	100
			Indeks Kepuasan Masyarakat	82.50	80.25	100

### 4. Permasalahan dan Solusi

### 5. Penghargaan dan Prestasi

Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023.



## 6. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Urusan wajib kepegawaian daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp. 44.292.004.503,00- terealisasi sebesar Rp. 38.193.055.686,00,- atau 86,23 persen dan kinerja keluaran (output) sebesar 94,81 persen dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 18.914.983.941,- terealisasi sebesar Rp. 15.905.266.181,- atau 84,09 persen yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

#### b. Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan sebesar Rp. 25.377.020.562,- terealisasi sebesar Rp. 22.400.815.000,- atau 88,27 persen yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

### 2. Program kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2024, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muara Enim melaksanakan 3 program 12 kegiatan dan 35 Subkegiatan. Adapun program dan kegiatan, capaian program indikator sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

#### 1) Urusan Kepegawaian

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 34.609.429.585,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.446.859.619,- atau 87,65 persen dengan capaian kinerja *output* sebesar 98,75 persen. Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) subkegiatan sebagai berikut.

##### 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 11.193.604,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.173.884,- atau sebesar 99,82 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 2 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 11.168.485,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.165.846,- atau sebesar 99,98 persen. Adapun output/keluaran dari



subkegiatan ini adalah 2 Dokumen RKA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 10.226.771,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.203.498,- atau sebesar 99,77 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 3 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

## 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 6.528.114.947,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.714.382.087,- atau sebesar 87,53 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 12 Bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 11.187.234,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.184.583,- atau sebesar 99,98 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Laporan Keuangan Akhir dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 11.175.390,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.171.810,- atau sebesar 99,97 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 14 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

## 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 155.330.136,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 113.025.495,- atau sebesar 72,76 persen. Hal ini dikarenakan belanja asuransi sesuai dengan harga penawaran PT. Sinar Mas. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 3 Dokumen dengan capaian output/keluaran 100 persen.
- b. Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 7.419.598,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.168.000,- atau sebesar 96,61 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 2 Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

## 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Pemulangan Pegawai Yang Pensiun dengan anggaran sebesar Rp. 76.718.297,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.472.218,- atau sebesar 95,77 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 289 Orang sebesar 100 persen.



- b. Subkegiatan Pemindahan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp. 95.482.348,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 88.741.860,- atau sebesar 92,94 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 71 Orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 48.200.000,- atau sebesar 80,33 persen. Hal ini dikarenakan pendidikan dan pelatihan tersebut target 6 orang tetapi realisasi 11 orang dengan besaran kontribusi yang berbeda-beda Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 11 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 27.321.096,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.593.000,- atau sebesar 93,67 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 13 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 194.242.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 185.055.000,- atau sebesar 95,27 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 62 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 242.979.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 234.057.900,- atau sebesar 70 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 35 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen
- d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 95.300.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 88.837.000,- atau sebesar 93,22 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 10 Paket maka capaian output/keluaran sebesar 100 persen
- e. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.650.000,- atau sebesar 61,04 persen. Hal ini dikarenakan tagihan sesuai dengan pemakaian media/surat kabar/majalah setiap bulannya. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 12 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen
- f. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 599.838.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 595.417.264,- atau sebesar 99,26 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 102 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 25.623.497.073,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.494.618.975,- atau sebesar 87,79 persen. Hal ini dikarenakan jasa Konsultasi pengawas bangunan gedung dilakukan perpanjangan kontrak tahun 2025. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 2 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 95 persen
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.000.000,- atau sebesar 100 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 800 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen
  - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 291.440.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 256.762.859,- atau sebesar 88,10 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 3 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen
  - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 44.372.240,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.350.000,- atau sebesar 88,68 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 3 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen
  - d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 153.240.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 153.240.000,- atau sebesar 100 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 14 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 200.831.625,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 133.428.340,- atau sebesar 66,44 persen. Hal ini dikarenakan pemeliharaan kendaraan dinas sesuai dengan kerusakan atau pemeliharaan yang akan diperlukan. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 10 unit kendaraan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen
  - b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 85.647.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 81.770.000,- atau sebesar 95,47 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 gedung dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen



- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan dengan anggaran sebesar Rp. 40.703.341,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.190.000,- atau sebesar 88,91 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 3 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen

## **B. Program Kepegawaian Daerah**

Alokasi anggaran untuk Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp. 6.245.563.820,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.865.346.449,- atau 77,90 persen dengan capaian kinerja *output* sebesar 95,83 persen. Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan dan 8 (delapan) subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
  - a. Subkegiatan Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 1.036.908.889,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 949.113.732,- atau sebesar 91,53 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen
  - b. Subkegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar Rp. 494.359.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 484.664.245,- atau sebesar 98,04 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 3 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen
2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
  - a. Subkegiatan Pengelolaan Mutasi ASN dengan anggaran sebesar Rp. 88.213.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 84.047.870,- atau sebesar 95,28 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 293 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen
  - b. Subkegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan anggaran sebesar Rp. 351.139.380,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 350.339.633,- atau sebesar 99,77 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1.108 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen
  - c. Subkegiatan Pengelolaan Promosi ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.370.806.167,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.348.661.179,- atau sebesar 56,89 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 293 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 65 persen. Dikarenakan seleksi terbuka JPT Pratama dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum bisa dilaksanakan karena izin pelaksanaan kegiatan tersebut belum mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
  - a. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN dengan anggaran sebesar Rp. 49.894.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.018.166,- atau sebesar 74,19 persen. Hal ini dikarenakan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan



pelaporan telah dilaksanakan ke kecamatan-kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim yang dibagi dalam beberapa tim, akan tetapi pelaksanaannya belum dilaksanakan secara maksimal mengingat padatnya jadwal kegiatan di BKPSDM. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen

b. Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 1.680.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.440.000.000,- atau sebesar 85,71 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 30 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 90 persen.

#### 4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

a. Subkegiatan Pembinaan Disiplin ASN dengan anggaran sebesar Rp. 174.242.184,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 171.501.624,- atau sebesar 98,43 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah sebanyak 1 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen

## 2. URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

### A. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp. 3.437.011.098,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.993.875.113,- atau 87,11 persen dengan capaian kinerja *output* sebesar 95,00 persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut.

#### 1. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

a. Subkegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan dengan anggaran sebesar Rp. 3.226.914.432,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.784.735.778,- atau sebesar 86,30 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 16 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 90,00 persen

b. Subkegiatan Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan dengan anggaran sebesar Rp. 210.096.666,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 209.139.335,- atau sebesar 99,54 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.



### 3. Capaian Indikator Kinerja

Sesuai dengan target kinerja sasaran dalam Renstra, capaian indikator kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.55 Matrik Capaian Indikator Kinerja  
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya SDM Aparatur yang Profesional		Indeks Profesionalitas ASN	57,8	77,57	134,2%	
	1.1	Terwujudnya Sistem Merrit	1.1.1 Indeks Sistem Merrit	200 / Kurang	134,5 / Buruk	67,25%
	1.2	Meningkatnya Penerapan Manajemen ASN	1.1.2 Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	55 (C)	70.20 (B)	93,6%
	1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1.1.3 Indeks Kepuasan Pegawai	Baik	Baik	100%

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Muara Enim, Tahun 2024

Pada tabel di atas, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Tahun 2024, Indeks Sistem Merrit, dan Indeks NSPK belum dapat dihitung dikarenakan nilainya belum dirilis dan masih menunggu hasil pengukuran dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Hasil pengukuran BKN RI terhadap profesionalitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim diperkirakan baru akan keluar pada bulan Juni 2025.

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) didasarkan pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas aparatur Sipil Negara. Standar pengukuran IP ASN berdasarkan Peraturan tersebut menggunakan 4 (empat) standar dimensi pengukuran yaitu Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kompetensi, Dimensi Kinerja, dan Dimensi Disiplin.

1. Dimensi Kualifikasi yaitu dimensi yang menunjukkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya.



2. Dimensi Kompetensi yaitu dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
3. Dimensi Kinerja yaitu dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kinerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
4. Dimensi Disiplin yaitu dimensi yang menggambarkan kesanggupan seseorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangan – undangan dan/atau peraturan kedinasan, apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Capaian IP ASN Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 yang telah dirilis BKN RI pada bulan September 2024 Berdasarkan hasil survey secara mandiri capaian IP ASN Kabupaten Muara Enim tahun 2023 sebesar 77,35 atau kategori sedang, belum optimalnya target kinerja tersebut dikarenakan ;

1. Belum optimalnya kualifikasi pendidikan ASN
2. Belum optimalnya kompetensi ASN
3. Belum optimalnya kinerja ASN
4. Belum optimalnya kedisiplinan ASN

Pengukuran Indeks Sistem Merit didasarkan pada Berita Acara Verifikasi Hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Nomor: BA.27/PMPSM/SM1.KASN/XI/2023. Dengan menilai 8 Aspek yakni : Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Pengembangan Karir, Promosi dan Mutasi, Manajemen Kerja, Penggajian Penghargaan dan Disiplin, Perlindungan dan Pelayanan dan Sistem Informasi.

- a. Aspek Perencanaan Kebutuhan mendapatkan nilai 22,5 dengan catatan belum dikelolanya data proyeksi BUP 5 tahun kedepan yang diupdate secara berkala.
- b. Aspek Pengadaan mendapatkan nilai 16, dengan catatan belum diintegrasikannya pemberian program pengembangan kompetensi teknis bidang tugas (PKTBT) dan belum melampirkan SK CPNS yang sesuai dengan penempatan PNS untuk mengetahui kesesuaian dengan formasi yang dilamar.
- c. Aspek Pengembangan Karier mendapatkan nilai 17,5 , dengan catatan belum tersusun talent pool dengan rencana suksesi, belum terdapat bukti analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja serta belum disusun strategi atau program pengembangan kompetensi, diklat hanya dilakukan untuk



diklat wajib saja dan perlu disusun strategi atau program pengembangan kompetensi baik klasikal maupun non klasikal.

- d. Aspek Promosi dan Mutasi mendapatkan nilai 5 dengan catatan yakni belum terdapat bukti kebijakan internal tentang pola karir dan pengisian jabatan, perlu menyusun kebijakan internal tentang pola karir dan pengisian jabatan.
- e. Aspek Manajemen Kinerja mendapatkan nilai 32,5 dengan catatan belum terdapat bukti analisis permasalahan kerja, perlu menyusun analisis permasalahan kinerja individu pegawai beserta strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dan belum terdapat bukti penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengembangan karir pegawai.
- f. Aspek Penggajian Penghargaan dan Disiplin mendapatkan nilai 25.
- g. Aspek Perlindungan dan Pelayanan mendapatkan nilai 2 dengan catatan belum terdapat bukti fasilitas pelayanan kepegawaian secara online dan perlu dibangun sistem pelayanan administrasi kepegawaian untuk memudahkan pegawai.
- h. Aspek Sistem Informasi mendapatkan nilai 14 dengan catatan belum menggunakan eoffice untuk memudahkan pelayanan administrasi dan assesment yang diberikan kepada seluruh pegawai perlu ditingkatkan kembali.

Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2023 Pemerintah Kab. Muara Enim mendapatkan Nilai Indeks 70,20 dengan Kategori B Predikat Baik. Pemerintah Kab. Muara Enim melalui Tim Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN Instansi agar melakukan beberapa hal antara lain: 1) Melakukan upaya perbaikan terhadap rekomendasi hasil Pengawasan dan Pengendalian Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2023 sebagaimana catatan yang tertuang pada setiap elemen di aplikasi indeks NSPK; 2) Melakukan pemantauan internal terhadap implementasi NSPK Manajemen ASN; 3) Tetap berkomitmen melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas implementasi Manajemen ASN Tahun 2024 yang sesuai dengan NSPK; dan 4) Hasil perbaikan terhadap catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan pada Angka

Indeks Kepuasan Pegawai Tahun 2024 masih dalam proses survey terhadap Pegawai Kabupaten Muara Enim atas pelayanan yang didapatkan dari BKPSDM Kabupaten Muara Enim.



#### 4. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1.	<p>Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 oleh Badan Kepegawaian Negara RI yang baru dirilis pada Bulan September 2024 terhadap 6.871 ASN, IP ASN Kabupaten Muara Enim mendapatkan nilai 77,57 dengan kategori sedang dengan rentang nilai antara 71-80.</p> <p>Dari hasil pengukuran terdapat 3 (tiga) dimensi dengan nilai rata-rata baik yaitu Dimensi Kinerja (24,99) dengan bobot penilaian 30% , Dimensi Disiplin (5) dengan bobot penilaian 5% dan Dimensi Kualifikasi (21,46) dengan bobot penilaian 25%, sedangkan untuk 1 (satu) dimensi dengan nilai rata rata rendah yaitu dimensi Kompetensi (26,12) dengan bobot 40%, belum optimalnya target kinerja tersebut dikarenakan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belum optimalnya kualifikasi pendidikan ASN</li> <li>2) Belum optimalnya kompetensi ASN</li> <li>3) Belum optimalnya kinerja ASN</li> <li>4) Belum optimalnya kedisiplinan ASN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengupayakan Peningkatan jenjang/ tingkat pendidikan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui peningkatan program tugas belajar bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.</li> <li>2. Mengupayakan peningkatan kegiatan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan fungsional, serta pelatihan teknis dan kegiatan pengembangan lainnya bagi Aparatur di lingkungan pemerintah kabupaten Muara Enim.</li> <li>3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan kedinasan, terutama pembangunan gedung diklat.</li> <li>4. Menerapkan cascading kinerja ke dalam perjanjian kinerja individu.</li> <li>5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja ASN</li> </ol>

#### 5. Penghargaan dan Prestasi

- a) Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara atas Keberhasilannya Menerapkan Sistem Merit Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Tahun 2023 dengan Kualitas Baik.
- b) Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Bupati Muara Enim Sebagai Perangkat Daerah Yang Paling Responsif II Dalam Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat di SP4N-LAPOR! Tahun 2024.
- c) Sertifikat Penghargaan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara atas Pengadaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2024 Menggunakan CAT Badan Kepegawaian Negara.
- d) Piagam Penghargaan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara atas Pencapaian Penyelesaian Disparitas Data Terbanyak di Wilayah Kerja Kantor Regional VII Sebesar 6.311 Data.



## 7. INSPEKTORAT

### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Pada tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Muara Enim mengalokasikan anggaran sebesar Rp24.791.765.368,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp19.837.098.691,00 atau 80,01% dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Belanja Operasi

Belanja operasi dialokasikan sebesar Rp22.479.945.598,00 dan terealisasi sebesar Rp18.322.672.191,00 atau sebesar 81,51% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

#### b. Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan sebesar Rp2.311.819.770,00 dan terealisasi sebesar Rp1.514.426.500,00 atau sebesar 65,51% yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

### 2. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Muara Enim melaksanakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 41 (empat puluh satu) sub kegiatan, yaitu:

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp18.695.266.928,00** dengan realisasi sebesar **Rp16.561.883.838,00** atau sebesar **88,59%**. Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) subkegiatan sebagai berikut:

##### 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp12.453.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp2.815.000,00 atau sebesar 22,60%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen RKA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp12.408.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp7.417.000,00 atau sebesar 59,77%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp13.684.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp9.532.500,00 atau sebesar 69,66%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen DPA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp13.481.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp7.013.000,00 atau sebesar 52,02%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini

- adalah 1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp11.037.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp8.145.000,00 atau sebesar 73,79%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 4 Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/OPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp13.109.477.674,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp12.072.029.363,00 atau sebesar 92,09%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 70 orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN serta 12 bulan terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
    - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp9.083.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp0,00 atau sebesar 0%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan capaian output/keluaran sebesar 0%.
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp7.428.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp2.353.000,00 atau sebesar 31,67%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen Laporan Keuangan SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - a. Pengamanan Milik Barang Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp76.445.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp61.007.450,00 atau sebesar 79,81%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah premi asuransi untuk 9 unit kendaraan roda empat dan 1 unit kendaraan roda dua dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp1.430.326.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.412.744.403,00 atau sebesar 98,77%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp10.236.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp8.106.400,00 atau sebesar 79,19%. Adapun

- output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 121 unit dan 19 jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp17.572.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp10.342.000,00 atau sebesar 58,85%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 121 unit dan 19 jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp103.240.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp85.901.900,00 atau sebesar 83,21%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1.371 unit dan 52 jenis alat tulis kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp36.867.927,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp18.830.000,00 atau sebesar 51,07%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 7 jenis dan 51.054 barang cetakan dan penggandaan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp12.050.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp10.992.000,00 atau sebesar 91,22%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah penyediaan 2 media cetak dan 3.651 dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - f. Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp18.900.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp6.250.000,00 atau sebesar 33,07%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 12 kegiatan rapat yang disediakan makan dan minum dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp700.089.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp671.007.938,00 atau sebesar 95,85%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, 72 (OHK) perjalanan dinas yang dilaksanakan ke dalam daerah/kecamatan, dan 72 (OHK) perjalanan dinas yang dilaksanakan ke luar daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp693.395.450,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp467.260.500,00 atau sebesar 67,10%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 162 unit mebel dengan capaian output/keluaran sebesar 70,00%.
    - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp1.178.224.320,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp608.666.000,00

atau sebesar 51,66%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 97 unit peralatan dan mesin lainnya dengan capaian output/keluaran sebesar 55,00%.

- c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya dengan anggaran sebesar Rp9.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp9.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 18 unit aset tetap lainnya dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.

#### 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp12.610.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp7.500.000,00 atau sebesar 59,48%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp173.875.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp130.479.977,00 atau sebesar 75,04%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah tersedianya 1 laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp35.050.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp14.000.000,00 atau sebesar 39,94%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp64.200.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp58.850.000,00 atau sebesar 91,67%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 12 laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

#### 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp41.841.988,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp36.402.500,00 atau sebesar 87,00%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak untuk 1 unit kendaraan dinas roda empat dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp285.199.469,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp251.259.692,00 atau sebesar 88,10%. Adapun output/keluaran dari



subkegiatan ini adalah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak untuk 8 unit kendaraan dinas/operasional roda empat dan 1 unit kendaraan dinas/operasional roda dua dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp563.607.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp562.978.215,00 atau sebesar 99,89%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 4 unit gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp41.480.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp21.000.000,00 atau sebesar 50,63%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 68 unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

## **B. Program Penyelenggaraan Pengawasan**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp3.828.065.400,00 dengan realisasi sebesar Rp2.608.381.773,00 atau 68,14%. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan sebagai berikut:

### **1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal**

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp809.161.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp599.365.867,00 atau sebesar 74,07%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 65 laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- b. Review Laporan Kinerja dengan anggaran sebesar Rp289.027.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp70.150.231,00 atau sebesar 24,27%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 6 laporan hasil review laporan kinerja dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- c. Review Laporan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp62.331.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp49.161.574,00 atau sebesar 78,87%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 laporan hasil review laporan keuangan dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- d. Pengawasan Desa dengan anggaran sebesar Rp717.392.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp706.431.400,00 atau sebesar 98,47%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 65 laporan hasil pengawasan desa dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan anggaran sebesar Rp403.871.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp226.538.369,00



atau sebesar 56,09%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 90 dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dengan capaian output/keluaran sebesar 80,00%.

2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan anggaran sebesar Rp290.283.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp72.491.571,00 atau sebesar 24,97%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 3 laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani dengan capaian output/keluaran sebesar 80,00%.
- b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan anggaran sebesar Rp1.255.997.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp884.242.761,00 atau sebesar 70,40%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 50 laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

**C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi**

Alokasi anggaran untuk Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi sebesar Rp2.268.433.040,00 dengan realisasi sebesar Rp666.833.080,00 atau 29,40%. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 5 (empat) subkegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp454.014.440,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp97.469.071,00 atau sebesar 21,47%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun dengan capaian output/keluaran sebesar 80%.
2. Pendampingan dan Asistensi
  - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp628.608.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp93.118.037,00 atau sebesar 14,81%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 58 perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 25%.
  - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp262.950.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp48.990.720,00 atau sebesar 18,63%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 58 perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi dengan capaian output/keluaran sebesar 80%.



- c. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan anggaran sebesar Rp125.945.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp6.291.400,00 atau sebesar 52,82%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 7 kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan capaian output/keluaran sebesar 80%.
- d. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan anggaran sebesar Rp125.945.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp6.291.400,00 atau sebesar 5%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 58 perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas dengan capaian output/keluaran sebesar 20%.

### 3. Capaian Indikator Kinerja

Sesuai dengan target kinerja sasaran dalam Renstra, capaian indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.56 Matrik Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	100%
			Indeks Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
			Persentase Temuan BPK terhadap APBD (secara material)	<1%	1,12%	89,28%
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	92,5%	100%	100%
			Persentase Temuan APIP yang Ditindaklanjuti	95%	86,35%	90,89%

### 4. Permasalahan dan Solusi

Berikut ini permasalahan yang terjadi terkait capaian indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024 beserta solusinya.

No	Permasalahan	Solusi
1.	Tidak tercapainya target persentase temuan BPK terhadap APBD dikarenakan terdapat temuan pemeriksaan yang signifikan yaitu aspek pelaksanaan kontrak/kegiatan pada temuan kekurangan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak pekerjaan Belanja Modal pada Lima SKPD dan aspek pembayaran dan pertanggungjawaban pada realisasi belanja perjalanan dinas pada 23 SKPD tidak sesuai ketentuan. Kemudian, terdapat kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan pada penyusunan laporan keuangan, pendapatan, belanja, dan aset.	Guna meminimalisir persentase temuan BPK terhadap APBD ke depannya perlu memperkuat pengendalian intern pada setiap perangkat daerah.
2.	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti tidak sesuai target dikarenakan masih berproses penagihan/evaluasi tindak lanjut terhadap temuan yang memiliki nominal/nilai material. Selain itu, objek pemeriksaan kurang kooperatif/tidak merespons dalam percepatan penyelesaian hasil pemeriksaan (rekomendasi).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melibatkan pihak Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Muara Enim untuk melakukan pendampingan penagihan melalui perdata/tata usaha negara.</li> <li>b. Melakukan evaluasi berkala terhadap tindak lanjut temuan dengan melakukan stressing ulang agar segera menindaklanjuti.</li> <li>c. Melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak/objek yang belum menindaklanjuti hasil temuan audit serta meminta pernyataan tanggung jawab mutlak (SKTJM).</li> </ul>

## 5. Penghargaan dan Prestasi

Pada tahun 2024, tidak terdapat penghargaan dan prestasi yang diterima oleh Inspektorat Kabupaten Muara Enim.

## 6. BADAN PENDAPATAN DAERAH

### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp28.021.548.762** dan terealisasi sebesar **Rp24.274.812.540** atau sebesar **86,63%** yang dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a) Belanja Operasional, dengan target sebesar Rp25.089.400.562 dan terealisasi sebesar Rp21.398.648.705 atau sebesar 85,29%.
- b) Belanja Modal, dengan target sebesar Rp2.932.148.200 dan terealisasi sebesar Rp2.876.163.836 atau sebesar 98,09%.

### 2. Program kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim terdiri dari **2 Program, 9 Kegiatan** dan **39 Subkegiatan**, dengan rincian sebagai berikut :

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini memiliki target sebesar Rp21.796.646.717 dan terealisasi sebesar Rp18.284.028.742 atau sebesar 83,88%. Program ini terdiri dari 8 Kegiatan dan 26 Subkegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp86.792.000 Dengan Realisasi sebesar Rp78.400.000 atau sebesar 90,72%. Kegiatan ini terdiri dari 6 subkegiatan dengan rincian sebagai berikut :
  - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD, alokasi sebesar Rp17.487.500 dengan realisasi sebesar Rp15.750.000 atau sebesar 90,06%.
  - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD, alokasi sebesar Rp17.487.500 dengan realisasi sebesar Rp15.750.000 atau sebesar 90,06%.
  - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD, alokasi sebesar Rp17.086.000 dengan realisasi sebesar Rp15.750.000 atau sebesar 92,18%.
  - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD, alokasi sebesar Rp17.132.000 dengan realisasi sebesar Rp15.750.000 atau sebesar 91,93%.
  - e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, alokasi sebesar Rp8.799.000 dengan realisasi sebesar Rp8.000.000 atau sebesar 90,92%.
  - f) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi sebesar Rp8.800.000 dengan realisasi sebesar Rp7.400.000 atau sebesar 84,09%.
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp15.563.079.330 Dengan Realisasi sebesar Rp12.319.938.717 atau sebesar 79,16%.
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi sebesar



- Rp15.313.987.330 dengan realisasi sebesar Rp12.071.998.717 atau sebesar 78,83%.
- b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, alokasi sebesar Rp249.092.000 dengan realisasi sebesar Rp247.940.000 atau sebesar 99,54%.
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp176.775.400 Dengan Realisasi sebesar Rp160.886.088 atau sebesar 91,01%.
- a) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, alokasi sebesar Rp176.775.400 Dengan Realisasi sebesar Rp160.886.088 atau sebesar 91,01%.
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp57.000.000 Dengan Realisasi sebesar Rp2.560.000 atau sebesar 4,49%.
- a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, alokasi sebesar Rp57.000.000 Dengan Realisasi sebesar Rp2.560.000 atau sebesar 4,49%.
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp2.596.021.950 Dengan Realisasi sebesar Rp2.539.994.248 atau sebesar 9%.
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, alokasi sebesar Rp42.116.560 dengan Realisasi sebesar Rp41.949.000 atau sebesar 99,60%.
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi sebesar Rp972.911.200 dengan Realisasi sebesar Rp968.080.000 atau sebesar 99,50%.
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, alokasi sebesar Rp118.304.490 dengan Realisasi sebesar Rp116.543.000 atau sebesar 98,51%.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, alokasi sebesar Rp249.834.800 dengan Realisasi sebesar Rp228.673.500 atau sebesar 91,53%.
- e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, alokasi sebesar Rp215.338.800 dengan Realisasi sebesar Rp212.973.200 atau sebesar 98,90%.
- f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, alokasi sebesar Rp32.988.000 dengan Realisasi sebesar Rp22.066.000 atau sebesar 66,89%.
- g) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, alokasi sebesar Rp29.936.400 dengan Realisasi sebesar Rp18.150.000 atau sebesar 60,63%.
- h) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi



SKPD, alokasi sebesar Rp934.591.700 dengan Realisasi sebesar Rp931.559.548 atau sebesar 99,68%.

- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp737.487.000 dengan Realisasi sebesar Rp701.800.000 atau sebesar 95,16%.
  - a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi sebesar Rp640.000.000 dengan Realisasi sebesar Rp608.200.000 atau sebesar 95,03%.
  - b) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, alokasi sebesar Rp97.487.000 dengan Realisasi sebesar Rp93.600.000 atau sebesar 96,01%.
  
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp833.990.550 Dengan Realisasi sebesar Rp754.537.897 atau sebesar 90,47%.
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, alokasi sebesar Rp31.595.400 Dengan Realisasi sebesar Rp24.178.825 atau sebesar 76,53%.
  - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi sebesar Rp288.795.150 Dengan Realisasi sebesar Rp242.439.072 atau sebesar 83,95%.
  - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi sebesar Rp513.600.000 Dengan Realisasi sebesar Rp487.920.000 atau sebesar 95,00%.
  
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp1.745.500.487 Dengan Realisasi sebesar Rp1.725.911.792 atau sebesar 928,88%.
  - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan, alokasi sebesar Rp174.881.247 Dengan Realisasi sebesar Rp169.831.348 atau sebesar 97,11%.
  - b) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi sebesar Rp1.499.000.000 Dengan Realisasi sebesar Rp1.489.824.444 atau sebesar 99,39%.
  - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya, alokasi sebesar Rp71.619.240 Dengan Realisasi sebesar Rp66.256.000 atau sebesar 92,51%.

## **B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Program ini memiliki target sebesar Rp6.224.902.045 dan terealisasi sebesar Rp5.990.783.798 atau sebesar 96,24%. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 13 Subkegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp6.224.902.045 dan terealisasi sebesar Rp5.990.783.798 atau sebesar



96,24%.

- a) Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, alokasi sebesar Rp415.220.900 Dengan Realisasi sebesar Rp386.238.589 atau sebesar 93,02%.
- b) Sub Kegiatan Analisa & Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, alokasi sebesar Rp448.294.000 Dengan Realisasi sebesar Rp447.342.896 atau sebesar 99,79%.
- c) Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, alokasi sebesar Rp179.851.500 Dengan Realisasi sebesar Rp140.059.006 atau sebesar 77,87%.
- d) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, alokasi sebesar Rp1.636.213.220 Dengan Realisasi sebesar Rp1.605.236.322 atau sebesar 98,11%.
- e) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, alokasi sebesar Rp402.610.000 Dengan Realisasi sebesar Rp400.398.405 atau sebesar 99,45%.
- f) Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan & Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, alokasi sebesar Rp471.800.000 Dengan Realisasi sebesar Rp470.000.000 atau sebesar 99,62%.
- g) Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB), alokasi sebesar Rp611.988.025 Dengan Realisasi sebesar Rp550.775.420 atau sebesar 90,00%.
- h) Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah, alokasi sebesar Rp196.756.100 Dengan Realisasi sebesar Rp195.117.016 atau sebesar 99,17%.
- i) Sub Kegiatan Penelitian & Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, alokasi sebesar Rp384.380.800 dengan Realisasi sebesar Rp378.491.524 atau sebesar 98,47%.
- j) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, alokasi sebesar Rp859.890.800 Dengan Realisasi sebesar Rp820.889.714 atau sebesar 95,46%.
- k) Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, alokasi sebesar Rp145.782.800 Dengan Realisasi sebesar Rp134.156.700 atau sebesar 92,03%.
- l) Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan & Pengawasan Pajak Daerah, alokasi sebesar Rp280.272.200 Dengan Realisasi sebesar Rp279.690.425 atau sebesar 99,79%.
- m) Sub Kegiatan Pembinaan & Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, alokasi sebesar Rp191.841.700 Dengan Realisasi sebesar Rp182.387.781 atau sebesar 95,07%



### 3. Capaian Indikator Kinerja

Dibuat dalam bentuk matrik sebagai berikut:

**Tabel 3.57 Matrik Capaian Indikator Kinerja  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan Pendapatan Daerah yang semakin meningkat	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah	9,72	10,52	108,27
			Persentase Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah	89,87	91,78	102,13
			Persentase Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah	0,37	2,72	737,45

### 4. Permasalahan dan Solusi

Dibuat dalam bentuk matrik sebagai berikut:

No	Permasalahan	Solusi
1	<p><b>Hambatan</b></p> <p>1. Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib pungut.</p> <p>a) Sebagian wajib pajak perdesaan masih enggan menyetorkan langsung ke Kas Daerah atau Bank terdekat yang telah ditunjuk.</p> <p>b) Wajib Pajak dalam menyampaikan dan mengisi data mengenai objek dan subjek pajak masih belum akurat/ transparan sehingga masih perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap objek pajak di</p>	<p>1. Melakukan sosialisasi penyuluhan tentang Pajak Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait.</p> <p>2. Melakukan kerja sama dengan Kantor Pos, Bank Sumsel Babel dan Bank BRI untuk melayani penerimaan pembayaran Pajak Daerah terutama PBB-P2 dan BPHTB.</p> <p>3. Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Muara</p>

No	Permasalahan	Solusi
	<p>lapangan.</p> <p>c) Wajib pungut pajak daerah masih ada yang belum melakukan pemungutan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Kondisi ekonomi masyarakat.</p> <p>a) Sebagian besar masyarakat Kabupaten Muara Enim hidup dari mata pencaharian pertanian, rendahnya harga jual hasil pertanian dan perkebunan mengalami penurunan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19</p> <p>b) Masyarakat wajib pajak lebih mengutamakan kebutuhan primer untuk kelangsungan kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak sekolah.</p> <p>3. Akurasi data subjek dan objek pajak.</p> <p>a) Data wajib pajak yang belum akurat.</p> <p>b) Adanya wajib pajak yang sudah tidak berada di alamat terdaftar.</p> <p>c) Masih adanya objek pajak ganda, tidak ada objek dan keberatan.</p> <p><b>Kendala</b></p> <p>a) Regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak konsisten dengan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>b) Database Pajak Daerah yang masih harus disempurnakan.</p> <p>c) Lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak.</p> <p>d) Kurangnya SDM aparatur yang berkualifikasi perpajakan.</p> <p>e) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Daerah.</p>	<p>Enim Tanggal 7 Januari 2019 Nomor 900/09/Bapenda-I/2019, 900/35/BPKAD-2/2019 dan 010/MRE/1/B/ 2019 tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah secara Online Pemerintah Kabupaten Muara Enim.</p> <p>4. Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dengan PT Pos Indonesia (Persero) Tanggal 7 Januari 2019 Nomor 900/09/ Bapenda-I/2019, 25/REG3/JKRJ/HK/ 0119 tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online Pemerintah Kabupaten Muara Enim.</p> <p>5. Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Tanggal 7 Januari 2019 Nomor 900/09/Bapenda-I/2019, 92/180.2-16.03/1/2019 tentang Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Muara Enim.</p> <p>6. Melakukan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Tanggal 23 Mei 2019 Nomor 35/MOU/Bappeda/2019, 269/100-16.03/V/2019 tentang Kerja Sama di Bidang Pertanahan</p> <p>7. Melakukan Kesepakatan Bersama Antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tanggal 23 Mei 2019 Nomor Kep-329/WPJ.03/2019, 34/MOU/Bappeda/2019 Tentang Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi.</p> <p>8. Menerbitkan Surat Edaran Bupati Muara Enim Tanggal 10 Juni 2019 Nomor 973/1114/BAPENDA-III/2019 tentang Pelaporan dan Pembayaran Transaksi</p>



No	Permasalahan	Solusi
	<p>f) Subjek Pajak Daerah berada di luar daerah sehingga sulit untuk melakukan penagihan pajak.</p> <p>g) Terhadap tidak tercapainya PBB P2 hal ini masih terkait dengan piutang PBB P2 penyerahan dari KPP Pratama Prabumulih pada tahun 2014 dan juga database yang diterima masih banyak tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.</p> <p>h) Pada tahun anggaran 2023 terdapat objek ganda tidak ada objek dan subjek sebanyak 1.707 SPPT dengan nilai Rp91.157.666,00 maka penerimaan Pendapatan PBB P2 belum mencapai target yang telah ditetapkan pada APBD.</p> <p>i) Penerimaan pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah, terutama dari sektor Pajak Daerah khususnya PBB P2 masih mengalami hambatan dan kendala, dalam pelaksanaan penerbitan SPPT PBB P2 masih terdapat objek ganda, tidak ada objek dan keberatan. Penagihan PBB P2 khususnya Perdesaan sebagian besar harus dilakukan secara langsung oleh petugas Badan Pendapatan Daerah, UPTD Pendapatan dengan cara Door-to-Door ke desa-desa/kelurahan, masih banyak masyarakat perdesaan yang enggan menyetorkan pembayaran PBB P2 langsung ke Kas Daerah atau Bank terdekat yang telah ditunjuk untuk menerima setoran PBB P2 dan masih rendahnya kesadaran wajib pajak karena kurang mengertinya manfaat dari pembayaran Pajak serta alasan masalah ekonomi. Pada saat petugas Badan Pendapatan Daerah dan UPTD Pendapatan melakukan penagihan Door-to-Door banyak ditemui masyarakat Perdesaan sedang</p>	<p>Pajak Hiburan Melalui Sistem Online.</p> <p>9. Menerbitkan Surat Edaran Bupati Muara Enim Tanggal 31 Januari 2020 Nomor 973/04/BAPENDA-II/2020 tentang Kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Pungut yang Telah Dipasang/Terintegrasi Alat Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Web Services (Transaction Monitoring Device) di Hotel, Restoran, Hiburan, Rumah Makan, Kantin dan Warung dalam Kabupaten Muara Enim.</p> <p>10. Menerbitkan Surat Bupati Muara Enim Tanggal 23 Maret 2020 Nomor 970/0309/X.Bapenda-II/2020 tentang Pengintegrasian Alat Perekam Transaksi E-Tax/TMD.</p> <p>11. Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tanggal 30 Juli 2019 Nomor Kep.068/ WPJ.03/KP/2019, 970/60/Bapenda-I/PKS/2019 tentang Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>12. Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Muara Enim Tanggal 13 Desember 2019 Nomor 900/43/ Bapenda-I/2019, 900/96/BPKAD-2/2019, B.7070-KC-IV/12/2019 tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemerintah Kabupaten Muara Enim secara Online.</p>



No	Permasalahan	Solusi
	<p>tidak ada di rumah.</p> <p>j) Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim menerbitkan SPPT PBB P2 sebanyak 160.239 lembar dengan jumlah ketetapan Rp14.696.194.906,00 terdapat objek ganda dan tidak ada objek sebanyak 846 SPPT dengan jumlah ketetapan sebesar Rp22.244.544,00 maka penerimaan Pendapatan PBB P2 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD.</p>	

## 5. Penghargaan dan Prestasi



## 9. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

### 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja

Urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim dengan alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp 11.117.087.038,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.777.197.505,00 yang terdiri dari:

#### a. Belanja operasi

Belanja operasi digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja operasi dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.428.494.838,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.137.876.583,00 atau 68,45 %.

#### b. Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk membiayai belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, serta belanja modal aset lainnya. Belanja modal dialokasikan anggaran sebesar Rp 688.592.200,00 dan terealisasi sebesar Rp 639.320.922,00 atau 92,84 %.

### 2. Program kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim melaksanakan 2 program, 12 kegiatan, dan 45 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

#### I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

##### a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp 88.832.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 71.527.600,00 atau 80,52 %.

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, sebagai berikut:

##### 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp 25.529.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 20.705.100,00 atau 81,10 %.

##### 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Alokasi anggaran sebesar Rp 16.114.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.228.200,00 atau 94,50 %.

##### 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Alokasi anggaran sebesar Rp 22.781.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 18.836.700,00 atau 82,68 %.

##### 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Alokasi anggaran sebesar Rp 4.865.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.592.400,00 atau 94,39 %.

##### 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Alokasi anggaran sebesar Rp 14.217.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.578.200,00 atau 60,34 %.

##### 6. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp 5.323.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.587.000,00 atau 67,38 %.



- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Alokasi anggaran sebesar Rp 3.422.675.901,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.659.974.814,00 atau 77,72%.  
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, sebagai berikut:
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
Alokasi anggaran sebesar Rp 3.383.142.601,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.625.419.714,00 atau 77,60 %.
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
Alokasi anggaran sebesar Rp 7.343.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.570.500,00 atau 75,85 %.
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/ Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  
Alokasi anggaran sebesar Rp 32.189.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 28.984.600,00 atau 90,04 %.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
Alokasi anggaran sebesar Rp 73.899.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 72.684.490,00 atau 98,36 %.  
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, sebagai berikut:
1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  
Alokasi anggaran sebesar Rp 54.827.800,00 dengan realisasi Rp 54.531.890,00 atau 99,46 %.
  2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  
Alokasi anggaran sebesar Rp 19.071.700,00 dengan realisasi Rp 18.152.600,00 atau 95,18 %.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Alokasi anggaran sebesar Rp 184.464.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 54.996.735,00 atau 29,81 %.  
Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, sebagai berikut:
1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Alokasi anggaran sebesar Rp 184.464.000,00 dengan realisasi Rp 54.996.735,00 atau 29,81 %.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Alokasi anggaran sebesar Rp 1.184.968.128,00 dengan realisasi sebesar Rp 768.639.604,00 atau 64,87 %.  
Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, sebagai berikut:
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Alokasi anggaran sebesar Rp 7.215.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.557.100,00 atau 77,02 %.
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
Alokasi anggaran sebesar Rp 355.216.200,00 dengan realisasi sebesar



- Rp 329.959.600,00 atau 92,89 %.
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
Alokasi anggaran sebesar Rp 36.678.028,00 dengan realisasi sebesar Rp 28.719.100,00 atau 78,30 %.
  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
Alokasi anggaran sebesar Rp 85.835.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 64.227.800,00 atau 74,83 %.
  5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
Alokasi anggaran sebesar Rp 21.495.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 21.455.600,00 atau 99,81 %.
  6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  
Alokasi anggaran sebesar Rp 5.346.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.758.000,00 atau 89,00 %.
  7. Fasilitasi Kunjungan Tamu  
Alokasi anggaran sebesar Rp 22.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 22.669.000,00 atau 99,95 %.
  8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
Alokasi anggaran sebesar Rp 650.502.100,00 dengan realisasi Rp 291.293.404,00 atau 44,78 %.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah  
Alokasi anggaran sebesar Rp 263.376.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 259.811.822,00 atau 98,65 %.  
Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, sebagai berikut:
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Alokasi anggaran sebesar Rp 63.376.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 60.511.822,00 atau 95,48 %.
  2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Alokasi anggaran sebesar Rp 200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 199.300.000,00 atau 99,65 %.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Alokasi anggaran sebesar Rp 179.964.765,00 dengan realisasi sebesar Rp 167.908.947,00 atau 93,30 %.  
Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, sebagai berikut:
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Alokasi anggaran sebesar Rp 4.480.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.480.000,00 atau 100 %.
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
Alokasi anggaran sebesar Rp 85.604.765,00 dengan realisasi sebesar Rp 73.548.947,00 atau 85,92 %.
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
Alokasi anggaran sebesar Rp 89.880.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 89.880.000,00 atau 100 %.

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran sebesar dengan realisasi sebesar Rp 383.680.669,00 dengan realisasi sebesar Rp 329.899.572,00 atau 85,98 %.

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan  
Alokasi anggaran sebesar Rp 40.708.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.928.000,00 atau 26,84 %.
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  
Alokasi anggaran sebesar Rp 156.663.769,00 dengan realisasi sebesar Rp 133.473.569,00 atau 85,20 %.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
Alokasi anggaran sebesar Rp 145.188.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 145.142.173,00 atau 99,97 %.
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Alokasi anggaran sebesar Rp 14.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.640.000,00 atau 96,06 %.
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Alokasi anggaran sebesar Rp 26.920.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 26.715.830,00 atau 99,24 %.

## II. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Alokasi anggaran sebesar Rp 1.068.881.130,00 dengan realisasi sebesar Rp 634.147.843,00 atau 59,33 %.

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa  
Alokasi anggaran sebesar Rp 349.276.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 184.198.527,00 atau 52,74 %.
2. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan  
Alokasi anggaran sebesar Rp 309.707.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 171.481.162,00 atau 55,37 %.
3. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan  
Alokasi anggaran sebesar Rp 409.897.330,00 dengan realisasi sebesar Rp 278.468.154,00 atau 67,94 %.

b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Alokasi anggaran sebesar Rp 1.330.865.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 829.666.706,00 atau 62,34 %.



Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Alokasi anggaran sebesar Rp 161.215.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 60.806.922,00 atau 37,72 %.
2. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan  
Alokasi anggaran sebesar Rp 319.458.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 214.198.765,00 atau 67,05 %.
3. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata  
Alokasi anggaran sebesar Rp 286.567.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 222.304.788,00 atau 77,57 %.
4. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan  
Alokasi anggaran sebesar Rp 296.327.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 152.502.137,00 atau 51,46 %.
5. Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja  
Alokasi anggaran sebesar Rp 267.296.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 179.854.094,00 atau 67,29 %.

- c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan  
Alokasi anggaran sebesar Rp 785.209.525,00 dengan realisasi sebesar Rp 540.466.213,00 atau 68,83 %.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan  
Alokasi anggaran sebesar Rp 565.024.950,00 dengan realisasi sebesar Rp 367.035.257,00 atau 64,96 %.
2. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Alokasi anggaran sebesar Rp 220.184.575,00 dengan realisasi sebesar Rp 173.430.956,00 atau 78,77 %.

- d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Alokasi anggaran sebesar Rp 2.150.269.120,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.387.473.159,00 atau 64,53 %.

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, sebagai berikut:

1. Penelitian, Pengembangan dan Perekrutan di Bidang Teknologi dan Inovasi  
Alokasi anggaran sebesar Rp 814.675.130,00 dengan realisasi sebesar Rp 551.929.071,00 atau 67,75 %.
2. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi  
Alokasi anggaran sebesar Rp 351.415.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 205.094.627,00 atau 58,36 %.
3. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif  
Alokasi anggaran sebesar Rp 365.617.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 199.363.245,00 atau 54,53 %.
4. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan



Alokasi anggaran sebesar Rp 381.298.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 268.972.016,00 atau 70,54 %.

5. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Alokasi anggaran sebesar Rp 237.261.990,00 dengan realisasi sebesar Rp 162.114.200,00 atau 68,33 %.

### 3. Capaian Indikator Kinerja

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026, capaian indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.58 Matrik Capaian Indikator Kinerja  
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi	Peningkatan Inovasi Daerah dan Peningkatan Hasil Riset	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (>60)	Sangat Inovatif (64,31)	100%
			Jumlah Rekomendasi dari Hasil Riset	100%	100%	100%

### 4. Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan	Solusi
1.	Kompetensi SDM peneliti belum memenuhi syarat sesuai aturan.	1. Penambahan tenaga peneliti yang memenuhi syarat. 2. Peningkatan kompetensi peneliti yang ada melalui peningkatan pendidikan, diklat, bimtek dan lain-lain.
2.	Belum adanya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan penelitian mandiri.	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menunjang tugas dan kewajiban peneliti.
3.	Masih dibutuhkan SDM jabatan fungsional dalam menunjang operasional Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Mengefisiensikan tenaga yang dimiliki oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

### 5. Penghargaan dan Prestasi

Penghargaan dan prestasi yang diterima oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim selama tahun 2024, sebagai



berikut:

- 1) Predikat terbaik II kategori Siswa SLTA Inovatif atas nama Dhini Zahra Eris Ramado dan Syabilah Purnamasari dari SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim dengan inovasi “Pemanfaatan Limbah Daun Tembesu (*Fagraea Fragrans Roxb*) Menjadi *Biodegradable Foam* sebagai alternatif Pengganti *Styrofoam*” pada Pemilihan Inovator Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
- 2) Predikat Harapan I kategori Tenaga Kesehatan Inovatif atas nama Asnara, S.Gz dari Puskesmas Sukarami Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim dengan inovasi “KECAP ASIN (Kelas Edukasi Calon Pengantin yang Agamis Sehat dan Intensif) pada Pemilihan Inovator Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
- 3) Predikat Terbaik III kategori Peneliti Inovatif atas nama Anggraini Wulan Pratiwi, S.Sn., Efran Fauzan, S.E. dan Royda, S.E., M.Si dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim dengan inovasi “Pemanfaatan Limbah Kulit Biji Kopi Petik Merah Menjadi Bahan Pewarna Alami Batik Khas Kabupaten Muara Enim” pada Pemilihan Inovator Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
- 4) Predikat Kabupaten Sangat Inovatif dengan skor Indeks Inovasi Daerah 64,31 berdasarkan Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024 dan penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2024.
- 5) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 memperoleh Nilai B dengan Indeks Total 81,561 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023.



### 3.6. KECAMATAN

#### 1. KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU

Alokasi anggaran belanja Kecamatan Semende Darat Ulu pada tahun 2024 sebesar Rp.4.477.573.518,00 dan terealisasi anggaran sebesar Rp. 4.013.579.913,00 atau 89,19% dengan rincian sebagai berikut :

##### A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp. 3.393.566.584** terealisasi sebesar **Rp. 2.374.017.470** (*Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah*) atau **69,96 persen** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

##### B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 668.911.866** terealisasi sebesar **Rp. 667.851.866**, (*Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Enam*) atau **99,84 persen** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

##### C. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar **Rp. 0,00** terealisasi sebesar **Rp. 0,00** (*Nol Rupiah*) atau **0,00 persen** yang dialokasikan untuk membiayai keperluan darurat yang mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

##### D. Belanja Transfer

Belanja Transfer dialokasikan sebesar **Rp. 0,00** terealisasi sebesar **Rp 0,00** (*Nol Rupiah*) atau **0,00 persen** yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

#### 1.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim melaksanakan 9 Program dan 23 Kegiatan, dan 106 SubKegiatan antara lain yaitu:

##### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. Rp 3.720.464.988** dengan realisasi sebesar **Rp. Rp 3.318.154.313** atau **89,19 persen** dengan capaian kinerja output sebesar **100,00 persen**. Program ini terdiri dari **8 (delapan)** kegiatan dan **24 (dua puluh empat)** Sub kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.



- a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. Rp17.790.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. Rp11.770.000** atau sebesar **58,00 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **66,16** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
  - b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. Rp1.230.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0** atau sebesar **0 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran sebesar **Rp. Rp2.201.458.896** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. Rp1.959.962.853** atau sebesar **89,03 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
  - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 33.630.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 16.670.000** atau sebesar **49,57 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- a. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 7.400.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 6.999.987** atau sebesar **94,59 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
  - b. Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 5.625.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. Rp5.400.000** atau sebesar **96,00 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- a. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar **Rp. 12.000.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 12.000.000** atau sebesar **100 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **0,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **0,0**.
  - b. Sub kegiatan Pakaian Dinas Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar **Rp. 29.392.200** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 29.392.200** atau sebesar **100 persen**.

Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98 persen** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. Rp5.841.100** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. Rp5.823.500** atau sebesar **99,70 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
  - b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 6.174.600** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 5.694.750** atau sebesar **92,23 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
  - c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 81.142.300** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 51.934.500** atau sebesar **64 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
  - d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar **Rp. 5.950.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 5.840.000** atau sebesar **98,15 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
  - e. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar **Rp. Rp2.880.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 0** atau sebesar **0,00 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
  - f. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 256.239.876** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 190.884.268** atau sebesar **74,49 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
  - g. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar **Rp. 91.680.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 90.750.000** atau sebesar **98,99 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah



- a. Sub kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar **Rp. 79.720.880** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. Rp79.720.880** atau sebesar **100 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
  - b. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 263.812.050** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 259.798.880** atau sebesar **0,00 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
  - c. Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 145.990.986** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 145.310.986** atau sebesar **99,53 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar **Rp. 5.215.800** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 5.160.000** atau sebesar **98,93 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
  - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar **Rp. Rp16.324.200** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. Rp10.680.584** atau sebesar **65,43 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
  - c. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 38.520.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 26.750.000** atau sebesar **69,44 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar **Rp. 97.782.600** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 78.344.925** atau sebesar **80,12 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **89 ,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**
  - b. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. Rp303.254.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 300.454.000** atau sebesar **95,00 persen**. Adapun



output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.

- c. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 11.410.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 16.772.000** atau sebesar **146,99 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.

## **B. Program Pengelolaan Pendidikan**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 162.695.400 dengan realisasi sebesar Rp. 151.254.600 atau 92,97 persen dengan capaian kinerja output sebesar 100,00 persen. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (Empat) Sub kegiatan sebagai berikut.

1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
  - a. Sub kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta dengan anggaran sebesar **Rp. 68.501.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 68.501.000** atau sebesar **100 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
  - a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar **Rp. 29.963.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 27.623.400** atau sebesar **92,19 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
  - b. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dengan anggaran sebesar **Rp. 29.963.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 27.623.400** atau sebesar **92,19 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
  - c. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar **Rp. 34.267.600** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 27.565.100** atau sebesar **80,44 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.

## **C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 172.995.730 dengan realisasi sebesar Rp.



165.150.000 atau 95,46 persen dengan capaian kinerja output sebesar 100,00 persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - a. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar **Rp. 27.360.330** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 27.360.330** atau sebesar **100,00 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
  - b. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar **Rp. 145.635.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 121.450.000** atau sebesar **83,39 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.

#### **D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar **Rp 263.386.000** dengan realisasi sebesar **Rp 243.755.000** atau **92,55** persen dengan capaian kinerja output sebesar **100,00** persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah
  - a. Sub kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memanfaatkan pengamalan pancasila pelaksanaan UUD RI 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan RI dengan anggaran sebesar **Rp. 179.386.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 161.505.000** atau sebesar **90,03** persen. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.
  - b. Sub kegiatan Pelaksanaan tugas forum koordinasi di Kecamatan dengan anggaran sebesar **Rp 84.000.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 82.250.000** atau sebesar **97,92** persen. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00** persen.

#### **E. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar **Rp 158.031.400** dengan realisasi sebesar **Rp. 135.266.000** atau **85,59** persen dengan capaian kinerja output sebesar



**100,00 persen.** Program ini terdiri dari **1 (satu)** kegiatan dan **2 (dua)** Sub kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Sub kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar **Rp. 147.166.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. Rp135.266.000** atau sebesar **91,91 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.
  - b. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar **Rp. 10.865.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 8.900.000** atau sebesar **81,91 persen**. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah **98,00** dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 persen**.

## 1.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

**Tabel 3.59 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Semende Darat Ulu**

TUJUAN	SASARAN				%
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	85	91,23	100
		Pesentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik	85	92,27	100
		Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan) yang ditindaklanjuti	85	91,91	100
		PKK Aktif	100	100	100
		Posyandu Aktif	100	100	100



### 1.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	Masih ada beberapa kegiatan yang belum optimal dilaksanakan sehingga belum dapat menyerap dana secara maksimal (anggaran masih ada yang tersisa)	Mengevaluasi terhadap kegiatan yang belum optimal dilaksanakan
2	Kekurangan pegawai (ahli pratama Perencana, Tenaga ahli Keuangan)	Mengajukan usulan penambahan pegawai kecamatan ke BKPSDM

### 1.4. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

- a. Juara MTQ Tingkat Kabupaten Muara Enim
- b. Penghargaan Top 10 Inovasi Daerah Kategori Tingkat Kecamatan dalam rangka Penilaian/Asistensi Inovasi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.



## 2. KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH

Urusan Kewilayahan diselenggarakan oleh perangkat daerah Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024, alokasi belanja Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp4.399.857.683,00 dan terealisasi sebesar Rp3.552.539.576,00 atau 80.74 % dan kinerja keluaran (output) sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :

### A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp3.865.315.180 terealisasi sebesar Rp3.037.509.576 Atau 78.58% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

### B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp534.542.503 terealisasi sebesar Rp515.030.000 atau 96.34 % yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

## 2.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2024 Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 program dan 14 kegiatan, dan 33 sub kegiatan yaitu :

### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pagu Anggaran sebesar Rp3.060.901.983 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp2.368.861.826

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp8.008.500 dengan Realisasi sebesar Rp7.959.500
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, alokasi sebesar Rp1.998.500 dengan realisasi sebesar Rp1.980.500
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD alokasi sebesar Rp2.178.600 dengan realisasi sebesar Rp2.167.000
  - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi sebesar Rp3.831.400 dengan realisasi sebesar Rp3.812.000
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp1.907.470.625 Realisasi sebesar Rp1.274.725.568
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi sebesar Rp1.896.855.125 dengan realisasi sebesar Rp1.264.291.568
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi sebesar Rp2.325.900 dengan realisasi sebesar Rp2.313.000
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD alokasi sebesar Rp8.289.600 dengan realisasi sebesar Rp8.121.000



3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp5.775.000 Dengan Realisasi sebesar Rp4.497.180
  - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD alokasi sebesar Rp5.775.000 dengan realisasi sebesar Rp4.497.180
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 33.565.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 18.530.000
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya alokasi sebesar Rp 18.565.000 dengan realisasi sebesar Rp 18.530.000
  - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi alokasi sebesar Rp 15.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 0,-
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 513.973.153 Dengan Realisasi sebesar Rp 481.240.150
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor alokasi sebesar Rp 7.887.100 dengan realisasi sebesar Rp 7.705.000
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi sebesar Rp243.482.703 dengan realisasi sebesar Rp237,522,000
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi sebesar Rp 73.606.800 dengan realisasi sebesar Rp 65.358.300
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi sebesar Rp 29.942.200 dengan realisasi sebesar Rp 27.902.000
  - e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu alokasi sebesar Rp 29.705.500 dengan realisasi sebesar Rp 13.475.000
  - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi sebesar Rp 129.348.850 dengan realisasi sebesar Rp 129.277.850
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 85,000,000 Dengan Realisasi sebesar Rp 84.600.000
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp 85,000,000 dengan realisasi sebesar Rp 84.600.000
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 100.064.770 Dengan Realisasi sebesar Rp 91.593.235



- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat alokasi sebesar Rp 4.480.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.480.000
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi sebesar Rp 10.584.770 dengan realisasi sebesar Rp 6.854.928
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi sebesar Rp 33.640.000 dengan realisasi sebesar Rp 33.290.000
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi sebesar Rp 51.360.000 dengan realisasi sebesar Rp 51.360.000
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 407.044.935 Dengan Realisasi sebesar Rp 401.324.500
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi sebesar Rp 92.656.902 dengan realisasi sebesar Rp 88.188.000
    - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya alokasi sebesar Rp 314.388.033 dengan realisasi sebesar Rp 313.136.500

**B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Pagu Anggaran sebesar Rp 220.455.800 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 218.924.600

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Alokasi Anggaran sebesar Rp 84.699.600 Dengan Realisasi sebesar Rp 84.699.600
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta alokasi sebesar Rp 84.699.600 dengan realisasi sebesar Rp 84.699.600
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Alokasi Anggaran sebesar Rp 135.756.200 dengan Realisasi sebesar Rp 134.225.000
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha alokasi sebesar Rp 17.174.200 dengan realisasi sebesar Rp 17.170.000
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan alokasi sebesar Rp 17.079.800 dengan realisasi sebesar Rp 17.070.000
  - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan alokasi sebesar Rp 86.184.200 dengan realisasi sebesar Rp 84.935.000



### **C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Pagu Anggaran sebesar Rp 500.656.700 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 436.584.000

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Alokasi Anggaran sebesar Rp 500.656.700 Dengan Realisasi sebesar Rp 436.584.000
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa alokasi sebesar Rp 38.137.100 dengan realisasi sebesar Rp 37.186.000
  - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan alokasi sebesar Rp 296.319.600 dengan realisasi sebesar Rp 246.608.000

### **D. Program Kordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum**

Pagu Anggaran sebesar Rp 28.999.600 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 13.260.000

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Alokasi Anggaran sebesar Rp 28.999.600 Dengan Realisasi sebesar Rp 13.260.000
  - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan alokasi sebesar Rp 28.999.600 dengan realisasi sebesar Rp 13.260.000

### **E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Pagu Anggaran sebesar Rp 411.571.400 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 348.921.150

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 411.571.400 Dengan Realisasi sebesar Rp348.921.150
  - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia alokasi sebesar Rp 301.327.900 dengan realisasi sebesar Rp 280.708.000
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan alokasi sebesar Rp 110.243.500 dengan realisasi sebesar Rp 68.213.150

### **F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Pagu Anggaran sebesar Rp 177.272.200 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 165.988.000



1. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Alokasi Anggaran sebesar Rp 177.272.200 Dengan Realisasi sebesar Rp 165.988.000
  - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum alokasi sebesar Rp 154.466.200 dengan realisasi sebesar Rp 146.438.000
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan alokasi sebesar Rp 22.806.000 dengan realisasi sebesar Rp 19.550.000

## 2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tabel 3.60 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Semende Darat Tengah

Tujuan	Sasaran				%
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100
		b. Persentase Urusan Pemerintah yang di fasilitasi	100	100	100
		c. Persentase PKK Aktif	100	100	100
		d. Persentase Sarana dan Prasarana Umum dalam kondisi baik	85	85	100
		e. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100	100	100
		f. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa	100	100	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	CC	CC	100

## 2.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	Dalam Pelayanan Kependudukan khususnya E-KTP kecamatan hanya diberi kewenangan pada perekaman sementara untuk percetakan dilakukan oleh DISDUK CAPIL Kab. Muara Enim	Sosialisasi kepada masyarakat apabila membutuhkan E-KTP cepat diberi rekomendasi langsung ke



No	Permasalahan	Solusi
	sehingga pelayanan dirasa lamban oleh masyarakat dan membutuhkan biaya.	DISDUK CAPIL Muara Enim dan juga dilakukan perekaman secara jemput bola ke desa-desa
2	Pelayanan belum berbasis elektronik	Adanya web sehingga masyarakat bisa akses semua informasi
3	Kurangnya Personil di bagian IT	Mengusulkan ke BKPSDM
4	Kurangnya SDM ASN yg berkompeten	Diklat/Bimtek

#### 2.4. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

- a. Perangkat Daerah Terbaik Ke-2 Kategori Kecamatan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- b. TOP 10 Inovasi Terbaik dalam Indeks Inovasi Daerah Innovate Government Award (IGA) Kabupaten Muara Enim
- c. Juara Harapan 1 Cabang Khat Hiasan Pada MTQ Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- d. Juara 3 Cabang Tilawah Remaja Pada MTQ Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- e. Juara Harapan 1 Kearsipan Internal oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024



### 3. KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT

Urusan wajib yang diselenggarakan oleh perangkat daerah Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024, alokasi belanja Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 3.849.940.151 dan terealisasi sebesar Rp. 3.370.742.273 atau 87,55 persen dan kinerja keluaran (output) sebesar 100 persen dengan rincian sebagai berikut:

#### A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 3.080.090.251 terealisasi sebesar Rp. 2.661.910.373 atau 86,42 persen yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

#### B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 769.849.900,00 terealisasi sebesar Rp. 768.851.900 atau 99,87 persen yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

#### 3.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2024 Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 34 subkegiatan, antara lain yaitu :

##### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.2.954.386.951 dengan realisasi sebesar Rp. 2.606.723.573 atau 88,23 persen dengan capaian kinerja output sebesar 100 persen. Program ini terdiri dari 8 kegiatan dan 21 subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 12.423.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.275.000 atau sebesar 61,09 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 82,71 Persen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 7.842.100 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.675.000 atau sebesar 85,12 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 1.664.848.176 dan realisasi keuangan



- sebesar Rp. 1.428.707.614 atau sebesar 85,82 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 6.084.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.850.000 atau sebesar 96,15 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 11.550.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 0 dengan capaian output/keluaran sebesar 0 persen.
  4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 8,200.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 0 dengan capaian output/keluaran sebesar 0 persen.
    - b. Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.300.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp.0 atau sebesar 0 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 0 dengan capaian output/keluaran sebesar 0 persen.
    - c. Subkegiatan Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.300.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 0 dengan capaian output/keluaran sebesar 0 persen.
  5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 4.878.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.813.000 atau sebesar 98,66 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
    - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 13.990.700 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.955.000 atau sebesar 99,74 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

- c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 47.732.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.147.000 atau sebesar 75,57 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 14.474.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.150.000 atau sebesar 21,78 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - e. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.160.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.900.000 atau sebesar 87,96 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - f. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 9.725.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.000.000 atau sebesar 71,98 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 183.714.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 147.628.537 atau sebesar 80,36 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
- a. Subkegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 169.151.900 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 169.151.900 atau sebesar 100 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 101.698.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 101.698.000 atau sebesar 100 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 4.995.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.900.000 atau sebesar 100 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.



- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp.15.028.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.102.522 atau sebesar 93,84 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 8.760.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.700.000 atau sebesar 48,52 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 99,32 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen
  - d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 51.360.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 51.360.000 atau sebesar 100 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 104.091.475 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 79.955.000 atau sebesar 76,81 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 503.078.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 501.755.000 atau sebesar 99,74 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

**B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 183.919.000 dengan realisasi sebesar Rp. 174.355.000 atau 94,72 persen dengan capaian kinerja output sebesar 98,00 persen. Program ini terdiri dari 2 (Dua) kegiatan dan 4 (Empat) subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana pelayanan Umum
  - a. Subkegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan pihak swasta dengan anggaran sebesar Rp. 99.725.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.725.000 atau sebesar 100 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.



2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
  - a. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp.7.439.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.500.000 atau sebesar 73,93 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaist dengan Non Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 25.400.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.860.000 atau sebesar 90,00 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - c. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp. 51.355.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.270.000 atau sebesar 90.10 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

#### **C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Alokasi anggaran untuk Pogram Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp. 237.930.500 dengan realisasi sebesar Rp. 198.136.000 atau 83,27 persen dengan capaian kinerja output sebesar 100 persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (Dua) subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - a. Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp. 27.478.700 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.290.000 atau sebesar 95,67 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 210.451.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 171.846.000 atau sebesar 81,66 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

#### **D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 157.395.100 dengan realisasi sebesar Rp. 128.400.000 atau 81,58 persen dengan capaian kinerja output sebesar 100



persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - a. Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 157.395.100 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 128.400.000 atau sebesar 81,58 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

#### **E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 291.157.700 dengan realisasi sebesar Rp. 263.127.700 atau 90,37 persen dengan capaian kinerja output sebesar 100 persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - a. Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 200.927.700 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 200.927.700 atau sebesar 100 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.90.230.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 62.200.000 atau sebesar 68,93 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 98,00 Persen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

#### **F. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 25.150.900 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0 persen dengan capaian kinerja output sebesar 0 persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



- a. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 25.150.900 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 0 dengan capaian output/keluaran sebesar 0 persen.

### 3.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

**Tabel 3.61 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Semende Darat Laut**

Tujuan	Sasaran				%
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm)	Baik	Baik	100
Meningkatkan Peran Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah	Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah	Rata-Rata Capaian Kegiatan Pemerintahan Yang Terselenggara	100	95	95
Meningkatkan Peran Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	90,00	65,50	65,50

### 3.3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	Sumber Daya Aparatur SKPD Kecamatan Semende Darat Laut secara kuantitas masih belum mencukupi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan.	Perlu dilakukan pemerataan distribusi aparatur di Kecamatan Semende Darat Laut untuk memenuhi kebutuhan sumber daya aparatur.
2	Belum terpenuhi kompetensi Sumber Daya Aparatur SKPD Kecamatan dalam optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan.	Pelatihan atau bimtek pada aparatur SKPD Kecamatan Semende Darat Laut guna menunjang kompetensi aparatur SKPD Kecamatan Semende Darat Laut

#### 4. KECAMATAN TANJUNG AGUNG

Alokasi Anggaran belanja Kecamatan Tanjung Agung alokasi belanja Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp. 4.742.148.480,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 4.441.385.627,-** atau **93,66 %**, dengan rincian sebagai berikut :

##### A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp. 3.790.598.685,-** terealisasi sebesar **Rp. 3.496.034.627,-** atau **92,23 %** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

##### B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 951.549.795,-** terealisasi sebesar **Rp. 945.351.000,-** atau **99,35 %** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

#### 4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2024 Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 34 subkegiatan, antara lain yaitu :

##### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**, Dengan anggaran sebesar Rp. 15.349.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.850.000,- atau sebesar 96,75 %.
  - b. Subkegiatan **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, Dengan anggaran sebesar Rp. 11.061.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.884.000,- atau sebesar 98,40 %.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**, Dengan anggaran sebesar Rp. 1.818.280.363,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.627.111.114,- atau sebesar 89,49 %.
  - b. Subkegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**, Dengan anggaran sebesar Rp. 14.231.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.055.000,- atau sebesar 98,76 %.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**, Dengan anggaran sebesar Rp. 5.484.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.184.000,- atau sebesar 94,52 %.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.



- a. Subkegiatan **Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**, Dengan anggaran sebesar Rp. 28.875.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.875.000,- atau sebesar 100 %.
  - b. Subkegiatan **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**, Dengan anggaran sebesar Rp. 22.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.500.000,- atau sebesar 33,33 %.
  - c. Subkegiatan **Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan**, Dengan anggaran sebesar Rp. 14.689.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.660.000,- atau sebesar 99,80 %.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
    - a. Subkegiatan **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**, Dengan anggaran sebesar Rp. 6.794.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.790.000,- atau sebesar 99,94 %.
    - b. Subkegiatan **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**, Dengan anggaran sebesar Rp. 23.003.125,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.000.000,- atau sebesar 99,99 %.
    - c. Subkegiatan **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**, Dengan anggaran sebesar Rp 60.234.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 52.270.000,- atau sebesar 86,78 %.
    - d. Subkegiatan **Fasilitasi Kunjungan Tamu**, Dengan anggaran sebesar Rp. 26.889.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.850.000,- atau sebesar 99,85 %.
    - e. Subkegiatan **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**, Dengan anggaran sebesar Rp. 228.006.000- dengan realisasi sebesar Rp. 218.143.704,- atau sebesar 95,67 %.
    - f. Subkegiatan **Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD**, Dengan anggaran sebesar Rp. 8.093.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.323.000,- atau sebesar 90,48 %.
  6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
    - a. Subkegiatan **Pengadaan Mebel**, Dengan anggaran sebesar Rp 115.045.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 113.900.000,- atau sebesar 100 %
    - b. Subkegiatan **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**, Dengan anggaran sebesar Rp 344.661.195,- dengan realisasi sebesar Rp. 340.831.000,- atau sebesar 100 %
  7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
    - a. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**, Dengan anggaran sebesar Rp 4.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.480.000,- atau sebesar 100 %.
    - b. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** Dengan anggaran sebesar Rp. 38.111.160,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.472.473,- atau sebesar 87,83 %.

- c. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**, Dengan anggaran sebesar Rp 89.880.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 82.390.000,- atau sebesar 91,67 %
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - a. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**, Dengan anggaran sebesar Rp. 40.181.388,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.838.862,- atau sebesar 86,70 %.
  - b. Subkegiatan **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**, Dengan anggaran sebesar Rp. 569.274.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 566.057.500,- atau sebesar 99,43 %.
  - c. Subkegiatan **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**, Dengan anggaran sebesar Rp. 15.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.500.000,- atau sebesar 94,16 %.
  - d. Subkegiatan **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**, Dengan anggaran sebesar Rp. 15.824.815,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.540.000,- atau sebesar 98,20 %.

## **B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan **Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta**, Dengan anggaran sebesar Rp. 83.714.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 83.714.000,- atau sebesar 100 %.
- 2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat.
  - a. Subkegiatan **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**, Dengan anggaran sebesar Rp. 15.240.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.240.000,- atau sebesar 100 %.
  - b. Subkegiatan **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Perizinan**, Dengan anggaran sebesar Rp. 37.806.474,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.730.000,- atau sebesar 99,80 %
  - c. Subkegiatan **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan**, Dengan anggaran sebesar Rp. 37.092.058,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.080.000,- atau sebesar 95,48 %



### C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum.
  - a. Subkegiatan **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**, Dengan anggaran sebesar Rp. 27.271.529,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.217.000,- atau sebesar 99,80 %.
  - b. Subkegiatan **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**, Dengan anggaran sebesar Rp. 317.074.244,- dengan realisasi sebesar Rp. 305.959.987,- atau sebesar 96,49 %.

### D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban.

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - a. Subkegiatan **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan**. Dengan anggaran sebesar Rp. 121.990.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 116.291.000,- atau sebesar 95,33 %.

### E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
  - a. Subkegiatan **Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**. Dengan anggaran sebesar Rp. 385.398.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 384.955.000,- atau sebesar 99,88 %.
  - b. Subkegiatan **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**, Dengan anggaran sebesar Rp. 124.084.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 97.013.987,- atau sebesar 78,18 %.

### F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

1. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.
  - a. Subkegiatan **Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa**. Dengan anggaran sebesar Rp. 15.960.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.816.000,- atau sebesar 99,10 %.
  - b. Subkegiatan **Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**. Dengan anggaran sebesar Rp. 16.567.829,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.404.000,- atau sebesar 99,01 %.
  - c. Subkegiatan **Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**, Dengan anggaran sebesar Rp.



16.349.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.254.000,- atau sebesar 99,42 %.

## 4.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tabel 3.62 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Tanjung Agung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target %	Realisasi %	Capaian %
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
		Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	85 %	87 %	85 %
		Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik	85 %	88%	85 %
		Persentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi	90 %	95%	90 %
		PKK Aktif	90 %	100 %	90 %
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Desa	90 %	98 %	90 %
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	BB	CC	CC

### PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	Adanya Tambang Galian C Ilegal yang merusak lingkungan	Kewenangan pertambangan galian C dan tambang batubara sudah diambil alih oleh pihak Provinsi.



No	Permasalahan	Solusi
2	Banyaknya tambang batubara ilegal sehingga menimbulkan debu yang meresahkan masyarakat	Pihak Kecamatan sudah menghimbau , membuat edaran dan menginstruksikan kepada Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Tanjung tentang larangan kegiatan penambangan Galian C dan penambangan Batubara Ilegal.
3	Banyaknya truk batubara yang melintas sehingga sering menyebabkan kemacetan di jalan raya	Diharapkan Truk Batubara mempunyai jalan tersendiri agar tidak terjadi kemacetan dan mengganggu pengguna jalan raya.
4	Sering terjadi pemadaman listrik sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari.	Pihak terkait agar lebih meningkatkan pelayanan dan kinerja sehingga tidak terjadi pemadaman yg terus menerus.
5	Jaringan internet yang lemah sinyal	Menambah Tower atau pemasangan straling dan sejenisnya.
6	Jumlah SDM pegawai yang terbatas dengan kompetensi yang tidak merata	Mengusulkan ke BKPSDM Kabupaten Muara Enim untuk penambahan staf (SDM) untuk memenuhi kekurangan pegawai tersebut.
7	Kurangnya kendaraan operasional roda 4 untuk menunjang kegiatan Kecamatan	Mengusulkan ke TAPD Kabupaten untuk pemenuhan kendaraan operasional tersebut.
8	Banyak masyarakat yang menikah tetapi belum tercatat di KUA, sehingga kesulitan dalam mengurus dokumen Kependudukan (KK, Akte dan KTP)	Sudah disampaikan secara tertulis ke Dinas terkait untuk diadakan Isbat Masal di Kecamatan Tanjung Agung
9	Masih banyak masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni	Sudah diusulkan melalui bantuan bedah rumah ke Dinas terkait.

#### 4.3 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

- a. Juara I Lomba Masak Serba Ikan Kategori Menu Balita tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 oleh TP. PKK Kecamatan Tanjung Agung berkolaborasi dengan TP. PKK Kabupaten Muara Enim.
- b. Juara I Lomba Wajik tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 oleh TP. PKK Kecamatan Tanjung Agung.
- c. Juara I Lomba Menu B2SA tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 oleh TP. PKK Kecamatan Tanjung Agung.



- d. Juara III Lomba TTG (Umum) tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 oleh SMKN 1 Tanjung Agung.
- e. Juara Harapan I Lomba Desa tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 oleh Desa Embawang Kecamatan Tanjung Agung.
- f. Penghargaan Terbaik Komitmen Perencanaan dan Penghargaan Responsif Gender Tahun 2024.
- g. Penghargaan Terbaik GERTAM (Gertam Cabe) Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 oleh TP. PKK Kecamatan Tanjung Agung.



## 5. KECAMATAN LAWANG KIDUL

Alokasi Anggaran belanja Kecamatan Lawang Kidul alokasi belanja Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp. 9.333.239.486,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 8.016.328.898,-** atau **85,89 %**, dengan rincian sebagai berikut :

### A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp. 8.846.979.486,-** terealisasi sebesar **Rp. 7.649.730.251,-** atau 86,74 % yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

### B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 486.260.000,-** terealisasi sebesar **Rp. 480.900.000,-** atau 98,90 % yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

## 5.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada tahun 2024 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 Program dan 17 Kegiatan dan 30 Subkegiatan, antara lain :

### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Dengan anggaran sebesar Rp. 107.102.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.006.000,- atau sebesar 42,02 %.
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD. Dengan anggaran sebesar Rp. 20.903.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.550.000,- atau sebesar 39,20 %.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Dengan anggaran sebesar Rp. 4.043.021.057,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.376.539.515,- atau sebesar 83,52 %.
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Dengan anggaran sebesar Rp. 73.028.907,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.932.000,- atau sebesar 6,75 %.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD. Dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.184.000,- atau sebesar 43,20 %.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.



- a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.500.000,- atau sebesar 37,50 %.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.950.000,- atau sebesar 91,57 %.
  - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Dengan anggaran sebesar Rp. 62.142.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.196.000,- atau sebesar 85,60 %.
  - c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Dengan anggaran sebesar Rp 73.306.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 66.600.000,- atau sebesar 92,11 %.
  - d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Dengan anggaran sebesar Rp. 11.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0,00 %.
  - e. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu. Dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.695.000,- atau sebesar 88,98 %.
  - f. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Dengan anggaran sebesar Rp. 256.880.000- dengan realisasi sebesar Rp. 249.027.873,- atau sebesar 96,94 %.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah .
  - a. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Dengan anggaran sebesar Rp 91.260.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 87.300.000,- atau sebesar 95,66 %
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - a. Subkegiatan Jasa Surat Menyura. Dengan anggaran sebesar Rp 6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.000.000,- atau sebesar 100 %
  - b. Subkegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Dengan anggaran sebesar Rp 60.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.647.626,- atau sebesar 82,75 %
  - c. Subkegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Dengan anggaran sebesar Rp 219.840.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 219.840.000,- atau sebesar 100 %
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Dengan anggaran sebesar Rp. 43.821.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.143.000,- atau sebesar 18,58 %.



- b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Dengan anggaran sebesar Rp. 389.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 352.500.000,- atau sebesar 90,50 %.

**B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
  - a. Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Dengan anggaran sebesar Rp. 220.385.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 209.820.000,- atau sebesar 95,21 %.
2. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum.
  - a. Subkegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.086.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.073.490.000,- atau sebesar 98,78 %.
3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat.
  - a. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. Dengan anggaran sebesar Rp. 6.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 %.
  - b. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Perizinan. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.207.012.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.167.200.000,- atau sebesar 96,72 %
  - c. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan. Dengan anggaran sebesar Rp. 77.154.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.385.000,- atau sebesar 69,19 %

**C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.**

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - a. Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. Dengan anggaran sebesar Rp. 20.976.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.795.000,- atau sebesar 80,07 %.
  - b. Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan. Dengan anggaran sebesar Rp. 429.281.822,- dengan realisasi sebesar Rp. 395.575.300,- atau sebesar 92,15 %.



2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
  - a. Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan. Dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.850.000,- atau sebesar 99,01 %.
  - b. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Dengan anggaran sebesar Rp. 475.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 284.400.000,- atau sebesar 59,85 %.

**D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
  - a. Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan anggaran sebesar Rp. 267.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 229.200.000,- atau sebesar 85,78 %.

**E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.**

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.
  - a. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan. Dengan anggaran sebesar Rp. 3.214.300,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- atau sebesar 0 %.

**5.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

**Tabel 3.63 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Lawang Kidul**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Urusan Pemerintahan yang difasilitasi	85%	90%	90%
		PKK Aktif	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik	85%	85%	85%



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
		Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman Keindahan) yang ditindaklanjuti	85%	90%	90%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Bb	bb	Bb

### 5.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Banyaknya truk batubara yang melintas sehingga sering menyebabkan kemacetan di jalan raya dan menyebabkan jalan raya/ umum menjadi berlubang Banyaknya tambang batubara ilegal sehingga menimbulkan debu yang meresahkan Masyarakat.	Diharapkan Truk Batubara mempunyai jalan tersendiri agar tidak terjadi kemacetan dan mengganggu pengguna jalan raya. Pihak Kecamatan sudah menghimbau, membuat edaran dan menginstruksikan kepada Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Tanjung tentang larangan kegiatan penambangan Galian C dan penambangan Batubara Ilegal.
2.	Adanya Tambang Ilegal yang merusak lingkungan	Kewenangan pertambangan galian C dan tambang batubara sudah diambil alih oleh pihak Provinsi.
3.	Sering terjadinya pemadaman listrik sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari.	Pihak terkait agar lebih meningkatkan pelayanan dan kinerja sehingga tidak terjadi pemadaman yang terus menerus.
4.	Jaringan internet yang lemah sinyal	Menambah Tower atau pemasangan straling dan sejenisnya.
5.	Jumlah SDM pegawai yang terbatas dengan kompetensi yang tidak merata	Mengusulkan ke BKPSDM Kabupaten Muara Enim untuk penambahan staf (SDM) untuk memenuhi kekurangan pegawai tersebut.
6.	Masih banyak masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni	Sudah diusulkan melalui bantuan bedah rumah ke Dinas terkait.

#### **5.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI**

- a. TOP 10 Pengembangan Inovasi (GPU LAKI)
- b. Juara Umum II MTQ Tk Kabupaten Muara Enim
- c. Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tk Provinsi di Raih Desa Tegalrejo
- d. Pelaksana Terbaik Rumah Cinta Kegiatan PAAR Tk Provinsi di raih di Desa Keban Agung
- e. Pengadain Kader Monitoring Evaluasi Pondok Inovasi Cinta (PIC) TK. Kabupaten Muara Enim
- f. Pengadain Kader Kegiatan Kreasi Jingle Galeri Pelangi TK Kabupaten Muara Enim
- g. Pengadain Kader Kegiatan Posyandu TK Kabupaten Muara Enim
- h. Juara I Harapan Lomba Masak B2SA TK kabupaten Muara Enim



## 6. KECAMATAN MUARA ENIM

Alokasi anggaran belanja Kecamatan Muara Enim pada tahun 2024 sebesar Rp.14.584.259.176 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.721.893.907 atau 87,23% dengan rincian sebagai berikut :

### A. Belanja Operasi

Alokasi anggaran belanja operasi tahun 2024 sebesar Rp.12.903.919.276 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.903.919.276 atau 85,85%.

### B. Belanja Pegawai

Alokasi anggaran belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp.5.930.033.489 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.743.852.808 atau 80%.

### C. Belanja Barang dan Jasa

Alokasi anggaran belanja barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp.6.973.885.787 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6.334.461.099 atau 90,83%.

### D. Belanja Modal

Alokasi anggaran belanja modal tahun 2024 sebesar Rp. 1.680.339.900 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.643.580.000 atau 97,81%.

### E. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alokasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp. 984.339.900 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.949.570.000 atau 96,47%.

### F. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Alokasi anggaran belanja modal Gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp. 596.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.594.185.000 atau 99,70%.

### G. Belanja Modal Aset Lainnya

Alokasi anggaran belanja modal asset lainnya tahun 2024 sebesar Rp.100.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.825.000 atau 99,83%.

## 6.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Terdiri dari 6 program dan 15 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.708.838.930 dengan realisasi sebesar Rp.7.311.734.504 atau 83,96%.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.457.100 dengan realisasi sebesar Rp.68.021.050 atau 91,36%
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.766.600 dengan realisasi sebesar Rp. 12.240.000 atau 95,88%
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.338.000 dengan realisasi sebesar Rp. 15.214.050 atau 93,12%



- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.509.000 dengan realisasi sebesar Rp.11.418.000 atau 91,28%
  - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.575.500 dengan realisasi sebesar Rp. 15.425.000 atau 93,06%
  - e. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.267.100 dengan realisasi sebesar Rp. 13.724.000 atau 84,37%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.985.498.789 dengan realisasi sebesar Rp. 4.796.041.308 atau 80,13%.
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.930.033.489 dengan realisasi sebesar Rp. 4.743.852.808 atau 80 %
    - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.718.800 dengan realisasi sebesar Rp. 15.339.250 atau 91,75%.
    - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.265.100 dengan realisasi sebesar Rp.16.806.250 atau 97,34%.
    - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.481.400 dengan realisasi sebesar Rp. 20.043.000 atau 93,30%
  3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.969.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.482.720 atau 49,98%
    - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.969.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.482.720 atau 49,98%
  4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0
    - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0
  5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 774.059.019 dengan realisasi sebesar Rp.721.548.160 atau 93,22%
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.980.600 dengan realisasi sebesar Rp. 14.574.500 atau 97,26%



- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.69.277.219 dengan realisasi sebesar Rp.62.274.700 atau 89,89%.
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 145.738.600 dengan realisasi sebesar Rp. 125.996.250 atau 86,45%
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.085.000 dengan realisasi sebesar Rp.74.126.000 atau 81,38%.
  - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.780.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.060.000 atau 80,95%.
  - f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.110.780.000 dengan realisasi sebesar Rp.108.332.500 atau 97,79%
  - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 338.417.600 dengan realisasi sebesar Rp.333.184.210 atau 98,45%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.677.389.900 dengan realisasi sebesar Rp.645.770.000 atau 95,33%.
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.182.520.000 dengan realisasi sebesar Rp.161.460.000 atau 88,46%.
  - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 494.869.900 dengan realisasi sebesar Rp.484.310.000 atau 97,87%.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.384.471.590 dengan realisasi sebesar Rp.311.789.791 atau 81,10%
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.928.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.900.000 atau 99,43%.
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 166.073.590 dengan realisasi sebesar Rp. 94.849.791 atau 57,11%.
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.030.000 dengan realisasi sebesar Rp.6.600.000 atau 82,19%.
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.205.440.000 dengan realisasi sebesar Rp.205.440.000 atau 100%.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.775.993.532 dengan realisasi sebesar Rp.763.081.475 atau 98,34%.
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.112.434.832 dengan realisasi sebesar Rp.102.216.475 atau 90,91%.
  - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.654.298.700 dengan realisasi sebesar Rp.651.965.000 atau 99,64%.
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.260.000 dengan realisasi sebesar Rp.8.900.000 atau 96,11%.

## **B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.590.542.400 dengan realisasi sebesar Rp.542.869.100 atau 91,93%.

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 391.717.700 dengan realisasi sebesar Rp.378.430.000 atau 96,61%.
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 391.717.700 dengan realisasi sebesar Rp.378.430.000 atau 96,61%.
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 198.824.700 dengan realisasi sebesar Rp. 164.439.100 atau 82,71%.
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan alokasi anggaran sebesar Rp.20.888.800 dengan realisasi sebesar Rp.15.112.800 atau 72,35%.
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.600.000 dengan realisasi sebesar Rp. 99.600.000 atau 87,25%.
  - c. Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.78.335.900 dengan realisasi sebesar Rp.62.426.300 atau 79,69%.

## **C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.825.384.134 dengan realisasi sebesar Rp.4.524.215.803 atau 93,76%.



1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.958.939.534 dengan realisasi sebesar Rp.771.380.803 atau 80,44%.
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.46.062.900 dengan realisasi sebesar Rp.42.537.500 atau 92,35%.
  - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.912.876.634 dengan realisasi sebesar Rp.728.843.303 atau 79,84%.
  
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.866.444.600 dengan realisasi sebesar Rp.3.752.835.000 atau 97,06%.
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.020.400 dengan realisasi sebesar Rp. 35.633.400 atau 98,93%.
  - b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.1.095.090.000 atau 99,55%.
  - c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.730.424.200 dengan realisasi sebesar Rp.2.622.111.600 atau 96,03%.

#### **D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.476.912 dengan realisasi sebesar Rp. 10.896.000 atau 80,85%.

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.476.912 dengan realisasi sebesar Rp. 10.896.000 atau 80,85%.
  - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.13.476.912 dengan realisasi sebesar Rp. 10.896.000 atau 80,85%.

#### **E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.164.191.000 dengan realisasi sebesar Rp. 125.330.000 atau 76,33%.



1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.164.191.000 dengan realisasi sebesar Rp. 125.330.000 atau 76,33%.
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.164.191.000 dengan realisasi sebesar Rp. 125.330.000 atau 76,33%.

**F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.281.825.800 dengan realisasi sebesar Rp.206.848.500 atau 73,40%.

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.281.825.800 dengan realisasi sebesar Rp.206.848.500 atau 73,40%.
  - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.115.400 dengan realisasi sebesar Rp. 24.385.000 atau 89,93%.
  - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 205.337.700 dengan realisasi sebesar Rp. 151.546.600 atau 73,80%.
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.372.700 dengan realisasi sebesar Rp. 30.916.000 atau 62,62%.

**6.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

**Tabel 3.64 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Muara Enim**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	% Target	% Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi	85	90	100
		Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik	85	95	100
		Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan)	85	92	100



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	% Target	% Realisasi	% Capaian
		yang ditindaklanjuti			
		PKK Aktif	100	100	100
		Posyandu Aktif	100	100	100

### 6.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	Masih ada beberapa kegiatan yang belum optimal dilaksanakan sehingga belum dapat menyerap dana secara maksimal (anggaran masih ada yang tersisa)	Mengevaluasi terhadap kegiatan yang belum optimal dilaksanakan
2	Kekurangan pegawai (banyak kekosongan jabatan) baik di Kecamatan dan Kelurahan	Mengajukan usulan penambahan pegawai kecamatan dan kelurahan ke BKPSDM

### 6.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

- a. Penghargaan Piala Adipura kategori Kota Kecil Tahun 2023 yang diterima pada tahun 2024
- b. Penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan Kategori Menuju Kecamatan Layak Anak (Kelana) Tahun 2024
- c. Juara I MTQ Tingkat Kabupaten Muara Enim
- d. Penghargaan Top 10 Inovasi Daerah Kategori Tingkat Kecamatan dalam rangka Penilaian/Asistensi Inovasi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- e. Juara III Lomba Wajik Kreasi Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

## 7. KECAMATAN UJAN MAS

Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim melaksanakan Urusan Wajib Pemerintahan Umum, pada tahun 2023 dialokasi anggaran sebesar **Rp 4,417,946,360.00** terealisasi sebesar **Rp 3.438.206.118** atau **77,82%** dengan capaian kinerja keluaran (*output*) sebesar **77,82%**, dengan rincian sebagai berikut.

### A. Belanja Operasional

Belanja Operasional dialokasikan sebesar **Rp 3.940.281.196** terealisasi sebesar **Rp 2.961.684.954** atau **75%**, yang diarahkan untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS, pembulatan gaji serta tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya juga belanja barang dan jasa.

### B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp 477.665.164** terealisasi sebesar **Rp 476.521.164** atau **100%** yang dialokasikan untuk belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.

## 7.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

Pada Tahun 2023 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 Program 13 Kegiatan 31 Sub Kegiatan, antara lain yaitu :

### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp3.427.146.761** terealisasi sebesar **Rp2.600.788.592** atau **76%**. Program tersebut terdiri dari 7 (Tujuh) Kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan yaitu:

1. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar **Rp20.517.400** terealisasi sebesar **Rp5.550.000** atau **27%**, Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu:
  - a. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar **14.999.900** terealisasi sebesar **Rp2.930.000** atau **20%** dengan keluaran (*output*) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 2 dokumen
  - b. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar **Rp5.517.500** terealisasi sebesar **Rp2.620.000** atau **47%** dengan keluaran (*output*) Penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 Dokumen.
2. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar **Rp2.529.714.007** terealisasi sebesar **Rp1.815.167.095** atau **72%**, Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
  - a. Lokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN sebesar **Rp2.527.266.007** terealisasi sebesar



- Rp1.814.285.095** atau 72% dengan keluaran (*output*) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN sebanyak 12 bulan.
- b. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD sebesar **Rp5.517.500** terealisasi sebesar **Rp2.620.000** atau 47% dengan keluaran (*output*) Laporan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/semesyeran SKPD sebanyak 3 laporan.
3. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar **Rp95.555.600** terealisasi sebesar **Rp1.815.167.095** atau 72%, Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan, yaitu:
- a. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sebesar **Rp19.652.500** terealisasi sebesar **Rp19.602.000** atau 100%, dengan keluaran (*output*) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sebanyak 14 paket.
  - b. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar **Rp68.682.000** terealisasi sebesar **Rp31.106.366** atau 45%, dengan keluaran (*output*) Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi sebanyak 2 orang.
  - c. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan/Bimtal sebesar **Rp7.221.100** terealisasi sebesar **Rp5.350.000** atau 74%, dengan keluaran (*output*) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan/Bimtal sebanyak 25 orang.
4. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar **Rp318.273.449** terealisasi sebesar **Rp301.330.123** atau 95%, Kegiatan ini terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan, yaitu:
- a. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar **Rp1.965.000** terealisasi sebesar **Rp1.115.000** atau 57% dengan keluaran (*output*) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 5 jenis.
  - b. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar **Rp141.443.264** terealisasi sebesar **Rp139.621.164** atau 99% dengan keluaran (*output*) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 11 jenis.
  - c. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar **Rp13.578.600** terealisasi sebesar

- Rp8.005.000** atau **59%** dengan keluaran (*output*) Penyediaan bahan Logistik kantor sebanyak 23 jenis.
- d. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar **Rp3.872.400** terealisasi sebesar **Rp900.000** atau **23%** dengan keluaran (*output*) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 9 jenis.
  - e. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar **Rp7.104.000** terealisasi sebesar **Rp7.104.000,00** atau **100%** dengan keluaran (*output*) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 3 harian.
  - f. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar **Rp4.998.185** terealisasi sebesar **Rp310.000** atau **6%** dengan keluaran (*output*) Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 11 Notulen.
  - g. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar **Rp145.312.000** terealisasi sebesar **Rp144.274.959** atau **99%** dengan keluaran (*output*) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 3 laporan.
5. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar **Rp50.000.000** terealisasi sebesar **Rp49.750.000** atau **100%**, Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) subkegiatan yaitu:
- a. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar **Rp50.000.000** terealisasi sebesar **Rp49.750.000** atau **100%** dengan keluaran (*output*) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit.
6. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar **Rp84.973.305** terealisasi sebesar **Rp79.052.400** atau **93%**, Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) subkegiatan yaitu:
- a. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar **Rp1.999.874** terealisasi sebesar **Rp1.000.000** atau **50%** dengan keluaran (*output*) Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 2 jenis.
  - b. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar **Rp27.718.931** terealisasi sebesar **Rp26.692.400** atau **96%** dengan keluaran (*output*) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 2 Rekening.
  - c. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor sebesar **Rp3.894.500** terealisasi

- sebesar **Rp0** atau **0%** dengan keluaran (*output*) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 4 jenis.
- d. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar **Rp51.360.000** terealisasi sebesar **Rp 51.360.000,00** atau **100%** dengan keluaran (*output*) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 2 orang.
7. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar **Rp328.113.000** terealisasi sebesar **Rp293.880.608** atau **90%**, Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
- a. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar **Rp28.189.000** terealisasi sebesar **Rp 6.730.608** atau **24%** dengan keluaran (*output*) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 6 unit.
- b. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar **Rp299.924.000** terealisasi sebesar **Rp287.150.000** atau **96%** dengan keluaran (*output*) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit.

#### **B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar **Rp213.052.026** terealisasi sebesar **Rp203.880.526** atau **96%**. Program tersebut terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yaitu:

1. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sebesar **Rp128.263.526** terealisasi sebesar **Rp128.263.526** atau **100%**, Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
- a. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta sebesar **Rp128.263.526** terealisasi sebesar **Rp128.263.526** atau **100%** dengan keluaran (*output*) Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta sebanyak 90 titik perbaikan lampu jalan.
2. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat sebesar **Rp84.788.500** terealisasi sebesar **Rp75.617.000** atau **89%**, Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
- a. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non



Usaha sebesar **Rp20.606.400** terealisasi sebesar **Rp18.050.000** atau **88%** dengan keluaran (*output*) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha sebanyak 7 dokumen.

- b. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan sebesar **Rp21.601.400** terealisasi sebesar **21.527.000** atau **100%** dengan keluaran (*output*) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan sebanyak 7 Dokumen.
- c. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan sebesar **Rp42.580.700** terealisasi sebesar **Rp36.040.000** atau **85%** dengan keluaran (*output*) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan sebanyak 6 dokumen.

#### C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar **Rp Rp368.788.773** dengan realisasi sebesar **Rp270.443.000** atau **73%**. Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu:

1. Alokasi anggaran Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sebesar **Rp Rp368.788.773** dengan realisasi sebesar **Rp270.443.000** atau **73%**, Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
  - a. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sebesar **Rp24.994.000** terealisasi sebesar **Rp21.930.000** atau **88%** dengan keluaran (*output*) Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Sebanyak 150 orang.
  - b. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan sebesar **Rp343.794.773** terealisasi sebesar **Rp248.513.000** atau **72%** dengan keluaran (*output*) Jumlah desa yang termonitor pembangunannya sebanyak 9 desa, Terselenggaranya 5 cabang kegiatan MTQ tingkat Kecamatan, Pembinaan Ke Desa sebanyak 9 Desa, Terlaksananya Teknologi Tepat Guna sebanyak 9 Desa, Kegiatan inovasi yang di kembangkan 1 Kegiatan, Pembinaan PKK desa oleh Tim PKK Kecamatan sebanyak 9 PKK Aktif.

#### D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar **Rp26.156.000** dengan realisasi sebesar **Rp18.720.000** atau **72%**. Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu:



1. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar **Rp26.156.000** dengan realisasi sebesar **Rp18.720.000** atau **72%**, Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
  - a. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebesar **Rp26.156.000** dengan realisasi sebesar **Rp18.720.000** atau **72%** dengan keluaran (*output*) Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebanyak 9 Desa.

#### **E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar **Rp361.850.500** dengan realisasi sebesar **Rp340.774.000** atau **94%**. Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu:

1. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah sebesar **Rp361.850.500** dengan realisasi sebesar **Rp340.774.000** atau **94%**, Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
  - a. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar **Rp273.064.000** dengan realisasi sebesar **Rp271.324.000** atau **99%** dengan keluaran (*output*) Jumlah Anggota Paskibra di Kecamatan Ujan Mas sebanyak 40 Orang
  - b. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebesar **Rp88.786.500** dengan realisasi sebesar **Rp69.450.000** atau **78%** dengan keluaran (*output*) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebanyak 8 Desa.

#### **F. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar **Rp20.952.300** dengan realisasi sebesar **Rp3.600.000** atau **17%**. Program tersebut terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu:

1. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar **Rp20.952.300** dengan realisasi sebesar **Rp3.600.000** atau **17%**, Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:



- a. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan sebesar **Rp20.952.300** dengan realisasi sebesar **Rp3.600.000** atau **17%** dengan keluaran (*output*) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Ujan Mas desa yang di fasilitasi sebanyak 9 desa.

## 7.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

**Tabel 3.65 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Ujan Mas**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	% Target	% Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
		Persentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi	90	85	90
		PKK Aktif	100	95	100
		Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik	85	85	85
		Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentaraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	90	85	90
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa	90	90	90
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	CC	CC

### 7.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	Ruangan yang Kurang	Akan diajukan ke Dinas Terkait mengenai Penambahan Ruang dan Sarana Prasarana
2	Kendaraan Dinas Roda Dua yang sudah Rusak	Akan dianggarkan di tahun 2026
3	Belum adanya sarana angkutan barang roda empat (Pick Up)	Akan dianggarkan di tahun 2026

### 7.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

-



## 8. KECAMATAN BENAkat

Urusan Penunjang Lainnya oleh Perangkat Daerah Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024, alokasi anggaran Belanja Kecamatan Benakat sebesar Rp. 3.847.259.825,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) dengan Realisasi sebesar Rp. 3.523.254.872,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) atau sebesar 91,58 Persen, untuk Membiayai Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

### A. Belanja Operasional

Belanja Operasional dialokasikan sebesar Rp. 3.156.552.940,- (*Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 2.834.578.872,- (*Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) atau 89,90 Persen yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

### B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 690.706.885,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 688.676.000,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*) atau 99,71 Persen yang diarahkan untuk membiaya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kinerja Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim.

## 8.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada tahun 2024 Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim melaksanakan sebanyak 6 (Enam) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) Subkegiatan yaitu :

### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar **Rp. 3.274.623.340,-** (*Tiga Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 3.000.388.472,-** (*Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) atau sebesar **91,63** Persen, program ini terdiri dari 8 (Delapan) Kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Subkegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 1.480.400,-** (*Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 869.000,-** (*Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) atau sebesar **58,70** Persen. Adapun Output/keluaran dari

- subkegiatan ini adalah 1 (Dua) Dokumen yang terdiri dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 1.480.400,- (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 507.000,- (Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah)** atau **34,25** Persen. adapun output/keluaran dari subkegiatan ini berupa 1 (Satu) Dokumen yang terdiri atas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Benakat tahun 2024, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 5.097.500,- (Lima Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.507.000,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah)** atau **88,42** Persen. Adapun Output/Keluaran adalah berupa 1 (satu) dokumen DPA-SKPD Kecamatan Benakat tahun anggaran 2024 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 1.517.400,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.231.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)** atau **81,13** Persen. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini berupa 1 (satu) Perubahan dokumen DPPA-SKPD Kecamatan Benakat tahun anggaran 2024 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - e. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 2.833.900,- (Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.023.000,- (Satu Juta Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)** atau **36,10** Persen. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini berupa 1 (satu) laporan yang terdiri dari Dokumen LKPJ, LPPD, dan PK sebanyak 3 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar **Rp. 2.123.636.638,- (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.946.342.036,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Enam Rupiah)** atau **91,65** Persen. Subkegiatan ini untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang direncanakan dengan target sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang, dengan realisasi sebanyak 16 (Enam Belas) orang selama 12 (dua belas) bulan atau sebesar 91,65 persen.
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 3.392.500,- (Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.014.400,- (Dua Juta Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah)** atau **59,39** Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 (Satu) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 2.499.900,- (Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.381.200,- (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah)** atau **95,25** Persen. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semester SKPD sebanyak 1 (Satu) Laporan, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 12.144.000,- (Dua Belas Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 0,- (nol rupiah)** atau **0** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah berupa asuransi kendaraan roda empat sebanyak 1 (Satu) unit, guna memenuhi amanat Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Subkegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan asuransi tidak dapat di perpanjang karena sudah jatuh tempo.
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya dengan anggaran sebesar **Rp. 10.600.000**



- (Sepuluh Juta Enam Ratus Ribuan Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah)** atau **99,06** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah berupa 20 stel pakaian dinas ASN dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan anggaran **Rp. 21.209.600,- (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Ribuan Enam Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 0,- (Nol. Rupiah)** atau **0** Persen. Subkegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan biaya setor Diklat/bimtek/lainnya dibayarkan oleh OPD Bappeda Kabupten Muara Enim dalam pelaksanaan Bimtek Penyusunan Rencana Strategis Tingkat Kecamatan di Yogyakarta selama 5 (Lima) hari sehingga penyerapan anggaran tidak terealisasi.
  - c. Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar **Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribuan Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)** atau **0** Persen. Subkegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan tidak ada sosialisasi peraturan perundang-undangan yang ada di wilayah Kecamatan Benakat sehingga penyerapan anggaran tidak terealisasi.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 52.500.400,- (Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribuan Empat Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** atau **95,24** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 10 Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian output sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 5.001.237,- (Lima Juta Satu Ribuan Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.017.000,- (Empat Juta Tujuh Belas Ribuan Rupiah)** atau **80,32** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 13 Paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian output sebesar 100 Persen.
  - c. Subkegiatan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 14.203.700,- (Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Ribuan Tujuh Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 14.006.400,- (Empat Belas Juta Enam Ribuan Empat Ratus Rupiah)** atau **98,61** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 5 Paket bahan logistik kantor dengan capaian output sebesar 100 persen.
  - d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar **Rp. 3.286.000,- (Tiga Juta Dua Ratus**



- Delapan Puluh Enam Ribu)** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.420.170,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah)** atau **73,68** Persen. adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 4 (Empat) paket barang cetakan dan penggandaan dengan capaian output sebesar 100 persen.
- e. Subkegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar **Rp. 2.664.000,- (Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)** atau **0** Persen. subkegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pihak rekanan / penyedia belum bekerjasama sehingga penyerapan anggaran tidak optimal.
  - f. Subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran **Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 148.913.785,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah)** atau **90,27** Persen. adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 12 (Dua belas) laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD setiap bulannya dengan capaian output sebesar 100 Persen.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Subkegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar **Rp. 14.640.000,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 14.640.000,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** atau **100** Persen. Adapun Output/keluaran subkegiatan ini adalah 41 (Empat Puluh Satu) unit yang terdiri dari 31 (Tiga Puluh Satu) unit kursi plastik dan 10 (Sepuluh) unit kursi rapat dengan capaian output sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 124.426.700,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 124.426.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)** atau **99,85** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 6 (Enam) Unit yang terdiri dari 1 (Satu) unit kipas, 2 (Dua) unit Printer, dan 3 (Tiga) Unit Komputer PC dengan capaian output sebesar 100 persen.
  - c. Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 460.000.185,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 458.636.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh**



**Enam Ribu Rupiah)** atau **99,70** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 4 (Empat) unit yang terdiri dari 1 (Satu) unit Pagar Bagian Samping, 1 (Satu) unit pagar belakang, 1 (Satu) unit pembangunan siring, dan 1 (Satu) unit pembangunan counblock dengan capaian output sebesar 100 Persen.

7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
  - a. Subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar **Rp. 2.240.000,- (Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** atau **98,21** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 200 (Dua Ratus) lembar Materai dengan capaian output sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar **Rp. 23.904.980,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 17.690.481,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Puluh Delapan Puluh Satu Rupiah)** atau **74,00** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa berupa 2 (Dua) jenis terdiri dari Belanja tagihan air, dan belanja tagihan listrik, selama 12 (Dua belas) bulan. Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan adanya efisiensi penggunaan/pemakaian belanja air, dan listrik dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - c. Subkegiatan ini jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 5.480.000,- (Lima Juta Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.870.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** atau **70,62** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 9 (Sembilan) unit pemeliharaan yang terdiri dari 3 (Tiga) unit pemeliharaan AC, 3 (Tiga) unit pemeliharaan komputer, dan 3 (Tiga) unit pemeliharaan unit printer dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - d. Subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 51.360.000,- (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 45.820.000,- (Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** atau **89,21** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 12 (Dua Belas) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - a. Subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dians operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar **Rp. 72.118.500,- (Tujuh Puluh Dua Juta**



Seratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 53.400.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) atau 74,04 persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 5 (Lima) unit kendaraan yang terdiri dari 1 (Unit) Kendaraan Dinas Mobil Camat, 1 (Unit) kendaraan dinas Sekcam, 3 (Tiga) unit kendaraan dinas roda 2 (Dua) dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

- b. Subkegiatan pemeliharaan / rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 106.280.000,- (Seratus Enam Juta Dua Puluh Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 105.800.000,- (Seratus Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) atau 99,55 persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 2 (Dua) unit pembangunan yang terdiri dari 1 (Satu) unit pemasangan plavon aula dan rehab ringan gedung negara sederhana dan 1 (Satu) unit rehab ringan gedung kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

#### **B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 59.229.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 51.136.000,- (Lima Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) atau sebesar 86,34 Persen, program ini terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 4 (Empat) Subkegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
  - a. Subkegiatan Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta dengan anggaran sebesar Rp. 16.678.000,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau 89,94 Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 300 (Buah) prasaran dan sarana fasilitas pelayanan umum dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.
  - a. Subkegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dengan anggaran sebesar Rp. 12.001.400,- (Dua Belas Juta Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 11.161.000,- (Sebelas Juta Seratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) atau 93 Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 6 (Enam) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan dengan anggaran sebesar Rp. 12.008.300,- (Dua Belas Juta Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi



sebesar **Rp. 10.938.000,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)** atau **91,09 Persen**. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 6 (Enam) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

- c. Subkegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan yang lain yang dilimpahkan dengan anggaran sebesar **Rp. 18.541.300,- (Delapan belas juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 14.037.000,- (Empat Belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah)** atau **75,71 Persen**. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 6 (Enam) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

### C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Alokasi anggaran program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar **Rp. 181.108.100,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus delapan ribu seratus rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 162.850.500,- (Seratus enam puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)** atau **89,92 Persen**. Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 2 (Dua) subkegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa.
  - a. Subkegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dengan anggaran sebesar **Rp. 34.782.100,- (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 24.576.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)** atau **70,66 Persen**. Adapun output/keluaran berupa 6 (Enam) laporan, Penyerapan realisasi anggaran tidak mencapai target dikarenakan belanja perjalanan dinas tidak dibelanjakan tetapi diambil dari anggaran belanja kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - b. Subkegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan anggaran sebesar **Rp. 146.326.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 138.274.500,- (Seratus Tiga Puluh Delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)** atau **94,50 persen**. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 12 (Dua Belas) lembaga kemasyarakatan yang mengikuti forum musyawarah pembangunan desa dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.



#### **D. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum.**

Alokasi anggaran program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum sebesar **Rp. 18.142.685,- (Delapan Belas juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 15.275.400,- (Lima belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah)** atau **84,20 persen**. Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) subkegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
  - a. Subkegiatan sinergitas kepolisian negara republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dengan anggaran sebesar **Rp. 18.142.685,- (Delapan Belas juta seratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 15.275.400,- (Lima belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah)** atau **84,20 persen**. Penyerapan anggaran realisasi tidak mencapai target dikarenakan belanja perjalanan dinas tidak dibelanjakan tetapi diambil dari anggaran belanja kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 2 (Dua) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

#### **E. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**

Alokasi anggaran program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebesar **Rp. 309.202.500,- (Tiga ratus sembilan juta dua ratus dua ribu lima ratus rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 291.534.500,- (Dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)** atau **94,29 persen**. Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 2 (Dua) subkegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.
  - a. Sub kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara republik indonesia dengan anggaran sebesar **Rp. 230.172.500,- (dua ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 230.172.500,- (dua ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)** atau **100 persen**. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 35 (tiga puluh lima) orang anggota paskibraka yang terlatih dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - b. Subkegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan dengan anggaran sebesar **Rp. 79.030.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah)** dengan realisasi



anggaran sebesar **Rp. 61.362.200,- (enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah)** atau **77,64 persen**. Penyerapan realisasi anggaran tidak mencapai target dikarenakan belanja perjalanan dinas diambil dari belanja perjalanan dinas subkegiatan Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 5 (lima) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

**F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.**

Alokasi anggaran program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar **Rp. 4.954.200,- (empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah)** atau **41,78 persen**. Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
  - a. Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan pembangunan perdesaan di wilayah kecamatan dengan anggaran sebesar **Rp. Rp. 4.954.200,- (empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah)** atau **41,78 persen**. Penyerapan realisasi anggaran tidak mencapai target dikarenakan belanja perjalanan dinas diambil dari belanja perjalanan dinas subkegiatan Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 6 (enam) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

**8.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

**Tabel 3.66 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Benakat**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	% Target	% Realisasi	% Capaian
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
		Persentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi	100	100	100
		PKK Aktif	100	100	100
		Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik	100	100	100



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	% Target	% Realisasi	% Capaian
		Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentaraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	100	100	100
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	CC	CC

### 8.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Fasilitas Sarana dan Prasaran Kantor yang kurang	Mengenai fasilitas sarana dan prasaran akan diajukan anggaran ke OPD terkait
2.	Beberapa Kendaraan Dinas yang kurang layak	Mengenai adanya beberapa kendaraan dinas yang kurang layak akan diajukan penambahan anggaran pada tahun 2026
3.	Belum adanya sarana angkutan barang roda empat (Pick UP)	Mengenai belum adanya kendaraan angkutan barang akan diajukan penambahan anggaran pada tahun 2026

### 8.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

- a. Penghargaan Top 10 Inovasi Daerah pada Tingkat Kecamatan Tahun 2024 dan Penghargaan Peringkat 3 PKK Kecamatan Benakat Tahun 2024.



## 9. KECAMATAN GUNUNG MEGANG

Urusan Wajib Kecamatan Gunung Megang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024, alokasi belanja Kecamatan Gunung Megang sebesar **Rp.4.469.382.972,-** dan terealisasi sebesar **Rp.3.794.298.822,-** atau **84,90%** dan kinerja keluaran (*output*) sebesar **84,90%** dengan rincian sebagai berikut :

### A. Belanja Operasional

Belanja Operasional dialokasikan sebesar **Rp.4.211.850.652,-** terealisasi sebesar **Rp.3.537.556.828,-** atau **84,00%** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

### B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp.257.532.321,-** terealisasi sebesar **Rp.255.952.320,-** atau **99,39%** yang dialokasikan untuk membiayai biaya modal yang akan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

## 9.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2024 Kecamatan Gunung Megang melaksanakan 6 (enam) program 14 (empat belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan, antara lain yaitu :

### A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp.3.298.600.092,-** dengan realisasi sebesar **Rp.2.703.856.548,-** atau **81,97%** Program tersebut terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **RP.10.770.000** dan realisasi keuangan sebesar **RP.10.304.000,-** atau **95,67%**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD. dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **RP.2.952.600** dan realisasi keuangan sebesar **RP.2.449.800** atau **82,97 % Persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah. dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar **RP.2.141.888.154,-** dan realisasi keuangan sebesar **RP.1.623.871,451,-** atau **75,81%**. Adapun output/keluaran dari



- subkegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dengan anggaran sebesar **RP.6.891.400** dan realisasi keuangan sebesar **RP.6.507.000,-** atau **94.42 Persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD capaian output/keluaran sebesar **100 persen**
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - a. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar **RP. 10.032.000,-** dan realisasi keuangan sebesar **RP.-** atau **0,0 Persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD. dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - a. Sub Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan anggaran sebesar **RP.15.360.000,-** dan realisasi keuangan sebesar **RP.15.360.000,-** atau **100%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
    - b. Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan anggaran sebesar **RP.17.000.000,-** dan realisasi keuangan sebesar **RP.15.000.000,-** atau **88,24%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
    - c. Sub Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar **RP.6.524.000,-** dan realisasi keuangan sebesar **RP.6.399.000,-** atau **98.08%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar **RP. 36.961.000,-** dan realisasi keuangan sebesar **RP. 36.797.000,-** atau **99,56%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
    - b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar **RP. 64.529.420,-** dan realisasi keuangan sebesar **RP. 64.476.320,** atau **99,92 %**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan



- ini adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen
- c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Daerah dengan anggaran sebesar RP. 52.272.300,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 43.210.100,- atau 82,66%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen
  - d. Sub kegiatan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar RP. 2.502.000,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 2.499.600 atau 99,90 Persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - e. Sub kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 17.699.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.17.120.000,- atau 96,73 Persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu capaian output/keluaran sebesar 100 persen
  - f. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar RP. 245.078.800,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 244.979.417,- atau 99,96 Persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar RP. 196.080.000,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 194.500.000,- atau 99,19 Persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar RP. 5.745.600,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 4.510.000,- atau 78,49%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian output/keluaran 100 persen.
    - b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar RP. 59.740.970,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 25.540.510,- atau 42,75%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan capaian output/keluaran 100 persen.
    - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 6.620.000 dan realisasi keuangan



- sebesar Rp. 3.570.000,- atau 53,93%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran 100 persen.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 51.360.000 dengan anggaran sebesar Rp. 51.360.000 atau 100 Persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah tenaga keamanan kantor dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran 100 persen.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 40.594.288, dan realisasi keuangan sebesar RP. 36.202.350,- atau 89,18%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan capaian output/keluaran 100 persen.
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 307.998.060, dan realisasi keuangan sebesar RP. 299.200.000,- atau 97,14%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor yang di pelihara dengan capaian output/keluaran 100 persen.

## **B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 194.782.901,- dengan realisasi sebesar RP. 193.952.000,- atau 99,58% Program tersebut terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut.

1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
  - a. Sub kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta dengan anggaran sebesar RP. 108.944.000,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 108.944.000,- atau 100%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
  - a. Sub kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.105.000,- atau 84,20%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah



dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan dengan capaian output sebesar 100 persen.

- b. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran sebesar RP. 48.707.772, dan realisasi keuangan sebesar RP. 48.587.000,- atau 99.75%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan dengan anggaran sebesar RP. 34.631.129,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 34.289.000,- atau 99.01 %. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen

### **C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 389.108.434, dengan realisasi sebesar Rp. 321.975.500,- atau 82,75% Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - a. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp. 32.919.617, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.357.100,- atau 98,29 Persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 356.188.817,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 289.618.400, atau 81,31%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

### **D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 155.210.830, dengan realisasi sebesar Rp. 151.505.000,- atau 97,61% Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 155.210.830, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 151.500.000,- atau 97,61 %. Adapun



output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

#### **E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 413.315.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 408.810.100, atau 98,91% Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
  - a. Sub kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar RI tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 291.384.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 291.383.600,- atau 100%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara RI tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Sub kegiatan Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dengan anggaran sebesar RP. 121.931.200,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 117.426.500,- atau 96,31% Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah dokumen lugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

#### **F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 18.365.215,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.200.000,- atau 77,32% Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 18.365.215,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.200.000,- atau 77,32%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.



## 9.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan target kinerja sasaran dalam Renstra, capaian indikator kinerja OPD Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.67 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Gunung Megang**

Tujuan	Sasaran				%
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	1.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	90
	2.1 Meningkatnya peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah	2.1.1 Persentase urusan Pemerintah yang Fasilitasi	90	90	90
		2.1.2 PKK Aktif	100	100	100
		2.1.3 Persentase penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	90	90	90
	3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	3.1.1 Nilai Sakip Kecamatan	59,95	59,95	59,95

## 9.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,55% dikarenakan turunnya harga komoditas terbesar yang menyumbang pertumbuhan ekonomi yaitu sektor perekonomian	Kedepan harus lebih meningkatkan sektor lainnya seperti industri dan jasa guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, tidak hanya mengandalkan sektor Perkebunan dan sektor migas saja

## 9.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

- a. Juara I Lomba BBGRM Tingkat Kabupaten Muara Enim
- b. Juara II Lomba Desa Tingkat Kabupaten Muara Enim
- c. Juara II Posyantek Tingkat Kabupaten Muara Enim
- d. Juara VIII Lomba MTQ Tingkat Kabupaten Muara Enim
- e. Juara IV Lomba Reporting Tingkat Kabupaten Muara Enim



## 10. KECAMATAN RAMBANG NIRU

Dilaksanakan oleh Kecamatan Rambang Niru dengan Alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp. 4.243.634.471,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 4.040.434.209,-** atau **95,21 %** .

### 10.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Terdiri dari 5 (Lima) Program dan 30 (Tiga Puluh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 12.255.300,-** Dengan Realisasi sebesar **Rp. 9.523.000,-** atau **77,71 %**
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, alokasi sebesar Rp. 6.458.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.758.500,- atau 58,19%
  - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi sebesar Rp. 5.796.500,- dengan realisasi sebesar Rp 5.764.500,- atau 99,45%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 2.296.606.585,-** Dengan Realisasi sebesar **Rp. 2.117.842.813,-** atau **92,22 %**.
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN alokasi sebesar **Rp.2.288.061.185,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.109.311.813,-** atau **92,19 %**.
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi sebesar **Rp. 4.469.800,-** dengan realisasi sebesar **Rp.4.465.000,-** atau **99,89%**.
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD alokasi sebesar **Rp. 4.075.600,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.066.000,-** atau **99,76%**.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 0,-** Dengan Realisasi sebesar **Rp. 0,-**
  - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD alokasi sebesar **Rp. 0,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 0,-** .
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 48.235.800,-** Dengan Realisasi sebesar **Rp.46.117.000,-** atau **95,61%**.
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya alokasi sebesar **Rp.10.070.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.10.070.000,-** atau **100%**.



- b. Sub Kegiatan pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi alokasi sebesar **Rp. 26.422.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 24.570.000,-** atau **92,99%**.
  - c. Sub Kegiatan Sosialisai Peraturan Perundang-undangan alokasi sebesar **Rp. 11.743.800,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 11.477.000,-** atau **97,73%**.
  
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 468.429.768,-** Dengan Realisasi sebesar **Rp.467.611.528,-** atau **99,83%**.
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor alokasi sebesar **Rp. 2.887.368,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.882.500,-** atau **99,83%**.
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi sebesar **Rp. 161.419.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 160.615.000,-** atau **99,50%**.
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi sebesar **Rp. 21.802.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 21.801.000,-** atau **99,99%**.
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi sebesar **Rp.2.256.900,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.250.000,-** atau **99,69%**.
  - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu alokasi sebesar **Rp.21.945.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 21.945.000,-** atau **100%**.
  - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi sebesar **Rp.258.119.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.258.119.000,-** atau **100%**.
  
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar **Rp.234.677.788,-** Dengan Realisasi sebesar **Rp.233.139.200,-** atau **99,34%**.
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi sebesar **Rp.30.479.388,-** dengan realisasi sebesar **Rp.29.848.200,-** atau **97,93%**.
  - b. Sub Kegiatan Rehabilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Alokasi Anggaran Sebesar **Rp.204.198.400,-** Dengan Realisasi sebesar **Rp.203.291.000,-** atau **99,56%**.
  
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 165.495.960,-** Dengan Realisasi sebesar **Rp.162.488.198,-** atau **98,18%**.
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat alokasi sebesar **Rp. 2.811.200,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.810.000,-** atau **99,96%**.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi sebesar **Rp. 61.474.760,-** dengan realisasi sebesar **Rp.58.468.198,-** atau **95,11%**.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi sebesar **Rp. 11.330.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 11.330.000,-** atau **100%**.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi sebesar **Rp. 89.880.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 89.880.000,-** atau **100%**

#### **B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

- 1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 120.714.670,-** Dengan Realisasi sebesar **Rp.119.645.000,-** atau **99,11%**.
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta alokasi sebesar **Rp.120.714.670,-** Dengan Realisasi sebesar **Rp.119.645.000,-** atau **99,11%**.
- 2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 102.953.800,-** Dengan Realisasi sebesar **Rp.102.135.900,-** atau **99,21%**.
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan alokasi sebesar **Rp. 38.278.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 37.626.900,-** atau **98,30%**.
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan alokasi sebesar **Rp. 64.675.300,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 64.509.000,-** atau **99,74%**.

#### **C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

- 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 327.208.400,-** Dengan Realisasi sebesar **Rp.326.634.820,-** atau **99,82%**.
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa alokasi sebesar **Rp.54.450.900,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 54.414.300,-** atau **99,93%**.
  - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan alokasi sebesar **Rp.272.757.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 272.220.520,-** atau **99,80%**.

#### **D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Alokasi Anggaran sebesar



**Rp.400.110.000,-** Dengan Realisasi sebesar **Rp.388.422.750,-** atau **97,08%**.

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia alokasi sebesar **Rp. 299.310.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.288.322.750,-** atau **96,33%**.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan alokasi sebesar **Rp. 100.800.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 100.100.000,-** atau **99,31%**.

#### **E. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa**

1. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 66.946.400,-** Dengan Realisasi sebesar **Rp.66.874.000,-** atau **99,89%**.
  - a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum alokasi sebesar **Rp.46.735.400,-** dengan realisasi sebesar **Rp.46.663.000,-** atau **99,85%**.
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan alokasi sebesar **Rp.20.211.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 20.211.000,-** atau **100%**.

## **10.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

**Tabel 3.68 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Rambang Niru**

<b>NO</b>	<b>OPD Pelaksana</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Uraian Program/ Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
I	Rambang Niru	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3.225.701.201	Rp 3.036.721.739
A			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 12.255.300	Rp 9.523.000
1			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 6.458.800	Rp 3.758.500
2			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.796.500	Rp 5.764.500
B			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.296.606.585	Rp2.117.842.813



NO	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1			Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Rp2.288.061.185	Rp2.109.311.813
2			Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp4.469.800	Rp4.465.000
3			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD	Rp4.075.600	Rp4.066.000
C			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp -	Rp -
1			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp -	
D			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp48.235.800	Rp46.117.000
1			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp10.070.000	Rp10.070.000
2			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp26.422.000	Rp24.570.000
3			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Rp11.743.800	Rp11.477.000
E			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp468.429.768	Rp467.611.528
1			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp2.887.368	Rp2.882.500
2			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp161.419.000	Rp160.615.000
3			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp21.802.500	Rp21.801.000
4			Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp2.256.900	Rp2.250.000
5			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp21.945.000	Rp21.945.000
6			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp258.119.000	Rp258.118.028



NO	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi
F			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp234.677.788	Rp233.139.200
1			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp30.479.388	Rp29.848.200
			Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp204.198.400	Rp203.291.000
G			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp165.495.960	Rp162.488.198
1			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.811.200	Rp2.810.000
2			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp61.474.760	Rp58.468.198
3			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp11.330.000	Rp11.330.000
4			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp89.880.000	Rp89.880.000
II			POGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp223.668.470	Rp221.780.900
A			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp120.714.670	Rp119.645.000
1			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Rp120.714.670	Rp119.645.000
B			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Rp102.953.800	Rp102.135.900



NO	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi
1			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Rp38.278.500	Rp37.626.900
2			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp64.675.300	Rp64.509.000
III			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp327.208.400	Rp326.634.820
A			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp327.208.400	Rp326.634.820
1			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp54.450.900	Rp54.414.300
2			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp272.757.500	Rp272.220.520
IV			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 400.110.000	Rp 388.422.750
A			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 400.110.000	Rp 388.422.750
1			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan	Rp 299.310.000	Rp 288.322.750



NO	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program / Kegiatan	Target	Realisasi
			Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
2			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Rp 100.800.000	Rp 100.100.000
V			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Rp66.946.400	Rp66.874.000
A			Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp66.946.400	Rp66.874.000
1			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp46.735.400	Rp46.663.000
2			Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Rp20.211.000	Rp20.211.000
				Rp4.243.634.471	Rp4.040.434.209

### 10.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

-

### 10.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

- a. Juara I (Satu) Lomba Desa Dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 diwakili Oleh Desa Lubuk Raman



## 11. KECAMATAN LUBAI

Dilaksanakan oleh Kecamatan Lubai dengan Alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 4.189.999.574,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.004.930.753,-

### 11.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Terdiri dari 6 (Enam) Program dan 14 (Empat Belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 10.860.000,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 10.830.000,-
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi sebesar Rp. 7.245.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.230.000,-
  - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi sebesar Rp. 3.615.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.600.000,-
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.414.891.538,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 1.325.962.701,-
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN, alokasi sebesar Rp. 1.409.391.538,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.320.520.701,-
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, alokasi sebesar Rp. 5.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.442.000,-
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 12.693.400,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 11.050.000,-
  - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, alokasi sebesar Rp. 7.193.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.590.000,-
  - b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD, alokasi sebesar Rp. 5.499.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.460.000,-
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp.649.986.122,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 643.106.793,-
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, alokasi sebesar Rp. 12.007.332,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.724.000,-



- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi sebesar Rp. 246.635.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 246.600.000,-
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, alokasi sebesar Rp. 61.574.352,- dengan realisasi sebesar Rp. 56.441.000,-
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, alokasi sebesar Rp. 8.976.988,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.950.000,-
  - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, alokasi sebesar Rp. 42.790.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.800.000,-
  - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi sebesar Rp. 278.002.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 277.591.793,-
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 42.715.000,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 10.215.000,-
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, alokasi sebesar Rp. 8.075.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.075.000,-
  - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, alokasi sebesar Rp. 32.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,-
  - c. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, alokasi sebesar Rp. 2.140.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.140.000,-
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 300.036.000,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 299.300.000,-
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi sebesar Rp. 300.036.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 299.300.000,-
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 89.165.800,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 77.269.259,-
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, alokasi sebesar Rp. 6.015.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.010.000,-
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi sebesar Rp. 31.790.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.319.259,-
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi sebesar Rp. 51.360.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.940.000,-

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 525.183.714,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 518.800.000,-
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi sebesar Rp. 42.843.714,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.980.000,-
  - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, alokasi sebesar Rp. 12.820.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.820.000,-
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi sebesar Rp. 469.520.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 468.000.000,-

#### **B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 236.400.000,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 236.400.000,-
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta, alokasi sebesar Rp. 236.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 236.400.000,-
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 62.882.200,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 62.858.000,-
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintah yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha, alokasi sebesar Rp. 18.340.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.317.000,-
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkaist dengan Non Perizinan, alokasi sebesar Rp. 18.862.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.861.000,-
  - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan, alokasi sebesar Rp. 25.680.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.680.000,-

#### **C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 275.105.800,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 249.248.000,-
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, alokasi sebesar Rp. 28.490.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 28.483.000,-



- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, alokasi sebesar Rp. 246.615.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 220.765.000,-

**D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 132.602.000,- Dengan realisasi sebesar Rp. 125.040.000,-
  - a. Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, alokasi sebesar Rp. 132.602.000 dengan realisasi sebesar Rp. 125.040.000,-

**E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 349.270.000 Dengan realisasi sebesar Rp. 348.130.000,-
  - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, alokasi sebesar Rp. 295.930.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 295.930.000,-
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, alokasi sebesar Rp. 53.340.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 52.200.000,-

**F. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

1. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 88.208.000,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 86.721.000,-
  - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, alokasi sebesar Rp. 50.651.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.489.000,-
  - b. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa, alokasi sebesar Rp. 19.357.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.256.000,-
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan, alokasi sebesar Rp. 18.199.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.976.000,-



## **11.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

-

## **11.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

-

## **11.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI**

Penghargaan dan prestasi yang diterima Pemerintah Daerah dari Tahun tahun 2023

- a. Juara III Lomba Audit Kearsipan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- b. Peringkat 10 Besar MTQ Ke 41 Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 di Kecamatan Kelekar
- c. Partisipan dalam rangka Penilaian dan Pengukur Indeks Inovasi Daerah serta Innovative Government Award (IGA) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024



## 12. KECAMATAN RAMBANG

Pada tahun 2024, alokasi anggaran belanja Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 5.202.352.425,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.220.103.245,00 atau 81,1 persen dan kinerja keluaran (output) sebesar 99,03 persen dengan rincian sebagai berikut :

### A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 4.548.354.025,00 terealisasi sebesar Rp. 3.572.783.245,00 atau 84,66 persen yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

### B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 653.998.400,00 terealisasi sebesar Rp. 647.320.000,00 atau 98,97 persen yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

## 12.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2024 Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 36 subkegiatan, antara lain yaitu :

### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** sebesar **Rp. 3.971.097.175,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.166.729.245,00 (Unaudited)** atau **80 persen** dengan capaian kinerja *output* sebesar **100 persen**. Program ini terdiri dari **8 (delapan)** kegiatan dan 25 (dua puluh lima) subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp. 1.683.200,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.060.000,00** atau sebesar **63 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 % dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - b. Subkegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp. 1.683.200,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.060.000,00** atau sebesar **63 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 % dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - c. Subkegiatan **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar **Rp. 1.809.800,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 980.000,00** atau sebesar **54 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 % dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** dengan anggaran sebesar **Rp. 2.554.645.951,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.967.680.698,00** atau sebesar **77 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - b. Subkegiatan **Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp. 1.889.400,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 800.000,00** atau sebesar **42 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp. 5.484.400,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 5.472.000,00** atau sebesar **100 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan **Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya** dengan anggaran sebesar **Rp. 9.450.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 8.925.000,00** atau sebesar **94 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - b. Subkegiatan **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi** dengan anggaran sebesar **Rp. 30.000.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 30.000.000,00** atau sebesar **100 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - c. Subkegiatan **Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan** dengan anggaran sebesar **Rp. 7.744.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.800.000,00** atau sebesar **36 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp. 74.000.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 7.748.000,00** atau sebesar **10 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

- b. Subkegiatan **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp. 161.819.956,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 147.157.000,00** atau sebesar **91 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - c. Subkegiatan **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp. 31.735.900,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 25.664.000,00** atau sebesar **81 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - d. Subkegiatan **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** dengan anggaran sebesar **Rp. 14.598.048,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 10.520.000,00** atau sebesar **72 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - e. Subkegiatan **Fasilitasi Kunjungan Tamu** dengan anggaran sebesar **Rp. 31.703.500,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 22.050.000,00** atau sebesar **70 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - f. Subkegiatan **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp. 313.308.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 267.909.717,00** atau sebesar **86 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Subkegiatan **Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** dengan anggaran sebesar **Rp. 29.500.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 29.500.000,00** atau sebesar **100 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - b. Subkegiatan **Pengadaan Mebel** dengan anggaran sebesar **Rp. 79.998.400,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 78.300.000,00** atau sebesar **98 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** dengan anggaran sebesar **Rp. 8.567.300,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 5.600.000,00** atau sebesar **65 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.



- b. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dengan anggaran sebesar **Rp. 41.999.820,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 31.493.866,00** atau sebesar **75 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - c. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp. 64.200.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 64.200.000,00** atau sebesar **100 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas** dengan anggaran sebesar **Rp. 48.500.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 21.252.964,00** atau sebesar **44 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - b. Subkegiatan **Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya** dengan anggaran sebesar **Rp. 29.520.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 11.700.000,00** atau sebesar **40 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - c. Subkegiatan **Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** dengan anggaran sebesar **Rp. 427.256.300,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 264.235.000,00** atau sebesar **99 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

## **B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Alokasi anggaran untuk Program **Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** sebesar **Rp. 218.697.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 202.990.000,00** atau **93 persen** dengan capaian kinerja *output* sebesar **100 persen**. Program ini terdiri dari 2 (**dua**) kegiatan dan 4 (empat) subkegiatan sebagai berikut.

- 1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
  - a. Subkegiatan **Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta** anggaran sebesar **Rp. 95.000.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 94.930.000,00** atau sebesar **100 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100 %** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.



2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
  - a. SubKegiatan **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha** anggaran sebesar **Rp. 31.194.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 29.350.000,00** atau sebesar **94 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 % dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - b. SubKegiatan **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan** anggaran sebesar **Rp. 70.571.800,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 59.520.000,00** atau sebesar **84 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 % dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - c. SubKegiatan **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan** anggaran sebesar **Rp. 21.931.200,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 19.190.000,00** atau sebesar **88 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 % dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

#### C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk Program **Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** sebesar **Rp. 356.683.800,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 226.664.000,00** atau **64 persen** dengan capaian kinerja *output* sebesar **100 persen**. Program ini terdiri dari 1 (**satu**) kegiatan dan 2 (**dua**) subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - a. Subkegiatan **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa** anggaran sebesar **Rp. 40.952.200,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 38.434.000,00** atau sebesar **94 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 % dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - b. Subkegiatan **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan** anggaran sebesar **Rp. 315.731.600,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 188.230.000,00** atau sebesar **60 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 % dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

#### D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk Program **Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** sebesar **Rp. 141.240.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 128.400.000,00** atau **91 persen** dengan capaian kinerja *output*



sebesar 100 **persen**. Program ini terdiri dari 1 (**satu**) kegiatan dan 1 (**satu**) subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - a. Subkegiatan **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan** anggaran sebesar **Rp. 141.240.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 128.400.000,00** atau sebesar **91 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 % dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

#### **E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Alokasi anggaran untuk Program **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** sebesar **Rp. 306.040.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 295.900.000,00** atau 97 **persen** dengan capaian kinerja *output* sebesar 100 **persen**. Program ini terdiri dari 1 (**satu**) kegiatan dan 2 (**dua**) subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - a. Subkegiatan **Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia** anggaran sebesar **Rp. 243.810.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 239.900.000,00** atau sebesar **98 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 % dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
  - b. Subkegiatan **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan** anggaran sebesar **Rp. 62.230.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 56.000.000,00** atau sebesar **90 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 % dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

#### **F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Alokasi anggaran untuk Program **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** sebesar **Rp. 208.594.450,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 199.420.000,00** atau 96 **persen** dengan capaian kinerja *output* sebesar 100 **persen**. Program ini terdiri dari 1 (**satu**) kegiatan dan 3 (**tiga**) subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Subkegiatan **Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** anggaran sebesar **Rp. 142.638.300,00** dan



realisasi keuangan sebesar **Rp. 138.225.000,00** atau sebesar **97 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 % dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

- b. Subkegiatan **Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa** anggaran sebesar **Rp. 55.916.250,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 55.350.000,00** atau sebesar **99 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 % dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- c. Subkegiatan **Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan** anggaran sebesar **Rp. 10.039.900,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 5.845.000,00** atau sebesar **58 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 % dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

## 12.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tabel 3.69 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Rambang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
		2	Persentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi	90%	90%	100%
		3	Persentase PKK Aktif	90%	90%	100%
		4	Persentase Sarana dan Prasarana fasilitas Pelayanan Umum dalam Kondisi	80%	80%	100%
		5	Persentase penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang	80%	80%	100%
		6	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa	90%	90%	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	BB	BB



### 12.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,55% dikarenakan turunnya harga komoditas terbesar yang menyumbang pertumbuhan ekonomi yaitu sektor perkebunan.	Kedepan harus lebih meningkatkan sektor lainnya seperti industri dan jasa guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, tidak hanya mengandalkan sektor perkebunan dan sektor migas saja.

### 12.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

- a. Juara III MTQ Tingkat Kabupaten Tahun 2024
- b. Juara I Lomba Iva Test Tingkat Kabupaten Tahun 2024
- c. Top 10 Inovasi Kategori Kecamatan Tingkat Kabupaten Tahun 2024
- d. Juara Harapan III Kearsipan Tingkat Kabupaten Tahun 2024
- e. Juara III Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2024
- f. Juara Harapan III Lomba Masak Menu B2SA Tingkat Kabupaten Tahun 2024
- g. Juara I Lomba Lagu Daerah Kategori Solo Tingkat Kabupaten Tahun 2024
- h. Juara III Lomba Tari Kreasi Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2024



### 13. KECAMATAN LEMBAK

Perangkat Daerah Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dengan alokasi belanja sebesar Rp 4.637.703.103,- dan telah terealisasi sebesar Rp 3.829.462.092,- atau 82.57% dan kinerja keluaran sebesar 98% dengan rincian sebagai berikut :

#### A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 3.598.629.703,- dan telah terealisasi sebesar Rp.2.960.676.292,- atau 82,27% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang termasuk komponen belanja operasi.

#### B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp 1.039.072.400,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 868.785.800,- atau 95.36% yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

### 13.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2024 Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan, yaitu:

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 3.598.629.703,- dengan Realisasi sebesar Rp. 2.960.676.292,- atau 82,27% Program ini terdiri 8 (delapan) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 11.924.600,- dengan Realisasi sebesar Rp 11.573.100,- atau 97.05%. terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 5.022.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.962.000,- atau 98.80%. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar 100%.
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.602.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.361.100,- atau 94.76%.
  - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.300.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.250.000,- atau 97,83%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 2.737.011.238,- dengan Realisasi sebesar Rp 2.215.928.833,- atau 80.96%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.731.711.238,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2210.678.833,- atau 80.93%.
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 5.300.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.250.000,- atau 99,06%.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 13.000.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 13.000.000,- atau 100%. terdiri dari :
    - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 13.000.000,- atau 100%.
  4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 321.579.846,- dengan Realisasi sebesar Rp 233.423.817,- atau 72.59%. terdiri dari :
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100%.
    - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 111.521.046,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 96.060.000,- atau 86.14%.
    - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 14.149.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.350.000,- atau 73.15%.
    - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 6.795.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
    - e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 15.949.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.175.000,- atau 57.53%.
    - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 168.165.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 112.838.817,- atau 67.10%.
  5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 220.760.125,- dengan Realisasi sebesar Rp 220.510.000,- atau 99,89%. terdiri dari:
    - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 21.760.125,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 21.710.000,- atau 99,77%.
    - b. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 199.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 198.800.000,- atau 99,90%.



6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 74.391.200,- dengan Realisasi sebesar Rp 71.900.542,- atau 99,34%. terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 5.597.200,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.560.000,- atau 99,34%.
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 14.994.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 14.980.542,- atau 99,91%.
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 2.440.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 51.360.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 51.360.000,- atau 100%.
  
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 219.962.694,- dengan Realisasi sebesar Rp 194.340.000,- atau 88,35%. terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 29.962.694,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.440.000,- atau 14,82%.
  - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 190.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 189.900.000,- atau 99,95%.

#### **B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp 230.622.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 226.302.000,- atau 98,13%. Program ini terdiri 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Alokasi Anggaran Sebesar Rp 149.262.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 149.262.000,- atau 100%. terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta dengan anggaran sebesar Rp149.262.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 149.262.000,- atau 100%.
  
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Alokasi Anggaran Sebesar Rp 81.360.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 77.040.000,- atau 94,69%. terdiri dari :



- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 25.680.000,- atau 85.60%.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 25.680.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 25.680.000,- atau 100%.
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp. 25.680.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 25.680.000,- atau 100%.

### **C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp 229.942.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 135.265.000,- atau 53.83%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Alokasi Anggaran Sebesar Rp 229.942.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 135.265.000,- atau 53.83%. terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp. 29.948.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 27.390.000,- atau 91.46%.
  - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.199.993.200,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 107.875.000,- atau 53.94%.

### **D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar Rp 142.710.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 118.160.000,- atau 82.80%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 142.710.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 118.160.000,- atau 82.80%. terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar 142.710.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 118.160.000,- atau 82.80%.



#### **E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp 389.299.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 350.220.000,- atau 89.96%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 389.299.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 350.220.000,- atau 89.96% terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 289.299.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 256.470.000,- atau 88.65%.
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 93.750.000,- atau 93.75%.

#### **F. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp 46.499.400,- dengan Realisasi sebesar Rp 38.838.800,- atau 83.53%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Alokasi Anggaran Sebesar Rp 46.499.400,- dengan Realisasi sebesar Rp 38.838.800,- atau 83.53%.  
Terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 31.499.400,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 31.488.800,- atau 98,97%.
  - b. Sub Kegiatan koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.350.000,- atau 49.00%.

### 13.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Lembak dapat dilihat pada matrik berikut ini:

**Tabel 3.70 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Lembak**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lembak	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
		Persentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi	100%	100%	100%
		PKK Aktif	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik	85%	85%	85%
		Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	CC	CC

### 13.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Masih ada desa yang belum memiliki pos kambling untuk menjaga keamanan desa	Dibangun pos kambling untuk ronda menjaga keamanan desa
2.	Masih banyak binatang kaki empat yang berkeliaran di jalan umum desa	Digalakkan himbauan bahwa binatang kaki empat harus dikandangkan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Muara Enim No.300/89/Satpol PP-IV/2024 Tgl. 1 Maret



No	Permasalahan	Solusi
		2024 Tentang Penertibah Hewan Ternak Berkaki Empat
3.	Masih ada Kepala Desa yang ingin mengganti perangkat desa secara sepihak.	Pembinaan bahwa pergantian perangkat desa harus mempedomani Permendagri No.83 Tahun 2015 dan Permendagri no. 67 Tahun 2017, serta Perda Muara Enim No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
4.	Penyampaian Pelaporan dan Pertanggungjawaban Desa tidak tepat waktu	Pendampingan dan pembinaan terhadap pemerintah desa lebih intensif
5.	Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Camat sudah tidak layak pakai, kendaraan yang sering dipakai untuk menunjang kegiatan operasional kantor, sudah tua sering mogok dan rusak walaupun sudah dilakukan perawatan dan pemeliharaan.	Penghapusan untuk kendaraan dinas lama dan akan dianggarkan pada tahun 2026 untuk kendaraan dinas yang baru.

### 13.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

- a. Juara 1 Mujawwad Putra pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- b. Juara 1 Tafsir Arab Putri pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- c. Juara 1 Tafsir Inggris Putri pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- d. Juara 2 Tafsir Inggris Putra pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- e. Juara 2 Tilawah Remaja Putra pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- f. Juara 2 Tilawah Remaja Putri pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- g. Juara 2 KTI Putri pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- h. Juara 2 Murattal Dewasa Putri pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- i. Juara 3 Murattal Remaja Putra pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- j. Juara 3 KTI Putra pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- k. Juara 3 30 Juz Putra pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- l. Juara Harapan Tilawah Dewasa Putra pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- m. Juara Harapan Murattal Remaja Putri pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- n. Juara 1 lomba Galeri Pelangi dan Paredi pada Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Kabupaten Muara Enim
- o. Juara 2 lomba TTG kategori umum pada Acara Lomba Wajik Kreasi, Lomba Lagu Daerah, Pameran UP2K dan Lomba TTG dalam Melestarikan Adat, Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim.
- p. Juara 1 lomba lagu daerah pada Acara Lomba Wajik Kreasi, Lomba Lagu Daerah, Pameran UP2K dan Lomba TTG dalam Melestarikan Adat, Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim.
- q. Juara 2 bintang vokalis pada Festival Qasidah Rebana dan Bintang Vokalis Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.



## 14. KECAMATAN KELEKAR

Alokasi Anggaran belanja Kecamatan Kelekar alokasi belanja Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp. 4.036.934.632,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 3.846.893.469,-** atau **95,29 %**, dengan rincian sebagai berikut :

### A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp. 3.415.236.932,-** terealisasi sebesar **Rp. 3.226.684.969,-** atau **94,48 %** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

### B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 621.697.700,-** terealisasi sebesar **Rp. 620.208.500,-** atau **99,76 %** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

## 14.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada tahun 2024 Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 Program dan 14 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan, antara lain :

### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**. Dengan anggaran sebesar Rp. 2.796.815,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.759.400,- atau sebesar 62,91 %.
  - b. Subkegiatan **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.694.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 793.800,- atau sebesar 46,85 %.
  - c. Subkegiatan **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**. Dengan anggaran sebesar Rp. 2.520.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.318.400,- atau sebesar 92,00 %.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - a. Sub kegiatan **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.775.577.933,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.682.408.948,- atau sebesar 94,75 %.
  - b. Subkegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**. Dengan anggaran sebesar Rp. 3.553.915,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.689.000,- atau sebesar 75,66 %.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**. Dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.935.824,- atau sebesar 82,26 %.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan **Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya**. Dengan anggaran sebesar Rp. 7.950.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.950.000,- atau sebesar 100 %.
  - b. Subkegiatan **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**. Dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar 50,00 %.
  
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**. Dengan anggaran sebesar Rp. 2.092.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.085.000,- atau sebesar 99,63 %.
  - b. Subkegiatan **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**. Dengan anggaran sebesar Rp. 65.605.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.488.800,- atau sebesar 99,82 %.
  - c. Subkegiatan **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**. Dengan anggaran sebesar Rp 56.998.475,- dengan realisasi sebesar Rp. 53.696.200,- atau sebesar 94,21 %.
  - d. Subkegiatan **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**. Dengan anggaran sebesar Rp. 24.161.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.972.200,- atau sebesar 41,30 %.
  - e. Subkegiatan **Fasilitas Kunjungan Tamu**. Dengan anggaran sebesar Rp. 18.900.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.900.000,- atau sebesar 100,00 %.
  - f. Subkegiatan **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**. Dengan anggaran sebesar Rp. 155.134.500- dengan realisasi sebesar Rp. 155.017.606,- atau sebesar 99,92 %.
  
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - a. Subkegiatan **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**. Dengan anggaran sebesar Rp 500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 499.053.000,- atau sebesar 99,81 %
  - b. Subkegiatan **Pengadaan Mebel**. Dengan anggaran sebesar Rp 60.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 59.500.000,- atau sebesar 99,17 %
  
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - a. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**. Dengan anggaran sebesar Rp 5.840.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.840.000,- atau sebesar 100,00 %.

- b. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**. Dengan anggaran sebesar Rp. 23.443.680,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.121.091,- atau sebesar 90,09 %.
  - c. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**. Dengan anggaran sebesar Rp 2.800.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.800.000,- atau sebesar 64,29 %.
  - d. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**. Dengan anggaran sebesar Rp 44.940.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.940.000,- atau sebesar 100,00 %.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- a. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**. Dengan anggaran sebesar Rp. 32.868.416,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.713.200,- atau sebesar 93,44 %.
  - b. Subkegiatan **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**. Dengan anggaran sebesar Rp. 2.710.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.710.800,- atau sebesar 100,00 %.

**B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

- 1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum.
  - a. Subkegiatan **Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta**. Dengan anggaran sebesar Rp. 49.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 49.400.000,- atau sebesar 99,80 %.
- 2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat.
  - a. Subkegiatan **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**. Dengan anggaran sebesar Rp. 21.611.905,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.318.600,- atau sebesar 98,64 %.
  - b. Subkegiatan **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Perizinan**. Dengan anggaran sebesar Rp. 22.295.605,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.199.800,- atau sebesar 99,57 %
  - c. Subkegiatan **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan**. Dengan anggaran sebesar Rp. 48.387.444,- dengan realisasi sebesar Rp. 47.812.400,- atau sebesar 98,81 %



### **C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.**

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum.
  - a. Subkegiatan **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.** Dengan anggaran sebesar Rp. 34.999.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.074.000,- atau sebesar 97,35 %.
  - b. Subkegiatan **Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.** Dengan anggaran sebesar Rp. 635.438.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 596.398.200,- atau sebesar 93,86 %.

### **D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban.**

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
  - a. Subkegiatan **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.** Dengan anggaran sebesar Rp. 107.041.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 96.300.000,- atau sebesar 89,97 %.

### **E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
  - a. Subkegiatan **Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.** Dengan anggaran sebesar Rp. 226.999.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 225.749.900,- atau sebesar 99,45 %.
  - b. Subkegiatan **Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.** Dengan anggaran sebesar Rp. 42.335.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.335.200,- atau sebesar 100,00 %.

### **F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.**

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.
  - a. Subkegiatan **Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.** Dengan anggaran sebesar Rp. 13.511.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.411.600,- atau sebesar 99,26 %.
  - b. Subkegiatan **Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.** Dengan anggaran sebesar



Rp. 9.224.644,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.193.000,- atau sebesar 99,66 %.

## 14.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tabel 3.71 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Kelekar

Tujuan	Sasaran				Capaian (%)
	Uraian	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	Baik	Baik	Baik
	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase urusan Pemerintah yang difasilitasi	85%	95%	100%
		PKK aktif	100%	100%	100 %
		Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum dalam kondisi baik	85%	85%	100%
		Persentase pelanggaran K3(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	85%	85%	100%
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa	90%	90%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	CC	CC

### 14.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	Sering terjadi pemadaman listrik sehingga mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.	Pihak terkait agar lebih meningkatkan pelayanan dan kinerja untuk meminimalisir pemadaman listrik.
2	Jumlah SDM pegawai yang terbatas dengan kompetensi yang tidak merata	Mengusulkan ke BKPSDM Kabupaten Muara Enim untuk penambahan staf (SDM) untuk memenuhi kekurangan pegawai tersebut.
3	Masih ada beberapa kegiatan yang belum optimal dilaksanakan	Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang belum optimal dilaksanakan

### 14.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

- a. Juara II Umum Lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an ke 40 Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- b. Juara I Lomba Bintang Vokalis Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- c. Juara II Lomba Qasidah Robbana Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- d. Juara III Kategori Sekolah pada Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- e. Juara III Kategori Sekolah (SMP) Lomba Lagu Daerah Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- f. Juara III Lomba KP SPAMS Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- g. Juara I Lomba Posyantek Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- h. Juara I Lomba Audit Kearsipan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- i. Top 10 Inovasi Kategori Perangkat Daerah dan Kecamatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024



## 15. KECAMATAN GELUMBANG

Pada tahun 2024, alokasi belanja Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp. 7.298.144.037,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 6.830.647.184,00** atau **93,59%** dan kinerja keluaran (*output*) sebesar **100%** dengan rincian sebagai berikut:

### A. Belanja Operasional

Belanja Operasional dialokasikan sebesar **Rp. 6.120.538.724,00** terealisasi sebesar **Rp. 5.670.172.184,00** atau **92,64%** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasional.

### B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 1.177.605.313,00** terealisasi sebesar **Rp. 1.160.475.000,00** atau **98,55%** yang diarahkan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

## 15.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2023 Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 38 subkegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.078.758.635,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.768.413.808,00 atau 92,39%.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 8.727.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.977.400,00 atau 91,41%.
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.306.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.556.500,00 atau 77,32%.
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 2.413.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.413.200,00 atau 100%.
  - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi sebesar Rp. 3.007.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.007.700,00 atau 100%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 2.428.753.733,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.204.074.813,00 atau 90,75%.
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi anggaran sebesar Rp. 2.425.360.733,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.200.681.813,00 atau 90,74%.
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.084.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.084.500,00 atau 100%.



3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 5.775.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%.
  - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 5.775.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0%.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 61.582.900,00 Dengan Realisasi sebesar Rp. 38.567.900,00 atau 62,63%.
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, alokasi anggaran sebesar Rp. 22.155.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.990.000,00 atau 85,71%.
  - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, alokasi anggaran sebesar Rp. 27.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.500.000,00 atau 27,78%.
  - c. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 12.427.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.077.900,00 atau 97,18%.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 729.524.252,00 dengan realisasi sebesar Rp. 708.654.847,00 atau 97,14%.
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp. 213.479.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 206.989.000,00 atau 96,96%.
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp. 131.465.752,00 dengan realisasi sebesar Rp 127.012.000,00 atau 96,61%.
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp. 69.410.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 64.509.100,00 atau 92,94%.
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, alokasi anggaran sebesar Rp. 10.339.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.920.200,00 atau 57,26%.
  - e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, alokasi anggaran sebesar Rp. 16.513.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.930.000,00 atau 96,47%.
  - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 288.316.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 288.294.547,00 atau 99,99%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 162.245.275,00 dengan realisasi sebesar Rp. 154.570.000,00 atau 95,27%.



- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 31.688.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 28.890.000,00 atau 91,17%.
  - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, alokasi anggaran sebesar Rp. 130.557.275,00 dengan realisasi sebesar Rp. 125.680.000,00 atau 96,26%.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 104.565.753,00 dengan realisasi sebesar Rp. 91.177.848,00 atau 87,20%
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, alokasi anggaran sebesar Rp. 6.294.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.290.000,00 atau 99,93%
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi anggaran sebesar Rp. 65.341.353,00 dengan realisasi sebesar Rp. 51.957.848,00 atau 79,52%.
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.650.000,00 atau 100%.
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp. 29.280.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.280.000,00 atau 100%.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 577.584.322,00 dengan realisasi sebesar Rp. 373.641.000,00 atau 64,69%
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, alokasi anggaran sebesar Rp. 13.637.081,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.147.000,00 atau 37,74%.
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 15.417.981,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.314.000,00 atau 92,84%.
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi anggaran sebesar Rp. 540.899.260,00 dengan realisasi sebesar Rp. 536.300.000,00 atau 99,15%.
  - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi anggaran sebesar Rp. 7.630.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.630.000,00 atau 100%.



## **B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 417.407.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 41.0430.800,00 atau 98,33%.

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, alokasi anggaran sebesar Rp. 280.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 279.300.000,00 atau 99,51%.
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta, alokasi anggaran sebesar Rp. 280.680.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 279.300.000,00 atau 99,51%.
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, alokasi anggaran sebesar Rp. 136.727.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 131.130.800,00 atau 95,91%
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, alokasi anggaran sebesar Rp. 50.329.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 50.322.300,00 atau 99,99%.
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan, alokasi anggaran sebesar Rp. 50.329.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 50.328.500,00 atau 100%.
  - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, alokasi anggaran sebesar Rp. 36.068.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 30.480.000,00 atau 84,51%.

## **C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.897.988.802,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.825.520.176,00 atau 96,18%.

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 535.935.495,00 dengan realisasi sebesar Rp. 479.104.300,00 atau 89,40%.
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 41.393.595,00 dengan realisasi sebesar Rp. 40.960.500,00 atau 98,95%.
  - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, alokasi anggaran sebesar Rp. 494.541.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 438.143.800,00 atau 88,60%.
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan alokasi, anggaran sebesar Rp. 1.362.053.307,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.346.415.876,00 atau 98,85%.



- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.930.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.637.600,00 atau 92,56%.
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan, alokasi anggaran sebesar Rp. 796.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 792.940.000,00 atau 99,62%.
- c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, alokasi anggaran sebesar Rp. 562.123.207,00 dengan realisasi sebesar Rp. 549.838.276,00 atau 97,81%.

#### **D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 322.368.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 276.511.000,00 atau 85,77%.

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, alokasi anggaran sebesar Rp. 322.368.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 276.511.000,00 atau 85,77%.
  - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, alokasi anggaran sebesar Rp. 322.368.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 276.511.000,00 atau 85,77%.

#### **E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 548.922.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 517.364.700,00 atau 94,25%.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 548.922.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 517.364.700,00 atau 94,25%.
  - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, alokasi anggaran sebesar Rp. 385.484.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 376.631.500,00 atau 97,70%.
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, alokasi anggaran sebesar Rp. 163.437.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 140.733.200,00 atau 86,11%.

#### **F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Alokasi anggaran sebesar Rp. 32.698.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 32.406.700,00 atau 99,11%.



1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 32.698.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 32.406.700,00 atau 99,11%.
  - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 17.984.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.772.700,00 atau 98,82%.
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan, alokasi anggaran sebesar Rp. 14.714.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.634.000,00 atau 99,46%.

## 15.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tabel 3.72 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Gelumbang

Tujuan	Sasaran				Capaian (%)
	Uraian	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	80%	80%	100 %
	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase urusan Pemerintah yang difasilitasi	90%	100%	100%
		PKK aktif	100%	100%	100 %
		Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum dalam kondisi baik	85%	85%	100%
		Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	85%	85%	100%
		Persentase Penyelenggara	90%	90%	100%

Tujuan	Sasaran				Capaian (%)
	Uraian	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	
		an Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	59,95	55,01	91,76%

### 15.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Adanya sekolah SD/SMP yang kekurangan ruang kelas akibat banyaknya warga usia sekolah dalam wilayah kecamatan gelumbang yang tidak seimbang dengan penambahan ruang kelas SD/SMP	Telah diusulkan dalam Musrenbang Desa-Desa dalam wilayah Kecamatan Gelumbang untuk dijadikan usulan prioritas pada forum OPD
2.	Masih tingginya pernikahan dini dalam Wilayah Kecamatan Gelumbang	Telah diusulkan dalam Musrenbang Desa penyuluhan langsung ke Desa oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.	Terlambatnya penyelesaian/ realisasi pembangunan fisik Dana Desa disebabkan keterlambatan pembuatan RAB karena terbatasnya Tenaga yang berkompeten dibidang tersebut sedangkan Desa di wilayah Kecamatan Gelumbang yaitu 22 Desa dengan 1 orang Tenaga Pendamping Desa Teknik (PDTI)	Permohonan penambahan Pendamping Desa Teknik (PDTI)
4.	Fasilitas pelayanan yang belum mencukupi seperti belum adanya ruang laktasi, area bermain untuk anak-anak, sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka, serta sarana prasarana untuk kelompok rentan (disabilitas).	Pembenahan ruang untuk mencukupi ruang/sarana yang belum ada

### 15.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

- a. Perangkat Daerah Terbaik ke-1 Kategori Kecamatan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- b. Juara II Wirausaha Muda Berprestasi Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 (Afi-Desa Putak)



- c. Juara Harapan II Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2024 (Desa Kartamulia)
- d. Juara III Lomba Swadaya Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 (Desa Gaung Telang)
- e. Juara I Penilaian Kinerja Kader Pembangunan Manusia Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 (Eka Novitawati-Desa Midar)
- f. Juara I Kategori Umum pada Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 (Posyantek Kecamatan Gelumbang)
- g. Juara I Kategori Sekolah pada Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 (SMK Negeri I Gelumbang)
- h. Juara III Lomba Lagu Daerah Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 (SMA Negeri I Gelumbang)
- i. Top 10 Inovasi Kategori Perangkat Daerah dan Kecamatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
- j. Komitmen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2024 serta Capaian 100% Desa Kelurahan Memiliki Perdes Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.



## 16. KECAMATAN MUARA BELIDA

Urusan Kewilayahan diselenggarakan oleh perangkat daerah Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024, alokasi belanja Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 3,835,308,283 dan terealisasi sebesar Rp. 3,485,156,333 atau 90,87 % dan kinerja keluaran (output) sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :

### A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 3.287.334.483 terealisasi sebesar Rp. 2.950.128.833 Atau 89.74% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

### B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 547.973.800 terealisasi sebesar Rp. 535.027.500 atau 97.64 % yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

## 16.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2024 Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 program dan 14 kegiatan, dan 34 sub kegiatan yaitu :

### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 2.656.597.883 dengan realisasi sebesar Rp2.363.824.833 atau 88,98 % program ini terdiri dari 8 kegiatan, dan 23 subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.390.000 atau sebesar 67,38 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.027.000 atau sebesar 89,19 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 4.600.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp 4.574.000 atau sebesar 99,43 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen AKIP dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 1.834.240.451 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.683.355.692 atau sebesar 91,77 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 6.100.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.040.000 atau sebesar 99,02 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.824.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.100.000 atau sebesar 93,27 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas Operasional yang disediakan Jasa Jaminan Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 0%.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 sebesar 0 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan capaian output/keluaran sebesar 0 %.
  - b. Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.900.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.900.000 sebesar 100%
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 3.999.348 dan realisasi keuangan sebesar Rp.



- 3.480.000 atau sebesar 87,01 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 51.621.385 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.450.000 atau sebesar 97,73 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 38.309.599 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.966.000 atau 86,05 %. Adapun Output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 3.599.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.588.800 atau sebesar 99,69 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan, dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - e. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.875.000 atau sebesar 99,17%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - f. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 334.202.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 246.644.641 atau sebesar 73,80 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Subkegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 61.323.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 61.000.000 atau sebesar 99,47 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Mebel yang di sediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 116.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 105.398.500 atau sebesar 90,86 %. Adapun

Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang di sediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 2.497.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.490.000 atau sebesar 99,70 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 32.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.000.000 atau sebesar 100 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jenis komunikasi, sumber Daya Air dan listrik yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp. 3.860.000 dan realisasi sebesar Rp. 3.800.000 atau sebesar 98,45 % Adapun output dari kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan capaian keluaran sebesar 100%.
  - d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 51.360.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 51.360.000 atau sebesar 100%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Jasa Umum Pelayanan Kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 41.840.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.511.200 atau sebesar 80,09 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 11.043.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.150.000 atau sebesar 55,69%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang



dipelihara/direhabilitasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

## **B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Alokasi anggaran untuk program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 461.731.000 dengan realisasi sebesar Rp. 457.732.000 atau 99,13% program ini terdiri dari 2 kegiatan, dan 4 subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
  - a. Subkegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta dengan anggaran sebesar Rp. 370.650.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 369.479.000 atau sebesar 99,68%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Prasarana dan fasilitas Pelayanan umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - a. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 2.434.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.760.000 atau sebesar 72,31 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran sebesar Rp. 27.187.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.960.000 atau sebesar 99,17%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Nonperizinan pada urusan pemerintah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp. 61.460.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.533.000 atau sebesar 96,86%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

## **C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

Alokasi anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 296.349.400 dengan realisasi sebesar Rp.



292.908.500 atau 98,84% program ini terdiri dari 1 kegiatan, dan 2 subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - a. Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp. 43.610.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.524.000 atau sebesar 99,80%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 252.739.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 249.384.500 atau sebesar 98,67%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

#### **D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Alokasi anggaran untuk program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 7.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 7.000.000 atau 100 % program ini terdiri dari 1 kegiatan, dan 1 subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.000.000 atau sebesar 100%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

#### **E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Alokasi anggaran untuk program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 295.430.000 dengan realisasi sebesar Rp. 282.630.000 atau 95,67 % program ini terdiri dari 1 kegiatan, dan 2 subkegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - a. Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar



Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 226.630.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 226.630.000 atau sebesar 100 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

- b. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 68.600.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 56.000.000 atau sebesar 81,40 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

#### **F. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Alokasi anggaran untuk program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 118.200.000 dengan realisasi sebesar Rp. 81.830.000 atau 69,23 % program ini terdiri dari 1 kegiatan, dan 2 subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 104.200.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 68.140.000 atau sebesar 65,39 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 14.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.690.000 atau sebesar 97,79 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Desa yang di Fasilitasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



## 16.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tabel 3.73 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Muara Belida

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100%
			Persentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi	100	100	100%
			Persentase PKK Aktif	100	100	100%
			a. Persentase Sarana dan Prasarana Umum dalam kondisi baik	100	100	100%
			b. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100%
			c. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa			
		Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	CC	CC	100

## 16.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Dalam Pelayanan Kependudukan khususnya E-KTP kecamatan hanya diberi kewenangan pada perekaman sementara untuk percetakan dilakukan oleh DISDUK CAPIL Kab. Muara Enim sehingga pelayanan dirasa lamban oleh masyarakat dan membutuhkan biaya.	Sosialisasi kepada masyarakat apabila membutuhkan E-KTP cepat diberi rekomendasi langsung ke DISDUK CAPIL Muara Enim. Dan juga dilakukan perekaman secara jemput bola ke desa-desa
2.	Pelayanan belum berbasis elektronik	Adanya web sehingga masyarakat bias akses semua informasi
3.	Kurangnya Personil di bagian IT	Mengusulkan ke BKPSDM
4.	Kurangnya SDM ASN yang berkompeten	Diklat/Bimtek



#### **16.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI**

- a. Perencana Terbaik III Lingkup Kabupaten Muara Enim
- b. Terbaik II Pengawasan Arsip Internal
- c. Juara I Posyantek Tingkat Provinsi Sumatera Selatan diwakili oleh desa Muara Belida
- d. Juara I BBGRM Tingkat Kabupaten Muara Enim di Wakili oleh desa Muara Belida
- e. Juara 4 Lomba Qasidah Rabbana Tingkat Kabupaten Muara Enim



## 17. KECAMATAN BELIMBING

Urusan Kewilayahan diselenggarakan oleh perangkat daerah Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024, alokasi belanja Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 4.963.593.052 dan terealisasi sebesar Rp. 4.218.986.895. atau 85 % dan kinerja keluaran (output) sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut:

### a. Belanja Operasi belanja

Operasi dialokasikan sebesar Rp. 4.576.746.892 terealisasi sebesar Rp. 3.832.775.734 Atau 83.74% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

### b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 386.846.160 terealisasi sebesar Rp. 386.211.160 atau 99.84 % yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

## 17.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2024 Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 program dan 15 kegiatan, dan 37 sub kegiatan yaitu :

### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Alokasi anggaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.3.933.620.022,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.227.495.595,00 atau 82.32 % program ini terdiri dari 8 kegiatan, dan 25 subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 18.278.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.151.000 atau sebesar 94%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 20.439.934,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.991.400,00 atau sebesar 98 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 4.721.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.016.000,00 atau sebesar 85%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen AKIP dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.011.580.736,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.640.984.870,00 atau sebesar 94 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.398.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.191.600 atau sebesar 95%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 47.798.111,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.496.200,00 atau sebesar 99%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 0 %.
  - b. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 15.015.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.462.600 atau sebesar 31 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas Operasional yang disediakan Jasa Jaminan Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 50%.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 sebesar 0 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan capaian output/keluaran sebesar 0 %.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 11.376.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.950.000 atau sebesar 87 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 10.447.652 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.497.000 atau sebesar 48%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 47.366.517 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.990.700 atau 53 %. Adapun Output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 11.107.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.252.000 atau sebesar 56%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang cetak dan Penggandaan yang disediakan, dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - e. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 38.874.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.045.000 atau sebesar 100%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - f. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 147.519.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 147.468.956 atau sebesar 100%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Subkegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 64.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 64.000.000 atau sebesar 100%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Mebel yang di sediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 77.846.160 dan realisasi keuangan sebesar



- Rp. 77.846.160 atau sebesar 100%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang di sediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Pengadaan Bangunan Gedung atau Bangunan Kantor Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.834.000 atau sebesar 98 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang di sediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - d. Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Bangunan Gedung atau Bangunan Kantor Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.531.000 atau sebesar 99.76 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 4.480.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.400.000 atau sebesar 98 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 66.840.720 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.409.384 atau sebesar 78 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jenis komunikasi, sumber Daya Air dan listrik yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 51.360.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 51.360.000 atau sebesar 100%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Jasa Umum Pelayanan Kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 39.400.292 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.198.725 atau sebesar 92 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini

adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 10.230.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.180.000 atau sebesar 99.51 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 765.539.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 763.580.000 atau sebesar 99.74%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

## **B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Alokasi anggaran untuk program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 172.924.856 dengan realisasi sebesar Rp. 159.337.856 atau 92% program ini terdiri dari 2 kegiatan, dan 4 subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
  - a. Subkegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta dengan anggaran sebesar Rp. 65.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 65.000.000 atau sebesar 100%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Prasarana dan fasilitas Pelayanan umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - a. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 21.145.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.965.000 atau sebesar 71 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran sebesar Rp. 26.521.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.115.000 atau sebesar 72%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah



Laporan Nonperizinan pada urusan pemerintah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- c. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp. 60.257.856 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.257.856 atau sebesar 99%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

#### **C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Alokasi anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 327.909.174 dengan realisasi sebesar Rp. 266.732.344 atau 81.34 program ini terdiri dari 1 kegiatan, dan 2 subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - a. Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp. 27.657.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.858.000 atau sebesar 97%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 300.251.874 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 239.874.344 atau sebesar 79.89%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

#### **D. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Alokasi anggaran untuk program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 142.418.000 dengan realisasi sebesar Rp. 142.346.600 atau 99.94 % program ini terdiri dari 2 kegiatan, dan 2 subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 129.582.000



dan realisasi keuangan sebesar Rp. 129.536.000 atau sebesar 99.96%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

2. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a. Subkegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 12.836.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.810.600 atau sebesar 99.80 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Koordinasi/sinergi dengan Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

#### **E. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Alokasi anggaran untuk program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 356.655.500 dengan realisasi sebesar Rp. 348.663.000 atau 97.76 % program ini terdiri dari 1 kegiatan, dan 2 subkegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Urusan
  - a. Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 293.079.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 288.370.000 atau sebesar 98 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
  - b. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 63.576.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.293.000 atau sebesar 95 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini



adalah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

#### F. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Alokasi anggaran untuk program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 30.065.500 dengan realisasi sebesar Rp. 24.411.500 atau 81.% program ini terdiri dari 1 kegiatan, dan 3 subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp. 8.071.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.256.000 atau sebesar 90%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan anggaran sebesar Rp. 11.6617.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.617.500 atau sebesar 58%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.637.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.538.000 atau sebesar 99.06 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Desa yang di Fasilitasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

### 17.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tabel 3.74 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Belimbing

Tujuan	Sasaran				Capaian (%)
	Uraian	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	100
		Persentase Urusan	100	100	100



Tujuan	Sasaran				Capaian (%)
	Uraian	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	
		Pemerintah yang di fasilitasi			
		Persentase PKK Aktif	100	100	100
		Persentase Sarana dan Prasarana Umum dalam kondisi baik	85	85	100
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100	100	100
		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa	95	95	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	CC	CC	100

### 17.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Dalam Pelayanan Kependudukan khususnya E-KTP kecamatan hanya diberi kewenangan pada perekaman sementara untuk percetakan dilakukan oleh DISDUK CAPIL Kab. Muara Enim sehingga pelayanan dirasa lamban oleh masyarakat dan membutuhkan biaya.	Sosialisasi kepada masyarakat apabila membutuhkan E-KTP cepat diberi rekomendasi langsung ke DISDUK CAPIL Muara Enim. Dan juga dilakukan perekaman secara jemput bola ke desa-desa
2.	Pelayanan belum berbasis elektronik	Adanya web sehingga masyarakat bias akses semua informasi
3.	Kurangnya Personil di bagian IT	Mengusulkan ke BKPSDM
4.	Kurangnya SDM ASN yg berkompeten	Diklat/Bimtek



#### **17.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI**

- a. Perencana Terbaik III Lingkup Kabupaten Muara Enim
- b. Terbaik II Pengawasan Arsip Internal
- c. Juara I Posyantek Tingkat Provinsi Sumatera Selatan diwakili oleh desa Belimbing
- d. Juara I BBGRM Tingkat Kabupaten Muara Enim di Wakili oleh desa Belimbing
- e. Juara 4 Lomba Qasidah Rabbana Tingkat Kabupaten Muara Enim



## 18. KECAMATAN BELIDA DARAT

Alokasi anggaran belanja Kecamatan Belida Darat pada tahun 2024 sebesar Rp.4.212.560.395 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.817.445.282 atau 90,62% dengan rincian sebagai berikut :

### 1. Belanja Operasi

Alokasi anggaran belanja operasi tahun 2024 sebesar Rp.4.082.560.395, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.692.065.282 atau 90,44%.

### 2. Belanja Pegawai

Alokasi anggaran belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp.2.505.360.004,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.248.776.268,00 atau 89,76%.

### 3. Belanja Barang dan Jasa

Alokasi anggaran belanja barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp.1.577.200.391,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.443.289.014,00 atau 91,51%.

### 4. Belanja Modal

Alokasi anggaran belanja modal tahun 2024 sebesar Rp. 1.680.339.900 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.643.580.000 atau 97,81%.

### 5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alokasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp. 984.339.900 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.949.570.000 atau 96,47%.

### 6. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Alokasi anggaran belanja modal Gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp. 130.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 125.380.000,00 atau 96,45%.

## 18.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Terdiri dari 6 program dan 15 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.530.506.675 dengan realisasi sebesar Rp.3.203.282.682 atau 90,73%.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.865.500 dengan realisasi sebesar Rp.16.965.000 atau 81,31%

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.865.500 dengan realisasi sebesar Rp.16.965.000,00 atau 81,31%

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0%

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0 dengan realisasi sebesar Rp.0 atau 0%



- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0%
  - e. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.516.603.754 dengan realisasi sebesar Rp.2.248.776.268 atau 89,36%.
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.504.266.554 dengan realisasi sebesar Rp.2.248.776.268 atau 89,80%
    - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0%.
    - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.375.600 dengan realisasi sebesar Rp.0 atau 0%.
    - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.961.600 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0%
  3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0%
    - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0%
  4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.300.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0
    - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.300.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0
    - b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0
  5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.401.013.178 dengan realisasi sebesar Rp.369.180.214 atau 92,06%
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.258.907 dengan realisasi sebesar Rp. 6.445.000,00 atau 57,24%

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 141.373.612 dengan realisasi sebesar Rp.136.694.000 atau 96,69%.
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.688.168 dengan realisasi sebesar Rp.11.070.000 atau 87,25%
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.91.085.000 dengan realisasi sebesar Rp.74.126.000 atau 81,38%.
  - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.796.099 dengan realisasi sebesar Rp.2.850.000 atau 36,65%.
  - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.396.942 dengan realisasi sebesar Rp.13.176.000,00 atau 91,52%
  - g. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.560.000 dengan realisasi sebesar Rp.21.175.000 atau 98,21%.
  - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.191.939.450 dengan realisasi sebesar Rp.177.770.214 atau 92,62%.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.143.706.993 dengan realisasi sebesar Rp.140.225.200 atau 97,58%
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.473.600 dengan realisasi sebesar Rp.6.470.000 atau 99,94%.
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.998.920 dengan realisasi sebesar Rp.17.142.700 atau 95,24 %.
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.029.973 77,52 8.550.000 dengan realisasi sebesar Rp.6.600.000 atau 82,19%.
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.108.204.500 dengan realisasi sebesar Rp.108.062.500,00 atau 99,87%.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.441.017.250 dengan realisasi sebesar Rp.428.136.000 atau 97,08%.
- a. Sub Kegiatan Honor Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.093.450 dengan realisasi sebesar Rp.0 atau 0%.
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp.21.871.800 dengan alokasi



anggaran sebesar dengan realisasi sebesar Rp.11.236.000 atau 51,37%.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.418.052.000 dengan realisasi sebesar Rp.416.900.000 atau 99,72%.

## **B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.142.900.200 dengan realisasi sebesar Rp.139.285.000 atau 97,47%

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.391.800 dengan realisasi sebesar Rp.51.300.000 atau 99,82%.
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta dengan alokasi anggaran sebesar Rp.51.391.800 dengan realisasi sebesar Rp.51.300.000 atau 99,82 %.
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.508.400 dengan realisasi sebesar Rp87.985.000 atau 96,15 %.
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.745.300 dengan realisasi sebesar Rp. 42.485.000 atau 92,87%.
  - b. Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.45.763.100 dengan realisasi sebesar Rp.45.500.000 atau 99,43%.

## **C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.154.286.000 dengan realisasi sebesar Rp107.455.000 atau 69,65%.

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.154.286.000 dengan realisasi sebesar Rp107.455.000 atau 69,65%.
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.626.800 dengan realisasi sebesar Rp.44.355.000 atau 99,39%.
  - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran



sebesar Rp 109.659.200 dengan realisasi sebesar Rp.63.100.000 atau 57,54%.

#### **D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.710.500 dengan realisasi sebesar Rp3.999.600 atau 34,15%.

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.710.500 dengan realisasi sebesar Rp3.999.600 atau 34,15%.
  - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.710.500 dengan realisasi sebesar Rp3.999.600 atau 34,15%.

#### **E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.218.908.000 dengan realisasi sebesar Rp218.908.000 atau 100%.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.218.908.000 dengan realisasi sebesar Rp218.908.000 atau 100%.
  - a. Sub Kegiatan "Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia" dengan alokasi anggaran sebesar Rp.189.508.000 dengan realisasi sebesar Rp. 189.508.000 atau 100%.
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.400.000 dengan realisasi sebesar Rp29.400.000 atau 100%.

#### **F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.154.249.020 dengan realisasi sebesar Rp.144.515.000 atau 93,69 %.

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.281.825.800 dengan realisasi sebesar Rp.206.848.500 atau 73,40%.
  - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar



Rp.131.499.000 dengan realisasi sebesar Rp.128.400.000,00 atau 97,64%.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.750.020 dengan realisasi sebesar Rp.16.115.000 atau 70,84%.

## 18.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

**Tabel 3.74 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Belida Darat**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi	85	90	100
		Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik	85	95	100
		Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan) yang ditindaklanjuti	85	92	100
		PKK Aktif	100	100	100
		Posyandu Aktif	100	100	100

## 18.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	Masih ada beberapa kegiatan yang belum optimal dilaksanakan sehingga belum dapat menyerap dana secara maksimal (anggaran masih ada yang tersisa)	Mengevaluasi terhadap kegiatan yang belum optimal dilaksanakan
2	Kekurangan pegawai (bakal ada kekosongan jabatan)	Mengajukan usulan penambahan pegawai kecamatan ke BKPSDM

## 18.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

- a. Penghargaan Top 10 Inovasi Daerah Kategori Tingkat Kecamatan dalam rangka Penilaian/ Asistensi Inovasi Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024



## 19. KECAMATAN LUBAI ULU

Alokasi anggaran belanja Kecamatan Lubai Ulu pada tahun 2024 sebesar Rp.4.297.527.716 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.577.297.519 atau 83,24% dengan rincian sebagai berikut :

### A. Belanja Operasi

Alokasi anggaran belanja operasi tahun 2024 sebesar Rp.4.082.560.395, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.692.065.282 atau 90,44%.

### B. Belanja Pegawai

Alokasi anggaran belanja pegawai tahun 2024 sebesar Rp.2.202.015.948,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.761.529.862,00 atau 80,18%.

### C. Belanja Barang dan Jasa

Alokasi anggaran belanja barang dan jasa tahun 2024 sebesar Rp.1.577.200.391,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.443.289.014,00 atau 91,51%.

### D. Belanja Modal

Alokasi anggaran belanja modal tahun 2024 sebesar Rp.342.412.900 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 334.962.000 atau 97,82%.

### E. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alokasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp. 223.883.800 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.216.762.000 atau 96,82%.

### F. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Alokasi anggaran belanja modal Gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp. 118.529.100,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 118.200.000,00 atau 99,72%.

## 19.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Terdiri dari 6 program dan 14 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.119.451.916 dengan realisasi sebesar Rp.2.585.128.889 atau 82,87%

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.999.800 dengan realisasi sebesar Rp4.983.000 atau 81,31%
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.999.800 dengan realisasi sebesar Rp. 4.999.800 atau 99,66%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.202.015.948 dengan realisasi sebesar Rp1.761.529.862 atau 80,18%.



- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.197.015.948 dengan realisasi sebesar Rp.1.756.655.862 atau 79,97%
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesarRp. 5.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.674.000 atau 93,48%
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.925.850 dengan realisasi sebesar Rp. 5.766.500 atau 58.1%
    - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.925.850 dengan realisasi sebesar Rp. 5.766.500 atau 58.1%
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.532.000 dengan realisasi sebesar Rp. 40.530.357 atau realisasi sebesar 74,32 %
    - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.532.000 dengan realisasi sebesar Rp. 40.530.357 atau realisasi sebesar 74,32 %
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.251.833.150 dengan realisasi sebesar R.224.501.930 atau 89,15%
    - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.928.400 dengan realisasi sebesar Rp.21.895.000 atau 99,85%
    - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.989.550 dengan realisasi sebesar Rp.19.933.000 atau 99,72%.
    - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.54.998.100 dengan realisasi sebesar Rp.30.692.000 atau 55,81%
    - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.9.993.500 atau 99,94%.
    - e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.952.000 dengan realisasi sebesar Rp.14.942.000 atau 99,93%.
    - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.129.964.300 dengan realisasi sebesar Rp.127.046.430 atau 97,75%.



6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp.118.529.100 dengan realisasi sebesar Rp. 118.200.100 atau 99,72%
  - b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp.223.883.800 dengan realisasi sebesar Rp. 216.762.000 atau 96,82%
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.115.070.468 dengan realisasi sebesar Rp.97.914.240 atau 85,09%
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.489.600 dengan realisasi sebesar Rp.8.480.000 atau 99,89%.
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.39.980.868 dengan realisasi sebesar Rp.28.514.240 atau 71,32 %.
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.66.600.000 dengan realisasi sebesar Rp.60.920.000,00 atau 91,47%.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.138.661.800 dengan realisasi sebesar R.114.941.000 atau 82,89%.
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp.78.738.900 dengan alokasi anggaran sebesar dengan realisasi sebesar Rp.55.162.000 atau 70,06%.
  - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.972.900 dengan realisasi sebesar Rp. 44.929.000 atau 99,90%.
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.950.000 dengan realisasi sebesar Rp. 14.850.000 atau 99,33%.

## **B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.198.382.300 dengan realisasi sebesar Rp.Rp183.486.000 atau 92,49%



1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.970.000 dengan realisasi sebesar Rp.78.500.000 atau 98,16%.
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta dengan alokasi anggaran sebesar Rp.79.970.000 dengan realisasi sebesar Rp.78.500.000 atau 98,16%.
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 118.422.300 dengan realisasi sebesar Rp 104.986.000 atau 88,65 %.
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan alokasi anggaran sebesar Rp.41.197.000 dengan realisasi sebesar Rp. 34.610.000 atau 84,01%.
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Non Perizinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.309.500 dengan realisasi sebesar Rp. 28.006.000 atau 86,68%.
  - c. Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.44.915.800 dengan realisasi sebesar Rp. 42.370.000 atau 94,33%.

#### **C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.489.921.800 dengan realisasi sebesar Rp 321.974.630 atau 68,52%.

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 489.921.800 dengan realisasi sebesar Rp.321.974.630 atau 68,52%.
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.999.700 dengan realisasi sebesar Rp.39.707.500 atau 79,42 %.
  - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 419.922.100 dengan realisasi sebesar Rp.282.267.130 atau 67,22%.

#### **D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.154.537.500 dengan realisasi sebesar Rp.142.150.000 atau 91,98%.



1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 154.537.500 dengan realisasi sebesar Rp.142.150.000 atau 91,98%.
  - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 154.537.500 dengan realisasi sebesar Rp.142.150.000 atau 91,98%.

**E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.329.997.200 dengan realisasi sebesar Rp.319.465.000 atau 96,81%.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 329.997.200 dengan realisasi sebesar Rp.319.465.000 atau 96,81%.
  - a. Sub Kegiatan "Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia" dengan alokasi anggaran sebesar Rp.329.465.000 dengan realisasi sebesar Rp. 319.465.000 atau 96,81%.

**F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.227.000 dengan realisasi sebesar Rp.25.093.000 atau 99,47 %.

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.25.227.000 dengan realisasi sebesar Rp.206.848.500 atau 73,40%.
  - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa alokasi anggaran sebesar Rp. 25.227.000 dengan realisasi sebesar Rp. 25.093.000 atau 99,47%.

**19.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA**

**Tabel 3.75 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Lubai Ulu**

Tujuan	Sasaran				Capaian (%)
	Uraian	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	
Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam	Persentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi	85	90	100



Tujuan	Sasaran				Capaian (%)
	Uraian	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	
	Penyelenggaraan Pemerintahan				
		Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik	85	95	100
		Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan) yang ditindaklanjuti	85	92	100
		PKK Aktif	100	100	100
		Posyandu Aktif	100	100	100

### 19.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	Masih ada beberapa kegiatan yang belum optimal dilaksanakan sehingga belum dapat menyerap dana secara maksimal (anggaran masih ada yang tersisa)	Mengevaluasi terhadap kegiatan yang belum optimal dilaksanakan
2	Kekurangan SDM	Mengajukan usulan penambahan pegawai kecamatan ke BKPSDM

### 19.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Penghargaan dan prestasi yang diterima Kecamatan Lubai Ulu pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Penghargaan Sebagai Komitmen Capaian 100 % Desa Kelurahan yang memiliki Perdes Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Tahun 2024.



## 20.KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU

Urusan Kewilayahan diselenggarakan oleh perangkat daerah Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024, alokasi belanja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 3.907.728.607 dan terealisasi sebesar Rp. 3.668.439.600 atau 93,88 % dan kinerja keluaran (output) sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :

### a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 1.980.645.266 terealisasi sebesar Rp. 1.886.057.804 atau 95,22 % yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

### b. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 505.941.000 terealisasi sebesar Rp. 503.252.500 atau 99,57 % yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

## 20.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2024 Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 program dan 15 kegiatan, dan 37 sub kegiatan yaitu :

### A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Alokasi anggaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.3.057.818.958,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.922.921.000,00 atau 95,03 % program ini terdiri dari 8 kegiatan, dan 20 subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.176.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.880.200,00 atau sebesar 92,90 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.176.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.880.200,00 atau sebesar 92,90 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 5.150.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.689.900,00 atau sebesar 91,05 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen AKIP dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 1.979.285.266,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.884.697.804,00 atau sebesar 95,22 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.004.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.847.000,00 atau sebesar 96,08 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.004.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.847.000,00 atau sebesar 96,08 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas Operasional yang disediakan Jasa Jaminan Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 0 %.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 sebesar 0 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan capaian output/keluaran sebesar 0 %.
  - b. Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan - undangan dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 sebesar 0 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian output/keluaran sebesar 0 %.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 3.867.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.215.000 atau sebesar 83,12 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 110.906.278,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 109.752.500,00 atau sebesar 98,96 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 27,818.090,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.507.500 atau 84,50 %. Adapun Output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 2.244.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.080.000,00 atau sebesar 92,67 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang cetak dan Penggandaan yang disediakan, dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - e. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 16.800.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.800.000 atau sebesar 100%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - f. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 240.884.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 240.880.496,00 atau sebesar 99,99 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Bangunan Gedung atau Bangunan Kantor Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 401.360.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 399.650.000,00 atau sebesar 99,57 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya yang di sediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 1.892.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.884.000,00 atau sebesar 99,54 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 53.987.424,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.372.000,00 atau sebesar 63,67 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jenis komunikasi, sumber Daya Air dan listrik yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 10.150.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.090.000,00 atau sebesar 99,41 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 154.080.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 154.080.000,00 atau sebesar 100%. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Jasa Umum Pelayanan Kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 28.617.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.767.500,00 atau sebesar 76,06 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 13.412.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang



dipelihara/direhabilitasi dengan capaian output/keluaran sebesar 0%.

## **B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

Alokasi anggaran untuk program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 148.680.824,00 dengan realisasi sebesar Rp. 142.745.500,00 atau 96,01 % program ini terdiri dari 2 kegiatan, dan 3 subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
  - a. Subkegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta dengan anggaran sebesar Rp. 36.066.624,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.565.000,00 atau sebesar 98,61 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Prasarana dan fasilitas Pelayanan umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
  - a. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 56.153.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.820.500,00 atau sebesar 99,41 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp. 56.460.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 51.360.000,00 atau sebesar 90,97 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

## **C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

Alokasi anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 227.580.680,00 dengan realisasi sebesar Rp. 152.713.000,00 atau 88,89 % program ini terdiri dari 1 kegiatan, dan 2 subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
  - a. Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan



anggaran sebesar Rp. 27.092.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.090.000,00 atau sebesar 99,99 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Subkegiatan Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 200.488.280,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 125.623.000,00 atau sebesar 62,66 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

#### **D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

Alokasi anggaran untuk program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 292.907.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 291.135.000,00 atau 99,39 % program ini terdiri dari 1 kegiatan, dan 2 subkegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Urusan
  - a. Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 236.907.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 235.135.000,00 atau sebesar 99,25 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %
  - b. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 56.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 56.000.000,00 atau sebesar 100 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %



## E. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Alokasi anggaran untuk program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 162.740.345,00 dengan realisasi sebesar Rp. 158.875.000,00 atau 97,62.% program ini terdiri dari 1 kegiatan, dan 2 subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
  - a. Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 151.581.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 151.355.000,00 atau sebesar 99,85 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
  - b. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.11.158.645,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.520.000,00 atau sebesar 67,39 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Desa yang di Fasilitasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%

### 20.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tabel 3.76 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Empat Petulai Danguku

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama	a. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	a. Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	95	95	100
		b. Meningkatkan Kenyamanan bagi Umat beragama dalam menjalankan Ibadah	b. Persentase Konflik bernuansa SARA	0	0	100
2.	Meningkatnya Daya Saing Daerah	Meningkatkan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	BAIK	BAIK	100%
3.	Meningkatkan Kualitas Layanan	Meningkat Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Kualitas Pelayanan Publik	B	B	100%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	kepada masyarakat					
4.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintah	Meningkat Kualitas Sumber Daya Aparatur	Indeks Profesional Apartur	BAIK	BAIK	100 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Predikat SAKIP	CC	CC	100 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	Indeks Maturitas SPIP	BAIK	BAIK	

### 20.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Kurangnya Personil di bagian IT	Mengusulkan ke BKPSDM
2.	Kurangnya SDM ASN yg berkompeten	Diklat/Bimtek
3.	Sering terjadi pemadaman listrik sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari	Pihak terkait agar lebih meningkatkan pelayanan dan kinerja sehingga tidak terjadi pemadaman yg terus menerus

### 20.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Selama Tahun 2024 Kecamatan Empat Petulai Dangku menerima beberapa penghargaan antara lain :

- a. TOP 10 Inovasi Daerah Tingkat Kecamatan Lingkup Kabupaten Muara Enim



## 21.KECAMATAN PANANG ENIM

Urusan Penunjang Lainnya oleh Perangkat Daerah Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2024, alokasi anggaran Belanja Kecamatan Panang Enim sebesar *Rp. 3.361.748.281,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Stau Rupiah)* dengan Realisasi sebesar *Rp. 3.218.600.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)* atau sebesar 91,08 Persen, untuk Membiayai Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

### A. Belanja Operasional

Belanja Operasional dialokasikan sebesar sebesar *Rp. 3.361.748.281,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Stau Rupiah)* dengan realisasi sebesar *Rp. 2.648.267.542,- (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)* atau 88,50 Persen yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

### B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar *Rp. 445.164.800,-(Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Empat Delapan Ratus Rupiah)* dengan realisasi sebesar *Rp. 100.812.800,- (Seratus Juta Delapan Ratus Dua Belas Rubu Delapan Ratus Rupiah)* atau 77,34 persen yang diarahkan untuk membiaya kebutuhan arana dan prasarana yang mendukung pelayanan kinerja Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim.

## 21.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada tahun 2024 Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim melaksanakan sebanyak 6 (Enam) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) Subkegiatan yaitu :

### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar *Rp. 2.648.267.582,- (Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah)* dengan realisasi sebesar *Rp.2.156.876.300,- (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah)* atau sebesar 81,04 Persen, program ini terdiri dari 7 (Tujuh) Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Subkegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar *Rp. 42.212.800,- (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)*



dengan realisasi sebesar **Rp. 18.470.800,- (Delapan Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)** atau sebesar **43,08** Persen. Adapun Output dari sub kegiatan ini adalah 2 (Dua) Dokumen yang terdiri dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.19.510.400,- (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Empat Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 8.183.400,- (Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)** atau **41,09** Persen. adapun output dari subkegiatan ini berupa 1 (Satu) Dokumen yang terdiri atas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Panang Enim tahun 2024, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 9.999.800,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.164.000,- (Enam Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)** atau **61,06** Persen. Adapun Output adalah berupa 1 (satu) dokumen DPA-SKPD Kecamatan Benakat tahun anggaran 2024 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 12.702.600,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Enam Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.123.400,- (Empat Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah)** atau **32,05** Persen. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini berupa 1 (satu) laporan yang terdiri dari Dokumen LKPJ, LPPD, dan PK sebanyak 3 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar **Rp. 1.970.948.988,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan**



- Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.687.583.158,- (Satu Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah ) atau 85,6 Persen. Subkegiatan ini untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang direncanakan dengan target sebanyak 12 (Dua Belas) orang, dengan realisasi sebanyak 11 (Sebelas ) orang selama 12 (Sebelas) bulan atau sebesar 91,75 persen.*
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar *Rp. 12.192.300,- (Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.6.266.000,- (Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) atau 51,4 Persen.* Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 (Satu) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar *Rp. 8.100.000,- (Delapan Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.481.200,- (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 90,25 Persen.* Adapun Output dari sub kegiatan ini adalah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semester SKPD sebanyak 1 (Satu) Laporan, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar *Rp. 5.484.500,- (Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) atau 0 Persen.* Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah berupa asuransi kendaraan roda empat sebanyak 1 (Satu) unit, guna memenuhi amanat Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Subkegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan asuransi tidak dapat di perpanjang karena sudah jatuh tempo.
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
    - a. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya dengan anggaran sebesar *Rp. 43.848.800,- (Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.235.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu*

- Rupiah) atau 2,08 Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah berupa 20 setel pakaian dinas ASN dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.*
- b. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan *anggaran Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 0,- (Nol. Rupiah) atau 0 Persen.* Subkegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan biaya setor Diklat/bimtek/lainnya dibayarkan oleh OPD Bappeda Kabupaten Muara Enim dalam pelaksanaan Bimtek Penyusunan Rencana Strategis Tingkat Kecamatan di Yogyakarta selama 5 (Lima) hari sehingga penyerapan anggaran tidak terealisasi.
  - c. Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar *Rp. 31.848.800,- (Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.235.000,- (Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ) atau 3,9 Persen.* Subkegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan tidak ada sosialisasi peraturan perundang-undangan yang ada di wilayah Kecamatan Panang Enim sehingga penyerapan anggaran tidak terealisasi.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor dengan anggaran sebesar *Rp. 730.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu) dengan realisasi sebesar Rp. 720.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau 98,06 Persen.* adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 4 Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian output sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar *Rp. 122.072.000,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 103.510.000,- (Seratus Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) atau 84,08 Persen.* adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 15 Paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian output sebesar 100 Persen.
  - c. Subkegiatan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar *Rp. 47.194.300,- (Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 23.531.750,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 49,09 Persen.* adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 2 Paket

- bahan logistik kantor dengan capaian output sebesar 100 persen.
- d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar *Rp. 15.753.500,- (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)* dengan realisasi sebesar *Rp. 3.355.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)* atau *60,08 Persen*. adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 2 paket barang cetakan dan penggandaan dengan capaian output sebesar 100 persen.
  - e. Subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran *Rp. 216.290.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)* dengan realisasi sebesar *Rp. 189.123.092,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah)* atau *87,03 Persen*. adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 12 (Dua belas) laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD setiap bulannya dengan capaian output sebesar 100 Persen.
6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.
- a. Subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar *Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)* dengan realisasi sebesar *Rp. 2.150.000,- (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)* atau *76,08 Persen*. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 200 (Dua Ratus) lembar Materai dengan capaian output sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar *Rp. 17.239.800,- (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)* dengan realisasi *0 Persen*. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 2 (Dua) jenis terdiri dari Belanja tagihan air, dan belanja tagihan listrik, selama 12 (Dua belas) bulan. Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan adanya efisiensi penggunaan/pemakaian belanja air, dan listrik dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - c. Subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebesar *Rp. 105.120.000,- (Seratus Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)* dengan realisasi sebesar *Rp. 105.120.000,- (Seratus Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)* atau *100 Persen*. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 2 (Dua) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - a. Subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar *Rp. 11.779.594,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 10.336.500,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 87,07 persen.* Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 5 (Lima) unit kendaraan yang terdiri dari 1 (Unit) Kendaraan Dinas Mobil Camat, 1 (Unit) kendaraan dinas Sekcam, 3 (Tiga) unit kendaraan dinas roda 2 (Dua) dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
  - b. Subkegiatan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran *sebesar Rp. 12.870.000,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar 0 persen.* Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 1 (Satu) unit rehab ringan gedung kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

**B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik *sebesar Rp. 86.872.200,- (Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 62.536.000,- (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) atau sebesar 72 Persen,* program ini terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 4 (Empat) Subkegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
  - a. Subkegiatan Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta dengan anggaran sebesar *Rp. 16.531.800,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar 0 Persen.* Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 24 (Unit) prasaran dan sarana fasilitas pelayanan umum dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat.
  - a. Subkegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dengan anggaran sebesar *Rp. 21.400.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 21.400.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) atau 100 Persen.*



- Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 2 (Dua) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan dengan anggaran sebesar *Rp. 5.593.300,- (Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah)* dengan realisasi sebesar *Rp. 5.190.000,- (Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)* atau *92,08 Persen*. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 4 (Empat) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - c. Subkegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan yang lain yang dilimpahkan dengan anggaran sebesar *Rp. 43.347.100,- (Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)* dengan realisasi sebesar *Rp. 35.946.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)* atau *82,09 Persen*. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 6 (Enam) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

### **C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.**

Alokasi anggaran program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar *Rp. 279.664.800,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)* dengan realisasi sebesar *Rp. 196.663.300,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah)* atau *70,03 Persen*. Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 2 (Dua) subkegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa.
  - a. Subkegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dengan anggaran sebesar *Rp. 21.987.700,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)* dengan realisasi sebesar *Rp. 19.245.300,- (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah)* atau *87,05 Persen*. Adapun output/keluaran berupa 100 (Seratus) lembaga Kemasyarakatan, dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan anggaran sebesar *Rp. 257.677.100,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)* dengan realisasi sebesar *Rp. 177.368.300,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah)* atau *68,8 persen*. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 8 (Delapan) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.



#### **D. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum.**

Alokasi anggaran program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum sebesar *Rp. 5.316.385,- (Lima Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi 0 persen*. Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) subkegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
  - a. Subkegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah kecamatan dengan anggaran sebesar *Rp. 5.316.385,- (Lima Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi 0 persen*. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 1 (Satu) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

#### **E. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.**

Alokasi anggaran program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebesar *Rp. 299.485.300,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 209.450.400,- (Dua Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 69,99 persen*. Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 2 (Dua) subkegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.
  - a. Subkegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara republik Indonesia dengan anggaran sebesar *Rp. 203.655.300,- (Dua Ratus Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 191.800.400,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 94,02 persen*. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 30 (tiga puluh) orang anggota Paskibraka yang terlatih dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan dengan anggaran sebesar *Rp. 95.830.000,- (Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.17.650.000,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 40,64 persen*. Penyerapan realisasi anggaran tidak mencapai



target dikarenakan belanja perjalanan dinas diambil dari belanja perjalanan dinas subkegiatan Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 2 (Dokumen) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

#### **F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.**

Alokasi anggaran program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar *Rp. 42.142.100,- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah)* dengan realisasi sebesar *Rp. 8.631.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)* atau *28,78 persen*. Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 4 (Empat) subkegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
  - a. Subkegiatan koordinasi pelaksanaan pembangunan perdesaan di wilayah kecamatan dengan anggaran sebesar *Rp. Rp. 4.954.200,- (empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah)* dengan realisasi sebesar *Rp. 2.070.000,- (dua juta tujuh puluh ribu rupiah)* atau *41,78 persen*. Penyerapan realisasi anggaran tidak mencapai target dikarenakan belanja perjalanan dinas diambil dari belanja perjalanan dinas subkegiatan Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 6 (enam) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - b. Subkegiatan fasilitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar *Rp. 24.489.000,- (Dua Puluh empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)* dengan realisasi *0 persen*. Penyerapan realisasi anggaran tidak mencapai target dikarenakan belanja perjalanan dinas diambil dari belanja perjalanan dinas subkegiatan Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 1 (Satu) Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - c. Subkegiatan fasilitas penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa *sebesar 0 persen*. Penyerapan realisasi anggaran tidak mencapai target dikarenakan belanja perjalanan dinas diambil dari belanja perjalanan dinas subkegiatan Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 5 (Lima) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
  - d. Subkegiatan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan sebesar *Rp. 17.653.100,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus*



Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 8.631.000 (Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) atau 48,9 persen. Penyerapan realisasi anggaran Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 12 (Dua Belas) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

## 21.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tabel 3.77 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Panang Enim

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya peran kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan	a. Persentase urusan pemerintahan yang difasilitasi b. PKK Aktif c. Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum dalam kondisi baik, d. Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman dan keindahan) yang ditindaklanjuti,	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	BB	CC	CC

### 21.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Fasilitas Sarana dan Prasarana Kantor yang kurang	Mengenai fasilitas sarana dan prasarana akan diajukan anggaran ke OPD terkait
2.	Beberapa Kendaraan Dinas yang kurang layak	Mengenai adanya beberapa kendaraan dinas yang kurang layak akan diajukan penambahan anggaran pada tahun 2026
3.	Belum adanya sarana angkutan barang roda empat (Pick UP)	Mengenai belum adanya kendaraan angkutan barang akan diajukan penambahan anggaran pada tahun 2026

### 21.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Penghargaan Top 10 Inovasi Daerah pada Tingkat Kecamatan Tahun 2024 dan Penghargaan Peringkat 3 PKK Kecamatan Panang Enim Tahun 2024.



## 22. KECAMATAN SUNGAI ROTAN

### 22.1 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 dengan alokasi belanja sebesar Rp 5.082.133.363,- dan telah terealisasi sebesar Rp 4.639.647.970,- atau 91,3% dan kinerja keluaran sebesar 98% dengan rincian sebagai berikut :

#### A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 3.903.405.238,- dan telah terealisasi sebesar Rp.3.466.491.570,- atau 88,81% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang termasuk komponen belanja operasi.

#### B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp 1.178.728.125,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.173.156.000,- atau 99,53% yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

### 22.2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2024 Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan, yaitu::

#### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 4.082.500.53,- dengan Realisasi sebesar Rp. 3.697.485,970,- atau 90,60%. Program ini terdiri 8 (delapan) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 16.503.100,- dengan Realisasi sebesar Rp 13.750.000,- atau 83,30%. terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.756.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.755.000,- atau 100%. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar 100%.
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.061.400,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.061.000,- atau 100%.
  - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.472.200,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.472.000,- atau 100%.
  - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.723.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.723.000,- atau 100%.

- e. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6.489.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.739.000,- atau 57,60%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 2.129.796.892,- dengan Realisasi sebesar Rp 1.904.019.955,- atau 89,40%. terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.122.878.292,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.897.119.955,- atau 89,40%.
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 6.918.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.900.000,- atau 99,70%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 5.484.500,- dengan Realisasi sebesar Rp 5.145.250,- atau 93,80%. terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 5.484.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.145.250,- atau 93,80%.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 75.375.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 32.500.000,- atau 43,10%. terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 9.265.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 8.500.000,- atau 91,70%.
  - b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 56.390.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 24.000.000,- atau 42,60%.
  - c. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 9.720.000,- dan tidak terealisasi atau realisasi 0%.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 646.431.459,- dengan Realisasi sebesar Rp 597.240.982,- atau 92,40%. terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 42.664.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 23.579.900,- atau 55,3%.
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 172.873.259,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 171.539.600,- atau 99,2%.
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 63.826.700,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 49.151.500,- atau 77%.



- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 23.277.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 23.001.000,- atau 98,8%.
  - e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 16.800.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 16.170.000,- atau 96,3%.
  - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 326.990.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 313.798.982,- atau 96%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 453.685.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 452.196.000,- atau 99,70%. terdiri dari:
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 453.685.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 452.196.000,- atau 99,70%.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 116.865.960,- dengan Realisasi sebesar Rp 95.013.419,- atau 81,30%. terdiri dari :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 9.993.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.993.000,- atau 100%.
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 66.391.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 45.663.419,- atau 68,80%.
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 14.800.960,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 13,680,000,- atau 92,40%.
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 25.680.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 25.680.000,- atau 100%.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 638.358.626,- dengan Realisasi sebesar Rp 597.620.364,- atau 93,60%. terdiri dari:
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 9.360.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,- atau 16%.
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 49.981.026,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 21.710.364,- atau 43,40%.
  - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 579.017.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 574.410.000,- atau 99,20%.



## **B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp 217.510.150,- dengan Realisasi sebesar Rp 205.987.000,- atau 94,70%. Program ini terdiri 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Alokasi Anggaran Sebesar Rp 83.456.250,- dengan Realisasi sebesar Rp 83.250.000,- atau 99,80%. terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta dengan anggaran sebesar Rp. 83.456.250,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 83.250.000,- atau 99,80%.
2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Alokasi Anggaran Sebesar Rp 134.053.900,- dengan Realisasi sebesar Rp 122.737.000,- atau 91,60%. terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 62.540.300,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 58.398.000,- atau 93,40%.
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp. 71.513.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 64.339.000,- atau 90%.

## **C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp 278.344.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 239.955.000,- atau 86,20%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Alokasi Anggaran Sebesar Rp 278.344.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 239.955.000,- atau 86,20%. terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp. 36.144.400,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.450.000,- atau 78,70%.
  - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 242.199.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 211.505.000,- atau 87,30%.

## **D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar Rp 202.400.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 201.400.000,- atau 99,50%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 202.400.000,- dengan Realisasi sebesar



Rp 201.400.000,- atau 99,50%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 202.400.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 201.400.000,- atau 99,50%.

#### **E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp 262.815.776,- dengan Realisasi sebesar Rp 256.870.000,- atau 97,70%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 262.815.776,- dengan Realisasi sebesar Rp 256.870.000,- atau 97,70%. terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 207.870.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 207.770.000,- atau 100%.
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 54.945.276,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 49.100.000,- atau 89,40%.

#### **F. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp 38.562.900,- dengan Realisasi sebesar Rp 37.950.000,- atau 98,40%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 38.562.900,- dengan Realisasi sebesar Rp. 37.950.000,- atau 98,40%. terdiri dari :
  - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 38.562.900,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 37.950.000,- atau 98,40%.

### 22.3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Sungai Rotan dapat dilihat pada matrik berikut ini :

**Tabel 3.78 Matrik Capaian Indikator Kinerja Kec. Sungai Rotan**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sungai Rotan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
			Persentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi	100%	100%	100%
			PKK Aktif	100%	100%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik	85%	85%	85%
			Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	CC	CC

#### 22.4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan Sungai Rotan pada Tahun 2024 menemui beberapa permasalahan dan solusinya adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Masih ada desa yang belum memiliki pos kambling untuk menjaga keamanan desa	Dibangun pos kambling untuk ronda menjaga keamanan desa
2.	Masih banyak binatang kaki empat yang berkeliaran di jalan umum desa	Digalakkan himbauan bahwa binatang kaki empat harus dikandangkan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Muara Enim No.300/89/Satpol PP-IV/2024 Tgl. 1 Maret 2024 Tentang Penertiban Hewan Ternak Berkaki Empat
3.	Masih ada Kepala Desa yang ingin mengganti perangkat desa secara sepihak.	Pembinaan bahwa pergantian perangkat desa harus mempedomani Permendagri No.83 Tahun 2015 dan Permendagri no. 67 Tahun 2017, serta Perda Muara Enim No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
4.	Penyampaian Pelaporan dan Pertanggungjawaban Desa tidak tepat waktu	Pendampingan dan pembinaan terhadap pemerintah desa lebih intensif
5.	Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Camat sudah tidak layak pakai, kendaraan yang sering dipakai untuk menunjang kegiatan operasional kantor, sudah tua sering mogok dan rusak walaupun sudah dilakukan perawatan dan pemeliharaan.	Penghapusan untuk kendaraan dinas lama dan akan dianggarkan pada tahun 2026 untuk kendaraan dinas yang baru.

#### 22.5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

- 1) Juara 1 Mujawwad Putra pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- 2) Juara 1 Tafsir Arab Putri pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- 3) Juara 1 Tafsir Inggris Putri pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- 4) Juara 2 Tafsir Inggris Putra pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- 5) Juara 2 Tilawah Remaja Putra pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- 6) Juara 2 Tilawah Remaja Putri pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- 7) Juara 2 KTI Putri pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- 8) Juara 2 Murattal Dewasa Putri pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- 9) Juara 3 Murattal Remaja Putra pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- 10) Juara 3 KTI Putra pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- 11) Juara 3 30 Juz Putra pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- 12) Juara Harapan Tilawah Dewasa Putra pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- 13) Juara Harapan Murattal Remaja Putri pada lomba MTQ tingkat Kabupaten
- 14) Juara 1 lomba Galeri Pelangi dan Paredi pada Peringatan Hari Kesatuan



Gerak PKK Kabupaten Muara Enim

- 15) Juara 2 lomba TTG kategori umum pada Acara Lomba Wajik Kreasi, Lomba Lagu Daerah, Pameran UP2K dan Lomba TTG dalam Melestarikan Adat, Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim.
- 16) Juara 1 lomba lagu daerah pada Acara Lomba Wajik Kreasi, Lomba Lagu Daerah, Pameran UP2K dan Lomba TTG dalam Melestarikan Adat, Seni dan Budaya Kabupaten Muara Enim.
- 17) Juara 2 bintang vokalis pada Festival Kasidah Rebana dan Bintang Vokalis Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2024.



### 3.7. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Pakaian dan Atribut Sekolah Gratis (Anak-Anak Mendapatkan Pendidikan Gratis)	Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 8 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Muara Enim	Pada setiap tahun ajaran baru, penggunaan dana BOS Daerah diprioritaskan terlebih dahulu untuk membiayai fasilitas penunjang belajar bagi peserta didik berupa pakaian seragam sekolah harian dan sepatu sekolah.
2.	Kesehatan Gratis (Kesehatan Mudah dan Gratis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2019 tentang Program Berobat Mudah dan Gratis bagi Masyarakat Kabupaten Muara Enim</li> <li>b. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Berobat Mudah dan Gratis</li> </ul>	Penyelenggaraan Program Berobat Mudah dan Gratis bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Muara Enim agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Selanjutnya juga program ini untuk menjamin masyarakat Kabupaten Muara Enim mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar secara mudah dan gratis.
3.	Asuransi Kematian (Rakyat Hidup Aman, Damai dan Agamis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2019 tentang Asuransi Kematian Bagi Masyarakat</li> <li>b. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Asuransi Kematian dan Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kematian Bagi Masyarakat</li> </ul>	Program ini bertujuan untuk meringankan beban ahli musibah dan untuk memotivasi masyarakat Kabupaten Muara Enim supaya tertib administrasi terkait dengan pelaporan masyarakat yang meninggal dunia.



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
4	Beasiswa (Anak-Anak Mendapatkan Pendidikan Gratis)	Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Berprestasi dan/atau Tidak Mampu Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi	Program ini bertujuan sebagai pemberian stimulan kepada peserta didik agar termotivasi untuk berprestasi guna mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Muara Enim.
5.	Pembinaan Anak-Lansia dan BLT Anak-blnt Lansia (Bantuan Langsung Kepada Keluarga Miskin)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia</li> <li>b. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia</li> </ul>	Program ini bertujuan untuk Mewujudkan perlindungan dan pelayanan sosial dasar dalam rangka membantu kehidupan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia secara wajar; Mewujudkan pembinaan dan kemandirian terhadap Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia, menjamin pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia dilaksanakan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu sehingga membantu kehidupannya secara wajar; Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pembinaan Anak Yatim, Anak Piatu, Anak Yatim Piatu, Anak Fakir Miskin dan Lanjut Usia; dan Membantu penurunan jumlah Anak Fakir Miskin.



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
6	Umrah Gratis dan Wisata Religi (Rakyat Hidup Aman, Damai dan Agamis)	Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2019 tentang Umrah dan Wisata Religi bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim	Program ini bertujuan meningkatkan wawasan dan terpenuhinya kebutuhan rohani dalam rangka pembangunan mental spiritual masyarakat.



### 3.8. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	I	Sekretaris Daerah	<p><u>Bagian Hukum:</u> Program bantuan hukum belum maksimal dirasakan oleh masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum serta sosialisasi yang dilakukan kurang masif.</p>	<p>Program bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin atau tidak mampu akan ditingkatkan secara bertahap pada tahun-tahun mendatang, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sementara itu, sosialisasi program bantuan hukum telah dilaksanakan di setiap kecamatan dan desa, dengan peserta sosialisasi terdiri dari Kepala Desa, anggota BPD, serta tokoh masyarakat, dan akan terus dilakukan setiap tahun.</p>
			<p><u>Bagian Tata Pemerintahan:</u> Penyelesaian tapal batas Kabupaten Muara Enim dengan kabupaten yang berbatasan langsung sesegera mungkin untuk diselesaikan demi adanya kepastian hukum antara kedua belah pihak.</p>	<p>Pada tahun 2024, penyelesaian tapal batas Kabupaten Muara Enim dengan kabupaten yang berbatasan langsung telah dilakukan melalui pemasangan pilar batas sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2019. Pemasangan tersebut mencakup 22 patok pilar permanen di sub-segmen Kecamatan Benakat, Kabupaten Muara Enim, yang berbatasan dengan Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI. Selain itu, sebanyak 40 patok pilar batas permanen juga telah dipasang di Kelurahan Kecamatan Lawang Kidul.</p>



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	<p>Beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Muara Enim untuk mempermudah akses pelayanan dokumen kependudukan, seperti Rendang Pedas Andalan (Rekam Data Penyandang Disabilitas Anak dan Lansia), Belah Dadoku (Begitu Lahir Dapat Dokumen Kependudukan), dan Artis Dukcapil (Antar Gratis Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil) diapresiasi oleh Komisi I sebab manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan diharap untuk meningkatkan program inovasi tersebut diperluas sampai ke desa.</p> <p>Sosialisasi inovasi yang sudah dilakukan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Muara Enim yang belum mendapat identitas kependudukan.</p> <p>Menginventarisir sarana dan prasarana pendukung pelayanan data kependudukan di setiap kecamatan.</p>	Pada tahun 2024 telah dilakukan sosialisasi terhadap inovasi yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi di 6 Kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi/publikasi inovasi melalui radio, banner dan leaflet. Telah dilakukan inventarisasi sarana/prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan di seluruh kecamatan.



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<p>Dinas Pemdes agar dapat memfasilitasi desa yang belum memiliki peta desa <i>karto metrik</i> demi mempercepat penegasan batas desa.</p> <p>Sasaran dan tujuan dari program-program seperti peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa dan peningkatan usaha ekonomi masyarakat desa belum memenuhi harapan dengan masih banyaknya permasalahan aparatur desa yang belum menguasai tugas dan fungsinya.</p> <p>Aparat desa juga dinilai belum menguasai langkah pembuatan peraturan desa.</p> <p>Dalam menjaga wilayah Kabupaten Muara Enim yang berbatasan hampir dengan seluruh dengan kabupaten/kota di Sumatera Selatan, ditemukan bahwa masih ada batas wilayah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Guna mendapatkan kepastian hukum dan tidak dirugikannya Kabupaten Muara Enim, ditegaskan agar eksekutif untuk lebih maksimal dalam penyelesaian batas-batas wilayah sampai ke pemerintah pusat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Sosialisasi pembuatan peta desa kartometrik di setiap kecamatan.</li> <li>2. Menyelenggarakan Bimtek dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara, contohnya Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>3. Menyelenggarakan Bimtek dan Pelatihan Keperangkat desa, contohnya Bimtek Kepala Desa. Kaur Keuangan terkait Siskeudes</li> <li>4. Memperjelas Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Desa khususnya terkait pengembangan ekonomi dan potensi desa</li> <li>5. Peningkatan Kemandirian Desa baik dalam Anggaran Maupun dalam Manajemen Pemerintahan Desa</li> </ol>



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			<p>Dalam penataan wilayah sesuai perundang-undangan, adanya kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) serta adanya penetapan Hak Guna Usaha (HGU) kawasan hutan produksi, hutan lindung dan hutan industri, perlu adanya sosialisasi ke masyarakat dan badan usaha agar tidak terjadinya tumpang tindih dan pemanfaatan yang bukan peruntukannya.</p> <p>Untuk pemerintahan desa, sesuai dengan kewenangannya, maka dituntut kemandirian desa baik dalam anggaran maupun di dalam manajemen pemerintahan desa. Maka dinilai perlu secara kontinyu OPD terkait melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelayanan publik tingkat desa lebih optimal dalam mencapai sasaran dan hakikat otonomi pemerintahan desa bisa terwujud.</p> <p>Ditegaskan kepada eksekutif untuk segera menginventarisir serta penyelesaian batas wilayah antar desa yang dimaksud demi kepastian hukum batas antar desa yang ada di Kabupaten Muara Enim.</p>	



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Dinas Perhubungan	<u>Keberadaan mobil batubara yang parkir di jalan Sultan Mahmud Badarudin II: Pj. Bupati</u> dihimbau untuk dapat menertibkan dan memberikan peringatan kepada pihak perusahaan atau transfortir agar tidak parkir/stop di jalan lintas dalam wilayah Kabupaten Muara Enim.	Pada Tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim telah melakukan penertiban terhadap Kendaraan Angkutan Batubara di jalan SMB II . Terhadap Pengalihan ke Jalan Baru di Enim 3 belum dapat dilakukan dikarenakan Dinas PUPR belum merekomendasikan, mengingat kekuatan Jembatan dan Tonase jalan belum layak untuk di lewati Kendaraan Berat.
		Dinas Komunikasi dan Informatika	Jaringan internat di seluruh desa dalam Kabupaten Muara Enim terdapat 52 desa yang belum ada jaringan internet yang memadai (sinyal lemah dan tidak ada sinyal sama sekali).  Dinas terkait diharap untuk membuat langkah-langkah kerjasama dengan pihak <i>provider</i> dalam mendukung proses kegiatan belajar (daring) dan untuk memenuhi standar pelayanan secara <i>online</i> di seluruh kecamatan.	1. Terkait dengan desa yang belum ada jaringan internet yang memadai (Sinyal Lemah dan tidak ada sinyal), Dinas Kominfo SP telah melakukan langka-langka dengan koordinasi ke Kementerian Kominfo melalui Direktorat telekomunikasi dan memberikan data teknis beserta pendukung desa-desa yang masih dalam kondisi sinyal lemah dan blankspot. Sebagai tindak lanjut telah di lakukan survey bersama dengan penyelenggara telekomunikasi/ provider seperti Telkomsel, Indosat dan Smartfreen ke desa-desa yang potensial untuk di bangun Base Transceiver Station (BTS) baru. Dalam hal pembangunan



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
				<p>BTS baru merupakan kewenangan provider dengan memperhatikan prinsip <i>Business to Business</i>.</p> <p>2. Dalam mewujudkan desa digitalisasi, pada tahun anggaran 2024 Dinas Kominfo SP Kab Muara Enim telah menganggarkan belanja internet desa untuk 256 desa dan kelurahan. Dinas Kominfo SP juga telah memberikan program Internet V-Sat untuk di desa-desa yang memiliki potensi pariwisata di lima lokasi yaitu di Desa Bedegung (wisata air terjun curup tenang), Desa Karya Mulia (wisata kampung malaka), Desa Sumber Rahayu (wisata betung berseri), Desa Pinang Banjar (wisata air) dan Desa Ujan Mas Baru (wisata danau emas)</p>
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pelaku usaha/perusahaan yang belum mengantongi izin supaya dinas terkait dapat menginventarisir perusahaan tersebut sehingga tidak merugikan pemerintah Kabupaten Muara Enim.	Terkait dengan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM RI melalui aplikasi OSS RBA telah memberikan kemudahan dalam berinvestasi bagi pelaku usaha dengan penerbitan izin yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha secara online. DPMPSTP telah melakukan kegiatan sosialisasi pemanfaatan



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
				aplikasi OSS RBA dalam hal penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha.
			Memperketat perizinan pasar modern (mini market) di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muara Enim yang berdampak terhadap UKM dan pedagang kecil.	Dalam hal penerbitan perizinan berusaha, pemerintah Kabupaten Muara Enim berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. DPMPTSP telah melakukan kegiatan sosialisasi perizinan berusaha bagi pelaku usaha melalui aplikasi OSS RBA.
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Mengenai masih banyaknya kekosongan jabatan dalam ruang lingkup pemerintah Kabupaten Muara Enim, agar segera mempercepat pembentukan panitia seleksi sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BKPSDM telah membentuk Panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), namun belum mendapat rekomendasi dari Mendagri untuk pelaksanaan seleksinya.</li> <li>2. BKPSDM telah berkoordinasi dengan BKN dalam penerimaan CPNS dan PPPK, dan berhasil mendapatkan alokasi formasi PNS sebanyak 856 dan PPPK sebanyak 6.414 serta diizinkan untuk melakukan optimalisasi terhadap formasi belum terisi sehingga penyerapan penerimaan pegawai baru dapat dimaksimalkan.</li> </ol>
			Masih kurangnya kuota penerimaan formasi CPNS dan PPPK dari kebutuhan yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim sehingga pihak terkait agar dapat lebih banyak berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).	
			Meminta kepada Pj. Bupati untuk mengevaluasi OPD yang kinerjanya tidak bisa memenuhi target RPJMD tahun 2018-2023.	



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Dinas Polisi Pamong Praja	Penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh tim yustisi belum maksimal dikarenakan keterbatasan volume kegiatan yang hanya 6 kali dalam 1 tahun sehingga hal ini tentu berpengaruh pada penindakan pelaku pelanggaran peraturan daerah.	Untuk kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Lingkup Kabupaten Muara Enim yang dilakukan oleh Tim Yustisi telah ditambahkan volume kegiatan dari tahun sebelumnya. Pelaksanaan yustisi pada tahun 2024 dilakukan sebanyak 12 kali.
		Badan Kesbang dan Politik	Terhadap organisasi masyarakat yang tidak jelas visi dan misi pembentukannya untuk dilakukan pembinaan, penertiban dan apabila menyimpang dari ideologi dan tujuan awal pembentukannya untuk dicabut izinnya.	Melakukan pemeriksaan/ Evaluasi terhadap keabsahan dokumen yang disampaikan dan diserahkan sebagai syarat untuk pelaporan dan pendataan atas pembentukan dan keberadaan dan susunan kepengurusannya di wilayah Kabupaten muara Enim. disampaikan penjelasan kepada pimpinan/ketua dan pengurus atas pentingnya memahami visi dan misi ormas yang akan di pimpinnya agar tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945 melakukan pantauan langsung terhadap keabsahan dokumen dan kegiatan ormas tersebut. serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum Jika ditemukan ormas yang melanggar aturan atau melakukan tindak pidana diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundangan undangan dan di usulkan ke Kementerian Bidang Hukum Dan Hak



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
				Azasi Manusia atas Pembekuan, Pencabutan dan Pembubaran Organisasi Masyarakat tersebut.
			Mengevaluasi dan pendataan kepengurusan organisasi masyarakat sehingga tidak tumpang tindih dalam kepengurusan yang valid.	<p>Dilakukan pendataan secara rinci terhadap semua ormas yang terdaftar dan masih aktif sesuai dgn surat keputusan kepengurusan yg di sah kan oleh pimpinan ormas baik DPP, DPD dan DPW. Data yang dikumpulkan mencakup informasi seperti nama, alamat, struktur kepengurusan, dan bidang kegiatan ormas.</p> <p>Pemetaan bidang kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pendirian ormas untuk menghindari tumpang tindih kepengurusan dan kegiatan. Dengan demikian, setiap ormas memiliki ruang yang jelas untuk beroperasi tanpa mengganggu ormas lain serta memahami tugasnya dan memastikan setiap anggota tahu perannya masing-masing.</p> <p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan dan kepengurusan ormas di 22 kecamatan. Pada tahun 2024 sebanyak 145 Ormas yang terdaftar dan aktif dari sebelumnya berejumlah 487 ormas</p>



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Camat se-Kabupaten Muara Enim	Program pemeliharaan lampu jalan di seluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim yang belum maksimal karena masih banyak ditemukan titik-titik lampu jalan yang rusak tidak kunjung diperbaiki.	Terhadap rekomendasi DPRD kepada OPD Kecamatan, maka beberapa kecamatan telah menganggarkan pemeliharaan lampu jalan di tahun 2024.
2.	II	Dinas Perdagangan	Mengoptimalkan pemanfaatan ruang petak pasar inpres yang kosong agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan ruang/petak tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.	<p>Terkait optimalisasi penggunaan ruang petak pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah, Pihak eksekutif sependapat dengan masukan Komisi II DPRD Kabupaten Muara Enim. saat ini dilakukan beberapa langkah dalam upaya optimalisasi pendapatan asli daerah, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan serta revitalisasi gedung B (Pasar Inpres) dan gedung C masuk dalam program kegiatan skala prioritas Kabupaten Muara Enim</li> <li>2. Membangun tangga penghubung antara Gedung B (Pasar Inpres) dengan Gedung A pada tahun 2025;</li> <li>3. Dilakukan evaluasi kembali pengguna ruang/petak yang kosong.</li> </ol>
			Mengingatkan Dinas Perdagangan yang membidangi pertambangan untuk segera	Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tentang Panas Bumi, ada 2 (dua) pemanfaatan panas bumi,



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			<p>melakukan inventarisir dan kajian terhadap pemanfaatan panas bumi yang ada di Kabupaten Muara Enim dan dilaporkan ke komisi teknis.</p>	<p>yakni Pemanfaatan Langsung dan Pemanfaatan Tidak Langsung. Pemanfaatan Langsung yakni kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi secara langsung tanpa melakukan proses pengubahan dari energi panas/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik seperti untuk wisata air panas/pemandian air panas di Kabupaten Garut dan tempat lainnya untuk roasting kopi, untuk pengolahan gula aren, pasteurisasi media tanam, pengeringan produk pertanian dan yang lainnya.</p> <p>Saat ini Disperindag ESDM telah membuat kajian (study kelayakan) untuk pemanfaatan langsung untuk akses keekonomian di tahun anggaran 2024. Kedepannya akan dibuatkan rencana untuk pembuatan Design Engineering Detail (DED) untuk pemanfaatan langsung panas bumi.</p> <p>Kendala untuk pemanfaatan langsung saat ini adalah lokasi yang ada untuk pemanfaatan langsung berada di Lokasi Kawasan Hutan Lindung (HL), dimana untuk mendapatkan akses mengelola pemanfaatan langsung ini harus memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari</p>



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
				Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan koordinasi yang intensif untuk perizinan tersebut
		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Komoditas tanaman pangan memiliki peranan pokok dalam pemenuhan pangan maka dari itu produksi dan produktivitas tanaman pangan harus dilakukan secara integratif dari hulu hingga hilir. Salah satu kendala yang dihadapi petani adalah pemenuhan kebutuhan sarana produksi maka diminta kepada pemerintah daerah agar dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan bagi petani.	Untuk pemenuhan kebutuhan sarana produksi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan secara integratif dari Hulu ke hilir Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim telah menindaklanjutinya melalui Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B berupa belanja diserahkan kepada masyarakat berupa : Combine harvester (2 unit), Motor Roda 3/Bentor (10 unit), Cultivator (6 unit), Handtraktor (29 unit), pembangunan RMU (1 unit), Pompa Air (8 unit), Power Tresher ( Unit), waring (100 rol) dan Jonder/Traktor Roda 4 (11 unit).



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
				<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani belanja Brang diserahkan kepada masyarakat berupa Pemanagan Jalan Usaha Tani sepanjang 16.516,64 meter</li> <li>3. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi Usaha Tani belanja diserahkan kepada masyarakat berupa : Pembangunan irigasi air tanah dangkal (2 unit), Pembangunan irigasi tersier (990,98 M3), Pembangunan Sprinkle ( 1 unit), Pembangunan Embung (293,23 M3) dan Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (17 Paket).</li> <li>4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit belanja diserahkan kepada masyarakat berupa pembangunan DAM Parit sebanyak 2 unit</li> <li>5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lainnya belanja diserahkan kepada masyarakat (DAK Fisik Penugasan) berupa karung (3250 lembar), Mesin jahit Karung (13 Unit), Timbangan (13 Unit), Mesin Cetak Pelet (13 Unit), Mesin penepung/mesin Disk Mill (13 Unit), Motor</li> </ol>



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
				<p>Roda 3 (13 Unit), Alat dan Mesin pendukung Olahhan pakan Konsentrat Unggas (13 Unit), Pembangunan Gudang Olahhan pakan Unggas (13 Unit)</p> <p>6. Penjaminan Kemurnian dan kelestarian SDG Hewan dan tanaman belanja diserahkan kepada masyarakat berupa kegiatan pengembangan Instensifikasi Tanaman padi dan palawija Berupa bantuan Benih Padi Sebar (BR) sebanyak 1600 Ha x 2 musim tanam</p>
			<p>Pembinaan terhadap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Muara Enim agar dapat ditingkatkan seperti peningkatan produk-produk olahan dengan harapan masyarakat dapat menerima manfaat seperti program asuh dan program ahli gizi untuk anak-anak sekolah yang ada di Kabupaten Muara Enim.</p>	<p>Untuk Pembinaan terhadap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Muara Enim agar dapat ditingkatkan seperti peningkatan produk-produk olahan dengan harapan masyarakat dapat menerima manfaat seperti program asuh dan program ahli gizi untuk anak - anak di sekolah yang ada di Kabupaten Muara Enim, Dinas Tanaman pangan Hortikultura telah menindaklanjutinya melalui sub kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan berupa kegiatan sosialisasi pengolahan Hasil (Pelaku Usaha) sebanyak 45 orang dan Sosialisasi produk ASUH sebanyak 45 orang</p>



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			Untuk penyaluran pupuk yang bersubsidi dapat dilakukan melalui BUMDES sesuai dengan desa masing-masing.	Untuk Penyaluran Pupuk yang bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan Juknis Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kementerian Pertanian, Pupuk Bersubsidi yang diusulkan melalui Program E-RDCK yang alokasinya ditentukan oleh Kementerian Pertanian RI. Tahun 2024 Alokasi Pupuk Subsidi telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 874/KPTS/DTPHP/2023 dengan rincian : Urea (917.600 Kg) dan NPK (981.300 Kg) Untuk 18 Kecamatan sesuai dengan Alokasi yang diterima dari Kementerian Pertanian dan Selanjutnya dilakukan Realokasi untuk mengoptimalkan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Masing-masing Kecamatan.
		Dinas Ketahanan Pangan	Program peningkatan ketahanan pangan: Perlunya penganggaran dalam upaya pengawasan daerah rawan pangan.	Terhadap perlunya penganggaran untuk pengawasan daerah rawan pangan Dinas Ketahanan Pangan sangat setuju untuk menyediakan anggaran dalam upaya pengawasan daerah rawan pangan.
			Upaya peningkatan ketahanan pangan: Memberikan masukan agar di buat analisis	Terkait analisis kerawanan pangan yang ada di Kabupaten Muara Enim, Dinas Ketahanan



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			terhadap kerawanan pangan yang ada di Kabupaten Muara Enim.	Panganan akan membuat analisis dan jika telah selesai akan segera dipublikasikan.
		Dinas Perikanan	Melakukan pemasaran bibit benih ikan lokal yang ada di Kabupaten Muara Enim dari kolam budidaya menjadi kolam khusus dengan harapan untuk meningkatkan penghasilan para peternak ikan.	Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim sehingga kami kedepan akan lebih memaksimalkan lagi kinerja dinas dengan memproduksi benih ikan lokal selain dari menjalin kerja sama dengan UPT Pusat (BPBAT) Jambi, juga akan merencanakan memenuhi fasilitas pembenihan yang ada di Lokasi UPTD BBI milik Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim.
			Program pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan dinilai harus optimal lagi sehingga target terealisasi kinerja tercapai, untuk itu diperlukan perencanaan yang lebih baik.	Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim akan melanjutkan kinerja Dinas Perikanan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada dan menggerakkan para pembenih ikan (UPR) pembudidaya ikan dan petugas lapangan (Penyuluh Perikanan) untuk melakukan pembinaan.
		Dinas Perkebunan	Dalam program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan, diharapkan kepada Dinas Perkebunan untuk terus melakukan promosi produksi perkebunan agar komoditi hasil perkebunan Kabupaten Muara Enim	Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2024 telah mengikuti dan berperan serta dalam Event-Event Promosi Hasil Produksi Perkebunan baik itu di Tingkat Nasional maupun di Tingkat Regional diantaranya Gelaran Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) di ICE BSD



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			dapat diketahui oleh publik di luar Kabupaten Muara Enim.	Tangerang, KTNA Agro Expo Tahun 2024 di Tabanan - Bali, Pameran Terpadu Investasi-Perdagangan Pertanian-Koperasi UMKM dan Pariwisata Tahun 2024 di Batam Kepulauan Riau dan Festival Kopi Lahat 2024 (Regional) di Lahat - Sumatera Selatan.
			Dalam mendukung komoditi perkebunan, dibutuhkan pengembangan bibit unggul perkebunan yang memang nyata menjadi usaha petani perkebunan masyarakat dan disesuaikan dengan geografis yang dimiliki Kabupaten Muara Enim.	Pada Tahun 2024, Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim melakukan langkah besar untuk mewujudkan pengembangan bibit unggul perkebunan lokal yang spesifik lokasinya merupakan varietas unggul lokal yaitu Pohon Induk Terpilih Kopi Gerudak Semendo dengan bekerjasama dengan Pusat Standarisasi Instrumen (PSI) Perkebunan Bogor, yang harapannya kedepannya tercapainya rencana pembangunan Kebun Entress Kopi dan Kebun Produksi Kopi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu
		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
		<i>Pekerjaan Umum</i>	Program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2023, agar diprioritaskan pada anggaran tahun 2024	Deskripsi tindak lanjut dari setiap program yang diprioritaskan dideskripsikan pada 7 point program berikut:
			Sebelum dianggarkannya suatu kegiatan, harus ada perencanaan terlebih dahulu seperti survei lokasi agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang ada dan tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat.	Perencanaan telah dilakukan sesuai tahapan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan anggaran yang tersedia.
			Pengawasan pekerjaan pembangunan harus ditingkatkan untuk menghasilkan mutu dan kualitas yang baik.	Pengawasan pekerjaan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi
			Terhadap program kegiatan yang sudah melalui proses DED pada tahun anggaran 2022, diinstruksikan kepada eksekutif untuk segera ditetapkan menjadi kebijakan anggaran tahun 2023 seperti pembuatan jembatan di Kecamatan Empat Petulai Dangku.	Program yang sudah melalui DED pada tahun anggaran 2022 sudah ditetapkan menjadi kebijakan anggaran tahun 2023 seperti pembuatan jembatan di Kecamatan Empat Petulai Dangku sesuai dengan rekomendasi
			Dalam program pembangunan jalan dan jembatan, perlu adanya acuan pelaksanaan pembangunan dengan mempertimbangkan	Pembangunan jalan dan jembatan sudah dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat dan



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			kebutuhan masyarakat dan penguatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya menjadi sarana di tengah masyarakat dalam mendorong peningkatan ekonomi di tengah masyarakat.	penguatan ekonomi guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat.
			Terhadap pembangunan dan pemeliharaan yang menyangkut PU Bina Marga, diperlukan kualitas sumber daya manusia tenaga pengawas dalam kegiatan tersebut. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Beztek dan gambar yang dapat dipertanggungjawabkan.	Seluruh kegiatan pembangunan dan pemeliharaan telah dilakukan pengawasan untuk memenuhi tanggung jawab.
			Dalam upaya mendorong program dan kegiatan OPD Dinas Tanaman Pangan, Holtikultur dan Peternakan dan untuk mendukung terciptanya swasembada pangan, maka didorong untuk terus ditingkatkan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigrasi rawa dan pengairan lainnya.	Program SDA telah dilaksanakan dengan kegiatan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten.
		<i>Tata Ruang</i>	Perda RT RW merupakan dokumen penting untuk menata kawasan strategis yang akan didesain oleh pemerintah Kabupaten Muara	Perda RT RW telah disusun dan diperbaharui apabila terdapat perubahan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan amanat yang berlaku.



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			Enim. Maka dari itu, Pj. Bupati diminta untuk memperketat izin penggunaan ruang dan wilayah Kabupaten Muara Enim agar sesuai dengan peraturan daerah sekaligus menertibkan izin sesuai dengan amanat Perda RT RW, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.	
		Dinas Lingkungan Hidup	Pj. Bupati untuk mengoptimalkan pendidikan lingkungan hidup mulai sejak dini agar menanamkan perilaku hidup yang sadar cinta lingkungan.	Dalam rangka menanamkan perilaku yang sadar dan cinta lingkungan sejak usia dini, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Lingkungan Hidup telah memprogramkan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penilaian sekolah adiwiyata dengan mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P.52/MENLHK/SETJEN/KUM -1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: 53/MENLHK/SETJEN/KUMI/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata. Sampai dengan Tahun 2024 Sekolah di Kabupaten Muara Enim yang telah mendapat penghargaan Adiwiyata adalah sebagai



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
				berikut: 1. Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten sebanyak 242 Sekolah 2. Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi sebanyak 105 Sekolah 3. Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional sebanyak 35 Sekolah 4. Sekolah Adiwiyata Tingkat mandiri sebanyak 8 Sekolah
			Mencermati upaya pengembangan terbuka hijau (RTH) sebagai upaya untuk menghindari alih fungsi lahan produktif dan tetap mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Muara Enim. Diminta kepada pemerintah daerah supaya ruang terbuka hijau yang sudah dibangun agar mendapat perawatan dan pembersihan serta dilengkapi dengan sarana penerangan yang memadai.	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diatur melalui Perda RT RW dan Perbub No 1 Tahun 2024 tentang RDTR Kawasan Perkantoran Muara Enim Tahun 2024-2044. Perawatan untuk Tahun 2024 telah dilaksanakan pembersihan sebanyak 2 (dua) kali, dibulan Februari dan di Bulan Agustus Tahun 2024. Sedangkan untuk prasarana penerangan akan dikoordinasikan pemenuhannya melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman melalui penyedia sarana PSU.
			Perlu diatur tentang pengelolaan dan dibuat regulasi terkait fungsi penanganan sampah jika memungkinkan dengan perubahan teknologi PLTSA melalui atau antara pemerintah dan pihak swasta.	Terhadap Pengelolaan Sampah telah diterbitkan beberapa Peraturan sebagai berikut : - Peraturan daerah nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah - Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			<p>Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, khususnya bidang kebersihan, maka perlu ada peningkatan kebersihan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran untuk penanggulangan sampah.</p>	<p>Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah 2018-2025 - Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengurangan Pemakaian Kantong Plastik. Saat ini sedang disusun Peta Jalan (RoadMap) Rencana Aksi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026 kedepan akan dibuat Pemerintah Kabupaten Pembuatan dan pengelolaan regulasi terkait fungsi penanganan persampahan dan Upaya Pembangunan teknologi PLTSA. Muara Enim berupaya menggandeng Investor untuk Pembangunan PLTSA.</p> <p>Sebagai amanat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tenaga kebersihan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan akan diikutsertakan dalam pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM terhadap Peningkatan Sarana dan Prasaran Penanggulangan Persampahan diperlukan dukungan anggaran paling sedikit 3% dari APBD sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala</p>



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
				Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia
			Agar penanggulangan sampah menjadi tanggung jawab di setiap kecamatan-kecamatan.	Terhadap Penanggulangan sampah di Kecamatan-kecamatan akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan sesuai dengan Keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan penanganan sampah desa disetiap Kecamatan dapat dikelola oleh BUMDES.
			Dalam pengawasan Amdal, dibutuhkan program dan kegiatan terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan.	Untuk Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang tercantum pada Dokumen AMDAL yang dimiliki oleh Perusahaan, Pemerintah kabupaten Muara Enim melalui Dinas Lingkungan Hidup telah memprogramkan dan melaksanakan Pengawasan secara rutin dan berkala ke perusahaan dalam Kabupaten Muara Enim oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Namun sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagian besar kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
				RKLRPL Dokumen AMDAL menjadi kewenangan Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yaitu antara lain pengawasan terhadap kegiatan pertambangan mineral dan Batubara serta sektor energi dan sumber daya mineral lainnya.
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Transparansi dan informasi sistem alur keuangan daerah perlu kinerja OPD, baik diperuntukkan sesama instansi maupun terhadap masyarakat.	Transparansi dan informasi sistem alur keuangan daerah yang menurut Komisi II perlu kinerja OPD terkait baik yang diperuntukkan sesama instansi maupun terhadap masyarakat.
			Persoalan aset masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan terkhusus pendataan dan pengelolaan aset daerah.	Dalam perencanaan anggaran akan lebih memperhatikan kebutuhan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.
			Untuk aset daerah yang menjadi kewenangan BPKAD antara lain, PDAM-LE, Hotel Griya Serasan, serta perusahaan sarana pembangunan Muara Enim, maka perlu adanya laporan keuangan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.	Melakukan efisiensi pelaksanaan kegiatan
			Sehubungan dengan tugas DPRD sebagai lembaga pengawas, Pj. Bupati dihimbau untuk bersikap tegas kepada para investor	Mengurangi anggaran yang tidak digunakan pada saat penyusunan RAPBD-P agar penyerapan anggaran lebih maksimal.



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			yang menanamkan modanya di Kabupaten Muara Enim.	
3.	III	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Memastikan bahwa setiap usulan anggaran dari OPD terkait dan memastikan bahwa anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan dan usulan anggaran, yang mana hal ini merupakan skala prioritas pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Serta pemberian anggaran tersebut juga disesuaikan dengan tugas pokok fungsi OPD terkait, yaitu untuk pembangunan yang berkualitas, optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan, peningkatan kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, peningkatan peran perusahaan daerah di dalam pembangunan daerah, serta penguatan kompetensi ASN di masing-masing perangkat daerah.	Dalam penyusunan anggaran, Bappeda Kabupaten Muara Enim telah melakukan pembinaan dan memberikan arah untuk menyusun renja OPD berdasarkan RPD Tahun 2024-2026.
		Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah harus tetap ditingkatkan guna membiayai pembangunan serta perbaikan kualitas kehidupan sosial masyarakat secara luas, dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan	Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah dan terus akan melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui pendataan dan pemutakhiran data objek dan subjek Pajak Daerah dan



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			objek dan subjek pendapatan bekerja sama dengan pemerintah pusat (Kementerian teknis), pemerintah provinsi Sumatera Selatan, dan pemerintah Kabupaten/kota lainnya.	Retribusi Daerah dengan bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Kelurahan lingkup Kabupaten Muara Enim serta stakeholder terkait.
			Mengharapkan peran serta dari perusahaan, tidak hanya dari perusahaan besar saja akan tetapi perusahaan menengah ke bawah juga dilibatkan untuk memberikan peran sertanya kepada pemerintah Kabupaten Muara Enim.	Melakukan koordinasi dan konfirmasi serta sosialisasi kepada perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Muara Enim melalui Dana Hibah Peran Serta sebagai amanat Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Peran Serta Badan Usaha, Masyarakat dan Luar Negeri untuk peningkatan pembangunan di Kabupaten Muara Enim.
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Mengharapkan adanya pelaksanaan belanja daerah selalu mengedepankan asas efisiensi, efektif dan akuntabel.	Transparansi dan informasi sistem alur keuangan daerah yang menurut Komisi II perlu kinerja OPD terkait baik yang diperuntukkan sesama instansi maupun terhadap masyarakat.
			Diharapkan penyerapan anggaran agar lebih maksimal sehingga SILPA pada akhir tahun anggaran tidak terlalu besar.	Dalam perencanaan anggaran akan lebih memperhatikan kebutuhan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.
			Disarankan kepada OPD yang akan menganggarkan kegiatan tersebut sebelum menganggarkan atau melaksanakan kegiatan	Melakukan survey harga sebelum pelaksanaan kegiatan



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			untuk lebih dulu melakukan survei ke lapangan.	
		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Mendukung terbentuknya mall pelayanan publik (MPP) yang saat ini sudah bisa menampung stand pelayanan terpadu di Kabupaten Muara Enim. Diharapkan dengan adanya mall pelayanan publik ini selain mempermudah datangnya investor juga menggairahkan iklim berinvestasi di Kabupaten Muara Enim yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).Selain itu juga, adanya penambahan anggaran untuk kegiatan DPMPTSP,adanya penambahan 2 unit mobil untuk operasional DPMPTSP, dan sosialisasi mall pelayanan publik ke masyarakat.	Terima kasih kepada Komisi III DPRD Kabupaten Muara Enim yang telah mendukung keberadaan MPP di Kabupaten Muara Enim dengan harapan akan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim termasuk memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD dan realisasi investasi di Kabupaten Muara Enim.
		Dinas Perhubungan	Untuk mengatasi permasalahan angkutan umum dan mendukung Kabupaten Muara Enim menjadi kabupaten layak anak (KLA)	Dinas Perhubungan telah menerapkan Rute Aman Sekolah (RASS) Yaitu Penyediaan Angkutan Anak Sekolah . Saat ini tersedia 8



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			maka dibutuhkan kendaraan feeder untuk angkutan umum dan siswa.	(Delapan)unit bus sekolah yang melayani Rute Kecamatan muara Enim - Desa Pang Jaya (PP 1 Unit), Trans- Kota Muara Enim (PP 1 Unit), Kecamatan Gelumbang (1 Unit), Kecamatan Lubai (1 Unit) dan melayani Anak SekolahMTS Kemenag (3 Unit). Pada APBD 2025 telah dianggarkan Pengadaan 2 (dua) unit Bus Sekolah Baru.
			Disarankan kepada Bupati Muara Enim melalui OPD terkait untuk menambah anggaran di Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim guna keperluan operasional dan penambahan rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan.	
		Dinas Perdagangan	Dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi pasar, diharapkan OPD terkait untuk mendata ulang/ melakukan uji petik terhadap penerimaan retribusi pasar inpres yang ada.	Tahun 2024 Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM telah melaksanakan pendampingan secara berkala dalam uji petik evaluasi penagihan dan pemungutan retribusi harian, retribusi bulanan serta tunggakan kepada pedagang di Pasar Inpres Muara Enim dari bulan Oktober, November sampai dengan Desember Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, optimalisasi penerimaan daerah, serta memastikan kepatuhan dalam mekanisme pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
			Diharapkan kepada OPD terkait untuk melakukan pendataan terhadap kios-kios yang kosong atau tidak ditempati oleh	Dari hasil uji petik yang dilakukan, diperoleh data terkait jumlah petak kios/los yang kosong, tidak beroperasi, serta pedagang yang menunggak pembayaran retribusi harian. Temuan ini menjadi



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			pedagang guna penertiban pedagang pasar inpres Muara Enim.	dasar evaluasi bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM dalam upaya penertiban, optimalisasi pemanfaatan kios/los, serta peningkatan efektivitas penagihan retribusi guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
		PDAM Lematang Enim	Agar memperluas jaringan air bersih diupayakan sampai ke pelosok desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Muara Enim terutama diprioritaskan kepada pembangunan perumahan baru. Diharapkan meningkatkan kualitas mutu air, mengurangi kebocoran pipa air, secara bertahap mengganti meteran air yang sudah tidak baik lagi, sehingga pada akhirnya PDAM Lematang Enim dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, PDAM membutuhkan tambahan anggaran untuk biaya operasional PDAM.	PDAM Lematang Enim berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi air untuk masyarakat. PDAM Lematang Enim telah menyiapkan DED optimalisasi kapasitas produksi dan distribusi
		RSUD Dr.H.M. Rabain Muara Enim	RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim dengan status badan layanan umum daerah (BLUD) dapat merencanakan, mengelola secara	Terhadap rekomendasi DPRD kepada RSUD Dr. H. Mohamad Rabain, maka perencanaan penganggaran Program pemenuhan upaya



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			langsung pendapatannya dan mengendalikan semua urusan internal rumah sakit secara fleksibel, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim serta menjadi rujukan masyarakat di sekitar Kabupaten Muara Enim.	kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan melakukan rencana pembangunan gedung rawat inap dan rawat jalan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dan kendala pelayanan bidang kesehatan yang terjadi yang diharapkan akan dapat mengatasi masalah kekurangan ruang perawatan bagi pasien dan sarana prasarana yang lebih memadai yang ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2026 serta pemanfaatannya pada tahun 2027.
		Bank Sumsel Babel Muara Enim	Disarankan kepada Bank Sumsel Babel Muara Enim dalam rangka mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) berupa jasa giro dan bagian laba BUMD, kiranya agar lebih menggiatkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat terutama penghimpunan dana dari masyarakat misalnya pembayaran tagihan rekening PLN, PDAM, internet serta penghimpunan dana dalam bentuk simpanan (tabungan)	Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dari masyarakat serta bekerjasama dengan instansi lain melalui pola kemitraan sehingga dapat melayani pembayaran tagihan PDAM, Telkom, Pajak, dan lainnya baik secara tunai maupun nontunai melalui produk E-Channel Bank Sumsel Babel yang mempermudah dan memenuhi kebutuhan nasabah dalam bertransaksi.
			Mempermudah pemberian kredit kepada masyarakat terutama kredit usaha menengah, kecil dan mikro (UMKM) dan secara bertahap	Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim memberikan fasilitas kredit produktif yang diberikan kepada pelaku usaha khususnya UMKM



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			memperbanyak jumlah anjungan tunai mandiri (ATM) di wilayah Kabupaten Muara Enim, terutama di wilayah kecamatan Tanjung Agung sampai kepada kecamatan Semende Darat Ulu/Tengah/Laut.	dalam bentuk kredit usaha rakyat yang dapat diberikan bagi masyarakat yang memiliki usaha dan membutuhkan kredit modal kerja ataupun kredit investasi atau KI. Selain itu Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim juga telah menyediakan beberapa mesin ATM yang berlokasi di wilayah Muara Enim, Tanjung Enim, Semendo, Belimbing, Ujan Mas, dan Tanjung Agung.
		Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Muara Enim	Kehadiran Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Muara Enim disamping memberikan pengetahuan masyarakat luas tentang perbankan, juga melakukan pemerataan kesempatan membuka usaha, dengan cara lebih menghususkan memberikan bantuan kredit kepada pedagang/pengusaha kecil di desa-desa dan di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Muara Enim, pada akhirnya dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Muara Enim.	Memberikan apresiasi kepada manajemen bank perkreditan rakyat Gerbang Serasan Muara Enim pada tahun 2023 telah menyumbangkan pendapatan asli daerah sebesar 1,4 Milyar, kiranya ditahun tahun kedepan kontribusi pendapatan asli daerah dapat terus ditingkatkan
4.	IV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Beberapa program kegiatan dan sub-kegiatan tidak mencapai indikator, untuk itu diminta agar dalam pengajuan anggaran hendaknya lebih selektif dan efisien.	Dalam penyusunan / pengajuan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah dilakukan dengan mempertimbangkan penentuan tujuan kegiatan, identifikasi kebutuhan, estimasi biaya,



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
				mempertimbangkan sumber daya guna pencapaian indikator tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.
			Terkait dengan perekrutan tenaga guru pengabdian pendidikan agama Islam diutamakan yang berdomisili di kecamatan tempat penugasan dan sesuai kualifikasi.	Rekrutmen Guru Pengabdian PAI adalah Terbuka bagi Putra dan Putri Muara Enim Fresh graduate berdomisili di Kabupaten Muara Enim yang mempunyai Kualifikasi di Bidang Pendidikan Agama Islam ditambah pengalaman-pengalaman ybs di bidang keagamaan, setelah dilakukan proses rekrutmen Guru Pengabdian Pendidikan Agama Islam melalui Tahapan tes tertulis dan Wawancara didapatkan hasil perangkaan Calon Guru Pengabdian PAI, bagi peserta yang lulus seleksi dengan peringkat terbaik itulah yang nantinya akan ditempatkan di kecamatan-kecamatan tempat penugasan Guru Pengabdian PAI, terkait dengan pelamar ataupun peserta yang lulus seleksi banyak peserta yang melamar ataupun yang telah lulus dengan peringkat terbaik berdomisili/tinggal di dalam satu kecamatan yang sama sehingga penempatan mereka tidak bisa semuanya berdasarkan Domisili.
		Dinas Kesehatan	Banyaknya sarana dan prasarana yang terdapat di rumah sakit umum daerah tipe D	Komisi IV DPRD Kabupaten Muara Enim memberikan apresiasi atas capaian program



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			<p>yang belum maksimal penggunaannya karena terbatasnya daya tegangan listrik. Disarankan agar dapat melaksanakan kerja sama dengan PT. PLN untuk pengadaan trafo mandiri untuk ketiga rumah sakit umum daerah kelas D dengan melakukan penganggaran pada Dinas Kesehatan atau diambil dari dana hibah.</p>	<p>kegiatan fisik yang sudah dilakukan di tahun 2023 oleh dinas kesehatan yang mencapai 93% terkait capaian tersebut apakah sudah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum tipe D dan Puskesmas –Puskesmas di Kabupaten Muara Enim. Karena banyaknya sarana dan prasarana yang terdapat Di Rumah SakitUmum Daerah Tipe D yang belum maksimal penggunaannya karena terbatasnya Daya Tegangan Listrik yang ada Komisi IV merekomendasikan kepada dinas terkait agar dapat melaksanakan kerja dengan PT. PLN untuk pengadaan TRAF0 Mandiri Untuk ke 3 RSUD Kelas D dengan melakukan penganggaran pada dinas kesehatan atau diambil dari dana hibah.</p>
			<p>Pj. Bupati untuk melakukan koordinasi ke Kementerian Kesehatan terkait BLUD di 3 (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan.</p>	<p>Selanjutnya komisi IV DPRD kabupaten Muara Enim Merekomendasikan kepada PJ. Bupati untuk melakukan kordinasi ke Kementerian Kesehatan terkait BLUD di 3 RSUD Kelas D yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang menjadi kewenangan dinas kesehatan terkait dengan tersediannya dokter spesialis di RSUD Klelas D Komisi IV merekomendasika kepada PJ. Bupati agar dapat</p>



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
				meningkatkan penganggaran Honor dan Fasilitas pendukung lainnya
			Terkait dengan tidak tersedianya dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, direkomendasikan kepada Pj. Bupati agar dapat meningkatkan penganggaran honor dan dan dasilitas pendukung lainnya.	
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Apresiasi capaian kerja yang sudah dilakukan Tahun 2023, dan dinas didorong untuk dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait anggaran bedah rumah dari dana hibah pusat karena program ini sangat membantu dan diharapkan oleh masyarakat kurang mmpu di Kabupaten Muara Enim.	Tahun 2024 sudah menyampaikan usulan RTLH ke Provinsi melalui Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK), namun belum disetujui Pemerintah Provinsi
			Terkait masih besarnya SILVA, direkomendasikan agar dalam perencanaan dan pengangguran hendaknya lebih memperhatikan kembali secara efektif dan efisien.	Akan dilakukan Refocusing anggaran terhadap kegiatan yang tidak mempunyai output (hasil keluaran) yang jelas.
		Dinas Ketenagakerjaan	Rekomendasi kepada dinas terkait untuk menambah instruktur/tenaga pengajar di Balai Latihan Kerja terutama instruktur kelistrikan, instruktur komputer dan	1. Sudah terdapat penambahan 1 orang tenaga instruktur kelistrikan/otomatif a.n Mecho Aris Yowansyah, S.Pd sebagai instruktur ahli Pertama



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			instruktur kecantikan supaya lebih mengefektifkan balai latihan kerja, sehingga tenaga kerja yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.	2. Sudah dilakukan upgrading atas tenaga instruktur lainnya pada kelistrikan dan computer.
			Untuk mempermudah akses ke Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja dan ke SMA Negeri 3 Muara Enim, direkomendasikan kepada Pj. Bupati agar membangun jalan alternatif yang sudah direncanakan.	Pembangunan jalan alternatif telah direncanakan untuk pelaksanaan pembangunannya.
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terkait dengan program kerja dan capaian prestasi yang ada saat ini, hendaknya agar dapat ditingkatkan lagi sehingga dapat menjadi motivasi kerja bagi aparatur sipil negara dan menjadi contoh OPD lainnya.	Melakukan monitoring dan evaluasi Program Kerja yang sudah berjalan serta meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait
		Dinas Sosial	Terkait dengan program-program yang ada saat ini di OPD hendaknya lebih ditingkatkan lagi.	Untuk melaksanakan pengadaan bantuan langsung dari pemerintah berupa uang tunai untuk korban bencana kebakaran, akan dikoordinasikan dan disusun aturan sebagai payung hukum untuk melaksanakan rekomendasi tersebut.
		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Menilai dan mengapresiasi OPD ini sudah melakukan program kerja dengan baik harapan ke depan agar lebih menciptakan	1. Menyelenggarakan Pelatihan-Pelatihan, sosialisasi, pendampingan usaha dan pembinaan bagi Koperasi dan UMK dalam



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			terobosan-terobosan yang lebih baik lagi dan lebih menyentuh kepada masyarakat.	<p>rangka meningkatkan kapasitas SDM bagi Pengurus/Pengelola Koperasi dan Pelaku UMK</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Memfasilitasi akses pemasaran dan permodalan bagi pelaku UMK dan Koperasi</li> <li>3. Memfasilitasi kegiatan promosi produk UMK</li> <li>4. Memberikan bantuan peralatan kerja bagi pelaku UMK</li> </ol>
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Keberadaan aset yang menjadi tanggung jawab OPD ini agar dapat melakukan perawatan dan peningkatan sarana dan prasarana terutama di Gedung Olahraga Renang dan Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu.	Dispora telah melakukan perawatan dan pemeliharaan serta peningkatan sarana dan prasarana terutam Gedung Olahraga Renang dan Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu sudah dianggarkan Pada Anggaran 2024 dan selanjutnya tetap dianggarkan bertahap pada anggaran tahun berikutnya
			Merekomendasikan kepada OPD ini agar dapat segera menyelesaikan kewajiban mengenai bonus atlet yang masih belum terselesaikan baik itu di Porprov dan Peparprov.	Dispora Telah melakukan penganggaran terhadap penyelesaian Bonus Atlet Porprov dan Peparprov pada anggaran perubahan tahun 2024.
		Dinas Komunikasi,	Dalam mempersiapkan desa memasuki era digitalisasi, direkomendasikan pada dinas	Dalam mewujudkan desa dgiitalisasi, pada tahun anggaran 2024 Dinas Kominfo SP Kabupaten



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Informatika, Statistik dan Persandian	terkait agar terus berupaya untuk mewujudkan desa digitalisasi di Kabupaten Muara Enim dengan didukung anggaran yang memadai dalam menyediakan dan mendukung internet desa.	Muara Enim telah menganggarkan belanja internet desa untuk 256 desa dan kelurahan. Dinas Kominfo SP juga telah memberikan program Internet V-Sat untuk di desa-desa yang memiliki potensi pariwisata di lima lokasi yaitu di Desa Bedegung (wisata air terjun curup tenang), Desa Karya Mulia (wisata kampung malaka), Desa Sumber Rahayu (wisata betung berseri), Desa Pinang Banjar (wisata air) dan Desa Ujan Mas Baru (wisata danau emas)
		Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana	Terkait dengan capaian kerja yang telah dilaksanakan hendaknya OPD ini harus dapat ditingkatkan lagi dan mencari terobosan-terobosan yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPPKB melaksanakan program dari BKKBN berupa program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) dan bantuan pangan.</li> <li>2. Pengadaan Alat Teknologi Tepat Guna (ATTG) untuk disalurkan ke kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).</li> <li>3. Peningkatan Kesehatan Mental Remaja melalui Sistem Terintegrasi dan Elaborasi Berkelanjutan (SINDERELA) yaitu Kegiatan layanan konsultasi dan konseling kesehatan mental remaja di Kabupaten Muara Enim secara offline di Kantor DPPKB dan balai</li> </ol>



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
				penyuluh KB serta online melalui website DPPKB.
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<p>Terkait dengan masih rendahnya minat baca masyarakat sehingga indeks literasi masyarakat belum sesuai harapan standar nasional. Direkomendasikan untuk segera mengambil solusi terhadap permasalahan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan program literasi yang berbasis inklusi sosial dengan mengintegrasikan kegiatan di masyarakat dalam wadah perpustakaan baik perpustakaan umum daerah, perpustakaan sekolah dan perpustakaan desa/kelurahan</li> <li>2. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung yang mudah dijangkau masyarakat seperti penambahan IT dan jaringan di desa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan gedung perpustakaan desa terdiri dari gedung yang tersebar di berbagai kecamatan yaitu desa ujan Mas Ulu Kecamatan Ujan Mas, Desa Gemawang Kecamatan Rambang Niru, Desa Karang Mulya Kecamatan Lubai dan Desa Ibul Kecamatan Belide Darat.</li> <li>2. Penyediaan buku elektronik dalam bentuk Aplikasi Muara Enim Digital Linrary (Medali) yang dapat diakses melalui Aplikasi Android.</li> <li>3. Penambahan jaringan internet dalam bentuk WFI di perpustakaan.</li> <li>4. Rencana pembuatan titik baca di areal publik atau tempat-tempat pelayanan publik seperti rumah sakit, mall pelayanan publik dll.</li> <li>5. Untuk penambahan IT dan jaringan di desa akan dikoordinasikan dengan Dinas Kominfo kewenangan yang memilikinya.</li> </ol>
		Badan Penelitian dan	Terkait dengan rendahnya serapan anggaran disebabkan kekosongan jabatan struktural,	Sudah disampaikan surat kepada Bupati Muara Enim melalui BKPSDM Kabupaten Muara Enim



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
		Pembangunan Daerah (BALITBANG DA)	direkomendasikan kembali agar segera mengisi kekosongan jabatan.	untuk mengisi jabatan yang kosong dan jabatan tersebut telah diisi.
			Diharapkan kepada OPD ini dapat memberikan terobosan dengan menciptakan inovasi-inovasi baru melalui kerjasama dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim.	Telah dilakukan peninjauan kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Muara Enim terkait <i>cost sharing</i> .
			Terkait dengan perubahan nomenklatur OPD BALITBANGDA sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 100.2.2.6/5808/OTDA dan Surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. B-791/I/OT.00.00/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023, direkomendasikan kepada Pj. Bupati untuk menyampaikan kepada DPRD terkait pembahasan perubahan ketiga Perda No. 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.	Telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perlu adanya pengembangan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Muara Enim. Untuk pelaksanaan kewajiban ini, maka Dinas Pariwisata perlu didukung dengan SDM yang	Untuk tahun 2024 dinas pariwisata dan ekonomi kreatif telah mengusulkan tenaga teknis kepariwisataan baik CPNS & PPPK ke Bupati Muara Enim. Terkait penambahan anggaran pada



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
			handal dan dana yang memadai, oleh sebab itu direkomendasikan kepada Pj. Bupati agar segera memenuhi kebutuhan SDM di Dinas Pariwisata, yaitu tenaga teknis pariwisata serta penambahan anggaran pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Muara Enim.	tahun 2024 sudah di alokasikan oleh pemerintahan kabupaten Muara Enim sesuai dengan kemampuan daerah.
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Terkait program kegiatan administrasi daerah yang serapannya masih rendah, direkomendasikan kepada Pj. Bupati agar segera mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong supaya kinerja dapat maksimal yang dalam hal ini berlaku juga pada OPD mitra kerja.	BPBD Kabupaten Muara Enim telah mengisi jabatan-jabatan yang masih kosong yakni Bagian Organisasi dan BKPSDM
			Disarankan kepada OPD terkait agar dapat menyosialisasikan dampak-dampak terjadinya bencana kepada masyarakat.	Kegiatan Sosialisasi terutama diwilayah rawan bencana sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi edukasi kebencanaan kepada 250 Pelajar di daerah rawan bencana banjir.</li> <li>2. Membentuk Desa Tangguh Bencana di 20 Desa di Kabupaten Muara Enim</li> <li>3. Sosialisasi kepada masyarakat Desa Peduli Bencana di 22 Desa di Kabupaten Muara Enim.</li> </ol>



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
				Aktivasi Bencana Banjir, Longsor, Kebakaran Hutan dan Lahan dan sosialisasi langsung yang dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Muara Enim dengan melibatkan TNI, POLRI, di wilayah terdampak dan memiliki potensi bencana alam tersebut seperti penyebaran Maklumat Kapolri, Pemasangan Spanduk himbauan Penyebaran Pamflet.
			Sehubungan dengan sering terjadinya orang hilang di sungai, direkomendasikan kepada OPD terkait untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan menyediakan alat-alat yang memadai sehingga dapat lebih mudah di deteksi agar pencarian korban lebih mudah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPBD sudah melaksanakan pelatihan kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) Water Rescue oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan Palembang.</li> <li>2. Sudah menganggarkan penambahan peralatan berupa Perahu Karet dan peralatan Water Rescue lainnya.</li> </ol>
		Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. M. Rabain	Banyaknya laporan dari masyarakat dengan pelayanan yang kurang memuaskan, maka direkomendasikan kepada Pj. Bupati untuk melakukan penataan dan pembinaan pegawai dengan harapan pasien dan keluarga pasien merasa nyaman.	Terhadap rekomendasi DPRD kepada RSUD Dr. H. Mohamad Rabain, maka perencanaan penganggaran Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan melakukan rencana pembangunan gedung rawat inap dan rawat jalan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dan kendala pelayanan bidang



No.	Komisi	Nama Institusi	Isi Rekomendasi	Tindak Lanjut
				kesehatan yang terjadi yang diharapkan akan dapat mengatasi masalah kekurangan ruang perawatan bagi pasien dan sarana prasarana yang lebih memadai yang ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2026 serta pemanfaatannya pada tahun 2027.
		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Terkait masih adanya masalah efisiensi waktu dalam penanganan bencana kebakaran, direkomendasikan untuk melakukan pembangunan pos-pos pemadam kebakaran di kecamatan yang belum tersedia.	Terkait masukan dan saran dari Komisi IV dalam hal kekurangan pos pemadam kebakaran dan perlengkapan alat pelindung diri, akan dibentuk secara bertahap untuk tahun berikutnya sesuai kemampuan anggaran daerah.



BAB I

PENDAHULUAN

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

BAB III

HASIL  
PENYELENGGARAAN  
URUSAN PEMERINTAH  
YANG MENJADI  
KEWENANGAN DAERAH

**BAB IV**

**CAPAIAN KINERJA  
PELAKSANAAN TUGAS  
PEMBANTUAN DAN  
PENUGASAN**

BAB V

PENUTUP

LAMPIRAN

## **BAB IV**

### **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

Penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan otonomi daerah, selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kabupaten Muara Enim juga melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi. Alokasi dana APBN Tugas Pembantuan yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan infrastruktur pemukiman.

#### **4.1. Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan**

##### **4.1.1 Dasar Hukum**

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 410/KPTS/BPKAD/2024 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

##### **4.1.2. Jumlah Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan**

Pada Tahun 2024, Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dialokasikan untuk pelaksanaan program-program strategis prioritas provinsi dan prioritas kabupaten. Adapun program-program tersebut yaitu:

1. Pelaksanaan Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp.20.000.000.000,00;
2. Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.30.000.000.000,00;
3. Pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.999.799.000,00.

Adapun secara terperinci dijelaskan pada tabel berikut.



**Tabel 4.1 Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di  
Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Program/ Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Nilai Kontrak	Realisasi	
						(Rp)	%
1.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	a. Kecamatan Muara Enim b. Kecamatan Ujan Mas c. Kecamatan Rambang Niru d. Kecamatan Gelumbang e. Kecamatan Sungai Rotan f. Kecamatan Belide Darat g. Kecamatan Lubai h. Kecamatan Lubai Ulu i. Kecamatan Tanjung Agung j. Kecamatan Semende Darat Laut k. Kecamatan Semende Darat Tengah l. Kecamatan Lawang Kidul m. Kecamatan Panang Enim	20.000.000.000,00	19.573.137.600,00	19.573.137.600,00	100%
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Kecamatan Empat Petulai Dangku	30.000.000.000,00	28.454.833.000,00	28.454.833.000,00	100%
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kecamatan Muara Enim	3.999.799.000,00	3.931.000.000,00	3.931.000.000,00	100%
<b>TOTAL</b>				<b>53.999.799.000,00</b>	<b>51.958.970.600,00</b>	<b>51.958.970.600,00</b>	<b>100 %</b>



Sumber dana pada tabel di atas berasal dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dana bantuan ini bersifat *reimburse* dengan tiga tahap penyerahan, yaitu:

1. Tahap I sebesar 30% dari nilai kontrak,
2. Tahap II sebesar 40% dari nilai kontrak,  
Tahap ini baru bisa diajukan bila penggunaan di tahap I sudah mencapai 75%, dan
3. Tahap III sebesar 30% dari nilai kontrak,  
Tahap ini baru bisa diajukan bila penggunaan di tahap II sudah mencapai 75%.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mengajukan permohonan pencarian tahap I,II, dan III pada T.A 2024 kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada T.A 2024. Namun, realisasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan T.A 2024 hanya Tahap I yaitu 30% dari nilai kontrak sebesar Rp.15.587.691.180,00 yang diterima pada RKUD Kab. Muara Enim pada tanggal 20 November 2024. Pelaksanaan atas pekerjaan tersebut telah selesai 100% dengan pembayaran kepada pihak ketiga dan telah terealisasi sebesar 100% dengan menggunakan dana APBD Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Ada pun rincian dari realisasi Tahap I dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ialah sebagai berikut:

1. Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebanyak 16 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 19.573.137.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.5.871.941.280,00
2. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 3 paket pekerjaan dengan nilai kontrak sebesar Rp.32.855.833.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.9.715.749.900,00

#### **4.1.3 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan pelaksanaan program Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 yang bersifat Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) ini terjadi ketika pihak Pemerintah Daerah Muara Enim mengajukan permohonan dana pada Tahap II dan Tahap III. Hal ini terjadi karena pengajuan dan penggantian dana tadi dilakukan dengan sistem *reimburse* yang mana pengajuan tahap II baru bisa diajukan ketika penggunaan di Tahap I sudah mencapai 75% dan Tahap III baru bisa diajukan ketika penggunaan di Tahap II telah mencapai 75% pula. Permasalahan yang terjadi ialah ketika Pemerintah Pusat melakukan efisiensi anggaran, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah juga mengalami imbasnya. Hal ini terjadi pula pada Pemerintah Muara Enim yang mana pihak Provinsi Sumatera Selatan belum mengabulkan pengajuan pencairan dana pada Tahap II dan Tahap III sehingga dana APBD Muara Enim digunakan untuk menalangi biaya program pembangunan tersebut.

#### **4.2. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan**

Otonomi daerah diselenggarakan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Daerah, sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat selama tidak bertentangan dengan tatanan



hukum nasional dan kepentingan umum. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan meliputi :

- a. Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD);
- b. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
- c. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Sinergi);
- d. Pembinaan batas wilayah;
- e. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- h. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

#### **4.2.1. Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD)**

##### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

Kerjasama antar daerah merupakan instrumen yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan keterkaitan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah atau dengan pihak ketiga, dan meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, inovasi serta meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus percepatan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat melaksanakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik secara menguntungkan. Untuk mewujudkan kewenangan tersebut salah satu program/kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah melakukan Kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Daerah khususnya daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Muara Enim.

Kerja sama tersebut diselenggarakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang diarahkan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik yang saling menguntungkan. Kerjasama yang dibangun antara daerah tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik, khususnya pada daerah yang terpencil, daerah perbatasan, dan daerah tertinggal. Disamping itu, dalam upaya percepatan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kabupaten Muara Enim senantiasa melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, baik kepada lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang meliputi bidang kesehatan, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan

teknologi, hukum, pembangunan infrastruktur dasar masyarakat, manajemen usaha, pendampingan petani, dan lain-lain.

b) Prinsip dan Proses Kerjasama

Ada pun prinsip kerjasama yang diterapkan dalam pemerintahan Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip dasar dalam menjalin kerjasama antar daerah difokuskan pada substansi yang sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan azas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, saling menguntungkan untuk kepentingan bersama berdasarkan kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Proses kerjasama daerah dilakukan melalui tahapan antara lain: identifikasi permasalahan, pertemuan awal Kepala Daerah, Studi Kelayakan bersama, negosiasi *indomarco* substansi yang akan dikerjasamakan, penandatanganan keputusan bersama/ MoU/ Perjanjian Kerjasama, penyusunan *master plan/action plan*, pembentukan badan kerjasama, dan operasional.
- c. Badan Kerjasama yang akan dibentuk dapat bersifat permanen dikelola secara profesional dan *ex officio* berdasarkan kedudukan pejabat yang menangani kerjasama. Pembentukan struktur organisasi didasarkan pada petugas yang memiliki kompetensi teknis operasional, kompetensi manajerial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan, dalam hal ini pemerintah daerah dapat berperan dan melakukan koordinasi antar daerah.

c) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Ada pun kerjasama daerah dengan perangkat daerah lain sepanjang tahun 2024 ialah sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Daftar Kerjasama Kabupaten Muara Enim dengan Perangkat Daerah Lain**

No.	Mitra Kerjasama	MoU	Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Kerjasama
1.	Kota Pagar Alam	134.4/ 005/ IV/ 2024 09/ KPA/ 2024 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dengan Pemerintah Kota Pagar Alam Tentang Pengembangan Pembangunan Potensi Daerah	11/06/2024	2 Tahun
2.	Kota Surabaya	134.4/ 010/ IV/ 2024 100. 3. 7. 1/ 13911/ 436. 1. 2/ 2024 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dan Pemerintah Kota Surabaya Tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah	11/07/2024	5 Tahun

No.	Mitra Kerjasama	MoU	Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Kerjasama
3.	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	134.4/ 019/ IV/ 2024 100.3.7.I/ KSB/ PEMKAB. OKU/ 2024 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tentang Pengembangan Potensi Daerah	07/10/2024	5 Tahun
4.	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	134.4/ 020/ IV/ 2024 415.4/ 012/ IV/ 2024 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tentang Pengembangan Potensi Daerah	07/10/2024	5 Tahun
5.	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Nomor 134.4/ 015/ IV/ 2023 dan 032/KSB/ OTDA/ I/ 2024 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Kerja Sama Pembangunan Dan Pengembangan Potensi Daerah	20/08/2024	5 Tahun

#### d) Permasalahan dan Solusi

Permasalahan-permasalahan pokok dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan di daerah perbatasan antara lain ialah salah satu daerah mungkin mendapatkan keuntungan lebih besar dibanding daerah lainnya dalam kerja sama ini, jika kerja sama terkait infrastruktur, ada kemungkinan manfaat hanya dirasakan oleh sebagian wilayah saja, dan tidak adanya sistem monitoring yang jelas untuk mengevaluasi sejauh mana kerja sama ini berdampak positif bagi masyarakat.

Ada pun solusi yang dapat penulis sarankan ialah dengan mencantumkan pembagian manfaat secara adil dan proporsional, melakukan kajian awal mengenai dampak dan manfaat bagi masing-masing daerah sebelum kesepakatan dibuat, dan mengadakan pertemuan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan keadilan dalam implementasi kerja sama.

### 4.2.2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)

#### 1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh pemerintah daerah karena berbagai keterbatasan yang dimiliki. Adapun Kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BUMN/BUMD, dalam upaya pengembangan untuk mempercepat pelayanan, memperbaiki pengelolaan sumberdaya alam dan sarana pelayanan, alih teknologi, memperluas layanan,

meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, dan memacu dinamika sosial masyarakat;

- b. Kerjasama Pemerintahan Daerah dengan LSM/Masyarakat, dikembangkan untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat dan mendorong potensi sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, seperti pengelolaan aset pemerintah daerah oleh masyarakat dan penyuluhan serta pelestarian kawasan hutan untuk mendorong peningkatan produktivitas; dan
- c. Kerjasama antar daerah yang bersifat masal, berupa Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKCSI) dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). Lembaga tersebut merupakan wadah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendayagunaan sumber daya yang tersedia di daerah.

## 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kerjasama dengan pihak ketiga telah dilakukan oleh Kabupaten Muara Enim melalui perangkat daerah yang terkait. Kerjasama yang dilakukan, baik kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/ Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)/Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta/Instansi/Lembaga Organisasi Masyarakat yang diimplementasikan melalui pola kemitraan dan dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama untuk pengembangan Potensi Daerah, diantaranya sebagai berikut.

**Tabel 4.3 Daftar Kerjasama Kabupaten Muara Enim dengan Pihak Ketiga**

No.	Mitra Kerjasama	MoU	Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Kerjasama
1.	PT PLN PERSERO UNIT INDUK DISTRIBUSI SUMSEL	074/ 001/ IV/ 2024 0001. Mou/ HKM. 02. 01/ F11000000/ 2024 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dengan PT PLN (PERSERO) Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi, Dan Bengkulu Tentang Pembangunan, Operasional, Dan Pemeliharaan Jaringan Listrik Perdesaan Di Wilayah Kabupaten Muara Enim	13/03/2024	5 Tahun
2.	SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI BHAKTI PERTIWI	074/ 002/ IV/ 2024 007/ STIFI BP-II/ III/ 2024 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	26/03/2024	2 Tahun
3.	POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN	119/ 003/ IV/ 2024 NK- 10/ PKN/ 2024	18/04/2024	5 Tahun

No.	Mitra Kerjasama	MoU	Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Kerjasama
		Nota Kesepakatan Antara Politeknik Keuangan Negara STAN Dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tentang Pemenuhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dibidang Keuangan Negara		
4.	UNIVERSITAS PADJADJARAN	074/ 004/ IV/ 2024 245/ Unb. RKT / HK.07.00/ 2024 - Mou Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dengan Universitas Padjadjaran Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	18/04/2024	5 Tahun
5.	UNIVERSITAS SELERO LAHAT	074/ 006/ IV/ 2024 170/ UNSELA/ VI/ 2024 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dan Universitas Selero Lahat Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	09/07/2024	5 Tahun
6.	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDURAHMAN PALEMBANG	074/ 007/ IV/ 2024 0265/ STIKES/ III.9/ VII/ 2024 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurahman Palembang Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	09/07/2024	5 Tahun
7.	UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA	074/ 008/ IV/ 2024 296/ Un40/ HK, 07,00/ 2024 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dengan Universitas Pendidikan Indonesia Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	09/07/2024	5 Tahun
8.	UNIVERSITAS TAMAN SISWA	074/ 009/ IV/ 2024 100. 3. 7. I/ 139 II / 436. I. 2/ 2024 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dengan Universitas Taman Siswa Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	9/07/2024	5 Tahun
9.	BADAN STANDARISASI DAN KEBIJAKAN JASA	119/ 011/ IV/ 2024 459/ BSKJI/ VII/ 2024	18/07/2024	5 Tahun



No.	Mitra Kerjasama	MoU	Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Kerjasama
	ISDUSTRI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN BSKJI	Nota Kesepakatan Antara Badan Standarisasi Dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tentang Pemanfaatan Teknologi Dan Inovasi Yang Berkelanjutan Di Kabupaten Muara Enim		
10	BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MUARA ENIM	119/ 012/ IV/ 2024 303/ 16030/ HM. 310/ 2024 Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim Tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Pengembangan Data / Atau Informasi Pembangunan Daerah Menuju Muara Enim Satu Data	05/08/2024	5 Tahun
11	PT. BA TENTANG PENGELOLAAN TANAH DAN BANGUNAN	119/ 013/ IV/ 2024 T/ 187/ 0400/ HK. 03/ VIII/ 2024 Kesepakatan Bersama Antara PT. Bukit Asam Tbk Dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tentang Pengelolaan Tanah Dan Bangunan Di Terminal Bantingan Tanjung Enim	17/08/2024	10 Tahun
12	PT. BA TENTANG PINJAM PAKAI LAHAN TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH	119/ 014/ IV/ 2023 T/ 188/ 0400/ HK. 03/ VIII/ 2024 Kesepakatan Bersama Antara PT. Bukit Asam Tbk Dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tentang Pinjam Pakai Lahan Tempat Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Muara Enim	17/08/2024	10 Tahun
13	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	074/ 017/ IV/ 2024 4240/ Un. 03/ OT. 01. 6/ 8/ 2024 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	02/09/2024	5 Tahun
14	PT. BUKIT ASAM	119/ 013/ IV/ 2024 T/ 187/ 0400/ HK. 03/ VIII/ 2024 Kesepakatan Bersama Antara PT. Bukit Asam Tbk Dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tentang Pengelolaan Tanah Dan Bangunan Di Terminal Bantingan Tanjung Enim	19/09/2024	3 Tahun
15	UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG	074/ 21/ IV/ 2024 0051/UN9/Mou/DN/2024 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim	14/10/2024	5 Tahun



No.	Mitra Kerjasama	MoU	Tanggal Penetapan	Jangka Waktu Kerjasama
		Dan Universitas Sriwijaya Palembang Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.		
16	Perum Bulog Lahat	119/ 024/ IV/ 2024 PK-001/06010/10/ 2024 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Badan Urusan Logistik Cabang Lahat tentang Pengadaan Penyaluran Komoditas Pangan.	28/10.2024	2 Tahun
17	BPJS KETENAGAKERJAAN MUARA ENIM	PER/147/10/2024 119/023/IV/2024 Nota Kesepakatan Antara BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim Dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tentang Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Muara Enim.	28/10/2024	1 Tahun
18	POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG	074/25/ IV/ 2024 NK/121/HK.07/PTP.5/ 2024 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dengan Politeknik Pariwisata Palembang Tentang Tridarma Perguruan Tinggi Dan Inovasi Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.	14/11.2024	2 Tahun
19	UNIVERSITAS SERASAN MUARA ENIM	074/27/ IV/ 2024 16.008/UNSAN/XI/2024 KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DAN UNIVERSITAS SERASAN TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN IPTEK, INOVASI, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA	02/12/2024	5 Tahun

### 3. Permasalahan dan Solusi

Kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama antara Pemerintah dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan, relatif tidak ada permasalahan yang berarti. Hal ini tentunya tidak lepas dari koordinasi, kerjasama dan dukungan dari semua pihak sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan kerjasama, serta komitmen bersama dalam pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati.



#### 4.2.3. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Sinergi)

##### 1) Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah

Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi, senantiasa bekerja sama serta berkoordinasi, baik kepada lembaga legislatif, Unsur Forum Koordinasi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal lainnya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim berjalan baik dan kondusif.

Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka menjalin hubungan kerjasama yang serasi dengan DPRD Kabupaten Muara Enim, unsur Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi vertikal, antara lain:

- a) Menciptakan iklim yang kondusif dengan DPRD Kabupaten Muara Enim dan jajaran unsur Forum Koordinasi Pemerintah Daerah untuk bersama sama mewujudkan *Good Governance*.
- b) Melaksanakan rapat koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pemerintah Daerah baik yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan maupun yang bersifat insidental sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang di daerah.

##### 2) Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi vertikal diantaranya adalah penyusunan Buku Profil Daerah yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Muara Enim. Selain itu, kerjasama yang dilakukan dengan instansi vertikal yaitu pelaksanaan kegiatan Karya Bhakti Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), Upaya Khusus (UPSUS) bidang pertanian, dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) yang diselenggarakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Komandan Kodim 0404/Muara Enim. Program kegiatan yang dilaksanakan melalui program TMMD meliputi kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik diantaranya pembangunan jalan, jembatan, balai desa, masjid, dan MCK. Sedangkan kegiatan non fisik diantaranya penyuluhan tentang bela negara, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, keagamaan, kesehatan lingkungan dan KB, hukum, dan ketertiban masyarakat. Ada pun jabaran mengenai kerjasama tersebut ialah sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Sinergi)**

No	Pihak yang diajak Bekerjasama	Landasan Kerjasama (No. MoU)	Implementasi Kerjasama (PKS/Kegiatan/Program)
1.	Badan Standarisasi Dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian	119/ 011/ IV/ 2024 459/ BSKJI/ VII/ 2024 Nota Kesepakatan Antara Badan Standarisasi Dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tentang Pemanfaatan Teknologi Dan Inovasi Yang	Sinergi Kerja Sama Dibidang Perindustrian Terhadap Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Yang Berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim

No	Pihak yang diajak Bekerjasama	Landasan Kerjasama (No. MoU)	Implementasi Kerjasama (PKS/Kegiatan/Program)
		Berkelanjutan di Kabupaten Muara Enim	
2.	Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim	119/ 012/ IV/ 2024 303/ 16030/ Hm. 310/ 2024 Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim Tentang Penyediaan, Pemanfaatan Dan Pengembangan Data / Atau Informasi Pembangunan Daerah Menuju Muara Enim Satu Data	Sinergi Kerja Sama Program Muara Enin Satu Data
3.	Lembaga Administrasi Negara	119/ 016/ IV/ 2024 36/ K. 1/Hkm. 03. 1 Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dengan Lembaga Administrasi Negara Tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Muara Enim Melalui Penyelenggaraan Kegiatan Analisis Kebijakan, Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi, Serta Pendidikan Tinggi Terapan	Sinergi Program Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Kegiatan Analisis Kebijakan, Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi, Serta Pendidikan Tinggi Terapan
4.	Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan	HK. 02/ MoU.II/ PW07/ 4/ 2024 119/ 018/ IV/ 2024 1973/ T/ 14500/ KL.02/ IX/ 2024 Nota Kesepakatan Antara Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dan PT Bukit Asam Tbk Tentang Sinergi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Wilayah Kabupaten Muara Enim	Sinergi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Di Wilayah Kabupaten Muara Enim
5.	BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim	Per/147/10/2024 119/023/IV/2024 Nota Kesepakatan Antara BPJS Ketenagakerjaan Muara Enim Dan Pemerintah Kabupaten	Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Muara Enim.



No	Pihak yang diajak Bekerjasama	Landasan Kerjasama (No. MoU)	Implementasi Kerjasama (PKS/Kegiatan/Program)
		Muara Enim Tentang Sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Muara Enim	
6.	Southeast Asian Ministers Of Education Organization Regional Centre For Food And Nutrition	074/26/ IV/ 2024 083 /Recfon-MoU/XI/2024 Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dengan Seameo Recfon Tentang Pengembangan Masyarakat, Pendidikan Dan Penelitian Dibidang Pangan Dan Gizi Untuk Penanggulangan Stunting	Sinergi Pengembangan Masyarakat, Pendidikan Dan Penelitian Dibidang Pangan Dan Gizi Untuk Penanggulangan Stunting
7.	PT PLN (Persero) Uid S2jb Up3 Lahat	No. Pihak Pertama : 02/Bapenda-II/2024  No. Pihak Kedua : 0012.Mou/Hkm.02.01/F1103000 0/2024	Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik, Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pengawas, Penertiban Penggunaan Penerangan Jalan Umum Dan Sosialisasi Pembayaran Listrik.
8.	PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan	No. Pihak Pertama : 074/12/PKS/Disperkimtan-IV/2024  No. Pihak Kedua : 0001.Mou/Hkm.02.01/F1109000 0/2024	Pelaksanaan Pembangunan, Operasional, Dan Pemeliharaan Jaringan Listrik Perdesaan Di
9.	PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Lahat  Pt PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Ogan Ilir	No. Pihak Ketiga : 0002.Mou/Hkm.02.01/F1103000 0/2024  No. Pihak Keempat : 0001.Mou/Hkm.02.01/F1100000 0/2024	Kecamatan Panang Enim, Kecamatan Benakat, Kecamatan Gunung Megang, Kecamatan Rambang Niru, Kecamatan Rambang, Kecamatan Lubai dan Kecamatan Lubai Ulu Kabupaten Muara Enim
10.	PT PLN (Persero) UIW S2jb Up3 Lubuklinggau	No. Pihak Pertama : 36/Disperkimtan-I/2024 03/Bapenda-Ii/2024	Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik,



No	Pihak yang diajak Bekerjasama	Landasan Kerjasama (No. MoU)	Implementasi Kerjasama (PKS/Kegiatan/Program)
		No. Pihak Kedua : 0012.Mou/Hkm.02.01/F1103000 0/2024	Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pengawas, Penertiban Penggunaan Penerangan Jalan Umum Dan Sosialisasi Pembayaran Listrik.
11.	PT PLN (Persero) UID S2jb Up3 Ogan Ilir	No. Pihak Pertama : 03/Disperkim-I/2024 04/Bapenda-II/2024  No. Pihak Kedua : 0071.Pj/Hkm.02.01/F1110000/2 024	Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik, Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pengawas, Penertiban Penggunaan Penerangan Jalan Umum Dan Sosialisasi Pembayaran Listrik.
1	Kodim 04/04 Muara Enim	Nomor : 554/21/Satpol Pp /2024 Nomor : B/401/VII/2024	Kerjasama Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMMD)
13.	Satpol Pp Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Nomor : 134.4/1975/Satpol Pp-M.E/2024 Nomor : 134.4/413/Satpol Pp-Pali/2024	Kerjasama Penegakan Perda Dan Perkada, Menyelenggarakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dalam Menjaga Konduksifitas Di Daerah Perbatasan Kabupaten/Kota, Serta Kegiatan Lainnya Yang Berhubungan Dengan Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	VIII/1258/PKS/DPPKB-1/2024	Penyelenggaraan Peningkatan Layanan Dan Pemberdayaan Keluarga Secara Terintegrasi Dan Berkelanjutan
15.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	VIII/1256/PKS/DPPKB-1/2024	
16.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	VIII/1257/PKS/DPPKB-1/2024	



No	Pihak yang diajak Bekerjasama	Landasan Kerjasama (No. MoU)	Implementasi Kerjasama (PKS/Kegiatan/Program)
17.	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya	0051/Un9/MoU/Dn/2024 074/21/IV/2024 Kesepakatan Bersama Antara Universitas Sriwijaya Dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia	Penyusunan Dokumen Profil Potensi Unggulan Dan Peluang Investasi Kabupaten Muara Enim Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Tahun 2024
18.	Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya	0051/Un9/Mou/Dn/2024 074/21/IV/2024 Kesepakatan Bersama Antara Universitas Sriwijaya Dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Pengembangan Kompetensi Sumberdaya Manusia	Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman Modal Pada Aplikasi Pri (Potensi Investasi Regional), Aplikasi Bedah Investasi Dan Website Dpmpmsp Kabupaten Muara Enim Sub Kegiatan Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah Pada Sistem Pir (Potensi Investasi Regional) Tahun 2024
19.	Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia	Surat Perintah Kerja No. 570/2106/Spk/Dpmpmsp-2/2024 Berdasarkan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Dan Lembaga Administrasi Negara No. 019/04/Iv/2022 Dan No.15/K.1/Hkm.03.01 Tanggal 28 Maret 2022	Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan (Sp) Dan Standar Operasional Prosedur (Sop) Sebagai Pedoman Dan Acuan Terhadap Produk Layanan Dan Pelaksanaan Proses Perizinan Dan Non Perizinan Yang Telah Dilimpahkan Kepada Dpmpmsp Kabupaten Muara Enim
2	Sekolah Tinggi Theologia Ebenhaezer	No. 041/305/Dpk-2/2024 No. A.19 /210/Pks/Stte/XI/2024	-
2	Smp Xaverius Emmanuel Tanjung Enim	No. 041/285/Dpk-2/2024 No. 10.9/Smp.Xe/E/IX/2024	-
2	Smp Negeri Lubai	No. 041/286/Dpk-2/2024 No.421.3/013/Mou/Smpn3lubai/	-



No	Pihak yang diajak Bekerjasama	Landasan Kerjasama (No. MoU)	Implementasi Kerjasama (PKS/Kegiatan/Program)
		IX/2023	
2	Kejaksaan Negeri Muara Enim	No. 041/31/Dpk-2/2024 No. 2013/6.615/07/2024	-
2	SMP Negeri 4 Muara Enim	No. 041/275.1/Dpk-2/2024 No. 420/26/Smpn4me/2024	-
2	Poltekpar Palembang	Nomor: 074/001/Pks/Dpek/IX/2024 Nomor Nk/122/Hk.07/Ptp.5/2024	Perjanjian Kerja Sama Dalam Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Riset, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Ini Disesuaikan Dengan Kemampuan Anggaran Masing-Masing. Apabila Terjadi Perbedaan Pendapat Atau Perselisihan Dalam Pelaksanaan Dan Atau Penafsiran Ini, Sejauh Mungkin Para Pihak Akan Menyelesaikan Melalui Musyawarah Untuk Mufakat Dengan Tetap Memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim	800/812/Bkpsdm/2024 Pks/004/VII/Ka/Pc/2024bnnk	Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika
2	Pemerintah Kota Surabaya	134.4/004/Pks/Bkpsdm/IV/2024 100.3.7.1/23986/436.8.4/2024	Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen
2	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan	893.4/825/BKPSDM-4/2024 890/2212/BPSDMD/V/2024	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan V Dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim



No	Pihak yang diajak Bekerjasama	Landasan Kerjasama (No. MoU)	Implementasi Kerjasama (PKS/Kegiatan/Program)
2	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau	893.4/753/BKPSDM-4/2024 800.2.1/383/BKPSDM.LLG	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan	893.4/831/BKPSDM-4/2024 893/3181/BPSDMD/V/2024	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXXVII Dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan	893.4/825/BKPSDM-4/2024 890/2212/BPSDMD/V/2024	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan V Dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau	893.4/064/BKPSDM-4/2024 800.2.1/382/BKPSDM.LLG	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau	893.4/836/BKPSDM-4/2024 800.2.1/454/BKPSDM.LLG/2024	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3	Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan	893.4/0062/Bkpsdm-4/2024 0406/B7.11/Kp/2024	Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan 1. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Dasar 2. Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Menengah Pertama 3. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Bagi Guru Angkatan I 1. Implementasi Coaching Dalam Pembelajaran



No	Pihak yang diajak Bekerjasama	Landasan Kerjasama (No. MoU)	Implementasi Kerjasama (PKS/Kegiatan/Program)
			<p>n Bagi Kepala Sekolah Angkatan I</p> <p>2. Implementasi Coaching Dalam Pendampingan Satuan Pendidikan Bagi Pengawas Sekolah</p> <p>3. Implementasi Coaching Dalam Pembelajaran Bagi Guru Angkatan I Kabupaten Muara Enim Tahun 2024</p>
3	Pt. Arga Bangun Bangsa	893.4/845/Bkpsdm-4/2024 083/Iht/Abb/10/2024	Program Internalisasi Core Values Berakhlak Serta Employer Branding Bangga Melayani Bangsa
3	Assessment Center Sumatra Selatan	893.4/844/Bkpsd-4/2024 890/3807/Bpsdmd/Ii/2024	Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Pejabat Pembuat Komitmen (Pkk Tipe C) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim</li> <li>• Pt Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Cabang Muara Enim</li> <li>• Pt Pos Indonesia (Persero)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 900/09/Bapenda-1/2019</li> <li>• 900/35/Bpkad-2/2019</li> <li>• 010/Mre/1/B/ 2019</li> <li>• 25/Reg3/Jkrj/Hk/0119</li> </ul>	Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 900/09/Bapenda-1/2019</li> <li>• 92/180.2-16.03/1/2019</li> </ul>	Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pajak Bumi Dan



No	Pihak yang diajak Bekerjasama	Landasan Kerjasama (No. MoU)	Implementasi Kerjasama (PKS/Kegiatan/Program)
			Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Muara Enim
3	Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35/Mou/Bappeda/ 2019</li> <li>• 269/100-16.03/V/2019</li> </ul>	Kerja Sama Di Bidang Pertanahan
4	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Dan Kepulauan Bangka Belitung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kep-329/WPJ.03/ 2019</li> <li>• 34/MOU/Bappeda/ 2019</li> </ul>	Koordinasi Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi
4	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kep.068/Wpj.03/Kp/2 019</li> <li>• 970/60/Bapenda-I/Pks/2019</li> </ul>	Koordinasi Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim</li> <li>• Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Muara Enim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 900/43/Bapenda/ 2019</li> <li>• 900/96/Bpkad-2/ 2019</li> <li>• B.7070-Kc-Iv/12/ 2019</li> </ul>	Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Pemerintah Kabupaten Muara Enim Secara Online
4	Universitas Taman Siswa Palembang	Nomor: 074/009/IV/2024 Nomor: 207/Uts-Bau/ C.06.01/Plg/2024	Penyusunan Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Kabupaten Muara Enim
4	Universitas Padjadjaran	Nomor :074/04/IV/2024; Nomor: 245/Un.6rkt/ Hk.07.00/2024-Mou	1. Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan (Pengembangan Sistem Aplikasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Di Kabupaten Muara Enim Tahun 2024



No	Pihak yang diajak Bekerjasama	Landasan Kerjasama (No. MoU)	Implementasi Kerjasama (PKS/Kegiatan/Program)
			2. Pengelolaan Data Kelitbangan Dan Peraturan (Monitoring, Evaluasi Dan Pendampingan Pencegahan Penurunan <i>Stunting</i> Di Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
4	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim	No. PKS/005/VIII/KA/PC/2024/BNNK No. 100/284/DPPPA/2024	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Presekursor Narkotika

### 3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, pelaksanaan kerjasama dengan instansi vertikal tidak ada kendala atau permasalahan yang berarti. Hal ini tentunya tidak lepas dari koordinasi, kerjasama dan dukungan dari semua pihak mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kerjasama.

#### 4.2.4. Pembinaan Batas Wilayah

##### 1. Kebijakan dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah bahwa untuk memantapkan penyelesaian batas wilayah pada tingkat Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten telah membentuk Tim Penyelesaian Batas Daerah (TPBD) Kabupaten Muara Enim yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Muara Enim setiap tahunnya.

##### 2. Realisasi dan Kegiatan

Penataan batas wilayah Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antara lain melalui penelitian dokumen, pelacakan, pengukuran, pemasangan pilar batas permanen (apabila sepakat), pembuatan peta batas dan deskripsi pilar batas (apabila sepakat). Kabupaten Muara Enim memiliki 11 Segmen batas yang berbatasan dengan kabupaten /Kota lainnya. Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten/Kota yang sudah dalam bentuk Permendagri terdapat 9 Segmen yaitu:

A. Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan **Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu** (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 102 Tahun 2017)

1) Kecamatan Semende Darat Laut

B. Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan **Kabupaten Lahat** (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2019)

Khusus Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Lahat, Berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2019, terdapat 7 Sub segmen sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Muara Enim
- 2) Kecamatan Ujan Mas
- 3) Kecamatan Lawang Kidul
- 4) Kecamatan Tanjung Agung
- 5) Kecamatan Panang Enim
- 6) Kecamatan Semende Darat Laut
- 7) Kecamatan Semende Darat Tengah

Khusus segmen Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan Kabupaten Lahat. Permendagri No. 111 Tahun 2019 diwilayah Kecamatan Muara Enim dengan Merapi Timur Kab.Lahat telah dilaksanakan pemasangan pilar permanen tugu batas sebanyak 12 Tugu/pilar pada tahun 2022 oleh Kabupaten Muara Enim.

C. Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan **Kabupaten OKU** (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2019) Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten terdapat 7 Sub segmen sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Tanjung Agung
- 2) Kecamatan Panang Enim
- 3) Kecamatan Semende Darat Laut
- 4) Kecamatan Semende Darat Tengah
- 5) Kecamatan Semende Darat Ulu
- 6) Kecamatan Lubai Ulu
- 7) Kecamatan Lubai

Khusus Segmen Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan Kabupaten OKU (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2019) telah dilaksanakan pemasangan Pilar Permanen Tugu batas sebanyak 12 Tugu/pilar pada tahun 2023 oleh Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten OKU di Wilayah Kecamatan Semende Darat Laut dengan Kecamatan Ulu Ogan.

D. Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan **Musi Rawas** (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 45 tahun 2017) Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Musi Rawas terdapat 2 Sub segmen sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Ujan Mas
- 2) Kecamatan Benakat



- E. Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan **Kabupaten PALI** (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2019) Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Pali, berdasarkan terdapat 6 Sub segmen sebagai berikut:
- 1) Kecamatan Gunung Megang
  - 2) Kecamatan Benakat
  - 3) Kecamatan Belimbing
  - 4) Kecamatan Empat Petulai Dangku
  - 5) Kecamatan Lembak
  - 6) Kecamatan Sungai Rotan
- F. Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan **Kota Palembang** (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 31 Tahun 2018). Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kota Palembang terdapat 1 Sub segmen sebagai berikut:
- 1) Kecamatan Muara Belida
- G. Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan **Kabupaten Banyu Asin** (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 95 Tahun 2022). Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Banyu Asin, terdapat 3 Sub segmen sebagai berikut:
- 1) Kecamatan Muara Belida
  - 2) Kecamatan Gelumbang
  - 3) Kecamatan Sungai Rotan
- Khusus Segmen Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 95 Tahun 2022) tahap Proses pemasangan Pilar Permanen Tugu batas sebanyak 36 Tugu/pilar pada tahun 2023 (APBDP 2023) oleh Kabupaten Muara Enim berbatas dengan Kabupaten Banyuasin di Wilayah Kecamatan Muara Belida dengan Kecamatan Rantau Bayur.
- H. Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan **Kota Pagar Alam** (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun Tahun 2022) Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kota Pagar Alam, terdapat 2 Sub segmen sebagai berikut:
- 1) Kecamatan Semende Darat Tengah
  - 2) Kecamatan Semende Darat Ulu
- I. Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan **Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS)** (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2022)

Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten /Kota yang dalam tahapan Draf Permendagri ada Dua (2) Segmen yaitu:

1) Kota Prabumulih

Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kota Prabumulih (Draf Peraturan Menteri Dalam Negeri No Tahun 2022) terdapat 5 Sub segmen sebagai berikut:

- a) Kecamatan Empat Petulai Dangku
- b) Kecamatan Rambang Niru
- c) Kecamatan Rambang
- d) Kecamatan Belida Darat
- e) Kecamatan Lembak

2) Kabupaten Ogan Ilir (OI)

Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Ilir (OI) (Dalam proses Peraturan Menteri Dalam Negeri ). Terdapat 5 Sub segmen sebagai berikut:

- a) Kecamatan Muara Belida
- b) Kecamatan Gelumbang
- c) Kecamatan Kelekar
- d) Kecamatan Belida Darat
- e) Kecamatan Lubai

J. Khusus Segmen Batas Kecamatan dalam **Kabupaten Muara Enim**

1) Kecamatan Muara Enim

- a) Kecamatan Muara Enim berbatas dengan Kecamatan Ujan Mas
- b) Kecamatan Muara Enim berbatas dengan Kabupaten Lahat
- c) Kecamatan Muara Enim berbatas dengan Kecamatan Lawang Kidul
- d) Kecamatan Muara Enim berbatas dengan Kecamatan Gunung Megang

2. Kecamatan Ujan Mas

- a) Kecamatan Ujan Mas berbatas dengan Kecamatan Benakat
- b) Kecamatan Ujan Mas berbatas dengan Kecamatan Muara Enim
- c) Kecamatan Ujan Mas berbatas dengan Kecamatan Gunung Megang
- d) Kecamatan Ujan Mas berbatas dengan Kabupaten Musirawas

3. Kecamatan Lawang Kidul

- a) Kecamatan lawang Kidul berbatas dengan Kecamatan Muara Enim
- b) Kecamatan lawang Kidul berbatas dengan Kabupaten Lahat
- c) Kecamatan lawang Kidul berbatas dengan Kecamatan Rambang Niru
- d) Kecamatan lawang Kidul berbatas dengan Kecamatan Tanjung Agung
- e) Kecamatan lawang Kidul berbatas dengan Kecamatan Gunung Megang

4. Kecamatan Tanjung Agung

- a) Kecamatan Tanjung Agung berbatas dengan Kecamatan Lawang Kidul
- b) Kecamatan Tanjung Agung berbatas dengan Kecamatan Panang Enim
- c) Kecamatan Tanjung Agung berbatas dengan Kabupaten Oku
- d) Kecamatan Tanjung Agung berbatas dengan Kecamatan Lubai Ulu



- e) Kecamatan Panang Enim
  - a. Kecamatan Panang Enim berbatas dengan Kecamatan Tanjung Agung
  - b. Kecamatan Panang Enim berbatas dengan Kecamatan Semende Darat Laut
  - c. Kecamatan Panang Enim berbatas dengan Kabupaten Oku
  - d. Kecamatan Panang Enim berbatas dengan Kabupaten Lahat
  
- f) Kecamatan Semende Darat Laut
  - a) Kecamatan Semende Darat Laut berbatas dengan Kecamatan Semende Darat Tengah
  - b) Kecamatan Semende Darat Laut berbatas dengan Kecamatan Panang Enim
  - c) Kecamatan Semende Darat Laut berbatas dengan Kabupaten Lahat
  - d) Kecamatan Semende Darat Laut berbatas dengan Kabupaten Oku
  
- g) Kecamatan Semende Darat Tengah
  - a) Kecamatan Semende Darat Tengah dengan Kecamatan Semende Darat Laut
  - b) Kecamatan Semende Darat Tengah dengan Kecamatan Semende Darat Ulu
  - c) Kecamatan Semende Darat Tengah berbatas dengan Kabupaten Lahat
  - d) Kecamatan Semende Darat Tengah berbatas dengan Kabupaten Oku
  
- h) Kecamatan Semende Darat Ulu
  - a) Kecamatan Semende Darat Ulu berbatas dengan Kecamatan Semende Darat Tengah
  - b) Kecamatan Semende Darat Ulu berbatas dengan Kabupaten Lahat
  - c) Kecamatan Semende Darat Ulu berbatas dengan Kabupaten Okus
  - d) Kecamatan Semende Darat Ulu berbatas dengan Kabupaten Oku
  - e) Kecamatan Semende Darat Ulu berbatas dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
  - f) Kecamatan Semende Darat Ulu berbatas dengan Kota Pagar Alam
  
- i) Kecamatan Benakat
  - a) Kecamatan Benakat berbatas dengan Kecamatan Ujan Mas
  - b) Kecamatan Benakat berbatas dengan Kecamatan Gunung Megang
  - c) Kecamatan Benakat berbatas dengan dengan Kabupaten Pali
  - d) Kecamatan Benakat berbatas dengan dengan Kabupaten Musi Rawas
  
- 10. Kecamatan Gunung Megang
  - a) Kecamatan Gunung Megang berbatas dengan Kecamatan Benakat
  - b) Kecamatan Gunung Megang berbatas dengan Kecamatan Muara Enim
  - c) Kecamatan Gunung Megang berbatas dengan Kecamatan Belimbing
  - d) Kecamatan Gunung Megang berbatas dengan Kecamatan Rambang Niru
  - e) Kecamatan Gunung Megang berbatas dengan Ujan Mas
  - f) Kecamatan Gunung Megang berbatas dengan Kecamatan Lawang Kidul
  - g) Kecamatan Gunung Megang berbatas dengan Kabupaten Pali



11. Kecamatan Belimbing
  - a) Kecamatan Belimbing berbatas dengan Kecamatan Rambang Niru
  - b) Kecamatan Belimbing berbatas dengan Kecamatan Gunung Megang
  - c) Kecamatan Belimbing berbatas dengan Kecamatan Empat Petulai Dangku
  - d) Kecamatan Belimbing berbatas dengan Kabupaten Pali
  
12. Kecamatan Rambang Niru
  - a) Kecamatan Rambang Niru berbatas dengan Belimbing
  - b) Kecamatan Rambang Niru berbatas dengan Rambang
  - c) Kecamatan Rambang Niru berbatas dengan Kecamatan Gunung Megang
  - d) Kecamatan Rambang Niru berbatas dengan Kecamatan Lawang Kidul
  - e) Kecamatan Rambang Niru berbatas dengan Kecamatan Tanjung Agung
  - f) Kecamatan Rambang Niru berbatas dengan Lubai Ulu
  - g) Kecamatan Rambang Niru berbatas dengan Empat Petulai Dangku
  - h) Kecamatan Rambang Niru berbatas dengan Kota Prabumulih
  
13. Kecamatan Rambang
  - a) Kecamatan Rambang berbatas dengan Kecamatan Rambang Niru
  - b) Kecamatan Rambang berbatas dengan Kecamatan Lubai
  - c) Kecamatan Rambang berbatas dengan Kecamatan Lubai Ulu
  - d) Kecamatan Rambang berbatas dengan Kota Parbumulih
  
14. Kecamatan Lubai
  - a) Kecamatan Lubai berbatas dengan Kecamatan Lubai Ulu
  - b) Kecamatan Lubai berbatas dengan Kecamatan Rambang
  - c) Kecamatan Lubai berbatas dengan Kota Prabumulih
  - d) Kecamatan Lubai berbatas dengan Kecamatan Kabupaten OI
  - e) Kecamatan Lubai berbatas dengan Kabupaten Oku
  
15. Kecamatan Lubai Ulu
  - a) Kecamatan Lubai Ulu berbatas Dengan Kecamatan Lubai
  - b) Kecamatan Lubai Ulu berbatas Dengan Kecamatan Rambang
  - c) Kecamatan Lubai Ulu berbatas dengan Kecamatan Tanjung Agung
  - d) Kecamatan Lubai Ulu berbatas dengan Kecamatan Rambang Niru
  - e) Kecamatan Lubai Ulu berbatas dengan Kabupaten Oku
  
16. Kecamatan Empat Petulai Dangku
  - a) Kecamatan Empat Petulai Dangku berbatas Dengan Kecamatan Belimbing
  - b) Kecamatan Empat Petulai Dangku berbatas Dengan Kecamatan Rambang Niru
  - c) Kecamatan Empat Petulai Dangku berbatas Dengan Kabupten Pali
  - d) Kecamatan Empat Petulai Dangku berbatas Dengan Kota Prabumulih



17. Kecamatan Lembak

- a) Kecamatan Lembak berbatas Dengan Kecamatan Sungai Rotan
- b) Kecamatan Lembak berbatas Dengan Kecamatan Gelumbang
- c) Kecamatan Lembak berbatas Dengan Kecamatan Kelekar
- d) Kecamatan Lembak berbatas Dengan Kecamatan Belide Darat
- e) Kecamatan Empat Petulai Dangku berbatas Dengan Kabupten Pali
- f) Kecamatan Empat Petulai Dangku berbatas Dengan Kota Prabumulih

18. Kecamatan Belide Darat

- a) Kecamatan Belide Darat berbatas dengan Kecamatan Lembak
- b) Kecamatan Belide Darat berbatas Dengan Kecamatan Kelekar
- c) Kecamatan Belide Darat berbatas Dengan Kabupten OI
- d) Kecamatan Empat Petulai Dangku berbatas Dengan Kota Prabumulih

19. Kecamatan Sungai Rotan

- a) Kecamatan Sungai Rotan berbatas dengan Kecamatan Gelumbang
- b) Kecamatan Sungai Rotan berbatas dengan Kecamatan Lembak
- c) Kecamatan Sungai Rotan berbatas dengan dengan Kabupten Pali
- d) Kecamatan Sungai Rotan berbatas dengan dengan Kabupaten Banyu Asin

20. Kecamatan Gelumbang

- a) Kecamatan Gelumbang Dengan Kecamatan Sungai Rotan
- b) Kecamatan Gelumbang Dengan Kecamatan Lembak
- c) Kecamatan Gelumbang dengan Kecamatan Muara Belida
- d) Kecamatan Gelumbang dengan Kecamatan Kelekar
- e) Kecamatan Gelumbang Dengan Kabupaten Banyu Asin
- f) Kecamatan Gelumbang Dengan Kabupaten OI

21. Kecamatan Kelekar

- a) Kecamatan Kelekar berbatas Dengan Kecamatan Gelumbang
- b) Kecamatan Muara Belide berbatas dengan Kecamatan lembak
- c) Kecamatan Muara Belide berbatas dengan Kecamatan Belide Darat
- d) Kecamatan Muara Belide berbatas dengan Kabupaten OI

22. Kecamatan Muara Belide

- a) Kecamatan Muara Belide Dengan Kecamatan Gelumbang
- b) Kecamatan Muara Belide Dengan Kabupaten Banyu Asin
- c) Kecamatan Muara Belide Dengan Kota Palembang
- d) Kecamatan Muara Belide Dengan Kabupaten OI

K. Khusus Segmen Batas Kelurahan Kecamatan Kabupaten Muara Enim 1)  
Kecamatan Muara Enim (6 Kelurahan)

- a) Kelurahan Air Lintang
- b) Kelurahan Pasa I



- c) Kelurahan Pasar II
- d) Kelurahanh Pasar III
- e) Kelurahan Tungkal
- f) Kelurahan Muara Enim

2) Kecamatan Lawang Kidul (3 Kelurahan)

a. Kelurahan Pasar Tanjung Enim

- ✓ Kelurahan Pasar Tanjung Enim berbatas dengan Desa Tegal Rejo
- ✓ Kelurahan Pasar Tanjung Enim berbatas dengan Kelurahan Tanjung Enim Selatan

b. Kelurahan Tanjung Enim

- ✓ Kelurahan Tanjung Enim berbatas dengan Desa Lingga
- ✓ Kelurahan Tanjung Enim berbatas dengan Desa Tegal Rejo
- ✓ Kelurahan Tanjung Enim berbatas dengan Desa Darmo
- ✓ Kelurahan Tanjung Enim berbatas dengan Kelurahan Tanjung Enim Selatan

c. Kelurahan Tanjung Enim Selatan

- ✓ Kelurahan Tanjung Enim Selatan berbatas dengan Kelurahan Tanjung Enim
- ✓ Kelurahan Tanjung Enim Selatan berbatas dengan Kelurahan Pasar Tanjung
- ✓ Kelurahan Keban Agung Tanjung Enim Selatan berbatas dengan Desa Keban Agung

3) Kecamatan Gelumbang (1 Kelurahan )

✓ Kelurahan Gelumbang

- Kelurahan Gelumbang berbatas dengan Desa Bitis
- Kelurahan Gelumbang berbatas dengan Desa Sukamenang
- Kelurahan Gelumbang berbatas dengan Desa Talang Taling
- Kelurahan Gelumbang berbatas dengan Desa Tambangan Kelekar
- Kelurahan Gelumbang berbatas dengan Desa Embacang kelekar
- Kelurahan Gelumbang berbatas dengan Desa Karang Endah
- Kelurahan Gelumbang berbatas dengan Desa Midar
- Kelurahan Gelumbang berbatas dengan Desa Paya Bakal

3. Permasalahan dan Solusi

Mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, bahwa Penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi dilakukan oleh Gubernur, maka peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Tim PBD Provinsi Sumatera Selatan sangat diperlukan dalam rangka penyelesaian dan kerjasama perbatasan yang implementasinya memerlukan penanganan secara khusus dan terkoordinasi sesuai kewenangannya, selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan



lebih mempercepat baik proses maupun penyelesaian guna mendukung terciptanya iklim kondusif secara politis maupun investasi di daerah perbatasan.

#### 4.2.5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Secara umum bencana yang terjadi di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 berupa bencana alam dan bencana non alam. Adapun bencana alam berupa kebakaran pemukiman penduduk atau bangunan serta kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, banjir, angin puting beliung/angin kencang, orang tenggelam, dan bencana alam lainnya.

##### A. Kebakaran

Sepanjang tahun 2024 telah terjadi 106 bencana kebakaran di Kabupaten Muara Enim, 13 di antaranya merupakan kebakaran rumah dan bangunan, 90 merupakan kebakaran hutan dan lahan, dan 3 di antaranya merupakan jenis kebakaran lainnya.

- 1) Kebakaran Permukiman/Bangunan pada tahun 2024 telah terjadi sebanyak 13 kejadian dan telah ditanggulangi oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

**Tabel 4.5 Kejadian Bencana Kebakaran Bangunan Di Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
1	Selasa, 20 Februari 2024	Belimbing	Desa Bulang	Kebakaran Rumah	Telah terjadi kebakaran rumah hunian pada hari Senin, 19 Februari 2024 pukul 19.45 WIB mengakibatkan 1 unit rumah panggung dan bengkel terbakar.
2	Kamis, 07 Maret 2024	Benakat	Desa Pagar Dewa	Kebakaran Rumah	Telah terjadi kebakaran rumah hunian pada hari Kamis, 07 Maret 2024 pukul 01.00 WIB mengakibatkan 1 unit rumah terbakar.
3	Minggu, 14 April 2024	Muara Enim	Pasar II	Kebakaran Rumah	Telah terjadi kebakaran rumah hunian pada hari Minggu, 14 April 2024 pukul 10.30 WIB mengakibatkan 1 unit rumah terbakar rusak berat dan 1 unit rusak ringan.
4	Kamis, 25 April 2024	Tanjung Agung	Desa Tanjung Bulan	Kebakaran Rumah	Telah terjadi kebakaran rumah hunian pada hari Kamis, 25 April 2024 pukul 03.17 WIB di Kampung 2 Desa Tanjung Bulan Kecamatan Tanjung Agung. Penyebab : Korsleting Listrik.
5	Rabu, 19 Juni 2024	SDU	Segamit	Kebakaran Rumah	Telah terjadi kebakaran rumah hunian atas Nama Bapak Sehmin. Sumber api info sementara dikarenakan konslet aliran listrik.

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
6	Sabtu, 06 Juli 2024	Muara Enim	Kel. Tungkal	Kebakaran Rumah	ada hari Sabtu malam tanggal 06 Juli 2024 pukul 23.15 WIB telah terjadi konsleting listrik yang berasal dari rumah bapak Heri Agustin yang menyebabkan kebakaran rumah. Api sudah membesar dan menyambar 2 unit rumah yaitu rumah bapak Abdul Wahab dan rumah bapak alm. Yunus Alba yang menyebabkan 3 rumah yang terbakar.
7	Senin, 22 Juli 2024	Benakat	Kampung 1 Desa Pagar Dewa	Kebakaran Rumah	Sekira pukul 09.00 WIB tim TRC mendapat informasi bahwa telah terjadi kebakaran rumah hunian di desa Pagar dewa kecamatan Benakat. Tim langsung menuju ke lokasi kejadian menggunakan tank suply 4000L bersama DPKP Muara Enim membantu pemadaman dengan menyuplai unit pemadam DPKP, Penyebab kejadian dikarenakan Konsletan Listrik
8	Rabu, 24 Juli 2024	Sungai Rotan	Danau Tampang	Kebakaran Rumah	Pemilik rumah memasak air menggunakan kayu bakar, di tinggalkan sehingga percikan api menyambar rumah.
9	Kamis, 08 Agustus 2024	Muara Enim	JL. Pramuka Kel Pasar I	Kebakaran Ruko	1 unit ruko terbakar tanpa korban jiwa
10	Sabtu, 17 Agustus 2024	Sungai Rotan	Sukarami	Kebakaran Rumah	1 unit rumah terbakar dan 1 korban jiwa
11	Senin, 19 Agustus 2024	Gelumbang	Pinang Banjar	Kebakaran Rumah	Telah Terjadi kebakaran Rumah di desa pinang banjar Penyebab tidak diketahui
12	Senin, 02 September 2024	Lawang Kidul	Karang Asam	Kebakaran Rumah	Menindak lanjuti laporan dari warga bahwa telah terjadi kebakaran rumah di kecamatan lawang kidul. tim posko induk bersama DPKP langsung menuju ke lokasi Menggunakan Unit kendaraan R4 tanky suply pemadam 5000L. Di ketahui bangunan rumah tsb adalah mes PT. MUM yang di huni 8 orang. Saat ini api sudah padam. Tipe kebakaran rusak berat
13	Jumat, 04 Oktober 2024	Belimbing	Dusun 3 Desa Dalam	Kebakaran Rumah	tim mendapatkan laporan telah terjadi kejadian kebakaran Rumah di dusun 3 Desa Dalam Kec. Belimbing

Sumber: BNPB Muara Enim 2024



2) Kebakaran Hutan dan Lahan

Pada tahun 2024 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muara Enim sebanyak 90 kejadian kebakaran yang telah tertangani. Kebakaran tersebut dibagi menjadi beberapa jenis kebakaran yang ditanggulangi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim.

**Tabel 4.6. Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
1	Sabtu, 13 Juli 2024	Ujan Mas	Ulak Bandung	Kebakaran Hutan dan Lahan	
2	Sabtu, 20 Juli 2024	Lawang Kidul	Darmo	Kebakaran Hutan dan Lahan	
3	Minggu, 21 Juli 2024	Gunung Megang	Sumaja Makmur	Kebakaran Hutan dan Lahan	
4	Minggu, 21 Juli 2024	Gelumbang	Gaung Telang	Kebakaran Hutan dan Lahan	
5	Minggu, 21 Juli 2024	Gelumbang	Suka Menang	Kebakaran Hutan dan Lahan	
6	Minggu, 21 Juli 2024	Rambang Niru	Banuayu	Kebakaran Hutan dan Lahan	
7	Minggu, 21 Juli 2024	Lawang Kidul	Darmo	Kebakaran Hutan dan Lahan	
8	Rabu, 24 Juli 2024	Ujan Mas	Ujan Mas	Kebakaran Hutan dan Lahan	
9	Rabu, 24 Juli 2024	Muara Belida	Patra Tani	Kebakaran Hutan dan Lahan	
10	Kamis, 25 Juli 2024	Kelekar	Embacang	Kebakaran Hutan dan Lahan	
11	Jumat, 26 Juli 2024	Ujan Mas	Tanjung Raman	Kebakaran Hutan dan Lahan	
12	Senin, 29 Juli 2024	Muara Belida	Kayua ara Batu	Kebakaran Hutan dan Lahan	

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
13	Selasa, 30 Juli 2024	Gelumbang	Putak	Kebakaran Hutn dan Lahan	
14	Kamis, 01 Agustus 2024	Muara Enim	Petar Luar	Kebakaran Hutn dan Lahan	
15	Kamis, 01 Agustus 2024	Muara Belida	Arisan Musi	Kebakaran Hutn dan Lahan	
16	Jumat, 02 Agustus 2023	Sungai Rotan	Sungai Rotan	Kebakaran Hutn dan Lahan	
17	Minggu, 04 Desember 2024	Muara Enim	JL. Ade Irma Suryani (rumah Tumbuh)	Kebakaran Hutn dan Lahan	
18	Minggu, 04 Desember 2024	Sungai Rotan	Tanjung Miring	Kebakaran Hutn dan Lahan	
19	Senin, 05 Agustus 2024	Gelumbang	Gumai	Kebakaran Hutn dan Lahan	
20	Sabtu, 10 Agustus 2024	Gelumbang	Gumai	Kebakaran Hutn dan Lahan	
21	Rabu, 14 Agustus 2024	Kelekar	Pelempang	Kebakaran Hutn dan Lahan	
22	Rabu, 14 Agustus 2024	Sungai Rotan	Suka Merindu	Kebakaran Hutn dan Lahan	
23	Rabu, 14 Agustus 2024	Sungai Rotan	Suka Maju	Kebakaran Hutn dan Lahan	
24	Jumat, 16 Agustus 2024	Muara Enim	Perumahan Gejorokan 5	Kebakaran Hutn dan Lahan	
25	Sabtu, 17 Agustus 2024	Ujan Mas	Ujan Mas Lama	Kebakaran Hutn dan Lahan	
26	Sabtu, 17 Agustus 2024	Sungai Rotan	Sukarami	Kebakaran Rumah	
27	Senin, 19 Agustus 2024	Ujan Mas	Ujan Mas	Kebakaran Hutn dan Lahan	



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
28	Senin, 19 Agustus 2024	Muara Enim	Kel. Pasar 1	Kebakaran Hutan dan Lahan	
29	Selasa, 20 Agustus 2024	Muara Enim	Jl. Veteran Gerojokan 2 Kel. Pasar 1 Muara Enim	Kebakaran Hutan dan Lahan	
30	Selasa, 20 Agustus 2024	Sungai Rotan	Perbatasan Desa Penandingan dan Tanjung Miring	Kebakaran Hutan dan Lahan	
31	Jumat, 23 Agustus 2024	Gelumbang	Karta Mulya	Kebakaran Hutan dan Lahan	
32	Sabtu, 24 Agustus 2024	Muara Enim	Jl. Hauling Batu bara KM 8	Kebakaran Hutan dan Lahan	
33	Sabtu, 24 Agustus 2024	Muara Enim	Muara Lawai Simpang 3 SPBE	Kebakaran Hutan dan Lahan	
34	Sabtu, 24 Agustus 2024	Gunung Megang	Fajar Indah	Kebakaran Hutan dan Lahan	
35	Sabtu, 24 Agustus 2024	Sungai Rotan	Suka Dana	Kebakaran Hutan dan Lahan	
36	Sabtu, 24 Agustus 2024	Muara Belida	Mulya Abadi	Kebakaran Hutan dan Lahan	
37	Minggu, 25 Agustus 2024	Muara Enim	Muara Lawai	Kebakaran Hutan dan Lahan	
38	Minggu, 25 Agustus 2024	Muara Belida	Mukya Abadi	Kebakaran Hutan dan Lahan	
39	Senin, 26 Agustus 2024	Gelumbang	Karang Endah	Kebakaran Hutan dan Lahan	
40	Selasa, 27 Agustus 2024	Sungai Rotan	Sukarami	Kebakaran Hutan dan Lahan	
41	Selasa, 27 Agustus 2024	Muara Belida	Arisan Musi	Kebakaran Hutan dan Lahan	



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
42	Selasa, 27 Agustus 2024	Benakat	Padang Bindu	Kebakaran Hutan dan Lahan	
43	Selasa, 27 Agustus 2024	Gelumbang	Karta Mulya	Kebakaran Hutan dan Lahan	
44	Rabu, 28 Agustus 2024	Sungai Rotan	Muara Lematang	Kebakaran Hutan dan Lahan	
45	Rabu, 28 Agustus 2024	Lembak	Lembak	Kebakaran Hutan dan Lahan	
46	Rabu, 28 Agustus 2024	Muara Belida	Muara Belida	Kebakaran Hutan dan Lahan	
47	Rabu, 28 Agustus 2024	Sungai Rotan	jl. Servo Sungai Rotan	Kebakaran Hutan dan Lahan	
48	Kamis, 29 Agustus 2024	Sungai Rotan	Muara Lematang	Kebakaran Hutan dan Lahan	
49	Kamis, 29 Agustus 2024	Muara Enim	Desa Kepur	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sekira pukul 12:35 Wib Tim TRC posko induk menerima laporan dari DPKP bahwa telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di desa Kepur (Islamic center). TRC posko induk menuju kelokasi Menggunakan tanky suply 4000L. Diketahui lokasi kebakaran berbatasan dengan kantor PUPR dengan jarak 15Meter
50	Kamis, 29 Agustus 2024	Muara Enim	Jl Veteran Kel. Pasar 1	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sekira pukul 13:40 WIB Tim TRC posko induk menerima laporan dari warga bahwa telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kelurahan pasar 1 (Kuburan cina). TRC posko induk menuju ke lokasi Menggunakan tanky suply 4000L. Di ketahui lokasi kebakaran berjarak ±15Meter dari rumah warga.



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
51	Kamis, 29 Agustus 2024	Muara Enim	Desa Kepur	Kebakaran Hutan dan Lahan	Sekira pukul 14:32 WIB Tim TRC posko induk menerima laporan dari warga bahwa telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Desa Kepur. TRC posko induk menuju ke lokasi Menggunakan tanky suply 4000L. Kendala ke lokasi titik api tidak dapat di lalui kendaraan R4. Tim melakukan pemadaman dengan cara manual.
52	Kamis, 29 Agustus 2024	Sungai Rotan	Suka Maju	Kebakaran Hutan dan Lahan	Team TRC BPBD Posko karhutlah Kec. Sungai Rotan mendapat laporan dari Damkar Kec. Sungai Rotan ada Titik api Di Desa Suka Maju Kec. Sungai Rotan
53	Kamis, 29 Agustus 2024	Sungai Rotan	Muara Lematang	Kebakaran Hutan dan Lahan	Berdasarkan sumber informasi masyarakat fire Hotspot di lokasi kec. Sungai Rotan Wilayah Kodim 0404/ME, merupakan wilayah desa pagar bulan Kec Rantau Bayur Kab Banyuasin dilapangkan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekitar pukul 11:30 WIB Tim Posko Terpadu Koramil 01/Gelumbang tiba dilokasi Groundcheck ke titik Koordinat S : 3'01'41.0"S 104'21'03.0"E</li> </ul>
54	Jumat, 30 Agustus 2024	Muara Enim	SMP N 2	Kebakaran Hutan dan Lahan	Telah Terjadi Bencana KARHUTLA di Halaman SMP N 2 Muara Enim
55	Jumat, 30 Agustus 2024	Sungai Rotan	Suka Rami	Kebakaran Hutan dan Lahan	Team TRC BPBD Posko karhutlah Kec. Sungai Rotan mendapat laporan dari Damkar Kec. Sungai Rotan ada Titik api Di Desa Suka rami Kec. Sungai Rotan
56	Minggu, 1 September 2024	Gelumbang	Teluk Gelam	Kebakaran Hutan dan Lahan	Berdasarkan sumber Informasi Brin Fire Hotspot di lokasi wilayah Kodim 0404/ME pada pukul 07.30 WIB



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
57	Minggu, 1 September 2024	Sungai Rotan	Suka Maju	Kebakaran Hutan dan Lahan	Team TRC BPBD Posko karhutlah Kec. Sungai Rotan mendapat laporan dari Damkar Kec. Sungai Rotan ada Titik api Di Desa Suka Maju Kecamatan Sungai Rotan. Pemadaman Di Hari ke 4 Team Gabungan Karhutlah Posko Kec. Sungai Rotan melakukan pemadaman di Dekat Pemukiman Warga
58	Senin, 02 Septemeber 2024	Gelumbang	Teluk Limau	Kebakaran Hutan dan Lahan	Berdasarkan sumber Informasi Brin Fire Hotspot di lokasi wilayah Kodim 0404/ME, pada pukul 08.00 WIB dilaksanakan pengecekan kembali lokasi kebakaran.
59	Selasa, 03 September 2024	Muara Enim	Karang Raja	Kebakaran Hutan dan Lahan	
60	Selasa, 03 September 2024	Gelumbang	Pinang Banjar	Kebakaran Hutan dan Lahan	Team TRC BPBD Posko karhutlah Gelumbang mendapat laporan titik hotspot dari aplikasi simpongi dan laporan grup BPBD Muara Enim
61	Selasa, 03 September 2024	Muara Belida	Mulya Abadi	Kebakaran Hutan dan Lahan	
62	Rabu, 04 September 2024	Gelumbang	Desa Putak	Kebakaran Hutan dan Lahan	Menindak lanjuti laporan dari Bpk.lukman (Bapedda) Gelumbang bahwa telah terjadi kebakaran hutan dan lahan tim posko Gelumbang langsung menuju kelokasi Menggunakan kendaraan R2 .
63	Kamis, 05 September 2024	Muara Belida	Mulya Abadi	Kebakaran Hutan dan Lahan	
64	Kamis, 05 September 2024	Sungai Rotan	Suka Dana	Kebakaran Hutan dan Lahan	Team TRC BPBD Posko karhutlah Kec. Sungai Rotan mendapat laporan dari Damkar Kec. Sungai Rotan ada Titik api Di Desa Suka Dana



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
65	Kamis, 05 September 2024	Muara Belida	Arisan Musi	Kebakaran Hutan dan Lahan	
66	Jumat, 06 September 2024	Lawang Kidul	Keban Agung	Kebakaran Hutan dan Lahan	
67	Jumat, 06 September 2024	Muara Belida	Patra Tani	Kebakaran Hutan dan Lahan	Diduga berasal dari puntung Rokok
68	Sabtu, 07 September 2024	Tanjung Agung	Pulau Panggung	Kebakaran Hutan dan Lahan	
69	Sabtu, 07 September 2024	Kelekar	Pelempang	Kebakaran Hutan dan Lahan	Team TRC BPBD Posko karhutlah Kec. Gelumbang mendapat titik hotspot di aplikasi sipong i. Gelumbang ada Titik api Di Desa Pelempang Kecamatan Gelumbang.
70	Minggu, 08 September 2024	Ujan Mas	Ulak Bandung	Kebakaran Hutan dan Lahan	Team TRC BPBD Posko induk karhutlah Muara Enim mendapatkan laporan dari Babinsa desa ulak bandung bahwa ada kebakaran hutan di desa ulak bandung kec. Ujan mas kab. Muara enim
71	Senin, 09 September 2024	Muara Enim	Desa Harapan Jaya	Kebakaran Hutan dan Lahan	
72	Senin, 09 September 2024	Gelumbang	Teluk Limau	Kebakaran Hutan dan Lahan	
73	Jumar, 13 September 2024	Gelumbang	Teluk Limau	Kebakaran Hutan dan Lahan	
74	Sabtu, 14 September 2024	Gelumbang	Gumai	Kebakaran Hutan dan Lahan	Team TRC BPBD Posko Kec. Gelumbang mendapat laporan dari Firespot pantaun patroli udara PT. GENESA DIRGANTARA/BNPB/PK-RTY
75	Senin, 16 September 2024	Gelumbang	Putak	Kebakaran Hutan dan Lahan	Team TRC BPBD Posko Kec. Gelumbang mendapat



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
					laporan dari Babinsa bahwa ada titik api di desa Putak
76	Selasa, 17 September 2024	Gelumbang	Gumai	Kebakaran Hutan dan Lahan	
77	Rabu, 18 September 2024	Gelumbang	Putak	Kebakaran Hutan dan Lahan	
78	Rabu, 18 September 2024	Sungai Rotan	Suka Maju	Kebakaran Hutan dan Lahan	Team TRC BPBD Posko karhutlah Kec. Sungai Rotan mendapat laporan dari Kades dan Warga Desa Suka Maju kalau titik api kembali menyala sehingga titik api mengarah ke pemukiman warga, untuk saat ini team telah melakukan pemadaman
79	Rabu, 18 September 2024	Muara Belida	Patra Tani	Kebakaran Hutan dan Lahan	
80	Rabu, 18 September 2024	Gelumbang	Suka menang	Kebakaran Hutan dan Lahan	
81	Kamis, 03 Oktober 2024	Gelumbang	Desa Jambu	Kebakaran Hutan dan Lahan	Menindak lanjuti terkait adanya karhutla di Desa jambu Kecamatan gelumbang, Tim poslap gelumbang bersama AGT koramil dan manggala agni GC ke lokasi dengan jarak ±30Menit dari posko gelumbang. Setiba di lokasi kebakaran kondisi api sudah padam dikarenakan pemilik lahan sudah melakukan penyekatan lahan sehingga api tidak menjalar keluar dari batas tanah pemilik lahan.
82	Jum'at 01 November 2024	Gelumbang	Desa Putak	Kebakaran Hutan dan Lahan	
83	Jum'at 01 November 2024	Sungai Rotan	Desa Suka Jadi	Kebakaran Hutan dan Lahan	



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
84	Jum'at 01 November 2024	Gelumbang	Desa Gumai	Kebakaran Hutan dan Lahan	
85	Jum'at 01 November 2024	Gunung Megang	Desa Gunung Megang Dalam	Kebakaran Hutan dan Lahan	
86	Sabtu 02 November 2024	Gunung Megang	Desa Gunung Megang Dalam	Kebakaran Hutan dan Lahan	TRC BPBD Posko Induk Muara Enim Mendapatkan Laporan dari PT RMK telah terjadi Kebakaran Hutan dan lahan di Desa Gunung Megang Dalam
87	Sabtu 02 November 2024	Gelumbang	Desa Gumai	Kebakaran Hutan dan Lahan	
88	Jumat, 08 November 2024	Ujan mas	desa ulak bandung	Kebakaran Hutan dan Lahan	TRC BPBD Posko induk karhutlah Muara Enim mendapatkan laporan dari Babinsa Desa Ulak Bandung bahwa ada kebakaran hutan di Desa Ulak Bandung Kec. Ujan Mas Kab. Muara Enim
89	Jumat, 15 November 2024	Lawang kidul	Desa Darmo	Kebakaran Hutan dan Lahan	Menindak lanjuti terkait adanya Titik HS di Desa Darmo Kecamatan Lawang kidul Kabupaten Muara Enim, Tim TRC bersama Bhabinsa 404-05 Tanjung Enim menuju ke lokasi titik HS. Diketahui lokasi tersebut merupakan lokasi area tambang PT.MME (Monabang Muara Enim) yang berupa tumpukan Batubara/Stockpile.
90	Sabtu, 16 November 2024	Benakat	Desa padang bindu	Kebakaran Hutan dan Lahan	TRC BPBD berada di lokasi hotspot yang terpantau dari Brin fire hotspot adalah cerobong api milik PT. METCO E dan P Indonesia.

Sumber: BNPB Muara Enim 2024

### 3) Kebakaran Lainnya

Jenis kebakaran lainnya yang terjadi di Kabupaten Muara Enim ialah kebakaran mobil yang terjadi sebanyak 2 kali dan percikan api sebanyak 1 kali. Ada pun jabaran mengenai kebakaran tersebut ialah:



**Tabel 4.7. Kejadian Bencana Kebakaran Lainnya Di Kabupaten Muara Enim  
Tahun 2024**

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
1.	Selasa, 23 April 2024	Muara Enim	Desa Kepur	Kebakaran Mobil	Telah terjadi kebakaran mobil R4 tipe Kijang lama di area SPBU Kepur Muara Enim dengan kriteria Rusak Berat.
2.	Kamis, 03 Oktober 2024	Muara Enim	Muara Enim	Kebakaran Mobil	
3.	Selasa, 23 April 2024	Muara Enim	Pasar I	Percikan Api	Telah terjadi korsleting listrik yang mengakibatkan timbulnya percikan api di atap rumah warga. Percikan api tersebut berhasil di padamkan.

Sumber: BNPB Muara Enim 2024

### **B. Tanah Longsor**

Bencana alam tanah longsor tahun 2024 di Kabupaten Muara Enim terjadi sebanyak 14 kali, 13 kalinya merupakan bencana tanah longsor dan 1 kalinya merupakan bencana tanah longsor yang terjadi bersamaan dengan bencana banjir. Ada pun jabaran mengenai bencana tersebut ialah sebagai berikut:

**Tabel 4.8. Kejadian Bencana Tanah Longsor  
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
1	Senin, 12 Februari 2024	Semende Darat Tengah	Desa Sri Tanjung	Tanah Longsor	Perubahan vegetasi tanah dan tingginya kecepatan angin dan tekanan air hujan dalam beberapa hari mengakibatkan tanah longsor perbatasan antara Desa Sri Tanjung dan Desa Tebing Abang.
2	Minggu, 25 Februari 2024	Ujan Mas	Ulak Bandung	Tanah Longsor	Perubahan vegetasi tanah dan tingginya kecepatan angin dan tekanan air hujan dalam beberapa hari mengakibatkan tanah longsor di Dusun 7 Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan Mas.

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
3	Kamis, 28 Maret 2024	Muara Enim	Tungkal	Tanah Longsor	Tingginya intensitas hujan di wilayah Kabupaten Muara Enim sehingga meluapnya siring air lambai yang mengakibatkan terjadinya tanah longsor di RT. 01 RW. 03 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim mengakibatkan rusaknya atap bangunan gedung kantor Bawaslu
4	Rabu, 24 April 2024	Semende Darat Ulu	Cahaya Alam	Tanah Longsor	Tanah longsor aliran irigasi sawah di Desa Cahaya Alam Kecamatan Semende Darat Ulu
5	Sabtu, 27 April 2024	Semende Darat Tengah	Desa Tebing Tanjung	Tanah Longsor	Hujan dengan intensitas yang sangat tinggi mengakibatkan terjadinya tanah longsor yang berada di Desa Tebing Tanjung Kecamatan Semende Darat Tengah sehingga akses jalan tidak bisa dilalui karena material longsor.
6	Jumat, 28 Juni 2024	Muara Enim	Kel. Tungkal	Tanah Longsor	Pada hari Jum'at 28 Juni 2024 pukul 22:00 wib di RT 01 RW 03, Rukun damai, kelurahan tungkal terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi mengakibatkan tanah longsor yang berada di pinggiran jalan dengan ketinggian ±4M dan di pinggiran jembatan dengan ketinggian ±2M.
7	Selasa, 2 Juli 2024	Ujan Mas	Ulak Bandung	Tanah Longsor	Pada tanggal 23 Januari 2024 telah dilakukan pengecekan oleh tim kabupaten muara Enim yang terdiri dari PUPR, BPBD, Camat Ujan Mas dan perangkat Desa Ulak Bandung dan pada tgl 25 Februari 2024 terjadi longsor susulan yg mengakibatkan dinding dapur mengalami Rusak berat dan dari pihak BPBD Kabupaten Muara Enim telah mendirikan tenda keluarga untuk hunian sementara dan batuan logistik tanggap darurat untuk keluarga An. Wasiman (Pemilik Rumah Terdampak).



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
8	Rabu, 3 Juli 2024	Panang Enim	Lubuk Nipis	Tanah Longsor	Di sebabkan intensitas hujan sangat tinggi sehingga menyebabkan tanah longsor susulan yang terdahulu sekarang kembali terjadi longsor
9	Minggu, 08 September 2024	Semende Darat Tengah	Tanjung Sari	Tanah Longsor	Di sebabkan intensitas hujan sangat tinggi sehingga menyebabkan Longsor di Desa seri tanjung Kecamatan Semende darat tengah
10	Selasa 05 November 2024	Gelumbang	Desa Paya Bakal	Tanah longsor	Gara-gara rangka gorong gorong sudah dimakan usia ditambah Intensitas hujan tinggi hingga mengakibatkan ambles dan longsor KRONOLOGIS sebabkan intensitas hujan sangat tinggi sehingga menyebabkan gorong2 di ruas jalan desa paya bakal Kec Gelumbang mengalami ambles dan longsor,
11	Selasa 06 November 2024	Lawang Kidul	BTN Air paku	Tanah longsor	Telah terjadi bencana Tanah Ambles / longsor yang disebabkan oleh angin kencang disertai curah hujan yang tinggi pada hari selasa tanggal 05 November 2024 pukul 06.00 Wib mengakibatkan tanah longsor di SDN 21 Lawang kidul Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Mengalami kerusakan Dengan rincian (Panjang 16 Meter, Tinggi 2,8Meter).
12	Jumat, 08 November 2024	Semende darat Tengah	Desa Seri Tanjung	Tanah Longsor	Di sebabkan intensitas hujan sangat tinggi sehingga menyebabkan Longsor di Desa seri tanjung Kecamatan Semende darat tengah
13.	Jum'at, 03 Mei 2024	Rambang Niru	Tebat Agung	Banjir disertai Tanah Longsor	Hujan dengan intensitas yang sangat tinggi menyebabkan banjir sehingga terjadinya tanah longsor di jembatan sungai Baung penghubung Desa Tebat Agung dan Desa Gurinam yang menyebabkan tiang jembatan bergeser hingga jalan menurun.



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
14.	Rabu, 18 Desember 2024	Belimbing	Desa Teluk lubuk	Tanah Longsor	Team TRC BPBD mendapatkan laporan dari Pemerintah Desa Teluk lubuk bahwa telah terjadinya longsor yang berdampak rusak nya 1 unit rumah warga ( bagian dapur) akibat Tanah longsor Di Desa teluk lubuk kecamatan belimbing

Sumber: BNPB Muara Enim 2024

### C. Banjir

Bencana alam banjir di Kabupaten Muara Enim terjadi sebanyak 35 kejadian sepanjang tahun 2024. Peristiwa bencana banjir dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 4.9 Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
1	Jum'at, 12 Januari 2024	Muara Enim	Muara Enim	Banjir	Debit atau TMA sungai Enim naik meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
2	Jum'at, 12 Januari 2025	Ujan Mas	Ujan Mas Lama	Banjir	Debit atau TMA sungai Enim naik meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
3	Jum'at, 12 Januari 2026	Ujan Mas	Ujan Mas Ulu	Banjir	Debit atau TMA sungai Enim naik meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
4	Jum'at, 12 Januari 2027	Ujan Mas	Tanjung Raman	Banjir	Debit atau TMA sungai Enim naik meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
5	Sabtu, 13 Januari 2024	Benakat	Pagar Dewa	Banjir	Debit atau TMA sungai Benakat dan sungai Lematang naik meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
6	Sabtu, 13 Januari 2025	Benakat	Pagar Jati	Banjir	Debit atau TMA sungai Benakat dan sungai Lematang naik meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
7	Sabtu, 13 Januari 2026	Benakat	Rami Pasai	Banjir	Debit atau TMA sungai Benakat dan sungai Lematang naik meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
8	Sabtu, 13 Januari 2027	Benakat	Betung	Banjir	Debit atau TMA sungai Benakat dan sungai Lematang naik meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai



No	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
9	Sabtu, 13 Januari 2028	Benakat	Padang Bindu	Banjir	Debit atau TMA sungai Benakat dan sungai Lematang naik meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
10	Sabtu, 13 Januari 2029	Ujan Mas	Ujan Mas	Banjir	Debit atau TMA sungai Benakat dan sungai Lematang naik meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
11	Senin, 15 Januari 2024	Benakat		Banjir	Debit atau TMA sungai Benakat, sungai Buluran, sungai Belida dan sungai Lematang meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
12	Senin, 15 Januari 2025	Belimbing		Banjir	Debit atau TMA sungai Benakat, sungai Buluran, sungai Belida dan sungai Lematang meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
13	Senin, 15 Januari 2026	Gelumbang		Banjir	Debit atau TMA sungai Benakat, sungai Buluran, sungai Belida dan sungai Lematang meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
14	Senin, 15 Januari 2027	Muara Enim		Banjir	Debit atau TMA sungai Benakat, sungai Buluran, sungai Belida dan sungai Lematang meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
15	Senin, 15 Januari 2028	Muara Enim	Pelawaran	Banjir	Debit atau TMA sungai Benakat, sungai Buluran, sungai Belida dan sungai Lematang meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
16	Senin, 15 Januari 2029	Ujan Mas		Banjir	Debit atau TMA sungai Benakat, sungai Buluran, sungai Belida dan sungai Lematang meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
17	Rabu, 17 Januari 2024	Empat Petulai Dangku		Banjir	Debit atau TMA sungai Lematang meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
18	Minggu, 25 Februari 2024	Benakat	Desa Padang Bindu	Banjir	Debit atau TMA sungai Benakat meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
19	Kamis, 25 April 2024	Muara Enim	Muara Enim	Banjir	Debit atau TMA sungai Pelawaran naik meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
20	Jum'at, 26 April 2024	Muara Enim	Muara Enim	Banjir	Debit atau TMA sungai Lematang meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai serta terputusnya akses jalan H. Pangeran Danal Kelurahan Muara Enim



No	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
21	Selasa, 07 Mei 2024	Gunung Megang	Tanjung Terang	Banjir	Hujan dengan intensitas yang sangat tinggi menyebabkan tersumbatnya aliran drainase dan gorong-gorong didekat permukiman warga.
22	Rabu, 08 Mei 2024	Muara Enim	Air Lintang	Banjir	Hujan dengan intensitas yang sangat tinggi di wilayah Kecamatan Muara Enim menyebabkan meluapnya aliran gorong-gorong sehingga terjadi banjir.
23	Rabu, 08 Mei 2025	Muara Enim	Pasar III	Banjir	Hujan dengan intensitas yang sangat tinggi di wilayah Kecamatan Muara Enim menyebabkan meluapnya aliran air sungai Aur sehingga terjadi banjir.
24	Jumat, 28 Juni 2024	Muara Enim	Kel. Air Lintang	Banjir	Pada hari jumat tanggal 28 juni 2024 tepatnya pukul 21.00 terjadi hujan lebat di wilayah kabupaten Muara Enim yang berlangsung hingga pukul 00.00 WIB. Yang mengakibatkan sungai aur meluap dan membanjiri kawasan perumahan griya aur permai
25	Sabtu, 29 Juni 2024	Muara Enim	Kel. Air Lintang	Banjir	Telah terjadi hujan deras dengan intensitas tinggi pada hari jumat pukul 23.00Wib yang mengakibatkan banjir di kawasan Muara Enim kota.
26	Jumat, 28 Juni 2024	Lawang Kidul	Lingga	Banjir	Pada hari Jum'at 28 juni 2024 pukul 22:00 WIB di RT 07 dusun 03, Desa lingga kecamatan lawang kidul terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi mengakibatkan genangan air dengan ketinggian ±30 cm, dikarenakan gorong gorong saluran air tersumbat.
27	Selasa 06 November 2024	Muara Enim	Air Lintang		Telah terjadi hujan deras dengan intensitas tinggi pada hari rabu sekira pukul 18.30Wib yang mengakibatkan banjir di kawasan Muara Enim kota. kondisi air mulai surut pada pukul 21.00Wib. saat ini warga sudah di evakuasi dan air sudah mulai surut.
28	Selasa 06 November 2024	Muara Enim	Pasar III	Banjir	Telah terjadi hujan deras dengan intensitas tinggi pada hari rabu sekira pukul 18.30Wib yang mengakibatkan banjir di kawasan Muara Enim kota. kondisi air mulai surut pada pukul 21.00Wib. saat ini warga sudah di evakuasi dan air sudah mulai surut.



No	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
29	Selasa, 26 November 2024	Muara Enim	Air lintang	Banjir	Pada hari Selasa, 25 november 2024 pukul 20:00 wib di kecamatan Muara Enim terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi selama ±2jam mengakibatkan, sungai aur tidak mampu menampung debit air, sehingga air meluap ke pemukiman warga,
30	Selasa, 26 November 2024	Muara Enim	Pasar III	Banjir	Pada hari Selasa, 25 november 2024 pukul 20:00 wib di kecamatan Muara Enim terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi selama ±2jam mengakibatkan, sungai aur tidak mampu menampung debit air, sehingga air meluap ke pemukiman warga,
31	Selasa, 26 November 2024	Muara Enim	Pasar III	Banjir	Pada hari Selasa, 25 november 2024 pukul 20:00 wib di kecamatan Muara Enim terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi selama ±2jam mengakibatkan, sungai aur tidak mampu menampung debit air, sehingga air meluap ke pemukiman warga,
32	Selasa, 26 November 2024	Muara Enim	Pasar II	Banjir	Pada hari Selasa, 25 november 2024 pukul 20:00 wib di kecamatan Muara Enim terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi selama ±2jam mengakibatkan, sungai aur tidak mampu menampung debit air, sehingga air meluap ke pemukiman warga,
33	Rabu, 26 November 2024	Lawang Kidul	Pasar	Banjir	Pada hari Rabu, 27 november 2024 malam hari pukul 01.00 - 05.00 wib di kecamatan lawang kidul dan kabupaten Muara Enim terjadi hujan dengan intensitas yang Sedang selama ±5jam mengakibatkan, sungai enim dan sungai aur tidak mampu menampung debit air, sehingga air meluap ke pemukiman warga, dan juga di akibatkan oleh banyaknya sampah yang menyumbat menyebabkan air tidak bisa mengalir dengan lancar.
34	Senin, 09 Desember 2024	Muara Enim	Pasar 1	Banjir	

Sumber: BNPB Muara Enim 2024



#### D. Angin Puting Beliung

Bencana angin puting beliung/angin kencang di Kabupaten Muara Enim sepanjang tahun 2024 terjadi sebanyak 1 kali, ada pun jabaran mengenai bencana tersebut ialah sebagai berikut:

**Tabel 4.10 Kejadian Bencana Angin Puting Beliung Di Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
1	Jum'at 01 November 2024	Sungai Rotan	Desa Muara Lematang	Angin Puting Beliung	Hujan Deras di Sertai angin sekitar pukul 19.30 WIB Pohon Tumbang mengakibatkan 1 lokal ruang dan atap teras di SD N 13 Sungai Rotan Rusak Berat

Sumber: BNPB Muara Enim 2024

#### E. Pohon Tumbang

Bencana pohon tumbang di Kabupaten Muara Enim sepanjang tahun 2024 terjadi sebanyak 8 kali, berikut merupakan tabel jabaran mengenai kejadian tersebut.

**Tabel 4.11 Kejadian Bencana Pohon Tumbang di Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
1	Selasa, 05 Maret 2024	Muara Enim	Karang Raja	Pohon Tumbang	Telah terjadi pohon tumbang di Mako Yonif 141 / AYJP Karang Raja Kabupaten Muara Enim
2	Selasa, 09 April 2024	Muara Enim	Muara Enim	Pohon Tumbang	Telah terjadi pohon tumbang di Jalan Veteran Kelurahan Muara Enim pukul 12.41 Wib dikarenakan pohon sudah lapuk pada akar dan tidak mampu lagi menahan beban pohon yang rimbun mengakibatkan roboh
3	Kamis, 11 April 2024	Muara Enim	Air Lintang	Pohon Tumbang	Telah terjadi pohon tumbang di belakang rumah dinas Bupati.
4	Selasa, 13 Agustus 2024	Muara Enim	Jl. Islamic Center	Pohon Tumbang	
5	Selasa, 27 Agustus 2024	Muara Enim	Kel. Tungkal	Pohon Tumbang	Telah terjadi Pohon Tumbang akibat Angin Kencang dan pohon sudah rapuh terdapat Satu pagar rumah warga dan atap rumah



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
					mengalami kerusakan ringan
6	Rabu, 11 September 2024	Muara Enim	Pasar III	Pohon Tumbang	Pohon Sudah Lapuk
7	Selasa 05 November 2024	Semendo Darat Laut	Desa Pulau Panggung dusun Panco rengkih	Pohon tumbang	Di sebabkan intetitas hujan sangat tinggi dan angin kencang sehingga menyebabkan pohon tumbang
8	Rabu, 20 Desember 2024	Muara enim	Jl.Tjiek Agus Kiemas Desa Kepur	Pohon Tumbang	Posko induk BPBD kab Muara Enim mendapatkan laporan dari warga telah terjadi bencana pohon tumbang

Sumber: BNPB Muara Enim 2024

#### E. Orang Tenggelam

Bencana orang tenggelam di Kabupaten Muara Enim sepanjang tahun 2024 terjadi sebanyak 4 kali, kejadian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 4.12 Kejadian Bencana Orang Tenggelam di Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
1	Selasa, 23 April 2024	Semende Darat Laut	Pulau Panggung	Orang Hanyut Tenggelam	Telah terjadi 3 orang anak hanyut tenggelam pada hari Selasa, 23 April 2024 pukul 12.00 Wib di sungai Ayek Mio. 2 orang anak ditemukan selamat. dan 1 anak meninggal dunia.
2	Sabtu, 04 Mei 2024	Lawang Kidul	Tanjung Enim	Orang Hanyut Tenggelam	Telah terjadi 3 orang anak hanyut tenggelam pada hari Sabtu, 04 Mei 2024 pukul 16.00 Wib di sungai Enim Desa Dusun Tanjung. 1 orang anak ditemukan selamat. Dan 2 anak meninggal dunia.
3	Senin, 08 Juli 2024	Ujan Mas	Pinang Belarik	Orang Hanyut Tenggelam	Kira-kira pukul 07.00 pagi keluarga menemukan perahu, sandal dan rokok yang baru dibakar tinggal di pinggir sungai dan sampai pukul 10.00 belum pulang dan tidak ditemukan



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
4	Kamis, 15 Agustus 2024	Muara Enim	Kel. Tungkal	Orang Hanyut Tenggelam	

Sumber: BNPB Muara Enim 2024

#### F. Bencana Lainnya

Kejadian bencana lainnya terjadi sebanyak 9 kali sepanjang tahun 2024 di Muara Enim. Jenis bencana yang terjadi ialah angin kencang sebanyak 4 kali, rumah roboh terjadi sebanyak 2 kali, jembatan amblas terjadi 1 kali, jalan putus 1 kali, dan *Ground check* titik *Hotspot* sebanyak 1 kali. Ada pun jabaran mengenai bencana tersebut ialah sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Kejadian Bencana Lainnya Di Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
1	Minggu, 11 Maret 2024	Muara Enim	Tungkal	Angin Kencang	Angin kencang disertai curah hujan yang tinggi pada hari Minggu, 11 Maret 2024 pukul 18.30 WIB mengakibatkan 1 rumah bagian dapur ambruk
2	Jum'at, 19 April 2024	Lawang Kidul	Pasar Tanjung Enim	Angin Kencang	Intensitas hujan yang tinggi disertai angin kencang di wilayah Kecamatan Lawang Kidul mengakibatkan robohnya pohon Rengas di pinggir sungai Enim dan berdampak terhadap 2 unit rumah warga
3	Jum'at, 26 April 2024	Ujan Mas	Panang Jaya	Jalan Putus	Hujan dengan intensitas yang tinggi mengakibatkan gorong-gorong amblas yang berada di tengah jalan lintas Sumatera sehingga sebagian akses jalan terputus dan air tidak dapat mengalir
4	Kamis, 02 Mei 2024	Muara Belida	Desa Patra Tani	Angin Kencang	Pada hari Kamis, 02 Mei 2024 di Dusun 3 Desa Patra Tani ketika gelombang air pasang datang disertai angin kencang dari arah Utara sungai Meriak menerpa rumah warga sehingga mengakibatkan rumah tergeser dari tiang sejauh $\pm$ 2 meter dan posisi badan rumah terduduk ditanah.

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
5	Senin, 13 Mei 2024	Sungai Rotan	Desa Danau Rata	Rumah Roboh	Telah terjadi rumah roboh pada hari Senin, 13 Mei 2024 sekira pukul 14.15 Wib di Dusun II Desa Danau Rata Kecamatan Sungai Rotan akibat benturan air naik atau banjir.
6	Sabtu, 16 Juni 2024	Belimbing	Teluk Lubuk	Rumah Roboh	Telah terjadi rumah roboh pada hari Sabtu, 16 Juni 2024 di DesaTeluk Lubuk Kecamatan Belimbing akibat Angin Puting Belung.
7	Selasa 06 November 2024	muara enim	kelurahan pasar 1 muara enim	Ground check titik Hotspot	Sumber Panas Stokpile batu bara PT. DBU
8	Selasa 06 November 2024	Muara Enim	Desa lubuk empelas	Angin kencang dan hujan deras	Penyebab angin kencang dan curah hujan yang sangat tinggi Kronologi Di sebabkan intetitas hujan sangat tinggi dan angin kencang sehingga menyebabkan 1 rumah rusak
9	Selasa, 26 November 2024	Gelumbang.	Jembatan Penghubung Desa Teluk Limau dengan Desa Betung	Jembatan Amblas	Pada hari Selasa, 25 November 2024 pukul 05.00 wib di kecamatan Gelumbang Desa Betung terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi selama ± 1 jam mengakibatkan, jalur anak sungai desa betung debit air nya menjadi deras - dan pihak desa baru saja mengerjakan kegiatan normalisasi sungai. - juga jembatan tersebut sudah lama dimakan usia terbuat dari beton biasa

Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Muara Enim guna meringankan beban masyarakat yang mengalami musibah kebakaran hutan dan lahan, banjir dan tanah longsor serta angin puting beliung diberikan bantuan berupa pakaian dan logistik makanan siap saji. Selanjutnya, terhadap kejadian-kejadian tersebut diatas, beberapa faktor yang menyebabkan kejadian bencana di Kabupaten Muara Enim, diantaranya yaitu terjadinya pembukaan lahan dengan cara dibakar, kurangnya sarana dan prasarana armada penanggulangan bencana, kurangnya petugas Satuan Tugas Penanggulangan Bencana, lokasi pemukiman masyarakat



berada di daerah rawan bencana, dan masih kurangnya pelatihan-pelatihan terhadap bencana terutama bagi personil Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di bidang penanggulangan bencana.

#### **4.2.6. Pengelolaan Kawasan Khusus**

##### **1. Jenis Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah**

- a. Penetapan Kawasan Khusus Agropolitan dengan keputusan Bupati Muara Enim nomor: 576/KPTS/BAPPEDA-PP I/2008 Tanggal 4 Juni 2008 yang menetapkan 5 kawasan agropolitan yaitu:
  1. Agropolitan Center di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut.
  2. Agropolitan Distrik di Kecamatan Semende Darat Ulu
  3. Agropolitan Distrik di Kecamatan Semende Darat Tengah
  4. Agropolitan Distrik di Kecamatan Semende Darat Laut
  5. Agropolitan Distrik di Kecamatan Tanjung Agung

Dalam rangka pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Muara Enim, mempedomani Master Plan Kawasan Agropolitan yang telah disusun pada tahun 2008 oleh Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Detail Tata Ruang Agropolitan yang telah disusun melalui Bappeda Kabupaten Muara Enim pada tahun 2011. Sejak tahun 2014 dilakukan perjanjian kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor dalam upaya pengembangan Agribusiness Development Center (ADC) dengan cara pendampingan kepada petani dalam pelaksanaan pengembangan agribisnis di wilayah agropolitan Kabupaten Muara Enim.

Untuk menunjang pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Muara Enim, beberapa program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah diantaranya yaitu program bantuan bibit, pendampingan dan pembinaan kelompok tani, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, dan pengadaan sarana dan prasarana pertanian, serta pendampingan dan pengembangan kopi melalui perbaikan sistem budidaya, mutu kopi, kelembagaan dan pemasaran.

- b. Penambangan Batubara oleh PT. Bukit Asam Tbk telah mengubah bentangan lahan, sehingga diperlukan upaya pengendalian dan pemulihan lingkungan bekas tambang, guna pelestarian lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Pemanfaatan lahan bekas tambang telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2004, tanggal 2 Juni 2004 tentang Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang PT. Bukit Asam Tbk di Kabupaten Muara Enim sebagai Taman Hutan Raya Enim (TAHURA ENIM) yang meliputi Kuasa Pertambangan Air Laya seluas 3.628,3 Ha dan Kuasa Pertambangan Bangko Barat seluas 2.011,6 Ha.
- c. Dalam rangka pelestarian peninggalan sejarah yang mempunyai nilai budaya, ilmu pengetahuan dan pengembangan objek wisata, baik wisata potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya alam buatan telah ditetapkan



dan diatur dengan peraturan, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2004 tanggal 2 Juni 2004 tentang Kawasan Wisata Curup Tenang dengan luasan ± 36 Ha.

- d. Untuk menunjang distribusi arus barang dan pemanfaatan fungsi kawasan pergudangan serta penataan dan ketertiban lalu lintas barang jasa, pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mengatur dan menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 2 Juni 2004 tentang Pergudangan yang berlokasi di sekitar Terminal Regional Muara Enim. Namun dalam perjalanannya masih terdapat masyarakat yang mendirikan bangunan gudang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Hal ini secara bertahap akan ditertibkan, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kelancaran aktivitas distribusi dan arus bongkar muat barang.
- e. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan gagasan PT. Bukit Asam dalam hal pengembangan usaha ke bisnis hilirisasi batubara agar lebih kompetitif usahanya, lebih tinggi nilai tambahnya, dan bisa berperan lebih baik bagi kepentingan nasional secara terintegrasi di mulut tambang. Rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bukit Asam berada di mulut tambang Tanjung Enim, terletak di dua kecamatan yaitu Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan luasan seluas 585 Ha. Peran Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bukit Asam yaitu membuat Surat Bupati Muara Enim Nomor: 050/767/Bappeda-2/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal Persetujuan Bupati Muara Enim terhadap Usulan Pembentukan KEK Bukit Asam.
- f. Selain hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menetapkan KEK Bukit Asam dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Muara Enim, serta mengusulkan mendekatkan trase jalan tol Muara Enim-Simpang Meo yang akan dibangun melalui lokasi KEK Bukit Asam. Serta ikut aktif dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bukit Asam baik itu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Sampai dengan saat ini, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bukit Asam dalam tahapan pengoordinasian untuk pembebasan lahan, pelaksanaan proses pengadaan penyusunan dokumen masterplan dan studi kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus Bukit Asam, serta pelaksanaan proses pengadaan penyusunan dokumen AMDAL, ANDALIN dan Izin Lingkungan pada Kawasan Ekonomi Khusus Bukit Asam.

## 2. Sumber Anggaran

Dalam rangka pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, pengelolaan kawasan khusus tersebut didanai melalui dana APBD Kabupaten Muara Enim, APBD Provinsi Sumatera Selatan, APBN, dan CSR PKBL perusahaan yang berada di Kabupaten Muara Enim.

## 3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan khusus seperti:

- a) Dalam pengelolaan dan pengembangan kebudayaan, belum tersedianya SDM mempunyai Sejarah/Arkeologi/Purbakala. kompetensi di Bidang Sarana dan prasarana penunjang pengembangan kebudayaan Kabupaten Muara Enim (Laboratorium Budaya, Museum, Studio Audio Visual).
- b) Kawasan Wisata Curup Tenang yang berada di Desa Bedegung Kecamatan Tanjung Agung kondisi lingkungan areal sebagian telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan perkebunan sehingga mempengaruhi debit air terjun dan keindahan Kawasan Objek Wisata Curup Tenang. Selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar Kawasan Wisata Air Terjun Curup Tenang Kecamatan Tanjung Agung dalam hal memberlakukan prinsip SAPTA PESONA (Bersih, Aman, Tertib, Sejuk, Indah, Ramah-tamah dan Kenangan) untuk meningkatkan daya tarik objek Wisata Air Terjun Curup Tenang.
- c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membangun pergudangan di kawasan khusus yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 2 Juni 2004 tentang Pergudangan yaitu di kawasan Terminal Regional Muara Enim.

Dalam rangka pengelolaan kawasan khusus Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Telah disusunnya Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan oleh Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Agropolitan serta penyusunan Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Semende oleh Bappeda Kabupaten Muara Enim.
- 2) Terkait Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 2 Juni 2004 tentang Pergudangan yaitu di kawasan Terminal Regional Muara Enim. Pemerintah Kabupaten Muara Enim tetap berkomitmen dan secara persuasif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar Perda ini dipahami sebagai regulasi, dengan adanya kawasan pergudangan pemilik usaha bisa secara leluasa untuk melakukan bongkar muat barang tanpa harus mengganggu lalu lintas/ketertiban umum. Selain itu untuk sisi keamanan terhadap hal tidak diinginkan yang diakibatkan oleh tidak adanya pengawasan gudang dari pihak berwenang, terutama gudang yang menyimpan bahan-bahan bersifat membahayakan (mudah terbakar, bahan beracun, dll).
- 3) Perlu adanya peningkatan intensitas pemberian penyuluhan secara berkelanjutan terhadap masyarakat yang berada di kawasan Wisata Air



Terjun Curup Tenang Kecamatan Tanjung Agung untuk selalu menjaga kawasan agar melaksanakan penerapan prinsip SAPTA PESONA sehingga daya tarik dan potensi pariwisata akan terjaga dan terpelihara dengan baik dan angka kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara akan meningkat.

- 4) Perlu disusun rencana formasi penerimaan PNS guna memenuhi kebutuhan tenaga Bidang Budaya (Sejarah, Arkeologi, Cagar Budaya). Berikutnya perlu dirintis pembangunan Laboratorium Budaya dan Studio Audio Visual.
- 5) Menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 520/KPTS/BAPPEDA/2018 tentang Tim Pendukung Persiapan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bukit Asam Kabupaten Muara Enim, yang ditetapkan pada tanggal 02 Mei 2018, guna mendukung percepatan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bukit Asam.

#### **4.2.7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Gangguan yang terjadi dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2024  
Pembangunan bidang politik pada hakekatnya adalah mewujudkan Masyarakat yang berkepribadian, Serasi, Seimbang menuju Masyarakat adil, dan Makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Dinamika Pembangunan Politik, Demokratisasi dan Fenomena yang berkembang dan tidak terkendali dan dapat mengarah pada disintegrasi bangsa yang dilatar belakangi antara lain oleh Intervensi Politik, ketidakpuasan kelompok Masyarakat yang berkepentingan yang tidak terakomodir dan secara Kasat Mata dapat ditengarai dengan gejala-gejala:
  1. Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi
  2. Hubungan antar Etnik / Suku
  3. Hubungan antar / Inter Agama
  4. Hubungan antara Pemerintahan Daerah dengan Masyarakat dan Legislatif
  5. Performance Pemerintah Daerah
  6. Performance DPRD
  7. Performance Aparatur
  8. Masalah Pertanahan / Hukum
  9. Masalah Perburuhan
  10. Kekerasan Politik
  11. Efektifitas Tenaga Penanganan Konflik
  12. Distribusi Sumber Daya
  13. Tingkat Kriminalitas
  14. Kesenjangan wilayah Perbatasan / Daerah Pinggiran.

2. Perangkat Daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum  
 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun jumlah aparat pelaksana Ketertiban Umum dan jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahun 2023- 2024 dapat dilihat pada berikut:

**Tabel 4.14 Tindak Kriminal dan Pelanggaran KAMTIBMAS di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023-2024**

No.	Uraian	Tahun		Keterangan
		2023	2024	
1.	Curas, Curat, Curanmor	255	206	Kasus
2.	Penyalahgunaan Narkoba	142	147	Kasus
3.	Penganiayaan (Ringan, Berat)	35	35	Kasus
4.	Pembunuhan	5	3	Kasus
5.	Pengeroyokan	19	17	Kasus
6.	Penggelapan	17	30	Kasus
7.	Cabul / Zina	12	13	Kasus
8.	Penipuan/perbuatan curang	8	13	Kasus
9.	Perbuatan tidak menyenangkan	7	5	Kasus
10.	Pembakaran	5	0	Kasus
11.	Judi	3	2	Kasus
12.	Perkosaan	1	0	Kasus
13.	Pemerasan	1	2	Kasus
14.	Uang Palsu	0	2	Kasus
15.	Penyerobotan tanah	0	2	Kasus
16.	Sumpah palsu & ket. palsu	0	2	Kasus
17.	Pengerusakan	3	2	Kasus
18.	Lain-lain	118	74	Kasus

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim, 2024

Dalam rangka optimalisasi stabilitas keamanan dan ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah membentuk Tim Yustisi Serasan dengan Keputusan Bupati Muara Enim tanggal Nomor: 131/KPTS/Satpol PP/2022, tentang Tim Koordinasi Pengamanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban (Tim Yustisi) Tahun 2022 Kabupaten Muara Enim, yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri, Polres Muara Enim, Lembaga Pemasarakatan kelas II Muara Enim, Pengadilan Negeri Muara Enim, POLRES Muara Enim, KODIM 0404 Muara Enim, SubDenpom Persiapan Muara Enim, Lembaga Pemasarakatan Kelas II Muara Enim, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Kesbangpol, Badan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum Sekretariat, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Camat se-Kabupaten Muara Enim.

3. Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan  
Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim sebanyak 392 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 4.15 Tindak Kriminal dan Pelanggaran KAMTIBMAS  
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023-2024**

No.	Pendidikan Terakhir	Status Pegawai			Jumlah
		Honor	PNS	PPPK	
1.	S2	-	3	-	3
2.	S1	65	18	-	83
3.	D3	3	-	-	3
4.	SLTA / SEDERAJAT	300	2	-	302
5.	SD / SEDERAJAT	-	1	-	1
JUMLAH		368	24	-	392

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim, 2024

4. Penanggulangan dan Kendalanya  
Secara Umum Urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri dan Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Muara Enim melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi maupun berkoordinasi dengan instansi daerah / instansi Vertikal di daerah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, hal ini disebabkan masih kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana yang mendukung.
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan  
Dalam rangka Penanggulangan dan Antisipasi Dini kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik di daerah-daerah tertentu, selain mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim Yustisi, juga telah dilakukan kerjasama dengan aparat keamanan melalui kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penunjukan Anggota dan Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Muara Enim.

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH

BAB III HASIL

PENYELENGGARAAN  
URUSAN PEMERINTAH  
YANG MENJADI

KEWENANGAN DAERAH

BAB IV

CAPAIAN KINERJA  
PELAKSANAAN TUGAS  
PEMBANTUAN DAN  
PENUGASAN

BAB V

**PENUTUP**

LAMPIRAN

## BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim Tahun 2024 disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim Tahun 2024 dimaksud, menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026 yang tertera dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan kewenangannya mencakup 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan, yang dilaksanakan oleh 58 Perangkat Daerah. Secara keseluruhan, penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Muara Enim pada Tahun Anggaran 2024 dapat dikategorikan **BAIK**. Hal ini terlihat dari persentase realisasi capaian kinerja keuangan APBD sebesar **89.90 Persen (Unaudited)**, dengan rata-rata capaian kinerja output mencapai **96.70 persen** dari 305 program, 842 kegiatan, dan 2425 sub kegiatan. Capaian ini melebihi target indikator keberhasilan keuangan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026.

RPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2026, ditetapkan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama dan 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Sasaran. Adapun capaian dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran meliputi :

**Tabel 5.1 Capaian Indikator Kinerja Utama**

No	Indikator	Keterukuran Indikator	Persentase capaian
1	Meningkatnya kualitas kesehatan jasmani dan rohani masyarakat	Penilaian Capaian Kabupaten Sehat	100
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	100



No	Indikator	Keterukuran Indikator	Persentase capaian
3	Meningkatnya derajat kualitas sumber daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	104.74
4	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	100
5	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	109.4
6	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah	Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG)	100.07
		Indeks Pemberdayaan Gender	93.48
7	Meningkatnya pemenuhan hak anak	Predikat Kota Layak Anak	100
<b>Rata-rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama</b>			<b>100.96</b>

**Tabel 5.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran**

No	Indikator	Keterukuran Indikator	Persentase capaian
1	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	98.33
2	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	Indeks Kota Toleran	106.04
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Lingkungan Hidup	104.06
4	Meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal	Pertumbuhan ekonomi	130
5	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	100
6	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Usia Harapan Hidup	106.98
7	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	100.17
		Rata-Rata Lama Sekolah	103.63
8	Meningkatkan daya beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	107.34
9	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	100
10	Meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Indeks SPBE	109.67



No	Indikator	Keterukuran Indikator	Persentase capaian
11	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah	Predikat SAKIP	100
12	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai Kualitas Pelayanan Publik	108.06
13	Meningkatkan penanganan PPKS	Persentase penurunan penanganan PPKS	96.45
14	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	97.8
15	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	108.66
16	Meningkatkan pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	85
17	Meningkatkan kualitas layanan hunian masyarakat	Persentase Rumah Layak Huni	102.73
18	Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IPG	77.78
19	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IDG	0
20	Meningkatkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Persentase Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	121.63
<b>Rata-rata Indikator Kinerja Sasaran</b>			<b>98.30</b>

Dengan rincian capaian jumlah indikator kinerja utama dan indikator Kinerja sasaran sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Jumlah Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Jumlah Indikator Kinerja Utama	Jumlah Indikator Kinerja (<80%)	Jumlah Indikator Kinerja (80%-100%)
Indikator Kinerja Utama	7	0	7
Indikator Kinerja Sasaran	20	2	18

Secara keseluruhan pada tahun 2024, Indikator Kinerja Utama Kabupaten Muara Enim telah berhasil direalisasikan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,96 persen dari 7 Indikator Kinerja Utama. Untuk Indikator Kinerja Sasaran, capaian rata-rata kinerja mencapai 98,30 persen dari 20 indikator, dengan 18 indikator yang mencatatkan capaian antara 80 hingga 100 persen, sementara 2 indikator lainnya



masih berada di bawah 80 persen. Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 sesuai dan konsisten dengan RPD Kabupaten Muara Enim 2024-2026 dengan kinerja yang sangat baik.

Dengan demikian, pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 dapat dikatakan selaras dengan RPD Kabupaten Muara Enim 2024-2026. Bupati Muara Enim beserta seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat atas dukungannya terhadap program kerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2024.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim Tahun 2024 ini disampaikan, dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang dan menjadi bahan kajian serta pembahasan oleh Anggota Dewan Yang Terhormat untuk ditetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN
BAB V	PENUTUP

**LAMPIRAN**

**REKAPITULASI APBD  
KABUPATEN MUARA ENIM**

No	Perangkat Daerah	Target Anggaran Belanja					Realisasi Anggaran Belanja											
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Total Belanja	Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Tidak Terduga		Belanja Transfer		Total Realisasi Belanja			Output
							(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	%	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 683.637.124.140	Rp. 124.317.625.619			Rp. 807.954.749.759	Rp. 656.784.430.842	81,26%	Rp. 121.952.736.299	98,08%					Rp. 778.710.167.141	96,38%		
2	Dinas Kesehatan	Rp. 343.755.346.834	Rp. 66.837.372.121			Rp. 410.592.718.955	Rp. 306.665.323.066	74,69%	Rp. 63.673.145.262	95,27%					Rp. 389.745.669.950	94,55%		
3	RSUD DR. H.M. Rabain	Rp. 148.436.875.288,00	Rp. 35.110.242.903,00			Rp. 183.547.118.191,00	Rp. 133.239.633.821,50	72,52%	Rp. 22.851.074.788,00	65,08%					Rp. 156.090.708.609,50	85,04%		
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp. 144.408.684.094,00	Rp. 773.850.757.395,00			Rp. 918.259.441.489,00	Rp. 115.727.081.652,00	12,60%	Rp. 736.128.782.288,00	95,13%					Rp. 851.855.863.940,00	92,77%		
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Kumuh	Rp. 109.050.529.175	Rp. 120.540.104.605			Rp. 229.590.633.780,	Rp. 100.530.558.472	43,77%	Rp. 113.906.826.590,99	94,50%					Rp. 214.437.385.062,99	93,40%		
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 14.490.294.094	Rp. 923.699.575			Rp.15.413.993.669	Rp. 11.741.943.641	76,15%	Rp. 911.672.500	98,70%					Rp. 12.653.616.141	82,09%		
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Rp. 12.241.274.873	Rp. 8.703.620.450			Rp. 20.944.895.323	Rp. 10.891.292.721	52,00%	Rp. 8.678.737.000	99,71%					Rp. 19.570.329.721	93,44%		
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 9.659.182.787,00	Rp. 497.786.373,00			Rp. 10.156.969.160,00	Rp. 6.823.630.200,00	67,19%	Rp. 464.500.000,00	93,31%					Rp. 7.288.130.200,00	71,75%		
9	Dinas Sosial	Rp. 21.182.461.611	Rp. 7.303.815.000			Rp. 31.197.225.329	Rp. 14.797.587.123	47,45%	Rp. 7.303.815.000	72,93%					Rp. 22.109.810.047	70,87%		
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 12.475.401.930,00	Rp. 738.817.848,00			Rp. 13.214.219.778,00	Rp. 11.585.777.586,00	87,66%	Rp. 734.157.000,00	99,37%					Rp. 12.319.934.568,00	93,23%		
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp.10.991.455.851,00	Rp. 2.786.569.571,00			Rp. 13.778.025.422,00	Rp. 9.613.347.184,00	69,84%	Rp. 2.688.676.031,00	96,49%					Rp. 12.302.023.215,00	89,29%		
12	Dinas Ketahanan Pangan	Rp. 11.699.114.201	Rp. 310.142.180			Rp. 12.009.256.381	Rp. 10.091.675.158	84,03%	Rp. 303.429.000	97,84%					Rp. 10.395.104.158	86,56%		
13	Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 23.216.186.814,00	Rp. 2.922.392.382,00			Rp. 26.138.579.196,00	Rp. 17.661.458.246,00	67,22%	Rp. 2.192.380.000,00	75,02%					Rp. 19.853.838.246,00	75,96%		
14	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 11.110.923.786	Rp. 1.148.368.300			Rp. 12.259.292.086	Rp. 9.180.804.926	74,58%	Rp. 1.079.465.400	94,00%					Rp. 10.260.270.326	83,69%		
15	Diinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 42.225.571.177	Rp. 567.128.336			Rp. 42.792.699.513	Rp. 39.155.581.989.	91,50%	Rp.547.123.000	96,47%					Rp. 39.151.549.989	91,49%		
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Rp. 20.569.418.650	Rp. 2.163.294.800			Rp. 22.732.713.450	Rp.18.837.667.761	83,00%	Rp.2.076.645.000,	95,99%					Rp. 20.914.312.761	92,00%		
17	Dinas Perhubungan	Rp. 16.041.477.903,00	Rp. 3.435.696.000,00			Rp.19.477.173.903,00	Rp. 14.195.981.793,00	72,92%	Rp. 3.398.814.000,00	98,93%					Rp. 17.613.071.253,00	90,34%		
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp.27.268.243.144	Rp.1.318.563.120			Rp. 28.586.806.264	Rp.26.055.666.151,10	91,34%	Rp. 1.301.358.920	98,70%					Rp.27.357.025.071,10	95,70%		
19	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp. 11.544.013.794,00	Rp. 1.308.022.700,00			Rp. 12.852.036.494,00	Rp. 10.171.077.853,00	78,98%	Rp. 1.297.082.500,00	99,16%					Rp. 11.468.160.353,00	89,23%		
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu	Rp. 12.616.622.955	Rp. 755.568.890			Rp. 13.372.191.845	Rp. 10.384.736.209	77,37%	Rp. 754.825.900	99,90%					Rp. 11.069.180.245	82,78%		
21	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Rp. 43.787.004.865,05	Rp. 20.752.629.985			Rp. 64.539.634.850,05	Rp. 30.897.469.031	47,88%	Rp. 21.104.201.438	101,69%					Rp. 51.006.019.932,00	79,03%		
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp 10.795.028.993	Rp 6.120.200.000			Rp 16.915.228.993	Rp 9.668.882.066	57,17%	Rp 326.950.000	5,34%					Rp 9.995.832.066	59,09%		
23	Dinas Perikanan	Rp. 21.821.265.458,50	Rp. 818.872.547,00			Rp. 22.640.138.005,00	Rp. 18.256.908.074,00	80,63%	Rp. 799.129.000,00	97,59%					Rp.19.056.392.858,00	84,17%		
24	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 9.819.706.993,00	Rp. 7.474.048.200,00			Rp. 17.293.755.193,00	Rp. 8.687.804.538,00	49,70%	Rp. 7.247.092.500,00	96,96%					Rp. 15.934.897.038,00	92,14%		
25	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	Rp 73.884.174.298	Rp 2.340.800.620			Rp 76.224.974.918,00	Rp 64.957.049.139	85,33%	Rp 2.318.802.298	99,06%					Rp. 67.275.851.437,00	88,26%		
26	Dinas Pekebunan	Rp.24.957.138.641,00	Rp.661.925.000,00			Rp.25.619.063.641,00	Rp.20.124.788.255,00	78,56%	Rp.634.529.000,00	95,86%					Rp. 20.759.317.255,00	81,03%		
27	Dinas Perdagangan	Rp. 14.112.340.372,00	Rp. 12.484.658.400			Rp. 26.596.998.772	Rp. 12.350.640.687	46,47%	Rp. 12.261.546.000	98,00%					Rp. 24.750.743.637	92,54%		
28	Sekretariat Daerah	Rp. 84.686.916.643	Rp. 16.219.794.452			Rp. 100.906.711.095,00	Rp. 75.843.094.628	75,22%	Rp. 15.375.345.000	94,79%					Rp. 91.218.439.628,00	90,40%		
29	Sekretariat DPRD	Rp. 90.863.527.457	Rp. 1.767.740.700.			Rp. 92.631.268.157	Rp.80.574.109.346	86,86%	Rp. 1.739.515.000	98,40%					Rp. 82.313.624.346,00	88,86%		
30	Badan Kesbangpol	Rp. 119.809.305.269	Rp. 519.301.090			Rp.120.328.606.359	Rp. 116.664.761.897	96,92%	Rp. 514.230.000	99,02%					Rp. 117.178.991.897	97,38%		
31	Bappeda	Rp. 25.089.400.562,00	Rp. 2.932.148.200,00			Rp. 28.021.548.762,00	Rp. 21.398.648.704,82	76,34%	Rp. 2.876.163.835,52	98,09%					Rp. 24.274.812.540,34	86,63%		
32	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 108.018.760.665,66	Rp. 1.219.966.900,00	Rp. 15.000.000.000,00	Rp. 506.699.877.050,00	Rp. 630.938.604.616,00	Rp. 59.025.030.316,00	9,35%	Rp1.097.657.500,00	98,97%	Rp720.000.000,00	4,80%	Rp506.699.877.050,00	100,00%	Rp. 561.653.020.089,00	85,00%		
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp. 18.914.983.941	Rp. 25.377.020.562			Rp. 44.297.004.503,00	Rp. 15.905.266.181	35,92%	Rp. 22.400.815.000	88,27%					Rp. 38.193.055.686,00	86,23%		
34	Inspektorat Kabupaten	Rp. 22.479.945.598,00	Rp. 2.311.819.770,00			Rp. 24.791.765.368,00	Rp18.322.672.191,00	73,89%	Rp. 1.514.426.500,00	65,51%					Rp. 19.837.098.691,00	80,01%		
35	Badan Pendapatan Daerah	Rp. 25.089.400.562	Rp. 2.932.148.200			Rp. 28.021.548.762,00	Rp. 21.398.648.705	76,34%	Rp. 2.876.163.836	98,09%					Rp. 24.274.812.540	86,63%		
36	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 10.428.494.838,00	Rp. 688.592.200,00			Rp.11.117.087.038,00	Rp 7.137.876.583,00	64,16%	Rp. 639.320.922,00	92,84%					Rp 7.777.197.505,00	69,96%		
37	Kec. Semende Darat Ulu	Rp. 3.393.566.584	Rp. 668.911.866			Rp.4.477.573.518,00	Rp. 2.374.017.470	53,03%	Rp. 667.851.866	99,84%					Rp. 4.013.579.913,00	89,19%		
38	Kec. Semende Darat Tengah	Rp. 3.865.315.180	Rp. 534.542.503			Rp. 4.399.857.683,00	Rp. 3.037.509.576	69,06%	Rp. 515.030.000	96,34%					Rp 3.552.539.576,00	80,74%		
39	Kec. Semende Darat Laut	Rp. 3.080.090.251	Rp. 769.849.900			Rp. 3.849.940.151	Rp. 2.661.910.373	69,15%	Rp. 768.851.900	99,87%					Rp. 3.370.742.273	87,55%		
40	Kec. Tanjung Agung	Rp. 3.790.598.685	Rp. 951.549.795			Rp. 4.742.148.480	Rp. 3.496.034.627	73,74%	Rp. 945.351.000	99,35%					Rp. 4.441.385.627	93,66%		
41	Kec. Lawang Kidul	Rp. 8.846.979.486	Rp. 486.260.000			Rp. 9.333.239.486	Rp. 7.649.730.251	82,06%	Rp. 480.900.000	98,90%					Rp. 8.016.328.898	85,89%		
42	Kec. Muara Enim	Rp. 5.930.033.489	Rp. 6.973.885.787			Rp. 14.584.259.176	Rp. 4.743.852.808	32,86%	Rp.6.334.461.099	90,83%					Rp. 12.721.893.907	87,23%		
43	Kec. Ujan Mas	Rp. 3.940.281.196	Rp 477.665.164			Rp 4.417.946.360,00	Rp 2.961.684.954	67,04%	Rp 476.521.164	100%					Rp 3.438.206.118	77,82%		
44	Kec. Benakat	Rp. 3.156.552.940	Rp. 690.706.885			Rp. 3.847.259.825	Rp. 2.834.578.872	73,69%	Rp. 688.676.000	99,71%					Rp. 3.523.254.872	91,58%		
45	Kec. Gunung Megang	Rp. 4.211.850.652,00	Rp. 257.532.320,00			Rp. 4.469.382.972,00	Rp. 3.537.558.828,00	79,12%	Rp. 255.952.320,00	99,39%					Rp. 3.793.511.148,00	84,88%		
46	Kec. Rambang Niru	Rp 4.089.310.271	Rp 154.324.200			Rp 4.243.634.471	Rp 3.886.901.209	91,58%	Rp 153.533.000	99,49%					Rp 4.040.434.209	77,82%		
47	Kec. Lubai	Rp. 3.947.364.124	Rp. 242.635.450			Rp. 4.189.999.574	Rp. 3.760.735.295	90,00%	Rp. 242.600.000	99,99%					Rp. 4.003.335.295	95,55%		
48	Kec. Rambang	Rp. 4.548.354.025,00	Rp. 653.998.400,00			Rp. 5.202.352.425,00	Rp. 3.572.783.245,00	68,68%	Rp. 647.320.000,00	98,97%					Rp. 4.220.103.245,00	81,1%		
49	Kec. Lebak	Rp. 3.598.629.703	Rp 1.039.072.400			Rp. 4.637.703.103	Rp. 2.960.676.292	63,63%	Rp. 868.785.800	95,36%					Rp. 3.829.462.092	82,57%		
50	Kec. Kelekar	Rp. 3.415.236.932	Rp. 621.697.700			Rp. 4.036.934.632	Rp. 3.226.684.969	79,92%	Rp. 620.208.500	99,76%					Rp. 3.846.893.469	95,29%		
51	Kec. Gelumbang	Rp. 6.120.538.724,00	Rp. 1.177.605.313,00			Rp. 6.830.647.184,00	Rp. 5.670.172.184,00	83,01%	Rp. 1.160.475.000,00	98,55%								



**PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**  
**01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} * 100$	6
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>807.954.749.759,00</b>	<b>763.725.432.874,00</b>	<b>94,53</b>	<b>676.404.958.492,85</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>683.637.124.140,00</b>	<b>641.772.696.575,00</b>	<b>93,88</b>	<b>577.836.077.667,19</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	524.714.378.653,00	504.573.691.200,00	96,16	415.661.582.313,19
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	347.489.738.438,00	333.717.517.469,00	96,04	275.757.786.257,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	283.677.455.838,00	273.232.455.397,00	96,32	223.677.973.229,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	175.080.933.265,00	168.864.161.991,00	96,45	167.581.032.928,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	108.596.522.573,00	104.368.293.406,00	96,11	56.096.940.301,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26.877.532.099,00	25.534.589.468,00	95,00	20.855.286.453,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.652.864.880,00	15.085.417.364,00	96,37	15.188.360.902,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.224.667.219,00	10.449.172.104,00	93,09	5.666.925.551,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	202.693.750,00	157.449.000,00	77,68	136.955.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	202.693.750,00	157.449.000,00	77,68	136.955.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.194.741.200,00	13.540.576.310,00	95,39	13.538.540.880,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.194.741.200,00	13.540.576.310,00	95,39	13.538.540.880,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.667.179.125,00	6.349.027.850,00	95,23	4.529.736.100,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	380.920.750,00	371.492.850,00	97,52	1.031.378.700,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.286.258.375,00	5.977.535.000,00	95,09	3.498.357.400,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	15.349.828.173,00	14.439.316.860,00	94,07	12.270.482.700,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.731.403.497,00	7.470.629.940,00	96,63	8.169.193.260,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.618.424.676,00	6.968.686.920,00	91,47	4.101.289.440,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	513.803.856,00	460.097.609,00	89,55	745.629.660,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	496.978.086,00	460.097.609,00	92,58	745.629.660,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	16.825.770,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.504.397,00	4.004.975,00	61,57	3.182.235,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.096.844,00	2.040.757,00	97,33	2.219.020,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.407.553,00	1.964.218,00	44,56	963.215,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	57.213.626.715,00	52.103.634.931,00	91,07	36.751.319.156,19
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	57.213.626.715,00	52.103.634.931,00	91,07	36.751.319.156,19
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	16.070.220.474,00	14.004.681.546,00	87,15	15.574.873.186,19
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	41.143.406.241,00	38.098.953.385,00	92,60	21.176.445.970,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	120.011.013.500,00	118.752.538.800,00	98,95	103.152.476.900,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	114.148.959.500,00	112.937.188.800,00	98,94	99.297.561.900,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	114.148.959.500,00	112.937.188.800,00	98,94	99.297.561.900,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	5.862.054.000,00	5.815.350.000,00	99,20	3.854.915.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	5.862.054.000,00	5.815.350.000,00	99,20	3.854.915.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.626.215.487,00	134.381.855.375,00	95,56	144.187.918.738,00
5.1.02.01	Belanja Barang	35.970.205.841,00	34.177.316.865,00	95,02	35.273.433.550,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	35.970.205.841,00	34.177.316.865,00	95,02	35.273.433.550,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	556.503.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	54.300.000,00	53.375.000,00	98,30	26.306.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.142.512.132,00	956.755.975,00	83,74	605.887.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.599.162.950,00	1.492.657.690,00	93,34	1.062.387.650,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	50.885.900,00	47.988.000,00	94,31	32.451.400,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.590.000,00	7.000.000,00	81,49	300.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.452.790.718,00	1.452.554.200,00	99,98	78.566.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	211.459.341,00	130.297.500,00	61,62	14.677.400,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	108.800.000,00	96.080.000,00	88,31	474.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	64.250.000,00	62.550.000,00	97,35	83.681.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	28.710.169.000,00	27.844.392.500,00	96,98	28.322.734.950,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.893.343.725,00	1.384.571.000,00	73,13	1.969.462.000,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	510.785.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17.500.000,00	15.803.000,00	90,30	0,00

5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	41.625.000,00	40.500.000,00	97,30	1.596.796.700,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	47.080.075,00	46.875.000,00	99,56	16.250.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	40.750.000,00	36.750.000,00	90,18	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	210.000.000,00	209.220.000,00	99,63	206.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	205.986.000,00	191.707.000,00	93,07	95.306.250,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	111.001.000,00	108.240.000,00	97,51	94.364.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	37.312.602.823,00	35.151.526.152,00	94,21	39.457.103.274,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	26.598.283.916,00	25.632.417.717,00	96,37	32.046.313.539,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.069.650.000,00	2.942.350.000,00	95,85	1.882.350.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	17.394.440.000,00	17.045.440.000,00	97,99	27.436.140.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	30.000.000,00	0,00	0,00	12.945.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	286.000.000,00	279.000.000,00	97,55	56.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.033.190.000,00	1.026.840.000,00	99,39	188.650.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.140.670.000,00	1.049.950.000,00	92,05	825.570.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	962.090.000,00	875.420.000,00	90,99	351.740.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	717.000.000,00	703.090.000,00	98,06	115.830.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	3.748.716,00	3.663.000,00	97,71	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	22.500.000,00	12.750.000,00	56,67	26.500.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	25.500.000,00	24.450.000,00	95,88	37.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	203.200.000,00	196.847.500,00	96,87	103.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	320.000.000,00	179.750.000,00	56,17	0,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	637.500.000,00	635.000.000,00	99,61	300.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.360.320,00	0,00	0,00	10.879.400,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	212.100.000,00	211.993.625,00	99,95	50.484.943,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	188.234.880,00	169.544.067,00	90,07	191.707.396,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	276.600.000,00	214.554.000,00	77,57	184.625.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	149.834.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	70.000.000,00	59.275.525,00	84,68	6.557.800,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	393.684.000,00	374.787.435,00	95,20	176.030.235,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	294.504.000,00	275.822.400,00	93,66	77.162.400,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	99.180.000,00	98.965.035,00	99,78	98.867.835,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	350.800.000,00	300.650.000,00	85,70	257.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	105.600.000,00	86.600.000,00	82,01	45.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	245.200.000,00	214.050.000,00	87,30	212.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.141.470.000,00	4.344.384.000,00	84,50	2.983.225.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	890.220.000,00	663.184.000,00	74,50	692.825.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	4.251.250.000,00	3.681.200.000,00	86,59	2.290.400.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.951.814.907,00	3.706.537.000,00	93,79	3.448.934.500,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.896.931.557,00	1.673.478.000,00	88,22	1.312.059.500,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.054.883.350,00	2.033.059.000,00	98,94	2.136.875.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	300.000.000,00	299.060.000,00	99,69	0,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	300.000.000,00	299.060.000,00	99,69	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	576.550.000,00	493.690.000,00	85,63	545.100.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	135.000.000,00	125.860.000,00	93,23	68.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	22.000.000,00	13.500.000,00	61,36	124.800.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	419.550.000,00	354.330.000,00	84,45	351.800.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.364.863.144,00	3.352.667.000,00	99,64	3.650.017.500,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	222.136.144,00	209.940.000,00	94,51	111.063.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	100.740.000,00	100.665.000,00	99,93	72.158.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	2.236.144,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	90.280.000,00	87.425.000,00	96,84	24.735.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	23.360.000,00	18.590.000,00	79,58	11.470.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.520.000,00	3.260.000,00	59,06	2.700.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.142.727.000,00	3.142.727.000,00	100,00	3.538.954.500,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.142.727.000,00	3.142.727.000,00	100,00	3.531.604.500,00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	7.483.013.579,00	5.532.403.927,00	73,93	4.843.733.747,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.483.013.579,00	5.532.403.927,00	73,93	4.843.733.747,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.483.013.579,00	5.532.403.927,00	73,93	4.843.733.747,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	529.950.000,00	264.050.000,00	49,83	168.650.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	472.050.000,00	209.150.000,00	44,31	168.650.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	472.050.000,00	209.150.000,00	44,31	168.650.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	57.900.000,00	54.900.000,00	94,82	0,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	57.900.000,00	54.900.000,00	94,82	0,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	55.965.580.100,00	55.903.891.431,00	99,89	60.794.980.667,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	55.965.580.100,00	55.903.891.431,00	99,89	60.794.980.667,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	55.965.580.100,00	55.903.891.431,00	99,89	60.794.980.667,00
5.1.05	Belanja Hibah	18.296.530.000,00	2.817.150.000,00	15,40	17.986.576.616,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	8.350.745.000,00

5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	8.350.745.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	8.350.745.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	9.748.630.000,00	2.817.150.000,00	28,90	9.635.831.616,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.748.630.000,00	2.817.150.000,00	28,90	9.635.831.616,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.748.630.000,00	2.817.150.000,00	28,90	9.635.831.616,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	8.547.900.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.800.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.800.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.719.900.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.719.900.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>683.637.124.140,00</b>	<b>641.772.696.575,00</b>	<b>93,88</b>	<b>577.836.077.667,19</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>124.317.625.619,00</b>	<b>121.952.736.299,00</b>	<b>98,10</b>	<b>98.568.880.825,66</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.179.883.429,00	43.221.654.558,00	95,67	26.222.769.539,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	412.900.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	412.900.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	412.900.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	22.557.525.327,00	21.705.147.200,00	96,22	9.011.958.850,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	555.927.316,00	512.088.000,00	92,11	717.280.950,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	558.780.950,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	555.927.316,00	512.088.000,00	92,11	158.500.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	22.001.598.011,00	21.193.059.200,00	96,33	8.294.677.900,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	21.459.232.652,00	20.732.224.200,00	96,61	8.213.777.900,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	521.365.359,00	440.835.000,00	84,55	44.900.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.000.000,00	20.000.000,00	95,24	36.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	361.044.000,00	354.445.000,00	98,17	183.000.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	361.044.000,00	354.445.000,00	98,17	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	361.044.000,00	354.445.000,00	98,17	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	183.000.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	183.000.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	398.475.000,00	378.350.000,00	94,95	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	398.475.000,00	378.350.000,00	94,95	0,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	398.475.000,00	378.350.000,00	94,95	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	4.833.285.760,00	3.772.300.000,00	78,05	1.925.450.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.393.000.000,00	2.334.000.000,00	68,79	50.450.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.393.000.000,00	2.334.000.000,00	68,79	50.450.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.440.285.760,00	1.438.300.000,00	99,86	1.875.000.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	240.285.760,00	238.300.000,00	99,17	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	1.875.000.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	185.000.000,00	184.850.000,00	99,92	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	185.000.000,00	184.850.000,00	99,92	0,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	185.000.000,00	184.850.000,00	99,92	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.844.553.342,00	16.826.562.358,00	99,89	14.689.460.689,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.844.553.342,00	16.826.562.358,00	99,89	14.689.460.689,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	16.844.553.342,00	16.826.562.358,00	99,89	14.689.460.689,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.433.675.632,00	67.028.719.691,00	99,40	62.882.574.366,66
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	59.183.061.632,00	58.785.274.691,00	99,33	48.974.473.366,66
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	54.843.765.632,00	54.465.203.171,00	99,31	46.955.473.366,66
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.500.000.000,00	5.408.562.700,00	98,34	2.813.940.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	45.598.185.632,00	45.314.635.471,00	99,38	39.782.264.366,66
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	164.950.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	3.745.580.000,00	3.742.005.000,00	99,90	4.194.319.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.339.296.000,00	4.320.071.520,00	99,56	2.019.000.000,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	192.850.000,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	4.339.296.000,00	4.320.071.520,00	99,56	1.826.150.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	8.250.614.000,00	8.243.445.000,00	99,91	13.908.101.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	8.250.614.000,00	8.243.445.000,00	99,91	13.908.101.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	8.250.614.000,00	8.243.445.000,00	99,91	13.908.101.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	199.800.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	199.800.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	199.800.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	199.800.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.704.066.558,00	11.702.362.050,00	99,99	9.263.736.920,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	65.000.000,00	64.950.000,00	99,92	0,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	65.000.000,00	64.950.000,00	99,92	0,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	65.000.000,00	64.950.000,00	99,92	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	11.639.066.558,00	11.637.412.050,00	99,99	9.160.736.920,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	11.639.066.558,00	11.637.412.050,00	99,99	9.160.736.920,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	11.639.066.558,00	11.637.412.050,00	99,99	9.160.736.920,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>124.317.625.619,00</b>	<b>121.952.736.299,00</b>	<b>98,10</b>	<b>98.568.880.825,66</b>

	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>807.954.749.759,00</b>	<b>763.725.432.874,00</b>	<b>94,53</b>	<b>676.404.958.492,85</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>-807.944.749.759,00</b>	<b>-763.725.432.874,00</b>	<b>94,53</b>	<b>(676.404.958.492,85)</b>



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



DINAS KESEHATAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,436,177,881.00	306,596,001.00	21.35	179,731,837.00
4.1.02	Retribusi Daerah	146,260,559.00	306,596,001.00	209.62	179,731,837.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	146,260,559.00	306,596,001.00	209.62	95,926,237.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	83,805,600.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	1,289,917,322.00	0.00	0.00	0.00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	1,289,917,322.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,436,177,881.00	306,596,001.00	21.35	179,731,837.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,436,177,881.00	306,596,001.00	21.35	179,731,837.00
5	BELANJA DAERAH	410,592,718,955.00	370,261,379,292.80	90.18	273,500,946,506.81
5.1	BELANJA OPERASI	343,755,346,834.00	306,588,234,030.80	89.19	217,075,518,894.81
5.1.01	Belanja Pegawai	193,948,574,934.00	170,393,709,987.80	87.86	100,861,632,708.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	111,383,617,458.00	100,720,501,596.00	90.43	60,341,668,148.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	82,564,957,476.00	69,673,208,391.80	84.39	40,519,964,560.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	148,207,108,582.00	135,673,014,543.00	91.54	115,744,414,186.81
5.1.02.01	Belanja Barang	37,084,444,685.00	32,965,379,874.00	88.89	23,189,576,644.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	103,499,644,624.00	96,887,918,685.00	93.61	86,792,551,145.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1,102,474,366.00	789,468,010.00	71.61	498,719,123.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6,388,114,907.00	4,928,258,974.00	77.17	4,734,927,274.81
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	134,430,000.00	101,989,000.00	75.87	528,640,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	1,599,663,318.00	521,509,500.00	32.60	469,472,000.00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1,078,153,818.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kem	521,509,500.00	521,509,500.00	100.00	469,472,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	343,755,346,834.00	306,588,234,030.80	89.19	217,075,518,894.81
5.2	BELANJA MODAL	66,837,372,121.00	63,673,145,262.00	95.27	56,425,427,612.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31,836,304,121.00	29,334,193,551.00	92.14	20,978,644,653.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	6,950,000.00	0.00	0.00	17,140,000.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4,012,640,000.00	3,992,800,000.00	99.51	2,301,100,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3,174,151,152.00	2,403,300,000.00	75.71	3,246,063,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	101,550,000.00	101,300,000.00	99.75	3,875,923,000.00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	21,032,665,796.00	20,298,281,248.00	96.51	10,327,817,811.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1,883,017,173.00	991,954,303.00	52.68	748,780,842.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1,481,070,000.00	1,438,675,000.00	97.14	461,820,000.00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnia	140,000,000.00	104,128,000.00	74.38	0.00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	4,260,000.00	3,755,000.00	88.15	0.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31,141,068,000.00	30,608,330,151.00	98.29	28,920,732,959.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	29,022,800,000.00	28,508,978,151.00	98.23	26,471,997,959.00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2,118,268,000.00	2,099,352,000.00	99.11	2,448,735,000.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2,800,000,000.00	2,778,190,000.00	99.22	6,397,000,000.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	2,800,000,000.00	2,778,190,000.00	99.22	6,397,000,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	129,050,000.00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00	129,050,000.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1,060,000,000.00	952,431,560.00	89.85	0.00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1,060,000,000.00	952,431,560.00	89.85	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	66,837,372,121.00	63,673,145,262.00	95.27	56,425,427,612.00
	JUMLAH BELANJA	410,592,718,955.00	370,261,379,292.80	90.18	273,500,946,506.81
	SURPLUS/DEFISIT	(409,156,541,074.00)	(369,954,783,291.80)	90.42	(273,321,214,669.81)

Kab. Muara Enim, 04 Februari 2025  
Kepala Dinas Kesehatan

dr. Eni Zatila, MKM  
NIP. 197102022000122003



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



RSUD HM RABAIN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	111.000.000.000.00	103.561.702.990.63	93.30	99.929.299.021.14
4.1.02	Retribusi Daerah	111.000.000.000.00	103.561.702.990.63	93.30	0.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	111.000.000.000.00	103.561.702.990.63	93.30	0.00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	111.000.000.000.00	103.561.702.990.63	93.30	0.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	0.00	99.929.299.021.14
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0.00	0.00	0.00	99.929.299.021.14
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	0.00	0.00	0.00	99.929.299.021.14
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>111.000.000.000.00</b>	<b>103.561.702.990.63</b>	<b>93.30</b>	<b>99.929.299.021.14</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>111.000.000.000.00</b>	<b>103.561.702.990.63</b>	<b>93.30</b>	<b>99.929.299.021.14</b>
5	BELANJA DAERAH	183.547.118.191.00	156.090.708.609.50	85.04	160.578.332.980.34
5.1	BELANJA OPERASI	148.436.875.288.00	133.239.633.821.50	89.76	142.062.024.210.34
5.1.01	Belanja Pegawai	76.588.895.961.00	68.048.817.060.00	88.85	98.555.153.637.34
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0.00	0.00	0.00	24.230.750.333.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	0.00	0.00	0.00	18.742.711.876.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	0.00	0.00	0.00	1.683.086.243.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	0.00	0.00	0.00	134.730.000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0.00	0.00	0.00	2.269.469.750.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	0.00	0.00	0.00	257.436.850.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	0.00	0.00	0.00	1.092.093.600.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	0.00	0.00	0.00	50.948.444.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	0.00	0.00	0.00	273.570.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	15.158.895.961.00	14.905.556.208.00	98.33	24.481.832.202.34
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.770.250.772.00	8.729.694.155.00	99.54	14.173.041.388.34
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.511.182.720.00	3.501.579.032.00	99.73	5.851.925.743.00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.877.462.469.00	2.674.283.021.00	92.94	4.456.865.071.00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	61.430.000.000.00	53.143.260.852.00	86.51	49.842.571.102.00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	61.430.000.000.00	53.143.260.852.00	86.51	49.842.571.102.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.847.979.327.00	65.190.816.761.50	90.73	43.506.870.573.00
5.1.02.01	Belanja Barang	4.836.522.700.00	4.801.856.428.00	99.28	4.664.855.044.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.836.522.700.00	4.801.856.428.00	99.28	4.664.855.044.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.838.800.550.00	7.306.286.641.00	74.26	3.163.415.846.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.478.800.550.00	3.303.862.141.00	73.77	2.964.281.846.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.500.000.000.00	2.367.783.000.00	94.71	0.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.500.000.000.00	1.301.641.500.00	52.07	0.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan	360.000.000.00	333.000.000.00	92.50	199.134.000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	0.00	0.00	0.00	399.000.000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	399.000.000.00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	57.172.656.077.00	53.082.673.692.50	92.85	35.279.599.683.00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	57.172.656.077.00	53.082.673.692.50	92.85	35.279.599.683.00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>148.436.875.288.00</b>	<b>133.239.633.821.50</b>	<b>89.76</b>	<b>142.062.024.210.34</b>
5.2	BELANJA MODAL	35.110.242.903.00	22.851.074.788.00	65.08	18.516.308.770.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.110.242.903.00	22.851.074.788.00	65.08	17.725.433.770.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.700.828.000.00	3.629.987.000.00	98.09	359.727.090.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.700.828.000.00	3.629.987.000.00	98.09	359.727.090.00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	17.809.414.903.00	14.788.237.190.00	83.04	7.182.000.000.00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	17.809.414.903.00	14.788.237.190.00	83.04	7.182.000.000.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0.00	0.00	0.00	1.049.331.000.00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0.00	0.00	0.00	1.049.331.000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0.00	0.00	0.00	431.750.000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0.00	0.00	0.00	341.750.000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0.00	0.00	0.00	90.000.000.00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.600.000.000.00	4.432.850.598.00	32.59	8.702.625.680.00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	13.600.000.000.00	4.432.850.598.00	32.59	8.702.625.680.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	0.00	0.00	790.875.000.00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0.00	0.00	0.00	790.875.000.00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0.00	0.00	0.00	790.875.000.00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>35.110.242.903.00</b>	<b>22.851.074.788.00</b>	<b>65.08</b>	<b>18.516.308.770.00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>183.547.118.191.00</b>	<b>156.090.708.609.50</b>	<b>85.04</b>	<b>160.578.332.980.34</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>( 72.547.118.191.00 )</b>	<b>( 52.529.005.618.87 )</b>	<b>72.41</b>	<b>( 60.649.033.959.20 )</b>

Muara Enim, 31 Desember 2024  
Plt. Kepala RSUD HM Rabain

Selamat Oku Asmana, SKM,M.Kes  
NIP 196909191992031005



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	321,808,515.00	218,641,454.00	67.94	124,485,444.00
4.1.02	Retribusi Daerah	321,808,515.00	218,641,454.00	67.94	124,485,444.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	52,250,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	52,250,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	52,250,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	269,558,515.00	218,641,454.00	81.11	124,485,444.00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	269,558,515.00	218,641,454.00	81.11	124,485,444.00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	269,558,515.00	218,641,454.00	81.11	124,485,444.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	321,808,515.00	218,641,454.00	67.94	124,485,444.00
	JUMLAH PENDAPATAN	321,808,515.00	218,641,454.00	67.94	124,485,444.00
5	BELANJA DAERAH	918,259,441,489.00	814,366,952,157.00	92.74	717,268,214,803.61
5.1	BELANJA OPERASI	144,408,684,094.00	105,310,699,617.00	80.14	62,610,974,493.00
5.1.01	Belanja Pegawai	8,354,802,817.00	6,684,984,575.00	80.01	5,502,894,342.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4,375,266,673.00	3,792,338,552.00	86.68	3,204,852,648.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3,002,456,743.00	2,944,301,930.00	98.06	2,448,957,426.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2,827,489,960.00	2,793,732,794.00	98.81	2,437,091,426.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	174,966,783.00	150,569,136.00	86.06	11,866,000.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	319,053,892.00	289,976,442.00	90.89	243,644,946.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	301,539,258.00	273,830,298.00	90.81	242,458,246.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	17,514,634.00	16,146,144.00	92.19	1,186,600.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	391,891,500.00	134,890,000.00	34.42	118,035,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	391,891,500.00	134,890,000.00	34.42	118,035,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	327,136,950.00	162,197,000.00	49.58	151,640,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	327,136,950.00	162,197,000.00	49.58	151,640,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	111,684,000.00	87,855,000.00	78.48	81,550,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	98,789,500.00	78,960,000.00	79.93	80,810,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	12,894,500.00	8,895,000.00	67.43	740,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	216,010,755.00	170,911,200.00	79.12	155,558,160.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	195,820,059.00	160,844,820.00	82.14	154,978,800.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	20,190,696.00	10,066,380.00	49.86	579,360.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6,970,000.00	2,364,520.00	33.92	5,432,415.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6,970,000.00	2,364,520.00	33.92	5,432,415.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	62,833.00	42,460.00	67.58	34,801.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,225.00	39,763.00	79.17	34,625.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12,608.00	2,697.00	21.39	176.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3,979,536,144.00	2,892,646,023.00	72.69	2,298,041,694.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3,979,536,144.00	2,892,646,023.00	72.69	2,298,041,694.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3,856,050,988.00	2,774,949,556.00	71.96	2,288,172,962.00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	123,485,156.00	117,696,467.00	95.31	9,868,732.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	117,622,743,277.00	91,424,577,042.00	86.58	34,470,263,269.00
5.1.02.01	Belanja Barang	84,141,446,406.00	65,242,054,925.00	89.20	15,828,517,649.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	32,441,446,406.00	30,671,217,625.00	99.63	15,828,517,649.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	675,747,000.00	474,046,300.00	70.15	335,624,054.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	649,227,726.00	590,157,255.00	90.90	638,382,844.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	561,199,750.00	490,788,400.00	87.45	503,523,001.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,120,000.00	1,000,000.00	89.29	0.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	173,110,430.00	163,734,270.00	94.58	30,984,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	26,624,000.00	26,033,400.00	97.78	33,264,000.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29,910,647,500.00	28,723,915,350.00	101.55	14,191,608,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	443,770,000.00	201,542,650.00	45.42	214,915,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakailn Dinas Harijn (PDH)	0.00	0.00	0.00	33,216,750.00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	51,700,000,000.00	34,570,837,300.00	82.66	0.00
5.1.02.01.04.0060	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Air	51,700,000,000.00	34,570,837,300.00	82.66	0.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	17,672,652,236.00	15,738,037,811.00	91.74	13,796,026,424.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4,208,974,173.00	3,206,445,688.00	76.18	3,151,119,377.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	113,850,000.00	77,650,000.00	68.20	111,940,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan	196,200,000.00	173,700,000.00	88.53	175,950,000.00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	24,600,000.00	24,600,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	446,000,000.00	374,000,000.00	83.86	222,000,000.00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	222,000,000.00	222,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	415,140,000.00	345,370,000.00	83.19	404,810,000.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	338,030,000.00	320,190,000.00	94.72	335,110,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	51,360,000.00	51,360,000.00	100.00	48,150,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1,752,650,000.00	1,091,140,000.00	62.26	968,940,800.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	193,920,000.00	154,080,000.00	79.46	276,782,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	102,720,000.00	93,090,000.00	90.63	78,110,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	25,530,000.00	17,460,750.00	68.39	16,298,924.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	155,106,300.00	149,401,137.00	96.32	152,233,873.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	48,000,000.00	44,135,000.00	91.95	63,790,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	48,600,000.00	39,706,604.00	81.70	34,569,830.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	45,267,873.00	28,562,177.00	63.10	10,433,950.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	53,130,000.00	52,766,945.00	99.32	52,864,725.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	53,130,000.00	52,766,945.00	99.32	52,864,725.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	206,745,000.00	173,335,000.00	83.84	44,538,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	140,945,000.00	110,135,000.00	78.14	44,538,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	50,800,000.00	49,200,000.00	96.85	0.00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	15,000,000.00	14,000,000.00	93.33	0.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	12,683,953,063.00	12,014,690,198.00	98.46	10,304,879,322.00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	4,545,000,000.00	4,324,312,250.00	95.14	0.00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekrayasa-Jasa Desain Rekrayasa untuk Pekerjaan	3,500,000,000.00	3,201,319,500.00	91.47	1,946,301,750.00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekrayasa-Jasa Desain Rekrayasa untuk Pekerjaan	3,000,000,000.00	2,887,748,250.00	103.19	3,432,414,000.00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan	0.00	0.00	0.00	2,057,962,200.00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan	700,000,000.00	696,136,500.00	99.45	0.00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekrayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan	43,800,600.00	43,800,600.00	100.00	394,205,400.00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekrayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Telekomunikasi	895,152,483.00	861,373,098.00	126.01	2,473,995,972.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	519,850,000.00	290,800,000.00	55.94	242,625,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0.00	0.00	0.00	112,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	289,600,000.00	180,600,000.00	62.36	60,000,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	230,250,000.00	110,200,000.00	47.86	70,625,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	9,560,694,635.00	7,855,585,228.00	83.61	2,291,439,421.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	870,695,035.00	733,946,411.00	84.29	448,545,421.00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	104,881,000.00	104,775,000.00	99.90	10,376,000.00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	93,402,000.00	93,190,000.00	99.77	42,555,000.00
5.1.02.03.02.0007	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	8,045,000.00	8,040,000.00	99.94	8,045,000.00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	5,373,000.00	5,365,000.00	99.85	5,373,000.00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	39,081,035.00	39,032,000.00	99.87	39,071,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor	476,630,000.00	342,268,036.00	71.81	249,129,982.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	74,220,000.00	73,101,375.00	98.49	0.00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor	26,833,000.00	26,675,000.00	99.41	53,595,439.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14,030,000.00	14,000,000.00	99.79	12,200,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10,950,000.00	10,600,000.00	96.80	10,900,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	17,250,000.00	16,900,000.00	97.97	17,250,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	139,999,600.00	139,999,217.00	191.82	100,000,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	139,999,600.00	139,999,217.00	191.82	100,000,000.00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8,550,000,000.00	6,991,639,600.00	81.77	1,742,894,000.00
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	500,000,000.00	451,567,100.00	90.31	500,000,000.00

5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sos	11,230,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sos	7,201,138,000.00	7,201,138,000.00	100.00	22,108,636,250.00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memi	0.00	0.00	0.00	529,180,632.00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Tela	0.00	0.00	0.00	529,180,632.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	144,408,684,094.00	105,310,699,617.00	80.14	62,610,974,493.00
5.2	BELANJA MODAL	773,850,757,395.00	709,056,252,540.00	95.09	654,657,240,310.61
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,018,523,600.00	3,399,291,000.00	83.10	3,622,267,200.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0.00	0.00	0.00	1,555,000,000.00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0.00	0.00	0.00	1,555,000,000.00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	0.00	0.00	0.00	859,000,000.00
5.2.02.01.01.0007	Belanja Modal Compacting Equipment	0.00	0.00	0.00	350,000,000.00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0.00	0.00	0.00	346,000,000.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1,400,000,000.00	1,128,350,000.00	80.60	940,000,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1,400,000,000.00	1,128,350,000.00	80.60	940,000,000.00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1,400,000,000.00	1,128,350,000.00	80.60	940,000,000.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2,029,824,000.00	2,023,741,000.00	99.70	266,737,200.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	107,664,000.00	106,000,000.00	98.45	187,337,200.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perengkapan Kantor	107,664,000.00	106,000,000.00	98.45	69,841,200.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00	117,496,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1,922,160,000.00	1,917,741,000.00	99.77	0.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1,860,000,000.00	1,856,025,000.00	99.79	0.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	62,160,000.00	61,716,000.00	99.29	0.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0.00	0.00	0.00	79,400,000.00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0.00	0.00	0.00	79,400,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0.00	0.00	0.00	594,230,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0.00	0.00	0.00	106,930,000.00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0.00	0.00	0.00	9,900,000.00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0.00	0.00	0.00	97,030,000.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0.00	0.00	0.00	22,800,000.00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0.00	0.00	0.00	22,800,000.00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0.00	0.00	0.00	464,500,000.00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0.00	0.00	0.00	464,500,000.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	399,999,600.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	399,999,600.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.08.01.0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	399,999,600.00	0.00	0.00	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	188,700,000.00	187,200,000.00	99.21	262,300,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	188,700,000.00	187,200,000.00	99.21	234,650,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	188,700,000.00	187,200,000.00	99.21	234,650,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0.00	0.00	0.00	27,650,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0.00	0.00	0.00	27,650,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11,005,817,850.00	10,043,396,850.00	94.40	37,991,438,886.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	11,005,817,850.00	10,043,396,850.00	94.40	37,991,438,886.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10,105,817,850.00	9,156,716,850.00	94.03	37,991,438,886.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9,905,817,850.00	9,156,716,850.00	95.93	3,528,340,000.00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0.00	0.00	0.00	34,463,098,886.00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	900,000,000.00	886,680,000.00	98.52	0.00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	900,000,000.00	886,680,000.00	98.52	0.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	758,826,415,945.00	695,673,564,690.00	95.17	612,843,739,774.61
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	598,918,257,695.00	552,380,370,312.00	95.91	498,180,278,483.00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	497,073,888,015.00	466,549,870,882.00	96.53	457,578,986,825.00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	497,073,888,015.00	466,549,870,882.00	96.53	457,578,986,825.00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	101,844,369,680.00	85,830,499,430.00	92.88	40,601,291,658.00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	101,844,369,680.00	85,830,499,430.00	92.88	40,601,291,658.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	159,908,158,250.00	143,293,194,378.00	92.36	114,663,461,291.61
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	27,600,000,000.00	26,653,173,070.00	98.53	19,362,303,715.61
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	27,600,000,000.00	26,653,173,070.00	98.53	18,816,721,715.61
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	0.00	0.00	0.00	545,582,000.00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	126,308,359,250.00	110,713,221,308.00	90.08	84,824,221,326.00
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	60,048,676,050.00	56,546,957,008.00	98.60	46,144,637,426.00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	66,259,683,200.00	54,166,264,300.00	82.36	38,679,583,900.00
5.2.04.02.05	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0.00	0.00	0.00	6,056,597,675.00
5.2.04.02.05.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	0.00	0.00	0.00	6,056,597,675.00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	3,999,799,000.00	3,931,000,000.00	98.28	0.00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	3,999,799,000.00	3,931,000,000.00	98.28	0.00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2,000,000,000.00	1,995,800,000.00	139.72	4,420,338,575.00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	2,000,000,000.00	1,995,800,000.00	139.72	4,420,338,575.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	199,794,450.00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0.00	0.00	0.00	199,794,450.00
5.2.05.01.06	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita	0.00	0.00	0.00	199,794,450.00
5.2.05.01.06.0001	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita	0.00	0.00	0.00	199,794,450.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	773,850,757,395.00	709,056,252,540.00	95.09	654,657,240,310.61
	JUMLAH BELANJA	918,259,441,489.00	814,366,952,157.00	92.74	717,268,214,803.61
	SURPLUS/DEFISIT	(917,937,632,974.00)	(851,376,222,688.00)	92.75	(717,143,729,359.61)

0.00

Kab. Muara Enim, 22 Januari 2025  
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSuhermansyah, ST, M.Eng.  
NIP. 197208202005011004



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02	Retribusi Daerah	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5	BELANJA DAERAH	229,590,633,780.00	214,437,385,062.99	93.40	154,921,726,373.55
5.1	BELANJA OPERASI	109,050,529,175.00	100,530,558,472.00	92.19	70,459,771,913.78
5.1.01	Belanja Pegawai	6,277,267,036.00	5,368,020,675.00	85.52	5,298,025,455.78
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3,408,496,460.00	2,971,050,668.00	87.17	2,979,408,351.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2,619,299,760.00	2,332,952,244.00	89.07	2,286,631,886.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	257,275,000.00	203,805,196.00	79.22	206,887,176.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	217,156,500.00	165,970,000.00	76.43	215,950,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	82,287,000.00	78,150,000.00	94.97	69,900,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	74,497,000.00	61,465,000.00	82.51	59,015,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	151,905,000.00	125,938,380.00	82.91	136,149,600.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5,986,000.00	2,733,730.00	45.67	4,843,938.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	90,200.00	36,118.00	40.04	30,751.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,868,770,576.00	2,396,970,007.00	83.55	2,318,617,104.78
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2,868,770,576.00	2,396,970,007.00	83.55	2,318,617,104.78
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66,125,986,285.00	58,567,524,797.00	88.57	41,004,548,458.00
5.1.02.01	Belanja Barang	30,028,567,298.00	29,066,675,718.00	96.80	17,695,372,392.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	30,028,567,298.00	29,066,675,718.00	96.80	17,695,372,392.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	29,118,288,837.00	26,063,506,862.00	89.51	19,236,548,126.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	28,556,396,637.00	25,798,902,968.00	90.34	18,200,886,174.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	94,551,500.00	85,163,194.00	90.07	68,121,852.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30,000,000.00	26,000,000.00	86.67	47,660,000.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	224,840,700.00	14,840,700.00	6.60	688,280,100.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	212,500,000.00	138,600,000.00	65.22	231,600,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	592,424,250.00	441,770,489.00	74.57	1,355,904,497.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	505,224,250.00	354,570,489.00	70.18	224,053,497.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	87,200,000.00	87,200,000.00	100.00	1,131,851,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3,386,705,900.00	2,439,001,728.00	72.02	2,716,723,443.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,386,705,900.00	2,439,001,728.00	72.02	2,716,723,443.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	3,000,000,000.00	556,570,000.00	18.55	0.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	3,000,000,000.00	556,570,000.00	18.55	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	36,647,275,854.00	36,595,013,000.00	99.86	24,157,198,000.00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	12,157,198,000.00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	12,157,198,000.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kem	36,647,275,854.00	36,595,013,000.00	99.86	12,000,000,000.00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifa	36,647,275,854.00	36,595,013,000.00	99.86	12,000,000,000.00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>109,050,529,175.00</b>	<b>100,530,558,472.00</b>	<b>92.19</b>	<b>70,459,771,913.78</b>
5.2	BELANJA MODAL	120,540,104,605.00	113,906,826,590.99	94.50	84,461,954,459.77
5.2.01	Belanja Modal Tanah	12,382,090,321.00	10,194,664,000.00	82.33	2,230,870,000.00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	12,382,090,321.00	10,194,664,000.00	82.33	2,230,870,000.00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	7,145,000,000.00	6,801,806,000.00	95.20	2,230,870,000.00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	5,237,090,321.00	3,392,858,000.00	64.79	0.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,248,766,800.00	1,215,870,800.00	97.37	693,520,900.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0.00	0.00	0.00	202,660,000.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0.00	0.00	0.00	202,660,000.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0.00	0.00	0.00	152,500,000.00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0.00	0.00	0.00	152,500,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	221,918,800.00	193,170,800.00	87.05	106,228,400.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	16,200,000.00	16,000,000.00	98.77	36,728,400.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	205,718,800.00	177,170,800.00	86.12	69,500,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	805,000,000.00	802,400,000.00	99.68	7,500,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	250,000,000.00	250,000,000.00	100.00	7,500,000.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	3,000,000.00	2,900,000.00	96.67	0.00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	552,000,000.00	549,500,000.00	99.55	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	221,848,000.00	220,300,000.00	99.30	224,632,500.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	151,600,000.00	151,600,000.00	100.00	174,500,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	70,248,000.00	68,700,000.00	97.80	50,132,500.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18,889,564,000.00	15,921,741,897.25	84.29	12,903,353,984.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	18,489,564,000.00	15,523,507,897.25	83.96	12,215,775,001.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	17,439,564,000.00	15,523,507,897.25	89.01	12,215,775,001.00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1,050,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	400,000,000.00	398,234,000.00	99.56	687,578,983.00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	400,000,000.00	398,234,000.00	99.56	687,578,983.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	88,019,683,484.00	86,574,549,893.74	98.36	68,634,209,575.77
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	40,103,705,000.00	39,530,916,781.74	98.57	31,778,009,999.00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	40,103,705,000.00	39,530,916,781.74	98.57	31,778,009,999.00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	17,136,879,510.00	16,892,711,640.00	97.41	14,456,459,365.77
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan f	198,699,510.00	197,500,000.00	99.40	539,605,000.00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0.00	0.00	0.00	64,200,000.00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	16,938,180,000.00	16,495,211,640.00	97.38	13,852,654,365.77
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	30,779,098,974.00	30,350,921,472.00	98.61	22,399,740,211.00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	30,779,098,974.00	30,350,921,472.00	98.61	22,399,740,211.00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>120,540,104,605.00</b>	<b>113,906,826,590.99</b>	<b>94.50</b>	<b>84,461,954,459.77</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>229,590,633,780.00</b>	<b>214,437,385,062.99</b>	<b>93.40</b>	<b>154,921,726,373.55</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(229,570,633,780.00)</b>	<b>(214,437,385,062.99)</b>	<b>93.41</b>	<b>(154,921,726,373.55)</b>

Kab. Muara Enim, 03 Februari 2025

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Ir. H. Ahmad Yani Heriyanto, M.M.



## PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	15,413,993,669.00	12,592,143,641.00	81.69	11,987,571,985.32
5.1	BELANJA OPERASI	14,490,294,094.00	11,680,471,141.00	80.61	10,913,012,485.32
5.1.01	Belanja Pegawai	4,467,165,763.00	3,396,015,744.00	76.02	3,147,423,048.32
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,172,163,557.00	1,556,913,221.00	71.68	1,537,400,368.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,599,782,667.00	1,195,006,015.00	74.70	1,168,249,280.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,599,782,667.00	1,195,006,015.00	74.70	1,168,249,280.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	169,882,102.00	132,521,586.00	78.01	131,246,140.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	169,882,102.00	132,521,586.00	78.01	131,246,140.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	219,048,000.00	125,820,000.00	57.44	122,070,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	219,048,000.00	125,820,000.00	57.44	122,070,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	50,079,419.00	28,380,000.00	56.67	35,640,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	50,079,419.00	28,380,000.00	56.67	35,640,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	127,458,264.00	73,216,620.00	57.44	75,751,320.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	127,458,264.00	73,216,620.00	57.44	75,751,320.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5,883,500.00	1,952,304.00	33.18	4,427,320.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5,883,500.00	1,952,304.00	33.18	4,427,320.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29,605.00	16,696.00	56.40	16,308.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29,605.00	16,696.00	56.40	16,308.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,295,002,206.00	1,839,102,523.00	80.14	1,610,022,680.32
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,875,068,846.00	1,504,885,855.00	80.26	1,311,762,390.32
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,875,068,846.00	1,504,885,855.00	80.26	1,311,762,390.32
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	419,933,360.00	334,216,668.00	79.59	298,260,290.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	419,933,360.00	334,216,668.00	79.59	298,260,290.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10,023,128,331.00	8,284,455,397.00	82.65	7,765,589,437.00
5.1.02.01	Belanja Barang	1,628,819,090.00	1,279,304,240.00	78.54	1,468,596,600.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,628,819,090.00	1,279,304,240.00	78.54	1,468,596,600.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	271,404,000.00	184,965,000.00	68.15	164,118,000.00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3,000,000.00	480,000.00	16.00	0.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	246,001,750.00	217,054,600.00	88.23	156,445,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	188,491,440.00	167,631,640.00	88.93	118,772,600.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14,351,600.00	11,720,000.00	81.66	8,300,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	68,692,800.00	53,483,000.00	77.86	37,902,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17,676,500.00	17,550,000.00	99.28	18,362,000.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	108,000,000.00	108,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67,956,000.00	1,725,000.00	2.54	7,840,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	643,245,000.00	516,695,000.00	80.33	373,290,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0.00	0.00	0.00	552,653,000.00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0.00	0.00	0.00	30,914,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	5,857,644,481.00	5,100,589,135.00	87.08	5,266,890,852.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5,664,763,331.00	5,049,973,135.00	89.15	5,186,690,852.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36,500,000.00	6,600,000.00	18.08	5,650,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	142,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	12,000,000.00	6,000,000.00	50.00	10,500,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	198,120,000.00	198,120,000.00	100.00	5,077,320,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4,879,200,000.00	4,639,520,000.00	95.09	0.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	203,800,000.00	108,900,000.00	53.43	0.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	23,000,000.00	2,904,750.00	12.63	6,425,644.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	72,250,000.00	53,326,777.00	73.81	43,129,283.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15,840,000.00	1,800,000.00	11.36	10,220,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	38,812,500.00	24,366,608.00	62.78	24,070,650.00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	300,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17,240,831.00	7,235,000.00	41.96	9,375,275.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	60,045,150.00	50,616,000.00	84.30	0.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	60,045,150.00	50,616,000.00	84.30	0.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12,836,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12,836,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	120,000,000.00	0.00	0.00	80,200,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0.00	0.00	0.00	80,200,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	703,991,060.00	698,846,000.00	99.27	243,225,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	521,911,060.00	516,845,000.00	99.03	241,325,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	400,780,000.00	396,185,000.00	98.85	214,695,000.00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	1,241,060.00	1,200,000.00	96.69	0.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25,010,000.00	24,700,000.00	98.76	12,810,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14,600,000.00	14,600,000.00	100.00	7,150,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	8,280,000.00	8,160,000.00	98.55	6,670,000.00
5.1.02.03.02.0451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	72,000,000.00	72,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182,080,000.00	182,001,000.00	99.96	1,900,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	182,080,000.00	182,001,000.00	99.96	1,900,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,811,873,700.00	1,185,316,022.00	65.42	786,876,985.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,811,873,700.00	1,185,316,022.00	65.42	786,876,985.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,802,539,700.00	1,177,079,622.00	65.30	786,876,985.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,334,000.00	8,236,400.00	88.24	0.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20,800,000.00	20,400,000.00	98.08	0.00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20,800,000.00	20,400,000.00	98.08	0.00

5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	20,800,000.00	20,400,000.00	98.08	0.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	14,490,294,094.00	11,680,471,141.00	80.61	10,913,012,485.32
5.2	BELANJA MODAL	923,699,575.00	911,672,500.00	98.70	1,074,559,500.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372,399,575.00	366,355,000.00	98.38	831,779,500.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	408,300,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0.00	0.00	0.00	408,300,000.00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0.00	0.00	0.00	408,300,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	166,570,000.00	161,340,000.00	96.86	95,692,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	110,500,000.00	105,630,000.00	95.59	16,660,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	16,000,000.00	15,900,000.00	99.38	16,660,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	94,500,000.00	89,730,000.00	94.95	0.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	56,070,000.00	55,710,000.00	99.36	79,032,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0.00	0.00	0.00	53,500,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Peralatan Pendingin	30,000,000.00	29,850,000.00	99.50	24,032,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26,070,000.00	25,860,000.00	99.19	1,500,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0.00	0.00	0.00	189,337,500.00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0.00	0.00	0.00	189,337,500.00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0.00	0.00	0.00	189,337,500.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	197,954,575.00	197,455,000.00	99.75	93,450,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	172,299,700.00	171,895,000.00	99.77	79,250,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	172,299,700.00	171,895,000.00	99.77	79,250,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	25,654,875.00	25,560,000.00	99.63	14,200,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	25,654,875.00	25,560,000.00	99.63	14,200,000.00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	7,875,000.00	7,560,000.00	96.00	0.00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7,875,000.00	7,560,000.00	96.00	0.00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	7,875,000.00	7,560,000.00	96.00	0.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	329,300,000.00	326,250,000.00	99.07	197,500,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	329,300,000.00	326,250,000.00	99.07	197,500,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	329,300,000.00	326,250,000.00	99.07	197,500,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00	197,500,000.00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	144,300,000.00	141,850,000.00	98.30	0.00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	35,000,000.00	34,800,000.00	99.43	0.00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	150,000,000.00	149,600,000.00	99.73	0.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	222,000,000.00	219,067,500.00	98.68	0.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	222,000,000.00	219,067,500.00	98.68	0.00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	222,000,000.00	219,067,500.00	98.68	0.00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	222,000,000.00	219,067,500.00	98.68	0.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	45,280,000.00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0.00	0.00	0.00	45,280,000.00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0.00	0.00	0.00	45,280,000.00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	0.00	0.00	0.00	45,280,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	923,699,575.00	911,672,500.00	98.70	1,074,559,500.00
	JUMLAH BELANJA	15,413,993,669.00	12,592,143,641.00	81.69	11,987,571,985.32
	SURPLUS/DEFISIT	( 15,413,993,669.00 )	( 12,592,143,641.00 )	81.69	( 11,987,571,985.32 )

Kab. Muara Enim, 31 Desember 2024  
Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Andrille Martin, SE,Kp,MM  
NIP. 198203122006041011



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	20,944,895,323.00	19,570,029,721.00	93.44	16,316,214,519.00
5.1	BELANJA OPERASI	12,241,274,873.00	10,891,292,721.00	88.97	8,790,567,519.00
5.1.01	Belanja Pegawai	5,845,696,133.00	5,596,261,064.00	95.73	3,600,180,961.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3,037,787,171.00	2,876,108,773.00	94.68	1,773,124,140.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2,412,335,000.00	2,285,972,412.00	94.76	1,339,298,240.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,162,450,000.00	1,108,079,384.00	95.32	1,171,855,040.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,249,885,000.00	1,177,893,028.00	94.24	167,443,200.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	222,793,215.00	211,425,530.00	94.90	133,313,958.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	128,903,215.00	122,669,120.00	95.16	120,569,670.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	93,890,000.00	88,756,410.00	94.53	12,744,288.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	88,806,000.00	84,520,000.00	95.17	91,000,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	88,806,000.00	84,520,000.00	95.17	91,000,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	35,943,000.00	34,200,000.00	95.15	83,000,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	35,943,000.00	34,200,000.00	95.15	83,000,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	115,886,750.00	108,605,000.00	93.72	36,580,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25,481,750.00	24,185,000.00	94.91	23,620,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	90,405,000.00	84,420,000.00	93.38	12,960,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	157,867,878.00	147,591,960.00	93.49	81,617,340.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	67,462,878.00	62,136,360.00	92.10	68,436,900.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	90,405,000.00	85,455,600.00	94.53	13,180,440.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4,115,021.00	3,757,516.00	91.31	8,296,134.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4,115,021.00	3,757,516.00	91.31	8,296,134.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	40,307.00	36,355.00	90.20	18,468.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16,937.00	14,516.00	85.71	16,731.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	23,370.00	21,839.00	93.45	1,737.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,807,908,962.00	2,720,152,291.00	96.87	1,827,056,821.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2,307,977,394.00	2,238,635,617.00	97.00	1,496,099,933.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,477,577,394.00	1,426,653,955.00	96.55	1,371,389,591.00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	830,400,000.00	811,981,662.00	97.78	124,710,342.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	499,931,568.00	481,516,674.00	96.32	330,956,888.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	333,451,568.00	319,100,925.00	95.70	306,061,289.00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	166,480,000.00	162,415,749.00	97.56	24,895,599.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,395,578,740.00	5,295,031,657.00	82.79	5,190,386,558.00
5.1.02.01	Belanja Barang	1,377,472,680.00	1,258,172,220.00	91.34	1,113,621,157.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,377,472,680.00	1,258,172,220.00	91.34	1,113,621,157.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	5,200,000.00	5,200,000.00	100.00	473,200.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	121,220,615.00	79,493,255.00	65.58	144,235,290.00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	40,500,000.00	38,700,000.00	95.56	34,350,000.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0.00	0.00	0.00	598,500.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	230,601,334.00	230,295,365.00	99.87	109,753,167.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	176,005,439.00	161,618,400.00	91.83	169,170,900.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cetak	141,600.00	118,000.00	83.33	0.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	195,305,730.00	190,289,200.00	97.43	176,680,900.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12,989,200.00	12,675,000.00	97.58	12,980,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21,408,860.00	21,350,000.00	99.73	24,872,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15,661,702.00	15,661,000.00	100.00	31,388,000.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan	142,000,000.00	142,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2,475,200.00	660,000.00	26.66	2,735,000.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0.00	0.00	0.00	56,257,200.00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	61,068,000.00	58,440,000.00	95.70	0.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,048,000.00	1,485,000.00	24.55	10,261,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	167,847,000.00	121,497,000.00	72.39	165,130,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0.00	0.00	0.00	13,650,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	179,000,000.00	178,690,000.00	99.83	161,086,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2,901,089,072.00	2,429,652,448.00	83.75	2,437,457,087.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1,861,948,272.00	1,469,126,968.00	78.90	1,678,066,297.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pelaksana	17,900,000.00	10,000,000.00	55.87	9,800,000.00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelar	1,322,520,000.00	1,036,998,400.00	78.41	1,284,000,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12,840,000.00	12,840,000.00	100.00	7,490,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	51,360,000.00	51,360,000.00	100.00	51,360,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	198,795,343.00	198,632,000.00	99.92	198,500,000.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	19,200,000.00	15,000,000.00	78.13	11,200,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	30,003,500.00	21,100,000.00	70.33	16,812,680.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	64,998,990.00	51,035,692.00	78.52	53,159,734.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12,800,000.00	9,120,000.00	71.25	7,020,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	35,550,000.00	26,106,726.00	73.44	25,957,708.00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	7,560,000.00	839,400.00	11.10	2,196,600.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	88,420,439.00	36,094,750.00	40.82	10,569,575.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	209,140,800.00	192,925,480.00	92.25	166,390,790.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	209,140,800.00	192,925,480.00	92.25	166,390,790.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	54,000,000.00	54,000,000.00	100.00	48,000,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	54,000,000.00	54,000,000.00	100.00	48,000,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	776,000,000.00	713,600,000.00	91.96	545,000,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	776,000,000.00	713,600,000.00	91.96	545,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	377,870,288.00	260,135,387.00	68.84	248,414,642.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	331,872,288.00	214,235,387.00	64.55	202,674,650.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Dara	33,580,000.00	33,506,900.00	99.78	33,168,150.00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Dara	210,000,000.00	122,488,487.00	58.33	120,000,000.00
5.1.02.03.02.0054	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apur	30,000,000.00	25,800,000.00	86.00	26,000,000.00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	4,472,288.00	0.00	0.00	1,985,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	36,600,000.00	15,460,000.00	42.24	10,245,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Persona	10,950,000.00	10,950,000.00	100.00	8,476,500.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Pel	6,270,000.00	6,030,000.00	96.17	2,800,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45,998,000.00	45,900,000.00	99.79	45,739,992.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ged	45,998,000.00	45,900,000.00	99.79	45,739,992.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,739,146,700.00	1,347,071,602.00	77.46	1,390,893,672.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,739,146,700.00	1,347,071,602.00	77.46	1,390,893,672.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,739,146,700.00	1,347,071,602.00	77.46	1,390,893,672.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12,241,274,873.00	10,891,292,721.00	88.97	8,790,567,519.00
5.2	BELANJA MODAL	8,703,620,450.00	8,678,737,000.00	99.71	7,525,647,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,703,620,450.00	8,678,737,000.00	99.71	7,498,147,000.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	7,310,000,000.00	7,310,000,000.00	100.00	7,329,600,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	7,175,000,000.00	7,175,000,000.00	100.00	7,329,600,000.00

5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0.00	0.00	0.00	385,600,000.00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	7,175,000,000.00	7,175,000,000.00	100.00	6,944,000,000.00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor	135,000,000.00	135,000,000.00	100.00	0.00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Per	135,000,000.00	135,000,000.00	100.00	0.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	0.00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	0.00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	0.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	750,380,450.00	742,669,000.00	98.97	97,822,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	297,000,000.00	297,000,000.00	100.00	10,962,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0.00	0.00	0.00	10,962,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	297,000,000.00	297,000,000.00	100.00	0.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	453,380,450.00	445,669,000.00	98.30	86,860,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00	13,345,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	18,200,000.00	17,610,000.00	96.76	21,765,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	182,250,000.00	175,159,000.00	96.11	0.00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	207,930,450.00	207,900,000.00	99.99	51,750,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	157,500,000.00	153,050,000.00	97.17	18,900,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	77,500,000.00	73,405,000.00	94.72	0.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	77,500,000.00	73,405,000.00	94.72	0.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	0.00
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	0.00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	20,000,000.00	19,645,000.00	98.23	18,900,000.00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	20,000,000.00	19,645,000.00	98.23	18,900,000.00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2,500,000.00	2,040,000.00	81.60	2,485,000.00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2,500,000.00	2,040,000.00	81.60	2,485,000.00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	2,500,000.00	2,040,000.00	81.60	2,485,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	20,000,000.00	19,988,000.00	99.94	49,340,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	20,000,000.00	19,988,000.00	99.94	39,480,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	20,000,000.00	19,988,000.00	99.94	39,480,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0.00	0.00	0.00	9,860,000.00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	455,740,000.00	443,490,000.00	97.31	0.00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	455,740,000.00	443,490,000.00	97.31	0.00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	455,740,000.00	443,490,000.00	97.31	0.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	27,500,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0.00	0.00	0.00	27,500,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0.00	0.00	0.00	27,500,000.00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0.00	0.00	0.00	27,500,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	8,703,620,450.00	8,678,737,000.00	99.71	7,525,647,000.00
	JUMLAH BELANJA	20,944,895,323.00	19,570,029,721.00	93.44	16,316,214,519.00
	SURPLUS/DEFISIT	(20,944,895,323.00)	(19,570,029,721.00)	93.44	(16,316,214,519.00)

Kab. Muara Enim, 31 Januari 2025  
Plt. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan  
Penyelamatan

Drs. Sapiroma, M.Si.  
NIP. 197402231993021001



**PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>10.156.969.160,00</b>	<b>7.277.016.261,00</b>	<b>71,65</b>	<b>7.004.721.207,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>9.659.182.787,00</b>	<b>6.812.616.261,00</b>	<b>70,53</b>	<b>5.535.315.207,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	4.055.350.484,00	2.421.776.574,00	59,72	1.836.393.921,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.523.102.002,00	1.289.001.489,00	51,09	984.981.083,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.584.913.023,00	1.030.815.253,00	65,04	779.078.200,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.408.723.384,00	921.892.860,00	65,44	767.212.200,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	176.189.639,00	108.922.393,00	61,82	11.866.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	410.952.622,00	107.203.266,00	26,09	78.195.050,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	344.753.432,00	93.684.074,00	27,17	76.771.130,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	66.199.190,00	13.519.192,00	20,42	1.423.920,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	64.944.000,00	44.100.000,00	67,90	40.860.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	64.944.000,00	44.100.000,00	67,90	40.860.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	112.217.000,00	42.340.000,00	37,73	34.105.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	103.115.000,00	36.050.000,00	34,96	33.365.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9.102.000,00	6.290.000,00	69,11	740.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	336.970.376,00	63.729.600,00	18,91	51.707.880,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	294.213.608,00	55.546.140,00	18,88	50.838.840,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	42.756.768,00	8.183.460,00	19,14	869.040,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.069.160,00	797.762,00	6,10	1.025.288,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.069.160,00	797.762,00	6,10	1.025.288,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	35.821,00	15.608,00	43,57	9.665,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.972,00	13.708,00	44,26	9.601,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.849,00	1.900,00	39,18	64,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.532.248.482,00	1.132.775.085,00	73,93	851.412.838,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.233.130.642,00	945.743.872,00	76,69	719.508.311,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.120.530.196,00	860.651.574,00	76,81	709.515.385,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	112.600.446,00	85.092.298,00	75,57	9.992.926,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	299.117.840,00	187.031.213,00	62,53	131.904.527,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	265.337.702,00	161.492.957,00	60,86	128.897.311,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	33.780.138,00	25.538.256,00	75,60	3.007.216,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.603.832.303,00	4.390.839.687,00	78,35	3.698.921.286,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.262.903.767,00	947.039.784,00	74,99	691.431.200,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.262.903.767,00	947.039.784,00	74,99	691.431.200,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	134.186.800,00	91.135.600,00	67,92	67.116.800,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.367.214,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.589.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	216.416.732,00	199.814.100,00	92,33	139.775.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	125.175.309,00	96.726.400,00	77,27	60.880.200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	13.192.500,00	3.060.000,00	23,19	9.320.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.750.112,00	17.719.584,00	99,83	19.208.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.289.000,00	8.744.900,00	57,20	8.252.600,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.000.000,00	13.600.000,00	90,67	9.000.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	47.121.000,00	44.961.000,00	95,42	91.460.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	562.500,00	562.500,00	100,00	787.500,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	31.225.000,00	29.801.000,00	95,44	17.900.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	188.108.600,00	114.234.700,00	60,73	53.245.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	11.700.000,00	11.700.000,00	100,00	14.851.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	272.200.000,00	143.380.000,00	52,67	164.035.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	9.010.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	108.359.000,00	107.500.000,00	99,21	16.000.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	64.500.000,00	64.100.000,00	99,38	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.275.425.155,00	1.814.147.767,00	79,73	1.570.867.630,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.520.445.620,00	1.227.466.767,00	80,73	1.228.195.825,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	74.200.000,00	60.700.000,00	81,81	58.350.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.350.000,00	12.750.000,00	88,85	0,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	168.000.000,00	105.075.000,00	62,54	108.198.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	680.520.000,00	670.890.000,00	98,58	624.880.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	84.240.000,00	52.890.000,00	62,78	81.560.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	230.100.000,00	177.600.000,00	77,18	218.762.250,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	38.820.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.479.520,00	0,00	0,00	254.074,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	20.700.000,00	13.632.500,00	65,86	5.008.132,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	121.813.500,00	92.751.492,00	76,14	67.701.214,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.722.600,00	6.570.000,00	97,73	6.380.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	23.400.000,00	0,00	0,00	2.918.905,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	62.920.000,00	4.607.775,00	7,32	15.363.250,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	79.594.535,00	77.516.000,00	97,39	54.066.805,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	79.594.535,00	77.516.000,00	97,39	54.066.805,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.135.000,00	12.135.000,00	100,00	68.105.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	5.135.000,00	5.135.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	23.105.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	643.250.000,00	477.030.000,00	74,16	200.500.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	587.000.000,00	422.280.000,00	71,94	190.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	56.250.000,00	54.750.000,00	97,33	10.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	539.670.810,00	475.203.132,00	88,05	403.277.930,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	484.670.810,00	420.203.132,00	86,70	261.877.930,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	338.110.000,00	308.985.000,00	91,39	152.259.756,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	18.087.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	73.400.000,00	60.607.632,00	82,57	57.551.250,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	11.800.000,00	9.265.000,00	78,52	4.100.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14.564.810,00	14.200.500,00	97,50	7.229.924,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.536.000,00	9.000.000,00	38,24	10.025.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.600.000,00	11.245.000,00	82,68	5.875.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	9.660.000,00	6.900.000,00	71,43	6.750.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	141.400.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	141.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.525.832.571,00	1.154.449.004,00	75,66	1.033.344.526,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.525.832.571,00	1.154.449.004,00	75,66	1.033.344.526,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.350.276.751,00	994.976.876,00	73,69	1.033.344.526,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	175.555.820,00	159.472.128,00	90,84	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>9.659.182.787,00</b>	<b>6.812.616.261,00</b>	<b>70,53</b>	<b>5.535.315.207,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>497.786.373,00</b>	<b>464.400.000,00</b>	<b>93,29</b>	<b>1.469.406.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	414.786.373,00	381.400.000,00	91,95	1.120.456.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	770.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	770.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	770.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	67.000.000,00	66.700.000,00	99,55	189.686.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	67.000.000,00	66.700.000,00	99,55	151.250.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	67.000.000,00	66.700.000,00	99,55	151.250.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	38.436.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	34.700.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	3.736.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	211.673.873,00	180.300.000,00	85,18	54.770.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	11.673.873,00	0,00	0,00	54.770.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	11.673.873,00	0,00	0,00	54.770.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	200.000.000,00	180.300.000,00	90,15	0,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	200.000.000,00	180.300.000,00	90,15	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	136.112.500,00	134.400.000,00	98,74	106.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	120.000.000,00	119.500.000,00	99,58	79.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	120.000.000,00	119.500.000,00	99,58	79.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	16.112.500,00	14.900.000,00	92,47	26.500.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	16.112.500,00	14.900.000,00	92,47	26.500.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	348.950.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	149.500.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	149.500.000,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	149.500.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	199.450.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	199.450.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	199.450.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	0,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	0,00
5.2.05.01.06	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	0,00
5.2.05.01.06.0001	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>497.786.373,00</b>	<b>464.400.000,00</b>	<b>93,29</b>	<b>1.469.406.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>10.156.969.160,00</b>	<b>7.277.016.261,00</b>	<b>71,65</b>	<b>7.004.721.207,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(10.156.969.160,00)</b>	<b>(7.277.016.261,00)</b>	<b>71,65</b>	<b>(7.004.721.207,00)</b>

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
--------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------

Kab. Muara Enim, 30 Januari 2025  
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Abdurrozieq Putra, ST, MT  
NIP. 196908141998031003



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



DINAS SOSIAL  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	31,197,225,329.00	22,101,402,123.00	70.84	20,164,587,566.10
5.1	BELANJA OPERASI	21,182,461,611.00	14,797,587,123.00	69.86	17,768,299,986.10
5.1.01	Belanja Pegawai	4,332,124,616.00	2,900,151,762.00	66.95	3,230,036,707.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,457,994,907.00	1,466,181,001.00	59.65	1,735,246,699.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,874,129,709.00	1,433,970,761.00	76.51	1,494,790,008.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13,470,536,995.00	11,897,435,361.00	88.32	12,203,363,279.10
5.1.02.01	Belanja Barang	2,060,731,200.00	1,888,085,664.00	91.62	1,814,657,654.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	7,972,365,095.00	7,523,395,254.00	94.37	7,804,117,845.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	267,020,000.00	254,515,000.00	95.32	125,267,152.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3,170,420,700.00	2,231,439,443.00	70.38	2,459,320,628.10
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3,379,800,000.00	0.00	0.00	2,334,900,000.00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	3,379,800,000.00	0.00	0.00	2,334,900,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	21,182,461,611.00	14,797,587,123.00	69.86	17,768,299,986.10
5.2	BELANJA MODAL	10,014,763,718.00	7,303,815,000.00	72.93	2,396,287,580.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,515,211,718.00	921,465,000.00	60.81	1,731,246,000.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1,378,947,500.00	800,240,000.00	58.03	1,143,300,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	93,764,218.00	78,750,000.00	83.99	448,233,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	42,500,000.00	42,475,000.00	99.94	135,963,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8,499,552,000.00	6,382,350,000.00	75.09	665,041,580.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	8,228,000,000.00	6,111,900,000.00	74.28	665,041,580.00
5.2.03.04	Belanja Modal Tuju Titik Kontrol/Pasti	271,552,000.00	270,450,000.00	99.59	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	10,014,763,718.00	7,303,815,000.00	72.93	2,396,287,580.00
	JUMLAH BELANJA	31,197,225,329.00	22,101,402,123.00	70.84	20,164,587,566.10
	SURPLUS/DEFISIT	(31,197,225,329.00)	(22,101,402,123.00)	70.84	(20,164,587,566.10)

Kab. Muara Enim, 13 Februari 2025  
Kepala Dinas Sosial

Lido Septontoni, S.H., M.Si.  
NIP. 196610241992031006



**PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.010.000.000,00</b>	<b>2.198.793.000,00</b>	<b>109,39</b>	<b>1.792.339.700,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	2.010.000.000,00	2.198.793.000,00	109,39	1.792.339.700,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.010.000.000,00	2.198.793.000,00	109,39	1.792.339.700,00
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	1.792.339.700,00
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	0,00	0,00	1.792.339.700,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.010.000.000,00	2.198.793.000,00	109,39	0,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.010.000.000,00	2.198.793.000,00	109,39	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.010.000.000,00</b>	<b>2.198.793.000,00</b>	<b>109,39</b>	<b>1.792.339.700,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.010.000.000,00</b>	<b>2.198.793.000,00</b>	<b>109,39</b>	<b>1.792.339.700,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>13.214.219.778,00</b>	<b>12.319.934.586,00</b>	<b>93,23</b>	<b>10.732.839.677,54</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>12.475.401.930,00</b>	<b>11.585.777.586,00</b>	<b>92,87</b>	<b>10.163.743.677,54</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	5.727.968.965,00	5.272.331.040,00	92,05	5.000.106.164,54
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.264.033.523,00	2.957.858.958,00	90,62	2.888.272.787,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.385.404.278,00	2.227.012.348,00	93,36	2.128.287.182,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.263.946.578,00	2.137.311.562,00	94,41	2.116.421.182,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	121.457.700,00	89.700.786,00	73,85	11.866.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	266.751.723,00	257.164.448,00	96,41	233.024.088,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	248.617.599,00	247.745.864,00	99,65	231.362.848,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	18.134.124,00	9.418.584,00	51,94	1.661.240,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	125.921.250,00	76.020.000,00	60,37	114.370.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	125.921.250,00	76.020.000,00	60,37	114.370.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	255.137.460,00	202.660.000,00	79,43	219.034.850,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	255.137.460,00	202.660.000,00	79,43	219.034.850,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	60.624.500,00	47.265.000,00	77,96	43.545.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.198.750,00	42.085.000,00	82,20	42.805.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9.425.750,00	5.180.000,00	54,96	740.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	162.476.081,00	145.564.200,00	89,59	143.246.760,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	151.406.684,00	138.973.980,00	91,79	142.088.040,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.069.397,00	6.590.220,00	59,54	1.158.720,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.681.028,00	2.141.210,00	27,88	6.738.944,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.681.028,00	2.141.210,00	27,88	6.738.944,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	37.203,00	31.752,00	85,35	25.963,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.347,00	29.605,00	88,78	25.615,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.856,00	2.147,00	55,68	348,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.463.935.442,00	2.314.472.082,00	93,93	2.111.833.377,54
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.463.935.442,00	2.314.472.082,00	93,93	2.111.833.377,54
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.375.901.426,00	2.244.060.346,00	94,45	2.101.752.957,54
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	88.034.016,00	70.411.736,00	79,98	10.080.420,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.747.432.965,00	6.313.446.546,00	93,57	5.163.637.513,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.153.467.275,00	2.063.820.141,00	95,84	1.697.520.854,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.153.467.275,00	2.063.820.141,00	95,84	1.697.520.854,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	198.000.000,00	198.000.000,00	100,00	27.228.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.961.500,00	6.750.000,00	96,96	4.500.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	24.919.072,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	338.429.839,00	326.036.500,00	96,34	256.923.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	144.066.350,00	123.507.550,00	85,73	119.146.700,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.735.800,00	6.000.000,00	77,56	5.990.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	94.550.866,00	92.429.000,00	97,76	54.984.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	51.370.800,00	38.879.000,00	75,68	37.896.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	7.683.600,00	7.680.000,00	99,95	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	249.288.120,00	242.578.091,00	97,31	320.748.979,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	366.400.000,00	366.368.000,00	99,99	79.996.430,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	542.936.400,00	515.382.000,00	94,92	669.347.973,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	23.320.000,00	22.790.000,00	97,73	22.790.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	122.724.000,00	117.420.000,00	95,68	73.050.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.980.501.680,00	1.737.016.970,00	87,71	1.441.021.513,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.073.660.000,00	846.919.720,00	78,88	902.036.253,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.350.000,00	13.350.000,00	100,00	13.150.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	23.100.000,00	100,00	7.700.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	231.120.000,00	224.960.000,00	97,33	178.782.771,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	84.240.000,00	71.400.000,00	84,76	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	121.070.000,00	119.800.000,00	98,95	121.350.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	28.080.000,00	28.080.000,00	100,00	42.240.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	18.900.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	77.040.000,00	77.040.000,00	100,00	94.680.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.680.000,00	25.680.000,00	100,00	107.520.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	99.553.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	114.954.000,00	21.190.500,00	18,43	32.193.310,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	253.606.000,00	146.207.120,00	57,65	153.115.710,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	7.560.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.640.000,00	17.640.000,00	100,00	17.617.462,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19.580.000,00	14.272.100,00	72,89	7.674.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	196.375.680,00	195.492.450,00	99,55	30.657.060,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	93.960.000,00	93.960.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	63.892.800,00	63.892.800,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	38.522.880,00	37.639.650,00	97,71	30.657.060,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.840.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	6.840.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	703.626.000,00	694.604.800,00	98,72	508.328.200,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	595.926.000,00	590.454.800,00	99,08	471.953.200,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	22.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	82.500.000,00	78.950.000,00	95,70	14.375.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	515.362.880,00	431.776.341,00	83,78	354.299.600,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	318.362.880,00	234.776.341,00	73,74	154.795.600,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.550.000,00	11.536.000,00	29,92	100.065.600,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	170.520.000,00	148.040.341,00	86,82	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	51.380.000,00	17.530.000,00	34,12	15.895.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.532.880,00	16.520.000,00	99,92	15.800.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	24.820.000,00	24.600.000,00	99,11	14.460.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	16.560.000,00	16.550.000,00	99,94	8.575.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	197.000.000,00	197.000.000,00	100,00	199.504.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	197.000.000,00	197.000.000,00	100,00	199.504.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.098.101.130,00	2.080.833.094,00	99,18	1.661.196.266,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.098.101.130,00	2.080.833.094,00	99,18	1.661.196.266,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.098.101.130,00	2.080.833.094,00	99,18	1.661.196.266,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	9.599.280,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	9.599.280,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	9.599.280,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>12.475.401.930,00</b>	<b>11.585.777.586,00</b>	<b>92,87</b>	<b>10.163.743.677,54</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>738.817.848,00</b>	<b>734.157.000,00</b>	<b>99,37</b>	<b>569.096.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	693.817.848,00	689.157.000,00	99,33	569.096.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	587.345.348,00	582.684.500,00	99,21	400.629.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	165.000.000,00	163.900.000,00	99,33	44.648.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	165.000.000,00	163.900.000,00	99,33	24.648.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	422.345.348,00	418.784.500,00	99,16	355.981.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	137.595.348,00	136.050.000,00	98,88	241.150.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	21.000.000,00	20.359.500,00	96,95	94.831.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	263.750.000,00	262.375.000,00	99,48	20.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	106.472.500,00	106.472.500,00	100,00	168.467.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	87.500.000,00	87.500.000,00	100,00	109.700.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	87.500.000,00	87.500.000,00	100,00	109.700.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.972.500,00	18.972.500,00	100,00	58.767.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	18.972.500,00	18.972.500,00	100,00	58.767.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>738.817.848,00</b>	<b>734.157.000,00</b>	<b>99,37</b>	<b>569.096.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>13.214.219.778,00</b>	<b>12.319.934.586,00</b>	<b>93,23</b>	<b>10.732.839.677,54</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(11.204.219.778,00)</b>	<b>(10.121.141.586,00)</b>	<b>90,33</b>	<b>(8.940.499.977,54)</b>

Kab. Muara Enim, 08 Januari 2025  
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

M. Zulfachri Andri, S.H., M.H.  
NIP. 19731219200031002



**PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**



01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>13.778.025.422,00</b>	<b>12.302.023.215,00</b>	<b>89,29</b>	<b>13.098.373.291,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.991.455.851,00</b>	<b>9.613.347.184,00</b>	<b>87,46</b>	<b>7.643.373.291,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	4.567.125.830,00	4.149.761.911,00	90,86	3.605.892.249,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.411.029.552,00	2.132.856.995,00	88,46	1.926.963.153,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.785.852.888,00	1.653.098.028,00	92,57	1.431.637.780,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.739.881.228,00	1.630.672.828,00	93,72	1.431.637.780,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.971.660,00	22.425.200,00	48,78	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	167.484.079,00	124.793.302,00	74,51	124.678.822,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	161.107.128,00	124.793.302,00	77,46	124.678.822,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.376.951,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	126.105.750,00	115.640.000,00	91,70	115.450.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	126.105.750,00	115.640.000,00	91,70	115.450.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	188.687.500,00	137.585.000,00	72,92	155.249.200,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	188.687.500,00	137.585.000,00	72,92	155.249.200,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	36.250.125,00	26.200.000,00	72,28	20.095.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.794.250,00	24.905.000,00	73,70	20.095.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.455.875,00	1.295.000,00	52,73	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	95.596.363,00	69.885.300,00	73,10	70.537.080,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	91.451.976,00	69.378.360,00	75,86	70.537.080,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.144.387,00	506.940,00	12,23	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.016.325,00	5.630.829,00	51,11	9.295.823,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.016.325,00	5.630.829,00	51,11	9.295.823,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	36.522,00	24.536,00	67,18	19.448,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.208,00	23.955,00	68,04	19.448,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.314,00	581,00	44,22	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.156.096.278,00	2.016.904.916,00	93,54	1.678.929.096,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.156.096.278,00	2.016.904.916,00	93,54	1.678.929.096,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.135.935.438,00	1.999.330.207,00	93,60	1.678.929.096,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	20.160.840,00	17.574.709,00	87,17	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.424.330.021,00	5.463.585.273,00	85,05	4.037.481.042,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.177.532.592,00	1.005.297.850,00	85,37	900.787.450,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.177.532.592,00	1.005.297.850,00	85,37	900.787.450,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	60.000.000,00	49.295.000,00	82,16	64.814.750,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	284.399.926,00	238.370.550,00	83,82	242.183.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	162.849.658,00	141.855.300,00	87,11	158.455.700,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.560.900,00	4.800.000,00	86,32	2.990.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	31.143.708,00	29.119.500,00	93,50	7.952.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.321.900,00	8.522.000,00	91,42	4.606.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.332.500,00	1.300.000,00	97,56	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	86.700.000,00	64.200.000,00	74,05	18.425.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	528.224.000,00	459.885.500,00	87,06	379.100.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	14.310.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.000.000,00	7.950.000,00	99,38	7.950.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.730.897.586,00	2.377.198.241,00	87,05	1.460.937.495,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.597.475.336,00	1.327.991.131,00	83,13	885.684.495,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	323.400.000,00	277.500.000,00	85,81	183.200.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	120.000.000,00	100.000.000,00	83,33	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	28.000.000,00	2.565.667,00	9,16	0,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	35.330.000,00	5.522.000,00	15,63	5.876.500,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	56.160.000,00	56.160.000,00	100,00	80.040.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	142.720.000,00	122.680.000,00	85,96	67.930.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.260.000,00	16.050.000,00	83,33	28.080.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	60.990.000,00	60.990.000,00	100,00	38.520.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	8.250.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	36.000.000,00	35.970.000,00	99,92	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	22.000.000,00	13.500.000,00	61,36	5.900.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	4.000.000,00	3.996.000,00	99,90	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	171.600.000,00	171.428.400,00	99,90	171.428.400,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	27.462.000,00	7.337.750,00	26,72	11.403.948,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	184.443.336,00	126.108.634,00	68,37	73.506.597,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00	5.640.000,00	94,00	5.390.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	111.700.000,00	106.730.650,00	95,55	7.089.600,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	120.000.000,00	90.665.355,00	75,55	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.910.000,00	15.646.675,00	82,74	4.069.450,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	76.119.250,00	75.096.000,00	98,66	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	76.119.250,00	75.096.000,00	98,66	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.250.000,00	22.760.000,00	86,70	17.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	26.250.000,00	22.760.000,00	86,70	16.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	633.453.000,00	564.340.500,00	89,09	257.580.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	94.587.000,00	77.500.000,00	81,94	61.130.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	538.866.000,00	486.840.500,00	90,35	196.450.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	95.000.000,00	94.860.600,00	99,85	99.123.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	95.000.000,00	94.860.600,00	99,85	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	99.123.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	302.600.000,00	292.150.010,00	96,55	201.550.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	181.350.000,00	179.850.000,00	99,17	55.350.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	41.750.000,00	41.750.000,00	100,00	122.200.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	79.500.000,00	70.550.010,00	88,74	24.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	41.300.000,00	37.725.000,00	91,34	30.480.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.300.000,00	37.725.000,00	91,34	30.480.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20.000.000,00	16.675.000,00	83,38	16.130.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	970.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.100.000,00	6.850.000,00	96,48	5.130.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00	4.150.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	4.100.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.466.399.843,00	2.035.164.182,00	82,52	1.636.826.097,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.466.399.843,00	2.035.164.182,00	82,52	1.636.826.097,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.432.096.543,00	2.035.164.182,00	83,68	1.636.826.097,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.303.300,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.200.000,00	8.200.000,00	100,00	8.450.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.200.000,00	8.200.000,00	100,00	8.450.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	8.200.000,00	8.200.000,00	100,00	8.450.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>10.991.455.851,00</b>	<b>9.613.347.184,00</b>	<b>87,46</b>	<b>7.643.373.291,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.786.569.571,00</b>	<b>2.688.676.031,00</b>	<b>96,49</b>	<b>5.455.000.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.110.624.200,00	2.025.519.500,00	95,97	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.638.624.200,00	1.566.214.500,00	95,58	0,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	536.628.400,00	518.306.500,00	96,59	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	536.628.400,00	518.306.500,00	96,59	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.101.995.800,00	1.047.908.000,00	95,09	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	481.865.000,00	432.440.000,00	89,74	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	395.130.800,00	391.000.000,00	98,95	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	225.000.000,00	224.468.000,00	99,76	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	195.000.000,00	195.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	195.000.000,00	195.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	195.000.000,00	195.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	20.000.000,00	12.100.000,00	60,50	0,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	20.000.000,00	12.100.000,00	60,50	0,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	20.000.000,00	12.100.000,00	60,50	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	257.000.000,00	252.205.000,00	98,13	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	215.000.000,00	212.605.000,00	98,89	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	215.000.000,00	212.605.000,00	98,89	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	42.000.000,00	39.600.000,00	94,29	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	42.000.000,00	39.600.000,00	94,29	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	675.945.371,00	663.156.531,00	98,11	5.455.000.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	675.945.371,00	663.156.531,00	98,11	5.455.000.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	675.945.371,00	663.156.531,00	98,11	5.455.000.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	675.945.371,00	663.156.531,00	98,11	5.455.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>2.786.569.571,00</b>	<b>2.688.676.031,00</b>	<b>96,49</b>	<b>5.455.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>13.778.025.422,00</b>	<b>12.302.023.215,00</b>	<b>89,29</b>	<b>13.098.373.291,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(13.778.025.422,00)</b>	<b>(12.302.023.215,00)</b>	<b>89,29</b>	<b>(13.098.373.291,00)</b>

Kab. Muara Enim, 16 Januari 2025  
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Vivi Mariani, S.Si.,M.Bmd.,A.Pt  
NIP. 197603312000122003



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	S = (4/3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12.009.256.381,00</b>	<b>10.395.104.158,00</b>	<b>86,56</b>	<b>12.587.331.744,18</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>11.699.114.201,00</b>	<b>10.091.675.158,00</b>	<b>86,26</b>	<b>12.211.184.747,18</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	4.087.335.000,00	3.469.251.241,00	84,88	3.067.675.945,18
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.169.208.258,00	1.865.245.201,00	85,53	1.678.418.094,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.617.302.592,00	1.415.804.662,00	87,54	1.267.935.926,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.492.442.607,00	1.306.882.308,00	87,57	1.256.069.926,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	124.859.985,00	108.922.354,00	87,24	11.866.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	153.708.298,00	134.756.426,00	87,87	115.322.768,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	138.459.798,00	122.006.098,00	88,12	115.322.768,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.248.500,00	12.750.328,00	83,62	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	97.077.750,00	75.745.000,00	78,03	83.150.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	97.077.750,00	75.745.000,00	78,03	83.150.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	155.841.000,00	122.220.000,00	78,43	113.040.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	155.841.000,00	122.220.000,00	78,43	113.040.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	44.600.750,00	31.980.000,00	71,70	26.040.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36.664.250,00	25.690.000,00	70,07	25.300.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.936.500,00	6.290.000,00	79,25	740.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	85.808.982,00	67.712.700,00	78,91	62.788.140,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	74.738.982,00	60.398.280,00	80,81	62.498.460,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.070.000,00	7.314.420,00	66,07	289.680,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus ASN	14.786.582,00	7.008.006,00	47,39	10.128.109,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	14.786.582,00	7.008.006,00	47,39	10.128.109,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	82.304,00	18.407,00	22,36	15.151,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	78.716,00	16.882,00	21,45	15.127,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.588,00	1.525,00	42,50	24,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.918.176.742,00	1.614.906.040,00	84,14	1.389.257.851,18
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.918.176.742,00	1.614.906.040,00	84,14	1.389.257.851,18
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.812.282.332,00	1.528.868.324,00	84,36	1.379.177.431,18
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	105.844.410,00	85.137.716,00	80,44	10.080.420,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.611.779.201,00	6.622.423.817,00	87,00	9.143.508.852,00
5.1.02.01	Belanja Barang	4.407.554.566,00	3.982.305.600,00	90,35	5.530.459.206,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.407.554.566,00	3.982.305.600,00	90,35	5.530.459.206,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	4.452.500,00	4.452.500,00	100,00	3.380.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	46.731.200,00	38.976.600,00	83,41	30.767.400,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.111.900,00	4.111.900,00	100,00	28.337.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.678.500,00	3.678.500,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	120.000,00	114.800,00	95,67	47.050.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	244.822.300,00	178.045.300,00	72,72	195.162.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	148.897.800,00	117.944.600,00	79,21	114.445.900,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.497.600,00	2.230.000,00	89,29	2.230.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	13.494.966,00	9.992.700,00	67,38	7.833.200,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.037.800,00	9.822.800,00	97,86	4.634.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	81.622.500,00	67,110.000,00	69,97	62.663.750,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.562.725.500,00	3.312.163.700,00	92,97	4.680.668.556,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Nature dan Pakan-Nature	0,00	0,00	0,00	4.656.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	156.607.000,00	122.002.000,00	77,90	131.962.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakai Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	12.720.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.875.000,00	7.875.000,00	100,00	164.170.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	39.780.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.294.873.935,00	996.756.550,00	76,98	1.334.245.314,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.005.114.435,00	842.709.550,00	83,87	878.843.314,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	107.200.000,00	77.800.000,00	72,57	228.200.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	66.300.000,00	49.500.000,00	74,66	47.250.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	51.300.000,00	42.300.000,00	82,46	38.400.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	132.500.000,00	130.700.300,00	98,64	66.340.200,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	53.700.000,00	15.300.000,00	28,49	81.300.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	159.310.000,00	156.910.000,00	98,49	189.600.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Ahli	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	64.200.000,00	64.200.000,00	100,00	64.200.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	51.360.000,00	51.360.000,00	100,00	51.360.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perbaikan/Pertandingan	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	25.000.000,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	19.753.000,00	12,678.056,00	64,18	12,636.247,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	17.210.625,00	8,463.250,00	49,17	6,638.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	69,429.625,00	46,533.244,00	67,02	42,312.692,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.570.500,00	10,570.500,00	100,00	10,676.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	4.750.000,00	4,030.000,00	84,84	4,499.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16,930,675,00	16,764,200,00	99,02	4,830,675,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7,400,500,00	7,008,000,00	94,70	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	7,400,500,00	7,008,000,00	94,70	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	43,975,000,00	15,975,000,00	36,33	16,350,000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Pempung	7,000,000,00	0,00	0,00	10,500,000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	21,000,000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6,900,000,00	6,900,000,00	100,00	3,000,000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	9,075,000,00	9,075,000,00	100,00	2,850,000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	55,134,000,00	14,914,000,00	27,05	62,502,000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	7,701,000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	40,134,000,00	5,134,000,00	12,79	7,701,000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	15,000,000,00	9,780,000,00	65,20	147,000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	183,250,000,00	116,150,000,00	63,38	376,560,000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	66,000,000,00	7,900,000,00	10,61	57,700,000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	117,250,000,00	109,150,000,00	93,09	318,650,000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	226,950,000,00	226,729,000,00	99,90	616,413,800,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26,950,000,00	26,950,000,00	100,00	26,000,000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16,200,000,00	16,200,000,00	100,00	15,250,000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7,300,000,00	7,300,000,00	100,00	7,300,000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3,450,000,00	3,450,000,00	100,00	3,450,000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200,000,000,00	199,779,000,00	99,89	590,413,800,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	200,000,000,00	199,779,000,00	99,89	199,050,000,00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	391,363,800,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,651,600,700,00	1,387,432,767,00	84,01	1,644,390,482,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,651,600,700,00	1,387,432,767,00	84,01	1,644,390,482,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,333,535,800,00	1,201,929,650,00	90,13	1,644,390,482,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	318,064,900,00	185,503,117,00	58,32	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30,800,000,00	29,200,000,00	94,81	18,000,000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30,800,000,00	29,200,000,00	94,81	18,000,000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Persembaan	30,800,000,00	29,200,000,00	94,81	18,000,000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>11.699.114.201,00</b>	<b>10.091.675.158,00</b>	<b>86,26</b>	<b>12.211.184.747,18</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>310.142.180,00</b>	<b>303.429.000,00</b>	<b>97,84</b>	<b>376.146.997,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.142.180,00	103.650.000,00	94,11	376.146.997,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	281,870.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	281,870.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	281,870.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.142.180,00	34,950.000,00	87,07	74,576.997,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	58,076.997,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	58,076.997,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	40.142.180,00	34,950.000,00	87,07	16,500.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	40.142.180,00	34,950.000,00	87,07	16,500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	70.000.000,00	68,700.000,00	98,14</	



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024



01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	521,880,000.00	516,381,250.00	98.95	536,325,500.00
4.1.02	Retribusi Daerah	521,880,000.00	516,381,250.00	98.95	536,325,500.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	521,880,000.00	516,381,250.00	98.95	274,550,000.00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	521,880,000.00	516,381,250.00	98.95	271,550,000.00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	521,880,000.00	516,381,250.00	98.95	271,550,000.00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	0.00	0.00	0.00	261,775,500.00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0.00	0.00	0.00	261,775,500.00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0.00	0.00	0.00	261,775,500.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	521,880,000.00	516,381,250.00	98.95	536,325,500.00
	JUMLAH PENDAPATAN	521,880,000.00	516,381,250.00	98.95	536,325,500.00
5	BELANJA DAERAH	26,138,579,196.00	19,853,838,246.00	75.96	20,281,663,876.00
5.1	BELANJA OPERASI	23,216,186,814.00	17,661,458,246.00	76.07	18,080,279,774.00
5.1.01	Belanja Pegawai	6,789,883,406.00	6,460,863,511.00	95.15	5,822,136,334.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3,901,175,242.00	3,693,298,550.00	94.67	3,407,806,861.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2,919,297,913.00	2,841,009,596.00	97.32	2,554,249,644.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2,791,234,003.00	2,728,883,646.00	97.77	2,530,517,644.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	128,063,910.00	112,125,950.00	87.55	23,732,000.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	315,788,656.00	307,380,792.00	97.34	280,393,106.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	310,680,343.00	302,895,752.00	97.49	279,799,806.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5,108,313.00	4,485,040.00	87.80	593,300.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	218,921,531.00	144,740,000.00	66.12	148,195,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	218,921,531.00	144,740,000.00	66.12	148,195,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	157,850,000.00	137,926,000.00	87.38	157,540,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	157,850,000.00	137,926,000.00	87.38	157,540,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	101,798,369.00	87,700,000.00	86.15	82,670,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	94,407,994.00	81,225,000.00	86.04	81,190,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7,390,375.00	6,475,000.00	87.61	1,480,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	179,323,191.00	170,114,580.00	94.86	178,587,720.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	173,788,191.00	166,566,000.00	95.84	177,863,520.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,535,000.00	3,548,580.00	64.11	724,200.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8,150,543.00	4,385,471.00	53.81	6,137,733.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8,150,543.00	4,385,471.00	53.81	6,137,733.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	45,039.00	42,111.00	93.50	33,658.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41,441.00	40,096.00	96.75	33,534.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,598.00	2,015.00	56.00	124.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,883,268,164.00	2,762,124,961.00	95.80	2,408,889,473.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2,871,222,004.00	2,753,194,585.00	95.89	2,401,254,738.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2,765,377,594.00	2,665,808,933.00	96.40	2,381,109,018.00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	105,844,410.00	87,385,652.00	82.56	20,145,720.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	12,046,160.00	8,930,376.00	74.13	7,634,735.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	12,046,160.00	8,930,376.00	74.13	7,634,735.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5,440,000.00	5,440,000.00	100.00	5,440,000.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5,440,000.00	5,440,000.00	100.00	5,440,000.00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5,440,000.00	5,440,000.00	100.00	5,440,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16,426,303,408.00	11,200,594,735.00	68.19	12,258,143,440.00
5.1.02.01	Belanja Barang	4,724,672,525.00	2,684,796,324.00	56.83	3,328,606,500.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4,724,672,525.00	2,684,796,324.00	56.83	3,328,606,500.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	142,534,700.00	62,225,000.00	43.66	155,144,400.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	174,008,905.00	166,245,700.00	95.54	197,336,484.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2,733,501,000.00	1,440,102,824.00	52.68	1,768,283,600.00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	66,860,000.00	62,842,500.00	93.99	46,585,000.00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	53,701,300.00	53,393,600.00	99.43	125,011,446.00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	959,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	209,433,781.00	150,091,800.00	71.67	205,183,200.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	256,610,820.00	68,231,200.00	26.59	144,289,500.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6,497,800.00	5,370,000.00	82.64	2,800,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	247,206,519.00	246,971,200.00	99.90	266,217,280.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	208,068,000.00	8,025,000.00	3.86	17,931,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	264,356,100.00	237,919,000.00	90.00	64,096,840.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	141,020,000.00	86,194,000.00	61.12	125,200,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	97,576,000.00	34,884,000.00	35.75	149,345,000.00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	21,225,600.00	9,360,000.00	44.10	12,384,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	94,952,500.00	46,780,000.00	49.27	0.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0.00	0.00	0.00	28,998,750.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6,160,500.00	6,160,500.00	100.00	19,800,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	6,427,203,276.00	5,337,441,158.00	83.04	5,722,023,193.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5,874,530,776.00	5,045,700,758.00	85.89	5,390,290,793.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	74,600,000.00	18,150,000.00	24.33	41,700,000.00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	219,420,000.00	174,738,800.00	79.64	142,479,400.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	229,440,000.00	196,560,000.00	85.67	199,640,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	64,590,000.00	35,670,000.00	55.23	40,050,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	559,638,150.00	289,278,180.00	51.69	494,010,126.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	181,340,000.00	74,500,000.00	41.08	124,200,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	51,360,000.00	39,590,000.00	77.08	51,360,000.00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveilliance ISO	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	3,000,000.00	2,250,000.00	75.00	1,500,000.00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0.00	0.00	0.00	59,496,000.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0.00	0.00	0.00	800,000.00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	67,813,000.00	66,840,000.00	98.57	47,070,000.00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4,034,730,000.00	3,911,120,000.00	96.94	3,941,920,000.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	10,713,600.00	5,544,512.00	51.75	5,427,012.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	52,470,000.00	26,984,250.00	51.43	23,205,916.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	137,659,776.00	137,449,993.00	99.85	150,822,523.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12,000,000.00	8,069,700.00	67.25	7,204,950.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	30,000,000.00	20,786,573.00	69.29	14,590,700.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	110,756,250.00	31,168,750.00	28.14	23,002,000.00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	16,000,000.00	0.00	0.00	21,812,166.00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	202,088,500.00	193,190,400.00	95.60	199,912,400.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	194,688,000.00	193,190,400.00	99.23	194,438,400.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	7,400,500.00	0.00	0.00	5,474,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1,950,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1,950,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	131,134,000.00	86,550,000.00	66.00	43,840,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10,134,000.00	0.00	0.00	20,540,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	121,000,000.00	86,550,000.00	71.53	23,300,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	217,500,000.00	12,000,000.00	5.52	83,480,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	22,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	195,000,000.00	12,000,000.00	6.15	68,980,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2,216,522,047.00	1,172,455,935.00	52.90	1,194,585,593.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,082,686,047.00	1,038,913,935.00	49.88	1,118,640,593.00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	791,074,447.00	500,161,844.00	63.23	330,741,775.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	307,460,000.00	72,595,000.00	23.61	163,502,288.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	706,530,000.00	381,152,091.00	53.95	482,532,000.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18,000,000.00	1,520,000.00	8.44	5,322,500.00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	94,221,600.00	11,058,000.00	11.74	16,900,000.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	72,200,000.00	63,987,000.00	88.62	84,126,300.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15,250,000.00	4,040,000.00	26.49	3,955,000.00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	50,000,000.00	1,000,000.00	2.00	27,000,730.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14,600,000.00	1,500,000.00	10.27	4,100,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10,350,000.00	1,900,000.00	18.36	460,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	133,836,000.00	133,542,000.00	99.78	75,945,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	133,836,000.00	133,542,000.00	99.78	75,945,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2,925,405,560.00	1,907,967,818.00	65.22	1,981,928,154.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,925,405,560.00	1,907,967,818.00	65.22	1,981,928,154.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,921,805,560.00	1,907,967,818.00	65.30	1,981,928,154.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	132,500,000.00	97,933,500.00	73.91	31,000,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	132,500,000.00	97,933,500.00	73.91	31,000,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	132,500,000.00	97,933,500.00	73.91	31,000,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	23,216,186,814.00	17,661,458,246.00	76.07	18,080,279,774.00
5.2	BELANJA MODAL	2,922,392,382.00	2,192,380,000.00	75.02	2,201,384,102.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,922,392,382.00	2,192,380,000.00	75.02	2,049,587,102.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2,138,004,000.00	1,477,380,000.00	69.10	827,052,752.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1,938,004,000.00	1,279,380,000.00	66.02	628,380,000.00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	676,752,000.00	114,920,000.00	16.98	0.00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	718,252,000.00	661,000,000.00	92.03	537,000,000.00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	543,000,000.00	503,460,000.00	92.72	91,380,000.00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	200,000,000.00	198,000,000.00	99.00	198,672,752.00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	200,000,000.00	198,000,000.00	99.00	0.00
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	0.00	0.00	0.00	198,672,752.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	106,192,500.00	102,000,000.00	96.05	277,001,500.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	63,640,000.00	61,750,000.00	97.03	105,758,300.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	58,640,000.00	56,900,000.00	97.03	32,334,300.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5,000,000.00	4,850,000.00	97.00	73,424,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	42,552,500.00	40,250,000.00	94.59	141,406,400.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0.00	0.00	0.00	58,741,200.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	8,500,000.00	7,800,000.00	91.76	0.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34,052,500.00	32,450,000.00	95.29	82,665,200.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0.00	0.00	0.00	29,836,800.00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0.00	0.00	0.00	29,836,800.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0.00	0.00	0.00	36,120,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0.00	0.00	0.00	24,880,000.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0.00	0.00	0.00	24,880,000.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0.00	0.00	0.00	11,240,000.00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0.00	0.00	0.00	11,240,000.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	357,697,600.00	339,600,000.00	94.94	777,062,850.00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	357,697,600.00	339,600,000.00	94.94	777,062,850.00
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	0.00	0.00	0.00	197,250,000.00
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	71,591,600.00	71,100,000.00	99.31	526,650,000.00
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	286,106,000.00	268,500,000.00	93.85	53,162,850.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	320,498,282.00	273,400,000.00	85.30	132,350,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	247,880,582.00	223,000,000.00	89.96	116,690,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	247,880,582.00	223,000,000.00	89.96	116,690,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	72,617,700.00	50,400,000.00	69.40	15,660,000.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	72,617,700.00	50,400,000.00	69.40	11,680,000.00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0.00	0.00	0.00	3,980,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	151,797,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0.00	0.00	0.00	151,797,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0.00	0.00	0.00	151,797,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00	151,797,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	2,922,392,382.00	2,192,380,000.00	75.02	2,201,384,102.00
	JUMLAH BELANJA	26,138,579,196.00	19,853,838,246.00	75.96	20,281,663,876.00
	SURPLUS/DEFISIT	(25,616,699,196.00)	(19,337,456,996.00)	75.49	(19,745,338,376.00)

Kab. Muara Enim, 17 Januari 2025  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Alfarizal, S.H., M.H.  
NIP. 196708101995031003



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	12,259,292,086.00	10,260,270,326.00	83.89	9,310,786,839.59
5.1	BELANJA OPERASI	11,110,923,786.00	9,180,804,926.00	82.63	7,965,264,839.59
5.1.01	Belanja Pegawai	5,999,814,667.00	5,211,509,516.00	86.86	4,536,201,199.59
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,911,415,495.00	2,545,072,589.00	87.42	2,324,169,622.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2,167,978,320.00	1,959,828,972.00	90.40	1,747,970,233.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,905,077,300.00	1,767,656,734.00	92.79	1,703,060,633.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	262,901,020.00	192,172,238.00	73.10	44,909,600.00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	237,914,534.00	202,574,100.00	85.15	183,947,676.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	196,753,338.00	180,410,420.00	91.69	178,189,772.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	41,161,196.00	22,163,680.00	53.85	5,757,904.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	118,889,750.00	112,210,000.00	94.38	118,150,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	118,889,750.00	112,210,000.00	94.38	118,150,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	174,209,000.00	96,600,000.00	55.45	106,460,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	174,209,000.00	96,600,000.00	55.45	106,460,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	66,804,375.00	56,630,000.00	84.77	51,280,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	50,225,000.00	45,115,000.00	89.83	48,360,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	16,579,375.00	11,515,000.00	69.45	2,920,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	137,326,425.00	114,496,020.00	83.38	111,309,540.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	111,197,289.00	99,794,760.00	89.75	107,398,860.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	26,129,136.00	14,701,260.00	56.26	3,910,680.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8,244,916.00	2,704,713.00	32.80	5,023,886.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8,244,916.00	2,704,713.00	32.80	5,023,886.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	48,175.00	28,784.00	59.75	28,287.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28,700.00	24,209.00	84.35	26,903.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	19,475.00	4,575.00	23.49	1,384.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3,084,799,172.00	2,662,836,927.00	86.32	2,208,431,577.59
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2,487,059,050.00	2,153,745,024.00	86.60	1,791,040,354.59
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2,294,736,960.00	2,007,639,371.00	87.49	1,750,550,411.59
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	192,322,060.00	146,105,653.00	75.97	40,489,943.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	597,740,122.00	509,091,903.00	85.17	417,391,223.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	540,043,490.00	465,273,431.00	86.15	405,757,522.00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	57,696,632.00	43,818,472.00	75.95	11,633,701.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	3,600,000.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	3,600,000.00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	3,600,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,111,109,119.00	3,969,295,410.00	77.66	3,429,063,640.00
5.1.02.01	Belanja Barang	1,704,016,821.00	1,410,477,750.00	82.77	1,047,198,940.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,704,016,821.00	1,410,477,750.00	82.77	1,047,198,940.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1,856,400.00	0.00	0.00	1,720,000.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	44,235,000.00	25,239,400.00	57.06	36,147,740.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2,000,200.00	1,750,000.00	79.54	4,550,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	105,740,212.00	54,940,300.00	51.96	67,611,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	369,053,869.00	272,646,500.00	73.88	224,174,700.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	254,380,840.00	218,563,150.00	85.92	435,330,500.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4,654,500.00	4,280,000.00	91.95	3,546,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21,340,000.00	16,894,000.00	79.17	23,076,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12,968,700.00	12,345,000.00	95.19	10,340,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan	830,954,600.00	762,404,400.00	91.75	200,828,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35,332,500.00	21,975,000.00	62.19	21,325,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	20,250,000.00	19,440,000.00	96.00	18,550,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1,283,028,150.00	1,103,102,773.00	85.98	1,043,079,164.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1,080,507,500.00	923,603,720.00	85.48	912,268,420.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara	32,400,000.00	32,400,000.00	100.00	8,100,000.00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	6,000,000.00	2,700,000.00	45.00	0.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	532,680,000.00	517,310,000.00	97.11	518,470,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	550,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	77,040,000.00	64,200,000.00	83.33	51,360,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	64,200,000.00	46,010,000.00	71.67	51,360,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	9,900,000.00	6,000,000.00	60.61	30,000,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	18,000,000.00	7,256,195.00	40.31	7,227,671.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	25,990,000.00	10,186,750.00	39.19	14,416,654.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	174,122,500.00	161,581,900.00	92.80	148,376,045.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	29,520,000.00	6,000,000.00	20.33	7,550,000.00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	95,205,000.00	59,395,900.00	62.39	68,024,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14,900,000.00	10,562,975.00	70.89	7,384,050.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	71,313,650.00	68,922,053.00	96.65	74,760,744.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	71,313,650.00	68,922,053.00	96.65	74,760,744.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18,125,000.00	8,850,000.00	48.83	0.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	13,625,000.00	7,050,000.00	51.74	0.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2,000,000.00	800,000.00	40.00	0.00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	2,500,000.00	1,000,000.00	40.00	0.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	42,582,000.00	32,027,000.00	75.21	0.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	42,582,000.00	32,027,000.00	75.21	0.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan	70,500,000.00	69,700,000.00	98.87	56,050,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	37,500,000.00	37,500,000.00	100.00	25,000,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	33,000,000.00	32,200,000.00	97.58	31,050,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	185,359,848.00	164,760,450.00	88.89	33,580,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	135,359,848.00	114,960,450.00	84.93	33,580,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18,209,848.00	15,140,000.00	83.14	15,800,000.00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	60,000,000.00	44,390,450.00	73.98	7,100,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7,300,000.00	7,080,000.00	96.99	7,260,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	49,850,000.00	48,350,000.00	96.99	3,420,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50,000,000.00	49,800,000.00	99.60	0.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	50,000,000.00	49,800,000.00	99.60	0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,938,704,300.00	1,290,954,437.00	66.59	1,305,205,536.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,938,704,300.00	1,290,954,437.00	66.59	1,305,205,536.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,863,369,400.00	1,231,741,340.00	66.10	1,305,205,536.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	75,334,900.00	59,213,097.00	78.60	0.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	11,110,923,786.00	9,180,804,926.00	82.63	7,965,264,839.59
5.2	BELANJA MODAL	1,148,368,300.00	1,079,465,400.00	94.00	1,345,522,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,148,368,300.00	1,079,465,400.00	94.00	1,345,522,000.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	421,300,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0.00	0.00	0.00	421,300,000.00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0.00	0.00	0.00	421,300,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	447,898,500.00	435,470,000.00	97.23	366,774,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	181,080,000.00	180,950,000.00	99.93	307,286,000.00

5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	266,818,500.00	254,520,000.00	95.39	59,488,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	123,927,000.00	115,095,000.00	92.87	59,488,000.00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	30,250,000.00	28,975,500.00	95.79	0.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	31,000,000.00	30,949,500.00	99.84	0.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	74,500,000.00	72,500,000.00	97.32	0.00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	7,141,500.00	7,000,000.00	98.02	0.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0.00	0.00	0.00	20,600,000.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0.00	0.00	0.00	20,600,000.00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0.00	0.00	0.00	20,600,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	700,469,800.00	643,995,400.00	91.94	536,848,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	483,228,500.00	458,757,500.00	94.94	173,397,000.00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0.00	0.00	0.00	129,999,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	483,228,500.00	458,757,500.00	94.94	43,398,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	217,241,300.00	185,237,900.00	85.27	363,451,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	217,241,300.00	185,237,900.00	85.27	363,451,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1,148,368,300.00	1,079,465,400.00	94.00	1,345,522,000.00
	JUMLAH BELANJA	12,259,292,086.00	10,260,270,326.00	83.69	9,310,786,839.59
	SURPLUS/DEFISIT	(12,259,292,086.00)	(10,260,270,326.00)	83.69	(9,310,786,839.59)

Kab. Muara Enim, 10 Januari 2025  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Drs. Risman Effendi, M.Si.  
NIP. 196805071990091001

**PEREMINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
 Periode 1 Desember 2024 s.d 31 Desember 2024

Usuran Pemerintahan : 2 Usuran Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar  
 Unit Organisasi : Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Sub Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH/KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>42,792,699,513</b>	<b>15,719,517,069</b>	<b>23,432,032,920</b>	<b>39,151,549,989</b>	<b>3,641,149,524</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>42,225,571,177</b>	<b>15,485,217,069</b>	<b>23,121,209,920</b>	<b>38,604,426,989</b>	<b>3,621,144,188</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4,983,448,081</b>	<b>3,643,697,427</b>	<b>531,744,088</b>	<b>4,175,441,515</b>	<b>808,006,566</b>
<b>5.1.01.01</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2,653,890,994</b>	<b>2,124,617,203</b>	<b>153,329,940</b>	<b>2,277,947,143</b>	<b>375,943,851</b>
5.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok/PNS	1,800,702,739	1,530,913,314	106,778,800	1,637,692,114	163,010,825
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok/PPPK	134,291,421	116,533,193	12,814,400	131,347,593	2,943,828
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	249,055,382	149,394,952	10,763,846	160,158,798	88,896,584
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	16,161,492	13,070,688	1,281,440	14,352,128	1,809,364
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	104,360,375	57,800,000	3,760,000	61,560,000	42,800,375
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	164,871,250	116,280,000	7,360,000	123,640,000	41,231,250
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53,571,215	38,275,000	2,945,000	41,220,000	12,351,215
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8,306,500	6,845,000	740,000	7,585,000	721,500
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	104,596,206	80,820,720	5,793,600	86,614,320	17,981,886
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	11,992,837	8,473,140	869,040	9,342,180	2,650,657
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5,947,932	4,206,144	222,295	4,428,439	1,519,493
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29,561	22,680	1,427	24,107	5,454
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,084	2,372	292	2,664	1,420
<b>5.1.1.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>2,329,557,087</b>	<b>1,519,080,224</b>	<b>378,414,148</b>	<b>1,897,494,372</b>	<b>432,062,713</b>
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2,233,053,412	1,446,886,772	360,251,851	1,807,138,623	425,914,789
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	88,343,675	72,193,452	10,002,297	82,195,749	6,147,926
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000	-	8,160,000	8,160,000	-
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>37,242,123,096</b>	<b>11,839,519,642</b>	<b>22,589,465,832</b>	<b>34,428,985,474</b>	<b>2,813,137,622</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>21,772,593,246</b>	<b>3,225,498,248</b>	<b>17,514,493,008</b>	<b>20,739,991,256</b>	<b>1,032,601,990</b>
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18,600,000	10,430,000	8,620,000	17,050,000	1,550,000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	580,663,526	298,366,150	200,454,450	498,820,600	81,842,926
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	327,218,800	151,517,700	106,180,600	257,698,300	69,520,500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6,511,600	3,980,000	1,840,000	5,800,000	711,600
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Prabot Kantor	55,055,900	34,219,000	11,385,000	45,604,000	9,451,900
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	25,209,000	11,480,000	11,810,000	23,290,000	1,919,000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	362,480,000	209,000,000	114,057,500	323,057,500	39,422,500
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan/Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	19,622,182,620	1,941,212,398	16,924,459,458	18,865,671,856	756,510,764
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	774,671,800	565,313,000	137,886,000	702,999,000	71,672,800
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>1,906,441,850</b>	<b>1,285,382,594</b>	<b>461,893,576</b>	<b>1,747,276,170</b>	<b>159,165,680</b>
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	219,200,000	93,300,000	64,400,000	157,700,000	61,500,000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	30,480,000	25,400,000	5,080,000	30,480,000	-
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	437,400,000	250,000,000	182,250,000	432,250,000	5,150,000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	568,120,000	426,820,000	106,970,000	533,790,000	34,330,000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	208,600,000	170,080,000	29,960,000	200,040,000	8,560,000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	100,200,000	89,500,000	10,700,000	100,200,000	-
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6,000,000	5,500,000	500,000	5,500,000	500,000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	11,500,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1,500,000
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggara Acara	10,000,000	12,405,000	-	12,405,000	2,405,000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	79,000,000	54,500,000	21,000,000	75,500,000	3,500,000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	27,000,000	20,112,057	4,025,530	24,137,587	2,862,413
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	8,004,000	3,096,500	1,076,250	4,172,750	3,831,250
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	158,950,000	114,669,037	23,730,246	138,399,283	20,550,717
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19,200,000	12,405,000	6,175,000	18,580,000	620,000
5.1.02.02.01.0087	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	22,181,850	-	8,527,550	8,527,550	13,654,300
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja Luran Jaminan/Asuransi</b>	<b>4,114,382,300</b>	<b>2,841,783,626</b>	<b>945,062,352</b>	<b>3,786,845,978</b>	<b>327,536,322</b>
5.1.02.02.02.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat/Desa	4,055,178,300	2,782,949,616	945,062,352	3,728,011,968	327,166,332
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	59,204,000	58,834,010	-	58,834,010	369,990
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>412,200,000</b>	<b>134,700,000</b>	<b>193,900,000</b>	<b>328,600,000</b>	<b>83,600,000</b>
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	155,300,000	12,400,000	105,000,000	117,400,000	37,900,000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	232,850,000	98,250,000	88,300,000	187,150,000	45,700,000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mesin	24,050,000	24,050,000	-	24,050,000	-
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>1,142,540,000</b>	<b>270,840,000</b>	<b>707,650,000</b>	<b>977,690,000</b>	<b>164,950,000</b>
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30,810,000	19,270,000	10,270,000	29,540,000	1,270,000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1,111,830,000	250,770,000	697,380,000	948,150,000	163,680,000
<b>5.1.02.02.08</b>	<b>Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi</b>	<b>683,538,000</b>	<b>215,734,050</b>	<b>426,909,000</b>	<b>642,643,050</b>	<b>40,894,950</b>
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur/ Jasa Desain Arsitektural	488,289,000	215,734,050	232,744,000	448,478,050	39,810,950
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa/Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	195,249,000	-	194,165,000	194,165,000	1,084,000
<b>5.1.02.02.12</b>	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>985,300,000</b>	<b>512,725,000</b>	<b>395,300,000</b>	<b>908,025,000</b>	<b>77,275,000</b>
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	77,000,000	46,925,000	20,000,000	66,925,000	10,075,000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	743,300,000	465,800,000	210,300,000	676,100,000	67,200,000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	165,000,000	165,000,000	-	165,000,000	-
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>424,730,000</b>	<b>302,930,000</b>	<b>83,835,000</b>	<b>386,765,000</b>	<b>37,965,000</b>
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	276,550,000	197,985,000	54,090,000	252,075,000	24,495,000
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	69,000,000	47,545,000	10,815,000	58,360,000	10,640,000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12,000,000	9,470,000	2,500,000	11,970,000	30,000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	24,400,000	21,300,000	3,050,000	24,350,000	50,000
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10,000,000	5,100,000	4,500,000	9,600,000	400,000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18,980,000	11,500,000	7,380,000	18,880,000	100,000
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13,800,000	10,050,000	1,500,000	11,550,000	2,250,000
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>88,300,000</b>	<b>-</b>	<b>88,150,000</b>	<b>88,150,000</b>	<b>150,000</b>
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	88,300,000	-	88,150,000	88,150,000	150,000
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>5,331,497,700</b>	<b>2,969,038,224</b>	<b>1,475,272,896</b>	<b>4,444,311,120</b>	<b>887,186,580</b>
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,331,497,700	2,983,226,124	1,475,272,896	4,458,499,020	872,998,680
<b>5.1.02.05.01</b>	<b>Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>380,500,000</b>	<b>81,687,900</b>	<b>297,000,000</b>	<b>378,687,900</b>	<b>1,812,100</b>
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	380,500,000	67,500,000	297,000,000	364,500,000	16,000,000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>567,128,336</b>	<b>236,300,000</b>	<b>310,823,000</b>	<b>547,123,000</b>	<b>20,005,336</b>
<b>5.2.02.05.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>	<b>12,245,520</b>	<b>-</b>	<b>9,500,000</b>	<b>9,500,000</b>	<b>2,745,520</b>
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12,245,520	-	9,500,000	9,500,000	2,745,520
<b>5.2.02.05.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>	<b>153,816,481</b>	<b>112,800,000</b>	<b>33,300,000</b>	<b>146,100,000</b>	<b>7,716,481</b>
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	50,838,000	46,000,000	-	46,000,000	4,838,000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	33,300,000	-	33,300,000	33,300,000	-
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat rumah Tangga Lainnya (Homeuse)	69,678,481	66,800,000	-	66,800,000	2,878,481
<b>5.2.02.06.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Studio</b>	<b>34,743,000</b>	<b>-</b>	<b>34,743,000</b>	<b>34,743,000</b>	<b>-</b>
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	8,325,000	-	8,325,000	8,325,000	-
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	26,418,000	-	26,418,000	26,418,000	-
<b>5.2.02.10.01</b>	<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>	<b>341,323,335</b>	<b>123,500,000</b>	<b>208,530,000</b>	<b>332,030,000</b>	<b>9,293,335</b>
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	341,323,335	123,500,000	208,530,000	332,030,000	9,293,335
<b>5.2.02.13.01</b>	<b>Belanja Modal Sumur</b>	<b>25,000,000</b>	<b>-</b>	<b>24,750,000</b>	<b>24,750,000</b>	<b>250,000</b>
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	25,000,000	-	24,750,000	24,750,000	250,000
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>-</b>					



**PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**



01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>22.732.713.450,00</b>	<b>20.917.312.761,00</b>	<b>92,01</b>	<b>20.189.012.218,95</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>20.569.418.650,00</b>	<b>18.840.667.761,00</b>	<b>91,60</b>	<b>15.996.312.221,95</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	3.531.073.094,00	3.060.257.803,00	86,67	3.133.871.656,45
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.852.420.103,00	1.561.934.798,00	84,32	1.734.975.079,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.303.413.799,00	1.180.745.228,00	90,59	1.295.420.346,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.263.885.186,00	1.158.320.028,00	91,65	1.295.420.346,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	39.528.613,00	22.425.200,00	56,73	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	136.146.288,00	105.394.014,00	77,41	118.044.658,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	131.402.854,00	103.151.494,00	78,50	118.044.658,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.743.434,00	2.242.520,00	47,28	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	104.826.750,00	81.530.000,00	77,78	95.070.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	104.826.750,00	81.530.000,00	77,78	95.070.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	177.796.500,00	109.032.000,00	61,32	123.900.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	177.796.500,00	109.032.000,00	61,32	123.900.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	36.239.875,00	23.220.000,00	64,07	25.575.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.784.000,00	21.925.000,00	64,90	25.575.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.455.875,00	1.295.000,00	52,73	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	80.826.155,00	56.415.180,00	69,80	65.902.200,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	77.942.028,00	54.821.940,00	70,34	65.902.200,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.884.127,00	1.593.240,00	55,24	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.120.000,00	5.583.678,00	42,56	11.047.136,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.120.000,00	5.583.678,00	42,56	11.047.136,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	50.736,00	14.698,00	28,97	15.739,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.417,00	14.132,00	28,60	15.739,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.319,00	566,00	42,91	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.621.052.991,00	1.440.723.005,00	88,88	1.323.871.577,45
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.621.052.991,00	1.440.723.005,00	88,88	1.323.871.577,45
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.593.331.836,00	1.421.051.955,00	89,19	1.323.871.577,45
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	27.721.155,00	19.671.050,00	70,96	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00	75.025.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00	75.025.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	75.025.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.038.345.556,00	15.780.409.958,00	92,62	12.862.440.565,50
5.1.02.01	Belanja Barang	3.533.282.161,00	3.189.590.612,00	90,27	1.665.236.602,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.533.282.161,00	3.189.590.612,00	90,27	1.665.236.602,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	11.610.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	13.666.902,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	740.070.583,00	628.553.400,00	84,93	393.616.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	531.566.262,00	475.164.400,00	89,39	383.057.700,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.893.500,00	4.860.000,00	99,32	3.210.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	62.752.314,00	58.460.000,00	93,16	48.304.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	26.264.000,00	25.843.000,00	98,40	8.486.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	13.942.500,00	13.650.000,00	97,90	10.500.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	961.432.212,00	957.326.212,00	99,57	234.800.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	24.102.900,00	23.729.500,00	98,45	6.202.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	174.701.950,00	143.900.500,00	82,37	47.253.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	747.805.940,00	671.228.600,00	89,76	421.290.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	12.190.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	229.250.000,00	171.200.000,00	74,68	22.750.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.500.000,00	15.675.000,00	95,00	14.700.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.706.417.725,00	10.182.550.894,00	95,11	9.242.061.055,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.263.123.775,00	7.960.516.276,00	96,34	7.321.742.050,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	238.800.000,00	225.625.000,00	94,48	158.350.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	120.000.000,00	116.200.000,00	96,83	11.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	924.960.000,00	819.250.000,00	88,57	509.970.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	175.680.000,00	143.800.000,00	81,85	214.460.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.495.007.600,00	4.470.970.000,00	99,47	4.052.440.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	170.000.000,00	168.680.000,00	99,22	377.027.700,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00	83.040.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	8.000.000,00	7.500.000,00	93,75	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	50.000.000,00	49.000.000,00	98,00	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	38.000.000,00	36.000.000,00	94,74	13.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	7.000.000,00	1.356.772,00	19,38	1.336.772,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	28.404.000,00	6.656.750,00	23,44	8.451.378,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	181.680.000,00	94.218.829,00	51,86	72.457.650,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.648.000,00	12.648.000,00	100,00	12.500.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.788.912.000,00	1.785.710.000,00	99,82	1.734.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.032.175,00	22.900.925,00	95,29	13.208.550,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	133.133.950,00	103.704.618,00	77,89	65.777.805,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	133.133.950,00	103.704.618,00	77,89	65.777.805,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	326.610.000,00	306.705.000,00	93,91	351.970.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	35.310.000,00	15.405.000,00	43,63	61.635.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	291.300.000,00	291.300.000,00	100,00	290.335.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	98.550.000,00	98,55	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	100.000.000,00	98.550.000,00	98,55	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.883.550.000,00	1.713.075.000,00	90,95	1.502.571.200,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	105.000.000,00	70.125.000,00	66,79	19.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.778.550.000,00	1.642.950.000,00	92,38	1.483.071.200,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	717.704.500,00	624.316.536,00	86,99	738.366.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	315.813.900,00	225.396.436,00	71,37	120.073.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	242.550.000,00	170.746.436,00	70,40	67.662.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	52.500.000,00	34.080.000,00	64,91	44.036.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.743.900,00	11.720.000,00	99,80	8.375.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.880.000,00	4.800.000,00	98,36	0,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.140.000,00	4.050.000,00	97,83	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	401.890.600,00	398.920.100,00	99,26	618.293.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	401.890.600,00	398.920.100,00	99,26	618.293.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.991.291.170,00	1.703.081.916,00	85,53	1.216.776.908,50
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.991.291.170,00	1.703.081.916,00	85,53	1.216.776.908,50
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.991.291.170,00	1.703.081.916,00	85,53	1.216.776.908,50
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	89.650.000,00	80.870.000,00	90,21	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	89.650.000,00	80.870.000,00	90,21	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	89.650.000,00	80.870.000,00	90,21	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>20.569.418.650,00</b>	<b>18.840.667.761,00</b>	<b>91,60</b>	<b>15.996.312.221,95</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.163.294.800,00</b>	<b>2.076.645.000,00</b>	<b>95,99</b>	<b>4.192.699.997,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.263.294.800,00	1.215.645.000,00	96,23	2.521.409.997,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	1.752.180.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	1.752.180.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	1.752.180.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	300.800.000,00	270.455.000,00	89,91	408.039.997,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	196.300.000,00	166.055.000,00	84,59	152.900.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	196.300.000,00	166.055.000,00	84,59	152.900.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	59.000.000,00	58.900.000,00	99,83	255.139.997,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	191.559.997,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	63.580.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000.000,00	49.900.000,00	99,80	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	45.500.000,00	45.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	151.000.000,00	150.890.000,00	99,93	338.900.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	151.000.000,00	150.890.000,00	99,93	338.900.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	101.000.000,00	100.890.000,00	99,89	82.500.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	256.400.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	811.494.800,00	794.300.000,00	97,88	22.290.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	785.494.800,00	768.700.000,00	97,86	22.290.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	785.494.800,00	768.700.000,00	97,86	22.290.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	26.000.000,00	25.600.000,00	98,46	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	26.000.000,00	25.600.000,00	98,46	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	900.000.000,00	861.000.000,00	95,67	1.671.290.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	900.000.000,00	861.000.000,00	95,67	1.671.290.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	900.000.000,00	861.000.000,00	95,67	1.671.290.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	900.000.000,00	861.000.000,00	95,67	1.671.290.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>2.163.294.800,00</b>	<b>2.076.645.000,00</b>	<b>95,99</b>	<b>4.192.699.997,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>22.732.713.450,00</b>	<b>20.917.312.761,00</b>	<b>92,01</b>	<b>20.189.012.218,95</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(22.732.713.450,00)</b>	<b>(20.917.312.761,00)</b>	<b>92,01</b>	<b>(20.189.012.218,95)</b>

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
--------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------

Kab. Muara Enim, 31 Januari 2025  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
Berencana

H. Rinaldo, S.STP.,M.Si  
NIP. 197709191996021001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



DINAS PERHUBUNGAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,050,474,000.00	587,822,500.00	55.96	722,814,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	1,050,474,000.00	587,822,500.00	55.96	722,814,000.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	504,174,000.00	365,165,000.00	72.43	636,772,000.00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	504,174,000.00	365,165,000.00	72.43	406,825,000.00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	504,174,000.00	365,165,000.00	72.43	406,825,000.00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0.00	0.00	0.00	229,947,000.00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0.00	0.00	0.00	229,947,000.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	546,300,000.00	222,657,500.00	40.76	86,042,000.00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	327,500,000.00	80,000,000.00	24.43	14,400,000.00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	327,500,000.00	80,000,000.00	24.43	14,400,000.00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	120,400,000.00	58,620,000.00	48.69	71,642,000.00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan	120,400,000.00	58,620,000.00	48.69	71,642,000.00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	93,400,000.00	83,562,000.00	89.47	0.00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	93,400,000.00	83,562,000.00	89.47	0.00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5,000,000.00	475,500.00	9.51	0.00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	5,000,000.00	475,500.00	9.51	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,050,474,000.00	587,822,500.00	55.96	722,814,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,050,474,000.00	587,822,500.00	55.96	722,814,000.00
5	BELANJA DAERAH	19,477,173,903.00	17,594,795,793.00	90.34	13,703,677,233.00
5.1	BELANJA OPERASI	16,041,477,903.00	14,195,981,793.00	88.50	11,501,183,583.00
5.1.01	Belanja Pegawai	5,943,889,983.00	4,625,404,195.00	77.82	3,749,980,283.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3,272,202,804.00	2,541,497,692.00	77.67	2,102,213,328.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2,546,046,696.00	1,986,102,147.00	78.01	1,637,709,420.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2,276,887,251.00	1,797,739,884.00	78.96	1,619,104,620.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	269,159,445.00	188,362,263.00	69.98	18,604,800.00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	254,978,499.00	192,995,822.00	75.69	150,744,042.00
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	222,679,362.00	175,566,012.00	78.84	149,720,778.00
5.1.01.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	32,299,137.00	17,429,810.00	53.96	1,023,264.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	189,238,520.00	154,500,000.00	81.64	131,430,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	189,238,520.00	154,500,000.00	81.64	131,430,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	42,321,840.00	38,640,000.00	91.30	35,880,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	42,321,840.00	38,640,000.00	91.30	35,880,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	62,921,060.00	51,180,000.00	81.34	44,315,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	46,589,120.00	37,680,000.00	80.88	42,875,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	16,331,940.00	13,500,000.00	82.66	1,440,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	137,356,117.00	114,785,700.00	83.57	96,901,960.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	117,153,539.00	100,156,860.00	85.49	95,888,080.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	20,202,578.00	14,628,840.00	72.41	1,013,880.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	39,293,879.00	3,265,093.00	8.31	5,210,962.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20,820,361.00	3,265,093.00	15.68	5,210,962.00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	18,473,518.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	46,193.00	28,930.00	62.63	21,944.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	36,234.00	25,940.00	71.59	21,694.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,959.00	2,990.00	30.02	250.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,671,687,179.00	2,083,906,503.00	78.00	1,647,766,955.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2,671,687,179.00	2,083,906,503.00	78.00	1,647,766,955.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2,445,506,952.00	1,954,430,390.00	79.92	1,633,911,021.00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	226,180,227.00	129,476,113.00	57.24	13,855,934.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10,097,587,920.00	9,570,577,598.00	94.78	7,751,203,300.00
5.1.02.01	Belanja Barang	1,366,545,656.00	1,172,114,940.00	85.77	1,331,812,450.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,306,465,656.00	1,112,234,940.00	85.13	1,261,022,200.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3,081,600.00	0.00	0.00	6,724,000.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	322,479,100.00	292,619,240.00	90.74	252,763,500.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	62,500,000.00	62,500,000.00	100.00	50,000,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	246,398,655.00	207,659,000.00	84.28	256,921,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	91,141,500.00	65,855,300.00	72.26	63,216,700.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4,038,500.00	3,330,000.00	82.46	3,210,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	55,109,601.00	55,073,500.00	99.93	50,488,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	21,948,300.00	18,517,500.00	84.37	20,908,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	0.00	0.00	0.00	3,320,000.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk	38,085,000.00	37,710,000.00	99.02	28,681,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	461,683,400.00	368,970,400.00	79.92	139,195,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0.00	0.00	0.00	171,290,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0.00	0.00	0.00	16,480,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0.00	0.00	0.00	197,825,000.00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	60,080,000.00	59,880,000.00	99.67	70,790,250.00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	60,080,000.00	59,880,000.00	99.67	70,790,250.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	4,742,432,648.00	4,455,727,572.00	93.95	3,933,538,183.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3,823,559,958.00	3,621,310,642.00	94.71	3,257,895,783.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Peneliti	29,500,000.00	27,000,000.00	91.53	25,400,000.00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	6,500,000.00	4,000,000.00	61.54	6,500,000.00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	3,265,120,000.00	3,106,425,000.00	95.14	2,931,385,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	211,328,700.00	209,500,000.00	99.13	18,000,000.00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	4,755,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	9,000,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	34,202,700.00	34,202,700.00	100.00	34,179,245.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	138,043,750.00	130,703,154.00	94.68	128,543,684.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10,808,000.00	10,600,000.00	98.08	10,400,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	79,155,000.00	66,603,638.00	84.14	66,088,800.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	27,646,808.00	23,276,150.00	84.19	28,399,054.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	180,672,690.00	175,008,930.00	96.87	188,018,400.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	180,672,690.00	175,008,930.00	96.87	188,018,400.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	667,400,000.00	609,550,000.00	91.33	420,000,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	420,000,000.00	418,500,000.00	99.64	270,600,000.00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	35,000,000.00	34,800,000.00	99.43	25,200,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	212,400,000.00	156,250,000.00	73.56	124,200,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan	70,800,000.00	49,858,000.00	70.42	67,624,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6,700,000.00	2,560,000.00	38.21	22,020,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	4,100,000.00	4,050,000.00	98.78	10,800,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	60,000,000.00	43,248,000.00	72.08	34,804,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2,344,484,216.00	2,306,630,100.00	98.39	883,981,500.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,269,484,216.00	2,232,184,100.00	98.36	834,082,500.00

5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Uk	103,800,000.00	103,407,600.00	99.62	147,610,000.00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	3,354,216.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	34,500,000.00	29,385,000.00	85.17	4,500,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	6,100,000.00	6,100,000.00	100.00	8,920,000.00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	2,500,000.00	0.00	0.00	3,250,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Persona	7,300,000.00	7,300,000.00	100.00	8,030,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Pe	6,900,000.00	5,300,000.00	76.81	6,270,000.00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu-La	1,599,990,000.00	1,594,142,000.00	99.63	0.00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu-La	0.00	0.00	0.00	192,000,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75,000,000.00	74,446,000.00	99.26	49,889,000.00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gec	75,000,000.00	74,446,000.00	99.26	49,889,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,639,625,400.00	1,631,604,986.00	99.51	1,595,871,167.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,639,625,400.00	1,631,604,986.00	99.51	1,595,871,167.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,637,375,400.00	1,631,604,986.00	99.65	1,595,871,167.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pih	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	6,000,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	6,000,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perombaan	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	6,000,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	16,041,477,903.00	14,195,981,793.00	88.50	11,501,183,583.00
5.2	BELANJA MODAL	3,435,696,000.00	3,398,814,000.00	98.93	2,202,493,650.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,183,196,000.00	2,151,633,000.00	98.55	1,468,910,650.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	20,700,000.00	20,112,000.00	97.16	0.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	20,700,000.00	20,112,000.00	97.16	0.00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	20,700,000.00	20,112,000.00	97.16	0.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	648,195,000.00	647,710,000.00	99.93	584,350,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	648,195,000.00	647,710,000.00	99.93	584,350,000.00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	602,000,000.00	602,000,000.00	100.00	584,350,000.00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	46,195,000.00	45,710,000.00	98.95	0.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	37,375,000.00	34,650,000.00	92.71	0.00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	37,375,000.00	34,650,000.00	92.71	0.00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penquji Kendaraan Bermotor	37,375,000.00	34,650,000.00	92.71	0.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	94,490,000.00	93,600,000.00	99.06	185,500,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	25,500,000.00	25,200,000.00	98.82	136,690,000.00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	25,500,000.00	25,200,000.00	98.82	16,300,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00	20,390,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	68,990,000.00	68,400,000.00	99.14	48,810,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	68,990,000.00	68,400,000.00	99.14	16,400,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0.00	0.00	0.00	12,060,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0.00	0.00	0.00	20,350,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	29,900,000.00	29,800,000.00	99.67	105,030,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0.00	0.00	0.00	73,300,000.00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0.00	0.00	0.00	69,700,000.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	10,000,000.00	9,900,000.00	99.00	22,000,000.00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	10,000,000.00	9,900,000.00	99.00	22,000,000.00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0.00	0.00	0.00	9,730,000.00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0.00	0.00	0.00	9,730,000.00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	19,900,000.00	19,900,000.00	100.00	0.00
5.2.02.06.04.0001	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen	19,900,000.00	19,900,000.00	100.00	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	220,000,000.00	216,900,000.00	98.59	214,329,400.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	192,000,000.00	188,900,000.00	98.39	197,079,400.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	192,000,000.00	188,900,000.00	98.39	197,079,400.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	28,000,000.00	28,000,000.00	100.00	17,250,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	28,000,000.00	28,000,000.00	100.00	17,250,000.00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	8,280,000.00	5,770,000.00	69.69	0.00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	8,280,000.00	5,770,000.00	69.69	0.00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	8,280,000.00	5,770,000.00	69.69	0.00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1,124,256,000.00	1,103,091,000.00	98.12	379,701,250.00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1,124,256,000.00	1,103,091,000.00	98.12	379,701,250.00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	1,124,256,000.00	1,103,091,000.00	98.12	379,701,250.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,252,500,000.00	1,247,181,000.00	99.58	733,583,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1,252,500,000.00	1,247,181,000.00	99.58	733,583,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1,252,500,000.00	1,247,181,000.00	99.58	733,583,000.00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	115,000,000.00	114,230,000.00	99.33	0.00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	29,000,000.00	28,889,000.00	99.62	0.00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/B	1,015,500,000.00	1,011,799,000.00	99.64	344,610,000.00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	18,000,000.00	17,889,000.00	99.38	227,200,000.00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0.00	0.00	0.00	99,478,000.00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	75,000,000.00	74,374,000.00	99.17	62,295,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3,435,696,000.00	3,398,814,000.00	98.93	2,202,493,650.00
	JUMLAH BELANJA	19,477,173,903.00	17,594,795,793.00	90.34	13,703,677,233.00
	SURPLUS/DEFISIT	( 18,426,699,903.00 )	( 17,006,973,293.00 )	92.30	( 12,980,863,233.00 )

Kab. Muara Enim, 31 Januari 2025  
Kepala Dinas Perhubungan

H. Junaidi, S.H.,M.Hum.,M.Si.  
NIP. 197106131994031001



## PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	454,287,369.00	0.00
4.1.02	Retribusi Daerah	0.00	454,059,301.76	0.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0.00	228,067.24	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0.00	454,287,369.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	0.00	454,287,369.00	0.00
5	BELANJA DAERAH	28,586,806,264.00	27,357,025,071.10	95.70
5.1	BELANJA OPERASI	27,268,243,144.00	26,055,666,151.10	95.55
5.1.01	Belanja Pegawai	4,675,100,604.00	4,171,934,145.00	89.24
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22,373,147,540.00	21,663,737,006.10	96.83
5.1.05	Belanja Hibah	219,995,000.00	219,995,000.00	100.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	27,268,243,144.00	26,055,666,151.10	95.55
5.2	BELANJA MODAL	1,318,563,120.00	1,301,358,920.00	98.70
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,318,563,120.00	1,301,358,920.00	98.70
	JUMLAH BELANJA MODAL	1,318,563,120.00	1,301,358,920.00	98.70
	JUMLAH BELANJA	28,586,806,264.00	27,357,025,071.10	95.70
	SURPLUS/DEFISIT	( 28,586,806,264.00 )	( 26,902,737,702.10 )	94.11

Muara Enim, 31 Desember 2024  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan PersaArdian Arifanardi, AP., M.Si.  
NIP. 197407201993111001



REALISASI 2023
6
503,888,617.70
503,888,617.70
0.00
503,888,617.70
503,888,617.70
24,598,953,497.00
22,122,356,347.00
4,059,269,150.00
18,063,087,197.00
0.00
22,122,356,347.00
2,476,597,150.00
2,476,597,150.00
2,476,597,150.00
24,598,953,497.00
( 24,095,064,879.30 )

indian



## PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) * 100$	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0.00	454,287,369.00	0.00	503,888,617.70
4.1.02	Retribusi Daerah	0.00	454,059,301.76	0.00	503,888,617.70
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	0.00	454,059,301.76	0.00	503,888,617.70
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.00	454,059,301.76	0.00	503,888,617.70
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0.00	228,067.24	0.00	0.00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0.00	228,067.24	0.00	0.00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0.00	228,067.24	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0.00	454,287,369.00	0.00	503,888,617.70
	JUMLAH PENDAPATAN	0.00	454,287,369.00	0.00	503,888,617.70
5	BELANJA DAERAH	28,586,806,264.00	27,357,025,071.10	95.70	24,598,953,497.00
5.1	BELANJA OPERASI	27,268,243,144.00	26,055,666,151.10	95.55	22,122,356,347.00
5.1.01	Belanja Pegawai	4,675,100,604.00	4,171,934,145.00	89.24	4,059,269,150.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,431,611,143.00	2,178,754,347.00	89.60	2,212,281,430.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,788,157,740.00	1,637,273,420.00	91.56	1,612,207,666.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	176,350,594.00	153,773,516.00	87.20	163,785,128.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	116,588,483.00	100,310,000.00	86.04	119,950,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	185,476,900.00	154,357,000.00	83.22	177,728,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	44,513,500.00	40,390,000.00	90.74	35,125,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	113,531,460.00	90,525,000.00	79.74	97,042,800.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6,953,600.00	2,100,441.00	30.21	6,417,937.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	38,866.00	24,970.00	64.25	24,899.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,243,489,461.00	1,993,179,798.00	88.84	1,846,987,720.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2,243,489,461.00	1,993,179,798.00	88.84	1,846,987,720.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22,373,147,540.00	21,663,737,006.10	96.83	18,063,087,197.00
5.1.02.01	Belanja Barang	1,527,023,880.00	1,488,730,770.00	97.49	1,484,751,500.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,527,023,880.00	1,488,730,770.00	97.49	1,484,751,500.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	16,936,069,460.00	16,279,832,749.10	96.13	13,512,617,773.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16,776,422,210.00	16,120,995,392.00	96.09	13,388,820,273.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	36,377,250.00	36,175,857.10	99.45	29,827,500.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21,270,000.00	21,000,000.00	98.73	10,270,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	102,000,000.00	101,661,500.00	99.67	83,700,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1,063,320,000.00	1,054,582,788.00	99.18	627,115,680.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	364,020,000.00	362,295,555.00	99.53	327,523,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	639,300,000.00	632,587,233.00	98.95	249,592,680.00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60,000,000.00	59,700,000.00	99.50	50,000,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2,837,734,200.00	2,831,590,699.00	99.78	2,438,602,244.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,837,734,200.00	2,831,590,699.00	99.78	2,438,602,244.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	219,995,000.00	219,995,000.00	100.00	0.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	219,995,000.00	219,995,000.00	100.00	0.00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	219,995,000.00	219,995,000.00	100.00	0.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	27,268,243,144.00	26,055,666,151.10	95.55	22,122,356,347.00
5.2	BELANJA MODAL	1,318,563,120.00	1,301,358,920.00	98.70	2,476,597,150.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,318,563,120.00	1,301,358,920.00	98.70	2,476,597,150.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	290,000,000.00	288,800,000.00	99.59	0.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	290,000,000.00	288,800,000.00	99.59	0.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	499,513,720.00	496,028,720.00	99.30	397,566,200.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	208,545,000.00	206,060,000.00	98.81	192,031,200.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	290,968,720.00	289,968,720.00	99.66	205,535,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	157,450,000.00	155,890,000.00	99.01	1,589,947,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	134,950,000.00	133,390,000.00	98.84	1,588,847,000.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	22,500,000.00	22,500,000.00	100.00	1,100,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	371,599,400.00	360,640,200.00	97.05	489,083,950.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	164,599,400.00	154,749,700.00	94.02	224,968,950.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	207,000,000.00	205,890,500.00	99.46	264,115,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1,318,563,120.00	1,301,358,920.00	98.70	2,476,597,150.00
	JUMLAH BELANJA	28,586,806,264.00	27,357,025,071.10	95.70	24,598,953,497.00
	SURPLUS/DEFISIT	( 28,586,806,264.00 )	( 26,902,737,702.10 )	94.11	( 24,095,064,879.30 )

--	--	--	--	--	--

Muara Enim, 31 Desember 2024  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

Ardian Arifanardi, AP., M.Si.  
NIP. 197407201993111001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	12,852,036,494.00	11,468,160,353.00	89.23	10,376,415,896.95
5.1	BELANJA OPERASI	11,544,013,794.00	10,171,077,853.00	88.11	9,878,406,896.95
5.1.01	Belanja Pegawai	4,897,046,454.00	4,494,470,690.00	91.78	3,930,145,631.95
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,520,045,446.00	2,365,016,757.00	93.85	2,152,085,315.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,832,911,262.00	1,763,042,964.00	96.19	1,569,335,080.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,710,554,899.00	1,650,918,964.00	96.51	1,545,603,080.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	122,356,363.00	112,126,000.00	91.64	23,732,000.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	204,996,518.00	174,090,774.00	84.92	163,270,076.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	184,977,008.00	174,090,774.00	94.11	163,270,076.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	20,019,510.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	113,889,850.00	109,130,000.00	95.82	108,685,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	113,889,850.00	109,130,000.00	95.82	108,685,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	205,205,000.00	188,020,000.00	91.63	177,360,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	205,205,000.00	188,020,000.00	91.63	177,360,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	38,563,125.00	29,645,000.00	76.87	29,755,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31,713,500.00	23,170,000.00	73.06	28,275,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6,849,625.00	6,475,000.00	94.53	1,480,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	114,173,027.00	96,173,760.00	84.24	95,956,500.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	105,880,098.00	93,639,060.00	88.44	95,377,140.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8,292,929.00	2,534,700.00	30.56	579,360.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10,261,072.00	4,889,354.00	47.65	7,704,140.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8,412,503.00	4,889,354.00	58.12	7,704,140.00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1,848,569.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	45,592.00	24,905.00	54.63	19,519.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	40,668.00	22,012.00	54.13	19,471.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,924.00	2,893.00	58.75	48.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,377,001,008.00	2,129,453,933.00	89.59	1,778,060,316.95
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2,377,001,008.00	2,129,453,933.00	89.59	1,778,060,316.95
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2,278,946,152.00	2,044,014,806.00	89.69	1,758,242,209.95
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	98,054,856.00	85,439,127.00	87.13	19,818,107.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,646,967,340.00	5,676,607,163.00	85.40	5,948,261,265.00
5.1.02.01	Belanja Barang	2,363,473,732.00	2,017,223,189.00	85.35	1,838,742,238.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2,363,473,732.00	2,017,223,189.00	85.35	1,838,742,238.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	277,724,252.00	261,481,127.00	94.15	283,528,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	333,692,800.00	291,803,162.00	87.45	227,951,600.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	258,897,500.00	221,818,400.00	85.68	143,266,500.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0.00	0.00	0.00	4,990,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputasi	29,684,600.00	29,605,000.00	99.73	29,654,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9,516,880.00	7,233,500.00	76.01	0.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16,820,500.00	16,633,400.00	98.89	5,501,500.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Komunikasi	78,345,400.00	59,607,250.00	76.08	34,277,238.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	808,200,800.00	699,516,350.00	86.55	738,807,900.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	32,000,000.00	31,985,000.00	99.95	17,678,500.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	508,379,000.00	387,328,000.00	76.19	325,688,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0.00	0.00	0.00	16,399,000.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10,212,000.00	10,212,000.00	100.00	11,000,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1,919,465,060.00	1,660,204,975.00	86.49	1,966,823,199.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	745,578,260.00	611,952,075.00	82.08	926,321,174.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, dan	212,300,000.00	187,000,000.00	88.08	174,500,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	1,500,000.00	1,200,000.00	80.00	0.00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	15,240,000.00	15,240,000.00	100.00	64,800,000.00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2,250,000.00	2,250,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15,240,000.00	15,240,000.00	100.00	15,240,000.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	194,160,000.00	167,630,000.00	86.34	182,140,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0.00	0.00	0.00	93,100,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	200,880,480.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	31,680,000.00	20,980,000.00	66.22	27,030,000.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	4,500,000.00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	26,500,000.00	26,500,000.00	100.00	9,000,000.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	22,500,000.00	22,500,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	9,128,000.00	6,187,570.00	67.79	12,835,895.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	25,070,000.00	7,137,750.00	28.47	11,160,869.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	99,861,060.00	91,405,467.00	91.53	89,889,680.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9,597,000.00	9,390,000.00	97.84	9,540,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	39,700,000.00	19,255,113.00	48.50	17,497,025.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30,352,200.00	9,536,175.00	31.42	14,207,225.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	38,390,800.00	38,264,900.00	99.67	38,276,525.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	38,390,800.00	38,264,900.00	99.67	38,276,525.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	385,575,000.00	355,575,000.00	92.22	246,460,000.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0.00	0.00	0.00	5,260,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	106,400,000.00	91,400,000.00	85.90	62,000,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	279,175,000.00	264,175,000.00	94.63	179,200,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	450,221,000.00	395,198,000.00	87.78	375,703,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	92,421,000.00	66,443,000.00	71.89	75,603,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	357,800,000.00	328,755,000.00	91.88	300,100,000.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0.00	0.00	0.00	97,212,500.00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain	0.00	0.00	0.00	97,212,500.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	299,700,000.00	259,215,000.00	86.49	282,850,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	254,700,000.00	250,340,000.00	98.29	253,100,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	45,000,000.00	8,875,000.00	19.72	29,750,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	29,559,848.00	29,419,000.00	99.52	29,600,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29,559,848.00	29,419,000.00	99.52	29,600,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	29,559,848.00	29,419,000.00	99.52	29,600,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2,304,468,700.00	1,939,759,999.00	84.17	2,083,095,828.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,304,468,700.00	1,939,759,999.00	84.17	2,083,095,828.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,304,468,700.00	1,939,759,999.00	84.17	2,083,095,828.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	30,000,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	30,000,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	30,000,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	11,544,013,794.00	10,171,077,853.00	88.11	9,878,406,896.95
5.2	BELANJA MODAL	1,308,022,700.00	1,297,082,500.00	99.16	498,009,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	808,022,700.00	802,881,000.00	99.36	387,809,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	374,812,700.00	371,006,000.00	99.98	309,048,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	374,812,700.00	371,006,000.00	99.98	309,048,000.00

5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	124,100,000.00	121,850,000.00	98.19	106,900,000.00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	21,622,700.00	21,540,000.00	99.62	0.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	69,000,000.00	68,835,000.00	99.76	0.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0.00	0.00	0.00	172,150,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	71,250,000.00	71,075,000.00	99.75	44,240,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	46,250,000.00	46,075,000.00	99.62	44,240,000.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0.00	0.00	0.00	44,240,000.00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	46,250,000.00	46,075,000.00	99.62	0.00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	0.00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	361,960,000.00	360,800,000.00	99.68	34,521,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	259,000,000.00	258,000,000.00	99.61	17,950,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	259,000,000.00	258,000,000.00	99.61	17,950,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	102,960,000.00	102,800,000.00	99.84	16,571,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0.00	0.00	0.00	16,571,000.00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	88,950,000.00	88,850,000.00	99.89	0.00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	14,010,000.00	13,950,000.00	99.57	0.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500,000,000.00	494,201,500.00	98.84	110,200,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	500,000,000.00	494,201,500.00	98.84	110,200,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	500,000,000.00	494,201,500.00	98.84	110,200,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	500,000,000.00	494,201,500.00	98.84	110,200,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1,308,022,700.00	1,297,082,500.00	99.16	498,009,000.00
	JUMLAH BELANJA	12,852,036,494.00	11,468,160,353.00	89.23	10,376,415,896.95
	SURPLUS/DEFISIT	( 12,852,036,494.00 )	( 11,468,160,353.00 )	89.23	( 10,376,415,896.95 )

Kab. Muara Enim, 08 Januari 2025  
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Husin Aswadi, SE.,M.M.  
NIP. 197006191996031002



## PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>1.281.270.527,00</b>	<b>51,25</b>	<b>674.117.115,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	2.500.000.000,00	1.281.270.527,00	51,25	674.117.115,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.500.000.000,00	1.281.270.527,00	51,25	674.117.115,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	674.117.115,00
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	674.117.115,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.500.000.000,00	1.281.270.527,00	51,25	0,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.500.000.000,00	1.281.270.527,00	51,25	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>1.281.270.527,00</b>	<b>51,25</b>	<b>674.117.115,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>1.281.270.527,00</b>	<b>51,25</b>	<b>674.117.115,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>13.372.191.845,00</b>	<b>11.069.180.245,00</b>	<b>82,78</b>	<b>13.117.881.613,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>12.616.622.955,00</b>	<b>10.314.354.345,00</b>	<b>81,75</b>	<b>10.177.344.678,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	5.523.541.391,00	4.631.434.198,00	83,85	4.343.118.087,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.644.241.527,00	2.141.174.208,00	80,97	2.088.444.847,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.884.546.916,00	1.583.399.708,00	84,02	1.514.189.382,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.884.546.916,00	1.583.399.708,00	84,02	1.514.189.382,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	237.546.000,00	163.847.096,00	68,97	150.273.898,00
5.1.01.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	237.546.000,00	163.847.096,00	68,97	150.273.898,00
5.1.01.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	65.497.500,00	53.550.000,00	81,76	65.570.000,00
5.1.01.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	65.497.500,00	53.550.000,00	81,76	65.570.000,00
5.1.01.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	265.489.724,00	226.870.000,00	85,45	242.000.000,00
5.1.01.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	265.489.724,00	226.870.000,00	85,45	242.000.000,00
5.1.01.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	36.387.500,00	22.430.000,00	61,64	21.485.000,00
5.1.01.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36.387.500,00	22.430.000,00	61,64	21.485.000,00
5.1.01.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	134.025.000,00	85.817.700,00	64,03	86.976.420,00
5.1.01.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	134.025.000,00	85.817.700,00	64,03	86.976.420,00
5.1.01.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	20.705.886,00	5.236.352,00	25,29	7.933.522,00
5.1.01.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.705.886,00	5.236.352,00	25,29	7.933.522,00
5.1.01.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	43.001,00	23.352,00	54,31	16.625,00
5.1.01.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	43.001,00	23.352,00	54,31	16.625,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.879.299.864,00	2.490.259.990,00	86,49	2.254.673.240,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.334.909.836,00	2.038.873.768,00	87,32	1.846.359.245,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.334.909.836,00	2.038.873.768,00	87,32	1.846.359.245,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	544.390.028,00	451.386.222,00	82,92	408.313.995,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	544.390.028,00	451.386.222,00	82,92	408.313.995,00
<b>5.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>7.093.081.564,00</b>	<b>5.682.920.147,00</b>	<b>80,12</b>	<b>5.834.226.591,00</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>1.284.270.698,00</b>	<b>988.273.300,00</b>	<b>76,95</b>	<b>1.193.923.660,00</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>1.284.270.698,00</b>	<b>988.273.300,00</b>	<b>76,95</b>	<b>1.193.923.660,00</b>
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.100.000,00	12.435.000,00	65,10	25.011.560,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.519.677,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	45.581.135,00	45.580.000,00	100,00	72.580.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	416.481.348,00	334.414.700,00	80,30	341.797.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	481.502.156,00	389.695.600,00	80,93	492.924.900,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.488.000,00	5.000.000,00	91,11	4.990.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	35.109.694,00	30.609.500,00	87,18	12.816.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	46.433.088,00	39.633.500,00	85,36	36.350.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	20.750.000,00	11.250.000,00	54,22	15.365.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.695.600,00	6.650.000,00	86,41	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	179.310.000,00	98.495.000,00	54,93	157.159.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.300.000,00	6.110.000,00	83,70	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	15.370.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.000.000,00	8.400.000,00	70,00	12.000.000,00
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>2.810.663.078,00</b>	<b>2.489.452.166,00</b>	<b>88,57</b>	<b>2.283.678.691,00</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>2.426.398.278,00</b>	<b>2.156.610.145,00</b>	<b>88,88</b>	<b>1.833.093.451,00</b>
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	76.300.000,00	61.600.000,00	80,73	55.400.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	69.000.000,00	69.000.000,00	100,00	84.240.000,00

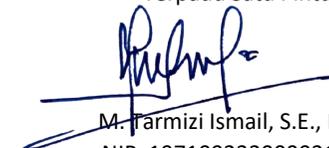
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	412.320.000,00	355.730.000,00	86,28	408.490.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	466.200.000,00	430.200.000,00	92,28	357.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	385.184.785,00	385.184.772,00	100,00	199.967.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	345.866.500,00	345.866.472,00	100,00	199.967.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	108.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	7.192.347,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	9.000.000,00	7.116.100,00	79,07	7.113.600,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	9.500.400,00	5.060.250,00	53,26	12.024.888,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	365.001.110,00	269.305.756,00	73,78	196.995.566,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.600.000,00	3.610.000,00	37,60	4.200.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	93.920,00	18,78	0,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	160.000.000,00	158.300.000,00	98,94	170.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.625.483,00	9.042.875,00	93,95	8.003.050,00
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>	<b>148.519.800,00</b>	<b>124.763.041,00</b>	<b>84,00</b>	<b>57.515.342,00</b>
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	148.519.800,00	124.763.041,00	84,00	57.515.342,00
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.450.000,00</b>
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	68.800.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	0,00	0,00	0,00	16.150.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>122.745.000,00</b>	<b>121.493.980,00</b>	<b>98,98</b>	<b>162.649.898,00</b>
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	5.135.000,00	5.135.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.810.000,00	30.810.000,00	100,00	15.405.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	85.000.000,00	84.948.980,00	99,94	147.244.898,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.800.000,00	600.000,00	33,33	0,00
<b>5.1.02.02.12</b>	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>113.000.000,00</b>	<b>86.585.000,00</b>	<b>76,62</b>	<b>137.970.000,00</b>
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	8.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	88.500.000,00	62.085.000,00	70,15	129.970.000,00
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>284.510.637,00</b>	<b>228.518.912,00</b>	<b>80,32</b>	<b>116.452.500,00</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>219.110.637,00</b>	<b>163.118.912,00</b>	<b>74,45</b>	<b>116.452.500,00</b>
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	75.690.637,00	57.663.912,00	76,18	12.952.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	10.000.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	53.000.000,00	37.135.900,00	70,07	35.580.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.260.000,00	12.809.100,00	96,60	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	28.820.000,00	20.760.000,00	72,03	31.140.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	30.840.000,00	27.250.000,00	88,36	27.280.000,00
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>65.400.000,00</b>	<b>65.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	65.400.000,00	65.400.000,00	100,00	0,00
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>2.713.637.151,00</b>	<b>1.976.675.769,00</b>	<b>72,84</b>	<b>2.240.171.740,00</b>
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.713.637.151,00	1.976.675.769,00	72,84	2.240.171.740,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.660.117.151,00	1.944.147.447,00	73,09	2.240.171.740,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	53.520.000,00	32.528.322,00	60,78	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>12.616.622.955,00</b>	<b>10.314.354.345,00</b>	<b>81,75</b>	<b>10.177.344.678,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>755.568.890,00</b>	<b>754.825.900,00</b>	<b>99,90</b>	<b>2.940.536.935,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.580.000,00	205.235.000,00	99,83	1.371.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	421.300.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	421.300.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	421.300.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	103.050.000,00	102.715.000,00	99,67	474.200.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	14.500.000,00	14.365.000,00	99,07	263.700.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	14.500.000,00	14.365.000,00	99,07	263.700.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	88.550.000,00	88.350.000,00	99,77	210.500.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	83.550.000,00	83.400.000,00	99,82	210.500.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	56.000.000,00	56.000.000,00	100,00	468.500.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	468.500.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	468.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	46.530.000,00	46.520.000,00	99,98	7.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	46.530.000,00	46.520.000,00	99,98	7.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	46.530.000,00	46.520.000,00	99,98	7.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	499.602.900,00	99,92	1.401.036.935,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	500.000.000,00	499.602.900,00	99,92	1.401.036.935,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.000.000,00	499.602.900,00	99,92	1.401.036.935,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	500.000.000,00	499.602.900,00	99,92	1.251.136.935,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	149.900.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	168.500.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	168.500.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	168.500.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	168.500.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	49.988.890,00	49.988.000,00	100,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	49.988.890,00	49.988.000,00	100,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	49.988.890,00	49.988.000,00	100,00	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	49.988.890,00	49.988.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>755.568.890,00</b>	<b>754.825.900,00</b>	<b>99,90</b>	<b>2.940.536.935,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>13.372.191.845,00</b>	<b>11.139.562.109,00</b>	<b>83,30</b>	<b>13.117.881.613,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>( 10.872.191.845,00 )</b>	<b>( 9.922.986.571,00 )</b>	<b>91,27</b>	<b>( 12.443.764.498,00 )</b>

Kab. Muara Enim, 09 Januari 2025

Terpadu Satu Pintu



M. Farmizi Ismail, S.E., M.Si.

NIP. 197109232000031004



## PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1,000,000,000.00	438,755,000.00	43.88	342,030,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	1,000,000,000.00	438,755,000.00	43.88	342,030,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1,000,000,000.00	438,755,000.00	43.88	342,030,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	1,000,000,000.00	438,755,000.00	43.88	342,030,000.00
5	BELANJA DAERAH	64,539,634,850.05	52,001,670,469.00	80.57	56,740,409,858.00
5.1	BELANJA OPERASI	43,787,004,865.05	30,897,469,031.00	70.56	45,366,755,648.00
5.1.01	Belanja Pegawai	5,550,206,019.00	4,636,106,578.00	83.53	4,241,956,161.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31,710,711,846.05	24,514,328,194.00	77.31	29,656,358,928.00
5.1.05	Belanja Hibah	6,526,087,000.00	1,747,034,259.00	26.77	11,468,440,559.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	43,787,004,865.05	30,897,469,031.00	70.56	45,366,755,648.00
5.2	BELANJA MODAL	20,752,629,985.00	21,104,201,438.00	101.69	11,373,654,210.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,217,649,985.00	1,200,042,500.00	98.55	1,259,170,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19,450,000,000.00	19,819,643,938.00	101.90	9,127,356,210.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0.00	0.00	0.00	887,450,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	99,678,000.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	84,980,000.00	84,515,000.00	99.45	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	20,752,629,985.00	21,104,201,438.00	101.69	11,373,654,210.00
	JUMLAH BELANJA	64,539,634,850.05	52,001,670,469.00	80.57	56,740,409,858.00
	SURPLUS/DEFISIT	( 63,539,634,850.05 )	( 51,562,915,469.00 )	81.15	( 56,398,379,858.00 )

Kab. Muara Enim, 14 Januari 2025  
Kepala Dinas Kepemudaan dan OlahragaSyarifudin, AP.,M.Si  
NIP. 197302181993111001



**PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>16.915.228.993,00</b>	<b>9.995.832.066,00</b>	<b>59,09</b>	<b>9.554.640.899,40</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.795.028.993,00</b>	<b>9.668.882.066,00</b>	<b>89,57</b>	<b>9.039.043.050,40</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	5.861.524.734,00	5.328.348.061,00	90,90	5.042.913.262,40
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.227.100.501,00	2.829.717.721,00	87,69	2.772.429.254,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.329.328.080,00	2.201.664.922,00	94,52	2.123.203.454,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.224.250.000,00	2.114.377.722,00	95,06	2.111.337.454,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	105.078.080,00	87.287.200,00	83,07	11.866.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	214.139.375,00	183.666.212,00	85,77	164.158.314,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	186.259.375,00	178.284.164,00	95,72	162.734.394,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	27.880.000,00	5.382.048,00	19,30	1.423.920,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	273.151.970,00	101.570.000,00	37,18	114.030.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	273.151.970,00	101.570.000,00	37,18	114.030.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	222.519.250,00	183.480.000,00	82,46	209.232.200,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	222.519.250,00	183.480.000,00	82,46	209.232.200,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	57.142.681,00	46.375.000,00	81,16	42.670.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.074.681,00	41.230.000,00	80,72	41.930.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	6.068.000,00	5.145.000,00	84,79	740.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	124.063.404,00	107.978.220,00	87,03	108.123.060,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	116.936.976,00	103.922.700,00	88,87	107.254.020,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.126.428,00	4.055.520,00	56,91	869.040,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.708.942,00	4.952.266,00	73,82	10.982.218,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.708.942,00	4.952.266,00	73,82	10.982.218,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	46.799,00	31.101,00	66,46	30.008,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	44.999,00	29.363,00	65,25	29.944,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.800,00	1.738,00	96,56	64,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.634.424.233,00	2.498.630.340,00	94,85	2.270.484.008,40
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.634.424.233,00	2.498.630.340,00	94,85	2.270.484.008,40
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.551.260.768,00	2.431.268.478,00	95,30	2.260.403.588,40
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	83.163.465,00	67.361.862,00	81,00	10.080.420,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.933.504.259,00	4.340.534.005,00	87,98	3.019.474.088,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.989.817.266,00	1.846.987.980,00	92,82	884.514.830,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.989.817.266,00	1.846.987.980,00	92,82	884.514.830,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	30.706.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	15.200.000,00	14.592.000,00	96,00	33.950.600,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	10.981.600,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.418.035,00	2.000.000,00	58,51	2.500.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	39.574.744,00	39.097.428,00	98,79	31.282.930,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	284.985.774,00	236.119.452,00	82,85	250.181.300,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	133.460.400,00	104.933.600,00	78,63	97.503.600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00	3.550.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	29.504.213,00	24.728.000,00	83,81	22.439.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.314.500,00	10.552.500,00	85,69	12.261.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.079.600,00	2.700.000,00	53,15	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.290.445.000,00	1.272.086.000,00	98,58	246.583.800,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	172.285.000,00	136.629.000,00	79,30	117.845.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	21.730.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	958.449.805,00	648.455.060,00	67,66	626.588.880,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	703.181.305,00	423.891.810,00	60,28	434.380.780,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	43.300.000,00	32.250.000,00	74,48	33.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	12.840.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	119.520.000,00	105.145.909,00	87,97	86.360.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	270.240.000,00	77.040.000,00	28,51	107.520.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	71.400.000,00	71.400.000,00	100,00	69.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	32.383.140,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	23.712.000,00	23.104.000,00	97,44	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	25.000.000,00	24.937.500,00	99,75	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	17.000.000,00	7.500.000,00	44,12	4.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	5.982.600,00	562.489,00	9,40	692.345,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	23.598.000,00	6.882.750,00	29,17	7.121.762,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	74.999.835,00	52.459.454,00	69,95	45.061.699,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	7.758.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.250.000,00	16.583.985,00	96,14	16.260.234,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.178.870,00	6.025.723,00	53,90	7.283.600,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	37.538.500,00	33.363.250,00	88,88	21.653.100,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	37.538.500,00	33.363.250,00	88,88	21.653.100,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	29.650.000,00	24.750.000,00	83,47	23.650.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	29.650.000,00	24.750.000,00	83,47	23.650.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	88.080.000,00	80.900.000,00	91,85	61.905.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	5.135.000,00	5.000.000,00	97,37	15.270.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	35.945.000,00	35.000.000,00	97,37	20.135.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	47.000.000,00	40.900.000,00	87,02	26.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	100.000.000,00	85.550.000,00	85,55	85.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	55.000.000,00	45.350.000,00	82,45	16.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	45.000.000,00	40.200.000,00	89,33	52.500.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	76.882.288,00	53.430.000,00	69,50	18.700.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.882.288,00	28.430.000,00	54,80	18.700.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	4.472.288,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.980.000,00	5.275.000,00	48,04	5.450.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.250.000,00	15.080.000,00	70,96	7.850.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	15.180.000,00	8.075.000,00	53,19	5.400.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.747.604.900,00	1.630.910.965,00	93,32	1.421.170.378,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.747.604.900,00	1.630.910.965,00	93,32	1.421.170.378,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.747.604.900,00	1.630.910.965,00	93,32	1.421.170.378,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	160.750.000,00	160.750.000,00	100,00	68.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	160.750.000,00	160.750.000,00	100,00	68.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlimbaban	160.750.000,00	160.750.000,00	100,00	68.500.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	976.655.700,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	976.655.700,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	976.655.700,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	976.655.700,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>10.795.028.993,00</b>	<b>9.668.882.066,00</b>	<b>89,57</b>	<b>9.039.043.050,40</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>6.120.200.000,00</b>	<b>326.950.000,00</b>	<b>5,34</b>	<b>515.597.849,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.320.200.000,00	326.950.000,00	24,77	241.508.349,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.004.000.000,00	11.500.000,00	1,15	164.108.349,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	92.000.000,00	0,00	0,00	103.740.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	92.000.000,00	0,00	0,00	103.740.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	912.000.000,00	11.500.000,00	1,26	60.368.349,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	900.000.000,00	0,00	0,00	37.618.899,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	22.749.450,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.000.000,00	11.500.000,00	95,83	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	316.200.000,00	315.450.000,00	99,76	77.400.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	136.200.000,00	135.450.000,00	99,45	44.850.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	136.200.000,00	135.450.000,00	99,45	44.850.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	32.550.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	32.550.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.800.000.000,00	0,00	0,00	214.089.500,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.800.000.000,00	0,00	0,00	214.089.500,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.800.000.000,00	0,00	0,00	14.900.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	199.189.500,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	199.189.500,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>6.120.200.000,00</b>	<b>326.950.000,00</b>	<b>5,34</b>	<b>515.597.849,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>16.915.228.993,00</b>	<b>9.995.832.066,00</b>	<b>59,09</b>	<b>9.554.640.899,40</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(16.915.228.993,00)</b>	<b>(9.995.832.066,00)</b>	<b>59,09</b>	<b>(9.554.640.899,40)</b>

Kab. Muara Enim, 15 Januari 2025  
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



H. Shofyan Aripanca, S.Kom., M.Si.  
NIP. 197201221997031003



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM  
DINAS PERIKANAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125,000,000.00	126,500,000.00	101.20	120,510,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	125,000,000.00	126,500,000.00	101.20	120,510,000.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	125,000,000.00	126,500,000.00	101.20	120,510,000.00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	125,000,000.00	126,500,000.00	101.20	120,510,000.00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	125,000,000.00	126,500,000.00	101.20	120,510,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	125,000,000.00	126,500,000.00	101.20	120,510,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	125,000,000.00	126,500,000.00	101.20	120,510,000.00
5	BELANJA DAERAH	22,640,138,005.50	19,056,037,074.00	84.17	19,297,369,481.23
5.1	BELANJA OPERASI	21,821,265,458.50	18,256,908,074.00	83.67	18,398,261,570.23
5.1.01	Belanja Pegawai	5,290,141,883.00	3,385,742,339.00	64.00	3,187,069,219.23
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3,100,707,845.00	1,745,874,312.00	56.31	1,730,018,399.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2,073,851,088.00	1,362,072,798.00	65.68	1,328,823,080.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,995,654,148.00	1,317,222,398.00	66.00	1,328,823,080.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	78,196,940.00	44,850,400.00	57.36	0.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	287,900,580.00	118,314,840.00	41.10	115,146,068.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	278,460,000.00	116,072,320.00	41.68	115,146,068.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9,440,580.00	2,242,520.00	23.75	0.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	208,845,000.00	109,810,000.00	52.58	127,695,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	208,845,000.00	109,810,000.00	52.58	127,695,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	314,969,200.00	63,090,000.00	20.03	61,200,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	314,969,200.00	63,090,000.00	20.03	61,200,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	51,316,200.00	27,565,000.00	53.72	26,230,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	46,410,000.00	24,975,000.00	53.81	26,230,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4,906,200.00	2,590,000.00	52.79	0.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	149,632,740.00	60,470,700.00	40.41	63,584,760.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	143,871,000.00	58,949,880.00	40.97	63,584,760.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,761,740.00	1,520,820.00	26.40	0.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14,144,000.00	4,532,758.00	32.05	7,319,329.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14,144,000.00	4,532,758.00	32.05	7,319,329.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	49,037.00	18,216.00	37.15	20,162.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	46,410.00	17,502.00	37.71	20,162.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,627.00	714.00	27.18	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,175,834,038.00	1,626,268,027.00	74.74	1,443,450,820.23
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2,175,834,038.00	1,626,268,027.00	74.74	1,443,450,820.23
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2,125,431,938.00	1,591,115,085.00	74.86	1,443,450,820.23
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	50,402,100.00	35,152,942.00	69.74	0.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13,600,000.00	13,600,000.00	100.00	13,600,000.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	13,600,000.00	13,600,000.00	100.00	13,600,000.00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13,600,000.00	13,600,000.00	100.00	13,600,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16,531,123,575.50	14,871,165,735.00	89.96	15,211,192,351.00
5.1.02.01	Belanja Barang	11,618,849,864.50	10,724,106,329.00	92.30	11,732,395,039.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11,618,849,864.50	10,724,106,329.00	92.30	11,732,395,039.00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	60,369,237.00	44,601,795.00	73.88	18,059,600.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	27,118,500.00	17,331,000.00	63.91	9,849,000.00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	275,000,000.00	273,225,000.00	99.35	297,036,750.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0.00	0.00	0.00	4,307,500.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	104,007,000.00	79,086,000.00	76.04	68,639,000.00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	0.00	0.00	0.00	26,019,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	313,226,742.00	227,369,700.00	72.59	164,142,760.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	277,906,219.00	193,947,700.00	69.79	206,872,884.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6,295,076.00	5,000,000.00	79.43	3,040,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3,545,895.00	2,201,400.00	62.08	1,094,400.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	43,655,326.00	27,462,650.00	62.91	26,895,500.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14,519,843.00	11,246,000.00	77.45	9,151,506.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	367,712,593.00	255,144,644.00	69.39	304,220,337.00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	0.00	0.00	0.00	7,431,480.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9,354,472,781.50	8,855,530,440.00	94.67	9,924,227,766.00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	612,872,492.00	587,952,500.00	95.97	562,709,706.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	158,348,160.00	144,007,500.00	90.94	85,647,850.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0.00	0.00	0.00	13,250,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2,240,158,061.00	2,019,707,266.00	90.16	1,664,606,470.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1,756,458,491.00	1,569,015,896.00	89.33	1,405,404,430.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	102,953,000.00	98,400,000.00	95.58	58,300,000.00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	56,160,000.00	33,110,000.00	58.96	12,574,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	466,920,000.00	444,480,000.00	95.19	430,840,000.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	198,120,000.00	186,560,000.00	94.17	213,360,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	102,720,000.00	102,720,000.00	100.00	102,720,000.00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	463,200,000.00	424,800,000.00	91.71	417,600,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	19,980,000.00	19,980,000.00	100.00	19,980,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	11,404,800.00	427,284.00	3.75	432,284.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	32,694,500.00	8,719,750.00	26.67	14,394,246.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	121,380,000.00	96,260,771.00	79.31	104,040,000.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	35,520,000.00	19,600,000.00	55.18	22,750,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17,250,000.00	6,001,900.00	34.79	5,957,400.00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	120,000,000.00	119,800,000.00	99.83	0.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8,156,191.00	8,156,191.00	100.00	2,456,500.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	29,748,000.00	29,748,000.00	100.00	19,980,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	29,748,000.00	29,748,000.00	100.00	19,980,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	190,551,570.00	189,143,370.00	99.26	85,172,040.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	79,295,070.00	79,179,370.00	99.85	35,299,040.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	111,256,500.00	109,964,000.00	98.84	49,873,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	263,400,000.00	231,800,000.00	88.00	154,050,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	110,400,000.00	108,550,000.00	98.32	63,100,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	93,000,000.00	72,450,000.00	77.90	50,300,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	60,000,000.00	50,800,000.00	84.67	40,650,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	293,306,600.00	274,756,500.00	93.68	51,068,600.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	93,306,600.00	80,956,500.00	86.76	51,068,600.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	70,573,800.00	58,514,000.00	82.91	30,358,100.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16,250,400.00	16,042,500.00	98.72	16,110,500.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6,482,400.00	6,400,000.00	98.73	4,600,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200,000,000.00	193,800,000.00	96.90	0.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	200,000,000.00	193,800,000.00	96.90	0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2,378,809,050.00	1,852,595,640.00	77.88	1,763,122,242.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2,378,809,050.00	1,852,595,640.00	77.88	1,763,122,242.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,364,934,050.00	1,852,595,640.00	78.34	1,763,122,242.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,875,000.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	21,821,265,458.50	18,256,908,074.00	83.67	18,398,261,570.23
5.2	BELANJA MODAL	818,872,547.00	799,129,000.00	97.59	899,107,911.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	619,072,547.00	600,930,000.00	97.07	500,850,000.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	19,980,000.00	19,980,000.00	100.00	0.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	19,980,000.00	19,980,000.00	100.00	0.00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	19,980,000.00	19,980,000.00	100.00	0.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	350,000,000.00	338,100,000.00	96.60	0.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	350,000,000.00	338,100,000.00	96.60	0.00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	350,000,000.00	338,100,000.00	96.60	0.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	155,172,672.00	151,200,000.00	97.44	411,650,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	7,347,312.00	6,900,000.00	93.91	336,100,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	0.00	0.00	0.00	279,900,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7,347,312.00	6,900,000.00	93.91	56,200,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	147,825,360.00	144,300,000.00	97.62	75,550,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0.00	0.00	0.00	41,550,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	51,255,360.00	50,300,000.00	98.14	34,000,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	96,570,000.00	94,000,000.00	97.34	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	93,919,875.00	91,650,000.00	97.58	89,200,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	58,275,000.00	57,300,000.00	98.33	68,000,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	58,275,000.00	57,300,000.00	98.33	68,000,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	35,644,875.00	34,350,000.00	96.37	21,200,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	35,644,875.00	34,350,000.00	96.37	21,200,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	199,800,000.00	198,199,000.00	99.20	398,257,911.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	199,800,000.00	198,199,000.00	99.20	198,990,452.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	199,800,000.00	198,199,000.00	99.20	198,990,452.00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	199,800,000.00	198,199,000.00	99.20	198,990,452.00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0.00	0.00	0.00	199,267,459.00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0.00	0.00	0.00	199,267,459.00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0.00	0.00	0.00	199,267,459.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	818,872,547.00	799,129,000.00	97.59	899,107,911.00
	JUMLAH BELANJA	22,640,138,005.50	19,056,037,074.00	84.17	19,297,369,481.23
	SURPLUS/DEFISIT	( 22,515,138,005.50 )	( 18,929,537,074.00 )	84.07	( 19,176,859,481.23 )

Kab. Muara Enim, 16 Januari 2025  
Kepala Dinas Perikanan

Muflih, S.STP, M.H  
NIP. 197902111998101001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140,000,000.00	232,280,000.00	165.91	105,617,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	140,000,000.00	232,280,000.00	165.91	105,617,000.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	140,000,000.00	232,280,000.00	165.91	105,617,000.00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	140,000,000.00	232,280,000.00	165.91	105,617,000.00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	140,000,000.00	232,280,000.00	165.91	105,617,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	140,000,000.00	232,280,000.00	165.91	105,617,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	140,000,000.00	232,280,000.00	165.91	105,617,000.00
5	BELANJA DAERAH	17,293,755,193.00	15,934,897,038.00	92.14	11,786,953,561.09
5.1	BELANJA OPERASI	9,819,706,993.00	8,687,804,538.00	88.47	8,359,800,561.09
5.1.01	Belanja Pegawai	4,091,318,733.00	3,549,340,210.00	86.75	3,494,626,060.09
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,315,046,725.00	1,856,047,370.00	80.17	1,918,100,772.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,674,687,296.00	1,425,531,612.00	85.12	1,435,203,711.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,549,990,468.00	1,316,609,212.00	84.94	1,423,337,711.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	124,696,828.00	108,922,400.00	87.35	11,866,000.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	242,028,297.00	121,126,314.00	50.05	122,235,668.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	211,876,791.00	111,964,018.00	52.84	122,235,668.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	30,151,506.00	9,162,296.00	30.39	0.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	125,921,250.00	102,690,000.00	81.55	117,990,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	125,921,250.00	102,690,000.00	81.55	117,990,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	122,225,000.00	110,440,000.00	90.36	138,080,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	122,225,000.00	110,440,000.00	90.36	138,080,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28,672,500.00	24,650,000.00	85.97	21,435,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21,022,750.00	18,360,000.00	87.33	20,695,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7,649,750.00	6,290,000.00	82.22	740,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	113,631,057.00	67,060,920.00	59.02	74,230,500.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	104,766,849.00	61,774,260.00	58.96	73,940,820.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8,864,208.00	5,286,660.00	59.64	289,680.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7,742,686.00	4,527,778.00	58.48	8,908,490.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7,742,686.00	4,527,778.00	58.48	8,908,490.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	138,639.00	20,746.00	14.96	17,403.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	75,639.00	19,318.00	25.54	17,379.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	63,000.00	1,428.00	2.27	24.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,776,272,008.00	1,693,292,840.00	95.33	1,576,525,288.09
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,776,272,008.00	1,693,292,840.00	95.33	1,576,525,288.09
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,671,519,808.00	1,608,862,171.00	96.25	1,566,444,868.09
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	104,752,200.00	84,430,669.00	80.60	10,080,420.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,728,388,260.00	5,138,464,328.00	89.70	4,865,174,501.00
5.1.02.01	Belanja Barang	1,161,143,602.00	920,967,038.00	79.32	719,639,830.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,161,143,602.00	920,967,038.00	79.32	719,639,830.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	14,632,200.00	14,400,000.00	98.41	0.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15,455,000.00	820,000.00	5.31	22,195,500.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12,440,000.00	11,245,000.00	90.39	31,322,000.00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	7,956,000.00	7,140,000.00	89.74	2,550,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	308,851,566.00	226,902,588.00	73.47	200,180,700.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	176,496,592.00	142,267,650.00	80.61	74,333,630.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3,707,200.00	3,310,000.00	89.29	3,490,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	110,664,944.00	87,229,000.00	78.82	36,468,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10,999,100.00	9,096,300.00	82.70	6,833,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	39,632,000.00	37,095,000.00	93.60	96,558,000.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	33,307,000.00	28,500,000.00	85.57	8,230,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	146,974,000.00	112,754,000.00	76.72	153,379,000.00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Publik	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18,131,000.00	18,117,000.00	99.92	900,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	101,900,000.00	87,730,000.00	86.09	42,000,000.00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	93,000,000.00	75,000,000.00	80.65	24,700,000.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	54,279,000.00	46,642,500.00	85.93	12,900,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	2,718,000.00	2,718,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2,078,454,500.00	1,771,252,899.00	85.22	2,324,082,289.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1,495,240,000.00	1,277,425,399.00	85.43	1,394,277,718.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Penasehat, dan Sekretaris	76,100,000.00	51,900,000.00	68.20	17,200,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	13,500,000.00	13,500,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, dan Publikasi	4,800,000.00	4,800,000.00	100.00	4,200,000.00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	95,000,000.00	74,000,000.00	77.89	127,000,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	528,840,000.00	491,390,000.00	92.92	490,060,000.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	322,680,000.00	276,310,000.00	85.63	231,990,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	65,000,000.00	65,000,000.00	100.00	201,160,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4,400,000.00	4,400,000.00	100.00	6,800,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6,000,000.00	4,200,000.00	70.00	7,350,000.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15,000,000.00	9,500,000.00	63.33	0.00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	21,750,000.00	13,800,000.00	63.45	67,600,000.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	145,200,000.00	101,400,000.00	69.83	69,050,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	49,500,000.00	43,000,000.00	86.87	60,000,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6,210,000.00	3,783,000.00	60.92	4,100,690.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	112,710,000.00	102,694,374.00	91.11	91,690,878.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16,200,000.00	9,522,150.00	58.78	10,003,900.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9,700,000.00	6,725,875.00	69.34	5,872,250.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19,354,500.00	11,542,500.00	59.64	14,452,000.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	19,354,500.00	11,542,500.00	59.64	14,452,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	279,200,000.00	266,900,000.00	95.59	155,950,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	61,300,000.00	49,000,000.00	79.93	17,300,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	217,900,000.00	217,900,000.00	100.00	138,650,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	218,660,000.00	183,260,000.00	83.81	159,604,571.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	53,916,000.00	53,916,000.00	100.00	21,402,000.00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0.00	0.00	0.00	85,000,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	164,744,000.00	129,344,000.00	78.51	53,202,571.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0.00	0.00	0.00	545,423,000.00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain	0.00	0.00	0.00	545,423,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	66,000,000.00	32,125,000.00	48.67	54,375,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus, Siskat/Pelatihan	0.00	0.00	0.00	26,375,000.00

5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	164,520,000.00	146,320,000.00	88.94	148,295,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	149,530,000.00	132,060,000.00	88.32	131,040,000.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	0.00	0.00	0.00	7,295,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	2,900,000.00	2,900,000.00	100.00	2,700,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Persona	6,570,000.00	5,840,000.00	88.89	6,570,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Pet	5,520,000.00	5,520,000.00	100.00	690,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	464,950,000.00	463,279,000.00	99.64	228,410,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ged	0.00	0.00	0.00	228,410,000.00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ged	388,950,000.00	387,834,000.00	99.71	0.00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ged	76,000,000.00	75,445,000.00	99.27	0.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,811,320,158.00	1,788,645,391.00	98.75	1,444,747,382.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1,811,320,158.00	1,788,645,391.00	98.75	1,444,747,382.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,768,027,158.00	1,756,998,065.00	99.38	1,444,747,382.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43,293,000.00	31,647,326.00	73.10	0.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pih	48,000,000.00	48,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	48,000,000.00	48,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	48,000,000.00	48,000,000.00	100.00	0.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	9,819,706,993.00	8,687,804,538.00	88.47	8,359,800,561.09
5.2	BELANJA MODAL	7,474,048,200.00	7,247,092,500.00	96.96	3,427,153,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,102,772,270.00	2,039,338,000.00	96.98	185,070,000.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	533,373,120.00	489,326,000.00	91.74	0.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	533,373,120.00	489,326,000.00	91.74	0.00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	471,768,120.00	437,280,000.00	92.69	0.00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	61,605,000.00	52,046,000.00	84.48	0.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1,063,286,650.00	1,047,785,000.00	98.54	151,088,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5,000,000.00	4,005,000.00	80.10	79,310,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5,000,000.00	4,005,000.00	80.10	79,310,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1,058,286,650.00	1,043,780,000.00	98.63	71,778,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	671,145,300.00	669,300,000.00	99.73	26,778,000.00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	10,811,350.00	8,400,000.00	77.70	0.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	100,000,000.00	99,500,000.00	99.50	43,800,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	276,330,000.00	266,580,000.00	96.47	1,200,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	100,000,000.00	97,520,000.00	97.52	33,982,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	100,000,000.00	97,520,000.00	97.52	25,000,000.00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	30,000,000.00	27,520,000.00	91.73	0.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00	25,000,000.00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0.00	0.00	0.00	8,982,000.00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0.00	0.00	0.00	8,982,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	346,112,500.00	345,100,000.00	99.71	0.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	305,000,000.00	304,600,000.00	99.87	0.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	305,000,000.00	304,600,000.00	99.87	0.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	41,112,500.00	40,500,000.00	98.51	0.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	41,112,500.00	40,500,000.00	98.51	0.00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	60,000,000.00	59,607,000.00	99.35	0.00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	60,000,000.00	59,607,000.00	99.35	0.00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	60,000,000.00	59,607,000.00	99.35	0.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,883,760,000.00	4,721,504,500.00	96.68	3,242,083,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	4,883,760,000.00	4,721,504,500.00	96.68	3,242,083,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4,730,300,000.00	4,645,604,500.00	98.21	3,242,083,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3,995,300,000.00	3,919,420,500.00	98.10	2,931,194,000.00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	135,000,000.00	134,604,000.00	99.71	0.00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/B	400,000,000.00	391,810,000.00	97.95	0.00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	200,000,000.00	199,770,000.00	99.89	197,350,000.00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0.00	0.00	0.00	113,539,000.00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	153,460,000.00	75,900,000.00	49.46	0.00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainny	153,460,000.00	75,900,000.00	49.46	0.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	422,515,930.00	421,250,000.00	99.70	0.00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	422,515,930.00	421,250,000.00	99.70	0.00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	422,515,930.00	421,250,000.00	99.70	0.00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	422,515,930.00	421,250,000.00	99.70	0.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	65,000,000.00	65,000,000.00	100.00	0.00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/C	65,000,000.00	65,000,000.00	100.00	0.00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	65,000,000.00	65,000,000.00	100.00	0.00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen,	65,000,000.00	65,000,000.00	100.00	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	7,474,048,200.00	7,247,092,500.00	96.96	3,427,153,000.00
	JUMLAH BELANJA	17,293,755,193.00	15,934,897,038.00	92.14	11,786,953,561.09
	SURPLUS/DEFISIT	( 17,153,755,193.00 )	( 15,702,617,038.00 )	91.54	( 11,681,336,561.09 )

Kab. Muara Enim, 31 Januari 2025  
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Isdrin, ST  
NIP. 196909141996031002



**PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM**  
**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**



01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>76.319.400,00</b>	<b>50,88</b>	<b>66.951.000,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	150.000.000,00	76.319.400,00	50,88	66.951.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	150.000.000,00	76.319.400,00	50,88	66.951.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	150.000.000,00	76.319.400,00	50,88	66.951.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	150.000.000,00	76.319.400,00	50,88	66.951.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>76.319.400,00</b>	<b>50,88</b>	<b>66.951.000,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>76.319.400,00</b>	<b>50,88</b>	<b>66.951.000,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>76.224.974.918,00</b>	<b>67.272.138.799,00</b>	<b>88,25</b>	<b>62.658.954.009,30</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>73.884.174.298,00</b>	<b>64.953.336.501,00</b>	<b>87,91</b>	<b>57.945.205.518,30</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	25.310.786.790,00	20.027.390.821,00	79,13	19.365.320.055,30
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	13.977.190.532,00	10.702.162.835,00	76,57	10.574.885.022,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	10.065.241.436,00	8.134.534.527,00	80,82	7.843.989.593,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	8.305.213.936,00	6.671.579.900,00	80,33	6.729.544.593,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.760.027.500,00	1.462.954.627,00	83,12	1.114.445.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.026.848.432,00	729.499.898,00	71,04	721.822.412,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	848.460.540,00	610.036.246,00	71,90	627.226.744,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	178.387.892,00	119.463.652,00	66,97	94.595.668,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	347.683.280,00	163.860.000,00	47,13	189.965.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	347.683.280,00	163.860.000,00	47,13	189.965.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.705.610.250,00	1.095.440.000,00	64,23	1.205.730.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.705.610.250,00	1.095.440.000,00	64,23	1.205.730.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	189.262.150,00	130.445.000,00	68,92	124.705.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	70.515.900,00	40.050.000,00	56,80	48.495.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	118.746.250,00	90.395.000,00	76,12	76.210.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	556.235.807,00	413.663.040,00	74,37	431.043.840,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	447.361.051,00	318.285.900,00	71,15	345.733.080,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	108.874.756,00	95.377.140,00	87,60	85.310.760,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	86.177.593,00	34.604.365,00	40,15	57.522.392,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	86.177.593,00	34.604.365,00	40,15	57.522.392,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	131.584,00	116.005,00	88,16	106.785,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	99.618,00	90.758,00	91,11	90.488,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	31.966,00	25.247,00	78,98	16.297,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.325.436.258,00	9.317.067.986,00	82,27	8.782.377.033,30
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	11.325.436.258,00	9.317.067.986,00	82,27	8.782.377.033,30
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9.966.719.306,00	8.240.182.582,00	82,68	8.013.334.848,30
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.358.716.952,00	1.076.885.404,00	79,26	769.042.185,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	8.058.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	8.058.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	8.058.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.573.387.508,00	44.925.945.680,00	92,49	38.579.885.463,00
5.1.02.01	Belanja Barang	40.009.904.472,00	38.176.493.269,00	95,42	32.429.718.491,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	40.009.904.472,00	38.176.493.269,00	95,42	32.429.718.491,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	15.127.500,00	15.005.000,00	99,19	68.506.500,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	431.393.100,00	340.905.730,00	79,02	286.481.908,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	178.893.900,00	164.330.200,00	91,86	1.236.127.150,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	277.062.100,00	274.686.100,00	99,14	150.073.270,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	54.000.000,00	48.300.000,00	89,44	29.900.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	421.822.800,00	395.589.716,00	93,78	334.151.710,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	5.107.300,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	16.126.000,00	16.052.000,00	99,54	14.740.800,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	310.486.525,00	257.080.190,00	82,80	196.093.650,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	230.789.140,00	190.472.300,00	82,53	216.687.260,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.785.100,00	5.840.000,00	86,07	3.240.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	28.574.800,00	28.438.900,00	99,52	18.898.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.324.200,00	19.292.000,00	99,83	18.349.200,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	119.595.000,00	114.522.900,00	95,76	5.284.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	166.943.200,00	154.015.650,00	92,26	193.904.110,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	275.413.500,00	261.414.200,00	94,92	243.396.100,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	37.000.375.407,00	35.504.105.483,00	95,96	28.637.782.533,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	28.163.300,00	23.419.000,00	83,15	16.015.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	132.000.000,00	130.010.000,00	98,49	124.900.000,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	3.000.000,00	2.400.000,00	80,00	2.625.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	159.316.400,00	138.395.900,00	86,87	41.075.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	111.299.000,00	68.875.000,00	61,88	491.580.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	80.800.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	5.827.500,00	5.775.000,00	99,10	5.250.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.986.000,00	13.968.000,00	99,87	8.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.010.790.463,00	3.986.856.597,00	79,57	3.727.853.691,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.479.901.002,00	3.159.779.022,00	90,80	3.113.691.391,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.950.000,00	28.350.000,00	97,93	38.100.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	43.700.000,00	38.400.000,00	87,87	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	45.720.000,00	27.940.000,00	61,11	132.600.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	94.250.000,00	92.382.400,00	98,02	102.218.850,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	93.640.000,00	69.875.600,00	74,62	31.255.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.365.370.000,00	1.298.990.000,00	95,14	1.273.670.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	801.150.000,00	766.000.000,00	95,61	40.910.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	30.480.000,00	15.110.000,00	49,57	370.100.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	19.600.000,00	19.600.000,00	100,00	31.500.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	160.000.000,00	160.000.000,00	100,00	160.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	118.770.000,00	115.440.000,00	97,20	334.360.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	77.040.000,00	67.410.000,00	87,50	259.200.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12.000.000,00	6.000.000,00	50,00	0,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	173.400.000,00	173.400.000,00	100,00	12.400.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	691.200,00	378.981,00	54,83	412.284,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	45.247.500,00	11.990.450,00	26,50	13.567.148,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	248.220.502,00	183.649.969,00	73,99	192.730.048,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14.590.000,00	10.850.000,00	74,37	14.280.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	64.475.000,00	33.071.547,00	51,29	67.800.261,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.606.800,00	22.940.075,00	93,23	20.587.800,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	32.315.461,00	32.197.575,00	99,64	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	32.315.461,00	32.197.575,00	99,64	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.700.000,00	9.700.000,00	82,91	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	11.700.000,00	9.700.000,00	82,91	2.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	169.274.000,00	151.274.000,00	89,37	9.134.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	27.674.000,00	27.674.000,00	100,00	9.134.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	141.600.000,00	123.600.000,00	87,29	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	887.500.000,00	285.746.000,00	32,20	266.628.300,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	250.000.000,00	99.178.500,00	39,67	83.028.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	550.000.000,00	99.067.500,00	18,01	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	87.500.000,00	87.500.000,00	100,00	84.000.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	0,00	99.600.300,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	430.100.000,00	348.160.000,00	80,95	336.400.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	33.800.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	307.100.000,00	243.250.000,00	79,21	253.400.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	123.000.000,00	104.910.000,00	85,29	49.200.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	412.944.734,00	394.973.039,00	95,65	211.570.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	336.644.734,00	319.055.039,00	94,77	211.570.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	268.640.000,00	252.037.709,00	93,82	199.540.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	28.000.000,00	27.777.330,00	99,20	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	25.264.734,00	25.060.000,00	99,19	5.660.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	1.920.000,00	96,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.840.000,00	5.760.000,00	98,63	2.920.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,00	6.500.000,00	94,20	3.450.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	76.300.000,00	75.918.000,00	99,50	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	76.300.000,00	75.918.000,00	99,50	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.139.747.839,00	2.367.622.775,00	75,41	2.198.743.281,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.139.747.839,00	2.367.622.775,00	75,41	2.198.743.281,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.139.747.839,00	2.367.622.775,00	75,41	2.198.743.281,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>73.884.174.298,00</b>	<b>64.953.336.501,00</b>	<b>87,91</b>	<b>57.945.205.518,30</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.340.800.620,00</b>	<b>2.318.802.298,00</b>	<b>99,06</b>	<b>4.713.748.491,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	775.800.620,00	755.273.779,00	97,35	2.298.225.710,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	64.141.350,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	64.141.350,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0,00	0,00	0,00	64.141.350,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	243.500.000,00	239.300.000,00	98,28	663.401.800,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	243.500.000,00	239.300.000,00	98,28	663.401.800,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	15.500.000,00	15.300.000,00	98,71	342.250.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	228.000.000,00	224.000.000,00	98,25	321.151.800,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	272.798.320,00	260.693.779,00	95,56	901.559.110,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	50.000.000,00	49.995.782,00	99,99	821.740.900,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	49.995.782,00	99,99	821.740.900,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	222.798.320,00	210.697.997,00	94,57	79.818.210,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	139.930.000,00	129.499.997,00	92,55	79.818.210,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	82.868.320,00	81.198.000,00	97,98	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	20.880.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	20.880.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	20.880.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	386.037.450,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	386.037.450,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	17.960.000,00
5.2.02.08.01.0041	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	368.077.450,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	209.502.300,00	205.280.000,00	97,98	262.206.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	154.399.100,00	154.250.000,00	99,90	249.306.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	154.399.100,00	154.250.000,00	99,90	249.306.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	55.103.200,00	51.030.000,00	92,61	12.900.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	55.103.200,00	51.030.000,00	92,61	12.900.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.505.000.000,00	1.503.958.519,00	99,93	2.055.774.071,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.505.000.000,00	1.503.958.519,00	99,93	1.964.776.764,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.310.000.000,00	1.309.022.922,00	99,93	1.964.776.764,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	130.000.000,00	129.779.385,00	99,83	198.584.455,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	0,00	0,00	0,00	349.745.847,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	830.000.000,00	829.827.529,00	99,98	1.266.675.762,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	149.770.700,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	350.000.000,00	349.416.008,00	99,83	0,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	195.000.000,00	194.935.597,00	99,97	0,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	195.000.000,00	194.935.597,00	99,97	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	90.997.307,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	90.997.307,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	90.997.307,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.000.000,00	59.570.000,00	99,28	359.748.710,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	39.988.860,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	0,00	0,00	0,00	39.988.860,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	39.988.860,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	60.000.000,00	59.570.000,00	99,28	319.759.850,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	60.000.000,00	59.570.000,00	99,28	319.759.850,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	60.000.000,00	59.570.000,00	99,28	319.759.850,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>2.340.800.620,00</b>	<b>2.318.802.298,00</b>	<b>99,06</b>	<b>4.713.748.491,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>76.224.974.918,00</b>	<b>67.272.138.799,00</b>	<b>88,25</b>	<b>62.658.954.009,30</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(76.074.974.918,00)</b>	<b>(67.195.819.399,00)</b>	<b>88,33</b>	<b>(62.592.003.009,30)</b>

Kab. Muara Enim, 15 Januari 2025  
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan  
Peternakan

Ulii Amri, Sp.,MM  
NIP. 197007031995031002



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

DINAS PERKEBUNAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>43.874.450,00</b>	<b>97,50</b>	<b>38.409.010,00</b>
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	45.000.000,00	43.874.450,00	97,50	38.409.010,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	45.000.000,00	43.874.450,00	97,50	38.409.010,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	45.000.000,00	43.874.450,00	97,50	38.409.010,00
4.1.04.01.05.0005	Hasil Penjualan Tanaman	0,00	0,00	0,00	38.409.010,00
4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	45.000.000,00	43.874.450,00	97,50	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>43.874.450,00</b>	<b>97,50</b>	<b>38.409.010,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>43.874.450,00</b>	<b>97,50</b>	<b>38.409.010,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>25.619.063.641,00</b>	<b>20.736.974.262,00</b>	<b>80,94</b>	<b>20.890.519.619,20</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>24.957.138.641,00</b>	<b>20.102.445.262,00</b>	<b>80,55</b>	<b>19.766.677.349,20</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	7.377.425.618,00	6.515.731.848,00	88,32	5.827.128.285,20
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.789.256.584,00	3.414.300.538,00	90,10	3.195.949.310,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.844.793.405,00	2.639.143.986,00	92,77	2.452.060.700,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.491.532.075,00	2.307.387.828,00	92,61	2.271.177.300,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	353.261.330,00	331.756.158,00	93,91	180.883.400,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	298.449.480,00	232.410.893,00	77,87	219.675.724,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	231.824.480,00	197.177.625,00	85,05	196.250.608,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	66.625.000,00	35.233.268,00	52,88	23.425.116,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	133.526.750,00	126.120.000,00	94,45	124.870.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	133.526.750,00	126.120.000,00	94,45	124.870.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	269.062.500,00	236.540.000,00	87,91	208.480.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	269.062.500,00	236.540.000,00	87,91	208.480.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	55.288.500,00	43.850.000,00	79,31	48.355.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.547.500,00	24.495.000,00	92,27	36.585.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	28.741.000,00	19.355.000,00	67,34	11.770.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	152.968.376,00	125.503.860,00	82,05	126.517.740,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	113.608.376,00	101.677.680,00	89,50	109.136.940,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	39.360.000,00	23.826.180,00	60,53	17.380.800,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	35.127.570,00	10.695.560,00	30,45	15.953.203,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	35.127.570,00	10.695.560,00	30,45	15.953.203,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	40.003,00	36.239,00	90,59	36.943,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	33.661,00	30.724,00	91,27	33.459,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	6.342,00	5.515,00	86,96	3.484,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.580.009.034,00	3.093.951.310,00	86,42	2.586.978.975,20
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.580.009.034,00	3.093.951.310,00	86,42	2.586.978.975,20
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.273.466.853,00	2.841.120.773,00	86,79	2.455.590.719,20
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	306.542.181,00	252.830.537,00	82,48	131.388.256,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN	8.160.000,00	7.480.000,00	91,67	44.200.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.160.000,00	7.480.000,00	91,67	44.200.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	7.480.000,00	91,67	44.200.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.579.713.023,00	13.586.713.414,00	77,29	13.939.549.064,00
5.1.02.01	Belanja Barang	11.244.282.323,00	9.337.222.650,00	83,04	9.847.182.705,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.244.282.323,00	9.337.222.650,00	83,04	9.847.182.705,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	34.584.000,00	28.749.000,00	83,13	60.972.300,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	169.557.900,00	129.038.250,00	76,10	90.229.200,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	82.775.000,00	73.275.000,00	88,52	85.414.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	201.147.223,00	159.912.100,00	79,50	186.006.115,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0,00	354.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	284.605.900,00	217.736.100,00	76,50	135.154.200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.322.300,00	5.780.000,00	91,42	6.320.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.303.000,00	14.038.000,00	91,73	13.508.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.999.000,00	16.557.000,00	91,99	7.079.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	36.000.000,00	14.000.000,00	38,89	54.697.500,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.963.613.000,00	8.572.321.200,00	86,04	9.102.115.100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.230.000,00	59.000.000,00	71,75	49.221.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	321.395.000,00	18.066.000,00	5,62	15.375.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	23.786.190,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00	16.950.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.082.380.000,00	1.745.444.468,00	56,63	1.563.724.936,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	932.928.000,00	810.064.800,00	86,83	693.196.030,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.000.000,00	24.800.000,00	68,89	22.300.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	56.000.000,00	56.000.000,00	100,00	56.000.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	395.520.000,00	348.110.000,00	88,01	249.510.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	54.220.000,00	51.220.000,00	94,47	71.220.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00	127.560.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	24.000.000,00	18.000.000,00	75,00	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.120.000,00	1.178.284,00	28,60	1.128.284,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	21.068.000,00	17.725.250,00	84,13	6.361.708,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	125.550.000,00	112.641.461,00	89,72	86.866.355,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	19.200.000,00	9.860.000,00	51,35	11.050.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.200.000,00	14.085.330,00	86,95	13.973.885,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	9.850.000,00	7.500.000,00	76,14	14.286.048,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	31.200.000,00	8.944.475,00	28,67	8.939.750,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	105.202.000,00	53.179.648,00	50,55	42.807.946,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	105.202.000,00	53.179.648,00	50,55	42.807.946,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	97.500.000,00	53.500.000,00	54,87	43.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	90.000.000,00	53.500.000,00	59,44	13.000.000,00
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0102	Belanja Sewa Alat Ukur Lainnya	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	223.400.000,00	200.500.000,00	89,75	189.150.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	174.000.000,00	151.100.000,00	86,84	139.750.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	49.400.000,00	49.400.000,00	100,00	49.400.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	351.000.000,00	309.040.000,00	88,05	322.380.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	175.500.000,00	170.160.000,00	96,96	161.100.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	175.500.000,00	138.880.000,00	79,13	161.280.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.372.350.000,00	319.160.020,00	23,26	273.190.960,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.118.450.000,00	106.220.000,00	9,50	38.400.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	244.900.000,00	212.940.020,00	86,95	213.290.960,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	475.330.000,00	440.612.146,00	92,70	416.448.139,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	152.270.000,00	117.665.586,00	77,27	76.634.139,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	34.000.000,00	31.611.766,00	92,98	69.779.139,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	100.740.000,00	75.915.070,00	75,36	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9.000.000,00	1.923.750,00	21,38	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.880.000,00	4.740.000,00	97,13	4.005.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000,00	3.475.000,00	95,21	2.850.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	323.060.000,00	322.946.560,00	99,96	339.814.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	323.060.000,00	322.946.560,00	99,96	339.814.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.777.720.700,00	2.063.434.150,00	74,29	2.112.193.284,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.777.720.700,00	2.063.434.150,00	74,29	2.112.193.284,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.777.720.700,00	2.063.434.150,00	74,29	2.112.193.284,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>24.957.138.641,00</b>	<b>20.102.445.262,00</b>	<b>80,55</b>	<b>19.766.677.349,20</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>661.925.000,00</b>	<b>634.529.000,00</b>	<b>95,86</b>	<b>1.123.842.270,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	294.150.000,00	267.100.000,00	90,80	870.133.270,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	418.300.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	418.300.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	418.300.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	62.160.000,00	57.200.000,00	92,02	328.086.030,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	62.160.000,00	57.200.000,00	92,02	328.086.030,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	184.831.650,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	62.160.000,00	57.200.000,00	92,02	48.060.225,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	95.194.155,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	231.990.000,00	209.900.000,00	90,48	123.747.240,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	231.990.000,00	209.900.000,00	90,48	69.513.750,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	231.990.000,00	209.900.000,00	90,48	69.513.750,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	54.233.490,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	54.233.490,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	367.775.000,00	367.429.000,00	99,91	253.709.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	367.775.000,00	367.429.000,00	99,91	253.709.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	367.775.000,00	367.429.000,00	99,91	253.709.000,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	127.650.000,00	127.600.000,00	99,96	0,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	170.000.000,00	169.926.000,00	99,96	0,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	70.125.000,00	69.903.000,00	99,68	62.467.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	191.242.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>661.925.000,00</b>	<b>634.529.000,00</b>	<b>95,86</b>	<b>1.123.842.270,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>25.619.063.641,00</b>	<b>20.736.974.262,00</b>	<b>80,94</b>	<b>20.890.519.619,20</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(25.574.063.641,00)</b>	<b>(20.693.099.812,00)</b>	<b>80,91</b>	<b>(20.852.110.609,20)</b>

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
--------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------



Kab. Muara Enim, 30 Januari 2025  
Kepala Dinas Perkebunan

Holika, S.Sos., M.Si.  
NIP. 196605121986031007



**PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM**  
**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.851.720.000,00</b>	<b>1.539.528.000,00</b>	<b>83,14</b>	<b>1.393.030.000,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	1.851.720.000,00	1.539.528.000,00	83,14	1.393.030.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.839.720.000,00	1.527.528.000,00	83,03	1.393.030.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.839.720.000,00	1.527.528.000,00	83,03	1.355.175.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	244.800.000,00	155.802.000,00	63,64	227.666.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	934.320.000,00	763.357.000,00	81,70	541.175.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	660.600.000,00	608.369.000,00	92,09	586.334.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	37.855.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perengkapannya	0,00	0,00	0,00	37.855.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.851.720.000,00</b>	<b>1.539.528.000,00</b>	<b>83,14</b>	<b>1.393.030.000,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.851.720.000,00</b>	<b>1.539.528.000,00</b>	<b>83,14</b>	<b>1.393.030.000,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>26.596.998.772,00</b>	<b>24.612.186.687,00</b>	<b>92,54</b>	<b>20.209.410.625,99</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>14.112.340.372,00</b>	<b>12.350.640.687,00</b>	<b>87,52</b>	<b>10.394.288.725,99</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	5.295.016.658,00	4.734.160.860,00	89,41	4.769.873.461,99
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.957.029.864,00	2.600.693.026,00	87,95	2.730.597.468,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.168.456.875,00	1.981.897.394,00	91,40	2.057.310.595,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.040.808.800,00	1.869.771.422,00	91,62	2.033.578.595,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	127.648.075,00	112.125.972,00	87,84	23.732.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	270.102.724,00	214.350.438,00	79,36	224.076.018,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	248.906.935,00	198.652.798,00	79,81	220.753.538,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	21.195.789,00	15.697.640,00	74,06	3.322.480,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	155.482.250,00	137.970.000,00	88,74	144.610.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	155.482.250,00	137.970.000,00	88,74	144.610.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	130.083.996,00	101.320.000,00	77,89	118.860.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	130.083.996,00	101.320.000,00	77,89	118.860.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	73.396.500,00	45.275.000,00	61,69	49.885.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	63.524.750,00	38.800.000,00	61,08	48.405.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9.871.750,00	6.475.000,00	65,59	1.480.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	146.770.530,00	115.509.900,00	78,70	126.083.220,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	134.051.037,00	105.371.100,00	78,61	123.765.780,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	12.719.493,00	10.138.800,00	79,71	2.317.440,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.644.207,00	4.341.914,00	34,34	9.744.758,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.644.207,00	4.341.914,00	34,34	9.744.758,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	92.782,00	28.380,00	30,59	27.877,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	88.554,00	25.808,00	29,14	27.181,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.228,00	2.572,00	60,83	696,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.337.986.794,00	2.133.467.834,00	91,25	2.032.475.993,99
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.337.986.794,00	2.133.467.834,00	91,25	2.032.475.993,99
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.236.699.756,00	2.045.986.694,00	91,47	2.012.339.093,99
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	101.287.038,00	87.481.140,00	86,37	20.136.900,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.817.323.714,00	7.616.479.827,00	86,38	5.624.415.264,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.476.052.447,00	1.911.941.400,00	77,22	1.361.689.272,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.126.052.447,00	1.566.941.400,00	73,70	1.361.689.272,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.160.800,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	48.655.460,00	11.280.000,00	23,18	45.509.600,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	336.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	56.084.500,00	53.980.000,00	96,25	10.415.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Angkutan	94.373.640,00	90.600.000,00	96,00	106.960.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	239.823.788,00	216.483.750,00	90,27	192.989.250,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	363.487.643,00	348.173.150,00	95,79	218.613.200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.096.700,00	5.000.000,00	98,10	4.765.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	42.832.271,00	42.564.000,00	99,37	51.929.600,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	68.452.570,00	67.466.500,00	98,56	61.044.200,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.800.700,00	3.490.000,00	91,83	3.260.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.730.000,00	4.550.000,00	96,19	60.125.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	995.120.000,00	545.384.000,00	54,81	439.976.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	92.431.500,00	74.595.000,00	80,70	86.920.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	26.473.500,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.995.000,00	4.950.000,00	99,10	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	7.492.500,00	7.425.000,00	99,10	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	55.000.000,00	50.000.000,00	90,91	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	41.179.375,00	41.000.000,00	99,56	52.708.922,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	350.000.000,00	345.000.000,00	98,57	0,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	350.000.000,00	345.000.000,00	98,57	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.561.263.117,00	3.118.583.303,00	87,57	2.245.544.932,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.108.713.117,00	1.858.371.578,00	88,13	1.953.151.007,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	62.250.000,00	59.250.000,00	95,18	21.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	543.960.000,00	488.940.000,00	89,89	478.170.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	211.800.000,00	171.690.000,00	81,06	193.080.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	30.600.000,00	17.400.000,00	56,86	15.600.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	652.040.000,00	589.471.000,00	90,40	612.835.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	249.120.000,00	233.880.000,00	93,88	236.880.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	38.000.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	0,00	0,00	0,00	3.325.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	17.764.035,00	11.845.541,00	66,68	8.024.033,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	21.827.378,00	11.913.858,00	54,58	10.394.464,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	214.946.804,00	188.291.429,00	87,60	228.603.510,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	17.280.000,00	14.040.000,00	81,25	14.460.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.124.900,00	1.649.750,00	9,63	8.279.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	0,00	0,00	43.778.925,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	43.778.925,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	190.550.000,00	68.250.000,00	35,82	124.240.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	161.000.000,00	38.700.000,00	24,04	77.400.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	46.840.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	227.000.000,00	220.850.000,00	97,29	115.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	227.000.000,00	220.850.000,00	97,29	115.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	800.000.000,00	790.261.725,00	98,78	0,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	350.000.000,00	345.262.725,00	98,65	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	450.000.000,00	444.999.000,00	98,89	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	235.000.000,00	180.850.000,00	76,96	9.375.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	176.500.000,00	176.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	58.500.000,00	4.350.000,00	7,44	9.375.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	95.073.800,00	75.988.964,00	79,93	13.450.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.073.800,00	75.988.964,00	79,93	13.450.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	69.473.800,00	62.538.964,00	90,02	0,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.150.000,00	9.150.000,00	100,00	9.150.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.920.000,00	2.920.000,00	100,00	2.920.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.380.000,00	1.380.000,00	100,00	1.380.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.669.934.350,00	2.494.966.160,00	93,45	2.003.731.060,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.669.934.350,00	2.494.966.160,00	93,45	2.003.731.060,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.248.646.850,00	2.198.927.967,00	97,79	2.003.731.060,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	421.287.500,00	296.038.193,00	70,27	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>14.112.340.372,00</b>	<b>12.350.640.687,00</b>	<b>87,52</b>	<b>10.394.288.725,99</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>12.484.658.400,00</b>	<b>12.261.546.000,00</b>	<b>98,21</b>	<b>9.815.121.900,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.484.658.400,00	1.470.503.000,00	99,05	2.007.493.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	95.500.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	95.500.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	95.500.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	150.000.000,00	148.073.000,00	98,72	73.720.000,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	150.000.000,00	148.073.000,00	98,72	49.720.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	50.000.000,00	48.889.000,00	97,78	0,00
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	100.000.000,00	99.184.000,00	99,18	49.720.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.138.658.400,00	1.132.880.000,00	99,49	1.482.233.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	88.245.000,00	87.600.000,00	99,27	339.708.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	54.945.000,00	54.600.000,00	99,37	75.368.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	33.300.000,00	33.000.000,00	99,10	264.340.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.050.413.400,00	1.045.280.000,00	99,51	1.100.803.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	92.130.000,00	88.780.000,00	96,36	64.595.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	84.625.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	44.500.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	930.283.400,00	928.500.000,00	99,81	907.083.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	41.722.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	41.722.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	196.000.000,00	189.550.000,00	96,71	161.800.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	172.000.000,00	165.700.000,00	96,34	143.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	172.000.000,00	165.700.000,00	96,34	143.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	24.000.000,00	23.850.000,00	99,38	18.800.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	24.000.000,00	23.850.000,00	99,38	18.800.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	174.240.000,00
5.2.02.13.02	Belanja Modal Produksi	0,00	0,00	0,00	174.240.000,00
5.2.02.13.02.0002	Belanja Modal Produksi Lainnya	0,00	0,00	0,00	174.240.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.000.000.000,00	10.791.043.000,00	98,10	7.512.368.900,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	11.000.000.000,00	10.791.043.000,00	98,10	7.313.728.900,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.000.000.000,00	10.791.043.000,00	98,10	7.313.728.900,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.000.000.000,00	989.440.000,00	98,94	297.323.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	10.000.000.000,00	9.801.603.000,00	98,02	7.016.405.900,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	198.640.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	198.640.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	198.640.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	295.260.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	295.260.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	295.260.000,00
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	0,00	0,00	0,00	295.260.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>12.484.658.400,00</b>	<b>12.261.546.000,00</b>	<b>98,21</b>	<b>9.815.121.900,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>26.596.998.772,00</b>	<b>24.612.186.687,00</b>	<b>92,54</b>	<b>20.209.410.625,99</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(24.745.278.772,00)</b>	<b>(23.072.658.687,00)</b>	<b>93,24</b>	<b>(18.816.380.625,99)</b>

Kab. Muara Enim, 31 Januari 2025  
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan  
Sumber Daya Mineral

Drs. Bhakti, M.Si.  
NIP. 197403131993021001



**PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM SEKRETARIAT DAERAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**  
**01 Januari 2024 Sam pai 31 Desember 2024**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.136.327.00</b>
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	0.00	8.136.327.00
4.1.04.05	Jasa Giro	0.00	0.00	0.00	8.136.327.00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0.00	0.00	0.00	8.136.327.00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0.00	0.00	0.00	8.136.327.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.136.327.00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.136.327.00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>100.906.711.095.00</b>	<b>91.218.439.628.00</b>	<b>90.40</b>	<b>85.934.082.384.38</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>84.686.916.643.00</b>	<b>75.843.094.628.00</b>	<b>89.56</b>	<b>70.354.682.732.38</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	23.049.548.428.00	21.106.058.521.00	91.57	18.669.489.382.38
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	9.125.805.590.00	8.578.495.015.00	91.81	7.980.721.846.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	6.813.236.679.00	6.454.104.693.00	94.73	6.020.824.696.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	6.586.662.061.00	6.233.056.293.00	94.63	6.008.958.696.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	226.574.618.00	221.048.400.00	97.56	11.866.000.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	691.010.144.00	647.201.328.00	93.66	621.062.592.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	679.188.858.00	637.270.168.00	93.83	621.062.592.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.821.286.00	9.931.160.00	84.01	0.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	427.127.750.00	319.210.000.00	74.73	321.485.000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	427.127.750.00	319.210.000.00	74.73	321.485.000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	579.346.400.00	381.015.000.00	65.77	418.607.000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	579.346.400.00	381.015.000.00	65.77	418.607.000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	209.597.133.00	195.620.000.00	93.33	196.225.000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	196.513.004.00	182.855.000.00	93.05	195.485.000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	13.084.129.00	12.765.000.00	97.56	740.000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	385.850.140.00	367.024.560.00	95.12	381.001.620.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	376.571.327.00	358.623.840.00	95.23	380.711.940.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.278.813.00	8.400.720.00	90.54	289.680.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.509.026.00	14.230.524.00	72.94	21.427.802.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.509.026.00	14.230.524.00	72.94	21.427.802.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	128.318.00	88.910.00	69.29	88.136.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	117.943.00	84.399.00	71.56	88.112.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.375.00	4.511.00	43.48	24.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.339.197.464.00	10.319.574.936.00	91.01	8.837.754.702.38
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.066.098.656.00	7.361.002.718.00	91.26	6.309.943.489.38
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.877.846.788.00	7.187.682.642.00	91.24	6.300.049.556.38
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	188.251.868.00	173.320.076.00	92.07	9.893.933.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.046.767.374.00	2.732.341.031.00	89.68	2.333.812.853.00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.957.319.008.00	2.655.329.112.00	89.79	2.328.974.253.00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	89.448.366.00	77.011.919.00	86.10	4.838.600.00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	226.331.434.00	226.231.187.00	99.96	193.998.360.00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	226.331.434.00	226.231.187.00	99.96	193.998.360.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.189.500.000.00	1.164.150.000.00	97.87	750.750.000.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.189.500.000.00	1.164.150.000.00	97.87	750.750.000.00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.189.500.000.00	1.164.150.000.00	97.87	750.750.000.00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	55.843.240.00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	18.000.000.00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	18.000.000.00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	2.520.000.00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	2.520.000.00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	32.400.000.00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	32.400.000.00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	2.896.800.00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	2.896.800.00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	26.400.00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	26.400.00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	40.00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0.00	0.00	0.00	40.00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.395.045.374.00	1.243.838.570.00	89.16	1.044.419.594.00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.395.045.374.00	1.243.838.570.00	89.16	1.044.419.594.00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.395.045.374.00	1.243.838.570.00	89.16	1.044.419.594.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.283.003.215.00	54.406.671.107.00	88.78	51.308.199.350.00
5.1.02.01	Belanja Barang	17.995.374.887.00	16.436.332.387.00	91.34	15.271.955.352.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	17.995.374.887.00	16.436.332.387.00	91.34	15.271.955.352.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	899.122.896.00	384.897.050.00	63.33	575.582.100.00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	17.090.175.00	11.475.000.00	67.14	0.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.372.310.000.00	1.245.300.000.00	90.74	1.146.000.000.00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	6.000.000.00	5.960.000.00	99.33	5.940.000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.701.051.879.00	2.462.014.667.00	91.15	2.455.665.443.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.357.342.595.00	2.112.173.850.00	89.60	2.197.413.800.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	60.362.300.00	37.320.000.00	61.83	29.105.000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	73.500.000.00	73.500.000.00	100.00	51.750.000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	797.649.627.00	682.186.500.00	85.52	383.237.909.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	280.146.520.00	255.613.000.00	91.24	383.562.000.00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	181.280.600.00	179.000.000.00	98.74	176.800.000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	762.718.100.00	758.370.000.00	99.43	416.920.100.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada	152.800.000.00	137.990.000.00	90.31	332.030.000.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	984.000.000.00	928.352.670.00	94.34	968.074.000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.963.772.200.00	1.622.306.000.00	82.61	1.527.788.000.00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.600.000.000.00	4.494.410.150.00	97.70	3.995.247.000.00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	366.616.000.00	361.316.000.00	98.55	17.400.000.00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	8.000.000.00	7.800.000.00	97.50	35.940.000.00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	16.000.000.00	15.700.000.00	98.13	59.970.000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.000.000.00	15.200.000.00	95.00	29.940.000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	84.998.045.00	44.600.000.00	52.47	105.620.000.00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	12.000.000.00	11.900.000.00	99.17	47.100.000.00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0.00	0.00	0.00	15.500.000.00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	2.910.200.00	2.870.000.00	98.62	2.870.000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	310.000.000.00	309.560.000.00	99.86	243.580.000.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	279.703.750.00	276.517.500.00	98.86	68.920.000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	17.455.936.184.00	14.537.432.988.00	83.28	13.680.820.399.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.169.090.084.00	10.251.684.218.00	84.24	8.883.788.853.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.104.400.000.00	2.870.150.000.00	92.45	1.262.420.000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	522.800.000.00	455.900.000.00	87.20	571.612.500.00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.000.000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.711.500.000.00	1.385.410.000.00	80.95	1.638.470.000.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	364.200.000.00	332.730.000.00	91.36	336.150.000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	440.280.000.00	196.340.000.00	44.59	210.610.000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.858.000.000.00	1.700.500.000.00	91.52	1.701.950.000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	731.880.000.00	515.740.000.00	70.47	516.810.000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0.00	0.00	0.00	125.000.000.00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	138.000.000.00	89.500.000.00	64.86	81.500.000.00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	385.000.000.00	384.045.900.00	99.75	0.00

5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	70,000,000.00	40,000,000.00	57.14	40,000,000.00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	180,000,000.00	166,528,000.00	92.52	170,746,500.00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	97,500,000.00	72,000,000.00	73.85	10,200,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	57,376,000.00	57,375,935.00	100.00	67,843,332.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	532,364,130.00	390,060,625.00	73.27	365,858,311.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1,363,984,854.00	1,059,790,076.00	77.70	1,397,116,332.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	317,957,500.00	305,486,500.00	96.08	317,962,500.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	96,500,000.00	87,400,000.00	90.57	7,200,000.00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	15,000,000.00	14,746,182.00	98.31	0.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	180,347,600.00	127,981,000.00	70.96	59,339,378.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	737,592,100.00	610,293,770.00	82.74	495,197,860.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	737,592,100.00	610,293,770.00	82.74	495,197,860.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1,418,100,000.00	983,450,000.00	69.35	627,810,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	413,000,000.00	389,200,000.00	94.24	86,500,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1,005,100,000.00	594,250,000.00	59.12	541,310,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1,561,554,000.00	1,315,960,000.00	84.27	1,058,463,686.00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00	20,540,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	140,794,000.00	110,540,000.00	78.51	112,491,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1,420,760,000.00	1,205,420,000.00	84.84	867,682,686.00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0.00	0.00	0.00	57,750,000.00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1,569,600,000.00	1,376,045,000.00	87.67	2,515,560,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1,493,600,000.00	1,320,045,000.00	88.38	2,409,110,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	76,000,000.00	56,000,000.00	73.68	6,000,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0.00	0.00	0.00	100,450,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1,914,339,144.00	1,714,272,034.00	89.55	1,741,129,498.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	704,321,144.00	620,726,500.00	88.13	631,802,500.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	238,026,144.00	235,100,000.00	98.77	251,750,000.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	47,620,000.00	47,000,000.00	98.70	164,690,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	213,500,000.00	185,620,000.00	86.94	174,956,000.00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	148,375,000.00	142,490,000.00	69.07	0.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	29,200,000.00	28,916,000.00	99.03	29,200,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	27,600,000.00	21,600,500.00	78.26	11,206,500.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,210,018,000.00	1,093,545,534.00	90.37	1,109,326,998.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	430,018,000.00	419,924,172.00	97.65	384,301,034.00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0.00	0.00	0.00	24,725,200.00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	240,000,000.00	192,383,215.00	80.16	237,430,000.00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	400,000,000.00	399,803,663.00	99.95	396,677,525.00
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	140,000,000.00	81,434,484.00	58.17	66,193,185.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	22,060,853,000.00	19,942,011,954.00	90.40	19,409,137,416.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22,060,853,000.00	19,942,011,954.00	90.40	19,409,137,416.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22,058,843,000.00	19,940,001,954.00	90.39	19,409,137,416.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,010,000.00	2,010,000.00	100.00	0.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1,856,500,000.00	1,776,621,744.00	95.70	1,205,156,685.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1,856,500,000.00	1,776,621,744.00	95.70	1,205,156,685.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1,856,500,000.00	1,776,621,744.00	95.70	1,205,156,685.00
5.1.05	Belanja Hibah	354,365,000.00	330,365,000.00	93.23	376,994,000.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	354,365,000.00	330,365,000.00	93.23	376,994,000.00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	354,365,000.00	330,365,000.00	93.23	376,994,000.00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	354,365,000.00	330,365,000.00	93.23	376,994,000.00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>84,686,916,643.00</b>	<b>75,843,094,628.00</b>	<b>89.56</b>	<b>70,354,682,732.38</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>16,219,794,452.00</b>	<b>15,375,345,000.00</b>	<b>94.79</b>	<b>15,579,399,652.00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,589,794,452.00	14,748,645,000.00	94.60	14,778,488,152.00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	79,500,000.00	78,540,000.00	98.79	0.00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	79,500,000.00	78,540,000.00	98.79	0.00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	79,500,000.00	78,540,000.00	98.79	0.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	10,115,960,000.00	9,523,960,000.00	94.15	11,021,842,152.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	10,115,960,000.00	9,523,960,000.00	94.15	11,021,842,152.00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6,890,960,000.00	6,436,960,000.00	93.41	9,348,850,000.00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	2,525,000,000.00	2,432,500,000.00	96.34	0.00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0.00	0.00	0.00	79,242,152.00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	700,000,000.00	654,500,000.00	93.50	1,593,750,000.00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0.00	0.00	0.00	39,500,000.00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0.00	0.00	0.00	39,500,000.00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	0.00	0.00	0.00	39,500,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3,821,252,660.00	3,596,605,000.00	94.12	2,449,176,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	394,900,000.00	388,400,000.00	98.35	188,400,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perangkat Kantor	269,900,000.00	264,200,000.00	97.89	164,300,000.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	125,000,000.00	124,200,000.00	99.36	24,100,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3,426,352,660.00	3,208,205,000.00	93.63	2,260,776,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	958,000,000.00	891,300,000.00	93.04	1,078,864,000.00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	46,750,000.00	45,620,000.00	97.58	50,105,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	980,504,420.00	888,665,000.00	90.63	349,940,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1,353,186,240.00	1,295,320,000.00	95.72	723,867,000.00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	87,912,000.00	87,300,000.00	99.30	58,000,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	315,000,000.00	313,990,000.00	99.68	382,000,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	315,000,000.00	313,990,000.00	99.68	382,000,000.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	315,000,000.00	313,990,000.00	99.68	49,900,000.00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0.00	0.00	0.00	34,600,000.00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0.00	0.00	0.00	297,500,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1,258,081,792.00	1,235,550,000.00	98.21	801,170,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	715,081,792.00	698,850,000.00	97.73	686,170,000.00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	198,000,000.00	198,000,000.00	100.00	0.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	517,081,792.00	500,850,000.00	96.86	686,170,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	543,000,000.00	536,700,000.00	98.84	115,000,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	180,000,000.00	173,700,000.00	96.50	115,000,000.00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	363,000,000.00	363,000,000.00	100.00	0.00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0.00	0.00	0.00	84,800,000.00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0.00	0.00	0.00	84,800,000.00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0.00	0.00	0.00	84,800,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	530,000,000.00	526,800,000.00	99.40	701,400,000.00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	530,000,000.00	526,800,000.00	99.40	701,400,000.00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	530,000,000.00	526,800,000.00	99.40	701,400,000.00
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	530,000,000.00	526,800,000.00	99.40	701,400,000.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0.00	99,511,500.00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00	99,511,500.00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00	0.00	99,511,500.00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	0.00	0.00	0.00	99,511,500.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100,000,000.00	99,900,000.00	99.90	0.00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	100,000,000.00	99,900,000.00	99.90	0.00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100,000,000.00	99,900,000.00	99.90	0.00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	100,000,000.00	99,900,000.00	99.90	0.00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>16,219,794,452.00</b>	<b>15,375,345,000.00</b>	<b>94.79</b>	<b>15,579,399,652.00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>100,906,711,095.00</b>	<b>91,218,439,628.00</b>	<b>90.40</b>	<b>85,934,082,384.38</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>-100,906,711,095.00</b>	<b>-91,218,439,628.00</b>	<b>90.40</b>	<b>-85,925,946,057.38</b>

Ir. Yulius, M.Si.



## PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

## SEKRETARIAT DPRD

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>92.631.268.157,00</b>	<b>82.313.624.346,00</b>	<b>88,86</b>	<b>79.471.906.642,50</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>90.863.527.457,00</b>	<b>80.574.109.346,00</b>	<b>88,68</b>	<b>78.119.702.642,50</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	31.620.958.197,00	30.442.816.311,00	96,27	35.635.470.981,50
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.000.768.817,00	2.484.498.157,00	82,80	2.169.431.107,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.320.429.078,00	1.940.848.950,00	83,64	1.646.147.669,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.151.160.588,00	1.794.762.164,00	83,43	1.634.281.669,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	169.268.490,00	146.086.786,00	86,30	11.866.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	215.687.034,00	182.569.100,00	84,65	162.596.066,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	190.472.034,00	176.738.548,00	92,79	162.596.066,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	25.215.000,00	5.830.552,00	23,12	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	132.416.654,00	94.320.000,00	71,23	130.230.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	132.416.654,00	94.320.000,00	71,23	130.230.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	132.092.000,00	90.140.000,00	68,24	66.293.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	132.092.000,00	90.140.000,00	68,24	66.293.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	68.883.500,00	62.320.000,00	90,47	52.395.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	58.261.000,00	53.690.000,00	92,15	51.840.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	10.622.500,00	8.630.000,00	81,24	555.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	122.425.983,00	109.643.880,00	89,56	104.429.640,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	106.762.068,00	103.415.760,00	96,87	104.212.380,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15.663.915,00	6.228.120,00	39,76	217.260,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.239.551,00	4.626.657,00	56,15	7.318.452,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.715.069,00	4.626.657,00	68,90	7.318.452,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.524.482,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	595.017,00	29.570,00	4,97	21.280,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	526.891,00	25.878,00	4,91	21.256,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	68.126,00	3.692,00	5,42	24,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.205.274.468,00	1.923.773.874,00	87,24	1.582.487.380,50
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.205.274.468,00	1.923.773.874,00	87,24	1.582.487.380,50
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.062.309.428,00	1.811.225.410,00	87,83	1.572.421.247,50
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	142.965.040,00	112.548.464,00	78,72	10.066.133,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.021.794.912,00	25.641.424.280,00	98,54	31.490.432.494,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.003.170.000,00	99,92	1.004.010.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.003.170.000,00	99,92	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.481.200,00	126.291.900,00	87,41	129.977.400,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.481.200,00	126.291.900,00	87,41	129.977.400,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00	133.325.220,00	85,23	135.570.240,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00	133.325.220,00	85,23	135.570.240,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.974.000,00	99,90	86.058.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.974.000,00	99,90	86.058.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.454.596.500,00	99,92	1.455.814.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.454.596.500,00	99,92	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	125.149.500,00	104.291.250,00	83,33	125.149.500,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	125.149.500,00	104.291.250,00	83,33	125.149.500,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.780.100,00	11.205.600,00	37,63	13.337.100,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.780.100,00	11.205.600,00	37,63	13.337.100,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	100,00	7.938.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	100,00	7.938.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00	1.308.300.000,00	98,89	1.984.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.323.000.000,00	1.308.300.000,00	98,89	1.984.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	139.000.000,00	99.750.886,00	71,76	88.647.898,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	139.000.000,00	99.750.886,00	71,76	88.647.898,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.958.569.412,00	5.885.953.924,00	98,78	10.429.367.856,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	110.369.412,00	80.316.548,00	72,77	77.106.288,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.800.000,00	2.059.344,00	42,90	2.065.392,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.200.000,00	6.178.032,00	85,81	6.196.176,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.836.200.000,00	5.797.400.000,00	99,34	10.344.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.159.500.000,00	7.159.500.000,00	100,00	8.100.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.159.500.000,00	7.159.500.000,00	100,00	8.100.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	502.005.000,00	331.065.000,00	65,95	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	502.005.000,00	331.065.000,00	65,95	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.242.569.260,00	50.131.293.035,00	84,62	42.484.231.661,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.325.163.030,00	1.983.787.930,00	85,32	1.691.329.600,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.325.163.030,00	1.983.787.930,00	85,32	1.691.329.600,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.732.800,00	1.732.800,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.880.000,00	7.700.000,00	51,75	3.425.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.000.000,00	2.700.000,00	90,00	2.820.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.160.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	233.236.400,00	181.784.900,00	77,94	105.809.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	295.163.000,00	209.799.900,00	71,08	194.794.600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.999.000,00	4.100.000,00	45,56	7.440.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	30.686.330,00	30.686.330,00	100,00	30.822.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.574.000,00	16.574.000,00	100,00	14.644.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00	0,00	20.273.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	738.420.000,00	575.825.000,00	77,98	551.902.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	10.578.000,00	8.695.000,00	82,20	0,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	29.250.000,00	28.440.000,00	97,23	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	191.403.000,00	186.750.000,00	97,57	189.900.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	198.000.000,00	193.500.000,00	97,73	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	201.474.000,00	195.750.000,00	97,16	215.490.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	166.216.500,00	164.250.000,00	98,82	165.600.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	180.000.000,00	175.500.000,00	97,50	177.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.890.730.150,00	2.927.442.597,00	75,24	2.888.915.254,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.935.283.150,00	2.108.708.617,00	71,84	2.534.878.498,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	284.620.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	549.600.000,00	535.560.000,00	97,45	45.720.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.666.197.950,00	1.006.500.000,00	60,41	1.297.966.600,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	128.400.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00	77.040.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	133.699.500,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	691.200,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	94.941.000,00	68.952.500,00	72,63	28.828.634,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	346.596.000,00	345.691.442,00	99,74	377.114.664,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	187.800.000,00	123.406.000,00	65,71	132.640.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.000.000,00	7.494.700,00	62,46	7.495.200,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	38.857.000,00	21.103.975,00	54,31	21.353.900,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	188.447.000,00	179.571.980,00	95,29	149.811.756,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	188.447.000,00	179.571.980,00	95,29	149.811.756,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	153.730.000,00	128.750.000,00	83,75	1.800.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	153.730.000,00	128.750.000,00	83,75	1.800.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.270.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.270.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	603.000.000,00	510.412.000,00	84,65	202.425.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	157.425.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	567.000.000,00	510.412.000,00	90,02	45.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	874.306.480,00	802.901.005,00	91,83	1.486.870.935,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	689.878.480,00	618.499.605,00	89,65	624.654.500,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	44.040.000,00	44.009.891,00	99,93	439.842.525,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	475.090.000,00	475.059.714,00	99,99	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	43.595.625,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	14.300.000,00	7.100.000,00	49,65	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	23.550.000,00	800.000,00	3,40	7.500.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	109.598.480,00	80.040.000,00	73,03	67.000.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	0,00	0,00	54.983.850,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000,00	4.864.000,00	44,42	7.180.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.350.000,00	6.626.000,00	64,02	4.552.500,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	184.428.000,00	184.401.400,00	99,99	862.216.435,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	184.428.000,00	184.401.400,00	99,99	712.966.435,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	0,00	0,00	149.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	52.152.369.600,00	44.417.161.503,00	85,17	36.417.115.872,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	52.152.369.600,00	44.417.161.503,00	85,17	36.417.115.872,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.919.917.600,00	44.417.161.503,00	85,55	36.417.115.872,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	232.452.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>90.863.527.457,00</b>	<b>80.574.109.346,00</b>	<b>88,68</b>	<b>78.119.702.642,50</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.767.740.700,00</b>	<b>1.739.515.000,00</b>	<b>98,40</b>	<b>1.352.204.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.767.740.700,00	1.739.515.000,00	98,40	1.181.964.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	421.300.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	421.300.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	421.300.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.718.200.700,00	1.690.415.000,00	98,38	620.984.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.150.000,00	10.100.000,00	99,51	14.950.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.150.000,00	10.100.000,00	99,51	14.950.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.708.050.700,00	1.680.315.000,00	98,38	606.034.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.155.533.200,00	1.129.620.000,00	97,76	373.534.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	552.517.500,00	550.695.000,00	99,67	183.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	49.540.000,00	49.100.000,00	99,11	139.680.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	49.540.000,00	49.100.000,00	99,11	124.560.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	49.540.000,00	49.100.000,00	99,11	124.560.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	15.120.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	15.120.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	170.240.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	170.240.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	170.240.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	170.240.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>1.767.740.700,00</b>	<b>1.739.515.000,00</b>	<b>98,40</b>	<b>1.352.204.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>92.631.268.157,00</b>	<b>82.313.624.346,00</b>	<b>88,86</b>	<b>79.471.906.642,50</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(92.631.268.157,00)</b>	<b>(82.313.624.346,00)</b>	<b>88,86</b>	<b>(79.471.906.642,50)</b>

Kab. Muara Enim, 30 Januari 2025  
Plt. Kepala Sekretariat DPRD

Romza Aidi, S.IP., M.Si.  
NIP. 196909211990031006



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	120,328,606,359.00	117,178,991,897.00	97.38	52,991,940,491.80
5.1	BELANJA OPERASI	119,809,305,269.00	116,664,761,897.00	97.38	52,551,458,491.80
5.1.01	Belanja Pegawai	3,905,654,046.00	3,098,165,974.00	79.33	2,764,140,112.80
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,989,111,859.00	1,606,913,022.00	80.79	1,494,369,513.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,432,364,653.00	1,201,117,792.00	83.86	1,087,877,200.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,392,984,365.00	1,178,692,592.00	84.62	1,087,877,200.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	39,380,288.00	22,425,200.00	56.95	0.00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	150,596,112.00	131,623,918.00	87.40	125,030,156.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	145,870,477.00	131,623,918.00	90.23	125,030,156.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4,725,635.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	103,391,750.00	79,590,000.00	76.98	84,230,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	103,391,750.00	79,590,000.00	76.98	84,230,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	148,379,000.00	94,200,000.00	63.49	100,120,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	148,379,000.00	94,200,000.00	63.49	100,120,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	37,326,375.00	25,610,000.00	68.61	21,085,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34,870,500.00	24,315,000.00	69.73	21,085,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2,455,875.00	1,295,000.00	52.73	0.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	107,846,054.00	70,754,340.00	65.61	68,726,580.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	104,961,927.00	70,247,400.00	66.93	68,726,580.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,884,127.00	506,940.00	17.58	0.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9,149,933.00	4,001,024.00	43.73	7,286,166.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9,149,933.00	4,001,024.00	43.73	7,286,166.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	57,982.00	15,948.00	27.51	14,411.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	56,668.00	15,367.00	27.12	14,411.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,314.00	581.00	44.22	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,916,542,187.00	1,491,252,952.00	77.81	1,269,770,599.80
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,916,542,187.00	1,491,252,952.00	77.81	1,269,770,599.80
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,888,821,032.00	1,473,632,245.00	78.02	1,269,770,599.80
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	27,721,155.00	17,620,707.00	63.56	0.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6,428,125,678.00	5,758,462,378.00	89.58	5,121,786,411.00
5.1.02.01	Belanja Barang	1,580,723,528.00	1,482,745,500.00	93.80	1,116,237,194.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,580,723,528.00	1,482,745,500.00	93.80	1,116,237,194.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0.00	0.00	0.00	16,790,000.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11,910,000.00	9,126,000.00	76.62	8,675,000.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5,802,000.00	5,700,000.00	98.24	5,260,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	50,188,164.00	49,650,000.00	98.93	48,904,694.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	380,730,755.00	346,737,000.00	91.07	232,977,200.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Cetak	150,232,500.00	133,421,300.00	88.81	76,844,800.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12,385,700.00	11,027,600.00	89.03	7,340,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	94,321,239.00	78,940,000.00	83.69	14,894,500.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14,906,330.00	14,226,000.00	95.44	5,978,000.00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan	3,756,240.00	3,300,000.00	87.85	0.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	11,213,600.00	11,210,000.00	99.97	9,410,000.00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2,600,000.00	2,570,000.00	98.85	1,440,000.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77,106,000.00	56,838,500.00	73.71	99,810,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	342,700,600.00	342,678,100.00	99.99	284,303,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0.00	0.00	0.00	11,130,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	25,587,500.00	25,533,500.00	99.79	0.00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	12,487,500.00	12,487,500.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	14,690,400.00	12,600,000.00	85.77	0.00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	369,105,000.00	365,700,000.00	99.08	304,480,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1,727,393,050.00	1,569,443,347.00	90.86	1,728,237,181.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1,135,876,550.00	1,001,682,347.00	88.19	1,123,982,181.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, dan	46,100,000.00	38,400,000.00	83.30	36,500,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	255,000,000.00	221,900,000.00	87.02	497,250,000.00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	178,500,000.00	178,500,000.00	100.00	166,350,000.00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10,800,000.00	10,800,000.00	100.00	10,800,000.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	252,720,000.00	228,590,000.00	90.45	139,310,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13,200,000.00	12,800,000.00	96.97	52,940,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0.00	0.00	0.00	38,520,000.00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	6,210,000.00	6,210,000.00	100.00	6,210,000.00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	21,225,000.00	21,225,000.00	100.00	21,250,000.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	198,500,000.00	188,700,000.00	95.06	65,800,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	16,500,000.00	16,500,000.00	100.00	13,500,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6,000,000.00	5,674,804.00	94.58	5,674,804.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6,900,000.00	2,409,750.00	34.92	2,390,250.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	96,333,300.00	53,144,218.00	55.17	49,127,127.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7,440,000.00	4,830,000.00	64.92	5,880,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13,448,250.00	11,998,575.00	89.22	8,680,000.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22,201,500.00	20,116,000.00	90.61	6,230,000.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	22,201,500.00	20,116,000.00	90.61	6,230,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	97,400,000.00	97,400,000.00	100.00	96,200,000.00
5.1.02.02.04.0011	Belanja Sewa Mesin Proses	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00	90,000,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7,400,000.00	7,400,000.00	100.00	4,200,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	354,415,000.00	343,745,000.00	96.99	306,375,000.00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00	20,540,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	55,915,000.00	45,245,000.00	80.92	16,035,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	298,500,000.00	298,500,000.00	100.00	269,800,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	117,500,000.00	106,500,000.00	90.64	195,450,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	95,000,000.00	95,000,000.00	100.00	92,000,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	22,500,000.00	11,500,000.00	51.11	13,450,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	238,730,000.00	210,261,000.00	88.07	89,640,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	156,630,000.00	128,161,000.00	81.82	16,740,000.00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	114,540,000.00	89,864,000.00	78.46	0.00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	14,350,000.00	10,627,000.00	74.06	0.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	17,070,000.00	17,000,000.00	99.59	12,600,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal	5,840,000.00	5,840,000.00	100.00	2,190,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Personal	4,830,000.00	4,830,000.00	100.00	1,950,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	82,100,000.00	82,100,000.00	100.00	72,900,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	82,100,000.00	82,100,000.00	100.00	72,900,000.00

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,350,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05	Belanja Hibah	109,475,525,545.00	107,808,133,545.00	98.48	44,665,531,968.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kem	107,765,266,939.00	106,097,874,939.00	98.45	42,986,349,960.00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifa	107,709,086,939.00	106,041,694,939.00	98.45	42,802,387,960.00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang E	107,709,086,939.00	106,041,694,939.00	98.45	42,802,387,960.00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Suk	0.00	0.00	0.00	183,962,000.00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba	0.00	0.00	0.00	183,962,000.00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang	56,180,000.00	56,180,000.00	100.00	0.00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan	56,180,000.00	56,180,000.00	100.00	0.00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,710,258,606.00	1,710,258,606.00	100.00	1,679,182,008.00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1,710,258,606.00	1,710,258,606.00	100.00	1,679,182,008.00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai	1,710,258,606.00	1,710,258,606.00	100.00	1,679,182,008.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	119,809,305,269.00	116,664,761,897.00	97.38	52,551,458,491.80
5.2	BELANJA MODAL	519,301,090.00	514,230,000.00	99.02	440,482,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	497,301,090.00	492,230,000.00	98.98	440,482,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	228,358,590.00	227,250,000.00	99.51	211,680,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	48,020,000.00	47,700,000.00	99.33	8,680,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	35,520,000.00	35,200,000.00	99.10	0.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12,500,000.00	12,500,000.00	100.00	8,680,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	180,338,590.00	179,550,000.00	99.56	203,000,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	140,321,090.00	140,050,000.00	99.81	138,680,000.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	36,000,000.00	35,500,000.00	98.61	19,470,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4,017,500.00	4,000,000.00	99.56	44,850,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	29,970,000.00	29,500,000.00	98.43	5,470,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	29,970,000.00	29,500,000.00	98.43	0.00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	29,970,000.00	29,500,000.00	98.43	0.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0.00	0.00	0.00	5,470,000.00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0.00	0.00	0.00	5,470,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	226,972,500.00	223,680,000.00	98.55	223,332,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	208,000,000.00	206,280,000.00	99.17	168,070,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	208,000,000.00	206,280,000.00	99.17	168,070,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	18,972,500.00	17,400,000.00	91.71	55,262,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	18,972,500.00	17,400,000.00	91.71	55,262,000.00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	12,000,000.00	11,800,000.00	98.33	0.00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	12,000,000.00	11,800,000.00	98.33	0.00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	12,000,000.00	11,800,000.00	98.33	0.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22,000,000.00	22,000,000.00	100.00	0.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	22,000,000.00	22,000,000.00	100.00	0.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	22,000,000.00	22,000,000.00	100.00	0.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	22,000,000.00	22,000,000.00	100.00	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	519,301,090.00	514,230,000.00	99.02	440,482,000.00
	JUMLAH BELANJA	120,328,606,359.00	117,178,991,897.00	97.38	52,991,940,491.80
	SURPLUS/DEFISIT	( 120,328,606,359.00 )	( 117,178,991,897.00 )	97.38	( 52,991,940,491.80 )

Kab. Muara Enim, 04 Maret 2025  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Drs. Andy Wijaya, M.M.  
NIP. 196609251986081001



**PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>102.459.839.167,00</b>	<b>127.467.613.012,00</b>	<b>124,41</b>	<b>119.769.836.524,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	102.118.871.536,00	126.743.710.193,00	124,11	118.951.424.120,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	115.244.229,00	0,00	2.908.009.968,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0,00	114.950.229,00	0,00	2.761.212.566,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0,00	114.950.229,00	0,00	2.761.212.566,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00	64.751.685,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00	64.751.685,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	5.768.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	5.768.000,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	294.000,00	0,00	76.277.717,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	294.000,00	0,00	76.277.717,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	17.150.539.602,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	5.186.867.225,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	5.186.867.225,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	1.181.277.115,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	1.181.277.115,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	127.122.088,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	127.122.088,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	98.476.206,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	98.476.206,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	290.735.723,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	290.735.723,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	10.266.061.245,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	10.266.061.245,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0,00	10.210.000,00	0,00	973.722.080,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	388.483.640,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	388.483.640,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisny	0,00	10.210.000,00	0,00	256.122.300,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisny	0,00	10.210.000,00	0,00	256.122.300,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	100.128.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	100.128.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	202.594.940,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	202.594.940,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00	26.393.200,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00	26.393.200,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	780.750.000,00	389.173.294,00	49,85	1.035.925.243,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	530.000.000,00	347.485.794,00	65,56	628.147.368,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	530.000.000,00	347.485.794,00	65,56	628.147.368,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	200.000.000,00	38.687.500,00	19,34	237.338.875,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	200.000.000,00	38.687.500,00	19,34	237.338.875,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	50.000.000,00	3.000.000,00	6,00	170.439.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	50.000.000,00	3.000.000,00	6,00	170.439.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	35.699.118.346,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	26.400.941,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	26.400.941,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	35.672.717.405,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	35.672.717.405,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	35.624.700,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	35.624.700,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	35.624.700,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	485.000.000,00	770.316.321,00	158,83	812.171.868,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	485.000.000,00	770.316.321,00	158,83	812.171.868,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	485.000.000,00	770.316.321,00	158,83	812.171.868,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	66.572.000,00	133,14	33.347.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	66.572.000,00	133,14	33.347.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	66.572.000,00	133,14	33.347.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.000.000.000,00	28.210.125.859,00	188,07	28.380.267.259,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	15.000.000.000,00	21.568.663.411,00	143,79	28.380.267.259,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	15.000.000.000,00	21.568.663.411,00	143,79	28.380.267.259,00
4.1.01.14.39	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	0,00	6.641.462.448,00	0,00	0,00
4.1.01.14.39.0001	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	0,00	6.641.462.448,00	0,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.508.829.041,00	12.783.812.382,00	121,65	11.222.742.800,00
4.1.01.15.01	PBBP2	10.508.829.041,00	12.783.812.382,00	121,65	11.222.742.800,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	10.508.829.041,00	12.783.812.382,00	121,65	11.222.742.800,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.600.000.000,00	14.737.491.007,00	94,47	20.699.955.254,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.600.000.000,00	5.596.015.607,00	155,44	4.899.646.272,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	3.600.000.000,00	5.596.015.607,00	155,44	4.899.646.272,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	12.000.000.000,00	9.141.475.400,00	76,18	15.800.308.982,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	12.000.000.000,00	9.141.475.400,00	76,18	15.800.308.982,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	59.694.292.495,00	69.660.765.101,00	116,70	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	15.872.751.993,00	19.312.440.299,00	121,67	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	7.083.329.493,00	7.724.139.788,00	109,05	0,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	8.789.422.500,00	11.588.300.511,00	131,84	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	41.000.000.000,00	46.508.143.251,00	113,43	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	33.000.000.000,00	37.719.072.104,00	114,30	0,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	8.000.000.000,00	8.789.071.147,00	109,86	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	2.104.437.576,00	3.034.418.627,00	144,19	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	2.020.466.342,00	2.888.407.395,00	142,96	0,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	43.613.500,00	108.028.882,00	247,70	0,00
4.1.01.19.03.0010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	40.357.734,00	37.982.350,00	94,11	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	20.000.000,00	74.633.500,00	373,17	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	20.000.000,00	74.633.500,00	373,17	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	697.102.926,00	731.129.424,00	104,88	0,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	250.000.000,00	285.565.788,00	114,23	0,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	1.500.000,00	4.120.000,00	274,67	0,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	7.875.002,00	7.272.625,00	92,35	0,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	23.721.221,00	2.844.540,00	11,99	0,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	414.006.703,00	431.326.471,00	104,18	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	340.967.631,00	723.902.819,00	212,31	818.412.404,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	340.967.631,00	723.902.819,00	212,31	818.412.404,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.576.000,00	6.495.207,00	252,14	2.456.834,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.576.000,00	6.495.207,00	252,14	701.623,00
4.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	0,00	1.755.211,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	197.000.000,00	514.491.557,00	261,16	266.612.401,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	197.000.000,00	514.491.557,00	261,16	19.950.986,00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	4.381.433,00
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	121.840,00
4.1.04.12.07.0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	2.233.377,00
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	6.624.607,00
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Denda Pajak Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	233.300.158,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.500.000,00	4.319.348,00	287,96	2.358.102,00
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	150.000,00	2.302.195,00	1.534,80	337.922,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	600.000,00	1.682.920,00	280,49	747.600,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	150.000,00	10.469,00	6,98	1.247.100,00
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	600.000,00	323.764,00	53,96	18.480,00
4.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	23.000.000,00	2.949.450,00	12,82	24.326.387,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	15.850.000,00	2.114.850,00	13,34	24.265.112,00
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	5.000.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.04.12.09.0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	834.600,00	41,73	16.275,00
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	150.000,00	12.947.908,00	8.631,94	0,00
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	12.947.908,00	0,00	0,00
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	282.258,00	0,00	45.042,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	282.258,00	0,00	45.042,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.500.000,00	3.168.736,00	211,25	53.789.441,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.500.000,00	3.168.736,00	211,25	53.789.441,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	10.400,00	5.200,00	50,00	42.200,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	10.400,00	5.200,00	50,00	42.200,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	648.684,00	0,00	126.951.745,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	648.684,00	0,00	126.951.745,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.231.231,00	81.617.537,00	1.560,20	162.545.058,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	5.231.231,00	81.617.537,00	1.560,20	162.545.058,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	110.000.000,00	96.976.934,00	88,16	179.285.194,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	30.000.000,00	25.682.367,00	85,61	0,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	80.000.000,00	71.294.567,00	89,12	179.285.194,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>102.459.839.167,00</b>	<b>127.467.613.012,00</b>	<b>124,41</b>	<b>119.769.836.524,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>102.459.839.167,00</b>	<b>127.467.613.012,00</b>	<b>124,41</b>	<b>119.769.836.524,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>28.021.548.762,00</b>	<b>24.274.812.540,34</b>	<b>86,63</b>	<b>21.760.715.568,60</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>25.089.400.562,00</b>	<b>21.398.648.704,82</b>	<b>85,29</b>	<b>20.613.688.768,60</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	15.313.987.330,00	12.071.998.717,00	78,83	11.482.469.577,60
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.603.931.228,00	4.874.583.387,00	86,99	4.776.241.407,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.257.198.788,00	3.866.246.658,00	90,82	3.749.890.878,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.217.818.500,00	3.843.821.458,00	91,13	3.749.890.878,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	39.380.288,00	22.425.200,00	56,95	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	447.944.704,00	348.110.962,00	77,71	349.025.622,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	443.219.069,00	348.110.962,00	78,54	349.025.622,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.725.635,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	403.962.750,00	285.710.000,00	70,73	279.250.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	403.962.750,00	285.710.000,00	70,73	279.250.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	87.310.000,00	72.660.000,00	83,22	62.770.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	87.310.000,00	72.660.000,00	83,22	62.770.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	144.725.875,00	95.905.000,00	66,27	109.060.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	142.270.000,00	94.610.000,00	66,50	109.060.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.455.875,00	1.295.000,00	52,73	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	254.007.719,00	201.689.700,00	79,40	220.301.640,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	251.123.592,00	201.182.760,00	80,11	220.301.640,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.884.127,00	506.940,00	17,58	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.651.185,00	4.205.910,00	48,62	5.882.846,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.651.185,00	4.205.910,00	48,62	5.882.846,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	130.207,00	55.157,00	42,36	60.421,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	128.893,00	54.576,00	42,34	60.421,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.314,00	581,00	44,22	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.484.794.574,00	3.874.975.019,00	86,40	3.340.688.355,60
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.484.794.574,00	3.874.975.019,00	86,40	3.340.688.355,60
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.457.073.419,00	3.857.230.516,00	86,54	3.340.688.355,60
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	27.721.155,00	17.744.503,00	64,01	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.225.261.528,00	3.322.440.311,00	63,58	3.365.539.815,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.712.266.087,00	3.184.471.586,00	67,58	3.237.839.721,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	65.775.154,00	65.775.154,00	100,00	92.287.570,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	417.410.202,00	417.410.202,00	100,00	469.710.667,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	14.673.009,00	14.673.009,00	100,00	12.577.221,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	39.037.500,00	8.419.936,00	21,57	25.692.401,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	931.369.780,00	931.369.780,00	100,00	1.161.357.330,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	374.593,00	374.593,00	100,00	0,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	24.250.000,00	22.700.428,00	93,61	20.023.912,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	2.500.000,00	1.811.484,00	72,46	0,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	750.000.000,00	716.352.780,00	95,51	1.149.474.190,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	592.272.059,00	0,00	0,00	4.167.018,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	711.750.000,00	172.500.000,00	24,24	302.549.412,00
5.1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(J,PBJT),	1.162.853.790,00	833.084.220,00	71,64	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	512.995.441,00	137.968.725,00	26,89	127.700.094,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	3.184.761,00	3.184.761,00	100,00	377.523,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	22.699.500,00	2.921.547,00	12,87	11.006.494,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.912.150,00	5.622.788,00	26,89	7.746.758,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	91.351.500,00	15.282.802,00	16,73	37.129.515,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.825.625,00	0,00	0,00	2.212.053,00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	743.750,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	375.250,00	350.371,00	93,37	0,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.812.500,00	0,00	0,00	4.661.103,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	87.730.549,00	6.214.556,00	7,08	9.408.468,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.439.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	6.427.500,00	749.294,00	11,66	2.748.451,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	24.054.075,00	8.492.056,00	35,30	2.958.664,00
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Zin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	10.516.376,00
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	12.750.000,00	1.400.550,00	10,98	1.134.752,00
5.1.01.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	37.799.937,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	111.937.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	118.751.281,00	93.750.000,00	78,95	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.775.413.232,00	9.326.649.987,82	95,41	9.131.219.191,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.543.095.195,00	1.412.349.023,00	91,53	1.608.235.202,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.543.095.195,00	1.412.349.023,00	91,53	1.608.235.202,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	38.626.000,00	34.418.568,00	89,11	32.825.339,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	100.903.600,00	100.221.130,00	99,32	97.815.043,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	341.048.125,00	292.688.500,00	85,82	275.204.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	991.200,00	980.000,00	98,87	980.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	707.000.420,00	679.322.000,00	96,09	787.079.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	31.595.400,00	24.178.825,00	76,53	23.423.920,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	118.804.490,00	116.543.000,00	98,10	125.378.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	42.116.560,00	41.949.000,00	99,60	28.255.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	9.000.000,00	8.000.000,00	88,89	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	903.000,00	900.000,00	99,67	900.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	85.000.000,00	83.028.000,00	97,68	63.680.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.106.400,00	30.120.000,00	44,88	110.700.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	42.994.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.418.459.197,00	3.139.897.810,00	91,85	3.184.768.398,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.930.546.797,00	2.784.916.722,00	95,03	2.806.503.781,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00	3.550.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.750.000,00	22.500.000,00	66,67	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	612.240.000,00	590.840.000,00	96,50	582.280.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.605.350.000,00	1.559.120.000,00	97,12	1.548.150.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	128.400.000,00	124.120.000,00	96,67	199.706.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	58.800.000,00	36.539.065,00	62,14	38.105.840,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	28.750.000,00	7.936.500,00	27,61	19.297.012,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	201.245.150,00	197.963.507,00	98,37	181.519.554,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	32.988.000,00	22.066.000,00	66,89	24.178.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	201.132.000,00	196.000.000,00	97,45	196.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.341.647,00	24.281.650,00	99,75	13.717.375,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	176.775.400,00	160.886.088,00	91,01	142.650.617,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	176.775.400,00	160.886.088,00	91,01	142.650.617,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.540.000,00	10.270.000,00	50,00	10.200.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.540.000,00	10.270.000,00	50,00	10.200.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	57.000.000,00	2.560.000,00	4,49	31.375.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	57.000.000,00	2.560.000,00	4,49	31.375.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	233.597.000,00	181.265.000,00	77,60	194.039.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	233.597.000,00	181.265.000,00	77,60	194.039.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	649.129.240,00	639.656.608,82	98,54	236.013.460,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.129.240,00	114.666.000,00	95,45	111.375.001,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11.010.000,00	10.910.000,00	99,09	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	3.045.001,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	46.500.000,00	44.300.000,00	95,27	58.425.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	23.599.240,00	20.650.000,00	87,50	23.040.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.500.000,00	9.406.000,00	99,01	9.405.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	29.520.000,00	29.400.000,00	99,59	17.460.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	529.000.000,00	524.990.608,82	99,24	124.638.459,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	180.000.000,00	178.289.117,17	99,05	0,00
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	199.000.000,00	197.950.000,00	99,47	0,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	150.000.000,00	148.751.491,65	99,17	124.638.459,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.164.729.600,00	4.134.746.546,00	99,28	4.102.202.131,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.164.729.600,00	4.134.746.546,00	99,28	4.102.202.131,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.164.729.600,00	4.134.746.546,00	99,28	4.102.202.131,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>25.089.400.562,00</b>	<b>21.398.648.704,82</b>	<b>85,29</b>	<b>20.613.688.768,60</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.932.148.200,00</b>	<b>2.876.163.835,52</b>	<b>98,09</b>	<b>1.147.026.800,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.502.148.200,00	2.448.534.000,00	97,86	1.072.706.800,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	640.000.000,00	608.200.000,00	95,03	638.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	640.000.000,00	608.200.000,00	95,03	638.000.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	640.000.000,00	608.200.000,00	95,03	638.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	724.427.000,00	716.404.000,00	98,89	242.266.800,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	41.700.000,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	41.700.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	724.427.000,00	716.404.000,00	98,89	200.566.800,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	637.487.000,00	630.804.000,00	98,95	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	29.865.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	86.940.000,00	85.600.000,00	98,46	170.701.800,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	700.000.000,00	699.300.000,00	99,90	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	700.000.000,00	699.300.000,00	99,90	0,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	700.000.000,00	699.300.000,00	99,90	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	437.721.200,00	424.630.000,00	97,01	192.440.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	90.000.000,00	89.280.000,00	99,20	148.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	90.000.000,00	89.280.000,00	99,20	148.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	347.721.200,00	335.350.000,00	96,44	44.440.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	215.971.200,00	205.900.000,00	95,34	44.440.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	131.750.000,00	129.450.000,00	98,25	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.000.000,00	377.980.235,52	99,47	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	380.000.000,00	377.980.235,52	99,47	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	380.000.000,00	377.980.235,52	99,47	0,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	190.000.000,00	188.985.338,59	99,47	0,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	190.000.000,00	188.994.896,93	99,47	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	49.649.600,00	99,30	74.320.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	50.000.000,00	49.649.600,00	99,30	0,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	50.000.000,00	49.649.600,00	99,30	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	50.000.000,00	49.649.600,00	99,30	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	74.320.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	74.320.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	74.320.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>2.932.148.200,00</b>	<b>2.876.163.835,52</b>	<b>98,09</b>	<b>1.147.026.800,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>28.021.548.762,00</b>	<b>24.274.812.540,34</b>	<b>86,63</b>	<b>21.760.715.568,60</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>74.438.290.405,00</b>	<b>103.192.800.471,66</b>	<b>138,63</b>	<b>98.009.120.955,40</b>

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
--------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------

Kab. Muara Enim, 14 Januari 2025  
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Feri Sonevel, SE  
NIP. 196811161989031004



**PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.434.490.636.595,00</b>	<b>3.638.327.125.866,80</b>	<b>105,93</b>	<b>2.812.397.414.415,09</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>43.428.985.447,00</b>	<b>105.012.560.484,83</b>	<b>241,80</b>	<b>94.921.988.214,09</b>
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.102.654.447,00	31.147.873.242,38	100,15	54.804.783.997,15
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	14.319.747.760,00	14.319.747.760,00	100,00	38.454.630.239,67
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	14.319.747.760,00	14.319.747.760,00	100,00	38.454.630.239,67
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	14.319.747.760,00	14.319.747.760,00	100,00	38.454.630.239,67
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	16.782.906.687,00	16.828.125.482,38	100,27	16.350.153.757,48
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.782.906.687,00	16.828.125.482,38	100,27	16.350.153.757,48
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.782.906.687,00	16.828.125.482,38	100,27	16.350.153.757,48
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.326.331.000,00	73.864.687.242,45	599,24	40.117.204.216,94
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.000.000,00	506.397.254,00	337,60	179.403.504,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	220.158.100,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	220.158.100,00	0,00	0,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	286.239.154,00	0,00	179.403.504,00
4.1.04.01.03.0044	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	0,00	286.239.154,00	0,00	179.403.504,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01.05.0071	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	126.331.000,00	175.000.000,00	138,52	0,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	126.331.000,00	175.000.000,00	138,52	0,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	126.331.000,00	175.000.000,00	138,52	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	12.050.000.000,00	21.668.584.014,00	179,82	19.738.650.604,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	12.000.000.000,00	21.473.330.058,00	178,94	19.688.723.887,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	12.000.000.000,00	21.473.330.058,00	178,94	19.688.723.887,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00	195.253.956,00	390,51	49.926.717,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00	195.253.956,00	390,51	49.926.717,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0,00	16.615.028.351,00	0,00	3.286.226.226,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	16.615.028.351,00	0,00	3.286.226.226,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	16.615.028.351,00	0,00	3.286.226.226,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	4.648.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	4.648.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	0,00	4.648.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	9.981.649.662,08	0,00	5.336.251.143,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	9.981.649.662,08	0,00	5.336.251.143,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	9.981.649.662,08	0,00	5.336.251.143,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	6.447.006,14
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	6.447.006,14
4.1.04.13.01.0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	6.447.006,14
4.1.04.14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	932.250.750,00
4.1.04.14.01	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	932.250.750,00
4.1.04.14.01.0001	Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	932.250.750,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	24.910.027.961,37	0,00	10.633.326.983,80
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	650.879.689,68
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	650.879.689,68
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	6.086.322.579,92	0,00	2.527.949.505,50
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	0,00	6.086.322.579,92	0,00	2.527.949.505,50
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	227.409.790,00	0,00	510.000,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	152.004.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	0,00	72.063.790,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	0,00	2.602.000,00	0,00	510.000,00
4.1.04.15.08.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	740.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	579.054.064,63	0,00	25.035.808,58
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	579.054.064,63	0,00	25.035.808,58
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	100.974.750,00	0,00	15.631.016,00
4.1.04.15.10.0050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	15.631.016,00
4.1.04.15.10.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD	0,00	470.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.10.0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	100.504.750,00	0,00	0,00
4.1.04.15.11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	0,00	4.080.210.180,00	0,00	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.04.15.11.0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD	0,00	3.544.710.180,00	0,00	0,00
4.1.04.15.11.0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD	0,00	535.500.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	473.616.432,64	0,00	40.767.508,62
4.1.04.15.15.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	18.833.340,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	0,00	4.550.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	0,00	16.818.200,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	119.437.625,00	0,00	1.560.170,00
4.1.04.15.15.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	23.796.500,00	0,00	467.000,00
4.1.04.15.15.0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	8.050.000,00	0,00	500.000,00
4.1.04.15.15.0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	12.402.608,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	8.579.300,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	3.565.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat	0,00	1.053.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	135.941.955,64	0,00	36.015.338,02
4.1.04.15.15.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	0,00	110.403.904,00	0,00	2.225.000,60
4.1.04.15.15.0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	1.985.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Batik Tradisional	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	465.304.000,00	0,00	245.718.017,00
4.1.04.15.16.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	27.405.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	102.000.000,00	0,00	219.285.000,00
4.1.04.15.16.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan	0,00	13.200.000,00	0,00	18.000.000,00
4.1.04.15.16.0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	0,00	2.793.700,00	0,00	119.517,00
4.1.04.15.16.0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	3.902.500,00
4.1.04.15.16.0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Lembur	0,00	69.000,00	0,00	4.411.000,00
4.1.04.15.16.0158	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	294.036.300,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	131.010.815,00	0,00	201.593.884,59
4.1.04.15.17.0152	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Lainnya	0,00	7.825.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0156	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0440	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	300.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0554	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	52.059.573,00	0,00	10.725,00
4.1.04.15.17.0555	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0560	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	9.557.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0574	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	4.311.900,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0577	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	7.715.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0580	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	27.242.342,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0582	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0611	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	201.583.159,59
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	19.524.905,00	0,00	0,00
4.1.04.15.34.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	14.524.905,00	0,00	0,00
4.1.04.15.34.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	12.700.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.37.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	12.700.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.42	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	0,00	556.757,00	0,00	0,00
4.1.04.15.42.0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	556.757,00	0,00	0,00
4.1.04.15.46	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	48.026.649,00	0,00	14.000.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.04.15.46.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	12.050.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.46.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	24.552.541,00	0,00	0,00
4.1.04.15.46.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.46.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	3.266.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.46.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	4.858.108,00	0,00	14.000.000,00
4.1.04.15.47	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.47.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.51	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	0,00	19.457.640,00	0,00	0,00
4.1.04.15.51.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	0,00	12.759.108,00	0,00	0,00
4.1.04.15.51.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	6.698.532,00	0,00	0,00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung	0,00	682.781.731,23	0,00	553.275.032,78
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	447.351.512,67	0,00	434.697.591,04
4.1.04.15.61.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	0,00	0,00	19.024.967,88
4.1.04.15.61.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	155.378.281,14	0,00	79.055.641,84
4.1.04.15.61.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	52.864.712,47	0,00	2.996.832,02
4.1.04.15.61.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	25.767.724,95	0,00	0,00
4.1.04.15.61.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
4.1.04.15.61.0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	1.419.500,00	0,00	0,00
4.1.04.15.61.0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	11.699.128.176,24	0,00	6.321.184.753,39
4.1.04.15.65.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	11.530.975.954,80	0,00	6.022.574.950,65
4.1.04.15.65.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	168.152.221,44	0,00	298.609.802,74
4.1.04.15.66	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi- Bangunan Air	0,00	281.949.490,71	0,00	11.781.767,66
4.1.04.15.66.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	191.075.996,34	0,00	0,00
4.1.04.15.66.0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penganggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	0,00	60.873.494,37	0,00	11.781.767,66
4.1.04.15.66.0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.71	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya-Hewan	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
4.1.04.15.71.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Hewan Ternak-Ternak Potong	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>43.428.985.447,00</b>	<b>105.012.560.484,83</b>	<b>241,80</b>	<b>94.921.988.214,09</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.377.588.613.451,00</b>	<b>3.524.646.144.599,22</b>	<b>104,35</b>	<b>2.704.324.918.994,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.115.940.499.950,00	3.198.030.938.052,00	102,63	2.418.868.422.019,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	2.886.217.201.950,00	2.968.307.640.052,00	102,84	2.196.841.376.819,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.884.223.992.950,00	1.988.077.195.000,00	105,51	1.296.623.296.891,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	518.413.852.450,00	471.404.391.000,00	90,93	456.573.815.855,50
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	46.440.519.900,00	41.532.911.000,00	89,43	48.084.473.966,50
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	952.851.000,00	952.851.000,00	100,00	1.359.144.336,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00	1.093.630,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	27.924.962.000,00	77.037.741.289,00	275,87	24.154.332.847,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	29.048.844.450,00	30.577.731.000,00	105,26	42.770.149.227,50
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	9.286.085.600,00	8.692.739.000,00	93,61	8.397.498.022,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.897.381.000,00	2.897.381.000,00	100,00	2.733.923.465,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1.233.593.008.550,00	1.342.378.615.711,00	108,82	695.904.827.520,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.063.654.000,00	0,00	0,00	2.067.713.205,00
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Juran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	0,00	0,00	0,00	12.998.754.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.120.498.000,00	1.120.498.000,00	100,00	1.577.570.816,50
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	11.482.336.000,00	11.482.336.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	693.238.814.000,00	676.353.374.468,00	97,56	637.315.100.820,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	526.243.957.000,00	544.838.517.000,00	103,53	637.315.100.820,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	32.109.012.000,00	18.089.113.468,00	56,34	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	85.840.401.000,00	64.380.300.000,00	75,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	35.399.055.000,00	35.399.055.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	11.646.389.000,00	11.646.389.000,00	100,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	66.526.502.000,00	62.807.794.258,00	94,41	39.649.991.641,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	2.499.999.000,00	2.498.166.200,00	99,93	1.349.781.100,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	12.143.313.000,00	12.012.429.570,00	98,92	8.480.664.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	13.978.956.000,00	13.805.157.951,00	98,76	10.553.925.766,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.514.333.000,00	2.419.182.350,00	96,22	2.829.758.951,00
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	43.965.000,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	9.047.562.000,00	25.499.665.495,00	281,84	8.969.688.815,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	18.579.699.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	7.762.640.000,00	6.573.192.692,00	84,68	7.422.208.009,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	242.227.893.000,00	241.069.276.326,00	99,52	223.252.987.467,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	88.545.900.000,00	88.387.936.099,00	99,82	87.829.377.813,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.405.000.000,00	2.405.000.000,00	100,00	2.610.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	104.781.611.000,00	107.116.626.000,00	102,23	100.680.127.860,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.862.054.000,00	6.941.000.000,00	118,41	4.687.000.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	7.201.800.000,00	7.074.438.000,00	98,23	7.179.645.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.719.900.000,00	1.570.250.000,00	91,30	1.777.200.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	24.328.524.000,00	20.847.380.597,00	85,69	13.409.160.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	6.977.104.000,00	6.576.585.130,00	94,26	3.902.712.700,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	369.343.694,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00	207.898.150,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	150.060.500,00	36,96	438.800.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	161.722.250,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN</b>	<b>2.886.217.201.950,00</b>	<b>2.968.307.640.052,00</b>	<b>102,84</b>	<b>2.196.841.376.819,00</b>
4.2.01.05	Dana Desa	223.347.712.000,00	223.347.712.000,00	100,00	222.027.045.200,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	223.347.712.000,00	223.347.712.000,00	100,00	222.027.045.200,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	223.347.712.000,00	223.347.712.000,00	100,00	222.027.045.200,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.375.586.000,00	6.375.586.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	6.375.586.000,00	6.375.586.000,00	100,00	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	6.375.586.000,00	6.375.586.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>229.723.298.000,00</b>	<b>229.723.298.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>222.027.045.200,00</b>
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	261.648.113.501,00	326.615.206.547,22	124,83	285.456.496.975,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	207.648.314.501,00	305.300.417.867,22	147,03	266.531.524.475,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	207.648.314.501,00	305.300.417.867,22	147,03	266.531.524.475,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	45.948.632.207,00	23.079.758.099,00	50,23	20.761.566.130,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	23.460.160.208,00	0,00	22.290.530.960,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	126.926.720.764,00	221.111.978.878,00	174,20	190.703.717.572,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	978.955.939,00	906.141.291,00	92,56	781.488.646,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	33.794.005.591,00	36.742.379.391,22	108,72	31.994.221.167,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	53.999.799.000,00	21.314.788.680,00	39,47	18.924.972.500,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	53.999.799.000,00	21.314.788.680,00	39,47	18.924.972.500,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	53.999.799.000,00	21.314.788.680,00	39,47	18.924.972.500,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>261.648.113.501,00</b>	<b>326.615.206.547,22</b>	<b>124,83</b>	<b>285.456.496.975,00</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.377.588.613.451,00</b>	<b>3.524.646.144.599,22</b>	<b>104,35</b>	<b>2.704.324.918.994,00</b>
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>13.473.037.697,00</b>	<b>8.668.420.782,75</b>	<b>64,34</b>	<b>13.150.507.207,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.325.000.000,00	327.192.879,00	24,69	1.006.407.510,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	213.998.090,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	213.998.090,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	213.998.090,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.325.000.000,00	327.192.879,00	24,69	792.409.420,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.325.000.000,00	327.192.879,00	24,69	792.409.420,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.325.000.000,00	327.192.879,00	24,69	792.409.420,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.148.037.697,00	8.341.227.903,75	68,66	12.144.099.697,00
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	12.148.037.697,00	8.341.227.903,75	68,66	12.144.099.697,00
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	12.148.037.697,00	8.341.227.903,75	68,66	12.144.099.697,00
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Masyarakat yang Berbadan hukum Indonesia	12.148.037.697,00	8.341.227.903,75	68,66	12.144.099.697,00
	<b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>13.473.037.697,00</b>	<b>8.668.420.782,75</b>	<b>64,34</b>	<b>13.150.507.207,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.434.490.636.595,00</b>	<b>3.638.327.125.866,80</b>	<b>105,93</b>	<b>2.812.397.414.415,09</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>630.938.604.615,66</b>	<b>567.542.564.866,00</b>	<b>89,95</b>	<b>478.984.358.346,50</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>108.018.760.665,66</b>	<b>59.025.030.316,00</b>	<b>54,64</b>	<b>52.127.374.633,50</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	86.967.019.461,66	42.221.544.346,00	48,55	36.325.614.755,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	80.757.673.319,66	36.858.244.556,00	45,64	31.682.455.978,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.706.603.725,00	2.442.007.023,00	90,22	2.502.908.187,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.706.603.725,00	2.442.007.023,00	90,22	2.502.908.187,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	246.021.250,00	215.708.960,00	87,68	233.237.724,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	246.021.250,00	215.708.960,00	87,68	233.237.724,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	173.132.750,00	156.310.000,00	90,28	155.050.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	173.132.750,00	156.310.000,00	90,28	155.050.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	83.517.000,00	66.480.000,00	79,60	78.260.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	83.517.000,00	66.480.000,00	79,60	78.260.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	94.710.000,00	78.155.000,00	82,52	89.665.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	94.710.000,00	78.155.000,00	82,52	89.665.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	161.080.185,00	133.759.740,00	83,04	154.978.800,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	161.080.185,00	133.759.740,00	83,04	154.978.800,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.683.178,00	2.300.117,00	11,69	3.909.368,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.683.178,00	2.300.117,00	11,69	3.909.368,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.038,00	38.724,00	73,01	42.554,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.038,00	38.724,00	73,01	42.554,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	71.981.195.393,66	30.059.015.675,00	41,76	25.344.743.108,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	59.244.845.616,66	23.109.754.579,00	39,01	21.849.293.316,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12.736.349.777,00	6.949.261.096,00	54,56	3.495.449.792,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.322.896.900,00	926.117.331,00	70,01	779.915.309,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.062.626.700,00	672.708.409,00	63,31	653.566.972,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	260.270.200,00	253.408.922,00	97,36	126.348.337,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.968.779.900,00	2.778.351.986,00	70,01	2.339.745.928,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.202.969.600,00	2.018.125.223,00	63,01	1.960.700.918,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	765.810.300,00	760.226.763,00	99,27	379.045.010,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.697.346.142,00	3.325.169.790,00	89,93	3.024.358.777,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.926.417.704,00	2.639.210.179,00	90,19	2.395.613.207,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.926.417.704,00	2.639.210.179,00	90,19	2.395.613.207,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	770.928.438,00	685.959.611,00	88,98	628.745.570,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	770.928.438,00	685.959.611,00	88,98	628.745.570,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.512.000.000,00	2.038.130.000,00	81,14	1.618.800.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.152.000.000,00	991.130.000,00	86,04	1.056.800.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.152.000.000,00	991.130.000,00	86,04	1.056.800.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.360.000.000,00	1.047.000.000,00	76,99	562.000.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.360.000.000,00	1.047.000.000,00	76,99	562.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.051.741.204,00	9.318.164.247,00	77,32	9.297.520.282,50
5.1.02.01	Belanja Barang	2.988.503.576,00	2.480.937.850,00	83,02	2.388.497.376,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.988.503.576,00	2.480.937.850,00	83,02	2.388.497.376,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	2.500.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	32.400.000,00	31.372.000,00	96,83	37.353.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	111.000.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	858.738.454,00	705.756.150,00	82,19	465.857.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.335.359.922,00	1.125.705.700,00	84,30	1.195.339.100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	28.325.500,00	22.400.000,00	79,08	12.970.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	111.478.950,00	104.900.000,00	94,10	77.923.576,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	37.176.750,00	35.836.000,00	96,39	46.732.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	36.056.000,00	32.473.000,00	90,06	20.507.400,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	544.468.000,00	417.995.000,00	76,77	376.894.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	28.620.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.277.974.539,00	2.220.477.272,00	67,74	2.442.361.613,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.002.715.539,00	2.064.248.577,00	68,75	2.211.836.800,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	248.400.000,00	91.800.000,00	36,96	229.800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	702.850.000,00	499.700.000,00	71,10	509.200.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	3.200.000,00	800.000,00	25,00	800.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	276.000.000,00	258.000.000,00	93,48	308.100.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	0,00	0,00	2.055.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	129.540.000,00	89.390.000,00	69,01	109.920.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	479.070.000,00	348.320.000,00	72,71	375.860.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	133.500.000,00	57.260.000,00	42,89	110.760.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	268.316.850,00	90.000.000,00	33,54	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	165.220.000,00	117.000.000,00	70,81	131.550.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	95.640.000,00	88.440.000,00	92,47	88.440.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	45.000.000,00	42.735.000,00	94,97	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	17.600.000,00	5.000.000,00	28,41	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	31.038.500,00	19.309.750,00	62,21	13.118.620,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	329.961.500,00	301.360.612,00	91,33	305.256.230,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.400.000,00	6.939.000,00	60,87	8.850.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.000.000,00	313.140,00	10,44	0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	62.678.689,00	47.881.075,00	76,39	18.126.950,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	129.852.000,00	109.128.695,00	84,04	104.354.813,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	129.852.000,00	109.128.695,00	84,04	104.354.813,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	103.407.000,00	42.100.000,00	40,71	121.670.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	103.407.000,00	42.100.000,00	40,71	121.670.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	42.000.000,00	5.000.000,00	11,90	4.500.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	42.000.000,00	5.000.000,00	11,90	4.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.941.423.400,00	1.785.164.304,00	91,95	973.598.644,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	328.090.000,00	267.862.004,00	81,64	224.311.364,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	185.390.000,00	170.964.804,00	92,22	154.787.864,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	25.300.000,00	21.546.000,00	85,16	15.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	58.560.000,00	52.535.200,00	89,71	29.223.500,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.640.000,00	13.716.000,00	82,43	5.500.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.600.000,00	4.600.000,00	31,51	7.700.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	27.600.000,00	4.500.000,00	16,30	12.100.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.613.333.400,00	1.517.302.300,00	94,05	699.337.280,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.613.333.400,00	1.517.302.300,00	94,05	699.337.280,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	49.950.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.843.839.689,00	2.831.584.821,00	73,67	3.493.062.649,50
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.843.839.689,00	2.831.584.821,00	73,67	3.493.062.649,50

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.843.839.689,00	2.831.584.821,00	73,67	3.493.062.649,50
5.1.03	Belanja Bunga	9.000.000.000,00	7.485.321.723,00	83,17	6.504.239.596,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	9.000.000.000,00	7.485.321.723,00	83,17	6.504.239.596,00
5.1.03.04.06	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	9.000.000.000,00	7.485.321.723,00	83,17	6.504.239.596,00
5.1.03.04.06.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	9.000.000.000,00	7.485.321.723,00	83,17	6.504.239.596,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>108.018.760.665,66</b>	<b>59.025.030.316,00</b>	<b>54,64</b>	<b>52.127.374.633,50</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.219.966.900,00</b>	<b>1.097.657.500,00</b>	<b>89,97</b>	<b>1.167.972.854,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.202.966.900,00	1.080.657.500,00	89,83	1.167.972.854,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	987.728.400,00	871.007.500,00	88,18	866.348.854,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	747.728.400,00	635.183.500,00	84,95	682.832.264,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	747.728.400,00	635.183.500,00	84,95	502.832.264,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	240.000.000,00	235.824.000,00	98,26	183.516.590,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	214.000.000,00	213.984.000,00	99,99	82.546.450,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	26.000.000,00	21.840.000,00	84,00	14.000.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	660.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	73.710.140,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	13.119.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	13.119.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	13.119.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	35.000.000,00	32.900.000,00	94,00	0,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	35.000.000,00	32.900.000,00	94,00	0,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	35.000.000,00	32.900.000,00	94,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	180.238.500,00	176.750.000,00	98,06	288.505.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	67.500.000,00	66.750.000,00	98,89	131.745.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	67.500.000,00	66.750.000,00	98,89	131.745.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	112.738.500,00	110.000.000,00	97,57	156.760.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	112.738.500,00	110.000.000,00	97,57	156.760.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>1.219.966.900,00</b>	<b>1.097.657.500,00</b>	<b>89,97</b>	<b>1.167.972.854,00</b>
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>720.000.000,00</b>	<b>4,80</b>	<b>1.964.524.977,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	720.000.000,00	4,80	1.964.524.977,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	720.000.000,00	4,80	1.964.524.977,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	720.000.000,00	4,80	1.964.524.977,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	720.000.000,00	4,80	1.964.524.977,00
	<b>JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>720.000.000,00</b>	<b>4,80</b>	<b>1.964.524.977,00</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>506.699.877.050,00</b>	<b>506.699.877.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>423.724.485.882,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.333.351.461,00	22.333.351.461,00	100,00	9.835.810.693,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	10.211.887.154,00	10.211.887.154,00	100,00	9.063.540.185,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.211.887.154,00	10.211.887.154,00	100,00	9.063.540.185,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	10.211.887.154,00	10.211.887.154,00	100,00	9.063.540.185,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	12.121.464.307,00	12.121.464.307,00	100,00	772.270.508,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	12.121.464.307,00	12.121.464.307,00	100,00	772.270.508,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	12.121.464.307,00	12.121.464.307,00	100,00	772.270.508,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	484.366.525.589,00	484.366.525.589,00	100,00	413.888.675.189,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	484.366.525.589,00	484.366.525.589,00	100,00	413.888.675.189,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	406.913.208.920,00
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	406.913.208.920,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	484.366.525.589,00	484.366.525.589,00	100,00	6.975.466.269,00
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	6.975.466.269,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	4.420.766.494,00	4.420.766.494,00	100,00	0,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	223.347.712.000,00	223.347.712.000,00	100,00	0,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	256.598.047.095,00	256.598.047.095,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA TRANSFER</b>	<b>506.699.877.050,00</b>	<b>506.699.877.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>423.724.485.882,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>630.938.604.615,66</b>	<b>567.542.564.866,00</b>	<b>89,95</b>	<b>478.984.358.346,50</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>2.803.552.031.979,34</b>	<b>3.070.784.561.000,80</b>	<b>109,53</b>	<b>2.333.413.056.068,59</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>654.021.770.081,21</b>	<b>654.021.770.083,21</b>	<b>100,00</b>	<b>824.465.988.492,40</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>660.300.286.213,21</b>	<b>660.300.286.213,21</b>	<b>100,00</b>	<b>879.327.121.622,40</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	560.300.286.213,21	560.300.286.213,21	100,00	879.327.121.622,40
6.1.01.05	Penghematan Belanja	560.300.286.213,21	560.300.286.213,21	100,00	879.327.121.622,40
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	560.300.286.213,21	560.300.286.213,21	100,00	879.327.121.622,40
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	560.300.286.213,21	560.300.286.213,21	100,00	879.327.121.622,40
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	0,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	0,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>660.300.286.213,21</b>	<b>660.300.286.213,21</b>	<b>100,00</b>	<b>879.327.121.622,40</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.278.516.132,00</b>	<b>6.278.516.130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>54.861.133.130,00</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	30.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	18.582.617.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	18.582.617.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	18.582.617.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	18.582.617.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.278.516.132,00	6.278.516.130,00	100,00	6.278.516.130,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	6.278.516.132,00	6.278.516.130,00	100,00	6.278.516.130,00
6.2.03.01.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	6.278.516.132,00	6.278.516.130,00	100,00	6.278.516.130,00
6.2.03.01.01.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	6.278.516.132,00	6.278.516.130,00	100,00	6.278.516.130,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.278.516.132,00</b>	<b>6.278.516.130,00</b>	<b>100,00</b>	<b>54.861.133.130,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>654.021.770.081,21</b>	<b>654.021.770.083,21</b>	<b>100,00</b>	<b>824.465.988.492,40</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>3.457.573.802.060,55</b>	<b>3.724.806.331.084,01</b>	<b>107,73</b>	<b>3.157.879.044.560,99</b>

Kab. Muara Enim, 16 Januari 2025  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Juli Jumatan Nuri, SE  
NIP. 197207212000031005



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	44,292,004,503.00	38,306,018,453.00	86.49	15,317,357,368.34
5.1	BELANJA OPERASI	18,914,983,941.00	15,905,203,453.00	84.09	14,753,277,368.34
5.1.01	Belanja Pegawai	6,528,114,947.00	5,714,382,087.00	87.53	5,392,547,496.84
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3,330,474,361.00	2,888,335,172.00	86.72	2,835,747,489.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2,572,567,130.00	2,234,134,802.00	86.84	2,147,049,526.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2,400,239,210.00	2,110,473,222.00	87.93	2,147,049,526.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	172,327,920.00	123,661,580.00	71.76	0.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	282,966,613.00	238,284,422.00	84.21	239,960,104.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	261,572,583.00	227,593,910.00	87.01	239,960,104.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	21,394,030.00	10,690,512.00	49.97	0.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	103,719,750.00	98,490,000.00	94.96	99,570,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	103,719,750.00	98,490,000.00	94.96	99,570,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	122,954,900.00	108,216,000.00	88.01	128,700,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	122,954,900.00	108,216,000.00	88.01	128,700,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	83,609,250.00	70,978,700.00	84.89	71,100,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	73,759,000.00	63,643,700.00	86.29	71,100,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	9,850,250.00	7,335,000.00	74.47	0.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	157,183,084.00	133,325,220.00	84.82	141,653,520.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	142,336,984.00	125,503,860.00	88.17	141,653,520.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14,846,100.00	7,821,360.00	52.68	0.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7,433,016.00	4,872,304.00	65.55	7,681,893.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7,433,016.00	4,872,304.00	65.55	7,681,893.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	40,618.00	33,724.00	83.03	32,446.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32,213.00	30,629.00	95.08	32,446.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	8,405.00	3,095.00	36.82	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3,197,640,586.00	2,826,046,915.00	88.38	2,556,800,007.84
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2,562,563,696.00	2,251,031,385.00	87.84	2,045,444,212.30
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2,421,437,816.00	2,156,173,250.00	89.05	2,045,444,212.30
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	141,125,880.00	94,858,135.00	67.22	0.00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	635,076,890.00	575,015,530.00	90.54	511,355,795.54
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	592,739,098.00	546,530,955.00	92.20	511,355,795.54
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	42,337,792.00	28,484,575.00	67.28	0.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12,386,868,994.00	10,190,821,366.00	82.27	9,360,729,871.50
5.1.02.01	Belanja Barang	1,118,138,841.00	982,332,821.00	87.85	855,152,708.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,118,138,841.00	982,332,821.00	87.85	855,152,708.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12,835,000.00	4,823,900.00	37.58	12,279,058.00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	2,000,000.00	1,980,000.00	99.00	0.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	544,109,143.00	515,553,821.00	94.75	367,805,900.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	121,894,428.00	104,532,100.00	85.76	158,548,850.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8,300,000.00	8,300,000.00	100.00	3,500,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	28,297,000.00	23,735,000.00	83.88	20,227,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	103,351,096.00	98,373,000.00	95.18	85,700,000.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3,750,000.00	3,750,000.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	283,075,000.00	210,965,000.00	74.53	183,932,500.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0.00	0.00	0.00	23,159,400.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	10,527,174.00	10,320,000.00	98.03	0.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	7,164,138,472.00	5,327,708,579.00	74.37	4,680,987,148.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2,408,386,825.00	1,586,204,109.00	65.86	1,205,386,192.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	574,200,000.00	175,300,000.00	30.53	7,000,000.00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	6,500,000.00	2,000,000.00	30.77	0.00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	0.00	0.00	0.00	202,600,000.00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	12,000,000.00	8,400,000.00	70.00	3,500,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12,600,000.00	12,600,000.00	100.00	180,800,000.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	45,720,000.00	40,920,000.00	89.50	56,160,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2,400,000.00	1,500,000.00	62.50	1,200,000.00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0.00	0.00	0.00	82,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	126,520,000.00	123,720,000.00	97.79	6,400,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	79,320,000.00	61,920,000.00	78.06	26,400,000.00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	250,000,000.00	247,687,000.00	99.07	0.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0.00	0.00	0.00	3,900,000.00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	950,000,000.00	615,000,000.00	64.74	350,000,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	20,500,000.00	13,500,000.00	65.85	4,000,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	0.00	0.00	0.00	3,129,447.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	17,250,000.00	8,793,000.00	50.97	11,622,620.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	220,190,400.00	209,459,152.00	95.13	213,005,875.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	24,000,000.00	14,650,000.00	61.04	14,040,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	54,000,000.00	38,510,707.00	71.32	33,288,000.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13,186,425.00	12,244,250.00	92.85	6,340,250.00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	155,330,136.00	113,025,495.00	72.76	88,576,956.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	155,330,136.00	113,025,495.00	72.76	88,576,956.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	198,950,000.00	176,950,000.00	88.94	43,752,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2,100,000.00	2,100,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	96,850,000.00	91,850,000.00	94.84	26,580,000.00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	100,000,000.00	83,000,000.00	83.00	15,672,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1,260,850,000.00	1,045,065,000.00	82.89	1,218,000,000.00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	108,800,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1,152,050,000.00	1,045,065,000.00	90.71	1,218,000,000.00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	502,421,511.00	345,123,975.00	68.69	0.00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	502,421,511.00	345,123,975.00	68.69	0.00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1,680,000,000.00	1,440,000,000.00	85.71	720,000,000.00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	20,000,000.00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	60,000,000.00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	1,520,000,000.00	1,280,000,000.00	84.21	640,000,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	958,200,000.00	621,340,000.00	64.84	1,405,272,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	958,200,000.00	621,340,000.00	64.84	1,405,272,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	356,368,381.00	276,514,090.00	77.59	294,310,243.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	270,720,781.00	194,744,090.00	71.94	160,850,243.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	187,645,200.00	121,184,090.00	64.58	76,860,243.00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	4,964,240.00	2,300,000.00	46.33	4,900,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	38,703,341.00	34,210,000.00	88.39	37,240,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	24,090,000.00	23,850,000.00	99.00	28,200,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	15,318,000.00	13,200,000.00	86.17	13,650,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	85,647,600.00	81,770,000.00	95.47	133,460,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	85,647,600.00	81,770,000.00	95.47	133,460,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3,748,223,300.00	3,604,265,876.00	96.16	3,530,279,772.50
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3,748,223,300.00	3,604,265,876.00	96.16	3,530,279,772.50
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,748,223,300.00	3,604,265,876.00	96.16	3,530,279,772.50
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>18,914,983,941.00</b>	<b>15,905,203,453.00</b>	<b>84.09</b>	<b>14,753,277,368.34</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>25,377,020,562.00</b>	<b>22,400,815,000.00</b>	<b>88.27</b>	<b>564,080,000.00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	255,945,000.00	251,320,000.00	98.19	564,080,000.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	564,080,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0.00	0.00	0.00	564,080,000.00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0.00	0.00	0.00	564,080,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	255,945,000.00	251,320,000.00	98.19	0.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	60,495,000.00	58,320,000.00	96.40	0.00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	60,495,000.00	58,320,000.00	96.40	0.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	195,450,000.00	193,000,000.00	98.75	0.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	105,450,000.00	103,000,000.00	97.68	0.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	90,000,000.00	90,000,000.00	100.00	0.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25,121,075,562.00	22,149,495,000.00	88.17	0.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	25,121,075,562.00	22,149,495,000.00	88.17	0.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	25,121,075,562.00	22,149,495,000.00	88.17	0.00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25,121,075,562.00	22,149,495,000.00	88.17	0.00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>25,377,020,562.00</b>	<b>22,400,815,000.00</b>	<b>88.27</b>	<b>564,080,000.00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>44,292,004,503.00</b>	<b>38,306,018,453.00</b>	<b>86.49</b>	<b>15,317,357,368.34</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>( 44,292,004,503.00 )</b>	<b>( 38,306,018,453.00 )</b>	<b>86.49</b>	<b>( 15,317,357,368.34 )</b>

Muara Enim, 08 Januari 2025  
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Muara Enim



Harson Sunardi, SAP., M.Si  
NIP. 196604161985031002



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM INSPEKTORAT  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>24,791,765,368.00</b>	<b>19,837,098,691.00</b>	<b>80.01</b>	<b>16,316,857,959.10</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>22,479,945,598.00</b>	<b>18,322,672,191.00</b>	<b>81.51</b>	<b>16,199,557,959.10</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	13,109,477,674.00	12,072,029,363.00	92.09	10,810,374,756.10
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9,370,467,924.00	6,250,642,828.00	66.71	5,389,183,203.00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>22,479,945,598.00</b>	<b>18,322,672,191.00</b>	<b>81.51</b>	<b>16,199,557,959.10</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2,311,819,770.00</b>	<b>1,514,426,500.00</b>	<b>65.51</b>	<b>117,300,000.00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,881,819,770.00	1,084,926,500.00	57.65	117,300,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	430,000,000.00	429,500,000.00	99.88	0.00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>2,311,819,770.00</b>	<b>1,514,426,500.00</b>	<b>65.51</b>	<b>117,300,000.00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>24,791,765,368.00</b>	<b>19,837,098,691.00</b>	<b>80.01</b>	<b>16,316,857,959.10</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>-24,791,765,368.00</b>	<b>-19,837,098,691.00</b>	<b>80.01</b>	<b>-16,316,857,959.10</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>-24,791,765,368.00</b>	<b>-19,837,098,691.00</b>	<b>80.01</b>	<b>-16,316,857,959.10</b>



**PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>102.459.839.167,00</b>	<b>127.467.613.012,00</b>	<b>124,41</b>	<b>119.769.836.524,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	102.118.871.536,00	126.743.710.193,00	124,11	118.951.424.120,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	0,00	115.244.229,00	0,00	2.908.009.968,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	0,00	114.950.229,00	0,00	2.761.212.566,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	0,00	114.950.229,00	0,00	2.761.212.566,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00	64.751.685,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	0,00	0,00	0,00	64.751.685,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	5.768.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	5.768.000,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	294.000,00	0,00	76.277.717,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	294.000,00	0,00	76.277.717,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	17.150.539.602,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	5.186.867.225,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	5.186.867.225,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	1.181.277.115,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	1.181.277.115,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	127.122.088,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	127.122.088,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	98.476.206,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	98.476.206,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	290.735.723,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	290.735.723,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	10.266.061.245,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisny	0,00	0,00	0,00	10.266.061.245,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	0,00	10.210.000,00	0,00	973.722.080,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	388.483.640,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00	388.483.640,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisny	0,00	10.210.000,00	0,00	256.122.300,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisny	0,00	10.210.000,00	0,00	256.122.300,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	100.128.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	100.128.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	202.594.940,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	202.594.940,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00	26.393.200,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00	26.393.200,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	780.750.000,00	389.173.294,00	49,85	1.035.925.243,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	530.000.000,00	347.485.794,00	65,56	628.147.368,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	530.000.000,00	347.485.794,00	65,56	628.147.368,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	200.000.000,00	38.687.500,00	19,34	237.338.875,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	200.000.000,00	38.687.500,00	19,34	237.338.875,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	50.000.000,00	3.000.000,00	6,00	170.439.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	50.000.000,00	3.000.000,00	6,00	170.439.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	750.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	35.699.118.346,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	26.400.941,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	26.400.941,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	35.672.717.405,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	35.672.717.405,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	35.624.700,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	35.624.700,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	35.624.700,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	485.000.000,00	770.316.321,00	158,83	812.171.868,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	485.000.000,00	770.316.321,00	158,83	812.171.868,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	485.000.000,00	770.316.321,00	158,83	812.171.868,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	66.572.000,00	133,14	33.347.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	66.572.000,00	133,14	33.347.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	66.572.000,00	133,14	33.347.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.000.000.000,00	28.210.125.859,00	188,07	28.380.267.259,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	15.000.000.000,00	21.568.663.411,00	143,79	28.380.267.259,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	15.000.000.000,00	21.568.663.411,00	143,79	28.380.267.259,00
4.1.01.14.39	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	0,00	6.641.462.448,00	0,00	0,00
4.1.01.14.39.0001	Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	0,00	6.641.462.448,00	0,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	10.508.829.041,00	12.783.812.382,00	121,65	11.222.742.800,00
4.1.01.15.01	PBBP2	10.508.829.041,00	12.783.812.382,00	121,65	11.222.742.800,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	10.508.829.041,00	12.783.812.382,00	121,65	11.222.742.800,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	15.600.000.000,00	14.737.491.007,00	94,47	20.699.955.254,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	3.600.000.000,00	5.596.015.607,00	155,44	4.899.646.272,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	3.600.000.000,00	5.596.015.607,00	155,44	4.899.646.272,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	12.000.000.000,00	9.141.475.400,00	76,18	15.800.308.982,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	12.000.000.000,00	9.141.475.400,00	76,18	15.800.308.982,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	59.694.292.495,00	69.660.765.101,00	116,70	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	15.872.751.993,00	19.312.440.299,00	121,67	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	7.083.329.493,00	7.724.139.788,00	109,05	0,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	8.789.422.500,00	11.588.300.511,00	131,84	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	41.000.000.000,00	46.508.143.251,00	113,43	0,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	33.000.000.000,00	37.719.072.104,00	114,30	0,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	8.000.000.000,00	8.789.071.147,00	109,86	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	2.104.437.576,00	3.034.418.627,00	144,19	0,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	2.020.466.342,00	2.888.407.395,00	142,96	0,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	43.613.500,00	108.028.882,00	247,70	0,00
4.1.01.19.03.0010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	40.357.734,00	37.982.350,00	94,11	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	20.000.000,00	74.633.500,00	373,17	0,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	20.000.000,00	74.633.500,00	373,17	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	697.102.926,00	731.129.424,00	104,88	0,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	250.000.000,00	285.565.788,00	114,23	0,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	1.500.000,00	4.120.000,00	274,67	0,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	7.875.002,00	7.272.625,00	92,35	0,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	23.721.221,00	2.844.540,00	11,99	0,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	414.006.703,00	431.326.471,00	104,18	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	340.967.631,00	723.902.819,00	212,31	818.412.404,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	340.967.631,00	723.902.819,00	212,31	818.412.404,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.576.000,00	6.495.207,00	252,14	2.456.834,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.576.000,00	6.495.207,00	252,14	701.623,00
4.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	0,00	1.755.211,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	197.000.000,00	514.491.557,00	261,16	266.612.401,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	197.000.000,00	514.491.557,00	261,16	19.950.986,00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	4.381.433,00
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	121.840,00
4.1.04.12.07.0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	2.233.377,00
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	6.624.607,00
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Denda Pajak Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	233.300.158,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.500.000,00	4.319.348,00	287,96	2.358.102,00
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	150.000,00	2.302.195,00	1.534,80	337.922,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	600.000,00	1.682.920,00	280,49	747.600,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	150.000,00	10.469,00	6,98	1.247.100,00
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	600.000,00	323.764,00	53,96	18.480,00
4.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	23.000.000,00	2.949.450,00	12,82	24.326.387,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	15.850.000,00	2.114.850,00	13,34	24.265.112,00
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	5.000.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4.1.04.12.09.0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000.000,00	834.600,00	41,73	16.275,00
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	150.000,00	12.947.908,00	8.631,94	0,00
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	12.947.908,00	0,00	0,00
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	282.258,00	0,00	45.042,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	282.258,00	0,00	45.042,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.500.000,00	3.168.736,00	211,25	53.789.441,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.500.000,00	3.168.736,00	211,25	53.789.441,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	10.400,00	5.200,00	50,00	42.200,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	10.400,00	5.200,00	50,00	42.200,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	648.684,00	0,00	126.951.745,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	648.684,00	0,00	126.951.745,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.231.231,00	81.617.537,00	1.560,20	162.545.058,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	5.231.231,00	81.617.537,00	1.560,20	162.545.058,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	110.000.000,00	96.976.934,00	88,16	179.285.194,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	30.000.000,00	25.682.367,00	85,61	0,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	80.000.000,00	71.294.567,00	89,12	179.285.194,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>102.459.839.167,00</b>	<b>127.467.613.012,00</b>	<b>124,41</b>	<b>119.769.836.524,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>102.459.839.167,00</b>	<b>127.467.613.012,00</b>	<b>124,41</b>	<b>119.769.836.524,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>28.021.548.762,00</b>	<b>24.274.812.540,34</b>	<b>86,63</b>	<b>21.760.715.568,60</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>25.089.400.562,00</b>	<b>21.398.648.704,82</b>	<b>85,29</b>	<b>20.613.688.768,60</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	15.313.987.330,00	12.071.998.717,00	78,83	11.482.469.577,60
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.603.931.228,00	4.874.583.387,00	86,99	4.776.241.407,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.257.198.788,00	3.866.246.658,00	90,82	3.749.890.878,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.217.818.500,00	3.843.821.458,00	91,13	3.749.890.878,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	39.380.288,00	22.425.200,00	56,95	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	447.944.704,00	348.110.962,00	77,71	349.025.622,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	443.219.069,00	348.110.962,00	78,54	349.025.622,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.725.635,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	403.962.750,00	285.710.000,00	70,73	279.250.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	403.962.750,00	285.710.000,00	70,73	279.250.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	87.310.000,00	72.660.000,00	83,22	62.770.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	87.310.000,00	72.660.000,00	83,22	62.770.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	144.725.875,00	95.905.000,00	66,27	109.060.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	142.270.000,00	94.610.000,00	66,50	109.060.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.455.875,00	1.295.000,00	52,73	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	254.007.719,00	201.689.700,00	79,40	220.301.640,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	251.123.592,00	201.182.760,00	80,11	220.301.640,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.884.127,00	506.940,00	17,58	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.651.185,00	4.205.910,00	48,62	5.882.846,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.651.185,00	4.205.910,00	48,62	5.882.846,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	130.207,00	55.157,00	42,36	60.421,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	128.893,00	54.576,00	42,34	60.421,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.314,00	581,00	44,22	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.484.794.574,00	3.874.975.019,00	86,40	3.340.688.355,60
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.484.794.574,00	3.874.975.019,00	86,40	3.340.688.355,60
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.457.073.419,00	3.857.230.516,00	86,54	3.340.688.355,60
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	27.721.155,00	17.744.503,00	64,01	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.225.261.528,00	3.322.440.311,00	63,58	3.365.539.815,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.712.266.087,00	3.184.471.586,00	67,58	3.237.839.721,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	65.775.154,00	65.775.154,00	100,00	92.287.570,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	417.410.202,00	417.410.202,00	100,00	469.710.667,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	14.673.009,00	14.673.009,00	100,00	12.577.221,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	39.037.500,00	8.419.936,00	21,57	25.692.401,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	931.369.780,00	931.369.780,00	100,00	1.161.357.330,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	374.593,00	374.593,00	100,00	0,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	24.250.000,00	22.700.428,00	93,61	20.023.912,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	2.500.000,00	1.811.484,00	72,46	0,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	750.000.000,00	716.352.780,00	95,51	1.149.474.190,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	592.272.059,00	0,00	0,00	4.167.018,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	711.750.000,00	172.500.000,00	24,24	302.549.412,00
5.1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu [(,PB)JT],	1.162.853.790,00	833.084.220,00	71,64	0,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	512.995.441,00	137.968.725,00	26,89	127.700.094,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	3.184.761,00	3.184.761,00	100,00	377.523,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	22.699.500,00	2.921.547,00	12,87	11.006.494,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	20.912.150,00	5.622.788,00	26,89	7.746.758,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	91.351.500,00	15.282.802,00	16,73	37.129.515,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	3.825.625,00	0,00	0,00	2.212.053,00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	743.750,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	375.250,00	350.371,00	93,37	0,00
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.812.500,00	0,00	0,00	4.661.103,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	87.730.549,00	6.214.556,00	7,08	9.408.468,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.439.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	6.427.500,00	749.294,00	11,66	2.748.451,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	24.054.075,00	8.492.056,00	35,30	2.958.664,00
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Inzin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	10.516.376,00
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Inzin Usaha Perikanan	12.750.000,00	1.400.550,00	10,98	1.134.752,00
5.1.01.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	37.799.937,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	111.937.500,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	118.751.281,00	93.750.000,00	78,95	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.775.413.232,00	9.326.649.987,82	95,41	9.131.219.191,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.543.095.195,00	1.412.349.023,00	91,53	1.608.235.202,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.543.095.195,00	1.412.349.023,00	91,53	1.608.235.202,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	38.626.000,00	34.418.568,00	89,11	32.825.339,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	100.903.600,00	100.221.130,00	99,32	97.815.043,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	341.048.125,00	292.688.500,00	85,82	275.204.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	991.200,00	980.000,00	98,87	980.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	707.000.420,00	679.322.000,00	96,09	787.079.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	31.595.400,00	24.178.825,00	76,53	23.423.920,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	118.804.490,00	116.543.000,00	98,10	125.378.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	42.116.560,00	41.949.000,00	99,60	28.255.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	9.000.000,00	8.000.000,00	88,89	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	903.000,00	900.000,00	99,67	900.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	85.000.000,00	83.028.000,00	97,68	63.680.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.106.400,00	30.120.000,00	44,88	110.700.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	42.994.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.418.459.197,00	3.139.897.810,00	91,85	3.184.768.398,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.930.546.797,00	2.784.916.722,00	95,03	2.806.503.781,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00	3.550.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.750.000,00	22.500.000,00	66,67	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	612.240.000,00	590.840.000,00	96,50	582.280.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.605.350.000,00	1.559.120.000,00	97,12	1.548.150.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	128.400.000,00	124.120.000,00	96,67	199.706.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	58.800.000,00	36.539.065,00	62,14	38.105.840,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	28.750.000,00	7.936.500,00	27,61	19.297.012,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	201.245.150,00	197.963.507,00	98,37	181.519.554,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	32.988.000,00	22.066.000,00	66,89	24.178.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	201.132.000,00	196.000.000,00	97,45	196.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	24.341.647,00	24.281.650,00	99,75	13.717.375,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	176.775.400,00	160.886.088,00	91,01	142.650.617,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	176.775.400,00	160.886.088,00	91,01	142.650.617,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.540.000,00	10.270.000,00	50,00	10.200.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.540.000,00	10.270.000,00	50,00	10.200.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	57.000.000,00	2.560.000,00	4,49	31.375.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	57.000.000,00	2.560.000,00	4,49	31.375.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	233.597.000,00	181.265.000,00	77,60	194.039.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	233.597.000,00	181.265.000,00	77,60	194.039.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	649.129.240,00	639.656.608,82	98,54	236.013.460,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120.129.240,00	114.666.000,00	95,45	111.375.001,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11.010.000,00	10.910.000,00	99,09	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	3.045.001,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	46.500.000,00	44.300.000,00	95,27	58.425.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	23.599.240,00	20.650.000,00	87,50	23.040.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.500.000,00	9.406.000,00	99,01	9.405.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	29.520.000,00	29.400.000,00	99,59	17.460.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	529.000.000,00	524.990.608,82	99,24	124.638.459,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	180.000.000,00	178.289.117,17	99,05	0,00
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	199.000.000,00	197.950.000,00	99,47	0,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	150.000.000,00	148.751.491,65	99,17	124.638.459,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.164.729.600,00	4.134.746.546,00	99,28	4.102.202.131,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.164.729.600,00	4.134.746.546,00	99,28	4.102.202.131,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.164.729.600,00	4.134.746.546,00	99,28	4.102.202.131,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>25.089.400.562,00</b>	<b>21.398.648.704,82</b>	<b>85,29</b>	<b>20.613.688.768,60</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.932.148.200,00</b>	<b>2.876.163.835,52</b>	<b>98,09</b>	<b>1.147.026.800,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.502.148.200,00	2.448.534.000,00	97,86	1.072.706.800,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	640.000.000,00	608.200.000,00	95,03	638.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	640.000.000,00	608.200.000,00	95,03	638.000.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	640.000.000,00	608.200.000,00	95,03	638.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	724.427.000,00	716.404.000,00	98,89	242.266.800,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	41.700.000,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	41.700.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	724.427.000,00	716.404.000,00	98,89	200.566.800,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	637.487.000,00	630.804.000,00	98,95	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	29.865.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	86.940.000,00	85.600.000,00	98,46	170.701.800,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	700.000.000,00	699.300.000,00	99,90	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	700.000.000,00	699.300.000,00	99,90	0,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	700.000.000,00	699.300.000,00	99,90	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	437.721.200,00	424.630.000,00	97,01	192.440.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	90.000.000,00	89.280.000,00	99,20	148.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	90.000.000,00	89.280.000,00	99,20	148.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	347.721.200,00	335.350.000,00	96,44	44.440.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	215.971.200,00	205.900.000,00	95,34	44.440.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	131.750.000,00	129.450.000,00	98,25	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.000.000,00	377.980.235,52	99,47	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	380.000.000,00	377.980.235,52	99,47	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	380.000.000,00	377.980.235,52	99,47	0,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	190.000.000,00	188.985.338,59	99,47	0,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	190.000.000,00	188.994.896,93	99,47	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.000.000,00	49.649.600,00	99,30	74.320.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	50.000.000,00	49.649.600,00	99,30	0,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	50.000.000,00	49.649.600,00	99,30	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	50.000.000,00	49.649.600,00	99,30	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	74.320.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	74.320.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	74.320.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>2.932.148.200,00</b>	<b>2.876.163.835,52</b>	<b>98,09</b>	<b>1.147.026.800,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>28.021.548.762,00</b>	<b>24.274.812.540,34</b>	<b>86,63</b>	<b>21.760.715.568,60</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>74.438.290.405,00</b>	<b>103.192.800.471,66</b>	<b>138,63</b>	<b>98.009.120.955,40</b>

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
--------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------

Kab. Muara Enim, 14 Januari 2025  
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Feri Sonevel, SE  
NIP. 196811161989031004



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>11.117.087.038,00</b>	<b>7.777.197.505,00</b>	<b>69,96</b>	<b>5.912.303.454,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.428.494.838,00</b>	<b>7.137.876.583,00</b>	<b>68,45</b>	<b>5.396.053.604,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	3.383.142.601,00	2.625.419.714,00	77,60	2.315.396.246,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.845.852.371,00	1.430.291.480,00	77,49	1.286.084.529,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.243.159.155,00	1.025.799.858,00	82,52	898.386.625,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.157.610.195,00	980.949.458,00	84,74	898.386.625,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	85.548.960,00	44.850.400,00	52,43	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	159.277.473,00	97.544.664,00	61,24	83.036.511,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	147.300.619,00	91.265.608,00	61,96	83.036.511,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.976.854,00	6.279.056,00	52,43	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	108.147.750,00	81.175.000,00	75,06	71.490.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	108.147.750,00	81.175.000,00	75,06	71.490.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	216.685.000,00	150.150.000,00	69,29	157.620.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	216.685.000,00	150.150.000,00	69,29	157.620.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.546.250,00	15.800.000,00	55,35	15.821.850,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.236.750,00	13.210.000,00	56,85	15.821.850,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.309.500,00	2.590.000,00	48,78	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	80.989.432,00	54.604.680,00	67,42	52.432.080,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	72.675.616,00	50.549.160,00	69,55	52.432.080,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.313.816,00	4.055.520,00	48,78	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.020.001,00	5.201.189,00	57,66	7.285.981,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.020.001,00	5.201.189,00	57,66	7.285.981,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	27.310,00	16.089,00	58,91	11.482,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.440,00	14.969,00	61,25	11.482,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.870,00	1.120,00	39,02	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.537.290.230,00	1.195.128.234,00	77,74	1.029.311.717,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.537.290.230,00	1.195.128.234,00	77,74	1.029.311.717,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.476.807.710,00	1.160.153.207,00	78,56	1.029.311.717,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	60.482.520,00	34.975.027,00	57,83	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.045.352.237,00	4.512.456.869,00	64,05	3.080.657.358,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.187.003.603,00	861.701.800,00	72,59	676.797.100,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.187.003.603,00	861.701.800,00	72,59	676.797.100,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	231.994.275,00	168.070.900,00	72,45	113.510.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	350.681.100,00	290.240.700,00	82,76	240.489.800,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.480.000,00	4.480.000,00	100,00	3.920.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	36.678.028,00	28.719.100,00	78,30	17.937.200,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.988.900,00	5.387.100,00	77,08	6.541.500,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	12.000.000,00	11.500.000,00	95,83	6.650.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	77.726.300,00	60.230.000,00	77,49	2.038.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.800.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	355.605.000,00	211.674.000,00	59,53	175.720.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	27.250.000,00	21.750.000,00	79,82	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	9.540.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	10.000.000,00	9.250.000,00	92,50	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	69.800.000,00	50.400.000,00	72,21	20.450.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.255.787.534,00	1.997.706.687,00	88,56	1.107.597.318,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.047.184.734,00	1.839.159.797,00	89,84	986.107.288,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	464.400.000,00	346.450.000,00	74,60	499.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola	0,00	0,00	0,00	36.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	198.960.000,00	177.230.000,00	89,08	170.880.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	60.360.000,00	58.560.000,00	97,02	73.800.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.142.400.000,00	1.093.400.000,00	95,71	76.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	51.360.000,00	51.360.000,00	100,00	51.360.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.500.000,00	6.000.000,00	92,31	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	10.006.200,00	9.536.248,00	95,30	8.068.536,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	27.600.000,00	16.753.750,00	60,70	13.385.596,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	47.998.565,00	47.258.949,00	98,46	44.589.181,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.346.000,00	4.758.000,00	89,00	3.285.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.000.000,00	5.650.000,00	94,17	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.253.969,00	7.202.850,00	64,00	6.638.975,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	54.827.800,00	54.531.890,00	99,46	53.138.030,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	54.827.800,00	54.531.890,00	99,46	53.138.030,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.600.000,00	19.300.000,00	93,69	0,00
<b>KodeRekening</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN 2024</b>	<b>REALISASI 2024</b>	<b>% 2024</b>	<b>REALISASI 2023</b>
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	20.600.000,00	19.300.000,00	93,69	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	73.675.000,00	48.340.000,00	65,61	7.702.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	73.675.000,00	48.340.000,00	65,61	7.702.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	59.500.000,00	36.375.000,00	61,13	60.650.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00	12.000.000,00	75,00	60.650.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	36.000.000,00	16.875.000,00	46,88	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	372.426.700,00	322.696.722,00	86,65	92.545.303,00

5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	227.238.700,00	177.554.549,00	78,14	76.270.303,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	147.568.700,00	128.338.719,00	86,97	56.470.303,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	38.550.000,00	8.860.000,00	22,98	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	13.500.000,00	13.495.830,00	99,97	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.420.000,00	13.220.000,00	98,51	8.380.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	7.200.000,00	98,63	4.320.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,00	6.440.000,00	93,33	4.100.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	145.188.000,00	145.142.173,00	99,97	16.275.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	145.188.000,00	145.142.173,00	99,97	16.275.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.150.134.400,00	1.250.351.660,00	39,69	1.203.717.637,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.150.134.400,00	1.250.351.660,00	39,69	1.203.717.637,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.140.684.400,00	1.250.351.660,00	39,81	1.203.717.637,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>10.428.494.838,00</b>	<b>7.137.876.583,00</b>	<b>68,45</b>	<b>5.396.053.604,00</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>688.592.200,00</b>	<b>639.320.922,00</b>	<b>92,84</b>	<b>516.249.850,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	418.592.200,00	390.471.422,00	93,28	516.249.850,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	63.376.000,00	60.511.822,00	95,48	421.300.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	63.376.000,00	60.511.822,00	95,48	421.300.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	63.376.000,00	60.511.822,00	95,48	421.300.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	293.541.600,00	271.525.000,00	92,50	24.150.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	217.640.000,00	198.700.000,00	91,30	17.950.000,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	90.000.000,00	85.000.000,00	94,44	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	32.640.000,00	30.200.000,00	92,52	17.950.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	95.000.000,00	83.500.000,00	87,89	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	75.901.600,00	72.825.000,00	95,95	6.200.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	57.001.600,00	56.475.000,00	99,08	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	6.500.000,00	6.350.000,00	97,69	6.200.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	12.400.000,00	10.000.000,00	80,65	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	61.674.600,00	58.434.600,00	94,75	70.799.850,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	48.354.600,00	48.354.600,00	100,00	45.897.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	48.354.600,00	48.354.600,00	100,00	45.897.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.320.000,00	10.080.000,00	75,68	24.902.850,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	13.320.000,00	10.080.000,00	75,68	24.902.850,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.300.000,00	99,65	0,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	200.000.000,00	199.300.000,00	99,65	0,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	200.000.000,00	199.300.000,00	99,65	0,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	200.000.000,00	199.300.000,00	99,65	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	70.000.000,00	49.549.500,00	70,79	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	70.000.000,00	49.549.500,00	70,79	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	70.000.000,00	49.549.500,00	70,79	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	70.000.000,00	49.549.500,00	70,79	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>688.592.200,00</b>	<b>639.320.922,00</b>	<b>92,84</b>	<b>516.249.850,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>11.117.087.038,00</b>	<b>7.777.197.505,00</b>	<b>69,96</b>	<b>5.912.303.454,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(11.117.087.038,00)</b>	<b>(7.777.197.505,00)</b>	<b>69,96</b>	<b>(5.912.303.454,00)</b>

Kab. Muara Enim, 13 Januari 2025  
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Panca Surya Diharta, S.H. NIP. 196803081993021001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	4.477.573.518,00	4.179.915.281,87	93,35	3.401.360.744,10
5.1	BELANJA OPERASI	3.610.541.652,00	3.320.591.672,00	91,97	2.956.607.486,10
5.1.01	Belanja Pegawai	2.206.218.896,00	2.024.439.558,00	91,76	1.979.245.895,10
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.163.730.044,00	1.101.474.173,00	94,65	1.145.550.192,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	854.923.918,92	844.174.964,00	98,74	869.782.300,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	769.785.368,92	769.785.368,00	100,00	869.782.300,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	85.138.550,00	74.389.596,00	87,37	0,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	120.075.454,00	99.304.166,00	82,70	104.483.604,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	109.858.828,00	90.334.086,00	82,23	104.483.604,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.216.626,00	8.970.080,00	87,80	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.300.210,00	77.990.000,00	93,63	84.280.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.300.210,00	77.990.000,00	93,63	84.280.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.079.250,00	18.895.000,00	69,78	22.795.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	21.760.500,00	15.195.000,00	69,83	22.795.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.318.750,00	3.700.000,00	69,57	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	69.628.209,00	55.111.620,00	79,15	61.412.160,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	63.392.847,00	49.318.020,00	77,80	61.412.160,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.235.362,00	5.793.600,00	92,92	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.660.591,00	946.701,00	25,86	2.788.449,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.660.591,00	946.701,00	25,86	2.788.449,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	22.411,08	11.722,00	52,30	8.679,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.914,08	10.243,00	51,44	8.679,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.497,00	1.479,00	59,23	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.037.728.852,00	920.925.385,00	88,74	830.455.703,10
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.037.728.852,00	920.925.385,00	88,74	830.455.703,10
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	977.246.332,00	871.146.867,00	89,14	830.455.703,10
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	60.482.520,00	49.778.518,00	82,30	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obje	4.760.000,00	2.040.000,00	42,86	3.240.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	4.760.000,00	2.040.000,00	42,86	3.240.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.760.000,00	2.040.000,00	42,86	3.240.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.404.322.756,00	1.296.152.114,00	92,30	977.361.591,00
5.1.02.01	Belanja Barang	513.465.180,00	461.765.050,00	89,93	335.315.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	513.465.180,00	461.765.050,00	89,93	335.315.700,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.334.000,00	10.334.000,00	100,00	9.976.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.268.800,00	15.062.500,00	98,65	14.300.200,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	36.000.000,00	35.723.700,00	99,23	35.286.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kan	80.876.830,00	53.584.500,00	66,25	33.930.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.508.800,00	15.813.900,00	70,26	17.545.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.215.800,00	5.160.000,00	98,93	5.080.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kant	6.174.600,00	5.694.750,00	92,23	5.809.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	55.217.100,00	54.899.500,00	99,42	33.118.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan ur	11.832.050,00	9.505.000,00	80,33	3.780.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.025.000,00	147.225.000,00	98,13	108.420.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	24.120.000,00	22.920.000,00	95,02	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.540.000,00	9.540.000,00	100,00	10.070.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	11.700.000,00	11.700.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	10.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	8.152.200,00	8.152.200,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	49.000.000,00	38.950.000,00	79,49	47.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	506.192.300,00	475.031.796,00	93,84	438.582.190,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	349.961.800,00	319.981.809,00	91,43	306.845.190,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pe	900.000,00	900.000,00	100,00	900.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	7.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelar	128.400.000,00	128.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	127.560.000,00	112.320.000,00	88,05	112.320.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	19.125.000,00	19.125.000,00	100,00	141.900.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.680.000,00	20.330.000,00	79,17	20.330.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.840.000,00	12.840.000,00	100,00	12.840.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	10.924.200,00	10.680.584,00	97,77	6.306.340,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.880.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.252.600,00	3.386.225,00	79,63	2.668.850,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	7.400.500,00	6.999.987,00	94,59	5.787.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	7.400.500,00	6.999.987,00	94,59	5.787.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	45.580.000,00	45.300.000,00	99,39	45.700.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.580.000,00	6.300.000,00	95,74	4.200.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	36.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	5.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	48.000.000,00	47.500.000,00	98,96	48.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	48.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00	11.500.000,00	95,83	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	55.250.000,00	55.250.000,00	100,00	32.250.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	43.250.000,00	43.250.000,00	100,00	32.250.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	63.340.000,00	45.421.000,00	71,71	8.800.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	63.340.000,00	45.421.000,00	71,71	8.800.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Dara	51.930.000,00	35.735.000,00	68,81	3.170.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	5.000.000,00	3.726.000,00	74,52	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Persona	3.650.000,00	3.200.000,00	87,67	3.600.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Pe	2.760.000,00	2.760.000,00	100,00	2.030.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	296.975.276,00	289.584.268,00	97,51	180.363.701,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	296.975.276,00	289.584.268,00	97,51	180.363.701,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	296.975.276,00	289.584.268,00	97,51	180.363.701,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pih	24.350.000,00	24.350.000,00	100,00	14.300.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	6.800.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00	6.800.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	7.500.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	7.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.610.541.652,00	3.320.591.672,00	91,97	2.956.607.486,10
5.2	BELANJA MODAL	867.031.866,00	859.323.609,87	99,11	444.753.258,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	430.840.880,00	430.268.880,00	99,87	170.447.258,00

5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	103,720,880.00	103,720,880.00	100.00	42,500,000.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00	25,375,000.00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	27,000,000.00	27,000,000.00	100.00	25,375,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	76,720,880.00	76,720,880.00	100.00	17,125,000.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	52,720,880.00	52,720,880.00	100.00	17,125,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00	0.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	91,000,000.00	90,750,000.00	99.73	0.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	91,000,000.00	90,750,000.00	99.73	0.00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	91,000,000.00	90,750,000.00	99.73	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	236,120,000.00	235,798,000.00	99.86	56,342,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	142,800,000.00	142,790,000.00	99.99	0.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	142,800,000.00	142,790,000.00	99.99	0.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	93,320,000.00	93,008,000.00	99.67	56,342,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	93,320,000.00	93,008,000.00	99.67	56,342,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	436,190,986.00	429,054,729.87	98.36	274,306,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	436,190,986.00	429,054,729.87	98.36	274,306,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	436,190,986.00	429,054,729.87	98.36	274,306,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	436,190,986.00	429,054,729.87	98.36	274,306,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	867,031,866.00	859,323,609.87	99.11	444,753,258.00
	JUMLAH BELANJA	4,477,573,518.00	4,179,915,281.87	93.35	3,401,360,744.10
	SURPLUS/DEFISIT	( 4,477,573,518.00 )	( 4,179,915,281.87 )	93.35	( 3,401,360,744.10 )

Kab. Muara Enim, 04 Maret 2025  
Kepala Kecamatan Semende Darat Ulu

Dani Rapiko, SSTP.  
NIP. 198308302001121001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM  
KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	4.399.857.683,00	3.552.539.576,00	80,74	3.188.826.246,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.865.315.180,00	3.037.509.576,00	78,58	2.204.360.646,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.896.855.125,00	1.264.291.568,00	66,65	1.027.175.031,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.968.460.055,00	1.773.218.008,00	90,08	1.177.185.615,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.865.315.180,00	3.037.509.576,00	78,58	2.204.360.646,00
5.2	BELANJA MODAL	534.542.503,00	515.030.000,00	96,35	984.465.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	413.542.503,00	394.680.000,00	95,44	556.015.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	121.000.000,00	120.350.000,00	99,46	378.640.600,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	49.810.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	534.542.503,00	515.030.000,00	96,35	984.465.600,00
	JUMLAH BELANJA	4.399.857.683,00	3.552.539.576,00	80,74	3.188.826.246,00
	SURPLUS/DEFISIT	(4.399.857.683,00)	(3.552.539.576,00)	80,74	(3.188.826.246,00)





PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	3.849.940.151,00	3.430.762.273,00	89,11	2.786.415.049,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.080.090.251,00	2.661.910.373,00	86,42	2.150.485.549,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.667.568.176,00	1.431.427.614,00	85,84	1.182.026.838,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	909.638.115,00	713.863.829,00	78,48	643.458.315,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	682.651.702,00	551.475.690,00	80,78	493.006.700,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	649.204.414,00	529.050.490,00	81,49	493.006.700,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	33.447.288,00	22.425.200,00	67,05	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	77.474.482,00	62.983.462,00	81,30	56.912.034,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	73.460.807,00	62.983.462,00	85,74	56.912.034,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.013.675,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	84.952.000,00	53.500.000,00	62,98	51.500.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	84.952.000,00	53.500.000,00	62,98	51.500.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.749.000,00	7.380.000,00	95,24	360.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.749.000,00	7.380.000,00	95,24	360.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	12.489.625,00	8.925.000,00	71,46	9.950.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.403.750,00	7.630.000,00	73,34	9.950.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.085.875,00	1.295.000,00	62,08	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	39.861.779,00	28.171.380,00	70,67	29.474.940,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	37.412.172,00	27.664.440,00	73,95	29.474.940,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.449.607,00	506.940,00	20,69	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.433.207,00	1.422.604,00	32,09	2.248.556,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.433.207,00	1.422.604,00	32,09	2.248.556,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	26.320,00	5.693,00	21,63	6.085,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.350,00	5.112,00	20,17	6.085,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	970,00	581,00	59,90	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	755.210.061,00	714.843.785,00	94,65	538.568.523,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	755.210.061,00	714.843.785,00	94,65	538.568.523,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	732.529.116,00	697.227.242,00	95,18	538.568.523,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	22.680.945,00	17.616.543,00	77,67	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obje	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.412.522.075,00	1.230.482.759,00	87,11	968.458.711,00
5.1.02.01	Belanja Barang	513.838.400,00	450.781.700,00	87,73	297.102.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	513.838.400,00	450.781.700,00	87,73	297.102.500,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	5.367.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.730.200,00	15.680.000,00	99,68	7.140.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	31.840.400,00	31.450.000,00	98,77	24.450.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kan	63.092.900,00	58.497.000,00	92,72	24.100.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.095.700,00	12.239.000,00	45,17	8.570.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.995.200,00	4.900.000,00	98,09	4.950.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kant	13.990.700,00	13.955.000,00	99,74	6.425.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	70.603.400,00	70.538.000,00	99,91	42.300.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan ur	13.145.000,00	13.145.000,00	100,00	5.645.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	204.344.900,00	161.377.700,00	78,97	100.355.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00	47.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	560.308.875,00	522.272.522,00	93,21	489.161.367,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	344.308.875,00	322.822.522,00	93,76	318.624.367,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pe	3.000.000,00	2.100.000,00	70,00	3.100.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelar	128.400.000,00	117.700.000,00	91,67	128.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.480.000,00	30.480.000,00	100,00	30.480.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	60.960.000,00	60.960.000,00	100,00	60.960.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.680.000,00	23.540.000,00	91,67	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.680.000,00	23.540.000,00	91,67	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00	16.500.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	15.028.000,00	14.102.522,00	93,84	13.984.367,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	1.900.000,00	87,96	2.160.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.420.875,00	0,00	0,00	330.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	11.550.000,00	0,00	0,00	5.787.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	11.550.000,00	0,00	0,00	5.787.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	79.350.000,00	79.350.000,00	100,00	53.350.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00	48.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.350.000,00	5.350.000,00	100,00	5.350.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	52.500.000,00	52.500.000,00	100,00	48.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	40.500.000,00	40.500.000,00	100,00	36.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	72.600.000,00	67.600.000,00	93,11	63.400.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	72.600.000,00	67.600.000,00	93,11	63.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	68.760.000,00	68.500.000,00	99,62	38.200.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	68.760.000,00	68.500.000,00	99,62	38.200.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Dara	60.000.000,00	59.800.000,00	99,67	33.950.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Persona	8.760.000,00	8.700.000,00	99,32	4.250.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	236.114.800,00	155.428.537,00	65,83	113.994.844,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	236.114.800,00	155.428.537,00	65,83	113.994.844,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	236.114.800,00	155.428.537,00	65,83	113.994.844,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pih	33.500.000,00	33.500.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	33.500.000,00	33.500.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	33.500.000,00	33.500.000,00	100,00	30.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.080.090.251,00	2.661.910.373,00	86,42	2.150.485.549,00
5.2	BELANJA MODAL	769.849.900,00	768.851.900,00	99,87	635.929.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	270.849.900,00	270.849.900,00	100,00	229.225.500,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	248.021.900,00	248.021.900,00	100,00	28.227.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	248.021.900,00	248.021.900,00	100,00	28.227.500,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	169.151.900,00	169.151.900,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Peningin	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	0,00

5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.328.000,00	5.328.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	120.998.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	64.658.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	64.658.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	56.340.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	56.340.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	499.000.000,00	498.002.000,00	99,80	406.704.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	499.000.000,00	498.002.000,00	99,80	381.341.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	499.000.000,00	498.002.000,00	99,80	216.841.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	250.000.000,00	249.500.000,00	99,80	167.341.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	174.000.000,00	173.652.000,00	99,80	0,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	75.000.000,00	74.850.000,00	99,80	49.500.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	164.500.000,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	0,00	0,00	0,00	164.500.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	25.363.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	25.363.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	25.363.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	769.849.900,00	768.851.900,00	99,87	635.929.500,00
	JUMLAH BELANJA	3.849.940.151,00	3.430.762.273,00	89,11	2.786.415.049,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.849.940.151,00)	(3.430.762.273,00)	89,11	(2.786.415.049,00)

Kab. Muara Enim, 20 Januari 2025  
Kepala Kecamatan Semende Darat Laut

Hasbullah Yusuf, S.H.,M.M  
NIP. 197409011993031001



## PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

## KECAMATAN TANJUNG AGUNG

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.742.148.480,00</b>	<b>4.435.020.883,00</b>	<b>93,52</b>	<b>3.249.425.786,67</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.790.598.685,00</b>	<b>3.500.536.333,00</b>	<b>92,35</b>	<b>2.874.110.786,67</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.823.720.363,00	1.636.255.870,00	89,72	1.416.654.283,67
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	937.996.817,00	852.843.509,00	90,92	800.221.884,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	744.645.866,00	677.388.612,00	90,97	634.568.700,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	675.468.850,00	613.316.612,00	90,80	634.568.700,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	69.177.016,00	64.072.000,00	92,62	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	72.847.775,00	64.974.656,00	89,19	59.005.954,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	64.044.050,00	56.837.512,00	88,75	59.005.954,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.803.725,00	8.137.144,00	92,43	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	58.045.750,00	54.040.000,00	93,10	48.640.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	58.045.750,00	54.040.000,00	93,10	48.640.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	21.184.905,00	18.745.000,00	88,48	19.840.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.363.500,00	15.045.000,00	86,65	19.840.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.821.405,00	3.700.000,00	96,82	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	39.722.235,00	36.861.780,00	92,80	36.354.840,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	34.464.395,00	32.009.640,00	92,88	36.354.840,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.257.840,00	4.852.140,00	92,28	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.525.815,00	824.586,00	54,04	1.805.413,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.525.815,00	824.586,00	54,04	1.805.413,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	24.471,00	8.750,00	36,27	6.977,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.179,00	7.760,00	33,48	6.977,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.292,00	1.115,00	86,30	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	880.283.546,00	777.992.361,00	88,38	613.712.399,67
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	880.283.546,00	777.992.361,00	88,38	613.712.399,67
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	824.841.236,00	727.636.628,00	88,22	613.712.399,67
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	55.442.310,00	50.355.733,00	90,83	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN	5.440.000,00	5.420.000,00	99,63	2.720.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	5.440.000,00	5.420.000,00	99,63	2.720.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.440.000,00	5.420.000,00	99,63	2.720.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.966.878.322,00	1.864.280.463,00	94,78	1.457.456.503,00
5.1.02.01	Belanja Barang	860.739.047,00	808.265.362,00	93,90	532.271.021,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	860.739.047,00	808.265.362,00	93,90	532.271.021,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	60.584.600,00	59.387.500,00	98,02	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	26.044.000,00	18.120.000,00	69,57	25.953.500,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	22.789.388,00	19.555.862,00	85,81	19.700.821,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	85.361.334,00	84.725.000,00	99,25	83.428.300,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	63.430.000,00	59.836.000,00	94,33	30.088.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.480.000,00	4.480.000,00	100,00	3.740.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	23.003.125,00	23.000.000,00	99,99	14.435.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	68.928.200,00	68.924.000,00	99,99	23.280.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.802.000,00	26.802.000,00	100,00	24.000.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.550.000,00	9.800.000,00	92,89	9.100.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	5.488.800,00	5.487.000,00	99,97	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	282.620.000,00	251.813.000,00	89,10	106.575.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8.442.000,00	8.400.000,00	99,50	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	38.085.600,00	34.055.000,00	89,42	84.770.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	14.050.000,00	14.050.000,00	100,00	7.950.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	34.250.000,00	34.000.000,00	99,27	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	750.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	75.830.000,00	75.830.000,00	100,00	85.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	637.847.660,00	603.709.473,00	94,65	552.156.963,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	387.463.160,00	371.225.473,00	95,81	340.390.963,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	4.800.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	21.700.000,00	21.700.000,00	100,00	11.200.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	1.400.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	108.070.000,00	108.070.000,00	100,00	124.120.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	28.080.000,00	28.080.000,00	100,00	66.600.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	40.920.000,00	38.920.000,00	95,11	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	11.310.000,00	11.310.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	51.360.000,00	43.870.000,00	85,42	51.360.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	38.520.000,00	38.520.000,00	100,00	38.520.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	6.600.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	7.500.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.005.000,00	395.000,00	39,30	366.497,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	37.106.160,00	33.077.473,00	89,14	27.924.466,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.892.000,00	6.783.000,00	76,28	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.484.500,00	5.184.000,00	94,52	4.966.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	5.484.500,00	5.184.000,00	94,52	4.966.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	74.100.000,00	72.300.000,00	97,57	63.800.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	60.200.000,00	60.200.000,00	100,00	58.400.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	13.900.000,00	12.100.000,00	87,05	4.200.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	57.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	57.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	122.800.000,00	107.000.000,00	87,13	86.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	79.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	84.300.000,00	83.500.000,00	99,05	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	22.500.000,00	7.500.000,00	33,33	7.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	31.224.815,00	30.040.000,00	96,21	14.400.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.224.815,00	30.040.000,00	96,21	14.400.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.324.815,00	13.040.000,00	97,86	7.300.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.500.000,00	8.000.000,00	94,12	3.650.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,00	6.500.000,00	94,20	3.450.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	386.416.800,00	371.615.628,00	96,17	311.828.519,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	386.416.800,00	371.615.628,00	96,17	311.828.519,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	386.416.800,00	371.615.628,00	96,17	311.828.519,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.650.000,00	50.650.000,00	100,00	46.800.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	50.650.000,00	50.650.000,00	100,00	46.800.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	50.650.000,00	50.650.000,00	100,00	46.800.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>3.790.598.685,00</b>	<b>3.500.536.333,00</b>	<b>92,35</b>	<b>2.874.110.786,67</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>951.549.795,00</b>	<b>934.484.550,00</b>	<b>98,21</b>	<b>375.315.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	458.249.795,00	453.274.000,00	98,91	197.815.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	46.940.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	46.940.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	46.940.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	251.524.595,00	249.650.000,00	99,25	98.200.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	74.400.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	74.400.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	247.524.595,00	245.650.000,00	99,24	23.800.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	125.520.000,00	124.400.000,00	99,11	16.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	47.154.595,00	46.750.000,00	99,14	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	74.850.000,00	74.500.000,00	99,53	7.800.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	181.725.200,00	178.624.000,00	98,29	51.375.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	129.600.000,00	128.640.000,00	99,26	42.525.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	129.600.000,00	128.640.000,00	99,26	42.525.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	52.125.200,00	49.984.000,00	95,89	8.850.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	52.125.200,00	49.984.000,00	95,89	8.850.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	493.300.000,00	481.210.550,00	97,55	177.500.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	433.980.000,00	422.210.550,00	97,29	177.500.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	312.510.000,00	301.210.550,00	96,38	177.500.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	185.320.000,00	184.248.000,00	99,42	177.500.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	71.000.000,00	60.962.550,00	85,86	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	56.190.000,00	56.000.000,00	99,66	0,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	121.470.000,00	121.000.000,00	99,61	0,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	121.470.000,00	121.000.000,00	99,61	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	59.320.000,00	59.000.000,00	99,46	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	59.320.000,00	59.000.000,00	99,46	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	59.320.000,00	59.000.000,00	99,46	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>951.549.795,00</b>	<b>934.484.550,00</b>	<b>98,21</b>	<b>375.315.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.742.148.480,00</b>	<b>4.435.020.883,00</b>	<b>93,52</b>	<b>3.249.425.786,67</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(4.742.148.480,00)</b>	<b>(4.435.020.883,00)</b>	<b>93,52</b>	<b>(3.249.425.786,67)</b>

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
--------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------

Kab. Muara Enim, 30 Januari 2025  
Kepala Kecamatan Tanjung Agung

H. Cholid Tri Aquarian, S.STP., M. Si.  
NIP. 197901291998021001



## PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

## KECAMATAN LAWANG KIDUL

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>9.333.239.486,00</b>	<b>8.130.630.251,00</b>	<b>87,11</b>	<b>6.861.456.271,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.846.979.486,00</b>	<b>7.649.730.251,00</b>	<b>86,47</b>	<b>6.340.131.271,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	4.044.821.057,00	3.344.581.868,00	82,69	2.932.760.597,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.449.635.320,00	1.877.030.529,00	76,62	1.694.171.047,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.894.256.110,00	1.454.232.311,00	76,77	1.308.311.512,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.842.808.822,00	1.412.585.518,00	76,65	1.308.311.512,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	51.447.288,00	41.646.793,00	80,95	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	214.550.039,00	169.775.108,00	79,13	147.360.448,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	203.468.424,00	163.944.556,00	80,57	147.360.448,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.081.615,00	5.830.552,00	52,61	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	186.345.000,00	139.275.000,00	74,74	130.790.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	186.345.000,00	139.275.000,00	74,74	130.790.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	235.875,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	235.875,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	42.390.250,00	23.725.000,00	55,97	23.375.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	33.865.250,00	21.320.000,00	62,96	23.375.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.525.000,00	2.405.000,00	28,21	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	102.867.179,00	87.483.360,00	85,04	81.182.820,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	95.433.312,00	83.717.520,00	87,72	81.182.820,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.433.867,00	3.765.840,00	50,66	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.961.000,00	2.518.507,00	28,11	3.131.804,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8.961.000,00	2.518.507,00	28,11	3.131.804,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.867,00	21.243,00	71,13	19.463,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.625,00	20.308,00	89,76	19.463,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.242,00	935,00	12,91	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.593.385.737,00	1.465.751.339,00	91,99	1.236.039.550,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.593.385.737,00	1.465.751.339,00	91,99	1.236.039.550,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.540.463.532,00	1.431.992.878,00	92,96	1.236.039.550,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	52.922.205,00	33.758.461,00	63,79	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	2.550.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	2.550.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	2.550.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.802.158.429,00	4.305.148.383,00	89,65	3.407.370.674,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.625.022.929,00	1.598.876.000,00	98,39	1.455.145.058,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.625.022.929,00	1.598.876.000,00	98,39	1.455.145.058,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	40.452.000,00	40.262.000,00	99,53	15.452.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	166.149.129,00	143.025.100,00	86,08	121.559.958,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.494.200,00	19.313.200,00	99,07	9.460.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	7.182.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	17.142.500,00	17.116.000,00	99,85	15.552.600,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	345.000.000,00	344.950.000,00	99,99	106.130.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	685.000.000,00	682.890.000,00	99,69	867.878.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	177.910.100,00	177.444.700,00	99,74	203.900.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	76.000.000,00	76.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	13.780.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	22.750.000,00	22.750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	69.125.000,00	69.125.000,00	100,00	36.250.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.533.873.500,00	2.262.341.626,00	89,28	1.735.295.291,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.255.759.500,00	2.009.007.626,00	89,06	1.604.138.091,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.100.000,00	19.500.000,00	97,01	73.400.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	7.200.000,00	6.000.000,00	83,33	4.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	488.250.000,00	293.400.000,00	60,09	201.250.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.311.480.000,00	1.284.060.000,00	97,91	946.040.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	127.560.000,00	127.560.000,00	100,00	126.955.200,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	102.760.000,00	91.800.000,00	89,33	69.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.840.000,00	12.840.000,00	100,00	12.840.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	64.200.000,00	64.200.000,00	100,00	64.200.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	36.600.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perbaikan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	17.424.000,00	13.055.074,00	74,93	19.444.287,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.800.000,00	1.751.100,00	97,28	1.305.750,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	40.776.000,00	34.841.452,00	85,45	29.763.104,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.369.500,00	0,00	0,00	3.339.750,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.000.000,00	5.184.000,00	43,20	10.157.200,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	12.000.000,00	5.184.000,00	43,20	10.157.200,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	45.050.000,00	45.050.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.050.000,00	15.050.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	221.064.000,00	203.100.000,00	91,87	121.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	205.600.000,00	195.600.000,00	95,14	114.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	15.464.000,00	7.500.000,00	48,50	7.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	41.500.000,00	41.250.000,00	99,40	14.500.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.500.000,00	26.250.000,00	99,06	14.500.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	24.500.000,00	24.450.000,00	99,80	14.500.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	601.762.000,00	402.680.757,00	66,92	202.430.325,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	601.762.000,00	402.680.757,00	66,92	202.430.325,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	601.762.000,00	402.680.757,00	66,92	202.430.325,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>8.846.979.486,00</b>	<b>7.649.730.251,00</b>	<b>86,47</b>	<b>6.340.131.271,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>486.260.000,00</b>	<b>480.900.000,00</b>	<b>98,90</b>	<b>521.325.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.260.000,00	132.300.000,00	97,09	321.670.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	91.260.000,00	87.300.000,00	95,66	46.940.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	91.260.000,00	87.300.000,00	95,66	46.940.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	91.260.000,00	87.300.000,00	95,66	46.940.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	122.292.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	9.710.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	9.710.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	112.582.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	39.200.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	73.382.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	152.438.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	152.438.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	152.438.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	350.000.000,00	348.600.000,00	99,60	199.655.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	350.000.000,00	348.600.000,00	99,60	199.655.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	350.000.000,00	348.600.000,00	99,60	199.655.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	350.000.000,00	348.600.000,00	99,60	199.655.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>486.260.000,00</b>	<b>480.900.000,00</b>	<b>98,90</b>	<b>521.325.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>9.333.239.486,00</b>	<b>8.130.630.251,00</b>	<b>87,11</b>	<b>6.861.456.271,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(9.333.239.486,00)</b>	<b>(8.130.630.251,00)</b>	<b>87,11</b>	<b>(6.861.456.271,00)</b>

Kab. Muara Enim, 30 Januari 2025  
Kepala Kecamatan Lawang Kidul

Drs. Edi Susanto, M.M.  
NIP. 197409211993021001



## PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

## KECAMATAN MUARA ENIM

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>14.584.259.176,00</b>	<b>12.719.893.907,00</b>	<b>87,22</b>	<b>12.258.692.373,90</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>12.903.919.276,00</b>	<b>11.076.313.907,00</b>	<b>85,84</b>	<b>11.125.547.373,90</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	5.930.033.489,00	4.743.852.808,00	80,00	4.568.539.271,90
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.186.249.949,00	2.784.100.766,00	87,38	2.825.602.503,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.453.334.242,00	2.240.888.068,00	91,34	2.266.360.552,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.407.668.054,00	2.196.037.668,00	91,21	2.254.494.552,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.666.188,00	44.850.400,00	98,21	11.866.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	230.157.154,00	189.387.574,00	82,29	192.944.294,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	224.677.211,00	184.005.526,00	81,90	191.520.374,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.479.943,00	5.382.048,00	98,21	1.423.920,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	244.522.000,00	186.460.000,00	76,25	175.030.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	244.522.000,00	186.460.000,00	76,25	175.030.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	70.734.625,00	47.135.000,00	66,64	58.645.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	68.093.750,00	44.545.000,00	65,42	57.905.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.640.875,00	2.590.000,00	98,07	740.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	169.290.803,00	118.261.860,00	69,86	127.893.720,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	166.189.416,00	115.220.220,00	69,33	127.024.680,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.101.387,00	3.041.640,00	98,07	869.040,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.158.363,00	1.936.673,00	10,67	4.695.315,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.158.363,00	1.936.673,00	10,67	4.695.315,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	52.762,00	31.591,00	59,87	33.622,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	51.918,00	30.987,00	59,68	33.558,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	844,00	604,00	71,56	64,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.743.783.540,00	1.959.752.042,00	71,43	1.742.936.768,90
5.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.743.783.540,00	1.959.752.042,00	71,43	1.742.936.768,90
5.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.708.502.070,00	1.927.158.937,00	71,15	1.732.939.006,90
5.1.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	35.281.470,00	32.593.105,00	92,38	9.997.762,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.973.885.787,00	6.332.461.099,00	90,80	6.557.008.102,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.900.441.697,00	2.604.627.400,00	89,80	3.274.843.724,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.900.441.697,00	2.604.627.400,00	89,80	3.274.843.724,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	46.038.700,00	45.500.000,00	98,83	33.867.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	9.855.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	22.540.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	30.024.832,00	29.845.000,00	99,40	14.232.600,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	422.393.446,00	354.793.200,00	84,00	275.344.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	166.662.900,00	127.704.500,00	76,62	70.409.700,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.848.000,00	8.700.000,00	98,33	7.010.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	69.277.219,00	62.274.700,00	89,89	15.488.400,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.980.600,00	14.574.500,00	97,29	1.076.563.324,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.187.500.000,00	1.182.690.000,00	99,59	1.089.875.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	706.151.000,00	533.455.500,00	75,54	396.591.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	180.000.000,00	179.990.000,00	99,99	197.442.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	23.625.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	34.965.000,00	31.500.000,00	90,09	27.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.352.826.590,00	3.091.359.986,00	92,20	2.852.197.476,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.948.373.590,00	2.746.761.266,00	93,16	2.515.092.176,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	37.950.000,00	37.950.000,00	100,00	54.900.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	12.600.000,00	11.700.000,00	92,86	8.100.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	151.500.000,00	149.500.000,00	98,68	37.500.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertibatan Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.356.720.000,00	1.292.300.000,00	95,25	1.057.440.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	119.660.000,00	105.890.000,00	88,49	106.820.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	56.620.000,00	54.080.000,00	95,51	50.670.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	820.780.000,00	784.780.000,00	95,61	543.090.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	115.560.000,00	115.560.000,00	100,00	115.560.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	89.880.000,00	89.880.000,00	100,00	89.880.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0,00	0,00	0,00	371.999.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	10.000.000,00	7.810.050,00	78,10	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	29.216.250,00	19.854.000,00	67,96	17.519.924,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	124.607.340,00	67.185.741,00	53,92	52.912.877,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.780.000,00	3.060.000,00	80,95	3.040.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	15.250.000,00	5.211.475,00	34,17	2.660.375,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.969.000,00	5.482.720,00	49,98	5.042.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	10.969.000,00	5.482.720,00	49,98	5.042.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	117.684.000,00	117.416.000,00	99,77	42.668.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.804.000,00	30.536.000,00	99,13	34.268.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	74.880.000,00	74.880.000,00	100,00	8.400.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	148.995.300,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	148.995.300,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	265.400.000,00	211.300.000,00	79,62	128.400.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	247.400.000,00	193.300.000,00	78,13	108.400.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	151.930.000,00	150.060.000,00	98,77	90.340.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	84.450.000,00	82.660.000,00	97,88	90.340.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	67.160.000,00	67.160.000,00	100,00	33.540.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	36.900.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	10.800.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.030.000,00	6.600.000,00	82,19	9.100.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.760.000,00	2.400.000,00	86,96	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	67.480.000,00	67.400.000,00	99,88	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	67.480.000,00	67.400.000,00	99,88	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	556.687.500,00	474.413.713,00	85,22	321.626.902,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	556.687.500,00	474.413.713,00	85,22	321.626.902,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	308.903.600,00	299.881.513,00	97,08	321.626.902,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	247.783.900,00	174.532.200,00	70,44	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	18.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>12.903.919.276,00</b>	<b>11.076.313.907,00</b>	<b>85,84</b>	<b>11.125.547.373,90</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.680.339.900,00</b>	<b>1.643.580.000,00</b>	<b>97,81</b>	<b>1.133.145.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	984.339.900,00	949.570.000,00	96,47	607.620.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	182.520.000,00	161.460.000,00	88,46	46.940.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	182.520.000,00	161.460.000,00	88,46	46.940.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	182.520.000,00	161.460.000,00	88,46	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	46.940.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.548.000,00	7.350.000,00	97,38	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	7.548.000,00	7.350.000,00	97,38	0,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	7.548.000,00	7.350.000,00	97,38	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	520.821.900,00	509.575.000,00	97,84	336.810.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	74.960.000,00	74.360.000,00	99,20	39.020.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	66.960.000,00	66.460.000,00	99,25	2.500.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	7.900.000,00	98,75	36.520.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	445.861.900,00	435.215.000,00	97,61	283.300.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	294.511.900,00	284.650.000,00	96,65	80.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	98.000.000,00	97.340.000,00	99,33	131.010.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	53.350.000,00	53.225.000,00	99,77	72.290.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	14.490.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	14.490.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	27.450.000,00	27.050.000,00	98,54	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	27.450.000,00	27.050.000,00	98,54	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	27.450.000,00	27.050.000,00	98,54	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	246.000.000,00	244.135.000,00	99,24	223.870.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	151.000.000,00	150.135.000,00	99,43	144.950.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	151.000.000,00	150.135.000,00	99,43	144.950.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	95.000.000,00	94.000.000,00	98,95	78.920.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	87.000.000,00	86.050.000,00	98,91	78.920.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	8.000.000,00	7.950.000,00	99,38	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	596.000.000,00	594.185.000,00	99,70	525.525.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	530.000.000,00	528.285.000,00	99,68	525.525.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	530.000.000,00	528.285.000,00	99,68	525.525.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	530.000.000,00	528.285.000,00	99,68	504.125.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	21.400.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	66.000.000,00	65.900.000,00	99,85	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	66.000.000,00	65.900.000,00	99,85	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	66.000.000,00	65.900.000,00	99,85	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	99.825.000,00	99,83	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	99.825.000,00	99,83	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	99.825.000,00	99,83	0,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	100.000.000,00	99.825.000,00	99,83	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>1.680.339.900,00</b>	<b>1.643.580.000,00</b>	<b>97,81</b>	<b>1.133.145.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>14.584.259.176,00</b>	<b>12.719.893.907,00</b>	<b>87,22</b>	<b>12.258.692.373,90</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(14.584.259.176,00)</b>	<b>(12.719.893.907,00)</b>	<b>87,22</b>	<b>(12.258.692.373,90)</b>

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023

Kab. Muara Enim, 30 Januari 2025  
Kepala Kecamatan Muara Enim

Elvik Fransiska, S.STP., M.Si.  
NIP. 197805181996121001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



KECAMATAN UJAN MAS  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	4,417,946,360.00	3,438,206,118.00	77.82	3,099,603,625.42
5.1	BELANJA OPERASI	3,940,281,196.00	2,961,684,954.00	75.16	2,415,603,825.42
5.1.01	Belanja Pegawai	2,527,266,007.00	1,814,285,095.00	71.79	1,488,847,534.42
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,441,060,663.00	981,405,882.00	68.10	872,410,634.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,137,394,128.00	785,551,394.00	69.07	675,930,200.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1,045,902,540.00	721,479,394.00	68.98	675,930,200.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	91,491,588.00	64,072,000.00	70.03	0.00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	121,585,378.00	69,080,450.00	56.82	70,578,790.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	111,445,043.00	69,080,450.00	61.99	70,578,790.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10,140,335.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	88,979,004.00	63,980,000.00	71.90	60,200,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	88,979,004.00	63,980,000.00	71.90	60,200,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	37,234,625.00	22,060,000.00	59.25	20,445,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	31,953,750.00	18,360,000.00	57.46	20,445,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5,280,875.00	3,700,000.00	70.06	0.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	49,204,226.00	39,106,800.00	79.48	43,089,900.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	43,061,439.00	37,658,400.00	87.45	43,089,900.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6,142,787.00	1,448,400.00	23.58	0.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6,633,493.00	1,616,759.00	24.37	2,157,461.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6,633,493.00	1,616,759.00	24.37	2,157,461.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29,809.00	10,479.00	35.15	9,283.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27,523.00	8,825.00	32.06	9,283.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,286.00	1,654.00	72.35	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,086,205,344.00	832,879,213.00	76.68	616,436,900.42
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,086,205,344.00	832,879,213.00	76.68	616,436,900.42
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,015,642,404.00	783,072,838.00	77.10	616,436,900.42
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	70,562,940.00	49,806,375.00	70.58	0.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,413,015,189.00	1,147,399,859.00	81.20	926,756,291.00
5.1.02.01	Belanja Barang	646,384,358.00	494,862,134.00	76.56	409,716,600.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	646,384,358.00	494,862,134.00	76.56	409,716,600.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8,500,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	500,000.00	310,000.00	62.00	0.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8,720,000.00	6,730,608.00	77.19	6,940,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34,717,247.00	14,573,000.00	41.98	32,967,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31,556,600.00	11,449,000.00	36.28	14,217,600.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,456,000.00	1,000,000.00	68.68	1,450,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2,293,185.00	0.00	0.00	1,937,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	93,028,526.00	92,178,526.00	99.09	73,580,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	21,500,000.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	38,500,000.00	23,800,000.00	61.82	6,300,000.00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	30,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	242,597,700.00	166,965,000.00	68.82	146,325,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	77,482,600.00	74,154,000.00	95.70	25,200,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7,420,000.00	7,420,000.00	100.00	7,420,000.00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12,939,000.00	12,932,000.00	99.95	7,500,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	16,793,500.00	16,750,000.00	99.74	12,180,000.00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	62,700,000.00	61,200,000.00	97.61	49,800,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	487,591,931.00	414,106,400.00	84.93	351,940,631.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	236,322,931.00	218,706,400.00	92.55	215,990,631.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pel	1,500,000.00	600,000.00	40.00	1,800,000.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	79,160,000.00	75,350,000.00	95.19	84,240,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	37,200,000.00	37,200,000.00	100.00	27,000,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25,680,000.00	25,680,000.00	100.00	25,680,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25,680,000.00	25,680,000.00	100.00	25,680,000.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	20,400,000.00	20,400,000.00	100.00	16,400,000.00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan List	11,880,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0.00	0.00	0.00	9,300,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	5,426,850.00	5,426,850.00	100.00	1,272,960.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	22,292,081.00	21,265,550.00	95.40	11,022,621.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7,104,000.00	7,104,000.00	100.00	7,080,000.00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0.00	0.00	0.00	5,069,800.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0.00	0.00	0.00	1,445,250.00
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	10,969,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	10,969,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	48,750,000.00	48,750,000.00	100.00	48,250,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	42,000,000.00	42,000,000.00	100.00	42,000,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6,750,000.00	6,750,000.00	100.00	6,250,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	55,000,000.00	55,000,000.00	100.00	52,000,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	43,000,000.00	43,000,000.00	100.00	52,000,000.00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	136,550,000.00	91,650,000.00	67.12	35,700,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	49,500,000.00	15,000,000.00	30.30	0.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	87,050,000.00	76,650,000.00	88.05	35,700,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3,894,500.00	0.00	0.00	3,900,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,894,500.00	0.00	0.00	3,900,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	1,494,500.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Persona	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Pe	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	208,144,400.00	178,531,325.00	85.77	120,699,060.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	208,144,400.00	178,531,325.00	85.77	120,699,060.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	208,144,400.00	178,531,325.00	85.77	120,699,060.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pih	67,000,000.00	59,900,000.00	89.40	40,500,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	67,000,000.00	59,900,000.00	89.40	40,500,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	67,000,000.00	59,900,000.00	89.40	40,500,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3,940,281,196.00	2,961,684,954.00	75.16	2,415,603,825.42
5.2	BELANJA MODAL	477,665,164.00	476,521,164.00	99.76	683,999,800.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139,621,164.00	139,621,164.00	100.00	138,999,800.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	80,520,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0.00	0.00	0.00	80,520,000.00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0.00	0.00	0.00	80,520,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	61,691,164.00	61,691,164.00	100.00	33,479,800.00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0.00	0.00	0.00	7,999,000.00

5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	0.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15,191,164.00	15,191,164.00	100.00	13,400,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	77,930,000.00	77,930,000.00	100.00	10,000,000.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	67,430,000.00	67,430,000.00	100.00	10,000,000.00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	67,430,000.00	67,430,000.00	100.00	10,000,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	10,500,000.00	10,500,000.00	100.00	0.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	10,500,000.00	10,500,000.00	100.00	0.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	288,044,000.00	287,150,000.00	99.69	545,000,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	288,044,000.00	287,150,000.00	99.69	465,500,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	288,044,000.00	287,150,000.00	99.69	465,500,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	288,044,000.00	287,150,000.00	99.69	366,000,000.00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0.00	0.00	0.00	99,500,000.00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0.00	0.00	0.00	79,500,000.00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0.00	0.00	0.00	79,500,000.00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0.00	0.00	0.00	79,500,000.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50,000,000.00	49,750,000.00	99.50	0.00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	50,000,000.00	49,750,000.00	99.50	0.00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	50,000,000.00	49,750,000.00	99.50	0.00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	50,000,000.00	49,750,000.00	99.50	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	477,665,164.00	476,521,164.00	99.76	683,999,800.00
	JUMLAH BELANJA	4,417,946,360.00	3,438,206,118.00	77.82	3,099,603,625.42
	SURPLUS/DEFISIT	(4,417,946,360.00)	(3,438,206,118.00)	77.82	(3,099,603,625.42)

Kab. Muara Enim, 16 Januari 2025  
Plt. Kepala Kecamatan Ujan Mas

Hasman Hadi, S.IP  
NIP. 196809141989031003



## PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

## KECAMATAN BENAKAT

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2023

01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.082.381.964</b>	<b>2.788.364.415,49</b>	<b>90,46</b>	<b>3.117.198.770,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.939.984.164</b>	<b>2.649.026.615,49</b>	<b>90,10</b>	<b>2.430.242.310,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.947.259.512	1.672.412.089,49	85,89	1.667.658.160,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.088.253.858	941.243.458,67	86,49	1.003.922.931,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	823.285.125	719.730.800,00	87,42	765.845.185,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	817.203.800	719.730.800,00	88,07	765.845.185,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	6.081.325	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	88.273.312	77.894.461,60	88,24	83.719.610,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	87.543.553	77.894.461,60	88,98	83.719.610,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	729.759	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	84.952.000	76.400.000,00	89,93	82.880.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	84.952.000	76.400.000,00	89,93	82.880.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.320.000	360.000,00	8,33	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.320.000	360.000,00	8,33	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.364.000	17.530.000,00	64,06	18.070.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.984.750	17.530.000,00	64,96	18.070.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	379.250	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	57.602.868	48.357.153,07	83,95	51.852.720,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	57.157.485	48.357.153,07	84,60	51.852.720,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	445.383	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.416.245	960.121,00	39,74	1.542.295,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.416.245	960.121,00	39,74	1.542.295,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	40.308	10.923,00	27,10	13.121,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	39.950	10.923,00	27,34	13.121,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	358	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	859.005.654	731.168.630,82	85,12	663.735.229,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	859.005.654	731.168.630,82	85,12	663.735.229,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	853.965.444	731.168.630,82	85,62	663.735.229,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.040.210	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	992.724.652	976.614.526,00	98,38	762.584.150,00
5.1.02.01	Belanja Barang	534.311.559	532.081.044,00	99,58	341.337.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	534.311.559	532.081.044,00	99,58	341.337.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0	0,00	0,00	32.042.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.394.736	9.869.500,00	94,95	8.153.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.243.700	25.452.300,00	96,98	52.170.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.373.323	12.360.002,00	99,89	14.836.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	899.500	899.500,00	100,00	899.400,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.017.200	4.017.000,00	100,00	6.300.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	27.078.100	27.078.000,00	100,00	51.273.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.645.000	9.635.000,00	99,90	12.000.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	239.765.000	239.107.742,00	99,73	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	127.530.000	127.527.000,00	100,00	97.633.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.760.000	15.760.000,00	100,00	16.530.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.480.000	8.250.000,00	97,29	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.125.000	13.125.000,00	100,00	10.500.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	39.000.000	39.000.000,00	100,00	39.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	236.713.448	223.988.000,00	94,62	234.360.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	141.173.448	132.448.000,00	93,82	139.660.000,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	4.950.000,00	91,67	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	21.400.000	20.000.000,00	93,46	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.125.000	10.125.000,00	100,00	15.960.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.680.000	24.000.000,00	93,46	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.680.000	24.000.000,00	93,46	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	18.400.000	18.400.000,00	100,00	18.400.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	13.600.000	13.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	2.394.000	0,00	0,00	900.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	10.606.000	10.323.000,00	97,33	7.980.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.518.800	2.400.000,00	95,28	2.520.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.369.648	4.650.000,00	86,60	2.400.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	36.540.000	36.540.000,00	100,00	24.300.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	36.000.000	36.000.000,00	100,00	24.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	540.000	540.000,00	100,00	300.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	39.000.000	35.000.000,00	89,74	36.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	39.000.000	35.000.000,00	89,74	6.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000	20.000.000,00	100,00	34.400.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	20.000.000	20.000.000,00	100,00	34.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	85.011.000	84.702.000,00	99,64	40.400.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.760.000	50.451.000,00	99,39	40.400.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.580.000	33.561.000,00	99,94	33.580.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.820.000	5.530.000,00	95,02	1.830.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.840.000	5.840.000,00	100,00	2.920.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.520.000	5.520.000,00	100,00	2.070.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.251.000	34.251.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	34.251.000	34.251.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	128.088.645	127.243.482,00	99,34	137.887.150,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	128.088.645	127.243.482,00	99,34	137.887.150,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	128.088.645	127.243.482,00	99,34	137.887.150,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.600.000	8.600.000,00	100,00	8.600.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.600.000	8.600.000,00	100,00	8.600.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	8.600.000	8.600.000,00	100,00	8.600.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>2.939.984.164</b>	<b>2.649.026.615,49</b>	<b>90,10</b>	<b>2.430.242.310,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>142.397.800</b>	<b>139.337.800,00</b>	<b>97,85</b>	<b>686.956.460,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142.397.800	139.337.800,00	97,85	133.140.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	50.000.000	46.940.000,00	93,88	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	50.000.000	46.940.000,00	93,88	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50.000.000	46.940.000,00	93,88	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	69.815.800	69.815.800,00	100,00	72.090.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.142.900	5.142.900,00	100,00	45.710.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.747.800	4.747.800,00	100,00	45.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	395.100	395.100,00	100,00	710.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	64.672.900	64.672.900,00	100,00	26.380.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	564.500	564.500,00	100,00	16.100.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	14.108.400	14.108.400,00	100,00	10.280.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000.000	50.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	22.582.000	22.582.000,00	100,00	61.050.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	22.582.000	22.582.000,00	100,00	45.850.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	22.582.000	22.582.000,00	100,00	45.850.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0	0,00	0,00	15.200.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0	0,00	0,00	15.200.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	380.860.600,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0,00	0,00	380.860.600,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	0,00	0,00	321.480.600,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0	0,00	0,00	222.300.600,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0	0,00	0,00	99.180.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	0,00	0,00	59.380.000,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	0	0,00	0,00	59.380.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	172.955.860,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	0,00	0,00	123.984.960,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0	0,00	0,00	123.984.960,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	0	0,00	0,00	123.984.960,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0	0,00	0,00	48.970.900,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0	0,00	0,00	48.970.900,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0	0,00	0,00	48.970.900,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>142.397.800</b>	<b>139.337.800,00</b>	<b>97,85</b>	<b>686.956.460,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.082.381.964</b>	<b>2.788.364.415,49</b>	<b>90,46</b>	<b>3.117.198.770,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(3.082.381.964)</b>	<b>(2.788.364.415,49)</b>	<b>90,46</b>	<b>(3.117.198.770,00)</b>

Kab. Muara Enim, 30 Januari  
2024  
Kepala Kecamatan Benakat

Hasbullah Yusuf, SH  
NIP. 197409011993031001

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



## PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

KECAMATAN GUNUNG MEGANG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	4,469,382,972.00	3,793,511,148.00	84.88	2,732,191,269.06
5.1	BELANJA OPERASI	4,211,850,652.00	3,537,558,828.00	83.99	2,618,566,569.06
5.1.01	Belanja Pegawai	2,142,568,154.00	1,623,871,451.00	75.79	1,184,339,739.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,194,088,021.00	888,051,617.00	74.37	663,522,643.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	910,897,062.00	674,875,830.00	74.09	495,266,900.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	834,860,748.00	610,803,830.00	73.16	495,266,900.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	76,036,314.00	64,072,000.00	84.27	0.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	105,076,958.00	89,948,906.00	85.60	67,187,472.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	96,308,768.00	81,811,762.00	84.95	67,187,472.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8,768,190.00	8,137,144.00	92.80	0.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	82,184,500.00	59,640,000.00	72.57	48,300,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	82,184,500.00	59,640,000.00	72.57	48,300,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	24,971,500.00	15,885,000.00	63.61	12,720,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	20,587,000.00	12,185,000.00	59.19	12,720,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4,384,500.00	3,700,000.00	84.39	0.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	67,646,234.00	47,217,840.00	69.80	39,613,740.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	52,868,598.00	42,365,700.00	80.13	39,613,740.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14,777,636.00	4,852,140.00	32.83	0.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3,279,220.00	475,531.00	14.50	426,313.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3,279,220.00	475,531.00	14.50	426,313.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	32,547.00	8,510.00	26.15	8,218.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30,150.00	7,395.00	24.53	8,218.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,397.00	1,115.00	46.52	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	947,800,133.00	735,819,834.00	77.63	520,217,096.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	947,800,133.00	735,819,834.00	77.63	520,217,096.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	894,877,928.00	686,179,398.00	76.68	520,217,096.00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	52,922,205.00	49,640,436.00	93.80	0.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	680,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	680,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2,069,282,498.00	1,913,687,377.00	92.48	1,434,226,830.06
5.1.02.01	Belanja Barang	696,811,272.00	616,137,600.00	88.42	495,881,100.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	696,811,272.00	616,137,600.00	88.42	495,881,100.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	32,394,100.00	25,142,100.00	77.61	30,262,500.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	16,579,732.00	16,578,000.00	99.99	18,452,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	68,932,326.00	57,412,000.00	83.29	58,539,400.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17,329,874.00	15,137,500.00	87.35	15,513,400.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5,745,600.00	4,510,000.00	78.49	3,750,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3,077,100.00	3,024,000.00	98.27	2,598,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	104,905,000.00	104,891,000.00	99.99	90,349,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan	30,500,000.00	10,807,000.00	35.43	4,846,800.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	321,843,000.00	286,556,000.00	89.04	162,810,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0.00	0.00	0.00	25,200,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6,360,000.00	6,360,000.00	100.00	6,360,000.00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	3,500,000.00	1,750,000.00	50.00	3,500,000.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17,100,000.00	15,450,000.00	90.35	17,100,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	7,344,540.00	7,320,000.00	99.67	0.00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	61,200,000.00	61,200,000.00	100.00	56,600,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	684,432,970.00	623,032,860.00	91.03	558,980,778.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	480,800,970.00	431,432,860.00	89.73	412,680,778.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara	5,850,000.00	5,850,000.00	100.00	4,950,000.00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	12,600,000.00	12,600,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	120,910,000.00	120,910,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	81,840,000.00	81,840,000.00	100.00	81,840,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0.00	0.00	0.00	148,800,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25,680,000.00	25,680,000.00	100.00	25,680,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25,680,000.00	25,680,000.00	100.00	25,680,000.00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00	9,000,000.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	94,800,000.00	84,100,000.00	88.71	88,900,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	11,197,142.00	3,825,250.00	34.16	3,552,870.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	48,543,828.00	21,715,260.00	44.73	22,813,658.00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	35,000,000.00	34,850,000.00	99.57	0.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8,200,000.00	3,882,350.00	47.35	1,464,250.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10,032,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	10,032,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	55,200,000.00	55,200,000.00	100.00	58,300,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	51,400,000.00	51,400,000.00	100.00	54,000,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3,800,000.00	3,800,000.00	100.00	4,300,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	48,000,000.00	48,000,000.00	100.00	48,000,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	36,000,000.00	36,000,000.00	100.00	48,000,000.00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan	90,400,000.00	88,400,000.00	97.79	40,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	73,400,000.00	73,400,000.00	100.00	40,000,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	17,000,000.00	15,000,000.00	88.24	0.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	317,221,456.00	307,562,000.00	96.95	178,760,952.06
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11,421,456.00	8,362,000.00	73.21	11,074,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-K	4,801,456.00	4,792,000.00	99.80	4,454,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga	3,050,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2,190,000.00	2,190,000.00	100.00	2,190,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Perse	1,380,000.00	1,380,000.00	100.00	1,380,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	305,800,000.00	299,200,000.00	97.84	167,686,952.06
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat	305,800,000.00	299,200,000.00	97.84	132,686,952.06
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pa	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	325,516,800.00	323,154,917.00	99.27	174,304,000.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	325,516,800.00	323,154,917.00	99.27	174,304,000.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	325,516,800.00	323,154,917.00	99.27	174,304,000.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pi	45,300,000.00	43,800,000.00	96.69	26,300,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyar	45,300,000.00	43,800,000.00	96.69	26,300,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	45,300,000.00	43,800,000.00	96.69	26,300,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4,211,850,652.00	3,537,558,828.00	83.99	2,618,566,569.06
5.2	BELANJA MODAL	257,532,320.00	255,952,320.00	99.39	113,624,700.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	257,532,320.00	255,952,320.00	99.39	113,624,700.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	46,940,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0.00	0.00	0.00	46,940,000.00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0.00	0.00	0.00	46,940,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	61,452,320.00	61,452,320.00	100.00	48,684,700.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	61,452,320.00	61,452,320.00	100.00	48,684,700.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	22,903,700.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	46,452,320.00	46,452,320.00	100.00	14,000,000.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0.00	0.00	0.00	11,781,000.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	196,080,000.00	194,500,000.00	99.19	7,500,000.00

5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	196,080,000.00	194,500,000.00	99.19	0.00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	196,080,000.00	194,500,000.00	99.19	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	257,532,320.00	255,952,320.00	99.39	113,624,700.00
	JUMLAH BELANJA	4,469,382,972.00	3,793,511,148.00	84.88	2,732,191,269.06
	SURPLUS/DEFISIT	( 4,469,382,972.00 )	( 3,793,511,148.00 )	84.88	( 2,732,191,269.06 )

Kab. Muara Enim, 16 Januari 2025  
Kepala Kecamatan Gunung Megang

Hendri Desta Kesuma, AP., M.Si.  
NIP. 197312281995011001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM KECAMATAN RAMBANG NIRU  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4,243,634,471.00</b>	<b>4,034,279,456.00</b>	<b>95.07</b>	<b>3,716,488,823.74</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4,089,310,271.00</b>	<b>3,880,746,456.00</b>	<b>94.90</b>	<b>3,513,701,823.74</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2,288,061,185.00	2,109,241,760.00	92.18	1,953,008,178.74
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,324,938,305.00	1,165,888,567.00	88.00	1,138,314,291.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	988,781,183.00	906,589,921.00	91.69	865,295,100.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	942,513,785.00	861,739,521.00	91.43	853,429,100.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	46,267,398.00	44,850,400.00	96.94	11,866,000.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	126,302,186.00	101,119,480.00	80.06	104,210,638.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	120,702,369.00	95,737,432.00	79.32	102,786,718.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5,599,817.00	5,382,048.00	96.11	1,423,920.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	84,952,000.00	76,020,000.00	89.49	81,410,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	84,952,000.00	76,020,000.00	89.49	81,410,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	38,874,625.00	24,281,850.00	62.46	24,025,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36,233,750.00	21,691,850.00	59.87	23,285,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2,640,875.00	2,590,000.00	98.07	740,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	82,511,663.00	56,342,760.00	68.28	61,701,840.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	79,410,276.00	53,301,120.00	67.12	60,832,800.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3,101,387.00	3,041,640.00	98.07	869,040.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3,470,333.00	1,523,714.00	43.91	1,658,146.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3,470,333.00	1,523,714.00	43.91	1,658,146.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	46,315.00	10,842.00	23.41	13,567.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45,074.00	10,238.00	22.71	13,503.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,241.00	604.00	48.67	64.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	963,122,880.00	943,353,193.00	97.95	814,693,887.74
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	963,122,880.00	943,353,193.00	97.95	814,693,887.74
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	927,600,232.00	908,095,664.00	97.90	804,618,255.74
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	35,522,648.00	35,257,529.00	99.25	10,075,632.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,801,249,086.00	1,771,504,696.00	98.35	1,560,693,645.00
5.1.02.01	Belanja Barang	610,361,826.00	608,472,220.00	99.69	499,038,300.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	610,361,826.00	608,472,220.00	99.69	499,038,300.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3,325,700.00	3,318,000.00	99.77	3,170,000.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5,615,000.00	5,615,000.00	99.99	4,520,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	21,289,388.00	21,285,000.00	99.98	16,482,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	74,463,800.00	74,068,800.00	99.47	65,325,700.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	19,444,400.00	19,258,920.00	99.03	13,757,600.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,811,200.00	2,810,000.00	99.96	2,803,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7,094,800.00	7,082,000.00	99.82	7,544,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	111,602,038.00	110,527,500.00	99.04	88,907,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23,000,000.00	23,000,000.00	100.00	103,866,000.00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada	23,100,000.00	23,100,000.00	100.00	26,350,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	218,870,000.00	218,712,000.00	99.93	123,813,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0.00	0.00	0.00	16,200,000.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakai Dinas Harian (PDH)	25,970,000.00	25,970,000.00	100.00	10,070,000.00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakai Batik Tradisional	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	16,230,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakai Olahraga	5,500,000.00	5,500,000.00	99.10	0.00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakai Paskibraka	62,225,000.00	62,225,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	511,399,260.00	495,642,198.00	96.92	496,363,090.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	259,649,260.00	255,842,198.00	98.53	242,870,290.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	3,600,000.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	28,080,000.00	28,080,000.00	100.00	26,280,000.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	38,520,000.00	38,520,000.00	100.00	38,520,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1,020,000.00	1,020,000.00	100.00	1,140,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	51,360,000.00	51,360,000.00	100.00	51,360,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	38,520,000.00	38,520,000.00	100.00	38,520,000.00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	7,200,000.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	17,100,000.00	16,875,000.00	98.68	21,310,000.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6,900,000.00	3,892,650.00	56.42	2,781,580.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	54,574,760.00	54,574,548.00	100.00	50,382,710.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3,574,500.00	3,000,000.00	83.93	1,776,000.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0.00	0.00	0.00	5,216,000.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	0.00	0.00	0.00	5,216,000.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	80,650,000.00	80,550,000.00	99.88	85,975,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	43,500,000.00	43,500,000.00	100.00	36,000,000.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	37,150,000.00	37,050,000.00	99.73	49,975,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	58,000,000.00	48,000,000.00	82.76	56,000,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	58,000,000.00	48,000,000.00	82.76	56,000,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	113,100,000.00	111,250,000.00	98.36	106,301,800.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	16,850,000.00	15,000,000.00	89.02	15,301,800.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	96,250,000.00	96,250,000.00	100.00	91,000,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	210,662,000.00	209,763,000.00	99.57	209,490,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11,330,000.00	11,330,000.00	100.00	11,330,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4,880,000.00	4,880,000.00	100.00	4,880,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4,380,000.00	4,380,000.00	100.00	4,380,000.00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2,070,000.00	2,070,000.00	100.00	2,070,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	199,332,000.00	198,433,000.00	99.55	198,160,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	199,332,000.00	198,433,000.00	99.55	198,160,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	404,826,000.00	393,627,278.00	97.23	292,202,255.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	404,826,000.00	393,627,278.00	97.23	292,202,255.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	356,678,000.00	352,619,278.00	98.86	292,202,255.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48,148,000.00	41,008,000.00	85.17	0.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	64,000,000.00	64,000,000.00	100.00	63,600,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	64,000,000.00	64,000,000.00	100.00	63,600,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	64,000,000.00	64,000,000.00	100.00	63,600,000.00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>154,324,200.00</b>	<b>153,533,000.00</b>	<b>99.49</b>	<b>202,787,000.00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154,324,200.00	153,533,000.00	99.49	202,787,000.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	48,480,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0.00	0.00	0.00	48,480,000.00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0.00	0.00	0.00	48,480,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	154,324,200.00	153,533,000.00	99.49	145,677,500.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	124,324,200.00	124,033,000.00	99.77	145,677,500.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	124,324,200.00	124,033,000.00	99.77	126,077,500.00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0.00	0.00	0.00	19,600,000.00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	30,000,000.00	29,500,000.00	98.33	0.00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	30,000,000.00	29,500,000.00	98.33	0.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0.00	0.00	0.00	7,400,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0.00	0.00	0.00	1,229,500.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0.00	0.00	0.00	1,229,500.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0.00	0.00	0.00	1,229,500.00
<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>		<b>154,324,200.00</b>	<b>153,533,000.00</b>	<b>99.49</b>	<b>202,787,000.00</b>

	JUMLAH BELANJA	4.243.634.471.00	4.034.279.456.00	95.07	3.716.488.823.74
	SURPLUS/DEFISIT	(4.243.634.471.00)	(4.034.279.456.00)	95.07	(3.716.488.823.74)

Kab. Muara Enim, 13 Januari 2025  
Kepala Kecamatan Rambang Niru

Fredy Febriansyah, S.STP, M.Si  
NIP. 198502022003121001



## PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

## KECAMATAN LUBAI

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.189.999.574,00</b>	<b>4.003.335.295,00</b>	<b>95,55</b>	<b>3.402.701.396,71</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.947.364.124,00</b>	<b>3.760.735.295,00</b>	<b>95,27</b>	<b>2.806.351.396,71</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.409.391.538,00	1.320.475.243,00	93,69	1.033.526.110,71
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	746.237.951,00	672.901.261,00	90,17	566.160.398,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	566.668.380,00	524.681.693,00	92,59	441.203.700,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	497.612.880,00	460.609.700,00	92,56	441.203.700,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	69.055.500,00	64.071.993,00	92,78	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	59.736.910,00	53.441.496,00	89,46	43.595.544,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	49.626.314,00	44.471.416,00	89,61	43.595.544,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	10.110.596,00	8.970.080,00	88,72	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	52.199.600,00	41.370.000,00	79,25	36.760.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	52.199.600,00	41.370.000,00	79,25	36.760.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.182.500,00	7.380.000,00	72,48	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.182.500,00	7.380.000,00	72,48	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	21.890.263,00	13.970.000,00	63,82	16.195.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	13.639.263,00	10.270.000,00	75,30	16.195.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.251.000,00	3.700.000,00	44,84	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	33.105.546,00	29.981.880,00	90,56	25.781.520,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	26.306.150,00	24.188.280,00	91,95	25.781.520,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.799.396,00	5.793.600,00	85,21	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.441.975,00	2.067.631,00	84,67	2.619.756,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.441.975,00	2.067.631,00	84,67	2.619.756,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.777,00	8.561,00	67,00	4.878,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.004,00	7.082,00	70,79	4.878,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.773,00	1.479,00	53,34	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	663.153.587,00	647.573.982,00	97,65	467.365.712,71
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	663.153.587,00	647.573.982,00	97,65	467.365.712,71
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	610.231.382,00	597.354.335,00	97,89	467.365.712,71
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	52.922.205,00	50.219.647,00	94,89	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.537.972.586,00	2.440.260.052,00	96,15	1.772.825.286,00
5.1.02.01	Belanja Barang	806.082.036,00	768.443.000,00	95,33	524.601.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	806.082.036,00	768.443.000,00	95,33	524.601.900,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.837.800,00	8.816.000,00	99,75	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18.280.000,00	11.830.000,00	64,72	8.220.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	26.470.964,00	24.800.000,00	93,69	15.335.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31.945.448,00	31.724.000,00	99,31	20.808.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	73.668.288,00	71.939.000,00	97,65	39.886.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.015.800,00	6.010.000,00	99,90	5.040.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	39.098.904,00	38.717.000,00	99,02	7.404.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	212.407.332,00	212.124.000,00	99,87	179.768.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.990.000,00	8.195.000,00	63,09	3.900.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	224.854.500,00	204.700.000,00	91,04	148.440.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	70.988.000,00	69.813.000,00	98,34	20.450.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.300.000,00	5.300.000,00	100,00	5.300.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.775.000,00	2.775.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	10.500.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	61.200.000,00	61.200.000,00	100,00	59.550.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	612.546.550,00	556.439.259,00	90,84	449.265.970,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	320.302.750,00	298.299.259,00	93,13	284.975.970,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	250.000,00	250.000,00	100,00	250.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	7.500.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	51.360.000,00	51.360.000,00	100,00	51.360.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	130.720.000,00	123.230.000,00	94,27	128.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	700.000,00	700.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.680.000,00	19.260.000,00	75,00	12.840.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.680.000,00	25.680.000,00	100,00	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	34.500.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perbaikan/Pertandingan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	31.790.000,00	26.319.259,00	82,79	21.231.970,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.622.750,00	0,00	0,00	1.214.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.193.800,00	5.590.000,00	77,71	5.590.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	7.193.800,00	5.590.000,00	77,71	5.590.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	70.650.000,00	70.650.000,00	100,00	64.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	61.500.000,00	61.500.000,00	100,00	60.000.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9.150.000,00	9.150.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	44.400.000,00	44.400.000,00	100,00	39.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	32.400.000,00	32.400.000,00	100,00	27.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	170.000.000,00	137.500.000,00	80,88	55.700.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	32.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	137.500.000,00	137.500.000,00	100,00	51.200.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	782.376.000,00	780.120.000,00	99,71	476.400.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.820.000,00	12.820.000,00	100,00	7.450.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00	4.380.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.520.000,00	5.520.000,00	100,00	3.070.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	769.556.000,00	767.300.000,00	99,71	468.950.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	769.556.000,00	767.300.000,00	99,71	369.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	99.950.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	303.368.000,00	301.657.793,00	99,44	290.557.416,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	303.368.000,00	301.657.793,00	99,44	290.557.416,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	303.368.000,00	301.657.793,00	99,44	290.557.416,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	32.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	32.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlimbaan	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	32.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>3.947.364.124,00</b>	<b>3.760.735.295,00</b>	<b>95,27</b>	<b>2.806.351.396,71</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>242.635.450,00</b>	<b>242.600.000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>596.350.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	242.635.450,00	242.600.000,00	99,99	217.150.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	46.940.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	46.940.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	46.940.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	131.835.450,00	131.800.000,00	99,97	145.210.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	39.518.500,00	39.500.000,00	99,95	0,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	39.518.500,00	39.500.000,00	99,95	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	92.316.950,00	92.300.000,00	99,98	145.210.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	21.316.950,00	21.300.000,00	99,92	78.880.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	31.250.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	29.680.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	110.800.000,00	110.800.000,00	100,00	25.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	75.800.000,00	75.800.000,00	100,00	13.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	75.800.000,00	75.800.000,00	100,00	13.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	329.500.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	329.500.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	329.500.000,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00	149.800.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	179.700.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	49.700.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	49.700.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	0,00	0,00	0,00	49.700.000,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	0,00	0,00	49.700.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>242.635.450,00</b>	<b>242.600.000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>596.350.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.189.999.574,00</b>	<b>4.003.335.295,00</b>	<b>95,55</b>	<b>3.402.701.396,71</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(4.189.999.574,00)</b>	<b>(4.003.335.295,00)</b>	<b>95,55</b>	<b>(3.402.701.396,71)</b>

Kab. Muara Enim, 04 Februari 2025  
Kepala Kecamatan Lubai

Wien Wierma Putra, S.STP., M.Si.  
NIP. 19811112001121002



## PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

KECAMATAN RAMBANG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	5.202.352.425,00	4.230.103.245,00	81,31	4.109.697.451,31
5.1	BELANJA OPERASI	4.885.354.025,00	3.982.228.245,00	81,51	3.590.870.451,31
5.1.01	Belanja Pegawai	2.554.645.951,00	1.967.680.698,00	77,02	1.655.287.498,31
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.528.496.800,00	1.059.025.018,00	69,29	937.937.268,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.026.149.151,00	908.655.680,00	88,55	717.350.230,31
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.330.708.074,00	2.014.547.547,00	86,44	1.935.582.953,00
5.1.02.01	Belanja Barang	763.450.854,00	619.543.464,00	81,15	722.152.300,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	753.329.220,00	708.749.366,00	94,08	819.410.707,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	429.520.000,00	411.145.000,00	95,72	34.160.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	316.908.000,00	267.909.717,00	84,54	225.359.946,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	67.500.000,00	7.200.000,00	10,67	134.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.885.354.025,00	3.982.228.245,00	81,51	3.590.870.451,31
5.2	BELANJA MODAL	316.998.400,00	247.875.000,00	78,19	518.827.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	316.998.400,00	247.875.000,00	78,19	328.827.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00	64.627.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	147.498.400,00	144.250.000,00	97,80	64.760.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	80.000.000,00	14.725.000,00	18,41	115.440.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	60.000.000,00	59.400.000,00	99,00	84.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	190.000.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	316.998.400,00	247.875.000,00	78,19	518.827.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.202.352.425,00	4.230.103.245,00	81,31	4.109.697.451,31
	SURPLUS/DEFISIT	( 5.202.352.425,00 )	( 4.230.103.245,00 )	81,31	( 4.109.697.451,31 )

Kab. Muara Enim, 27 Februari 2025  
Kepala Kecamatan RambangArman Sarijaya, S.H., M.Si.  
NIP. 197110232006041005



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



KECAMATAN LEMBAK  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	4.637.702.103,00	3.829.462.090,00	82,57	3.355.395.429,11
5.1	BELANJA OPERASI	4.135.154.878,00	3.339.692.090,00	80,76	2.996.681.554,11
5.1.01	Belanja Pegawai	2.731.711.238,00	2.210.678.831,00	80,93	1.869.368.903,11
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.603.222.306,00	1.240.413.299,00	77,37	1.106.103.793,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.227.281.613,00	1.001.422.464,00	81,60	877.472.729,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.138.636.000,00	937.350.464,00	82,32	877.472.729,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	88.645.613,00	64.072.000,00	72,28	0,00
5.1.01.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	119.321.478,00	85.190.254,00	71,40	82.815.796,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	107.950.004,00	82.050.726,00	76,01	82.815.796,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	11.371.474,00	3.139.528,00	27,61	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	108.702.500,00	74.060.000,00	68,13	67.760.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	108.702.500,00	74.060.000,00	68,13	67.760.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.052.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.166.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.886.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	48.280.125,00	27.990.000,00	57,97	25.561.850,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42.855.000,00	24.290.000,00	56,68	25.561.850,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.425.125,00	3.700.000,00	68,20	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	87.203.569,00	50.766.420,00	58,22	51.418.200,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	80.155.600,00	47.797.200,00	59,63	51.418.200,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	7.047.969,00	2.969.220,00	42,13	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.342.200,00	968.821,00	72,18	1.063.080,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.342.025,00	968.821,00	72,19	1.063.080,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	175,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	38.821,00	15.340,00	39,51	12.138,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.700,00	13.707,00	47,76	12.138,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.121,00	1.633,00	16,13	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.128.488.932,00	970.265.532,00	85,98	763.265.110,11
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.128.488.932,00	970.265.532,00	85,98	763.265.110,11
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.062.966.202,00	919.945.310,00	86,55	763.265.110,11
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	65.522.730,00	50.320.222,00	76,80	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.403.443.640,00	1.129.013.259,00	80,45	1.127.312.651,00
5.1.02.01	Belanja Barang	667.189.640,00	550.248.900,00	82,47	366.110.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	667.189.640,00	550.248.900,00	82,47	366.110.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.568.000,00	11.880.000,00	81,55	500.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	13.254.694,00	3.720.000,00	28,07	7.300.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	46.464.700,00	36.088.000,00	77,67	45.633.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.466.700,00	30.058.900,00	80,23	19.535.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.597.200,00	5.560.000,00	99,34	5.500.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.956.946,00	17.700.000,00	88,69	6.830.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	154.262.000,00	154.262.000,00	100,00	121.102.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	777.000,00	0,00	0,00	14.225.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan u	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	244.080.000,00	204.530.000,00	83,80	81.235.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.249.000,00	600.000,00	48,04	0,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.763.400,00	13.100.000,00	66,28	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	10.600.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	63.950.000,00	59.750.000,00	93,43	53.650.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	501.319.000,00	423.105.542,00	84,40	317.609.101,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	298.094.000,00	269.180.542,00	90,30	190.709.101,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	8.400.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelar	128.400.000,00	107.000.000,00	83,33	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	77.040.000,00	77.040.000,00	100,00	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	0,00	0,00	26.080.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	48.430.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.680.000,00	25.680.000,00	100,00	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.680.000,00	25.680.000,00	100,00	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	17.600.000,00	17.600.000,00	100,00	15.600.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	14.994.000,00	14.980.542,00	99,91	13.855.601,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	0,00	0,00	1.303.500,00
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	50.500.000,00	41.500.000,00	82,18	49.700.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	45.000.000,00	36.000.000,00	80,00	42.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00	7.700.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	36.000.000,00	34.000.000,00	94,44	51.600.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	39.600.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00	10.000.000,00	83,33	12.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis s	110.725.000,00	78.425.000,00	70,83	25.600.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	110.725.000,00	78.425.000,00	70,83	25.600.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.440.000,00	0,00	0,00	291.199.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.440.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	2.440.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Persona	0,00	0,00	0,00	700.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	288.999.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ged	0,00	0,00	0,00	288.999.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	216.745.000,00	139.908.817,00	64,55	114.594.050,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	216.745.000,00	139.908.817,00	64,55	114.594.050,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	216.745.000,00	139.908.817,00	64,55	114.594.050,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pih	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00	37.800.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00	37.800.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.750.000,00	15.750.000,00	100,00	37.800.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.135.154.878,00	3.339.692.090,00	80,76	2.996.681.554,11
5.2	BELANJA MODAL	502.547.225,00	489.770.000,00	97,46	358.713.875,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.547.225,00	101.070.000,00	89,01	184.415.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	46.940.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	46.940.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	46.940.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.760.125,00	21.710.000,00	99,77	53.145.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.760.125,00	21.710.000,00	99,77	53.145.000,00

5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	10.566.100,00	10.500.000,00	99,37	18.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	10.566.100,00	10.500.000,00	99,37	18.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	81.221.000,00	68.860.000,00	84,78	66.330.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	81.221.000,00	68.860.000,00	84,78	66.330.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	389.000.000,00	388.700.000,00	99,92	174.298.875,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	389.000.000,00	388.700.000,00	99,92	174.298.875,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	389.000.000,00	388.700.000,00	99,92	174.298.875,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	190.000.000,00	189.900.000,00	99,95	0,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	199.000.000,00	198.800.000,00	99,90	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	174.298.875,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	502.547.225,00	489.770.000,00	97,46	358.713.875,00
	JUMLAH BELANJA	4.637.702.103,00	3.829.462.090,00	82,57	3.355.395.429,11
	SURPLUS/DEFISIT	(4.637.702.103,00)	(3.829.462.090,00)	82,57	(3.355.395.429,11)

Kab. Muara Enim, 02 Maret 2025  
Plt. Kepala Kecamatan Lembak

Didi Haryanto, S.Kom.  
NIP. 198205242008031001



## PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

## KECAMATAN KELEKAR

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.036.934.632,00</b>	<b>3.846.893.469,00</b>	<b>95,29</b>	<b>2.566.474.238,40</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.415.236.932,00</b>	<b>3.226.684.969,00</b>	<b>94,48</b>	<b>2.427.834.238,40</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.775.577.933,00	1.682.408.948,00	94,75	1.508.176.936,40
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	921.332.626,00	850.517.203,00	92,31	803.126.384,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	734.528.706,00	681.169.370,00	92,74	620.374.600,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	668.854.906,00	617.097.370,00	92,26	620.374.600,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	65.673.800,00	64.072.000,00	97,56	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	58.936.297,00	53.116.112,00	90,12	56.783.748,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	56.637.714,00	50.873.592,00	89,82	56.783.748,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.298.583,00	2.242.520,00	97,56	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	64.267.494,00	58.380.000,00	90,84	73.360.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	64.267.494,00	58.380.000,00	90,84	73.360.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.963.000,00	7.370.100,00	73,97	360.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.963.000,00	7.370.100,00	73,97	360.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.370.502,00	14.020.000,00	97,56	12.540.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.578.002,00	10.320.000,00	97,56	12.540.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.792.500,00	3.700.000,00	97,56	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	37.931.788,00	35.268.540,00	92,98	37.223.880,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	35.927.564,00	33.313.200,00	92,72	37.223.880,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.004.224,00	1.955.340,00	97,56	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.323.673,00	1.182.691,00	89,35	2.475.782,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.323.673,00	1.182.691,00	89,35	2.475.782,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.166,00	10.390,00	93,05	8.374,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.917,00	9.184,00	92,61	8.374,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.249,00	1.206,00	96,56	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	854.245.307,00	831.891.745,00	97,38	705.050.552,40
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	854.245.307,00	831.891.745,00	97,38	705.050.552,40
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	804.341.172,00	784.839.871,00	97,58	705.050.552,40
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	49.904.135,00	47.051.874,00	94,28	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.639.658.999,00	1.544.276.021,00	94,18	919.657.302,00
5.1.02.01	Belanja Barang	695.305.819,00	639.318.300,00	91,95	344.408.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	695.305.819,00	639.318.300,00	91,95	344.408.400,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.710.800,00	1.710.800,00	100,00	3.582.700,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.141.500,00	8.400.000,00	43,88	3.520.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	19.593.416,00	17.240.000,00	87,99	12.277.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	93.547.303,00	85.423.900,00	91,32	72.162.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	48.747.400,00	26.409.800,00	54,18	19.565.100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.840.000,00	5.840.000,00	100,00	6.854.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.907.600,00	3.833.800,00	98,11	1.585.400,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	40.192.800,00	40.085.000,00	99,73	36.981.600,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	5.600.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	364.025.000,00	357.275.000,00	98,15	116.690.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.950.000,00	7.950.000,00	100,00	6.890.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.500.000,00	22.000.000,00	80,00	6.750.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	54.750.000,00	54.750.000,00	100,00	52.050.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	734.268.680,00	696.440.115,00	94,85	350.049.752,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	372.768.680,00	367.504.291,00	98,59	179.569.392,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	2.850.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	96.300.000,00	96.300.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	12.840.000,00	12.840.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	74.670.000,00	72.530.000,00	97,13	86.640.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	9.900.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.260.000,00	19.260.000,00	100,00	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.680.000,00	25.680.000,00	100,00	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	11.400.000,00	11.400.000,00	100,00	7.100.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	89.000.000,00	89.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	23.443.680,00	21.121.091,00	90,09	19.388.642,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.875.000,00	3.073.200,00	79,31	1.330.750,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.000.000,00	4.935.824,00	82,26	5.480.360,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	6.000.000,00	4.935.824,00	82,26	5.480.360,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	132.000.000,00	126.500.000,00	95,83	35.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	87.000.000,00	81.500.000,00	93,68	5.000.000,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	93.000.000,00	82.000.000,00	88,17	38.400.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	38.400.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	66.000.000,00	55.000.000,00	83,33	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	130.500.000,00	115.500.000,00	88,51	91.600.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	100.500.000,00	100.500.000,00	100,00	77.600.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	30.000.000,00	15.000.000,00	50,00	14.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	3.202.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	3.202.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.552.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	1.650.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	197.284.500,00	195.717.606,00	99,21	210.997.150,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	197.284.500,00	195.717.606,00	99,21	210.997.150,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	197.284.500,00	195.717.606,00	99,21	210.997.150,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	11.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	11.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	11.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>3.415.236.932,00</b>	<b>3.226.684.969,00</b>	<b>94,48</b>	<b>2.427.834.238,40</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>621.697.700,00</b>	<b>620.208.500,00</b>	<b>99,76</b>	<b>138.640.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.697.700,00	121.155.000,00	99,55	138.640.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	49.260.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	49.260.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	49.260.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	60.000.000,00	59.500.000,00	99,17	30.550.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	60.000.000,00	59.500.000,00	99,17	19.750.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	60.000.000,00	59.500.000,00	99,17	9.750.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	61.697.700,00	61.655.000,00	99,93	58.830.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	27.800.000,00	27.790.000,00	99,96	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	27.800.000,00	27.790.000,00	99,96	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	33.897.700,00	33.865.000,00	99,90	58.830.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	33.897.700,00	33.865.000,00	99,90	58.830.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	499.053.500,00	99,81	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	500.000.000,00	499.053.500,00	99,81	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	500.000.000,00	499.053.500,00	99,81	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	70.000.000,00	69.918.000,00	99,88	0,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	90.000.000,00	89.741.000,00	99,71	0,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	150.000.000,00	149.812.500,00	99,88	0,00
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	75.000.000,00	74.750.000,00	99,67	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	115.000.000,00	114.832.000,00	99,85	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>621.697.700,00</b>	<b>620.208.500,00</b>	<b>99,76</b>	<b>138.640.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.036.934.632,00</b>	<b>3.846.893.469,00</b>	<b>95,29</b>	<b>2.566.474.238,40</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(4.036.934.632,00)</b>	<b>(3.846.893.469,00)</b>	<b>95,29</b>	<b>(2.566.474.238,40)</b>

Kab. Muara Enim, 05 Januari 2025  
Kepala Kecamatan Kelekar

Budi Purwanto, S.E., M.Si.  
NIP. 196711191993031003



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM  
KECAMATAN GELUMBANG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>7.298.144.037,00</b>	<b>6.830.647.184,00</b>	<b>93,59</b>	<b>5.693.712.024,32</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>6.120.538.724,00</b>	<b>5.670.172.184,00</b>	<b>92,64</b>	<b>4.567.324.752,32</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.432.840.733,00	2.204.081.813,00	90,60	1.973.127.481,32
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.687.697.991,00	3.466.090.371,00	93,99	2.594.197.271,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>6.120.538.724,00</b>	<b>5.670.172.184,00</b>	<b>92,64</b>	<b>4.567.324.752,32</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.177.605.313,00</b>	<b>1.160.475.000,00</b>	<b>98,55</b>	<b>1.126.387.272,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	291.426.053,00	277.775.000,00	95,32	168.010.272,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	886.179.260,00	882.700.000,00	99,61	958.377.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>1.177.605.313,00</b>	<b>1.160.475.000,00</b>	<b>98,55</b>	<b>1.126.387.272,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>7.298.144.037,00</b>	<b>6.830.647.184,00</b>	<b>93,59</b>	<b>5.693.712.024,32</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(7.298.144.037,00)</b>	<b>(6.830.647.184,00)</b>	<b>93,59</b>	<b>(5.693.712.024,32)</b>

Kab. Muara Enim, 30 Januari 2025  
Kepala Kecamatan Gelumbang

Herry Mulyawan, S.P.  
NIP. 197205081999031003



## PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

## KECAMATAN SUNGAI ROTAN

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.082.133.363,00</b>	<b>4.639.647.970,00</b>	<b>91,29</b>	<b>3.182.325.682,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.903.405.238,00</b>	<b>3.466.491.970,00</b>	<b>88,81</b>	<b>3.110.545.682,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	2.122.878.292,00	1.897.119.955,00	89,37	1.843.745.464,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.087.964.496,00	1.014.865.418,00	93,28	1.044.826.170,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	875.648.172,00	821.043.792,00	93,76	846.328.726,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	810.842.972,00	756.971.792,00	93,36	846.328.726,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	64.805.200,00	64.072.000,00	98,87	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	75.353.560,00	70.003.388,00	92,90	66.242.936,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	75.353.560,00	70.003.388,00	92,90	66.242.936,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	53.200.000,00	48.300.000,00	90,79	56.560.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	53.200.000,00	48.300.000,00	90,79	56.560.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.497.400,00	7.200.000,00	96,03	360.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.497.400,00	7.200.000,00	96,03	360.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.040.000,00	25.475.000,00	87,72	27.315.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.230.000,00	21.775.000,00	89,87	27.315.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.810.000,00	3.700.000,00	76,92	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	46.688.760,00	42.510.540,00	91,05	45.334.920,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	45.103.920,00	41.062.140,00	91,04	45.334.920,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.584.840,00	1.448.400,00	91,39	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	520.192,00	320.096,00	61,53	2.673.150,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	520.192,00	320.096,00	61,53	2.673.150,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	16.412,00	12.602,00	76,79	11.438,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14.260,00	10.948,00	76,77	11.438,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.152,00	1.654,00	76,86	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.034.913.796,00	882.254.537,00	85,25	798.919.294,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.034.913.796,00	882.254.537,00	85,25	798.919.294,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	984.511.696,00	831.967.833,00	84,51	798.919.294,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	50.402.100,00	50.286.704,00	99,77	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.780.526.946,00	1.569.372.015,00	88,14	1.266.800.218,00
5.1.02.01	Belanja Barang	653.437.612,00	564.314.364,00	86,36	434.116.935,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	653.437.612,00	564.314.364,00	86,36	434.116.935,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.827.800,00	5.000.000,00	73,23	14.150.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	43.217.800,00	17.200.000,00	39,80	11.400.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	41.056.776,00	20.210.364,00	49,23	24.647.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	108.497.200,00	108.326.500,00	99,84	56.088.335,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	60.987.276,00	50.438.000,00	82,70	41.988.600,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	12.600.010,00	12.599.600,00	100,00	12.088.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	106.120.750,00	86.829.900,00	81,82	66.095.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.700.000,00	9.600.000,00	98,97	5.250.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	190.015.000,00	180.460.000,00	94,97	131.160.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.265.000,00	8.500.000,00	91,74	9.540.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	7.500.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	57.650.000,00	57.650.000,00	100,00	52.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	657.083.450,00	607.328.669,00	92,43	461.350.639,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	483.948.950,00	447.583.419,00	92,49	308.587.639,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.900.000,00	900.000,00	23,08	2.750.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	184.400.000,00	183.400.000,00	99,46	28.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	109.630.000,00	105.490.000,00	96,22	110.720.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00	4.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.840.000,00	12.840.000,00	100,00	12.840.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.840.000,00	12.840.000,00	100,00	12.840.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00	23.600.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	45.000.000,00	41.400.000,00	92,00	71.100.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.140.000,00	816.250,00	19,72	294.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	47.251.500,00	29.847.169,00	63,17	24.448.164,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.897.450,00	0,00	0,00	2.995.475,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.484.500,00	5.145.250,00	93,81	4.863.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	5.484.500,00	5.145.250,00	93,81	4.863.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	67.600.000,00	67.600.000,00	100,00	63.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	63.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	48.000.000,00	46.000.000,00	95,83	42.000.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00	10.000.000,00	83,33	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	52.050.000,00	41.000.000,00	78,77	42.900.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	26.500.000,00	24.000.000,00	90,57	18.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	25.550.000,00	17.000.000,00	66,54	24.400.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	15.930.884,00	14.780.000,00	92,78	5.650.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.930.884,00	14.780.000,00	92,78	5.650.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.140.884,00	8.100.000,00	99,50	1.600.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.790.000,00	6.680.000,00	85,75	2.050.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	385.975.000,00	315.148.982,00	81,65	308.682.644,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	385.975.000,00	315.148.982,00	81,65	308.682.644,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	385.975.000,00	315.148.982,00	81,65	308.682.644,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	68.100.000,00	67.800.000,00	99,56	57.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	68.100.000,00	67.800.000,00	99,56	57.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlimbaan	68.100.000,00	67.800.000,00	99,56	57.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>3.903.405.238,00</b>	<b>3.466.491.970,00</b>	<b>88,81</b>	<b>3.110.545.682,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.178.728.125,00</b>	<b>1.173.156.000,00</b>	<b>99,53</b>	<b>71.780.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	189.303.325,00	187.200.000,00	98,89	71.780.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	46.940.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	46.940.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	46.940.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	71.616.625,00	70.400.000,00	98,30	13.600.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	71.616.625,00	70.400.000,00	98,30	13.600.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	56.076.625,00	55.000.000,00	98,08	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	15.540.000,00	15.400.000,00	99,10	13.600.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	82.686.700,00	82.600.000,00	99,90	11.240.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	82.686.700,00	82.600.000,00	99,90	9.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	82.686.700,00	82.600.000,00	99,90	9.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	35.000.000,00	34.200.000,00	97,71	0,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	35.000.000,00	34.200.000,00	97,71	0,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	35.000.000,00	34.200.000,00	97,71	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	989.424.800,00	985.956.000,00	99,65	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	989.424.800,00	985.956.000,00	99,65	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	989.424.800,00	985.956.000,00	99,65	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	332.302.500,00	330.270.000,00	99,39	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	268.260.000,00	267.820.000,00	99,84	0,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	388.862.300,00	387.866.000,00	99,74	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>1.178.728.125,00</b>	<b>1.173.156.000,00</b>	<b>99,53</b>	<b>71.780.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.082.133.363,00</b>	<b>4.639.647.970,00</b>	<b>91,29</b>	<b>3.182.325.682,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(5.082.133.363,00)</b>	<b>(4.639.647.970,00)</b>	<b>91,29</b>	<b>(3.182.325.682,00)</b>

Kab. Muara Enim, 17 Januari 2025  
Kepala Kecamatan Sungai Rotan

Candra Firmansyah, S.E., M.Si.  
NIP. 197807042011011006



## PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

KECAMATAN MUARA BELIDA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	3,835,308,283.00	3,485,156,333.00	90.87	2,823,626,966.36
5.1	BELANJA OPERASI	3,287,334,483.00	2,950,128,833.00	89.74	2,680,226,966.36
5.1.01	Belanja Pegawai	1,834,240,451.00	1,683,355,692.00	91.77	1,543,286,701.36
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	955,883,587.00	883,643,004.00	92.44	874,352,617.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	878,356,864.00	799,712,688.00	91.05	668,934,084.36
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,453,094,032.00	1,266,773,141.00	87.18	1,136,940,265.00
5.1.02.01	Belanja Barang	493,041,532.00	467,016,300.00	94.72	336,287,050.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	529,240,000.00	470,431,200.00	88.89	307,439,715.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3,860,000.00	3,800,000.00	98.45	123,030,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	366,202,500.00	264,775,641.00	72.30	313,183,500.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	60,750,000.00	60,750,000.00	100.00	57,000,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3,287,334,483.00	2,950,128,833.00	89.74	2,680,226,966.36
5.2	BELANJA MODAL	547,973,800.00	535,027,500.00	97.64	143,400,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222,323,800.00	210,398,500.00	94.64	143,400,000.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	74,400,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	222,323,800.00	210,398,500.00	94.64	69,000,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	325,650,000.00	324,629,000.00	99.69	0.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	325,650,000.00	324,629,000.00	99.69	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	547,973,800.00	535,027,500.00	97.64	143,400,000.00
	JUMLAH BELANJA	3,835,308,283.00	3,485,156,333.00	90.87	2,823,626,966.36
	SURPLUS/DEFISIT	( 3,835,308,283.00 )	( 3,485,156,333.00 )	90.87	( 2,823,626,966.36 )

Kab. Muara Enim, 07 Februari 2025  
Kepala Kecamatan Muara BelidaEdi Suprianto, S.P.  
NIP. 197005151993031002



KECAMATAN BELIMBING  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4/3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	4.963.593.052,00	4.218.986.895,00	85,00	3.093.007.240,04
5.1	BELANJA OPERASI	4.576.746.892,00	3.832.775.735,00	83,74	2.878.586.940,04
5.1.01	Belanja Pegawai	2.012.260.736,00	1.640.984.870,00	81,55	1.569.992.973,04
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.040.324.265,00	895.062.249,00	86,04	919.124.444,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	794.201.591,00	693.546.860,00	87,33	711.959.986,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok ASN	721.242.911,00	629.474.860,00	87,28	711.959.986,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	72.958.680,00	64.072.000,00	87,82	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	88.715.017,00	77.629.622,00	87,50	75.954.974,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	83.465.992,00	74.490.094,00	89,25	75.954.974,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.249.025,00	3.139.528,00	59,81	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	63.170.750,00	52.080.000,00	82,44	60.900.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	63.170.750,00	52.080.000,00	82,44	60.900.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.963.000,00	7.980.000,00	74,07	360.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.963.000,00	7.980.000,00	74,07	360.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.829.375,00	19.685.000,00	73,37	22.375.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.657.625,00	15.985.000,00	70,55	22.375.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.171.750,00	3.700.000,00	88,69	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	36.356.335,00	44.883.140,00	79,29	45.407.340,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	51.754.064,00	41.713.920,00	80,60	45.407.340,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.602.271,00	2.969.220,00	64,52	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.055.340,00	46.548,00	4,41	2.156.768,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.055.340,00	46.548,00	4,41	2.156.768,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	32.857,00	11.079,00	33,72	10.376,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	22.807,00	9.446,00	41,78	10.376,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.050,00	1.633,00	15,93	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	971.256.471,00	745.922.621,00	76,80	640.868.529,04
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	956.893.356,00	745.922.621,00	77,97	640.868.529,04
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	901.251.046,00	695.555.802,00	77,18	640.868.529,04
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	55.442.310,00	50.366.819,00	90,85	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	14.563.115,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	14.563.115,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obje	680.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.564.486.156,00	2.191.790.865,00	85,47	1.318.593.967,00
5.1.02.01	Belanja Barang	625.415.876,00	525.914.200,00	84,09	488.847.350,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	625.415.876,00	525.914.200,00	84,09	488.847.350,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.829.400,00	99,69	0,77	7.047.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	39.548.100,00	18.894.700,00	47,78	15.042.350,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	16.619.732,00	15.020.000,00	90,37	18.901.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kam	70.459.847,00	58.316.000,00	82,76	61.850.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	52.878.145,00	34.395.500,00	64,99	29.095.300,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.480.000,00	4.400.000,00	98,21	3.360.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kant	10.447.652,00	4.976.000,00	47,63	6.462.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	61.376.000,00	59.950.000,00	97,68	66.718.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkap	0,00	0,00	0,00	26.330.400,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan ur	35.415.500,00	30.600.000,00	86,40	27.555.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	256.034.500,00	221.320.000,00	86,44	132.025.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.672.000,00	3.628.000,00	98,75	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	61.825.000,00	61.825.000,00	100,00	54.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	819.253.282,00	615.500.700,00	75,12	548.276.275,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	465.837.882,00	450.058.109,00	96,61	419.957.275,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pe	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00	2.100.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	11.250.000,00	11.250.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelar	120.910.000,00	120.910.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	101.030.000,00	101.030.000,00	100,00	109.920.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	141.750.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.680.000,00	25.680.000,00	100,00	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.680.000,00	25.680.000,00	100,00	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perombaan/Pertandingan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	85.700.000,00	85.700.000,00	100,00	76.100.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Taruhan A	6.900.000,00	1.143.250,00	16,57	1.635.750,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	59.940.720,00	51.268.134,00	85,53	31.999.525,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.727.182,00	3.378.725,00	71,47	2.092.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.015.400,00	4.642.600,00	30,92	5.149.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	15.015.400,00	4.642.600,00	30,92	5.149.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	71.100.000,00	69.600.000,00	97,89	69.270.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	7.520.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Perorangan	62.700.000,00	61.200.000,00	97,61	59.000.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	750.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	7.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	80.400.000,00	80.400.000,00	100,00	47.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	68.400.000,00	68.400.000,00	100,00	36.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainny	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	11.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa D	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	27.000.000,00	10.800.000,00	40,00	7.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	12.000.000,00	10.800.000,00	90,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	15.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	767.483.398,00	763.580.000,00	99,49	28.040.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.483.398,00	17.180.000,00	98,28	18.040.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	7.253.398,00	7.000.000,00	96,51	7.740.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-AI	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	3.950.000,00	3.900.000,00	98,73	3.650.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Persona	5.680.000,00	5.680.000,00	100,00	3.650.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Pe	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	750.000.000,00	746.400.000,00	99,52	10.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gee	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	273.833.600,00	248.395.956,00	90,71	217.330.342,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	273.833.600,00	248.395.956,00	90,71	217.330.342,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	244.932.400,00	225.508.956,00	92,07	217.330.342,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28.901.200,00	22.887.000,00	79,19	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pih	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00	36.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00	36.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00	36.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.576.746.892,00	3.832.775.735,00	83,74	2.878.586.940,04
5.2	BELANJA MODAL	386.846.160,00	386.211.160,00	99,84	214.420.300,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.846.160,00	136.846.160,00	100,00	214.420.300,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	46.940.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	46.940.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	111.846.160,00	111.846.160,00	100,00	122.757.600,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	103.846.160,00	103.846.160,00	100,00	122.757.600,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00	67.064.900,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	32.996.160,00	32.996.160,00	100,00	19.185.300,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.850.000,00	6.850.000,00	100,00	16.507.400,00
5.2.02.10	Belanja				



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



KECAMATAN BELIDA DARAT  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	4,212,560,395.00	3,817,445,282.00	90.62	3,081,986,904.00
5.1	BELANJA OPERASI	4,082,560,395.00	3,692,065,282.00	90.44	2,988,606,904.00
5.1.01	Belanja Pegawai	2,505,360,004.00	2,248,776,268.00	89.76	1,720,878,788.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,419,178,014.00	1,178,522,597.00	83.04	995,072,226.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1,088,391,725.00	910,468,941.00	83.65	761,999,200.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	108,696,943.00	104,329,824.00	95.98	86,573,524.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	84,952,000.00	76,020,000.00	89.49	69,160,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13,200,000.00	7,380,000.00	55.91	360,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	36,936,992.00	21,760,000.00	58.91	22,805,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	82,545,947.00	56,994,540.00	69.05	52,069,980.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4,385,964.00	1,556,826.00	35.50	2,093,504.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	68,443.00	12,466.00	18.21	11,018.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1,085,088,540.00	1,070,253,671.00	98.63	725,806,562.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1,085,088,540.00	1,070,253,671.00	98.63	725,806,562.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obje	1,093,450.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1,093,450.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,577,200,391.00	1,443,289,014.00	91.51	1,267,728,116.00
5.1.02.01	Belanja Barang	363,967,606.00	299,252,000.00	82.22	338,273,000.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	363,967,606.00	299,252,000.00	82.22	338,273,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	514,112,362.00	500,987,200.00	97.45	513,842,000.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	420,627,862.00	410,644,700.00	97.63	412,787,500.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5,484,500.00	5,342,500.00	97.41	5,484,500.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00	45,000,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00	41,070,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	3,000,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	431,881,973.00	425,450,000.00	98.51	161,500,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,829,973.00	8,550,000.00	61.82	12,900,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	418,052,000.00	416,900,000.00	99.72	148,600,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	235,438,450.00	209,799,814.00	89.11	222,313,116.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	235,438,450.00	209,799,814.00	89.11	222,313,116.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pih	31,800,000.00	7,800,000.00	24.53	31,800,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	31,800,000.00	7,800,000.00	24.53	31,800,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4,082,560,395.00	3,692,065,282.00	90.44	2,988,606,904.00
5.2	BELANJA MODAL	130,000,000.00	125,380,000.00	96.45	93,380,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130,000,000.00	125,380,000.00	96.45	93,380,000.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	75,000,000.00	70,380,000.00	93.84	46,940,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	75,000,000.00	70,380,000.00	93.84	46,940,000.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	46,440,000.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	46,440,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00	0.00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	130,000,000.00	125,380,000.00	96.45	93,380,000.00
	JUMLAH BELANJA	4,212,560,395.00	3,817,445,282.00	90.62	3,081,986,904.00
	SURPLUS/DEFISIT	( 4,212,560,395.00 )	( 3,817,445,282.00 )	90.62	( 3,081,986,904.00 )

Kab. Muara Enim, 03 Februari 2025  
Kepala Kecamatan Belida Darat

Zulchaidir Sidik, S.STP, M.Si  
NIP. 198408162002121001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



KECAMATAN LUBAI ULU  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	4,297,527,716.00	3,577,297,519.00	83.24	3,134,597,436.84
5.1	BELANJA OPERASI	3,955,891,816.00	3,243,112,519.00	81.98	2,769,457,436.84
5.1.01	Belanja Pegawai	2,197,015,948.00	1,756,855,862.00	79.97	1,577,269,053.84
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1,233,005,785.00	939,764,152.00	76.22	902,456,093.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	938,057,888.00	730,511,286.00	77.87	688,197,700.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	855,960,000.00	666,439,311.00	77.86	688,197,700.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	82,097,888.00	64,071,975.00	78.04	0.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	103,100,049.00	76,008,902.00	73.72	77,114,302.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	93,275,000.00	69,601,702.00	74.62	77,114,302.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9,825,049.00	6,407,200.00	65.21	0.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	85,800,000.00	63,980,000.00	74.57	71,000,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	85,800,000.00	63,980,000.00	74.57	71,000,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10,636,500.00	8,596,850.00	80.82	360,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10,636,500.00	8,596,850.00	80.82	360,000.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	23,258,750.00	16,880,000.00	72.57	16,565,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18,152,750.00	13,180,000.00	72.61	16,565,000.00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5,106,000.00	3,700,000.00	72.46	0.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	63,396,377.00	43,307,160.00	68.31	46,928,160.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	57,400,000.00	40,410,360.00	70.40	46,928,160.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,996,377.00	2,896,800.00	48.31	0.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8,739,119.00	470,259.00	5.38	2,279,590.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	8,739,119.00	470,259.00	5.38	2,279,590.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	17,102.00	9,695.00	56.69	11,341.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,350.00	9,328.00	65.00	11,341.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,752.00	367.00	13.34	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	964,010,163.00	817,091,710.00	84.76	674,812,960.84
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	964,010,163.00	817,091,710.00	84.76	674,812,960.84
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	906,047,748.00	767,289,897.00	84.69	674,812,960.84
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	57,962,415.00	49,801,813.00	85.92	0.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,758,875,888.00	1,486,256,657.00	84.50	1,192,188,383.00
5.1.02.01	Belanja Barang	598,495,050.00	495,320,000.00	82.76	360,575,400.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	598,495,050.00	495,320,000.00	82.76	360,575,400.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	24,802,900.00	24,759,000.00	99.82	20,450,000.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	31,718,100.00	7,425,000.00	23.41	33,642,000.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	14,710,000.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	66,422,800.00	65,703,500.00	98.92	33,525,000.00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36,840,500.00	28,305,500.00	76.83	17,756,400.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8,489,600.00	8,480,000.00	99.89	4,990,000.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	20,655,050.00	20,533,000.00	99.41	6,962,000.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	59,298,400.00	57,795,000.00	97.46	34,970,000.00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	21,777,000.00	11,207,000.00	51.46	24,400,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	217,030,100.00	181,362,000.00	83.57	107,750,000.00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15,925,600.00	14,450,000.00	90.73	0.00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0.00	0.00	0.00	7,420,000.00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	31,635,000.00	11,400,000.00	36.04	0.00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	63,900,000.00	63,900,000.00	100.00	54,000,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	717,529,518.00	639,812,740.00	89.17	588,847,678.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	512,353,668.00	465,401,240.00	90.84	454,522,678.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, dan Penasehat	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	2,050,000.00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	600,000.00	600,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelar	128,400,000.00	128,400,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	99,100,000.00	85,860,000.00	86.64	190,860,000.00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0.00	0.00	0.00	29,820,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	56,440,000.00	56,440,000.00	100.00	66,720,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25,680,000.00	25,680,000.00	100.00	25,680,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	40,920,000.00	35,240,000.00	86.12	40,920,000.00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	24,000,000.00	24,000,000.00	100.00	8,500,000.00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	65,000,000.00	59,850,000.00	92.08	24,500,000.00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0.00	0.00	0.00	21,600,000.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	39,980,868.00	28,514,240.00	71.32	34,872,678.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7,232,800.00	5,817,000.00	80.43	0.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9,925,850.00	5,766,500.00	58.10	0.00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	9,925,850.00	5,766,500.00	58.10	0.00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	97,000,000.00	73,700,000.00	75.98	38,325,000.00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0.00	0.00	0.00	33,500,000.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	89,100,000.00	65,800,000.00	73.85	0.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7,900,000.00	7,900,000.00	100.00	4,825,000.00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	86,250,000.00	85,920,000.00	99.62	75,000,000.00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	86,250,000.00	85,920,000.00	99.62	75,000,000.00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	12,000,000.00	9,025,000.00	75.21	21,000,000.00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	12,000,000.00	9,025,000.00	75.21	0.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	94,860,000.00	72,600,000.00	76.53	45,440,000.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94,860,000.00	72,600,000.00	76.53	20,640,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	67,160,000.00	45,000,000.00	67.00	0.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor	14,950,000.00	14,850,000.00	99.33	14,800,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal	12,750,000.00	12,750,000.00	100.00	5,840,000.00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	24,800,000.00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	0.00	0.00	0.00	24,800,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	296,241,300.00	232,773,917.00	78.58	140,925,305.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	296,241,300.00	232,773,917.00	78.58	140,925,305.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	276,691,300.00	232,773,917.00	84.13	140,925,305.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,550,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	51,750,000.00	45,750,000.00	88.41	56,400,000.00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	51,750,000.00	45,750,000.00	88.41	56,400,000.00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Persembahan	51,750,000.00	45,750,000.00	88.41	56,400,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3,955,891,816.00	3,243,112,519.00	81.98	2,769,457,436.84
5.2	BELANJA MODAL	341,635,900.00	334,185,000.00	97.82	365,140,000.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	223,106,800.00	215,985,000.00	96.81	85,940,000.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0.00	0.00	0.00	46,940,000.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0.00	0.00	0.00	46,940,000.00

5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	118,620,000.00	118,390,000.00	99.81	39,000,000.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	104,486,800.00	97,595,000.00	93.40	0.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	104,486,800.00	97,595,000.00	93.40	0.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118,529,100.00	118,200,000.00	99.72	279,200,000.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	118,529,100.00	118,200,000.00	99.72	279,200,000.00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	118,529,100.00	118,200,000.00	99.72	279,200,000.00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	118,529,100.00	118,200,000.00	99.72	163,800,000.00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0.00	0.00	0.00	115,400,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	341,635,900.00	334,185,000.00	97.82	365,140,000.00
	JUMLAH BELANJA	4,297,527,716.00	3,577,297,519.00	83.24	3,134,597,436.84
	SURPLUS/DEFISIT	( 4,297,527,716.00 )	( 3,577,297,519.00 )	83.24	( 3,134,597,436.84 )

Kab. Muara Enim, 07 Februari 2025  
Kepala Kecamatan Lubai Ulu

Taufik Azrulah, S.Sos.  
NIP. 197108131993031002



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM  
KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.907.728.607,00</b>	<b>3.668.439.600,00</b>	<b>93,88</b>	<b>3.204.602.093,95</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.401.787.607,00</b>	<b>3.165.187.100,00</b>	<b>93,04</b>	<b>2.476.277.893,95</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.980.645.266,00	1.886.057.804,00	95,22	1.596.646.975,95
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.046.691.821,00	1.020.992.201,00	97,54	901.581.782,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	807.241.640,00	803.163.695,00	99,49	693.742.280,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	742.220.940,00	739.091.720,00	99,58	693.742.280,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	65.020.700,00	64.071.975,00	98,54	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	86.267.425,00	81.489.282,00	94,46	71.658.742,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	78.631.698,00	74.505.434,00	94,75	71.658.742,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7.635.727,00	6.983.848,00	91,46	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.676.000,00	71.120.000,00	84,99	76.020.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.676.000,00	71.120.000,00	84,99	76.020.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	19.525.750,00	18.940.000,00	97,00	15.190.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	15.520.500,00	15.240.000,00	98,19	15.190.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.005.250,00	3.700.000,00	92,38	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	48.060.261,00	44.393.460,00	92,37	42.510.540,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	43.501.422,00	40.844.880,00	93,89	42.510.540,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.558.839,00	3.548.580,00	77,84	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.908.540,00	1.876.635,00	98,33	2.450.401,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.908.540,00	1.876.635,00	98,33	2.450.401,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.205,00	9.129,00	74,80	9.819,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.062,00	8.492,00	84,40	9.819,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.143,00	637,00	29,72	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	932.593.445,00	863.705.603,00	92,61	695.065.193,95
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	932.593.445,00	863.705.603,00	92,61	695.065.193,95
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	879.671.240,00	813.502.592,00	92,48	695.065.193,95
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	52.922.205,00	50.203.011,00	94,86	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00	0,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.421.142.341,00	1.279.129.296,00	90,01	879.630.918,00
5.1.02.01	Belanja Barang	430.576.917,00	379.109.500,00	88,05	266.196.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	430.576.917,00	379.109.500,00	88,05	266.196.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.192.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	7.021.200,00	6.530.000,00	93,00	6.920.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.546.600,00	13.805.000,00	88,80	8.400.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	42.477.415,00	38.079.000,00	89,65	33.158.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.319.600,00	15.066.500,00	92,32	10.685.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.892.800,00	1.884.000,00	99,54	1.752.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.765.278,00	4.790.000,00	70,80	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	31.134.524,00	29.980.000,00	96,29	17.855.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	43.129.300,00	18.705.000,00	43,37	13.210.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	2.205.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.480.000,00	38.220.000,00	96,81	105.095.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	145.917.800,00	138.355.000,00	94,82	0,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	74.700.000,00	73.695.000,00	98,65	66.915.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	695.707.424,00	619.804.500,00	89,09	455.672.868,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	482.557.424,00	450.404.500,00	93,34	346.972.868,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	128.400.000,00	128.400.000,00	100,00	32.100.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	38.520.000,00	38.520.000,00	100,00	38.520.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	64.200.000,00	64.200.000,00	100,00	64.200.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.420.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	102.720.000,00	102.720.000,00	100,00	102.720.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	51.360.000,00	51.360.000,00	100,00	51.360.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	19.900.000,00	17.400.000,00	87,44	17.400.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	700.000,00	700.000,00	100,00	1.800.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	53.987.424,00	34.372.000,00	63,67	25.265.868,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.050.000,00	1.432.500,00	23,68	3.107.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	69.000.000,00	57.250.000,00	82,97	22.100.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	40.000.000,00	35.250.000,00	88,13	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	29.000.000,00	22.000.000,00	75,86	22.100.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	0,00

KodeRekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	110.150.000,00	78.150.000,00	70,95	74.600.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	101.150.000,00	78.150.000,00	77,26	74.600.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.150.000,00	10.090.000,00	99,41	10.090.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.150.000,00	10.090.000,00	99,41	10.090.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.660.000,00	3.600.000,00	98,36	3.600.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.490.000,00	6.490.000,00	100,00	5.110.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	267.908.000,00	259.325.296,00	96,80	136.872.050,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	267.908.000,00	259.325.296,00	96,80	136.872.050,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	267.908.000,00	259.325.296,00	96,80	136.872.050,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.800.000,00	10.800.000,00	64,29	10.800.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.800.000,00	10.800.000,00	64,29	10.800.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlimbaan	16.800.000,00	10.800.000,00	64,29	10.800.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>3.401.787.607,00</b>	<b>3.165.187.100,00</b>	<b>93,04</b>	<b>2.476.277.893,95</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>505.941.000,00</b>	<b>503.252.500,00</b>	<b>99,47</b>	<b>728.324.200,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.941.000,00	104.962.500,00	99,08	425.181.200,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	342.480.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	342.480.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	294.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	48.480.000,00
5.2.02.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	105.941.000,00	104.962.500,00	99,08	74.001.200,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	30.800.000,00	30.712.500,00	99,72	74.001.200,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	30.800.000,00	30.712.500,00	99,72	74.001.200,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	75.141.000,00	74.250.000,00	98,81	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	75.141.000,00	74.250.000,00	98,81	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	398.290.000,00	99,57	218.800.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000,00	199.163.000,00	99,58	218.800.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	199.163.000,00	99,58	218.800.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	119.500.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	99.300.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	200.000.000,00	199.163.000,00	99,58	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	200.000.000,00	199.127.000,00	99,56	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	200.000.000,00	199.127.000,00	99,56	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	200.000.000,00	199.127.000,00	99,56	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	84.343.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	84.343.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	84.343.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	84.343.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>505.941.000,00</b>	<b>503.252.500,00</b>	<b>99,47</b>	<b>728.324.200,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.907.728.607,00</b>	<b>3.668.439.600,00</b>	<b>93,88</b>	<b>3.204.602.093,95</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(3.907.728.607,00)</b>	<b>(3.668.439.600,00)</b>	<b>93,88</b>	<b>(3.204.602.093,95)</b>

Kab. Muara Enim, 28 Februari 2025  
Kepala Kecamatan Empat Petulai Dangku

Husni Thamrin, S.E., M.Si.  
NIP. 196710271990031004



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM  
KECAMATAN PANANG ENIM  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.361.748.282,00</b>	<b>2.634.107.000,00</b>	<b>78,36</b>	<b>2.672.141.134,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>3.260.935.482,00</b>	<b>2.560.007.000,00</b>	<b>78,51</b>	<b>2.331.201.134,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.973.668.988,00	1.688.263.158,00	85,54	1.475.718.781,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.287.266.494,00	871.743.842,00	67,72	855.482.353,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>3.260.935.482,00</b>	<b>2.560.007.000,00</b>	<b>78,51</b>	<b>2.331.201.134,00</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>100.812.800,00</b>	<b>74.100.000,00</b>	<b>73,50</b>	<b>340.940.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.812.800,00	74.100.000,00	73,50	340.940.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>100.812.800,00</b>	<b>74.100.000,00</b>	<b>73,50</b>	<b>340.940.000,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.361.748.282,00</b>	<b>2.634.107.000,00</b>	<b>78,36</b>	<b>2.672.141.134,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(3.361.748.282,00)</b>	<b>(2.634.107.000,00)</b>	<b>78,36</b>	<b>(2.672.141.134,00)</b>

Kab. Muara Enim, 07 Januari 2025  
Kepala Kecamatan Panang Enim

Eko Sulistiawan, AP., M.Si.  
NIP. 197509271994121002



**PEMERINTAH KABUPATEN  
MUARA ENIM**